



TOGETHER WE CREATE MORE VALUE

BERSAMA MEWUJUDKAN PENINGKATAN NILAI



Gambar 1.1. Insan MRT Jakarta di area beranda stasiun
Image 1.1. MRT Jakarta staff at station concourse area

TOGETHER WE CREATE MORE VALUE

BERSAMA MEWUJUDKAN PENINGKATAN NILAI

"Together We Create More Value" (Bersama Mewujudkan Peningkatan Nilai) dipilih sebagai tema Laporan Tahunan 2019 karena berbagai capaian penting dapat terwujud oleh kerja sama berbagai pemangku kepentingan: Pemerintah, swasta, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang mendukung. MRT Jakarta akan terus menjadi Platform Kolaborasi sehingga lebih banyak lagi mendorong peningkatan nilai yang berkesinambungan.

MRT Jakarta lebih dari sekadar infrastruktur. MRT Jakarta juga telah membentuk karakter dan budaya baru kota. Kami membantu mengatasi kemacetan, mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. MRT Jakarta adalah wadah di mana berbagai perbedaan melebur menjadi satu. MRT Jakarta juga berperan sebagai ruang ketiga atau ruang interaksi publik guna menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas.

Selesaiannya konstruksi MRT Fase 1 Utara-Selatan, koridor Bundaran HI - Lebak Bulus yang dilanjutkan dengan pengoperasiannya pada Maret 2019 menandai era baru transportasi publik di Indonesia.

Ada beberapa pencapaian utama MRT Jakarta pada tahun 2019. Pertama, Perseroan berhasil **menyelesaikan konstruksi**. Pada kuartal pertama 2019, Perseroan menyelesaikan konstruksi MRT Fase 1 tepat waktu, tepat anggaran, dan tepat kualitas. Kedua, Perseroan **memulai operasi komersial**. Hingga akhir tahun 2019, MRT Jakarta merupakan moda transportasi pilihan warga dengan ketepatan waktu 99,88% dan telah melayani lebih dari 24 juta pengguna jasa dengan rata-rata pengguna jasa mencapai sekitar 89 ribu orang per hari, di atas target sebesar 65 ribu orang per hari. Ketiga, Perseroan **meraih laba di tahun pertama beroperasi**. Walaupun baru beroperasi selama 9 bulan, Perseroan telah mampu membukukan laba bersih. MRT Jakarta juga telah **meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan**. MRT Jakarta juga telah mengubah budaya bertransportasi masyarakat perkotaan dengan memberikan pelayanan yang nyaman, aman, andal, dan ramah lingkungan. Hal tersebut didukung oleh **penguatan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan** di lingkungan Perseroan. Di tahun 2019, Perseroan mendapatkan sertifikasi ISO Sistem Manajemen Terintegrasi dan menerapkannya di dalam seluruh kegiatan Perseroan.

"Together We Create More Value" was chosen as the theme of our 2019 Annual Report because major achievements were made possible through the collaboration of various stakeholders: Government, private companies, non-governmental organizations, citizens and all parties that gave their support. MRT Jakarta will continue to be a Collaboration Platform that drives continuous value creation in the future.

MRT Jakarta is more than just a piece of infrastructure. MRT Jakarta has also shaped a new urban community character and culture. We have helped to curtail traffic congestion, reduced air pollution and improved people's quality of life and welfare. MRT Jakarta is a melting pot within which diversities unite. MRT Jakarta also plays the role of a third space or public interaction space in order to deliver high-quality developments.

The completion of the MRT North-South Phase 1, the Bundaran HI - Lebak Bulus corridor, and its commencement of operations in March 2019, marked a new era in Indonesian public transportation.

*In 2019, MRT Jakarta achieved several major accomplishments. Firstly, the Corporation **completed its construction goals**. In the first quarter of 2019, the Corporation completed MRT Phase 1 construction on time, on budget and on quality. Secondly, the Corporation **officially started commercial operations**. By the end of 2019, MRT Jakarta had become the capital's transportation of choice with a 99.88% on-time performance that served more than 24 million passengers, with average passenger numbers reaching approximately 89,000 per day. Thirdly, the Corporation was profitable in its first operational year. At the end of 2019, the **Corporation achieved its first net profit** even though it had only been operating for nine months. MRT Jakarta has also **improved the life quality of urban citizens**. MRT Jakarta has successfully transformed the culture of urban transportation by providing service in a comfortable, safe, reliable and environmentally-friendly manner. These are supported by **strengthened Governance, Risk Management, and Compliance (GRC)** implementation within the corporation. The Corporation received **Integrated ISO Management System Certification** in 2019 and implemented the system throughout all of its corporate activity.*



Gambar 1.2. Pengerjaan Konstruksi Fase 1 MRT Bundaran HI - Lebak Bulus
Image 1.2. Construction Work of MRT Phase 1 Bundaran HI - Lebak Bulus

1 KONSTRUKSI FASE 1 MRT BUNDARAN HI-LEBAK BULUS: TEPAT WAKTU, TEPAT ANGGARAN, TEPAT KUALITAS

CONSTRUCTION OF MRT PHASE 1 BUNDARAN HI - LEBAK BULUS: ON TIME, ON BUDGET, ON QUALITY

Tanggal 24 Maret 2019 menjadi salah satu momen bersejarah dalam transportasi di Indonesia: MRT pertama di Indonesia resmi beroperasi dan hadir memberi jawaban terhadap problematika transportasi. Kini Indonesia telah memasuki peradaban baru transportasi publik di mana warga mulai beralih dari transportasi pribadi ke angkutan umum yang modern.

Dengan proyek pembangunan jalur sepanjang 16 kilometer, konstruksi Fase 1 MRT Jakarta terselesaikan 100 persen dan tepat waktu. MRT Jakarta beroperasi dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI, terdiri dari tujuh stasiun layang dan enam stasiun bawah tanah, termasuk satu area depo seluas 8,5 hektare di Lebak Bulus.

Dalam menjalankan pelaksanaan proyek Fase 1, PT MRT Jakarta (Perseroda) selalu mengedepankan aspek keselamatan kerja. Hal ini mengarahkan MRT Jakarta dalam mendapatkan penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam kategori Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Kecelakaan Nihil (*zero accident*) dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

March 24, 2019 was a historic moment for Indonesia's transportation industry as the country's first MRT system officially began operations. The system was created in order to provide an answer to Jakarta's transportation problems. Indonesia had officially entered a new era of public transportation whereby citizens began to shift from private vehicles to modern public transportation.

Built on along 16-kilometer route, construction of MRT Jakarta Phase 1 was completed fully and on time. Operating between Lebak Bulus and Bundaran HI, MRT Jakarta comprises seven elevated stations and six underground stations, including one depot with an area of over 8.5 hectares located in Lebak Bulus.

While carrying out construction of Phase 1, PT MRT Jakarta (Perseroda) prioritized occupational safety. This led to MRT Jakarta receiving Occupational Health and Safety Awards from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia in the Occupational Health and Safety Management System and Zero Accident categories.

2 MULAINYA OPERASI KOMERSIAL

START OF COMMERCIAL OPERATIONS

Hadirnya MRT Jakarta merupakan terobosan baru bagi transportasi publik. Tidak hanya meningkatkan mobilitas, MRT Jakarta juga memberikan manfaat lainnya, seperti perbaikan kualitas udara dan menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan, seiring dengan adanya perubahan gaya hidup masyarakat yang beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi publik.

The creation of MRT Jakarta represents a breakthrough in public transportation. Not only does it increase mobility but MRT Jakarta also brings with it a number of other benefits, such as improving the quality of the city's air and becoming a solution to the capital's serious traffic congestion problem while transforming people's life habits, as they gradually switch from the use of private vehicles to public transportation.

Dalam mendukung mobilisasi masyarakat, layanan operasional MRT Jakarta telah menunjukkan ketepatan waktu 99,88 persen meliputi waktu tempuh kereta per lintas, 99,92 persen meliputi ketepatan waktu pemberhentian di stasiun, dan 99,82 persen meliputi ketepatan waktu kedatangan kereta di stasiun.

In an effort to support citizen mobility, MRT Jakarta's service operations have managed to achieve a 99.88% on-time performance that includes the time to travel from one station to another, a 99.92% exact train dwelling time at stations, and 99.82% arrival punctuality at stations.

Jumlah pengguna jasa yang diangkut sepanjang tahun 2019 adalah 24.621.467 penumpang, dengan rata-rata jumlah pengguna jasa sebesar 89.645 orang per hari. Angka ini berada di atas target, yakni 65.000 pengguna jasa per hari.

The total number of passengers carried throughout 2019 reached 24,621,467, with an average daily ridership of 89,645 passengers per day. This figure is above the original target set of 65,000 passengers per day.



Gambar 1.3. Stasiun MRT Fatmawati saat jam operasional
Image 1.3. MRT Fatmawati Station during operating hours

3 MERAIH LABA DI TAHUN PERTAMA BEROPERASI

GAINING PROFIT IN THE FIRST OPERATIONAL YEAR

Keberhasilan MRT Jakarta dalam tahun pertama beroperasi mendorong Perseroan untuk mendapatkan laba untuk pertama kalinya. Hingga akhir tahun 2019, Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp143,38 miliar. Capaian laba tahun berjalan didapatkan melalui Pendapatan Tiket; Pendapatan Non-Tiket melalui pengembangan unit bisnis lain seperti periklanan, ritel, dan hak penamaan stasiun; serta subsidi prasarana dan sarana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

MRT Jakarta's achievements in its first year of operations have pushed the Corporation forward into profit for the first time. By the end of 2019, the Corporation had successfully recorded income for the year amounting to Rp143.38 billion, sourced from farebox revenue; non-farebox revenue from other businesses, such as retail, advertising and naming rights; as well as from infrastructure and rolling stock subsidies provided by the DKI Jakarta Provincial Government.



Gambar 1.4. Stasiun MRT Lebak Bulus Grab sebagai salah satu stasiun dengan pengguna jasa terbanyak
Image 1.4. MRT Lebak Bulus Grab Station is one of the station with the highest number of passengers



Gambar 1.5. Transformasi budaya masyarakat Jakarta menggunakan transportasi publik
Image 1.5. Jakarta community culture transformation in using public transport

4 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PERKOTAAN

IMPROVING THE LIFE QUALITY OF URBAN COMMUNITIES

MRT Jakarta Fase 1 memiliki panjang 16 kilometer dengan 13 stasiun yang membentang dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus. Melalui pembangunan yang terintegrasi, stasiun-stasiun dibangun di titik-titik strategis ibu kota Jakarta dan terhubung dengan moda transportasi publik lainnya untuk memberikan kemudahan mencapai tempat tujuan. Tak hanya dekat dengan area perkantoran, stasiun MRT Jakarta juga terletak di dekat beragam pusat perbelanjaan, pusat kuliner, hingga objek wisata menarik.

Selain itu pengembangan Kawasan Berorientasi Transit di sepanjang koridor MRT Jakarta memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan kota termasuk penataan kawasan, arus pengguna jasa, akses pejalan kaki, hingga integrasi antarmoda sehingga memberikan kenyamanan dan kemudahan masyarakat dalam melakukan mobilitas sehari-harinya.

MRT Jakarta juga telah berhasil mengubah budaya masyarakat menjadi lebih disiplin dalam menjaga kebersihan fasilitas umum, kesadaran tertib mengantre panjang, memberi jalan, dan kesempatan duduk di kereta bagi penumpang prioritas (lanjut usia, disabilitas, wanita hamil, dan lain-lain).

The first phase of MRT Jakarta comprises a 16-kilometer route and 13 stations stretching from Bundaran HI to Lebak Bulus. Through integrated development, stations have been built at strategic points across the capital city of Jakarta and are connected to other modes of public transportation to make it easy for passengers to reach their destinations. Not only are MRT stations close to office areas but they are also located near a variety of shopping and culinary centers, as well as popular tourist attractions.

In addition, the development of Transit Oriented Development areas along the MRT Jakarta corridor is playing an important role in improving the quality of urban development, including the overall layouts of areas, passenger flows and pedestrian access, as well as inter-transportation mode integration, so as to provide comfort and ease for communities carrying out their daily activities.

MRT Jakarta has also succeeded in transforming the culture of the public by instilling greater discipline as regards maintaining the cleanliness of public facilities, waiting patiently in long lines and giving up their seats to priority passengers (elderly, disabled, expectant mothers, etc.).



Gambar 1.6. Pemeriksaan rel kereta bawah tanah agar selalu dalam kondisi prima
Image1.6. Underground railway track inspections ensure that they are always in prime condition

5 PENINGKATAN TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN KEPATUHAN DALAM SELURUH KEGIATAN KORPORASI

IMPROVEMENT OF GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, AND COMPLIANCE (GRC) IN ALL CORPORATE ACTIVITIES

Di tahun 2019, PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan standarisasi pada aspek kualitas produk dan jasa, keamanan serta lingkungan MRT Jakarta melalui ISO Sistem Manajemen Terintegrasi berstandar internasional, yaitu ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu; ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, dan ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Ketiga ISO tersebut diberikan oleh TUV Rheinland, untuk masa berlaku 20 Desember 2019 hingga 20 Desember 2022.

PT MRT Jakarta (Perseroda) menempatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai unsur terpenting dalam pengembangan perusahaan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktik bisnis demi mewujudkan kelangsungan usaha. Hal ini mendorong PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam mendapatkan Skor Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebesar 87,331 atau termasuk kategori "Baik". Hal ini diikuti juga dengan tercapainya Skor Kematangan Risiko sebesar 3,55 yang dikategorisasikan sebagai "Defined".

In 2019, PT MRT Jakarta (Perseroda) standardized various aspects of quality, service, security and environmental management relating to MRT Jakarta through the integrated ISO Management System. This system complies with the ISO 9001:2015 international standard for Quality Management Systems, ISO 14001:2015 for Environmental Management Systems and ISO 45001:2018 for Occupational Health and Safety Management Systems. These three ISO certifications were awarded by TUV Rheinland and will remain valid from December 20, 2019 until December 20, 2022.

PT MRT Jakarta (Perseroda) has also placed the implementation of Good Corporate Governance (GCG) as a fundamental factor relating to the development of a company and one that is inseparable from day-to-day business practices in order to realize business continuity. This focus has resulted in PT MRT Jakarta (Perseroda) achieving a score of 87,331 for its practice of GCG, which places it in the "Good" category. Furthermore, the corporation also achieved a Risk Maturity score of 3.55 in 2019, which means that it is categorized as "Defined".



DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH PT MRT JAKARTA (PERSERODA) DI TAHUN 2019

LIST OF AWARDS RECEIVED BY PT MRT JAKARTA (PERSERODA) IN 2019

Bendera Emas SMK3 PP 50 2012



Tanggal Date:
22 April 2019

Acara Event:
Penghargaan K3 2019

Diberikan oleh Awarded by:
Kementerian Ketenagakerjaan RI



Annual Report Award: Kategori BUMD Non-listed

Tanggal Date:
14 November 2019

Acara Event:
Annual Report Award 2019

Diberikan oleh Awarded by:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Omni Brand of the Year 2019



Tanggal Date:
24 Juli 2019

Acara Event:
Omni Brand Award 2019

Diberikan oleh Awarded by:
Marketeers Magazine



Top Digital Implementation Top Leader on Digital Business

Tanggal Date:
27 November 2019

Acara Event:
Top Digital Awards 2019

Diberikan oleh Awarded by:
IT Works

Merit Award untuk Best Planning of the Year; Internasional Category untuk Master Plan dan Panduan Rancang Kota



Tanggal Date:
12 September 2019

Acara Event:
6th Singapore Institute of Planners (SIP)
Awards 2019

Diberikan oleh Awarded by:
Singapore Institute of Planners (SIP)



The Best Business Performance for Public Transportation

Tanggal Date:
4 Desember 2019

Acara Event:
CNBC Indonesia Award

Diberikan oleh Awarded by:
CNBC Indonesia

Special Recognition for Public Facility



Tanggal Date:
19 September 2019

Acara Event:
Annual PropertyGuru Indonesia Property Awards
2019

Diberikan oleh Awarded by:
PropertyGuru



International Innovation Awards for Platform Screen Door System in Service and Solution Category

Tanggal Date:
4 Desember 2019

Acara Event:
International Innovation Awards
for Platform Screen Door System

Diberikan oleh Awarded by:
Enterprise Asiaac

International Diamond Prize for Excellence in Quality in the Gold Category



Tanggal *Date*:
9 Desember 2019

Acara *Event*:
*International Diamond Prize for Excellence in
Quality 2019*

Diberikan oleh *Awarded by*:
European Society for Quality Research

Indonesia Trusted Companies based on Corporate Governance Perception Index (CGPI)



Tanggal *Date*:
13 Desember 2019

Acara *Event*:
Good Corporate Governance Award 2019

Diberikan oleh *Awarded by*:
IICG dan SWA

Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan 2019



Tanggal *Date*:
17 Desember 2019

Acara *Event*:
TSM Award 2019

Diberikan oleh *Awarded by*:
Kementerian Perhubungan RI

ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001



Tanggal *Date*:
20 Desember 2019

Acara *Event*:
Audit Eksternal *Stage 2* ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 dan ISO 45001:2018

Diberikan oleh *Awarded by*:
TUV Rheinland

Penghargaan Ruang Menyusui di Ruang Publik (Stasiun Fatmawati)



Tanggal *Date*:
25 Desember 2019

Acara *Event*:
Kompetisi Ruang Laktasi AIMI

Diberikan oleh *Awarded by*:
Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia



DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

UMUM GENERAL

| | |
|--|-----------|
| BERSAMA MEWUJUDKAN PENINGKATAN NILAI <i>TOGETHER WE CREATE MORE VALUE</i> | 1 |
| KONSTRUKSI FASE 1 MRT BUDARAN HI - LEBAK BULUS: TEPAT WAKTU, TEPAT ANGGARAN, TEPAT KUALITAS <i>CONSTRUCTION OF MRT PHASE 1 BUNARAN HI - LEBAK BULUS: ON TIME, ON BUDGET, ON QUALITY</i> | 2 |
| MULAINYA OPERASI KOMERSIAL <i>START OF COMMERCIAL OPERATIONS</i> | 3 |
| MERAHAI LABA DI TAHUN PERTAMA BEROPERASI <i>GAINING PROFIT IN THE FIRST OPERATIONAL YEAR</i> | 4 |
| PENINGKATAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT PERKOTAAN <i>IMPROVING THE LIFE QUALITY OF URBAN COMMUNITIES</i> | 5 |
| PENINGKATAN TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN KEPATUHAN DALAM SELURUH KEGIATAN KORPORASI <i>IMPROVEMENT OF GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT, AND COMPLIANCE (GRC) IN ALL CORPORATE ACTIVITIES</i> | 6 |
| DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA OLEH PT MRT JAKARTA (PERSERODA) DI TAHUN 2019 <i>LIST OF AWARDS RECEIVED BY PT MRT JAKARTA (PERSERODA) IN 2019</i> | 7 |
| DAFTAR ISI <i>TABLE OF CONTENTS</i> | 9 |
| TUGAS POKOK PT MRT JAKARTA (PERSERODA) <i>MAIN DUTIES OF PT MRT JAKARTA (PERSERODA)</i> | 13 |
| JEJAK LANGKAH <i>MILESTONES</i> | 14 |
| CAPAIAN MRT JAKARTA 2019 <i>ACHIEVEMENTS OF MRT JAKARTA IN 2019</i> | 17 |
| PENCAPAIAN KONSTRUKSI FASE SELANJUTNYA <i>CONSTRUCTION ACHIEVEMENTS FOR THE NEXT PHASE</i> | 19 |
| PENCAPAIAN KEUANGAN DAN ORGANISASI <i>FINANCE AND ORGANIZATIONAL ACHIEVEMENTS</i> | 22 |

IKHTISAR KINERJA 2019 PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2019

| | |
|--|-----------|
| IKHTISAR KEUANGAN <i>FINANCIAL HIGHLIGHTS</i> | 28 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| IKHTISAR OPERASI DAN ORGANISASI <i>OPERATIONAL AND ORGANIZATIONAL HIGHLIGHTS</i> | 32 |
|---|-----------|

| | |
|--|-----------|
| IKHTISAR SAHAM <i>SHARED HIGHLIGHTS</i> | 35 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA EFEK LAINNYA <i>BONDS, SUKUK OR CONVERSION BONDS, AND OTHER SECURITIES</i> | 36 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| SUMBER PENDANAAN <i>FUNDING SOURCES</i> | 36 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| KILAS PERISTIWA 2019 <i>2019 EVENT HIGHLIGHTS</i> | 37 |
|--|-----------|

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

| | |
|--|-----------|
| LAPORAN DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS' REPORT</i> | 49 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| LAPORAN DIREKSI <i>BOARD OF DIRECTORS' REPORT</i> | 63 |
|--|-----------|

| | |
|--|-----------|
| SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT MRT JAKARTA (PERSERODA) <i>STATEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON RESPONSIBILITY FOR THE 2019 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA (PERSERODA)</i> | 78 |
|--|-----------|

| | |
|---|-----------|
| SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT MRT JAKARTA (PERSERODA) <i>STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON RESPONSIBILITY FOR THE 2019 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA (PERSERODA)</i> | 79 |
|---|-----------|

PROFIL PERSEROAN CORPORATE PROFILE

| | |
|---|-----------|
| INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERSEROAN <i>GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY</i> | 82 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN <i>BRIEF HISTORY OF MRT JAKARTA</i> | 86 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| KEGIATAN DAN BIDANG USAHA <i>CORPORATE ACTIVITIES AND LINE OF BUSINESS</i> | 86 |
|---|-----------|

| | | | |
|---|------------|---|------------|
| KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT <i>TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT</i> | 91 | INFORMASI TENTANG DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN <i>INFORMATION ON ADDRESSES OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, BRANCH AND REPRESENTATIVE OFFICES</i> | 149 |
| VISI, MISI DAN NILAI - NILAI PERSEROAN <i>VISION, MISSION AND CORPORATE VALUES</i> | 94 | ASET DIGITAL PERSEROAN <i>CORPORATE DIGITAL ASSETS</i> | 150 |
| MAKNA LOGO PERSEROAN <i>MEANING OF THE CORPORATE LOGO</i> | 99 | ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN <i>MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS</i> | |
| STRUKTUR ORGANISASI <i>ORGANIZATIONAL STRUCTURE</i> | 100 | TINJAUAN UMUM: TRANSPORTASI PUBLIK IBU KOTA JAKARTA <i>GENERAL REVIEW: PUBLIC TRANSPORTATION IN THE CAPITAL CITY OF JAKARTA</i> | 154 |
| PROFIL DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE</i> | 102 | PERKEMBANGAN MRT HINGGA TAHUN 2019 <i>THE PROGRESS OF MRT UNTIL 2019</i> | 156 |
| PROFIL DIREKSI <i>DIRECTORS' PROFILE</i> | 107 | TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT OPERASI <i>OPERATIONAL REVIEW BY OPERATION SEGMENT</i> | 159 |
| PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF <i>EXECUTIVE OFFICIALS PROFILE</i> | 112 | ASPEK PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA JASA <i>RIDERSHIP GROWTH ASPECTS</i> | 170 |
| DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI <i>EMPLOYEE DEMOGRAPHIC AND COMPETENCY DEVELOPMENT</i> | 120 | TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA <i>FINANCIAL REVIEW AND OTHER MATERIAL INFORMATION</i> | 172 |
| PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERSEROAN, AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO <i>EDUCATION AND / OR TRAINING OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT AND RISK MANAGEMENT</i> | 130 | KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG <i>ABILITY TO PAY DEBT AND ACCOUNT RECEIVABLE COLLECTIBILITY</i> | 198 |
| KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM <i>SHAREHOLDERS COMPOSITION</i> | 140 | INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA <i>INFORMATION OF GOING CONCERN</i> | 227 |
| STRUKTUR GRUP MRT JAKARTA <i>GROUP STRUCTURE OF MRT JAKARTA</i> | 144 | PROSPEK USAHA TAHUN 2020 DAN RENCANA STRATEGIS <i>BUSINESS PROSPECTS 2020 AND STRATEGIC PLANS</i> | 230 |
| INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI SERTA JOINT VENTURE (JV) DAN SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) <i>INFORMATION ON SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT VENTURE (JV) AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES (SPV)</i> | 145 | PETA JALAN USAHA: RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG <i>BUSINESS ROAD MAP: LONG TERM DEVELOPMENT PLAN</i> | 232 |
| INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM <i>ISSUANCE OF SHARES AND LISTING CHRONOLOGY INFORMATION</i> | 145 | TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>CORPORATE GOVERNANCE</i> | |
| INFORMASI TENTANG PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI DAN/ATAU EFEK LAINNYA <i>ISSUANCE OF BONDS AND / OR OTHER SECURITIES AND LISTING INFORMATION</i> | 145 | PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION</i> | 236 |
| LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG <i>SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS</i> | 146 | STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>STRUCTURE OF CORPORATE GOVERNANCE ORGANS</i> | 251 |
| PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI <i>AWARDS AND CERTIFICATION</i> | 148 | PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM <i>SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS</i> | 252 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| DEWAN KOMISARIS <i>BOARD OF COMMISSIONERS</i> | 282 | KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN SEKURITI <i>RISK AND SECURITY MONITORING COMMITTEE</i> | 444 |
| KOMISARIS INDEPENDEN <i>INDEPENDENT COMMISSIONERS</i> | 297 | ORGAN PENUNJANG DIREKSI <i>DIRECTORS SUPPORTING ORGANS</i> | 461 |
| DIREKSI <i>DIRECTORS</i> | 298 | KOMITE MANAJEMEN RISIKO <i>RISK MANAGEMENT COMMITTEE</i> | 462 |
| HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS RELATIONSHIP</i> | 319 | SEKRETARIS PERUSAHAAN <i>CORPORATE SECRETARY</i> | 465 |
| KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS</i> | 320 | CORPORATE STRATEGY <i>CORPORATE STRATEGY</i> | 474 |
| PENILAIAN KINERJA TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>PERFORMANCE ASSESSMENTS FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS</i> | 326 | RISK MANAGEMENT & QSSHE ASSURANCE <i>RISK MANAGEMENT & QSSHE ASSURANCE</i> | 481 |
| REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>REMUNERATION FOR THE BOARDS OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS</i> | 347 | AUDIT INTERNAL <i>INTERNAL AUDIT</i> | 497 |
| RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DEWAN KOMISARIS YANG MENDUNDANG DIREKSI DAN RAPAT DIREKSI <i>BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING, THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING WITH INVITED DIRECTORS AND THE DIRECTORS' MEETING</i> | 357 | AUDIT EKSTERNAL <i>EXTERNAL AUDIT</i> | 510 |
| RAPAT DEWAN KOMISARIS <i>THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING</i> | 357 | SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL <i>INTERNAL CONTROL SYSTEM</i> | 518 |
| RAPAT GABUNGAN: RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN MENDUNDANG DIREKSI <i>THE BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING WITH INVITED DIRECTORS</i> | 362 | MANAJEMEN RISIKO <i>RISK MANAGEMENT</i> | 533 |
| RAPAT DIREKSI <i>DIRECTORS' MEETING</i> | 369 | TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> | 552 |
| HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI <i>AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARDS OF COMMISSIONERS, DIRECTORS AND / OR CONTROLLING SHAREHOLDERS</i> | 407 | AKSES INFORMASI DAN DATA PERSEROAN <i>ACCESS TO INFORMATION AND CORPORATE DATA</i> | 553 |
| ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS <i>BOARDS OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS</i> | 411 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI <i>INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY GOVERNANCE</i> | 564 |
| SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS <i>SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</i> | 411 | BUDAYA ANTI KORUPSI <i>ANTI CORRUPTION CULTURE</i> | 579 |
| KOMITE AUDIT <i>AUDIT COMMITTEE</i> | 415 | KODE ETIKA DAN PERILAKU <i>CODE OF CONDUCT</i> | 579 |
| KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUSAHAAN <i>HUMAN CAPITAL AND BUSINESS COMMITTEE</i> | 428 | PENGENDALIAN GRATIFIKASI <i>GRATIFICATION CONTROL</i> | 582 |
| | | INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK <i>INFORMATION ON FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES</i> | 583 |
| | | LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) <i>REPORT OF STATE OFFICIALS WEALTH (LHKPN)</i> | 583 |
| | | SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN <i>WHISTLEBLOWING SYSTEM</i> | 585 |

| | | | |
|--|------------|---|------------|
| TRANSPARANSI PRAKTIK TATA KELOLA YANG TIDAK BAIK <i>TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES</i> | 591 | TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG TANGGUNG JAWAB TERHADAP KUALITAS PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA (LAYANAN BERMUTU) <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DURING THE PROVISION OF QUALITY GOODS AND SERVICES TO CUSTOMERS AND WORK PARTNERS (QUALITY SERVICE)</i> | 681 |
| PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE</i> | 593 | | |
| PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) <i>ASSESSMENT OF GCG APPLICATIONS BY THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY (BPKP)</i> | 593 | TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN (BERBAGI DENGAN MASYARAKAT) <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT (SHARING WITH THE COMMUNITY)</i> | 696 |
| PENILAIAN INDEKS PERSEPSI TATA KELOLA <i>CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX ASSESSMENT</i> | 601 | | |
| PERKARA PENTING <i>IMPORTANT CASES</i> | 605 | | |
| KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA <i>GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY</i> | 609 | LAPORAN KEUANGAN <i>FINANCIAL REPORT</i> | 709 |

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

| | |
|--|------------|
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR MRT JAKARTA</i> | 616 |
| KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP MRT JAKARTA <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY AND GOVERNANCE OF FOR MRT JAKARTA</i> | 618 |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY WITHIN THE SCOPE OF THE FULFILLMENT OF HUMAN RIGHTS</i> | 625 |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK OPERASI YANG ADIL <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATIONS</i> | 627 |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN (KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI) <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE ENVIRONMENT (COMMITMENT FOR A HARMONIOUS ENVIRONMENT)</i> | 628 |
| TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA (TUMBUH BERSAMA KARYAWAN) <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH (GROWING WITH EMPLOYEES)</i> | 650 |

TUGAS POKOK PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

MAIN DUTIES OF PT MRT JAKARTA (PERSERODA)



Gambar 1.7. Aset sarana dan prasarana serta situasi kawasan sekitar stasiun MRT Jakarta
Image 1.7. Rolling stock and infrastructure asset along with the surrounding areas of an MRT Jakarta station

PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM PERKOTAAN YANG MELIPUTI PEMBANGUNAN PRASARANA, PENGOPERASIAN PRASARANA, PERAWATAN DAN PENGUSAHAAN PRASARANA
Management of urban public railway infrastructure, which includes infrastructure development, infrastructure operations, infrastructure maintenance and commercialization.

PENYELENGGARAAN SARANA PERKERETAAPIAN UMUM PERKOTAAN YANG MELIPUTI PEMBANGUNAN SARANA, PENGOPERASIAN SARANA, PERAWATAN DAN PENGUSAHAAN SARANA
Management of urban public railway facilities, which includes rolling stock development, rolling stock operations and rolling stock maintenance and commercialization.

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PROPERTI ATAU BISNIS DI STASIUN DAN KAWASAN SEKITARNYA, SERTA DEPO DAN KAWASAN SEKITARNYA
Development and management of properties or businesses in stations, depots and surrounding areas.

BEROPERASINYA MRT PADA 24 MARET 2019 MENANDAI PELAKSANAAN SELURUH TUGAS POKOK PT MRT JAKARTA (PERSERODA), YAITU PENYELENGGARAAN PRASARANA; PENYELENGGARAAN SARANA; DAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PROPERTI/BISNIS DI STASIUN, SERTA DEPO DAN KAWASAN SEKITARNYA.

The operation of MRT on March 24, 2019 marked the implementation of all main duties of PT MRT Jakarta (Perseroda), which include management of transportation infrastructure; management of rolling stock; and development and management of properties/businesses in stations and depots, as well as their surrounding areas.

JEJAK LANGKAH

MILESTONE

1990-1992

Penyusunan *Masterplan* Angkutan Umum Terpadu Jabodetabek oleh Departemen Perhubungan yang mengusulkan Pola Transportasi Terpadu antara Kereta Api, *Light Rail*, dan Bus.

Preparation of an integrated public transport Masterplan for Jabodetabek by the Ministry of Transportation, which proposed an integrated transportation system involving railway, light rail and bus.

1995-1996

Basic Design oleh konsorsium Indonesia-Jepang-Eropa dengan kesimpulan bahwa proyek ini tidak layak dilakukan dengan skema pembiayaan swasta penuh (BOT) karena biaya yang dapat ditutup dengan perolehan tiket hanya sebesar 15%.

Basic Design by a consortium which included Indonesia - Japan - Europe, which concluded that the project was not feasible through a full private financing scheme (BOT) because only 15% of the costs could be covered through fares.

2000

Studi Kelayakan MRT (Subway) oleh Tim Studi JICA yang menekankan pentingnya pembangunan *Subway* di Jakarta, dan agar proyek ini layak dibiayai perlu keterlibatan Pemerintah dalam pembiayaannya.

MRT (Subway) Feasibility Study implemented by the JICA Study Team, which emphasized the importance of subway construction in Jakarta, and that, in order to make this project worth funding, Government financing would be required.

1999

Revisi *Basic Design* oleh Departemen Perhubungan yang mengusulkan agar proyek ini dibiayai oleh Pemerintah dengan partisipasi swasta yang minimal.

Revision of the Basic Design by the Ministry of Transportation which proposed that the project should be financed by the Government with private sector participation at the minimum.

2002

Studi JICA pada *Integrated Transportation Master Plan II* menekankan prioritas pada pembangunan *Subway*.

JICA study on integrated transportation Master Plan II emphasized the prioritizing of subway development.

2004

Juli 2004, Departemen Perhubungan mengeluarkan Studi *Implementation Program for Jakarta MRT System (Lebak Bulus-Dukuh Atas)*.

July 2004, the Ministry of Transportation released a Study on the Implementation Program for Jakarta MRT System (Lebak Bulus - Dukuh Atas).

2006

28 November 2006, *Loan Agreement* Tahap 1 (IP-536) ditandatangani berdasarkan syarat-syarat yang sebelumnya telah disepakati dalam *Minutes of Discussion (MoD)* dan *Memorandum on Engineering Services (MoES)* mengenai pinjaman sebesar ¥1,869 miliar yang dipergunakan untuk pembiayaan.

On November 28, 2006, the Phase I Loan Agreement (IP-536) was signed based on the terms previously agreed in the Minutes of Discussion (MoD) and the Memorandum on Engineering Services (MoES) regarding a loan of ¥1.869 billion which would be used to finance the project.

2005

Studi oleh Tim *Special Assistance for Project Formation (SAPROF)* dari JBIC untuk memfasilitasi pembentukan kesepakatan di antara pemangku kepentingan atas proyek ini di Indonesia.

A Study undertaken by the Special Assistance for Project Formation (SAPROF) Team from JBIC was carried out in order to facilitate agreement among the stakeholders for the project within Indonesia.

2007

Kajian SAPI (*Special Assistance for Project Implementation*) dan SAPMAN (*Special Assistance for Procurement Management*) dilakukan oleh JBIC untuk membantu Departemen Perhubungan dan Pemrov DKI Jakarta.

Study of SAPI (Special Assistance for Project Implementation) and SAPMAN (Special Assistance for Procurement Management) conducted by JBIC to assist the Ministry.

2008

17 Juni 2008, PT MRT Jakarta berdiri, setelah terlebih dulu mendapatkan persetujuan DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 mengenai Pembentukan BUMD PT MRT Jakarta dan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 mengenai Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta.

June 17, 2008, PT MRT Jakarta was established upon approval being granted by DKI Jakarta Council through the issuance of Regional Regulation No. 3 of 2008 on the Establishment of BUMD PT MRT Jakarta, and Regional Regulation No. 4 of 2008 on Regional Capital Investment in PT MRT Jakarta.

2010

8 Juli 2010, *Minutes of Discussion (MoD)* antara JICA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BAPPENAS, dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. MOD ini membahas perpanjangan rute MRT koridor Selatan-Utara Tahap I dari Lebak Bulus-Dukuh Atas, menjadi Lebak Bulus-Bundaran HI.

July 8, 2010, Minutes of Discussion (MoD) signed by JICA, the Provincial Government of DKI Jakarta, BAPPENAS and the Directorate General of Railways at the Ministry of Transportation. This MOD discussed the route extension for the South - North MRT corridor's Phase I from Lebak Bulus Dukuh Atas to Lebak Bulus - Bundaran HI.

2009

31 Maret 2009, *Loan Agreement* tahap 2 (L/A 2) untuk pinjaman tahap konstruksi senilai ¥48,15 miliar sebagai bagian kedua dari total pinjaman untuk Proyek MRT (L/A2).

March 31, 2009, Loan Agreement phase 2 (L/A 2) for the construction phase worth ¥48.15 billion was secured as the second part of the total loans for the MRT Project (L/A 2).

2011

Pelaksanaan kegiatan lelang fisik Proyek MRT khususnya dilaksanakan karena telah mempunyai payung hukum. Payung hukum tersebut telah dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan seluruh kegiatan MRT, termasuk proses tender, diberikan kewenangannya kepada PT MRT Jakarta.

The physical tender of the MRT Project is executed as a legal protection issued by the Central Government and DKI Jakarta Provincial Government and declares that the authority for the entirety of MRT activities, including the tender process, has been granted to PT MRT Jakarta.

2012

28 September 2012, diumumkan nama-nama nominasi konsorsium pemenang lelang 3 (tiga) Paket Bawah Tanah. Sebagai Konsorsium pertama yang mengerjakan Paket (CP-104, dan CP-105) adalah Shimizu Obayashi sebagai *leader*-nya dengan anggota Wijaya Karya, dan Jaya Konstruksi *Joint Venture*. Sedangkan untuk (CP-106) nominasinya adalah Konsorsium Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC) bersama Utama Karya *Joint Operation*.

On September 28, 2012, the names of the winning tender consortium nominations of 3 (three) Underground Packages are announced. The first consortium working on the CP-104 and CP-105 Packages has Shimizu Obayashi as its leader with membership comprising Wijaya Karya and the Jaya Konstruksi Joint Venture. While for the CP-106 Package, the nominees were a consortium of the Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC) and Utama Karya Joint Operation.

2014

Proyek MRT Jakarta mendapatkan pengakuan internasional sebagai salah satu proyek dari 20 proyek infrastruktur di dunia.

The MRT Jakarta Project gained international recognition as one of the 20 best infrastructure projects in the world.

2013

Proyek MRT Jakarta memasuki tahap konstruksi (peletakan batu pertama).

The MRT Project enters the construction phase (groundbreaking).

2015

Beroperasinya *Tunnel Boring Machines* (TBM) Antareja untuk konstruksi bawah tanah, dengan peresmian pengoperasian TBM oleh Presiden Joko Widodo.

President Joko Widodo inaugurates the operations of Antareja Tunnel Boring Machines (TBM) for underground construction.

2016

- TBM Antareja dan Antareja II telah berhasil menembus Stasiun Senayan-Istora-Bendungan Hilir dari lokasi awal pengoperasian TBM di titik Patung Pemuda Senayan.
- TBM Mustikabumi I dan Mustikabumi II mulai bekerja dari titik Stasiun Bundaran HI dan telah berhasil membuat terowongan jalur bawah tanah menembus Stasiun Dukuh Atas menuju Stasiun Setiabudi. Stasiun Setiabudi adalah tempat berakhirnya seluruh pekerjaan terowongan jalur bawah tanah.

- *The Antareja and Antareja II TBMs successfully tunnel from Senayan - Istora - Bendungan Hilir stations from the TBM launching point at Patung Pemuda Senayan.*
- *The Mustikabumi I and Mustikabumi II TBMs commence tunneling from Bundaran HI Station and successfully tunnel through to Dukuh Atas Station heading towards Setiabudi Station. Setiabudi station is the meeting point for all tunneling works.*

2017

- Seluruh rangkaian jalur layang dan bawah tanah MRT Jakarta Koridor Bundaran HI-Lebak Bulus telah tersambung.
- Selesaiannya keseluruhan proses *tunneling* jalur bawah tanah MRT Jakarta dari Senayan hingga Bundaran HI.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menugaskan PT MRT Jakarta sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara-Selatan Fase 1 MRT Jakarta.

- *The entire elevated and underground line for the MRT Jakarta Bundaran HI - Lebak Bulus Corridor is connected up.*
- *The overall tunneling process for the underground section of MRT Jakarta, from Senayan to Bundaran HI, is completed.*
- *The Provincial Government of DKI Jakarta assigns PT MRT Jakarta as the Main Operator responsible for managing the North - South Corridor of the Transit Oriented Development Area of Phase 1 of MRT Jakarta.*

2018

- Tersambungannya seluruh rel dari Stasiun Bundaran HI-Depo Lebak Bulus
- Peluncuran aplikasi *mobile* MRT Jakarta.
- Dimulainya tes integrasi persinyalan di jalur utama menggunakan kereta pertama.
- Dimulainya pengujian pertama prasarana MRT oleh DJKA.
- Dimulainya tes uji pergerakan kereta (*Dynamic Test*) di jalur utama.
- Rangkaian kereta MRT Jakarta fase 1 telah lengkap 16 rangkaian
- Dimulainya *Parallel Trial Run*.
- Selesaiannya rangkaian *training* Masinis dan OCC

- *All rail links from Bundaran HI Station - Lebak Bulus Depot are connected up.*
- *Launch of the MRT Jakarta mobile application.*
- *Signaling integration tests get underway on the main line using a first test train.*
- *Commencement of the first trial of MRT infrastructure by DJKA with Dynamic Testing of trains on the main line.*
- *16 trains for MRT Jakarta Phase 1 are readied.*
- *Parallel Trial Run Phase.*
- *Completion of the Train Drivers and OCC training activities*

2019

- Penandatanganan Pakta Integritas oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda).
- Sertifikasi Seluruh Masinis.
- Penandatanganan Hibah Daerah MRT Fase 2.
- Uji Coba Publik MRT Jakarta
- Peresmian MRT Jakarta Fase 1 dan Pencanangan MRT Jakarta Fase 2.
- Hari Pertama Operasi Komersial.
- Operasi Penuh MRT Jakarta
- Penandatanganan Pakta Integritas pelaksanaan Pengadaan Proyek Fase 2.
- Peresmian *Park and Ride South Quarter*.
- Peresmian Peta Transportasi Publik Terintegrasi.
- Penandatanganan *Head of Agreement* antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

- *An Integrity Pact is signed by the Board of Commissioners and the Board of Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda).*
- *Certification of All Train Drivers.*
- *Signing of the Regional Grant for MRT Phase 2.*
- *Public Trials of MRT Jakarta commence.*
- *Inauguration of Jakarta MRT Phase 1 and Launching of MRT Jakarta Phase 2.*
- *First Day of Commercial Operations.*
- *Full operation of MRT Jakarta.*
- *signing of an Integrity Pact for the implementation of Project Procurement Phase 2.*
- *Inauguration of Park and Ride South Quarter.*
- *Inauguration of Integrated Public Transportation Map.*
- *Signing of Head of Agreement between PT MRT Jakarta (Perseroda) and PT Kereta Api Indonesia (Persero).*

CAPAIAN MRT JAKARTA 2019

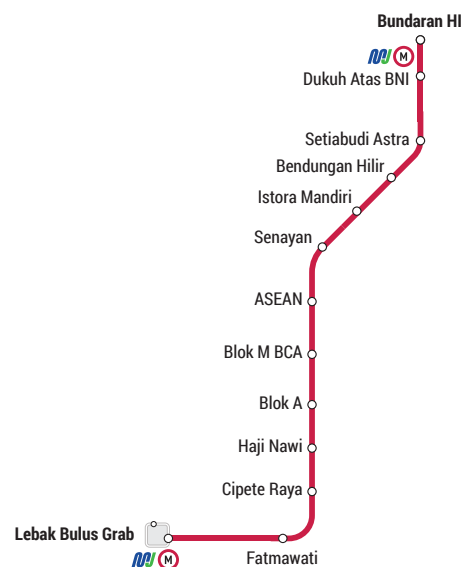
ACHIEVEMENTS OF MRT JAKARTA IN 2019



Gambar 1.8. Sarana MRT Jakarta melintasi jalur layang dari Stasiun Fatmawati menuju Stasiun Cipete Raya
Image 1.8. MRT Jakarta rolling stock running along elevated track from Fatmawati Station towards Cipete Raya Station

PETA FASE 1 (BUNDARAN HI-LEBAK BULUS)

Map Phase 1 (Bundaran HI - Lebak Bulus)

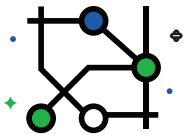


Gambar 1.9
Image 1.9

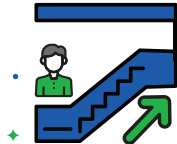
MRT JAKARTA KORIDOR UTARA-SELATAN FASE 1 TELAH RESMI BEROPERASI, DAN MENJADI WADAH BAGI PEMBENTUKAN NILAI-NILAI BARU MASYARAKAT JAKARTA DAN INDONESIA.

MRT Jakarta North - South Line Phase 1 has begun official operations and become an agent for the transformation of new values for the people of Jakarta and Indonesia.

Pencapaian Konstruksi *Construction Achievements*



16 Kilometer Panjang Jalur
16 Km Track Length



13 Stasiun Berstandar Internasional
13 International Standard Stations



Tidak Ada Kasus Kecelakaan
Zero Fatalities

Pencapaian Operasi *Operational Achievements*



99,88% Performa Ketepatan Waktu
99.88% On Time Performance



24.621.467 Pengguna Jasa di Sepanjang Tahun 2019
24,621,467 Passengers in 2019



82,8 Indeks Kepuasan Pelanggan
82.8 Customer Satisfaction Index

Pencapaian Komersial *Commercial Achievements*



5 Stasiun dengan Hak Penamaan
5 Stations Naming Rights Sold



Bermitra Media Iklan dengan Skema Bagi Hasil
Advertising Partner with Revenue Sharing Scheme Secured



34 Reguler dan 14 UMKM Tenan Ritel
34 Regular and 14 MSME Retail Tenants

Pencapaian KBT (Kawasan Berorientasi Transit) *TOD (Transit Oriented Development) Achievements*



KBT Dukuh Atas - Gerbang Internasional Pusat Kota Jakarta
TOD Dukuh Atas - International Gateway to the Heart of Jakarta



Pengembangan 5 KBT di Stasiun MRT Fase 1
Development of 5 TOD as part of MRT Station Phase 1



Gerakan #JalanJakarta Sebagai Inovasi Aksesibilitas
#JalanJakarta Movement as an Innovation for Accessibility

Pencapaian Tata Kelola Perusahaan *Governance, Risk Management, and Compliance Achievements*



Skor Tata Kelola Perusahaan yang baik
87,331 "Baik"
Good Corporate Governance Score: 87.331 "Good"



Skor Kematangan Risiko: 3,55 "Defined"
Risk Maturity Score: 3.55 "Defined"



ISO Sistem Manajemen Terintegrasi:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO Integrated Management System

PENCAPAIAN KONSTRUKSI FASE SELANJUTNYA

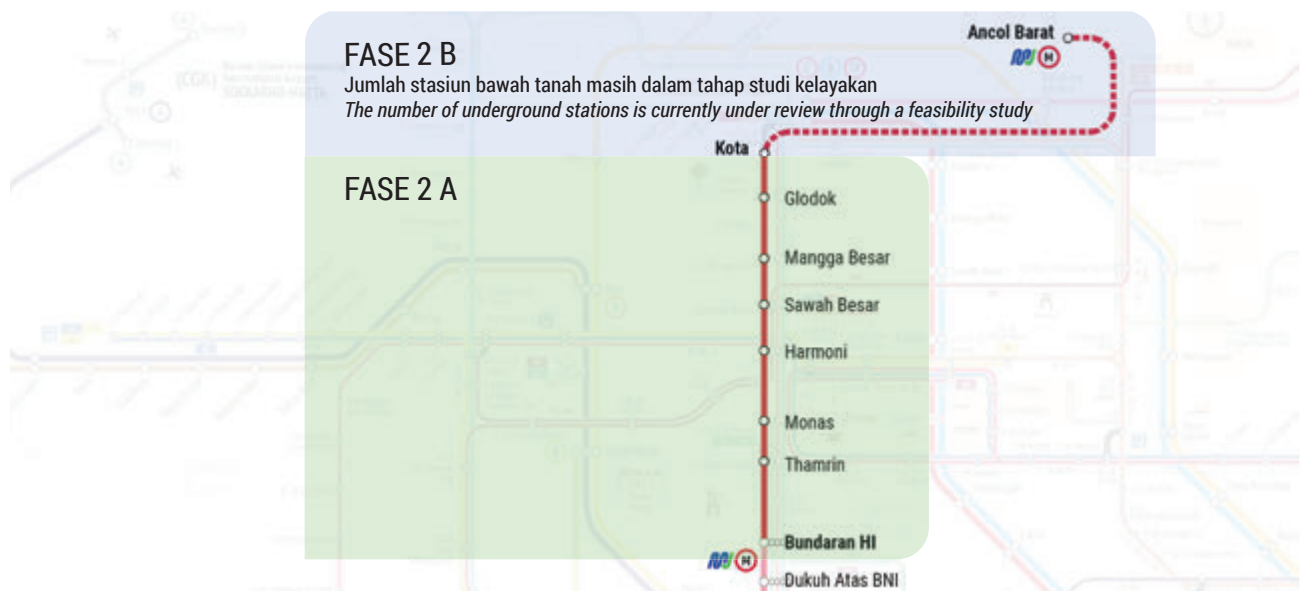
CONSTRUCTION ACHIEVEMENT FOR THE NEXT PHASE

JALUR MRT FASE 2 (KORIDOR BUNDARAN HI-ANCOL BARAT) SAAT INI DALAM TAHAP PENYELESAIAN DESAIN TEKNIS DAN MEMASUKI TAHAP PELAKSANAAN KONSTRUKSI.

MRT Phase 2 (Bundaran HI - Ancol Barat corridor) is currently near the end of its engineering design stage and is entering the construction stage.

PETA FASE 2 (BUNDARAN HI-ANCOL BARAT)

Map Phase 2 (Bundaran HI - Ancol Barat)



Gambar 1.10
Image 1.10

Pada 24 Maret 2019, pembangunan MRT Fase 2 telah resmi dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo. Pembangunan MRT Fase 2 dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu Fase 2A (rute Bundaran HI-Kota) dan Fase 2B (rute Kota-Ancol Barat). Fase 2A terdiri atas 6 (enam) paket kontrak, dan Fase 2B telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, Fase 2B dalam tahap Studi Kelayakan.

On March 24, 2019, the construction of MRT Phase 2 was inaugurated by the President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo. Construction of MRT Phase 2 has been divided into 2 (two) stages, Phase 2A (Bundaran HI - Kota) and Phase 2 B (Kota - Ancol Barat). Phase 2A comprises 6 (six) contract packages, while Phase 2B has been granted Principal Approval by the Governor of DKI Jakarta and is currently in the Feasibility Study stage.



Gambar 1.11. Proyek Pembangunan Stasiun Monas
Image 1.11. Monas Station Construction Project

PERKEMBANGAN PAKET KONTRAK FASE 2A MRT JAKARTA

Progress of MRT Jakarta Phase 2A Contract Packages

| No | Kontrak Contract | Lingkup Scope | Pekerjaan Work |
|----|------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | CP 200 | D-Wall RSS di Kawasan Medan Merdeka | Konstruksi Dinding Diafragma Gardu Induk MRT Jakarta <i>Construction of the Diaphragm Wall for the MRT Jakarta Receiving Substation</i> |
| 2. | CP 202 | Bundaran HI - Harmoni | Konstruksi 2 stasiun bawah tanah dan terowongan sepanjang 1,94 Km <i>Construction of two underground stations and 1.94 km of tunnel</i> |
| 3. | CP 203 | Harmoni – Mangga Besar | Konstruksi 3 stasiun bawah tanah dan terowongan sepanjang 1,19 Km <i>Construction of three underground stations and 1.19 km of tunnel</i> |
| 4. | CP 204 | Mangga Besar - Kota | Konstruksi 2 stasiun bawah tanah dan terowongan sepanjang 0,68 Km <i>Construction of two underground stations and 0.68 km of tunnel</i> |

| No | Kontrak Contract | Lingkup Scope | Pekerjaan Work |
|----|------------------|-----------------------------|--|
| 5. | CP 205 | Railway Systems & Trackwork | Konstruksi Rel dan Instalasi Sistem Perkeretaapian Construction of Trackwork and Installation of the Railway System |
| 6. | CP 206 | Rolling Stock | Pengadaan Rangkaian Kereta Procurement of Rolling Stock |

Tabel 1.1
Table 1.1

Status masing-masing Paket Kontrak per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- CP 200: Konstruksi dinding diafragma Gardu Induk bawah tanah MRT Jakarta di Kawasan Medan Merdeka telah dirampungkan.
- CP 201: Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari JICA atas Dokumen Tender CP 201. Pengumuman tender telah dilaksanakan pada 24 Mei 2019. Ada 3 Peserta yang berpartisipasi dalam tender Paket CP 201, yaitu Shimizu-Adhi Karya JV, Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi JV, dan SMCC-Hutama Karya JO. Hasil dari Evaluasi Teknis telah disampaikan kepada JICA pada tanggal 18 November 2019. Pembukaan Dokumen Finansial telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019. Hasil Evaluasi Finansial telah disampaikan pada 31 Desember 2019 dan saat ini menunggu persetujuan dari JICA. *Target Contract Award* pada bulan Januari 2020 dan *Commencement date* pada bulan Maret 2020.
- CP 202 - 203: Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari JICA atas Dokumen tender CP 202 - 203. Pengumuman tender telah dilaksanakan pada 6 Agustus 2019. Tender telah melalui tahapan Klarifikasi serta penyampaian *Addendum*. Namun, tidak adanya pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen pada 4 November 2019 menyebabkan tender dinyatakan sebagai Tender Gagal, yang dilaporkan kepada JICA pada 20 November 2019. Pada 17 November 2019 telah diadakan *Market Sounding* dengan mengundang calon peserta tender. Berdasarkan *Market Sounding* tersebut, salah satu faktor di antaranya, pelaksanaan tender CP 202 - 203 yang beririsan dengan CP 201 mengakibatkan sumber daya peserta tender CP 202 - 203 terbatas, sehingga tidak adanya pemasukan Dokumen Penawaran. Jadwal tender yang rapat antara CP 201 dengan CP 202 - 203 terjadi karena koordinasi dan persetujuan yang memerlukan waktu lama dari Otoritas terkait untuk pembangunan Stasiun Monas (CP 201) di Kawasan Medan Merdeka. Hal ini menyebabkan terlambatnya Pengumuman tender CP 201 dan beririsan dengan jadwal tender CP 202 - 203.
- CP 205: Saat ini Dokumen Tender CP 205 sedang dalam tahap reviu oleh JICA. Perseroan akan melaksanakan tender CP 205 setelah persetujuan dari JICA diperoleh.
- CP 206: Saat ini Dokumen Tender CP 206 sedang dalam tahap reviu oleh JICA, Perseroan akan melaksanakan tender CP 206 setelah persetujuan dari JICA diperoleh.

The status of each Contract Packages as of December 31, 2019 was as follows:

- *CP 200: Construction of the MRT Jakarta underground Receiving Substation diaphragm wall in Medan Merdeka Area has been completed.*
- *CP 201: The Corporation has obtained Concurrence of JICA for the CP 201 Tender Document. The Tender Announcement was published on May 24, 2019. Three Bidders participated in Tender CP 201, namely Shimizu - Adhi Karya JV, Obayashi - Wijaya Karya - Jaya Konstruksi JV, and SMCC - Hutama Karya JO. The result of the Technical Evaluation was submitted to JICA on November 18, 2019. The opening of Financial Documents was carried out on 10 December 2019. The Financial Evaluation results were submitted on 31 December 2019 for the Concurrence of JICA. Targeted Contract Awards will be held in January 2020 and the Commencement date will be in March 2020.*
- *CP 202 - 203: The Corporation has obtained Concurrence of JICA for the CP 202 - 203 Tender Document. The Tender Announcement was published on 6 August 2019. The tender has passed the clarification stage including the distribution of the Addendum. However, there was no submission of Bid Documents prior to the 4 November 2019 deadline, which led to a Tender Failure as reported to JICA on 20 November 2019. On 17 November 2019, a Market Sounding session was carried out by inviting prospective Tenders. Based on the results of the Market Sounding and other factors, the simultaneous tender schedule for CP 202 - 203 with CP 201 created difficulties for CP 202 - 203 Tender participants as regards the allocation of sufficient resources to allow them to submit the Bid Documents. The limited Tender schedule between CP 201 and CP 202 - 203 was due to the prolonged coordination and approval process from the respective Authorities as regards construction of Monas Station (CP 201) in the Medan Merdeka Area. This caused a delay in the tender announcement for CP 201 and further simultaneous scheduling in relation to the CP 202 - 203 tender process.*
- *CP 205: Tender Document CP 205 is currently under JICA review. The Corporation will proceed with Tender CP 205 when concurrence from JICA has been obtained.*
- *CP 206: Tender Document CP 206 is currently under JICA review. The Corporation will proceed with Tender CP 206 when concurrence from JICA has been obtained.*

PENCAPAIAN KEUANGAN DAN ORGANISASI

FINANCE AND ORGANIZATION ACHIEVEMENTS

TOTAL PENDAPATAN TAHUN 2019

TOTAL REVENUE IN 2019

Sejak beroperasinya MRT Jakarta, Perseroan mulai membukukan pendapatan. Besarnya animo pengguna jasa serta dukungan dunia usaha melalui kerja sama pada bisnis non-tiket MRT memberikan dampak luar biasa terhadap Pendapatan Perseroan.

Since the start of MRT Jakarta's commercial operations, the Corporation has generated Revenue. Specifically, the astounding enthusiasm of passengers coupled with support from the business community through non-farebox business commercialization has resulted in significant Revenue gains.

Rp933,23
"Miliar Billion"

PENDAPATAN TIKET TAHUN 2019

FAREBOX REVENUE FOR 2019

Rp191,55
"Miliar Billion"

Perseroan membukukan pendapatan tiket sebesar Rp191,55 miliar yang merupakan penjualan tiket ke pengguna jasa. Nilai ini 113,34% lebih tinggi dari target sebesar Rp169 miliar.

The Corporation recorded Fare revenue of Rp191.55 billion through passenger ticket sales. This amount is 113.34% higher than the target of Rp169 billion that was set.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi prasarana dan sarana kepada Perseroan untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan prasarana dan sarana MRT serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat.

The DKI Jakarta Provincial Government has granted infrastructure and rolling - stock subsidies to the Corporation in order to ensure the management of MRT infrastructure and rolling stock and to provide affordable tariffs for passengers.

Subsidi MRT Jakarta berdasarkan Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perseroan No. 4343/-1.811.32 (CON/008/MRT/IX/2019) Tanggal 30 September 2019 tentang Pemberian Subsidi MRT yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.

The MRT Jakarta subsidy is based on an agreement between the DKI Jakarta Provincial Government and the Corporation No. 4343 / -1,811.32 (CON / 008 / MRT / IX / 2019) dated 30 September 2019 concerning the Granting of MRT Subsidies Sourced from APBD for the 2019 Budgetary Year.

PENDAPATAN NON-TIKET TAHUN 2019

NON-FAREBOX REVENUE FOR 2019

Perseroan membukukan pendapatan non-tiket sebesar Rp207,61 miliar yang didapat dari pendapatan periklanan, non-periklanan, dan ritel. Nilai ini 220,86% lebih besar dari target yang ditetapkan di awal sebesar Rp94 miliar. Besaran tersebut disebabkan oleh dukungan dunia usaha melalui kerja sama pada bisnis non-tiket MRT Jakarta.

The Corporation recorded non-farebox revenue of Rp207.61 billion from advertising, non-advertising and retail revenue. This amount is 220.86% higher than the set target of Rp94 billion. This is mainly due to business development support through partnerships relating to MRT Jakarta's non-farebox business.

Rp207,61
"Miliar Billion"

JUMLAH ASET TAHUN 2019

TOTAL ASSETS IN 2019

Rp17,35
"Triliun Trillion"

Perseroan mencatat jumlah aset pada tahun 2019 sebesar Rp17,35 triliun. Nilai ini meningkat 29,38% atau Rp13,41 triliun lebih tinggi dibandingkan jumlah aset pada tahun 2018. Sebagian besar aset Perseroan berupa Aset Tetap senilai Rp16,02 triliun.

The Corporation recorded total Assets of Rp17.35 trillion in 2019. This figure represents an increase of 29.38% or Rp13.41 trillion over the total Assets for 2018. Most of these Corporate Assets are in the form of Fixed Assets, which are valued at Rp16.02 trillion.

LAJU PERTUMBUHAN MAJEMUK TAHUNAN (CAGR)
ASET TETAP 2015-2019

COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR) OF
FIXED ASSETS 2015-2019

Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (CAGR) Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebesar 61,87%. Selesaiannya pembangunan konstruksi MRT Fase 1 berdampak besar terhadap pertumbuhan nilai Aset Tetap Perseroan.

The Compound Annual Growth Rate (CAGR) of the Corporation over the last 5 (five) years has been 61.87%. The completion of Phase 1 of the MRT construction has had a major impact upon the growth of the Corporate Fixed Assets' value.

61,87%

“Persen Percent”

LABA TAHUN BERJALAN 2019

PROFIT FOR THE YEAR 2019

Rp143,38

“Miliar Billion”

Perseroan mencatat pencapaian laba pada tahun 2019 sebesar Rp143,38 miliar. Nilai ini meningkat hingga 203,36% dibandingkan dengan rugi berjalan pada tahun 2018 sebesar Rp138,72 miliar. Pembukuan laba pada tahun pertama menjadi catatan penting bagi MRT Jakarta sebagai perseroan moda transportasi publik.

The Corporation recorded its first profit of Rp143.38 billion in 2019. This amount represents an increase of 203.36% over the loss of Rp138.72 billion sustained in 2018. The first year of operational profit marked a milestone for MRT Jakarta as a Public Transportation Corporation.

DUKUNGAN BAGI PENGEMBANG RITEL UMKM

SUPPORT FOR MSMEs RETAIL DEVELOPMENT

Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan usaha ritel yang melibatkan UMKM. Perseroan bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) melakukan proses kurasi untuk memilih 14 (empat belas) UMKM yang terdiri dari 7 (tujuh) UMKM kuliner, 4 (empat) UMKM fesyen, dan 3 (tiga) UMKM kriya. Mitra UMKM ditempatkan di 3 (tiga) stasiun MRT Jakarta yang strategis dengan angka laju penumpang yang tinggi, yaitu Stasiun Lebak Bulus Grab, Stasiun Fatmawati, dan Stasiun Dukuh Atas BNI.

The Corporation is committed to developing community Micro, Small and Medium enterprises (MSMEs). One of these commitments encompasses the development of retail businesses which involve MSMEs. In collaboration with the Creative Economy Agency (Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), the Corporation conducted a curation process in order to select 14 (fourteen) Enterprises comprising 7 (seven) Culinary Enterprises, 4 (four) Fashion Enterprises and 3 (three) Craft Enterprises. MSMEs Partners are now located at 3 (three) strategic MRT Jakarta Stations with high passenger traffic, namely Lebak Bulus Grab Station, Fatmawati Station and Dukuh Atas BNI Station.

14

“UMKM MSMEs”

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA - KESELAMATAN PERKERETAAPIAN (SMK3-KP)

IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
MANAGEMENT SYSTEM - RAILWAY TRANSPORTATION SAFETY

92,17%

“Persen Percent”

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan hasil pencapaian 92,17% untuk kategori tingkat lanjutan dan mendapatkan Bendera Emas.

The Corporation received an award certificate from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia for the implementation of its Occupational Safety and Health Management System with a score of 92.17% in the advanced level category, gaining a Golden Flag in the process.



PENGHARGAAN KECELAKAAN NIHIL ZERO ACCIDENT AWARD

Perseroan meraih penghargaan kecelakaan nihil atas implementasi program K3 yang sangat baik. Para pekerja berhasil melewati 24.638.418 jam kerja tanpa kecelakaan terhitung sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Desember 2018.

The Corporation also received a zero accident award for the excellent implementation of its Occupational Safety and Health system. Workers successfully performed their duties for 24,638,418 working hours without any accidents being recorded between 1 May 2016 and 31 December 2018.

24.638.418

"Jam Hours"

PENILAIAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM ASSESSMENT

77,10
"Efektif Effective"

Perseroan mencatat penilaian sistem pengendalian internal tahun 2019 sebesar 77,10 dengan predikat "Efektif". Nilai dan predikat ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 sebesar 70,73 atau "Cukup Efektif". Terdapat beberapa rekomendasi sebagai catatan penting bagi peningkatan penerapan sistem pengendalian internal, yang akan menjadi dasar bagi Perseroan untuk melakukan perbaikan secara konsisten.

The Corporation posted an internal control system assessment score of 77.10 for 2019, which is considered "Effective". This number and category have improved in comparison with the figure of 70.73 or "Fairly Effective" which was posted in 2018. A number of recommendations have also been made as regards improving the implementation of the internal control system, which will become the basis upon which the Corporation will work to make consistent improvements.

ISO SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI ISO INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

Perseroan melakukan standardisasi pada aspek kualitas produk dan jasa, keamanan, serta lingkungan MRT melalui ISO Sistem Manajemen Terintegrasi berstandar internasional, yaitu ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu; ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan; dan ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Ketiga ISO tersebut diberikan oleh TUV Rheinland, untuk masa berlaku 20 Desember 2019 hingga 20 Desember 2022.

The Corporation standardized aspects relating to the quality of its products and services, security and environmental management throughout MRT Jakarta through the introduction of the ISO Integrated Management System, specifically ISO 9001:2015 on Quality Management Systems; ISO 14001:2015 on Environmental Management Systems; and ISO 45001:2018 on Occupational Safety and Health Management Systems These three ISOs were granted by TUV Rheinland and have a validity period of 20 December 2019 until 20 December 2022.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

SKOR ASSESSMENT GCG TAHUN 2019

GOOD CORPORATE GOVERNANCE ASSESSMENT SCORE IN 2019

87,33
"Baik Good"

Perseroan mencatat skor penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada tahun 2019 sebesar 87,33 yang termasuk dalam predikat "Baik". Nilai ini meningkat 2,19 poin dari skor penilaian tahun 2018 yang tercatat sebesar 85,14 juga dengan predikat kualifikasi "Baik".

The Corporation recorded a GCG implementation assessment score of 87.33 in 2019, placing it in the "Good" category. This score represents an improvement of 2.19 points over the previous assessment score of 85.14 which was posted in 2018 and which also fell into the "Good" category.

Penilaian ini dilakukan dengan metode yang disusun dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan DKI Jakarta No. ST-1071/PW09/4.2/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Assessment Penerapan GCG pada PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2019.

Assessments of GCG implementation are carried out using methods compiled and developed by the DKI Jakarta Provincial Representative for the Indonesia National Government Internal Auditor (BPKP) in accordance with DKI Jakarta BPKP Representative Task Letter No. ST-1071 / PW09 / 4.2 / 2019 dated 28 November 2019 concerning the Assessment of GCG Implementation by PT MRT Jakarta (Perseroda) in 2019.

PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT MATURITY INDEX

Perseroan mencatat tingkat kematangan manajemen risiko tahun 2019 meningkat dari tahun 2018, dari sebelumnya "Repeatable" atau sebesar 2,89 menjadi "Defined" atau sebesar 3,55. Tingkat kematangan "Defined" menunjukkan bahwa kegiatan dan proses telah terdefinisikan dan terstandarisasi serta menjadi bagian dari kegiatan Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan pada pengelolaan risiko khususnya dengan beroperasinya MRT Fase 1 dan mulainya Konstruksi MRT Fase 2.

The Corporation recorded an increase in its risk management maturity index score in 2019 in comparison with 2018, from "Repeatable" with a score of 2.89 to "Defined" with a score of 3.55. A "Defined" maturity level indicates that the corporation's activities and processes have been defined and standardized, and that the practice is embedded within the corporation. The corporation is committed to continuing to improve its risk-management score, particularly with MRT Phase 1 already in operation and MRT Phase 2 Construction already underway.

3,55
"Defined"



IKHTISAR KINERJA 2019

PERFORMANCE HIGHLIGHT 2019

Capaian kinerja 2019 dalam mewujudkan awal hadirnya peradaban baru transportasi publik.

2019 performance highlights in actualizing the beginning of a new era of public transportation.



LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2019

IKHTISAR KEUANGAN

FINANCIAL HIGHLIGHTS

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

| Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain <i>In million Rupiah, unless stated otherwise</i> | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | YoY 2018-2019 (%) |
|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Pendapatan Tiket <i>Farebox Revenue</i> | 191.552 | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Subsidi <i>Subsidy Revenue</i> | 534.070 | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Non-Tiket <i>Non-Farebox Revenue</i> | 207.608 | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan <i>Total Revenues</i> | 933.230 | - | - | - | - | - |
| Beban Pokok Pendapatan <i>Cost of Revenues</i> | (760.415) | - | - | - | - | - |
| Laba Kotor <i>Gross Profit</i> | 172.815 | - | - | - | - | - |
| Beban Umum dan Administrasi <i>General and Administrative Expenses</i> | (221.750) | (207.263) | (136.266) | (79.457) | (63.667) | 6,99 |
| Rugi Usaha <i>Operating Loss</i> | (48.935) | (207.264) | (136.266) | (79.457) | (63.667) | (76,39) |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expenses)</i> | 120.854 | 77.281 | 21.135 | 43.043 | 909 | 56,38 |
| Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Manfaat Pajak Penghasilan <i>Income (Loss) Before Final Tax Expense and Income Tax Benefit</i> | 71.919 | (129.983) | (115.131) | (36.414) | (62.758) | 155,33 |
| Beban Pajak Final <i>Final Tax Expense</i> | (7.973) | (8.737) | - | - | - | - |
| Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan <i>Income (Loss) Before Income Tax Benefit</i> | 63.946 | (138.719) | (115.131) | (36.414) | (62.758) | 146,10 |
| Manfaat Pajak Penghasilan Tanguhan <i>Deferred Income Tax Benefit</i> | 79.434 | - | - | - | - | - |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan <i>Income (Loss) for the Year</i> | 143.380 | (138.719) | (115.130) | (36.413) | (62.758) | 203,36 |
| Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain <i>Other Comprehensive Income (Expense)</i> | 3.324 | 1.213 | (1.764) | 449 | 561 | 173,94 |
| Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan <i>Total Comprehensive Income (Loss) for the Year</i> | 146.704 | (137.506) | (116.894) | (35.964) | (62.196) | 206,69 |
| Laba (Rugi) per Saham (Rupiah penuh) <i>Earning (Loss) per Share (full Rupiah)</i> | 11.226 | (22.498) | (20.121) | (9.198) | (32.286) | 151,46 |

Keterangan: Hingga akhir tahun 2019 Perseroan belum memiliki entitas anak. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki informasi terkait laba (rugi) tahun berjalan dan total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan yang diatribusikan, baik kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali

Remarks: Until the end of 2019 the Corporate does not have a subsidiary. Accordingly, Corporate does not have any information related to profit (loss) for the year and total comprehensive profit (loss) for the year attributable, both to the owner of the parent entity and non-controlling interests.

Tabel. 2.1
Table. 2.1

DENGAN DIMULAINYA OPERASIONAL MRT JAKARTA PADA TAHUN 2019, PERSEROAN MEMBUKUKAN PENDAPATAN PERDANA

With the operation in 2019, the Corporation recorded its first revenue

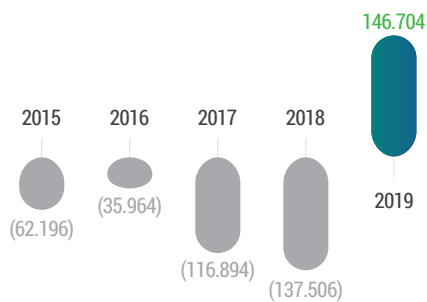


Grafik. 2.1
Graphic. 2.1



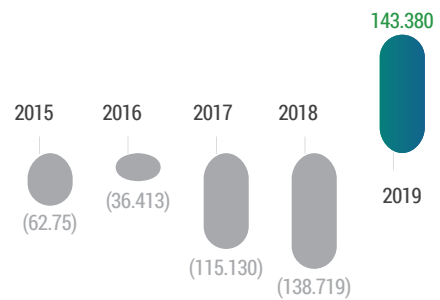
Grafik. 2.2
Graphic. 2.2

TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
Total Comprehensive Income (Loss) for The Year
(Rp-Juta Million)



Grafik. 2.3
Graphic. 2.3

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
Income (Loss) for The Year
(Rp-Juta Million)



Grafik. 2.4
Graphic. 2.4

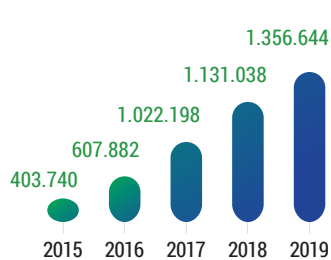
POSISI KEUANGAN

FINANCIAL POSITION

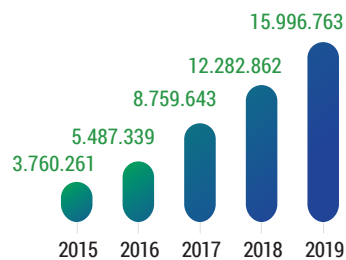
| Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain <i>In million Rupiah, unless stated otherwise</i> | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | YoY 2018-2019 (%) | CAGR 2015-2019 (%) |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|
| Aset <i>Assets</i> | | | | | | | |
| Aset Lancar <i>Current Assets</i> | 1.185.263 | 616.805 | 785.531 | 475.867 | 395.308 | 92,16 | 31,59 |
| Aset Tetap <i>Fixed Assets</i> | 16.023.642 | 12.708.591 | 8.383.938 | 4.471.592 | 2.333.822 | 26,09 | 61,87 |
| Aset Tidak Lancar Lainnya <i>Other Non-Current Assets</i> | 144.502 | 88.503 | 612.372 | 1.147.763 | 1.434.871 | 63,27 | 43,67 |
| Jumlah Aset <i>Total Assets</i> | 17.353.407 | 13.413.900 | 9.781.841 | 6.095.221 | 4.164.001 | 29,37 | 42,88 |
| Liabilitas dan Ekuitas <i>Liabilities and Equity</i> | | | | | | | |
| Liabilitas <i>Liabilities</i> | | | | | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i> | 699.277 | 382.883 | 466.942 | 262.755 | 201.743 | 82,63 | 36,45 |
| Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i> | 657.367 | 748.155 | 555.256 | 345.127 | 201.997 | (12,13) | 34,31 |
| Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i> | 1.356.644 | 1.131.038 | 1.022.198 | 607.882 | 403.740 | 19,95 | 35,39 |
| Ekuitas Neto <i>Net Equity</i> | 15.996.763 | 12.282.862 | 8.759.643 | 5.487.339 | 3.760.261 | 30,24 | 43,62 |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas <i>Total Liabilities and Equity</i> | 17.353.407 | 13.413.900 | 9.781.841 | 6.095.221 | 4.164.001 | 29,37 | 42,88 |

Keterangan: Perseroan tidak memiliki entitas asosiasi/ventura bersama, dengan demikian tidak terdapat informasi tentang investasi pada entitas asosiasi/ventura bersama.
Remarks: The Corporate does not have an associate/joint venture, thus there is no information on investment in an associate/joint venture.

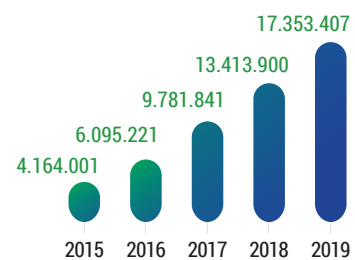
Tabel 2.2
Table 2.2



Grafik 2.5. Jumlah Liabilitas (Rp-Juta)
Graphic 2.5. Total Liabilities (Rp-Million)



Grafik 2.6. Jumlah Ekuitas Neto (Rp-Juta)
Graphic 2.6. Total Net Equity (Rp-Million)



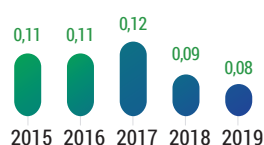
Grafik 2.7. Jumlah Aset (Rp-Juta)
Graphic 2.7. Total Assets (Rp-Million)

RASIO-RASIO KEUANGAN

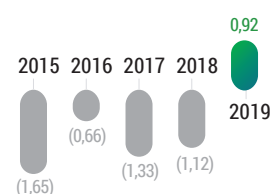
FINANCIAL RATIOS

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | YoY 2018-2019 (%) |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| Rasio Likuiditas <i>Liquidity Ratio</i> | | | | | | |
| Rasio Lancar (kali) <i>Current Ratio (times)</i> | 1,69 | 1,61 | 1,68 | 1,81 | 1,96 | 5,22 |
| Rasio Solvabilitas (kali) <i>Solvability Ratio (times)</i> | 12,79 | 11,86 | 9,57 | 10,03 | 10,31 | 7,86 |
| Rasio Kas (kali) <i>Cash Ratio (times)</i> | 1,40 | 1,58 | 1,67 | 1,79 | 1,94 | 76,54 |
| Rasio Cepat (kali) <i>Quick Ratio (times)</i> | 1,69 | 1,61 | 1,68 | 1,81 | 1,96 | 5,22 |
| Rasio Solvabilitas <i>Solvency Ratio</i> | | | | | | |
| Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (kali) <i>Debt to Equity Ratio (times)</i> | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 7,90 |
| Rasio Utang Jangka Pendek terhadap Ekuitas (kali) <i>Short Term Debt to Equity Ratio (times)</i> | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 40,23 |
| Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas (kali) <i>Long Term Debt to Equity (times)</i> | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 32,53 |
| Rasio Utang terhadap Aset (kali) <i>Debt to Asset Ratio (times)</i> | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - |
| Rasio Profitabilitas <i>Profitability Ratio</i> | | | | | | |
| Margin Laba Kotor (%) <i>Gross Profit Margin (%)</i> | 18,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Margin Laba Bersih (%) <i>Net Profit Margin (%)</i> | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| Tingkat Pengembalian Aset (%) <i>Return On Asset (ROA) (%)</i> | 0,85 | (1,03) | (1,20) | (0,59) | (1,49) | 182,47 |
| Tingkat Pengembalian Ekuitas (%) <i>Return on Equity (ROE) (%)</i> | 0,92 | (1,12) | (1,33) | (0,66) | (1,65) | 184,64 |

Tabel. 2.3
Table. 2.3



Grafik. 2.8. Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (kali)
Graphic. 2.8. Debt to Equity Ratio (times)



Grafik. 2.9. Tingkat Pengembalian Ekuitas (%)
Graphic. 2.9. Return on Equity (RoE) (%)

IKHTISAR OPERASI DAN ORGANISASI

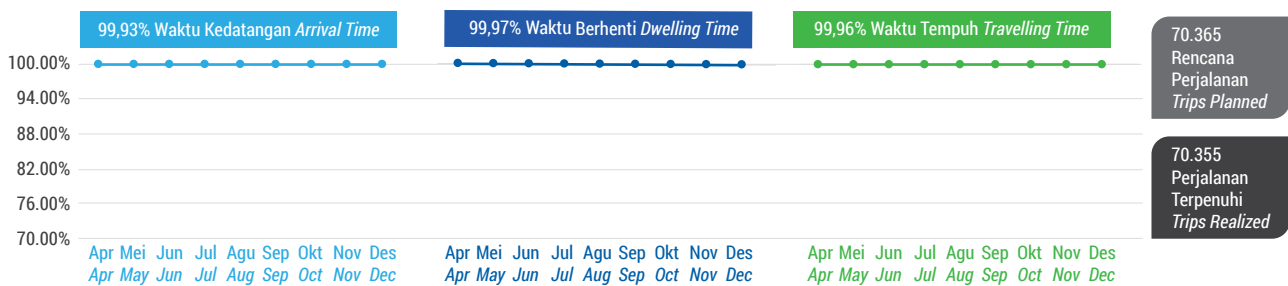
OPERATION AND ORGANIZATION HIGHLIGHTS

IKHTISAR OPERASI

OPERATION HIGHLIGHTS

| Indikator Operasi Operation Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|------------|--------|--------|--------|------|
| Jumlah Pengguna Jasa Selama 1 (satu) Tahun Total Number of Passengers in 1 (one) year | 24.621.467 | - | - | - | - |
| Rata-rata Pengguna Jasa per Hari Average Number of Daily Passengers | 89.645 | - | - | - | - |
| Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index | 82,78 | - | - | - | - |
| Persentase Perkembangan Konstruksi MRT Jakarta Fase 1 MRT Jakarta Phase 1 Construction Development Percentage | 100% | 98,86% | 80,49% | 49,46% | - |

Tabel. 2.4
Table. 2.4

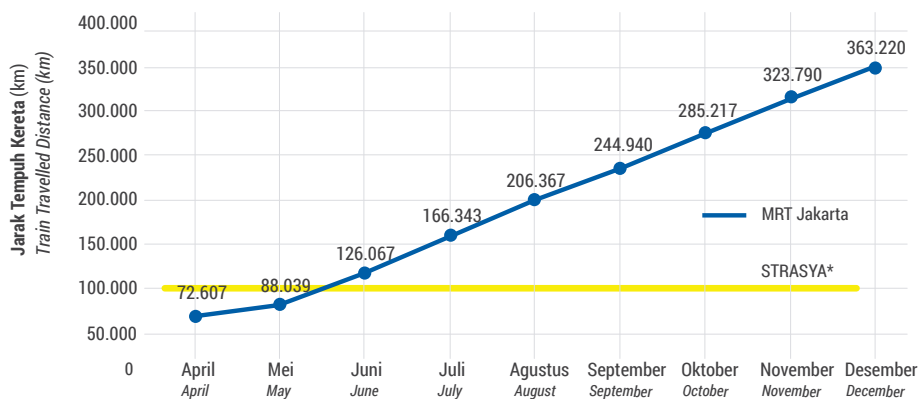


10 perjalanan dibatalkan pada April hingga Mei 2019 disebabkan familiarisasi sistem dan prosedur.
10 trips were cancelled from April to May 2019 due to system and procedure familiarization

*Data tidak mencakup dampak yang diakibatkan force majeure: 1. Gempa Bumi pada tanggal 2 Agustus 2019 (9 Perjalanan Delay); 2. Pemadaman Listrik PLN pada tanggal 4 Agustus 2019 (91 Perjalanan Batal)

*Data does not include force majeure impacts: 1. Earthquake on August, 2 2019 (9 Trips Delayed); Power Blackout on August 4, 2019 (91 Trips Cancelled)

Grafik. 2.10 Laporan Ketepatan Waktu MRT Jakarta April-Desember 2019
Graphic. 2.10 On Time Performance Report MRT Jakarta April – December 2019



*STRASYA (Standard Urban Railway System for Asia): Jarak rata-rata antara kegagalan yang menyebabkan keterlambatan kereta 5 menit atau lebih tidak boleh kurang dari 100.000 km
STRASYA (Standard Urban Railway System for Asia): Mean Distance Between Failures which cause 5 minutes or more service delay should not be less than 100,000 km

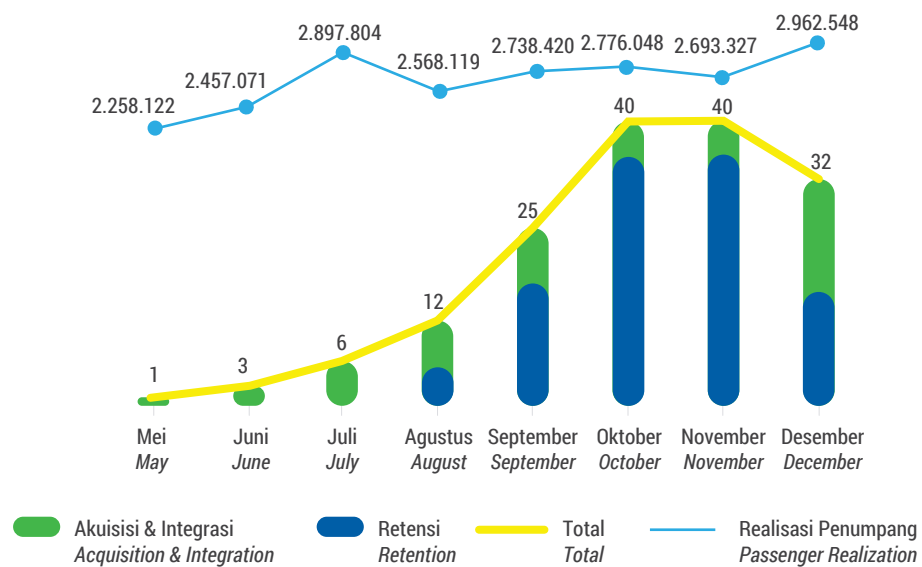
Grafik. 2.11 Grafik Jarak Rata-rata Antara Keterlambatan Kereta yang Lebih Dari 5 Menit
Graphic. 2.11 Chart of Mean Distance Travelled Between Train Delays More Than 5 Minutes

TABEL JUMLAH PROGRAM UPAYA PENINGKATAN PENGGUNA JASA

Table Total Ridership Growth Strategy Program

| | Akuisisi & Integrasi <i>Integration & Acquisition</i> | Retensi <i>Retention</i> | Total <i>Total</i> | Realisasi Pengguna Jasa <i>Passenger Realization</i> |
|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---|
| Mei <i>May</i> | - | 1 | 1 | 2.258.122 |
| Juni <i>June</i> | - | 3 | 3 | 2.457.071 |
| Juli <i>July</i> | - | 6 | 6 | 2.897.804 |
| Agustus <i>August</i> | 5 | 7 | 12 | 2.568.119 |
| September <i>September</i> | 17 | 8 | 25 | 2.738.420 |
| Oktober <i>October</i> | 35 | 5 | 40 | 2.776.048 |
| November <i>November</i> | 35 | 5 | 40 | 2.693.327 |
| Desember <i>December</i> | 16 | 16 | 32 | 2.962.548 |
| Total | 108 | 51 | 159 | |

Tabel. 2.5
Table. 2.5



Grafik. 2.12
Graphic. 2.12

IKHTISAR ORGANISASI ORGANIZATION HIGHLIGHTS

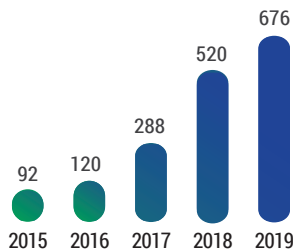
| Indikator Organisasi Organization Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah Karyawan Total Employees | 676 | 520 | 288 | 120 | 92 |
| Nilai Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik* Good Corporate Governance Implementation Score* | 87,33 | 85,14 | 80,45 | 71,20 | 65,79 |
| Nilai Kematangan Risiko Risk Maturity Score | 3,55 | 2,95 | - | - | - |
| Nilai Sistem Pengendalian Internal Internal Control System Score | 77,10 | - | 70,62 | - | - |
| Jumlah Kepesertaan Pelatihan Karyawan Total Participants of Employee Training | 1333 | 1693 | 710 | 607 | 88 |

*) Sejak tahun 2017 penilaian Tata Kelola Perusahaan dilakukan dengan menggunakan parameter yang disusun oleh BPKP. Hal ini berbeda dengan tahun 2015 dan 2016, di mana parameter yang digunakan adalah Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.

*) Since 2017 the Good Corporate Governance assessment has been conducted using parameters compiled by BPKP. This is different from 2015 and 2016, where the parameter used is the SOEs Ministry Secretary Decree No. SK-16/S.MBU/2012.

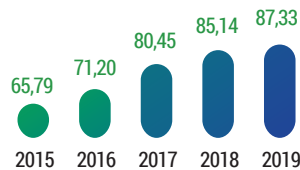
Tabel. 2.6
Table. 2.6

JUMLAH KARYAWAN Total Employees



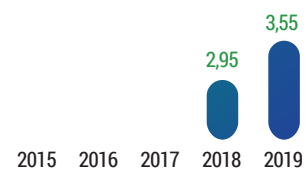
Grafik. 2.13
Graphic. 2.13

NILAI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK GCG Implementation Score



Grafik. 2.14
Graphic. 2.14

TINGKAT KEMATANGAN MANAJEMEN RISIKO Risk Maturity Score



Grafik. 2.15
Graphic. 2.15

IKHTISAR SAHAM

SHARE HIGHLIGHTS

JUMLAH SAHAM

TOTAL SHARES

Jumlah saham Perseroan sebanyak 12.771.972 lembar saham, dengan kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 12.771.472 lembar atau 99,99%, dan Perumda Pasar Jaya sebanyak 500 lembar atau 0,01% dari seluruh jumlah saham Perseroan.

Perseroan tidak menerbitkan sahamnya untuk dimiliki oleh publik maupun oleh manajemen atau karyawan.

The number of Corporation shares is 12,771,972 shares, with share ownerships by DKI Jakarta Provincial Government of 12,771,472 shares or 99.99% and Perumda Pasar Jaya of 500 shares or 0.01% of the total Corporation's shares.

The Corporation does not issue shares for public ownership, neither for management or employees ownerships.

PERDAGANGAN SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PUBLIK

SHARES TRADING AND PUBLIC SHARE OWNERSHIP

Hingga 31 Desember 2019, Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya kepada publik. Perseroan tidak menerbitkan sahamnya untuk dimiliki oleh manajemen atau karyawan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait perdagangan saham yang memuat kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan dan volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatat setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir; termasuk penghentian sementara perdagangan saham dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Up to December 31, 2019, the Corporation did not make Public Offering of Shares and did not trade its shares to the public. The Corporation did not issue its shares for management or employees ownership. Therefore, there is no information related to shares trading that contains market capitalization based on price at the Stock Exchange where the shares are listed; the highest, lowest and closing share price based on price at the Stock Exchange where the shares are listed; shares trading volume at the Stock Exchange where the shares are listed; and information in chart which at least includes the closing price based on price at the Stock Exchange where the shares are listed and shares trading volume at the Stock Exchange where the shares are listed for every quarter in the last 2 (two) years; including temporary suspension of shares trading in the last 2 (two) years.

AKSI KORPORASI

CORPORATE ACTIONS

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak melakukan aksi korporasi seperti aksi pemecahan saham, penggabungan saham, saham bonus, maupun penurunan nilai nominal saham.

Throughout 2019, the Corporation did not take any corporate actions such as stock splits, reverse stock splits, bonus shares, nor decrease the nominal value of shares.

DIVIDEN SAHAM

SHARE DIVIDEND

Sejak berdirinya hingga akhir tahun 2019, Perseroan belum membagikan dividen kepada pemegang saham. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta keputusan pemegang saham.

Since its establishment until the end of 2019, the Corporation has not yet distributed any dividend to shareholders. This is in accordance with the provisions in the Articles of Association and Shareholder's resolution.

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI, SERTA EFEK LAINNYA

BONDS, SUKUK OR CONVERSION BONDS, AND OTHER SECURITIES

Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, atau obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi tentang jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo, serta peringkat obligasi/sukuk.

The Corporation does not issue bonds, sukuk or converted bonds, or other securities. Therefore, there is no information on the number of outstanding bonds / sukuk / converted bonds, interest / yield rates, maturity dates, and rating of bonds / sukuk.

SUMBER PENDANAAN

FUNDING SOURCE

Sumber pendanaan proyek MRT Jakarta didapatkan dari ekuitas modal saham pemegang saham Perseroan, yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui skema Penanaman Modal Daerah (PMD). Berikut disampaikan sumber pendanaan pembangunan dan pengembangan proyek MRT Jakarta.

The funding source for MRT Jakarta project is obtained from equity capital shares of the Corporation's shareholders, that is DKI Jakarta Provincial Government, through the Regional Investment (PMD) scheme. The following shows funding sources for construction and development of MRT Jakarta project.



Figur. 2.1. Sumber pendanaan pembangunan dan pengembangan proyek MRT Jakarta
Figure. 2.1. Funding Sources for MRT Jakarta Construction and Development Project

KILAS PERISTIWA 2019

2019 EVENT HIGHLIGHTS



28-31 Januari 2019 *January 28-31, 2019*

Awak Sarana Perkeretaapian (ASP), petugas *Operation Control Centre*, petugas pemeliharaan, dan ASP Khusus PT MRT Jakarta (Perseroda) mengambil ujian sertifikasi.

PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Officers on Train, Operation Control Center Officers, maintenance officers, and Special Officers on Train took the certification test.



13 Februari 2019 *February 13, 2019*

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian hibah daerah pembangunan proyek MRT Jakarta Fase 2.

DKI Jakarta Provincial Government and Republic of Indonesia's Central Government through the Ministry of Finance signed an agreement on regional grant for MRT Jakarta Phase 2 development project.



15 Februari 2019 *February 15, 2019*

PT MRT Jakarta (Perseroda) memberikan penghargaan terkait *Safety, Health, Environment, Security (SHES)* kepada kontraktor proyek MRT Jakarta Fase 1. *PT MRT Jakarta (Perseroda) presented the 2019 Safety, Health, Environment and Security (SHES) Award to Contractors of MRT Jakarta Phase 1 Project.*



12 Maret 2019 *March 12, 2019*

PT MRT Jakarta (Perseroda) melaksanakan uji coba MRT Jakarta. *PT MRT Jakarta (Perseroda) held MRT Jakarta trial run for the public.*



24 Maret 2019 *March 24, 2019*

Presiden Joko Widodo meresmikan MRT Jakarta Fase 1 sekaligus mencanangkan proyek MRT Jakarta Fase 2.

President Joko Widodo inaugurated MRT Jakarta Phase 1 and simultaneously launched MRT Jakarta Phase 2 project.



28 Maret 2019 *March 28, 2019*

PT MRT Jakarta (Perseroda) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

PT MRT Jakarta (Perseroda) held the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders.



1 April 2019 April 1, 2019

MRT Jakarta memulai operasi komersial dengan penerapan diskon tarif 50% bagi pengguna jasa selama satu bulan pertama operasi.
MRT Jakarta opened for commercial operation at 50 percent discounted fares for the passengers for the first month of operation.



10 April 2019 April 10, 2019

Stasiun Sisingamangaraja resmi berganti nama menjadi Stasiun ASEAN sebagai komitmen Jakarta menjadi tuan rumah yang baik bagi masyarakat negara-negara Asia Tenggara.
Sisingamangaraja Station officially changed its name to ASEAN Station as a commitment of Jakarta to be a good host for the citizens of Southeast Asian countries.



22 April 2019 April 22, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) meraih penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Kecelakaan Nihil dari Kementerian Ketenagakerjaan.
PT MRT Jakarta (Perseroda) received Occupational Safety and Health Management System (SMK3) and Zero Accident awards from The Ministry of Manpower.



2 Mei 2019 May 2, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerja sama pengembangan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia dalam kereta api perkotaan dengan Crossrail International UK.
PT MRT Jakarta (Perseroda) and Crossrail International UK signed a Memorandum of Understanding on capacity building and human resource development in urban railways.



2 Mei 2019 May 2, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) menandatangani pakta integritas pelaksanaan pengadaan proyek Fase 2 MRT Jakarta.
PT MRT Jakarta (Perseroda) signed the integrity pact for the procurement of MRT Jakarta Phase 2 project implementation.



13 Mei 2019 Mei 13, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) mulai memberlakukan tarif penuh dalam penggunaan MRT Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Light Rail Transit.
PT MRT Jakarta (Perseroda) applied full fare for MRT Jakarta, pursuant to the Regulation of DKI Jakarta Provincial Governor Number 34 of 2019 on Fares for Mass Rapid Transit and Light Rail Transit Transportation.



31 Mei 2019 May 31, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) melakukan perubahan struktur komisaris dengan memberhentikan dengan hormat Plt. Komisaris Utama Perseroan Rukijo dan tetap menjadi Komisaris; memberhentikan dengan hormat Yusmada Faizal selaku Komisaris; Mengangkat Muhammad Syaugi sebagai Komisaris Utama Perseroan; dan mengangkat Adnan Pandu Praja sebagai Komisaris.
PT MRT Jakarta (Perseroda) conducted Board of Commissioners reshuffle by honorably dismissing the Acting President Commissioner, Rukijo who would remain as a Commissioner; Honorably dismissing Commissioner Yusmada Faizal; Appointing Muhammad Syaugi as the President Commissioner; and appointing Adnan Pandu Praja as a Commissioner.



19 Juni 2019 June 19, 2019

Pada hari jadinya yang ke-11, PT MRT Jakarta (Perseroda) memberikan apresiasi kepada kontraktor Fase 1, konsultan, mitra bisnis, dan media yang telah mengawal proses pembangunan MRT Jakarta dari nol.
On the eleventh anniversary celebration, PT MRT Jakarta (Perseroda) extended its appreciation to Phase 1 Contractors, Consultants, business partners and the Media that have overseen MRT Jakarta development from the start.



11 Juli 2019 July 11, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menandatangani Nota Kesepahaman terkait studi integrasi antarmoda serta optimalisasi konektivitas pejalan kaki dan sepeda di sepanjang koridor MRT Jakarta.

Transportation and Development Policy (ITDP) signed a Memorandum of Understanding on intermodal integration study and optimization of pedestrian and bicycle-line connectivity along MRT Jakarta corridor.



24 Juli 2019 July 24, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) meraih penghargaan *Marketeers Omni Brand of the Year 2019* untuk keberhasilan perseroan dalam melakukan ekspansi bisnis lebih jauh lagi dengan menggabungkan dunia *offline* dan *online*.

PT MRT Jakarta (Perseroda) received the 2019 Marketeers Omni Brand of the Year Awards for the Corporation's achievement in expanding business by integrating online and offline domains.



26 Juli 2019 July 26, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan SMRT International Pte Ltd menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerja sama pembangunan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia, operasi dan pemeliharaan fasilitas, serta infrastruktur kereta api.

PT MRT Jakarta (Perseroda) and SMRT International Pte. Ltd. signed a Memorandum of Understanding on capacity building and human resources development, operations and facility maintenance, as well as railway infrastructure.



1 Agustus 2019 August 1, 2019

Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo hadir dalam acara "Goresan Batik Kemerdekaan" di Beranda A Stasiun Bundaran HI, dan berkesempatan mengawali goresan batik pertama di atas kain sepanjang 74 meter.

President Joko Widodo and First Lady Iriana Joko Widodo attended the "Goresan Batik Kemerdekaan" event held at Platform A of Bundaran HI Station, and had the opportunity to mark the first draw of Batik on a 74-meter-long piece of fabric.



15 Agustus 2019 August 15, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Intiland Development Tbk. menandatangani Nota Kesepahaman yang meliputi pemenuhan kebutuhan area *park and ride* di lahan seluas 3.500m² di kawasan South Quarter, Cilandak, Jakarta Selatan.

PT MRT Jakarta (Perseroda) and PT Intiland Development Tbk. signed a Memorandum of Understanding which includes provision of park and ride area of approximately 3,500m² at South Quarter, Cilandak, South Jakarta.



22 Agustus 2019 August 22, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) menyelenggarakan Diskusi Panel *Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) 2019* dengan tema "Peran *Business Continuity Management (BCM)* Untuk Keberlanjutan Perusahaan".

PT MRT Jakarta (Perseroda) held 2019 Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) Discussion Panel with the theme "The Role of Business Continuity Management (BCM) For Corporate Sustainability".



27 Agustus 2019 August 27, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda), diwakili oleh Direktur Utama, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diwakili Wakil Ketua KPK melakukan kegiatan pemasangan stiker berpesan anti-korupsi di Ratangga dan stasiun-stasiun MRT Jakarta.

PT MRT Jakarta (Perseroda), represented by the President Director, and the Corruption Eradication Commission (KPK), represented by KPK Deputy Chairman installed stickers with anticorruption messages inside the Ratangga and MRT Jakarta stations.



4 September 2019 September 4, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) merayakan Hari Pelanggan Nasional. Direksi Perseroan ikut menyapa penumpang sambil membagikan pin Hari Pelanggan Nasional, berperan sebagai petugas loket tiket, loket informasi, dan menampung aspirasi pengguna jasa.

PT MRT Jakarta (Perseroda) celebrated the National Customers' Day. The Directors participated in greeting the passengers, distributing National Customers' Day pins, taking the role of ticketing and information booth personnel, and listening to passengers' aspirations.



8 September 2019 *September 8, 2019*

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, meresmikan gerakan #RuangBacaJakarta dengan membaca buku bersama-sama selama perjalanan dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun Lebak Bulus Grab. *DKI Jakarta Provincial Governor, Anies Baswedan, launched #RuangBacaJakarta movement by reading a book together during a trip from Bundaran HI Station to Lebak Bulus Grab Station.*



16 September 2019 *September 16, 2019*

Dalam ajang *6th Singapore Institute of Planners (SIP) Awards 2019*, PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PDW Architects mendapatkan Merit Award untuk *Best Planning of the Year*, dan Kategori Internasional untuk Master Plan dan Panduan Rancang Kota (*Urban Design Guidelines*) Kawasan Berorientasi Transit (KBT) Dukuh Atas. *In the 6th Singapore Institute of Planners (SIP) Award 2019, PT MRT Jakarta (Perseroda) and PDW Architects received the Merit Award for Best Planning of the Year, International Category for Master Plan, and Urban Design Guidelines for Dukuh Atas Transit Oriented Development (TOD) Area.*



19 September 2019 *September 19, 2019*

Dalam ajang tahunan "*Annual PropertyGuru Indonesia Property Awards 2019*", PT MRT Jakarta (Perseroda) mendapatkan penghargaan di kategori "*Special Recognition for Public Facility*". *During the "Annual PropertyGuru Indonesia Property Awards 2019" event, PT MRT Jakarta (Perseroda) received an award in the "Special Recognition for Public Facilities" category.*



30 September 2019 *September 30, 2019*

PT MRT Jakarta (Perseroda), diwakili oleh Direktur Utama William Sabandar menandatangani Naskah Perjanjian Subsidi MRT Jakarta dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. *PT MRT Jakarta (Perseroda), represented by President Director William Sabandar, and Head of DKI Jakarta Transportation Agency, Syafrin Liputo, signed an Agreement on MRT Jakarta Subsidy.*



12 Oktober 2019 *October 12, 2019*

Masyarakat umum dan komunitas mengikuti pencanangan gerakan #JakartaRamahBersepeda yang ditandai dengan menjajal jalur khusus pesepeda dari persimpangan Jalan Fatmawati hingga Bundaran HI sepanjang kurang lebih 12 kilometer.

Public and cyclists community participated in the launching of #JakartaRamahBersepeda (#JakartaCyclingFriendly) movement which was marked by trying-out the designated lane for cyclists from Jalan Fatmawati to Bundaran HI of approximately 12km.



25 Oktober 2019 *October 25, 2019*

Guna mendukung program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta #JakartaRamahBersepeda, PT MRT Jakarta (Perseroda) menjajal jalur sepeda dari Stasiun Fatmawati menuju Stasiun Bundaran HI sebagai langkah konkret untuk mendukung perbaikan kualitas udara di Jakarta. To support DKI Jakarta Provincial Government's program #JakartaRamahBersepeda (#JakartaCyclingFriendly), PT MRT Jakarta (Perseroda) tried-out the bicycle lane from Fatmawati Station to Bundaran HI Station as a concrete action to support the improvement of air quality in Jakarta.



14 November 2019 *November 14, 2019*

PT MRT Jakarta (Perseroda) kembali menerima penghargaan di ajang Annual Report Award 2019, dan meraih peringkat 3 kategori BUMD Non-Listed.

PT MRT Jakarta (Perseroda) again received an award at the Annual Report Award 2019, and won 3rd place in the Non-Listed ROE category.



27 November 2019 *November 27, 2019*

Dalam ajang "Top Digital Awards 2019", PT MRT Jakarta (Perseroda) meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu pertama sebagai Top Digital Implementation on Logistics and Transportation dan kedua sebagai Top Leader on Digital Business 2019.

In the "2019 Digital Top Awards", PT MRT Jakarta (Perseroda) won two awards at once, first as Top Digital Implementation on Logistics and Transportation, second as Top Leader on Digital Business 2019.



29 November 2019 *November 29, 2019*

PT MRT Jakarta (Perseroda) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang menyetujui dan mengesahkan sejumlah hal, antara lain pembentukan Anak Perusahaan Sarana; Pembentukan Anak Perusahaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT); dan perubahan Nomenklatur Direksi.

PT MRT Jakarta (Perseroda) held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) that approved and ratified some agendas, including establishment of a Subsidiary Company focusing on Operations; establishment of a Transit Oriented Development (TOD) Subsidiary; and changes to the Board of Directors' Nomenclature.



4 Desember 2019 *December 4, 2019*

Dalam ajang *International Innovation Awards* 2019 di Singapura, PT MRT Jakarta (Perseroda) mendapat penghargaan untuk kategori service and solution atas tersedianya fitur dan sistem pintu tepi peron (*platform screen door system*) yang ada di setiap stasiun MRT Jakarta.

In the 2019 International Innovation Awards event in Singapore, PT MRT Jakarta (Perseroda) received an award in the service and solution category for the availability of the feature and platform screen door system at every MRT Jakarta station.



4 Desember 2019 *December 4, 2019*

Dalam gelaran pertama *CNBC Indonesia Awards* 2019, CNBC Indonesia memberikan penghargaan kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai "*The Best Business Performance in Public Transportation*".

In the first CNBC Indonesia Awards 2019, CNBC Indonesia awarded PT MRT Jakarta (Perseroda) as "The Best Business Performance in Public Transportation".



6 Desember 2019 *December 6, 2019*

Kartu Jelajah Berganda atau *Multi Trip Ticket* (MTT) resmi diluncurkan di Terowongan Jalan Kendal, Dukuh Atas. Ke depannya, integrasi dengan sistem Jak Lingko memungkinkan kartu MTT digunakan untuk jasa PT Transportasi Jakarta dan PT LRT Jakarta.

The Multi Trip Ticket (MTT) Card was officially launched in Kendal Tunnel, Dukuh Atas. Going forward, the implementation of Jak Lingko integrated system will allow the MTT card to be used for PT Transportasi Jakarta and PT LRT Jakarta services.



9 Desember 2019 December 9, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT KAI (Persero) sepakat untuk membentuk Perusahaan Patungan yang memiliki tugas utama melakukan studi integrasi dan pembenahan kawasan stasiun dan pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) sebagai upaya menuju Jakarta sebagai kota cerdas.

PT MRT Jakarta (Perseroda) and PT KAI (Persero) agreed to establish a Joint Venture with a main task to conduct study on the integration and improvement of station area and the management of Transit Oriented Development (TOD) as the effort to make Jakarta a smart city.



9 Desember 2019 December 9, 2019

European Society for Quality Research (ESQR) menganugerahkan penghargaan “International Diamond Prize for Excellence in Quality 2019” kategori Emas kepada PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai bentuk pengakuan atas performa bisnis yang unggul, praktik proses bisnis yang terbaik, kesadaran akan kualitas layanan, serta pencapaian perseroan dalam mendapatkan pengguna jasa.

The European Society for Quality Research (ESQR) awarded the “International Diamond Prize for Excellence in Quality 2019” Gold Category to PT MRT Jakarta (Perseroda). This award is an acknowledgment of the superior business performance, best practices implementation, service quality awareness, as well as the Corporation achievement in drawing passengers.



11 Desember 2019 December 11, 2019

Dalam ajang *Indonesia Most Trusted Companies 2019* yang digelar oleh *Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)* dan *Majalah SWA*, PT MRT Jakarta (Perseroda) mendapatkan penghargaan kategori “*Trusted Company Based on Corporate Governance Perception Index*”.

In the 2019 Indonesia Most Trusted Companies event held by the Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine, PT MRT Jakarta (Perseroda) won the “Trusted Company Based on the Corporate Governance Perception Index” category.



17 Desember 2019 December 17, 2019

PT MRT Jakarta (Perseroda) menerima penghargaan pada ajang “Penghargaan Manajemen Keselamatan Penyelenggara Jasa Angkutan Tahun 2019” oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

PT MRT Jakarta (Perseroda) received an award at the 2019 Transportation Safety Management Award organized by The Ministry of Transportation of The Republic of Indonesia.



- 1. MUHAMMAD SYAUGI**
Komisaris Utama
President Commissioner
- 2. RUKIJO**
Komisaris
Commissioner
- 3. ZULFIKRI**
Komisaris
Commissioner
- 4. MUKHTASOR**
Komisaris
Commissioner
- 5. ADNAN PANDU PRAJA**
Komisaris
Commissioner







DEWAN KOMISARIS SANGAT MENGAPRESIASI KINERJA PERSEROAN TAHUN INI, KHUSUSNYA DENGAN BEROPERASINYA MRT. KERJA SAMA YANG DIBANGUN MRT JAKARTA DENGAN SELURUH PIHAK MAMPU MEWUJUDKAN IMPIAN KEHADIRAN TRANSPORTASI PUBLIK YANG AMAN, NYAMAN, CEPAT, DAN TEPAT WAKTU.

The Board of Commissioners highly appreciates this year's Corporat performance, particularly with the commencement of MRT operations. The collaborations MRT Jakarta has forged with all stakeholders have realized the dream of presenting a safe, comfortable, fast, and timely public transportation service.



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commisioners' Report

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Beroperasinya MRT Fase 1 rute Lebak Bulus - Bundaran HI pada 24 Maret 2019 menjadi tonggak keberhasilan bagi Indonesia, khususnya Jakarta sebagai ibu kota, dalam menghadirkan moda transportasi dengan standar kualitas yang tinggi. Sebagai operator MRT, PT Mass Rapid Transit Jakarta (Persero), disebut juga "Perseroan", patut bangga atas keberhasilan tersebut. Tentunya, keberhasilan ini tak akan lepas dari kerja sama seluruh pihak, baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku implementor moda transportasi di Jakarta sekaligus sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan, maupun Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh jajarannya yang telah menjadi pemangku kepentingan sekaligus regulator dalam berbagai aspek.

The initiation of MRT Phase 1 operation of Lebak Bulus - Bundaran HI route on March 24, 2019 has become a milestone of success for Indonesia, especially Jakarta as the capital city, in presenting a mode of transportation with a high quality standard. As the MRT operator, PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda), also called the "Corporation", deserves to feel proud of this success. Certainly, this success would not have been possible without the collaborations between all parties involved, including the DKI Jakarta Provincial Government as the implementer of transportation modes in Jakarta and the Corporation's major shareholder, as well as the Government of the Republic of Indonesia as a stakeholder and regulator in various aspects.

Izinkan Dewan Komisaris menyampaikan sekilas laporannya dalam laporan tahunan Perseroan tahun 2019, yang akan menjadi bagian dalam pelaporan manajemen atas kinerja Perseroan di sepanjang tahun 2019, khususnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat.

Please allow the Board of Commissioners to briefly present its report in the 2019 Annual Report, which will become part of management's report on the Corporate performance throughout 2019, specifically in carrying out supervisory and advisory duties.

PENGAWASAN OLEH DEWAN KOMISARIS ATAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN STRATEGIS PERSEROAN YANG DILAKUKAN DIREKSI

The Board of Commissioners' Supervision on The Corporation Strategic Policies Implementation Carried Out by The Directors

Dewan Komisaris berperan sebagai pembawa aspirasi dari pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka memberikan nasihat dan masukan bagi Direksi dalam menerapkan kebijakan strategis Perseroan dan mewujudkan berbagai target yang telah dicanangkan.

The Board of Commissioners acts as the bearer of aspirations for all shareholders and stakeholders. The Board of Commissioners' supervisory duties are carried out with the objectives of providing advice and input to The Directors in implementing the Corporation's strategic policies as well as realizing the various targets that have been set.

Untuk itu, Dewan Komisaris dan Direksi berupaya untuk terus membangun hubungan yang harmonis dan strategis. Pengawasan Dewan Komisaris atas kebijakan strategis Direksi dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, Rapat Internal Dewan Komisaris, dan Rapat Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya (Komite Komisaris).

Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dilakukan dengan tujuan melakukan pemantauan penyelesaian konstruksi serta beroperasinya MRT Jakarta Fase 1, dan kesiapan pembangunan MRT Jakarta Fase 2 rute Bundaran HI-Ancol Barat. Di sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris melaksanakan 12 kali rapat internal, serta 12 kali rapat gabungan yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi dan komite sebagai organ pendukung. Rapat ini menjadi forum penting bagi Dewan Komisaris untuk dapat menerima seluruh laporan pengoperasian dan pemeliharaan MRT serta pengembangan bisnis yang dilakukan Direksi; termasuk penyelenggaraan Perseroan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas.

Pengawasan juga dilakukan secara langsung terhadap ketepatan waktu, kendala, risiko, serta mitigasinya dari perspektif masing-masing komite yang dimiliki Dewan Komisaris. Pengawasan ini dilakukan melalui *site visit* atau kunjungan ke paket pekerjaan konstruksi bersama komite, dengan pelaksanaan sebagai berikut:

- 23 Februari 2019, pemantauan kesiapan operasi komersial MRT di Stasiun Haji Nawi, Stasiun Cipete Raya, Stasiun Fatmawati, Depo Lebak Bulus.
- 25 Maret 2019, peresmian operasi komersial MRT, dan *ground breaking* konstruksi MRT Fase 2 di Stasiun Senayan dan Stasiun Bundaran HI.
- 17 September 2019, pemantauan ketersediaan daya dan fasilitas kelistrikan di Depo Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati.
- 14 Oktober 2019, pemantauan adanya laporan rembesan air di *back office* kantor Stasiun Bundaran HI.
- 23 Oktober 2019, pemantauan adanya laporan rembesan air di terowongan kereta di Stasiun Setiabudi dan Stasiun Dukuh Atas.

Agar fungsi pengawasan atas kebijakan strategis yang dilakukan Direksi dapat berjalan secara efektif, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota Dewan Komisaris.

As such, the Board of Commissioners and Directors strive to continue building a harmonious and strategic relationship. The Board of Commissioners' Supervision on the Directors' strategic policies is carried out through 3 (three) activities, namely Board of Commissioners' meeting with the Directors; Internal Board of Commissioners Meeting, and Board of Commissioners meeting with its supporting committees.

The Board of Commissioners' meetings with the Directors were held with the objectives of monitoring the MRT Jakarta Phase 1 construction and operation launch, as well as the readiness of the Bundaran HI - Ancol Barat route development of MRT Jakarta Phase 2. Throughout 2019, the Board of Commissioners has held 12 internal meetings, and 12 joint meetings attended by the Board of Commissioners, Directors and the supporting committees. These meetings became an important forum for the Board of Commissioners to receive all reports on MRT operations and maintenance, as well as business development efforts carried out by the Directors; including corporate governance in compliance with the rules and regulations applicable to incorporated companies.

Supervision was also directly carried out on timeliness, challenges, risks and mitigation strategies from the perspectives of each committee under the Board of Commissioners. This supervision was carried out through site visits or visits to a construction work package with the committees, with implementations as follows:

- *February 23, 2019, monitoring the readiness of MRT commercial operations in Haji Nawi Station, Cipete Raya Station, Fatmawati Station, and Lebak Bulus Depot.*
- *March 24, 2019, the inauguration of MRT commercial operations and the groundbreaking ceremony of MRT Phase 2 construction at Senayan and Bundaran HI stations. September 17, 2019, monitoring the availability of power and electricity facilities at Lebak Bulus Depot and Fatmawati Station.*
- *October 14, 2019, examining a water leakage report at the back office of Bundaran HI Station.*
- *October 23, 2019, examining water leakage reports in the train tunnels of Setiabudi and Dukuh Atas stations.*

To ensure that the supervisory function on the strategic policies carried out by the Board of Directors can run effectively, the Board of Commissioners delegated duties and responsibilities among board members.

LINGKUP PEMBAGIAN PERAN PENGAWASAN DAN KONSULTASI ANTAR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

The Division of Supervisory and Consultancy Duties among The Board of Commissioners' Members



BIDANG KEUANGAN DAN ANGGARAN
FINANCE AND BUDGETING



BIDANG KONSTRUKSI
CONSTRUCTION



BIDANG OPERASI DAN PEMELIHARAAN
OPERATIONS AND MAINTENANCE



BIDANG BISNIS DAN PENGEMBANGAN USAHA
BUSINESS AND BUSINESS DEVELOPMENT

Selain Dewan Komisaris, peran pengawasan juga dilakukan melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah ("BPBUMD"). Selaku pembina BUMD, BPBUMD melakukan pengawasan atas kinerja BUMD Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Fungsi pengawasan dijalankan Dewan Komisaris melalui berbagai masukan dan rekomendasi atas pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi di sepanjang tahun 2019. Berikut beberapa rekomendasi penting Dewan Komisaris kepada Direksi yang diberikan di tahun 2019.

1. Aspek Operasi & Pemeliharaan MRT Fase 1

- Persiapan strategi menuju rata-rata pengguna jasa 100 ribu per hari untuk tahun 2020.
- Menjaga aspek *service, security, dan safety* untuk membangun kepercayaan pengguna jasa.
- Peningkatan aspek *operation security*.
- Perbaikan kualitas *maintenance* secara terus-menerus.
- Evaluasi terhadap fasilitas yang ada dan mengoptimalkan penggunaannya untuk pengguna jasa MRT, termasuk menyiapkan strategi dan langkah-langkah untuk penambahan fasilitas dan integrasinya dengan moda lain.
- Peningkatan strategi penjualan *Multi Trip Ticket*.
- Persiapan menuju integrasi tiket dengan moda transportasi lain di Jabodetabek.

2. Aspek Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Fase 1

- Pengawasan penyusunan Peraturan Gubernur terkait Pengelola Kawasan Berorientasi Transit dan Panduan Rancang Kota.
- Tindak lanjut skema pembayaran berbasis teknologi informasi.
- Pemasangan iklan sesuai regulasi dan turut mempertimbangkan aspek teknis keamanan.
- Utilisasi area ritel di stasiun.

3. Aspek Konstruksi MRT Jakarta Fase 2

- Menyiapkan strategi agar pengadaan *Contract Package (CP)* tidak gagal dan tetap menjaga target penyelesaian proyek.
- Menyiapkan alternatif dan landasan kebijakan untuk pemberian CP kepada kontraktor lainnya.
- Menyiapkan landasan kebijakan dan memastikan tata kelola untuk penunjukan langsung.
- Menyelesaikan isu pemindahan utilitas dan pembebasan lahan untuk Depo di Ancol Barat.
- Melakukan kajian dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Republik Indonesia untuk skema pendanaan.

4. Aspek Governance, Risk, Compliance, dan Keuangan

- Pelaksanaan mitigasi dari *Top Risk Register*, baik untuk Operasi & Pemeliharaan MRT Jakarta Fase 1 maupun Konstruksi MRT Jakarta Fase 2.
- Menjaga tercapainya KPI dan program kerja Perseroan di tahun 2019.
- Penyerapan RKAP 2019 dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja.
- Menyetujui pengajuan RKAP 2020 oleh manajemen setelah proses kajian berlapis dan umpan balik oleh Dewan Komisaris maupun Komite.

Aside from the Board of Commissioners, the supervisory role was also carried out through the Regionally-owned Enterprise Development Agency (BPBUMD). As an ROE supervisor, BPBUMD oversaw the performance of DKI Jakarta Provincial ROEs, which was then reported to the DKI Jakarta Provincial Government.

The supervisory function was carried out by the Board of Commissioners through various input and recommendations on Corporate management activities by the Directors throughout 2019. The following is a list of important recommendations given by the Board of Commissioners to the Directors in 2019.

1. Operations & Maintenance Aspect of MRT Phase 1

- *Prepare strategies to reach an average of 100,000 passengers per day in 2020.*
- *Apply maintenance in the areas of service, security, and safety to improve passenger confidence.*
- *Improve operation security.*
- *Continuously improve maintenance quality.*
- *Evaluate existing facilities and optimize their utilization for MRT passengers, including preparing strategies and steps for facility additions and their integrations with other modes.*
- *Improve the Multi Trip Ticket selling strategy.*
- *Prepare for ticket integration with other modes of transportation in Jabodetabek.*

2. Business Development Aspect of MRT Jakarta Phase 1

- *Supervise the drafting of the Governor's Regulation related to TOD Areas Management and Urban Design Guidelines.*
- *Follow up on information technology-based payment schemes.*
- *Advertise in accordance with regulations while taking into considerations the technical aspect of security.*
- *Utilize the retail areas at the stations.*

3. Construction Aspect of MRT Jakarta Phase 2

- *Prepare a strategy to ensure that the Contract Package (CP) procurement does not fail and continue maintaining project deadline.*
- *Prepare alternatives and policy foundation for granting CPs to other contractors.*
- *Prepare a policy foundation and ensure governance for direct appointment.*
- *Resolve issues regarding utility transfer and land acquisition for the Depot in Ancol Barat.*
- *Conduct studies and provide recommendations to the DKI Jakarta Provincial Government and the Republic of Indonesia Government in the area of funding schemes.*

4. Governance, Risk, Compliance, and Financial Aspects

- *Conduct mitigation of the Top Risk Register, both for MRT Jakarta Phase 1 Operation & Maintenance and MRT Jakarta Phase 2 Construction.*
- *Ensure the accomplishments of KPIs and Corporate programs in 2019.*
- *Ensure absorption of 2019 RKAP by taking into consideration the effectiveness and efficiency of work program implementation.*
- *Approve the 2020 RKAP proposal prepared by management after a multi-layered review process and feedback from the Board of Commissioners and Committee.*

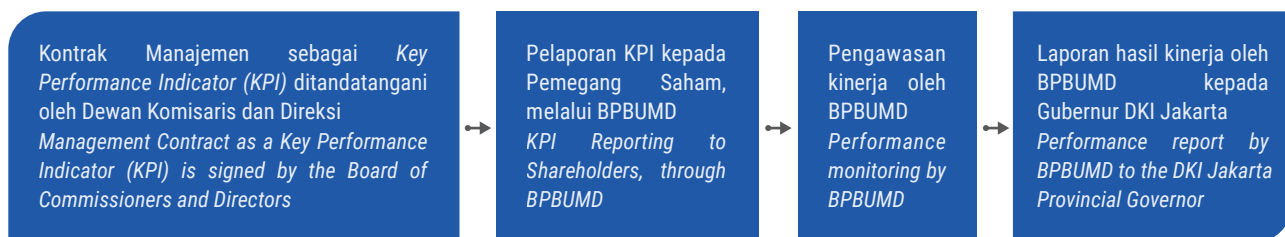
- Penyelesaian isu subsidi tahun 2019 dan penerimaan subsidi tahun 2020.
- Penyelesaian isu perhitungan subsidi tahun 2020 berdasarkan rumus subsidi pengguna jasa yang disepakati dengan pihak Pemerintah Provinsi.
- Persiapan dan aspek *governance* dari Perseroan menuju pembentukan 2 (dua) entitas anak dan Ventura Bersama (JV) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero).
- Pelaksanaan manajemen tata kelola dan risiko pada Teknologi Informasi. Pada era digital, untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik diperlukan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibutuhkan manajemen risiko bidang TIK antara lain risiko perencanaan TIK (*Enterprise Architecture*), risiko pengadaan perangkat TIK, risiko implementasi TIK dan risiko Tata kelola TIK. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa kinerja TIK dapat mendukung misi organisasi dan melindungi aset Perseroan.
- *Resolve subsidy issues in 2019 and receipts of the subsidy in 2020.*
- *Resolve 2020 subsidy calculation issues using the passenger subsidy formula which has been agreed with the Provincial Government.*
- *Set up preparation and governance aspects of the Corporation to work towards the establishment of 2 (two) subsidiaries and Joint Venture (JV) with PT Kereta Api Indonesia (Persero).*
- *Conduct execution of IT Risk Management and Governance. In the digital era, the role of Information and Communication technology is vital in establishing good Corporate Governance. Hence, an IT risk management system is fundamental to assure, among others, IT Enterprise Architecture risks, IT procurement risks, IT implementation risks, and IT Governance risks. These are all required to ensure that the IT Risk Management System supports the corporate missions as well as protecting corporate assets.*

PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI MENGENAI PENGELOLAAN PERSEROAN DAN DASAR PENILAIANNYA

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE IN CORPORATE MANAGEMENT AND THE BASIS OF ASSESSMENT

Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi menandatangani Kontrak Manajemen dengan Pemegang Saham yang diwakili oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk *Key Performance Indicator* (KPI) tahun 2019. Capaian atas KPI Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dilaporkan setiap 3 bulannya (triwulan) oleh Perseroan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD). BPBUMD selaku pembina BUMD kemudian melakukan pengawasan atas kinerja BUMD Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 88 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

The Board of Commissioners and the Board of Directors signed a Management Contract with Shareholders, who were represented by the DKI Jakarta Provincial Governor, regarding Key Performance Indicators (KPIs) for 2019. The achievements of the Board of Directors and Board of Commissioners' KPIs were reported every three months (quarterly) by the Corporation to the DKI Jakarta Provincial Government, through the ROE Development Agency (BPBUMD). BPBUMD as the advisory body then supervised the performance of the DKI Jakarta Provincial ROEs to be subsequently reported to the DKI Jakarta Provincial Governor, in accordance with Governor Decree No. 88 of 2003 concerning Coaching and Development of ROEs within the DKI Jakarta Provincial Government.



Figur 3.1. Alur Penilaian atas Kinerja Direksi
Figure 3.1. Flow of Assessment on The Board of Directors

Sesuai dengan Kontrak Manajemen yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi, penilaian terhadap kinerja Direksi melekat pada pengelolaan kinerja Perseroan berdasarkan target-target yang telah ditetapkan, yang meliputi aspek *ridership*, aspek konstruksi, aspek pengembangan usaha, dan aspek korporasi.

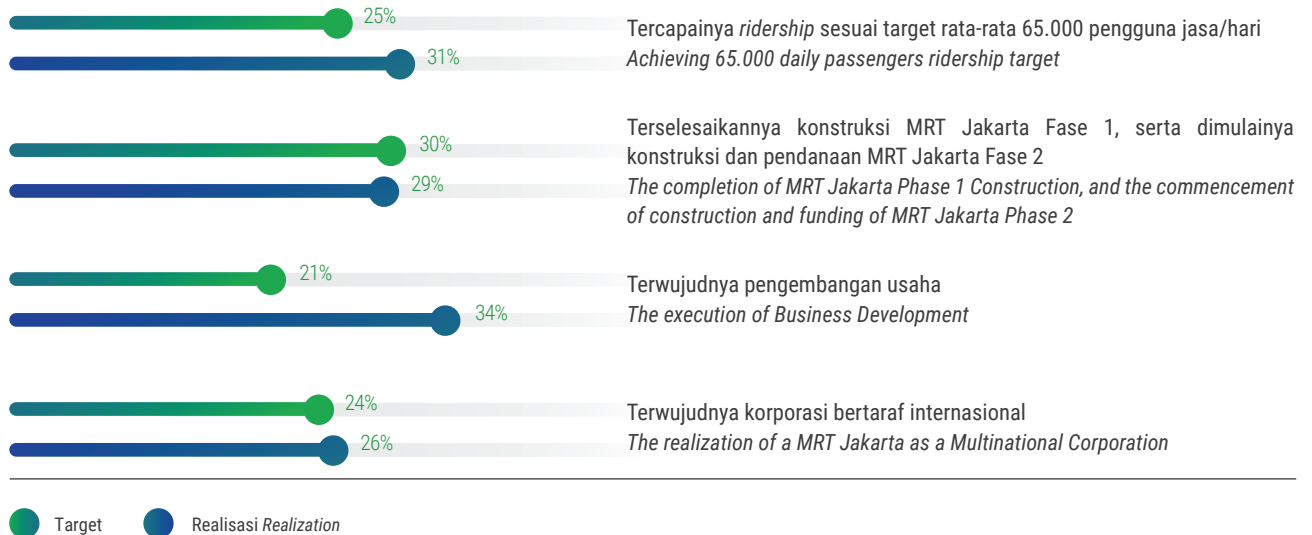
In accordance with the Management Contract signed by the Board of Commissioners and Directors, the assessment of the Directors' performance is inherent in the Corporate performance management that is based on the targets that have been set, which include ridership, construction, business development, and corporate aspects.

Berikut disampaikan pencapaian target kinerja sebagai penilaian bagi kinerja Perseroan yang melekat sebagai kinerja Direksi.

The following are the achievements of performance targets as an assessment of the Corporate performance inherent in the performance of the Directors.

PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PENILAIAN KINERJA DIREKSI

The Achievement on Strategic Targets Based on The Board of Directors' Performance Assessment



Grafik 3.1. Alur Penilaian atas Kinerja Direksi
Graphic 3.1. Flow of Assessment on The Board of Directors

Capaian penting untuk pengukuran kinerja Perseroan di atas, dan pandangan Dewan Komisaris terhadap pencapaian kinerja tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tercapainya *ridership* sesuai target rata-rata 65.000 pengguna jasa/hari mencapai 31%, lebih besar dari target 26%, yaitu:
 - Ketepatan perjalanan kereta mencapai 33%, lebih besar dari target 25%.
 - Jumlah aktual perjalanan kereta sesuai dengan yang direncanakan mencapai 33%, lebih besar dari target 25%.
 - Indeks Kesiapan Publik mencapai 26%, lebih besar dari target 25%.
 - Indeks Kepuasan Pelanggan mencapai 28%, lebih besar dari target 25%
2. Terselesaikannya konstruksi MRT Jakarta Fase 1 serta dimulainya konstruksi dan pendanaan MRT Jakarta Fase 2 mencapai 29%, lebih kecil dari target 30%, yaitu:
 - Progres fisik proyek MRT Jakarta Fase 1 mencapai 22%, atau sesuai target.
 - Progres fisik proyek MRT Jakarta Fase 2A (CP 200) mencapai 22%, lebih besar dari target 21,74%.
 - Persentase realisasi dana hibah dan pinjaman MRT Jakarta Fase 1 dan 2A mencapai 22%, lebih besar dari target 21,74%.
 - Terselesaikannya tender konstruksi dan jasa konsultasi MRT Jakarta Fase 2A mencapai 11%, lebih kecil dari target 13,04%.
 - Penugasan Engineering Design MRT Jakarta Koridor Timur-Barat mencapai 22%, atau sesuai target.
3. Terwujudnya pengembangan usaha mencapai 34%, lebih besar dari target 21%, yaitu:
 - Pendapatan non-tiket (sesuai RKAP) mencapai 112%, lebih besar dari target 51%.
 - Persentase penguatan dasar hukum untuk Kawasan

The significant achievements to measure the corporate performance as stated above, and the Board of Commissioners' views on the achievements can be described as follows:

1. *The achievement of Ridership with the average target of 65,000 passengers/day reached 31%, greater than the target of 26%, namely:*
 - *Train travel accuracy reached 33%, larger than the target of 25%.*
 - *Actual number of train trips as planned is 33%, larger than the target of 25%.*
 - *Public Readiness Index reached 26%, larger than the target of 25%.*
 - *Customer Satisfaction Index reached 28%, larger than the target of 25%.*
2. *The completion of MRT Jakarta Phase 1 construction and commencement of MRT Jakarta Phase 2 construction and funding reached 29%, lower than the target of 30%, namely:*
 - *The physical progress of MRT Jakarta Phase 1 project reached 22%, or on target.*
 - *The physical progress of MRT Jakarta Phase 2 project (CP 200) reached 22% of completion, larger than the 21.74% target.*
 - *The percentage of realization of MRT Jakarta grants and loans for Phase 1 and 2 reached 22%, larger than the target of 21.74%.*
 - *Completion of the construction tender and MRT Phase 2 consulting services reached 11%, smaller than the target of 13.04%.*
 - *MRT Jakarta East-West Corridor Engineering Design Assignment reached 22%, or on target.*
3. *The realization of business development reached 37%, greater than the 21% target, namely:*
 - *Non-Farebox Revenue (in accordance to RKAP) reached 112%, larger than the target of 51%.*
 - *The percentage of legal basis strengthening for the Transit Oriented*

Transit (KBT) di sepanjang koridor MRT mencapai 18%, atau sesuai dengan target.

- Persentase penyelenggaraan Kawasan KBT di seluruh koridor MRT Jakarta mencapai 31%, atau sesuai dengan target.

4. Terwujudnya Korporasi Bertaraf Internasional mencapai 26%, lebih besar dari target 24%, yaitu:

- Nilai *Risk Maturity* mencapai 22%, lebih besar dari target 18,18%.
- Nilai *Good Corporate Governance* (GCG) mencapai 18%, sesuai dengan target 18,18%.
- Level *Knowledge Management Maturity* mencapai 23%, lebih besar dari target 18,18%.
- *Incident Severity Rate* (*Frequency Rate* $\leq 0,4$ dan *Severity Rate* $\leq 0,2$) mencapai 45%, sesuai dengan target 45,45%.

Dewan Komisaris secara khusus menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah ditunjukkan oleh Direksi. Terutama dengan target pengembangan usaha yang berhasil dicapai dengan sangat baik, yang berdampak positif terhadap pencapaian pendapatan perdana serta laba yang ditorehkan. Dewan Komisaris berharap catatan dan rekomendasi Dewan Komisaris terkait persiapan pembangunan konstruksi MRT Jakarta Fase 2 dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Development (TOD) area along the MRT corridor reached 18%, or on target.

- *The percentage of operations of TOD area in all MRT Jakarta corridors reached 31%, or precisely on the target.*

4. *The realization of a multinational corporation reached 26%, greater than the target of 24%, namely:*

- *Risk Maturity value reached 22%, larger than the target of 18.18%.*
- *Good Corporate Governance (GCG) value reached 18%, in accordance with the target of 18.18%.*
- *Knowledge Management Maturity index reached 23%, larger than the target of 18.18%.*
- *Incident Severity Rate (Frequency Rate ≤ 0.4 and Severity Rate ≤ 0.2) reached 45%, in accordance with the target of 45.45%.*

The Board of Commissioners specifically expressed appreciation for the performance that has been demonstrated by the Directors. Especially for the business development targets that have been achieved very well, and have positively impacted the initial income and incised profits. The Board of Commissioners hopes that its notes and recommendations relating to the preparation of MRT Jakarta Phase 2 construction can be carried out properly and in accordance with the expected targets.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN OLEH DIREKSI BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW ON THE BUSINESS PROSPECTS PREPARED BY THE DIRECTORS

Dewan Komisaris bersama Komite dan organ pendukung Dewan Komisaris lainnya telah melakukan tinjauan atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKAP) tahun 2020 yang disusun Direksi. RKAP Perseroan untuk tahun 2020 yang menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) menunjukkan Perseroan telah menggunakan pendekatan komprehensif dalam menjalankan bidang usahanya, dimana aspek keuntungan dan efisiensi finansial, kepuasan pelanggan, perbaikan proses bisnis internal, maupun pengembangan dan pembelajaran SDM internal menjadi fokus korporasi. Dewan Komisaris berpandangan bahwa sasaran strategi, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut telah mencerminkan prospek usaha yang baik, dengan mempertimbangkan potensi peningkatan jumlah pengguna jasa dan standar pelayanan operasi, perluasan koridor jalur kereta, hasil pengembangan usaha non-tiket (NFB), serta ketersediaan dana yang ada.

Dengan RKAP 2020 yang menitikberatkan pada *establishment* Perseroan sebagai operator kereta berkelas dunia, Perseroan telah menetapkan target-target yang menantang dan lebih tinggi dibandingkan target korporasi tahun sebelum, di antaranya menargetkan pengguna jasa sebanyak 100.000 pengguna jasa/hari atau naik dari target rata-rata 65.000 pengguna jasa/hari pada tahun sebelum, target pendapatan non-tiket menjadi Rp421 miliar, naik dibandingkan pencapaian pendapatan non-tiket sebesar Rp207 miliar pada tahun 2019.

Begitu juga dalam aspek pengelolaan *Governance, Risk, dan Compliance* (GRC) dimana Skor GCG, Skor *Risk Maturity Level*, dan Skor *Knowledge Management Maturity* juga ditargetkan lebih tinggi dari tahun sebelum. Perseroan juga menetapkan target-target baru yang mencerminkan penguatan dan perluasan bisnis MRT Jakarta di tahun 2020 di antaranya

The Board of Commissioners together with its committee and other supporting organs have reviewed the Work Plan and Budget (RKAP) for 2020 as prepared by the Directors. The Corporation's RKAP for 2020 that uses the Balanced Scorecard (BSC) approach shows that the Corporation has used a comprehensive approach in running its business activities, where aspects of profitability and financial efficiency, customer satisfaction, improvement of internal business processes, as well as internal HC development and learning become the focus of the Corporation. The Board of Commissioners believes that the strategic objectives, programs and activities related to the aspects mentioned above have reflected good business prospects, taking into account the potential increase in the number of passengers and operational service standards, expansion of the railroad corridor, the results of non-Farebox business (NFB) developments, and the availability of funds.

With the 2020 RKAP, which focuses on the Corporation's establishment as a world-class train operator, the Corporation has set challenging targets that are higher than the previous year's corporate targets, including aiming for the average of 100,000 passengers / day or up from the average target of 65,000 passengers / day in the previous year, the NFB revenue target is set at Rp421 billion, an increase from the NFB revenue achievement of Rp207 billion in 2019.

Similar trend is found in the Governance, Risk and Compliance (GRC) aspects where the scores of GCG, Risk Maturity Level, and Knowledge Management Maturity are also set at higher figures than the previous year. The Corporation also set new targets that reflect the strengthening and expansion of the MRT Jakarta businesses in 2020, including setting a

penetapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan menjadi 'Top 5 aplikasi travel' untuk peningkatan pelayanan pengguna jasa, target pekerjaan konstruksi Fase 2, target kerja sama Koefisien Lantai Bangunan (KLB) untuk perkembangan bisnis, hingga target pembentukan anak perusahaan dan *Joint Venture*.

Secara umum Dewan Komisaris berpandangan bahwa seluruh target yang dicanangkan di tahun 2020 telah mencerminkan seluruh kekuatan dan keunggulan Perseroan. Target-target ini mencerminkan kapasitas dan potensi Perseroan yang telah menunjukkan pencapaiannya pada tahun pertama operasi komersial dan ditantang untuk memperoleh pencapaian yang lebih tinggi lagi di tahun 2020. Target-target di atas akan tercapai dengan kerja keras, kerja cepat, dan kerja sama seluruh jajaran Perseroan sehingga dapat mewujudkan fungsi MRT Jakarta sebagai solusi bagi kebutuhan moda transportasi publik di Jakarta.

Minimum Service Standards (SPM) and becoming a 'Top 5 travel application' in passenger service improvements, Phase 2 construction work targets, Floor Area Ratio (KLB) collaboration targets for business development, and the target of establishing a subsidiary and a Joint Venture.

In general, the Board of Commissioners views that all targets set for 2020 have reflected the Corporation's strengths and excellence. These targets reflect the capacity and potential of the Corporation, which has demonstrated its achievements in its first year of commercial operations and is challenged to achieve even more in 2020. The targets mentioned above will be achieved through hard work, time-efficiency, effectiveness, and cooperation between all levels of the Corporation to realize MRT Jakarta's function as a solution to the need for public transportation modes in Jakarta.

PANDANGAN DEWAN KOMISARIS ATAS PENGELOLAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) DI PERSEROAN DAN PERAN DEWAN KOMISARIS DALAM WBS PERSEROAN

BOARD OF COMMISSIONERS' VIEW AND ROLE ON THE CORPORATION'S WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) MANAGEMENT

Perseroan memiliki Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau *Whistleblowing System (WBS)* yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK/002/BOC-MRT/V/2017 dan No. SK/042-2/BOD-MRT/V/2017 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Pengelolaan pengaduan melalui WBS dilakukan oleh Divisi *Corporate Secretary* yang berada di bawah Direktorat Utama. Namun, Perseroan juga membentuk Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang bertugas memutuskan hasil validasi data/informasi laporan yang masuk melalui saluran WBS dan melaporkannya pada Direktur Utama dan Komisaris Utama.

Komite ini juga bertugas untuk melaporkan hasil validasi data/informasi laporan melalui saluran WBS kepada Komisaris Utama jika terlapor adalah Direksi, untuk kemudian diputuskan, apakah laporan dengan Direksi sebagai pihak terlapor dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.

Manajemen Perseroan melalui *Corporate Secretary* juga aktif melakukan sosialisasi adanya WBS Perseroan secara terbuka. Situs web Perseroan telah memuat informasi rinci tentang saluran pelaporan melalui WBS yang dapat diakses secara terbuka oleh pemangku kepentingan Perseroan dengan alamat www.jakartamrt.co.id/wbs.

Berdasarkan laporan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, di sepanjang tahun 2019 saluran WBS yang diberlakukan Perseroan menampung 14 pengaduan pelanggaran, dimana 13 di antaranya tidak terbukti dan selesai tanpa status tindak lanjut, serta 1 (satu) pengaduan ditindaklanjuti dengan bentuk tindak lanjut adalah teguran.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas komitmen Manajemen untuk mengembangkan WBS sebagai bagian dari penegakan prinsip GCG di lingkup Perseroan. Keterbukaan saluran WBS yang disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan menunjukkan niat besar Perseroan untuk dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam penegakan prinsip GCG.

The Corporation has a Whistleblowing System (WBS), which has been established through the Board of Commissioners and Directors Joint Decree No. SK/002/BOC-MRT/V/2017 and No. SK/042-2/BODMRT/V/2017 concerning Guidelines for Whistleblowing System. The management of complaints through WBS is carried out by the Corporate Secretary Division under the Main Directorate. However, the Corporation has also formed a Committee for the Whistleblowing System which is tasked with deciding the results of data validation / information reports that come through the WBS channel and report them to the President Director and the President Commissioner.

This committee is also tasked to report on the results of data validation / information reports through the WBS channel to the President Commissioner if the reported party is among the Directors, which will then be decided whether or not that report can proceed to the next stage.

The corporate management, through the Corporate Secretary, is also actively and openly conducting socialization of the Corporation's WBS. The Corporation's website has provided detailed information about the reporting channel through WBS that can be accessed openly by the corporate stakeholders at the jakartamrt.co.id/wbs.

Based on the report submitted to the Board of Commissioners, the WBS channel that was put in place by the Corporation has received 14 complaints of violations in 2019, 13 of which were not proven to be true and were completed without a follow-up status, while 1 (one) complaint was followed up with a formal reprimand.

The Board of Commissioners appreciates the management's commitment to develop WBS as part of GCG principles enforcement within the Corporate scope. The openness of the WBS channel which has been communicated to all stakeholders reflects the Corporation's great intention to involve the stakeholders in upholding GCG principles.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' SUPPORTING COMMITTEES' PERFORMANCE ASSESSMENT

Salah satu keberhasilan pelaksanaan peran pengawasan Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas secara aktif oleh organ-organ pendukungnya. Hingga akhir tahun 2019, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite dan 1 (satu) organ pendukung lainnya, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti, Komite Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pengusahaan, serta Sekretaris Dewan Komisaris. Keberadaan ketiga komite tersebut mengalami perubahan, dimana Komite Pemantau Risiko di tahun 2019 mendapatkan tugas tambahan menjadi Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti, serta Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun sebelumnya menjadi Komite SDM dan Pengusahaan.

Komite Audit berperan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi, mendorong penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkungan Perseroan dan meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan Perseroan dan Pengelolaan Risiko.

Sementara Komite SDM dan Pengusahaan dibentuk guna membantu tugas pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan pengelolaan SDM dan pengembangan usaha di lingkungan Perseroan agar berjalan sesuai dengan target dan aspirasi pemegang saham serta pemangku kepentingan.

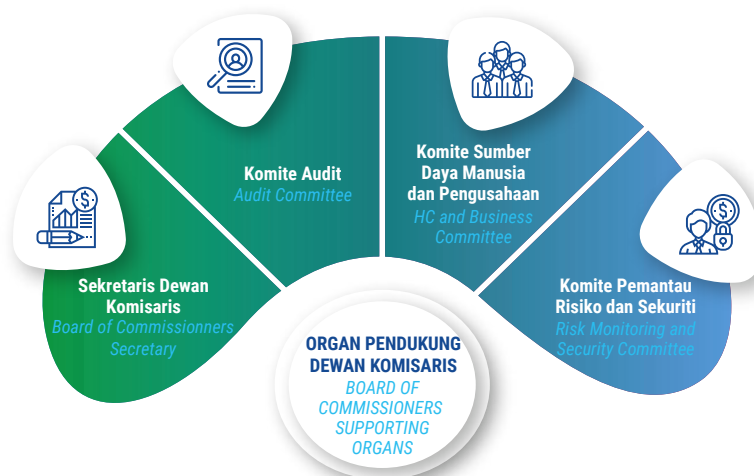
Penilaian kinerja organ pendukung di atas dilakukan berdasarkan evaluasi kehadiran masing-masing anggota komite dalam rapat, serta evaluasi ketepatan penyampaian laporan kepada Dewan Komisaris, baik ketepatan waktu maupun akurasi data. Dewan Komisaris memberikan apresiasinya kepada seluruh komite atas keaktifan yang telah ditunjukkan, termasuk keterlibatan dalam kunjungan kerja ke lapangan seperti yang telah disampaikan di atas. Dewan Komisaris berharap, seluruh upaya yang telah ditunjukkan komite dapat menjadi fondasi untuk dapat menunaikan tugasnya di tahun-tahun mendatang.

One of the successful implementations of the Board of Commissioners' supervision role is the active implementation of duties by its supporting organs. Until the end of 2019, the Board of Commissioners was assisted by 3 (three) committees and 1 (one) other supporting organ, which were the Audit Committee, the Risk Monitoring and Security Committee, the Human Capital (HC) and Business Committee, and the Board of Commissioners' Secretary. The roles of the three committees have undergone changes, in which the Risk Monitoring Committee received the additional duty to become the Risk Monitoring and Security Committee in 2019, and the previous year's Nomination and Remuneration Committee now becomes the HC and Business Committee.

The Audit Committee bears the role of assisting the Board of Commissioners in carrying out supervision, providing input and recommendations to the Directors, encouraging the implementation of GCG principles within the Corporation and improving the quality of disclosure and financial reporting. Risk Monitoring Committee is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties on the Corporation.

Corporation and risk management. While the HC and Business Committee was formed to assist the Board of Commissioners in monitoring and ensuring that the human capital management and business development efforts within the Corporation are carried out in alignment with the targets and aspirations of the Shareholders and Stakeholders.

The three committees' performances are assessed based on the attendance evaluation of each committee member at meetings, as well as report submission efficiency to the Board of Commissioners in terms of timeliness and data accuracy. The Board of Commissioners extends its appreciation to all committees for their active roles, including their involvements in field visits as mentioned above. The Board of Commissioners hopes that all the efforts made by the committees can become the foundation to carry out their duties in the coming years.



Figur 3.2. Alur Penilaian atas Kinerja Direksi
Figure 3.2. Flow of Assessment on The Board of Directors Performance

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS' STRUCTURE

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019 dan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS No. 46 tanggal 26 Juni 2019, Dewan Komisaris mengalami perubahan susunan keanggotaan. Berikut disampaikan kronologis susunan keanggotaan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2019.

Based on the Shareholders' Circular Resolution dated May 31, 2019 and the Shareholders' Decision Statement Outside the GMS No. 46 dated June 26, 2019, the Board of Commissioners underwent a change in the structure of its membership. The following is the chronology of the Board of Commissioners' membership structure throughout 2019.

KRONOLOGIS SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2019

Chronology of The Board of Commissioners' Composition Throughout 2019

| 1 Januari-31 Mei 2019 <i>January 1 – May 31, 2019</i> | 31 Mei-31 Desember 2019 <i>May 31 – December 31, 2019</i> | Keterangan <i>Remarks</i> |
|---|---|--|
| Rukijo (Plt. Komisaris Utama/ <i>Acting President Commissioner</i>) | Rukijo (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019, Rukijo tidak lagi menjabat Plt. Komisaris Utama. Beliau kembali menduduki jabatan Komisaris. <i>Based on the Shareholders' Circular Decision Outside the GMS on May 31, 2019, Rukijo no longer served as Acting President Commissioner. He returned to the position of Commissioner.</i> |
| Yusmada Faizal (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | | Yusmada Faizal tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 31 Mei 2019. <i>Yusmada Faizal no longer served on the Board of Commissioners as of May 31, 2019.</i> |
| Zulfikri (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | Zulfikri (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | |
| Mukhtasor (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | Mukhtasor (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | |
| | M.Syaugi (Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>) | M.Syaugi duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019. <i>Muhammad Syaugi has served on the Board of Commissioners since the Shareholders' Circular Decision Outside the GMS on May 31, 2019.</i> |
| | Adnan Pandu Praja (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | Adnan Pandu Praja duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019. <i>Adnan Pandu Praja has served on the Board of Commissioners since the Shareholders' Circular Decision Outside the GMS dated May 31, 2019.</i> |

Tabel 3.1
Table 3.1

Dengan perubahan di atas, jumlah anggota Dewan Komisaris di akhir tahun 2018 dan akhir tahun 2019 mengalami perubahan dari 4 (empat) orang menjadi 5 (lima) orang. Berikut susunan keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019.

With the above changes, the number of the Board of Commissioners' members at the end of 2018 and 2019 has changed from 4 (four) to 5 (five) members. The following is the structure of the Board of Commissioners' membership as of December 31, 2019.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2019*Board of Commissioners' Composition as of December 31, 2019*

| Nama <i>Name</i> | Jabatan <i>Position</i> | Masa Jabatan <i>Term of Office</i> | Periode Jabatan <i>Period of Office</i> |
|----------------------------|--|--|---|
| M. Syaugi | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | 31 Mei 2019-RUPS Tahun 2023 <i>May 31, 2019 - 2023 AGMS</i> | Ke-1 1 st |
| Rukijo | Komisaris <i>Commissioner</i> | 10 Agustus 2015-RUPS Tahun 2020 <i>August 10, 2015 - 2020 AGMS</i> | Ke-1 1 st |
| Zulfikri | Komisaris <i>Commissioner</i> | 4 Mei 2018-RUPS Tahun 2022 <i>May 04, 2018 - 2022 AGMS</i> | Ke-1 1 st |
| Mukhtasor | Komisaris <i>Commissioner</i> | 29 Oktober 2018-RUPS Tahun 2022 <i>October 29, 2018 - 2022 AGMS</i> | Ke-1 1 st |
| Adnan Pandu Praja | Komisaris <i>Commissioner</i> | 31 Mei 2019-RUPS Tahun 2023 <i>May 31, 2019 - 2023 AGMS</i> | Ke-1 1 st |

Tabel 3.2
Table 3.2

Keputusan terkait alasan pergantian dan perubahan susunan dan komposisi keanggotaan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi hak dari pemegang saham Perseroan.

Decisions regarding the reasons behind replacements and changes in the structure and composition of the Board of Commissioners are fully the rights of the Corporate shareholders.

AKHIR KATA

CLOSING REMARKS

Dengan beroperasinya MRT Fase 1, Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih atas seluruh kolaborasi dan kerja sama yang telah tercipta, antara Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta seluruh pemangku kepentingan. Demikian pula dengan dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan Direksi dan seluruh karyawan Perseroan, izinkan Dewan Komisaris menyampaikan rasa bangga. Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih atas dukungan, masukan, dan arahan yang diberikan semua pihak hingga akhirnya MRT Fase 1 dapat beroperasi dengan baik. Dukungan ini akan menjadi modal bagi Perseroan untuk dapat mengoperasikan MRT dengan standar kualitas yang tinggi, sekaligus menghadirkan moda transportasi publik yang dapat memberikan solusi atas kemacetan Jakarta.

Jakarta, 24 Maret 2020

With the commencement of MRT Phase 1 operations, the Board of Commissioners would like to express its gratitude for all the collaborations and cooperations that have been established between the Republic of Indonesia Government, the DKI Jakarta Provincial Government, and all stakeholders. Likewise with the dedication and hard work demonstrated by the Directors and all employees of the Corporation, please allow the Board of Commissioners to express its pride. The Board of Commissioners would also like to express its gratitude for the support, input and direction given by all parties that have allowed the MRT Phase 1 to operate properly. The support will become an asset for the Corporation to operate the MRT with high quality standards, while presenting a mode of transportation that can provide solutions to Jakarta's traffic congestions to the public.

Jakarta, March 24, 2020

Atas nama Dewan Komisaris PT Mass Rapid Transit Jakarta
On behalf of PT Mass Rapid Transit Jakarta's Board of Commissioners



M. SYAUGI
Komisaris Utama
President Commissioner





- 1. WILLIAM P. SABANDAR**
Direktur Utama
President Director
- 2. SILVIA HALIM**
Direktur Konstruksi
Construction Director
- 3. TUHIYAT**
Direktur Keuangan dan
Manajemen Korporasi
*Finance and Corporate
Management Director*
- 4. MUHAMMAD EFFENDI**
Direktur Operasi
dan Pemeliharaan
*Operations and
Maintenance Director*
- 5. GHAMAL PERIS**
Direktur Pengembangan
Bisnis
*Business Development
Director*







Bundaran HI

KEBERHASILAN PT MRT JAKARTA (PERSERODA) MENYELESAIKAN KONSTRUKSI DAN MEMULAI OPERASI KOMERSIAL FASE 1 RUTE LEBAK BULUS - BUNDARAN HI MERUPAKAN HASIL KOLABORASI BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN. DIREKSI DAN SELURUH JAJARAN PT MRT JAKARTA MENGUCAPKAN APRESIASI SETINGGI-TINGGINYA ATAS KOMITMEN DAN KERJA SAMA SEMUA PIHAK.

The success of PT MRT Jakarta (Perseroda) in completing the construction works and initiating commercial operation of MRT Jakarta Phase 1 route from Lebak Bulus to Bundaran HI station is the result of collaborations established between various stakeholders. The Directors and all management of PT MRT Jakarta would like to extend its utmost appreciation to the commitment and cooperation of all parties.

LAPORAN DIREKSI

Directors' Report

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Mengawali Laporan Direksi, izinkan saya atas nama seluruh jajaran Manajemen dan karyawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan kerja samanya, sehingga MRT Jakarta dapat menyelesaikan konstruksi Fase 1 rute Lebak Bulus-Bundaran HI dan mulai beroperasi dengan baik. Beroperasinya MRT Jakarta dan seluruh kegiatan pendukungnya menunjukkan komitmen besar Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menghadirkan moda transportasi modern sebagai solusi mengatasi kemacetan Jakarta. Kita berharap beroperasinya MRT akan berintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya sehingga memberikan jawaban atas persoalan mobilitas dan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat Jakarta.

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

To begin with the Directors' Report, allow me on behalf of all Management and employees to thank all parties for their collaboration, that enables MRT Jakarta to complete the Phase 1 construction from B uluLse bakto Bundaran HI and successfully launch its operation. The operation of MRT Jakarta and its supporting activities shosw s the the Government's strong commitment together with stakeholders in presenting a modern mode of transportation as a solution to overcome traffic congestion in Jakarta. We hope that MRT will be able to integrate with other modes of transportation in order for it to be able to bring about solution to the people's mobility, as well as improving welfare of the people of Jakarta.

CAPAIAN STRATEGIS TAHUN 2019: BEROPERASINYA MRT FASE 1 RUTE LEBAK BULUS - BUNDARAN HI

Strategic Achievements of 2019: Operation of MRT Phase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI

Mengacu pada Akta Pendirian dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Perseroda) sebagaimana terakhir kali telah diubah dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), Perseroan memiliki 3 mandat utama, yaitu:

Referring to the Deed of Establishment and the DKI Jakarta Provincial Government Regulation No. 3 Year 2008 on the Establishment of Regional Government Owned Enterprise Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta (Perseroda), most recently amended by the Regional Regulation of DKI Jakarta Province No. 9 of 2018 On the Jakarta MRT Limited Liability Company (Regional Corporation), the Corporation has 3 (three) main mandates, which are:

1. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana;
2. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana;
3. Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta depo dan kawasan sekitarnya.

Beroperasinya MRT dan seluruh sarana pendukungnya memperkuat pelaksanaan ketiga mandat tersebut, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan prasarana MRT, penyelenggaraan sarana MRT, dan pengembangan bisnis di Stasiun MRT dan kawasan sekitarnya. Sejak 24 Maret, Perseroan memulai kegiatan operasi komersial dan pengembangan bisnis pada seluruh fasilitas dan jalur MRT Jakarta.

Setelah melalui fase uji coba sistem di akhir tahun 2018 dan uji coba operasi di awal tahun 2019, MRT Jakarta resmi beroperasi secara komersial pada 24 Maret 2019. Rute Fase 1 Lebak Bulus–Bundaran HI ini terdiri dari jalur layang (*Elevated*) dan jalur bawah tanah (*Underground*) dengan total 13 stasiun perhentian. Jalur layang membentang ±10 km dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja, dengan 7 (tujuh) stasiun layang, yaitu Stasiun Lebak Bulus Grab dan Depo kereta yang dibangun di permukaan tanah (*at grade*) berdekatan dengan stasiun ini, Stasiun Fatmawati, Stasiun Cipete Raya, Stasiun Haji Nawi, Stasiun Blok A, Stasiun Blok M BCA dan Stasiun ASEAN. Jalur ini tersambung dengan jalur bawah tanah berupa terowongan yang membentang ±6 km, terdiri dari 6 (enam) stasiun bawah tanah, yaitu Stasiun Senayan, Stasiun Istora Mandiri, Stasiun Bendungan Hilir, Stasiun Setiabudi Astra, Stasiun Dukuh Atas BNI, dan Stasiun Bundaran HI.

1. Provision of urban public railway infrastructure covering MRT facility construction, operations, maintenance, and management;
2. Provision of urban public railway facilities covering MRT facility construction, operations, maintenance, and management;
3. Development and management of property / businesses at stations and nearby areas, as well as depots and its surrounding areas.

The operation of MRT and all supporting facilities enhanced the execution of the three mandates, which can be interpreted simply as the operation of MRT infrastructure, facilities, and business development in MRT Stations and surrounding areas. Starting March 24, the Corporate commenced commercial operations and business development activities in all Jakarta MRT facilities and lines.

Following the try out system phase from the end of 2018 to early 2019, MRT Jakarta Phase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI route officially commenced commercial operation on March 24, 2019. This Phase 1 route consists of elevated and underground lines with a total of 13 stop stations. The elevated lines extends ±10km from the Lebak Bulus area to Sisingamangaraja, with 7 (seven) elevated stations, namely the Lebak Bulus Grab Station and the Train Depot which are built on ground surface (*at grade*) adjacent to these following stations, Fatmawati Station, Cipete Raya Station, Haji Nawi Station, Blok A Station, Blok M BCA Station and ASEAN Station. This line is connected by an underground line in the form of a tunnel that stretches ±6km, consisting of 6 (six) underground stations, namely Senayan Station, Istora Mandiri Station, Bendungan Hilir Station, Setiabudi Astra Station, Dukuh Atas BNI Station, and Bundaran HI.



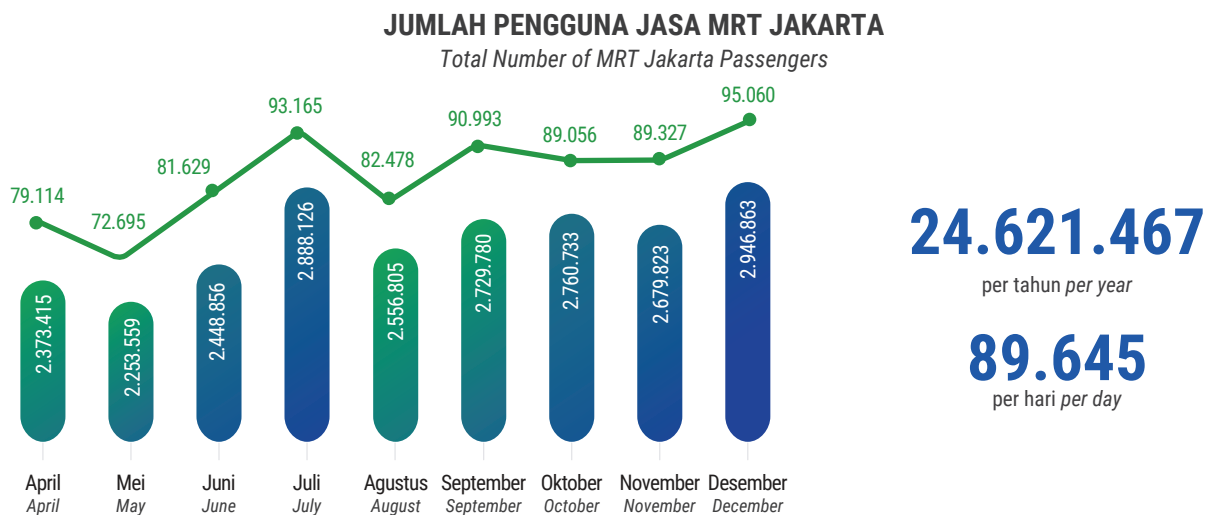
Gambar 3.1. Peta MRT Jakarta Fase 1
Image 3.1. Map of MRT Jakarta Phase 1

Sejak dimulainya operasi komersial hingga 31 Desember 2019, layanan kereta MRT beroperasi mulai pukul 05:00 WIB hingga 24:00 WIB. Layanan interval kedatangan kereta (*headway*) dilakukan setiap 5 (lima) menit pada jam sibuk pukul 07:00-09:00 Senin-Jumat, dan setiap 10 menit pada jam biasa Senin-Minggu. Di hari biasa, Grafik Perjalanan Kereta (Gapeka) berjumlah 285 perjalanan per hari, sedangkan Gapeka pada hari Sabtu dan Minggu adalah sebanyak 219 perjalanan per hari. Terdapat pengurangan jumlah Gapeka pada hari Sabtu dan Minggu yang disebabkan oleh perubahan *headway* kedatangan kereta pada jam sibuk di hari biasa.

Since the beginning of its commercial operation until December 31, 2019, the MRT train service operates from 05.00 am to 12 midnight. The train headway is set every 5 (five) minutes during rush hour at 07:00 - 09:00 on Monday - Friday, and every 10 minutes during normal hours on Monday - Sunday. On normal days, the Train Travel Chart (Gapeka) totals 285 trips per day, while Gapeka on Saturday and Sunday totals 219 trips per day. There is a reduction in the number of Gapeka on Saturdays and Sundays caused by changes in the headway of train arrivals during rush hour on weekdays.

Jumlah pengguna jasa MRT di sepanjang tahun 2019 sebanyak 24.621.467 pengguna jasa, dengan rata-rata 89.645 pengguna jasa per hari.

The number of MRT passengers throughout 2019 was 24,621,467 passengers, with an average of 89,645 passengers per day.



*Grafik perhitungan jumlah pengguna jasa dimulai dari 1 April 2019 karena 24-31 Maret 2019 merupakan periode uji coba gratis MRT Jakarta.

*The graph for the calculation of total passengers starts from April 01, 2019 as on March 24 - 31, 2019 is a free trial period for MRT Jakarta.

Grafik 3.2
Graphic 3.2

Beroperasinya MRT Jakarta menjadi dasar bagi Perseroan untuk memulai pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun serta Depo dan kawasan sekitarnya. Rencana pengembangan bisnis telah dilakukan pada beberapa tahun sebelumnya, dengan model bisnis yang berpijak pada pengelolaan properti di stasiun serta Depo dan kawasan sekitarnya. Skema bisnis yang dikembangkan antara lain kerja sama periklanan mencakup penyediaan ruang iklan dalam area stasiun, hak penamaan stasiun, kemitraan pada layanan kepada pengguna jasa seperti kartu pembayaran dan persinyalan telekomunikasi, serta bisnis ritel mencakup pengelolaan tenan reguler dan tenan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Commercial operation of MRT Jakarta became the basis for the Corporation to start developing and managing property or business in stations as well as Depots and its surrounding areas. Business development plan which has been carried out in the previous years, applying the business model in which refers to property management in stations as well as Depots and its surrounding areas. Developed business schemes are, among others, advertising partnership which covers advertising spaces in stations, naming rights, partnership for passenger services such as prepaid cards and telecommunication signal, as well as retail business which accommodates regular tenants and MSME's tenants.

Pada skema bisnis periklanan, Perseroan mengembangkan 2 (dua) jenis periklanan. Pertama, adalah penempatan iklan terpampang baik pada sarana maupun prasarana MRT, dimana Perseroan menggandeng mitra strategis dalam pengelolaan periklanan di stasiun dan *rolling stock*. Proses penunjukan mitra strategis telah melalui beberapa tahapan yang dilakukan di tahun 2018. Mitra strategis yang telah

In the advertising business scheme, the Corporation develops 2 (two) types of advertising. First, ad placement is displayed both on MRT facilities and infrastructure, where the Corporation cooperates with strategic partners in managing advertising at stations and *rolling stock*. The process of appointing a strategic partner was through several stages to operate and manage all inventory of advertising media in the station

ditunjuk memiliki hak untuk mengoperasikan dan mengelola seluruh inventori media periklanan di area stasiun dan *rolling stock*, yang terdiri dari 13 stasiun dan 16 *rolling stock*.

Dalam kerja sama tersebut, Perseroan menerapkan skema bagi hasil dengan *minimum guarantee* per tahun. Kerja sama diterapkan selama 20 tahun dengan harapan pengembangan media periklanan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas media iklan pada sarana dan prasarana MRT.

Kedua, adalah Hak Penamaan Stasiun (*Naming Rights*) yang dikelola langsung oleh Perseroan. Pertama melalui sistem lelang langsung selama 10 tahun. Selanjutnya, melalui penawaran kepada calon mitra potensial dengan durasi kontrak 5 (lima) tahun. Dari sistem lelang, Perseroan memperoleh mitra untuk *Naming Rights* 3 (tiga) stasiun, yaitu Stasiun Dukuh Atas-BNI, Stasiun Setiabudi-Astra, dan Stasiun Istora-Mandiri. Sedangkan pada model penawaran, Perseroan mendapatkan 2 (dua) mitra untuk *Naming Rights* Stasiun Lebak Bulus - Grab dan Stasiun Blok M - BCA.

Untuk skema bisnis *merging product*, Perseroan mengembangkan berbagai manfaat kepada pengguna jasa MRT melalui layanan telekomunikasi dan *acceptance card*. Pada layanan telekomunikasi, konektivitas selular dan wifi yang beroperasi di Stasiun MRT merupakan kerja sama Perseroan dengan mitra strategis. Sedangkan *acceptance card* merupakan kerja sama penerimaan uang elektronik perbankan dalam rangka meningkatkan layanan dan memberikan kemudahan pembayaran kepada pelanggan, dimana Perseroan telah menjalin kerja sama dengan 5 (lima) bank untuk durasi 2 (dua) tahun.

Pada skema bisnis ritel yang merupakan pengelolaan tenan di stasiun, Perseroan melakukan seleksi baik melalui kategori maupun standarisasi layanan dari masing-masing tenan. Untuk tenan reguler dipilih melalui proses seleksi pada periode tertentu. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tenan yang memenuhi standar MRT untuk melayani pengguna jasa selama berada di stasiun. Skema bisnis yang digunakan adalah penetapan sewa tetap dan pembayaran biaya operasional (listrik dan air), serta penetapan bagi hasil yang dievaluasi setiap bulannya. Terdapat 3 (tiga) kategori untuk tenan reguler, yaitu Makanan & Minuman, Swalayan Mini, dan Fesyen & Aksesoris. Sedangkan tenan UMKM ditempatkan pada 3 (tiga) Stasiun MRT yang strategis dengan angka laju penumpang yang tinggi, yaitu Stasiun Lebak Bulus Grab, Stasiun Fatmawati, dan Stasiun Dukuh Atas BNI. Perseroan bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) melakukan proses kurasi untuk memilih tenan UMKM dari 3 (tiga) kategori, yaitu kuliner, fesyen, dan kriya. Pendaftaran seleksi tenan UMKM telah dilakukan untuk memilih 14 tenan, yang terdiri atas 7 (tujuh) UMKM kuliner, 4 (empat) UMKM fesyen, dan 3 (tiga) UMKM kriya.

Keberhasilan beroperasinya MRT Fase 1 adalah kerja sama seluruh pihak, baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan BAPPENAS. Demikian juga dengan partisipasi dunia industri dan pelaku usaha yang mendukung kerja sama bisnis yang dikembangkan Perseroan. Perencanaan yang matang dan sistem serta lingkungan yang dibentuk dalam seluruh

to operate and manage all inventory of advertising media in the station area and rolling stock, which consists of 13 stations and 16 rolling stock.

In this collaboration, the Corporation implemented a profit sharing scheme with a minimum guarantee per year. The collaboration is set for 20 years hoping that the development of advertising media will be carried out continuously to improve its quality on MRT facilities and infrastructure.

Second, is the Station Naming Rights which is managed directly by the Corporation. The first method was through an auction system with a duration of a Naming Rights contract for 10 years, and then making an offer to potential partners with a contract duration of 5 (five) years. From the auction system, the Corporation obtained partners for the Naming Rights of three stations, namely: Dukuh Atas Station - BNI, Setiabudi Station - Astra, and Istora Station - Mandiri. Whereas in the offering model, the Corporation joined forces with two partners for the Naming Rights of Lebak Bulus - Grab Station and Blok M - BCA Station.

For the merging product business scheme, the Corporation developed various benefits for MRT passengers through telecommunications services and acceptance cards. In the telecommunication services, cellular and wifi connectivity operating at MRT Stations is achieved through the cooperation between the Corporation with strategic partners. While acceptance cards are cooperation in receiving electronic banking money in order to improve services and provide ease of payment for passengers, where the Corporation has cooperated with 5 (five) banks for a 2 (two) year agreement.

In the retail business scheme which is the management of tenants at stations, the Corporation selects both through categories and standardization of services of each tenant. For regular tenants the selected process are conducted in certain periods. This was done in order for tenants to meet MRT standards to serve passengers at stations. The business scheme used is of fixed rent and payment of operational costs (electricity and water), and revenue sharing which is evaluated every month. There are 3(three) categories for regular tenants, namely Food & Beverages, Convenience Store, and Fashion & Accessories. While MSME's tenants are placed in three strategic MRT Stations with high traffic numbers, namely Lebak Bulus Grab Station, Fatmawati Station, and Dukuh Atas BNI. The Corporation collaborates with the Creative Economy Agency (BEKRAF) to carry out a curation process to select MSME's tenants from three categories, namely culinary, fashion, and crafts. Registration for the selection of M SME's tenants has been conducted with 14 tenants, consisting of 7 (seven) culinary MSME's tenants, 4 (four) fashion, and 3 (three) craft.

The successful cooperation of all parties, both the DKI Jakarta Provincial Government and the Government of the Republic of Indonesia, in this case the Transportation Ministry, Finance Ministry, and National Development Planning Agency (BAPPENAS). Industries and businesses also play a part in supporting business cooperation developed by the Corporation. Careful planning and the system and also the environment formed in the whole range of MRT facilities and infrastructure have encouraged the people of

membentuk kebudayaan baru dan mampu menyamakan dirinya dengan kota-kota maju lainnya di dunia.

Jakarta to form new cultures and be able to equate themselves with other developed cities in the world.

INISIASI STRATEGIS TAHUN 2019: KONSTRUKSI MRT FASE 2 BUNDARAN HI-ANCOL BARAT

STRATEGIC INITIATION IN 2019: MRT PHASE 2 CONSTRUCTION BUNDARAN HI - ANCOL BARAT

Sejalan dengan telah selesainya tahapan konstruksi pada MRT Fase 1, di tahun 2019 Perseroan mulai melakukan *Engineering Study* pada rencana konstruksi MRT Fase 2 yang dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu Fase 2A (rute Bundaran HI-Kota) dan Fase 2B (rute Kota-Ancol Barat). Paket Kontrak Fase 2A terdiri atas 6 paket kontrak, yaitu:

1. CP 200 konstruksi D-Wall RSS di Kawasan Medan Merdeka
2. CP 201 konstruksi rute Bundaran HI-Harmoni
3. CP 202 konstruksi rute Harmoni-Mangga Besar
4. CP 203 konstruksi rute Mangga Besar-Kota
5. CP 205 konstruksi rel dan instalasi sistem perkeretaapian
6. CP 206 pengadaan *Rolling Stock*.

Pada tanggal 17 Mei 2019, Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan Persetujuan Prinsip atas rencana perubahan lokasi Depo ke Ancol Barat. Kemajuan tahapan dari masing-masing paket pekerjaan adalah sebagai berikut:

- CP 200: Konstruksi dinding diafragma Gardu Induk bawah tanah MRT Jakarta di Kawasan Medan Merdeka telah dirampungkan.
- CP 201: proses tender telah berlangsung sejak pengumuman pada 24 Mei 2019, dengan status per 31 Desember 2019 telah dilakukan Evaluasi Finansial dan menunggu persetujuan JICA. *Contract Award* ditargetkan pada bulan Januari 2020 dan *Commencement date* pada bulan Maret 2020.
- CP 202–203: persetujuan JICA telah diterima pada tanggal 2 Agustus 2019. Per 31 Desember 2019, proses tender dinyatakan gagal karena tidak adanya dokumen penawaran hingga batas waktu 4 November 2019.

Perseroan telah mengundang calon peserta tender pada tanggal 17 November 2019 untuk mendapat masukan terkait penyebab tender gagal dan perbaikan serta perubahan yang harus dilakukan. Pelaksanaan tender CP 202-203 yang beririsan dengan CP 201 mengakibatkan sumber daya peserta tender yang terbatas menjadi salah satu faktor penyebab tidak adanya pemasukan Dokumen Penawaran. Hal ini tidak terlepas dari akumulasi keterlambatan jadwal dimulainya tender CP 201 karena proses perizinan pembangunan Stasiun Monas (CP 201) di Kawasan Medan Merdeka yang memerlukan waktu panjang.

- CP 205: Saat ini Dokumen Tender CP 205 sedang dalam tahap reviu oleh JICA, Perseroan akan melaksanakan tender CP 205 setelah persetujuan dari JICA diperoleh.
- CP 206: Saat ini Dokumen Tender CP 206 sedang dalam tahap reviu oleh JICA, Perseroan akan melaksanakan tender CP 206 setelah persetujuan dari JICA diperoleh.

In line with the completion of MRT Phase 1 construction in 2019, the Corporation began the MRT Phase 2 which was divided into two stages, Phase 2A (Bundaran HI - Kota route) and Phase 2B (Kota-Ancol Barat route). The MRT Phase 2A consists of 6 (six) contract packages, which are:

1. *CP 200 D-Wall RSS Construction at Medan Merdeka Area*
2. *CP 201 construction of Bundaran HI - Harmoni route*
3. *CP 202 construction of Harmoni - Mangga Besar route*
4. *CP 203 construction of Mangga Besar - Kota route*
5. *CP 205 construction of Trackwork & installation of Railway Systems*
6. *CP 206 procurement of Rolling Stock*

In May 17, 2019, the DKI Jakarta Governor issued a Principle Approval regarding the location change of Depot to Ancol Barat. The progress of each contract package are as follows:

- *CP 200: Construction of the MRT Jakarta underground Receiving Substation diaphragm wall in Medan Merdeka Area has been completed.*
- *CP 201: the tender process has taken place since the announcement was made on May 24, 2019, with status as of December 31, 2019, Financial Evaluation has been carried out and awaiting for concurrence of JICA. Contract Award is targeted in Januari 2020 and the Commencement date set in March 2020.*
- *CP 202 – 203: Concurrence of JICA was accepted on August 2, 2019. As of December 31, 2019, the tender process was declared as Tender Failure due to the absence of bid submission until the deadline set on November 4, 2019.*

The Corporation has invited potential bidders on November 17, 2019, to receive feedback related to the cause of the failed tender, improvement and adjustment that must be made. The simultaneous tender schedule for CP 202-203 with CP 201 resulted in the lack of resources from Tender participants being one of the factors causing the absence of bid submission. This is accumulatively caused by the delay in CP 201 tender due to the prolonged coordination and approval process in the construction of Monas Station (CP 201) in Medan Merdeka Area.

- *CP 205: Tender Document CP 205 is currently under JICA's review. The Corporation will proceed the Tender CP 205 when concurrence from JICA has been obtained.*
- *CP 206: Tender Document CP 206 is currently under JICA's review. The Corporation will proceed the Tender CP 206 when concurrence from JICA has been obtained.*

Keberhasilan Perseroan dalam menyelesaikan proses konstruksi MRT Fase 1 yang sesuai dengan target waktu, target dana, dan target kualitas, menjadi dasar utama bagi optimisme untuk memulai proses konstruksi MRT Fase 2. Penyelesaian tahap konstruksi dan beroperasinya MRT Fase 1 akan menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu dari sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta pada masa yang akan datang.

The success in completing Phase 1 construction that was in accordance with the targeted time, funding, and quality, led the corporation to proceed with construction of MRT Phase 2. The completion of the MRT Phase 1 construction and operation marks the beginning in the development history of an MRT system integrated network which is part of the DKI Jakarta mass transportation system in the future.

MEMOREHKAN PENDAPATAN DAN LABA: PENCAPAIAN TAHUN 2019

INCISION INCOME AND PROFIT: ACHIEVEMENTS IN 2019

Keberhasilan beroperasinya MRT Fase 1 secara komersial melalui pengembangan model bisnis seperti yang telah dijelaskan di atas, mendorong Perseroan untuk mampu membukukan pendapatan perdana yang cukup signifikan. Sejak beroperasi komersialnya MRT hingga akhir tahun 2019, Perseroan mampu membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 932,77 miliar. Capaian pendapatan usaha ini didapatkan dari pendapatan *Farebox* atau tiket MRT sebesar Rp 191,55 miliar, pendapatan non-tiket melalui pengembangan skema bisnis *advertising*, *merging products*, dan ritel sebesar Rp 207,61 miliar, dan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 533,61 miliar.

The successful commercial operation of MRT Phase 1, through the development of the business model as described above, enables the Corporation to record a significant initial income. Since the commercial operation of MRT until the end of 2019, the Corporation has been able to record operating revenues of Rp932,77 billion. This business income was obtained from Farebox revenue or MRT tickets amounting to Rp191,55 billion, Non-Farebox revenue through the development of advertising, merging products and retail business schemes of Rp207,61 billion, and subsidies from the DKI Jakarta Provincial Government amounting to Rp 533,61 billion.

Subsidi sarana dan prasarana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilandasi pada perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perseroan No.4343/-1.811.32 (CON/008/MRT/IX/2019) tentang Pemberian Subsidi MRT yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada PT MRT Jakarta (Persero) untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT. Ketentuan, penugasan, dan mekanisme subsidi selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu. Subsidi sarana perkeretaapian adalah alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian MRT dalam rangka kewajiban pelayanan publik atau *Public Service Obligation* (PSO) agar tarif terjangkau oleh pengguna jasa dimana tarif yang dikenakan kepada masyarakat selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perkotaan dan Peraturan Direksi Perusahaan No. 049 Tahun 2019 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan MRT Jakarta Tahun 2019. Perhitungan subsidi sarana secara garis besar didasari oleh pencapaian target *Origin Destination* (OD) stasiun tahun berjalan. Sedangkan subsidi prasarana perkeretaapian adalah alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar beban pembayaran operasional, perawatan dan biaya modal fasilitas operasi prasarana perkeretaapian yang dibayarkan secara *real cost* tanpa didasari oleh ketercapaian target OD stasiun tahun berjalan.

Facilities and infrastructure subsidies from the DKI Jakarta Provincial Government are based on the agreement between the DKI Jakarta Provincial Government and Corporation No. 4343/1.811.32 (CON/008/MRT/IX/2019) concerning Granting of MRT Subsidies from the 2019 Fiscal Year Budget, and the Governor of DKI Jakarta Provincial Regulation No. 53 of 2017 concerning the Assignment of PT MRT Jakarta (Persero) for the Implementation of MRT infrastructures and facilities. Provisions, assignments and subsidy mechanisms are further regulated in DKI Jakarta Governor Regulation No. 107 of 2019 concerning Integrated Moda Raya and Lintas Raya Integrated Subsidies. Railway facilities subsidy is the budget allocation by the DKI Jakarta Provincial Government for the implementation of MRT railways facilities in the framework of public service obligations (PSO) so that fares are affordable for service users where the fares charged to the public are further regulated in DKI Jakarta Governor Regulation No. 34 of 2019 on Public Transportation Fares with Urban Railways and Corporate Directors Regulation No. 049 of 2019 on Fares for the Implementation of the MRT Jakarta Transportation in 2019. The calculation of facility subsidies is largely based on the achievement of the current station Origin Target (OD) target. While the railroad infrastructure subsidy is the allocation of the DKI Jakarta Provincial Government budget to pay operational, maintenance and capital costs for the operation of railroad infrastructure that is paid in real cost without being based on the achievement of the current OD station target.

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan membukukan laba sebesar Rp143,38 miliar. Pencapaian laba di tahun pertama menjadi torehan besar bagi penyelenggaraan moda transportasi perkotaan, dimana pengelolaan MRT akan menjadi *benchmark* bagi penyelenggaraan moda transportasi perkotaan lainnya di Indonesia, dan bahkan di negara-negara lain.

As of the end of 2019, the Corporation recorded a profit of Rp143,38 billion. Achievement of profits in the first year is a major accomplishment for the implementation of urban transportation modes, where the management of the MRT acts as a benchmark for the implementation of other urban transportation modes in Indonesia, and even in other countries.

PENCAPAIAN REALISASI TERHADAP TARGET TAHUN 2019

ACHIEVEMENT IN THE REALIZATION OF 2019'S TARGET

Realisasi persentase ketepatan perjalanan kereta mencapai angka 99,96%, lebih tinggi 24,98% dibandingkan target awal sebesar 75%. Pencapaian ini didukung dengan teknologi *Communication-Based Train Control* (CBTC) atau Sistem Kendali Kereta Berbasis Komunikasi yang dapat memastikan jumlah kereta yang beroperasi dan jarak antara satu kereta dan yang lain pada batas aman, sehingga *headway* kereta dapat dimaksimalkan ketepatannya. Sama halnya, persentase jumlah aktual perjalanan kereta juga melebihi target yang ditetapkan, yakni 99,98% atau 70.355 dari 70.365 perjalanan yang direncanakan, 24,98% lebih tinggi dibandingkan target sebesar 75%. Terdapat 10 pembatalan perjalanan yang terjadi pada April 2019, yang juga merupakan bulan awal operasi hingga bulan Mei 2019 disebabkan familiarisasi sistem dan prosedur. Terakhir, *Customer Satisfaction Index* (CSI) pada MRT Jakarta di tahun 2019 juga melampaui target korporasi, yaitu di angka 82,78, lebih tinggi 17,78 poin dari target awal sebesar 75. Perolehan angka CSI sebesar 82,78 didapatkan dari rata-rata indeks CSI dari seluruh stasiun MRT. CSI juga mengukur indeks rata-rata di masing-masing stasiun. Tiga stasiun dengan nilai CSI tertinggi adalah Stasiun Bundungan Hilir (89,63), Stasiun Bundaran HI (85,67), dan Stasiun Istora Mandiri (84,77).

Pada MRT Fase 2 koridor Bundaran HI–Ancol Barat, Perseroan telah menyelesaikan pengerjaan *Contact Package 200* (CP 200) yakni pembangunan *Diaphragm Wall* Dinding Penahan Tanah Bawah Tanah MRT Jakarta di Gardu Induk Kawasan Medan Merdeka. Pasca pengerjaan konstruksi CP 200 ini, MRT Jakarta telah melakukan penanaman 920 pohon atas penebangan atau relokasi pohon sebanyak 92 pohon di area yang terdampak atas kegiatan konstruksi CP 200. Realisasi dana hibah dan pinjaman MRT Fase 1 dan 2 pada tahun 2019 telah mencapai target, yakni 85%. Persentase terselesaikannya tender konstruksi dan jasa konsultasi MRT Fase 2 mencapai 53% dari target yang ditetapkan sebesar 64%, atau 84% dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pemasukan Dokumen Tender CP 202-203, sehingga tender dinyatakan gagal, dan Perseroan perlu melakukan proses tender ulang.

KENDALA, TANTANGAN, DAN SOLUSINYA

CONSTRAINTS, CHALLENGES AND SOLUTIONS

Di awal beroperasinya kereta MRT Fase 1, Perseroan mengantisipasi sejumlah kendala dan tantangan terkait perilaku pengguna jasa dalam menggunakan sarana dan prasarana MRT yang telah disediakan. Sejumlah sistem, perangkat, hingga petugas keamanan yang telah dibekali dengan pendekatan humanis dipersiapkan agar perilaku pengguna jasa dapat sejalan dengan target operasi MRT berstandar kualitas tinggi. Nilai-nilai budaya seperti antre, kebersihan, hingga menghormati pengguna jasa lain, menjadi standar bagi seluruh karyawan dan petugas MRT untuk dapat menerapkannya di seluruh aspek pengelolaan dan pengoperasian MRT. Manajemen secara khusus memberikan apresiasi setinggi-tingginya dan rasa bangga terhadap animo masyarakat Jakarta serta pengguna jasa dalam menyambut beroperasinya MRT. Sistem dan perangkat yang telah dipersiapkan oleh Perseroan sangat cepat diadopsi oleh seluruh

The realization of the train travel accuracy percentage reached 99.98% which is 24.98% higher than the initial target of 75%. This achievement is supported by the Communication-Based Train Control (CBTC) technology that can ensure the number of trains operating and the distance between one train and another at a safe limit, so that train headways can be maximized in its accuracy. Likewise, the percentage of actual number of train trips also exceeded the target set, namely 99.81% or 70,355 of 70,365 planned trips, 24.81% higher than the 75% target. There were 10 trip cancellations that occurred in April 2019, which was also the initial month of operation until May 2019 due to familiarization of systems and procedures. Finally, the Customer Satisfaction Index (CSI) at the MRT Jakarta in 2019 also exceeded the corporate target of 82.78, 17.78 points higher than the initial target of 75. The acquisition of the CSI number 82.78 was obtained from the average CSI index of all MRT stations. CSI also measures the average index at each station. The three stations with the highest CSI values are Bundungan Hilir Station (89.63), Bundaran HI Station (85.67), and Istora Mandiri Station (84.77).

In Phase 2 of MRT at HI - Ancol Barat Corridor, the Corporation has completed work on Contract Package 200 (CP 200), the construction of a Diaphragm Wall (D- Wall) Underground Receiving Substation of MRT Jakarta in Medan Merdeka Area. After the CP 200 construction works, MRT Jakarta has planted 920 trees for the cutting down or relocation of 92 trees in the area affected by CP 200 construction activities. The realization of the MRT Phase 1 & 2 grants and loans in 2019 has reached the target, which is 85%. The percentage of completion of construction tenders and MRT Phase 2 consulting services reached 53% of the target set at 64%, or 84% of the targeted. This is due to the lack of submission of CP 202-203 bidding documents, so the tender was declared fail, and the Corporation needed to do a re-tender process.

At the beginning of the MRT train Phase 1 operations, the Corporation anticipated a number of obstacles and challenges related to behavior of passengers in using MRT facilities and infrastructure that had been provided. A number of systems, devices, and security personnel who have been equipped with a humanist approach are assigned so that the behavior of passengers can be in line with the target of high quality operation standards of MRT. Cultural values such as queuing, cleanliness, to respecting other passengers, become a standard for all employees and MRT officers to be able to apply them in all aspects of MRT management and operation. The management especially extended its highest appreciation and pride towards the interest of the people of Jakarta and passengers. The culture of queuing is formed by itself, well-managed cleanliness, and especially appreciation for human values in passenger behavior when using MRT transportation modes. The Management hopes

pengguna jasa. Budaya antri terbentuk dengan sendirinya, kebersihan yang terkelola dengan baik, dan terutama penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan dalam perilaku pengguna jasa saat menggunakan moda transportasi MRT. Manajemen berharap nilai-nilai peradaban ini akan menyebar ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta, dan menjadikan kota Jakarta sebagai kota dengan nilai kehidupan yang tinggi.

Tantangan lainnya adalah dimulainya tahapan pembangunan proyek MRT Fase 2 dengan rute Bundaran HI-Ancol Barat. Bentangan jalur yang melewati berbagai lokasi strategis seperti kawasan Medan Merdeka, lingkaran Istana Kepresidenan Republik Indonesia, hingga situs-situs peninggalan di seputaran daerah Kota, tentu memberikan tantangan tersendiri bagi Perseroan untuk dapat menyelesaikan pembangunan konstruksi MRT Fase 2 sesuai dengan target waktu. Untuk mendorong keputusan pembangunan proyek MRT Fase 2, Perseroan telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta untuk dapat melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua dan integrasi Stasiun Kota, konsep penataan Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk, serta *Traffic Management* pada saat pembangunan MRT Fase 2 dan perencanaan utilitas.

PROSPEK USAHA 2020

2020 BUSINESS PROSPECTS

Menjelang tahun 2020, MRT Jakarta diproyeksikan untuk menjadi semakin besar. Untuk merespons perubahan ini, seluruh rencana aksi strategis dan taktis di tahun 2020 dibalut dalam tema "*Becoming Bolder, Smarter and Faster*". *Bolder* berarti menjadi lebih besar tetapi harus juga lebih tangguh, gigih, dan berani berjuang menembus berbagai tantangan dan mewujudkan semua *milestone* atau jejak langkah yang telah ditargetkan. *Smarter* berarti seiring dengan pertumbuhan yang pesat, MRT Jakarta harus semakin kreatif, inovatif dan canggih memanfaatkan pengetahuan Perseroan serta keunggulan teknologi dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks. *Faster* berarti walaupun Perseroan menjadi lebih besar, tidak menjadikan Perseroan lamban, melainkan semakin cepat dan cekatan dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam pengembangan usaha MRT Fase 1, Perseroan melakukan akselerasi untuk mengoptimalkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2020 tentang Penugasan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit (KBT) Koridor Utara-Selatan MRT Jakarta. Rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu melalui pengelolaan dan komersialisasi KBT di sepanjang jalur MRT untuk mendapatkan manfaat atas pelampauan koefisien luas bangunan (KLB) dan pendapatan atas komersialisasi kawasan KBT. Selain itu potensi interkoneksi, Hak atas Penamaan Stasiun (*Naming Rights*), dan potensi bisnis lainnya di sepanjang jalur MRT Utara-Selatan Fase 1 juga akan terus dioptimalkan dan masuk ke dalam *pipeline* pengembangan usaha Perseroan.

Dalam proses pembangunan Fase 2A, tahun 2020 diharapkan menjadi tahun di mana Perseroan perlu menyelesaikan proses lelang *Contract Package* yang telah ditetapkan. Pengerjaan CP 200 telah rampung di tahun 2019 dan *Contract Award* untuk pengerjaan CP 201 pembangunan stasiun bawah tanah dari Stasiun Bundaran HI-Stasiun Harmoni (Fase

that the values of this civilization will spread into the daily lives of the people of Jakarta, and make the city of Jakarta a city with high life values. behavior when using MRT transportation modes. The Management hopes that the values of this civilization will spread into the daily lives of the people of Jakarta, and make the city of Jakarta a city with high life values.

Another challenge is the commencement of the MRT Phase 2 project development with the route of Bundaran HI - Ancol Barat. The stretch of lane that passes through various strategic locations such as the Medan Merdeka area, the circle of the Republic of Indonesia Presidential Palace, to the heritage sites around the Kota area, certainly presents a challenge for the Corporation to be able to complete the construction of MRT Phase 2 construction in accordance with the target time. To encourage decisions regarding the construction of MRT Phase 2 project, the Corporation has coordinated with the DKI Jakarta Governor to be able to revitalize the Kota Tua area and integration of Kota Station, rearrangement concept of Gajah Mada - Hayam Wuruk Street, and Traffic Management during the MRT Phase 2 development and utility planning.

By 2020, the MRT Jakarta is projected to become even greater. To respond to this change, all strategic and tactical action plans for 2020 are wrapped in the theme "Becoming Bolder, Smarter and Faster". Bolder means to be bigger but must also be more resilient, persistent, and brave to fight through various challenges and realize all the milestones or footsteps that have been targeted. Smarter means that along with the rapid growth, MRT Jakarta must be more creative, innovative and sophisticated utilizing the Corporation's knowledge and technological excellence in responding to increasingly complex challenges. Faster means that even though the Corporation is growing, it does not make the Corporation slow, but rather becomes faster and more agile in carrying out its duties.

In developing MRT Phase 1 business, the Corporation accelerated to abide by the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 67 of 2019 concerning the administration of transit oriented areas and DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 15 of 2020 concerning the assignment of PT MRT Jakarta (Perseroda) as the manager of North - South Transit Oriented Development (TOD) areas. The action plan to be implemented through the management and commercialization of the TOD area along the MRT line to achieve benefits from exceeding the building area coefficient (KLB) and revenue from the commercialization of the TOD area. In addition, the potential for interconnection, Naming Rights, and other business potentials along the north - south MRT line Phase 1 will also continue to be optimized and enter into the Corporation's business development pipeline.

In the Phase 2A development process, 2020 is expected to be the year where the Corporate needs to complete the Contract Package tender process that has been set. The CP 200 work has been completed in 2019 and the Contract Award for the CP 201 work on the construction of an underground station from the Bundaran HI Station - Harmoni Station

2A) ditargetkan rampung pada triwulan I 2020. Perseroan menargetkan proses retender CP 202-203 untuk berhasil pada tahun 2020, sehingga target pengoperasian Fase 2A pada Desember 2024 tidak mundur.

Dalam perspektif *Financial*, target utamanya adalah mewujudkan perseroan yang sehat secara keuangan dengan memaksimalkan pendapatan Perseroan. Perspektif *Customer* berfokus pada upaya peningkatan layanan dan kepuasan pelanggan, serta melaksanakan tugas-tugas layanan publik yang terkait dengan peningkatan mobilitas dan kualitas hidup masyarakat sebagai implikasi dari sistem layanan transportasi publik yang semakin meningkat. Selanjutnya terkait perspektif *Internal Business Process*, fokus adalah pada *operational excellence* (pemastian kualitas dalam kegiatan operasional), pengembangan jaringan MRT, pengembangan *platform* digital, peningkatan penghasilan non-tiket, pengembangan KBT, serta pengembangan anak usaha dan perseroan patungan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perseroan. Sementara perspektif *Learning & Growth* sebagai fondasi dari kerangka strategis ini ditargetkan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya Insan MRT Jakarta, meningkatkan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC), *Safety*, dan implementasi *Knowledge Management*.

(Phase 2A) is targeted to be completed in the first quarter of 2020. The Corporation targets the CP 202-203 retender process to succeed in 2020, so that the Phase 2A operating target of December 2024 will not be delayed.

From a Financial perspective, the main target is to realize a financially sound corporation by maximizing the Corporate revenue. The Customer Perspective focuses on efforts to improve service and customer satisfaction, as well as carrying out public service tasks related to increasing mobility and quality of life of the people as an implication of the increasingly public transportation service system. Furthermore, related to the Internal Business Process perspective, the focus is on operational excellence (ensuring quality in operational activities), developing the MRT network, developing digital platforms, increasing non-ticket income, developing TOD, and developing subsidiaries and joint ventures according to the needs of Corporate development. While the Learning & Growth perspective as the foundation of this strategic framework is targeted to improve the capabilities and capacity of MRT Jakarta People, improve Governance, Risk, and Compliance (GRC), Safety, and the implementation of Knowledge Management.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION



Figur 3.3. Alur Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan Perseroan
Figure 3.3. Flow of Good Corporate Governance implementation in the Corporate Environment

Menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perseroan memiliki tanggung jawab yang besar untuk memenuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan terkait penyelenggaraan organisasi berbasis Perseroan Terbatas, maupun peraturan untuk penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan MRT. Manajemen bertanggung jawab untuk dapat mewujudkan komitmen tersebut melalui pembentukan organisasi yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilandasi oleh 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

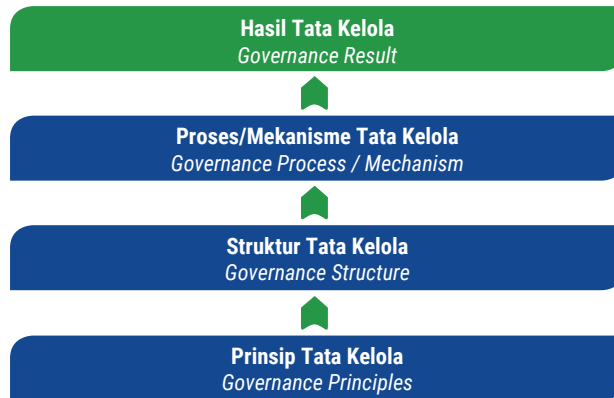
Penerapan prinsip GCG di lingkup Perseroan dilakukan melalui 3 (tiga) aspek besar, yaitu keberadaan struktur organ GCG sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, proses atau mekanisme GCG yang

As a Regionally-owned Enterprise (ROE) of DKI Jakarta Provincial Government, the Corporation is fully obliged to comply with all applicable laws and regulations related to Limited Liability Corporation legal entity and to the MRT operation and maintenance. The management is responsible for realizing this commitment through the establishment of an organization according to GCG basic principles or a Good Corporate Governance (GCG) which is based on 5 (five) basic principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness.

GCG principles within the Corporation is implemented through 3 (three) major aspects, namely: the existence of GCG structure in accordance with applicable laws and regulations, GCG processes / mechanism that

mengatur hubungan antar perangkat dalam struktur, dan hasil GCG yang diwujudkan melalui sosialisasi, evaluasi, dan peningkatan penerapan prinsip GCG.

regulate the relationship between GCG organs, and GCG results realized through GCG dissemination, evaluation, and improvement.



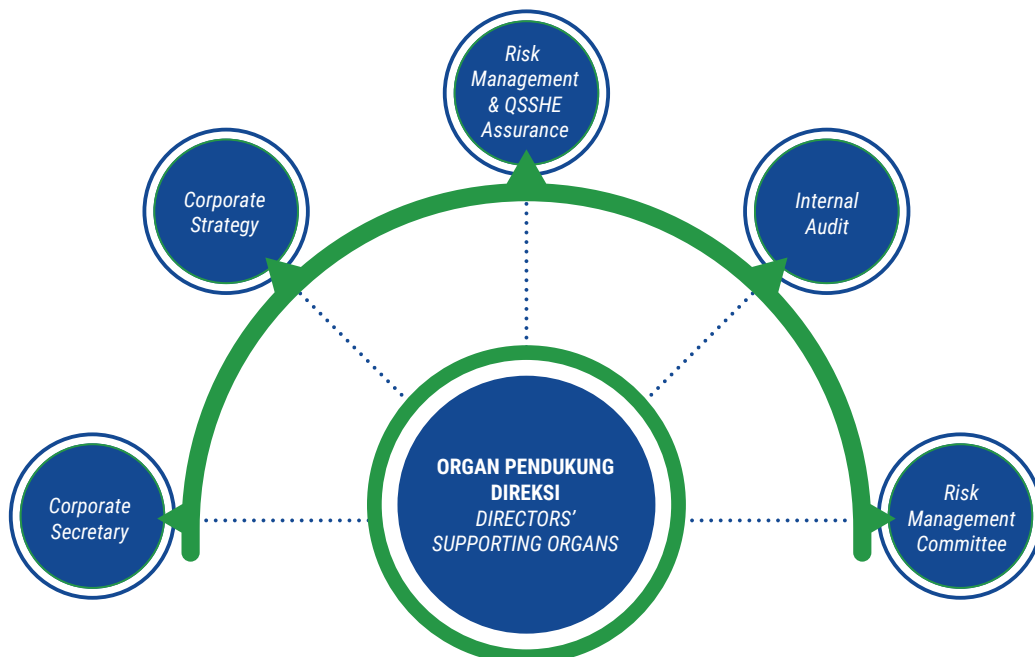
Figur 3.3. Alur Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan Perseroan
Figure 3.3. Flow of Good Corporate Governance implementation in the Corporate Environment

Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris selaku representasi pemegang saham dan pemangku kepentingan berperan besar untuk melakukan penerapan prinsip GCG dengan baik. Sejalan dengan sarana dan prasarana MRT berstandar kualitas tinggi, Perseroan juga memberikan target yang tinggi terhadap penerapan prinsip GCG di seluruh aspek pengelolaan organisasi Perseroan.

The Directors together with the Board of Commissioners as the representation of shareholders and stakeholders play a major role in implementing GCG principles properly. In line with the high quality standard of MRT facilities and infrastructure, the Corporation also sets high targets for the implementation of GCG principles in all management aspects of the organization.

Agar pengelolaan Perseroan dapat berjalan dengan perencanaan yang baik, implementasi kebijakan strategis yang terarah, serta pengawasan internal yang mendukung, Direksi dibantu oleh 4 (empat) unit kerja yang bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Utama, serta 1 (satu) komite, sebagaimana terlihat pada bagan di bawah ini.

In order for the Corporate management to run with good planning, implementation of directed strategic policies, and supporting internal supervision, the Directors are assisted by 4 (four) work units that are directly responsible under the President Director, as well as 1 (one) committee, as shown in the chart below.



Figur 4.4. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Lingkungan Perseroan
Figure 4.4. Good Corporate Governance implementation in the Corporate Environment

Corporate Strategy bertugas membantu Direksi dalam melakukan perencanaan strategis korporasi. Untuk mendukung penerapan GCG berbasis kepatuhan, Direksi dibantu oleh Corporate Secretary, termasuk pengumpulan dokumen Perseroan dan keterbukaan informasi kepada publik. Pengawasan pada sektor hulu dilakukan oleh 2 (dua) organ, yaitu Divisi Risk Management & QSSHE Assurance yang bertugas memastikan pengelolaan risiko Perseroan manajemen mutu, sistem keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan kerja, serta keamanan Perseroan berjalan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku di Perseroan. Sedangkan Komite Manajemen Risiko berfungsi sebagai organ yang membantu Direktorat Utama dalam pengambilan keputusan.

Penerapan prinsip GCG juga dilakukan melalui pengelolaan risiko di seluruh lingkup dan tingkatan Perseroan. Pengelolaan risiko bertujuan memberikan deteksi dini atas operasi dan pengelolaan usaha. Agar pengelolaan risiko dapat berjalan sesuai dengan perkembangan organisasi, operasi, dan bisnisnya, Perseroan melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko secara berkala. Di tahun 2019, evaluasi atas penerapan sistem manajemen risiko menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai capaian untuk tingkat maturitas sebesar 3,55 atau "Defined", meningkat dari tahun 2018 dengan tingkat maturitas sebesar 2,89 atau "Repeatable". Penilaian penerapan manajemen risiko meliputi komponen atau atribut Risk Strategy, Risk Appetite, Risk Profile, Governance Structure, Risk Policies, Risk Monitoring & Reporting, Risk Modelling & Analysis, Risk Culture, dan Risk Technology. Status "Defined" menunjukkan bahwa "kegiatan dan proses yang dilakukan telah terdefinisikan dan terstandarisasi serta menjadi bagian dari kegiatan organisasi". Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan pada pengelolaan risiko, khususnya dengan beroperasinya MRT Fase I yang memberikan tantangan baru bagi seluruh karyawan.

Selain itu, Manajemen Perseroan memastikan penerapan sistem pengendalian internal dapat berjalan secara efektif. Penilaian dan evaluasi atas sistem pengendalian internal telah dilakukan pada tahun 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup penilaian dan evaluasi meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal Perseroan yang terbagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu Lingkungan Pengendalian (Control Environment), Penilaian Risiko (Risk Assessment), Kegiatan Pengendalian (Control Activities), Informasi dan Komunikasi (Information & Communication), serta Pemantauan (Monitoring).

Hasil evaluasi menunjukkan sistem pengendalian internal Perusahaan untuk tahun 2019 menunjukkan capaian 77,10 atau berada pada tingkat efektivitas "Efektif", meningkat dari capaian penilaian tahun sebelumnya dengan skor 70,73 atau berada pada tingkat efektivitas "Cukup Efektif." Dari hasil evaluasi yang dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi sebagai catatan penting bagi peningkatan penerapan sistem pengendalian internal di lingkup Perseroan, yang akan menjadi dasar bagi Perseroan untuk melakukan perbaikan secara konsisten.

The Corporate Strategy is tasked with assisting the Board of Directors in carrying out corporate strategic planning. To support the implementation of compliance based GCG, Directors is assisted by The Corporate Secretary, including gathering Corporate documents and disclosing information to the public. Supervision in the upstream sector is carried out by 2 (two) organs, namely the Risk Management & QSSHE Assurance Division which is also tasked with assisting the Directors in managing aspects of Quality, Safety, Security, Health & Environment in MRT operations and the Risk Management Committee which has the role of monitoring the independency of the Risk Management & QSSHE Assurance Division.

The implementation of GCG principles is also carried out through risk management at all levels and levels of the Corporate Risk management aims to provide early detection of business operations and management. In order for risk management to run in accordance with the development of the organization, its operations and business, the Corporation evaluates the implementation of risk management systems regularly. In 2019, an evaluation on the implementation of risk management system showed an increase compared to the previous year, with an achievement value for a maturity level of 3.55 or "Defined", an increase from 2018 with a maturity level of 2.89 or "Repeatable". The assessment of risk management implementation includes components or attributes of Risk Strategy, Risk Appetite, Risk Profile, Governance Structure, Risk Policies, Risk Monitoring & Reporting, Risk Modeling & Analysis, Risk Culture and Risk Technology. The "Defined" status indicates that "the activities and processes carried out have been defined and standardized and are part of the organization's activities". The Corporation is committed to continually improving risk management, particularly with the operation of MRT Phase I which provides new challenges for all employees.

In addition, the Corporation's management ensures that the implementation of the internal control system can run effectively. An assessment and evaluation of the internal control system was carried out in 2019 by the DKI Jakarta Provincial Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The scope of the assessment and evaluation includes all aspects that support the implementation of the Corporation's internal control system which is divided into 5 (five) components, namely Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.

Evaluation results show that the Company's internal control system for 2018 shows 77.10 accomplishments or at the level of "Effective", increased from the previous year's assessment score of 70.73 or at the "Fairly Effective". From the results of the evaluation conducted, there are a number of recommendations as an important note for improving the implementation of internal control systems within the Corporate's scope, which will be the basis for the Corporation to make consistent improvements .

Agar penerapan GCG dapat terpantau dengan baik, Perseroan melakukan evaluasi melalui *assessment* atau penilaian agar dapat melakukan peningkatan penerapan GCG. Seperti halnya *assessment* tahun 2018, untuk *assessment* tahun 2019 dilakukan oleh BPKP Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan 9 (sembilan) aspek pengujian, yaitu:

1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Partisipan GCG
 - a. Pemegang Saham
 - b. Dewan Komisaris
 - c. Komite Dewan Komisaris
 - d. Direksi
 - e. Satuan Pengawasan Intern
 - f. Sekretaris Perusahaan
4. Pengungkapan Informasi

Hasil *assessment* penerapan GCG tahun 2019 menunjukkan skor 87,33 dengan predikat "Baik", meningkat dari hasil *assessment* penerapan GCG tahun 2018 dengan skor 85,14 juga dengan predikat "Baik". Peningkatan hasil *assessment* penerapan GCG yang telah dilakukan sejak tahun 2015 menunjukkan keinginan besar seluruh jajaran Perseroan untuk terus berbenah dan meningkatkan level pemahaman serta penerapan GCG.

Untuk dapat menumbuhkan kesadaran seluruh karyawan serta dalam rangka mencapai *Good Corporate Citizen*, Perseroan melakukan sosialisasi prinsip GCG secara rutin. Sosialisasi dilakukan melalui surat elektronik kepada seluruh karyawan, maupun publikasi pada situs web Perseroan yang dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh karyawan maupun pemangku kepentingan lainnya. Di samping itu, sosialisasi GCG dilakukan melalui tatap muka, serta tayangan video pada layar televisi yang berada di kantor Perseroan.

Kunci utama keberhasilan dalam penerapan prinsip GCG adalah komitmen kuat seluruh pihak yang terlibat dalam proses operasi dan bisnis Perseroan; baik pemegang saham maupun instansi terkait, seluruh organ GCG di internal Perseroan, hingga pemangku kepentingan. Direksi mengucapkan terima kasih atas komitmen tersebut, dan berharap dapat terus mewujudkan penerapan GCG yang akan berdampak pada keberlanjutan Perseroan di masa depan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN: MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: BUILDING RELATIONSHIPS WITH STAKEHOLDERS

Salah satu fondasi utama dalam penerapan prinsip GCG adalah mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan melalui tumbuh bersama seluruh pemangku kepentingan. Komitmen Perseroan pada pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan telah dimulai sejak awal berdiri, khususnya pada perwujudan aspek lingkungan hidup yang telah dilakukan sejak *groundbreaking* pembangunan proyek MRT di tahun 2013. Secara berkesinambungan, komitmen pada aspek lingkungan hidup dilakukan dalam berbagai hal, termasuk penataan kota dan relokasi tanaman di berbagai titik yang tersebar dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Untuk MRT Fase 2, Perusahaan

In order to properly monitor the GCG implementation, the Corporation conducts an evaluation through an assessment in order to improve the implementation of GCG. As with the 2018 assessment, for the 2019 assessment it was conducted by DKI Jakarta Provincial BPKP using 9 (nine) assessment aspects, namely:

1. Commitment
2. Policy
3. GCG Participants
 - a. Shareholders
 - b. Board of Commissioners
 - c. Board of Commissioners' Committee
 - d. Directors
 - e. Internal Audit Unit
 - f. Corporate Secretary
4. Information Disclosure

The Corporation's GCG assessment score in 2019 was 87.33 with the title "Good", an increase from the 2018 with the score of 85.14, also with the title of "Good". The improvement in the results since 2015 shows the great desire of all levels of the Company to continue to improve and increase the level of understanding and implementation of GCG.

To be able to raise awareness of all employees and in order to achieve Good Corporate Citizens, the Corporation regularly conducts dissemination of its GCG principles. Dissemination is carried out by electronic mail to all employees, as well as publications on the Corporation's website that can be viewed and downloaded easily by employees and other stakeholders. In addition, GCG socialization is carried out through face-to-face, video shows on television screens in the Corporation's offices.

The main key to success in implementing GCG principles is the strong commitment of all parties involved in the Corporation's operations and business processes; both shareholders and related institutions, all GCG organs within the Corporation, to stakeholders. The Directors expresses its gratitude for this commitment, and hopes to continue to realize the implementation of GCG which will have an impact on the Corporation's sustainability in the future.

One of the main basis in implementing GCG principles is to realize sustainable growth through growing together with all stakeholders. The Corporation's commitment to the implementation of Corporate Social Responsibility has been started since its inception, especially in the realization of environmental aspects that have been carried out since the groundbreaking of the MRT project construction in 2013. On an ongoing basis, commitment to environmental aspects is carried out in various ways, including urban planning and plant relocation at various points spread from Lebak Bulus to Bundaran HI. For MRT Phase 2, the Corporation targets city planning in several areas, such as the revitalization of the Kota Tua area and

menargetkan penataan kota di beberapa wilayah, seperti revitalisasi daerah Kota Tua dan penataan Jalan Gajah Mada-Hayam Wuruk.

Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (K3) diwujudkan melalui dorongan kuat tentang kesadaran akan pentingnya aspek K3, baik kepada karyawan maupun seluruh penumpang. Perseroan juga berupaya memberikan kesempatan pengembangan kompetensi diri kepada setiap karyawan, baik melalui promosi maupun kegiatan di luar kantor yang dapat memperkuat hubungan kultural antar karyawan maupun dengan manajemen. Selain itu, Perseroan juga berkomitmen untuk memenuhi seluruh kompensasi yang telah menjadi hak setiap karyawan.

Tanggung jawab atas produk dan layanan dilakukan melalui pemenuhan kualitas konstruksi MRT yang sangat baik, serta pengelolaan operasi dan pemeliharaan MRT dengan standar kualitas yang tinggi. Agar Perseroan mendapatkan gambaran tentang kualitas produk dan layanan MRT, Perseroan melakukan survei kepuasan kepada pengguna jasa melalui *Customer Satisfaction Index* (CSI). Hasil survei menunjukkan bahwa CSI MRT mencapai skor 82,78. Secara umum, pengguna MRT merasa puas dengan layanan MRT. Stasiun Bundungan Hilir mendapatkan indeks kepuasan tertinggi di antara stasiun lainnya, diikuti dengan Stasiun Bundaran HI dan Stasiun Istora.

Agar aspek kualitas produk dan jasa, keamanan, serta lingkungan MRT memiliki standar kualitas yang tinggi, Perseroan mengupayakan ISO sebagai standar internasional dengan proses audit yang melengkapi penilaian atas penerapan yang telah dilakukan Perseroan. Di tahun 2019, Perseroan telah mendapatkan 1 (satu) sertifikasi dan 3 (tiga) ISO terintegrasi, yaitu:

1. Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, didapatkan pada tanggal 29 Maret 2019 untuk masa berlaku hingga tahun 2022.
2. ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu dari TUV Rheinland, didapatkan pada tanggal 20 Desember 2019 untuk masa berlaku hingga tahun 2022.
3. ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan dari TUV Rheinland, didapatkan pada tanggal 20 Desember 2019 untuk masa berlaku hingga tahun 2022.
4. ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari TUV Rheinland, didapatkan pada tanggal 20 Desember 2019 untuk masa berlaku hingga tahun 2022

Pada aspek pengembangan sosial kemasyarakatan diwujudkan melalui pengembangan skema bisnis ritel yang memberikan kesempatan kepada tenan UMKM untuk memasarkan produknya. Perusahaan bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) melakukan proses kurasi kepada tenan UMKM, yang ditempatkan pada 3 (tiga) Stasiun MRT yang strategis dengan angka laju penumpang yang tinggi, yaitu Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati, dan Stasiun Dukuh Atas. Perseroan berkomitmen untuk dapat tumbuh bersama masyarakat khususnya masyarakat DKI Jakarta, dan mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan kontribusi positif bagi kehidupan warga Jakarta.

the rearrangement of Gajah Mada - Hayam Wuruk Street.

Occupational, Safety and Health (K3/OSH) practices are realized through strong encouragement about the awareness of the importance of K3 aspects, both to employees and all passengers. The Corporation also seeks to provide opportunities for the development of personal competence to every employee, both through promotions and activities outside the office that can strengthen cultural relations between employees and with management. In addition, the Corporation is also committed to fulfilling all compensation that is the right of every employee.

Responsibility for products and services is carried out through fulfilling the excellent quality of MRT construction, as well as managing the operation and maintenance of MRT with high quality standards. In order for the Corporation to get a picture of the quality of MRT products and services, the Corporation conducted a satisfaction survey to passengers through the Customer Satisfaction Index (CSI). The survey results showed that MRT CSI reached a score of 82.78. In general, MRT users are satisfied with MRT services. Bundungan Hilir Station received the highest satisfaction index among other stations, followed by the Bundaran HI and Istora Station.

in order for the aspects of product and service quality, safety and environment of the MRT to have a high quality standard, the Corporation strives for ISO as an international standard with an audit process that complements the assessment of the Corporation's implementation. In 2019, the Corporation received 1 (one) certification and 3 (three) integrated ISOs, namely:

1. *Occupational Safety and Health Management System Certification from the Republic of Indonesia Manpower Ministry, obtained on March 29, 2019 for the period of validity until 2022.*
2. *ISO 9001: 2015 concerning Quality Management System from TUV Rheinland, obtained on December 20, 2019 for the period of validity until 2022.*
3. *ISO 14001: 2015 on Environmental Management Systems from TUV Rheinland, obtained on December 20, 2019 for the period of validity until 2022.*
4. *ISO 45001: 2018 concerning Occupational Health and Safety Management System from TUV Rheinland, obtained on December 20, 2019 for the period of validity until 2022.*

In the aspect of social development, it is realized through the development of retail business schemes that provide opportunities for MSME tenants to market their products. The company collaborates with the Creative Economy Agency (BEKRAF) to curate the MSME's tenants, which are placed in 3 (three) strategic MRT stations with high traffic numbers, namely Lebak Bulus Station, Fatmawati Station and Dukuh Atas Station. The company is committed to be able to grow together with the community, especially the people of DKI Jakarta, and realize sustainable growth with a positive contribution to their lives.

PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

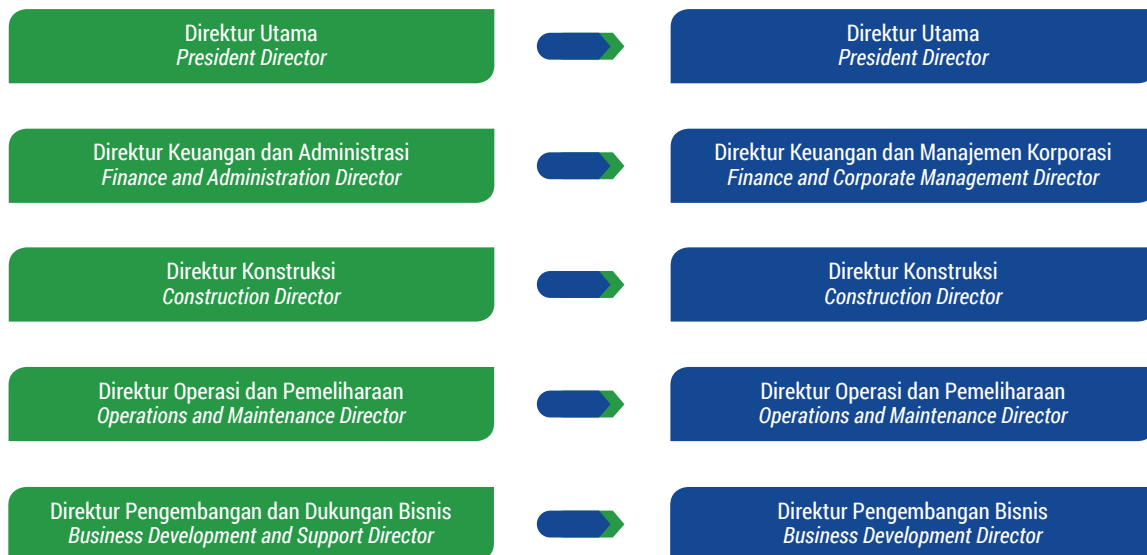
DIRECTORS' COMPOSITION CHANGES

Di tahun 2019 pemegang saham memutuskan untuk tidak melakukan perubahan susunan Direksi. Namun, sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa tanggal 28 November 2019, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan perubahan nomenklatur Direksi Perseroan, dengan kronologi sebagai berikut.

In 2019 the shareholders decided not to make changes to the Directors' composition. However, according to the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on November 28, 2019, the Shareholders approved and ratified the changes in nomenclature of the Corporate Directors, with the following chronology.

PERUBAHAN NOMENKLATUR DIREKSI SESUAI RUPS LUAR BIASA 28 NOVEMBER 2019

Change in Nomenclature of Directors In Accordance With Extraordinary GMS November 28, 2019



Figur 4.5
Figure 4.5

Perubahan nomenklatur di atas tidak mengubah susunan anggota Direksi. Susunan Direksi di akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Changes to the nomenclature above do not change the composition of the Directors. The composition of the Directors at the end of 2019 is as follows.

SUSUNAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2019

Directors' Composition As Of December 31, 2019

| Nama <i>Name</i> | Jabatan <i>Position</i> | Masa Jabatan <i>Term of Office</i> | Periode <i>Period</i> |
|---------------------|---|--|-------------------------------|
| William P. Sabandar | Direktur Utama <i>President Director</i> | 21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018 – 2023 AGMS</i> | Ke-2 <i>2nd</i> |
| Silvia Halim | Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i> | 21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018 – 2023 AGMS</i> | Ke-2 <i>2nd</i> |
| Muhammad Effendi | Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operations and Maintenance Director</i> | 29 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>October 29, 2018 – 2023 AGMS</i> | Ke-1 <i>1st</i> |
| Ghamal Peris | Direktur Pengembangan Bisnis <i>Business Development Director</i> | 29 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>October 29, 2018 – 2023 AGMS</i> | Ke-1 <i>1st</i> |

| Nama Name | Jabatan Position | Masa Jabatan Term of Office | Periode Period |
|--------------|--|---|-------------------------|
| Tuhyat | Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management Director | 21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023 March 21, 2018 – 2023 AGMS | Ke-2 2 st |

Tabel 4.6
Table 4.6

Keputusan terkait alasan pergantian dan perubahan susunan dan komposisi Direksi sepenuhnya menjadi hak dari Pemegang Saham Perseroan.

Decision related to reasons for replacement of and changes to the Directors composition shall be the full rights of the Corporate Shareholders.

AKHIR KATA CLOSING REMARKS

Secara khusus, Direksi menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama mewujudkan beroperasinya seluruh sarana dan prasarana MRT Fase 1. Kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan dukungan tanpa henti, demikian pula kepada Pemerintah Republik Indonesia dan seluruh jajarannya yang telah menjadi payung besar bagi terlaksananya moda transportasi MRT sebagai cermin ibu kota.

We would like to extend our deepest gratitude to all parties who have jointly realized the operation of all facilities and infrastructure of the MRT Phase 1. To the DKI Jakarta Provincial Government for providing ongoing support, as well as the Republic of Indonesia Government and all its officials for the major support for the implementation of the MRT transportation mode as an icon of the capital.

Direksi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya selaku representasi pemegang saham atas arahan, nasihat, dan pengawasan yang telah dilakukan. Kepada seluruh karyawan, izinkan Direksi menyampaikan apresiasinya yang tinggi atas seluruh dedikasi yang telah diberikan. Demikian pula kepada seluruh mitra kerja, Direksi memberikan rasa terima kasihnya atas dukungan dan kerja sama yang telah tercipta. Tak lupa kepada seluruh pengguna MRT, Direksi menyampaikan rasa bangga atas adaptasi yang begitu cepat yang dilakukan terhadap seluruh sistem dan perangkat MRT yang telah disediakan. Semoga semangat kebersamaan ini akan memberikan motivasi bagi seluruh pihak untuk dapat mengoperasikan MRT Fase 1 dengan standar kualitas yang tinggi, serta memulai pembangunan proyek MRT Fase 2 dengan hasil dan target waktu sesuai dengan yang diharapkan.

We would also like to extend our gratitude to the Board of Commissioners and its supporting organs as a representation of shareholders for the direction, advice and supervision that has been carried out. To all employees, please allow us to extend our high appreciation for all the dedication been given. Likewise for all work partners, we convey our gratitude for the support and cooperation that has been established. Last but not least, to all MRT passengers, we would like to extend our pride to the rapid adaptation made to all MRT systems and tools that have been provided. Hopefully this spirit of togetherness will provide motivation for all parties to be able to operate MRT Phase 1 with high quality standards, and begin the construction of MRT Phase 2 projects with results and time targets as expected.

Jakarta, 24 Maret 2020

Jakarta, March 24, 2020

Atas nama Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda)
On behalf of PT MRT Jakarta (Perseroda) Directors



WILLIAM P. SABANDAR
Direktur Utama
President Director

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

STATEMENT OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON THE ACCOUNTABILITY OF THE 2019 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT MRT Jakarta (Perseroda) for 2019 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of contents in the Annual Report and Financial Report of the Corporation.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness

Jakarta, 24 Maret 2020

Jakarta, March 24, 2020

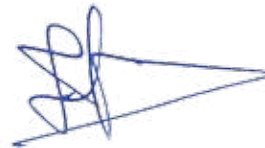
Dewan Komisaris
Board of Commissioners



M. SYAUGI
Komisaris Utama
President Commissioner



RUKIJO
Komisaris
Commissioner



ZULFIKRI
Komisaris
Commissioner



MUKHTASOR
Komisaris
Commissioner



ADNAN PANDU PRAJA
Komisaris
Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2019 PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

STATEMENT OF MEMBERS OF DIRECTORS ON THE ACCOUNTABILITY OF THE 2019 ANNUAL REPORT OF PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

We, the undersigned, testify that all information in the Annual Report of PT MRT (Perseroda) Jakarta for 2019 is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents in the Annual Report and Financial Report of the Corporation.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, 24 Maret 2020

Jakarta, March 24, 2020

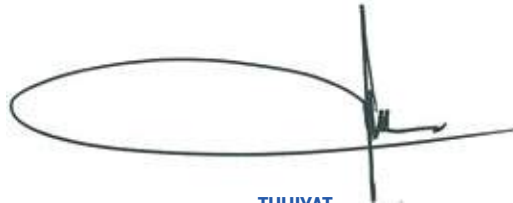
Direksi
Directors



WILLIAM P. SABANDAR
Direktur Utama
President Director



SILVIA HALIM
Direktur Konstruksi
Construction Director



TUHIYAT
Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
Finance and Corporate Management Director



MUHAMMAD EFFENDI
Direktur Operasi dan Pemeliharaan
Operation and Maintenance Director



GHAMAL PERIS
Direktur Pengembangan Bisnis
Business Development Director



PROFIL PERSEROAN

CORPORATE PROFILE

Perseroan terus berupaya mencapai keunggulan dengan menjadi penyedia transportasi massal dan pengembang sistem perkotaan terdepan di Indonesia.

The Corporation continuously makes efforts to achieve excellence by becoming a leading provider of mass transportation and developer of urban system in Indonesia.

The image shows the front of a modern train, likely a commuter train, with a blue and white color scheme. The train is moving along tracks, and the background is slightly blurred. The 'Jak Lingko' logo is visible on the front of the train, along with the letters 'KORPRI'.

Jak
Lingko

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2019

INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERSEROAN

GENERAL INFORMATION AND CORPORATE IDENTITY



Gambar. 4.1. Bagian dalam Ratangga
Image. 4.1. Interior Ratangga

Nama Perseroan

Corporate Name

PT Mass Rapid Transit Jakarta
(Perseroda)

Jumlah Karyawan

Total Employee

676 orang
676 Employees

Kantor Pusat

Head Office

Wisma Nusantara Lt. 21-23
Jl. MH Thamrin 59
Jakarta 10350 - Indonesia
P (62)21 - 3103629 |
(62)21 - 3906454
F (62) 21 - 3155846

Kantor Administrasi Depo

Depot Administration Office

Jl. Lebak Bulus Raya
Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak
Jakarta Selatan 12440, Indonesia

Status Badan Hukum

Status of Legal Entity

Perseroan Terbatas (PT) Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD)
Limited Liability Company (PT)
Regionally Owned Enterprise (ROE)

Tanggal Pendirian

Date of Establishment

17 Juni 2008
June 17, 2008

Bidang Usaha

Line of Business

Pengangkutan Darat
Land Transportation

Kepemilikan

Ownership

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 99,99%
DKI Jakarta Provincial Government 99,99%
- Perumda Pasar Jaya 0,01%
Perumda Pasar Jaya 0,01%

Modal Dasar

Authorized Capital

Rp40.757.353.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Issued Fully Paid Capital

Rp12.771.972.000.000,-

@mrtjkt
 @mrtjakarta
 MRT Jakarta
 MRTv
 1500 332
 info@jakartamrt.co.id
 jakartamrt.co.id

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

BRIEF HISTORY OF THE CORPORATE



Gambar. 4.2. Ratangga di Depo MRT Jakarta Lebak Bulus
Image. 4.2. Ratangga in Depo MRT Jakarta Lebak Bulus

SEKILAS MRT JAKARTA

MRT JAKARTA AT A GLANCE

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda); disebut sebagai “PT MRT Jakarta (Perseroda)” atau “Perseroan”; merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdiri pada tanggal 17 Juni 2008, Perseroan memiliki ruang lingkup kegiatan untuk pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana MRT, serta pengembangan dan pengelolaan properti/bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

Perseroan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Perseroda) sebagaimana terakhir kali diubah oleh Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 7 Tahun 2013, dimana saat ini kedua Peraturan Daerah tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).

Rencana pembangunan MRT di Jakarta telah dirintis sejak tahun 1985. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa Proyek MRT Jakarta merupakan proyek strategis nasional, dimana Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi koordinasi intensif untuk pelaksanaan proyek. Pencarian dana pinjaman disambut oleh Pemerintah Jepang yang bersedia memberikan dana pinjaman.

PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda), hereinafter referred to as PT MRT Jakarta (Perseroda), or “the Corporation”; is a Limited Liability Company, the majority of the shares in which are owned by the DKI Jakarta Provincial Government. Established on June 17, 2008, the scope of the Corporation’s business activities include the concession and development of MRT infrastructure and facilities, the operation and maintenance of MRT infrastructure and facilities, as well as the development and management of properties a/ businesses at and around MRT stations and depots.

The Corporation was established based on DKI Jakarta Provincial Regional Regulation No. 3 Year 2008 on the Establishment of the Regionally Owned Enterprise (ROE) Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta (Perseroda), as most recently amended by DKI Jakarta Provincial Regional Regulation No. 7 Year 2013. These two Regional Regulations have now been revoked and replaced by DKI Jakarta Provincial Regional Regulation No. 9 Year 2018 on the Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta (Perseroan Daerah).

The plan to develop an MRT system within Jakarta dates back to 1985. In 2005, the President of the Republic of Indonesia designated the MRT Jakarta Project as a nationally strategic project, while the Central and DKI Jakarta Provincial Government initiated intensive coordination in relation to the project’s execution. A fundraising effort was subsequently accepted by the Japanese Government, which was willing to provide a loan.

Pembangunan Jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 1 ini menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu dari sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta pada masa yang akan datang. Pengembangan selanjutnya adalah meneruskan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2 dari Bundaran HI menuju Ancol Barat, serta pengembangan jalur Timur-Barat.

Perseroan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan mulai dari tahap *Engineering Service*, Konstruksi, hingga Operasi dan Pemeliharaan dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Dalam tahap *Engineering Service*, Perseroan bertanggung jawab terhadap proses desain, pra-kualifikasi dan, tender kontraktor;
2. Dalam tahap Konstruksi, Perseroan sebagai atribusi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani kontrak dengan kontraktor pelaksana konstruksi, dan konsultan yang membantu proses tender kontraktor, serta konsultan manajemen dan operasional.
3. Dalam tahap Operasi dan Pemeliharaan, Perseroan bertanggung jawab terhadap pengoperasian dan perawatan, termasuk memastikan agar tercapainya jumlah penumpang yang cukup untuk memberikan *revenue* yang layak bagi Perseroan.

Proyek MRT Jakarta dimulai dengan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 1 sepanjang ±16km dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI yang memiliki 13 stasiun dengan 1 (satu) Depo. Untuk meminimalisir dampak pembangunan fisik Fase 1, selain menggandeng Konsultan Manajemen Lalu Lintas, Perseroan juga memastikan telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pembangunan Jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 1 ini menjadi awal sejarah pengembangan jaringan terpadu dari sistem MRT yang merupakan bagian dari sistem transportasi massal DKI Jakarta pada masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan MRT Jakarta yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) melibatkan beberapa instansi Pemerintah lainnya, baik pada tingkatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Perseroan sendiri. Dukungan dari instansi Pemerintah tersebut turut memberikan andil dalam keberhasilan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan MRT Fase 1.

Pengembangan selanjutnya adalah meneruskan pembangunan jalur MRT Koridor Utara-Selatan Fase 2 Bundaran HI-Ancol Barat, serta pengembangan jalur Timur-Barat. Sesuai dengan studi SITRAMP (*Study for Implementation and Transportation Master Plan*) Tahun 2003, jaringan MRT Utara-Selatan menunjukkan sampai dengan wilayah Kota Tua serta adanya jaringan Timur-Barat yang melengkapi interkoneksi pergerakan penumpang untuk menjangkau seluruh wilayah Jakarta.

Studi Kelayakan Fase 2 MRT jalur Bundaran HI – Kota/Kampung Bandan telah dilakukan pada tahun 2012 dan komitmen atas pembangunan MRT Fase 2 telah masuk dalam *Minutes of Discussion* antara Pemerintah Indonesia dengan JICA pada tahun 2010. Penyusunan studi *Basic Engineering Design* (BED) MRT Fase 2 telah dilakukan sejak Januari 2018.

The construction of Phase 1 of the MRT North-South Corridor is the first step towards the development of an integrated MRT system, which will become a part of Jakarta's future public transportation network. The next development will see the construction of Phase 2 of the MRT North-South Corridor from Bundaran HI to Ancol Barat, as well as the development of an East-West line.

The Corporation is responsible for all MRT-related activities, from Engineering Services and Construction to Operations and Maintenance, as follows:

1. *During the Engineering Service stage, the Corporation is responsible for the design, pre-qualification and tender processes.*
2. *During the Construction stage, the Corporation acts on behalf of the DKI Jakarta Provincial Government during the signing of contracts with construction Contractors, tender assistance Consultants and operational and management Consultants.*
3. *During the Operation and Maintenance stages, the Corporation is responsible for operations and maintenance, including ensuring that adequate passenger numbers are achieved in order to generate decent revenue for the Corporation.*

The MRT Jakarta Project began with the construction of Phase 1 of the MRT North-South corridor which runs along a ± 16 km route from Lebak Bulus to Bundaran HI, through 13 stations and 1 (one) Depot. In order to minimize the impact of the physical construction of Phase 1, in addition to cooperating with Traffic Management Consultants, the Corporation is also responsible for ensuring that an environmental Impact Analysis (EIA) is secured.

The construction of MRT North-South Corridor Line Phase 1 marks the historic starting point of the network development of the MRT system, which will become an integral part of DKI Jakarta's public transportation during the years to come. The execution of MRT Jakarta's construction, which has been identified as a Nationally Strategic Project (PSN), also involves Government Authorities, such as Central Government, the DKI Jakarta Provincial Government and the Corporation itself. Support from the Government is also a significant part of the success of the completion of construction of MRT Phase 1.

The next development will continue with the MRT Phase 2 North-South Corridor from Bundaran HI to Ancol Barat, as well as with the East-West line. The results of a SITRAMP (Study for Implementation and Transportation Master Plan) conducted in 2003 demonstrated that a North-South network that reaches Kota Tua and an interconnected East-West network would allow passengers to reach the entire area of Jakarta.

A Feasibility Study for MRT Phase 2 Bundaran HI – Kota / Kampung Bandan was conducted in 2012 and the commitment to implement the construction of MRT Phase 2 was recorded in an official Minutes of Discussion between the Government of the Republic of Indonesia and JICA in 2010. The preparation of a Basic Engineering Design (BED) Study for MRT Phase 2 has been implemented since January 2018.

Di tahun 2019, tepatnya pada 24 Maret 2019, MRT Jakarta Fase 1 rute Lebak Bulus - Bundaran HI resmi beroperasi. Di tahun 2019 pula, MRT Jakarta Fase 2A rute Bundaran HI - Kota telah dimulai dengan Paket pertamanya, yaitu pembangunan Dinding Diafragma untuk bangunan Gardu Induk bawah tanah MRT di Kawasan Medan Merdeka (CP 200). MRT Jakarta Fase 2A rute Bundaran HI - Kota ditargetkan mulai beroperasi pada awal tahun 2025.

Di tahun 2019, kereta MRT Jakarta beroperasi mulai pukul 05:00 - 24:00 WIB menggunakan Grafik Perjalanan Kereta (Gapeka) pada Hari Kerja (*weekdays*) sebanyak 285 perjalanan per hari dan Gapeka Hari Libur (*weekend*) sebanyak 219 perjalanan per hari. Sejak resmi beroperasi pada 24 Maret 2019 hingga 31 Desember 2019, MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI telah melayani 24.621.467 pengguna jasa, dengan rata-rata 89.645 pengguna jasa per hari.

NAMA PERSEROAN THE CORPORATE NAME

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat 3 (tiga) jenis badan usaha yang dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah, yaitu Badan Pengelola (BP), Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Ditinjau dari perspektif manajemen, baik BP maupun Perumda tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk alih daya maupun bekerja sama dengan sektor swasta, sehingga berisiko terjadinya inefisiensi karena terbatasnya pendanaan dari Pemerintah Daerah. Sementara Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) memiliki fungsi yang sama dengan sektor swasta sehingga mampu memanfaatkan sumber daya eksternal secara maksimal. Berdasarkan hal inilah maka kemudian ditetapkan nama Perseroan menjadi PT MRT Jakarta (Perseroda).

Perseroan melakukan pergantian nama yang semula bernama PT MRT Jakarta menjadi PT MRT Jakarta (Perseroda) pada Tahun 2019 dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar dengan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 9 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).

On March 24, 2019 the MRT Jakarta Phase 1 route from Lebak Bulus – Bundaran HI officially commenced operations. Also in 2019, the MRT Jakarta Phase 2A route from Bundaran HI - Kota began with its first package, specifically the Diaphragm Wall Construction for the MRT underground Receiving Substation in the Medan Merdeka Area (CP 200). The MRT Jakarta Phase 2A route from Bundaran HI - Kota is being targeted for operation in early 2025.

In 2019, MRT Jakarta trains operated from 05:00 - 24:00 WIB using a weekday Train Travel Chart comprising 285 trips per day and a weekend Train Travel Chart comprising 219 trips per day. Since officially commencing operations on March 24, 2019, up until December 31, 2019, MRT Jakarta Phase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI served 24,621,467 passengers, which is an average of 89,645 passengers per day.

Based on the applicable laws and regulations, 3 (three) types of business entities can be established by Local Government, namely Management Agencies (BP), Regionally Owned Enterprises in the form of Regional Public Corporations (Perumda) and Regionally Owned Enterprises in the form of Regional Corporations (Perseroda). From a management perspective, both BP and Perumda do not have enough flexibility to hire outsourced employees or cooperate with the private sector, so there is a risk of inefficiency due to limited funding from the Local Government. Meanwhile, Regionally Owned Enterprises in the form of Regional Corporations (Perseroda) have the same function as the private sector, so they can utilize external resources optimally. Based on these considerations, it was decided to adopt the Corporation name of PT MRT Jakarta (Perseroda).

The Corporation changed its name from PT MRT Jakarta to PT MRT Jakarta (Perseroda) in 2019 under the framework of the adjustment of its Articles of Association through Government Regulation No. 54 of 2017 concerning Regionally Owned Enterprises and DKI Jakarta Provincial Regional Regulation No. 9 Year 2018 regarding the Limited Liability Company (PT) MRT Jakarta (Perseroan Daerah).

KEGIATAN & BIDANG USAHA PERSEROAN

CORPORATE ACTIVITIES & LINE OF BUSINESS

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLES OF ASSOCIATION

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir mengalami perubahan melalui Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Akta Nomor 23 tanggal 13 Desember 2019, ruang lingkup kegiatan usaha PT MRT Jakarta (Perseroda) adalah sebagai berikut:

In accordance with Article 3 of the Corporation's latest Articles of Association, which were amended through Notary Deed Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Deed No. 23 dated December 13, 2019, the scope of PT MRT Jakarta's (Perseroda) business activities break down as follows:

RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Scope of Business Activities Based on Articles of Association

- 1. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan pengusahaan prasarana**

Management of urban public railway infrastructure, which includes infrastructure developments, infrastructure operations, infrastructure maintenances, and commercialization.

Keterangan Remarks

Telah dilakukan pembangunan dan pengusahaan prasarana di Fase 1. Perseroan tengah melakukan tahapan Pengadaan dan Konstruksi prasarana untuk Fase 2 dalam paket secara bertahap.

Phase 1 infrastructure development and commercialization has been completed. The Corporation is currently carrying out Tender and Construction work for Phase 2 infrastructure in packages.

- 2. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan pengusahaan sarana**

Management of urban public railway facilities, which includes rolling-stock procurement, rolling-stock operations, and rolling-stock maintenance, and commercialization.

Keterangan Remarks

Rangkaian kereta telah tersedia dan saat ini beroperasi melayani rute MRT Fase 1 Utara - Selatan. Perawatan rangkaian kereta dilakukan di Depo Lebak Bulus. Perseroan saat ini sedang mempersiapkan Desain Kereta dan Studi Kelayakan untuk Depo pada Konstruksi Fase 2.

Rolling stock have been procured and are currently serving the Phase 1 MRT North - South Line. Maintenance of rolling stock is undertaken at the Lebak Bulus Depot. The Corporation is currently preparing the Basic Design of Rolling Stock and Feasibility Study for the Depot for Phase 2 Construction.

3. Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depot dan kawasan sekitarnya

Development and Management of Properties / Businesses in the Stations, Depot, and the Surrounding Areas.

Keterangan Remarks

Pada Fase 1, penyusunan standardisasi, implementasi kemitraan Komersial, dan Ritel serta Panduan Rancang Kota (PRK) telah dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi bisnis di Stasiun dan beberapa Kawasan Berorientasi Transit (KBT) di sekitar Stasiun. Hal ini dijalankan melalui kemitraan strategis yang telah dijajaki bersama dengan para pemangku kepentingan di masing-masing area KBT.

During Phase 1, the standardization and implementation of Commercial and Retail partnerships and also the Urban Design Guideline (UDGL) were developed in order to optimize business potential within stations and several Transit Oriented Development (TOD) areas. This was undertaken through strategic partnerships with stakeholders in each TOD area.

Hingga akhir tahun 2019, MRT Fase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI telah resmi beroperasi. Fase 2 Bundaran HI - Ancol Barat dalam tahapan Pengadaan dan Konstruksi secara bertahap, dan belum beroperasi.

Towards the end of 2019, MRT Phase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI officially began operating. Phase 2 Bundaran HI - Ancol Barat is currently in the Tender and Construction stages and is not yet in operation.

RUANG LINGKUP KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR

Scope of Business Activities Based on Articles of Association



Pengembang dan operator dari jaringan transportasi MRT

Developer and Operator of MRT Network



Pengelola Kawasan Berorientasi Transit (KBT)

Transit Oriented Development (TOD) Operator

Figur. 4.3
Figure. 4.3

Perseroan bertujuan untuk memberikan layanan mobilitas kepada seluruh warga Jakarta sekaligus sebagai sarana untuk meremajakan kota dengan memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini ditempuh dengan menjadi penyedia layanan transportasi berbasis rel di wilayah perkotaan, mengembangkan kawasan sekitar stasiun dengan pendekatan KBT.

The Corporation is aiming to provide mobility services to all citizens of Jakarta, as well as becoming a means of rejuvenating the city by spurring economic growth. These goals are to be achieved by becoming a provider of railbased transportation services in urban areas and developing the areas around stations through a TOD-based approach.

Layanan transportasi berbasis rel merupakan jasa layanan angkutan umum dengan mekanisme tarif yang akan dikontrol secara ketat oleh Pemerintah, karenanya Perseroan harus mampu mengembangkan kesempatan dan potensi bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Eksplorasi sumber pendapatan di luar layanan transportasi dilakukan khususnya melalui pengembangan properti di kawasan seputar stasiun sebagai realisasi konsep Kawasan Berorientasi Transit (KBT).

Rail-based transportation services comprise publictransportation services under a tariff mechanism and these are strictly controlled by the government; thus, the Corporation must be able to develop other business opportunities and potential in order to generate revenue. Explorations of revenue sources outside of transportation services are being implemented through the development of the areas surrounding stations in order to realize the Transit Oriented Development (TOD) concept.

Saat ini pengembangan bisnis untuk mendapatkan pendapatan non-tiket dilakukan antara lain dengan kerja sama di bidang periklanan khususnya media luar ruang dan non-periklanan, yang di antaranya adalah kerja sama dengan penyedia infrastruktur telekomunikasi dan penerimaan uang elektronik dari mitra perbankan di MRT. Selain itu juga dikembangkan usaha di bidang ritel di area stasiun MRT Jakarta.

Currently, business development in relation to non-fare revenue is being implemented through out-of-home advertising partnerships and non-advertising business, including, for example, partnerships with providers of telecommunications infrastructure and electronic money from banking partners. In addition, retail businesses are being developed within MRT Jakarta station areas.

MRT JAKARTA FASE 1 (RUTE LEBAK BULUS-BUNDARAN HI): PRODUK, PELAYANAN JASA DAN PENGGUNA

MRT JAKARTA PHASE 1 (LEBAK BULUS - BUNDARAN HI ROUTE): SERVED PRODUCTS, SERVICES AND MARKETS



Gambar. 4.3. Ratangga melewati *Special Bridge* memasuki Stasiun Fatmawati
Image. 4.3. *Ratangga passing the Special Bridge to enter Fatmawati Station*

Per 31 Desember 2019, pembangunan MRT Fase 1 (rute Lebak Bulus - Bundaran HI) yang meliputi pembangunan stasiun, depo, jalur layang, jalur bawah tanah, sistem perkeretaapian, rel dan pengadaan kereta telah selesai dilakukan dan telah beroperasi.

MRT Fase 1 (rute Lebak Bulus - Bundaran HI) memiliki panjang ±16 km dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan, hingga Bundaran HI, Jakarta Pusat. Rute MRT Fase 1 terdiri dari 13 stasiun, yaitu:

1. Tujuh stasiun layang yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan ASEAN. Depo Lebak Bulus dibangun di permukaan tanah (*at grade*).
2. Terowongan MRT bawah tanah dan 6 (enam) stasiun bawah tanah yaitu Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI.

Di tahun 2019, kereta MRT Jakarta beroperasi mulai pukul 05:00 - 24:00 WIB menggunakan Grafik Perjalanan Kereta (Gapeka) pada Hari Kerja (*weekdays*) sebanyak 285 perjalanan per hari dan Gapeka Hari Libur (*weekend*) sebanyak 219 perjalanan per hari. Sejak resmi beroperasi pada 24 Maret 2019 hingga 31 Desember 2019, MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI telah melayani 24.621.467 pengguna jasa, dengan rata-rata 89.645 pengguna jasa hari.

Dalam stasiun-stasiun MRT Jakarta juga terdapat berbagai fasilitas, di antaranya ruang laktasi, musala, toilet dan toilet khusus disabilitas, Mesin Tiket Otomatis, eskalator, dan elevator prioritas. Terdapat pula tenan ritel di area tidak berbayar.

As of December 31, 2019, the construction of MRT Phase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI route) which comprises stations, a depot, elevated sections, underground sections, railway systems, track works and the procurement of rolling stock, was completed and operations commenced.

MRT Jakarta Phase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI runs along a ± 16 km route from Lebak Bulus, South Jakarta to Bundaran HI, Central Jakarta. MRT Jakarta Phase 1 comprises 13 stations, specifically:

1. 7 (seven) elevated stations, namely Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M and ASEAN. Depo Lebak Bulus has also been completed (*at grade*).
2. Underground MRT tunnels and 6 (six) underground stations, namely Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas and Bundaran HI.

In 2019, MRT Jakarta trains operated from 05:00 - 24:00 WIB through the use of a weekday Train Travel Chart featuring 285 trips per day and a weekend Train Travel Chart featuring 219 trips per day. Since officially commencing operations on March 24, 2019 until December 31, 2019, MRT Jakarta Phase 1 Lebak Bulus – Bundaran HI served 24,621,467 passengers and an average of 89,645 passengers per day.

MRT Jakarta stations feature various facilities, including nursery rooms, prayer rooms, toilets and toilets for the disabled, Ticket Vending Machines, escalators and priority elevators. Retail tenants are also located in unpaid areas.

PETA MRT JAKARTA RUTE UTARA-SELATAN FASE 1

Map of MRT Jakarta North – South Line Phase 1



Gambar. 4.4
Image. 4.4

MRT JAKARTA MENJADI SOLUSI BAGI WARGA JAKARTA DENGAN MENYEDIAKAN TRANSPORTASI YANG TEPAT WAKTU, AMAN, DAN NYAMAN, SERTA MENCERMINKAN JAKARTA SEBAGAI WADAH DI MANA BERBAGAI PERBEDAAN MELEBUR MENJADI SATU.

MRT Jakarta is a solution for the people of Jakarta and offers public transportation that is punctual, safe and comfortable, as well as representing Jakarta as a melting pot in which diversities dissolve into one.

MRT JAKARTA FASE 2 BUNDARAN HI-ANCOL BARAT: CAKUPAN PROYEK DAN PERKEMBANGANNYA

MRT JAKARTA PHASE 2 BUNDARAN HI - ANCOL BARAT: PROJECT SCOPE AND PROGRESS

MRT Fase 2 (Bundaran HI-Ancol Barat) merupakan rute ekstensi dari MRT Fase 1 (Lebak Bulus-Bundaran HI) sebagai bagian dari Jalur MRT yang menghubungkan wilayah selatan Kota Jakarta dengan wilayah utara Kota Jakarta.

MRT Phase 2 (Bundaran HI - Ancol Barat) is an extension line to Phase 1 (Lebak Bulus – Bundaran HI) and part of the MRT Line which connects the south of Jakarta to its northern districts.

Pembangunan MRT Fase 2 terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu Fase 2A (Bundaran HI-Kota) yang saat ini dalam tahap Tender Konstruksi serta

Construction of MRT Phase 2 comprises of 2 (two) stages, specifically Phase 2A (Bundaran HI - Kota), which is currently in the construction tender

Fase 2B (Kota – Ancol Barat) yang saat ini dalam tahap Studi Kelayakan setelah sebelumnya memperoleh Persetujuan Prinsip dari Gubernur DKI Jakarta pada Mei 2019.

Pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI – Kota) didukung dengan rencana pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan di sekitar stasiun MRT. MRT Fase 2A (Bundaran HI – Kota) akan melintasi kawasan pusat bisnis, pusat pemerintahan, kawasan wisata, kawasan cagar budaya, serta kawasan hunian dan sentra niaga di wilayah utara kota Jakarta. Pembangunan MRT Fase 2A (Bundaran HI – Kota) diperkirakan akan menarik 551.200 pengguna jasa/hari di sepanjang Jalur MRT Utara-Selatan (Lebak Bulus – Kota) sehingga akan memberikan dampak positif yang tinggi bagi pengembangan kawasan di sekitar stasiun MRT Jakarta.

MRT Fase 2B (Kota – Ancol Barat) direncanakan untuk menghubungkan MRT Fase 2A (Bundaran HI – Kota) menuju lahan depo potensial di Ancol Barat sebagaimana terindikasi dalam Persetujuan Prinsip dari Gubernur DKI Jakarta. MRT Fase 2B (Kota – Ancol Barat) memiliki potensi tangkapan penumpang yang tinggi karena melintasi sentra niaga, wisata serta kawasan pesisir yang memiliki potensi pengembangan yang tinggi sebagai Kawasan Berorientasi Transit baru.

Pembangunan MRT Fase 2 (Bundaran HI – Ancol Barat) direncanakan untuk terintegrasi langsung dengan moda transportasi lain seperti TransJakarta dan Kereta Commuter Indonesia. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daerah layanan MRT Jakarta serta mewujudkan integrasi transportasi di DKI Jakarta.

stage, and Phase 2B (Kota - Ancol Barat) which is currently in its Feasibility Study stage, having previously been granted Principle Approval by the Governor of DKI Jakarta in May 2019.

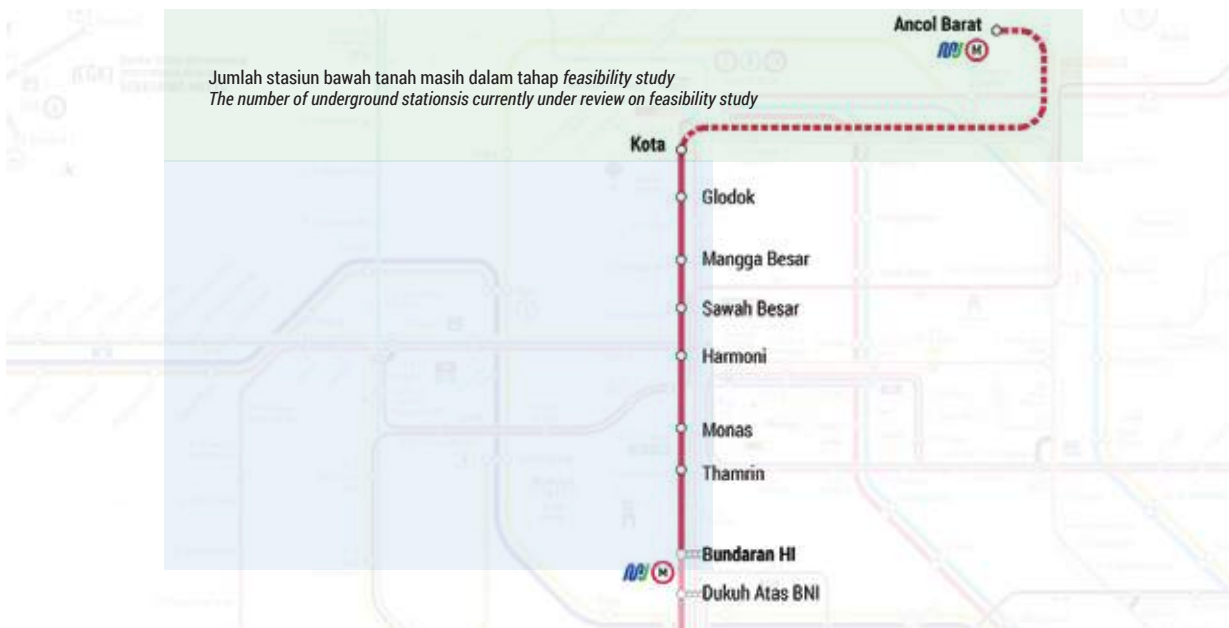
Construction of MRT Phase 2A (Bundaran HI – Kota) is supported by the Transit Oriented Development plan, which was developed through a consideration of the characteristics of the surrounding areas of stations. MRT Phase 2A (Bundaran HI – Kota) will pass through business districts, civic centers, tourism areas, heritage areas and residential and commercial centers in the northern part of Jakarta. Construction of MRT Phase 2A (Bundaran HI – Kota) is expected to attract 551,200 passengers per day along the MRT North-South Line (Lebak Bulus – Kota), resulting in a significant positive impact in terms of area developments around MRT Jakarta stations.

MRT Phase 2B (Kota – Ancol Barat) was planned in order to connect MRT Phase 2A (Bundaran HI – Kota) with a potential depot area in Ancol Barat, as set out under the Principal Approval granted by the Governor of DKI Jakarta. MRT Phase 2B (Kota – Ancol Barat) has a high potential demand due to the fact that it passes through commercial areas, tourism areas and coastal areas with high development potential in terms of becoming a new Transit Oriented Development area.

Construction of MRT Phase 2 (Bundaran HI – Ancol Barat) has been planned so that it will be directly integrated into other modes of transportation, such as TransJakarta and Kereta Commuter Indonesia. This is being undertaken in order to increase MRT Jakarta coverage and to ensure transport integration within DKI Jakarta.

PETA MRT JAKARTA RUTE UTARA - SELATAN FASE 2

Map of MRT Jakarta North – South Line Phase 2



Gambar. 4.5
Image. 4.5

KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT TRANSIT - ORIENTED DEVELOPMENT



Gambar. 4.6. Ilustrasi KBT MRT Jakarta Dukuh Atas
Image. 4.6. Illustration of TOD MRT Jakarta Dukuh Atas

RENCANA INDUK & PANDUAN RANCANG KOTA KBT MRT JAKARTA KORIDOR UTARA - SELATAN

PREPARATION OF MASTER PLAN & URBAN DESIGN GUIDELINES FOR MRT JAKARTA TOD AREAS ALONG THE NORTH - SOUTH CORRIDOR

Kawasan Berorientasi Transit (KBT) adalah kawasan suatu bentuk pengembangan kawasan campuran (*mixed-use*) dalam radius pengembangan jarak berjalan kaki (350 meter) yang ditata dengan pertimbangan untuk memberikan kemudahan yang maksimal terhadap akses transportasi publik serta mendorong pengembangan integrasi transportasi di dalam kawasan. Kawasan akan dikembangkan melalui prinsip pengembangan secara vertikal, sehingga mendorong terciptanya ruang terbuka yang lebih berkualitas pada level permukaan jalan. Selain itu, kawasan ditujukan menjadi *melting pot* di mana keberadaan fungsi campuran dapat meningkatkan interaksi sosial sehingga memberikan dampak positif kepada kawasan. Peningkatan pengembangan secara vertikal dan peningkatan *mixed-use* dalam kawasan perlu diwujudkan melalui desain integrasi spasial, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan dampak positif bagi pengembangan kawasan secara keseluruhan.

Pada tahun 2019, Perseroan melanjutkan mandat yang diberikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada Perseroan melalui Pergub No. 140/2017 tentang Penugasan PT MRT Jakarta (Perseroda) Sebagai Operator Utama Pengelola Kawasan *Transit Oriented Development* Koridor (Utara - Selatan) Fase 1 *Mass Rapid Transit* Jakarta. Di tahun 2019 juga telah diterbitkan Pergub No. 67/2019 tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit, yang menyebutkan bahwa sebagai pengelola KBT maka Perseroan mempunyai tugas untuk menyusun Panduan Rancang Kota (PRK) di seluruh KBT di koridor Utara - Selatan.

A Transit Oriented Development (TOD) comprises an area of mixed-use development within walking-distance (350-meter) radius, which is designed by taking into account maximum ease of access to public transportation and to encourage the development of transportation integration within the area. Such an area should be developed through the principle of vertical-density development, so as to encourage the creation of higher quality open spaces. In addition, the area should hopefully become a mixed-use melting pot which increases social interaction so as to have a positive overall impact on the area in question. Increases in vertical-density development and improvements in mixed use should be manifested through a spatial integration design, so that it will ultimately have a positive impact on the overall development of the area.

In 2019, the Corporation continued to implement the mandate granted by the Governor of DKI Jakarta Province to the Corporation through Pergub No. 140 / 2017 concerning the Assignment of PT MRT Jakarta (Perseroda) as the Main Operator of the Jakarta Transit Oriented Development Corridor (North - South) Transit Area Phase 1. In 2019 the Governor also introduced Regulation No. 67 / 2019 concerning the Implementation of Transit Oriented Development Areas, which states that, as the operator of the TOD Area, the Corporation has the task of compiling a set of Urban Design Guidelines (UDGL) for the MRT Jakarta TOD area that lies along the North - South corridor.

Selain itu Perseroan juga melanjutkan penyelesaian penyusunan PRK Fase 2 (Sarinah-Kota Tua) yang bekerja sama dengan konsultan terpilih, yaitu PT LAPI ITB, PSUD dan Gensler.

Sesuai dengan Pergub No. 67/2019, maka untuk menjadi pengelola KBT, Perseroan harus menyelesaikan dan mengirimkan kajian-proposal KBT kepada Pemprov DKI Jakarta sebagai dasar pengajuan. Untuk itu, Perseroan telah mengajukan 5 KBT pertama yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M-ASEAN, Istora-Senayan, dan Dukuh Atas, serta 3 KBT berikutnya yaitu Bundaran HI, Cipete Raya, dan Glodok - Kota Tua.

Selain itu, Perseroan juga melanjutkan penyusunan kajian proposal KBT untuk perpanjangan jalur menuju utara yaitu menuju Ancol Barat dengan konsultan terpilih yaitu PT. Studio Rancang Urban Selaras (Urban+).

PENGEMBANGAN INTERKONEKSI INTERCONNECTION DEVELOPMENT

Pada tahun 2019, telah diterbitkan Peraturan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroan) mengenai Pedoman Komponen Biaya Interkoneksi Bangunan-Stasiun MRT Jakarta (PER/044/BOD-MRT/VIII/2019). Peraturan Direksi ini dimaksudkan sebagai standarisasi bagi implementasi pengembangan Interkoneksi antara stasiun MRT Jakarta dengan bangunan-bangunan di sekitarnya.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan juga telah melakukan proses diskusi dengan banyak pengembang potensial di sekitar stasiun MRT Jakarta Fase 1 dan Fase 2 untuk pengembangan interkoneksi. Beberapa pengembang juga telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait konsep pengembangan lahan dan interkoneksi dalam lingkup KBT.

Interkoneksi Stasiun Blok M ke Blok M Plaza telah dioperasikan bersamaan dengan peresmian MRT Jakarta Fase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI), sementara interkoneksi Stasiun Bundaran HI ke gedung Indonesia One saat ini dalam proses konstruksi.

Pada tahun 2019, Perseroan juga telah melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT Inti Menara Jaya tentang Perancangan Bangunan dan Fasilitas Interkoneksi Poins Square - Stasiun MRT Jakarta Lebak Bulus pada tanggal 26 Agustus 2019.

Saat ini Perseroan tengah melakukan pembahasan bersama 13 pengembang potensial untuk membangun interkoneksi di 8 stasiun MRT Fase 1.

In addition, the Corporation also continued to work towards the completion of the preparation of Phase 2 PRK (Sarinah - Kota Tua) in collaboration with PT. LAPI ITB, PSUD and Gensler.

In accordance with Governor's Regulation No. 67/2019, in order to become an operator of a TOD Area, the Corporation must complete a TOD area analysis and submit a proposal to the DKI Jakarta Provincial Government. The Corporation has already submitted proposals relating to 5 TOD Areas, namely Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M - ASEAN, Istora - Senayan and Dukuh Atas. These were followed by a further 3 TOD Areas, namely Bundaran HI, Cipete Raya, and Glodok - Kota Tua.

In addition, the Corporation has also prepared a further TOD Area analysis which addresses the extension of the North - South Corridor to Ancol Barat in collaboration with PT. Studio Rancang Urban Selaras (Urban+).

In 2019, a PT MRT Jakarta (Perseroan) Board of Directors Regulation was issued which contained Guidelines for Interconnected Building Cost Components - Jakarta MRT Station (PER / 044 / BOD - MRT / VIII / 2019). This Board of Directors Regulation was intended to set standards for the implementation of interconnected developments between MRT Jakarta stations, as well as for various buildings in surrounding areas.

Throughout 2019, the Corporation also held discussions with many potential developers regarding MRT Jakarta Phase 1 and Phase 2 stations in relation to interconnected development. Some developers have also signed a Memorandum of Understanding (MoU) relating to the concept of land development and interconnection within the scope of TOD Areas.

Interconnectivity between Blok M Station and Blok M Plaza has already been introduced, along with the commencement of MRT Jakarta Phase 1 (Lebak Bulus - Bundaran HI), while interconnectivity between Bundaran HI Station and Indonesia One is currently under construction.

On August 26, 2019, the Corporation also signed a Cooperation Agreement (PKS) with PT Inti Menara Jaya relating to the Design of Interconnected Facilities at Poins Square - MRT Jakarta Lebak Bulus Station.

The Corporation is currently also in discussions regarding Interconnectivity with 13 potential developers at 8 MRT Phase 1 Stations..

PENYUSUNAN KAJIAN MODEL BISNIS KBT *PREPARATION OF STUDY ON TOD BUSINESS MODEL*

Pada tahun 2019, Perseroan telah melakukan studi internal yang berkaitan dengan proses pengembangan model bisnis dalam KBT. Studi ini bertujuan untuk melakukan analisis dan simulasi serta proyeksi finansial terhadap model bisnis jasa pengelolaan KBT dan pengembangan Interkoneksi, serta implementasi metode *Land Value Capture* (LVC).

Perseroan juga telah melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi pengembangan lahan dan sudah terdapat beberapa pengembang yang mengajukan proposal untuk peningkatan Koefisien Luas Bangunan (KLB) di 5 KBT pertama (Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M – ASEAN, Istora – Senayan, dan Dukuh Atas) serta KBT lainnya berdasarkan pada *Masterplan* Panduan Rancang Kota (PRK) di tiap KBT.

In 2019, the Corporation conducted a study which addressed the process of developing business models within TOD Areas. This study aimed to set out an analysis and simulation, as well as financial projections relating to the management - service business model for TOD Areas, the development of interconnectivity and the implementation of the Land Value Capture (LVC) method.

The Corporation has also mapped land development potential and several developers have submitted proposals for increasing the Floor Area Ratio (FAR) within the first 5 TOD Areas (Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M - ASEAN, Istora - Senayan and Dukuh Atas), as well as for other TOD Areas based on the Urban Design Guidelines (UDGL) for TOD Areas.



Gambar. 4.7. Potret Interkoneksi Blok M
Image. 4.7. Interconnections in Blok M

VISI, MISI, DAN NILAI PERSEROAN

VISION, MISSION, AND CORPORATE VALUE

VISI PERSEROAN

CORPORATE VISION

“UNTUK MENJADI PENYEDIA SARANA TRANSPORTASI PUBLIK TERDEPAN, YANG BERKOMITMEN UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI PENINGKATAN MOBILITAS, PENGURANGAN KEMACETAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSIT PERKOTAAN.”

“To become the leading provider of public transportation, committed to encourage economic growth through mobility improvement, traffic reduction and the development of urban transit systems.”

MISI PERSEROAN

CORPORATE MISSION

Untuk mencapai keunggulan yang berkesinambungan di semua hal yang dilakukan melalui:

- Pengembangan dan pengoperasian jaringan transportasi publik yang aman, terpercaya, dan nyaman;
- Menghidupkan kembali lingkungan perkotaan melalui pengembangan transit perkotaan ternama; dan
- Membangun reputasi sebagai pilihan dengan melibatkan, menginspirasi, dan memotivasi seluruh karyawan.

To strive for excellence in a sustainable way in all our undertakings through the following:

- *Development and operation of a safe, trusted and comfortable public-transportation network;*
- *Rejuvenation of urban environment through prominent urban-transit developments; and*
- *Building reputation as a preferred corporate by involving, inspiring and motivating our manpower.*

STRATEGI PERSEROAN

CORPORATE STRATEGY

Dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Perseroan memiliki strategi yang difokuskan kepada penguasaan kompetensi inti Perseroan sebagai operator kereta api perkotaan yang efisien dan berkelas dunia terutama dalam hal:

- Pengembangan dan operasi jaringan transportasi MRT
- Pengelolaan Kawasan Berorientasi Transit

In order to achieve the Corporation's vision and mission, the corporate has a set of strategy that is focused on the Corporation's core competencies as an efficient and world-class urban railway operator, especially in terms of:

- *Development and operation of MRT Jakarta's transportation network*
- *Management of Transit Oriented Development areas*

Dengan berfokus pada dua aspek yang saling terkait, Perseroan akan berkembang menjadi bisnis yang efektif dan terfokus untuk mengembangkan kompetensi intinya dan menjadi bagian dari komunitas perkeretaapian kota yang memiliki model bisnis yang berkembang pesat.

By focusing on these two interrelated aspects, the Corporation will be an effective and focused business which will enable the corporate to further develop its core competencies and be part of the urban railway operator community that has an advanced business model.

Perseroan telah menyelesaikan konstruksi Fase I MRT Jakarta jalur Utara – Selatan, serta telah mengoperasikannya kepada umum pada 24 Maret 2019 yang menandakan bahwa strategi jangka pendek Perseroan telah tercapai di tahun 2019 dan Perseroan terus menerus berupaya untuk melanjutkan menuju strategi berikutnya. Dalam mengupayakan keunggulan operasionalnya, Perseroan telah melakukan beberapa hal untuk memastikan layanan operasional MRT Jakarta dapat berjalan dengan optimal, seperti adanya pelatihan dan sertifikasi rutin terhadap awak sarana perkeretaapian, sarana, maupun prasarana yang dimiliki oleh MRT Jakarta. Selain hal tersebut, Perseroan terus menerus melakukan penyempurnaan pada aspek prosedur serta koordinasi pada unit kerja Operasi dan Pemeliharaan untuk menjalankan operasi MRT Jakarta yang andal. Untuk mencapai keunggulan operasionalnya, Perseroan juga melakukan kerja sama maupun sesi pertukaran pengetahuan dengan operator perkeretaapian domestik maupun internasional agar Perseroan mendapatkan pembelajaran operasi dan pemeliharaan terbaik dan terkini untuk dapat diadaptasi di lingkungan Perseroan.

Mengingat adanya mekanisme kontrol atas tarif oleh Pemerintah secara ketat dalam penyediaan layanan transportasi umum berbasis rel, Perseroan harus memiliki strategi dan kreativitas untuk menjajaki peluang dan potensi bisnis lainnya dalam memperoleh pendapatan di luar tarif maupun subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini akan berpengaruh kepada strategi bisnis non-tiket yang disusun oleh Perseroan. Dalam memperoleh pendapatan di luar tarif dan subsidi, Perseroan telah melakukan kerjasama dalam bidang periklanan, retail, dan telekomunikasi di dalam stasiun, serta pengembangan kawasan di sekitar area stasiun. Selain itu, Perseroan juga telah menjajaki pengembangan jaringan dengan melakukan kajian atas kebijakan pengembangan jaringan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beserta kajian atas skema pembiayaan untuk pengembangan jaringan tersebut.

Dengan strategi bisnis Perseroan yang tersusun secara matang, Perseroan tidak hanya menyediakan layanan transportasi umum berbasis rel yang aman, nyaman, dan dapat diandalkan, namun Perseroan berupaya untuk mencapai visinya untuk menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang memiliki dampak dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan.

The construction of the phase I MRT North-South Jakarta route was completed and commenced operations on March 24, 2019, which indicates that the Corporation's short-term strategy was achieved in 2019. Meanwhile, the Corporation is continuing with its next strategy. In striving for operational excellence, the Corporation has implemented several measures aimed at ensuring that MRT Jakarta's operational services can run optimally, including the implementation of training and the certification of MRT Jakarta's Operational and Maintenance staff, as well as the routine certification of MRT Jakarta facilities and infrastructure. In addition, the Corporation is continuing to improve its procedures and coordination within its Operations and Maintenance work units in order to run MRT Jakarta operations with reliability and customer trustworthiness in mind. In order to achieve operational excellence, the Corporation is also cooperating and exchanging knowledge with a number of domestic and international urban railway operators, so that it possesses the best, most up-to-date knowledge in relation to Operational and Maintenance activities which the Corporation will then adapt.

Due to a strict mechanism of tariff controls imposed by the government as regards the provision of rail-based public transportation services, the Corporation must have a strategy and must demonstrate creativity as it explores opportunities and other business potential in its efforts to generate revenue outside the tariffs and subsidies set by the government. This will ultimately affect the non-ticket business strategy prepared by the Corporation. In generating revenue other than tariffs and subsidies, the Corporation is cooperating within the fields of advertising, retail and telecommunications within its stations, as well as in terms of the development of areas around stations. In addition, the Corporation is also exploring network development by conducting a study of network development policies determined by the Central Government and the Provincial Government of DKI Jakarta, along with a study of funding schemes for network expansion.

With the Corporation's business strategy being carefully developed, it is not only providing rail-based public transportation services which are safe, comfortable and reliable, but also striving to achieve the Corporation's vision of becoming a leading public-transportation service provider that has an impact in terms of boosting economic growth through increased mobility, congestion reduction and urban transit system development.

PERSETUJUAN MANAJEMEN ATAS VISI DAN MISI PERSEROAN MANAGEMENT APPROVAL OF CORPORATE VISION AND MISSION

Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perseroan telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) 2014-2028 yang telah disahkan pada tanggal 24 November 2014. Dewan Komisaris dan Direksi secara periodik melakukan kajian terhadap relevansi Visi dan Misi Perseroan terhadap perkembangan terkini Perseroan. Di tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi telah melakukan kajian relevansi Visi dan Misi Perseroan yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun 2019 yang telah disahkan pada tanggal 21 Desember 2018.

The Corporation's Vision, Mission and Values were determined by its Board of Commissioners and Board of Directors within the 2014-2028 Long-Term Corporate Plan (RJPP), which was ratified on November 24, 2014. The Board of Commissioners and Board of Directors periodically review the relevance of the Corporation's Vision and Mission in light of the Corporation's most recent developments. In 2019, the Board of Commissioners and Board of Directors conducted a study on the relevance of the Corporation's Vision and Mission, as set out in the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), which was ratified on December 21, 2018.



Gambar 4.8. MRT Jakarta Pasti Bisa
Image 4.8. MRT Jakarta "I CAN"

NILAI-NILAI PERSEROAN CORPORATE VALUES

Pada tahun 2018, PT MRT Jakarta (Perseroda) mengenalkan perubahan nilai-nilai Perseroan yang disahkan pada tanggal 31 Januari 2018 melalui Peraturan Direksi No. 003 Tahun 2018 tentang Penetapan Core Values Perseroan dan Leadership Competencies di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Nilai-nilai Perseroan yang dimaksud menjadi acuan dalam berperilaku di MRT Jakarta.

In 2018, PT MRT Jakarta (Perseroda) introduced a number of changes to its corporate values which were ratified on January 31, 2018 through Board of Directors Regulation No. 003 of 2018 on the Establishment of Corporate Core Values and Leadership Competencies within PT MRT Jakarta (Perseroda). The Corporate Values referred to and which are used as a reference for the MRT Jakarta can be summed up as "I CAN".

INTEGRITY

Setiap karyawan Perseroan secara konsisten menampilkan sikap jujur dan satu kata dengan perbuatan sesuai dengan Pedoman Perilaku dan Tata Kelola Perseroan.

Each individual working for the Corporation should consistently display honesty and "one word with action" principles according to corporate governance and the code of conduct.

Keharusan

Do's

1. Saya bertindak sesuai dengan Pedoman Perilaku Perseroan.
2. Saya harus bekerja dengan profesional.
3. Saya berani menyatakan kebenaran.
4. Saya berani bertanggung jawab.

1. I act according to the Corporate Code of Conduct.
2. I must work professionally.
3. I dare to declare the truth.
4. I dare to be responsible.

Larangan

Dont's

1. Saya menggunakan sumber daya Perseroan untuk keuntungan pribadi.
2. Saya melakukan pembiaran atas pelanggaran.
3. Saya memberi dan menerima gratifikasi yang dilarang.
4. Saya tidak menghargai proses dan alur kerja.

1. I use corporate resources for personal gain.
2. I omit violations.
3. I give and accept banned gratifications.
4. I don't value process and work flow.

C CUSTOMER FOCUS

Setiap karyawan Perseroan menampilkan sikap proaktif dalam memahami, membantu, dan melayani kebutuhan pelanggan serta membangun relasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Each Corporate employee must pro-actively understand, assist and meet customers' requirements, as well as build good relations with all stakeholders.

Keharusan

Do's

1. Saya memperlakukan pelanggan dengan memposisikan diri sebagai pelanggan.
2. Saya membina hubungan pelanggan yang berorientasi jangka panjang.
3. Saya melayani pelanggan dengan senyum, sapa, dan salam.
4. Saya memberikan solusi inovatif atas masukan dan saran dari pelanggan.

1. I treat customers by positioning myself as a customer.
2. I foster a long-term, customer-oriented relationships.
3. I serve customers with smiles and greetings.
4. I provide innovative solutions to customer input and suggestions.

Larangan

Dont's

1. Saya melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan.
2. Saya mengabaikan kesempatan untuk memberikan pelayanan di atas standar.
3. Saya mengatakan "tidak bisa" sebelum memahami kebutuhan pelanggan.
4. Saya berpenampilan, berperilaku, dan berkomunikasi tidak sesuai etika.

1. I discriminate during the provision of services.
2. I ignore the opportunity to provide services above the standard.
3. I say "can't" before understanding customer needs.
4. I look, behave, and communicate unethically.

A ACHIEVEMENT ORIENTED

Setiap karyawan Perseroan memiliki semangat untuk berprestasi dan berani menghadapi tantangan dengan cara kerja yang efektif dan efisien.

Each Corporate employee has the spirit to create achievements and to face challenges through the implementation of effective and efficient procedures.

Keharusan

Do's

1. Saya memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk mencapai kinerja yang terbaik.
2. Saya proaktif dalam bekerja menciptakan solusi.
3. Saya menetapkan target kinerja yang terukur.
4. Saya memanfaatkan pembelajaran sebelumnya untuk melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

1. I use all of my potential to achieve the best performance.

2. I am proactive in working on the creation of solutions.

3. I set measurable performance targets.

4. I use previous learning to innovate and make continuous improvements.

Larangan

Dont's

1. Saya mengabaikan risiko dalam bertindak.
2. Saya menunda-nunda pekerjaan.
3. Saya cepat berpuas diri dalam melakukan pekerjaan.
4. Saya mudah menyerah bila mendapatkan masalah.

1. I ignore the risks involved in my actions.

2. I procrastinate.

3. I am complacent and hurry my work.

4. I give up easily when I get into trouble.

N NURTURING TEAM WORK

Setiap karyawan Perseroan menghargai perbedaan dan kontribusi setiap individu serta membangun komitmen untuk bersinergi secara produktif.

Each Corporate employee appreciates the differences and contributions of other individuals, as well as building commitment to productively creating synergy.

Keharusan

Do's

1. Saya berempati, beretika, proaktif terhadap rekan kerja.
2. Saya bersikap saling percaya atas kemampuan rekan kerja.
3. Saya memberikan umpan balik yang konstruktif.
4. Saya bersinergi dalam bekerja sesuai dengan tugas dan peran.

1. I empathize with and am ethical and proactive with colleagues.

2. I trust the abilities of my co-workers.

3. I provide constructive feedback.

4. I work in synergy according to my duties and roles.

Larangan

Dont's

1. Saya mengalihkan tanggung jawab/kesalahan.
2. Saya menonjolkan diri sendiri tanpa menghargai prestasi rekan kerja.
3. Saya membiarkan anggota tim tidak mendapatkan informasi yang diperlukan.
4. Saya bersikap pasif dan berlindung di balik kerja tim/kesibukan sendiri.

1. I shift responsibility for my mistakes.

2. I promote myself without respecting the achievements of my colleagues.

3. I do not give team members the information they need.

4. I am passive and take cover behind the work of my team / business.

MAKNA LOGO PERSEROAN

MEANING OF THE CORPORATE LOGO



increasing mobility, improving life quality



Logo MRT Jakarta mengambil gaya huruf "M" dan "J" membentuk track kereta MRT. Jalur yang ramping dan mengalir melambangkan perjalanan yang mulus dari keberangkatan hingga tujuan, bahkan dengan adanya perhentian di stasiun persinggahan. Warna hijau merepresentasikan pertumbuhan, lingkungan, yang kemudian menciptakan keharmonisan dengan warna biru yang menunjukkan stabilitas dan keandalan yang menjadi ciri khas dari PT MRT Jakarta (Perseroda).

The MRT Jakarta logo combines the letters "M" and "J" to form the MRT train tracks. A sleek and flowing track symbolizes a smooth journey from departure to destination, even in the presence of a stopover station. The color green represents growth and the environment, which then creates a harmony in blue, indicating the stability and reliability that is the hallmark of PT MRT Jakarta (Perseroda).



Biru dan hijau adalah warna inti PT MRT Jakarta (Perseroda). Warna-warna ini digunakan dalam berbagai aplikasi dan selalu mencerminkan identitas perseroan MRT Jakarta itu sendiri.

Blue and green are the core colors of PT MRT Jakarta (Perseroda). These colors are used in various applications and reflect the corporate identity of MRT Jakarta.

increasing mobility, improving life quality

Dalam logo MRT Jakarta, terdapat 2 (dua) kata kunci yang menyatu sebagai tagline, yaitu "Increasing Mobility" dan "Improving Life Quality". Tagline ini didesain untuk menarik perhatian dengan ringkas dan memberikan pemahaman yang mengesankan citra perseroan kepada pelanggan. Tagline ini mencakup visi utama MRT Jakarta, yaitu meningkatkan mobilitas dan meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.

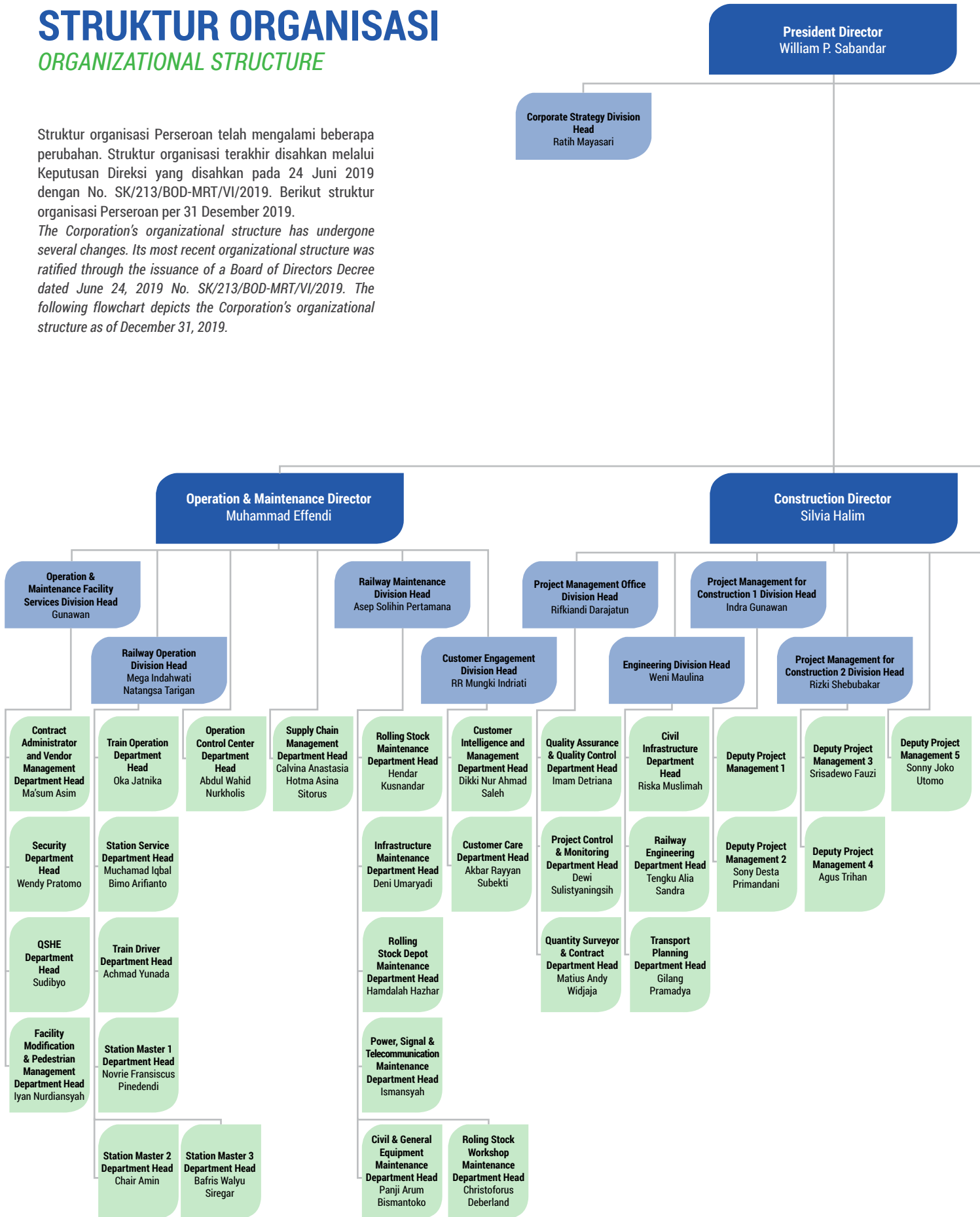
In the MRT Jakarta logo, 2 (two) keywords are fused into a tagline, which is "Increasing Mobility" and "Improving Life Quality". The tagline has been designed to attract attention with its snappiness and ability to impart understanding of the MRT Jakarta corporate image to customers. The tagline includes the main vision and mission of MRT Jakarta, which is to increase mobility and improve the quality of life for Jakarta's citizens.

STRUKTUR ORGANISASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur organisasi Perseroan telah mengalami beberapa perubahan. Struktur organisasi terakhir disahkan melalui Keputusan Direksi yang disahkan pada 24 Juni 2019 dengan No. SK/213/BOD-MRT/VI/2019. Berikut struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2019.

The Corporation's organizational structure has undergone several changes. Its most recent organizational structure was ratified through the issuance of a Board of Directors Decree dated June 24, 2019 No. SK/213/BOD-MRT/VI/2019. The following flowchart depicts the Corporation's organizational structure as of December 31, 2019.





PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS



MUHAMMAD SYAUGI

Komisaris Utama *President Commissioner*

Periode Jabatan : 31 Mei 2019-RUPS Tahun 2023,
Periode Pertama

Term of Office : May 31, 2019 – 2023 AGMS,
First Period

DATA PRIBADI

Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 59 tahun
Kelahiran Malang, 10 Desember 1960

*Indonesian citizen
59 years old
Born in Malang, December 10, 1960*

DOMISILI

Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bekasi, West Java, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

History of Appointment

Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019, merupakan periode ke-1 untuk masa jabatan 2019-2023.

Serves on the Corporation's Board of Commissioners through a Shareholder Decree outside the AGMS dated May 31, 2019, 1st period of the 2019-2023 term.

PENDIDIKAN

Education

Sarjana (S1) Sosial Politik dari Universitas Merdeka Madiun (1998), dan Magister (S2) Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2014).

Bachelor of Social Politics from Merdeka Madiun University (1998), and Master of Management from IMMI Jakarta College of Management (2014).

PENGALAMAN KERJA

History of Employment

Memiliki pengalaman pengabdian sebagai Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat terakhir Marsekal Madya. Lulusan Akademi Angkatan Udara TNI (1984), Fighter Weapon Instructor Course F-16 USA (1995), dan Sesko TNI AL angkatan 36 (1999). Di pengujung 90-an hingga 2002 bertugas sebagai Komandan Skuadron Udara 3/F-16 lalu mengemban tugas sebagai Atase Pertahanan RI untuk Rusia (2003-2007). Kemudian beliau ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI (2014-2017), serta dipercaya untuk menjabat Kepala Badan SAR Nasional (2012-2019).

Experience serving in the Indonesian National Armed Forces (TNI) with a final rank of Air Marshal. Graduate of the Indonesian Air Force Academy (1984), Fighter Weapons Instructor Course F-16 USA (1995) and Indonesian Navy Special Forces 36 (1999). From the end of the '90s until 2002 he served as Commander of the 3/F-16 Air Squadron and then assumed the role of Indonesian Defense Attache to Russia (2003-2007). He was then appointed as a Director-General of Defense Planning at the Republic of Indonesia Defense Ministry (2014-2017) and was appointed to serve as National SAR Agency Head (2012-2019).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Professional Certification and Competency Development Program in 2019

Workshop Asia Anti Fraud, Kerugian Negara dalam BUMN & BUMD: Risiko Investasi atau Korupsi, 2019

Asian Anti-Fraud Workshop, State Losses in SOEs (BUMN) & Regional-Owned Enterprises (BUMD): Investment or Corruption Risk, 2019

RANGKAP JABATAN

Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan

Occupies no concurrent position.

HUBUNGAN AFILIASI

Affiliation

Muhammad Syaugi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama.

Muhammad Syaugi has no affiliation with any other members of the Board of Commissioners, Board of Directors or major shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

MRT Jakarta Share Ownership

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, M. Syaugi tidak memiliki saham Perseroan.

Up until the end of 2019, the Corporation had not issued any public shares or run any share ownership program for management and employees. Therefore, M. Syaugi does not own any of the Corporation's shares.



RUKIJO

Komisaris Commissioner

Periode Jabatan : 10 Agustus 2015-RUPS Tahun 2020,
Periode Pertama

Term of Office : August 10, 2015 – 2020 AGMS,
First Period

DATA PRIBADI

Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 52 tahun
Kelahiran Metro, 1 Februari 1967

Indonesian citizen
52 years old
Born in Metro, February 1, 1967

DOMISILI

Domicile

Pamulang, Tangerang, Indonesia

Pamulang, Tangerang, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

History of Appointment

Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan Keputusan RUPS Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015, merupakan periode ke-1 untuk masa jabatan 2015-2020. Melalui Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 4 Mei 2018 beliau diangkat sebagai Pelaksana Tugas Komisaris Utama. Melalui Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 31 Mei 2019 beliau kembali ditugaskan sebagai Komisaris.

Serves on the Corporation's Board of Commissioners through a 2015 AGMS Resolution dated August 10, 2015, 1st period of the 2015-2020 term. Through the PT MRT Jakarta (Perseroda) Shareholders' Circular Decision dated May 4, 2018 Rukijo was appointed as Acting President Commissioner. Through the Shareholders' Decision Outside the GMS of PT MRT Jakarta (Perseroda) dated May 31, 2019 he was re-assigned as Commissioner.

PENDIDIKAN

Education

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Lampung (1990) serta Magister (S2) Manajemen Universitas Muhammadiyah Jakarta (2007).

Bachelor of Economics majoring in Economics and Development Studies from Lampung University (1990) and Master of Management from the University of Muhammadiyah Jakarta (2007).

RANGKAP JABATAN

Concurrent Position

Memiliki pengalaman profesi sebagai Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu) (2007-2009); Kepala Subdirektorat Pelaksanaan Transfer II DJPK Kemenkeu (2009-2013); Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu (2013-2014); Direktur Dana Perimbangan DJPK Kemenkeu (2014-2016); Sekretaris DJPK Kemenkeu (2016-sekarang). Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang diangkat sejak tahun 2016.

Has professional experience as Personnel Section Head at the Finance Ministry's Directorate-General of Fiscal Balance (Finance Ministry DJPK) (2007-2009); Sub Directorate Head of Transfer II Implementation at the Finance Ministry DGT (2009-2013); Regional Tax and Regional Retribution Director at the Finance Ministry DJPK (2013-2014); Finance Ministry DGT Balance Fund Director (2014-2016); Secretary of Finance Ministry DJPK (2016-present). Currently, Rujiko also serves as Secretary of the Finance Ministry at the Directorate-General of Fiscal Balance, to which he was appointed in 2016.

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Professional Certification and Competency Development Program in 2019

-

-

PENGALAMAN KERJA

History of Employment

Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2016-sekarang)

Secretary of the Finance Ministry at the Directorate-General of Fiscal Balance (2016-present)

HUBUNGAN AFILIASI

Affiliation

Rukijo memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perseroan. Jabatan Rukijo sebagai Komisaris Perseroan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Rukijo tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

Rukijo has an affiliation with Major / Controlling Shareholders through his position in the Finance Ministry as part of the Corporation's ultimate beneficial owners. Rukijo's position as the Corporation's Commissioner has passed the relevant fit-and-proper test. In addition, Rukijo has no affiliation with any other members of either the Board of Commissioners or Board of Directors.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

MRT Jakarta Share Ownership

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Rukijo tidak memiliki saham Perseroan.

Up until the end of 2019, the Corporation had not issued any public shares or run any share ownership program for management and employees. Therefore, Rukijo does not own any of the Corporation's shares.



ZULFIKRI

Komisaris Commissioner

Periode Jabatan : 4 Mei 2018-RUPS Tahun 2022,
Periode Pertama

Term of Office : May 4, 2018 – 2022 AGMS,
First Period

DATA PRIBADI

Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 57 tahun
Kelahiran Lintau, 9 Juli 1962

Indonesian citizen
57 years old
Born in Lintau, July 9, 1962

DOMISILI

Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

South Tangerang, Banten, Indonesia.

RIWAYAT PENUNJUKAN

History of Appointment

Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkular RUPS PT MRT Jakarta (Perseroada) tanggal 4 Mei 2018, merupakan periode ke-1 untuk masa jabatan 2018-2022.

Serves on the Corporation's Board of Commissioners through PT MRT Jakarta (Perseroada) GMS Circular Resolution dated May 4, 2018, 1st Period of the 2018-2022 term.

PENDIDIKAN

Education

Sarjana (S1) Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Bandung (ITB) (1987); Magister (S2) Sistem dan Teknik Jalan Raya, Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung, Bandung (1990); dan Pascasarjana (S2) Ekonomi Transportasi, Program Pasca Sarjana Universitas LYON II ENTREQ, Perancis (1997).

Bachelor of Civil Engineering and Planning, Bandung Institute of Technology (ITB) (1987); Master of Road Systems and Engineering, Postgraduate Program at the Bandung Institute of Technology, Bandung (1990); and Masters of Transportation Economics, LYON II University ENTREQ Postgraduate Program, France (1997).

PENGALAMAN KERJA

History of Employment

Berkarier di Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian (2017-sekarang). Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Direktur Prasarana Perkeretaapian (Mei 2017-November 2017); Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Mei 2016-Mei 2017); Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Multimoda (Februari 2014-Mei 2016); dan Kepala Bagian Perencanaan (Januari 2011-Februari 2014).

Has professional experience in the Transportation Ministry at the Directorate-General of Railways. He currently serves as Director General of Railways (2017-present). Positions that he has held include Railway Infrastructure Director (May 2017-November 2017); Railway Traffic and Transportation Director (May 2016-May 2017); Multimodal Research and Development Center Head (February 2014-May 2016); and Planning Head (January 2011-February 2014).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Professional Certification and Competency Development Program in 2019

-

-

RANGKAP JABATAN

Concurrent Position

Direktur Jenderal Perkeretaapian Lembaga Kementerian Perhubungan (2017-sekarang)

Transportation Ministry Director-General of Railways (2017-present)

HUBUNGAN AFILIASI

Affiliation

Zulfikri memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian Perhubungan sebagai entitas pemilik akhir Perseroan. Jabatan Zulfikri sebagai Komisaris Perseroan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu, Zulfikri tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

Zulfikri has an affiliation with Major / Controlling Shareholders through his position in the Transportation Ministry as the Corporation's Ultimate Beneficial Owner. Zulfikri's position as the Corporation's Commissioner has passed a fit-and-proper test. In addition, Zulfikri has no affiliation with any other Board of Commissioners or Board of Directors members.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

MRT Jakarta Share Ownership

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Zulfikri tidak memiliki saham Perseroan.

Up until the end of 2019, the Corporation had not issued any public shares or run any share ownership program for management and employees. Therefore, Zulfikri does not own any of the Corporation's shares.



MUKHTASOR

Komisaris Commissioner

Periode Jabatan : 29 Oktober 2018-RUPS Tahun 2022,
Periode Pertama

Term of Office : October 29, 2018 – 2022 AGMS,
First Period

DATA PRIBADI

Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 50 tahun
Kelahiran Blitar, 20 April 1969

Indonesian citizen
50 years old
Born in Blitar, April 20, 1969

DOMISILI

Domicile

Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Surabaya, East Java, Indonesia.

RIWAYAT PENUNJUKAN

History of Appointment

Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT MRT Jakarta (Perseroda) tanggal 29 Oktober 2018, merupakan periode ke-1 untuk masa jabatan 2018-2022.

Serves on the Corporation's Board of Commissioners through PT MRT Jakarta (Perseroda) Shareholders' Circular Decision dated October 29, 2018, 1st Period of the 2018-2022 term.

PENDIDIKAN

Education

Sarjana (S1) Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) (1993); Master of Engineering, Civil Engineering Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland (MUN), Canada (1998); dan Doctor of Philosophy, Civil Engineering Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland, Canada (2001).

Bachelor of Chemical Engineering, Faculty of Industrial Technology from the Sepuluh November Institute of Technology (ITS) (1993); Master of Engineering, Civil Engineering Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland (MUN), Canada (1998); and Doctor of Philosophy, Civil Engineering Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland, Canada (2001).

PENGALAMAN KERJA

History of Employment

Beliau pernah menjabat sebagai Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014); Penasihat Senior Direktur Utama PT Pertamina (2015-2016); Anggota Dewan Penasihat Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2015-2017); dan Guru Besar, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya (2009-sekarang).

Mukhtasor has also served as a Member of the Indonesian National Energy Board (2009-2014); as a Senior Advisor to the President Director of PT Pertamina (2015-2016); as a Member of the Minister's Advisory Council at the Environment and Forestry Ministry (2015-2017); and as a Professor at the Sepuluh November Institute of Technology (ITS), Surabaya (2009-present).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Professional Certification and Competency Development Program in 2019

-

-

RANGKAP JABATAN

Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan

Occupies no concurrent position.

HUBUNGAN AFILIASI

Affiliation

Mukhtasor tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, maupun dengan pemegang saham utama.

Mukhtasor has no affiliation with any other members of the Board of Commissioners or Board of Directors or with any major shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

MRT Jakarta Share Ownership

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Mukhtasor tidak memiliki saham Perseroan.

Up until the end of 2019, the Corporation had not issued any public shares or run any share ownership program for management and employees. Therefore, Mukhtasor does not own any of the Corporation's shares.



ADNAN PANDU PRAJA

Komisaris Commissioner

Periode Jabatan : 31 Mei 2019-RUPS Tahun 2023,
Periode Pertama

Term of Office : May 31, 2019 – 2023 AGMS,
First Period

DATA PRIBADI

Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 59 tahun
Kelahiran Jakarta, 14 Januari 1960

Indonesian citizen
59 years old
Born in Jakarta, January 14, 1960

DOMISILI

Domicile

Depok, Jawa Barat, Indonesia.

Depok, West Java, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

History of Appointment

Menjabat pada jajaran Komisaris Perseroan melalui Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019, merupakan periode ke-1 untuk masa jabatan 2019-2023.

Serves on the Corporation's Board of Commissioners through Shareholder Decree outside GMS dated May 31, 2019, which is the 1st period of the 2019-2023 term.

PENDIDIKAN

Education

Sarjana (S1) Hukum di Universitas Indonesia (1986) dan Pascasarjana (S2) Fakultas Hukum di Universitas of Technology, Sydney (2003).

Bachelor of Law from the University of Indonesia (1986) and Postgraduate of the Faculty of Law at the University of Technology, Sydney (2003).

PENGALAMAN KERJA

History of Employment

Pada era 1980-an, beliau aktif mengikuti program pertukaran pelajar Asia di Jepang, mendirikan Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS), serta menjadi penyunting Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Di tahun 1990-an dan 2000-an, beliau aktif bekerja sebagai praktisi hukum di sejumlah kantor hukum, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Dipercaya untuk menjabat Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (2011-2015), kemudian sebagai Staf Khusus Menteri Perindustrian RI (2016-2017). Beliau juga tercatat aktif sebagai penulis artikel di sejumlah media massa nasional.

During the 1980s, Adnan actively participated in Asian student exchange programs in Japan, founded the Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS) and was the editor of the Law and Development Journal for the Faculty of Law at the University of Indonesia. In the 1990s and 2000s, he actively worked as a legal practitioner for a number of law offices and for the Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM). He was entrusted to serve as Deputy-Chairman of the Republic of Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) (2011-2015), then as Special Staff Member to the Republic of Indonesia Industry Minister (2016-2017). He is also active as an article writer for a number of national mass media publications.

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Professional Certification and Competency Development Program in 2019

- Workshop Perhimpunan Auditor Internal Indonesia, Best Practices in Implementing Effective Governance From Rules to Principles, 2019
- Qualified Chief Risk Officer, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2018
- Qualified Risk Governance Professional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2018
- Certified Chief Governance Officer, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2018
- Certified Governance Oversight Professional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2018
- Assessor of Competency, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2017

- Internal Auditor Indonesia Workshop, Best Practices in Effective Implementation

- Qualified Chief Risk Officer, National Professional Certification Agency, 2018
- Qualified Risk Governance Professional, National Professional Certification Board, 2018
- Certified Chief Governance Officer, National Professional Certification Board, 2018
- Certified Governance Oversight Professional, National Professional Certification Board, 2018
- Competency Assessor, National Professional Certification Board, 2017

RANGKAP JABATAN

Concurrent Position

- Komisaris PT Taspen Properti Indonesia
- Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- Commissioner for PT Taspen Properti Indonesia
- Open Selection Committee for Middle and First Leadership Position for the DKI Jakarta Provincial Government

HUBUNGAN AFILIASI

Affiliation

Adnan Pandu Praja memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama Pengendali, melalui jabatan Panitia Seleksi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perseroan. Jabatan Adnan Pandu Praja sebagai Komisaris Perseroan telah melalui uji kepatutan dan kelayakan. Selain itu Adnan Pandu Praja tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya atau Direksi.

Adnan Pandu Praja has an affiliation with the Corporation's Major / Controlling Shareholders through a position on the Selection Committee for the DKI Jakarta Provincial Government and as part of the Corporation's ultimate beneficial owners. Adnan Pandu Praja's position as the Corporation's Commissioner has passed a fit-and-proper test. In addition, Adnan Pandu Praja has no affiliation with any other Board of Commissioners or Board of Directors members.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

MRT Jakarta Share Ownership

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Adnan Pandu Praja tidak memiliki saham Perseroan.

Up until the end of 2019, the Corporation had not issued any public shares or run any share ownership program for management and employees. Therefore, Adnan Pandu Praja does not own any of the Corporation's shares.

PROFIL DIREKSI

DIRECTORS' PROFILE



WILLIAM P. SABANDAR

Direktur Utama *President Director*

Periode Jabatan : 21 Maret 2018-RUPS Tahun 2023,
Periode Kedua

Term of Office : March 21, 2018 – 2023 AGMS,
Second Period

DATA PRIBADI

Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 53 tahun
Kelahiran Makassar, 4 November 1966

*Indonesian citizen
53 years old
Born in Makassar, November 4, 1966*

DOMISILI

Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia.

South Tangerang, Banten, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

History of Appointment

Menjabat sebagai Direktur Utama sejak 21 Oktober 2016 sesuai keputusan RUPS Tahun 2016 melalui Akta No. 51 Tanggal 21 Oktober 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., untuk periode ke-1 meneruskan masa jabatan Direktur Utama sebelumnya periode 2013-2018. Melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2018 yang dituangkan dalam Akta No. 133 Tanggal 21 Maret 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., beliau diangkat kembali sebagai Direktur Utama untuk periode ke-2 masa jabatan 2018-2023.

Appointed President-Director on October 21, 2016 in accordance with 2016 GMS Resolution, Deed No. 51 dated October 21, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., First served as President-Director from October 21, 2016 for the 1st period, continued his previous President-Director term during the 2013-2018 period. According to 2018 GMS Resolution Deed No.133 dated March 21, 2018. Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., He was reappointed as President-Director for the 2018-2023 period.

PENDIDIKAN

Education

Sarjana (S1) Teknik Sipil, Universitas Hasanuddin, (1990), Master (S2) Teknik Transportasi dari Universitas New South Wales, Australia (2000), Doktor Geografi Transportasi dari Universitas Canterbury, Selandia Baru (2004).

Bachelor of Civil Engineering, Hasanuddin University, (1990), Masters in Transportation Engineering from the University of New South Wales, Australia (2000), Doctor of Transportation Geography from the University of Canterbury, New Zealand (2004).

PENGALAMAN KERJA

History of Employment

William memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman yang solid dalam pembangunan dan manajemen krisis di berbagai bidang, termasuk sebagai Kepala Rekonstruksi Kepulauan Nias (2005-2009); Utusan Khusus Sekretaris Jenderal ASEAN merangkap Kepala Operasi untuk Rekonstruksi Myanmar (2009-2010); Direktur Corporate Affairs Sekretariat ASEAN (2011-2012); Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (2012-2014); Kepala Operasi Satuan Tugas Nasional REDD+ (2014-2015); Penasihat Senior Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, merangkap Kepala Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2015-2016).

William P. Sabandar has more than 25 years of solid experience in development and the management of crises across various areas, including as Nias Island Reconstruction Head (2005-2009); Special Representative of the Secretary-General of ASEAN cum Head of Operations for Myanmar Reconstruction (2009-2010); Corporate Affairs Director for the ASEAN Secretariat (2011-2012); Expert Assistant to the Head of Presidential Work Unit for Development Monitoring and Control (UKP4) (2012-2014); Operations Head for the National REDD+ Task Force (2014-2015); Senior Advisor to the Energy and Mineral Resources Minister cum Head of the National Task Force for the Accelerated Development of Renewable Energy and Energy Conservation (2015-2016).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Professional Certification and Competency Development Program in 2019

- 12th Annual City-Rail Summit, Shine Consultant International
- High-level Roundtable Discussion on Sustaining Transit Investment in Asia's Cities: Bangkok, Asian Development Bank
- Urban 20 Mayors Summit and Urban Resilience Forum Tokyo, Tokyo Metropolitan Government
- The 2nd Indonesia Investment Day - Towards Indonesia 4.0, IIPC Singapore
- The 3rd International Conference on Civil and Environmental, Universitas Hasanuddin

- 12th Annual City-Rail Summit, Shine Consultant International
- High-level Roundtable Discussion on Sustaining Transit Investment in Asia's Cities: Bangkok, Asian Development Bank
- Urban 20 Mayors Summit and Urban Resilience Forum Tokyo, Tokyo Metropolitan Government
- The 2nd Indonesia Investment Day - Towards Indonesia 4.0, IIPC Singapore
- The 3rd International Civil and Environmental Conference, Universitas Hasanuddin

RANGKAP JABATAN

Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan

Occupies no concurrent position.

HUBUNGAN AFILIASI

Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with any Board of Commissioners or Board of Directors members or with any Major / Controlling Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

MRT Jakarta Share Ownership

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, William P. Sabandar tidak memiliki saham Perseroan.

Up until the end of 2019, the Corporation had not issued any public shares or run any share ownership program for management and employees. Therefore, William P. Sabandar does not own any of the Corporation's shares.

**SILVIA HALIM****Direktur Konstruksi** *Construction Director*Periode Jabatan : 21 Maret 2018-RUPS Tahun 2023,
Periode Kedua*Term of Office* : March 21, 2018 – 2023 AGMS,
Second Period**DATA PRIBADI***Personal Data*

Warga Negara Indonesia
Usia 37 tahun
Kelahiran Jakarta, 18 Juni 1982

*Indonesian citizen
37 years old
Born in Jakarta, June 18, 1982*

DOMISILI*Domicile*

Denpasar, Bali, Indonesia.

Denpasar, Bali, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN*History of Appointment*

Mulai menjabat sebagai Direktur Konstruksi sejak 24 Agustus 2016 sesuai keputusan RUPS Tahun 2016 melalui Akta No. 48 Tanggal 13 September 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., untuk periode ke-1 meneruskan masa jabatan Direktur sebelumnya periode 2013- 2018. Melalui Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 21 Maret 2018 yang dituangkan dalam Akta No. 133 Tanggal 21 Maret 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., beliau diangkat kembali sebagai Direktur untuk periode ke-2 masa jabatan 2018-2023.

Silvia has been serving as a Construction Director since August 24, 2016 in accordance with the 2016 GMS Resolution, Deed No. 48 dated September 13, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. She has served as a Director since August 24, 2016 during the 1st period and continued a previous Director's term for the 2013-2018 period. According to the 2018 GMS Resolution, Deed No. 133 dated March 21, 2018. Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., she was appointed again as a Director for the 2018-2023 period.

PENDIDIKAN*Education*

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Nanyang Technological University, Singapura (2004).

Bachelor of Engineering majoring in Civil Engineering from Nanyang Technological University, Singapore (2004).

PENGALAMAN KERJA*History of Employment*

Project Manager, Road Projects Group di Land Transport Authority (LTA) Singapura, (2004-2016).

Project Manager, Road Projects Group in Singapore's Land Transport Authority (LTA), (2004 - 2016).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019*Professional Certification and Competency Development Program in 2019*

The Inaugural Woman In Rail Malaysia Leadership Conference 2019, Woman In Rail Malaysia.

Inaugural Woman in Rail Malaysia Leadership Conference 2019, Woman in Rail Malaysia.

RANGKAP JABATAN*Concurrent Position*

Tidak memiliki rangkap jabatan.

Occupies no concurrent position.

HUBUNGAN AFILIASI*Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Directors or any Major / Controlling Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA*MRT Jakarta Share Ownership*

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Silvia Halim tidak memiliki saham Perseroan.

Up until the end of 2019, the Corporation had not issued any public shares or run any share ownership program for management and employees. Therefore, Silvia Halim does not own any of the Corporation's shares.



TUHIYAT

Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
Finance and Corporate Management Director

Periode Jabatan : 21 Maret 2018-RUPS Tahun 2023,
Periode Kedua

Term of Office : March 21, 2018 – 2023 AGMS
Second Period

DATA PRIBADI

Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 53 tahun
Kelahiran Serang, 2 Februari 1966

Indonesian citizen
53 years old
Born in Serang, February 2, 1966

DOMISILI

Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

South Tangerang, Banten, Indonesia

RIWAYAT PENUNJUKAN

History of Appointment

Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi sejak 23 Maret 2013 sesuai RUPS Tahun 2013 melalui Akta No. 94 Tanggal 22 Maret 2013, Notaris Yuliati Widyadhari, SH. Jis, merupakan periode ke-2, masa jabatan 2018-2023. Menjabat pertama kali sebagai Direktur sejak 23 Maret 2013 untuk periode ke-1, masa jabatan 2013-2018.

Has served as Finance and Administration Director since March 23, 2013 according to the 2013 AGMS, Deed No. 94 dated March 22, 2013, Notary Yuliati Widyadhari, SH. Jis, 2nd period of office 2018-2023. First served as Director from March 23, 2013 for the 1st period of office from 2013-2018.

PENDIDIKAN

Education

Sarjana (S1) Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) (1994) dan Magister (S2) Manajemen di Universitas Krisnadwipayana, Jawa Barat (2000).

Bachelor of Accounting from State College of Accountancy (STAN) (1994) and Master of Management from Krisnadwipayana University, West Java (2000).

PENGALAMAN KERJA

History of Employment

Berkeahlian dan berpengalaman dalam bidang audit dan keuangan. Beliau Memiliki pengalaman profesi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1987-2001); Senior Internal Auditor PT Antam (Persero) Tbk (2001-2004); Manager Accounting PT Antam (Persero) Tbk (2004-2005), Asisten Senior Manager Accounting PT Antam (Persero) Tbk (2005-2006), Senior Manager Accounting & Budgeting PT Antam (Persero) Tbk (2006-2008), Senior Manager Treasury, Tax and Insurance PT Antam (Persero) Tbk (2008-2012).

Has expertise and experience in auditing and finance. Tuhiyat's professional experience was gained during his service at the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) (1987-2001); as a Senior Internal Auditor for PT Antam (Persero) Tbk (2001-2004); as the Accounting Manager for PT Antam (Persero) Tbk (2004-2005), Accounting Assistant Senior Manager for PT Antam (Persero) Tbk (2005-2006), Accounting & Budgeting Senior Manager for PT Antam (Persero) Tbk (2006-2008), and as the Treasury, Tax and Insurance Senior Manager for PT Antam (Persero) Tbk (2008-2012).

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Professional Certification and Competency Development Program in 2019

- National Conference IIA 2019 - Empowering Internal Auditors: Embracing the 4IR, The Institute of Internal Auditors Indonesia
- Seminar Nasional Audit Internal 2019 - Energizing Internal Audit: Bridging to The Future, Yayasan Pendidikan Internal Audit

- National Conference IIA 2019 - Empowering Internal Auditors: Embracing the 4IR, The Institute of Internal Auditors Indonesia
- Seminar Nasional Audit Internal 2019 - Energizing Internal Audit: Bridging to The Future, Yayasan Pendidikan Internal Audit

RANGKAP JABATAN

Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan

Occupies no concurrent position.

HUBUNGAN AFILIASI

Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors members or any Major / Controlling Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

MRT Jakarta Share Ownership

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Tuhiyat tidak memiliki saham Perseroan.

Up until the end of 2019, the Corporation had not issued any public shares or run any share ownership program for management and employees. Therefore, Tuhiyat does not own any of the Corporation's shares.

**MUHAMMAD EFFENDI****Direktur Operasi dan Pemeliharaan**
Operation and Maintenance Director

Periode Jabatan : 29 Oktober 2018-RUPS Tahun 2023,
Periode Pertama

Term of Office : October 29, 2018 – 2023 AGMS,
First Period

DATA PRIBADI*Personal Data*

Warga Negara Indonesia
Usia 55 tahun
Kelahiran Palembang, 1 Maret 1964

Indonesian citizen
55 years old
Born in Palembang, March 01, 1964

DOMISILI*Domicile*

Jagakarsa, DKI Jakarta, Indonesia.

Jagakarsa, DKI Jakarta, Indonesia.

RIWAYAT PENUNJUKAN*History of Appointment*

Menjabat sebagai Direktur Operasi dan Pemeliharaan sejak 29 Oktober 2018 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS, yang dituangkan dalam Akta No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., merupakan periode ke-1, masa jabatan 2018-2023.

Appointed as Operation and Maintenance Director on October 29, 2018 in accordance with the Shareholders' Decision outside GMS, 1st period of office 1, 2018-2023.

PENDIDIKAN*Education*

Sarjana (S1) Teknik Sipil di Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung (1989), Diploma di bidang Occupational Safety and Health (K3) di Australian Center for Work Safety, Australia (1998), dan Magister (S2) Management di Universitas Monash, Australia (2003).

Bachelor of Civil Engineering from the Faculty of Engineering, Parahyangan Catholic University, Bandung (1989), Diploma in Occupational Safety and Health (K3) from the Australian Center for Work Safety, Australia (1998), and Master's in Management from Monash University, Australia (2003).

PENGALAMAN KERJA*History of Employment*

Sebelum ditunjuk sebagai Direktur, Muhammad Effendi adalah Kepala Divisi Manajemen Proyek untuk Konstruksi 2 PT MRT Jakarta (Perseroda) (2017-2018) yang menangani pembangunan jalur dan stasiun bawah tanah MRT Jakarta Fase I. Sebelumnya, beliau adalah Kepala Divisi Konstruksi dan Penasihat Rasgas Company Ltd di Qatar selama 12 tahun (2005-2017). Muhammad Effendi dipercaya memegang tanggung jawab sebagai Direktur dan Manager di sejumlah Perseroan sejak 1997 hingga 2005.

Prior to his appointment as Director, Muhammad Effendi was the Project Management Division Head for Construction 2 of PT MRT Jakarta (Perseroda) (2017-2018), which handled the line construction and underground stations for Phase I of MRT Jakarta. Previously, he was the Construction Division Head and Advisor for Rasgas Company Ltd in Qatar for 12 years (2005-2017). Muhammad Effendi exercised the responsibilities of Director and Manager for a number of companies between 1997 and 2005.

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019*Professional Certification and Competency Development Program in 2019*

Public Speaking and Media Handling, Sepikul

Public Speaking and Media Handling, Sepikul

RANGKAP JABATAN*Concurrent Position*

Tidak memiliki rangkap jabatan

Occupies no concurrent position.

HUBUNGAN AFILIASI*Affiliation*

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors members or any Major / Controlling Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA*MRT Jakarta Share Ownership*

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Muhammad Effendi tidak memiliki saham Perseroan.

Up until the end of 2019, the Corporation had not issued any public shares or run any share ownership program for management and employees. Therefore, Muhammad Effendi does not own any of the Corporation's shares.



GHAMAL PERIS

Direktur Pengembangan Bisnis *Business Development Director*

Periode Jabatan : 29 Oktober 2018-RUPS Tahun 2023,
Periode Pertama

Term of Office : October 29, 2018 – 2023 AGMS,
First Period

DATA PRIBADI

Personal Data

Warga Negara Indonesia
Usia 39 tahun
Kelahiran Jakarta, 11 Februari 1980

Indonesian citizen
39 years old
Born in Jakarta, February 11, 1980

DOMISILI

Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

RIWAYAT PENUNJUKAN

History of Appointment

Menjabat sebagai Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis sejak 29 Oktober 2018 sesuai Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS, yang dituangkan dalam Akta No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., merupakan periode ke-1, masa jabatan 2018-2023.

Appointed as Business Development and Support Director on October 29, 2018 in accordance with the Shareholders' Decision outside GMS, 1st period of office 1, 2018-2023.

PENDIDIKAN

Education

Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen dari Universitas Indonesia, Depok (2003), Master (S2) of Business Administration dari The Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat (2012), Master (S2) of Business Administration dari HEC-Paris, Perancis (2012).

Bachelor of Economic Management from the University of Indonesia, Depok (2003), Master of Business Administration from the Wharton School, University of Pennsylvania, United States (2012), Master of Business Administration from HEC-Paris, France (2012).

PENGALAMAN KERJA

History of Employment

Berkarier pertama kali di PT Nestle Indonesia sebagai Head of Area (2003). Kemudian berkarier di Sodexo Benefits and Rewards Services (BRS) Indonesia dengan beberapa jabatan pernah dipercayakan kepadanya, antara lain Project Manager (2003-2006) dan Marketing & Business Development Manager - Member of Executive Committee (2006-2009); hingga akhirnya dipercaya untuk menduduki jabatan di Sodexo BRS International sebagai International Development Manager - Gift Market (2009-2013) dan Business Development Director Asia - Member of Asia Zone Executive (2013-2016). Selain itu, beliau juga melakukan terobosan sebagai Founder www.gerobaksoleh.com (2017-sekarang) dan dipercaya untuk duduk dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebagai Penasihat Strategis PT MRT Jakarta (Perseroda) (2018) sebelum akhirnya dipercaya untuk menjabat Direksi Perseroan.

Started his career at PT Nestle Indonesia as Area Head (2003). Then moved to Indonesia's Sodexo Benefits and Rewards Services (BRS), occupying several positions, including Project Manager (2003-2006) and Marketing & Business Development Manager - Member of the Executive Committee (2006-2009); until he was finally entrusted to the position of International Development Manager - Gift Market at Sodexo BRS International (2009-2013), as well as Business Development Director for Asia-Members of the Asia Zone Executive (2013-2016). In addition, he also made a breakthrough as the Founder of www.gerobaksoleh.com (2017-present) and was trusted to sit on the Governor's Team for the Acceleration of Development (TGUPP) as a Strategic Advisor for PT MRT Jakarta (Perseroda) (2018) before finally being entrusted to serve on the Corporation's Board of Directors.

SERTIFIKASI PROFESI DAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2019

Professional Certification and Competency Development Program in 2019

- High-level Roundtable Discussion on Sustaining Transit Investment in Asia's Cities: Bangkok, Asian Development Bank
- Global Digital Leader Accelerated Executive Development Program (IAE Paris - Sorbonne)
- Transit Oriented Development Conference, Marcus Evans
- Public Speaking and Media Handling, Sepikul

- High-level Roundtable Discussion on Sustaining Transit Investment in Asia's Cities: Bangkok, Asian Development Bank
- Global Digital Leader Accelerated Executive Development Program (IAE Paris - Sorbonne)
- Transit Oriented Development Conference, Marcus Evans
- Public Speaking and Media Handling, Sepikul

RANGKAP JABATAN

Concurrent Position

Tidak memiliki rangkap jabatan

Occupies no concurrent position.

HUBUNGAN AFILIASI

Affiliation

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan Pemegang Saham Utama/Pengendali.

Has no affiliation with the Board of Commissioners, other Board of Directors members or Major Controlling Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

MRT Jakarta Share Ownership

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Dengan demikian, Ghamal Peris tidak memiliki saham Perseroan.

Up until the end of 2019, the Corporation had not issued any public shares or run any share ownership program for management and employees. Therefore, Ghamal Peris does not own any of the Corporation's shares.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE OFFICIALS' PROFILE



HERU NUGROHO

Human Capital Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 2 Januari 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 55 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 1 September 2009

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 *Master of Business Administration*,
Universitas Gadjah Mada, 2019

MEGA INDAHWATI NATANGSA TARIGAN

Railway Operation Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 2 Februari 2017

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 36 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 1 Oktober 2009

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 *Master of Business Administration and Engineering*, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, 2009



ERNIE WIDIANTY RAHARDJO

Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 1 Desember 2014

Warga Negara Citizen

: Indonesian

Usia Age

: 46 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 1 January 2010

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 *Master of Business Administration*,
Nanyang Technological University
Singapore, 2009



ARIF RAHMAT

Project Management for Railway System Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 15 Januari 2018

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 50 tahun *Years old*

Domisili Domicile

: Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 8 Maret 2010

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 Teknik Sipil, Universitas Trisakti, 2018

WENI MAULINA

Engineering Division Head / Engineering Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 1 November 2018

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 32 tahun *Years old*

Domisili Domicile

: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 13 Agustus 2010

Riwayat Pendidikan *Education*

: S1 Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, 2009



INDRA GUNAWAN

Project Management for Construction 1 Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 9 September 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 42 tahun *Years old*

Domisili Domicile

: Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 1 Oktober 2012

Riwayat Pendidikan *Education*

: S1 Teknik Mesin, Institut Teknologi Nasional, 2002



ASEP SOLIHIN PERTAMANA

Railway Maintenance Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 21 Maret 2018

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 43 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Depok, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 5 September 2013

Riwayat Pendidikan *Education*

: S1 Teknik Elektro, Universitas Indonesia,
1998

TUBAGUS HIKMATULLAH

Finance and Accounting Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 2 Januari 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 47 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 1 September 2014

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 *Finance*, University Of Wollongong
Australia, 1999



RIZKI SHEBUBAKAR

Project Management for Construction 2 Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 9 September 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 31 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 17 November 2014

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 Magister Manajemen, Universitas
Indonesia, 2017



GUNAWAN

Operation and Maintenance Facility Services Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 9 Juli 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 34 tahun *Years old*

Domisili Domicile

: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 2 Februari 2015

Riwayat Pendidikan *Education*

: S1 Teknik Sipil, Universitas Diponegoro,
2010

AIDIN BARLEAN

General Affair and Procurement Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 1 Juli 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 49 tahun *Years old*

Domisili Domicile

: Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 1 Maret 2016

Riwayat Pendidikan *Education*

: S1 Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada,
1996



ANDY REVY ROHADIAN

Internal Audit Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 6 Maret 2017

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 53 tahun *Years old*

Domisili Domicile

: Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 6 Maret 2017

Riwayat Pendidikan *Education*

: D4 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
(STAN), 1996



AGUNG PRAMONO

Information System and Technology Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 18 April 2018

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 41 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 13 Maret 2017

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 Magister Manajemen, Universitas Prasetiya Mulya, 2006

MUHAMAD KAMALUDDIN

Corporate Secretary Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 2 Januari 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 45 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Depok, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 3 April 2017

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 *Business Administration*, London Business School, 2008



MUNGKI INDRIATI PRATIWI

Customer Engagement Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 2 Januari 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 45 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 4 Desember 2017

Riwayat Pendidikan *Education*

: S1 Teknik Arsitektur, Universitas Indonesia, 1998



RIFKIANDI DARAJATUN

Project Management Office Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 18 April 2018

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 46 tahun *Years old*

Domisili Domicile

: Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 2 Januari 2018

Riwayat Pendidikan *Education*

: S1 Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung, 1997

RENDY PRIMARTANTYO

Commercial and Retail Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 14 April 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 39 tahun *Years old*

Domisili Domicile

: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 14 Januari 2019

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 Magister Manajemen, Universitas Prasetiya Mulya, 2012



RATIH MAYASARI

Corporate Strategy Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 14 Juni 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 37 tahun *Years old*

Domisili Domicile

: Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 14 Juni 2019

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 Master Of Business Administration, Universitas Gadjah Mada, 2015



NICODEMUS WINATA

Business Expansion Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 19 Agustus 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 36 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 19 Agustus 2019

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 *Engineering Management*, Northwestern University Illinois, 2012

DENY ZULFIKAR

Legal Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 28 November 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 46 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 28 November 2019

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 *International Economic & Business Law*, University of Groningen Netherlands, 2003



YULHAM FERDIANSYAH ROESTAM

Transit Oriented Development Division Head

Menjabat Sejak Served Since

: 2 Desember 2019

Warga Negara Citizen

: Indonesia

Usia Age

: 41 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Depok, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 2 Desember 2019

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 Magister Manajemen, Universitas Prasetiya Mulya, 2004



RENDI ALHIAL

Secretary of the Board of Commissioners

Menjabat Sejak Served Since

: 1 Oktober 2019

Warga Negara *Citizen*

: Indonesia

Usia *Age*

: 35 tahun *Years old*

Domisili *Domicile*

: Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bergabung di MRT Jakarta *Joined MRT Jakarta*

: 22 Agustus 2016

Riwayat Pendidikan *Education*

: S2 Magister Psikologi, Universitas
Indonesia, 2011

DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

EMPLOYEE DEMOGRAPHIC AND COMPETENCY DEVELOPMENT

DEMOGRAFI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHIC

Per 31 Desember 2019, jumlah karyawan Perseroan mencapai 676 orang, mengalami peningkatan sebesar 30,00% atau 156 orang dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2018 yang sebanyak 520 orang. Peningkatan jumlah karyawan tersebut adalah konsekuensi logis dari meningkatnya kompleksitas pelayanan dan bisnis MRT Jakarta setelah resmi beroperasi per tanggal 24 Maret 2019.

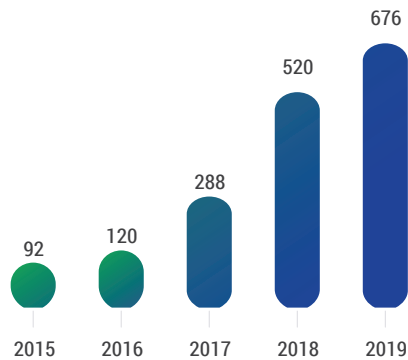
As of December 31, 2019, the Corporation had 676 employees. There was an increase of 30.00% or 156 employees from the number of employees on December 31, 2018 which was 520 employees. The increase is a logical consequence of the increasing complexity of MRT Jakarta's service and business after officially operates as of March 24, 2019.

Profil demografi karyawan Perseroan dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini:

The Corporation's employee demographic profile is described in the following table and chart:

PERGERAKAN JUMLAH KARYAWAN DALAM 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR 2015-2019

Movement of Total Employees in The Last 5 (Five) Years 2015-2019



Grafik 4.1
Graphic 4.1

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LEVEL ORGANISASI

Employee Demographic by Organization Level

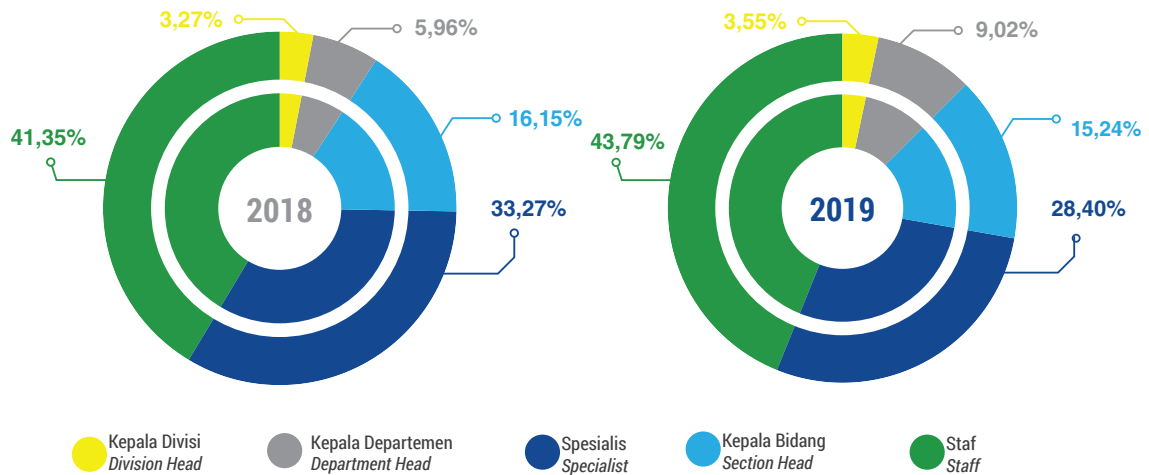
| Level Organisasi Organization Level | 2019 | | | | 2018 | | | | Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 Increase (Decrease) 2018-2019 |
|--|------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | |
| Kepala Divisi Division Head | 19 | 5 | 24 | 3,55 | 19 | 5 | 17 | 3,27 | 41,18 |
| Kepala Departemen Department Head | 50 | 11 | 61 | 9,02 | 27 | 4 | 31 | 5,96 | 96,77 |
| Kepala Bidang Section Head | 86 | 17 | 103 | 15,24 | 75 | 9 | 84 | 16,15 | 22,62 |
| Spesialis Specialist | 110 | 82 | 192 | 28,40 | 109 | 64 | 173 | 33,27 | 10,19 |
| Staff Staff | 226 | 70 | 296 | 43,79 | 162 | 53 | 215 | 41,35 | 37,67 |
| Jumlah Total | 491 | 185 | 676 | 100,00 | 385 | 135 | 520 | 100,00 | 30,00 |

L = Laki-laki P = Perempuan
M= Male F= Female

Tabel 4.1
Table 4.1

Total kepala departemen berlipat ganda pada 2019 karena proses pemenuhan yang belum selesai dari Kepala Departemen, dan proses pemenuhan berlanjut pada 2019.

The number of Department Head was doubled in 2019 due to incomplete process for filling the Department Head positions (in 2018), and the process was continued in 2019.



Grafik 4.2
Graphic 4.2

Dari tabel di atas, terlihat adanya peningkatan pada setiap level karyawan, namun tetap pada proporsi yang serupa.

From the table above, there is an increase in the number of employees on every level, but remains at the same proportion.

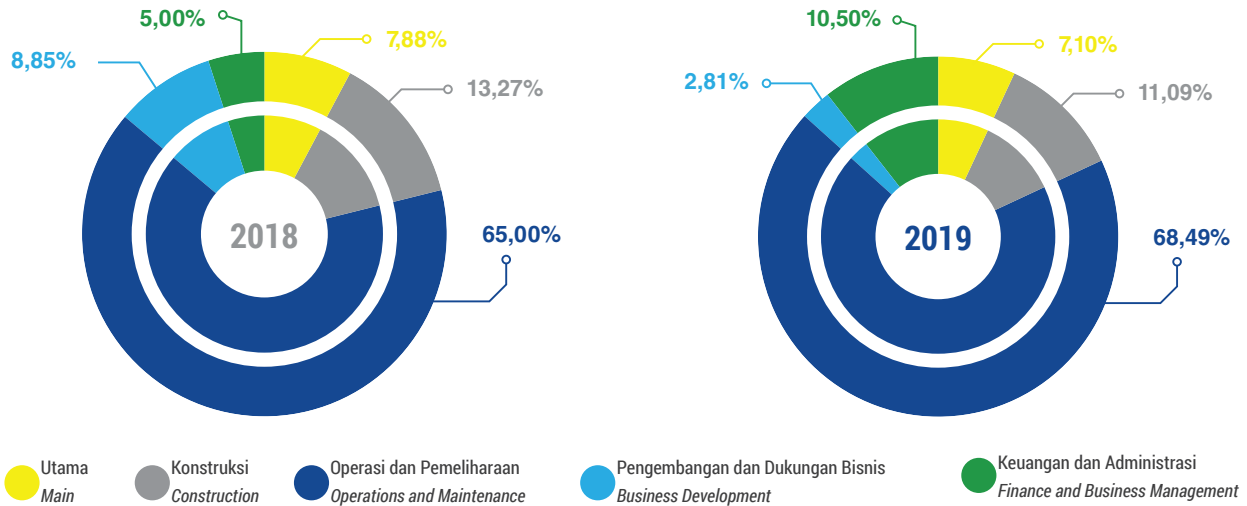
DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN DIREKTORAT

Employee Demographic by Directorate

| Direktorat Directorate | 2019 | | | | 2018 | | | | Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 Increase (Decrease) 2018-2019 |
|---|------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | |
| Utama Main | 25 | 23 | 48 | 7,10 | 19 | 22 | 41 | 7,88 | 17,07 |
| Konstruksi Construction | 48 | 27 | 75 | 11,09 | 47 | 22 | 69 | 13,27 | 8,70 |
| Operasu dan Pemeliharaan Operations and Maintenance | 361 | 102 | 463 | 68,49 | 270 | 68 | 338 | 65,00 | 36,98 |
| Pengembangan Bisnis Business Development | 10 | 9 | 19 | 2,81 | 28 | 18 | 46 | 8,85 | -58,70 |
| Kuangan dan Managemen Korporasi Finance and Corporation Management | 41 | 24 | 71 | 10,50 | 21 | 5 | 26 | 5,00 | 173,08 |
| Jumlah Total | 491 | 185 | 676 | 100,00 | 385 | 135 | 520 | 100,00 | 30,00 |

L = Laki-laki P = Perempuan
M = Male F = Female

Tabel 4.2
Table 4.2



Grafik 4.3
Graphic 4.3

Terjadi perubahan pengurangan jumlah karyawan yang signifikan pada Direktorat Pengembangan Bisnis dan di saat yang bersamaan terjadi peningkatan yang signifikan di Direktorat Keuangan dan Manajemen Korporasi karena terdapat dua divisi yang berpindah dari Direktorat Pengembangan Bisnis pada tahun 2018 ke Direktorat Keuangan dan Manajemen Korporasi pada tahun 2019, yaitu Divisi Human Capital dan Divisi General Affair and Procurement.

There was a significant reduction of the number of employee in the Directorate of Business Development, and at the same time there was a significant increase of the employee in the Directorate of Finance and Corporate Management. This is because two divisions from Directorate of Business Development were transferred to Directorate of Finance and Corporate Management in 2019, those divisions were Human Capital Division and General Affairs and Procurement Division.

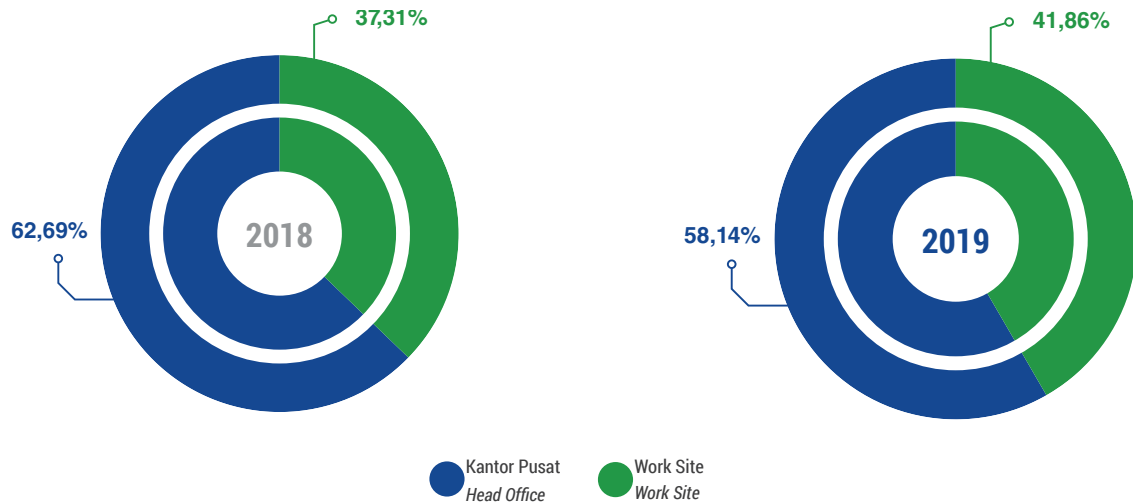
DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LOKASI KERJA/PENEMPATAN

Employee Demographic by Work Location/Placement

| Lokasi kerja/Penempatan <i>Work Location/Placement</i> | 2019 | | | | 2018 | | | | Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 <i>Increase (Decrease) 2018-2019</i> |
|---|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--|
| | L <i>M</i> | P <i>F</i> | Jumlah <i>Total</i> | Persentase <i>Percentage (%)</i> | L <i>M</i> | P <i>F</i> | Jumlah <i>Total</i> | Persentase <i>Percentage (%)</i> | |
| Kantor Pusat <i>Head Office</i> | 174 | 109 | 283 | 41,86 | 120 | 47 | 194 | 37,31 | 45,88 |
| Work Site | 317 | 76 | 393 | 58,14 | 265 | 61 | 326 | 62,69 | 20,55 |
| Jumlah <i>Total</i> | 491 | 185 | 676 | 100,00 | 385 | 135 | 520 | 100,00 | 30,00 |

L = Laki-laki P = Perempuan
M = Male F = Female

Tabel.4.3
Table.4.3



Grafik 4.4
Graphic 4.4

Pada tahun 2019 peningkatan jumlah karyawan di Kantor Pusat menggambarkan arah bisnis MRT Jakarta setelah resmi beroperasi, dengan meningkatnya karyawan pada unit-unit kerja pendukung dengan tetap fokus pada *service excellence* kepada konsumen.

In 2019, the increase of employee at the Head Office reflected MRT Jakarta's business orientation after officially operates, with an increase in the number of employee at supporting work units while remains focusing on service excellence to customers.

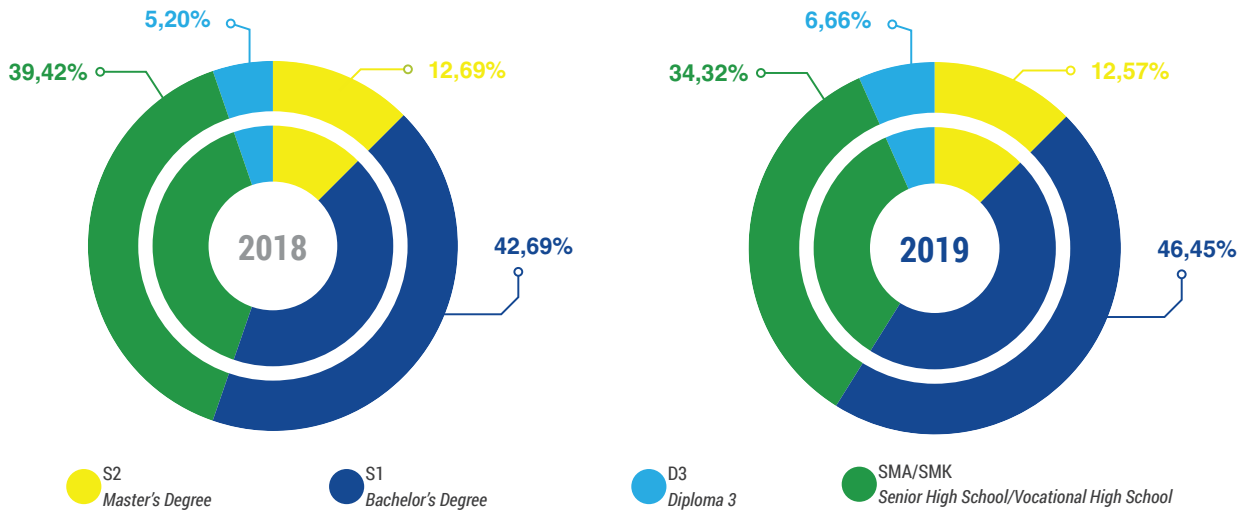
DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Employee Demographic by Education Level

| Tingkat Pendidikan <i>Educational Level</i> | 2019 | | | | 2018 | | | | Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 <i>Increase (Decrease) 2018-2019</i> |
|---|------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | |
| S2 Master's Degree | 61 | 24 | 85 | 12,57 | 48 | 18 | 66 | 12,69 | 28,79 |
| S1 Bachelor's Degree | 216 | 98 | 314 | 46,45 | 157 | 65 | 222 | 42,69 | 41,44 |
| D3 Diploma 3 | 170 | 62 | 232 | 34,32 | 153 | 52 | 205 | 39,42 | 13,17 |
| SMA/SMK <i>Senior High School / Vocational High School</i> | 44 | 1 | 45 | 6,66 | 27 | - | 27 | 5,20 | 66,67 |
| Jumlah Total | 491 | 185 | 676 | 100,00 | 385 | 135 | 520 | 100,00 | 30,00 |

L = Laki-laki P = Perempuan
M= Male F= Female

Tabel 4.4
Table 4.4



Grafik 4.5
Graphic 4.5

Walaupun terjadi penambahan karyawan pada tahun 2019, proporsi karyawan berdasarkan tingkat pendidikan masih serupa.

Despite the addition of employees in 2019, the proportion of employees based on education level remains the same.

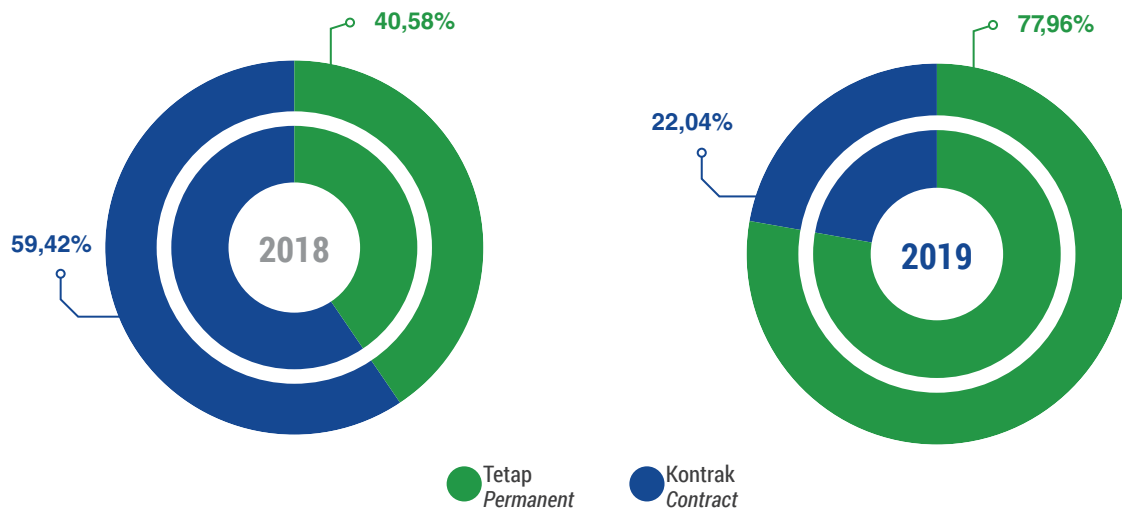
DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN LOKASI STATUS KEPEGAWAIAN

Employee Demographic By Employment Status

| Status Kepegawaian Employment Status | 2019 | | | | 2018 | | | | Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 Increase (Decrease) 2018-2019 |
|---|--------|--------|-----------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------------------------|--|
| | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | |
| Tetap Permanent | 379 | 527 | 527 | 77,96 | 148 | 63 | 211 | 40,58 | 149,79 |
| Kontrak Contract | 112 | 37 | 149 | 22,04 | 237 | 72 | 309 | 59,42 | -51,78 |
| Jumlah Total | 491 | 185 | 676 | 100,00 | 385 | 135 | 520 | 100,00 | 30,00 |

L = Laki-laki P = Perempuan
M = Male F = Female

Tabel 4.5
Table 4.5



Grafik 4.6
Graphic 4.6

Status kepegawaian bagi karyawan Perseroan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu karyawan tetap dan karyawan kontrak. Karyawan tetap adalah karyawan yang telah diangkat secara tetap melalui mekanisme yang berlaku secara internal di lingkup Perseroan. Sementara karyawan kontrak atau karyawan tidak tetap adalah subjek hukum perorangan yang mengikatkan diri dalam hubungan kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga menggunakan karyawan *outsourcing* yang mengisi beberapa fungsi, yaitu *cleaning service*, *driver*, dan *messenger*.

The Corporation's employment status is categorized in (2) two categories, permanent and contract employees. Permanent employee is appointed permanently through internal mechanism within the Corporation. Contract employee or nonpermanent employee is a legal person who binds to employment relationship outlined in a Temporary Work Agreement with the Corporation in accordance with the prevailing laws and regulations. The Corporation also outsources employees to fill in certain functions such as *cleaning service*, *driver* and *messenger*.

Peningkatan signifikan atas status karyawan tetap pada tahun 2019 disebabkan oleh banyak karyawan yang sudah melewati masa percobaan dan telah diangkat sebagai karyawan tetap.

Significant increase in the number of permanent employees in 2019 is attributable to many personnel have passed the probation period and appointed as permanent employees.

DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN RENTANG USIA

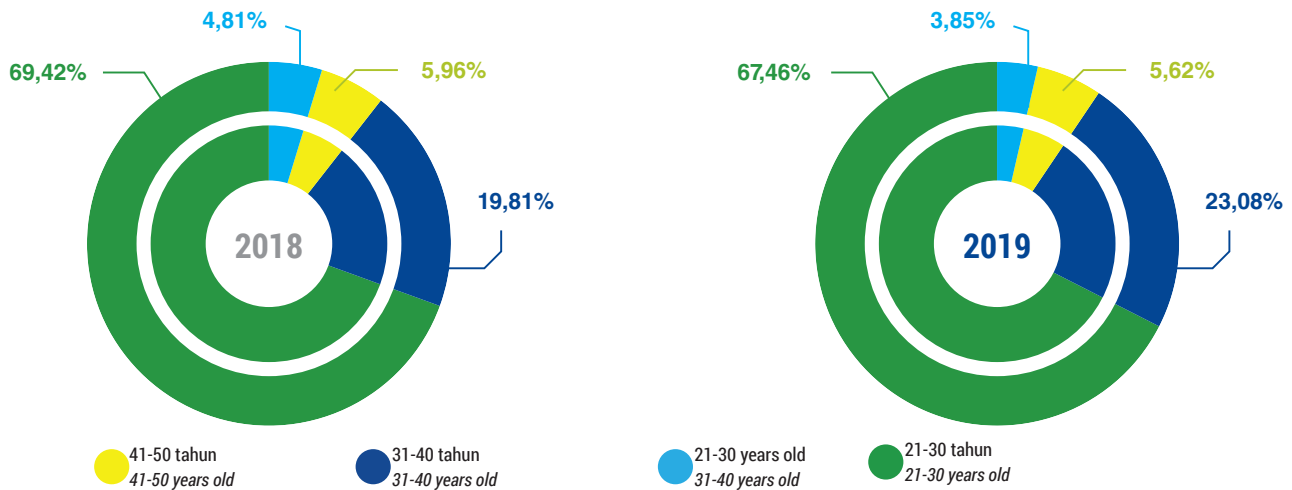
Employee Demographic by Age Range

| Rentang Usia Age Range | 2019 | | | | 2018 | | | | Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 Increase (Decrease) 2018-2019 |
|--------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------------------------|--------|--------|-----------------|---------------------------------|--|
| | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | |
| ≥ 51 tahun ≥ 51 years old | 26 | 0 | 26 | 3,85 | 25 | 0 | 25 | 4,81 | 4,00 |
| 41-50 tahun 41-50 years old | 34 | 4 | 38 | 5,62 | 28 | 3 | 31 | 5,96 | 22,58 |
| 31-40 tahun 31-40 years old | 121 | 35 | 156 | 23,08 | 80 | 23 | 103 | 19,81 | 51,46 |

| Rentang Usia Age Range | 2019 | | | | 2018 | | | | Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 Increase (Decrease) 2018-2019 |
|--------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | L M | P F | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | |
| 21-30 tahun 21-30 years old | 310 | 146 | 456 | 67,46 | 252 | 109 | 361 | 69,42 | 26,23 |
| Jumlah Total | 491 | 185 | 676 | 100,00 | 385 | 135 | 520 | 100,00 | 30,00 |

L = Laki-laki P = Perempuan
M= Male F = Female

Tabel 4.6
Table 4.6



Grafik 4.7
Graphic 4.7

Tidak terjadi perubahan signifikan pada proporsi demograf karyawan berdasarkan usia.

There was no significant change in the proportion of employee demographic by age.

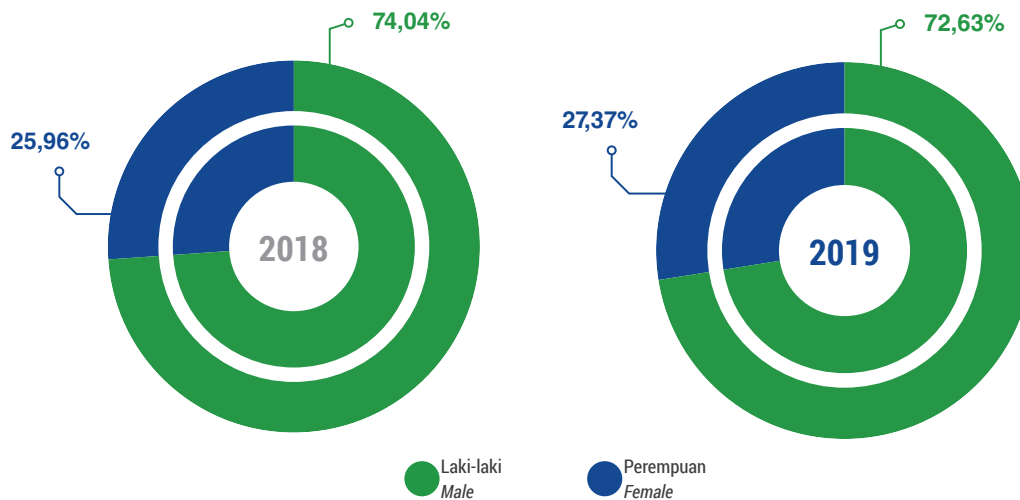
DEMOGRAFI KARYAWAN BERDASARKAN GENDER/JENIS KELAMIN

Employee Demographic by Gender

| Status Kepegawaian Employment Status | 2019 | | 2018 | | Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 Increase (Decrease) 2018-2019 |
|---|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | Jumlah Total | Persentase Percentage (%) | |
| Laki-laki Male | 491 | 72,63 | 385 | 74,04 | 27,53 |
| Perempuan Female | 185 | 27,37 | 135 | 25,96 | 37,04 |
| Jumlah Total | 676 | 100,00 | 520 | 100,00 | 30,00 |

L = Laki-laki P = Perempuan
M= Male F = Female

Tabel 4.7
Table 4.7



Grafik 4.8
Graphic 4.8

Proporsi karyawan perempuan meningkat dibandingkan data 2018, sejalan dengan arah Perseroan atas kampanye kesetaraan gender.

The proportion of female employees increased compared to the proportion in 2018, which is in line with the Corporation's direction of the gender equality campaign.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Sebagai entitas usaha yang dimiliki pemerintah, Perseroan memiliki tugas besar untuk dapat menciptakan nilai tambah terhadap kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan kompetensi SDM Perseroan tidak hanya berorientasi pada optimalisasi SDM sebagai penunjang usaha, namun juga memberikan dampak positif terhadap perilaku SDM Perseroan, baik sebagai karyawan Perseroan maupun sebagai anggota masyarakat. Pengembangan SDM Perseroan dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang mendukung kegiatan yang dilakukan Perseroan.

As a Government owned business entity, the Corporation has a great responsibility to create added value to the Human Capital (HC)'s competency, capacity and capability. The development of the Corporation's HR competencies is not only oriented to optimize HR as a business support, but also have positive impact on the behavior of the Corporation's HR, both as employees of the Corporation and as members of the community. The development of the Corporation's HC is carried out through coaching and development to meet the competencies and expertise that support the Corporation's activities.



Gambar 4.1
Image 4.1



Gambar 4.2
Image 4.2



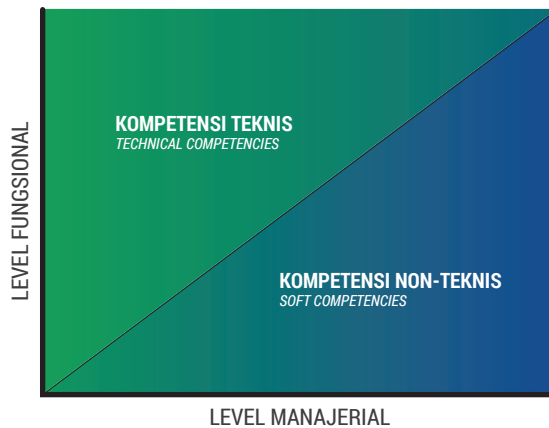
Gambar 4.3
Image 4.3



Gambar 4.4
Image 4.4

PRINSIP DASAR TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM MRT JAKARTA

Basic Principle for The Development of MRT Jakarta HC Competency



Grafik 4.9
Graphic 4.9

Pengembangan karyawan MRT didasarkan pada dua jenis kompetensi yang berlaku yaitu kompetensi teknis dan non-teknis. Kedua jenis kompetensi ini diterapkan baik untuk pengembangan karyawan pada level fungsional maupun manajerial. Untuk level manajerial; semakin tinggi suatu jabatan maka pengembangan kompetensi teknis akan lebih sedikit dari program pengembangan non-teknis karena tuntutan kompetensi teknis pada level manajerial yang semakin kecil. Sedangkan pada level fungsional, semakin tinggi level jabatannya maka pengembangan kompetensi teknis akan semakin besar mengikuti tuntutan kompetensi teknis yang juga semakin besar untuk level fungsional.

Berikut ini disampaikan pengembangan kompetensi SDM yang mencerminkan kesempatan pengembangan kompetensi berdasarkan level jabatan organisasi dan kesempatan kesetaraan gender.

MRT employee development is based on two types of applicable competencies, those are technical competencies and non-technical competencies. Both are applied to the employee development program for functional levels and managerial level. For managerial level, those in higher position have fewer technical competency development program than those in lower position; but have more non-technical competency development program because the needs for technical competency at managerial level is decreasing. However, in functional level, those in higher position have more technical competency development program than those in lower position, since the needs for technical competence is greater at functional level.

The following is HC competency development record that reflects the competency development opportunities based on job position and gender equality.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BERDASARKAN LEVEL JABATAN DAN KESETARAAN GENDER TAHUN 2019

Competency Development by Position and Gender Equality in 2019

| Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Tujuan Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Objects | Jumlah Peserta Berdasarkan Level Jabatan Total Participants by Position | Jumlah Peserta Total Participants | | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | L/M | P/F | Jumlah/Total |
| <i>Soft Skill Training</i> | <p>Untuk meningkatkan kompetensi yang mencakup kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antarmanusia, nilai-nilai perseroan serta yang membangun interaksi dengan orang lain.</p> <p><i>To improve competencies that include the ability to manage work processes, relationships between people, corporate values and who build interactions with others.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> •Kepala Divisi/Senior Advisor 38 peserta; 12% •Kepala Departemen/Advisor/Principal Engineer 132 peserta; 43% •Kepala Bidang (Section Head) 89 peserta; 29% •Engineer/Spesialis 48 peserta; 16% •Staf 2 peserta; 1% •Division Head/Senior Advisor 38 participants; 12% •Department Head/Advisor/Principal Engineer 132 participants; 43% •Section Head 89 participants; 29% •Engineer/Specialist 48 participants; 16% •Staff 2 participants; 1% | 243; 79% | 66; 21% | 309 |
| <i>Hard Skill Training</i> | <p>Untuk meningkatkan kompetensi yang mencakup kemampuan dan keterampilan teknis yang dimiliki karyawan sesuai dengan bidang ilmu dan bidang pekerjaan yang digelutinya, misalnya bidang keuangan, pemasaran, <i>engineering</i>, teknologi informasi, legal, akuntansi, dan sebagainya.</p> <p><i>To improve competencies that include the employees' abilities and technical skills in accordance with their expertise and work field for example, in finance, marketing, engineering, information technology, legal, accounting, and so on.</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> •Kepala Divisi/Senior Advisor 83 peserta; 81,024% •Kepala Departemen/Advisor/Principal Engineer 208 peserta; 20% •Kepala Bidang (Section Head) 187 peserta; 18% •Engineer/Spesialis 218 peserta; 21% •Staf 328 peserta; 32% •Division Head/Senior Advisor 83 participants; 8% •Department Head/Advisor/Principal Engineer 208 participants; 20% •Section Head 187 participants; 18% •Engineer/Specialist 218 participants; 21% •Staff 328 participants; 32% | 757; 74% | 267; 26% | 1,024 |

Tabel 3.9
Table 3.9

BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Competency Development Costs

| Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Realisasi 2019 (Rp) Realization | Realisasi 2018 (Rp) Realization | Anggaran 2019 (Rp) Budget | Peningkatan (Penurunan) 2018-2019 Increase (Decrease) | Penyerapan Anggaran 2019 Budget Absorption |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|---|
| Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | 11.333.028.205 | 24.932.744.510 | 11.548.839.000 | 55% ↓ | 98% |

Tabel 3.10
Table 3.10

Penurunan biaya pengembangan kompetensi di 2019 terjadi karena sudah terpenuhinya pemenuhan pengembangan kompetensi sebagai persyaratan operasi kereta MRT Jakarta di tahun 2018 yang membutuhkan biaya anggaran yang cukup besar. Pengembangan kompetensi untuk persyaratan operasi di tahun 2018 sebagian besar dianggarkan untuk pengembangan kompetensi personil di Direktorat Operasi dan Pemeliharaan dalam bentuk pelatihan dan sertifikasi kompetensi teknis.

The decline in competency development cost in 2019 was due to the completion of competency development as requirement of MRT Jakarta operation in 2018 which required significant budget. The budget for competency development as requirement of MRT Jakarta operation in 2018 was mostly allocated to the competency development of personnel at the Directorate of Operations and Maintenance for trainings and technical competence certifications.

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERSEROAN, AUDIT INTERNAL, DAN MANAJEMEN RISIKO

EDUCATION AND/OR TRAINING OF BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, COMMITTEES, CORPORATE SECRETARY, INTERNAL AUDIT AND RISK MANAGEMENT SECRETARY, INTERNAL AUDIT, AND RISK MANAGEMENT

Program pendidikan dan pelatihan untuk Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perseroan, Unit Kerja Internal Audit, Corporate Strategy, dan Risk Management & QSSHE Assurance dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja dan memperkuat Perseroan untuk mencapai perfoma optimal. Berbagai jenis program pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri yang dilaksanakan di tahun 2019 telah dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. Sebagai salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab pasca kegiatan pendidikan dan pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perseroan, dan Unit Audit Internal yang telah mengikuti program diminta untuk berbagi informasi hasil program yang telah diikuti sehingga dapat meningkatkan efektivitas hasil pendidikan dan pelatihan.

The Education and training program for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit, Corporate Strategy, and Risk Management & QSSHE Assurance Departments was conducted to improve their competencies and capabilities, and consequently it is expected to increase the work effectiveness and to strengthen the Corporation in achieving optimum performance. Various education and training programs, both domestic and international, were included in the Corporation's 2019 Work Planning and Budget. As part of the responsibilities, after taking the education and training program, Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, Internal Audit Unit were requested to share the knowledge gained from those programs to enhance the effectiveness of the education and training outcome.

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Tipe Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Subject of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|---|--|---|--|-----------------------------------|
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | | | | |
| Muhammad Syaugi (Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>) | <i>Hard Skills</i> | Workshop Kerugian Negara dalam BUMN dan BUMD: Risiko Investasi atau Korupsi? <i>Workshop on State Losses in SOEs and ROEs: Risk of Investment or Corruption?</i> | 7-8 November 2019/ Bali, Indonesia <i>November 7-8, 2019/Bali, Indonesia</i> | Asia Anti Fraud |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Tipe Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Subject of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|---|--|---|---|--|
| Akbar Anwar (Sekretaris Dewan Komisaris/ <i>Secretary of the Board of Commissioners</i>) | Hard Skills | Pelatihan (In House) PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 <i>In House Training of PSAK 71, PSAK 72, and PSAK 73</i> | 18 Juni 2019/ Jakarta, Indonesia <i>June 18, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Kantor Jasa Akuntan (KJA) Ahalik <i>Accounting Services Firm Ahalik</i> |
| Akbar Anwar (Sekretaris Dewan Komisaris/ <i>Secretary of the Board of Commissioners</i>) | Hard Skills | Konferensi Nasional Anti Fraud: Embracing Technology to Sustain Economic Growth – Anti Fraud Perspective <i>National Anti-Fraud Conference: Embracing Technology to Sustain Economic Growth - Anti-Fraud Perspective</i> | 9-11 Juli 2019/ Bali, Indonesia <i>July 9–11, 2019/ Bali, Indonesia</i> | Association of Certified Fraud Examiners |
| Akbar Anwar (Sekretaris Dewan Komisaris/ <i>Secretary of the Board of Commissioners</i>) | Hard Skills | Workshop Internasional: Best Practices in Implementing Effective Governance From Rules to Principles <i>International Workshop: Best Practices in Implementing Effective Governance From Rules to Principles</i> | 24-28 November 2019/ Perth, Australia <i>November 24–28, 2019/ Perth, Australia</i> | Perhimpunan Auditor Internal Indonesia <i>Indonesian Internal Auditor Association</i> |
| Rendi Alhial (Sekretaris Dewan Komisaris/ <i>Secretary of the Board of Commissioners</i>) | Hard Skills | Workshop Internasional: Best Practices in Implementing Effective Governance From Rules to Principles <i>International Workshop: Best Practices in Implementing Effective Governance From Rules to Principles</i> | 24-28 November 2019/ Perth, Australia <i>November 24–28, 2019/ Perth, Australia</i> | Perhimpunan Auditor Internal Indonesia |
| Direksi <i>Board of Directors</i> | | | | |
| William P. Sabandar (Direktur Utama/ <i>President Director</i>) | Hard Skills | 12th Annual City-Rail Summit | 15-20 Januari 2019/ Beijing, Republik Rakyat Tiongkok <i>January 15–20, 2019/ Beijing, People's Republic of China</i> | Shine Consultant International |
| William P. Sabandar (Direktur Utama/ <i>President Director</i>) | Hard Skills | High-level Roundtable Discussion on Sustaining Transit Investment in Asia's Cities: Bangkok | 28 Mei 2019/ Bangkok, Thailand <i>May 28, 2019/ Bangkok, Thailand</i> | Asian Development Bank |
| William P. Sabandar (Direktur Utama/ <i>President Director</i>) | Hard Skills | Urban 20 Mayors Summit and Urban Resilience Forum Tokyo | 20-24 Mei 2019/ Tokyo, Jepang <i>May 20–24, 2019/ Tokyo, Japan</i> | Tokyo Metropolitan Government |
| William P. Sabandar (Direktur Utama/ <i>President Director</i>) | Hard Skills | The 2nd Indonesia Investment Day - Towards Indonesia 4.0 | 26 Juli 2019/ Singapura <i>July 26, 2019/ Singapore</i> | IIPC Singapore |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Tipe Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Subject of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|--|--|--|--|
| William P. Sabandar (Direktur Utama/ <i>President Director</i>) | <i>Hard Skills</i> | <i>The 3rd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICCEE 2019)</i> | 28-30 Agustus 2019/Bali, Indonesia <i>August 28–30, 2019/Bali, Indonesia</i> | Universitas Hasanuddin <i>Hasanuddin University</i> |
| Tuhyat (Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi/ <i>Finance and Corporate Management Director</i>) | <i>Hard Skills</i> | <i>National Conference IIA 2019 - Empowering Internal Auditors: Embracing the 4IR</i> | 25-26 Juli 2019/Solo, Indonesia <i>July 25–26, 2019/Solo, Indonesia</i> | The Institute of Internal Auditors Indonesia |
| Tuhyat (Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi/ <i>Finance and Corporate Management Director</i>) | <i>Hard Skills</i> | <i>Seminar Nasional Audit Internal 2019 - Energizing Internal Audit: Bridging To The Future</i> | 25 April 2019/Palembang, Indonesia <i>April 25, 2019/Palembang, Indonesia</i> | Yayasan Pendidikan Internal Audit |
| Silvia Halim (Direktur Konstruksi/ <i>Construction Director</i>) | <i>Hard Skills</i> | <i>The Inaugural Woman In Rail Malaysia Leadership Conference 2019</i> | 8-9 Juli 2019/Kuala Lumpur, Malaysia <i>July 8–9, 2019/Kuala Lumpur, Malaysia</i> | Woman In Rail Malaysia |
| Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan/ <i>Operations and Maintenance Director</i>) | <i>Soft Skills</i> | <i>Public Speaking and Media Handling</i> | 9, 16, 23, 30 Juli 2019/Jakarta, Indonesia <i>July 9, 16, 23, 30, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Sepikul |
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis/ <i>Business Development Director</i>) | <i>Hard Skills</i> | <i>High-level Roundtable Hard Skills Discussion on Sustaining Transit Investment in Asia's Cities: Bangkok</i> | 28-29 Mei 2019/Bangkok, Thailand <i>May 28–29 2019/Bangkok, Thailand</i> | Asian Development Bank |
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis/ <i>Business Development Director</i>) | <i>Hard Skills</i> | <i>Transit Oriented Development Conference</i> | 28-31 Juli 2019/Singapura <i>July 28–31, 2019/Singapore</i> | Marcus Evans |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Tipe Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Subject of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|--|--|---|---|
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis/ <i>Business Development Director</i>) | <i>Soft Skills</i> | <i>Global Digital Leader Accelerated Executive Development Program (IAE Paris - Sorbonne)</i> | 30 September-11 Oktober 2019/Paris, Perancis <i>September 30–October 11, 2019/ Paris, France</i> | IAE Paris Sorbonne Business School |
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis/ <i>Business Development Director</i>) | <i>Soft Skills</i> | <i>Public Speaking and Media Handling</i> | 1 Oktober 2019, 3 Desember 2019, 10 Desember 2019, 14 Januari 2020/ <i>Jakarta, Indonesia October 1, 2019, December 3, 2019, December 10, 2019, January 14, 2020/ Jakarta, Indonesia</i> | Sepikul |
| Komite Audit <i>Audit Committee</i> | | | | |
| Adnan Pandu Praja(Ketua Komite Audit/ <i>Head of the Audit Committee</i>) | <i>Hard Skills</i> | <i>Workshop Internasional: Best Practices in Implementing Effective Governance From Rules to Principles</i> <i>International Workshop: Best practices in Implementing Effective Governance From Rules to Principles</i> | 24-28 November 2019/Perth, Australia <i>November 24–28, 2019/Perth, Australia</i> | Perhimpunan Auditor Internal Indonesia <i>Indonesia Internal Auditor Association</i> |
| Komite SDM dan perusahaan* <i>Audit Committee</i> | | | | |
| - | - | - | - | - |
| Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti* <i>Risk Monitoring and Security Committee</i> | | | | |
| - | - | - | - | - |
| Sekretaris Perseroan <i>Corporate Secretary</i> | | | | |
| Muhamad Kamaluddin | <i>Hard Skills</i> | <i>Workshop Pembahasan Sistem Manajemen Pengukuran Kinerja dengan Korn Ferry</i> <i>Discussion Workshop on Performance Measurement Management System with Korn Ferry</i> | 18 Juli 2019/ <i>Jakarta, Indonesia July 18, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Korn Ferry |

* Di sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pelatihan dan/atau pendidikan yang diikuti oleh Komite SDM dan Perusahaan dan Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti
Throughout 2019, there was no training and/or education followed by the HC and Business Committee & Risk Monitoring and Security Committee

| Nama dan Jabatan Name and Position | Tipe Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training | Tempat/Tanggal Place/Date | Penyelenggara Organizer |
|---------------------------------------|---|---|--|---|
| Muhamad Kamaluddin | Hard Skills | Pelatihan Corporate Communications: Integrated Government Relation Strategy <i>Corporate Communications Training: Integrated Government Relations Strategy</i> | 5 September 2019/ Jakarta, Indonesia <i>September 05, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Perdana Rey Communications |
| Muhamad Kamaluddin | Soft Skills | Pelatihan <i>Leadership in Urban Regeneration: The Role on BUMD DKI</i> <i>Leadership Training in Urban Regeneration: The Role on DKI Jakarta's Regional Government Owned-Enterprises</i> | 24-26 September 2019/Jakarta, Indonesia <i>September 24-26, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Forum Kounikasi Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta <i>Communication Forum of Regional Government-Owned Enterprises, Province of DKI Jakarta</i> |
| Muhamad Kamaluddin | Soft Skills | Pelatihan <i>Executive Coaching - Leader As Coach Batch 2</i> <i>Training of Executive Coaching- Leader As Coach Batch 2</i> | 9, 31 Oktober 2019 dan 1 November 2019/Jakarta, Indonesia <i>October 9, 31 2019 and November 1, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Loop Institute of Coaching |
| Muhamad Kamaluddin | Hard Skills | Workshop Kerugian Negara dalam BUMN dan BUMD: Risiko Investasi atau Korupsi? <i>Workshop on State Losses in SOEs and ROEs: Risk of Investment or Corruption?</i> | 7-8 November 2019/ Bali, Indonesia <i>November 7-8, 2019/ Bali, Indonesia</i> | Asia Anti Fraud |
| Muhamad Kamaluddin | Soft Skills | Pelatihan <i>Executive Management Development Program (EMDP) Seri Managing Business - Inspiring Leadership: Becoming High Performing Leader</i> <i>Training on Executive Management Development Program (EMDP) in Managing Business Series - Inspiring Leadership: Becoming High Performing Leader</i> | 18-19 November 2019/Jakarta, Indonesia <i>November 18-19, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Asian Leadership Centre |
| Muhamad Kamaluddin | Hard Skills | Pelatihan (<i>In House</i>) Sustainability Report <i>In House Training on Sustainability Report</i> | 19 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 19, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Ahmad Pratomo | Soft Skills | <i>Six Sigma Leadership Program Final Project Evaluation Program</i> | 7-9 Februari 2019/ Bogor, Indonesia <i>February 7-9, 2019/ Bogor, Indonesia</i> | Unotalent |
| Ahmad Pratomo | Hard Skills | Workshop Pembahasan Sistem Manajemen Pengukuran Kinerja dengan Korn Ferry <i>Discussion Workshop on Performance Measurement Management System with Korn Ferry</i> | 19 Juli 2019/ Jakarta, Indonesia <i>July 19, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Korn Ferry |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Tipe Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Subject of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|--|---|---|---|
| Ahmad Pratomo | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Leadership Development Program Seri Managing Task Batch 2</i> <i>Training on Leadership Development Program for Managing Task Series Batch 2</i> | 16-17 September 2019, 23 Oktober 2019 dan 12 November 2019/ Jakarta, Indonesia <i>September 16–17, 2019, October 23, 2019 and November 12, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |
| Ahmad Pratomo | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan FINNON - <i>Understanding Financial Statement</i> <i>FINNON Training - Understanding Financial Statement</i> | 17-19 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 17–19, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | PPM Manajemen |
| Ahmad Pratomo | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Leadership Development Program (LDP) Seri Managing People - Leader As Coach</i> <i>Training on Leadership Development Program (LDP) in Managing People Series - Leader As Coach</i> | 3-4 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 3–4, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Loop Institute of Coaching |
| Ahmad Pratomo | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan (<i>In House</i>) <i>Sustainability Report</i> <i>In House Training on Sustainability Report</i> | 19 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 19, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Ghassani Herstanti | <i>Hard Skills</i> | <i>Certified Professional Marketing (Asia)</i> | 7-11 Oktober 2019 dan 21-25 Oktober 2019/ Jakarta, Indonesia <i>October 7–11, 2019 and October 21–25, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Asia Marketing Federation (AMF) dan MarkPlus Institute |
| Ghassani Herstanti | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan <i>Corporate Communications: Integrated Government Relation Strategy</i> <i>Corporate Communications Training: Integrated Government Relations Strategy</i> | 5 September 2019/ Jakarta, Indonesia <i>September 5, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Perdana Rey Communications |
| Ghassani Herstanti | <i>Hard Skills</i> | Sertifikasi <i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i> <i>Certified Risk Management Officer (CRMO) Certification"</i> | 2-4 September 2019/ Jakarta, Indonesia <i>September 2–4, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko <i>Risk Management Professional Certification Institute</i> |
| Ghassani Herstanti | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> <i>Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) Training</i> | 16-17 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 16–17, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |

| Nama dan Jabatan Name and Position | Tipe Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training | Tempat/Tanggal Place/Date | Penyelenggara Organizer |
|---|---|---|--|--|
| Rita Dwi Pramita | Hard Skills | Workshop Annual Report Berbasis Kriteria AR Award 2018 Annual Report Workshop Based on 2018 AR Award Criteria | 9-10 April 2019 / Jakarta, Indonesia April 9–10, 2019/ Jakarta, Indonesia | Komite Nasional Kebijakan Governance National Governance Policy Committee |
| Rita Dwi Pramita | Hard Skills | Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001 Training on ISO 37001 Based Anti-Bribery Management System | 19-20 Agustus 2019/Bandung, Indonesia August 19–20, 2019/ Bandung, Indonesia | CRMS Indonesia |
| Rita Dwi Pramita | Soft Skills | Pelatihan Leadership Development Program Seri Managing Task Batch 1 Training on Leadership Development Program for Managing Task Series Batch 1 | 10-11 September 2019, 16 Oktober 2019 dan 07 November 2019/ Jakarta, Indonesia September 10–11, 2019, October 16, 2019 and November 07, 2019/Jakarta, Indonesia | Precena Strategic Partners |
| Rita Dwi Pramita | Soft Skills | Pelatihan Leadership Development Program (LDP) Seri Managing People-Leader As Coach Training on Leadership Development Program (LDP) in Managing People Series-Leader As Coach | 3-4 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia December 3–4, 2019/ Jakarta, Indonesia | Loop Institute of Coaching |
| Rita Dwi Pramita | Hard Skills | Pelatihan (In House) Sustainability Report Training on Sustainability Report | 19 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia December 19, 2019/ Jakarta, Indonesia | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Audit Internal Internal Audit | | | | |
| Andy Revy Rohadian | Hard Skills | Pelatihan Professional Executive Certificate in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing Professional Executive Certificate Training in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing | 4-8 Maret 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia March 4–8, 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia | Prasarana Integrated Management & Engineering Services Sdn Bhd (PRIME) |
| Andy Revy Rohadian | Hard Skills | Workshop Pembahasan Sistem Manajemen Pengukuran Kinerja dengan Korn Ferry Discussion Workshop on Management System of Performance Measurement with Korn Ferry | 18 Juli 2019/ Jakarta, Indonesia July 18, 2019/ Jakarta, Indonesia | Korn Ferry |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Tipe Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Subject of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|--|---|--|--|
| Andy Revy Rohadian | <i>Soft Skills</i> | <i>Pelatihan Executive Coaching - Leader As Coach Batch 1</i> <i>Training of Executive Coaching- Leader As Coach Batch 1</i> | 9, 29, 30 Oktober 2019/Jakarta, Indonesia <i>Oktober 9, 29, 30, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Loop Institute of Coaching |
| Andy Revy Rohadian | <i>Hard Skills</i> | <i>Workshop Internasional: Best Practices in Implementing Effective Governance From Rules to Principles</i> <i>International Workshop: Best Practices in Implementing Effective Governance From Rules to Principles</i> | 24-28 November 2019/Perth, Australia <i>November 24–28, 2019/Perth, Australia</i> | Perhimpunan Auditor Internal |
| Andy Revy Rohadian | <i>Hard Skills</i> | <i>Pelatihan Probity Audit</i> <i>Probity Audit Training</i> | 11-13 Desember 2019/Jakarta, Indonesia <i>December 11–13, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Lembaga Pengembangan Fraud Auditing <i>Fraud Auditing Development Institute</i> |
| Andy Revy Rohadian | <i>Soft Skills</i> | <i>Pelatihan Executive Management Development Program (EMDP) Seri Managing Business - Inspiring Leadership: Becoming High Performing Leader</i> <i>Executive Management Development Program (EMDP) Training Managing Business-Inspiring Leadership Series: Becoming High Performing Leader</i> | 18-19 November 2019/Jakarta, Indonesia <i>November 18–19, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Asian Leadership Centre |
| Achmad Syarif Hamzah | <i>Hard Skills</i> | <i>Program Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar</i> <i>Basic Level Qualified Internal Auditor Training and Certification Program</i> | 21 Januari 2019-2 Februari 2019 / Jakarta, Indonesia <i>January 21, 2019–February 02, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Yayasan Pendidikan Internal Audit <i>Internal Audit Education Foundation</i> |
| Achmad Syarif Hamzah | <i>Hard Skills</i> | <i>Pelatihan Professional Executive Certificate in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing</i> <i>Professional Executive Certificate Training in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing</i> | 4-15 Maret 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia <i>March 04–15, 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia</i> | Prasarana Integrated Management & Engineering Services Sdn Bhd (PRIME) |
| Achmad Syarif Hamzah | <i>Hard Skills</i> | <i>Pelatihan Probity Audit</i> <i>Probity Audit Training</i> | 11-13 Desember 2019/Jakarta, Indonesia <i>December 11–13, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Lembaga Pengembangan Fraud Auditing <i>Fraud Auditing Development Institute</i> |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Tipe Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Subject of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|--|--|--|--|
| Achmad Syarif Hamzah | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> <i>Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) Training</i> | 16-17 Desember 2019/Jakarta, Indonesia <i>December 16–17, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |
| Kantheni Utamingtyas | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Professional Executive Certificate in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing <i>Professional Executive Certificate Training in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing</i> | 4-15 Maret 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia <i>March 4–15, 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia</i> | Prasarana Integrated Management & Engineering Services Sdn Bhd (PRIME) |
| Kantheni Utamingtyas | <i>Hard Skills</i> | Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar II</i> <i>Basic Level II Qualified Internal Auditor Certification</i> | 13-24 Mei 2019/ Jakarta, Indonesia <i>May 13–24, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Yayasan Pendidikan Internal Audit <i>Internal Audit Education Foundation</i> |
| Kantheni Utamingtyas | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001 <i>Training on ISO 37001 Based Anti-Bribery Management System</i> | 19-20 Agustus 2019/Bandung, Indonesia <i>August 19–20, 2019/ Bandung, Indonesia</i> | CRMS Indonesia |
| Kantheni Utamingtyas | <i>Soft Skills</i> | <i>Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) Training</i> | 18-19 November 2019/Jakarta, Indonesia | Precena Strategic Partners |
| Kantheni Utamingtyas | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Probitas Audit <i>Probitas Audit Training</i> | 11-13 Desember 2019/Jakarta, Indonesia <i>December 11–13, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Lembaga Pengembangan Fraud Auditing <i>Fraud Auditing Development Institute</i> |
| Rizaldi | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Professional Executive Certificate in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing <i>Professional Executive Certificate Training in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing</i> | 4-15 Maret 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia <i>March 4–15, 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia</i> | Prasarana Integrated Management & Engineering Services Sdn Bhd (PRIME) |
| Rizaldi | <i>Hard Skills</i> | Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan II</i> <i>Advanced Level II Qualified Internal Auditor Certification</i> | 13-24 Mei 2019 / Jakarta, Indonesia <i>May 13–24, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Yayasan Pendidikan Internal Audit <i>Internal Audit Education Foundation</i> |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Tipe Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Subject of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|--|--|--|--|
| Rizaldi | <i>Hard Skills</i> | Sertifikasi Certified Risk Management Officer (CRMO) <i>Certified Risk Management Officer (CRMO) Certification</i> | 2–4 September 2019/Jakarta, Indonesia | Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko |
| Rizaldi | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) <i>Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) Training</i> | 30 September-1 Oktober 2019 / Jakarta, Indonesia <i>September 30–October 1, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |
| Rizaldi | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Probity Audit <i>Probity Audit Training</i> | 11–13 Desember 2019 / Jakarta, Indonesia <i>December 11–13, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Lembaga Pengembangan Fraud Auditing <i>Fraud Auditing Development Institute</i> |
| Said Muhammad Ichsan | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Professional Executive Certificate in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing <i>Professional Executive Certificate Training in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing</i> | 4–15 Maret 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia <i>March 4–15, 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia</i> | Prasarana Integrated Management & Engineering Services Sdn Bhd (PRIME) |
| Said Muhammad Ichsan | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) <i>Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) Training</i> | 30 September-1 Oktober 2019/ Jakarta, Indonesia <i>September 30–October 1, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |
| Said Muhammad Ichsan | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Probity Audit <i>Probity Audit Training</i> | 11-13 Desember 2019/Jakarta, Indonesia <i>December 11–13, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Lembaga Pengembangan Fraud Auditing <i>Fraud Auditing Development Institute</i> |
| Shella Widya Adinda | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Professional Executive Certificate in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing <i>Professional Executive Certificate Training in Urban Rail Operation and Maintenance Auditing</i> | 4-15 Maret 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia <i>March 4–15, 2019/ Kuala Lumpur, Malaysia</i> | Prasarana Integrated Management & Engineering Services Sdn Bhd (PRIME) |
| Shella Widya Adinda | <i>Hard Skills</i> | Program Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Dasar <i>Basic Level Qualified Internal Auditor Training and Certification Program</i> | 6-18 Mei 2019/ Jakarta, Indonesia <i>May 6–18, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Yayasan Pendidikan Internal Audit <i>Internal Audit Education Foundation</i> |

| Nama dan Jabatan Name and Position | Tipe Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Materi Pendidikan dan Pelatihan Subject of Education and Training | Tempat/Tanggal Place/Date | Penyelenggara Organizer |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| Shella Widya Adinda | Soft Skills | Pelatihan <i>Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> <i>Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) Training</i> | 2-3 Oktober 2019/ Jakarta, Indonesia <i>October 2-3, 2019/ Jakarta, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |
| Shella Widya Adinda | Hard Skills | Pelatihan Program Implementing GRC <i>GRC Implementation Program Training</i> | 21-23 Oktober 2019/Jakarta, Indonesia <i>October 21-23, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | CRMS Indonesia |
| Shella Widya Adinda | Hard Skills | Pelatihan <i>Probitiy Audit</i> <i>Probitiy Audit Training</i> | 11-13 Desember 2019/Jakarta, Indonesia <i>December 11-13, 2019/Jakarta, Indonesia</i> | Lembaga Pengembangan Fraud Auditing <i>Fraud Auditing Development Institute</i> |

Tabel 3.11
Table 3.11

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS COMPOSITION

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA

MRT JAKARTA SHARE OWNERSHIP COMPOSITION

KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA PER 31 DESEMBER 2019

MRT Jakarta Share Ownership as of December 31, 2019

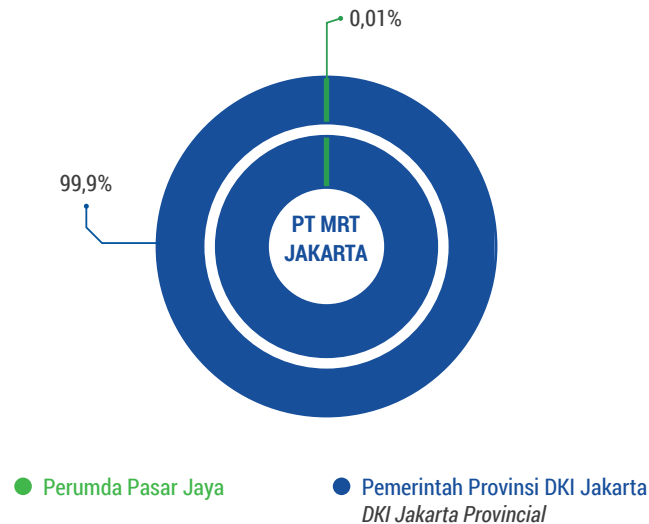
| Pemegang Saham Shareholders | Jumlah Saham (lembar) Total Shares (per share) | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Subscribed and Fully Paid-in Capital (Rp) | Persentase Kepemilikan(%) Ownership Percentage (%) |
|---|---|---|---|
| Nilai Nominal Saham = Rp1.000.000,-/lembar saham <i>Share Nominal Value = Rp1.000.000,-/share</i> | | | |
| Kepemilikan Saham 5% atau lebih <i>Share Ownership of 5% or more</i> | | | |
| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Provincial Government</i> | 12.771.472 | 12.771.472.000.000,- | 99,99% |
| Perumda Pasar Jaya | 500 | 500.000.000,- | 0,01% |

| Pemegang Saham Shareholders | Jumlah Saham (lembar) Total Shares (per share) | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Subscribed and Fully Paid-in Capital (Rp) | Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%) |
|--|---|---|--|
| Kepemilikan Kurang dari 5% Ownership Less than 5% | | | |
| Perumda Pasar Jaya | 500 | 500.000.000,- | 0,01% |
| Jumlah Total | 12.771.972 | 12.771.972.000.000,- | 100,00% |

Tabel 3.12
Table 3.12

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MRT JAKARTA PER 31 DESEMBER 2019

MRT Jakarta Shareholders Composition as of December 31, 2019



Grafik 3.18
Graphic 3.18

INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA OLEH MANAJEMEN INFORMATION ON SHARE OWNERSHIP IN MRT JAKARTA BY MANAGEMENT

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan saham untuk publik maupun program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan. Berikut disampaikan transparansi informasi terkait kepemilikan saham oleh manajemen Perseroan.

Until the end of 2019, the Corporation did not issue shares for the public nor share ownership progress for the management and employees. The following shows the Corporation's management share ownership information.

TABEL INFORMASI TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM MRT JAKARTA OLEH MANAJEMEN KUNCI

Table of Information on Share Ownership in MRT Jakarta by Key Management

| Nama Name | Jabatan Position | 2019 | | 2018 | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | Jumlah Saham (lembar) Total Shares (per share) | Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%) | Jumlah Saham (lembar) Total Shares (per share) | Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%) |
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | | | | | |
| M. Syaugi | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |
| Rukijo | Komisaris <i>Commissioner</i> | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |
| Zulfikri | Komisaris <i>Commissioner</i> | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |
| Mukhtasor | Komisaris <i>Commissioner</i> | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |
| Adnan Pandu Praja | Komisaris <i>Commissioner</i> | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |
| Direksi <i>Directors</i> | | | | | |
| William P. Sabandar | Direktur Utama <i>President Director</i> | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |
| Silvia Halim | Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i> | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |
| Muhammad Effendi | Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Operations and Maintenance Director</i> | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |
| Ghamal Peris | Direktur Pengembangan Bisnis <i>Business Development Director</i> | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |
| Tuhyat | Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Finance and Corporate Management Director</i> | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |
| Kepemilikan Saham oleh Karyawan <i>Share Ownership by Employee</i> | | -Nihil- -Nil- | | -Nihil- -Nil- | |

Keterangan: Nihil = tidak memiliki saham Perseroan

Remarks: Nil= does not own the Corporate's shares

Tabel 3.12
Table 3.12

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI HINGGA NAMA PEMILIK AKHIR

INFORMATION ON ULTIMATE SHAREHOLDERS AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS TO THE NAME OF END-OWNERS



PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MERUPAKAN PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI MRT JAKARTA DENGAN KEPEMILIKAN LANGSUNG SEBESAR 99,99%, DAN KEPEMILIKAN TIDAK LANGSUNG MELALUI PERUMDA PASAR JAYA SEBESAR 0,01%.

DKI Jakarta Provincial Government is the ultimate / controlling shareholder of MRT Jakarta with 99.99% direct ownership, and indirect ownership through Perumda Pasar Jaya of 0.01%.

Pemegang saham utama/pengendali Perseroan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan kepemilikan langsung sebesar 99,99%. Selain itu, terdapat kepemilikan saham tidak langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap saham Perseroan, melalui Perumda Pasar Jaya. Perumda Pasar Jaya merupakan pendiri sekaligus pemegang saham minoritas Perseroan sebesar 0,01%. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan entitas pemilik akhir Perseroan.

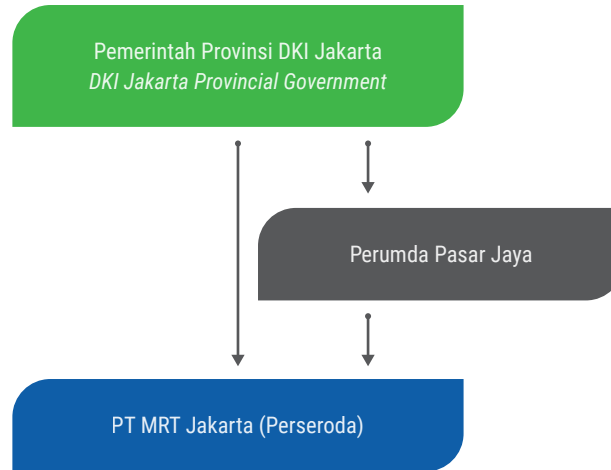
Perumda Pasar Jaya didirikan pada tahun 1966 oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga, dan kelancaran distribusi barang dan jasa di wilayah Jakarta. Dari 152 pasar yang dimiliki, Perumda Pasar Jaya mengelola 148 pasar dengan omset bisnis yang diperdagangkan mencapai lebih dari Rp150 triliun per tahun dengan 105.223 tempat usaha. Berdasarkan survei, pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya dikunjungi lebih dari 2 juta pengunjung setiap harinya. Hingga akhir tahun 2019, Perumda Pasar Jaya dimiliki 100% oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

The ultimate/controlling shareholders of the Corporation is DKI Jakarta Provincial Government, with 99.99% direct ownership of the shares. In addition, DKI Jakarta Provincial Government has indirect share ownership of the Corporation's shares through Perumda Pasar Jaya. Perumda Pasar Jaya is the founder and minority shareholder of the Corporation's shares at 0.01%. As such, DKI Jakarta Provincial Government is the Corporation's end-owner entity.

Perumda Pasar Jaya was established in 1966 by DKI Jakarta Regional Government to carry out public services in the management of market area, fostering market traders, helping the stability of prices and smoothing distribution of goods and services in Jakarta region. Out of 152 markets owned, Pasar Jaya manages 148 markets with a turnover of more than Rp150 billion per year with 105,223 business stalls. Based on the survey, the markets managed by Perumda Pasar Jaya are visited by more than 2 million visitors daily. As end of 2019, Perumda Pasar Jaya is 100% owned by the DKI Jakarta Provincial Government.

STRUKTUR GRUP MRT JAKARTA

GROUP STRUCTURE OF MRT JAKARTA



Figur 4.4. Struktur Grup MRT Jakarta
Figure 4. 4. Group structure of MRT Jakarta

Pemegang saham utama/pengendali Perseroan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan kepemilikan langsung sebesar 99,99%, dan kepemilikan tidak langsung melalui PD Pasar Jaya sebesar 0,01%. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan entitas induk sekaligus entitas pemilik akhir Perseroan.

The ultimate / controlling shareholder is DKI Jakarta Provincial Government, with 99.99% direct ownership of the shares and indirect ownership through Pasar Jaya of 0.01%. Accordingly, DKI Jakarta Provincial Government is the parent entity as well as the end-owner entity of the Corporation.



Alamat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Kantor Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Jl. Medan Merdeka Sel. No.8-9
Gambir, Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia

Telp dan Faks : +62 21 382 2255
Surel : dki@jakarta.go.id
Situs Web : www.jakarta.go.id

HINGGA AKHIR TAHUN 2019, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI ENTITAS ANAK MAUPUN ENTITAS ASOSIASI.

As end of 2019, the Corporation has no subsidiaries or associates.

INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, SERTA *JOINT VENTURE* (JV) DAN *SPECIAL PURPOSE VEHICLE* (SPV)

INFORMATION ON SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, JOINT VENTURE (JV) AND SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

Per 31 Desember 2019 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* (JV) ataupun *Special Purpose Vehicle* (SPV). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama entitas anak dan/atau asosiasi; persentase kepemilikan saham; keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).

As of December 31, 2019 and the date of this data/information disclosure, the Corporation has no Subsidiary, Associates, Joint Venture (JV) or Special Purpose Vehicle (SPV). Therefore, there is no information on names of subsidiaries and/or associates; percentage of share ownership; description of subsidiary and/or associates' business; and description of subsidiaries and/or associates' operations status (in operations or pending operations).

INFORMASI TENTANG KRONOLOGIS PENERBITAN DAN PENCATATAN SAHAM

INFORMATION ON SHARE ISSUANCE AND SHARE LISTING CHRONOLOGY

Hingga tanggal 31 Desember 2019 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perseroan tidak menerbitkan saham kepada publik, tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham mana pun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.

As of December 31, 2019 and the date of this data/information disclosure, the Corporation does not issue shares for public, does not make Initial Public Offering and does not trade its shares on any stock exchanges. Therefore, there is no information on years of shares listing, total shares, shares par value, shares offering prices for each corporate actions, total shares listed after each corporate actions, and name of the stock exchanges where the Corporation shares are listed.

INFORMASI TENTANG PENERBITAN DAN PENCATATAN OBLIGASI DAN/ATAU EFEK LAINNYA

BONDS AND / OR OTHER SECURITIES ISSUE AND LISTING INFORMATION

Hingga tanggal 31 Desember 2019 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perseroan tidak menerbitkan efek lainnya dalam bentuk apa pun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; nilai penawaran efek lainnya; nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan; dan peringkat efek.

As of December 31, 2019 and the date of this data / information disclosure, the Corporation does not issue other securities in any form. Therefore, there is no information on name of other securities, other securities issuance date, interest / yield rate of other securities, and maturity date of other securities; other securities offering price; name of stock exchange where other securities are listed; and securities rating.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

SUPPORTING INSTITUTION AND PROFESSION

DAFTAR LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

List of Supporting Institutions and Professions

Akuntan Publik *Public Accountant*

| | | |
|--|--|--|
| Ernst & Young (EY) Purwanto, Sungkoro & Surja Indonesia Stock Exchange Buliding Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-52 Jakarta 12190, Indonesia | | |
| Telp. | : +62 21 52895000 | |
| Fax. | : +62 21 52894100 | |
| Surel Email | : damestar.hutagalung@id.ey.com | |
| Situs Web Website | : www.ey.com | |
| Bentuk Jasa <i>Type of Service</i> | : Audit Laporan Keuangan | : <i>Financial Statement Audit</i> |
| Jasa Lainnya <i>Other Services</i> | : Audit Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Audit kepatuhan terhadap pengendalian internal | : <i>Compliance Audit of laws and regulations and compliance audit of internal control</i> |
| Periode Penugasan <i>Assignment Period</i> | : 17 Oktober 2019-31 Maret 2020 | : <i>October 17, 2019 - March 31, 2020</i> |
| Biaya Fee | : Rp670.000.000 | |

Konsultan Hukum *Legal Consultant*

| | | |
|---|---|---|
| Hanafiah Pongawa & Partners Wisma 46 Kota BNI, Lantai 41 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat 10220 | | |
| Telp. | : (+62 21) 5701837 | |
| Fax. | : Fax. (+62 21) 5701835 | |
| Surel Email | : hendra.ong@dentons.com | |
| Situs Web Website | : www.dentons.hprplawyers.com | |
| Bentuk Jasa <i>Type of Service</i> | : Jasa Konsultan/Penasihat Hukum | : <i>Legal Consultation services</i> |
| Periode Penugasan <i>Assignment Period</i> | : 1 Tahun (18 September 2019–18 September 2020) | : <i>1 Year (September 18, 2019 - September 18, 2020)</i> |
| Biaya Fee | : Maksimal Rp2.500.000.000 | : <i>Maximum Rp 2.500.000.000</i> |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Assegaf Hamzah & Partners Capital Place, Level 36 & 37 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta 12710 | | |
| Telp. | : (+62 21) 2555 7800 | |
| Fax. | : (+62 21) 2555 7899 | |
| Surel Email | : info@ahp.id | |
| Situs Web Website | : www.ahp.id | |
| Bentuk Jasa <i>Form of Service</i> | : Jasa Konsultan/Penasihat Hukum | : <i>Legal Consultation services</i> |
| Periode Penugasan <i>Assignment Period</i> | : Januari 2019-17 September 2019 | : <i>Januari 2019 - 17 September 2019</i> |
| Biaya Fee | : Rp. 570.515.545,- | |

Penilai *Assessor*

| | | |
|---|--|--|
| Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Jl. Pramuka No.33 Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13120 | | |
| Telp. | : (+62 21) 85910031 | |
| Situs Web Website | : www.bpkp.go.id/dki1 | |
| Bentuk Jasa <i>Type of Service</i> | : Assessment Good Corporate Governance | : <i>Good Corporate Governance Assessment</i> |
| Periode Penugasan <i>Assignment Period</i> | : 12 Desember 2019–14 Februari 2020 | : <i>December 12, 2019 - February 14, 2020</i> |
| Biaya Fee | : Rp41.760.000 | |

Notaris Notary

Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. JI. Panglima Polim V/11, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, 12160

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Telp. | : (+62 21) 7398569 | |
| Situs Web Website | : poerbaningsih@yahoo.com | |
| Bentuk Jasa Form of Service | : Jasa Notaris | : Notarial services |
| Periode Penugasan Assignment Period | : 1 Tahun (18 April 2019–18 April 2020) | : 1 Year (April 18, 2019 - April 18, 2020) |
| Biaya Fee | : Per harga satuan | : per Unit |

Tabel 4.1
Table 4.1

DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK 6 (ENAM) TAHUN TERAKHIR 2014-2019

List of Public Accountant Firm and Public Accountant for The Last 6 (Six) Years 2014 - 2019

| Tahun Buku Fiscal Year | Kantor Akuntan Publik Public Accountant Firm | Akuntan Publik Public Accountant | Jasa Service | Jasa Lainnya Other Services | Opini Opinion | Biaya Fee |
|------------------------|--|----------------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| 2019 | Purwanto, Sungkoro & Surja | Damestar Hutagalung, CPA | Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2019 <i>General audit of financial statements for 2019 fiscal year</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation as well as Internal Control</i> | Wajar, dalam semua hal yang material <i>Fairly, in all material aspects</i> | Rp670 juta <i>million</i> |
| 2018 | Purwanto, Sungkoro & Surja | Drs. David Sungkoro, CPA | Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2019 <i>General audit of financial statements for 2019 fiscal year</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation as well as Internal Control</i> | Wajar, dalam semua hal yang material <i>Fairly, in all material aspects</i> | Rp581,4 juta <i>million</i> |
| 2017 | Purwanto, Sungkoro & Surja | Drs. David Sungkoro, CPA | Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2019 <i>General audit of financial statements for 2019 fiscal year</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation as well as Internal Control</i> | Wajar, dalam semua hal yang material <i>Fairly, in all material aspects</i> | Rp508,8 juta <i>million</i> |
| 2016 | Purwanto, Sungkoro & Surja | E. Batara Manurung, CPA | Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2019 <i>General audit of financial statements for 2019 fiscal year</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation as well as Internal Control</i> | Wajar, dalam semua hal yang material <i>Fairly, in all material aspects</i> | Rp480 juta <i>million</i> |
| 2015 | Purwanto, Sungkoro & Surja | E. Batara Manurung, CPA | Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2019 <i>General audit of financial statements for 2019 fiscal year</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation as well as Internal Control</i> | Wajar, dalam semua hal yang material <i>Fairly, in all material aspects</i> | Rp400 juta <i>million</i> |
| 2014 | Purwanto, Suherman & Surja | E. Batara Manurung, CPA | Audit umum atas Laporan Keuangan tahun buku 2019 <i>General audit of financial statements for 2019 fiscal year</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern <i>Compliance with Regulations and Legislation as well as Internal Control</i> | Wajar, dalam semua hal yang material <i>Fairly, in all material aspects</i> | Rp335 juta <i>million</i> |

Tabel 4.2
Table 4.2

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATION

PENGHARGAAN DI TAHUN 2019

Awards in 2019

| Tanggal Date | Acara Event | Penghargaan Award | Diberikan Oleh Awarded by |
|------------------------------------|---|---|---|
| Internasional International | | | |
| 12 September 2019 | 6 th Singapore Institute of Planners (SIP) Awards 2019 | Merit Award untuk Best Planning of the Year; Internasional Category untuk Master Plan dan Panduan Rancang Kota Merit Award for Best Planning of the Year; International Category for Master Plans and City Design Guides | Singapore Institute of Planners (SIP) |
| 4 Desember 2019 | International Innovation Awards for Platform Screen Door System | International Innovation Awards for Platform Screen Door System in Service and Solution Category | Enterprise Asia |
| 9 Desember 2019 | International Diamond Prize for Excellence in Quality 2019 | International Diamond Prize for Excellence in Quality in the Gold Category | ESQR |
| Nasional National | | | |
| 22 April 2019 | Penghargaan K3 2019 2019 K3 Award | Bendera Emas SMK3 PP 50 2012 Gold Flag of SMK3 PP 50 2012 | Kementerian Ketenagakerjaan RI Ministry of Manpower of The Republic of Indonesia |
| 22 April 2019 | Penghargaan K3 2019 2019 K3 Award | Penghargaan Kecelakaan Nihil Zero Accident Award | Kementerian Ketenagakerjaan RI Ministry of Manpower of The Republic of Indonesia |
| 24 Juli 2019 | Omni Brand Award 2019 | Omni Brand of the Year 2019 | Marketeers Magazine |
| 19 September 2019 | Annual PropertyGuru Indonesia Property Awards 2019 | Special Recognition for Public Facility | PropertyGuru |
| 14 November 2019 | Annual Report Award 2019 | Annual Report Award: Kategori BUMD Non-listed Annual Report Award: Non-listed Regional Government Owned Enterprises category | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority (OJK) |
| 27 November 2019 | Top Digital Awards 2019 | Top Digital Implementation | IT Works |
| 27 November 2019 | Top Digital Awards 2019 | Top Leader on Digital Business | IT Works |
| 4 Desember 2019 | CNBC Indonesia Award | The Best Business Performance for Public Transportation | CNBC indonesia |
| 11 Desember 2019 | Indonesia Most Trusted Companies Awards | Perusahaan Terpercaya Trusted Company | IICG |
| 13 Desember 2019 | Good Corporate Governance Award 2019 | Indonesia Trusted Companies based on Corporate Governance Perception Index (CGPI) | IICG dan SWA |
| 17 Desember 2019 | Transportation Safety Management Award (TSMA) | Unggulan 1 Kategori Jasa Perkeretaapian Superior 1 Category Railroad Services | Kementerian Perhubungan RI Ministry of Transportation of The Republic of Indonesia |
| 25 Desember 2019 | Kompetisi Ruang Laktasi AIMI AIMI Lactation Space Competition | Penghargaan Ruang Menyusui di Ruang Publik (Stasiun Fatmawati) Breastfeeding Room Awards in Public Spaces (Fatmawati Station) | Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Breastfeeding Mothers Association (AIMI) |

Tabel 4.3
Table 4.3

SERTIFIKASI YANG BERLAKU DI TAHUN 2019

Certification Applicable in 2019

| Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi <i>Date of Certification Issued</i> | Jenis Sertifikat <i>Certificate Type</i> | Dikeluarkan oleh <i>Issued by</i> | Masa Berlaku Hingga <i>Validity Period Until</i> |
|---|---|--|---|
| 29 Maret 2019 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja <i>Safety and Occupational Health Management System</i> | Kementerian Ketenagakerjaan RI <i>Ministry of Manpower of The Republic of Indonesia</i> | 2022 |
| 20 Desember 2019 | ISO Terintegrasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 <i>Integrated ISO ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018</i> | TUV Rheinland | 2022 |

Tabel 4.4
Table 4.4

INFORMASI TENTANG DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI, KANTOR CABANG, DAN KANTOR PERWAKILAN

INFORMATION ON SUBSIDIARIES, ASSOCIATES, BRANCHES, AND REPRESENTATIVE OFFICES ADDRESSES



Gambar 4.4
Image 4.4

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak memiliki entitas anak maupun entitas asosiasi, dan tidak memiliki kantor cabang dan/atau kantor perwakilan. Alamat Perseroan terdapat pada kantor pusat dan kantor proyek yang telah dicantumkan pada bagian "Informasi Umum dan Identitas Perseroan" pada bab Profil Perseroan dalam laporan tahunan ini.

As end of 2019, the Corporation does not have subsidiaries or associates, and does not have branch offices and/or representative offices. The Corporation's address is the head office and project offices addresses as listed in the "General Information and Corporation Identity" section of the Corporation Profile chapter in this annual report.

ASET DIGITAL PERSEROAN

DIGITAL ASSET OF THE CORPORATION



Gambar 4.1. Situs Web PT MRT Jakarta (Perseroda)
Figure 4. 1. PT MRT Jakarta (Perseroda) Website

Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat www.jakartamrt.co.id. Situs web ini berisi informasi terkini tentang perkembangan pembangunan proyek MRT Jakarta, informasi pengadaan, informasi seputar korporasi, profil Perseroan, info karier, edukasi awal penggunaan MRT Jakarta saat nanti beroperasi, hingga berita terkini. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

Perseroan memiliki beberapa aset digital media sosial perseroan yang terdiri dari akun Facebook "MRT Jakarta", akun Twitter @mrtjakarta, akun Instagram @mrtjkt, akun Youtube MRTv, dan akun LinkedIn "MRT Jakarta". Media sosial tersebut berisi informasi terkini tentang perkembangan pembangunan proyek MRT Jakarta, info karier, edukasi penggunaan MRT Jakarta, sosialisasi budaya transportasi publik hingga berita terkini lainnya. Media sosial ini disediakan sebagai kanal komunikasi yang dapat diakses secara terbuka dan interaktif, dengan tujuan memberikan informasi terbaru tentang Perseroan dan berinteraksi dengan khalayak luas.

The corporation has an official website at www.jakartamrt.co.id. The content of this website includes up-to-date information on MRT Jakarta development, procurement information, information of the Corporation, Corporate Profile, career information, initial education of the use of MRT Jakarta when operating, and the latest news. This website is an open-access portal to provide comprehensive information about the Corporation to broader audience.

The Corporation owns multiple official social media accounts, including "MRT Jakarta" Facebook account, @mrtjakarta Twitter account, @mrtjkt Instagram account, MRTv Youtube account and "MRT Jakarta" LinkedIn account. These social media accounts have the latest information on the progress of MRT Jakarta construction projects, career information, educational contents on the use of MRT Jakarta, socialization of public transport culture, and the latest news. These social media are prepared as an open and interactive communication channel to provide the latest information about the Corporation and as means of interaction with broader audience.

| Uraian Description | Ketersediaan Availability | Keterangan Remarks |
|---|---------------------------|---|
| Struktur grup perseroan dan informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu <i>Corporation's group structure and shareholders information until individual end-owners</i> | ✓ | Terdapat informasi mengenai kepemilikan saham PT MRT Jakarta (Perseroda) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. <i>There is information about the ownership of PT MRT Jakarta (Perseroda) by the DKI Jakarta Provincial Government.</i> https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/sejarah-mrt-jakarta/ |
| Isi Kode Etik <i>Code of Conducts Content</i> | ✓ | Terdapat informasi Kode Etik dalam Tata Kelola Perseroan. <i>There is information about Corporate Governance, especially the Code of Conducts.</i> https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/tata-kelola-perusahaan/ |
| Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan <i>Information about General Meetings of Shareholders (GMS) at least including agenda discussed in the GMS, GMS minutes of Meeting Summary and important date information, such as GMS announcement date, GMS invitation date, GMS Summary</i> | ✓ | Terdapat informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disampaikan melalui Info Terkini atau Siaran Pers, meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, dan ringkasan risalah RUPS. <i>There is information on the General Meeting of Shareholders (GMS) communicated through the Latest Info or Press Release, including the agenda discussed in the GMS, and GMS minutes of meeting summary.</i> https://www.jakartamrt.co.id/2019/11/29/rups-luar-biasa-setujui-rkap-2020-dan-peningkatan-modal-perseroan/ https://www.jakartamrt.co.id/2018/10/29/pemegang-saham-tetapkan-direktur-dan-komisaris-baru-di-mrt-jakarta/ https://www.jakartamrt.co.id/siaran-pers-siaran-pers-rapat-umum-pemegang-saham-rups-luar-biasa-pt-mrt-jakarta-sahkan-rukijo-sebagai-plt-komisaris-utama/ |
| Laporan keuangan tahunan (5 tahun terakhir) <i>Annual financial statements (last 5 years)</i> | ✓ | Terdapat informasi laporan keuangan PT MRT Jakarta (Perseroda) 5 tahun terakhir yang disampaikan melalui Laporan Tahunan (Annual Report). <i>There is information on PT MRT Jakarta (Perseroda) financial statements of the last 5 years publicized in the Annual Report.</i> https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/annual-report/ |
| Profil Dewan Komisaris dan Direksi <i>Profile of Board of Commissioners and Board of Directors</i> | ✓ | Terdapat informasi mengenai profil Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda). <i>There is information about the Profile of Board of Commissioners and Board of Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda).</i> https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/dewan-komisaris/ https://www.jakartamrt.co.id/mrt-jakarta/direksi/ |
| Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite Dewan Komisaris, dan Unit Internal Audit <i>Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Commissioner Committees, and Internal Audit</i> | ✓ | Piagam/Charter tercakup dalam dokumen Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi. <i>Charter is included in the Board of Commissioners and Board of Directors Guidelines.</i> https://www.jakartamrt.co.id/dokumen/pedoman-dewan-komisaris-dan-direksi-board-manual/ |

Tabel 4.5
Table 4.5



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS

Perseroan sebagai penyedia layanan transportasi di Indonesia, tetap berfokus pada pengembangan bisnis melalui ekspansi strategi pengelolaan perencanaan yang dijalankan dengan baik.

As a provider of transportation service in Indonesia, the Corporation keeps its focus on business development expansion through well - executed planning management strategies.

TINJAUAN UMUM: TRANSPORTASI PUBLIK IBU KOTA JAKARTA

GENERAL REVIEW: PUBLIC TRANSPORTATION IN THE CAPITAL CITY OF JAKARTA



Gambar 5.1. MRT sebagai solusi kemacetan di Jakarta
Image 5.1. MRT as a solution to Jakarta's traffic congestion

KEMACETAN JAKARTA: TANTANGAN DAN UPAYA MENGATASI

TRAFFIC CONGESTION IN JAKARTA: THE CHALLENGES AND THE SOLUTIONS

Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis bagi Negara Republik Indonesia. Selain menjadi pusat pemerintah, dari perspektif ekonomi, Jakarta menjadi pusat perekonomian Indonesia, baik sebagai pusat pasar modal dan pasar keuangan maupun sebagai jalur lalu lintas ekspor impor khususnya melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peran sentral di atas telah melahirkan persoalan kemacetan di Jakarta. Tingginya tingkat kemacetan di Jakarta tak lepas dari pertumbuhan perekonomian yang sebagian besar didorong oleh konsumsi masyarakat. Dengan populasi penduduk yang didominasi oleh mereka yang berusia produktif, konsumsi masyarakat terkonsentrasi pada belanja modal pribadi; salah satunya adalah belanja kendaraan bermotor.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengupayakan berbagai hal untuk dapat menekan dan mengelola kemacetan di Jakarta. Berbagai kebijakan seperti aturan "3 in 1" yang kemudian diubah menjadi "Ganjil-Genap"; penambahan infrastruktur flyover dan underpass di beberapa titik, hingga pengelolaan transportasi umum yang terintegrasi, terus didorong agar kemacetan di Jakarta dapat berkurang. Di samping itu, pengelolaan transportasi publik dan dorongan kepada masyarakat Jakarta untuk menggunakan transportasi publik terus digaungkan untuk dapat menurunkan tingkat kemacetan.

The Province of DKI Jakarta has a strategic role for the Republic of Indonesia. In addition to being the center of administrative and political activities, from an economic perspective Jakarta is also the center of the Indonesian economy, both in terms of capital and financial markets as well as import-export activities, especially through the Tanjung Priok Port.

Meanwhile, Indonesia's economic growth and the aforementioned central role Jakarta bears have created traffic congestion problems in Jakarta. The high traffic congestion in Jakarta is inseparable from the economic growth that is largely driven by public consumption. With a population dominated by the productive age group, public consumption is concentrated on private capital spending; including motor vehicle purchases.

The Provincial Government of DKI Jakarta has implemented various efforts to suppress and manage traffic congestions in Jakarta. Efforts such as the "3 in 1" rule, which was later altered to become the "Odd-Even" rule, the additions of flyover and underpass infrastructures at several points, and the integrated management of public transportation modes have all been put in place to reduce traffic congestions in Jakarta. In addition, messages on improvements in public transportation management and encouragement for the people to use public transportation have also been continuously expressed with the objective of reducing congestions in Jakarta.

Upaya ini mulai menunjukkan hasil positif. Numbeo, sebuah *database* tentang *cost of living*, merilis indeks lalu lintas seluruh negara. *Numbeo Traffic Index 2020* dengan pengukuran di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020 menempatkan Jakarta di peringkat ke-13 sebagai kota termacet di dunia, membaik dari peringkat tahun sebelumnya di mana Jakarta ditempatkan di peringkat ke-5 sebagai kota termacet di dunia. Indeks ketidakefisienan menempatkan Jakarta di posisi ke-15, membaik dari tahun sebelumnya di posisi ke-7, sementara indeks Emisi CO₂ menempatkan Jakarta di peringkat ke-29, membaik dari tahun sebelumnya dengan peringkat ke-20.

These efforts have begun to show positive results. Numbeo, a database collecting information on cost of living, released a global traffic index in 2020. The Numbeo Traffic Index 2020 with data from the end of 2019 and early 2020 placed Jakarta at 13th on the list of the the most congested cities in the world, improving from the previous year's ranking of 5th. The inefficiency index puts Jakarta at 15th, improving from the previous year's ranking 7th, while the CO₂ Emissions index ranked Jakarta 29th, improving from the previous year's ranking of 20th.

MRT JAKARTA DAN URGENSI TRANSPORTASI PUBLIK IBU KOTA

MRT JAKARTA AND THE URGENCY OF PUBLIC TRANSPORTATION IN THE CAPITAL CITY



Gambar 5.2
Image 5.2

Salah satu strategi besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurai masalah kemacetan dilakukan dengan pengelolaan transportasi umum yang terintegrasi. Setelah *Bus Rapid Transit* atau yang lebih dikenal dengan bus *TransJakarta* beroperasi pada tahun 2004, perlahan budaya penggunaan transportasi publik oleh masyarakat mulai terbangun.

One of the Provincial Government of DKI Jakarta's key strategies in solving congestion problems is through integrated public transport management. After the Bus Rapid Transit, better known as TransJakarta, began operating in 2004, the culture of using public transportation services has slowly begun to develop in the community.

Di tahun 2013, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan dukungan dan keterlibatan penuh Pemerintah Pusat memulai mega proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) Jakarta Fase 1 dengan rute Lebak Bulus - Bundaran HI. Hal ini sejalan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 84 Tahun 2004 tentang Penetapan Pola Transportasi Makro di Provinsi DKI Jakarta Bab III Pasal 3 point b dan e, "Memasyarakatkan Sistem Angkutan Umum Massal dan Menambah Jaringan Primer, *Busway*, dan *Subway*". Selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2019, MRT Jakarta melakukan proses konstruksi hingga akhirnya resmi beroperasi pada 24 Maret 2019. Kini MRT sedang mengembangkan konstruksi Fase 2 untuk koridor utara.

In 2013, the Provincial Government of DKI Jakarta with full support from the Central Government began the first phase of the Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta project with the Lebak Bulus – Bundaran HI route. This is in line with DKI Jakarta Provincial Governor's Decree No. 84 of 2004 concerning Determination of Macro Transportation Patterns in DKI Jakarta Province Chapter III Article 3 points b and e, "Popularizing Mass Public Transport Systems and Developing Additional Primary Networks, Busway and Subway Networks". For 5 (five) years until 2019, MRT Jakarta carried out the construction process until the MRT began its operations on March 24, 2019. Currently the MRT is developing the Phase 2 construction for the northern corridor.

Bersama-sama dengan *Light Rapid Transit* (LRT) Jakarta, MRT Jakarta akan menjadi sebuah bagian dari solusi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menjawab persoalan kemacetan di Jakarta.

Together with the Jakarta Light Rapid Transit (LRT), MRT Jakarta will be part of the Provincial Government of DKI Jakarta's solution to solve congestion problems in Jakarta.

PERKEMBANGAN MRT HINGGA TAHUN 2019

THE PROGRESS OF MRT UP TO 2019



MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA MERUPAKAN MODA TRANSPORTASI KERETA DALAM KOTA JAKARTA DENGAN TARGET AWAL MENGHUBUNGKAN WILAYAH UTARA DAN SELATAN JAKARTA. KONSTRUKSI FASE 1 JALUR LEBAK BULUS – BUNDARAN HI TELAH DISELESAIKAN DAN FASE OPERASI DAN PEMELIHARAAN SERTA KOMERSIAL TELAH DIMULAI; SEDANGKAN FASE 2 JALUR BUNDARAN HI – ANCOL BARAT SEDANG DALAM TAHAPAN *ENGINEERING DESIGN* DAN MEMASUKI KONSTRUKSI SECARA BERTAHAP

Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta is a rail-based transportation mode within the city of Jakarta with the initial target of connecting the northern and southern parts of Jakarta. The construction of Phase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI route has been completed and the operational, maintenance, and commercial phases have commenced; while Phase 2 Bundaran HI - Ancol Barat route is currently in the engineering study stage and has begun construction in phases.

Gambar 5.3. Ratangga di Stasiun MRT Jakarta
Image 5.3. Ratangga at an MRT Jakarta station

PERKEMBANGAN MRT FASE 1 LEBAK BULUS-BUNDARAN HI

PROGRESS OF MRT PHASE 1 LEBAK BULUS - BUNDARAN HI

Pada 31 Desember 2019, pembangunan dan pengadaan MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI telah selesai dikerjakan. MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI memiliki panjang ±16 km yang membentang dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan, hingga berakhir di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Rute MRT Jakarta Fase 1 terdiri dari 13 stasiun perhentian, dengan rincian sebagai berikut:

- Konstruksi layang (*elevated*) membentang ± 10 km dari wilayah Lebak Bulus hingga Sisingamangaraja. Dari rute tersebut, terdapat 7 (tujuh) stasiun layang, yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M dan ASEAN. Sementara depo kereta dibangun di area

As of December 31, 2019, constructions and procurement of MRT Jakarta Phase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI have been completed. The MRT Jakarta Phase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI covers a distance of ± 16km, stretching from Lebak Bulus, South Jakarta, to Bundaran HI, Central Jakarta. The route of MRT Jakarta Phase 1 consists of 13 stations, with details as follows:

- *Construction of the elevated section stretches over ± 10 km; from Lebak Bulus to Sisingamangaraja. On these routes, there are 7 (seven) Elevated Stations, namely Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M and ASEAN. The train depot was built in the Lebak Bulus area,*

Lebak Bulus, berdekatan dengan Stasiun Lebak Bulus. Seluruh stasiun dan lintasan dibangun dengan struktur layang yang berada di atas permukaan tanah, sementara depo kereta dibangun di permukaan tanah.

- Konstruksi bawah tanah (*underground*) MRT Jakarta membentang ±6 km yang terdiri dari terowongan MRT bawah tanah dan 6 (enam) stasiun MRT bawah tanah, mulai dari Stasiun Senayan, Istora, Bundangan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, hingga perhentian terakhir di Bundaran HI.

Layanan kereta MRT Jakarta di tahun 2019 beroperasi mulai pukul 05:00-24:00 WIB dengan menggunakan perjalanan kereta *weekday* sebanyak 285 perjalanan per hari dan perjalanan kereta *weekend* sebanyak 219 perjalanan per hari. Sejak resmi beroperasi pada 24 Maret 2019 hingga 31 Desember 2019, MRT Jakarta Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI telah melayani 24.621.467 pengguna jasa, dengan rata-rata 89.645 pengguna jasa/hari.

Pengoperasian dan pemeliharaan MRT Fase 1 memberikan mandat kepada Perseroan untuk memulai tahapan baru, yaitu tahapan komersial. Terdapat 2 (dua) skema komersial yang mempengaruhi pendapatan Perseroan, yaitu pendapatan dari *Farebox* atau tiket, serta pendapatan *Non-Farebox* atau non-tiket yang didapatkan melalui bisnis iklan, *merging product*, dan ritel.

Pada pendapatan dari *Farebox*, setelah MRT Jakarta diresmikan pada tanggal 24 Maret 2019, pemberlakuan tarif pengguna jasa mulai diimplementasikan pada tanggal 1 April 2019 dengan pemberlakuan tarif diskon 50%. Pemberlakuan tarif normal, mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian *Mass Rapid Transit* dan Kereta Api Ringan/*Light Rapid Transit*. Target pendapat *Farebox* MRT Jakarta di tahun 2019 sebesar Rp169.000 juta sejalan dengan target pengguna jasa sebesar 17.875.000 pengguna jasa per tahun. Realisasi *Farebox* atas kinerja operasional MRT di tahun 2019 sebesar 107,16% dari target *Farebox* yang telah ditetapkan.

Pada awal tahun 2019, fokus utama Perseroan adalah pelayanan transportasi. Hal tersebut tercermin dari proyeksi minus laba Perseroan di tahun pertama beroperasi. Namun demikian, dengan transformasi kegiatan usaha non-tiket yang dilakukan secara signifikan membuahkan hasil pendapatan non-tiket berkontribusi sebesar 52% dibandingkan dengan pendapatan tiket. Berikut adalah bentuk usaha yang dilakukan dari pendapatan non-tiket:

- Melakukan pengusahaan penjualan media periklanan dengan bekerja sama dengan mitra strategis dengan menerapkan skema bisnis bagi hasil dan minimum pendapatan.
- Penjualan hak penamaan stasiun kepada mitra potensial.
- Bekerja sama dengan mitra strategis dalam membangun infrastruktur telekomunikasi untuk penyediaan sinyal dan wifi di area stasiun, dengan skema bisnis bagi hasil dan minimum pendapatan.
- Bekerja sama dengan mitra perbankan dalam memberikan pelayanan penerimaan kartu prabayar sebagai alat pembayaran tiket.
- Pengusahaan penyewaan ruang untuk retail dengan menerapkan sewa ruang dan bagi hasil pendapatan.

adjacent to the Lebak Bulus Station. All passenger stations and tracks are built with elevated structures above ground level, while train depots are built at ground level.

- *The underground construction of MRT Jakarta stretches over ± 6km consisting of underground MRT tunnels and 6 (six) underground MRT stations, starting from Senayan, Istora, Bundangan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, until the last stop at Bundaran HI.*

In 2019, the MRT Jakarta train service operated from 05:00 - 24:00 WIB with 285 trips every weekday and 219 trips per day on weekends. From its launch in March 24, 2019 to December 31, 2019, the MRT Jakarta Phase 1 Lebak Bulus - Bundaran HI had served 24,621,467 passengers, with an average of 89,645 passengers/day.

*The operations and maintenance of MRT Phase 1 gave mandate to the Corporation to start a new stage, the commercial stage. There are 2 (two) commercial schemes that affect the Corporation's revenue, which are the revenue from *Farebox* or tickets and the non-*Farebox* revenue which is obtained through advertising, product merging, and retail.*

*For *Farebox* revenue, after MRT Jakarta was launched on March 24, 2019, passenger fares began to be implemented on April 1, 2019 at a 50% discount rate. Normal fares started on May 13, 2019, in accordance with the provisions of Governor of DKI Jakarta Province No. 34 of 2019 concerning 'Mass Rapid Transit' and 'Light Rapid Transit' Railway Fares. MRT Jakarta's *Farebox* revenue target in 2019 was Rp169,000 million, in line with the target of 17.875 million passengers per year. The *Farebox* realization of MRT's operational performance in 2019 was 107.16% of the target set.*

*At the beginning of 2019, the main focus of the Corporation was on transportation services. It was reflected in the negative projection of the Corporate income in the first year of commercial operations. However, with the significant transformation of the non-*Farebox* business activities, the non-*Farebox* scheme managed to contribute to 52% of the total revenue in comparison to the *Farebox* scheme. The following are the implemented business activities under the non- *Farebox* scheme:*

- *Media advertising sales through partnership with strategic partner by applying revenue sharing and guaranteed minimum income schemes.*
- *Offering station-naming rights to potential partners.*
- *Collaborating with strategic partners to build telecommunication infrastructures to provide network and wi-fi services in stations, applying revenue sharing and guaranteed minimum income schemes.*
- *Partnership with banks in providing prepaid card services as a payment method.*
- *Renting out spaces for retail purposes by applying rental fees and revenue sharing schemes.*

PERKEMBANGAN MRT FASE 2 BUNDARAN HI-ANCOL BARAT

THE DEVELOPMENT OF MRT PHASE 2 BUNDARAN HI - ANCOL BARAT

Di samping pengoperasian perdana MRT Fase 1, pada 24 Maret 2019, pembangunan MRT Fase 2 telah resmi dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pembangunan MRT Fase 2 dibagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu Fase 2A (rute Bundaran HI - Kota) dan Fase 2B (rute Kota - Ancol Barat). Progres pekerjaan Fase 2A, Paket Pekerjaan CP 200 mencakup konstruksi dinding diafragma Gardu Induk Bawah Tanah MRT Jakarta di Kawasan Medan Merdeka telah dirampungkan, dan saat ini sedang dilaksanakan *tender* untuk MRT Jakarta Fase 2A (rute Bundaran HI - Kota) Paket Pekerjaan CP 201 – CP 203, dan penyusunan dokumen *tender* untuk Paket Pekerjaan CP 205 & CP 206 yaitu *Railway Systems, Trackwork, dan Rolling Stock* sedang disiapkan. Sementara, Fase 2B telah mendapatkan Persetujuan Prinsip Gubernur DKI Jakarta dan saat ini dalam tahap Studi Kelayakan.

Status masing-masing *Contract Package* per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

- CP 200: Konstruksi dinding diafragma Gardu Induk bawah tanah MRT Jakarta di Kawasan Medan Merdeka telah dirampungkan.
- CP 201: Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari JICA atas dokumen tender CP 201. Pengumuman tender telah dilaksanakan pada 24 Mei 2019. Ada 3 Peserta yang berpartisipasi dalam tender Paket CP 201, yaitu Shimizu-Adhi Karya JV, Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi JV, dan SMCC-Hutama Karya JO. Hasil dari Evaluasi Teknis telah disampaikan kepada JICA pada tanggal 18 November 2019. Pembukaan Dokumen Finansial telah dilakukan pada tanggal 10 Desember 2019. Hasil Evaluasi Finansial telah disampaikan pada 31 Desember 2019 dan saat ini menunggu persetujuan dari JICA.
- CP 202-203: Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari JICA atas dokumen tender CP 202-203. Pengumuman tender telah dilaksanakan pada 6 Agustus 2019. Tender telah melalui tahapan Klarifikasi (*Question & Answers*) serta penyampaian *Addendum*. Namun, tidak adanya pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen pada 4 November 2019 menyebabkan tender dinyatakan sebagai Tender Gagal, yang dilaporkan kepada JICA pada 20 November 2019. Pada 17 November 2019 telah diadakan *Market Sounding* dengan mengundang calon peserta tender. Berdasarkan *Market Sounding* tersebut, salah satu faktor di antaranya pelaksanaan tender CP 202-203 yang beririsan dengan CP 201 mengakibatkan sumber daya peserta tender CP 202-203 terbatas, sehingga tidak adanya pemasukan Dokumen Penawaran. Jadwal tender yang rapat antara CP 201 dengan CP 202-203 terjadi karena koordinasi dan persetujuan yang memerlukan waktu lama dari Otoritas terkait untuk pembangunan Stasiun Monas (CP 201) di Kawasan Medan Merdeka. Ini menyebabkan terlambatnya Pengumuman tender CP 201 dan beririsan dengan jadwal tender CP 202-203.
- CP 205: Saat ini Dokumen Tender CP 205 sedang dalam tahap reviu oleh JICA, Perseroan akan melaksanakan tender CP 205 setelah persetujuan JICA diperoleh.
- CP206: Saat ini Dokumen Tender CP 206 sedang dalam tahap reviu oleh JICA, Perseroan akan melaksanakan tender CP 206 setelah persetujuan JICA diperoleh.

In addition to the inauguration of MRT Phase 1, on March 24, 2019, the President of the Republic of Indonesia also officially initiated the construction of MRT Phase 2. The MRT Phase 2 construction is divided into 2 (two) phases, namely the Phase 2A (Bundaran HI - Kota route) and Phase 2B (Kota - Ancol Barat route). For Phase 2A, the Contract Package CP 200 that covers the construction of the diaphragm wall at MRT Jakarta's underground substation in Medan Merdeka area has been completed, and the tender process is currently being carried out for MRT Jakarta Phase 2A (Bundaran HI - Kota) Contract Packages CP 201 - CP 203, while the tender documents for Contract Packages CP 205 & CP 206 Railway Systems, Trackwork, and Rolling Stock are being prepared. Meanwhile, Phase 2B has been granted with Principle Approval by the Provincial Governor of DKI Jakarta and is currently in the Feasibility Study stage.

The status of each Contract Package for Phase 2A as of December 31, 2019 are as follows:

- *CP 200: Construction of the diaphragm wall for MRT Jakarta's underground substation in Medan Merdeka Area has been completed.*
- *CP 201: The Corporation has obtained approval from JICA on the CP 201 Tender Document. The tender announcement was published on May 24, 2019. There were 3 bidders participating in tender CP 201, namely Shimizu - Adhi Karya JV, Obayashi - Wijaya Karya - Jaya Konstruksi JV, and SMCC - Utama Karya JO. The result of the Technical Evaluation was submitted to JICA on November 18, 2019. The opening of Financial Documents was carried out on December 10, 2019. Financial Evaluation result was submitted on December 31, 2019 for approval by JICA.*
- *CP 202 - 203: The Corporation has obtained approval from JICA on the CP 202 - 203 tender documents. Tender Announcement was published on August 6, 2019. Tender has passed clarification stage (Questions & Answers) including distribution of Addendum. However, there was no submission of Bid Documents up to the deadline on November 4, 2019, which led to tender Failure as reported to JICA on November 20, 2019. On November 17, 2019, a Market Sounding session was carried out by inviting prospective tenders. Based on the result of Market Sounding, among other reasons, the simultaneous tender schedule for CP 202 - 203 with CP 201 created difficulties for CP 202 - 203 tender participants in accumulating sufficient resources, leading to a lack of Bid Document submissions. The limited period between CP 201 and CP 202 - 203 was due to the time needed for coordination and approval process from the relevant Authorities with regards to the construction of Monas Station (CP 201) in Medan Merdeka area. This caused delay in tender announcement for CP 201, making it concurrent with the schedule of CP 202 -203 tender process.*
- *CP 205: Tender Document CP 205 is currently under JICA's review. The Corporation will carry out Tender CP 205 after JICA's approval is obtained.*
- *CP 206: Tender Document CP 206 is currently under JICA's review. The Corporation will carry out Tender CP 206 after JICA's approval is obtained.*

TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT OPERASI

OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT

Sebagai pengelola dan penyedia jasa transportasi MRT Jakarta, Perseroan mengembangkan usahanya melalui bisnis tiket dan non-tiket. Berdasarkan perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Perseroan No. 4343/-1.811.32 (CON/008/MRT/IX/2019) tanggal 30 September 2019 tentang Pemberian Subsidi Moda Raya Terpadu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, untuk memberikan subsidi prasarana dan sarana sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan moda transportasi yang cepat, nyaman, dan tepat waktu.

Hingga akhir tahun 2019, Laporan Keuangan Perseroan belum menyajikan segmen usaha sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 5 (Revisi 2015) tentang Segmen usaha. Agar dapat menggambarkan segmen usaha dan perkembangan bisnis, Perseroan menggunakan struktur pendapatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Teraudit tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (EY Indonesia), yang terdiri dari pendapatan tiket atau *Farebox* yang di dalamnya juga termasuk subsidi prasarana dan sarana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pendapatan non-tiket atau *Non-Farebox*.

As the manager and provider of transportation services, MRT Jakarta expands its business through the Farebox and Non-Farebox businesses. Based on the agreement between the Provincial Government of DKI Jakarta and the Corporation No. 4343/-1.811.32 (CON/008/MRT/IX/2019) dated September 30, 2019, concerning the granting of Integrated Mada Raya Subsidies sourced from the Regional Budget of Revenue and Expenditures for Fiscal Year 2019, to provide infrastructure and facility subsidies as part of the commitment of the Provincial Government of DKI Jakarta in presenting a fast, comfortable, and timely mode of transportation.

Until the end of 2019, the Corporation's Financial Statements have yet to present business segments in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 5 (Revised 2015) concerning Business segments. In order to describe the business and business development segments, the Corporation uses a revenue structure as stated in the 2019 Audited Financial Statements, which have been audited by the Purwanto, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) Public Accounting Firm, consisting of ticket or Farebox revenue, which includes subsidies for infrastructure and facilities from the Provincial Government of DKI Jakarta, and non-ticket or non-Farebox revenue.

SEGMENT OPERASI MRT JAKARTA

BUSINESS SEGMENTS OF MRT JAKARTA



Tiket Farebox

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan operasional layanan kereta berupa tiket yang berasal dari *Multi Trip Ticket (MTT)*, *Single Trip Ticket (STT)*, dan Uang Elektronik, termasuk pendapatan kartu, biaya perjalanan, serta denda. Termasuk dalam pendapatan *Farebox* adalah subsidi prasarana dan sarana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Revenues earned from train service operational activities, in the form of tickets from Multi Trip Tickets (MTT), Single Trip Tickets (STT), and Electronic Money, including card revenues, travel costs, and fines. Included in the Farebox revenue are subsidies for infrastructures and facilities from the Provincial Government of DKI Jakarta.



Non-Tiket Non-Farebox

Pendapatan yang diperoleh dari periklanan (85%), non-periklanan (kemitraan dalam pelayanan kepada pengguna jasa MRT seperti penyediaan *prepaid card*, persinyalan telekomunikasi) (14%), dan ritel (1%).

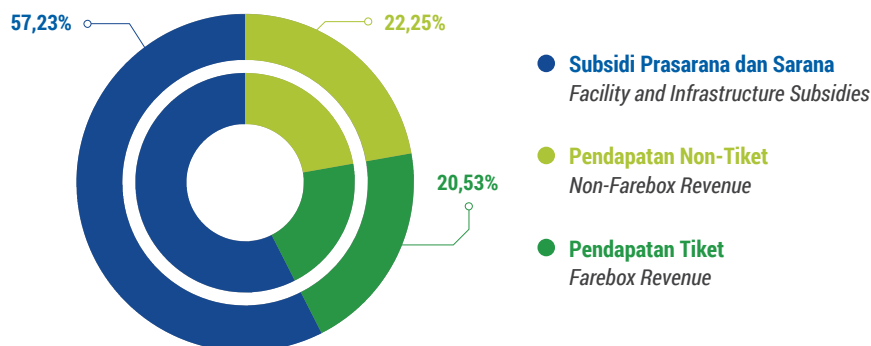
Revenues earned from advertising (85%), non-advertising (partnerships in providing services for MRT passengers such as prepaid cards, mobile network) (14%), and retail (1%).

Agar dapat memberikan gambaran tentang cakupan bisnis Perseroan berikut disampaikan kontribusi segmen operasi terhadap Pendapatan Usaha Perseroan.

In order to provide an overview of the Corporation's business scope, the following is the contribution of the operating segments to the Corporation's Operating Revenues.

KONTRIBUSI SEGMENT OPERASI TERHADAP PENDAPATAN USAHA*Contributions of Business Segments to Revenues*

| | 2019 | | 2018 | |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| | Jumlah Total (Rp-Juta Rp-Million) | Kontribusi Contribution (%) | Jumlah Total (Rp-Juta Rp-Million) | Kontribusi Contribution (%) |
| Pendapatan Tiket <i>Farebox Revenue</i> | 191.552 | 20,52 | - | - |
| Pendapatan Subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>Subsidy Revenue from Provincial Government of DKI Jakarta</i> | 534.070 | 57,23 | - | - |
| Pendapatan Non-Tiket <i>Non-Farebox Revenue</i> | 207.608 | 22,25 | - | - |
| Jumlah Pendapatan <i>Total Revenues</i> | 933.230 | 100,00 | - | - |

Tabel 5.1
Table 5.1**KOMPOSISI PENDAPATAN DARI SEGMENT OPERASI TERHADAP PENDAPATAN***Composition of Revenues Earned from Business Segments*Grafik 5.1
Graphic 5.1

Dari tabel dan bagan di atas, terlihat bahwa pendapatan tiket dari pengguna jasa berkontribusi sebesar 20,52% dari total pendapatan, sedangkan pendapatan dari non-tiket berkontribusi sebesar 22,25%. Subsidi masih berperan besar dalam operasi Perseroan, dengan kontribusi mencapai 57,23% terhadap total pendapatan.

Uraian tentang kinerja masing-masing segmen dapat dilihat di bawah ini:

TIKET

FAREBOX

Bisnis dari kegiatan tiket merupakan salah satu sumber pendapatan utama Perseroan dalam mengoperasikan prasarana dan sarana MRT. Pendapatan tiket merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket sesuai tarif angkutan pengguna jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass

From the table and chart above, it can be observed that revenue from passengers' tickets contributed to 20.52% of the Total Revenues, while revenue from non-Farebox businesses contributed to 22.25% of the Total Revenues. Subsidies still played a large role in the Corporation's operations, with contributions reaching 57.23% of the Total Revenues.

Description of each segment's performance can be viewed below:

The business from ticketing activities is one of the Corporation's main sources of income in operating MRT facilities and infrastructures. Ticket revenue is the revenue from ticket sales based on the passenger transportation rates as regulated in the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 34 of 2019 concerning Mass Rapid Transit Railroad

Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut, tarif terjauh angkutan perkeretaapian MRT koridor Lebak Bulus-Bundaran HI adalah Rp 14.000.

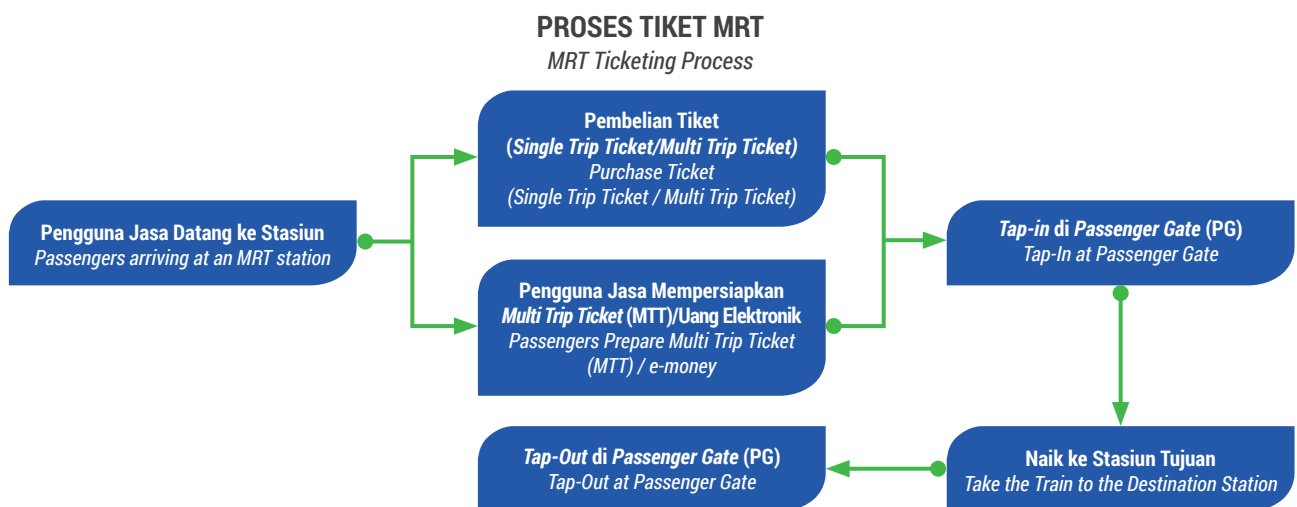
Transportation and Light Rail Transit. Based on The DKI Jakarta Provincial Governor Regulation, the highest tariff for MRT railroad services from Lebak Bulus to Bundaran HI is Rp14,000.

KINERJA OPERASI DAN BISNIS SEGMENT TIKET

OPERATIONAL AND BUSINESS PERFORMANCE OF THE FAREBOX SEGMENT

Skema proses tiket yang berlaku di MRT dapat dilihat di bawah ini:

The ticket processing scheme applicable in the MRT is explained below:



Figur 5.1
Figure 5.1

Proses bisnis tiket atau *Farebox* yang dilakukan Perseroan berfokus terhadap layanan kereta dan stasiun kepada pengguna jasa, terutama karena MRT Jakarta merupakan Perseroan publik transportasi, sehingga pelayanan terhadap pengguna jasa yang maksimal menjadi salah satu fokus utama dari Perseroan.

The ticketing business process, or Farebox, carried out by the Corporation focuses on train and station services for passengers, especially because MRT Jakarta is a public transportation Corporation, thus maximum services for passengers is one of the main focal points of the Corporation.

Mulai dari pengguna jasa datang ke stasiun MRT, lalu pengguna jasa dapat membeli *Single Trip Ticket* (STT) maupun *Multi Trip Ticket* (MTT) terlebih dahulu di loket, atau jika pengguna jasa sudah mempunyai uang elektronik dapat langsung melakukan *tap-in* di *Passenger Gate* (PG) yang sudah disediakan. Setelah itu pengguna jasa menaiki kereta menuju stasiun tujuan. Setelah sampai stasiun tujuan, maka pengguna jasa melakukan *tap-out* di PG kembali. Mulai dari pengguna jasa melakukan transaksi di loket sampai dengan pengguna jasa melakukan *tap-out* di stasiun tujuan, proses tersebutlah yang akan menjadi pendapatan *Farebox* MRT Jakarta.

Once passengers arrive at an MRT station, they will then buy a Single Trip Ticket (STT) or a Multi Trip Ticket (MTT) at the counter, or if the passengers already have electronic money, they can directly tap-in at the Passenger Gate (PG). After that, passengers aboard the train to their destination station. Once they arrive at the destination station, passengers will tap-out at the PG. The journey that begins when passengers make a transaction at the ticketing counter and ends when they tap out at the destination station is what will become the source of MRT Jakarta's Farebox revenue.

Untuk mempermudah proses bisnis tiket sekaligus memberikan layanan optimal bagi pengguna jasa, MRT Jakarta mengeluarkan produk berupa tiket sebagai alat pembayaran yang sah, selain itu uang elektronik yang diterbitkan oleh bank-bank yang bekerja sama dengan MRT Jakarta juga menjadi alat pembayaran yang sah yang dapat digunakan.

To simplify the ticketing business process, while also providing optimal services for passengers, MRT Jakarta issues tickets as valid payment instruments; electronic money issued by banks in cooperation with MRT Jakarta is also a valid payment instrument.

Berikut alat pembayaran yang diterima oleh MRT Jakarta:
1. *Single Trip Ticket* (STT).

The following are payment instruments accepted by MRT Jakarta:
1. *Single Trip Ticket* (STT).

2. Multi Trip Ticket (MTT), yang berisi saldo dengan nilai minimum sejumlah tarif terendah dari seluruh relasi yang tersedia.
3. Uang Elektronik yang diterbitkan oleh bank-bank yang bekerja sama dengan MRT Jakarta.

2. Multi Trip Ticket (MTT), which contains a balance with minimum value amounting to the lowest tariff of all available connections.
3. Electronic Money, issued by banks in collaboration with MRT Jakarta

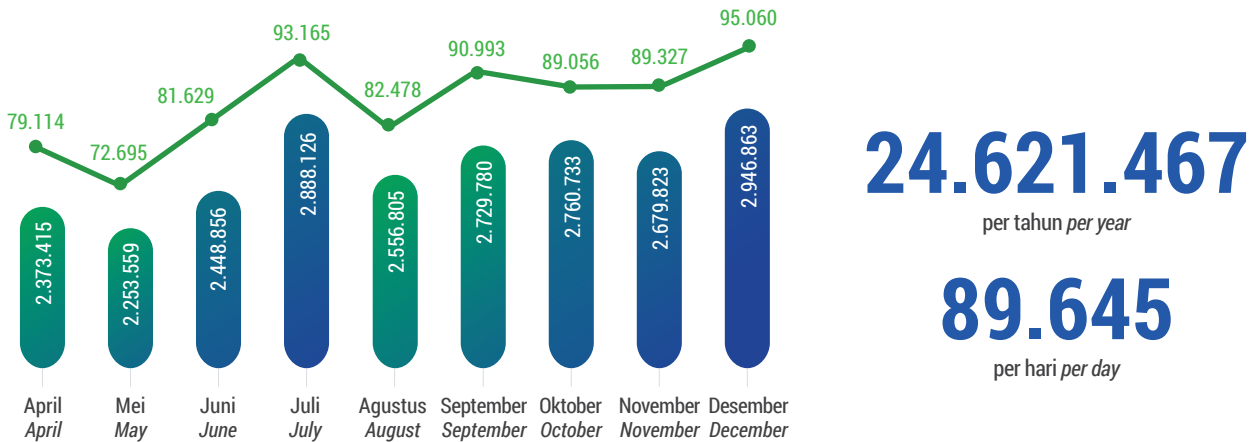
Tahun 2019 merupakan tahun pertama layanan operasional MRT Jakarta. Pada tanggal 24 Maret 2019, MRT Jakarta resmi beroperasi untuk masyarakat umum. Terdapat beberapa strategi dalam pengenalan MRT Jakarta. Selama satu minggu awal beroperasi, MRT Jakarta memberikan promosi gratis terhadap seluruh pengguna jasa. Setelah itu, mulai dari 1 April 2019 hingga 12 Mei 2019 MRT Jakarta memberikan promosi diskon 50% dari tarif normal kepada seluruh pengguna jasa.

The year 2019 was MRT Jakarta's first year of operations. On March 24, 2019, MRT Jakarta officially commenced operations for the general public. There were several strategies in introducing MRT Jakarta to the public. During the first week of operation, MRT Jakarta applied free-fares to all passengers. After that, starting from April 1, 2019 to May 12, 2019, MRT Jakarta offered a 50% discount off normal fares to all passengers.

Selama periode 2019, MRT Jakarta mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan pengguna jasa setiap bulannya. Di sepanjang tahun 2019 pengguna jasa MRT tercatat mencapai 24.621.467 pengguna jasa dengan rata-rata 89.645 pengguna jasa per hari.

Throughout 2019, MRT Jakarta experienced fluctuations in the number of passengers every month. In 2019, the number of passengers recorded reached 24,621,467 with an average of 89,645 passengers per day.

JUMLAH PENUMPANG MRT JAKARTA DAN RATA-RATA PENGGUNA JASA MRT PER HARI DI SETIAP BULAN TAHUN 2019
Total Number of MRT Jakarta Passengers and Average MRT Passengers per Day in Each Month of 2019



*Perhitungan jumlah pengguna jasa dimulai dari 1 April 2019 karena 24-31 Maret 2019 merupakan periode uji coba gratis MRT Jakarta.
*Calculation of the number of passengers starts from 1 April 2019, because 24 - 31 March 2019 is a free trial period of the Jakarta MRT.

Grafik 5.2
Graphic 5.2

SUBSIDI DARI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

SUBSIDIES FROM THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF DKI JAKARTA

Berdasarkan Perjanjian antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta (Persero) Nomor 4343/-1.811.32 (CON/008/MRT/IX/2019) tanggal 30 September 2019 tentang Pemberian Subsidi MRT yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor No. 53 Tahun 2017 tentang Penugasan kepada PT MRT Jakarta (Persero) untuk penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Mass Rapid Transit, Perseroan mendapatkan penugasan untuk melakukan penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT dengan pendanaan subsidi. Ketentuan, penugasan, dan mekanisme subsidi selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor No. 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu.

Based on the Agreement between the Provincial Government of DKI Jakarta and PT MRT Jakarta (Persero) No. 4343/-1.811.32 (CON/008/MRT/IX/2019) dated September 30, 2019, concerning the Granting of MRT Subsidies sourced from APBD Fiscal Year 2019, and the Provincial Governor of DKI Jakarta Regulation No. 53 of 2017 concerning assignment of PT MRT Jakarta (Persero) for the implementation of Infrastructures and Facilities for Mass Rapid Transit, the Corporation was assigned to implement MRT infrastructures and facilities with subsidy funding. Provisions, assignments and subsidy mechanisms are further regulated in the Provincial Governor of DKI Jakarta Regulation No. 107 of 2019 concerning Moda Raya Terpadu and Lintas Raya Terpadu subsidies.

Subsidi Sarana Perkeretaapian adalah alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian dalam rangka kewajiban pelayanan publik agar tarif terjangkau. Tarif yang dikenakan kepada masyarakat selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor No. 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Perkotaan dan Peraturan Direksi MRT Nomor No. 049 Tahun 2019 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan MRT Jakarta Tahun 2019. Perhitungan Subsidi Sarana secara garis besar didasari oleh pencapaian target *Origin Destination* (OD) stasiun tahun berjalan.

Railway Facilities Subsidy is a budget allocated by the Provincial Government of DKI Jakarta to administer railways facilities, as part of public service obligations to ensure affordable tariffs. The tariffs imposed to the public is further regulated in DKI Jakarta Governor Regulation No. 34 of 2019 concerning Passenger Transportation Tariffs with Urban Railways and MRT Directors Regulation No. 049 of 2019 concerning Tariffs for MRT Jakarta Transport Services Implementation in 2019. The calculation of Facilities Subsidy is largely based on the achievements of the station Origin Destination (OD) targets in the current year.

Subsidi Prasarana Perkeretaapian adalah alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar beban pembayaran operasional, perawatan dan biaya modal fasilitas operasi prasarana perkeretaapian yang dibayarkan secara *real cost* tanpa didasari oleh ketercapaian target OD stasiun tahun berjalan.

Railway Infrastructure Subsidy is a budget allocated by the DKI Jakarta Provincial Government to pay for the operational, maintenance and capital costs of railway infrastructure operating facilities, which are paid in real cost, not based on the achievements of OD station targets in the current year.

PROFITABILITAS SEGMENT TIKET

FAREBOX SEGMENT PROFITABILITY

Kinerja pendapatan segmen tiket dengan perbandingan terhadap target tahun 2019 dapat dilihat pada label di bawah ini.

The performance of the Farebox segment revenue in comparison to the 2019 targets can be observed in the table below.

KINERJA PENDAPATAN SEGMENT TIKET

Revenue Performance of the Farebox Segment

| Segmen Tiket Farebox Segment | Realisasi 2019 2019 Realization | Realisasi 2018 2018 Realization | Target 2019 2019 Target | Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2018 Increase (Decrease) Compared to 2018 (%) | Pencapaian Target 2019 Target Achievement in 2019 (%) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | | |
| | (1) | (2) | (3) | ((1-2)/2) | (1/3) |
| Pendapatan Tiket Farebox Revenue | 191.552 | - | 169.000 | - | 113,34 ↑ |
| Subsidi Prasarana dan Sarana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Infrastructure and Facilities Subsidy from Provincial Government of DKI Jakarta | 534.070 | - | 512.863 | - | 104,14 ↑ |
| Jumlah Pendapatan Segmen Tiket Total Revenue of Farebox Segment | 725.622 | - | 681.863 | - | 106,42 ↑ |

Tabel 5.2
Table 5.2

Dari tabel di atas dapat diketahui total pendapatan *Farebox* MRT Jakarta tahun 2019 sebesar Rp191.552 juta. Pendapatan tersebut berasal dari 24.621.467 pengguna jasa selama periode 1 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rata-rata pengguna jasa 89.645 per hari. Realisasi tersebut berhasil memenuhi target sebesar 132% dari target awal 65.000 pengguna jasa per hari. Realisasi pendapatan tiket tersebut sudah berhasil melebihi target pendapatan sebesar 113,34% dari target Rp169.000 juta.

From the table above, it can be observed that the total Farebox revenue of MRT Jakarta in 2019 is Rp191,552 million. The revenue is gathered from 24,621,467 paying passengers during the period of April, 2019 to December 31, 2019, with an average of 89,645 passengers per day. The realization has surpassed the target, specifically 132% of the initial target of 65,000 passengers per day. The realization of the Farebox revenue has successfully exceeded the target revenue by 113.34% from the target of Rp169,000 million.

Pada tahun 2019, sesuai Naskah Perjanjian Subsidi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta pagu anggaran subsidi ditetapkan sebesar Rp624.480 juta.

Melalui hasil verifikasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, total subsidi yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk diberikan kepada Perseroan adalah sebesar Rp534.070 juta dengan pencapaian target subsidi tahun anggaran 2019 mencapai 104,14% dari target sebesar Rp512.863 juta, sesuai proyeksi laba (rugi) yang disahkan pada bulan Maret 2019.

RENCANA PENGEMBANGAN EXPANSION PLAN

Pencapaian yang baik dari MRT Jakarta selama periode 2019 yang baik tidak serta merta menjadikan Perseroan merasa puas dan cukup terhadap seluruh layanan yang sudah diberikan kepada masyarakat yang menggunakan moda transportasi massal MRT. Perbaikan demi perbaikan terus diciptakan oleh MRT Jakarta demi terwujudnya pelayanan yang lebih maksimal dan prima lagi terhadap pengguna jasa.

Terdapat beberapa pengembangan dan perbaikan yang akan dilakukan oleh MRT Jakarta selama periode 2020 dan selanjutnya, di antaranya:

1. Proyek Pengembangan MRT Jakarta Fase 2

Dikembangkannya proyek MRT Fase 2 akan menyebabkan jangkauan masyarakat terhadap akses ke MRT Jakarta akan lebih mudah. Kemudahan akses untuk mencapai stasiun MRT Jakarta akan menyebabkan kenaikan jumlah pengguna jasa yang akan menggunakan moda transportasi MRT. Perpanjangan jalur MRT tersebut juga dapat mengurangi kemacetan, mempercepat perpindahan orang, mengurangi polusi, dan akan berujung pada peningkatan efisiensi ekonomi. Selain itu juga akan menyebabkan jumlah pendapatan *Farebox* MRT Jakarta akan lebih tinggi.

2. Integrasi Stasiun ASEAN dengan Halte *Busway* CSW

Integrasi merupakan hal yang penting bagi sarana transportasi umum di DKI Jakarta. Akses yang mudah dalam berpindah moda transportasi merupakan impian bagi seluruh warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Dengan adanya integrasi antarmoda transportasi, akan memudahkan dan memangkas jarak sekaligus waktu bagi pengguna jasa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan adanya integrasi antara Stasiun MRT ASEAN dengan Halte *Busway* CSW tentunya akan membuat para pengguna jasa, baik pengguna jasa MRT atau TransJakarta lebih mudah untuk berpindah moda transportasi, mengingat kedua lokasi tersebut merupakan lokasi yang strategis untuk menuju pusat perekonomian DKI Jakarta.

3. QR Code Ticket

Semakin berkembangnya era digitalisasi dalam metode pembayaran membuat MRT Jakarta harus mengikuti tren metode pembayaran digital yang sedang berlangsung. Salah satu metode pembayaran yang sudah berlaku di masyarakat adalah dengan menggunakan teknologi *QR Code*.

Dengan menggunakan *QR Code Ticket* masyarakat dapat membeli tiket perjalanan MRT Jakarta langsung di *mobile phone*, sehingga

In 2019, in accordance with the subsidy agreement between the Provincial Government of DKI Jakarta and PT MRT Jakarta (Perseroan), the budget ceiling was set at Rp624,480 million.

Based on the verification result from the Transportation Department of the Provincial Government of DKI Jakarta, the total subsidy approved by the DKI Jakarta Provincial Government to be granted to the Corporation was Rp534,070 million, with subsidy target attainment in the fiscal year of 2019 reaching 104.14% from the Rp512,863 million target, as predicted by the profit and loss projection legalized in March 2019.

The achievements of MRT Jakarta throughout the 2019 period did not necessarily leave the Corporation satisfied and complacent with all the existing services provided to MRT passengers. MRT Jakarta continuously creates improvements to provide even better services to passengers.

There are a number of developments and improvements that will be carried out by MRT Jakarta throughout 2020 and beyond, including the following:

1. Phase 2 MRT Jakarta Development Project

*The development of Phase 2 MRT project will allow for easier community access to MRT Jakarta. Ease of access to reach MRT Jakarta stations will increase the number of passengers. The extension of MRT Jakarta corridor will also decrease traffic congestions, accelerate people's mobility, reduce pollutions, and lead to increasing economic efficiency. In addition, these developments will also lead to an increase in the *Farebox* revenue.*

2. Integration of ASEAN Station with CSW Busway Stop

Integration is an important matter for public transportation facilities in DKI Jakarta. Easy access in switching modes of transportation is the dream of all citizens of DKI Jakarta and its surrounding areas. Integration between modes of transportation will ease transport as well as reducing distance and time to reach a destination. The integration of the ASEAN MRT Station and CSW Busway Stop will make it easier for MRT or TransJakarta passengers to switch modes of transportation, considering that these locations are strategic points to reach the economic center of DKI Jakarta.

3. QR Code Ticket

The growing digitalization of payment methods has motivated MRT Jakarta to follow the trend of adopting digital payment methods. One of the payment methods that are already in use is the QR Code technology.

By using QR Code Ticket, passengers can buy MRT tickets directly via mobile phone, thus eliminating the need to queue at the counter. With

tidak perlu lagi untuk mengantre di depan loket untuk membeli tiket. Dengan kemudahan tersebut diharapkan semakin banyak masyarakat yang berpindah moda transportasi dari pribadi ke MRT Jakarta.

such convenience, it is expected that more people will switch from private transportation modes to MRT Jakarta.

NON-TIKET NON-FAREBOX

Di samping pendapatan dari segmen tiket, Perseroan mengupayakan kegiatan usaha yang dapat memberikan potensi pendapatan di luar pendapatan tiket.

In addition to revenue from the Farebox segment, the Corporation is also pursuing business activities that can provide potential revenues outside of ticket revenue.

KINERJA OPERASI DAN BISNIS NON-TIKET OPERATIONAL AND BUSINESS PERFORMANCE OF THE NON-FAREBOX SEGMENT

Kegiatan usaha non-tiket diusahakan dari 3 (tiga) sumber utama, yaitu periklanan, *merging product*, dan ritel. Dalam pelaksanaannya Perseroan bekerja sama dengan pihak ketiga dengan konsep bagi hasil yang akan mengoptimalkan hasil.

Non-farebox business activities are executed through 3 (three) main sources, namely advertising, product merging and retailing. In its implementation, the Corporation collaborates with third parties by applying a revenue sharing scheme that will optimize results.

1. Periklanan

Ada dua jenis periklanan yang ada di MRT Jakarta, yaitu penyediaan ruang iklan dan hak penamaan stasiun. Untuk penjualan ruang iklan, MRT Jakarta menggandeng mitra strategis dalam pengelolaan dan penjualan. Sedangkan penjualan hak penamaan stasiun langsung diusahakan sendiri oleh MRT Jakarta.

1. Advertising

There are 2 (two) types of advertising in MRT Jakarta, consisting of advertising space and station naming rights. For advertising space sales, the Corporation cooperates with strategic partners in management and sales and rolling stock. Whereas sales for Station Naming Rights are directly managed by the Corporation.

a. Penyediaan Ruang Iklan

Ruang iklan di dalam stasiun dan *rolling stock* MRT Jakarta bermitra dengan PT Avabanindo Perkasa (Otego) melalui *beauty contest*. Otego memiliki hak untuk mengoperasikan dan mengelola seluruh inventori media periklanan. Dalam kerja sama tersebut, Perseroan menerapkan skema bagi hasil dengan minimal pendapatan setiap tahun. Kerja sama diterapkan selama 20 tahun dengan harapan pengembangan media beriklan yang dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas media iklan di lingkungan MRT.

a. Advertising Space

Advertising spaces inside MRT Jakarta stations and rolling stock are managed in partnership with PT Avabanindo Perkasa or Otego, which was chosen as a partner through a beauty contest. Otego has the rights to operate and manage all advertising media inventories. For this collaboration, the Corporation implemented a revenue sharing scheme with a minimum income guarantee per year. The collaboration is set to be implemented for 20 years, with the expectation that the developments of advertising spaces will be carried out sustainably to improve the advertising media quality in the MRT environment.



Gambar 5.4. Periklanan di stasiun MRT Jakarta
Image 5.4. Advertising in MRT Jakarta station

b. Hak Penamaan Stasiun

Penjualan hak penamaan stasiun pada tahun 2019 berbeda dibandingkan 2018, dimana penjualan tidak lagi dibatasi untuk mitra yang memiliki kantor berjarak 700m dari stasiun saja, tetapi terbuka untuk semua mitra yang tertarik dengan proposal penawaran. Pada tahun 2019 dengan cara penjualan ini, MRT Jakarta berhasil mendapatkan mitra untuk dua stasiun; Stasiun Lebak Bulus dengan Grab dan Stasiun Blok M dengan BCA. Sehingga pada akhir tahun 2019, MRT Jakarta memiliki 5 stasiun dengan hak penamaan, Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, Istora Mandiri, Setiabudi Astra dan Dukuh Atas BNI.

2. Non-Periklanan

Unit usaha non-periklanan adalah berupa kerja sama dengan mitra untuk memberikan pelayanan terhadap pengguna jasa. Dalam hal ini ada mitra untuk pelayanan telekomunikasi dengan PT Tower Bersama dan mitra perbankan dalam memberikan pelayanan penerimaan uang elektronik sebagai alat pembayaran tiket masuk ke dalam stasiun.

3. Ritel

Bisnis ritel terdiri dari tenan reguler dan tenan UMKM. Untuk kedua jenis tenan, Perseroan melakukan penerimaan kerja sama melalui seleksi pada periode tertentu. Segala informasi terkait seleksi dan prosesnya diumumkan melalui media sosial.

a. Tenan reguler

Tenan reguler dipilih melalui proses seleksi pada periode yang telah disepakati. Hal ini dilakukan dalam rangka mendapatkan tenan yang bisa memenuhi standar MRT Jakarta untuk melayani pengguna jasa selama berada di stasiun. Skema bisnis yang digunakan adalah penetapan sewa tetap dan pembayaran biaya operasional (listrik dan air), serta penetapan bagi hasil (*revenue sharing*) yang dievaluasi setiap bulan.

Saat ini tenan reguler di stasiun-stasiun MRT Jakarta terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu Makanan & Minuman, Swalayan Mini, dan Fesyen dan Aksesoris, sebagai berikut:

b. Stations Naming Rights

Station Naming Rights sales in 2019 were different to that of 2018, as sales were no longer restricted to partners with offices within 700m distance from the station, but were open to all partners interested in the bid proposal. With this rule in place, in 2019 MRT Jakarta succeeded in acquiring partners for two stations; Grab for the Lebak Bulus Station and BCA for the Blok M Station. Thus, by the end of 2019, MRT Jakarta has 5 (five) stations with naming rights: Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, Istora Mandiri, Setiabudi Astra and Dukuh Atas BNI.

2. Non-Advertising

Non-advertising business comes in the form of partnerships with other companies to provide services to passengers. In this case, there is a telecommunication service partner in PT Tower Bersama and banking partners to provide electronic money service as a valid payment instrument for MRT Jakarta.

3. Retail

The retail business consists of regular and MSMEs tenants. For both types of tenants, the Corporation accepts collaboration applications through a selection process during certain periods. All information regarding the selection and its process is announced through social media.

a. Regular tenants

Regular tenants are chosen through a selection process during certain periods. This is done in order to acquire tenants who can meet the standards set by MRT Jakarta in serving passengers while they are at MRT stations. The business scheme used is the fixed rent plus operational costs (electricity and water), as well as a revenue sharing policy that is evaluated every month.

Currently, regular tenants in MRT Jakarta stations consist of 3 (three) categories, namely Food & Beverages, Convenience Store, and Fashion & Accessories; they are as follows:

| No | Stasiun Station | Nama Ritel Name of Retailer | Kategori Category |
|----|-----------------|---------------------------------------|---|
| 1. | Lebak Bulus | Kafe Betawi Family Mart Shihlin | Makanan & Minuman Swalayan Mini Makanan & Minuman |
| 2. | Fatmawati | Lawson KOI | Swalayan Mini Makanan & Minuman |
| 3. | Cipete Raya | Starbucks MOR | Makanan & Minuman Swalayan Mini |
| 4. | Blok M | Alfa Express Shihlin Bakmi GM | Swalayan Mini Makanan & Minuman Makanan & Minuman |
| 5. | Senayan | A&W Lawson | Makanan & Minuman Swalayan Mini |

| No | Stasiun Station | Nama Ritel Name of Retailer | Kategori Category |
|-----|--------------------|---|--|
| 6. | Istora | Indomaret Auntie Anne's | Swalayan Mini Makanan & Minuman |
| 7. | Bendungan Hilir | Family Mart A&W | Swalayan Mini Makanan & Minuman |
| 8. | Setiabudi | MOR Bakmi GM | Swalayan Mini Makanan & Minuman |
| 9. | Dukuh Atas | Indomaret Kafe Betawi Daiso Century KOI Auntie Anne's Kaizen Alfa Express Starbucks | Swalayan Mini Makanan & Minuman Fesyen & Aksesoris Fesyen & Aksesoris Makanan & Minuman Makanan & Minuman Fesyen & Aksesoris Swalayan Mini Makanan & Minuman |
| 10. | Bundaran HI | Alfa Express Starbucks | Swalayan Mini Makanan & Minuman |
| 11. | Haji Nawi | KFC Mister Donut Chatime Indomaret | Makanan & Minuman Makanan & Minuman Makanan & Minuman Swalayan Mini |
| 12. | Blok A | Common Grounds Alfa Express | Makanan & Minuman Swalayan Mini |
| 13. | ASEAN | Transstation | Swalayan Mini |

Tabel 5.3. Tenan di stasiun-stasiun MRT Jakarta
Table 5.3. Tenant in MRT Jakarta Stations

b. UMKM

Dalam upaya memberikan dukungan secara optimal kepada UMKM, MRT Jakarta menempatkan UMKM di tiga stasiun MRT Jakarta yang strategis dengan angka laju penumpang yang tinggi, yaitu Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati, dan Stasiun Dukuh Atas. MRT Jakarta dan Bekraf bekerja sama melakukan proses kurasi untuk memilih tenan UMKM dari 3 (tiga) kategori, yaitu kuliner, fesyen, dan kriya untuk menjadi tenan di dalam stasiun MRT Jakarta. Pendaftaran seleksi ritel UMKM telah dilakukan untuk memilih 14 UMKM yang terdiri atas 7 (tujuh) UMKM Kuliner, 4 (empat) UMKM Fesyen, dan 3 (tiga) UMKM kriya.

b. MSMEs

To optimally support MSMEs, MRT Jakarta places MSMEs in three strategic stations with high traffic activities, namely Lebak Bu/us Station, Fatmawati Station, and Dukuh Atas Station. MRT Jakarta and Bekraf work together to curate and select MSMEs tenants from 3 (three) categories namely culinary, fashion, and crafts, to become tenants inside the MRT station. Registration for selection has been carried out to choose 14 MSMEs consisting of 7 (seven) Culinary MSMEs, 4 (four) Fashion MSMEs, and 3 (three) craft.

| No | Kategori Category | Brand Brand | Stasiun Station |
|----|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Kuliner Culinary | Lox Smoked Salmon | Lebak Bulus |
| 2. | Kuliner Culinary | Lemper Purnama | Fatmawati |

| No | Kategori Category | Brand Brand | Stasiun Station |
|-----|----------------------|--------------------------------|--------------------|
| 3. | Kuliner Culinary | Kaya Rempah Indonesia | Fatmawati |
| 4. | Kuliner Culinary | Gorjuice by Sunseed | Lebak Bulus |
| 5. | Kuliner Culinary | Delicacies by Melati Bakehouse | Lebak Bulus |
| 6. | Kuliner Culinary | Broodmet | Lebak Bulus |
| 7. | Kuliner Culinary | Kuliner | Lebak Bulus |
| 8. | Fesyen Fashion | RA | Lebak Bulus |
| 9. | Fesyen Fashion | KOMMA | Dukuh Atas |
| 10. | Fesyen Fashion | APIKMEN | Fatmawati |
| 11. | Fesyen Fashion | HWAN | Fatmawati |
| 12. | Fesyen Fashion | Batik Shoi | Dukuh Atas |
| 13. | Kriya Craft | DEKRANASDA | Lebak Bulus |
| 14. | Kriya Craft | Wande Seni | Lebak Bulus |
| 15. | Kriya Craft | Wande Jajan | Lebak Bulus |

Tabel 5.4. UMKM di stasiun - stasiun MRT Jakarta
Table 5.4. MSMEs in MRT Jakarta stations

Profitabilitas bisnis non tiket

Non-farebox business profitability

Kinerja pendapatan segmen non-tiket dengan perbandingan terhadap target tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The performance of the non-Farebox segment revenue in comparison to the 2019 target can be seen in the table below.

| Segmen Non tiket Non-farebox Segment | Realisasi 2019 Realization 2019 | Realisasi 2018 Realization 2018 | Target 2019 | Kenaikan (Penurunan) Terhadap 2018 Increase (Decrease) against 2018 | Pencapaian Target 2019 Achievement of Target 2019 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|--|
| | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | (%) | (%) |
| | (1) | (2) | (3) | (1-2)/2 | (1/3) |
| Pendapatan Non-Tiket Non-farebox Revenues | 207.608 | - | 94.275 | - | 220,22 |

Tabel 5.5. Segmen Non tiket
Table 5.5. Non-farebox Segmen

Pendapatan dari non-tiket mampu melampaui target yang ditetapkan, dengan realisasi Rp207.608 juta terhadap target sebesar Rp94.275 juta. Sejumlah upaya yang telah dilakukan Perseroan untuk meningkatkan bisnis dari non-tiket telah mendorong pendapatan dari segmen ini. Selain itu, persiapan pengoperasian MRT yang baik dan animo besar dari berbagai kalangan memberikan dampak positif terhadap citra MRT.

Revenue from the non-farebox business segment was able to exceed the set target, with a realization of Rp207,608 million compared to the target of Rp94,275 million. Several efforts to increase the non-Farebox business have augmented revenues from this segment. In addition, good MRT operational preparation as well as great interests from various members of the community have given positive impact on MRT's image.

Rencana Pengembangan Expansion Plan



Gambar 5.1
Image 5.1

Pada tahun 2020, MRT Jakarta akan mengoptimalkan media periklanan dibandingkan yang sudah dilakukan pada Fase 1, di antaranya adalah dengan mengoptimalkan periklanan di area stasiun, pilar stasiun layang, CTVT, dan pintu masuk. Di samping itu akan dimulai juga eksplorasi untuk optimalisasi media periklanan untuk Fase 2.

In 2020, MRT Jakarta will optimize the advertising media as compared to what was executed in Phase 1; among others is optimizing advertising in the station area, elevated stations, CTVT, and entrance gates. In addition, exploration to optimize advertising media for Phase 2 will also begin.

ASPEK PENINGKATAN JUMLAH PENGGUNA JASA

RIDERSHIP GROWTH ASPECTS



Gambar 5.2.
Image 5.2.

STRATEGI PENINGKATAN PENGGUNA JASA

RIDERSHIP GROWTH STRATEGY

Dalam rangka mendukung peningkatan jumlah pengguna jasa, serta mendukung pencapaian tingkat kepuasan pengguna jasa untuk aspek program, maka MRT Jakarta melakukan berbagai upaya pembuatan program yang memberikan pengalaman berbeda dalam bertransportasi dengan MRT Jakarta. Program yang disiapkan dengan mengacu pada survei profil pengguna jasa, tren jumlah pengguna jasa baik harian, mingguan, maupun bulanan ini diharapkan mampu menjawab dan meningkatkan loyalitas pengguna jasa. Program ini sekaligus menjadi diferensiasi MRT Jakarta dengan operator transportasi lainnya. Terdapat tiga kategori program, yaitu Program Akuisisi, Program Retensi, dan Program Integrasi. Selama tahun 2019 realisasi rata-rata jumlah pengguna jasa per hari MRT Jakarta yaitu adalah 89.645 dengan target jumlah pengguna jasa sebanyak 65.000/hari.

Program Akuisisi

Acquisition Program

Bertujuan untuk menarik pengguna jasa non-regular atau pengguna jasa baru, serta calon pengguna jasa potensial, di waktu yang tidak padat (*non-peak hours*). Bekerja sama dengan beragam pemangku kepentingan lintas industri, umumnya program ini diikuti oleh komunitas tertentu.

Program Retensi

Retention Program

Bertujuan untuk mempertahankan pengguna jasa setia MRT Jakarta dengan memberikan keuntungan bagi penggunaan kartu dari MRT Jakarta seperti Kartu Jelajah Berganda (*Multi Trip Ticket / MTT*) serta

In order to increase ridership as well as reaching customer satisfaction in terms of programs, MRT Jakarta has created a variety of programs that provide different experiences in commuting with MRT Jakarta. The programs, which were created in reference to the Customer Profile Survey, as well as the daily, weekly, and even monthly ridership trends, are expected to aid in increasing customer loyalty. These programs have also become a differentiating point for MRT Jakarta in comparison with other transportation modes. The programs are divided into three categories, which are the Acquisition Program, the Retention Program and the Integration Program. The average daily passengers in 2019 were 89,645 which exceeded the target of 65,000 passengers per day.

The program aims to reach non-regular passengers, new passengers, or potential passengers in non-peak hours. Coordinating with various stakeholders from across industries, this program is generally adopted by certain communities.

The program aims to retain existing and loyal passengers of MRT Jakarta by providing benefits through MRT Jakarta card usage, such as the Multi Trip Ticket (MTT) and Single Trip Ticket (STT). The program is divided into three

Kartu Jelajah Tunggal (*Single Trip Ticket /STT*). Program Retensi dibagi berdasarkan 3 (tiga) kategori, yaitu:

- **Kategori Kuliner**
Bekerja sama dengan mitra kedai kopi dan restoran di sepanjang koridor MRT Jakarta, MRT memberikan diskon pembelian atau gratis makanan atau minuman tertentu, antara lain dengan mitra Puyo, Eatlah, Hoka-Hoka Bento, Lawless Burger, Liberica, dan lain-lain.
- **Kategori Kesehatan**
Bekerja sama dengan instansi kesehatan seperti Prodia Lab, RS Siloam dan RS Mayapada, dengan manfaat yang diberikan berupa diskon pemeriksaan maupun layanan kesehatan gratis bagi pengguna jasa yang memiliki kartu MRT Jakarta.
- **Kategori Edukasi & Permainan**
Bekerja sama dengan pengelola arena bermain dan belajar bagi anak seperti Kidzania Jakarta dan Timezone yang keuntungannya berupa diskon tiket masuk maupun gratis bermain untuk beberapa jenis permainan.

Program Intergrasi *Integration Program*

Bertujuan agar para pengguna jasa potensial dapat menikmati pengalaman berintegrasi moda transportasi yang difasilitasi oleh MRT Jakarta bekerja sama antaroperator moda transportasi baik program kegiatan edukasi transportasi maupun dengan para pemangku kepentingan di sepanjang jalur MRT, di antaranya adalah:

- Kerja sama kolaborasi kegiatan seperti Railink Jazz Festival 2019, Irress Urban Bazaar, Irresistible Bazaar;
- Wisata Kreatif dan Kuliner M Bloc Space yang merupakan kerja sama dengan instansi BUMN (PERURI) berupa pemberian diskon kepada pengguna MRT Jakarta dan penyediaan peta info lokasi dari stasiun MRT terdekat menuju lokasi M Bloc Space;
- Wisata Edukasi Transportasi yang memberikan edukasi terkait transportasi publik kepada anak-anak sekolah maupun komunitas yang juga bekerja sama dengan PT Transportasi Jakarta. Berbagai mitra yang telah sebagai tujuan dari lokasi edukasi adalah:
 - » Perpustakaan Nasional
 - » Museum Gajah
 - » Kompas Gramedia
 - » @America
 - » Sekretariat ASEAN

Informasi Tentang Pangsa Pasar *Information On Market Share*

Perseroan merupakan operator dan pengelola moda transportasi MRT Jakarta yang tidak memiliki pelaku usaha sejenis di Jakarta. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki informasi terkait pangsa pasar.

categories, which are:

- **Food & Beverages category**
By collaborating with coffee shops and restaurants along the MRT Jakarta corridor, MRT offers discounts or free items at certain partners' stalls, such as Puyo, Eatlah, Hoka-Hoka Bento, Lawless Burger, Liberica and many more.
- **Health category**
By collaborating with healthcare providers such as Prodia Lab, Siloam Hospital and Mayapada Hospital, MRT provides benefits in the forms of special discounts and free health assessments for MRT Jakarta ticket card holders.
- **Education & Games Category**
By collaborating with playground and learning providers for children such as Kidzania and Timezone, MRT gives benefits to card holders through special discounts or free rides.

The program's objective is for potential customers to enjoy the experience of integrated transportation modes facilitated by MRT Jakarta through collaborations with other transportation modes, in terms of transportation education programs and with Stakeholders along the MRT corridor. The program includes:

- *Collaboration in events such as 2019 Railink Jazz Festival, Irress Urban-Bazaar, Irresistible Bazaar;*
- *Creative & Culinary Tourism at M Bloc Space, a collaboration with government agency Peruri in providing discounts to MRT users and providing location maps from the nearest MRT station to M Bloc Space;*
- *Educational Transportation Trip, which provides education on public transportation to school children and communities in collaboration with PT Transportasi Jakarta. Among the partners who have collaborated with MRT Jakarta as educational trip destinations are:*
 - » *The National Library*
 - » *The National Museum of Indonesia*
 - » *Kompas Gramedia*
 - » *@America*
 - » *The ASEAN Secretariat*

The Corporation is an operator of an MRT transportation mode that has no direct competitor in Jakarta. As such, the Corporation does not have information on market share.

TINJAUAN KEUANGAN DAN INFORMASI MATERIAL LAINNYA

FINANCIAL REVIEW AND INFORMATION ON OTHER MATERIALS

STANDAR PENYAJIAN INFORMASI DAN KESESUAIAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

INFORMATION PRESENTATION STANDARDS AND ADHERENCE TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, Surja (EY Indonesia). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

The analysis and discussion of financial performance in this annual report refers to the Financial Statements for the years ended 31 December 2019 and 31 December 2018 which have been audited by Public Accountants Firm Purwantono, Sungkoro, & Surja (EY Indonesia). Percentage and disclosure of the Coporate's financial statements, are prepared in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK") in Indonesia, which include Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("SAK"), issued by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Chartered Accountants.

KINERJA KEUANGAN

FINANCIAL PERFORMANCE

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

POSISI KEUANGAN MEMBERIKAN GAMBARAN SEKILAS TENTANG KEKUATAN PERMODALAN PERSEROAN. DI TAHUN 2019, JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS PERSEROAN SEBESAR RP17,35 TRILIUN, DENGAN KOMPOSISI TERDIRI DARI LIABILITAS SEBESAR 7,82% DAN EKUITAS SEBESAR 92,18%.

Financial Position provides a glimpse of the Corporation's capital strength. In 2019, the Total Liabilities and Equity of the Corporation was Rp17.35 trillion, with a composition of 7.82% Liabilities and 92.18% Equity.

| Posisi Keuangan Financial Position | 2019 (Rp-Juta Rp-Million) | 2018 (Rp-Juta Rp-Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Rp-Million) | Presentase Percentage (%) |
| Aset Assets | | | | |
| Aset Lancar Current Assets | 1.185.263 | 616.805 | 568.457 | 92,16 |
| Aset Tidak Lancar Non-Current Assets | 16.168.144 | 12.797.094 | 3.371.050 | 26,34 |
| Total Aset Total Assets | 17.353.407 | 13.413.899 | 3.939.507 | 29,37 |

Tabel 5.6. Posisi Keuangan (aset)
table 5.6. Financial Position (assets)

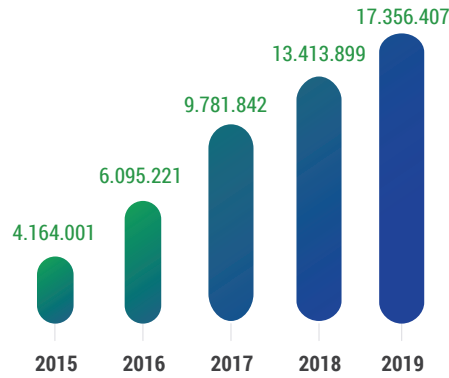
| Posisi Keuangan <i>Financial Position</i> | 2019 | 2018 | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | | |
|--|----------------------|----------------------|--|---------------------------------|----------|
| | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | Nominal Total (Rp-Juta Rp-Million) | Presentase Percentage (%) | |
| Liabilitas dan Ekuitas <i>Liability & Equity</i> | | | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i> | 699.277 | 382.883 | 316.395 | 82,63 | ↑ |
| Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i> | 657.367 | 748.155 | (90.788) | (12,13) | ↓ |
| Total Liabilitas <i>Total Liabilities</i> | 1.356.644 | 1.131.037 | 225.606 | 19,95 | ↑ |
| Ekuitas Neto <i>Net Equity</i> | 15.996.763 | 12.282.862 | 3.713.901 | 30,24 | ↑ |
| Total Liabilitas dan Ekuitas <i>Total Liability & Equity</i> | 17.353.407 | 13.413.899 | 3.939.507 | 29,37 | ↑ |

Tabel 5.7. Posisi Keuangan (Liabilitas dan Ekuitas)
table 5.7. Financial Position (Liability & Equity)

Aset Assets

TOTAL ASET PERUSAHAAN TAHUN 2019 MENCAPAI RP17,35 TRILIUN, MENGALAMI PENINGKATAN 29,37% DIBANDINGKAN TOTAL ASET TAHUN 2018 SEBESAR RP13,41 TRILIUN. PADA LAJU PERTUMBUHAN MAJEMUK TAHUNAN ATAU *COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR)* 2015-2019, TOTAL ASET PERUSAHAAN MENGALAMI PERTUMBUHAN 42,88%.

The Corporation's Total Assets in 2019 reached Rp17.35 trillion, an increase of 29.37% compared to the Total Assets in 2018 of Rp13.41 trillion. According to the 2015-2019 Compound Annual Growth Rate (CAGR), the Corporation's Total Assets experienced a growth of 42.88%.

TOTAL ASET 2015-2019 (RP-JUTA)*Total Assets 2015 - 2019 (RP-MILLION)*Grafik 5.3
Graphic 5.3**TOTAL ASET 2018-2019 (RP-JUTA)***Total Assets 2018 - 2019 (RP-MILLION)*

| Aset Assets | 2019 (Rp-Juta Rp-Million) | 2018 (Rp-Juta Rp-Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|----------|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Rp-Million) | Presentase Percentage (%) | |
| Liabilitas dan Ekuitas <i>Liability & Equity</i> | | | | | |
| Aset Lancar <i>Current Assets</i> | 1.185.263 | 616.805 | 568.457 | 92,16 | ↑ |
| Aset Tidak Lancar <i>Non-Current Assets</i> | 16.168.144 | 12.797.094 | 3.371.050 | 26,34 | ↑ |
| Total Aset <i>Total Assets</i> | 17.353.407 | 13.413.899 | 3.939.507 | 29,37 | ↑ |

Tabel 5.8
Table 5.8

Kinerja aset dipengaruhi oleh Aset Lancar dan Aset Tidak Lancar. Dibandingkan tahun 2018, Total Aset Lancar tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 92,16%, sedangkan Total Aset Tidak Lancar tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 26,34% sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

Asset performance is influenced by Current Assets and Non-Current Assets. Compared to 2018, Total Current Assets in 2019 increased by 92.16%, while Total Non-Current Assets in 2019 increased by 26.34%, as described as follows.

Aset Lancar

Current Assets

| Aset Assets | 2019 | 2018 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|--|----------------------|----------------------|---|---------------------------------|----------|
| | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | Nominal Total (Rp-Juta Rp-Million) | Presentase Percentage (%) | |
| Kas dan Setara Kas <i>Cash and Cash Equivalents</i> | 978.545 | 604.891 | 371.654 | 61,44 | ↑ |
| Piutang Usaha <i>Account Receivables</i> | 78.193 | - | 78.193 | - | |
| Piutang Subsidi <i>Subsidy Receivables</i> | 105.708 | - | 105.708 | - | |
| Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i> | 922 | 1.952 | (1.031) | (52,79) | ↓ |
| Pendapatan Masih Akan Diterima <i>Accrued Revenues</i> | 9.585 | 518 | 9.067 | 1.749,21 | ↑ |
| Persediaan <i>Inventory</i> | 3.621 | - | 3.621 | - | |
| Pajak Dibayar Dimuka <i>Prepaid Tax</i> | - | 3.277 | (3.277) | - | |
| Biaya Dibayar Dimuka - Neto dan Uang Muka <i>Prepaid Expenses - Net and Advances</i> | 9.543 | 6.167 | 3.376 | 54,75 | ↑ |
| Dana Diabatasi Penggunaannya <i>Restricted Funds</i> | 1.146 | - | 1.146 | - | |
| Jumlah Aset Lancar <i>Total Current Assets</i> | 1.186.263 | 616.805 | 568.457 | 92,16 | ↑ |

Tabel 5.9
Table 5.9

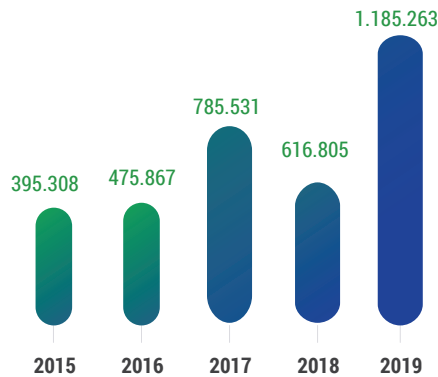
Jumlah Aset Lancar tahun 2019 sebesar Rp1.185.263 juta, meningkat 92,16% atau setara dengan Rp568.457 juta dibandingkan Jumlah Aset Lancar tahun 2018 sebesar Rp616.805 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pertumbuhan yang signifikan dari Kas dan Setara Kas dan Pendapatan Masih Akan Diterima. Selain itu adanya Piutang Usaha dan Piutang Subsidi yang di tahun sebelumnya belum diperoleh Perseroan, seperti yang akan dijelaskan berikutnya.

The amount of Current Assets in 2019 was Rp 1,185,263 million, an increase of 92.16% or equivalent to Rp 568,457 million compared to the amount of Current Assets in 2018 of Rp 616,805 million. This increase was mainly due to the significant growth of Cash and Cash Equivalents and Unearned Revenue. In addition, Account Receivables and Subsidy Receivables, which the Corporation had yet to receive in the previous year also contributed, as will be explained later.

Perkembangan Jumlah Aset Lancar Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of the Corporation's Current Assets can be seen in the chart below.

ASET LANCAR 2015-2019 (RP-JUTA) Current Assets 2015 - 2019 (RP-Million)



Grafik 5.4.
Graphic 5.4.

Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalents

Peningkatan Kas dan Setara Kas sebesar 61,44% dari Rp604.891 juta di tahun 2018 menjadi Rp976.545 juta per tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan Kas dan Setara Kas ini dipengaruhi oleh kegiatan operasional Perseroan yang mulai beroperasi komersial pada kuartal II tahun 2019.

The Corporation experienced an increase in Cash and Cash Equivalents by 61.44% from Rp604,891 million in 2018 to Rp976,545 million as of December 31, 2019. This increase in Cash and Cash Equivalents was influenced by the Corporation's operational activities; the Corporation began commercial operations in the second quarter of 2019.

Piutang Usaha

Account Receivables

Peningkatan Piutang Usaha menjadi Rp78.193 juta per tanggal 31 Desember 2019 dipengaruhi oleh kegiatan operasional Perseroan yang mulai beroperasi komersial pada kuartal II tahun 2019.

The Increase in Account Receivables to Rp78,193 million as of December 31, 2019 was influenced by the Corporation's operational activities; the Corporation began commercial operations in the second quarter of 2019.

Piutang Subsidi

Subsidy Receivables

Peningkatan Piutang Subsidi menjadi Rp105.708 juta per tanggal 31 Desember 2019 dipengaruhi oleh kegiatan operasional Perseroan yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu subsidi prasarana dan sarana.

The increase in Subsidy Receivables to Rp105,708 million as of December 31, 2019 was influenced by the Corporation's operational activities, which received subsidies from the Provincial Government of DKI Jakarta, namely infrastructure and facility subsidies.

Piutang Lain-lain

Other Receivables

Penurunan Piutang Lain-lain sebesar 52,79% dari Rp1.952 juta di tahun 2018 menjadi Rp922 juta.

The Corporation experienced a decrease in Other Receivables by 52.79%, from Rp1,952 million in 2018 to Rp922 million.

Pendapatan Masih Akan Diterima

Accrued Revenues

Peningkatan Pendapatan Akan Diterima sebesar 1.749,21% dari Rp518 juta di tahun 2018 menjadi Rp9.585 juta per 31 Desember 2019. Peningkatan Pendapatan Masih Akan Diterima dipengaruhi oleh pengembangan bisnis non-tiket yang telah berkontrak dengan Perseroan pada tahun 2019.

The Corporation experienced an increase in the Accrued Revenues by 1,749.21% from Rp518 million in 2018 to Rp9,585 million as of December 31, 2019. The increase in the Accrued Revenues was influenced by the developments in non-Farebox businesses that had signed contracts with the Corporation in 2019.

Persediaan

Inventory

Peningkatan Persediaan menjadi Rp3.621 juta per tanggal 31 Desember 2019 dipengaruhi oleh kegiatan operasional Perseroan yang mulai beroperasi komersial pada kuartal II tahun 2019. Persediaan ini terutama merupakan suku cadang dari aset operasional Perseroan.

The increase in Inventories to Rp3,621 million as of December 31, 2019 was affected by the Corporation's operational activities; the Corporation began commercial operations in the second quarter of 2019. This inventory is mainly spare parts of the Corporation's operational assets.

Pajak Dibayar Di muka

Prepaid Taxes

Penurunan Pajak Dibayar Dimuka dari Rp3.277 juta di tahun 2018 menjadi nihil per 31 Desember 2019.

There was a reduction of Prepaid Taxes from Rp3,277 million in 2018 to nil as of December 31, 2019.

Biaya Dibayar Dimuka - Neto dan Uang Muka

Prepaid Expenses - Net and Advances

Peningkatan Biaya Dibayar Dimuka - Neto dan Uang Muka sebesar 54,75% dari Rp6.167 juta menjadi Rp9.543 juta per 31 Desember 2019.

There was an Increase in Prepaid Expenses - Net and Advances of 54.75% from Rp6,167 million to Rp9,543 million as of December 31, 2019.

Dana Dibatasi Penggunaannya

Restricted Funds

Peningkatan Dana Dibatasi Penggunaannya menjadi Rp1.146 juta per 31 Desember 2019 dari sebelumnya nihil di tahun 2018.

There was an increase in Restricted Funds to Rp1,146 million as of 31 December 2019 from nil in 2018.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

| Aset Tidak Lancar Non-Current Assets | 2019 | 2018 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|--|----------------------|----------------------|---|---------------------------------|---|
| | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | Nominal Total (Rp-Juta Rp-Million) | Presentase Percentage (%) | |
| Uang Muka Kontraktor Contractors Advances | 19.000 | 68.571 | (49.571) | (72,29) | ↓ |
| Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net | 16.023.642 | 12.708.591 | 3.315.051 | 26,09 | ↑ |
| Aset Takberwujud - Neto Intangible Assets - Net | 28.741 | 13.208 | 15.533 | 117,61 | ↑ |

| Aset Tidak Lancar Non-Current Assets | 2019 | 2018 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------------------|----------------------|---|---------------------------------|
| | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | Nominal Total (Rp-Juta Rp-Million) | Presentase Percentage (%) |
| Uang Jaminan Security Deposits | 13.432 | 6.725 | 6.707 | 99,74 |
| Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets | 78.326 | - | 78.326 | - |
| Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan Estimated Claim for Tax Refund | 5.004 | - | 5.004 | - |
| Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets | 16.168.144 | 12.797.094 | 3.371.050 | 26,34 |

Tabel 5.10. Aset Tidak Lancar
Table 5.10. Non-Current Assets

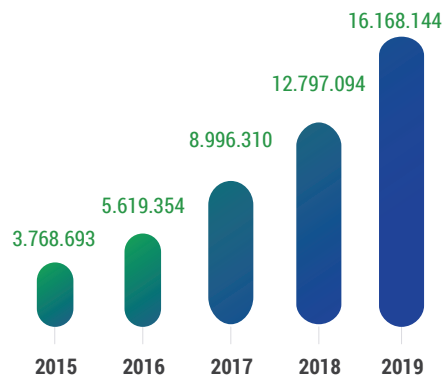
Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2019 sebesar Rp16.168.144 juta, meningkat 26,34% atau setara dengan Rp3.371.050 juta dibandingkan Jumlah Aset Tidak Lancar tahun 2018 sebesar Rp12.797.094 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Peningkatan Aset Tetap - Neto yang signifikan.

Total Non-Current Assets in 2019 amounted to Rp16,168,144 million, an increase of 26.34% or equivalent to Rp3,371,050 million compared to Total Non-Current Assets in 2018 of Rp12,797,094 million. This increase was mainly due to a significant increase in Fixed Assets - Net.

Perkembangan jumlah Aset Tidak Lancar Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

The progress of the Corporation's Non-Current Assets amounts can be seen in the chart below:

ASET TIDAK LANCAR 2015-2019 (RP-JUTA) Non-Current Assets 2015 - 2019 (RP-Million)



Grafik 5.5
Graphic 5.5

Uang Muka Kontraktor Contractor's Advances

Penurunan Uang Muka Kontraktor sebesar 72,29% dari Rp68.571 juta di tahun 2018 menjadi Rp19.000 juta per 31 Desember 2019.

There was a decrease in Contractor Advances by 72.29% from Rp68,571 million in 2018 to Rp19,000 million as of December 31, 2019.

Aset Tetap-Neto

Fixed Assets - Net

Peningkatan Aset Tetap-Neto sebesar 26,09% dari Rp12.708.591 juta di tahun 2018 menjadi Rp16.023.642 juta per 31 Desember 2019. Peningkatan Aset Tetap-Neto dipengaruhi oleh penyelesaian konstruksi dan serah terima aset dalam konstruksi kepada Perseroan di tahun 2019.

There was an increase in Fixed Assets - Net by 26.09% from Rp12,708,591 million in 2018 to Rp16,023,642 million as of December 31, 2019. The increase in Fixed Assets - Net was influenced by the completion of construction and the transfer of assets under construction to the Corporation in 2019.

Aset Takberwujud-Neto

Intangible Assets - Net

Peningkatan Aset Takberwujud-Neto sebesar 117,61% dari Rp13.208 juta di tahun 2018 menjadi Rp28.741 juta per 31 Desember 2019.

There was an increase in Intangible Assets - Net by 117.61% from Rp13,208 million in 2018 to Rp28,741 million as of December 31, 2019.

Uang Jaminan

Security Deposit

Peningkatan Uang Jaminan sebesar 99,74% dari Rp6.725 juta menjadi Rp13.432 juta per 31 Desember 2019. Jaminan dipengaruhi oleh aktivitas operasional Perseroan dalam mengembangkan bisnis non-tiket di tahun 2019.

There was an increase in Security Deposit by 99.74% from Rp6,725 million to Rp13,432 million as of December 31, 2019. The increase in Security Deposits was influenced by the Corporation's operational activities in developing non-Farebox business in 2019

Aset Pajak Tangguhan

Deferred Tax Assets

Peningkatan Aset Pajak Tangguhan menjadi Rp78.326 juta per 31 Desember 2019 dipengaruhi oleh perhitungan akumulasi pajak atas aset yang ditangguhkan.

The Deferred Tax Assets increased to Rp78,326 million as of December 31, 2019 and was affected by the calculation of the accumulated tax on deferred assets.

Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan

Estimated Income Tax Refund

Peningkatan Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan menjadi Rp5.004 Juta per 31 Desember 2019 dipengaruhi oleh pengembangan aktivitas operasional Perseroan dalam menjalankan bisnis tiket dan non-tiket.

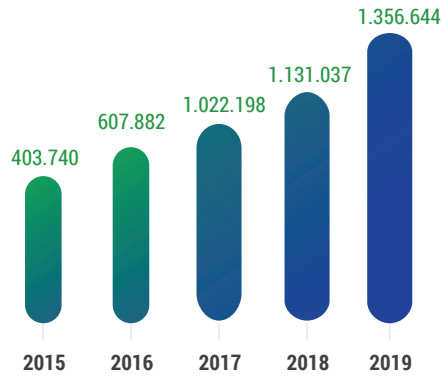
The increase in Estimated Income Tax Refund to Rp5,004 million as of December 31, 2019 was influenced by the developments of the Corporation's operational activities in Farebox and non-Farebox businesses.

Liabilitas

Liabilities

TOTAL LIABILITAS PERSEROAN TAHUN 2019 MENCAPAI RP1,36 TRILIUN, MENGALAMI PENINGKATAN 19,95% DIBANDINGKAN TOTAL LIABILITAS TAHUN 2018 SEBESAR RP1,13 TRILIUN.

The Corporation's Total Liabilities in 2019 reached Rp1.36 trillion, an increase of 19.95% compared to the Total Liabilities of Rp1.13 trillion in 2018.

TOTAL LIABILITAS 2015-2019 (RP-JUTA)*Total Liabilities 2015 - 2019 (RP-MILLION)*Grafik 5.6
Graphic 5.6**TOTAL LIABILITAS 2018-2019 (RP-JUTA)***Total Liabilities 2018 - 2019 (RP-MILLION)*

| Liabilitas Liabilities | 2019 | | 2018 | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|---------------------------------|
| | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Million) | Nominal Total (Rp-Juta Rp-Million) | Presentase Percentage (%) |
| Liabilitas Jangka Pendek <i>Current Liabilities</i> | 699.277 | | 382.883 | | 316.395 | 82,63 ↑ |
| Liabilitas Jangka Panjang <i>Non-Current Liabilities</i> | 657.367 | | 748.155 | | (90.788) | (12,13) ↓ |
| Jumlah Liabilitas <i>Total Liability</i> | 1.356.644 | | 1.131.037 | | 225.606 | 19,95 ↑ |

Tabel 5.11
Table 5.11

Kinerja liabilitas dipengaruhi oleh Liabilitas Jangka Pendek dan Liabilitas Jangka Panjang. Dibandingkan tahun 2018, Total Liabilitas Jangka Pendek tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 82,63%, sedangkan Total Liabilitas Jangka Panjang tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 12,13% sebagaimana semua diuraikan di bawah ini:

Liability performance is influenced by Current Liabilities and Non-Current Liabilities. Compared to 2018, Total Current Liabilities in 2019 increased by 82.63%, while Total Non-Current Liabilities in 2019 decreased by 12.13% as described below:

Liabilitas Jangka Pendek*Current Liabilities*

| Liabilitas Liabilities | 2019 | | 2018 | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|---------------------------------|
| | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Million) | Nominal Total (Rp-Juta Rp-Million) | Presentase Percentage (%) |
| Utang Usaha <i>Account Payables</i> | 1.106 | | 11.207 | | (10.101) | (90,13) ↓ |

| Liabilitas Liabilities | 2019 | 2018 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|--|----------------------|----------------------|---|---------------------------------|----------|
| | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Presentase Percentage (%) | |
| Utang Lain-lain <i>Other Paybles</i> | 1.165 | 1.358 | 195 | (14,34) | ↓ |
| Utang Kontraktor dan Konsultan <i>Payables to Contractors and Consultants</i> | 146.819 | 14.649 | 132.170 | 902,22 | ↑ |
| Beban Akrua <i>Accrued Expense</i> | 369.967 | 354.094 | 15873 | 4,48 | ↑ |
| Pendapatan Diterima Dimuka <i>Unearned Revenue</i> | 127.615 | - | 127.615 | - | |
| Utang Pajak <i>Tax Paybles</i> | 52.606 | 1.573 | 51.033 | 3.244,12 | ↑ |
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek <i>Total Current Liabilities</i> | 699.277 | 382.883 | 316.395 | 82,63 | ↑ |

Tabel 5.12. Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Table 5.12. Table of Current Liabilities

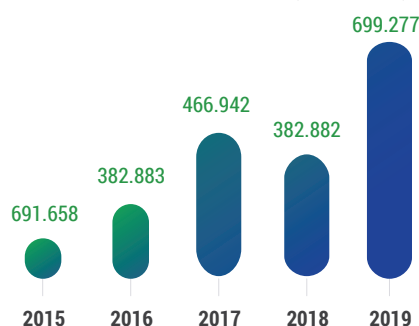
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2019 sebesar Rp699.277 juta, meningkat 82,63% atau setara dengan Rp316.395 juta dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek tahun 2018 sebesar Rp 382.883 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan yang signifikan dari Utang Kontraktor dan Konsultan-Pihak Ketiga dan Utang Pajak seperti yang akan dijelaskan berikutnya.

Total Current Liabilities in 2019 amounted to Rp699,277 million, an increase of 82.63% or equivalent to Rp316,395 million compared to the Total Current Liabilities in 2018 of Rp382,883 million. This increase was mainly due to a significant increase of Payables to Contractors and Consultants - Third Party and Tax Payables, as will be explained later.

Perkembangan Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The development of Corporation's Total Current Liabilities, can be seen in the chart below.

LIABILITAS JANGKA PENDEK 2015-2019 (RP-JUTA) Current Liabilities 2015 - 2019 (RP - Million)



Grafik .5.7
Graphic.5.7

Utang Usaha

Accounts Payable

Penurunan Utang Usaha sebesar 90,13% dari Rp11.207 juta di tahun 2018 menjadi Rp1,106 juta per 31 Desember 2019. Penurunan Utang Usaha dipengaruhi oleh penyelesaian pekerjaan-pekerjaan pendukung persiapan Perseroan yang mulai beroperasi komersial pada kuartal II tahun 2019.

There was a decrease in Accounts Payables by 90.13% from Rp11,207 million in 2018 to Rp1,106 million as of December 31, 2019. The decrease in Accounts Payables was influenced by the completion of preparatory works for the Corporation, which began commercial operations in the second quarter of 2019.

Utang Lain-lain

Other Payables

Utang Lain-lain Perseroan di tahun 2019 sebesar Rp1.164 juta, turun 14,34% atau setara dengan Rp195 juta dibandingkan Utang Lain-lain tahun 2018 sebesar Rp1.358 juta.

The Corporation's Other Payables in 2019 amounted to Rp1,164 million, down 14.34% or equivalent to Rp195 million compared to Other Payables in 2018 amounting to Rp1,358 million.

Utang Kontraktor dan Konsultan

Payables to Contractors and Consultants

Peningkatan Utang Kontraktor dan Konsultan sebesar 902,22% dari Rp14.649 juta di tahun 2018 menjadi Rp146.819 juta per 31 Desember 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh tagihan keuangan yang belum bisa dibayarkan pada tahun 2019. Perseroan sedang berkoodinasi dengan Pemerintah terkait untuk menyelesaikan tagihan keuangan tersebut.

The increase in Payables to Contractors and Consultants was 902.22% from Rp14,649 million in 2018 to Rp146,819 million as of 31 December 2019. This increase was influenced by financing charges that had not been paid in 2019. The Corporation is coordinating with relevant authorities and government bodies to settle the financing charges issue.

Beban Akrua

Accrual Expense

Peningkatan Beban Akrua sebesar 4,48% dari Rp354.094 juta di tahun 2018 menjadi Rp369.967 juta per 31 Desember 2019.

There was an increase in Accrued Expense by 4.48% from Rp354,094 million in 2018 to Rp369,967 million as of December 31, 2019.

Utang Pajak

Tax Payable

Peningkatan Utang Pajak sebesar 3.244, 12% dari Rp1.573 juta di tahun 2018 menjadi Rp52.606 juta per 31 Desember 2019. Peningkatan Utang Pajak dipengaruhi oleh peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019.

There was an increase increase in Tax Payable by 3,244, 12% from Rp1,573 million in 2018 to Rp52,606 million as of December 31, 2019. The increase in Tax Payable was influenced by the increase in the Land and Building Tax in 2019.

Pendapatan Diterima Dimuka

Unearned Revenues

Peningkatan Beban Akrua sebesar 4,48% dari Rp juta di tahun 2018 menjadi Rp369.967 juta per 31 Desember 2019.

The increase in Unearned Revenues to Rp127,615 million as of December 31, 2019 was influenced by the Corporation's operational activities; the Corporation began commercial operations in the second quarter of 2019.

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities

| Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities | 2019 | 2018 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|---|----------------------|----------------------|---|---------------------------------|----------|
| | (Rp-Juta Rp-Million) | (Rp-Juta Rp-Million) | Nominal Total (Rp-Juta Rp-Million) | Presentase Percentage (%) | |
| Utang Retensi Retention Payable | 480.756 | 691.273 | (210.517) | (30,45) | ↓ |
| Pendapatan Diterima Dimuka Unearned Revenues | 134.734 | 40.000 | 94.734 | 236,84 | ↑ |
| Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Liability for Employee Benefit | 28.855 | 16.882 | 11.973 | 70,92 | ↑ |
| Jaminan Uang Pelanggan Customer's security Deposit | 13.021 | - | 13.021 | - | ↑ |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities | 657,367 | 748,155 | (90.788) | (12,13) | ↓ |

Tabel 5.13. Liabilitas Jangka Panjang
Table 5.13. Non-Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2019 sebesar Rp657.367 juta, turun 12,13% atau setara dengan Rp90.788 juta dibandingkan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang tahun 2018 sebesar Rp748.155 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Utang Retensi seperti yang akan dijelaskan berikutnya.

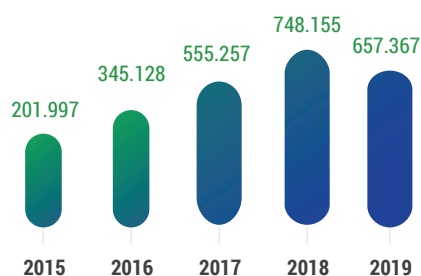
Total Non-Current Liabilities in 2019 amounted to Rp657,367 million, down 12.13% or equivalent to Rp90,788 million compared to the Total Non-Current Liabilities in 2018 of Rp748,155 million. This decrease was mainly due to the decrease in Retention Payable as will be explained next.

Perkembangan Panjang Jumlah Liabilitas Jangka Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The progress of the Corporation's Total Non-Current Liabilities can be seen in the chart below.

LIABILITAS JANGKA PANJANG 2015-2019 (RP-JUTA)

Non-Current Liabilities 2015 - 2019 (RP - Million)



Grafik 5.8
Graphic 5.8

Utang Retensi

Retention Payables

Penurunan Utang Retensi sebesar 30,45% dari Rp691.273 juta di tahun 2018 menjadi Rp480.756 juta per 31 Desember 2019. Penurunan Utang Retensi dipengaruhi oleh selesainya periode retensi dari beberapa kontraktor atau konsultan.

There was a decrease in Retention Payables by 30.45% from Rp691,273 million in 2018 to Rp480,756 million as of December 31, 2019. The decrease in Retention Payables was influenced by the completion of retention period from certain contractors or consultants

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liability for Employee Benefits

Peningkatan Liabilitas Imbalan Karyawan sebesar 70,92% dari Rp16.882 juta di tahun 2018 menjadi Rp 28.855 juta per 31 Desember 2019.

Employee Benefits Liability increased by 70.92% from Rp16,882 million in 2018 to Rp28,855 million as of December 31, 2019.

Pendapatan Diterima Di muka

Unearned Revenues

Peningkatan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar 236,84% dari Rp40.000 juta di tahun 2018 menjadi Rp134.734 juta per 31 Desember 2019. Peningkatan Pendapatan Diterima Dimuka dipengaruhi oleh aktivitas operasional Perseroan dalam mengembangkan bisnis non-tiket.

The increase in Unearned Revenues was 236.84% from Rp40,000 million in 2018 to Rp134,734 million as of December 31, 2019. The increase in Unearned Revenues was influenced by the Corporation's operational activities in developing non-Farebox businesses.

Uang Jaminan Pelanggan

Customer's Security Deposits

Peningkatan Uang Jaminan menjadi Rp13.021 Juta per 31 Desember dipengaruhi oleh aktifitas operasional Perseroan dalam mengembangkan bisnis non-tiket

The increase in Customer's Security Deposits to Rp13,021 million as of December 31, 2019 was influenced by the Corporation's operational activities in developing non-Farebox businesses.

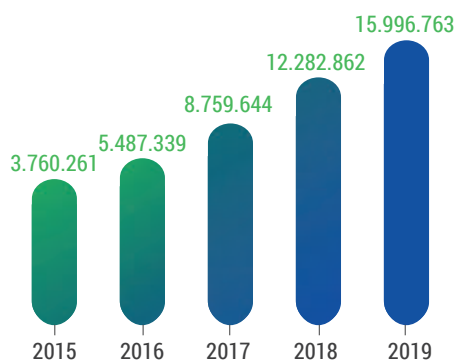
Ekuitas

Equity

EKUITAS NETO PERSEROAN TAHUN 2019 MENCAPAI RP15,99 TRILIUN, MENGALAMI PENINGKATAN 30,24% DIBANDINGKAN EKUITAS NETO TAHUN 2018 SEBESAR RP12,28 TRILIUN. PADA LAJU PERTUMBUHAN MAJEMUK TAHUNAN ATAU COMPOUND ANNUAL GROWTH RATE (CAGR) 2015-2019, EKUITAS NETO PERSEROAN MENGALAMI PERTUMBUHAN 43,62%

The Corporation's Net Equity in 2019 reached Rp15.99 trillion, an increase of 30.24% compared to the Net Equity in 2018 of Rp12.28 trillion. Based on the 2015-2019 Compound Annual Growth Rate (CAGR), the Corporation's Net Equity grew by 43.62%

TOTAL EKUITAS 2018-2019 (RP-JUTA)
Equity Total 2019-2019 (RP-Million)



Grafik 5.9
Graphic 5.9

EKUITAS 2018-2019 (RP-JUTA)
Equity 2019-2019 (RP-Million)

| Ekuitas <i>Equity</i> | 2019 <i>(Rp-Juta Million)</i> | 2018 <i>(Rp-Juta Million)</i> | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | Nominal Total <i>(Rp-Juta Million)</i> | Persentase Percentage <i>(%)</i> | |
| Modal Saham <i>Shared Capital</i> | 12.771.972 | 6.165.807 | 6.606.165 | 107,14 | ↑ |
| Modal Disetor Lainnya <i>Other Paid-up Capital</i> | 3.567.202 | 6.606.170 | (3.038.968) | (46,00) | ↓ |
| Defisit <i>Deficit</i> | (342.411) | (489.114) | 146.704 | (29,99) | ↓ |
| Ekuitas Neto <i>Net Equity</i> | 15.996.763 | 12.282.862 | 3.713.901 | 30,24 | ↑ |

Tabel 5.14
Table 5.14

Ekuitas Neto Perseroan tahun 2019 sebesar Rp15.996.763 juta, meningkat 30,24% atau setara dengan Rp3.713.901 juta dibandingkan Ekuitas Neto tahun 2018 sebesar Rp12.282.862 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari Modal Saham serta menurunnya Defisit sebagaimana diuraikan di bawah ini.

The Corporation's Net Equity in 2019 was Rp15,996,763 million, an increase of 30.24% or equivalent to Rp3,713,901 million compared to the Net Equity in 2018 of Rp12,282,862 million. This increase was mainly due to an increase in Shared Capital and a decrease in Deficit as described below.

MODAL SAHAM
CAPITAL STOCK

Peningkatan Modal Saham sebesar 107,14% dari Rp6.165.807 juta di tahun 2018 menjadi Rp12.771.972 juta per 31 Desember 2019. Peningkatan Modal Saham dipengaruhi oleh Setoran Modal yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

There was an increase in Shared Capital amounting to 107.14% from Rp6,165,807 million in 2018 to Rp12,771,972 million as of 31 December 2019. The increase in Shared Capital was influenced by Paid-up Capital from DKI Jakarta Provincial Government.

Modal Disetor Lainnya

Other Paid-up Capital

Penurunan Modal Disetor Lainnya sebesar 46,00% dari Rp6.606.170 juta di tahun 2018 menjadi Rp3.567.202 juta per 31 Desember 2019.

The decrease in Other Paid-up Capital was 46.00% from Rp6,606,170 million in 2018 to Rp3,567,202 million as of December 31, 2019.

Defisit

Deficit

Penurunan Defisit sebesar 29,99% dari Rp489.114 juta di tahun 2019 menjadi Rp342.411 juta per 31 Desember 2019. Penurunan Defisit dipengaruhi oleh Laba Komprehensif yang dibukukan pada tahun 2019.

There was a Decrease in Deficit by 29.99% from Rp489,114 million in 2018 to Rp342,411 million as of December 31, 2019. The decrease in the Deficit was influenced by the Comprehensive Profit recorded in 2019.

LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PROFIT (LOSS) AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

TAHUN 2019 MERUPAKAN TAHUN PENTING, DI MANA PERSEROAN MENCATATKAN PENDAPATAN PERTAMANYA SETELAH BEROPERASINYA MRT JAKARTA.

2019 was an important year, a year in which the Corporation recorded its first revenue after the MRT Jakarta commenced operations.

LABA (RUGI)

Profit (loss)

| Laba (Rugi) Profit (loss) | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) | |
| Pendapatan Revenues | 933.230 | - | 933.230 | - | |
| Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues | (760.415) | - | (760.415) | - | |
| Laba Kotor Gross Profit | 172.815 | - | 172.815 | - | |
| Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expense | (221.750) | (207.264) | (14.486) | 6,99 | ↑ |
| Rugi Usaha Operating Loss | (48.935) | (207.264) | 158.329 | (76,39) | ↓ |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain Other Income (Expense) | 120.854 | 77.281 | 43.573 | 56,38 | ↑ |

| Laba (Rugi) Profit (loss) | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) | |
| Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Final dan Manfaat Pajak Penghasilan <i>Income (Loss) Before Final Tax Expense and Income Tax Benefits</i> | 71.919 | (129.983) | 201.901 | 155,33 | ↑ |
| Beban Pajak Final <i>Final Tax Expense</i> | (7.973) | (8.737) | 764 | (8,74) | ↑ |
| Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan <i>Income (Loss) Before Income Tax Benefits</i> | 63.946 | (138.719) | 202.665 | 146,10 | ↓ |
| Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan <i>Deferred Income Tax Benefits</i> | 79.434 | - | 79.434 | - | |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan <i>Income (Loss) for the year</i> | 143.380 | (138.719) | 282.099 | 203,36 | ↑ |
| Penghasilan Komprehensif Lain <i>Other Comprehensive Income</i> | 3.324 | 1.213 | 2.111 | 173,94 | ↑ |
| Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan <i>Total Comprehensive Income (Loss) For The Year</i> | 146.704 | (137.506) | 284.210 | 206,69 | ↑ |
| Laba (Rugi) per Saham (Rupiah penuh) <i>Earning (Loss) per Share (full Rupiah)</i> | 11.226,13 | (22.498, 19) | 34.075 | 151,46 | ↑ |

Tabel 5.15
Table 5.15

Kinerja Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain diuraikan sebagai berikut.

The performance of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income are described as follows.

Pendapatan Revenue

Seperti yang telah diuraikan dalam bagian Tinjauan Operasi per Segmen usaha dalam bab ini, Pendapatan Perseroan didapatkan dari pendapatan tiket, Subsidi Prasarana dan Sarana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pendapatan non-tiket.

As described in the Operational Review per Business Segment section in this chapter, the Corporation's Revenue is gathered from ticket revenues, subsidies for facilities and infrastructure from the Provincial Government of DKI Jakarta, as well as non-Farebox revenues.

| Pendapatan Revenues | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) |
| Pendapatan Tiket Farebox Revenue | 191.552 | - | 191.552 | - |
| Pendapatan Subsidi Subsidy Revenue | 534.070 | - | 534.070 | - |
| Pendapatan Non-Tiket Non-Farebox Revenue | 207.608 | - | 207.608 | - |
| Jumlah Pendapatan Total Revenue | 933.230 | - | 933.230 | - |

Tabel 5.16
Table 5.16

Peningkatan jumlah Pendapatan Usaha dipengaruhi oleh aktivitas operasi Perseroan yang beroperasi komersial pada kuartal II tahun 2019.

The increase in the Operating Revenues was influenced by the Corporation's operational activities; the Corporation began commercial operations in the second quarter of 2019.

Beban Pokok Pendapatan

The Cost of Revenues

| Pendapatan Revenues | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) |
| Penyusutan Depreciation | 388.170 | - | 388.170 | - |
| Keamanan dan kebersihan Security and Hygiene | 102.876 | - | 102.876 | - |
| Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and Employees Welfare | 94.628 | - | 94.628 | - |
| Energi dan Utilitas Energy and Utility | 92.528 | - | 92.528 | - |
| Pajak bumi dan bangunan Land and Property Tax | 32.002 | - | 32.002 | - |
| Asuransi Insurance | 20.675 | - | 20.675 | - |

| Pendapatan Revenues | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) |
| Keperluan rumah tangga Household Appliances | 15.677 | - | 15.677 | - |
| Pemeliharaan Maintenance | 12.525 | - | 12.525 | - |
| Denda dan sanksi subsidi Penalty on Subsidy | 1.334 | - | 1.334 | - |
| Total | 760.415 | - | 760.415 | - |

Tabel 5.17
Table 5.17

Beban Pokok Pendapatan dipengaruhi oleh aktivitas operasi Perseroan yang beroperasi komersial pada kuartal II tahun 2019. Sebelum masa komersial, Perseroan belum memiliki Beban Pokok Pendapatan.

The Cost of Revenue is affected by the Corporation's activities; the Corporation began its commercial operations in the second quarter of 2019. Prior to the commercial period, the Corporation did not have Cost

LABA KOTOR

GROSS PROFIT

Laba Kotor didapatkan dari akun Pendapatan yang diakumulasikan dengan Beban Pokok Pendapatan. Laba kotor tahun 2019 sebesar Rp172.815 juta. Di tahun 2018, Perseroan belum membukukan Laba Kotor.

Gross Profit is obtained from the Revenue account which is accumulated with the Cost of Revenue. Gross Profit for 2019 amounted to Rp172,815 million. In 2018, the Corporation has yet to account for Gross Profit.

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

| | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) | |
| Gaji dan Kesejahteraan Karyawan Salaries and Employee's Welfare | 106.969 | 92.071 | 14.898 | 16,18 | ↑ |
| Perlengkapan Kantor Office Supplies | 30.051 | 16.018 | 14.033 | 87,61 | ↑ |
| Pelatihan dan Keanggotaan Training and Membership | 18.852 | 37.902 | (19.050) | (50,26) | ↓ |

| | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|----------|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) | |
| Sewa Kantor dan Kendaraan <i>Office and Vehicle Rent Expenses</i> | 17.330 | 19.073 | (1.743) | (9,14) | ↓ |
| Jasa Profesional <i>Professional Fee</i> | 17.082 | 17.537 | (455) | (2,59) | ↓ |
| Promosi dan Pameran <i>Promotion and Exhibition</i> | 8.989 | 6.219 | 2.770 | 44,55 | ↑ |
| Keperluan Rumah Tangga <i>Household Appliances</i> | 6.585 | 7.815 | (1.229) | (15,73) | ↓ |
| Penyusutan <i>Depreciation</i> | 4.213 | 2.899 | 1.314 | 45,33 | ↑ |
| Rapat Koordinasi dan RUPS <i>Coordination and Shareholders' Meetings</i> | 3.490 | 2.528 | 962 | 38,05 | ↑ |
| Transportasi dan Parkir <i>Transportation and Parking</i> | 2.707 | 3.198 | (491) | (15,35) | ↓ |
| Amortisasi <i>Amortization</i> | 2.192 | 174 | 2.018 | 1.158,57 | ↑ |
| Sumbangan <i>Donation</i> | 1.648 | 330 | 1.318 | 399,07 | ↑ |
| Komunikasi, Energi, dan Utilitas <i>Communication, Energy, and Utility</i> | 1.567 | 1.472 | 95 | 6,47 | ↑ |
| Administrasi Bank <i>Bank Administration</i> | 73 | 29 | 45 | 157,52 | ↑ |
| Jumlah Beban Umum dan Administrasi <i>General and Administrative Expense</i> | 221.750 | 207.264 | 14.486 | 6,99 | ↑ |

Tabel 5.18
Table 5.18

Peningkatan jumlah Beban Umum dan Administrasi sebesar 6,99% dari Rp207.264 juta di tahun 2018 menjadi Rp221.750 juta per 31 Desember 2019 yang dipengaruhi oleh aktivitas operasional Perseroan dalam menunjang masa komersial.

The increase in General and Administrative Expenses by 6.99% from Rp 207,264 million in 2018 to Rp221,750 million as of 31 December 2019, was influenced by Corporate's operational activities in supporting the commercial period.

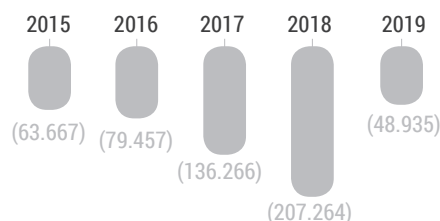
Labanya (Rugi) Usaha

Operating Profit (Loss)

Labanya (Rugi) Usaha didapatkan dari akun Labanya Kotor yang diakumulasi dengan beban usaha. Rugi Usaha tahun 2019 sebesar Rp48.935 juta, atau Rugi Usaha menurun 76,39% atau setara dengan Rp158.329 juta dibandingkan Rugi Usaha tahun 2018 sebesar Rp207.264 juta. Penurunan Rugi Usaha ini disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Usaha.

Operating Profit (Loss) is obtained from the Gross Profit account accumulated with operating expenses. Operating Losses in 2019 was Rp48,935 million, a decrease by 76.39% or equivalent to Rp158,329 million compared to the Operating Losses in 2018 of Rp207,264 million. The decrease in Operating Profit (Loss) was due to the increase in Operating Income.

TOTAL EKUITAS 2018-2019 (RP-JUTA)
Equity Total 2019-2019 (RP-Million)



Grafik 5.10
Graphic 5.10

Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Other Income

| | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|----------|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Persentase (%) | |
| Laba selisih kurs - neto <i>Gain on foreign exchange - net</i> | 48.213 | 33.566 | 14.647 | 43,64 | ↑ |
| Penghasilan bunga <i>Interest Income</i> | 38.511 | 43.684 | (5.173) | (11,84) | ↓ |
| Penghasilan denda <i>Penalty Income</i> | 23.420 | - | 23.420 | - | |
| Penghasilan keuangan <i>Finance Income</i> | 11.979 | - | 11.979 | - | |
| Penghasilan (beban) lain-lain - neto <i>Other Income (Expense) - Net</i> | (1.269) | 31 | (1.300) | (4.157,25) | ↓ |
| Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Total Other Income (Expense) - Net</i> | 120.854 | 77.281 | 43.573 | 56,38 | ↑ |

Tabel 5.19
Table 5.19

Peningkatan Penghasilan (Beban) Lain-lain sebesar 56,38% dari Rp77.281 juta di tahun 2018 menjadi Rp120.854 juta per 31 Desember 2019 dipengaruhi oleh adanya Laba Selisih Kurs, Penghasilan Denda, dan Penghasilan Keuangan.

The Increase in Other Income (Expense) - Net amounted to 56.38% from Rp77,281 million in 2018 to Rp120,854 million as of December 31, 2019. This was influenced by the Gains on Foreign Exchange, Penalty Income and Financial Income.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan

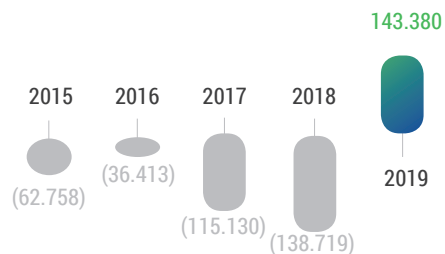
Income (Loss) for The Year

Laba (Rugi) Tahun Berjalan merupakan Laba atau Rugi Bersih Perseroan yang didapatkan dari akun Laba (Rugi) Usaha yang diakumulasikan dengan Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto. Laba Tahun Berjalan tahun 2019 sebesar Rp143.380 juta, meningkat 203,36% atau sebesar Rp282.009 juta dibandingkan Rugi Tahun Berjalan tahun 2018 sebesar Rp138.712 juta. Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih tahun berjalan pada tahun perdana beroperasi komersialnya MRT.

Income or Loss is obtained from the Income (Loss) account accumulated with Other Income (Expenses). Income for the Year 2019 amounted to Rp143,380 million, increasing by 203.36% or Rp282,009 million compared to the Loss for the Year in 2018 of Rp138,712 million. The Corporation managed to account for its Net Income for the Current Year in the first year of MRT Jakarta's commercial operation.

PERKEMBANGAN LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 2015-2019 (RP-JUTA)

Progress of Income (Loss) for The Year 2015-2019 (Rp-Million)



Grafik 5.11
Graphic 5.11

Penghasilan Komprehensif Lain

Other Comprehensive Income

Penghasilan Komprehensif Lain adalah sebesar Rp3.324 juta, meningkat 173,94% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp1.213 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan laba pengukuran kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja - Neto dari Pajak.

Other Comprehensive Income amounted to Rp3,324 million, an increase of 173.94% compared to 2019, which was Rp1,213 million. This increase was due to the increase in the re-measurement gains on employee benefits liabilities.

Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

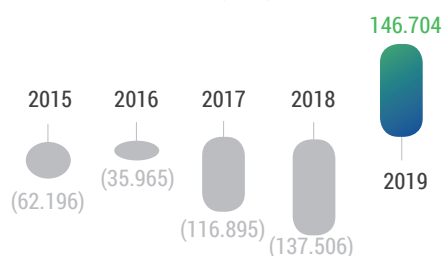
Total Comprehensive Income (Loss) For The Year

Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan didapatkan dari akun Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang diakumulasikan dengan penghasilan (beban) komprehensif lain. Total Laba Komprehensif tahun berjalan tahun 2019 sebesar Rp146.704 juta, meningkat 206,69% atau setara dengan Rp284.210 juta dibandingkan Total Rugi Komprehensif Tahun berjalan tahun 2018 sebesar Rp137.506 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan Pendapatan Usaha.

Total Comprehensive Income (Loss) for the Current Year is obtained from the Profit (Loss) of the Current Year account accumulated with other Comprehensive Income (Expense). Total Comprehensive Income for the year 2019 was Rp146,704 million, increasing by 206.69% or Rp284,210 million compared to the Total Comprehensive Loss for 2018 of Rp137,506 million. This increase was due to an increase in Operating Revenues.

PERKEMBANGAN TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 2015-2019 (RP-JUTA)

Progress of Total Comprehensive Income (Loss) for The Year 2015-2019 (Rp-Million)



Grafik 5.12
Graphic 5.12

Laba (Rugi) per Saham

Earning (Loss) Per Share

Laba (Rugi) Per Saham merupakan Laba Bersih yang dialokasikan ke setiap Saham yang Beredar, yang didapatkan dari Laba Tahun Berjalan dibagi dengan rata-rata tertimbang Jumlah Saham yang Beredar.

Earning (Loss) Per Share is the Net Income allocated to each Outstanding Share, which is obtained from the Current Year's Income divided by the weighted average Number of Outstanding Shares.

| | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) | |
| Laba (Rugi) Tahun Berjalan (Rp-juta) <i>Income (Loss) for the year (Rp-million)</i> | 143.380 | (138.719) | 282.099 | 203,36 | ↑ |
| Jumlah Saham yang Beredar (lembar) <i>Number of Outstanding Shares</i> | 12.771.972 | 6.165.807 | 6.606.165 | 107,14 | ↑ |
| Laba (Rugi) per Saham Dasar (Rp/lembar) <i>Income (Loss) per Basic Share (Rp/share)</i> | 11.226,13 | (22.498,19) | 33.724,32 | 149,90 | ↑ |

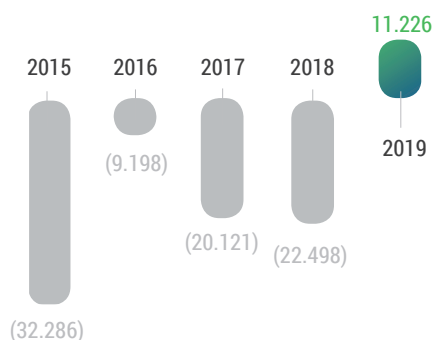
Tabel 5.20
Table 5.20

Laba Per Saham tahun 2019 sebesar Rp11.226,13 per lembar saham, meningkat 149,90% atau setara dengan Rp33.724,32 dibandingkan Rugi Per Saham tahun 2018 sebesar Rp22.498,19 per lembar saham. Kenaikan ini sejalan dengan Laba Tahun Berjalan yang berhasil dibukukan Perseroan di tahun 2019.

Earnings Per Share in 2019 amounted to Rp11,226.13 per share, an increase of 149.90% or equivalent to Rp33,724.32 per share, compared to 2018 Loss Per Share of Rp22,498.19 per share. This increase is in line with the Corporation's Current Year's Profits booked in 2019.

PERKEMBANGAN LABA (RUGI) PER SAHAM 2015-2019 (RP-JUTA)

Progress Of Earning (Loss) Per Share 2015-2019 (Rp-Million)



Grafik 5.13
Graphic 5.13

Informasi Tentang Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk dan Kepentingan Non Pengendali

Information About Profit (Loss) Current Year and Total Comprehensive Profit (Loss) for The Year Attributable to Owners of Parent Entity and Non-Controlling Interests

Hingga akhir tahun 2019 Perseroan belum memiliki entitas anak yang bernaung di bawahnya. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki informasi terkait Laba (Rugi) Tahun Berjalan dan Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang diatribusikan, baik kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali.

Until the end of 2019, the Corporation did not have an entity under its control. Accordingly, the Corporation does not have information related to Profit (Loss) Current Year and Total Comprehensive Income (Loss) Current Year distributed to owners of parent entity and non-controlling interests.

LAPORAN ARUS KAS

CASHFLOW STATEMENT

KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 2019 TERCATAT NAIK MENJADI RP976,55 MILIAR DARI RP604,89 MILIAR DI AWAL TAHUN 2019, YANG DISEBABKAN PERGERAKAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI DAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI.

Cash and Cash Equivalents at the end of 2019 were recorded to increase to Rp976.55 billion from Rp604.89 billion at the beginning of 2019. Which was attributable to the movements of cash flow from operating and investing activities.

| Arus Kas Cashflow | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) | |
| Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities | 561.816 | (111.599) | 673.414 | 603,43 | ↑ |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash flow from Investing Activities | (190.162) | (63.853) | (126.308) | 197,81 | ↑ |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash flow from Financing Activities | - | - | - | - | |
| Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents | 371.654 | (175.452) | 547.106 | 311,83 | ↑ |
| Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at beginning of year | 604.891 | 780.343 | (175.452) | (22,48) | ↓ |
| Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at end of year | 976.545 | 604.891 | 371.654 | 61,44 | ↑ |

Tabel 5.21
Table 5.21

Arus Kas memberikan gambaran tentang jumlah pemasukan dan pengeluaran Perseroan dalam suatu periode tertentu. Peningkatan Kas dan Setara Kas akhir periode 2019 menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengelola arus kas yang baik sehingga Kas dan Setara Kas akhir periode 2019 tercatat meningkat apabila dibandingkan dengan Kas dan Setara Kas awal periode 2019.

Cash Flow provides an overview of the amount of revenues and expenses of the Corporation in a certain period. Increase in Cash and Cash Equivalents at the end of 2019 show the Corporation's ability to manage cash flow so that Cash and Cash Equivalents at the end of 2019 are recorded higher when compared to Cash and Cash Equivalents at the beginning of 2019.

Berikut disampaikan kinerja Arus Kas di tahun 2019:

The following is the performance of Cash Flow in 2019:

| Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cashflow From Operating Activities | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) |
| Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers | 601.047 | 40.000 | 561.047 | 1.402,62 ↑ |
| Penerimaan dari Subsidi Receipts from Subsidy | 427.027 | - | 427.027 | - |
| Penerimaan Penghasilan Bunga Receipts from Interest Income | 29.862 | 35.150 | (5.288) | (15,04) ↓ |
| Pembayaran kepada Pemasok Payment to Vendors | (347.315) | (90.434) | (256.881) | 284,05 ↑ |
| Pembayaran kepada Komisaris, Direksi, dan Karyawan Payment to Commissioners, Directors, and Employees | (148.806) | (96.315) | (52.491) | 54,50 ↑ |
| Kas Bersih yang Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi Net Cash Received (Used) in Operating Activities | 561.816 | (111.599) | 673.414 | 603,43 ↑ |

Tabel 5.22
Table 5.22

Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2019 sebesar Rp561.816 juta, meningkat 603,43% atau setara dengan Rp673.414 juta dibandingkan Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi tahun 2018 sebesar Rp111.599 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan seperti yang akan diuraikan di bawah ini.

Net Cash Used in Operating Activities in 2019 was Rp561,816 million, an increase of 603.43% or equivalent to Rp673,414 million compared to Net Cash Used in Operating Activities in 2018 amounting to Rp 111,599 million. This increase was mainly due to the increased revenue from customers, as explained below.

Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers

Peningkatan Penerimaan dari Pelanggan sebesar 1.402,62% dari Rp40.000 juta di tahun 2018 menjadi Rp601.047 juta per 31 Desember 2019. Peningkatan Penerimaan dari Pelanggan dipengaruhi oleh aktivitas operasi Perseroan yang beroperasi komersial pada kuartal II tahun 2019.

The increase in Revenue from Customers amounted to 1,402.62% from Rp40,000 million in 2018 to Rp601,047 million as of December 31, 2019. The increase in Revenue from Customers was influenced by the Corporation's activities that started its commercial operations in the second quarter of 2019.

Penerimaan dari Subsidi

Receipts from Subsidies

Peningkatan Penerimaan dari Subsidi menjadi Rp427.027 juta per 31 Desember 2019 dipengaruhi oleh kegiatan operasional Perseroan yang mendapatkan subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu subsidi prasarana dan sarana.

The increase in Revenue from Subsidies to Rp427,027 million as of December 31, 2019 was influenced by Corporation's operational activities which received as infrastructure and facilities subsidies from the DKI Jakarta Provincial Government.

Penerimaan Penghasilan Bunga

Receipts from Interest Income

Penurunan Penerimaan Penghasilan Bunga sebesar 15,04% dari Rp35.150 juta di tahun 2018 menjadi Rp29.862 juta per 31 Desember 2019. Penurunan Kas dari Penerimaan Bunga dipengaruhi oleh suku bunga bank deposito yang menurun sesuai dengan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia.

The Interest Income Revenue decreased by 15.04% from Rp35,150 million in 2018 to Rp29,862 million as of December 31, 2019. The decrease of Cash from Interest Revenue was influenced by Lower Deposit Rates from Bank Indonesia.

Pembayaran kepada Pemasok

Payment to Vendors

Peningkatan Pembayaran kepada Pemasok sebesar 284,05% dari Rp90.434 juta di tahun 2018 menjadi Rp347.315 juta per 31 Desember 2019.

The Payments to Vendors increased by 284.05% from Rp90,434 million in 2018 to Rp347,315 million as of December 31, 2019.

Pembayaran kepada Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Payments to Commissioners, Directors, and Employees

Peningkatan Pembayaran kepada Komisaris, Direksi, dan Karyawan sebesar 54,50% dari Rp96.315 juta di tahun 2018 menjadi Rp148.806 juta per 31 Desember 2019 dipengaruhi oleh peningkatan jumlah karyawan yang signifikan dalam mempersiapkan masa komersial bisnis

The Payments to Commissioners, Directors, and Employees increased by 54.50% from Rp96,315 million in 2018 to Rp148,806 million as of 31 December 2019. This increase was influenced by the significant addition of employees in preparing the Corporation for commercial period.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Cash Flow from Investing Activities

| Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cashflow From Investing Activities | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|---|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) | |
| Penambahan Aset Tetap Additions to Fixed Assets | (172.436) | (50.472) | (121.964) | 241,65 | ↑ |
| Penambahan Aset Tak berwujud Additions to Intangible Assets | (17.726) | (13.382) | (4.344) | 32,46 | ↑ |
| Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities | (190.162) | (63.853) | (126.308) | 97,81 | ↑ |

Tabel 5.23
Table 5.23

Kas Bersih yang digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2019 sebesar Rp190.162 juta, meningkat 197,81% atau setara dengan Rp126.308 juta dibandingkan Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi tahun 2018 sebesar Rp63.853 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan perolehan Aset Tetap yang mengalami penambahan sebesar Rp121.964 juta.

Net Cash Used in Investing Activities in 2019 was Rp190,162 million, an increase of 197.81% or equivalent to Rp126,308 million compared to Net Cash Used in Investing Activities in 2018 amounting to Rp63,853 million. This increase was due to Fixed Assets acquisition of Rp121,964 million.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan *Cash Flow from Financing Activities*

Tidak terdapat aktivitas pendanaan di tahun 2019 sehingga Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan tahun 2019 adalah nihil.

There were no funding activities in 2019 so the Net Cash Obtained from Funding Activities in 2019 was nil.

Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Serta Kas dan Setara Kas Akhir Tahun *Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalent and Cash and Cash Equivalent by The End of Year*

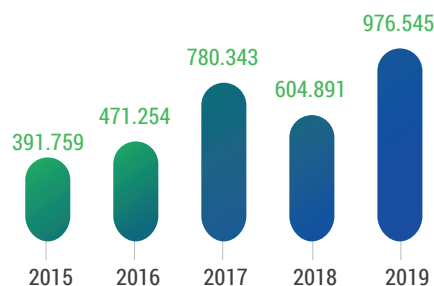
Dengan akumulasi pada Arus Kas dari Aktivitas Operasi dan Arus Kas dari Aktivitas Investasi seperti yang telah diuraikan di atas, Kas dan Setara Kas di sepanjang tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp371.654 juta. Dengan demikian, Kas dan Setara Kas di akhir tahun 2019 sebesar Rp976.545 juta.

With the accumulation of Cash Flows from Operating Activities and Cash Flows from Investment Activities as described above, Cash and Cash Equivalents throughout 2019 increased by Rp371,654 million. Accordingly, Cash and Cash Equivalents at the end of 2019 amounted to Rp976,545 million.

Perkembangan Kas dan Setara Kas Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

The progress of Corporation's Cash and Cash Equivalents can be seen in the chart below.

PERKEMBANGAN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 2015-2019 (RP-JUTA)
Progress of Cash and Cash Equivalents End of Year 2015-2019 (Rp-Million)



Grafik 5.14
Graphic 5.14

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

ABILITY TO PAY DEBT AND ACCOUNT RECEIVABLE COLLECTIBILITY

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

ABILITY TO PAY DEBT

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dapat diukur dengan menggunakan Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas. Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan Perseroan membayar seluruh utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendek.

The Corporation's ability to meet its obligations can be measured using the Solvency Ratio and the Liquidity Ratio. The Solvency Ratio is a ratio that measures the ability of the Corporation to pay all its debts, both short and long term. While the Liquidity Ratio is a ratio to measure the ability of the Corporation to pay its short-term debt.

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas dan Setara Kas}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}} = \frac{\text{Cash and Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{(Aset Lancar - Persediaan)}}{\text{Liabilitas Jangka Pendek}} = \frac{\text{(Current Assets - Inventory)}}{\text{Current Liabilities}}$$

RASIO LIKUIDITAS

Liquidity Ratio

| Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cashflow From Investing Activities | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) | |
| Kas dan Setara Kas (Rp-juta) Cash and Cash Equivalent (Rp-million) | 976.545 | 604.890 | 371.654 | 61,44 | ↑ |
| Persediaan (Rp-juta) Inventory (Rp-million) | 3.621 | - | 3.621 | - | |
| Aset Lancar (Rp-juta) Current Assets (Rp-million) | 1.185.263 | 616.805 | 568.457 | 92,16 | ↑ |
| Liabilitas Jangka Pendek (Rp-juta) Current Liabilities (Rp-million) | 699.277 | 382.883 | 316.395 | 82,63 | ↑ |
| Rasio Likuiditas Liquidity Ratio | | | | | |
| Rasio Lancar (kali) Current Ratio (times) | 1,69 | 1,61 | 0,08 | 5,22 | ↑ |
| Rasio Kas (kali) Cash Ratio (times) | 1,40 | 1,58 | (0,18) | (11,60) | ↓ |
| Quick Ratio (kali) Quick Ratio (times) | 1,69 | 1,61 | 0,08 | 4,89 | ↑ |

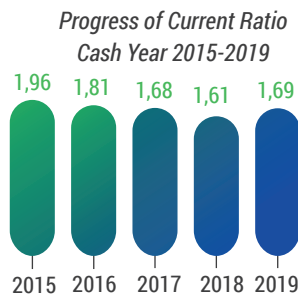
Tabel 5.24

Table 5.24

Kemampuan membayar Utang Jangka Pendek Perseroan dicerminkan dengan Rasio Likuiditas dimana tingkat likuiditas dapat dilihat dari Rasio Lancar, Rasio Kas dan Rasio Cepat. Rasio Lancar mengalami peningkatan dari 1,61 kali di tahun 2018 menjadi 1,69 kali di tahun 2019. Rasio Kas mengalami penurunan dari 1,58 kali di tahun 2018 menjadi 1,40 kali di tahun 2019, sedangkan Rasio Cepat mengalami peningkatan dari 1,61 kali di tahun 2018 menjadi 1,69 kali di tahun 2019. Hal ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka pendek yang dimiliki.

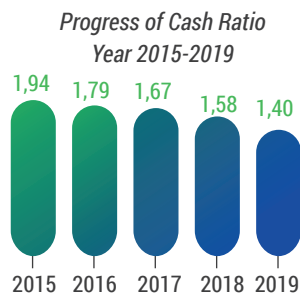
The ability to pay Current Liabilities of the Corporation is reflected by the Liquidity Ratio, where the level of liquidity can be seen from the Current Ratio, Cash Ratio and Quick Ratio. Current Ratio has increased from 1.61 times in 2018 to 1.69 times in 2019. Cash Ratio has decreased from 1.58 times in 2018 to 1.40 times in 2019, while the Quick Ratio has increased from 1.61 times in 2018 to 1.69 times in 2019. This shows the Corporation's ability to pay its Current Liabilities.

PERKEMBANGAN RASIO LANCAR KAS TAHUN 2015-2019



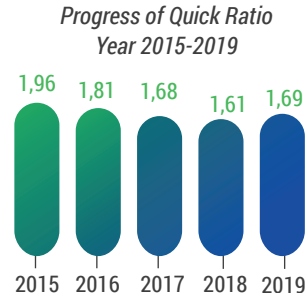
Grafik 5.15
Graphic 5.15

PERKEMBANGAN RASIO KAS TAHUN 2015-2019



Grafik 5.16
Graphic 5.16

PERKEMBANGAN RASIO CEPAT TAHUN 2015-2019



Grafik 5.17
Graphic 5.17

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas} / \text{Total Liabilities}}{\text{Ekuitas Neto} / \text{Net Equity}}$$

$$\text{Debt to Asset Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas} / \text{Total Liabilities}}{\text{Total Aset} / \text{Total Assest}}$$

RASIO SOLVABILITAS

Solvability Ratio

| | 2019 | 2018 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | | |
|---|------------|------------|---|---------------------------------|---|
| | | | Nominal Total | Persentase Percentage (%) | |
| Jumlah Aset (Rp-juta) <i>Total Assets (Rp-million)</i> | 17.353.407 | 13.413.899 | 3.939.507 | 29,37 | ↑ |
| Jumlah Utang Jangka Pendek (Rp-juta) <i>Total Current Liabilities (Rp-million)</i> | 699.277 | 382.883 | 316.394 | 82,63 | ↑ |
| Jumlah Utang Jangka Panjang (Rp-juta) <i>Total Non-Current Liabilities (Rp-million)</i> | 657.367 | 748.155 | (90.788) | (12,13) | ↓ |
| Jumlah Liabilitas (Rp-juta) <i>Total Liabilities (Rp-million)</i> | 1.356.644 | 1.131.037 | 225.606 | 19,95 | ↑ |
| Ekuitas Net (Rp-juta) <i>Net Equity (Rp-million)</i> | 15.996.763 | 12.282.862 | 3.713.901 | 30,24 | ↑ |
| Rasio Solvabilitas <i>Solvability Ratio</i> | | | | | |
| Rasio Solvabilitas (kali) <i>Solvability Ratio (times)</i> | 12,79 | 11,86 | 0,93 | 7,86 | ↑ |
| Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas (kali) <i>Liability to Equity Ratio (times)</i> | 0,08 | 0,09 | (0,01) | (7,90) | ↓ |
| Rasio Utang Jangka Pendek Terhadap Ekuitas (kali) <i>Short-term Debt to Equity Ratio (times)</i> | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 40,23 | ↑ |
| Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Ekuitas (kali) <i>Long-term Debt to Equity Ratio (times)</i> | 0,04 | 0,06 | (0,02) | (32,53) | ↓ |
| Rasio Utang Terhadap Aset (kali) <i>Debt to Assets Ratio (times)</i> | 0,08 | 0,08 | - | - | |

Tabel 5.25
Table 5.25

Kemampuan membayar Utang Jangka Panjang maupun Jangka Pendek Perseroan terlihat dari Rasio Solvabilitas yang terdiri dari Rasio Utang terhadap Modal atau Ekuitas, atau *Debt to Equity Ratio* (DER), baik Utang Jangka Pendek maupun Utang Jangka Panjang, maupun Rasio Utang terhadap Aset, atau *Debt to Asset Ratio* (DAR).

The ability to Pay Current and Non-Current Liabilities of the Corporation can be seen from the Solvency Ratio which consist of Debt to Capital or Equity Ratios (DER), both for Current and Non-Current Liabilities, and Debt to Asset Ratio (DAR).

Rasio Utang terhadap Ekuitas Perseroan tahun 2019 sebesar 0,08 kali, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,09 kali. Rasio Utang Jangka Pendek terhadap Ekuitas tahun 2019 Sebesar 0,04 kali mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,03 kali, dan rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas Perseroan tahun 2019 sebesar 0,04 kali, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 0,06 kali. Hal ini menunjukkan strategi Perseroan yang cermat dalam menjaga kemampuan membayar utang jangka pendek dan jangka panjangnya.

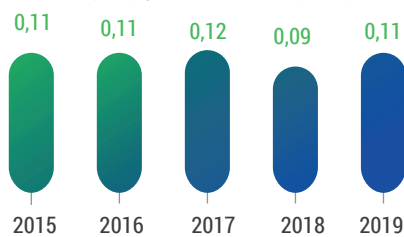
Debt to Equity of the Corporation in 2019 is 0.08 times, decreased compared to 0.09 times in 2018. Ratio of Current Liabilities to Equity in 2019 is 0.04 times, an increase compared to 0.03 times in 2018; and the ratio of Non-Current Liabilities to the Corporation's Equity in 2019 is 0.04 times, decreased compared to 0.06 times in 2018. This ratios show the Corporation's prudent strategy in maintaining its ability to pay Current and Non-Current Liabilities.

Sedangkan rasio Utang terhadap Aset Perseroan tahun 2019 sebesar 0,08 kali, seperti tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan dalam membayar utang dengan menggunakan asetnya.

Meanwhile the ratio of Debt to Assets of Corporate in 2019 was 0.08 times, the same as that in 2018. This shows that the Corporate has the ability to pay liabilities using its assets.

PERKEMBANGAN DEBT TO EQUITY RATIO (DER) TAHUN 2015-2019 (KALI)

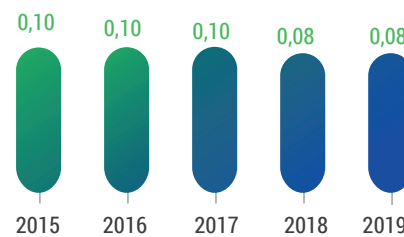
Progress of Debt to Equity Ratio (DER) year 2015-2019 (times)



Grafik 5.18
Graphic 5.18

PERKEMBANGAN DEBT TO ASSET RATIO (DAR) 2015-2019 (KALI)

Progress of Debt to Asset Ratio (DAR) year 2015-2019 (times)



Grafik 5.19
Graphic 5.19

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

COLLECTIBILITY OF ACCOUNTS RECEIVABLE

Kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang dapat diketahui dengan menghitung Lama Penagihan Rata-rata atau *Collection Period* serta Rasio Perputaran Piutang. Semakin kecil nilai *Collection Period* menunjukkan kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutang semakin cepat.

The ability of a Corporation to collect receivables can be determined by calculating the Average Collection Period or Receivable Turnover Ratio. The smaller the value of the Collection Period shows the Corporation's ability to collect receivables faster.

$$\text{Lama Penagihan Rata-rata} = \frac{\text{Piutang Usaha}}{\text{Pendapatan Usaha}} \times 365 \text{ hari/days}$$

Average Collection Period

$$\text{Rasio Perputaran Piutang} = \frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Piutang Usaha}}$$

Receivables Turnover Ratio

Berikut disampaikan piutang usaha yang dimiliki Perseroan di tahun 2019.

The following is the trade receivables of the Corporation in 2019.

PIUTANG USAHA PERSEROAN TAHUN 2019

The Trade Receivables of the Corporation in 2019

| | 2019 | 2018 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|--------|------|---|---------------------------|
| | | | Nominal Total | Persentase Persentase (%) |
| Piutang Usaha Pihak Berelasi <i>Trade Receivable Related Party</i> | 4 | - | - | - |
| Piutang usaha Pihak Ketiga <i>Trade Receivable Third Party</i> | 78.189 | - | - | - |
| Jumlah Piutang Usaha <i>Total Trade Receivable</i> | 78.193 | - | - | - |

Tabel 5.26
Table 5.26

Di bawah ini disampaikan label Tingkat Kolektibilitas Piutang Perseroan.

Below is presented a table of the Corporation's Receivables Collectibility Levels.

RASIO TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG*Receivable Collectibility Rate Ratio*

| | 2019 | 2018 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|---------|------|---|------------------------------|
| | | | Nominal Total | Persentase Percentage (%) |
| Piutang Usaha (Rp-juta) <i>Receivable (Rp - million)</i> | 78.193 | - | - | - |
| Pendapatan (Rp-juta) <i>Operating Revenue (Rp - million)</i> | 933.230 | - | - | - |
| Lama Penagihan Rata-rata (hari) <i>Average Collectible Period (days)</i> | 30,58 | - | - | - |
| Rasio Perputaran Piutang (kali) <i>Receivables Turnover Ratio (times)</i> | 0,08 | - | - | - |

Tabel. 5.27
Table. 5.27

Di tahun 2018, Perseroan belum membukukan Pendapatan dan Piutang Usaha. Perseroan baru membukukan Pendapatan dan Piutang Usaha di tahun 2019 pasca beroperasinya MRT secara komersil pada 1 April 2019. Lama penagihan rata-rata tahun 2019 sebesar 30,58 hari, sedangkan Rasio Perputaran Piutang sebesar 0,08 kali. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif dari penurunan nilai piutang dan seluruh saldo Piutang Usaha tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

In 2018, the Corporation has not yet recorded Revenue and Trade Receivables. The Corporation recorded Revenues and Accounts Receivable in 2019 after the commercial operation of the MRT on April 1, 2019. The average billing period in 2019 was 30.58 days, while the accounts Receivable Turnover Ratio was 0.08 times. Management believes that there is no objective evidence of impairment of receivables and that all Trade Receivable balances are collectible so no allowance or impairment is required.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL**CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY FOR CAPITAL STRUCTURE****Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Perseroan****Management Policy for Corporation's Capital Structure**

Dalam mengelola permodalannya, Perseroan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi Pemegang Saham, dengan mempertimbangkan:

1. Efisiensi penggunaan modal berdasarkan Arus Kas yang digunakan untuk kegiatan operasi.
2. Pengeluaran modal dan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

In managing its capital, the Corporation always maintains business continuity and maximizes the benefits for shareholders and other stakeholders. The corporation actively and routinely reviews and manages its capital to ensure optimal capital structure and optimal returns for shareholders, by taking into consideration:

1. *Efficiency of capital usage based on Cash Flow used for operating activities*
2. *Capital expenditures and future capital requirements.*

Struktur Modal Perseroan Corporate Capital Structure

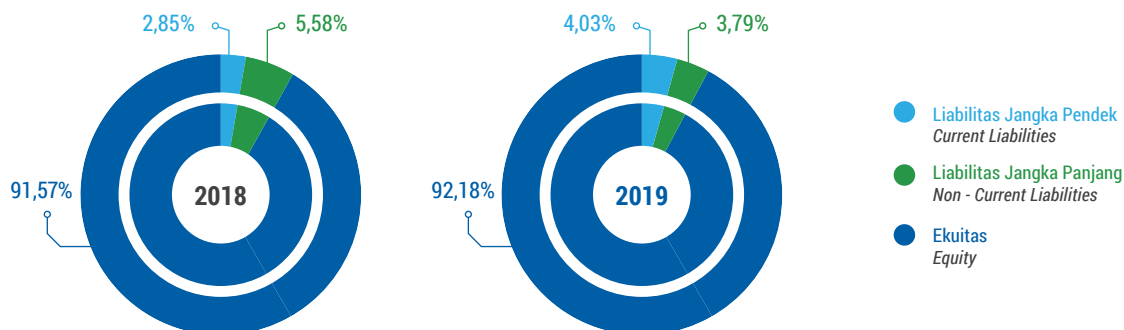
Struktur Modal Perseroan tahun 2019 yang terdiri dari utang berbasis bunga dan ekuitas dan perbandingannya dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

The Corporation's Capital Structure in 2019 consists of interest and equity-based debt, and the comparison with 2018 is as follows.

RASIO TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG Capital Structure and The Changes

| Struktur Modal Capital Structure | 2019 | | 2018 | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| | Jumlah Total (Rp-Juta Million) | Kontribusi Contribution (%) | Jumlah Total (Rp-Juta Million) | Kontribusi Contribution (%) | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) |
| | (1) | (2) | (2) | (3) | (3-1-2) | (3/2) |
| Liabilitas Liability | | | | | | |
| Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities | 699.277 | 4,03 | 382.882 | 2,85 | 316.395 | 82,64 |
| Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities | 657.367 | 3,79 | 748.155 | 5,58 | (90.788) | (12,13) |
| Jumlah Liabilitas Total Liabilities | 1.356.644 | 7,82 | 1.131.037 | 8,43 | 225.606 | 19,95 |
| Ekuitas Neto Net Equity | 15.996.763 | 92,18 | 12.282.862 | 91,57 | 3.713.901 | 30,24 |
| Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity | 17.353.407 | 100,00 | 13.413.899 | 100,00 | 3.939.508 | 29,37 |

Tabel. 5.28
Table. 5.28



Grafik. 5.20
Graphic. 5.20

Seperti terlihat pada label dan bagan di atas, Struktur Modal Perseroan didominasi oleh Ekuitas yang berkontribusi hingga 91,57% di tahun 2018 dan 92,18% di tahun 2019.

As shown in the table and chart above, the Corporation's Capital Structure is dominated by Equity, which contributed up to 91.57% in 2018 and 92.18% in 2019.

Pendanaan Proyek MRT Jakarta

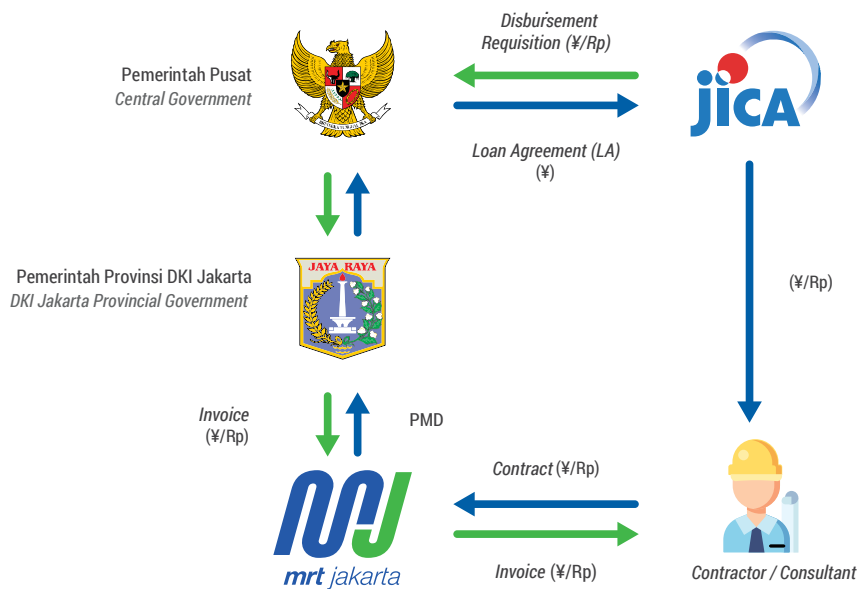
Funding for MRT Jakarta Project

Pendanaan untuk pekerjaan kontraktor dan jasa konsultan proyek MRT Jakarta bersumber dari Pinjaman Luar Negeri JICA oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diterus-hibahkan dan diterus-pinjamkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan ini kemudian diteruskan kepada PT MRT Jakarta melalui Penyerahan Modal Daerah.

The Project of MRT Jakarta Construction Works and Consulting Services was funded under JICA Loans by the Government of The Republic of Indonesia which was then given as on-granting and on-lending funds to the DKI Jakarta Provincial Government. The funding is later conveyed to PT MRT Jakarta through Regional Capital Participation.

Berikut adalah skema penerusan hibah dan pinjaman JICA ke Pemerintah RI lalu diterus-hibahkan dan pinjamkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

The following is the scheme of how JICA grants and loans are forwarded to the Government of the Republic of Indonesia and then to be later forwarded to the DKI Jakarta Provincial Government:



Figur. 5.2
Figure. 5.2

Pendanaan untuk pekerjaan kontraktor dan jasa konsultan proyek MRT Jakarta bersumber dari Pinjaman Luar Negeri JICA oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diterus-hibahkan dan diterus-pinjamkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan ini kemudian diteruskan kepada PT MRT Jakarta melalui Penyerahan Modal Daerah.

The Project of MRT Jakarta Construction Works and Consulting Services was funded under JICA Loans by the Government of the Republic of Indonesia which was then given as on-granting and on-lending funds to the DKI Jakarta Provincial Government. The funding is later conveyed to PT MRT Jakarta through Regional Capital Participation.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Selama tahun 2019, Perusahaan tidak memiliki Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal. Oleh karena itu, Perseroan tidak memiliki informasi mengenai nama pihak yang melakukan ikatan, tujuan dari ikatan tersebut, sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut, dan langkah-langkah yang direncanakan Perseroan untuk melindungi risiko dari posisi pihak lain.

During 2019, the Corporation has no Material Commitments for Capital Goods Investment. Therefore, the Corporation has no information about the party that entered into the agreement, the purpose of the agreement, the source of funds to fulfill the agreement and the Corporation's plan to mitigate the risk from other party's position.

REALISASI INVESTASI BARANG MODAL REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENT

Berikut realisasi investasi yang dilakukan Perseroan di sepanjang tahun 2019.

The following is the realization of investments made by the Corporation throughout 2019.

REALISASI INVESTASI PERSEROAN DI TAHUN 2019 Realization of Investments by Corporate in 2019

| Investasi Barang Modal Capital Goods Investment | Tujuan Purpose | Nilai Value (Rp-Juta Million) |
|---|--|-------------------------------------|
| Peralatan Pemeliharaan Maintenance Equipment | Investasi pada peralatan pemeliharaan sarana dan prasarana MRT pasca beroperasi secara penuh Investment on MRT's maintenance equipment for facilities and infrastructures, after full operation | 2.153 |
| Peralatan dan Perabotan Kantor Office Equipment and Furnitures | Fasilitas pendukung kegiatan perkantoran Facilities to support office activities | 12.122 |
| Jumlah Total | | 14.274 |

Tabel. 5.28
Table. 5.28

Investasi Barang Modal mengalami kenaikan 1.192,93% atau setara dengan Rp13.170 juta, dari Rp1.104 juta di tahun 2018 menjadi Rp14.274 juta di tahun 2019. Beroperasinya MRT memberikan dampak yang besar terhadap Investasi Barang Modal Perseroan.

Capital Goods Investment increased 1,192.93% or equivalent to Rp13,170 million, from Rp1,104 million in 2018 to Rp14,274 million in 2019. The operation of MRT has a large impact on the Corporation's Capital Goods Investment.

INVESTASI BARANG MODAL PERSEROAN Corporate's Capital Goods Investment

| Struktur Modal Capital Structure | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) |
| Realisasi Investasi Barang Modal Realization of Capital Goods Investment | 14.274 | 1.104 | 13.170 | 1.192,93 ↑ |

Tabel. 5.29
Table. 5.29

DAMPAK NILAI MATA UANG ASING BAGI KINERJA PERSEROAN IMPACT OF FOREIGN EXCHANGE ON CORPORATION'S PERFORMANCE

Perseroan mencatatkan realisasi Laba Selisih Kurs pada akhir tahun 2019 sebesar Rp48.213 juta. Selain Rupiah, transaksi Perseroan juga menggunakan mata uang Yen Jepang dalam melakukan pencatatan hutang atas invoice dan uang muka konstruksi dan konsultan. Pencatatan atas transaksi tersebut dikonversi ke dalam mata uang Rupiah sesuai tanggal invoice, menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Yen Jepang pada saat tanggal pembayaran (drawdown Joan) dari JICA ke kontraktor menyebabkan terjadinya selisih kurs pada pencatatan akuntansi.

The Corporation recorded gains on Foreign Exchange at the end of 2019 amounting to Rp48,213 million. Apart from Rupiah, the Corporation also use Japanese Yen to make transaction like recording debts on invoices and advances for construction and consultant. The transaction in Japanese Yen is converted into Rupiah according to the invoice date, the strengthening of Indonesia Rupiah against Japanese Yen at the time of payment (draw down loan) from JICA to the contractor, will cause foreign exchange difference in the accounting records.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

INFORMATION AND MATERIAL FACTS OCCURED AFTER THE DATE OF ACCOUNTANT REPORTS

Berikut disampaikan informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2019 hingga tanggal laporan akuntan 12 Maret 2020.

1. Pada tanggal 12 Februari 2020, berdasarkan Akta Notaris Nannete Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 11, Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendirikan badan usaha patungan dengan nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ("MITJ") dengan masing-masing kepemilikan saham 51% (PT MRT Jakarta (Perseroda)) dan 49% (PT KAI (Persero)).
2. Pada tanggal 14 Februari 2020, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja sama Paket Pekerjaan CP201 Rancang Bangun Bangunan Bawah Tanah - Pekerjaan Sipil 1 - berlokasi di sepanjang KP 15K+123 hingga KP 17K+800 pada proyek MRT Jakarta Fase 2 dengan Shimizu - Adhi Karya *Joint Venture*. Perjanjian tersebut berlaku selama 58 bulan sejak perjanjian efektif. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar ¥ 3.746.033.751 dan Rp4.038.472.467.522 (termasuk pajak).
3. Berdasarkan keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler tanggal 21 Februari 2020, para Pemegang Saham telah menyetujui pemberhentian Sdr. Tuhayat selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi. Berdasarkan keputusan tersebut, Perseroan mengangkat Sdri. Silvia Halim sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/11/BOD-MRT/II/2020 tanggal 21 Februari 2020.

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi sejak periode tanggal laporan akuntan hingga diterbitkannya laporan tahunan ini.

The following is material information and facts that occurred between the end of reporting period December 31, 2019 and the accountant's report date March 12, 2020.

1. *On February 12, 2020, based on Notarial Deed of Nannete Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 11, the Corporation and PT Kereta Api Indonesia (Persero) established a joint venture under the name PT Mada Integration of Jabodetabek Transportation ("MITJ"), with 51% (PT MRT Jakarta (Perseroda)) and 49% (PT KAI (Persero)) ownership respectively.*
2. *On February 14, 2020, t h e Corporation signed the CP201 Work Package Cooperation Agreement 'Underground Building Design' - Civil Works 1 - located along the KP. 15K + 123 until KP. 17K + 800, in Phase 2 of MRT Jakarta project, with Shimizu - Adhi Karya Joint Venture. The agreement is valid for 58 months from the effective date of agreement. The contract value is ¥ 3,746,033,751 and Rp4,038,472,467,522 (including tax).*
3. *Based on Shareholders' Decree outside the Circular General Meeting of Shareholders on 21 February 2020, Shareholders have agreed to the dismissal of Mr. Tuhayat as Director of Finance and Corporate Management. Based on this decision, Corporate appointed Ms. Silvia Halim as Acting Director (Plt) Director of Finance and Corporate Management, through The Directors Decree No. SK / 11 / BOD-MRT / II / 2020 dated February 21, 2020.*

There is no material information and facts that occurred from the period of the accountant's report date until the publication of this annual report.

PENCAPAIAN TARGET/PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 DAN PROYEKSI TAHUN 2020

TARGET ACHIEVEMENT / BUDGET ABSORPTION 2019 AND PROJECTION FOR 2020

Berikut disampaikan tabel keseluruhan untuk perbandingan realisasi tahun 2019, target tahun 2019 dan pencapaian realisasinya, serta proyeksi tahun 2020.

The following table presents the overall table for comparison of the realization of 2019, the 2019 target and the achievement of its realization, and the 2020 projection.

PERBANDINGAN REALISASI DENGAN TARGET DI TAHUN 2019, DAN PROYEKSI 2020

Comparison of The Realization with Target in 2019, and The 2020 Projection

| | Realisasi 2019 Realization 2019 | Target 2019 Target 2019 | Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019 Realization Achievement vs 2019 Target (%) | Proyeksi 2020 Projection 2020 | Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019 2020 Projection Against 2019 Realization (%) | Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019 2020 Projection Against 2019 Target (%) |
|---|------------------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| | (1) | (2) | (1:2) | (3) | (3:1) | (3:2) |
| Operasi <i>Operations</i> | | | | | | |
| Rata-rata Jumlah Pengguna Jasa per hari <i>Average Number of Passengers per day</i> | 89.645 | 65.000 | 137,92 | 100.000 | 111,55 | 153,85 ↑ |
| Komersial & Ritel <i>Commercial & Retail</i> | | | | | | |
| Jumlah Iklan dalam Stasiun <i>Number of Advertising in Station</i> | 13 | 13 | 100,00 | 13 | 100,00 | 100,00 |
| Jumlah Iklan di Rolling Stock <i>Number of Advertising in Rolling Stock</i> | 16 | 16 | 100,00 | 16 | 100,00 | 100,00 |
| Jumlah Iklan Media Luar Ruang Media Pillar <i>Number of Outside Media Advertising in Media Pillar Space</i> | - | - | - | 141 | - | - |
| Jumlah Iklan Media Luar Ruang Media CTVT (<i>Cooling Tower & Ventilation Tower</i>) <i>Number of outside Media Advertising in Media CTVT</i> | - | - | - | 15 | - | - |

| | Realisasi 2019 <i>Realization 2019</i> | Target 2019 <i>Target 2019</i> | Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019 <i>Realization Achievement vs 2019 Target</i> (%) | Proyeksi 2020 <i>Projection 2020</i> | Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019 <i>2020 Projection Against 2019 Realization</i> (%) | Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019 <i>2020 Projection Against 2019 Target</i> (%) |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---|---|
| | (1) | (2) | (1:2) | (3) | (3:1) | (3:2) |
| Hak Penamaan Stasiun <i>Naming Rights</i> | 5 | 5 | 100,00 | 7 | 140,00 | 140,00 |
| <i>Acceptance Card</i> | 5 | 5 | 100,00 | 5 | 100,00 | 100,00 |
| <i>QR Code</i> | - | - | - | 4 | - | - |
| Jumlah Retail UMKM <i>Number of MSME's Retailer</i> | 12 | 12 | 100,00 | 35 | 291,67 | 291,67 |
| Jumlah Mitra Ritel (di luar UMKM dan IKM) <i>Number of Retail Partner (non MSMEs and /KM)</i> | 34 | 25 | 100,00 | 34 | 136,00 | 136,00 |
| Sumber Daya Manusia <i>Human Capital</i> | | | | | | |
| Jumlah Karyawan (orang) <i>Number of Personnel (people)</i> | 676 | 740 | 91,35 | 780 | 115,38 | 105,41 |
| Labanya (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain (Rp-juta) <i>Profit (Loss) & Other Profit (Loss) & Other Comprehensive Income (Rp-million)</i> | | | | | | |
| Pendapatan Farebox <i>Farebox Income</i> | | | | | | |
| Pendapatan Tiket <i>Farebox Revenue</i> | 191.552 | 169.000 | 113,34 | 292.000 | 152,44 | 172,78 |
| Pendapatan Subsidi Pemprov DKI Jakarta <i>Subsidy from DKI Jakarta Provincial Government</i> | 534.070 | 512.863 | 104,14 | 938.000 | 175,63 | 182,89 |
| Pendapatan Non-Tiket <i>Non-Farebox Revenues</i> | 207.608 | 94.275 | 220,22 | 421.000 | 202,79 | 446,57 |
| Total Pendapatan <i>Total Revenues</i> | 933.230 | 776.138 | 120,24 | 1.651.000 | 176,91 | 212,72 |

| | Realisasi 2019 <i>Realization 2019</i> | Target 2019 <i>Target 2019</i> | Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019 <i>Realization Achievement vs 2019 Target</i> (%) | Proyeksi 2020 <i>Projection 2020</i> | Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019 <i>2020 Projection Against 2019 Realization</i> (%) | Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019 <i>2020 Projection Against 2019 Target</i> (%) |
|---|---|-----------------------------------|---|--|---|---|
| | (1) | (2) | (1:2) | (3) | (3:1) | (3:2) |
| Beban Pokok Pendapatan <i>Total Cost of Revenues</i> | | | | | | |
| Penyusutan <i>Depreciation</i> | (388.170) | (390.167) | 99,49 | (519.261) | 133,77 | 133,09 ↑ |
| Keamanan dan kebersihan <i>Safety and hygiene</i> | (102.876) | (103.672) | 99,23 | (147.600) | 143,47 | 142,37 |
| Gaji dan kesejahteraan karyawan <i>Salaries and employees welfare</i> | (94.628) | (95.342) | 99,25 | (137.422) | 145,22 | 144,14 ↑ |
| Energi dan utilitas <i>Energy and utility</i> | (92.528) | (110.512) | 83,73 | (157.854) | 170,60 | 142,84 ↑ |
| Asuransi <i>Insurance</i> | (20.675) | (33.024) | 62,61 | (29.397) | 142,19 | 89,02 ↓ |
| Pemeliharaan <i>Maintenance</i> | (12.525) | (24.693) | 50,72 | (34.076) | 272,06 | 138,00 ↑ |
| Keperluan rumah tangga, Pajak Bumi dan Bangunan, serta denda dan sanksi subsidi <i>Household appliances, Land and Property Tax, and penalty on subsidy</i> | (49.013) | (30.110) | 162,78 | (136.554) | 278,61 | 453,52 ↑ |
| Beban Pokok Pendapatan <i>Cost of Revenues</i> | (760.415) | (787.520) | 96,56 | (1.162.164) | 152,83 | 147,57 ↑ |
| Laba (Rugi) Kotor <i>Gross Profit (Loss)</i> | 172.815 | (11.382) | 1.618,32 | 488.837 | 282,87 | 4.394,82 ↑ |
| Total Beban Umum dan Administrasi <i>General and Administrative Expense</i> | (221.750) | (237.927) | 93,20 | (279.326) | 125,96 | 117,40 ↑ |
| Laba (Rugi) Usaha <i>Operating Profit (Loss)</i> | (48.935) | (249.309) | 19,63 | 209.511 | 528,14 | 184,04 ↑ |

| | Realisasi 2019 <i>Realization 2019</i> | Target 2019 <i>Target 2019</i> | Pencapaian Realisasi Terhadap Target 2019 <i>Realization Achievement vs 2019 Target</i> (%) | Proyeksi 2020 <i>Projection 2020</i> | Proyeksi 2020 Terhadap Realisasi 2019 <i>2020 Projection Against 2019 Realization</i> (%) | Proyeksi 2020 Terhadap Target 2019 <i>2020 Projection Against 2019 Target</i> (%) |
|--|---|-----------------------------------|---|--|---|---|
| | (1) | (2) | (1:2) | (3) | (3:1) | (3:2) |
| Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expenses)</i> | 195.639 | (15.788) | 1.339,16 | 19.514 | 9,97 | 223,60 ↑ |
| Penghasilan (Rugi) Komprehensif <i>Comprehensive Income (Loss)</i> | 146.704 | (265.097) | 155,34 | 229.025 | 156,11 | 186,39 ↑ |
| Posisi Keuangan (Rp-Juta) <i>Financial Position (Rp-Million)</i> | | | | | | |
| Aset <i>Assets</i> | | | | | | |
| Total Aset Lancar <i>Total Current Assets</i> | 1.185.263 | 558.801 | 212,11 | 1.583.691 | 133,62 | 283,41 ↑ |
| Total Aset Tidak Lancar <i>Total Non-Current Assets</i> | 16.168.144 | 16.681.330 | 96,92 | 18.711.842 | 115,73 | 112,17 ↑ |
| Total Aset <i>Total Assets</i> | 17.353.407 | 17.240.131 | 100,66 | 20.295.534 | 116,95 | 117,72 ↑ |
| Liabilitas dan Ekuitas <i>Liabilities and Equity</i> | | | | | | |
| Total Liabilitas Jangka Pendek <i>Total Current Liabilities</i> | 699.277 | 37.7164 | 1.881,58 | 644.508 | 92,17 | 1.734,23 ↑ |
| Total Liabilitas Jangka Panjang <i>Total Non-Current Liabilities</i> | 657.367 | 722.890 | 90,94 | 553.406 | 84,19 | 76,55 ↓ |
| Total Liabilitas <i>Total Liabilities</i> | 1.356.644 | 760.054 | 178,49 | 1.197.915 | 88,30 | 157,61 ↑ |
| Ekuitas Neto <i>Net Equity</i> | 15.996.763 | 16.480.077 | 97,07 | 19.097.619 | 119,38 | 115,88 ↑ |
| Total Liabilitas dan Ekuitas <i>Total Liabilities and Equity</i> | 17.353.407 | 17.240.131 | 100,66 | 20.295.534 | 116,95 | 117,72 ↑ |

Tabel. 5.30
Table. 5.30

PENCAPAIAN TARGET/PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 TARGET ACHIEVEMENTS / BUDGET ABSORPTION IN 2019

Operasi Operation

Perseroan menargetkan rata-rata jumlah pengguna jasa pada angka 65.000 per harinya di tahun 2019. Pada akhir tahun 2019, MRT Jakarta berhasil melampaui target rata-rata jumlah pengguna jasa harian di angka 89.645 pengguna jasa per hari atau 37,92% lebih tinggi dari target. Berbagai upaya dilakukan Perseroan untuk memenuhi target tersebut. Mulai dari pemberian promo gratis perjalanan menggunakan MRT Jakarta pada minggu pertama operasi (24 Maret 2019-31 Maret 2019), lalu juga promo tarif 50% selama 1 (satu) bulan penuh mulai dari 1 April 2019-30 April 2019. Pada hari biasa atau hari kerja, mayoritas pengguna jasa MRT adalah pekerja yang kantornya ada di sepanjang jalur MRT (Lebak Bulus-Bundaran HI). Sedangkan di penghujung minggu mayoritas pengguna jasa dipicu oleh adanya aktivitas *Car Free Day* dan acara-acara besar yang diadakan di sepanjang jalur MRT.

Lonjakan pengguna jasa secara signifikan terjadi pada bulan Juli dan Desember, di mana kedua bulan ini adalah periode liburan sekolah, libur Natal dan libur akhir tahun. Banyak juga masyarakat yang memanfaatkan hari libur tersebut untuk mencoba moda transportasi MRT pertama di Indonesia ini dengan keluarga, teman-teman, dan grup-grup lainnya. Selain dengan didukungnya kenaikan jumlah pengguna jasa oleh faktor-faktor tersebut, upaya Perseroan dalam memastikan aspek pelayanan bermutu dan keselamatan pengguna jasa menjadi hal yang sangat krusial. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana MRT dilakukan secara rutin dan menyeluruh agar kenyamanan pengguna jasa terjamin dan konsisten di setiap perjalanannya. *On-time Performance* kereta yang mendekati sempurna di sepanjang tahun 2019 juga memicu kepercayaan masyarakat untuk menggunakan moda transportasi MRT Jakarta.

Komersial & Ritel Commercial & Retail

Komersial Commercial

Pada tahun 2019, Perseroan menargetkan terisinya ruang iklan di seluruh stasiun MRT Jakarta (Stasiun Lebak Bulus Grab – Stasiun Bundaran HI) dan berhasil mencapai 100% target tersebut. Pemasangan media iklan dilakukan oleh Mitra Strategis Layanan Periklanan Area Stasiun MRT Jakarta Fase 1, PT Avabanindo Perkasa (Otego Media), yang memiliki hak untuk mengoperasikan dan mengelola seluruh inventori media periklanan di 13 (tiga belas) stasiun dan 16 (enam belas) sarana (*rolling stock*). Dengan menggunakan skema bagi hasil yang menerapkan minimum garansi di setiap tahunnya, kerja sama dengan Mitra Strategis akan berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun.

The corporation targets an average number of passengers of 65,000 per day in 2019. By the end of 2019, MRT Jakarta has succeeded in exceeding the average daily number of passengers at 89,645 passengers per day or 37.92% higher than target. Many efforts have been made by MRT Jakarta to meet these targets, starting from giving free travel in the MRT in the first week of operation (March 24, 2019 - March 31, 2019), then discount tariff 50% for 1 (one) full month starting from April 1, 2019 - April 30, 2019. On weekdays, the majority of MRT passengers are workers whose offices are along the MRT line (Lebak Bulus - Bundaran HI). While during weekend, the majority of passengers are triggered by Car Free Day activities and major events held along the MRT line.

Significant surge in passengers occurred in July and December, where both months are the period of school holidays, Christmas and year-end holidays. Many people also use the holiday period, to try the MRT for the first time with family, friends and other groups. In addition to passenger increase due to the above factors, MRT Jakarta efforts to ensure the quality of services and passenger safety are becoming crucial. Maintenance activities for MRT facility and infrastructure are carried out routinely and thoroughly to ensure that passenger comfort is guaranteed and consistent on each trip. On-time train performance, which is near to perfection in 2019, has also fueled public confidence in using MRT Jakarta transportation mode.

In 2019, the Corporation set a target to have all advertising spaces in all MRT Jakarta stations (from Lebak Bulus Grab Station to Bundaran HI Station) placed and such target was achieved by 100%. Advertising media placement is carried out by Strategic Partner of Advertising Services in the Operational Area of MRT Jakarta Phase 1, PT Avabanindo Perkasa (Otego Media), which is entitled to operate and manage all advertising inventory in 13 (thirteen) stations and 16 (sixteen) rolling stocks. Through revenue sharing scheme which applies annual minimum guarantee, this partnership will be valid for 20 (twenty) years..

Ritel

Retail

MRT Jakarta mengambil peran sebagai inkubator bisnis bagi pengusaha UMKM lokal di DKI Jakarta. Sebagai operator moda transportasi modern dengan prasarana yang memadai dan sangat berpotensi untuk mendatangkan pengguna jasa maupun pengunjung di stasiun, MRT Jakarta memberikan ruang komersial bagi pelaku UMKM yang memiliki potensi. Target jumlah UMKM pada tahun 2019 adalah 12 (dua belas) usaha yang dibagi menjadi kategori fesyen, kriya, dan kuliner (makanan/minuman). Dalam proses seleksi kurasi ritel UMKM, MRT Jakarta bekerja sama dengan Tenaga Ahli Kurasi (Kurator) BEKRAF. Pengumuman pendaftaran ritel UMKM dimulai dari awal tahun 2019 yang dapat diakses melalui situs resmi Retail UMKM MRT Jakarta (retailumkm.jakartamrt.co.id). Dari 273 lebih pendaftar gerai UMKM di MRT Jakarta, terdapat 12 tenan yang terkurasi, yaitu Broodmet, Lox Salmon, Gorjuice, Delicacies, Lemper Purnama, Kaya Rempah, RA Hijab, Dekranasda DKI Jakarta, Apikmen, Hwan, Batik Shio, dan Komma. Realisasi jumlah Mitra Ritel di 13 stasiun MRT Jakarta mencapai target, yaitu 25 gerai yang mayoritas menyediakan produk makanan dan minuman dengan konsep *grab and go* yang sesuai dengan konsep *rapid transit* MRT Jakarta.

MRT Jakarta takes the role of business incubator for local MSME's entrepreneurs in DKI Jakarta. As the operator of modern transportation with adequate infrastructure and has full potential to attract passengers as well as visitors in stations, MRT Jakarta provides commercial spaces for potential MSME's entrepreneurs. Target number of MSME's in 2019 was 12 (twelve) businesses which consist of fashion, craft and food / beverage categories. During the curation process, MRT Jakarta teamed-up with Curation Expert (Curator) from BEKRAF. The announcement for MSME's registration started in the beginning of 2019 which was accessible at official site of MSME's Retail MRT Jakarta. From more than 273 registrations, there were 12 curated tenants, namely Broodmet, Lox Salmon, Gorjuice, Delicacies, Lemper Purnama, Kaya Rempah, RA Hijab, Dekranasda DKI Jakarta, Apikmen, Hwan, Batik Shio and Komma. Realization of the amount regular retail partner in 13 MRT stations reach the target, namely 25 outlets, in which the majority provide grab and go concept for food and beverage, which goes well with rapid transit concept of MRT Jakarta.

Sumber Daya Manusia

Human Capital

Target Perseroan untuk perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau *Manpower Planning* pada tahun 2019 awalnya sebesar 686 karyawan, namun dengan adanya kegiatan restrukturisasi organisasi pada bulan Juni 2019, target jumlah karyawan bergerak naik menjadi 740 atau 54 lebih tinggi. Jumlah karyawan pada 31 Desember 2019 adalah 676 karyawan atau 91,35% dari target.

The Corporation's target for Human Resources (HR) or Manpower Planning in 2019 was initially 686 employees, but with organization restructuring in June 2019, the target number of employees increased to 740 employees or increased by 54. The number of employees as of 31 December 2019 was 676 employees or 91.35% of the target.

Labanya (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain

Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

Pada tahun 2019 Perseroan membukukan Total Pendapatan sebesar Rp933.230 juta, mencatat pencapaian 120,24% dibandingkan dengan target Total Pendapatan tahun 2019 sebesar Rp776.138 juta. Pencapaian ini disebabkan oleh pencapaian segmen tiket, non-tiket dan subsidi, sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Tiket sebesar Rp191.552 juta, dimana realisasi tersebut melampaui dari yang ditargetkan sebesar Rp169.000 juta.
2. Realisasi Pendapatan Non-tiket sebesar Rp207.608 juta, dimana realisasi tersebut melampaui dari yang ditargetkan sebesar Rp94.275 juta.
3. Realisasi Pendapatan Subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp534.070 juta, dimana realisasi tersebut melampaui dari yang ditargetkan sebesar Rp512.863 juta.

In 2019, the Corporation recorded a Total Income of Rp933,230 million recording an achievement of 120.24% compared to the target of Total Income in 2019 of Rp776,138 million. This achievement was due to the achievement of the ticket,

1. *Farebox revenue realization amounted to Rp191,552 million, where the realization exceeded the target of Rp169,000 million.*
2. *Non-Farebox revenue realization amounted to Rp207,608 million, where the realization exceeded the target of Rp94,275 million.*
3. *The realization of DKI Jakarta Provincial Government subsidized income amounted to Rp534,070 million, where the realization exceeded the targeted amount of Rp512,863 million.*

Selain itu, pada tahun 2019 realisasi Beban Pokok Pendapatan adalah sebesar Rp760.415 juta mencapai 96,56% dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar Rp787.520 juta. Realisasi Beban Pokok Pendapatan tersebut di antaranya berasal dari Beban Penyusutan, Keamanan & Kebersihan, dan Gaji dan Kesejahteraan Karyawan. Atas realisasi Pendapatan dan Beban Pokok Pendapatan tersebut, Perseroan menghasilkan Laba Kotor tahun 2019 sebesar Rp172.815 juta, jauh di atas target Rugi Kotor Rp11.382 juta.

Beban Umum dan Administrasi tersebut diantaranya berasal dari Beban Gaji dan Kesejahteraan Karyawan, Perlengkapan Kantor, dan Pelatihan dan Keanggotaan. Atas Beban Umum dan Administrasi tersebut, Perusahaan membukukan Rugi Usaha sebesar Rp48.935 juta, jauh lebih baik dari target Rugi Usaha sebesar Rp243.309 juta.

Penghasilan Lain-lain pada tahun 2019 sebesar Rp195.639 juta mencapai 1.339,16% dibandingkan dengan target tahun 2019. Penghasilan Lain-lain tersebut berasal dari Penghasilan (Beban) Lain-lain, Beban Pajak Final, Manfaat Penghasilan Pajak Tangguhan, dan Laba Pengukuran Kembali Atas Liabilitas Imbalan Kerja. Atas Rugi Usaha dan Penghasilan Lain-lain tersebut, Perseroan menghasilkan Laba Komprehensif tahun 2019 sebesar Rp146.704 juta, dengan pencapaian 155,34% terhadap target yang masih diproyeksikan Rugi Komprehensif sebesar Rp265.097 juta.

Posisi Keuangan

Financial Position

Pada tahun 2019 Perseroan memiliki Total Aset sebesar Rp17.353.407 juta, mencatat pencapaian 100,66% dengan target 2019 sebesar dibandingkan Rp17.240.131 juta. Pencapaian terutama didapatkan dari penyelesaian konstruksi MRT Fase 1 dan dimulainya konstruksi MRT Fase 2. Untuk Liabilitas pada tahun 2019, Perseroan memiliki Total Liabilitas sebesar Rp1.356.644 juta, atau 178,49% dibandingkan dengan target 2019 sebesar Rp760.054 juta. Total Liabilitas terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp699.277 juta dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp657.367 juta. Tingginya realisasi Total Liabilitas terutama berasal dari Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Pajak. Selain itu pada tahun 2019 Perseroan memiliki Ekuitas Neto sebesar Rp15.996.763 juta, atau 97,07% dibandingkan dengan target 2019 sebesar Rp16.480.077 juta. Realisasi Ekuitas Neto tahun 2019 didapatkan dari penambahan modal disetor lainnya seiring bertambahnya aset MRT karena penyelesaian konstruksi MRT Fase 1 dan dimulainya konstruksi MRT Fase 2.

In addition, in 2019 the realization of Cost of Revenues was Rp760,415 million, reaching 96.56% compared to the 2019 target of Rp787,520 million. Realization of Cost of Revenues among others came from Depreciation Expense, Security and Hygiene, and Salaries and Employee Welfare. Based on the realization of revenue and cost of revenues, the Corporation generated Gross Profit in 2019 of Rp172,815 million, far above the target of Gross Loss of Rp11,382 million.

These General and Administrative Expenses among others came from Salaries and Employee Welfare, Office Supplies, and Training and Membership. For General and Administrative Expenses, the Corporate recorded an Operating Loss of Rp48,935 million, far better than the target of Operation Loss of Rp243,309 million.

Other income in 2019 was Rp195,639 million, reaching 1,339.16% compared to the 2019 target. This other income came from Other Income (Expenses), Final Tax Expenses, Deferred Tax Income Benefits, and Remeasurement Profit from Employee Benefits Liabilities. For Operating Loss and Other Income, the Corporation generated Comprehensive Income in 2019 of Rp146,704 million, with an achievement of 155.34% of the target that is still projected as Comprehensive Loss at Rp265,097 million.

In 2019, the Corporation had Total Assets of Rp17,353,407 million, recording an achievement of 100.66% compared to the 2019 target of Rp17,240,131 million. The achievement was mainly obtained from the completion of MRT Phase 1 construction and commencement of MRT Phase 2 construction. For Liabilities in 2019, the Corporation had Total Liabilities of Rp1,356,644 million, or 178.49% compared to the 2019 target of Rp760,054 million. Total Liabilities consist of Current Liabilities of Rp699,277 million and Non-Current Liabilities of Rp657,367 million. The high realization of Total Liabilities was mainly derived from Unearned Revenue and Taxes Payable. Furthermore in 2019, the Corporation had Net Equity of Rp15,996,763 million, or 97.07% compared to the 2019 target of Rp16,480,077 million. Realization of Net Equity in 2019 was obtained from the addition of other paid-up capital in line with the increase in MRT assets due to the completion of MRT Phase 1 construction and the commencement of MRT Phase 2 construction.

PROYEKSI DAN TARGET TAHUN 2020

PROJECTION AND TARGET 2020

Operasi

Operation

Tahun 2020 akan menjadi tahun kedua MRT Jakarta beroperasi, sehingga capaian Perseroan pada tahun 2019 khususnya dalam kegiatan operasi menjadi fokus untuk aktivitas bisnis ke depannya. Melihat antusiasme masyarakat yang begitu besar di tahun 2019, Perseroan optimis bahwa MRT Jakarta dapat mencapai target rata-rata jumlah pengguna jasa harian yang baru, yakni 100.000 pengguna jasa/hari. Proyeksi tersebut naik sebesar 53,85% dari target tahun 2019 (65.000 pengguna jasa/hari). Strategi maupun rencana program Perseroan dalam mencapai target tersebut adalah dengan tetap menjalankan program Akuisisi, Retensi, dan Integrasi pengguna jasa seperti yang telah dilakukan pada tahun 2019. Kemudian, Hasil *Customer Satisfaction Index* (CSI) 2019 yang mencapai angka 82,78 beserta hasil penelitiannya menjadi salah satu acuan sentral Perseroan dalam mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan, sehingga target pengguna jasa di tahun 2020 dapat tercapai. Selain itu, Perseroan juga akan mengawal kebijakan dan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendukung naiknya penggunaan transportasi publik bagi masyarakat luas, seperti kebijakan kenaikan tarif parkir, kebijakan *Electronic Road Pricing* (ERP), dan program Jak Lingko yang mendukung tercapainya transportasi terintegrasi di DKI Jakarta.

2020 will be the second year of operations for MRT Jakarta, hence the Corporation's achievements in 2019 especially in operational activities will become the focus for future business activities. Looking at the public's great enthusiasm in 2019, the Corporation is optimistic that MRT Jakarta can reach the new target of 100,000 passengers / day. The projection is up by 53.85% from the 2019 target (65,000 passengers / day). The Corporation's strategy and plan to achieve this targets is by continuing to carry out the Acquisition, Retention and Integration program for passengers, as was done in 2019. Then, the 2019 Customer Satisfaction Index (CSI) results of 82.78 along with the research results will become one of the Corporation's main reference in maintaining and improving the quality of customer service so that the target of passengers in 2020 can be achieved. In addition, the Corporation will also guard the policies and commitments of the DKI Jakarta Provincial Government that will support the use of public transportation for larger community, such as the policy to increase parking fees, the Electronic Road Pricing (ERP) policy, and the Jak Lingko program that supports the achievement of an integrated transportation in DKI Jakarta.

Komersial & Retail

Commercial & Retail

Komersial

Commercial

Di tahun 2020, Perseroan menambahkan 2 (dua) kategori ruang media iklan baru, yakni Iklan Media Luar Ruang (*Media Pillar*), dan Media luar Ruang Media CTVT (*Cooling Tower & Ventilation Tower*). Pemanfaatan kedua ruang media iklan baru ini diharapkan dapat menambah kontribusi pendapatan non-tiket di tahun kedua pengoperasian, dengan target 141 ruang iklan di *Media Pillar* dan 15 ruang iklan di CTVT. Mengingat bahwa jalur MRT Jakarta sangat strategis, Perseroan yakin bahwa target pemasangan iklan di kedua kategori ruang media iklan baru ini akan tercapai.

In 2020, the Corporation added 2 (two) categories of new media advertising space, namely Media Pillar Ads and Media CTVT (Cooling Tower & Ventilation Tower). The utilization of the two new advertising media spaces is expected to increase the contribution of non-Farebox Revenues in the second year of operation, with a target of 141 ad space in Media Pillar and 15 ad space in Media CTVT Considering that Jakarta MRT line is very strategic, the Corporation is confident that the target of advertising in the two categories of new advertising media space will be achieved.

Ritel

Retail

MRT Jakarta memiliki 16 booth yang tersebar di 3 stasiun, yaitu Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Fatmawati dan Stasiun Lebak Bulus. Ketiganya merupakan stasiun teramai dan mempunyai lalu lintas yang tinggi. Pada September 2019 dari hasil seleksi tahap 1 dengan BEKRAF direkomendasikan 12 UMKM dan selanjutnya pada Januari 2020 dari hasil seleksi tahap 2 menerima hasil rekomendasi dari BEKRAF dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya dengan Dinas Perindustrian dan Energi sebanyak 8 (delapan) UMKM yang bergabung dalam 2 (dua)

MRT Jakarta has 16 MSME Booths which spread in 3 stations, consisting of Dukuh Atas Station, Fatmawati Station, and Lebak Bulus Station. All the three stations are the most crowded stations and have high traffic passengers. In September 2019 from the first selection result, 12 MSME's were recommended by BEKRAF and continued in January 2020 from the second selection result, as recommended by BEKRAF and Provincial Government of DKI Jakarta, specifically Industry and Energy Department, 8 (eight) MSME's were joined in 2 (two) booths. In March 2020, the

booth. Pada Maret 2020 Perseroan membuka kesempatan seleksi tahap 3 kepada masyarakat Jakarta. Pendaftaran dibuka untuk 15 Brand/UMKM untuk ditempatkan di 3 (tiga) *booth*. Dengan demikian, target tahun 2020 di lokasi 16 *booth* yang tersedia, tercapai *occupancy* 100%, sehingga dari 16 *booth* tersebut Perseroan mampu membina 35 Brand UMKM.

Sumber Daya Manusia *Human Capital*

Pada tahun 2020 yang juga merupakan tahun kedua MRT Jakarta beroperasi, Perseroan menaikkan proyeksi jumlah karyawan menjadi 780 karena adanya tambahan kebutuhan organisasi terutama di Direktorat Operasi dan Pemeliharaan (staf di stasiun, masinis kereta, dan teknisi pemelihara).

Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain *Profit (Loss) and Other Comprehensive Income*

Pada 2020 Perseroan memproyeksikan Total Pendapatan sebesar Rp1.651.000 juta 76,91% jika dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp933.230 juta, atau mencatat pencapaian 212,72% apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar Rp776.138 juta. Pertumbuhan pendapatan Perseroan terutama didorong oleh pengguna jasa MRT yang ditargetkan di tahun 2020 mencapai 100.000 pengguna jasa/hari.

Selain itu, pada tahun 2020 Perseroan juga memproyeksikan total Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp1.162.164 juta, meningkat 52,83% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp760.415 juta, atau meningkat 47,57% target tahun 2019 apabila dibandingkan dengan sebesar Rp787.520 juta. kenaikan Beban Pokok Pendapatan sejalan dengan proyeksi Pendapatan Usaha Perseroan. Atas Proyeksi Pendapatan dan Beban Pokok Pendapatan tersebut, Perseroan memproyeksikan mendapatkan Laba Kotor tahun 2020 sebesar Rp488.837 juta, tumbuh 182,87% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang mencatat Laba Kotor Rp172.815 juta, atau meningkat hingga 4.294,82% jika dibandingkan dengan target tahun 2019 di mana Perseroan masih menganggarkan Rugi Kotor sebesar Rp11.382 juta.

Untuk Beban Umum dan Administrasi, pada tahun 2020 Perusahaan memproyeksikan Beban Umum dan Administrasi Rp279.326 juta, meningkat 25,96% apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Umum dan Administrasi tahun 2019 sebesar Rp221.750 juta, atau meningkat 17,40% apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar Rp237.927 juta. Atas proyeksi Beban Umum dan Administrasi tersebut, Perseroan memproyeksikan Laba Usaha pada tahun 2020 sebesar Rp209.511 juta.

Penghasilan Lain-lain pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp19.514 juta sehingga proyeksi Laba Komprehensif di tahun 2020 sebesar Rp229.025 juta atau meningkat 56,11% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp146.704 juta.

Corporation would open the third selection opportunity to Jakarta people who willing to join. The registration is open for 15 brands / MSME's to be placed in 3 booths. Furthermore, target of 16 booths in 2020 will be 100% occupied and the Corporation will be able to maintain a total 35 MSME brands.

In 2020, being MRT Jakarta's second year in operation, the Corporation raised the projected number of employees to 780, due to additional organizational needs, especially in the Directorate of Operations and Maintenance (station staff, train drivers and maintenance technicians).

In 2020, the Corporation projects a Total Revenue of Rp1,651,000 million, a 76.91% increase compared to the realization in 2019 totaling Rp933,230 million, or a 212.72% achievement compared to the 2019 target of Rp776,138 million. The Corporation's Revenues growth was mainly driven by MRT passengers targeted in 2020 reaching 100,000 passengers / day.

In addition, in 2020 the Corporation also projected a total Cost of Revenues of Rp1,162,164 million, an increase of 52.83% compared to the realization in 2019 of Rp760,415 million, or an increase of 47.57% when compared to the 2019 target of Rp787,520 million. The increase in Cost Of Revenues was in line with the projected Operating Income of the Corporation. Based on the Projected Revenues and Cost of Revenues, the Corporation projects to obtain Gross Profit in 2020 of Rp488,837 million, increasing to 182.87% compared to the realization in 2019 which recorded a gross profit of Rp172,815 million, or increased to 4,294.82% when compared to the target for 2019 where the Corporation still allocates a Gross Loss of Rp11,382 million.

For General and Administrative Expenses, in 2020 the Corporation projects General and Administrative expenses of Rp279,326 million, an increase of 25.96% when compared to the realization of General and Administrative Expenses back in 2019 of Rp221,750 million, or an increase of 17.40% if compared to the 2019 target of Rp237,927 million. Based on the projected General and Administrative expenses, the Corporation projects an Operating Profit in 2020 totaling Rp209,511 million.

Other Income in 2020 is projected to be Rp19,514 million so that the projected Comprehensive Profit in 2020 is Rp229,025 million or an increase of 56.11% when compared to the realization in 2019 of Rp146,704 million.

Posisi Keuangan

Financial Position

Pada tahun 2020 Perseroan memproyeksikan total aset sebesar Rp20.295.534 juta, meningkat 16,95% jika dibandingkan dengan realisasi jumlah aset tahun 2019 sebesar Rp17.353.407 juta, atau mencapai 117,72% apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar Rp17.240.131 juta. Pertumbuhan aset ini terutama diharapkan didapatkan dari selesainya proyek MRT Fase 1 dan seiring berjalannya proyek konstruksi dari MRT Fase 2.

Untuk liabilitas pada tahun 2020, Perseroan memproyeksikan Total Liabilitas sebesar Rp1.197.915 juta, turun 12,70% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.356.644 juta, atau mencapai 157,61% apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar Rp760.054 juta. Penurunan liabilitas tahun 2020 terhadap realisasi tahun 2019 terutama karena utang konstruksi telah dibayarkan di tahun 2019 seiring dengan selesainya konstruksi MRT Fase 1 dan baru dimulainya konstruksi MRT Fase 2 pada tahun 2020.

Selain itu pada tahun 2020 Ekuitas Neto diproyeksikan mencapai Rp19.097.619 juta, tumbuh 19,38% dibandingkan dengan realisasi 2019 sebesar Rp15.996.763 juta, atau mencapai 115,88% terhadap target tahun 2019 sebesar Rp16.480.077 juta. Pertumbuhan Ekuitas Neto tahun 2020 terutama diharapkan didapatkan dari selesainya proyek MRT Fase 1 serta berjalannya proyek konstruksi MRT Fase 2. Selain itu, pembukuan laba Perseroan di tahun 2019 akan berdampak terhadap Saldo Laba pada Ekuitas.

In 2020, the Corporation projects total assets of Rp20,295,534 million, an increase of 16.95% when compared to the realization of total assets in 2019 of Rp17,353,407 million, or reaching 117.72% when compared to the 2019 target of Rp17,240,131 million. This asset growth is mainly expected to be obtained from the completion of MRT Phase 1 project and along with the construction project progresses from MRT Phase 2.

For liabilities in 2020, the Corporation projects total liabilities of Rp1,197,915 million, down 12.70% when compared with the realization in 2019 of Rp1,356,644 million, or reaching 157.61% when compared to the 2019 target of Rp760,054 million. Decrease in liabilities in 2020 against the realization in 2019 was mainly because construction debt was paid in 2019 along with the completion of MRT Phase 1 construction and the commencement of MRT Phase 2 construction in 2020.

In addition, in 2020 net equity is projected to reach Rp19,097,619 million, growing 19.38% compared to the realization of 2019 of Rp15,996,763 million, or reaching 115.88% of the 2019 target of Rp16,480,077 million. Net equity growth in 2020 is mainly expected to be obtained from the completion of MRT Phase 1 project and the ongoing MRT Phase 2 construction project. In addition, the Corporation's profit in 2019 will have an impact on the Retained Earnings in Equity.

KEBIJAKAN DAN PEMBAYARAN DIVIDEN

DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION

Dasar Kebijakan Terkait Dividen dan Pembagiannya

Basic Policies Regarding Dividends and The Distributions

Kebijakan dasar pembagian dividen Perseroan mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 20 tentang Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 20.

1. Laba Bersih Perusahaan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan yang diwajibkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

The basis of policy for dividend distribution refers to Corporation's Articles of Association, Article 20 concerning the Use of Profit and Dividend Distribution. Article of Association of the Corporation Article 20.

- 1 *Corporation's net profit in one financial year as stated in balance sheet and profit and loss calculation, which has been approved by annual GMS and is a positive profit balance, divided according to the method decided by GMS.*
- 2 *In the event that GMS does not determine its usage, net profit, after deducting the allowance for reserves required by Law and Corporate's Articles of Association, is distributed as dividends.*

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi belum sama sekali tertutup.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *If the calculation of profit and loss in a financial year shows a loss that cannot be covered with reserve funds, then the loss will still be recorded and included in the calculation of profit and loss and in the next financial year. The Corporation is considered to have no profit as long as the loss is recorded and included in the calculation profit and loss that has not been completely covered.*
4. *Profit distributed as dividends that are not taken within 5 (five) years after being available for payment, is put into a reserve fund specifically designated for this purpose. Dividends in the special reserve fund can be taken by the entitled Shareholders before 5 (five) years have passed, by providing proof of their rights to the dividends, that can be accepted by Directors of The Corporation.*
5. *The Corporation can distribute interim dividends before the fiscal year ends in accordance with applicable laws and regulations.*

Informasi tentang Pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham

Information on Cash Dividend Distribution to Shareholders

Sejak berdiri hingga tanggal 31 Desember 2019, Perseroan belum membagikan laba kepada Pemegang Saham. Hal ini sesuai dengan kebijakan dasar pembagian dividen, yaitu saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tahunan 2020 di mana RUPS tahunan 2020 memutuskan penggunaan saldo laba positif tidak dibagi sebagai dividen.

Since its establishment until 31 December 2019, the Corporation has not yet distributed profits to Shareholders. This is in accordance with the basis policy for dividend distribution, where a positive profit balance divided according to the method determined by Annual GMS. Annual GMS 2020 decides that the positive profit balance will not be divided as dividends.

KONTRIBUSI BAGI NEGARA

CONTRIBUTION TO THE STATE

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Based on Law No. 28 of 2007 concerning General Provisions and Procedures for Taxation, Taxes are mandatory contributions to the State owed by a person or agency, which is forced by the Law, with no direct compensation, and is used for the State's purposes for the maximum prosperity of the people.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Karena hal tersebut, Perseroan mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai salah satu kontribusi kepada Negara/Pemerintah Pusat. Di sepanjang tahun 2019, kontribusi pembayaran pajak Perseroan tercatat sebesar Rp40.426 juta, meningkat 179,74% dibandingkan kontribusi pembayaran pajak tahun 2018 yang sebesar Rp14.451 juta.

Taxpayers are individuals or entities, including taxpayers, tax cutters, and tax collectors, who have taxation rights and obligations in accordance with the provisions of tax legislation. Because of this, the Corporation has an obligation to fulfill tax obligations as a contribution to the State. In 2019, the contribution of Corporation's tax was recorded at Rp40,426 million, an increase of 179.74% compared to the contribution of tax in 2018 which amounted to Rp14,451 million.

Rincian pembayaran pajak Perseroan untuk tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut. *Details of the Corporation's tax payments for 2018 and 2019 are as follows.*

PEMBAYARAN PAJAK PERSEROAN TAHUN 2018 DAN 2019

The Corporate's Tax Payments for 2018 and 2019

| | 2019 (Rp-Juta Million) | 2018 (Rp-Juta Million) | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|
| | | | Nominal Total (Rp-Juta Million) | Persentase Percentage (%) |
| PPh Pasal 21-26 | 20.643 | 12.054 | 8.589 | 71,26 |
| PPh Pasal 23-26 | 2.364 | 636 | 1.727 | 271,13 |
| PPh Pasal 4 ayat 2 | 2.866 | 1.760 | 1.106 | 62,83 |
| Jumlah Kontribusi Pajak <i>Tax Contributions</i> | 40.426 | 14.451 | 25.974 | 179.74 |

Tabel. 5.31
Table. 5.31

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN KARYAWAN (ESOP/MSOP)

INFORMATION ON EMPLOYEE AND MANAGEMENT SHARE OWNERSHIP PROGRAMS (ESOP / MSOP)

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak pernah melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau *Management Stock Option Program (MSOP)*, dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau *Employee Stock Option Program (ESOP)*.

Until the end of 2019, the Corporation has never implemented Management Stock Option Program (MSOP), and Employee Stock Option Program (ESOP).

INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

INFORMATION ON REALIZATION OF THE USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERING

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, maupun efek lainnya. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dari efek yang diterbitkan Perseroan.

Until the end of 2019, the Corporation did not issue any bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities. Therefore, there is no information related to the realization of the use of proceeds from public offering of securities issued by the Corporation.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER, ACQUISITION, AND/OR DEBT CAPITAL RESTRUCTURING

Informasi material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan Usaha, Akuisisi, dan/atau Restrukturisasi Utang/Modal yang terjadi di tahun buku, khususnya yang berpengaruh terhadap laporan/kinerja keuangan Perseroan.

Material information regarding Investment, Expansion, Divestment, Merger, Acquisition, and / or Debt / Capital Restructuring that occurs in the financial year, especially those that affect the Corporation's financial statements / performance.

Informasi Material Mengenai Investasi

Material Information Regarding Investment

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai investasi yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

Until the end of 2019, the Corporation did not conduct material transactions regarding investments that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Material Information Regarding Expansion

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai ekspansi yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

Until the end of 2019, the Corporation has not made material transactions regarding expansion that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Material Information Regarding Divestment

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai divestasi yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

Until the end of 2019, the Corporation did not conduct material transactions regarding divestment that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

Informasi Tentang Mengenai Penggabungan Usaha

Material Information Regarding Business Combination

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai penggabungan usaha yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

Until the end of 2019, the Corporation did not conduct material transactions concerning merger that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

Informasi Tentang Mengenai Akuisisi

Material Information Regarding Acquisitions

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai akuisisi yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

Until the end of 2019, the Corporation did not conduct material transactions regarding acquisitions that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

Informasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Debt / Capital Restructuring

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak melakukan transaksi material mengenai restrukturisasi utang/modal yang harus dilaporkan, kecuali yang telah diungkapkan di laporan keuangan Perseroan.

Until the end of 2019, the Corporation did not conduct material transactions regarding debt/capital restructuring that must be reported, except those that have been disclosed in the Corporation's financial statements.

INFORMASI TRANSAKSI AFILIASI, TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI, SERTA TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

INFORMATION REGARDING AFFILIATED TRANSACTIONS, TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES, AND TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST

Kebijakan tentang Pihak Berelasi

Policy on Related Parties

Perseroan menerapkan PSAK 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, yang mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan. Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

The Corporation applies PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures, which require disclosure of relationships, transactions, and balances of related parties, including commitments, in financial statements. This transaction is carried out based on terms agreed by both parties, where such requirements may not be the same as other transactions carried out with unrelated parties.

Nama Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi, Sifat Transaksi, serta Alasan Dilakukannya Transaksi

Name of Transacting Parties, Nature of Affiliation, Nature of Transaction and Reasons for Transaction

Berikut disampaikan nama pihak bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi untuk transaksi Perseroan di sepanjang tahun 2018 dan 2019.

The following are the names of the transacting and nature of the affiliate relationship for the Corporation's transactions throughout 2018 and 2019.

PIHAK BERTRANSAKSI, SIFAT HUBUNGAN AFILIASI, DAN ALASAN DILAKUKAN TRANSAKSI

The Transaction Parties, Nature of Affiliation and Reasons of Transaction

| Pihak yang Berelasi <i>Related Parties</i> | Sifat Hubungan <i>Nature of Relationship</i> | Sifat Transaksi <i>Nature of Transaction</i> | Alasan Dilakukannya Transaksi <i>Reason for Transaction</i> |
|---|--|--|---|
| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Provincial Government</i> | Pemegang saham utama <i>Main Shareholder</i> | Pendapatan Subsidi dan Pajak Bumi dan Bangunan <i>Subsidy Income & Tax on Land & Building</i> | Subsidi dan Pajak Bumi dan Bangunan <i>Subsidy and Tax on Land & Building</i> |
| PT Bank Daerah Khusus Ibukota | Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>Under control of DKI Jakarta Provincial Government</i> | Penempatan Deposito & Rekening Giro <i>Placement of Time Deposit and Current Account</i> | Tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak yang berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga <i>The interest rates obtained from related party banks are proportional to the interest rates obtained from third party banks</i> |
| PT Jakarta Infrastruktur Proptertindo | Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <i>Under control of DKI Jakarta Provincial Government</i> | Penyediaan layanan periklanan pada MRT Jakarta Fase 1 untuk pendapatan non-tiket <i>Provision of adverts in MRT Jakarta Phase 1, for non-Farebox Revenues</i> | Kerja sama layanan periklanan <i>Cooperation in Advertising services</i> |

Tabel 5.33
Table 5.33

Penjelasan mengenai Kewajaran Transaksi

Explanation regarding Transactions Fairness

Perseroan dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga transaksi dengan pihak-pihak berelasi tetap disajikan dalam maupun dengan pihak ketiga, berdasarkan peraturan yang berlaku dari setiap instansi yang melakukan perikatan.

The Corporation is controlled by DKI Jakarta Provincial Government, hence transactions with related parties are still presented in the financial statements. All transactions, with related parties or with third parties, are based on the applicable regulations of each agency engaged in the commitment.

Saldo dan Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2019

Balance and Realization of Related Party Transactions in 2019

Saldo yang signifikan dengan Pihak Berelasi untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 dan 2019.

Significant balances with Related Parties for the Years Ended December 31, 2018 and 2019.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI DALAM ASET

Transactions of Related Parties in Assets

| Transaksi Pihak Berelasi dalam Aset <i>Transactions of Related Parties in Assets</i> | | | Persentase dari Jumlah Aset <i>Percentage of Total Assets</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|
| | 2019 <i>(Rp-Juta Million)</i> | 2018 <i>(Rp-Juta Million)</i> | 2019 <i>(%)</i> | 2018 <i>(%)</i> | Nominal Total <i>(Rp-juta Million)</i> | Persentase <i>Percentage (%)</i> |
| Bank | 294.823 | 8.355 | 1,70 | 0,06 | 286.468 | 3.428,70 ↑ |
| Deposito Berjangka <i>Time Deposit</i> | 384.000 | 545.000 | 2,21 | 4,06 | (161.000) | (29,54) ↓ |
| Piutang Usaha <i>Trade Receivables</i> | 4 | - | 0,01 | - | - | - |
| Piutang Subsidi <i>Subsidy Receivables</i> | 105.708 | - | 0,61 | - | - | - |
| Piutang Bunga <i>Interest Receivables</i> | 422 | 512 | 0,01 | 0,01 | (90) | (17,58) ↓ |
| Jumlah Aset dari Pihak-pihak Berelasi <i>Total Assets of Related Parties</i> | 784.957 | 553.867 | 4,52 | 4,13 | 231.090 | 41,72 ↑ |
| Jumlah Aset <i>Total Assets</i> | 17.353.407 | 13.413.899 | 100,00 | 100,00 | 3.939.508 | 29,37 ↑ |

Tabel 5.34
Table 5.34

TRANSAKSI PIHAK BERELASI DALAM ASET
Transactions of Related Parties in Assets

| Transaksi Pihak Berelasi dalam Liabilitas <i>Transactions of Related Parties in Liabilities</i> | 2019 | | 2018 | | Persentase dari Jumlah Liabilitas <i>Percentage of Total Liabilities</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|--|-------------------|-------------------|--------|--------|---|---------------------------|--|---|
| | (Rp-Juta Million) | (Rp-Juta Million) | (%) | (%) | Nominal Total (Rp-juta Million) | Persentase Percentage (%) | | |
| Utang Pajak Bumi dan Bangunan <i>Payable on Land and Property Tax</i> | 42.670 | - | 3,15 | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Diterima Di Muka <i>Unearned Revenues</i> | 825 | - | 0,06 | - | - | - | - | - |
| Jumlah Liabilitas dari Pihak-pihak Berelasi <i>Total Liabilities of Related Parties</i> | 43,495 | - | 3,21 | - | - | - | - | - |
| Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i> | 1.356.644 | 1.131.037 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |

Tabel 5.35
Table 5.35**TRANSAKSI PIHAK BERELASI DALAM PENDAPATAN**
Transactions of Related Parties in Revenues

| Transaksi Pihak Berelasi dalam Pendapatan <i>Transactions of Related Parties in Revenues</i> | 2019 | | 2018 | | Persentase dari Jumlah Pendapatan <i>Percentage of Total Revenues</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|---|-------------------|-------------------|--------|-----|--|---------------------------|--|---|
| | (Rp-Juta Million) | (Rp-Juta Million) | (%) | (%) | Nominal Total (Rp-juta Million) | Persentase Percentage (%) | | |
| Pendapatan Subsidi <i>Subsidy Revenues</i> | 534.069 | - | 57,23 | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Non-Tiket <i>Non-Farebox Revenues</i> | 2.475 | - | 0,27 | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi <i>Total Revenues of Related Parties</i> | 536.544 | - | 57,49 | - | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan <i>Total Revenues</i> | 933.230 | - | 100,00 | - | - | - | - | - |

Tabel 5.36
Table 5.36

TRANSAKSI PIHAK BERELASI DALAM BEBAN POKOK PENDAPATAN

Transactions of Related Parties in Beban Pokok Pendapatan

| Transaksi Pihak Berelasi dalam Beban Pokok Pendapatan <i>Transactions of Related Parties in Cost of Revenues</i> | | | Persentase dari Jumlah Pendapatan <i>Percentage of Total Revenues</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|
| | 2019 <i>(Rp-Juta Million)</i> | 2018 <i>(Rp-Juta Million)</i> | 2019 <i>(%)</i> | 2018 <i>(%)</i> | Nominal Total <i>(Rp-juta Million)</i> | Persentase Persentase <i>(%)</i> |
| Pajak Bumi dan Bangunan <i>Land and Property Tax</i> | 32.002 | - | 4,21 | - | - | - |
| Jumlah Beban Pokok Pendapatan dari Pihak-pihak Berelasi <i>Total Cost of Revenues of Related Parties</i> | 32.002 | - | 4,21 | - | - | - |
| Jumlah Beban Pokok Pendapatan <i>Total Cost of Revenues</i> | 760.415 | - | 100,00 | - | - | - |

Tabel 5.37
Table 5.37

TRANSAKSI PIHAK BERELASI DALAM PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Transactions of Related Parties in Other Income (Expense)

| Transaksi Pihak Berelasi dalam Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Transactions of Related Parties in Other Income (Expense)</i> | | | Persentase dari Jumlah Pendapatan <i>Percentage of Total Revenues</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------------|
| | 2019 <i>(Rp-Juta Million)</i> | 2018 <i>(Rp-Juta Million)</i> | 2019 <i>(%)</i> | 2018 <i>(%)</i> | Nominal Total <i>(Rp-juta Million)</i> | Persentase Persentase <i>(%)</i> |
| Penghasilan Bunga <i>Interest Income</i> | 20.834 | 31.169 | 17,24 | 40,33 | (10.335) | (33,16) ↓ |
| Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain dari Pihak-pihak Berelasi <i>Total Other Income (Expense) of Related Parties</i> | 20.834 | 31.169 | 17,24 | 40,33 | (10.335) | (33,16) ↓ |
| Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-lain <i>Total Other Income (Expense)</i> | 120.854 | 77.281 | 100,00 | 100,00 | 43.573 | 56,38 ↑ |

Tabel 5.38
Table 5.38

Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Corporate Policy Regarding Transactions Review Mechanism

Kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi telah melalui proses review dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal. Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah sesuai dengan PSAK No 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Fairness of transactions and compliance with regulations on related party transactions have gone through a review and audit process by internal and external auditors. The Corporation carries out transactions with related parties in accordance with PSAK No. 7 concerning "Related Party Disclosures".

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

FINANCIAL INFORMATION BEARING EXTRAORDINARY AND RARE EVENTS

Sampai dengan periode buku 2019, tidak terdapat transaksi yang bersifat luar biasa sesuai PSAK 25.

Up to 2019 book period, there were no extraordinary transaction in accordance with PSAK 25.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSEROAN

AMENDMENTS IN LAW AND REGULATIONS THAT AFFECT THE CORPORATE

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2019

DKI Jakarta Governor Regulation Number 95 Year 2019

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang diberlakukan
Explanation of the rules and/or applicable law

Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang mengatur tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan Moda Raya Terpadu/ *Mass Rapid Transit* dan Lintas Raya Terpadu/ *Light Rail Transit*

DKI Jakarta Governor Regulation, which regulates the minimum service standards for transportation of people with *Mass Rapid Transit* and *Light Rail Transit*

Dampak Terhadap Perseroan
Impact on the Corporate

Perseroan harus memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Apabila Perseroan tidak memenuhi standar tersebut, maka terdapat konsekuensi peneraan sanksi
The Corporation must meet the specified service standards. If it does not meet these standards, there are consequences of sanctions

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2019

DKI Jakarta Governor Regulation Number 107 Year 2019

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang diberlakukan
Explanation of the rules and/or applicable law

Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang mengatur tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu

DKI Jakarta Governor Regulation, which regulates *MRT* and *LRT* subsidies

Dampak Terhadap Perseroan
Impact on the Corporate

Penerimaan Subsidi Prasarana yang terdiri atas Biaya Operasi dan Perawatan Prasarana, biaya modal fasilitas operasi, biaya sumber daya manusia untuk pengoperasian dan perawatan prasarana perkeretaapian, *margin* keuntungan prasarana, biaya pajak, retribusi dan penerimaan negara bukan pajak.

The receipt of Infrastructure Subsidy which consists of Cost of Infrastructure Operation & Maintenance, Cost of Capital for operation facilities, Costs of human resources for operation and maintenance of train infrastructure, profit margins of infrastructure, costs of tax, fees and non-tax state Revenues

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2019

DKI Jakarta Governor Regulation Number 34 Year 2019

Penjelasan atas Peraturan dan/atau Perundang-undangan yang diberlakukan
Explanation of the rules and/or applicable law

Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang mengatur tentang tarif angkutan perkeretaapian *Mass Rapid Transit* dan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit*

DKI Jakarta Governor Regulation which regulates *MRT* and *LRT* transport rates

Dampak Terhadap Perseroan
Impact on the Corporate

Penetapan tarif oleh pemerintah yang mengatur pembatasan tarif yang dapat dikenakan kepada pengguna jasa

Tariff determination by the government, which regulates the limit of tariff imposed on passengers

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI CHANGES OF ACCOUNTING POLICY

ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka

ISAK 33: Foreign Exchange Transactions and Advance Payment

Penjelasan atas perubahan kebijakan akuntansi yang diberlakukan
Explanation on the changes of accounting policy applied

Interpretasi ini mengatur penentuan tanggal transaksi untuk tujuan menentukan nilai tukar yang akan digunakan pada pengakuan awal aset, biaya atau pendapatan (atau bagiannya) terkait pada penghentian pengakuan aset atau liabilitas non-moneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan uang muka dalam mata uang asing.
This interpretation regulates the determination of transaction date, in order to define the exchange rate for the initial recognition of assets, costs or Revenues (or parts thereof) related to the termination of recognition of non-monetary assets or liabilities, due to payments or receipt of advances in foreign currencies.

Dampak Terhadap Perseroan
Impact on the Corporate

Penerapan interpretasi ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.
The adoption of this interpretation does not result in major changes to the Corporation's accounting policies and has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial year.

ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

ISAK 34: Uncertainty in the Income Tax Treatment

Penjelasan atas perubahan kebijakan akuntansi yang diberlakukan
Explanation on the changes of accounting policy applied

Interpretasi ini mengatur akuntansi pajak penghasilan ketika perlakuan pajak melibatkan ketidakpastian yang mempengaruhi penerapan PSAK 46: Pajak Penghasilan. Interpretasi ini tidak berlaku untuk pajak atau retribusi di luar ruang lingkup PSAK 46, juga tidak secara khusus mencakup persyaratan yang berkaitan dengan bunga dan denda yang terkait dengan ketidakpastian perlakuan pajak. Interpretasi ini secara khusus membahas hal-hal berikut:

- Apakah suatu entitas mempertimbangkan ketidakpastian perlakuan pajak secara terpisah
- Asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan
- Bagaimana entitas menentukan laba pajak/(rugi pajak, dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan dan tarif pajak

Bagaimana entitas mempertimbangkan perubahan fakta dan keadaan terkait Perseroan menentukan apakah akan mempertimbangkan masing-masing perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah atau bersama-sama dengan satu atau lebih perlakuan pajak tidak pasti lainnya dan menggunakan pendekatan yang dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian tersebut dengan lebih baik. Pada saat melakukan adopsi Interpretasi, Perseroan mempertimbangkan apakah mereka memiliki posisi pajak yang tidak pasti, terutama yang berkaitan dengan transfer pricing. Pelaporan pajak Perseroan di berbagai yurisdiksi termasuk pengurangan beban pajak terkait dengan transfer pricing dan otoritas perpajakan mungkin dapat memiliki pandangan yang berbeda atas perlakuan pajak tersebut. Perseroan menentukan, berdasarkan pada kepatuhan perpajakannya dan studi penentuan *transfer pricing*, bahwa besar kemungkinan perlakuan pajaknya akan diterima oleh otoritas perpajakan.

This interpretation governs income tax accounting, when the tax treatment involves uncertainties that could affect the adoption of PSAK 46: Income Tax. This interpretation does not apply to taxes or levies outside the scope of PSAK 46, nor does it specifically cover requirements relating to interest and penalties related to uncertainty of tax treatment. This interpretation specifically addresses the following:

- *Does an entity consider the uncertainty of tax treatment separately*
- *Assumptions made by entity regarding the examination of tax treatment by the taxing authority*
- *How do entities determine tax profits / (tax loss), the basis for taxation, tax losses that have not been used, tax credit that has not been used and tax rates*

How the entity considers changes in facts and related circumstances the Corporation determines whether to consider each of the uncertain tax treatment separately or together with one or more other uncertain tax treatments and uses an approach that can better predict the resolution of the uncertainty. When adopting the Interpretation, the Corporation considers whether they have an uncertain tax position, especially relating to transfer pricing. The Corporation tax reporting in various jurisdictions, including reducing the tax burden associated with transfer pricing and taxation authorities, may have different views on the tax treatment. The Corporation determines, based on its tax compliance and studies on determining transfer pricing, that it is probable that its tax treatment will be received by the taxing authority.

Dampak Terhadap Perseroan
Impact on the Corporate

Penerapan interpretasi ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.

The adoption of this interpretation does not result in major changes to Corporation's accounting policies and has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial year.

Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program

Amendments to PSAK 24: Employee Benefits, Amendments, Curtailments or Completion of Programs

Penjelasan atas perubahan kebijakan akuntansi yang diberlakukan
Explanation on the changes of accounting policy applied

Amandemen PSAK 24 mengatur akuntansi ketika amandemen, pembatasan, atau penyelesaian program terjadi dalam periode pelaporan, maka entitas diharuskan untuk menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode setelah amandemen, pengurangan atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuarial yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan berdasarkan program dan aset program setelah peristiwa tersebut. Perseroan juga diharuskan untuk menentukan bunga neto untuk sisa periode setelah amandemen, pembatasan atau penyelesaian program dengan menggunakan liabilitas imbalan pasti (aset) yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan di dalam program dan aset program setelah peristiwa tersebut, dan tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Amendments to PSAK 24 governs the accounting when amendments, restrictions or completion of a program occur in the reporting period, then entity is required to determine the current service costs for the remaining period after the amendment, reduction or completion of the program using actuarial assumptions used to remeasure the defined benefit liabilities (assets) net that reflects the benefits offered based on the program and program assets after the event. The Corporation is also required to determine net interest for the remaining period after the amendment, limitation or completion of the program by using a defined benefit Liabilities (asset) that reflects the benefits offered in the program and program assets after the event, and the discount rate used to measure the Liabilities again (assets) net defined benefit.

Dampak Terhadap Perseroan
Impact on the Corporate

Penerapan standar dan interpretasi ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya.

The adoption of these standards and interpretations does not result in major changes to the Corporation's accounting policies and has no material impact on the amounts reported for the current or previous financial year.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan

Amendments to PSAK 46: Income Taxes

Penjelasan atas perubahan kebijakan akuntansi yang diberlakukan
Explanation on the changes of accounting policy applied

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari dividen lebih terkait langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan daripada distribusi kepada pemilik. Dengan demikian, entitas mengakui konsekuensi dari pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal atas transaksi atau peristiwa masa lalu terkait.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION OF GOING CONCERN

Pada awal tahun 2019, MRT Jakarta telah menyelesaikan tahap konstruksi dan efektif 24 Maret 2019, Perseroan mulai menjalankan kegiatan operasi bisnis. Dengan demikian, hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah bisnis operasi MRT Jakarta yang berpusat pada layanan transportasi publik.

Pada tahun 2019, Perseroan telah mencapai target operasi yang signifikan. Hal ini didukung oleh beberapa hal antara lain: kesiapan tenaga kerja Perseroan yang meningkat sebanyak 30% dibanding tahun 2018 dari 520 karyawan menjadi 676 karyawan pada akhir 2019, kepuasan atas layanan operasi bisnis dan pemeliharaan infrastruktur operasi yang baik dapat dilihat dari hasil *Customer Satisfaction Index* yakni 82,78, dan juga aspek *Governance, Risk & Compliance* yang menjadi bagian penting dari kelangsungan usaha Perseroan pada tahun pertama beroperasi. Pada 2019, Perseroan telah memperoleh sertifikat ISO Terintegrasi, Nilai Risk Maturity 3,55, dan Skor *Good Corporate Governance* 87,33.

Perseroan memiliki Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi dengan anggota Direktur Operasi dan Pemeliharaan, Direktur Konstruksi, Direktur Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi *Corporate Secretary*, Kepala Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance*, Kepala Divisi Internal Audit, Kepala Divisi PMO, Kepala Divisi *Engineering*, Kepala Divisi *Railway Operation*, Kepala Divisi *Railway Maintenance*, Kepala Divisi OMFS, Kepala Divisi *Finance & Accounting*, Kepala Divisi TOD, Kepala Divisi *Commercial & Retail*, dan Kepala Divisi *Corporate Strategy*. Adanya komite ini menjadi bagian dari keinginan Perseroan untuk melakukan pengelolaan risiko yang utuh, mengingat Manajemen Risiko berperan bukan hanya mengelola potensi dampak negatif dalam pencapaian tujuan Perseroan namun juga mengeksplorasi potensi dan peluang-peluang positif untuk meningkatkan nilai Perseroan dan pendekatan pengelolaan risiko tersebut mempunyai orientasi rentang waktu ke masa depan yang cukup jauh untuk dapat membangun kesiapan dan kapasitas organisasi dalam menjaga nilai Perseroan.

At the beginning of 2019, MRT Jakarta had completed the construction phase and effective March 24, 2019, the Corporation began running its operations. Therefore, one thing that has significant effect on the Corporation's business continuity is the MRT operation which is centered on public transportation services.

In 2019, the Corporation has reached significant operating target. This is supported by a few things such as: the readiness of workforce, which increased by 30% compared to 2018, from 520 to 676 employees by end of 2019, satisfaction with operations services and good maintenance of operation infrastructure - it can be seen from the results of Customer Satisfaction Index which is 82.78 and also from the aspects of Governance, Risk & Compliance which are very important for business continuity. In the first year of operation 2019, the Corporation has obtained an Integrated ISO certificate, Risk Maturity Value of 3.55, and Good Corporate Governance Score of 87.33.

The Corporation has a Risk Management Committee chaired by the Finance & Corporate Management Director with members of Operation & Maintenance Director, Construction Director, Business Development Director, Corporate Secretary Division Head, Risk Management & QSSHE Assurance Division Head, Internal Audit Division Head, and Project Management Office Division Head, Engineering Division Head, Railway Operation Division Head, Railway Maintenance Division Head, Operation & Maintenance Facility Service Division Head, Finance & Accounting Division Head, Transit Oriented Development Division Head, Commercial & Retail Division Head, and Corporate Strategy Division Head. The existence of this committee is part of Corporation's efforts to implement integrated risk management, given that Risk Management not only has the potential to mitigate negative impacts, but also to explore potential and positive opportunities aimed at increasing the value of the Corporation. The risk-management approach has a time span that stretches far into the future and can thus build readiness and capacity within the organization in order to preserve the Corporation's values.

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSEROAN TAHUN 2019

Realization of Key Performance Indicators of 2019

| Sasaran Strategis Strategic Target | Bobot Weight | Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicators (KPI) | Bobot IKU Weight | Triwulan IV Quarter IV | | Capaian IKU IKU Achievements | Nilai IKU IKU Score | Capaian Wildy Important Goals (WIG) Achievement | Nilai WIG Score | Nilai Kinerja Performance Rating |
|---|--------------|--|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|---|-----------------|----------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi Realization | | | | | |
| Tercapainya <i>ridership</i> sesuai target rata-rata 65.000 pengguna jasa/hari The achievement of <i>ridership</i> , according to target of average 65,000 passenger/day | 26% | Persentase ketepatan perjalanan kereta <i>Percentage of accuracy of train travel</i> | 25% | 75% | 99.96% | 133% | 33% | 120% | 31% | 120.00% |
| | | Persentase jumlah aktual perjalanan kereta sesuai dengan yang direncanakan <i>Percentage of actual number of train trips as planned</i> | 25% | 75% | 99.98% | 133% | 33% | | | |

| Sasaran Strategis Strategic Target | Bobot Weight | Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicators (KPI) | Bobot IKU Weight | Triwulan IV Quarter IV | | Capaian IKU IKU Achievements | Nilai IKU IKU Score | Capaian Wildy Wildy Important Goals (WIG) Achievement | Nilai WIG WIG Score | Nilai Kinerja Kinerja Performance Rating |
|---|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---|
| | | | | Target | Realisasi Realization | | | | | |
| Tercapainya ridership sesuai target rata-rata 65.000 pengguna jasa/hari The achievement of ridership, according to target of average 65,000 passenger/ day | 26% | Indeks Kesiapan Publik Public Readiness Index | 25% | 70 | 72.9 | 104% | 26% | 120% | 31% | 120.00% |
| | | Indeks Kepuasan Pelanggan Customers Satisfaction Index | 25% | 75 | 82.78 | 110% | 28% | | | |
| | | | | | | | | | | |

Tabel 5.39
Table 5.39

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSEROAN TAHUN 2019

Realization of Key Performance Indicators of 2019

| Sasaran Strategis Strategic Target | Bobot Weight | Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicators (KPI) | Bobot IKU Weight | Triwulan IV Quarter IV | | Capaian IKU IKU Achievements | Nilai IKU IKU Score | Capaian Wildy Wildy Important Goals (WIG) Achievement | Nilai WIG WIG Score | Nilai Kinerja Kinerja Performance Rating |
|--|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---|
| | | | | Target | Realisasi Realization | | | | | |
| Terselesaikannya konstruksi Fase 1 dimulainya konstruksi dan pendanaan Fase 2 Completion of Phase 1 construction and commencement of Phase 2 construction and funding | 30% | Persentase progres fisik proyek MRT Fase 1 Percentage or physical progress of the project MRT Phase 1 | 21.74% | 100% | 100.00% | 100% | 22% | 98% | 29% | |
| | | Persentase progress fisik proyek MRT Fase 2 (CP200) Percentage of physical progress of Phase 2 MRT project (CP200) | 21.74% | 100% | 100.00% | 100% | 22% | | | |
| | | Persentase realisasi dana hibah dan pinjaman MRT Fase 1 & 2 Percentage of grant and loan realization, MRT Phases 1 & 2 | 21.74% | 85% | 85.00% | 100% | 22% | | | |

| Sasaran Strategis Strategic Target | Bobot Weight | Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicators (KPI) | Bobot IKU Weight | Triwulan IV Quarter IV | | Capaian IKU IKU Achievements | Nilai IKU IKU Score | Capaian Wildy Wildy Important Goals (WIG) Achievement | Nilai WIG WIG Score | Nilai Kinerja Performance Rating |
|---|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi Realization | | | | | |
| Terselesaikannya konstruksi Fase 1 dimulainya konstruksi dan pendanaan Fase 2 <i>Completion of Phase 1 construction and commencement of Phase 2 construction and funding</i> | 30% | Persentase terselesaikannya tender konstruksi & jasa konsultasi MRT Fase 2 <i>Percentage of completion of construction tender & consulting services. MRT Phase 2</i> | 13.04% | 64% | 53.00% | 83% | 11% | 98% | 29% | |
| | | Persentase penugasan MRT Koridor Timur-Barat <i>Percentage on Engineering Design assignment. East - West Corridor MRT</i> | 21.74% | 100% | 100.00% | 100% | 22% | | | |

Tabel 5.40
Table 5.40

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERSEROAN TAHUN 2019 Realization of Key Performance Indicators of 2019

| Sasaran Strategis Strategic Target | Bobot Weight | Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicators (KPI) | Bobot IKU Weight | Triwulan IV Quarter IV | | Capaian IKU IKU Achievements | Nilai IKU IKU Score | Capaian Wildy Wildy Important Goals (WIG) Achievement | Nilai WIG WIG Score | Nilai Kinerja Performance Rating |
|--|--------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi Realization | | | | | |
| Terwujudnya pengembangan usaha <i>Realization of business development</i> | 21% | Pendapatan Non-Tiket (sesuai RKAP) <i>Non-Farebox Revenues (as in RKAP)</i> | 51% | 100% | 220.22% | 220% | 112% | 161% | 34% | |
| | | Persentase penguatan dasar hukum untuk Kawasan KBT di sepanjang koridor MRT <i>Percentage of legal basis strengthening, for the TOD area, along the MRT corridor</i> | 18% | 100% | 100.00% | 100% | 18% | | | |

| Sasaran Strategis <i>Strategic Target</i> | Bobot <i>Weight</i> | Indikator Kinerja Utama (IKU) <i>Key Performance Indicators (KPI)</i> | Bobot IKU <i>Weight</i> | Triwulan IV <i>Quarter IV</i> | | Capaian IKU <i>IKU Achievements</i> | Nilai IKU <i>Score</i> | Capaian Wildy <i>Important Goals (WIG) Achievement</i> | Nilai WIG <i>Score</i> | Nilai Kinerja <i>Performance Rating</i> |
|---|------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------|---|---------------------------|--|
| | | | | Target | Realisasi <i>Realization</i> | | | | | |
| Terwujudnya pengembangan usaha <i>Realization of business development</i> | 21% | Persentase penyelenggaraan Kawasan KBT di seluruh koridor MRT Jakarta <i>Percentage on the implementation of TOD area, throughout the MRT corridor</i> | 31% | 100% | 100.00% | 100% | 31% | | | |
| Terwujudnya korporasi bertaraf internasional <i>The realization of international level corporation</i> | 24% | Nilai Risk Maturity <i>Risk Maturity Score</i> | 18.18% | 2.9 | 3.55 | 122% | 22% | 109% | 26% | |
| | | Nilai Good Corporate Governance (GCG) <i>Good Corporate Governance (GCG) score</i> | 18.18% | 87 | 87.33 | 100% | 18% | | | |
| | | Level Knowledge Management Maturity <i>Maturity Knowledge Management Level</i> | 18.18% | 3.4 | 4.26 | 125% | 23% | | | |
| | | Incident Severity Rate <i>Frequency Rate ≤ 0.4 Severity Rate ≤ 0.2"</i> | 45.45% | 100% | 100.00% | 100% | 45% | | | |

Tabel 5.41
Table 5.41

PROSPEK USAHA TAHUN 2020 DAN RENCANA STRATEGIS

2020 BUSINESS PROSPECT AND STRATEGIC PLANS

Strategi bisnis MRT Jakarta mengedepankan pemahaman kepada kompetensi inti Perseroan sebagai penyedia layanan transportasi terdepan yang fokus, efisien, dan berkelas dunia. Tujuan dari MRT Jakarta adalah untuk membangun Perseroan menjadi organisasi yang berkesinambungan dan dikenal oleh masyarakat dalam memberikan layanan publik yang andal. Tahun 2020 akan menjadi tahun kritis dalam pengembangan bisnis di masa depan sehingga MRT Jakarta bukan hanya Perseroan yang melaksanakan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengembangan bisnis MRT atas trase Lebak Bulus - Bundaran HI saja. Di awal tahun 2020, MRT Jakarta membentuk perusahaan patungan bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) dan diberi nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (PT MITJ). PT MITJ adalah perpanjangan tangan dari MRT Jakarta untuk mengelola sistem transportasi kereta api di Jabodetabek berikut 85 stasiun dan kawasan sekitarnya. Ini adalah sebuah mandat sekaligus tantangan yang sangat besar. Keberhasilan melakukan pengelolaan integrasi transportasi Jabodetabek akan sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilai dan kinerja baik MRT Jakarta dapat ditularkan dan diadopsi penuh dalam tatanan pengelolaan PT MITJ.

MRT Jakarta's business strategy promotes an understanding of Corporate's core competencies as a leading, efficient and world-class transportation service provider. The purpose of MRT Jakarta is to build the Corporate into a sustainable organization and be known to public as provider of reliable public services. 2020 will be a critical year for business development in the future so that MRT Jakarta will not become only a Corporate that carries out the construction, operation, maintenance and development of MRT business on the Lebak Bulus-Bundaran HI course. In early 2020, MRT Jakarta formed a joint venture with PT Kereta Api Indonesia (Persero), named PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (PT MITJ). PT MITJ is an extension of MRT Jakarta to manage the rail transportation system in Jabodetabek, following 85 stations and the surrounding area. This is a big mandate and also a big challenge. The success of managing Jabodetabek transportation integration will depend very much on how the values and performances of MRT Jakarta can be transmitted and fully adopted in the management structure of PT MITJ.

Selain pembentukan PT MRT Jakarta (Perseroda), sesuai dengan mandat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 28 Maret 2019, MRT Jakarta akan melakukan pengembangan usaha melalui pembentukan dua anak Perseroan, yakni Anak Usaha Operasi (Sarana & Prasarana) dan Anak Usaha Kawasan Berorientasi Transit (KBT). Kedua anak Perseroan tersebut dibentuk untuk mengoptimalkan langkah MRT Jakarta sebagai BUMD yang memiliki dua peran, yakni pengembangan usaha dan menjadi instrumen pembangunan bagi masyarakat DKI Jakarta, khususnya di bidang layanan MRT Jakarta dan juga pengembangan Kawasan Berorientasi Transit untuk mendukung tema besar pembangunan Jakarta, yaitu Urban Regeneration sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta.

Dalam pengembangan usaha MRT Fase 1, Perseroan melakukan akselerasi untuk mengoptimalkan Peraturan Gubernur No. 67 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dan Peraturan Gubernur No. 15 tahun 2020 tentang penugasan PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor Utara-Selatan MRT Jakarta. Rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu melalui pengelolaan dan komersialisasi kawasan KBT di sepanjang jalur MRT untuk mendapatkan manfaat atas pelampauan Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan pendapatan atas komersialisasi kawasan KBT. Selain itu potensi interkoneksi, hak atas penamaan stasiun (*naming right*), dan potensi bisnis lainnya di sepanjang jalur MRT Utara-Selatan Fase 1 juga akan terus dioptimalkan dan masuk ke dalam *pipeline* pengembangan usaha Perseroan.

Selain fokus terhadap ekspansi pengembangan bisnis dan anak usaha, Perseroan tentunya tidak luput untuk terus meningkatkan pengelolaan perencanaan internal. Pada tahun 2020, MRT Jakarta akan mengimplementasikan metode pengelolaan strategi berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) yang telah terbukti menjadi salah satu praktik terbaik di dunia. Dengan diadopsinya metode ini, maka pengelolaan strategi Perseroan akan memiliki sifat yang lebih makro dan kolaboratif. Sifat makro ini mencakup empat perspektif yang ada dalam usaha, yakni *Financial* (Finansial), *Customer* (Pelanggan), *Internal Business Process* (Proses Internal Bisnis), dan *Learning & Growth* (Pembelajaran & Pengembangan) yang menggambarkan keseluruhan aspek pengelolaan bisnis MRT Jakarta.

Dalam perspektif *Financial*, target utama adalah mewujudkan Perseroan yang sehat secara keuangan dengan memaksimalkan pendapatan Perseroan. Perspektif *Customer* berfokus pada upaya peningkatan layanan dan kepuasan pelanggan, serta melaksanakan tugas-tugas layanan publik yang terkait dengan peningkatan mobilitas dan kualitas hidup masyarakat sebagai implikasi dari sistem layanan transportasi publik yang semakin meningkat. Selanjutnya terkait perspektif *Internal Business Process*, fokus adalah pada *operational excellence* (pemastian kualitas dalam kegiatan operasional), pengembangan jaringan MRT, pengembangan *platform digital*, peningkatan penghasilan non-tiket, pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (KBT), serta pengembangan anak usaha dan Perseroan patungan sesuai dengan kebutuhan pengembangan Perseroan. Sementara perspektif *Learning & Growth* sebagai fondasi dari kerangka strategis ini ditargetkan untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas sumber daya karyawan MRT Jakarta, meningkatkan *Governance, Risk, and Compliance (GRC), Safety*, dan implementasi *Knowledge Management*.

Besides the establishment of PT MITJ, in accordance with the mandate of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) on March 28, 2019, MRT Jakarta will conduct business development through the establishment of two subsidiaries, namely the Operating Subsidiary (Facilities & Infrastructure) and Transit Oriented Development (TOD) Subsidiary. The two subsidiaries were formed to optimize MRT Jakarta as a BUMD which has two roles, for business development and as instrument of development for the people of DKI Jakarta; particularly in the MRT services area and also the development of Transit- Oriented Zone to support Jakarta's major development theme, namely Urban Regeneration, as per the direction of the Governor of DKI Jakarta.

In developing Phase 1 MRT business, Corporate accelerated to optimize Governor Regulation No. 67 of 2019 concerning the administration of transit-oriented areas and Governor Regulation No. 15 of 2020 concerning the assignment of PT MRT Jakarta (Perseroda) as a manager of MRT Jakarta North-South transit-oriented corridors. The action plan is implemented through the management and commercialization of the TOD area along the MRT line, to benefit from exceeding the building area coefficient (KLB) and to get Revenues from the commercialization of TOD area. In addition, interconnection potential, naming right, and other business potential along the north-south MRT line Phase 1, will continue to be optimized and incorporated into Corporate's business development plan.

*In addition to focusing on expanding the business and the subsidiaries, Corporate will continue to improve the management of internal planning. In 2020, MRT Jakarta will implement a strategy management methods based on *Balanced Scorecard* (BSC), which has proven to be one of the best business practices in the world. With the adoption of this method, management of Corporate's strategy will have a macro and collaborative nature. This macro nature includes four perspectives existing in business, namely *Financial, Customer, Internal Business Process and Learning & Growth*, which describes all management aspects of MRT Jakarta business.*

In a Financial perspective, the main target is to realize a financially sound Corporate by maximizing the Corporate's Revenues. The Customer perspective focuses to improve service and customer satisfaction, as well as carrying out public service tasks to increase people's mobility and quality of life, as the results of a better public transportation service system. Furthermore, on the Internal Business Process perspective, the focus is on operational excellence (ensuring quality in operational activities), developing the MRT network, developing digital platforms, increasing non-farebox revenue, developing Transit-Oriented Development, and developing subsidiaries and joint ventures according to Corporate needs. While the Learning & Growth perspective, served as the foundation of this strategic framework, is targeted to improve the capabilities and resource capacity of the employees, improve Governance, Risk, and Compliance (GRC), Safety, and the implementation of Knowledge Management.

Menjelang tahun 2020, MRT Jakarta diproyeksikan untuk menjadi semakin besar. Untuk merespons perubahan ini, seluruh rencana aksi strategis dan taktis di tahun 2020 dibalut dalam tema "Becoming Bolder, Smarter and Faster": *Bolder* berarti menjadi lebih besar tetapi harus juga lebih tangguh, gigih, dan berani berjuang menembus berbagai tantangan dan mewujudkan semua atau jejak langkah yang telah ditargetkan. *Smarter* berarti seiring dengan pertumbuhan yang pesat, MRT Jakarta harus semakin kreatif, inovatif, dan canggih memanfaatkan pengetahuan Perseroan serta keunggulan teknologi dalam menjawab tantangan yang semakin kompleks.

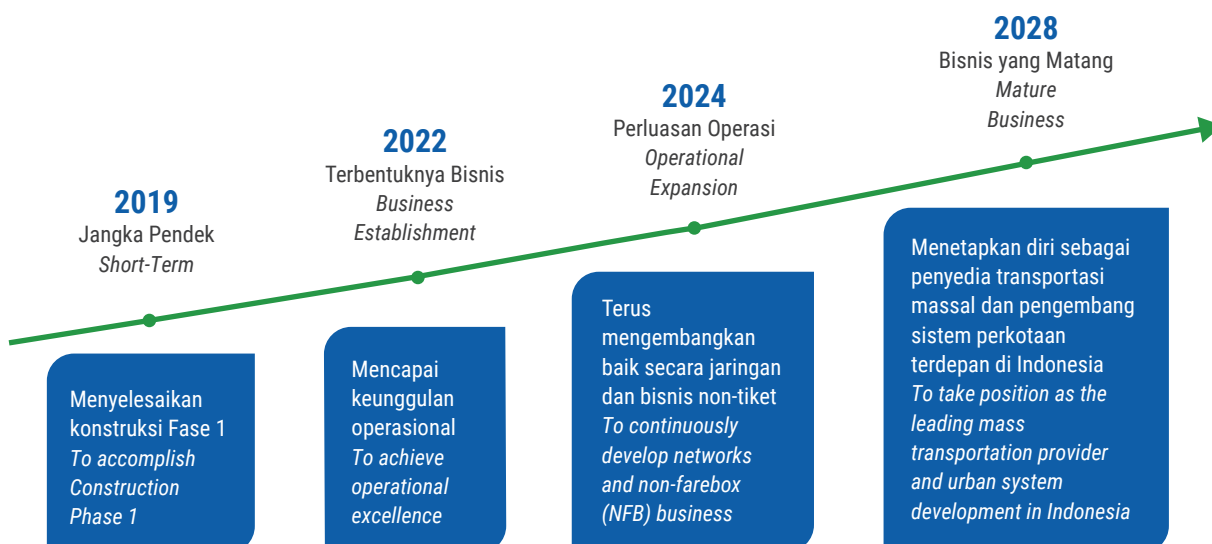
Faster berarti walaupun Perseroan menjadi lebih besar, tidak menjadikan Perseroan menjadi lamban, melainkan menjadi semakin cepat dan cekatan dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan menghilangkan sekat-sekat birokrasi maupun ego masing-masing unit. Suatu keniscayaan bahwa organisasi MRT Jakarta akan bertumbuh menjadi lebih besar dengan tugas dan tantangan yang semakin besar. Dasarnya telah diletakkan bersama dengan baik pada masa-masa awal pertumbuhan dan pertumbuhan ini harus terus dipelihara dengan baik.

By 2020, MRT Jakarta is projected to become even greater. To respond to this projection, all strategic and tactical plans for 2020 are wrapped in the theme "Becoming Bolder, Smarter and Faster": Bolder means bigger but also be more resilient, persistent, and brave to fight through challenges and to realize all milestones or steps that have been targeted. Smarter means that along with rapid growth, MRT Jakarta should be more creative, innovative and sophisticated, in utilizing the Corporate's knowledge and technological excellence, in responding to increasingly complex challenges.

Faster means, that even though Corporate is bigger, it does not make it slow, but rather faster and more agile in carrying out its duties by eliminating the bureaucratic barriers and the sectoral ego. It is a necessity that MRT Jakarta will grow bigger with greater tasks and challenges. The foundation has been put together very well in the beginning and so this growth must continue to be nurtured.

PETA JALAN USAHA: RENCANA PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG

BUSINESS ROAD MAP: LONG TERM DEVELOPMENT PLAN



Figur 5.3
Figure 5.3

Seperti yang tergambar pada bagan di atas, Perseroan memiliki rencana jangka panjang hingga tahun 2028, dengan capaian memiliki bisnis yang matang. Tahapan-tahapan di atas menjadi tujuan pengembangan Perseroan ke depan, dengan landasan utama mengedepankan layanan bagi pengguna jasa MRT Jakarta sekaligus membangun model usaha yang berkelanjutan.

As illustrated in the chart above, Corporate has a long-term plan until 2028, with the achievement of having a mature business. The above stages are the Corporate's future development goals, with the main foundation being to prioritize services for MRT passengers while building a sustainable business model.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tata Kelola Perusahaan yang Baik senantiasa diterapkan guna mewujudkan kelangsungan usaha.

Good Corporate Governance is applied constantly in order to realize the business continuity.

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2019

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

PRINSIP DASAR DAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BASIC PRINCIPLES AND COMMITMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perseroan berkomitmen secara penuh untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan para pemegang saham, masyarakat secara luas dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Perseroan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang terintegrasi dengan pengelolaan kepatuhan, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Langkah ini ditempuh agar Perseroan memiliki pengetahuan dan kapabilitas untuk mengelola Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan yang sejalan dengan pengelolaan kinerja bisnis dan mampu mengantarkan organisasi mencapai visi dan misinya.

Dalam mengembangkan infrastruktur dan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, Perseroan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola yang tertanam dalam tubuh dan budaya Perseroan mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Implementasi prinsip Tata Kelola Perusahaan di lingkup Perseroan juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).

As a Regionally Owned Enterprise (ROE) which majority shares are owned by the DKI Jakarta Provincial Government, the Corporation is fully committed to implementing Good Corporate Governance (GCG) principles as a foundation to create values and sustainability for the interests of shareholders, the community at large, and other stakeholders.

To realize such goal, the Corporation implements GCG that is integrated with compliance management, risk management and internal control. This step is taken so that the Corporation has the knowledge and capacity to manage Governance, Risk Management and Compliance that is in line with the managing business performance and is able to lead the organization to achieve its vision and mission.

In developing the infrastructure and implementing GCG principles, the Corporation ensures that the Governance principles embedded within the Corporation's body and culture refers to the Decree of the DKI Jakarta Province No. 96 of 2004 that regulates the implementation of Good Corporate Governance practices in Regionally Owned Enterprises (ROE) within the Government of the Special Capital Region of Jakarta. The implementation of GCG principles within the Corporation's scope also refers to the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 9 of 2018 on Jakarta MRT Limited Corporation (Regional Corporation).

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN THE OBJECTIVES OF IMPLEMENTING GCG

Tujuan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan di lingkungan Perseroan adalah:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, karyawan, klien, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan.
2. Mendorong dan mendukung perkembangan Perseroan.
3. Mengelola sumber daya dan risiko Perseroan secara lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.
5. Mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan Perseroan.
6. Memaksimalkan nilai Perseroan dalam bentuk peningkatan kinerja serta citra Perseroan yang baik
7. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan;
8. Mendorong organ Perseroan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi dengan nilai etika/moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan terhadap Pemangku Kepentingan;
9. Mengurangi potensi benturan kepentingan organ Perseroan dan Karyawan dalam menjalankan bisnis Perseroan;
10. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif terhadap pencapaian tujuan Perseroan.

The objectives of implementing GCG principles within the Corporation is to:

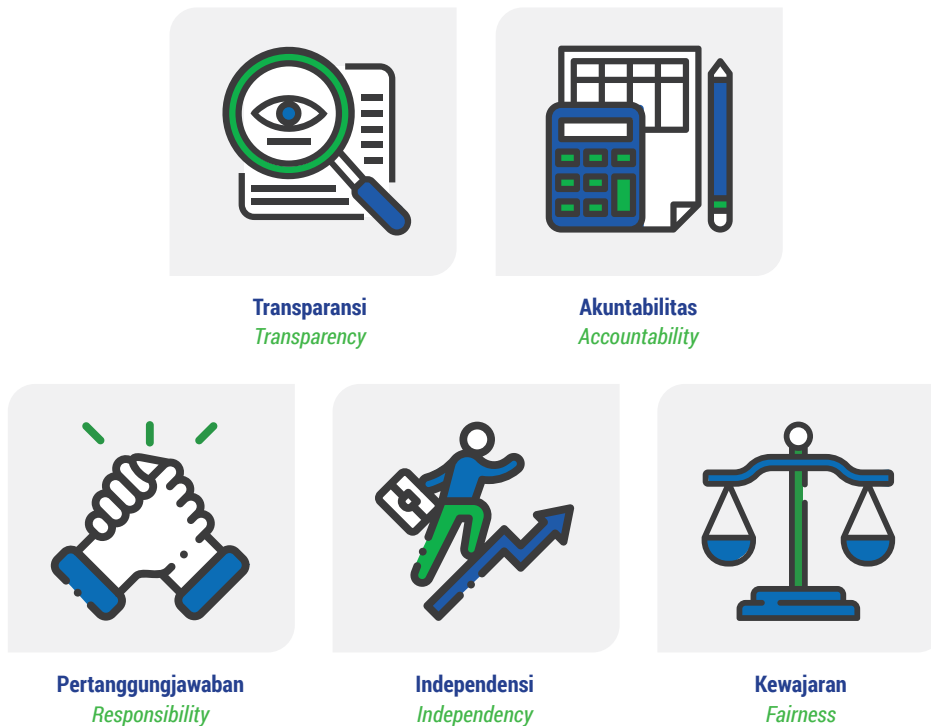
1. *Control and direct relations between shareholders, the Board of Commissioners, Directors, employees, clients, business partners, as well as community and the environment;*
2. *Encourage and support the Corporation's development;*
3. *Manage the Corporation's resources risks effectively and efficiently;*
4. *Increase accountability towards stakeholders;*
5. *Prevent acts of misconduct in managing the Corporation;*
6. *Maximize the Corporation's value in the form of improving work performances as well as maintaining the Corporation's good image;*
7. *Encourage the Corporation's management in a professional, transparent and efficient manner and also to empower its functions and strengthen independence of the Corporation's organs;*
8. *Encourage organs within the Corporation to come up with decisions and execute actions based on high ethical/moral values that complies with the applicable set of laws and regulations, as well as having the awareness of the Corporation's social responsibility towards stakeholders;*
9. *Reducing possible conflict of interests between organs and employees in conducting the Corporation's business;*
10. *Creating a business environment that support efforts to achieve the Corporation's goals.*

PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK, KOMITMEN DAN PENERAPANNYA GOOD CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES, COMMITMENTS AND THEIR IMPLEMENTATION

Dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan mengacu pada 5 (lima) nilai dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran, sebagaimana telah dirilis dalam Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

In implementing Good Corporate Governance (GCG) principles, the Corporation refers to 5 (five) basic principles, namely: transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, as stated in the General Guidelines for Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance (KNKG).

NILAI-NILAI DASAR PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK *The Basic Values of Good Corporate Governance Principles*



Figur 6.1
Figure 6.1

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DENGAN PRAKTIK TERBAIK DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE WITH THE BEST PRACTICES

PERSEROAN MEMILIKI KOMITMEN YANG KUAT UNTUK MENGEMBANGKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERDASARKAN PRAKTIK TERBAIK.

The Corporate has a strong commitment to developing GCG principles based on best practices.

JEJAK LANGKAH PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK MILESTONE OF DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

2009

- Pengesahan domain Perilaku (*Code of Conduct*). Berdasarkan SK Direksi No. 40 Tahun 2009
- Pengenalan nilai-nilai Perseroan (*PRIDE*)
- *Ratification Code of Conduct. Based on Directors Decree No. 40 of 2009*
- *Introduction of Corporate Values (PRIDE)*

2010

- Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Berdasarkan SK Direksi No. 063 Tahun 2010
- Pembentukan Satuan Tugas Manajemen Risiko. Berdasarkan SK Direksi No. 063 Tahun 2010
- *Appointment of Corporate Secretary. Based on Directors Decree No. 063 of 2010*
- *Establishment of Risk Management Work Unit. Based on Directors Decree No. 063 of 2010*

2012

- Pengesahan *Board Manual*. Berdasarkan SK Bersama Dewan Komisari dan Direksi tanggal 31 Juli 2012
- *Ratification of Board Manual. Based on Joint Decree of the Commissioners and Directors on July 31, 2012*

2011

- Pengesahan Piagam Komite Audit. Disahkan pada tanggal 21 September 2011 oleh Dewan Komisaris
- Pengesahan Piagam Internal Audit. Disahkan pada tanggal 19 September 2011 oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama
- *Ratification of Audit Committee Charter. Approved on September 21, 2011 by Commissioners*
- *Ratification of Internal Audit Charter. Approved on September 19, 2011, by the President Director and the President Commissioner*

2013

- Pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 004 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013
- Pengangkatan Komisaris Independen pertama. Berdasarkan Akta Notaris No. 02 Tanggal 3 Juni 2013
- *Ratification of Corporate Governance Guidelines. Based on Commissioners Decree No. 004 of 2013 on March 20, 2013*
- *Appointment of the first Independent Commissioner. Based on Notarial Deed No. 02 dated June 3, 2013*

2014

- Pengenalan nilai-nilai Perseroan (*PRIDE AT*) Berdasarkan SK Direksi No. 029 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014
- *Introduction of corporate value (PRIDE AT) Based on Directors Decree No. 029 of 2014 on March 20, 2014*

2015

- Pembentukan Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan SK Direksi No. SK/019/BOD-MRT/III/2015 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko di Lingkungan PT MRT Jakarta
- Pengesahan Piagam Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2015 tanggal 30 November 2015
- Pengesahan Pedoman Pengelolaan LHKPN. Berdasarkan SK Direksi No. 021 Tahun 2015 tanggal 17 Maret 2015
- Pengesahan Kebijakan Manajemen Risiko. Berdasarkan SK Direksi No. SK/014/BOD-MRT/III/2015 tentang Kebijakan Manajemen Risiko di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda)
- Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2015 oleh Tim *Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan. Berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama No. 182/INT/BODMRT/ST/IX/2015
- *Establishment the Risk Management Committee. Based on the Directors Decree No. SK/019/BOD-MRT/III/2015 on establishing Risk Management Committee of PT MRT Jakarta*
- *Ratification of Risk Management Committee Charter. Based on Commissioners Decree No. 001 of 2015 on November 30, 2015 Ratification of LHKPN Management guidelines. Based on Directors Decree No. 021 of 2015 on March 17, 2015*
- *Ratification of risk management policy. Based on Directors Decree No. SK/014/BOD-MRT/III/2015 on risk management policy of PT MRT Jakarta (Perseroda)*
- *GCG assessment of 2015 by GCG Self-Assessment Team. Based on President Director's Letter of Duty No. 182/INT/BOD-MRT/ST/IX/2015*

2016

- Awal Pembentukan Komite Audit. Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 003 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016
- Awal Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 004 Tahun 2016 tanggal 23 Februari 2016
- Awal Pembentukan Komite Pemantau Risiko. Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2016 tanggal 20 Januari 2016
- Pengesahan revisi *Charter* Komite Audit. Berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2016 tanggal 29 Januari 2016
- Pengesahan revisi *Charter Internal Audit*. Disahkan pada tanggal 25 Januari 2016 oleh Direktur Utama
- Pengesahan Pembaruan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Berdasarkan SK Direksi No. 071 Tahun 2016 tanggal 21 Desember 2016
- Pengesahan Pembaruan *Board Manual*. Berdasarkan SK bersama Dewan Komisari dan Direksi tanggal 21 Desember 2016
- Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2016 oleh Tim *Self Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan*. Berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama No. 1281/INT/BOD- MRT/ST/XII/2016
- Pembentukan *Risk Officer* di setiap Unit Kerja. Berdasarkan SK Direksi Nomor SK/003/BOD-MRT/I/2016
- *Establishment of Audit Committee. Based on Commissioners Decree No. 003 Of 2016 on January 29, 2016*
- *Establishment of Nomination and Remuneration Committee. Based on Commissioners Decree No. 004 Of 2016 on February 23, 2016*
- *Establishment of Risk Management Committee. Based on Commissioners Decree No. 001 Of 2016 on January 20, 2016*
- *Ratification of Revised Audit Committee Charter. Based on Commissioners decree No. 002 Of 2016 on January 29, 2016*
- *Ratification of Revised Internal Audit Charter. Approved on January 25, 2016 by President Director*
- *Amendment to the Code of Conduct. Based on Directors Decree No. 071 of 2016 on December 21, 2016*
- *Ratification of Revised Board Manual. Based on Joint Decree of Board of Commissioners and Directors on December 21, 2016*
- *GCG assessment of 2016 by GCG Self-Assessment Team. Based on President Director's Letter of Duty No. 1281/INT/ BOD-MRT/ST/XII/2016*
- *Establishment of Risk Officer in each Work Unit. Based on the decree of the Directors No. SK/003/BODMRT/I/2016*

2017

- Penetapan skor Tata Kelola Perusahaan sebagai salah satu KPI Perseroan. Berdasarkan Kontrak Kinerja Direksi dengan Pemegang Saham Tahun 2017
- Pengesahan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Disahkan pada tanggal 21 Desember 2017 oleh Dewan Komisaris
- Pengesahan Peta Jalan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2017 – 2021. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 010 Tahun 2017
- Penetapan Penanggung Jawab Penerapan dan Pemantauan Tata Kelola Perusahaan. Berdasarkan SK Direksi No. 039 Tahun 2017
- Pedoman Benturan Kepentingan. Berdasarkan SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 31 Mei 2017
- Pengesahan Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran. Berdasarkan SK Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 31 Mei 2017
- Pengesahan Pedoman Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 004 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017
- Pengesahan Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 005 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017
- Pengesahan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Berdasarkan SK Direksi No. 042-1 Tahun 2017
- Pengesahan Pembaruan Pedoman Pengelolaan LHKPN. Berdasarkan SK Direksi No. 020 Tahun 2017
- Pembentukan Unit Pengelola Implementasi Tata Kelola Perusahaan. Berdasarkan SK Direksi No. 001 Tahun 2017
- Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan oleh BPKP Tahun 2017. Berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan DKI Jakarta No. ST-1096/PW09/4.2/2017
- *Setting GCG Score as one of the Corporation's KPI Ratification of Risk Management Committee Charter. Based on Contract Management between Directors and Shareholders Year 2017*
- *Ratification of Remuneration and Nomination Committee Charter. Approved on December 21, 2017 by Board of Commissioners.*
- *Ratification of GCG Road MAP of 2017-2021. Based on Directors Decree No. 010 Of 2017*
- *Determination of GCG implementation and monitoring responsibility. Based on Directors Decree No. 039 of 2017*
- *Conflict of interest guidelines. Based on Joint Decree of Commissioners and Directors on May 31, 2017*
- *Ratification of WBS Guidelines. Based on Joint Decree of Commissioners and Directors on May 31, 2017*
- *Ratification of Internal Control System guidelines. Based on Directors Regulation No. 004 of 2017 on June 22, 2017*
- *Ratification of information and Technology Management guidelines. Based on Directors Regulation No. 005 of 2017 on June 22, 2017*
- *Ratification of the Gratification Control guidelines. Based on Directors Decree No. 042-1 of 2017*
- *Ratification of the Amendment of LHKPN Management guidelines. Based on Directors Decree No. 020 of 2017*
- *Establishment of GCG Management Unit. Based on Directors Decree No. 001 Of 2017*
- *Assessment of GCG implementation by BPKP of 2017. Based on Head of BPKP DKI Jakarta Letter of Duty No. ST-1096/ PW09/4.2/2017*

2018

- Pengenalan nilai-nilai Perseroan (*I CAN*). Berdasarkan Peraturan Direksi No.003 Tahun 2018 tentang Penerapan *Core Values* Perseroan dan *Leadership Competencies* di Lingkungan PT MRT Jakarta (Persero).
- Pengesahan Pembaruan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Berdasarkan Peraturan Direksi No. 007-1 Tahun 2018 tanggal 30 April 2018
- Pengesahan Pembaruan Pedoman Tata Kelola Perusahaan. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 014 Tahun 2018
- Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2018 oleh BPKP. Berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan DKI Jakarta No. ST-1080/PW09/4.2/2018
- Peluncuran Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran
- Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi. Berdasarkan SK Direksi No. 042-1 Tahun 2017
- Pengukuran SPI Tahun 2018. Pengukuran Sistem Pengendalian Internal oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta
- Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Resiko Tahun 2018 oleh Divisi Internal Audit dengan indeks maturitas 2,89
- Pengesahan Kebijakan Manajemen Resiko. Berdasarkan Peraturan Direksi No.033 Tahun 2018 tanggal 27 November 2018
- *Introduction of Corporate Values (I CAN). Directors Regulation No. 003 of 2018 regarding Implementation of Core Values and Leadership Competencies in PT MRT Jakarta.*
- *Amendment to the Code of Conduct. Based on Directors regulation No. 007-1 of 2018 on April 30, 2018*
- *Ratification of revised corporate governance guidelines. Based on Directors regulation No. 014 Of 2018*
- *GCG Assessment Of 2018 by BPKP. Based on Head of BPKP DKI Jakarta Letter of Duty No. ST-1080/PW09/4.2/2018*
- *WBS Launching*
- *Establishment of gratification control Unit. Based on Directors Decree No. 042-1 of 2017*
- *SPI qualification Of 2018. Internal Control System assessment by BPKP DKI Jakarta*
- *Assessment of Risk Maturity of 2018. Risk Maturity Index assessment year 2018 by Internal Audit Division with maturity index 2.89*
- *Ratification of Risk Management Policy. Based on Directors Regulation No.033 Tahun 2018 November 27, 2018*

2019

- Pengesahan Pembaruan Piagam Internal Audit. Disahkan pada tanggal 31 Januari 2019 oleh Direktur Utama dan Plt. Komisaris Utama
- Pengesahan Pembaruan Pedoman Perilaku. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 041 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019
- Pengesahan Pembaruan Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 005 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019
- Pengesahan Pembaruan Pedoman Pengelolaan LHKPN. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 011 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019
- Penandatanganan Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan. Dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2019
- Pembaruan nama Komite Nominasi dan Remunerasi. Perubahan nomenklatur Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi Komite SDM dan Pengusahaan
- Pembaruan nama Komite Pemantau Risiko. Perubahan nomenklatur Komite menjadi Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti
- Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2019 oleh BPKP. Berdasarkan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan DKI Jakarta No. ST-1071/PW09/4.2/2019
- Pengukuran SPI Tahun 2019. Pengukuran Sistem Pengendalian Internal oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta dengan nilai 77,10
- Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Resiko Tahun 2019. Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Resiko Tahun 2019 oleh PT Deloitte Konsultan Indonesia dengan indeks maturitas 3.55
- Keikutsertaan dalam program *Corporate Governance Perception Index* (CGPI). Hasil penilaian CGPI menunjukkan perolehan skor 80,47 dari skala 100 dengan kategori "Terpercaya"
- Pengesahan Sistem Manajemen Terintegrasi. Berdasarkan Peraturan Direksi No. 065 Tahun 2019
- Pelaksanaan Audit ISO Terintegrasi. Perseroan berhasil memperoleh sertifikasi ISO Terintegrasi dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018), Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), dan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) yang berlaku sampai dengan tahun 2022.
- Pengesahan kebijakan manajemen keberlangsungan usaha Berdasarkan Peraturan Direksi No. 042 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019.
- *Ratification of Revised Internal Audit Charter. Approved on January 31, 2019 by President Director and Act. President Commissioner*
- *Amendment to the Code of Conduct. Based on Directors regulation No. 041 of 2019 on July 31, 2019*
- *Revised Guidelines for Gratification Control. Based on Directors regulation No. 005 of 2019 on January 29, 2019*
- *Amendment to LHKPN Management Guidelines. Based on Directors Regulation No. 011 of 2019 on February 22, 2019*
- *Signing of the Commitment of Board of Commissioners and Directors in implementing GCG. Held on January 29, 2019*
- *Change in the name of Nomination and Remuneration Committee. Nomenclature changes of Nomination and Remuneration Committee to Human Capital and Business Committee*
- *Change in the name of Risk Monitoring Committee. Nomenclature changes of Risk Monitoring Committee to Risk and Security Monitoring Committee*
- *GCG Assessment of 2019 by BPKP. Based on Head of BPKP DKI Jakarta Letter of Duty No. ST-1071/PW09/4.2/2019*
- *SPI Qualification of 2019. Internal Control System assessment by BPKP DKI Jakarta with score 77,10*
- *Assessment of Risk Maturity of 2019. Risk Maturity Index assessment year 2019 by PT Deloitte Konsultan Indonesia with maturity index 3.55*
- *Participation in The Corporate Governance Perception Index (CGPI) program. CGPI evaluation shows a score of 80,47 out of 100 and being honored with the "Trusted" Category*
- *Ratification of Integrated Management System. Based on Directors Regulation No. 065 of 2019*
- *Implementation of ISO-Integrated Audit. The Corporate obtains Integrated ISO Certification which consists of Occupational Health and Safety Management System (ISO 45001:2018), Environment Management System (ISO 14001:2015) and Quality Management (ISO 9001:2015) with validity period until 2022*
- *Ratification of Business Continuity Management (BCM) Policy. Based on Directors Regulation No.042 year 2019 on August 23,2019.*

PETA JALAN: RENCANA PENGEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

ROAD MAP: DEVELOPMENT PLAN FOR IMPLEMENTING GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Perseroan telah menyusun dan memiliki peta jalan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No. 010 Tahun 2017 tentang Road Map Good Corporate Governance PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2017-2021. Peta jalan ini menjadi strategi besar Perseroan dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara bertahap hingga akhirnya mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

The Corporation compiled and has a GCG road map that is made based on Directors' Regulation No. 010 of 2017 concerning the Road Map of Good Corporate Governance of PT MRT Jakarta (Perseroda) for 2017-2021. This road map is a major strategy for the Corporation to gradually apply GCG principles until finally it is able to achieve the desired goals.

PETA JALAN PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK MRT JAKARTA 2017-2021

Road Map of MRT Jakarta GCG Development 2017 - 2021

| Framework Business Roadmap | Konstruksi Fase 1 Construction Phase I | Pra Operasi Fase 1 Pre Operation Phase I | 2019: Operasi dan Pemeliharaan Fase 1 2019: Operational & Maintenance Phase I | |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| GCG Maturity Level | GCG Managed Peningkatan Infrastruktur dan Sistem <i>Improvement of Infrastructure and Systems</i> | CG Managed Peningkatan Struktur & Sistem <i>Structure & System Improvement</i> | CG Learning & Growth Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sebagai Sebuah Strategi <i>Implementation of CG as a Strategy</i> | CG Citizenship <i>Added Value Stakeholders</i> |
| Stage Yearly | 2017 | 2018 - 2019 | 2020 | 2021 |
| Fokus Focus | Melengkapi kebijakan Struktur Lunak Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan sistem dasar tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal <i>Supporting GCG Soft Structure policy and basic governance, risk management and internal control systems</i> | <ul style="list-style-type: none"> Melengkapi kebijakan proses bisnis Perseroan Internalisasi Tata Kelola, Risiko, dan Kontrol Rencana Kepegawaian pada posisi struktur yang kosong Completing the corporate business process policies Internalization of Governance, Risk, & Control Manpower Planning in the position of the empty structure | <ul style="list-style-type: none"> Citra Perseroan: Perusahaan terpercaya untuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik Menyempurnakan proses bisnis dengan praktik internasional terbaik Corporate Brand: Trusted Company for GCG Improve business processes with best international practices | <ul style="list-style-type: none"> Menciptakan citra global "Operator lokal dengan Pemikiran Global" Memperlihatkan perjuangan dan pengorbanan Global branding "Local operator with Global Thinking" Showing sacrifice struggle and efforts |
| Main Drivens | Berbasis Kepatuhan <i>Compliance Based</i> | <ul style="list-style-type: none"> Berbasis Etika Berbasis Pasar Ethical Based Market Based | <ul style="list-style-type: none"> Berbasis Peningkatan Berkelanjutan Berbasis Budaya Continuous improvement Based Culture Based | <ul style="list-style-type: none"> Berbasis Pemangku Kepentingan (Menciptakan Nilai Saham) Stakeholder value Based (Creating Share Value) |
| Indikator Indicators | <ul style="list-style-type: none"> Mendesak Penyusunan Pedoman Struktur Lunak sesuai dengan hasil RUPS 2016 Penyusunan tugas pokok tiap divisi Penyusunan Rencana Utama TI | <ul style="list-style-type: none"> Mendesak 100% kebijakan atas proses bisnis 95% posisi organisasi terisi Sistem TI dalam tahap 4 Menetapkan Service Level Penyusunan Subsidi GCG | <ul style="list-style-type: none"> Mendesak 100% posisi organisasi telah terisi Melaksanakan BPA dibandingkan operator transportasi massal kelas internasional (SMRT) Meningkatkan nilai SLA Urgent | <ul style="list-style-type: none"> Penting Indonesia Sustainability Reporting Awards Tolak ukur untuk perusahaan lain Important Indonesia Sustainability Reporting Awards Indonesia Sustainability Reporting Awards |

| Framework Business Roadmap | Konstruksi Fase 1 Construction Phase I | Pra Operasi Fase 1 Pre Operation Phase I | 2019: Operasi dan Pemeliharaan Fase 1 2019: Operational & Maintenance Phase I | |
|-------------------------------|---|---|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Urgent • Formulating of Soft Structure guidelines in accordance with the 2016 GMS resolutions • Formulating of basic duties for each division • Preparation of IT Master Plan | <ul style="list-style-type: none"> • Subsidiary • Urgent • 100% policy on business processes • 95% of the organization's position is met • IT system in stage 4 • Establishing Service Level • Establishing GCG • Subsidiary | <ul style="list-style-type: none"> • 100% of the organization's position has been met • Implementing BPA compared to international mass transportation (SMRT) operators • Improved SLA scoring | <ul style="list-style-type: none"> • Benchmarks for other companies |
| <p>Penting Important</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Peta Jalan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 2017 – 2022 • Melaksanakan pemetaan proses bisnis Perusahaan (BPM) • Tone at the Top • Penyusunan materi value and code of ethics induction program to internal and limited external parties • Skor Penilaian SK-16: 75,10 • GCG Champion • ARA Award • Preparation of 2017 – 2022 GCG Road Map • Conducting corporation business process mapping (BPM) • Tone at the Top • Preparation of value and code of ethics for internal induction programs and limited external parties • Assessment Score SK-16: 75.10 • GCG Champion • ARA Award | <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian SK-16: 85,01 • Kondisi kepatuhan dalam tahap 4 • Kondisi Manajemen Risiko dalam tahap 4 • Kondisi pengendalian internal dalam Minor Deficiencies • Kondisi persepsi Pemangku Kepentingan atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam tahap 4 • Penghargaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan • Assessment Score SK-16: 85.01 • Condition of compliance at stage 4 • Risk Management Conditions at stage 4 • Internal control conditions in Minor Deficiencies • Stakeholders' view on GCG at stage 4 • CSR Awards | <ul style="list-style-type: none"> • Kondisi persepsi Pemangku Kepentingan atas Tata kelola Perusahaan yang Baik dalam tahap 5 • Penilaian SK-16: 90 • Perusahaan Terpercaya di Indonesia untuk Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan) • Pelaksanaan Manajemen Keberlanjutan sesuai standar GRI termasuk Laporan Keberlanjutan • Melaksanakan komunikasi reputasi Perseroan atas GRC sebagai nilai unggul • Melaksanakan komunikasi atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai benteng atas perilaku tidak etis (culture) • ASEAN Score Card/Standar Penilaian internasional lainnya • Stakeholders' views of GCG in stage 5 • Assessment Score SK-16: 90 • Indonesia Trusted Company for GCG (Corporate Governance Performance Index) • Implementation of Sustainability Management according to GRI standards including Sustainability Reporting • Communicating corporation's reputation for GRC as a competitive advantage • Communicating GCG to protect against unethical behaviors (culture) | |

Framework
Business Roadmap

Konstruksi Fase 1
Construction Phase I

Pra Operasi Fase 1
Pre Operation Phase I

2019: Operasi dan Pemeliharaan Fase 1
2019: Operational & Maintenance Phase I

• ASEAN Score Card / Other
international assessment
standards

Tabel 6.1
Table 6.1

PERKEMBANGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2019 DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 2019

Uraian tentang perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan di tahun 2019. A description of the development of GCG carried out in 2019.

Januari 2019 January 2019

1. Penandatanganan Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan
Commitment Statement Signing of the Board of Commissioners and Directors in implementing GCG
2. Pembaruan Piagam Internal Audit yang disahkan oleh Direktur Utama dan Plt. Komisaris Utama pada 31 Januari 2019
Renewal of the Internal Audit Charter approved by the President Director and Acting. President Commissioner on January 31, 2019
3. Pembaruan Pedoman Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Direksi No. 005 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019
Renewal of the Gratification Control Guidelines based on Directors' Regulation No. 005 of 2019 dated January 29, 2019
4. Sosialisasi LHKPN oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Socializing the Report of State Officials Wealth (LHKPN) by the Corruption Eradication Commission (KPK).

Februari 2019 February 2019

Pembaruan Pedoman Pengelolaan LHKPN berdasarkan Peraturan Direksi No. 011 Tahun 2019 tanggal 22 Februari 2019
Renewal of Report of State Officials Wealth Management Guidelines based on Directors' Regulation No.011 Year 2019 dated February 22, 2019

Juli 2019 July 2019

Pembaruan Pedoman Etika dan Perilaku berdasarkan Peraturan Direksi No. 041 Tahun 2019 tanggal 31 Juli 2019
Renewal of the Code of Conduct based on Directors' Regulation No. 041 of 2019 dated July 31, 2019

Juni 2019 June 2019

Penandatanganan Pakta Integritas oleh anggota Dewan Komisaris baru
Signing of the Integrity Pact by new members of the Board of Commissioners

Agustus 2019 August 2019

Sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi
Socializing Gratification Control based on Directors' Regulation No. 005 of 2019 dated January 29, 2019

September 2019
September 2019

1. Penyusunan Pedoman Penyusunan Pedoman, SOP dan Instruksi Kerja
Preparation of Guidelines Preparation of Guidelines, SOPs and Work Instructions
2. Internalisasi Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct)
Internalization of the Code of Conduct
3. Perubahan nomenklatur Komite Nominasi dan Remunerasi
Change of Nomenclature of the Nomination and Remuneration Committee to become the HC & Business Committee
4. Perubahan Nomenklatur Komite Pemantau Risiko menjadi Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti
Change of Nomenclature of the Risk Monitoring Committee to the Risk Monitoring and Security Committee.

Desember 2019
December 2019

1. Pelaksanaan penilaian penerapan GCG Tahun 2019 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Assessment of the implementation of GCG in 2019 by the Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) of DKI Jakarta Province
2. Pelaksanaan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Evaluation of the Implementation of the Internal Control System by BPKP DKI Jakarta Province
3. Pengukuran Tingkat Kematangan Manajemen Risiko pada tahun 2019 oleh PT Deloitte Konsultan Indonesia
Measurement of Risk Maturity in 2019 by PT Deloitte Konsultan Indonesia
4. PT MRT Jakarta (Perseroda) meraih Penghargaan "Trusted Company" dalam Corporate Governance Perception Index 2019
PT MRT Jakarta won the Trusted Award Company in Corporate Governance Perception Index 2019.

Dengan Nilai Score
87,33

Dengan Nilai Score
77,10

Dengan Nilai Score
3,55

Penghargaan Award
Trusted Company

PENGHARGAAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI TAHUN 2019
AWARD FOR THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 2019



Gambar 6.1. CGPI 2019 "Trusted Company"
Image 6.1. CGPI 2019 "Trusted Company"

Dalam ajang “Indonesia Most Trusted Companies 2019” yang digelar oleh Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) dan Majalah SWA, PT MRT Jakarta (Perseroda) mendapatkan penghargaan kategori “Trusted Company based on Corporate Governance Perception Index” dengan skor 80,47.

In the “Indonesia Most Trusted Companies 2019” event held by the Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine, PT MRT Jakarta (Perseroda) was honored with the “Trusted Company based on the Corporate Governance Perception Index” category with a score of 80.47.

Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi, Tuhayat, pada malam penganugerahan, Rabu, 11 Desember 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta. Ajang penghargaan ke-18 ini mengusung tema “Penguatan Platform Bisnis dalam Kerangka GCG”. Turut hadir pada acara tersebut, Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda), Adnan Pandu Praja.

The award was received directly by the Director of Finance and Corporate Management, Tuhayat, on the night of the awarding on Wednesday, December 11, 2019 at the Shangri-La Hotel, Jakarta. The 18th award event carries the theme “Strengthening the Business Platform within the GCG Framework”. Also present at the event, was the Corporate’s Commissioner, Adnan Pandu Praja.

STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM

INFRASTRUKTUR DAN STRUKTUR LUNAK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK MRT JAKARTA

Infrastructure and Soft Structure Good Corporate Governance of MRT Jakarta



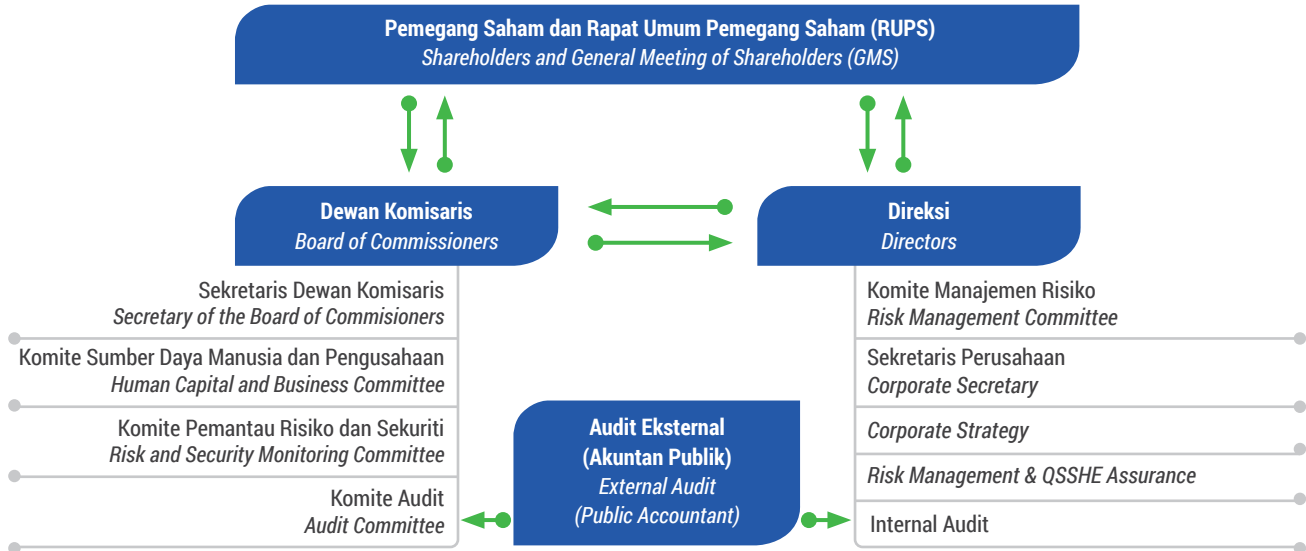
Figur 6.2
Figure 6.2

Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perseroan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sedangkan Mekanisme Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perseroan secara keseluruhan. Mekanisme Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga pemberlakuan aturan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

The Governance Structure is an organ or device owned by the Corporation be if an organ or device that was formed due to compliance with applicable laws and regulations, as well as an organ or device that was formed due to internal needs in order to improve GCG implementation. While the Governance Mechanism is a series of processes, habits, rules, and institutions that affects the overall management of the Corporation. The Governance Mechanism covers rules and regulations that apply to the Corporation, Permanent Procedures, Charter, documents, including the enforcement of rules governing relations between organs or instruments.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Organ Structure



Figur 6.3
Figure 6.3

MEKANISME TATA KELOLA

GOVERNANCE MECHANISM

Mekanisme Tata Kelola merupakan mekanisme implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang tercermin dalam sistem yang kuat. Hal ini menjadi penting, karena implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak cukup hanya dengan mengandalkan pilar struktur Tata Kelola, melainkan dibutuhkan adanya peraturan yang jelas dalam bentuk mekanisme. Mekanisme Tata Kelola dapat diartikan sebagai aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut.

The Governance Mechanism is a mechanism for implementing GCG which is reflected in a strong system. This becomes important, because the implementation of GCG is not enough just to rely on the pillars of the governance structure, but the need for clear regulations in the form of mechanisms. Governance mechanisms can be interpreted as rules of the game, procedures and clear relationships between parties acting as decision makers and those who execute supervision of these decisions.

Agar Struktur Tata Kelola di atas dapat berjalan dengan baik dan memiliki batasan tanggung jawab masing-masing, diperlukan Mekanisme Tata Kelola seperti peraturan dan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan serangkaian aturan internal, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi Perseroan berbasis pengelolaan yang akuntabel.

In order for the Governance Structure to run well and have limits of their respective responsibilities, a Governance Mechanism such as regulations and legislation as described previously is needed, and a set of internal rules, which are expected to create an environment in an organization that is based on an accountable management.

MEKANISME TATA KELOLA PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

PT MRT Jakarta (Perseroda) Governance Mechanism



Figur 6.4
Figure 6.4

Selama tahun 2019, Perseroan telah menyusun, menerapkan dan memperbarui kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi antara lain:

During 2019, the Corporation has developed, implemented and updated the GCG soft structure which consists of:

| Kebijakan dan Prosedur <i>Policies and Procedures</i> | Penetapan <i>Determination</i> |
|--|---|
| Anggaran Dasar Perseroan <i>Corporate's articles of association</i> | <p>Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT <i>Mass Rapid Transit</i> Jakarta No. 140 tanggal 17 Juni 2008 dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri No. AHU-36355.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan badan Hukum Perusahaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Juni 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan Berita Negara No. 21216 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Akta Nomor 23 Tanggal 13 Desember 2019 yang dibuat oleh dan di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, dan telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0105309. AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT <i>Mass Rapid Transit</i> Jakarta Perseroda.</p> <p><i>Deed of Establishment of PT Mass Rapid Transit Jakarta No. 140 dated June 17, 2008 by Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Ministerial Decree No. AHU-36355. AH.01.01. 2008 concerning Ratification of the Company's Legal Entity Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated June 27, 2008, and has been announced in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 86 dated 24 October 2008, Supplement to State Gazette No. 21216 of 2008 as amended the last time with Deed No. 23 dated December 13, 2019 made by and before Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notary in Jakarta, and was approved based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-0105309.AH .01.02. YEAR 2019 dated 16 December 2019 concerning Approval of the Amendment to the Limited Liability Company Association of PT Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda.</i></p> |
| Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct/CoC</i>) <i>Code of Ethics and Conduct (Code of Conduct / CoC)</i> | Peraturan Direksi No. 041 Tahun 2019 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>Directors Regulation No. 041 of 2019 concerning Code of Conduct within PT MRT Jakarta (Perseroda)</i> |
| Piagam Audit Internal <i>Internal Audit Charte</i> | Ditetapkan oleh Direktur Utama dan Plt. Komisaris Utama pada 31 Januari 2019 <i>Determined by the President Director and Acting President Commissioner on January 31, 2019</i> |
| Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) <i>Guidelines for Management of the Report of State Official Wealth (LHKPN)</i> | Peraturan Direksi No. 011 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi No. 009 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKPN) <i>Directors Regulation No. 011 of 2019 concerning Amendments to Directors' Regulation No. 009 of 2017 concerning Management of the Report of State Official Wealth (LHKPN)</i> |
| Pedoman Pengendalian Gratifikasi <i>Gratification Control Guidelines</i> | Peraturan Direksi No. 005 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi <i>Directors Regulation No. 005 of 2019 concerning Guidelines for Gratification Control</i> |
| Kebijakan Rantai Pasok dan Tata Kelola Pengadaan <i>Supply Chain Policy and Procurement Governance</i> | Peraturan Direksi No. 059 Tahun 2019 tentang Kebijakan Rantai Pasok dan Tata Kelola Pengadaan <i>Directors Regulation No. 059 of 2019 concerning Supply Chain Policy and Procurement Governance</i> |
| Pedoman Tata Kelola Informasi <i>Information Governance Guidelines</i> | Peraturan Direksi No. 013 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi <i>Directors Regulation No. 013 of 2019 concerning Guidelines for Management of Information Technology</i> |
| Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi <i>Special List of Board of Commissioners and Directors Share Ownership</i> | Daftar Khusus Kepemilikan Saham Dewan Komisaris diperbarui setiap tahun <i>Special List of Board of Commissioners' Share Ownership is updated every annually</i> |

| Kebijakan dan Prosedur <i>Policies and Procedures</i> | Penetapan <i>Determination</i> |
|---|---|
| Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Statement of Commitment of the Board of Commissioners and Directors to the Implementation of GCG</i> | Pernyataan Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi dalam Penerapan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diperbaharui setiap tahun <i>Statement of Commitment of the Board of Commissioners and Directors in the Implementation of GCG is updated annually</i> |
| Pedoman Penyusunan Pedoman SOP, dan Instruksi Kerja <i>Guidelines for Preparation of SOP Guidelines, and Work Instructions</i> | Peraturan Direksi No. 056 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Pedoman, Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja <i>Directors Regulation No. 056 of 2019 concerning Guidelines for the Preparation of Guidelines, Standard Operating Procedures and Work Instructions</i> |
| Direktur Utama sebagai <i>Role Model</i> <i>President Director as Role Model</i> | Keputusan Direksi No. 262 Tahun 2019 tentang Penetapan Direktur Utama sebagai Tokoh Panutan <i>Directors Decree No. 262 of 2019 concerning Designation of the President Director as Role Model</i> |

Tabel 6.2
Table 6.2

Kebijakan dan prosedur Tata Kelola Perusahaan telah diterbitkan dalam situs web Perseroan dengan alamat www.jakartamrt.co.id.

The Corporate's GCG policies and procedures have been published on the Corporation's website at www.jakartamrt.co.id.

SOSIALISASI KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK SOSIALIZATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE POLICIES

Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan kepada karyawan dilakukan secara rutin. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sosialisasi dilakukan melalui email kepada seluruh karyawan, maupun publikasi pada situs web Perseroan yang dapat dilihat dan diunduh dengan mudah oleh karyawan Perseroan maupun para pemangku kepentingan, media tatap muka, dan melalui video pada layar televisi Perseroan.

The socialization of Good Corporate Governance to all employees is conducted regularly. The objective is to provide an understanding of the implementation of good corporate governance and an understanding of policies related to GCG. The socialization is carried out through e-mails to all employees as well as publications on the Corporation's website that can be viewed and downloaded easily by Corporation's employees and stakeholders, face-to-face media and via video on the Corporation's television screens.



Melalui Surel
Through Email



Melalui Media Tatap Muka
Through Face-to-Face



Melalui Media Televisi
Through Television Media



Melalui Situs Web www.jakartamrt.co.id
Through Website www.jakartamrt.co.id

Figur 6.5
Figure 6.5

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE ORGAN STRUCTURE



Gambar 6.2
Image 6.2

Secara garis besar, struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup Perseroan mengacu kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang terdiri dari 3 (tiga) organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sistem pengelolaan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. Sementara RUPS merupakan forum bagi pemegang saham untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) organ komite, yaitu Komite Audit, Komite SDM & Pengusahaan, dan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, dengan didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi memiliki organ pendukung yaitu Divisi Sekretaris Perusahaan, Corporate Strategy, Internal Audit, Risk Management & QSSHE Assurance, dan Komite Manajemen Risiko.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan dituangkan dalam berbagai perangkat kebijakan yang telah disepakati secara bersama-sama oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Perangkat kebijakan ini mengatur pelaksanaan hubungan kerja seluruh Organ Tata Kelola di lingkungan Perseroan, dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Overall, the structure of GCG in the scope of the Corporate refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, consisting of 3 (three) main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), Directors, and Board of Commissioners.

As explained earlier, the Limited Liability Management system adheres to the 2 (two) tier system, namely the Board of Commissioners and the Directors with clear authority and responsibilities in accordance with their respective functions as mandated in the rules and regulations as well as the Articles of Association. While the GMS is a forum for shareholders to decide on strategic issues.

In carrying out their duties, the Board of Commissioners is assisted by 3 (three) committee organs, namely the Audit Committee, HC and Business Committee, and the Risk & Security Monitoring Committee, supported by the Secretary of the Board of Commissioners. Whereas the Board of Directors has supporting organs for the Corporate Secretary, Corporate Strategy, Internal Audit, Risk Management & QSSHE Assurance Division, and Risk Management Committee.

The Corporation's GCG mechanism is outlined in a variety of policy tools that have been mutually agreed upon by the Board of Commissioners and Directors. This policy set regulates the implementation of work relations for all Organs of Governance within the Corporation, with reference to the provisions of the Corporate's Articles of Association and / or applicable laws and regulations.

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI PERSEROAN

INFORMATION ON MAJOR SHAREHOLDERS / CORPORATE CONTROLLERS

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan definisi yang jelas terkait peran, fungsi, hak dan kewajiban dari pemegang saham sebagai pihak yang menjadi bagian dari kepemilikan perseroan; hal ini diatur melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan merupakan BUMD Provinsi DKI Jakarta, dengan kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100,00%, yang terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung melalui Perumda Pasar Jaya sebesar 0,01%. Dengan demikian Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company has provided a clear definition related to the roles, functions, rights and obligations of shareholders as parties who are part of the ownership of the corporate; where this matter is regulated through a General Meeting of Shareholders (GMS).

The Corporation is a DKI Jakarta Province ROE, with 100.00% ownership of the DKI Jakarta Provincial Government, consisting of 99.99% direct ownership and indirect ownership through Perumda (Provincial State-owned company) Pasar Jaya 0.01%. Therefore, DKI Jakarta Provincial Government acts as the Major Shareholder / Corporate Controller.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM PT MRT JAKARTA (PERSERODA) PER 31 DESEMBER 2019

Composition of PT MRT Jakarta (Perseroda) Shareholders as of December 31, 2019



Figur 6.6
Figure 6.6

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, hak-hak Pemegang Saham antara lain:

1. Menghadiri RUPS dan memberikan suara pada RUPS.
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya) baik dari Dewan Komisaris maupun Direksi mengenai keuangan atau hal-hal lain yang menyangkut Perseroan secara lengkap, tepat waktu dan teratur.
3. Memperoleh pembagian laba Perseroan (dividen).
4. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai dalam menyelenggarakan RUPS Tahunan dan sewaktu-waktu meminta penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu.
5. Mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
6. Menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

In accordance with the Corporate's Articles of Association, the rights of the Shareholders include:

1. Attend the GMS and vote at the GMS.
2. Obtain material information (including the right to ask) from both the Board of Commissioners and the Directors regarding financial matters or other matters concerning the Corporation in a complete, timely and orderly manner.
3. Obtain a distribution of the Corporate's profits (dividends).
4. Organize the GMS in the event that the Directors and / or the Board of Commissioners fails to hold an Annual GMS and at any time request an Extraordinary GMS if deemed necessary.
5. Make a binding resolution without the GMS on the condition that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing the proposal in question.
6. Exercising other rights based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai organ Perseroan merupakan wadah bagi Pemegang Saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan; termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.

Adapun wewenang RUPS meliputi:

1. Menetapkan dan melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Menetapkan komposisi jabatan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Menetapkan target dan kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Melaksanakan penilaian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Menyetujui atau menolak Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
7. Memberikan persetujuan/keputusan atas usulan aksi Perseroan yang perlu mendapat persetujuan RUPS.
8. Menetapkan Auditor Eksternal.
9. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan termasuk laporan keuangan dan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
10. Menetapkan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan (bila saldo laba positif).

JENIS RUPS GMS TYPE

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

General Meeting of Shareholders (GMS) is a Corporate Organ that has the authority not given to the Directors or the Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association. GMS as a Corporate organ is a place for Shareholders to make important decisions relating to capital invested in the Corporation, taking into account the provisions of the Articles of Association and the applicable laws and regulations.

GMS and / or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and authorities of the Board of Commissioners and Directors without limiting the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations; including to replace or dismiss members of the Board of Commissioners and/or Directors.

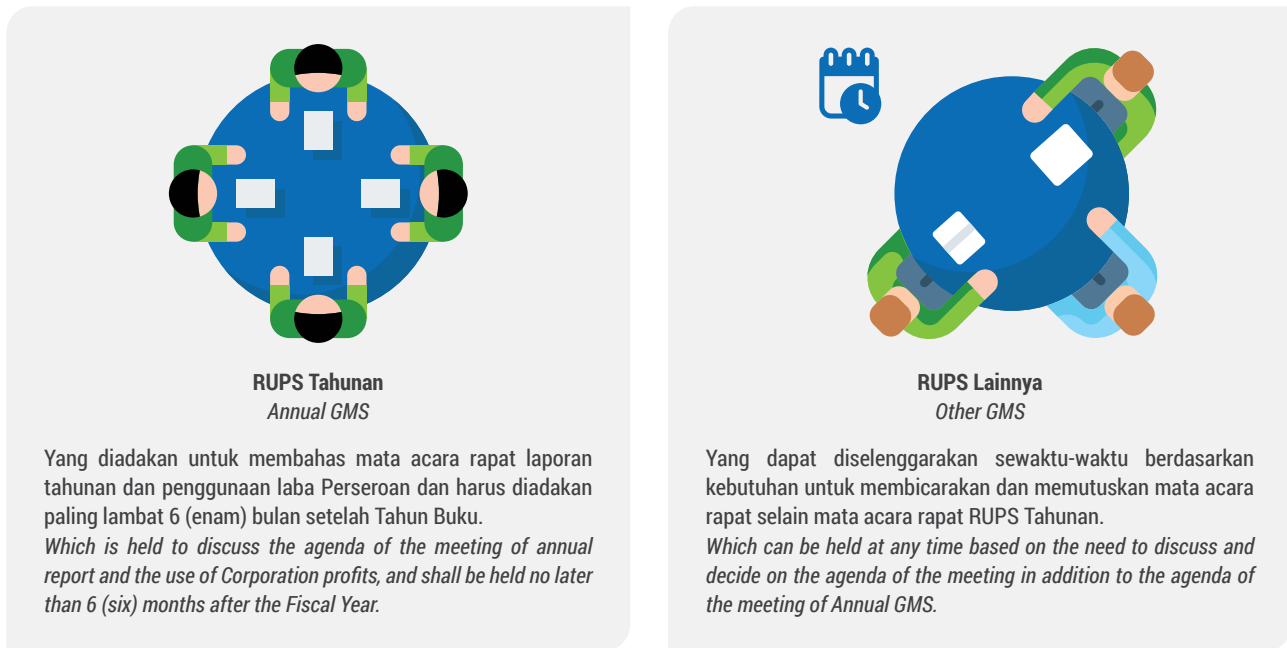
The authority of the GMS includes:

1. *Determine and implement the appointment and dismissal of the Board of Commissioners and Directors in accordance with statutory regulations.*
2. *Determine the composition of the Board of Commissioners and Directors.*
3. *Determine the targets and performance of the Board of Commissioners and Directors, and provide an assessment of the achievement of the performance of the Board of Commissioners and Directors.*
4. *Determine salary / honorarium, benefits, facilities and bonuses / incentives for the performance of the Board of Commissioners and Directors.*
5. *Carry out an assessment of prospective members of the Board of Commissioners and Directors.*
6. *Approve or reject the Corporation's Long Term Plan (RJPP) and the Corporation's Work Plan and Budget (RKAP).*
7. *Give approval/decisions on the proposed action of the Corporation that requires the approval of the GMS.*
8. *Establish External Auditors.*
9. *Approve and ratify annual reports including financial statements and the supervisory duties of the Board of Commissioners.*
10. *Determine the use of net income including the determination of the amount of allowance for reserves (if the balance of profit is positive).*

Based on the Corporate's Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the GMS consists of the Annual GMS and Other GMS.

JENIS-JENIS PELAKSANAAN RUPS

Types of GMS Implementation



Figur 6.6
Figure 6.6

Dalam RUPS Tahunan, dibahas laporan Direksi mengenai perhitungan tahunan, laporan tahunan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukan Akuntan Publik serta hal lainnya demi kepentingan Perseroan.

Sedangkan RUPS Lainnya diselenggarakan sewaktu-waktu, dapat berbentuk:

1. RUPS Luar Biasa
RUPS yang diselenggarakan sewaktu-waktu dengan metode penyelenggaraan yang sama dengan RUPS Tahunan.

In the Annual GMS, the Directors' report is discussed concerning the annual calculation, the annual report on the condition and running of the Corporation, the plan to use profits and the amount of dividends paid, requests for appointment of a Public Accountant and other matters for the interests of the Corporation.

Whereas the other GMS is held at any time, in the form of:

1. *Extraordinary GMS*
The GMS is held at any time using the same method of administration as the Annual GMS.

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RUPS PERSEROAN

PROVISIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF THE CORPORATION'S GMS

Baik RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya merupakan hak dan wewenang Pemegang Saham dalam mengendalikan kinerja Perseroan dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang atau Anggaran Dasar. Keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan usaha Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS Tahunan diselenggarakan secara rutin setiap tahun dan RUPS Lainnya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha dimana pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat atau dengan iklan dalam surat kabar

Both the Annual GMS and Other GMS are the rights and authority of the Shareholders in controlling the Corporation's performance within the limits determined by the law or the Articles of Association. Decisions resulted at the Annual GMS and Other GMS are made transparently with due regard to the Corporation's business interests.

In accordance with the provisions of the Corporate's Articles of Association, the Annual GMS is held regularly every year and Other GMS can be held at any time based on needs and in accordance with applicable regulations. The GMS is where the Corporation's domicile or where the Corporation conducts business activities where summons are made by registered mail or by advertisements in newspapers no later than 14 days prior to the date the

paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan atau diadakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau melalui sarana media elektronik lainnya, dengan risalah rapat dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh Pemegang Saham yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani. RUPS Tahunan dipimpin oleh Komisaris Utama.

Mengingat kepemilikan saham Perseroan sebesar 99,99% oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 0,01% oleh Perumda Pasar Jaya, dalam hal pengambilan dalam RUPS dilakukan dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat. Sedangkan untuk pengambilan keputusan sirkuler, keputusan dinyatakan sah apabila seluruh Pemegang Saham menyetujui usulan didistribusikan secara tertulis.

GMS is held or held through teleconferencing media, video conferences, or through other electronic media facilities, with minutes of the meeting made in writing and circulated to all participating Shareholders for approval and signature. The Annual GMS is chaired by the President Commissioner.

Considering the Corporation's 99.99% share ownership by the DKI Jakarta Provincial Government and 0.01% by P Pasar Jaya, in terms of decision making at the GMS, is conducted through a deliberation mechanism for consensus. Whereas for circular decision making, the decision shall be declared valid if all Shareholders approve the proposal which is distributed in writing.

PENYELENGGARAAN RUPS SEPANJANG TAHUN 2019 DAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS DI SEPANJANG TAHUN 2019

GMS HELD THROUGHOUT 2019 AND RESOLUTION OF SHAREHOLDERS WITHOUT THE GMS THROUGHOUT 2019

Sepanjang tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan 3 (tiga) kali RUPS, yaitu:

- Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa pada tanggal 28 Maret 2019 tentang Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018. Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dan hal-hal lainnya.
- Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian Plt. Komisaris Utama dan Pengangkatan Komisaris Utama serta Komisaris.
- Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa pada tanggal 28 November 2019 tentang Perubahan RKAP Tahun Buku 2020, Peningkatan Modal Dasar Perseroan, Pengesahan Modal Disetor dan Ditempatkan Perseroan, dan hal-hal lainnya.

Berikut disampaikan masing-masing RUPS dan keputusan pemegang saham di luar RUPS.

Seluruh keputusan dalam RUPS dilakukan dengan musyawarah mufakat. Adapun hasil keputusan RUPS beserta pelaksanaannya dan tindak lanjutnya oleh Manajemen hingga akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Throughout 2019, the Corporate held 3 (three) General Meeting of Shareholders, namely:

- *Implementation of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 28, 2019 regarding the Approval of the Corporation's Annual Report on the condition and running of the Corporation during Fiscal Year 2018 including the Report on the Implementation of the Supervisory Board of Commissioners during the 2018 Fiscal Year. Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2018, and Other things.*
- *Resolution of Shareholders without GMS dated May 31, 2019 concerning Dismissal of Acting President Commissioner and Appointing of President Commissioner and Commissioner.*
- *Implementation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 28, 2019 concerning Amendments to the RKAP for Fiscal Year 2020, Increase in the Corporate's Authorized Capital, Ratification of the Corporate's Paid Up and Issued Capital, and other matters.*

Please find the respective GMS and Circular Resolution of Shareholders as follows.

All resolution in the GMS are carried out by consensus agreement. The result of the GMS resolution along with its implementation and follow-up by the Corporation Management until the end of 2019 are as follows:

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS 31 MEI 2019

Resolution of Shareholders without the GMS 31 May 2019

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow-up by Management Until the End of 2019</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------|---|----------------|---|--|
| <p>Keputusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat saudara RUKIJO selaku Plt. Komisaris Utama Perusahaan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Plt Komisaris Utama. Selanjutnya saudara RUKIJO tetap menjalankan jabatannya selaku Komisaris Perseroan sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. 2. Mengangkat saudara MUHAMMAD SYAUGI sebagai Komisaris Utama Perseroan dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. 3. Memberhentikan dengan hormat saudara YUSMADA FAIZAL selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris. 4. Mengangkat saudara ADNAN PANDU PRAJA sebagai Komisaris Perseroan dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk sewaktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir. 5. Dengan dilakukan pengangkatan tersebut di atas, Susunan Pengurus Perseroan selengkapny menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris <table border="0" data-bbox="172 1496 794 1641"> <tr><td>Komisaris Utama</td><td>: Muhammad Syaugi</td></tr> <tr><td>Komisaris</td><td>: Rukijo</td></tr> <tr><td>Komisaris</td><td>: Adnan Pandu Praja</td></tr> <tr><td>Komisaris</td><td>: Muhtasor</td></tr> <tr><td>Komisaris</td><td>: Zulfikri</td></tr> </table> b. Direksi <table border="0" data-bbox="172 1675 794 1816"> <tr><td>Direktur Utama</td><td>: William P. Sabandar</td></tr> <tr><td>Direktur Konstruksi</td><td>: Silvia Halim</td></tr> <tr><td>Direktur Operasional dan Pemeliharaan</td><td>: Muhammad Effendi</td></tr> <tr><td>Direktur Keuangan dan Administrasi</td><td>: Tuhiyat</td></tr> <tr><td>Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis</td><td>: Ghamal Peris</td></tr> </table> | Komisaris Utama | : Muhammad Syaugi | Komisaris | : Rukijo | Komisaris | : Adnan Pandu Praja | Komisaris | : Muhtasor | Komisaris | : Zulfikri | Direktur Utama | : William P. Sabandar | Direktur Konstruksi | : Silvia Halim | Direktur Operasional dan Pemeliharaan | : Muhammad Effendi | Direktur Keuangan dan Administrasi | : Tuhiyat | Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis | : Ghamal Peris | √ | <p>Keputusan langsung berlaku. <i>The resolution applies immediately</i></p> |
| Komisaris Utama | : Muhammad Syaugi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | : Rukijo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | : Adnan Pandu Praja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | : Muhtasor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | : Zulfikri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Utama | : William P. Sabandar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Konstruksi | : Silvia Halim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Operasional dan Pemeliharaan | : Muhammad Effendi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Keuangan dan Administrasi | : Tuhiyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis | : Ghamal Peris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Selanjutnya para pemegang saham memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menuangkan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini ke dalam suatu akta Notaris, serta membuat perubahan yang disyaratkan guna penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

| Hasil Keputusan Resolution | Sudah/Belum Terlaksana Has Been / Has Not Been Implemented | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019 Follow-up by Management Until the End of 2019 |
|-------------------------------|--|--|
|-------------------------------|--|--|

Decision:

1. Respectfully dismiss RUKIJO as Acting The President Commissioner of the Corporation commencing from the last date of the Decision of the Shareholders outside the General Meeting of Shareholders and expresses highest gratitude and appreciation for his services during his tenure as Acting President Commissioner. Furthermore, RUKIJO continues with his positions as Commissioners of the Corporation in accordance with the provisions of the Corporation's Articles of Associations.
2. To appoint MUHAMMAD SYAUGI as the President Commissioner of the Corporation with a period of appointment in accordance with the Articles of Association of the Corporation as of the date of the latest signing of the Shareholder Resolution Without the General Meeting of Shareholder, without prejudice to the GMS' right to terminate before the term ends.
3. Respectfully honor Mr. YUSMADA FAIZAL as a Commissioner of the Corporation as of the last date of the Resolution of the Shareholder Without the General Meeting of Shareholders and express his highest gratitude and appreciation for his service during his time as Commissioner.
4. To appoint ADNAN PANDU PRAJA as a Commissioner of the Corporation for a period of appointment in accordance with the Corporate's Articles of Association as of the last date of the Resolution of the Shareholders Without the General Meeting of Shareholders without prejudice to the GMS' right to terminate before the term ends.
5. With the appointment mentioned above, the complete composition of the Corporation's Management is as follows:
 - a. Board of Commissioners

| | |
|------------------------|---------------------|
| President Commissioner | : Muhammad Syaugi |
| Commissioner | : Rukijo |
| Commissioner | : Adnan Pandu Praja |
| Commissioner | : Muhtasor |
| Commissioner | : Zulfikri |
 - b. Board of Directors

| | |
|--|-----------------------|
| President Director | : William P. Sabandar |
| Director of Construction | : Silvia Halim |
| Director of Operations and Maintenance | : Muhammad Effendi |
| Director of Finance and Administration | : Tuhiyat |
| Director of Business Development and Support | : Ghamal Peris |

Furthermore, the shareholders authorize the substitution rights to the Directors of the Corporation both jointly and individually to have the Decision of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders into a notarial deed, as well as making the required changes to adjust to the provisions laws and regulations.

Tabel 6.3
Table 6.3

RUPS TAHUNAN 28 MARET 2019
KANTOR PT MRT JAKARTA (PERSERODA), WISMA NUSANTARA LANTAI 21

Annual GMS March 28, 2019
PT MRT Jakarta (Perseroda) Office, Wisma Nusantara 21st Floor

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been /</i> <i>Has Not Been</i> <i>Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow-up by Management</i> <i>Until the End of 2019</i> |
|--|---|--|
| <p>Keputusan Mata Acara 1: Menyetujui Laporan Tahunan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018</p> <p>Resolution for Agenda 1: <i>Approve the Corporation's Annual Report and approve the Supervisory Report that has been implemented by the Board of Commissioners for the 2018 fiscal year</i></p> | √ | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 32 tahun 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>The resolution applies immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 32 of 2019 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 2: Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ersnt & Young) sesuai dengan laporannya No. 00183/2.1032/AU/1/06/0691-2/1/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal yang Material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.</p> <p>Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.</p> <p>Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi adanya tindak pidana penyalahgunaan jabatan yang menyebabkan kerugian Perseroan yang patut diduga dilakukan karena kesengajaan, ketidakhati-hatian, ketidakprofesionalan atas pengambilan keputusan yang tidak proporsional, maka Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) dapat dimintakan tanggung jawab pribadi.</p> <p>Resolution for Agenda 2: <i>To ratify the Corporation's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2018 which have been audited by Purwanto, Sungkoro, and Surja (Ersnt & Young) Public Accountants in accordance with their report No. 00183/2.1032/AU/1/06/0691-2/1/III/2019 dated March 14, 2019 with reasonable opinions in all material respects in accordance with financial accounting standards in Indonesia.</i></p> <p><i>Furthermore, with the approval of the Annual Report and the ratification of the Corporation's Financial Statements for the 2018 financial year, the GMS provides full redemption and release from responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners for supervisory actions has been carried out during the fiscal year ending December, 312018 to the extent that such actions are reflected in the Corporation's Financial Statements.</i></p> <p><i>If in the future, indications of misuse that are found to cause losses to the Corporation that are reasonably suspected of being done due to deliberate, inadvertent, unprofessional decision making are nor proportional, then the Management (Board of Commissioners and Directors) can be asked</i></p> | √ | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 32 tahun 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>The resolution applies immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 32 of 2019 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders</i></p> |

| <p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p> | <p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i></p> | <p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow-up by Management Until the End of 2019</i></p> |
|---|--|---|
| <p><i>for personal responsibility.</i></p> <p>Keputusan Mata Acara 3: Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) sesuai dengan Prosedur Pengadaan yang berlaku di Perseroan, untuk melaksanakan audit Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Resolution of Agenda 3: <i>To give authority to the Board of Commissioners to appoint an external auditor (Public Accountant Office) in accordance with the Procurement Procedures in force in the Corporation, to carry out audits for the Fiscal Year that end December 31, 2019.</i></p> | <p>√</p> | <p>Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 telah diterbitkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja pada tanggal 12 Maret 2020. <i>An audit of the Corporation's Financial Statements for Fiscal Year 2019 has been issued by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja on March 12, 2020.</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 4: Untuk penetapan Gaji/Honorarium, Insentif dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019 dilakukan oleh Pemegang Saham Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang hasilnya disampaikan melalui Dewan Komisaris. Resolution for Agenda 4: <i>For the stipulation of Salary/Honorarium, Incentives and Remuneration for Directors and Board of Commissioners of 2019, the Shareholders of the Jakarta Special Capital Region Government shall be based on the recommendations of the Board of Commissioners by referring to the provisions of the Governor Regulations of the Jakarta Capital Special Region concerning Guidelines for Determining the Income of Directors Supervisors and Board of Commissioners Regional Government-Owned Enterprises of the Special Capital Province of Jakarta whose results are submitted through the Board of Commissioners.</i></p> | <p>√</p> | <p>Persetujuan Pemegang Saham melalui Surat Plt. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) tanggal 31 Juli 2019 perihal remunerasi pengurus PT MRT Jakarta (Perseroda) 2018 dan 2019. <i>Shareholder Approval through Letter of Acting Head of Regional Owned Enterprise Development Agency (BP BUMD) on 31 July 2019 regarding the remuneration of the management of PT MRT Jakarta (Perseroda) 2018 and 2019.</i></p> |

Tabel 6.4
Table 6.4

RUPS LUAR BIASA 28 MARET 2019
KANTOR PT MRT JAKARTA (PERSEROA), WISMA NUSANTARA LANTAI 21

Extraordinary GMS March 28, 2019
PT MRT Jakarta (Persero) Office, Wisma Nusantara 21st Floor

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been /</i> <i>Has Not Been</i> <i>Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution</i> <i>of Extraordinary GMS 2019 Decision until the</i> <i>End of 2019</i> |
|--|---|--|
| <p>Keputusan Mata Acara 1: Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan (RKAP) 2019 sehingga menjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Proyek sebesar Rp4.413.862.000.000,- (empat triliun empat ratus tiga belas miliar delapan ratus enam puluh dua juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Penerusan Hibah dan Penerusan Pinjaman; 2. Anggaran Belanja Modal (<i>Capital Expenditure</i>) sebesar Rp225.987.000.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar sembilan miliar delapan puluh tujuh juta Rupiah) dan Anggaran Biaya Operasional Usaha (<i>Operational Expenditure</i>) sebesar Rp634.125.000.000,- (enam ratus tiga puluh empat milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah) yang bersumber dari Saldo Kas Perusahaan; dan 3. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Non-Farebox sebesar Rp94.275.000.000,- (sembilan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan Pendapatan <i>Farebox</i> serta Pendapatan Subsidi yang nilainya disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Segala sumber dan penggunaan dana pada rincian RKAP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai lampiran Keputusan RUPS ini akan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyesuaian RKAP dalam rangka pemenuhan terhadap peraturan dan/atau perkembangan bisnis yang berdampak material, dilakukan oleh Perseroan berdasarkan Tata Kelola Perseroan yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Resolution on Agenda 1: <i>To approve the Amendment of 2019 Corporate & Budget Plan (RKAP) so that it becomes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Project Budget in the amount of Rp4,413,862,000,000 (four million four hundred thirteen billion eight hundred sixty-two million rupiah) taken from the Grant Forwarding and Loan Forwarding Funds;</i> 2. <i>Capital Expenditure Budget of Rp225,987,000,000 (two hundred twenty-five billion nine hundred eighty-seven million rupiah) taken from the Company's Cash Balance; and</i> 3. <i>Revenues consisting of Non-Farebox Revenues amounting to Rp94,275,000,000 (ninety-four billion two hundred seventy-five million rupiah) and Farebox Revenues and Subsidy Revenues whose value is adjusted to the policies of the DKI Jakarta Provincial Government and the provisions of laws and regulation invitation.</i> | <p align="center">√</p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 32 tahun 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham <i>The resolution applies immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 32 of 209 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders.</i></p> |

| <p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p> | <p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i></p> | <p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2019 Decision until the End of 2019</i></p> |
|---|--|--|
| <p><i>All sources and uses of funds in the details of the RKAP which are an inseparable part as an attachment to this GMS Resolution will be held responsible by the Corporation's Management in accordance with the applicable laws and regulations and/or business developments that have a material impact, is carried out by the Corporation based on the prevailing corporate governance, as long as it does not conflict with the policies of the DKI Jakarta Provincial Government and the laws and regulations.</i></p> | | |
| <p>Keputusan Mata Acara 2: 1. Menyetujui secara prinsip persetujuan anak perusahaan di bidang Operator Sarana; 2. Menugaskan Perseroan untuk membuat kajian independen atas aspek legal, bisnis, keuangan, dan sumber daya manusia atas pembentukan anak perusahaan tersebut; 3. Menugaskan Dewan Komisaris Perseroan untuk memastikan pembentukan anak perusahaan sesuai dengan latar belakang, kajian dan manfaat yang telah diputuskan dalam RUPS.</p> <p>Resolution on Agenda 2: 1. <i>Approved in principle the establishment of a subsidiary of the corporation in the field of Facility Operators;</i> 2. <i>Assign the Corporation to make an independent study of the legal, business, Governance, Risk Management and Compliance, financial and human resources aspects of the establishment of such subsidiary;</i> 3. <i>Assign the Board of Commissioners of the Corporation to ensure the establishment of a subsidiary in accordance with the background studies and benefit that have been decided at the GMS.</i></p> | <p>√</p> | <p>Kajian independen atas aspek legal, bisnis, <i>Governance, Risk Management and Compliance</i>, keuangan, dan sumber daya manusia atas pembentukan anak perusahaan telah dilakukan oleh konsultan RSM Indonesia. <i>An independent review of legal, business, governance, risk management and compliance aspects, finance and human resources for the establishment of a subsidiary has been carried out by a consultant RSM Indonesia.</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 3: Menyetujui dan mengesahkan penyesuaian Anggaran Dasar berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas (PT) MRT Jakarta (Perseroda), dengan rincian: 1. Mengubah nama Perseroan (Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan) menjadi "Perseroan Terbatas <i>Mass Rapid Transit</i> Jakarta (Perseroan Daerah)" atau disingkat menjadi "PT MRT Jakarta (Perseroda)" dan bertempat dan berkedudukan di Jakarta, dengan ketentuan bahwa segala tindakan yang dilakukan Perseroan sebelum keputusan RUPS ini berlaku yang mencantumkan nama Perseroan tanpa mencantumkan kata (Perseroda) pada akhir nama Perseroan. 2. Mengubah syarat pengangkatan Direksi (Pasal 13 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan) menjadi sebagai berikut: Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), yaitu: a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum; b. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;</p> | <p>√</p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 32 tahun 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Akta No. 13 tahun 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham <i>The resolution applies immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 32 of 2019 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders and Deed No. 13 dated June 12, 2019 concerning Resolution of General Meeting of Shareholders.</i></p> |

| <p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p> | <p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i></p> | <p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2019 Decision until the End of 2019</i></p> |
|---|--|---|
| <p>c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan yang memadai dalam bidang usaha Perseroan;</p> <p>d. Memiliki kompetensi manajemen perusahaan;</p> <p>e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;</p> <p>f. Tidak menjabat struktural dan fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan/atau Direksi BUMD lainnya;</p> <p>g. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit; dan</p> <p>h. Syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>3. Mengubah syarat pengangkatan Dewan Komisaris (Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan) menjadi sebagai berikut: Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah), yaitu:</p> <p>a. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;</p> <p>b. Memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi;</p> <p>c. Memahami manajemen Perseroan;</p> <p>d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan;</p> <p>e. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;</p> <p>f. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan manapun yang dinyatakan pailit.</p> <p>Resolution of Agenda 3: <i>Approve and ratify the Articles of Association adjustment based on DKI Jakarta Provincial Regulation Number 9 of 2018 concerning (Regional Corporation) Jakarta MRT Limited Liability Company, with details:</i></p> <p>1. <i>Change the name of the Corporation (Article 1 of the Company's Articles of Association) to "Jakarta Mass Rapid Transit Limited Corporate (Regional Corporation)" or abbreviated to "PT MRT Jakarta (Perseroda)" and domiciled in Jakarta, provided that all actions taken by the Corporation before the resolution of the GMS is valid that includes the name of the Corporation without including the word (Perseroda) at the end of the Corporation's name.</i></p> <p>2. <i>Change the terms of appointment of Directors (Article 13 paragraph 2 of the Corporation's Articles of Association) to be as follows: Only Indonesian citizens who can be appointed as members of the Board of Directors whose meet the requirements specified in the prevailing laws and regulations and the Provincial Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Number 9 of 2018 concerning the (Regional Corporation) Jakarta MRT Limited Liability Company, namely:</i></p> <p>a. <i>Able to carry out legal actions;</i></p> <p>b. <i>Have integrity, loyalty, and dedication;</i></p> <p>c. <i>Having sufficient expertise, experience, and capability in the Corporation's business fields;</i></p> <p>d. <i>Having competency in Corporate management;</i></p> | | |

| <p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p> | <p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i></p> | <p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2019 Decision until the End of 2019</i></p> |
|---|--|---|
| <p>e. Provide sufficient time to carry out their duties; f. Not serving structural and functional positions in institutions/ institutions of the Central Government and Regional Governments and / or other BUMD Directors; g. Never been involved in any Corporate activity that was declared bankrupt; and h. Other requirements specified in the Articles of Association.</p> <p>3. Change the terms of appointment of the Board of Commissioners (Article 16 paragraph 2 of the Corporate's Articles of Association) to be as follows: Only Indonesian citizens who can be appointed as members of the Board of Commissioners whose meet the requirements specified in the applicable laws and regulations and the Provincial Regulation of the Special Capital Region of Jakarta MRT Limited Liability Company, namely:</p> <p>a. Able to carry out legal actions; b. Have integrity, loyalty and dedications; c. Understand the management of the Corporation; d. Have adequate knowledge in the Corporation's business fields; e. Provide sufficient time to carry out their duties; f. Never been involved in any of the Corporate activities that were declared bankrupt.</p> | | |
| <p>Keputusan Mata Acara 4: Menyetujui dan mengesahkan pemutakhiran Rencana Jangka Panjang Perusahaan untuk Tahun 2018–2030 dan Rencana Jangka Menengah Perusahaan untuk Tahun 2018–2022, dengan catatan sebagai berikut:</p> <p>1. Perlu dilakukan sinkronisasi dengan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, serta Rencana Induk Perkeretaapian dan Rencana Induk Transportasi Jakarta sesuai ketentuan perundang-undangan;</p> <p>2. Perlu dilakukan penyesuaian dalam hal pendirian anak perusahaan sarana dan aksi korporasi yang berdampak secara material pada proyeksi laporan keuangan Perseroan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Resolution of Agenda 4: Agree and approve the update of the Corporation's Long-Term Plan for 2018 - 2030 and the Corporation's Medium-Term Plan for 2018 - 2022, with the following notes:</p> <p>1. It is necessary to synchronize with the Jabodetabek Transportation Master Plan, as well as the Railroad Master Plan, and the Jakarta Transportation Master Plan in accordance with statutory provisions;</p> <p>2. It is necessary to do adjustments in the case of the establishment of subsidiary companies and corporate actions that have a material impact on the projected financial statements of the Corporation in accordance with the policies of the DKI Jakarta Provincial Government and statutory provisions.</p> | <p>√</p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 32 tahun 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The resolution applies immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 32 of 2019 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 5: Sebagai pemenuhan prasyarat dalam Perjanjian antara Perusahaan</p> | <p>√</p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta</p> |

| <p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p> | <p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i></p> | <p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2019 Decision until the End of 2019</i></p> |
|---|--|---|
| <p>Terbatas Mass Rapid Transit Jakarta dengan Perusahaan Daerah Pasar Jaya dalam Rangka Kerjasama Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengoperasian Gedung Fungsi Campuran di Lokasi Lahan Eks Pasar Blora Nomor CON/013/MRT/VII/2018 dan 567/-1.824.541, Pemegang Saham menyetujui Kerjasama Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan dan Pengoperasian Gedung Fungsi Campuran di Lokasi Lahan Eks Pasar Blora antara Perseroan dan Perumda Pasar Jaya guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Biaya pelaksanaan kerjasama dimaksud menggunakan kas Perseroan dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang besarnya sesuai kebutuhan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>Resolution of Agenda 5: <i>As a fulfillment of the requirements in the Agreement between the Jakarta Mass Rapid Transit Limited Liability Company and PERUMDA Pasar Jaya in the Framework of Collaboration on Land Utilization for the Construction and Operation of the Mixed Function Building in the Blora Ex-Market Land Location Number CON/013/MRT/VII2018 and 567/-1, 824. 541. Shareholders approved the Collaboration on Land Utilization for the Construction and Operation of the Mixed Function Building in the Blora Ex Market Area locaation between the Corporation and PERUMDA Pasar Jaya in order to meet the provisions in Government Regulation Number 54 Year 2017 concerning Regionally Owned Enterprises. The cost of implementing the said cooperation uses the Corporation's cash and/or other sources of finances the amount of which is according to the need based on the principles of good corporate governance and statutory provisions.</i></p> | | <p>No. 32 tahun 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The resolution applies immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 32 of 2019 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders</i></p> |

Tabel 6.5
Table 6.5

RUPS LUAR BIASA 2 NOVEMBER 2019
KANTOR PT MRT JAKARTA (PERSERODA), WISMA NUSANTARA LANTAI 21

Extraordinary GMS 2 November 2019
PT MRT Jakarta (Perseroda) Office, Wisma Nusantara 21st Floor

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been /</i> <i>Has Not Been</i> <i>Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the</i> <i>Resolution of Extraordinary GMS 2019</i> <i>Decision Until the End of 2019</i> |
|---|---|---|
| <p>Keputusan Mata Acara 1: Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2020 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Proyek sebesar Rp2.595.064.000.000,- (dua triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar enam puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari penerusan <i>JICA Loan</i>; dan Dana Pendamping Proyek Fase 2 sebesar Rp46.945.000.000,- (empat puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah) 2. Belanja Modal (<i>Capital Expenditure</i>) sebesar Rp280.431.000.000,- (dua ratus delapan puluh miliar empat ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan Biaya Operasional Usaha (<i>Operating Expense</i>) sebesar Rp905.779.000.000,- (sembilan ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang bersumber dari Saldo Kas Perusahaan; dan 3. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan <i>Farebox</i> sebesar Rp292.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua miliar rupiah), Pendapatan <i>Non-Farebox</i> sebesar Rp421.000.000.000,- (empat ratus dua puluh satu miliar rupiah) dan Pendapatan Subsidi sebesar Rp938.000.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar rupiah). <p>Dengan catatan bahwa Dana Pendamping Proyek Fase 2 dan Pendapatan Subsidi nilainya akan disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Resolution of Agenda 1: <i>Approve and ratify the Corporate Work Plan & Budget (RKAP) for Fiscal Year 2020, namely:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Project Budget of Rp2,595,064,000,000 (two trillion five hundred ninety five billion sixty four million rupiah) sourced from the forwarding of JICA Loan; and a Phase 2 Project Companion Fund of Rp46,945,000,000 (forty six billion nine hundred forty five million rupiah)</i> 2. <i>Capital Expenditure of Rp280,431,000,000 (two hundred eighty billion four hundred thirty-one million rupiah) and Operating Expense of Rp905,779,000,000 (nine hundred and five billion seven hundred seventy nine million rupiah) sourced from the Company's Cash Balance; and</i> 3. <i>Revenues consisting of Farebox Revenues of Rp292,000,000,000 (two hundred ninety two billion rupiahs). Non-Farebox Revenues of Rp421,000,000,000 (four hundred twenty one billion rupiah) and Revenues Subsidies amounting to Rp 938,000,000,000 (nine hundred thirty eight billion rupiah)</i> <p><i>With a note that the Project Funds for Phase 2 and Subsidized Income will be adjusted according to the policies of the DKI Jakarta Provincial Government later, and the provisions of the applicable laws and regulations.</i></p> | <p>√</p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 52 tanggal 29 November 2019 dan Akta No. 23 tanggal 13 Desember 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>The resolution applies immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 52 dated 29 November 2019 and Deed No. 23 December 13, 2019 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders.</i></p> |

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2019 Decision Until the End of 2019</i> |
|---|---|---|
| <p>Keputusan Mata Acara 2 Menyetujui dan Mengesahkan Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari sebelumnya sebesar Rp14.659.000.000.000,- (empat belas triliun enam ratus lima puluh sembilan miliar rupiah) menjadi Rp40.757.353.000.000,- (empat puluh triliun tujuh ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tiga juta rupiah)</p> <p>Resolution of Agenda 2: <i>Approved and Ratified the Increase in the Corporation's Authorized Capital from the previous amount of Rp14,659,000,000,000,- (fourteen trillion six hundred fifty nine billion rupiah) to Rp40,757,353,00,000,- (forty trillion seven hundred fifty seven billion three hundred fifty three million rupiah)</i></p> | √ | Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No 52 tanggal 29 November 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta No 23 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa <i>The resolution applies immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 52 dated 29 November 2019, concerning Minutes of General Meeting of Shareholders and Deed No. 23 December 13, 2019 concerning Resolution of General Meeting of Shareholders</i> |
| <p>Keputusan Mata Acara 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan saham baru sejumlah 3.660.724 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per saham kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengkonversi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Modal Disetor dan Ditempatkan penuh dalam Perusahaan; 2. Menyetujui dan Mengesahkan Peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan Perusahaan yang semula sebesar Rp9.111.248.000.000,- (sembilan triliun seratus sebelas miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) menjadi sebesar Rp12.771.972.000.000,- (dua belas triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) <p>Resolution of Agenda 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Issuance of the new shares of 3,660,724 (three million six hundred sixty thousand seven hundred twenty four) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share to the DKI Jakarta Provincial Government in the context of converting capital deposits which has been carried out by the DKI Jakarta Provincial Government to become Paid Up Capital and Placed fully in the Corporation; 2. Approved and Ratified the Increase in the Corporation's Paid Up and Placed Capital, which was originally Rp9,111,248,000,000 (nine trillion one hundred eleven billion two hundred forty eight million rupiah) to Rp12,771,972,000,000 (twelve trillion seven hundred seventy one billion nine hundred seventy two million rupiah) | √ | Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No 52 tanggal 29 November 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta No 23 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa <i>The resolution applies immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 52 date November 29, 2019, concerning Minutes of General Meeting of Shareholders and Deed No. 23 dated December 13, 2019, concerning Resolution of General Meeting of Shareholders.</i> |

| <p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p> | <p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i></p> | <p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2019 Decision Until the End of 2019</i></p> |
|--|--|---|
| <p>Keputusan Mata Acara 4: Menyetujui dan Mengesahkan Perubahan Nomenklatur Direktur Perseroan yang sebelumnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama; • Direktur Keuangan dan Administrasi; • Direktur Konstruksi; • Direktur Operasi dan Pemeliharaan; • Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis <p>menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktur Utama; • Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi; • Direktur Konstruksi; • Direktur Operasi dan Pemeliharaan; dan • Direktur Pengembangan Bisnis." <p>Resolution of Agenda 4: <i>Approve and Ratify the Amendment to the Nomenclature of the Corporate's Directors which previously:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>President Director;</i> • <i>Director of Finance and Administration;</i> • <i>Director of Construction;</i> • <i>Director of Operation and Maintenance</i> • <i>Director of Business Development and Support</i> <p><i>be as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>President Director;</i> • <i>Director of Finance and Corporate Management</i> • <i>Director of Construction</i> • <i>Director of Operation and Maintenance, and</i> • <i>Director of Business Development"</i> | <p>√</p> | <p>Keputusan langsung berlaku dan telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No 52 tanggal 29 November 2019 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Akta No 23 tanggal 13 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa <i>The resolution applies immediately and has been legally institutionalized through Deed No. 52 date November 29, 2019, concerning Minutes of General Meeting of Shareholders and Deed No. 23 dated December 13, 2019, concerning Resolution of General Meeting of Shareholders.</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 5: Menyetujui Pembentukan Anak Perusahaan Sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Resolution of Agenda 5: <i>Approve the Establishment of Subsidiary Companies in accordance with Law and Regulations</i></p> | <p>√</p> | <p>Sampai dengan akhir tahun 2019, pembentukan Anak Perusahaan Sarana masih dalam proses. <i>As of the end of 2019, the establishment of a subsidiary is still in process</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 6: Menyetujui Pembentukan Anak Perusahaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>Resolution of Agenda 6: <i>Approve the Establishment of a Transit Oriented Development (TOD) Subsidiary Company in accordance with Law and Regulations</i></p> | <p>√</p> | <p>Sampai dengan akhir tahun 2019, pembentukan Anak Perusahaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT) masih dalam proses. <i>As of the end of 2019, the establishment of a Transit Oriented Development (TOD) Subsidiary Company is still in process</i></p> |

Tabel 6.6
Table 6.6

INFORMASI RUPS DAN DAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS DI SEPANJANG TAHUN 2018 SERTA REALISASI HASIL KEPUTUSANNYA

INFORMATION ON THE GMS AND SHAREHOLDERS' RESOLUTION WITHOUT THE GMS THROUGHOUT 2018 AND THE REALIZATION OF THE RESOLUTION RESULT

Berikut disampaikan informasi tentang RUPS serta keputusan Pemegang Saham di sepanjang tahun 2018, serta tindak lanjut yang telah dilakukan Perseroan hingga akhir tahun 2019.

Following is the information on the GMS and Shareholders' resolution throughout 2018, as well as the follow-up that has been carried out by the Corporation until the end of 2019.

RUPS TAHUNAN 21 MARET 2018 KANTOR PT MRT JAKARTA (PERSERODA), WISMA NUSANTARA LANTAI 21 Annual GMS March 21, 2018 PT MRT Jakarta (Perseroda) Office, Wisma Nusantara 21st Floor

| Hasil Keputusan Resolution | Sudah/Belum Terlaksana Has Been / Has Not Been Implemented | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Tahunan 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2019 Decision Until the End of 2019 |
|---|--|---|
| <p>Keputusan Mata Acara 1: Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.</p> <p>Resolution of Agenda 1: <i>Approve the Corporation's Annual Report and approve the Supervisory Report that has been carried out by the Board of Commissioners for the 2017 Fiscal Year.</i></p> | √ | <p>Telah terealisasi. Persetujuan pemegang saham telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 132 Tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan.</p> <p><i>Has been realized Shareholder approval has been legally institutionalized through Deed No. 132 of 2018 concerning Minutes of Annual GMS</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 2: Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) sesuai dengan laporannya No. RPC-5845/PSS/2018 tanggal 5 Maret 2018 dengan pendapat Wajar dalam Semua Hal yang Material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 tersebut, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan</p> <p>Resolution of Agenda 2: <i>To ratify the Corporation's Financial Statements for the fiscal year ending on December 31, 2017 that have been audited by the Public Accounting Firm Purwanto, Sungkoro and Surja (Ernst & Young) in accordance with their report No. RPC-5845/PSS/2018 dated March 5, 2018 with a reasonable opinion in all material matters in accordance with financial accounting standards in Indonesia. Furthermore, with the approval of the Annual Report and the ratification of the Corporation's Financial Statements for the 2017 financial year, the Meeting provides full repayment and exemption from responsibility (volledig acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for management actions and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions taken, has been carried out during the fiscal year ending December 31, 2017 to the extent that such actions are reflected in the Corporation's Financial Statements.</i></p> | √ | <p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 132 Tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan.</p> <p><i>Has been legally institutionalized through Deed No. 132 of 2018 concerning Minutes of Annual GMS</i></p> |

| <p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p> | <p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i></p> | <p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Tahunan 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2019 Decision Until the End of 2019</i></p> |
|--|--|---|
| <p>Keputusan Mata Acara 3: Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan auditor eksternal (KAP) sesuai Prosedur Pengadaan yang berlaku di Perseroan untuk melaksanakan audit Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018</p> <p>Resolution of Agenda 3: <i>To give authority to the Board of Commissioners to appoint an external auditor (KAP) in accordance with the Procurement Procedures in force in the Corporate to carry out audits for the Financial Year which will end on December 31, 2018.</i></p> | <p>√</p> | <p>Telah terealisasi. Persetujuan pemegang saham telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 132 Tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan.</p> <p><i>Has been realized Shareholder approval has been legally institutionalized through Deed No. 132 of 2018 concerning Minutes of Annual GMS</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 4: Penetapan Gaji/Honorarium, Insentif Kerja dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 dilakukan oleh Pemegang Saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan usulan Dewan Komisaris dengan merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris BUMD Provinsi DKI Jakarta yang hasilnya akan disampaikan melalui Dewan Komisaris.</p> <p>Resolution of Agenda 4: <i>Determination of Salary/Honorarium, Work Incentives and Remuneration for Directors and Board of Commissioners in 2018 is carried out by DKI Jakarta Province Government as Shareholders based on the proposal of the Board of Commissioners by referring to the Regulation of the DKI Jakarta Governor Number 242 of 2015 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisors and Board of Commissioners of BUMD DKI Jakarta Province whose results will be submitted through the Board of Commissioners.</i></p> | <p>√</p> | <p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 132 Tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan.</p> <p><i>Has been legally institutionalized through Deed No. 132 of 2018 concerning Minutes of Annual GMS</i></p> |

Tabel 6.7
Table 6.7

RUPS LUAR BIASA 21 MARET 2018
KANTOR PT MRT JAKARTA (PERSERODA), WISMA NUSANTARA LANTAI 21
Extraordinary GMS March 21, 2018
PT MRT Jakarta (Perseroda) Office, Wisma Nusantara 21st Floor

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2019 Decision Until the End of 2019</i> |
|---|---|---|
| <p>Keputusan Mata Acara 1:</p> <p>1. Penerbitan saham baru sejumlah 444.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,- per saham kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengkonversi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh dalam Perseroan.</p> <p>2. Peningkatan Modal Disetor dan Ditempatkan yang semula sebesar Rp5.721.807.000.000,- menjadi sebesar Rp6.165.807.000.000,-.</p> <p>3. Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta Notaris. Selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p> <p>Resolutions of Agenda 1:</p> <p>1. <i>Issuance of new shares of 444.000 shares with a nominal value of Rp1.000.000,- per share to the DKI Jakarta Provincial Government in the context of converting capital deposits made by the DKI Jakarta Provincial Government to become Paid Up Capital and Placed fully in the Corporation .</i></p> <p>2. <i>The increase of paid up and issued capital amounted to Rp5,721,807,000,000 to Rp6,165,807,000,000.</i></p> <p>3. <i>Authorize the Corporation's Directors and/or parties appointed by the Corporation's Directors, both jointly and individually with the right to transfer this power to others authorized to declare this declare this decision in a notarial deed. Furthermore, the power of attorney or someone authorized by such power of attorney has the right to appear before the Notary to declare and sign this resolution as an official deed, and carry out all necessary actions, and notify the amendments to this authorized statute and make amendments or additions in whatever form is required to received notification of amendments to the Articles of Association, and submit and sign all requests and other documents, choose a place of domicile and carry out other.</i></p> | √ | <p>Penerbitan saham baru dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan telah dibukukan dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan.</p> <p><i>Issuance of new shares and increase in paid up and issued capital have been recorded in the Corporate's Financial Statements and Annual Report.</i></p> |

| <p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p> | <p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i></p> | <p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Annual GMS 2019 Decision Until the End of 2019</i></p> |
|--|--|--|
| <p>Keputusan Mata Acara 2:</p> <p>1. Mengubah struktur organisasi Perseroan dengan penambahan Organisasi Direksi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Utama b. Direktur Keuangan dan Administrasi c. Direktur Konstruksi d. Direktur Operasi dan Pemeliharaan e. Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis <p>2. Menambah satu Komisaris Perusahaan</p> <p>Resolutions of Agenda 2:</p> <p>1. <i>Change the organizational structure of the Corporate by adding the Directors's Organization as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>President Director</i> b. <i>Director of Finance and Administration</i> c. <i>Director of Construction</i> d. <i>Director of Operations and Maintenance</i> e. <i>Director of Business Development and Support</i> <p>2. <i>Add one Corporate Commissioner</i></p> | <p>√</p> | <p>Telah terealisasi. Persetujuan pemegang saham telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 132 Tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan.</p> <p><i>Has been realized Shareholder approval has been legally institutionalized through Deed No. 132 of 2018 concerning Minutes of Annual GMS</i></p> <p>Telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No. 132 tahun 2018 tentang Berita Acara RUPS Tahunan.</p> <p><i>Has been legally institutionalized through Deed No. 132 of 2018 concerning Minutes of Annual GMS</i></p> |
| <p>Keputusan Mata Acara 3:</p> <p>1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi.</p> <p>2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta Notaris. Selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p> <p>Resolution of Agenda 3:</p> <p>1. <i>Approved the amendment to the Corporate's Articles of Association to comply with Government Regulation No. 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprise.</i></p> <p><i>Give authority and power to the Directors of the Corporate and/or parties appointed</i></p> <p>2. <i>by the Directors of the Corporate both jointly or individually with the right to transfer this power to others authorized to declare this resolution in a notarial deed. Furthermore, the power of attorney or someone authorized by such power of attorney has the right to appear before the Notary to declare and sign this</i></p> | <p>√</p> | <p>Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan sesuai keputusan RUPS.</p> <p><i>The Corporate's Articles of Association have been amended according to the resolution of the GMS.</i></p> |

Hasil Keputusan
Resolution

Sudah/Belum
Terlaksana
*Has Been /
Has Not Been
Implemented*

Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga
Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa
2019 Hingga Akhir Tahun 2019
*Follow Up by Management of the
Resolution of Extraordinary GMS 2019
Decision Until the End of 2019*

resolution as an official letter, and carry out all necessary actions, and notify the amendment to this Articles of Association to the competent authority and make amendments or additions in whatever form is required to receive notification of amendments to the Articles of Association, and submit and sign all requests and other documents, choose a place of domicile and carry out other actions that may be needed.

Keputusan Mata Acara 4:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan tanggung jawab dan pelunasan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan, atas tugas-tugasnya serta tindakan yang dilakukan sejak pengangkatannya sampai dengan ditutupnya Rapat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, namun tidak melepaskan tanggung jawab apabila di kemudian hari terbukti ada tindakan yang menyimpang dan merugikan Perseroan.
2. Mengangkat kembali semua Direksi Perseroan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Direktur Utama | : William P. Sabandar |
| <hr/> | |
| Direktur Konstruksi | : Silvia Halim |
| <hr/> | |
| Direktur Operasi dan Pemeliharaan | : Agung Wicaksono |
| <hr/> | |
| Direktur Keuangan dan Administrasi | : Tuhiyat |
| <hr/> | |
| Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis | : Dirangkap jabatan oleh salah seorang Direktur lainnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan |
| <hr/> | |
3. Memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta Notaris. Selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Resolution of Agenda 4:

1. *Respectfully dismiss all members of the Directors of the Corporation as of the close of the Meeting and provide volledig acquit et de charge to all members of the Directors and the Board of Commissioners of the Corporation, for their duties and actions taken from their appointment up to their appointment the closing of the Meeting with due regard to the provisions and applicable laws, but does not*

√ Susunan Direksi telah sesuai dengan keputusan RUPS.
The composition of the Directors is in accordance with the resolution of the GMS.

| <p>Hasil Keputusan Resolution</p> | <p>Sudah/Belum Terlaksana Has Been / Has Not Been Implemented</p> | <p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2019 Hingga Akhir Tahun 2019 Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2019 Decision Until the End of 2019</p> |
|--|---|--|
| <p><i>relinquish responsibility if in the future there is evidence of deviant and detrimental actions to the Company</i></p> | <p>√</p> | |
| <p>2. Reappoint all Directors of the Corporation as follows:</p> <p>President Director : William P. Sabandar</p> <hr/> <p>Director of Construction : Silvia Halim</p> <hr/> <p>Director of Operations and Maintenance : Agung Wicaksono</p> <hr/> <p>Director of Finance and administration : Tuhayat</p> <hr/> <p>Director of Development and Business Support : Currently held a position by another Director with the approval of the Company's Board of Commissioners.</p> | | |
| <p>3. Give authority and power to the Directors of the Corporation and/or parties appointed by the Directors of the Corporation, both jointly or individually with the right to transfer this power to others authorized to declare this resolution in a notarial deed. Furthermore, the power of attorney or someone authorized by such power of attorney has the right to appear before the Notary to declare and sign this decision as an official letter and carry out all necessary actions, and notify the amendment to this Articles of Association to the competent authority and make amendments or additions in whatever form is required to receive notification of amendments to the Articles of Association, and submit and sign all requests and other documents, choose a place of domicile and carry out other actions that may be needed.</p> | | |

Tabel 6.8
Table 6.8

KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS 4 MEI 2018*Resolution of Shareholder without The GMS May 4, 2018*

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management Until the End of 2019</i> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------|----------|---|
| <p>Keputusan:</p> <p>1. Memperhatikan Surat Menteri Perhubungan yang ditujukan kepada Gubernur Prov. DKI Jakarta tanggal 20-11-2017 Nomor: KP.303/4/15.PHB-2017 perihal Usulan Pergantian Dewan Komisaris PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, maka Pemegang Saham menyetujui untuk:</p> <p>a. Memberhentikan dengan hormat Saudara Prasetyo Boeditjahjono, sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan yang telah dijalankan hingga tanggal ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini.</p> <p>b. Mengangkat Saudara Ir. Zulfikri, MSc., DEA sebagai Komisaris Perseroan selaku (<i>ex officio</i>) Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan masa jabatan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham ini, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk waktu-waktu memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.</p> <p>2. Pemegang Saham menyetujui untuk:</p> <p>a. Memberhentikan dengan hormat Saudara Erry Riyana Hardjapamekas sebagai Komisaris Utama sekaligus selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah berakhir masa jabatannya sesuai dengan Akta Nomor 126 tanggal 25-04-2013 jjs. Akta Nomor 43 tanggal 15-07-2013, dan Akta Nomor 72 tanggal 30-03-2015 dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan.</p> <p>Mengangkat Saudara Rukijo sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama</p> <p>b. Perseroan sampai dengan pengangkatan Komisaris Utama Perseroan definitif.</p> <p>3. Dengan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan pengurus Perseroan selengkapnya menjadi sebagai berikut:</p> <p>a. Dewan Komisaris</p> <table border="1" data-bbox="161 1563 991 1787"> <tr> <td>Plt. Komisaris Utama</td> <td>: Rukijo</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Yusmada Faizal</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Rukijo</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Zulfikri</td> </tr> </table> <p>b. Direksi</p> <table border="1" data-bbox="161 1809 991 2042"> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td>: William P. Sabandar</td> </tr> <tr> <td>Direktur Konstruksi</td> <td>: Silvia Halim</td> </tr> <tr> <td>Direktur Operasional dan Pemeliharaan</td> <td>: Agung Wicaksono</td> </tr> <tr> <td>Direktur Keuangan dan Administrasi</td> <td>: Tuhiyat</td> </tr> </table> | Plt. Komisaris Utama | : Rukijo | Komisaris | : Yusmada Faizal | Komisaris | : Rukijo | Komisaris | : Zulfikri | Direktur Utama | : William P. Sabandar | Direktur Konstruksi | : Silvia Halim | Direktur Operasional dan Pemeliharaan | : Agung Wicaksono | Direktur Keuangan dan Administrasi | : Tuhiyat | <p>√</p> | <p>Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan telah sesuai dengan keputusan pemegang saham yang telah dituangkan dalam Akta No. 19 Tahun 2018 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham</p> <p><i>The composition of the Corporate's Board of Commissioners and Directors is in accordance with the decision of the shareholders as outlined in Deed No. 19 of 2018 concerning Circular Resolution of Shareholders.</i></p> |
| Plt. Komisaris Utama | : Rukijo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | : Yusmada Faizal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | : Rukijo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | : Zulfikri | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Utama | : William P. Sabandar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Konstruksi | : Silvia Halim | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Operasional dan Pemeliharaan | : Agung Wicaksono | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Keuangan dan Administrasi | : Tuhiyat | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Sudah/Belum Terlaksana Has Been / Has Not Been Implemented | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019 Follow Up by Management Until the End of 2019 |
|---|--|--|
| Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis : Dirangkap jabatan oleh salah seorang Direktur lainnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan | √ | |
| <p>Selanjutnya Para Pemegang Saham memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menuangkan Keputusan ini ke dalam suatu akta Notaris, serta membuat perubahan yang disyaratkan guna penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | |
| <p>Decision:</p> | | |
| <p>1. Noting the Minister of Transportations's letter addressed to the DKI Jakarta Provincial Governance on 11/20-2017 Number: KP.303/4/15.PHB-2017 concerning the Proposed Substitution of the Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) Board of Commissioner, the Shareholder agreed to:</p> | | |
| <p>a. To honorably dismiss Mr. Prasetyo Boeditjahjono, as a Commissioner of the Company, as of the signing of the Circular Decision of the Shareholders and express the highest gratitude and appreciation for his service during his tenure as Commissioner of the Company which has been carried out until the date of the Circular Decision of the Shareholders.</p> | | |
| <p>b. Appoint Mr. Ir. Zulfikri, MSc., DEA as the Company's Commissioner (ex officio) Director General of Railways of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia with terms of service in accordance with the Articles of Association of the Corporation as of the signing of the Circular Decision of the Shareholders for dismissal before period of appointment is over.</p> | | |
| <p>2. Shareholders agree to:</p> | | |
| <p>a. To honorably dismiss Mr. Erry Riyana Hardjapamekas as President Commissioner and at the same time as the Independent Commissioner of the Corporation who has ended his term of appointment in accordance with Deed Number 126 dated 25-04-2013 jis. Deed No. 43 dated 15-07-2013 and No. 73 dated 30-03-2015 and expresses its highest gratitude and appreciation for his service during his tenure as President Commissioner of the Corporation.</p> | | |
| <p>b. To appoint Mr. Rukijo as Acting President Commissioner of the Corporation until the appointment of the definitive President Commissioner of the Corporation.</p> | | |
| <p>3. With the dismissal and appointment mentioned above, the composition of the corporate's management is as follows:</p> | | |
| <p>a. Board of Commissioners</p> | | |
| Acting President Commissioner | : Rukijo | |
| Commissioner | : Yusmada Faizal | |
| Commissioner | : Rukijo | |
| Commissioner | : Zulfikri | |
| <p>b. The Directors</p> | | |
| President Director | : William P. Sabandar | |
| Director of Construction | : Silvia Halim | |
| Director of Operations and Maintenance | : Agung Wicaksono | |
| Director of Finance and Administration | : Tuhiyat | |

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management Until the End of 2019</i> |
|---|---|--|
| <p><i>Director of Development and Business Support</i> : <i>Currently as a Development Officer and by one of them with the approval of the Corporate's Board of Commissioners.</i></p> <p><i>Furthermore, the Shareholders authorize the substitution rights to the Directors of the Corporation, both jointly and individually, to state this Resolution into a notarial deed, and make the changes required to comply with the law and regulations.</i></p> | | |

Tabel 6.9
Table 6.9

PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS 29 OKTOBER 2018

Resolution of Shareholder without The GMS 29 October 2018

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management Until the End of 2019</i> | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|------------------|-----------|----------|-----------|------------|---|---|
| <p>Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberhentikan dengan hormat Saudara Agung Wicaksono sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dan menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdianya selama menjabat sebagai Direksi Perseroan yang telah dijalankan. 2. Mengangkat Saudara Mukhtasor sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir. 3. Mengangkat Saudara Muhammad Effendi sebagai Direktur Operasional dan Pemeliharaan Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir. 4. Mengangkat Saudara Ghamal Peris sebagai Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis Perseroan terhitung sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham ini dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir. 5. Dengan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Komisaris <table border="1"> <tr> <td>Plt. Komisaris Utama</td> <td>: Rukijo</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Yusmada Faizal</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Rukijo</td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td>: Zulfikri</td> </tr> </table> | Plt. Komisaris Utama | : Rukijo | Komisaris | : Yusmada Faizal | Komisaris | : Rukijo | Komisaris | : Zulfikri | √ | <p>Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT MRT Jakarta tanggal 29 Oktober 2018 yang kemudian telah dituang dalam Akta No. 16 tanggal 17 November 2018 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham. <i>The composition of the Corporation's Board of Commissioners and Board of Directors is in accordance with Shareholders resolution without a GMS dated 29 October 2018 and stated on Deed No. 16 dated 17 November 2018 regarding Shareholder's Resolution without the GMS.</i></p> |
| Plt. Komisaris Utama | : Rukijo | | | | | | | | | |
| Komisaris | : Yusmada Faizal | | | | | | | | | |
| Komisaris | : Rukijo | | | | | | | | | |
| Komisaris | : Zulfikri | | | | | | | | | |

| <p style="text-align: center;">Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p> | <p style="text-align: center;">Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i></p> | <p style="text-align: center;">Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management Until the End of 2019</i></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------|-------|--|--|-----------|--|------------------|-------|--|--|-----------|--|----------|-------|--|--|-----------|--|------------|-------|--|--|-----------|--|-------------|-------|--|--|------------|--|--|----------------|--|-----------------------|-------|--|--|---------------------|--|----------------|-------|--|--|---------------------------------------|--|--------------------|-------|--|--|------------------------------------|--|-----------|-------|--|--|---|--|----------------|--|--|
| <p>5. Dengan dilakukan pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>a. Komisaris</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Plt. Komisaris Utama</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 40%;">: Rukijo</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td></td> <td>: Yusmada Faizal</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td></td> <td>: Rukijo</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td></td> <td>: Zulfikri</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Komisaris</td> <td></td> <td>: Mukhtasor</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>b. Direksi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Direktur Utama</td> <td></td> <td>: William P. Sabandar</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Direktur Konstruksi</td> <td></td> <td>: Silvia Halim</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Direktur Operasional dan Pemeliharaan</td> <td></td> <td>: Muhammad Effendi</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Direktur Keuangan dan Administrasi</td> <td></td> <td>: Tuhiyat</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><hr/></td> </tr> <tr> <td>Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis</td> <td></td> <td>: Ghamal Peris</td> </tr> </table> | Plt. Komisaris Utama | | : Rukijo | <hr/> | | | Komisaris | | : Yusmada Faizal | <hr/> | | | Komisaris | | : Rukijo | <hr/> | | | Komisaris | | : Zulfikri | <hr/> | | | Komisaris | | : Mukhtasor | <hr/> | | | b. Direksi | | | Direktur Utama | | : William P. Sabandar | <hr/> | | | Direktur Konstruksi | | : Silvia Halim | <hr/> | | | Direktur Operasional dan Pemeliharaan | | : Muhammad Effendi | <hr/> | | | Direktur Keuangan dan Administrasi | | : Tuhiyat | <hr/> | | | Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis | | : Ghamal Peris | | |
| Plt. Komisaris Utama | | : Rukijo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | | : Yusmada Faizal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | | : Rukijo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | | : Zulfikri | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Komisaris | | : Mukhtasor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Direksi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Utama | | : William P. Sabandar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Konstruksi | | : Silvia Halim | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Operasional dan Pemeliharaan | | : Muhammad Effendi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Keuangan dan Administrasi | | : Tuhiyat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis | | : Ghamal Peris | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>6. Selanjutnya Para Pemegang Saham memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menuangkan keputusan ini dalam suatu akta notaris, serta membuat perubahan yang disyaratkan guna penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Decision:

1. *Respectfully dismiss Mr. Agung Wicaksono as Director of Operations and Maintenance of the Corporation as of the last date of the Decision of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders and express their highest gratitude and appreciation for his service during his tenure as the Corporation's Directors that has been carried out.*
2. *Appoint Mr. Mukhtasor as Commissioner of the Corporation as the date of the latest signing of the Decision of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders with terms of service in accordance with the provisions in the Articles of Association, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time before the period of appointment end up.*
3. *To Appoint Mr. Muhammad Effendi as Director of Operations and Maintenance of the Corporation as of the date of the latest signing of the Decision of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders with terms of service in accordance with the provisions in the Articles of Association, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to terminate at any time before the end of the period of appointment.*
4. *To appoint Mr. Ghamal Peris as Director of Development and Business Support of the Corporation as of the date of the latest signing of the Decision of the Shareholders Outside the General Meeting of Shareholders with terms of service in accordance with the provisions in the Articles of Association, without prejudice to the GMS' right to dismiss at any time before period of appointment is over.*
5. *With the dismissal and appointment mentioned above, the composition of the corporation's management is as follows:*

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management Until the End of 2019</i> |
|---|---|--|
| a. Commissioners Acting President Commissioner : Rukijo | | |
| Commissioner : Yusmada Faizal | | |
| Commissioner : Rukijo | | |
| Commissioner : Zulfikri | | |
| Commissioner : Mukhtasor | | |
| b. The Directors President Director : William P. Sabandar | | |
| Director of Construction : Silvia Halim | | |
| Director of Operations and Maintenance : Muhammad Effendi | | |
| Director of Finance and administration : Tuhiyat | | |
| Director of Development and Business Support : Ghamal Peris | | |
| 6. Furthermore, the Shareholders authorize the substitution rights to the Directors of the Corporation, both jointly and individually, to state this Resolution into a notarial deed, and make the changes required to comply with the law and regulations. | | |

Tabel 6.10
Table 6.10

RUPS LUAR BIASA 21 DESEMBER 2018
KANTOR PT MRT JAKARTA (PERSERODA), WISMA NUSANTARA LANTAI 22
Extraordinary GMS December 21, 2018
PT MRT Jakarta (Perseroda) Office, Wisma Nusantara 22nd Floor

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2018 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2018 Decision Until the End of 2019</i> |
|---|---|--|
| <p>Keputusan Mata Acara 1: Menyetujui dan mengesahkan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun Buku 2019:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran Proyek sebesar Rp4.413.862.000.000,- yang bersumber dari penerusan JICA Loan; 2. Belanja Modal (<i>Capital Expenditure</i>) sebesar Rp126.165.000.000,- dan Biaya Operasional Usaha (<i>Operational Expenditure</i>) sebesar Rp634.125.000.000,- yang bersumber dari Saldo Kas Perusahaan; dan 3. Pendapatan yang terdiri dari Pendapatan <i>Non-Farebox</i> sebesar Rp94.275.000.000,- dan Pendapatan <i>Farebox</i> serta Pendapatan Subsidi yang nilainya disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Prov DKI Jakarta dan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>Resolution of Agenda 1: <i>Approve and ratify the Company Work Plan & Budget (RKAP) for Fiscal Year 2019:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Project Budget of Rp4,413,862,000, taken from the forwarding of JICA Loan;</i> 2. <i>Capital Expenditure of Rp126,165,000,000 and Operating Expenditure of Rp634,125,000,000 taken from the Corporation's Cash Balance; and</i> 3. <i>Revenues consisting of Non-Farebox Revenues amounting to Rp94,275,000,000 and Farebox Revenues and Subsidy Revenues whose value is adjusted to the Government's policy of DKI Jakarta Province and laws and regulations.</i> | √ | <p>Persetujuan dan pengesahan RKAP Tahun Buku 2019 telah dilembagakan secara hukum melalui Akta No 79 tanggal 21 Desember 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>Uraian realisasi tahun 2019 berdasarkan RKAP ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan anggaran proyek sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar Rp3.718.531.358.903,- atau 84% dari RKAP Tahun 2019 sebesar Rp4.413.862.000.000. • Penyerapan anggaran pendamping sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar Rp739.262.661.392,- atau 86% dari RKAP Tahun 2019 sebesar Rp860.112.000.000. <p><i>Approval and approval of the RKAP for fiscal year 2019 has been legally institutionalized through Deed No. 79 dated 21 December 2018 regarding Minutes of General Meeting of Shareholders.</i></p> <p><i>Descriptio of the realization in 2019 based on this RKAP:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>The absorption of the project budget up to December 2019 is Rp3,718,531,358,903,- or 84% of the 2019 RKAP of Rp4,413,862,000,000.</i> • <i>The absorption of the accompanying budget as of December 2019 was Rp739,262,661,392,- or 86% of the 2019 RKAP of Rp860,112,000,000.</i> |
| <p>Keputusan Mata Acara 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan mengesahkan peningkatan Modal Dasar PT MRT Jakarta (Perseroda) dari sebelumnya sebesar Rp10.200.000.000.000,- menjadi Rp14.659.000.000.000,-. 2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta Notaris. Selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan membuat pengubahan | √ | <p>Persetujuan peningkatan modal dasar telah disahkan secara hukum melalui Akta No 79 tanggal 21 Desember 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Akta No 14 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p><i>Approval to increase the authorized capital has been legally passed through Deed No. 79 dated 21 December 2018 regarding Minutes of General Meeting of Shareholders and Deed No. 14 dated 14 January 2019 regarding Statement of General Meeting of Shareholders' Resolution.</i></p> |

| Hasil Keputusan <i>Resolution</i> | Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i> | Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2018 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2018 Decision Until the End of 2019</i> |
|--------------------------------------|---|---|
|--------------------------------------|---|---|

dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

√

Resolutions of Agenda 2:

1. To approve and authorize an increase in the Capital of PT MRT Jakarta (Perseroda) from the previous amount of Rp10,200,000,000,000 to Rp14,659,000,000,000.
2. To authorize the Directors of the Corporate and / or parti appointed by the Directors of the Corporation, both jointly and individually with the right to transfer this power to others authorized to declare this decision in a notarial deed. Furthermore, the power of attorney or someone authorized by such power of attorney has the right to appear before the Notary to declare and sign this decision as an official deed, and carry out all necessary actions, and notify the amendments to this authorized statute and make changes and/ or additions in whatever form is required for receiving notification of amendments to the Articles of Association, and submitting and signing all requests and other documents, choosing a place of domicile and carrying out other actions that may be needed.

Keputusan Mata Acara 3:

1. Penerbitan saham baru sejumlah 2.945.441 lembar saham dengan nominal Rp1.000.000,- per saham kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengkonversi setoran modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi Modal Disetor Penuh dalam Perusahaan sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 809 Tahun 2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Penetapan Penyertaan Modal Daerah pada PT MRT Jakarta (Perseroda).
2. Peningkatan Modal Disetor yang semula sebesar Rp6.165.807.000.000,- menjadi sebesar Rp9.111.248.000.000,-.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk menyatakan keputusan ini ke dalam akta Notaris. Selanjutnya, kuasa atau seseorang yang diberi wewenang oleh kuasa tersebut berhak untuk menghadap Notaris untuk menyatakan dan menandatangani keputusan ini sebagai akta resmi, dan melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dan mengajukan serta

√

Persetujuan penerbitan saham baru dan peningkatan modal disetor telah disahkan secara hukum melalui Akta No 79 tanggal 21 Desember 2018 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan Akta No 14 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
Approval for the issuance of new shares and increase in paid up capital has been legally approved through Deed No. 79 dated December 21, 2019 concerning Minutes of General Meeting of Shareholders and Deed No. 14 Dated January, 14 2019 concerning Deed of Shareholders' Decision in General Meeting of Shareholders.

| <p>Hasil Keputusan <i>Resolution</i></p> | <p>Sudah/Belum Terlaksana <i>Has Been / Has Not Been Implemented</i></p> | <p>Tindak Lanjut oleh Manajemen Hingga Akhir Keputusan RUPS Luar Biasa 2018 Hingga Akhir Tahun 2019 <i>Follow Up by Management of the Resolution of Extraordinary GMS 2018 Decision Until the End of 2019</i></p> |
|--|--|---|
| <p>menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.</p> <p>Resolutions of Agenda 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Issuance of new shares of 2,945,441 shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share to the Government of DKI Jakarta Province in the context of converting capital deposits made by the Government of DKI Jakarta Province into full Paid-Up Capital in the Corporate in accordance with Governor Resolution Number 809 year 2018 dated May 4, 2018 concerning the Establishment of Regional Capital Participation in PT MRT Jakarta (Perseroda).</i> 2. <i>The increase in Initial Paid-in Capital amounted to Rp6,165,807,000,000 to Rp9,111,248,000,000.</i> 3. <i>Graining power of attorney to the Corporation's Directors, both jointly and individually with the right to transfer this power to others authorized to declare this decision in a notarial deed. Furthermore, the power of attorney or someone authorized by such power of attorney has the right to appear before the Notary to declare and sign this decision as an official deed, and carry out all necessary actions, and notify the amendments to this authorized statute and make changes and/or additions in whatever form is required for receiving notification of amendments to the Articles of Association, and submitting and signing all requests and other documents, choosing a place of domicile and carrying out other actions that may be needed.</i> | <p>√</p> | |

Tabel 6.11
Table 6.11

DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS

Sistem dua tingkat dalam badan usaha di Indonesia juga dilakukan Perseroan melalui organ Dewan Komisaris yang bertugas melakukan fungsi pengawasan terhadap kelangsungan usaha, termasuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan.

Board of Commissioners has the duty to carry out supervision of business continuity, including carrying out supervision on the implementation of duties and responsibilities of the Directors, as well as providing advice to the Directors, directing, monitoring, and evaluating the implementation of the Corporation strategic policies.

KRITERIA DAN PROSEDUR PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

CRITERIA AND PROCEDURE FOR APPOINTMENT AND DISMISSAL OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Seluruh anggota Dewan Komisaris harus memenuhi kualifikasi dan kriteria, yaitu:

1. Memiliki integritas, kompetensi dan pengetahuan mendasar terkait aspek keuangan yang memadai.
2. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
3. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.
4. Mampu melaksanakan perbuatan hukum
5. Memahami manajemen Perseroan
6. Memiliki pengetahuan yang memahami di bidang usaha Perseroan
7. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya

Dalam peraturan yang dimiliki Perseroan, anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai Direksi pada Badan Usaha Swasta/Milik Negara/Milik Daerah lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan. Di samping itu, Perseroan melarang adanya hubungan darah keluarga sesama anggota Dewan Komisaris dan sesama anggota Direksi atau antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi.

All members of the Board of Commissioners must meet the qualifications and criteria, namely:

1. *Have adequate integrity, competence and basic financial knowledge*
2. *Never been declared bankrupt and / or convicted for leading a company into bankruptcy .*
3. *Have never committed a disgraceful act and have never been convicted of a felony.*
4. *Able to carry out legal actions*
5. *Understand Corporate management*
6. *Having knowledge that understands the Corporation's field of business*
7. *Provide sufficient time to carry out their duties*

In Corporation's regulations, members of Board of Commissioners are not permitted to concurrently hold position of Director in other Private/State-Owned/Regional-Owned Enterprises that may cause conflicts of interest either directly or indirectly with the interests of the Corporation. In addition, the Corporation prohibits any family related background between members of the Board of Commissioners and fellow members of the Directors or between members of the Board of Commissioners and members of the Directors.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA KETENTUAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

APPOINTMENT AND DISMISSAL AND PROVISIONS OF TERMS OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris diangkat dan/atau diberhentikan oleh mekanisme RUPS. Sesuai keputusan RUPS di tahun 2015 yang telah dituangkan dalam Akta No. 72 Tahun 2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pernyataan keputusan RUPS, masa jabatan Dewan Komisaris diperpanjang, dari sebelumnya 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dan kembali diubah sesuai keputusan RUPS di tahun 2019 yang telah dituangkan dalam Akta No. 13 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pernyataan Keputusan RUPS, masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris diperpendek, dari sebelumnya 5 (lima) tahun menjadi 4 (empat) tahun merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dalam

The Board of Commissioners is appointed and/or terminated by the mechanism of the GMS. In accordance with the resolutions of GMS in 2015 that has been stipulated in Deed No. 72 of 2015 dated 30 March 2015 regarding Statement of GMS's Resolutions, the period of appointment of the Board of Commissioners is extended, from the previous 3 (three) years to 5 (five) years, and to be amended again in accordance with the resolutions of GMS in 2019 that has been stipulated in Deed No. 13 of 2019 dated 12 June 2019 regarding Statement of GMS's Resolutions, the period of appointment of the Board of Commissioners is extended, from the previous 5 (five) years to 4 (four) years referring to Government Regulation No. 54 Year 2017 regarding Regional Owned Enterprise, and can only be reappointed for the next 1 (one) periode of appointment, without prejudice to the right of the GMS to dismiss anytime. In the Board Manual, it was explained that the

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, secara khusus dinyatakan, bahwa pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

appointment of members of the Board of Commissioners for the next 1 (one) period of appointment shall be conducted in accordance with prevailing laws and regulations.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

NUMBER, COMPOSITION AND STRUCTURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2019

Di tahun 2019, terdapat pergantian susunan keanggotaan Dewan Komisaris, sesuai Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019 dan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar RUPS No. 46 tanggal 26 Juni 2019. Berikut disampaikan kronologis susunan keanggotaan Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2019.

In 2019, there was a change in the composition of the Board of Commissioners' membership, in accordance with the Circular Decision of the Shareholders Outside the GMS dated May 31, 2019 and the Declaration of the Shareholders' Resolution Outside the GMS No. 46 dated June 26, 2019. The following is a chronology of the membership structure of the Board of Commissioners throughout 2019.

KRONOLOGIS SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DI SEPANJANG TAHUN 2019

Chronology of The Composition of The Board of Commissioners Throughout 2019

| Periode 1 Januari- 31 Mei 2019 <i>Period of January 1 - May 31 2019</i> | Periode 31 Mei- 31 Desember 2019 <i>Period of May 31 - December 31 2019</i> | Keterangan <i>Note</i> |
|---|---|--|
| Rukijo (Plt. Komisaris Utama <i>Acting President Commissioner</i>) | Rukijo (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019, Rukijo tidak lagi menjabat Plt. Komisaris Utama. Beliau kembali menduduki jabatan Komisaris. <i>Based on the Circular Decision of the Shareholders Outside the GMS on May 31, 2019, Rukijo no longer serves as Acting President Commissioner. He returned to the position of Commissioner.</i> |
| Yusmada Faizal (Komisaris <i>Commissioner</i>) | | Yusmada Faizal tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 31 Mei 2019. <i>Yusmada Faizal no longer serves on the Board of Commissioners since May 31, 2019.</i> |
| Zulfikri (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Zulfikri (Komisaris <i>Commissioner</i>) | - |
| Mukhtasor (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Mukhtasor (Komisaris <i>Commissioner</i>) | - |
| | Muhammad Syaugi (Komisaris Utama <i>Acting President Commissioner</i>) | Muhammad Syaugi duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019. <i>Muhammad Syaugi sits on the Board of Commissioners since the Circular Decision of Shareholders Outside the GMS on May 31, 2019.</i> |
| | Adnan Pandu Praja (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Adnan Pandu Praja duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar RUPS tanggal 31 Mei 2019. <i>Adnan Pandu Praja sits on the Board of Commissioners since the Circular Decision of the Shareholders Outside the GMS dated May 31, 2019."</i> |

Tabel 6.12
Table 6.12

Dengan perubahan di atas, jumlah anggota Dewan Komisaris di akhir tahun 2018 dan akhir tahun 2019 mengalami perubahan, dari 4 (empat) orang menjadi 5 (lima) orang. Berikut susunan keanggotaan Dewan Komisaris per 31 Desember 2019.

With the above changes, the number of members of the Board of Commissioners at the end of 2018 and at the end of 2019 has changed, from 4 (four) people to 5 (five) people. The following is the composition of the Board of Commissioners' membership as at 31 December 2019.

SUSUNAN DEWAN KOMISARIS PER 31 DESEMBER 2019

Board of Commissioners Composition per December 31, 2019

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment | Masa Jabatan Term of Office | Periode Jabatan Office Period |
|-------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Muhammad Syaugi | Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | Akta No. 46 Tanggal 26 Juni 2019, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 46 Dated June 26, 2019, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.</i> | 31 Mei 2019 RUPS Tahun 2023 <i>May 31, 2019 AGM of 2023</i> | Ke-1 1 st |
| Rukijo | Komisaris <i>Commissioner</i> | Akta No. 1 Tanggal 19 Agustus 2018, Notaris Miki Tanumiharja, S.H. <i>Deed No. 1 August 19, 2018, Notary Miki Tanumiharja, SH.</i> | 10 Agustus 2015 RUPS Tahun 2020 <i>10 August 2015 AGM 2020</i> | Ke-1 1 st |
| Zulfikri | Komisaris <i>Commissioner</i> | Akta No. 19 Tanggal 6 Juli 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 19 Date 6 July 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> | 4 Mei 2018 RUPS Tahun 2022 <i>May 4, 2018 AGM Year 2022</i> | Ke-1 1 st |
| Mukhtasor | Komisaris <i>Commissioner</i> | Akta No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> | 29 Oktober 2018 RUPS Tahun 2022 <i>29 October 2018 AGM of 2022</i> | Ke-1 1 st |
| Adnan Pandu Praja | Komisaris <i>Commissioner</i> | Akta No. 46 Tanggal 26 Juni 2019, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 46 Dated June 26, 2019, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> | 31 Mei 2019 RUPS Tahun 2023 <i>May 31, 2019 AGM of 2023</i> | Ke-1 1 st |

Tabel 6.13
Table 6.13

Profil seluruh anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Perseroan pada Laporan Tahunan ini.

The profiles of all members of the Board of Commissioners can be seen in the Corporate Profile chapter in this Annual Report.

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI: PEDOMAN TATA KERJA DEWAN KOMISARIS

BOARD MANUAL: BOARD OF COMMISSIONERS WORK PROCEDURES

Dalam melaksanakan perannya, Dewan Komisaris mengacu pada Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, atau *Board Manual* yang dimiliki Perseroan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) No. 008 Tahun 2016 dan No.072-1 Tahun 2016. Secara khusus *Board Manual* ini mengatur tentang Dewan Komisaris terkait beberapa hal di bawah ini:

1. Masa Jabatan Dewan Komisaris
2. Program Pengenalan

In carrying out its role, the Board of Commissioners refers to the Corporation's Board of Commissioners and Directors Guidelines, or Board Manual based on the Joint Decision of the Board of Commissioners and Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) No. 008 2016 and No. 072-1 2016. Specifically this Board Manual deals with the Board of Commissioners regarding the following:

1. *Term of Office of the Board of Commissioners*
2. *Introduction Program*

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">3. Program Peningkatan Kapabilitas4. Tanggung Jawab5. Tugas dan Kewajiban<ul style="list-style-type: none">a. Pengawasanb. Kontrak Manajemenc. Pelaksanaan Tugas Berkaitan dengan RUPSd. Pengurusan Manajemen Risikoe. Sistem Pengendalian Internalf. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasig. Etika Berusaha dan Anti Korupsi6. Wewenang7. Hak8. Etika Jabatan9. Rapat<ul style="list-style-type: none">a. Rapat Dewan Komisaris dengan Dihadiri Direksib. Prosedur Kehadiran, Prosedur Rapat serta Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusanc. Pembuatan Risalah Rapat10. Laporan Tugas Pengawasan11. Komite-komite<ul style="list-style-type: none">a. Komite Auditb. Komite yang Dianggap Perlu | <ul style="list-style-type: none">3. <i>Capability Improvement Program</i>4. <i>Responsibility</i>5. <i>Duties and Obligations</i><ul style="list-style-type: none">a. <i>Supervision</i>b. <i>Management Contract</i>c. <i>Implementation of Tasks Regarding RUPS</i>d. <i>Management of Risk</i>e. <i>Internal Control System</i>f. <i>Information Openness and Confidentiality</i>g. <i>Business Ethics and Anti-Corruption</i>6. <i>Authority</i>7. <i>Rights</i>8. <i>Ethics Position</i>9. <i>Meeting</i><ul style="list-style-type: none">a. <i>Meeting of the Board of Commissioners attended by the Directors</i>b. <i>Attendance Procedure, Meeting Procedure and Procedure for Discussion of Problems and Decision Making</i>c. <i>Minutes of Meetings</i>10. <i>Supervision Task Report</i>11. <i>Committees</i><ul style="list-style-type: none">a. <i>Audit Committee</i>b. <i>Committees deemed necessary</i> |
|---|---|

INDEPENDENSI TERKAIT BENTURAN KEPENTINGAN

INDEPENDENCE RELATED TO CONFLICTS OF INTEREST

Dewan Komisaris diangkat berdasarkan aturan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 186 Tahun 2014, aturan tersebut salah satunya tercantum bahwa Dewan Komisaris dapat berasal dari profesional maupun pejabat negara. Aturan tersebut juga menyatakan bahwa Dewan Komisaris tidak diperkenankan memiliki ikatan atau hubungan afiliasi guna menghindari terjadinya benturan kepentingan.

Board of Commissioners is appointed based on the rules stated in the Statutes and Association of the DKI Jakarta Governor No. 186 of 2014, one of the rules stated that the Board of Commissioners can come from professionals and State officials. These rules also state that the Board of Commissioners is not permitted to have affiliation ties or relationships in operational matters with any Corporation to avoid conflicts of interest.

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN KEWAJIBAN, WEWENANG, SERTA HAK DEWAN KOMISARIS

RESPONSIBILITIES, DUTIES AND OBLIGATIONS, AUTHORITY, AND RIGHTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

The Board of Commissioners is responsible for supervising the management policies, the general management of the Corporate and the business of the Corporate and giving advice to the Directors. Supervision and provision of advice by the Board of Commissioners is carried out with the following principles:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.2. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. | <ul style="list-style-type: none">1. <i>In carrying out supervision, the Board of Commissioners will always comply with the Articles of Association and applicable laws and regulations.</i>2. <i>Each Member of the Board of Commissioners must be in good faith, prudent, and responsible in carrying out his supervisory duties and providing advice to the Directors for the interests of the Corporation and in accordance with the aims and objectives of the Corporation.</i> |
|---|---|

3. Setiap Anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) Anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Dewan Komisaris.
5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada butir (3) di atas apabila dapat membuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam hal Perseroan tidak mempunyai Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggung jawab Dewan Komisaris.
8. Atas nama Perseroan, Pemegang Saham dapat menggugat Anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.
9. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.

Tugas dan kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Umum

- a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS.
- b. Pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perseroan, Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan Perseroan antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*.

3. *Each Member of the Board of Commissioners is personally responsible for the Corporate's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out his duties as referred to above.*
4. *In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members of the Board of Commissioners, the responsibilities referred to in item (3) shall apply jointly and severally to each Member of the Board of Commissioners.*
5. *In conducting supervision, the Board of Commissioners acts as an assembly and cannot act individually on behalf of the Board of Commissioners.*
6. *Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for losses as referred to in item (3) above if they can prove:*
 - a. *Has supervised in good faith and prudence for the interests of the Corporation and in accordance with the aims and objectives of the Corporation;*
 - b. *Does not have personal interests either directly or indirectly for the management actions of the Directors which results in losses; and has given advice to the Directors to prevent such losses arising or continuing.*
7. *Supervision may not change to the execution of executive tasks, except in the case that the Corporation does not have a Director. In such case, the Board of Commissioners has the right to give temporary authority to one or more of the Members of the Board of Commissioners for the responsibilities of the Board of Commissioners.*
8. *On behalf of the Corporation Shareholders may sue Members of the Board of Commissioners who due to their mistakes or negligence have caused losses to the Corporation to a district court.*
9. *The Board of Commissioners may use the services of independent professionals and / or form Committees to assist the duties of the Board of Commissioners.*

The duties and obligations of the Board of Commissioners are as follows:

1. General

- a. *Comply with the Articles of Association and applicable laws and regulations as well as the resolution of the GMS.*
- b. *Supervision and provision of advice from the Board of Commissioners is carried out for the benefit of the Corporate and in accordance with the aims and objectives of the Corporate*
- c. *Supervise the Corporation's management policies carried out by the Directors and provide advice to the Directors including regarding the Corporation development plans, Long-Term Plan, Work Plan and Corporate Budget, implementation of the Articles of Association and RUPS decisions and applicable laws and regulations.*
- d. *Monitor the effectiveness of Good Corporate Governance practices implemented by the Corporation, among others, by holding regular meetings between the Board of Commissioners and the Directors to discuss the implementation of Good Corporate Governance.*

- e. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya.
 - f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
 - g. Membahas, memberikan saran dan pertimbangan atau masukan terhadap:
 - i. Rencana Jangka Panjang (RJP) Perseroan;
 - ii. Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Perseroan;
 - iii. Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP);
 - iv. Laporan kinerja Perseroan;
 - v. Laporan akhir masa jabatan anggota Direksi;
 - vi. Laporan keuangan Perseroan yang sudah diaudit; dan
 - vii. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
 - h. Melaporkan hasil penilaiannya terhadap pelaksanaan RJP, Renstra dan RKAP oleh Direksi kepada Gubernur melalui Badan Pembinaan BUMD (BPBUMD).
 - i. Melaporkan sedini mungkin kepada Gubernur melalui BPBUMD mengenai adanya temuan dan/atau kekeliruan dan/atau kelalaian dan/atau kesalahan pengelolaan/pengurusan Perseroan oleh Direksi.
 - j. Menyusun dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Gubernur melalui BPBUMD secara berkala triwulanan, semester atau tahunan atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir masa jabatan Dewan Komisaris.
2. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan cara:
- a. Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Perseroan;
 - b. Melakukan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi;
 - c. Melakukan kunjungan ke unit kerja/proyek tertentu, baik dengan (atau tanpa) pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya;
 - d. Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi;
 - e. Menugaskan Komite Audit untuk melakukan tugas-tugas pengawasan tertentu sesuai Piagam Komite Audit.
3. Kontrak Manajemen
Dewan Komisaris melakukan kontrak manajemen di hadapan RUPS.
4. Pelaksanaan Tugas Berkaitan dengan RUPS
Dalam hubungannya dengan RUPS, Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:
- a. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh seorang anggota Komisaris lainnya.
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RKAP tahunan atas:
 - i. Program kerja yang diajukan Direksi;
 - ii. Laporan keuangan Perseroan;
 - iii. Laporan kinerja Perseroan; dan
 - iv. Laporan akhir masa jabatan Direksi.
 - c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap
- e. Prepare a work plan for the Board of Commissioners for the following year period.
 - f. Responsible for the implementation of their duties to the GMS.
 - g. Discuss, provide advice and consideration or input on:
 - i. The Corporation's Long Term Plan (RJP);
 - ii. The Corporation's Strategic Business Plan (Renstra);
 - iii. Corporation Work Plan and Budget (RKAP);
 - iv. Corporation performance report;
 - v. Final report on terms of office for members of the Directors;
 - vi. Audited financial statements of the Corporation; and Other
 - vii. matters related to the Corporation's business activities.
 - h. Report the results of its assessment of the implementation of RJP, Strategic Plan and RKAP by the Directors to the Governor through the ROE Development Agency (BPBUMD).
 - i. Report as early as possible to the Governor through BPBUMD regarding the findings and/or mistakes and/or negligence and/or mismanagement/management of the Corporation by the Directors.
 - j. Prepare and report the results of supervision to the Governor through the BPBUMD periodically quarterly, semester or annually or at any time as needed.
 - k. Prepare and submit final reports on the term of office of the Board of Commissioners.
2. Supervision by the Board of Commissioners is carried out among others by:
- a. Request written information from the Directors about a problem in the Corporation;
 - b. Conduct joint meetings of the Board of Commissioners and Directors;
 - c. Conduct visits to certain work units / projects, both with (or without) prior notification to the Directors;
 - d. Provide responses to periodic reports from the Directors;
- e. Assign the Audit Committee to carry out certain supervisory tasks in accordance with the Audit Committee Charter.
3. Management Contract
The Board of Commissioners enters into a management contract before the GMS.
4. Implementation of Tasks Regarding RUPS
In conjunction with the GMS, the Board of Commissioners has the duty and obligation to:
- a. The GMS is chaired by the President Commissioner. In the event that the President Commissioner is unable to attend, the GMS shall be chaired by another Commissioner member.
 - b. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the annual RKAP on:
 - i. Work program proposed by the Directors;
 - ii. Corporate's financial statements;
 - iii. Corporate performance report; and
 - iv. End of Directors' term of office report.
 - c. Follow the development of the Corporation's activities.

- d. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting dalam kepengurusan Perseroan.
- e. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan; dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana aksi pengurusan Perseroan oleh Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS.
- g. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS.
- h. Dalam hal ada Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- i. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS.
- k. Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan.

5. Pengurusan Manajemen Risiko

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko.

6. Sistem Pengendalian Internal

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif.

7. Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

- a. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan kepada Pemegang Saham, dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara objektif.
- b. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga informasi penting yang diperlukan oleh Pemangku Kepentingan.
- c. Dewan Komisaris mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan masalah material yang dihadapi.
- d. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data Perseroan. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Etika Berusaha dan Anti Korupsi

- a. Dewan Komisaris dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. *Provide opinions and suggestions to the GMS regarding any issues deemed important in the management of the Corporation.*
- e. *Report immediately to the GMS if there is a symptom of a decline in the Corporation's performance accompanied by suggestions regarding corrective measures that must be taken.*
- f. *Providing opinions and suggestions to the GMS regarding the action plan for the management of the Corporation by the Directors who must obtain GMS approval.*
- g. *Researching and analyzing and signing the Annual Report compiled and submitted by the Directors to the GMS.*
- h. *In the event that the Board of Commissioners who does not sign the Annual Report must state the reasons in writing.*
- i. *Perform other supervisory duties as determined by the GMS.*
- j. *Responsible for the implementation of their duties to the GMS.*
- k. *Propose an External Auditor candidate to the GMS which is completed with the reason for the nomination and the proposed fee / fee.*

5. Handling of Risk Management

The Board of Commissioners has the obligation to oversee and provide advice to the Directors on a regular basis regarding the effectiveness of the implementation of risk management

6. Internal Control System

The Board of Commissioners has an obligation to supervise and provide advice to the Directors in order to establish an effective internal control system.

7. Openness and confidentiality of information

- a. *The Board of Commissioners supervises that the Directors disclose important information in the Annual Report and the Corporation's Financial Statements to Shareholders, and related Government Agencies in accordance with applicable laws in a timely, accurate, clear and objective manner.*
- b. *The Board of Commissioners oversees that the Directors take the initiative to disclose not only the problems required by legislation but also important information needed by the Stakeholders.*
- c. *The Board of Commissioners supervises that the Directors actively discloses the implementation of Good Corporate Governance principles and the material problems they face.*
- d. *The Board of Commissioners is responsible for maintaining the confidentiality of Corporate information and data. Confidential information obtained while serving as a Member of the Board of Commissioners must be kept confidential in accordance with the applicable laws and regulations.*

8. Business Ethics and Anti-Corruption

- a. *The Board of Commissioners is prohibited from giving or offering or accepting directly or indirectly anything of value to a customer or a Government official to influence or in return for what he has done and other actions in accordance with applicable laws and regulations.*

- b. Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Perseroan.
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib untuk bersedia diperiksa kekayaannya, sebelum, selama, dan setelah menjabat dan wajib untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.

Wewenang Dewan Komisaris adalah:

1. Dewan Komisaris berwenang untuk menyetujui atau menolak secara tertulis rencana Direksi dalam hal:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan.
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada Perseroan lain baik di dalam maupun di luar negeri.
 - c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek.
 - d. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan menghapuskan piutang macet, dan persediaan barang mati.
 - e. Mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Apabila seluruh Anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun Anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara Anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, mengajukan pemberhentian ke Pemegang Saham melalui RUPSLB.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Atas usulan Direksi, Dewan Komisaris berwenang mengangkat seorang Karyawan Perseroan untuk menjadi Sekretaris Dewan Komisaris dan tidak mengubah statusnya sebagai pegawai Perseroan.

- b. *Members of the Board of Commissioners are not permitted to request or accept gifts and the like from any party concerned, for themselves, family or colleagues where this can affect their objectivity in representing the interests of the Corporation.*
- c. *Members of the Board of Commissioners are required to be willing to inspect their wealth before, during and after taking office and must report and announce wealth before and after taking office.*

The authority of the Board of Commissioners is:

1. *The Board of Commissioners has the authority to approve or reject the Directors' written plans in terms of:*
 - a. *Borrow or lend money on behalf of the Corporation.*
 - b. *Establish a new business or participate in other Corporations both at home and abroad.*
 - c. *Placing fixed assets required for carrying out short-term credit withdrawals.*
 - d. *To release and write off movable assets with the age of an economist which is normally applicable in the industry in general up to 5 (five) years, and write off bad debts and dead goods inventory.*
 - e. *Enter into operational cooperation or management contract that is valid for a period of not more than 1 (one) year.*
2. *The Board of Commissioners at any time during office hours has the right to enter buildings and yards or other places used or controlled by the Corporation and has the right to examine all books, letters and other evidence, examine and match the situation of cash and others and has the right to know all the actions taken by the Directors.*
3. *If all Members of the Directors are suspended and the Corporation does not have a member of the Directors, the Board of Commissioners is temporarily required to take care of the Corporation. In such case the Board of Commissioners has the right to give temporary authority to one or more of the Members of the Board of Commissioners upon the responsibility of the Board of Commissioners.*
4. *The Board of Commissioners is authorized to temporarily dismiss one or more Members of the Directors, if they act contrary to the Articles of Association or neglect their obligations or there is an urgent reason for the Corporate in accordance with applicable regulations. Then, submit a termination to the Shareholders through the EGMS.*
5. *Requesting the Directors and / or other officials under the Directors with the knowledge of the Directors to attend the Board of Commissioners' meeting.*
6. *At the suggestion of the Directors, the Board of Commissioners has the authority to appoint a Corporation employee to become the Secretary of the Board of Commissioners and not change his status as a Corporation employee.*

- | | |
|--|--|
| 7. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Direksi. | 7. <i>Provide input, suggestions and considerations to the Directors.</i> |
| 8. Memberikan teguran dan peringatan kepada Direksi atas pengelolaan/pengurusan Perseroan yang tidak sesuai dengan RJP, Renstra dan/atau RKAP Perseroan. | 8. <i>Give warnings and warnings to the Directors of management / management of the Corporation that is not in accordance with RJP, Strategic Plan and/or RKAP of the Corporation.</i> |
| 9. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga melakukan tindakan yang merugikan Perseroan. | 9. <i>Examine members of the Directors who are suspected of carrying out actions that are detrimental to the Corporation.</i> |
| 10. Memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan/ pengurusan Perseroan oleh Direksi pada RUPS/ RUPSLB. | 10. <i>Provide recommendations regarding the management / management of the Corporation by the Directors at the GMS / EGMS.</i> |
| 11. Meminta data dan informasi mengenai kegiatan usaha Perseroan dan/atau pengelolaan/pengurusan Perseroan oleh Direksi. | 11. <i>Request data and information regarding the Corporation's business activities and/or management/management of the Corporation by the Directors.</i> |
| 12. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai perkembangan Perseroan. | 12. <i>Request clarification from the Directors regarding the Corporation's development.</i> |
| 13. Meminta Direksi dan/atau pejabat lain Perseroan untuk hadir dalam rapat yang diadakan Dewan Komisaris. | 13. <i>Requesting the Directors and/or other Corporation officials to attend the meeting held by the Board of Commissioners.</i> |
| 14. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan masukan, saran atau pertimbangan sesuai agenda rapat. | 14. <i>Attend Directors' meetings and provide input, suggestions or considerations according to meeting agenda.</i> |
| 15. Memberikan penilaian terhadap kinerja Direksi Perseroan. | 15. <i>Provide an assessment of the performance of the Corporate's Directors.</i> |
| 16. Memberikan persetujuan atas permohonan cuti yang diajukan oleh Direksi. | 16. <i>Give approval for leave applications submitted by the Directors.</i> |
| 17. Memberikan persetujuan atas permohonan izin yang diajukan Direksi untuk perjalanan dinas luar negeri. | 17. <i>Give approval of the permit application submitted by the Directors for overseas official travel.</i> |
| Hak-hak Dewan Komisaris adalah: | <i>The rights of the Board of Commissioners are:</i> |
| 1. Meminta penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan kepada Direksi dan Direksi wajib memberikan penjelasan. | 1. <i>Asking for clarification about everything that is asked to the Directors and Directors must provide an explanation.</i> |
| 2. Meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan, atau membentuk komite-komite sesuai kebutuhan. | 2. <i>Request the assistance of experts for a limited period at the expense of the Corporation, or form committees as needed.</i> |
| 3. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris atas beban Perseroan. | 3. <i>To appoint the Board of Commissioners' Secretary at the expense of the Corporation.</i> |
| 4. Menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. | 4. <i>Receiving salary and / or benefits, the amount of which is determined by the GMS.</i> |
| 5. Menerima insentif atas prestasi kerjanya yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perseroan mencapai tingkat keuntungan. | 5. <i>Receive incentives for work performance, the amount of which is determined by the GMS if the Corporation reaches a profit level.</i> |

PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

DISTRIBUTION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Berdasarkan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, tanggung jawab Dewan Komisaris bersifat kolektif. Pembagian tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris Perseroan di tahun 2019 berdasarkan Notulensi Rapat Internal Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 31 Juli 2019 adalah sebagai berikut:

Based on the Board Manual, the responsibilities of the Board of Commissioners are collective. The division of duties and responsibilities of Members of the Corporate's Board of Commissioners in 2019 based on the Minutes of the Corporate's Board of Commissioners' Internal Meeting on July 31, 2019 is as follows:

| | |
|---|---|
| <p>Muhammad Syaugi</p> <p>Koordinator seluruh bidang penugasan pengawasan Dewan Komisaris</p> | <p>Komisaris Utama <i>President Commissioner</i></p> <p><i>Coordinator of all areas of supervisory assignment of the Board of Commissioners</i></p> |
| <p>Rukijo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Keuangan dan Anggaran • Ketua Komite SDM & Pengusahaan | <p>Komisaris <i>Commissioner</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Finance and Budget</i> • <i>Chairman of the HC & Business Committee</i> |
| <p>Zulfikri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Operasi dan Pemeliharaan • Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti | <p>Komisaris <i>Commissioner</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Operations and Maintenance</i> • <i>Chairman of the Risk & Security Monitoring Committee</i> |
| <p>Mukhtasor</p> <p>Bidang Bisnis dan Pengembangan Usaha</p> | <p>Komisaris <i>Commissioner</i></p> <p><i>Business and Business Development</i></p> |
| <p>Adnan Pandu Praja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidang Konstruksi • Ketua Komite Audit | <p>Komisaris <i>Commissioner</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Construction</i> • <i>Chairman of the Audit Committee</i> |

PROGRAM PENGENALAN PERSEROAN

CORPORATE INDUCTION PROGRAM

Anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perseroan. Program Pengenalan meliputi pelaksanaan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan; gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka panjang, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya; audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit. Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perseroan atau ke proyek, dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perseroan di mana program tersebut dilaksanakan. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut dilakukan oleh Komisaris Utama.

Members of the Board of Commissioners who are appointed for the first time must be given an Corporate Induction Program. Induction Programs include the implementation of Corporate Governance Principles; a description of the Corporate relating to the objectives, nature and scope of activities, financial and operating performance, strategies, long-term business plans, risks and other strategic issues; internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee. The Corporate Induction Program can take the form of presentations, meetings, visits to the Corporate or projects, and review of documents or other programs deemed appropriate to the Corporate where the program is implemented. The responsibility for conducting such an introduction program is carried out by the President Commissioner.

Di tahun 2019, Program Pengenalan Perseroan terhadap Dewan Komisaris yang baru dilakukan pada tanggal 19 Juni 2019 di Kantor Pusat Perseroan yang diikuti oleh Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi, Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Dewan Komisaris, Kepala Departemen Legal & Corporate Legal.

In 2019, the Corporate's Introduction to the Board of Commissioners program was only carried out on June 19, 2019 at the Corporation's Head Office followed by the Director of Finance & Corporate Management, Corporate Secretary, Secretary of the Board of Commissioners, Head of the Legal & Corporate Legal Department.



Gambar 6.3
Image 6.3

PENINGKATAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

COMPETENCE IMPROVEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Perseroan senantiasa memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia mulai dari level teratas hingga bawah sebagai bentuk komitmen Perseroan dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing. Kebijakan mengenai program peningkatan kapabilitas bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kapabilitas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Rencana untuk melakukan program peningkatan kapabilitas harus dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
3. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program peningkatan kapabilitas seperti seminar dan pelatihan diwajibkan menyajikan presentasi kepada Anggota Dewan Komisaris lain dalam rangka berbagi informasi dan pengetahuan.
4. Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan bertanggung jawab untuk membuat laporan tentang pelaksanaan program peningkatan kapabilitas. Laporan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada bab Profil Perseroan dalam laporan tahunan ini.

The Corporation always facilitates the implementation of human resource development programs starting from the top level to the bottom as a form of the Corporation's commitment to create superior and competitive human resources. The policies regarding the capability improvement program for the Board of Commissioners are as follows:

1. *The capability improvement program is implemented in order to increase the work effectiveness of the Board of Commissioners.*
2. *Plans to conduct a capability improvement program must be included in the Board of Commissioners' Work Plan and Budget.*
3. *Every Member of the Board of Commissioners who participates in capacity building programs such as seminars and training is required to present presentations to other Members of the Board of Commissioners in order to share information and knowledge.*
4. *The relevant member of the Board of Commissioners is responsible for making a report on the implementation of the capability improvement program. The report is submitted to the Board of Commissioners.*

Concerning the competency enhancement activities that the Board of Commissioners participated in throughout 2019, can be seen in the Corporate Profile chapter in this annual report.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019 IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS' TASKS IN 2019

1. Realisasi Rencana Kerja Dewan Komisaris

1. Realization of the Board of Commissioners Work Plan

| Rencana Kerja Work Plan | Realisasi Realization |
|---|--|
| Melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi <i>Directors Hold the Board of Commissioners meeting by inviting the Directors 100%</i> | 100% <ul style="list-style-type: none"> • 12x rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi tiap bulannya sepanjang tahun 2019 (Target 8x rapat, detail di bawah) • 12x Board of Commissioners meetings by with inviting Directors every month throughout 2019 (Target 8x meetings, details below) |
| Melakukan rapat internal Dewan Komisaris <i>Conduct internal meetings of the Board of Commissioners</i> | 100% <ul style="list-style-type: none"> • 6x rapat internal Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 (Target 6x Rapat, detail di bawah) • 6x work visits conducted by the Board of Commissioners throughout 2019 (Target 6 times work visits, details below) |
| Melakukan observasi/kunjungan kerja progress konstruksi dan persiapan operasi Fase 1 <i>Conducting observations / work trips to oversee Phase 1 construction progress and preparations for operation</i> | 100% <ul style="list-style-type: none"> • 5x kunjungan kerja yang dilakukan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2019 (Target 4x kunjungan kerja, detail di bawah) • 5x work visits conducted by the Board of Commissioners throughout 2019 (Target 4 times work visits, details below) |
| Melakukan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Divisi atau Direktorat terkait program kerja Komite Komisaris <i>Hold a Board of Commissioners meeting by inviting Division or Directorate related work program of the Committee of Commissioner</i> | 100% <p>Total 10x rapat dalam setahun yang melibatkan unit kerja dengan detail sebagai berikut:</p> <p>Komisaris selaku ketua Komite Audit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 Oktober 2019 mengundang Divisi Internal Audit; • 15 November 2019 mengundang Divisi Keuangan, Divisi IT, dan Divisi PMO; • 19 Desember 2019 mengundang Divisi Internal Audit <p>Komisaris selaku ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 Juli 2019 mengundang Divisi Risk dan QSSHE Assurance; • 22 Oktober 2019 mengundang Divisi PMRS; • 14 November 2019 mengundang Divisi O&M Facility Service, bagian Departemen Security; • 23 Desember 2019 mengundang Divisi Risk dan QSSHE Assurance. <p>Komisaris selaku ketua Komite SDM & Pengusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 Oktober 2019 mengundang Divisi Human Capital; • 21 November 2019 mengundang Divisi Human Capital; • 20 Desember 2019 mengundang Divisi Commercial & Retail. (Target 6x rapat) <p>A total of 10x meetings a year involving work units with details as follows: Commissioner as chairman of the Audit Committee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 October 2019; invited the Internal Audit Division law; • 15 November 2019 invited the Finance Division, IT Division and PMO Division; • December 19, 2019 invited the Internal Audit Division <p>Commissioner as chairman of the Risk & Security Monitoring Committee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 July 2019 invited the Risk and QSSHE Assurance Division; • October 22, 2019 invited the PMRS Division; • 14 November 2019 invited the O&M Facility Service Division, part of the Security Department; • 23 December 2019 invited the Risk and QSSHE Assurance Division. <p>Commissioner as chairman of the HR & Business Committee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11 October 2019 invited the Human Capital Division • November 21, 2019 invited the Human Capital Division • December 20, 2019 invited the Commercial & Retail Division (6 target meeting) |

| Rencana Kerja <i>Work plan</i> | Realisasi <i>Realization</i> |
|---|---|
| <p>Melakukan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang BOD dan mengikutsertakan seluruh Komite</p> <p><i>Hold a Board of Commissioners meeting by inviting BOD and involving all Committees</i></p> | <p>100%</p> <p>6 kali rapat melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, dan Seluruh Komite meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 Januari 2019 Rapat monitoring persiapan operasi; • 20 Maret 2019 Rapat Pra RUPS; • 28 Maret 2019 Rapat RUPS; • 14 November Rapat Persiapan Pra RUPS Luar Biasa; • 15 November 2019 Rapat Pra RUPS Luar Biasa; • 28 November 2019 Rapat RUPS Luar Biasa. <p>(Target 4 kali rapat)</p> <p><i>6 meetings involving the Board of Commissioners, Directors and All Committees include:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 18 January 2019 Monitoring meeting for operational preparation; • March 20, 2019 Pre-RUPS Meeting; • March 28, 2019 GMS Meeting; • November 14 Extraordinary Pre-RUPS Preparatory Meeting; • November 15, 2019 Extraordinary General Meeting of Pre-AGM Meeting; • November 28, 2019 Extraordinary GMS Meeting. <p>(Target 4 meetings)</p> |
| <p>Melakukan evaluasi atas pelaksanaan RKAP tahun 2019 dan reviu atas pengajuan RKAP tahun 2020</p> <p><i>Evaluate the 2019 RKAP implementation and review the 2020 RKAP submission</i></p> | <p>100%</p> <p>Rapat Evaluasi dan reviu RKAP dilakukan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7-8 Oktober 2019 review mendetail atas pengajuan RKAP 2020; • 27 November 2019 evaluasi atas rencana serapan RKAP 2019 hingga akhir tahun; • 30 Desember 2019 evaluasi final atas pelaksanaan RKAP 2019 <p>(Target 1 kali rapat)</p> <p><i>The RKAP evaluation and review meeting is held on:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • October 7-8, 2019 detailed review of the submission of the 2020 RKAP; • November 27, 2019 evaluation of 2019 RKAP absorption plan until the end of the year; • December 30, 2019 final evaluation of the 2019 RKAP implementation <p>(Target 1 meeting)</p> |
| <p>Pengembangan dan peningkatan kapasitas Dewan Komisaris dan Komite Komisaris</p> <p><i>Development and capacity building of the Board of Commissioners and the Committee of Commissioners</i></p> | <p>100%</p> <p>Kegiatan pelatihan yang diikuti oleh Dewan Komisaris dan organ Komisaris sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi (Komisaris Utama) mengikuti Workshop Asia Anti Fraud pada 7-8 November 2019; • Adnan Pandu Praja (Komisaris) mengikuti Workshop Perhimpunan Auditor Internal Indonesia pada 25-27 November 2019; • Akbar Anwar (Sekretaris Dewan Komisaris) mengikuti Konferensi Nasional Anti Fraud pada 9-12 Juli 2019) • Rendi Alhial (Sekretaris Dewan Komisaris) mengikuti Workshop Perhimpunan Auditor Internal Indonesia pada 25-27 November 2019 <p>(Target 4 kali pelatihan)</p> <p><i>The training activities participated in by the Board of Commissioners and Board of Commissioners' organs are as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Syaugi (President Commissioner) attended the Anti-Fraud Asia Workshop on November 7-8, 2019; • Adnan Pandu Praja (Commissioner) attended the Workshop of the Indonesian Internal Auditor Association on 25-27 November 2019; • Akbar Anwar (Secretary of the Board of Commissioners) attended the Anti-Fraud National Conference on 9-12 July 2019) • Rendi Alhial (Secretary of the Board of Commissioners) attended the Indonesian Internal Auditor Association Workshop on November 25-27 2019 <p>(target 4 trainings)</p> |

Tabel 6.14
Table 6.14

2. Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

2. Board of Commissioners Work Visit

| Lokasi Kunjungan Kerja <i>Location</i> | Agenda | Tanggal <i>Date</i> | Peserta Kunjungan Kerja <i>Participant of Work Visit</i> |
|--|---|---|---|
| Stasiun Haji Nawi, Stasiun Cipete, Stasiun Fatmawati, Depo Lebak Bulus | Cek kesiapan operasi komersial MRT Jakarta <i>Check the readiness of Jakarta MRT commercial operations</i> | Sabtu, 23 Februari 2019 <i>Saturday, February 23, 2019</i> | Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Yusmada Faizal |
| Stasiun Senayan, Stasiun Bundaran HI | Peresmian operasi komersial MRT Jakarta, dan <i>groundbreaking</i> konstruksi Fase 2 <i>Inauguration of Jakarta MRT commercial operations, and Phase 2 construction groundbreaking</i> | Senin, 25 Maret 2019 <i>Monday, March 25, 2019</i> | Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Yusmada Faizal |
| Depo Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati | Cek ketersediaan daya listrik dan fasilitas kelistrikan <i>Check power availability and electrical facilities</i> | Selasa, 17 September 2019 <i>Tuesday, September 17, 2019</i> | Muhammad Syaugi |
| Stasiun Bundaran HI | Cek laporan rembesan air <i>back office</i> kantor stasiun <i>Check the station office's backwater seepage report</i> | Senin, 14 Oktober 2019 <i>Monday, October 14, 2019</i> | Muhammad Syaugi |
| Stasiun Setiabudi, Stasiun Dukuh atas | Cek laporan rembesan air di terowongan kereta <i>Check reports of water seepage in the train tunnel</i> | Rabu, 23 Oktober 2019 <i>Wednesday, October 23, 2019</i> | Muhammad Syaugi, Adnan Pandu Praja, Zulfikri, Mukhtasor |

Tabel 6.15
Table 6.15

3. Rekomendasi Dewan Komisaris untuk pengelolaan Perseroan sepanjang tahun 2019.

a. Aspek Konstruksi

- i. Menyiapkan strategi agar pengadaan *Contract Package* Fase 2 tidak gagal dan tetap menjaga target penyelesaian proyek;
- ii. Menyiapkan alternatif dan landasan kebijakan untuk pemberian paket kontrak kepada kontraktor non Jepang jika pihak JICA gagal memenuhi persyaratan kontrak;
- iii. Menyiapkan landasan kebijakan dan memastikan Tata Kelola untuk penunjukkan langsung *Nominated Sub Contractor* pekerjaan sistem persinyalan;
- iv. Menyelesaikan isu pembayaran Fase 1 terkait adanya *Variation Order* dan *Financing Charges*;
- v. Menyelesaikan isu pemindahan utilitas untuk Fase 2;
- vi. Menyelesaikan isu pembebasan lahan untuk Depo Fase 2 di Ancol Barat;
- vii. Mulai melakukan kajian dan membuat rekomendasi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk skema pendanaan Fase 3 dan seterusnya.

3. Recommendations from the Board of Commissioners for the management of the Corporation throughout 2019.

a. Construction Aspects

- i. Prepare a strategy so that the procurement of the *Contract Package* Phase 2 does not fail and still maintain the target of project completion;
- ii. Prepare alternatives and policy bases for awarding contract packages to non-Japanese contractors if JICA fails to fulfill the contract requirements;
- iii. Prepare policy bases and ensure governance for the direct appointment of *Nominated Sub Contractors* for signaling system work;
- iv. Resolving the issue of payment for Phase 1 related to *Variation Order* and *Financing Charges*;
- v. Resolving the issue of utility diversion for Phase 2;
- vi. Resolving the issue of land acquisition for Phase 2 Depot in Ancol Barat;
- vii. Begin to review & make recommendations to the Provincial and Central Governments for Phase 3 funding schemes and so on.

b. Aspek Operasi & Pemeliharaan

- i. Menyiapkan strategi menuju rata-rata penumpang 100 ribu per hari untuk tahun 2020;
- ii. Menjaga aspek layanan, keamanan, dan keselamatan untuk membangun kepercayaan penumpang;
- iii. Meningkatkan aspek keamanan operasi melalui penggunaan X-Ray dan peningkatan kapasitas keamanan vendor
- iv. Memperbaiki kualitas pemeliharaan dengan pengecekan tiap hari dan penggunaan lori berkamera di area jalur kereta;
- v. Menemukanali sumber masalah dari isu-isu berulang pada pemeliharaan suku cadang, seperti isu ausnya *Breakshoes*, *Overhead Catenary System*, kesalahan pada *Platform Screen Door*, dan *Overshoot*;
- vi. Meningkatkan koordinasi yang lebih baik antar fungsi operasi & pemeliharaan, khususnya dalam utilisasi *Handie Talkie*;
- vii. Melakukan evaluasi terhadap fasilitas *Park & Ride* yang sudah ada dan mengoptimalkan penggunaannya untuk penumpang MRT Jakarta;
- viii. Menyiapkan strategi dan langkah-langkah untuk penambahan fasilitas *Park & Ride* dan integrasinya dengan moda lain;
- ix. Meningkatkan strategi penjualan *Multi Trip Ticket*;
- x. Melakukan persiapan menuju integrasi tiket dengan moda transportasi lain di Jabodetabek.

c. Aspek Pengembangan Bisnis

- i. Melakukan pengawalan penyusunan Peraturan Gubernur terkait Pengelola Kawasan Berorientasi Transit dan Panduan Rancang Kota;
- ii. Menindaklanjuti skema pembayaran dengan QR Code dan strategi yang lebih luas untuk EFC peta jalan teknis;
- iii. Menindaklanjuti pemasangan iklan di area tiang jalur layang, CTVT, maupun area lain sesuai regulasi dan turut mempertimbangan aspek keselamatan teknis;
- iv. Menindaklanjuti utilisasi area ritel di stasiun untuk pemasangan ATM, gerai UMKM, maupun gerai komersial lain yang belum terlaksana di stasiun.

d. Aspek Governance, Risk, dan Compliance, serta Keuangan

- i. Melaksanakan mitigasi dari *Top Risk Register*, baik untuk Fase 1 Operasi & Pemeliharaan dan Fase 2 Konstruksi;
- ii. Menjaga tercapainya KPI dan program kerja Perseroan di tahun 2019;
- iii. Meningkatkan penyerapan RKAP 2019 dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kerja;
- iv. Menyetujui ajuan RKAP 2020 oleh manajemen setelah proses reviu berlapis dan umpan balik oleh Dewan Komisaris maupun Komite Komisaris;
- v. Menyelesaikan isu subsidi tahun 2019 dan penerimaan subsidi tahun 2020;
- vi. Menyelesaikan isu perhitungan subsidi tahun 2020 berdasarkan rumus subsidi penumpang yang disepakati dengan pihak Pemerintah Provinsi;
- vii. Menyiapkan tata kelola pembentukan 2 anak perseroan dan ventura bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

b. Operational & Maintenance Aspects

- i. Prepare a strategy to reach an average of 100,000 passengers per day for 2020;
- ii. Maintain service, security and safety aspects to build passenger confidence;
- iii. Increased aspects of security operations through the use of X-Ray and increased vendor security capacity;
- iv. Improved maintenance quality by checking every day and using camera lorries in the track area;
- v. Identifying the root cause of recurring issues in maintenance parts, such as the issue of wear out of breakshoes, Overhead Catenary System, errors on the Screen Door Platform, and overshoot;
- vi. Improved better coordination between operations & maintenance functions, especially in the utilization of Handie Talkies;
- vii. Evaluating existing Park & Ride facilities and optimizing their use for Jakarta MRT passengers;
- viii. Prepare strategies and steps for adding Park & Ride facilities and their integration with other modes;
- ix. Improving the Multi Trip Ticket sales strategy;
- x. Preparations for ticket integration with other modes of transportation in Jabodetabek.

c. Business Development Aspects

- i. Guarding the preparation of Governor's Regulations related to Transit Oriented Development Zone Management and Urban Design Guidelines;
- ii. Follow-up on payment schemes with QR Code and broader strategies for EFC technical road maps;
- iii. Follow-up advertisement in the elevated pole area, CTVT, and other areas according to regulations and take into consideration the technical safety aspects;
- iv. Follow up on the utilization of the retail area at the station to install ATMs, MSME outlets, and other commercial outlets that have not been implemented at the station.

d. Governance, Risk, and Compliance Aspects, as well as Finance

- i. Mitigation of the Top Risk Register, both for Phase 1 of Operation & Maintenance and Phase 2 of Construction;
- ii. Maintaining the achievement of KPI's and the Corporate's work program in 2019;
- iii. Absorption of RKAP 2019 by considering the effectiveness and efficiency of work program implementation;
- iv. Approved the proposal for RKAP 2020 by management after a multi-layered review process and feedback from the Board of Commissioners and the Board of Commissioners;
- v. Resolution of subsidies in 2019 and receipt of subsidies in 2020;
- vi. Resolution of 2020 subsidy calculation issues based on the passenger subsidy formula agreed with the Provincial Government;
- vii. The preparation and governance aspects of the Corporate towards the formation of 2 subsidiaries and a joint venture (JV) with PT KAI.

KOMISARIS INDEPENDEN

INDEPENDENT COMMISSIONERS

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya; baik terafiliasi dalam hubungan bisnis maupun hubungan keluarga. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Komisaris Independen, salah satu Komisaris Independen harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

In Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Independent Commissioners are appointed based on the GMS decision of parties who are not affiliated with major shareholders, members of the Board of Directors and / or other members of the Board of Commissioners; both affiliated in business relationships and family relationships. If there is more than 1 (one) Independent Commissioner, one of the Independent Commissioners must have an accounting or financial background.

INFORMASI TENTANG KEBERADAAN KOMISARIS INDEPENDEN PERSEROAN

CORPORATE INDEPENDENT COMMISSIONER INFORMATION

Di tahun 2019 Perseroan tidak memiliki Komisaris Independen. Keberadaan Komisaris Independen sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham Perseroan.

In 2019 the Corporation did not have an Independent Commissioner. The existence of an Independent Commissioner is entirely the authority of the DKI Jakarta Provincial Government as the Corporation's shareholders.

KRITERIA PENENTUAN KOMISARIS INDEPENDEN

CRITERIA FOR DETERMINING INDEPENDENT COMMISSIONERS

Kebudayaan Komisaris Independen yang ada di Perseroan senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pengurusan BUMD, Komisaris Independen di Perseroan memiliki kriteria sebagai berikut:

The existence of Independent Commissioners in the Corporation always guarantees that the supervision mechanism is operating effectively and in accordance with statutory regulations. Based on the Governor Regulation of 186 of 2014 concerning Management of ROE, Independent Commissioners in the Corporation have the following criteria:

1. Memiliki integritas, loyalitas, dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perseroan.
 2. Memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam mengelola Perseroan.
 3. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter berdasarkan pemeriksaan medis.
 4. Memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang sesuai dengan kedudukan Komisaris Perseroan.
 5. Mempunyai kemampuan dan kecakapan bertindak secara hukum.
 6. Tidak pernah menjadi Komisaris, Direksi, Badan Pengawas dalam suatu perseroan manapun yang dinyatakan pailit.
 7. Mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Strata 1 (satu)/Sarjana.
 8. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat permohonan disampaikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.
 9. Tidak sedang menjalani status hukum tersangka atau terdakwa.
 10. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif atau pengurus dan/atau pengurus organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik.
 11. Tidak pernah dihukum karena tindakan merugikan keuangan negara/daerah.
 12. Direkomendasikan layak dan patut oleh konsultan ahli yang independen berdasarkan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
1. *Having integrity, loyalty and high dedication to advance and develop the Corporation.*
 2. *Has competence and professionalism in managing the Corporation.*
 3. *Physically and mentally healthy as evidenced by a doctor's certificate based on medical check-ups.*
 4. *Having intellectual, emotional and spiritual intelligence in accordance with the position of Commissioner of the Company.*
 5. *Having the ability and ability to act in a legal manner.*
 6. *Never become a Commissioner, a Director, a Supervisory Board in any corporation that is declared bankrupt.*
 7. *Have at least Bachelor level education/Bachelor degree.*
 8. *The lowest age is 35 years and the highest is 60 years at the time the application is submitted to the Governor/Deputy Governor/Regional Secretary.*
 9. *Not undergoing the legal status of a suspect or defendant.*
 10. *Not being a member of the management and / or members of political parties and / or candidates / members of the legislative body or management and / or management of social organizations affiliated with political parties.*
 11. *Never been convicted of an act detrimental to state / regional finances.*
 12. *Recommended and appropriate by an independent expert consultant based on fit and proper test.*

13. Bersedia dan menyatakan mundur dari status Pegawai Negeri Sipil bagi pejabat atau pegawai lembaga/instansi Pemerintah/ Pemerintah Daerah yang bertugas sebagai Pelaksana Pelayanan Publik.
14. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anggota Direksi atau pejabat satu tingkat di bawah Direksi pada Perseroan yang bersangkutan baik karena hubungan darah maupun karena perkawinan sampai derajat ketiga.
15. Tidak berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan demikian, Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. *Willing and declaring resignation from the status of Civil Servants for officials or employees of institutions / agencies of the Government / Regional Government who are assigned as Implementers of Public Services.*
14. *Do not have family relations with members of the Directors or officials one level below the Directors at the relevant of the Corporation either because of blood relations or because of marriage to the third degree.*
15. *Not a member of the Indonesian National Army or the National Police.*

Accordingly, the Corporate's Independent Commissioners have fulfilled the criteria in accordance with the applicable laws and regulations.

DIREKSI

DIRECTORS

Direksi merupakan organ Perseroan yang berperan dalam menjalankan aktivitas operasional secara keseluruhan. Visi dan misi Perseroan yang telah dicanangkan, yang kemudian tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) menjadi kewajiban tujuan utama Direksi dalam menyelenggarakan pengelolaan Perseroan. Komposisi Direksi ditentukan dan diangkat dalam RUPS.

The Directors is a Corporate organ that plays a role in carrying out overall operational activities. The vision and mission of the Corporation that has been declared, which is then enshrined in the Corporation's Long Term Plan (RJPP) is the main objective of the Directors in carrying out the management of the Corporation. The composition of the Directors is determined and appointed at the GMS.

KUALIFIKASI DAN KRITERIA ANGGOTA DIREKSI

QUALIFICATIONS AND CRITERIA FOR MEMBERS OF THE DIRECTORS

Perseroan mewajibkan anggota Direksi untuk berdomisili di Indonesia. Di samping itu, anggota Direksi yang dinominasikan diharuskan untuk tidak pernah dinyatakan pailit dan atau dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan tidak pernah melakukan tindakan tercela dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.

The Corporation requires members of the Directors to reside in Indonesia. In addition, nominated members of the Directors must never be declared bankrupt and/or convicted for causing a Corporation to go bankrupt; and have never committed a disgraceful act and have never been convicted of a felony.

Perseroan melarang adanya rangkap jabatan anggota Direksi sebagai Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada perseroan sejenis dan/atau lembaga lain. Untuk menghindari benturan kepentingan, Perseroan tidak mengizinkan anggota Direksi yang dinominasikan memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, dan/atau pemegang saham Perseroan.

The Corporation prohibits the concurrent positions of members of the Directors as the Board of Commissioner, Directors or executive officers of similar Corporation and/or other institutions. To avoid conflicts of interest, the Corporation does not permit nominated members of the Directors who have financial and family relations with members of the Board of Commissioners, other members of the Directors and/or shareholders of the Corporation.

Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif Perseroan.

The majority of members of the Directors have more than 5 (five) years experience in the operational field as executive officers of the Corporation.

PENGGANGKATAN/PEMBERHENTIAN DAN KETENTUAN MASA JABATAN DIREKSI APPOINTMENT / DISMISSAL AND CONDITIONS OF DIRECTORS' TERM

Direksi diangkat dan/atau diberhentikan oleh mekanisme RUPS. Sesuai keputusan RUPS di tahun 2015 yang diselenggarakan pada 30 Maret 2015 dan telah disahkan melalui Akta No. 72 Tahun 2015 tentang Pernyataan Keputusan RUPS, masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun, dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), secara khusus dinyatakan bahwa pengangkatan anggota Direksi untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya hanya dapat dilakukan kepada anggota Direksi yang berkinerja baik, sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan BUMD, Pasal 72 ayat (2).

Directors are appointed and/or dismissed by the GMS mechanism. In accordance with the resolutions held on 30 March 2015 and has been ratified through Deed No. 72 of 2015 concerning Statement of GMS Decree, the term of office of the Directors are 5 (five) years, and can only be reappointed for another 1 (one) term, without prejudice to the rights of the GMS to dismiss at any time. In the Board of Commissioners and Directors Manual (Board Manual), it was specifically stated that the appointment of members of the Directors for the next 1 (one) term of office can only be done to members of the Directors with good working performance, in accordance with the Regulations of the Provincial Governor of the Jakarta Special Capital Region No. 109 of 2011 concerning Management of ROE, Article 72 paragraph (2).

JUMLAH, KOMPOSISI, DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2019 NUMBER, COMPOSITION AND COMPOSITION OF DIRECTORS IN 2019

Direksi Perseroan terdiri dari 5 (lima) jabatan fungsional yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi, Direktur Konstruksi, Direktur Pengembangan Bisnis, serta Direktur Operasi dan Pemeliharaan.

The Corporate's Directors consist of 5 (five) individuals namely: the President Director, Finance and Management Corporation Director, Construction Director, Business Development Director, and Operation and Maintenance Director.

Komposisi Direksi per 31 Desember 2018 beranggotakan 5 (lima) Direksi, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 4 (empat) Direktur. Di sepanjang tahun 2019 tidak terdapat pergantian keanggotaan Direksi. Dengan demikian susunan Direksi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2019 adalah sama.

Throughout 2019, there was no change in membership of the Directors. Therefore, the composition of the Directors as of December 31, 2018 and as of December 31, 2019 are the same.

SUSUNAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2019

Composition of Board of Directors per December 2019

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment | Masa Jabatan Term of Office | Periode Jabatan Office Period |
|---------------------|---|--|--|----------------------------------|
| William P. Sabandar | Direktur Utama <i>President Director</i> | Akta No. 51 Tanggal 21 Oktober 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 51 Dated October 21, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> | 21 Maret 2018-RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018- GMS Year 2023</i> | Ke-2 <i>2nd</i> |
| Silvia Halim | Direktur Konstruksi <i>Construction Director</i> | Akta No. 48 Tanggal 13 September 2016, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 48 September 13, 2016, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> | 21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018 - GMS Year 2023</i> | Ke-2 <i>2nd</i> |
| Muhammad Effendi | Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Director of Operation & Maintenance</i> | Akta No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 16 dated 17 November 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> | 29 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>October 29, 2018 - GMS Year 2023</i> | Ke-1 <i>1st</i> |
| Ghamal Peris | Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i> | Akta No. 16 Tanggal 17 November 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 16 dated 17 November 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> | 29 Oktober 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>October 29, 2018 - GMS Year 2023</i> | Ke-1 <i>1st</i> |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--------------------|
| Tuhyat | Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Finance and Corporate Management</i> | Akta No. 133 Tanggal 21 Maret 2018, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. <i>Deed No. 133 dated 21 March 2018, Notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.</i> | 21 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023 <i>March 21, 2018 - GMS Year 2023</i> | Ke-2 nd |
|--------|--|--|--|--------------------|

Tabel 6.16
Table 6.16

Profil seluruh Direksi dapat dilihat pada Bab Profil Perseroan dalam laporan tahunan ini.

The profiles of all Directors can be seen in the Corporate Profile chapter in this Annual Report.

INTEGRITAS

INTEGRITY

Direktur Perseroan tidak diperkenankan:

1. Memberi atau menerima hadiah (yang substansial) dari rekan bisnis Perseroan dan/atau anak perusahaannya.
2. Memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pihak ketiga mana pun yang merugikan Perseroan dan/atau anak perusahaannya.
3. Mengambil keuntungan dari peluang-peluang bisnis, yang merupakan hak Perseroan (dan/ atau anak perusahaannya), baik untuk dirinya sendiri, pasangannya, anak maupun sanak saudara yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan sampai derajat kedua.
4. Ikut serta, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan (sebagai Direktur atau Komisaris) di perseroan pesaing Perseroan dan/atau anak Perseroan.
5. Memiliki saham di perseroan pesaing Perseroan dan/atau anak perusahaannya.

Dalam berhubungan dengan Dewan Komisaris dan setiap anggotanya serta Komite Dewan Komisaris, Direksi bertindak berdasarkan semangat saling percaya dan keterbukaan.

Corporate's Directors not allowed to:

1. *Giving or receiving gifts (substantially) from the Corporation's business partners and/or subsidiaries.*
2. *Give improper advantage to any third party that harms the Corporation and/or its subsidiaries.*
3. *Take advantage of business opportunities, which are the rights of the Corporation (and/or its subsidiaries), both for themselves, their partners, children and relatives who have blood relations or marriage relationships to the second degree.*
4. *Participate, both directly and indirectly, in management (as a Director or Commissioner) in a competing company of the Corporation and/or a subsidiary.*
5. *Has shares in a competitor Corporation of the Corporation and/or a subsidiary.*

In dealing with the Board of Commissioners and every member and committee of the Board of Commissioners, the Directors acts based on the spirit of mutual trust and openness.

KERAHASIAAN

CONFIDENTIALITY

Selama masa jabatannya dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, setiap anggota Direksi dilarang menggunakan atau mengungkapkan (baik secara langsung maupun tidak langsung) informasi rahasia apapun yang dimiliki oleh Perseroan. Anggota Direksi tersebut juga dilarang menyalahgunakan Informasi Rahasia. Informasi Rahasia mencakup dokumen dan/atau informasi strategis yang dibuat dan/ atau diperoleh Perseroan, yang tidak boleh diungkapkan atau diberikan kepada pihak luar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga keunggulan kompetitif Perseroan dan/atau anak perusahaannya.
2. Untuk mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Informasi yang masuk dalam kategori Informasi Rahasia Perseroan adalah:

During his term of office and after the term of office expires, each member of the Directors is prohibited from using or disclosing (either directly or indirectly) any confidential information held by the Corporation. Members of the Directors are also prohibited from misusing Confidential Information. Confidential Information includes documents and/or strategic information created and/or obtained by the Corporation which may not be disclosed or provided to outside parties, with the following considerations:

1. *To maintain the competitive advantage of the Corporation and/or its subsidiaries.*
2. *To comply with agreements or laws that require the Corporation to maintain the confidentiality of information. Information included in the Corporate Confidential Information category are:*

- a. Laporan keuangan dan/atau transaksi material yang belum diungkapkan ke publik.
- b. Rencana strategis Perseroan.
- c. Informasi yang terikat dengan perjanjian kerahasiaan.
- d. Produk-produk Perseroan dan/atau anak perusahaannya yang masih dalam tahap pengembangan.
- e. Keunikan teknologi.
- f. Informasi lainnya yang dianggap rahasia.

- a. *Financial reports and / or material transactions that have not been disclosed to the public.*
- b. *The Corporation's strategic plan.*
- c. *Information that is bound by a confidentiality agreement.*
- d. *Products of the Corporation and/or its subsidiaries that are still in the development stage.*
- e. *The uniqueness of technology.*
- f. *Other information which is considered confidential.*

ETIKA BERUSAHA DAN ANTI KORUPSI

BUSINESS ETHICS AND ANTI-CORRUPTION

1. Direksi berkewajiban untuk mengembangkan dan memimpin penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Direktur Perseroan dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung ataupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. *The Directors is obliged to develop and lead the implementation of Good Corporate Governance.*
2. *The Corporate Directors are prohibited from giving or offering or accepting, directly or indirectly, anything of value to government officials to influence or in return for what they have done and other actions in accordance with statutory provisions.*

BENTURAN KEPENTINGAN

CONFLICT OF INTEREST

Seorang Direktur menghindari berada dalam posisi di mana kepentingan pribadinya dapat berbenturan dengan tugasnya dalam Perseroan. Direktur wajib segera melaporkan kepada Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya mengenai adanya benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dengan Perseroan dan wajib memberikan seluruh informasi yang relevan dalam laporan tersebut.

A Director avoids being in a position where his personal interests may conflict with his duties within the Corporation. The Director must immediately report to the President Director and other members of the Directors regarding any conflict of interest or potential conflict of interest with the Corporation and must provide all relevant information in the report.

Transaksi di mana terdapat seorang Direktur yang memiliki benturan kepentingan harus memperoleh persetujuan Direksi, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang setidaknya lazim digunakan pada industri yang bersangkutan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Transactions where there is a Director who has a conflict of interest must obtain Directors approval, carried out with terms and conditions that are at least commonly used in the industry concerned and meet the provisions of the applicable laws and regulations regarding affiliated transactions and / or transactions that contain conflicts of interest.

Direktur yang memiliki benturan kepentingan dilarang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai agenda di mana dia memiliki benturan kepentingan. Dalam hal anggota Direksi memiliki saham Perseroan dan/atau saham perseroan lain, anggota Direksi tersebut wajib memenuhi persyaratan pelaporan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi dilarang menerima, memberikan, atau menawarkan baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pihak lain untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

A director who has a conflict of interest is prohibited from participating in the decision making process regarding an agenda where he has a conflict of interest. In the event that a member of the Directors owns Corporation shares and/or shares of another Corporation, the member of the Directors must fulfill the reporting requirements stipulated in the applicable laws and regulations. Members of the Directors are prohibited from receiving, giving or offering either directly or indirectly anything of value to other parties to influence or in return for what they have done and other actions in accordance with statutory regulations.

Setiap tahunnya, seluruh anggota Direksi Perseroan menandatangani Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan.

Every year, all members of the Corporate's Directors sign a Statement of No Conflicts of Interest.

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI: PEDOMAN TATA KERJA DIREKSI

BOARD MANUAL: BOARD OF DIRECTORS WORK GUIDELINES

Dalam melaksanakan perannya, Direksi mengacu pada Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, atau *Board Manual*. Secara khusus pedoman ini mengatur tentang Direksi terkait beberapa hal di bawah ini:

1. Masa Jabatan
2. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas
3. Tugas dan Kewajiban Direksi
 - a. Umum
 - b. Tugas yang berhubungan dengan RUPS
 - c. Tugas yang terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja
 - d. Tugas yang terkait dengan Rencana Jangka Panjang (RJP)
 - e. Tugas yang terkait dengan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
 - f. Tugas yang terkait dengan Penyusunan Laporan Tahunan
 - g. Tugas yang terkait dengan Pengurusan Manajemen Risiko
4. Tanggung Jawab Direksi
5. Wewenang Direksi
 - a. Umum
 - b. Kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Komisaris
 - c. Kewenangan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris
6. Kontrak Manajemen
7. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
8. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan
9. Sistem Akuntansi dan Pembukuan
10. Hak Direksi
11. Etika Jabatan
12. Pendelegasian Wewenang di antara anggota Direksi Perseroan
13. Pembidangan Tugas Direksi
 - a. Umum
 - b. Direktur Utama
 - c. Direktur Konstruksi
 - d. Direktur Operasi dan Pemeliharaan
 - e. Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
14. Penggunaan Saran Profesional
15. Komite-komite (Tim) Direksi
16. Rapat Direksi
 - a. Umum
 - b. Jadwal dan Agenda Rapat
 - c. Prosedur Kehadiran
 - d. Prosedur Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan
 - e. Pembuatan Risalah Rapat Direksi
 - f. Prosedur Penyusunan Risalah Rapat Direksi
17. Sekretaris Perusahaan

In carrying out its role, the Directors refers to the Board of Commissioners and Directors Guidelines, or Board Manual. Specifically this Board Manual regulates the Directors regarding the following matters:

1. *Term of Office*
2. *Program for Introduction and Improvement of Capacities*
3. *Duties and Obligations of Directors*
 - a. *General*
 - b. *Tasks related to RUPS*
 - c. *Tasks related to the Strategy and Work Plan*
 - d. *Tasks related to the Long Term Plan (RJP)*
 - e. *Tasks related to the Compilation of Work Plans and Corporate Budgets (RKAP)*
 - f. *Tasks related to the preparation of the Annual Report*
 - g. *Duties related to Management of Risk Management*
4. *Responsibilities of the Directors*
5. *Authority of the Directors*
 - a. *General*
 - b. *The authority of the Directors which requires the approval of the Commissioners*
 - c. *The authority of the Directors must obtain the approval of the GMS and the approval was given after hearing the opinions and suggestions of the Commissioners*
6. *Management Contracts*
7. *Business Ethics and Anti-Corruption*
8. *Relationship with Stakeholders*
9. *Accounting and Bookkeeping Systems*
10. *Directors' Rights*
11. *Ethics Position*
12. *Delegation of Authority among the Directors of the Corporation*
13. *Guidance on the Duties of Directors*
 - a. *General*
 - b. *President Director*
 - c. *Construction Director*
 - d. *Director of Operation and Maintenance*
 - e. *Director of Finance and Corporate Management*
14. *Use of Professional Suggestions*
15. *Directors' Committees (Teams)*
16. *Directors' Meeting*
 - a. *General*
 - b. *Meeting Schedule and Agenda*
 - c. *Attendance Procedure*
 - d. *Procedure for Discussion of Problems and Decision Making*
 - e. *Making Minutes of Directors' Meetings*
 - f. *Procedure for the Preparation of Minutes of the Directors' Meetings*
17. *Corporate Secretary*

TUGAS DAN KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, SERTA HAK DIREKSI *DUTIES AND OBLIGATIONS, RESPONSIBILITIES, AUTHORITY AND RIGHTS OF DIRECTORS*

Secara garis besar, tugas dan kewajiban, tanggung jawab, wewenang, serta hak Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Umum

- Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada RUPS.
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan. Laporan keuangan tersebut wajib diserahkan kepada auditor publik untuk diaudit.
- Menyiapkan susunan organisasi pengurusan Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya.
- Dalam hal penyelenggaraan RUPS, Direksi harus menyiapkan mekanisme RUPS yang memungkinkan Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Direksi harus menjamin agar Pemegang Saham mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Anggaran Dasar, semua keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

2. Terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham

- Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan dokumen-dokumen terkait dengan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Pemegang Saham.
- Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Menandatangani Laporan Tahunan, dalam hal Direktur tidak menandatangani Laporan Tahunan, maka harus disebutkan alasannya.
- Memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan atau RUPS Luar Biasa.

Overall, the duties and obligations, responsibilities, authorities, and rights of the Corporate's Directors are as follows:

1. General

- *The Directors is tasked with carrying out all actions related to the management of the Corporation for the benefit of the Corporation and in accordance with the aims and objectives of the Corporation and representing the Corporation both inside and outside the court of all matters and all events with restrictions as regulated in statutory regulations, Articles of Association and/or Resolution of General Meeting of Shareholders.*
- *Preparing in due course RJPP, RKAP, and amendments as well as submitting them to the Board of Commissioners and Shareholders to get the GMS ratification.*
- *Provide accountability and all information regarding the condition and course of the Corporation in the form of annual reports including annual calculations and management reports to the GMS.*
- *Develop an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage and supervision. The financial statements must be submitted to public auditors for auditing.*
- *Prepare the organizational structure of the Corporation management complete with details of its tasks.*
- *In terms of holding a GMS, the Directors must prepare a GMS mechanism that allows Shareholders to be present at the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and regulations. The Directors must ensure that Shareholders receive their rights in accordance with the provisions of the Articles of Association, all decisions taken legally in the GMS and the applicable rules and regulations.*
- *In carrying out their duties, members of the Directors must comply with the Company's Articles of Association and laws and regulations and must implement the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness.*

2. Related to the General Meeting of Shareholders

- *Must hold and keep a Register of Shareholders and documents related to the GMS in accordance with statutory provisions.*
- *Provide periodic reports according to the manner and time in accordance with applicable regulations and other reports whenever requested by the Shareholders.*
- *Provide accountability and all information regarding the condition and course of the Corporation in the form of annual reports including annual calculations to the General Meeting of Shareholders.*
- *Signing the Annual Report, if the Director does not sign the Annual Report, the reasons must be stated.*
- *Summon and hold an Annual GMS and or Extraordinary GMS.*

3. Terkait dengan Strategi dan Rencana Kerja

- Menyiapkan Visi, Misi, dan Budaya Perseroan.
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
- Menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP) termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perseroan, serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- Mencapai sasaran-sasaran jangka panjang yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP).
- Mencapai target-target yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP) dan kontrak manajemen dalam bentuk *Key Performance Indicator* (KPI).

4. Terkait dengan Manajemen Risiko, membangun dan melaksanakan program manajemen risiko Perseroan secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Tata Kelola Perusahaan yang baik. Sistem manajemen risiko yang dibangun akan terdiri dari pentahapan-pentahapan sebagai berikut:

- Identifikasi Risiko adalah proses untuk menemukan, mengenali, menguraikan, dan menggambarkan risiko termasuk di dalamnya identifikasi sumber, peristiwa, penyebab dan dampak yang mungkin terjadi, serta didukung oleh data historis, analisis teoritis, pendapat pakar/ahli, atau informasi lainnya. Proses identifikasi untuk menemukan dan mengetahui risiko internal dan eksternal Perseroan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Perseroan.
- Analisis Risiko adalah proses untuk memahami sifat risiko dan menentukan tingkat/pengukuran risiko, sebagai dasar melakukan evaluasi risiko dan bagi manajemen dalam menangani/memperlakukan risiko, atau suatu metode analisis yang meliputi faktor penilaian, karakterisasi, komunikasi, manajemen, dan kebijakan yang berkaitan dengan risiko yang dapat dilakukan secara kuantitatif atau kualitatif.
- Evaluasi Risiko adalah proses manajemen risiko dengan cara membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko untuk menentukan apakah risiko dapat diterima atau ditoleransi sehingga membantu manajemen dalam menangani/memperlakukan risiko.
- Respons Risiko adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk memberikan solusi terhadap risiko yang melekat di dalam proses bisnis Perseroan, antara lain melalui tindakan menghindari, menerima, memindahkan, dan mengurangi.
- Penanganan/Perlakuan Risiko adalah proses untuk memodifikasi risiko antara lain; menghindari risiko dengan memutuskan untuk tidak melakukan atau melanjutkan aktivitas tertentu yang dianggap berisiko, menerima atau bahkan meningkatkan risiko untuk mengejar kesempatan, menghilangkan sumber risiko, mengurangi kemungkinan dan dampak terjadinya risiko, berbagi atau transfer risiko dengan pihak lain, serta mempertahankan risiko yang didukung informasi yang memadai – penanganan/ perlakuan risiko yang berhubungan dengan proses untuk mengurangi/menghilangkan dampak negatif dapat disebut juga “mitigasi risiko”, “penghapusan risiko”, “pencegahan risiko” dan “pengurangan risiko”.

3. Related to Strategies and Work Plans

- *Preparing the Corporation's Vision, Mission and Culture.*
- *Endeavor and guarantee the implementation of the Corporation's business and activities in accordance with the aims and objectives and business activities.*
- *Prepare a Work Plan and Corporate Budget (RKAP) and Long-Term Plan (RJP) including other plans related to the implementation of the Corporation's business and activities, and submit to the Board of Commissioners and Shareholders to get the GMS ratification.*
- *Achieve the long-term goals listed in the Corporate's Long-Term Plan (RJPP)*
- *Achieve targets stated in the Work Plan and Corporate Budget (RKAP) and management contracts in the form of Key Performance Indicators (KPI).*

4. Related to Risk Management Develop and implement an integrated corporate risk management program that is part of the GCG program implementation. The risk management system developed will consist of the following phases:

- *Risk Identification is a process to discover, familiarize, elaborate, and illustrate risks. It includes identifying the source, incidents, causes, and impacts that may occur. This is supported by historical data, theoretical analysis, perspective of experts, and other information. The identification process is done to discover and be aware of internal and external corporate risks that may affect the goals and objectives of the Corporation.*
- *Risk analysis is a process to understand risk behavior and hence decide the level or risk valuation, as the basis of conducting risk evaluation, and for the management, to handle or treat the risks, or as an analytical method that captures assessment factor, characterization, communication, management, and policies that have connection to risks which can be done using the quantitative or qualitative method.*
- *Risk Evaluation is a risk management process that compares the results of risk analysis with risk criteria to determine whether the risk can be accepted or tolerated, such that it helps the management to handle or treat risks.*
- *Risk Response is an action that is aimed to bring solutions on risks that are attached inside the Corporation's business process by acting to avoid, accept, transfer, or reduce.*
- *Risk Treatment is a process to modify risk by way of; avoiding the risk by deciding not to carry out or continue a certain activity that is deemed risky, accepting or increasing the risk to catch an opportunity, eliminating risk source, reducing the chances and impact of risk occurrence, transferring risk with other parties, as well as maintaining the risk that is supported with sufficient information - risk handling/treatment that are related with the process to reduce/eliminate the negative impacts that can also be called as "risk mitigation", "risk elimination", "risk prevention", and "risk reduction".*

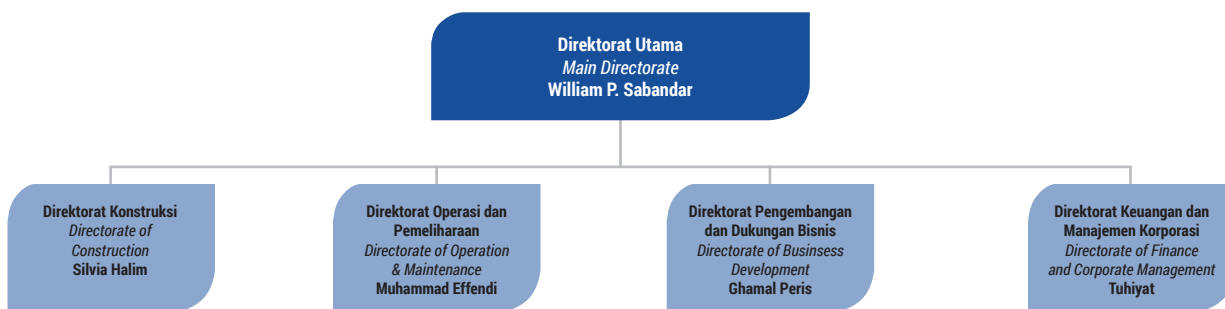
- Pemantauan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus menerus untuk memeriksa, mengawasi, melakukan pengamatan secara kritis untuk dapat mengidentifikasi terjadinya perubahan dari tingkat kinerja atau sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pengelolaan risiko.
 - Pelaporan Risiko adalah suatu bentuk komunikasi guna menyampaikan informasi status risiko dan pengelolaannya kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal.
5. Terkait dengan Sistem Pengendalian Intern
- Direksi harus menetapkan sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.
 - Sistem Pengendalian Intern mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - Lingkungan Pengendalian Intern dalam Perseroan
 - Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha
 - Aktivitas pengendalian
 - Sistem informasi dan komunikasi
 - Pemantauan
 - Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perseroan.
6. Terkait Pengawasan Intern
- Membentuk Satuan Pengawasan Intern yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - Fungsi Pengawasan Intern, adalah:
 - Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
 - Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
 - Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Komisaris.
 - Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di Perseroan.
7. Terkait dengan Sistem Akuntansi dan Pembukuan
- Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang mencakup prinsip-prinsip pengendalian intern, pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
 - Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan untuk menghasilkan penyelenggaraan pembukuan yang tertib, kecukupan modal kerja dengan biaya modal yang efisien, struktur neraca yang baik dan kokoh, penyajian laporan dan analisis keuangan tepat waktu dan akurat, serta prinsip-prinsip lain sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu Perseroan.
8. Terkait dengan Tugas dan Kewajiban Lain
- Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- *Risk Monitoring is a process that is continuously carried out to critically check, supervise, and observe to identify changes from the level of performance or target desired from the implementation of risk management.*
 - *Risk Reporting is a form of communication to deliver risk status information and its management to internal and external stakeholders.*
5. *Related to Internal Control Systems*
- *The Directors must establish an effective Internal Control system to secure the Corporation's investments and assets.*
 - *The Internal Control System includes the following:*
 - *Internal Control Environment in the Corporation*
 - *Business risk assessment and management*
 - *Control activities*
 - *Information and communication systems*
 - *Monitoring*
 - *The Directors compiles provisions governing the reporting mechanism for alleged irregularities in the Corporation.*
6. *Related to Internal Control*
- *Establish an Internal Supervision Unit led by a head who is appointed and dismissed by the President Director based on the Corporation's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners.*
 - *Internal Control Functions, are:*
 - *Evaluation of the effectiveness of the implementation of internal control, risk management and corporate governance processes, in accordance with laws and regulations and Corporation policies.*
 - *Examination and evaluation of efficiency and effectiveness in the fields of finance, operations, human resources, information technology and other activities.*
 - *The Directors must submit reports on the implementation of the internal control function periodically to the Board of Commissioners*
 - *The Directors must maintain and evaluate the quality of the internal control function in the Corporation.*
7. *Associated with Accounting and Bookkeeping Systems*
- *Arrange an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards which include principles of internal control, administration, recording, storage and supervision.*
 - *Conduct and maintain bookkeeping and administration of the Corporation to produce orderly accounting, working capital adequacy with efficient capital costs, a good and sturdy balance sheet structure, timely and accurate presentation of reports and financial analysis and other principles in accordance with the prevailing norms for a Corporation.*
8. *Related to Other Duties and Obligations*
- Performing other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and determined by the General Meeting of Shareholders based on statutory regulations.*

RUANG LINGKUP PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

SCOPE OF DELEGATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DIRECTORS

Direksi bertugas secara kolegal, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembidangan tugas di antara anggota Direksi. Pembidangan tugas di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegal dalam pengurusan Perseroan.

The Directors has collegial duties, but in order to be more efficient and effective in carrying out the tasks, the assignment is done among the members of the Directors. The assignment of duties among the Directors does not eliminate collegial responsibility of the Directors in the management of the Corporate.



Figur 6.4
Figure 6.4

William P. Sabandar (Direktur Utama President Director)

1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
2. Berperan sebagai wakil Perseroan dalam berkoordinasi dengan Pemangku Kepentingan.
3. Memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan semua kegiatan di seluruh Direktorat.
4. Menetapkan kebijakan Perseroan yang mencakup seluruh aktivitas Perseroan.
5. Menetapkan kebijakan dan strategi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kontrol internal serta mengevaluasi pelaksanaannya.
6. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang akan ditimbulkan telah ditetapkan rencana mitigasinya dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris secara berkala.
7. Memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Perseroan.
8. Memberikan persetujuan rencana audit tahunan.
9. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal.
10. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil pengawasan manajemen mutu.
11. Melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kinerja Perseroan.
12. Memastikan pencapaian kinerja Perseroan sesuai dengan target.
13. Memberikan laporan kepada pemangku kepentingan utama mengenai progres pembangunan proyek MRT Jakarta.
14. Menyampaikan informasi Perseroan kepada Pemangku Kepentingan.
15. Jika salah seorang Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur Utama atau Rapat Direksi dapat menunjuk salah seorang anggota Direksi lainnya untuk dapat berhak dan berwenang atas nama Direktur yang bersangkutan serta mewakili Perseroan.
16. Sebagai penanggung jawab penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, antara lain:
 - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
 - Memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga.
17. Bertanggung jawab mengawasi tindak lanjut hasil penilaian penerapan GCG baik yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun secara penilaian sendiri.
18. Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan masalah hukum.
19. Memberikan masukan dari aspek hukum kepada Direksi, berkaitan dengan operasionalisasi dan pengembangan usaha Perseroan.
20. Melakukan monitoring Daftar Pemegang Saham dan pemutakhirannya.

William P. Sabandar
(Direktur Utama *President Director*)

1. *Act for and on behalf of the Directors and represent the Corporation.*
2. *Acting as a representative of the Corporation. in coordination with the Stakeholders.*
3. *Lead, control and coordinate all activities in all Directorates.*
4. *Establish Corporate policies that cover all Corporate activities.*
5. *Establish policies and strategies in the areas of governance, risk management and internal control and evaluate their implementation.*
6. *Ensure that all material risks and impacts that will result from the mitigation plan have been determined and reported to the Board of Commissioners periodically.*
7. *Ensuring that the application of Risk Management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Corporation..*
8. *Give approval for the annual audit plan.*
9. *Responsible for overseeing the follow-up of the results of the audit both internal and external.*
10. *Responsible for overseeing the follow-up to the results of quality management supervision.*
11. *Perform overall supervision of the implementation of the Corporate performance.*
12. *Ensuring the achievement of the Corporate performance in accordance with the target.*
13. *Provide reports to key stakeholders regarding the progress of the Jakarta MRT project development.*
14. *Delivering Corporate information to Stakeholders.*
15. *If one of the Directors is absent or is unable to attend due to any reason, which does not need to be proven to a third party, the President Director or the Directors Meeting can appoint one of the other Directors to be entitled and authorized on behalf of the Director concerned and represent the Corporation.*
16. *As the person responsible for implementing and monitoring GCG, including:*
 - *Monitor and maintain that the Corporate business activities do not deviate from the applicable provisions*
 - *Monitor and maintain the Corporation's compliance with all agreements and commitments made by the Corporation with third parties.*
17. *Responsible for overseeing the follow-up of the results of the GCG implementation assessment both by external parties and by self-assessment.*
18. *Handling activities related to handling legal issues.*
19. *Provide input from the legal aspects to the Directors, relating to the operationalization and development of the Corporate's business.*
20. *Monitoring the List of Shareholders and their updates.*

Tabel 6.17
Table 6.17

Silvia Halim
(Direktur Konstruksi *Director of Construction*)

Tugas Pokok
Main Tasks

1. Bertanggung jawab atas pembangunan prasarana dan sarana MRT Jakarta.
2. Pengendalian biaya, waktu, maupun kualitas dalam kegiatan pembangunan MRT Jakarta sesuai strategi yang ditetapkan Direksi.
3. Mengoordinasikan dan mengawasi semua pelaksanaan proyek yang berada dalam kewenangannya.
4. Pengendalian atas aspek-aspek strategis dari setiap kegiatan besar dan pelaksanaan manajemen risiko konstruksi
5. Menjamin terlaksana secara efektif, baik pada tahap persiapan dan pelaksanaan pembangunan, maupun pada tahap persiapan operasi prasarana dan sarana MRT Jakarta atas aspek berikut:
 - Rencana pengelolaan proyek.
 - Sistem kontrol dan pengendalian kualitas.
 - Manajemen risiko dan pengelolaan keselamatan.
6. Pelaksanaan kajian terhadap produk atau output pekerjaan.
7. Ketersediaan jadwal induk dari tahap perencanaan sampai selesainya pembangunan.
8. Mengoordinasikan konsultan yang terlibat pada masa konstruksi.
9. Berkoordinasi dengan Direktur Operasi dan Pemeliharaan dalam perancangan dan spesifikasi teknis *Rolling Stock, Station Building & facilities*, dan berbagai sistem perkeretaapian dan pekerjaan terkait lainnya.
10. Mengarahkan dan mengoordinasikan Manajer Proyek dalam rangka memastikan seluruh aktivitas telah berjalan dalam arah pencapaian tujuan pekerjaan serta dapat diselesaikan dalam batasan-batasan waktu dan pendanaan.
11. Memimpin penyusunan prosedur operasional untuk pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa prosedur telah memenuhi atau selaras dengan kebutuhan pencapaian sasaran proyek.
12. Bertanggung jawab atas kebenaran dan kerapian administrasi kontrak konstruksi, termasuk kelengkapan perizinan dan lisensi terkait yang harus diperoleh.
13. Mengembangkan rencana jangka panjang organisasi dalam kaitan sasaran pertumbuhan kapasitas atau kemampuan melaksanakan pekerjaan pembangunan.

Silvia Halim(Direktur Konstruksi *Director of Construction*)

1. *Responsible for the construction of MRT infrastructure and facilities in Jakarta.*
2. *Control of cost, time, and quality in MRT Jakarta development activities in accordance with the strategy set by the Directors.*
3. *Coordinate and supervise all project implementation which is within its authority.*
4. *Control over the strategic aspects of each major activity and the implementation of construction risk management.*
5. *To ensure the effective implementation, both at the stage of preparation and implementation of development as well as at the stage of preparation for the operation of infrastructure and facilities of the Jakarta MRT on the following aspects:*
 - *Project management plan.*
 - *Quality control and management system.*
 - *Risk and safety management.*
6. *Carry out a review of the product or work output.*
7. *Availability of a master schedule from the planning stage to the completion of development.*
8. *Coordinate consultants involved in the construction period.*
9. *Coordinate with the Director of Operation and Maintenance in the design and technical specifications of the Rolling Stock, Station Building & facilities, and various railway systems and other related works.*
10. *Direct and coordinate the Project Manager in order to ensure all activities have been carried out in the direction of achieving the work objectives and can be completed within time and funding constraints.*
11. *Lead the preparation of operational procedures for project implementation and ensure that procedures have met or are aligned with the needs of achieving the project objectives.*
12. *Responsible for the correctness and tidiness of administration of construction contracts, including the completeness of permits and related licenses that must be obtained.*
13. *Developing the organization's long-term plan in relation to the target of capacity building or ability to carry out development work.*

Tanggung jawab pada Tahap Pra Konstruksi*Responsibilities in Pre-Construction Stage*

1. **Perencanaan Proyek**
 - Melakukan finalisasi rencana kerja.
 - Menetapkan strategi pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan proyek.
 - Menganalisis perkiraan biaya dan menetapkan rencana biaya proyek secara keseluruhan.
 - Membuat jadwal utama proyek secara keseluruhan.
 - Mengembangkan sistem atau prosedur komunikasi dan persetujuan.
 - Mempersiapkan perencanaan tentang aspek kesehatan dan keselamatan.
2. **Reviu Desain**
 - Melakukan reviu terhadap spesifikasi desain dan gambar termasuk ruang lingkup pekerjaan kontraktor dalam pelaksanaan proyek.
 - Mengidentifikasi pekerjaan utama, pekerjaan kritis, dan kesesuaian jadwal.
 - Sebagai representatif dari pemegang saham dan memberikan persetujuan terhadap seluruh dokumen konstruksi.
 - Mengoordinasikan arsitek dan konsultan.
 - Melakukan rapat koordinasi proyek.
 - Membantu dalam pemenuhan aspek hukum.
 - Melakukan reviu terhadap performa fasilitas pengelolaan limbah yang direncanakan.
 - Memperoleh persetujuan mengenai pengelolaan limbah.
3. **Berkaitan dengan Pengadaan Konstruksi**
4. **Melaksanakan dan memastikan pengadaan kontrak konstruksi sesuai rencana sampai dengan penandatanganan kontrak.**
 1. **Project Planning**
 - *Finalize the work plan.*
 - *Establish procurement strategies related to project implementation.*
 - *Analyze cost estimates and determine overall project cost plans.*
 - *Making the overall project master schedule.*
 - *Develop a system or procedure for communication and approval.*
 - *Prepare planning about aspects of health and safety.*
 2. **Design Review**
 - *Reviewing design specifications and drawings including the scope of work of the contractor in the implementation of the project.*
 - *Identifying the main work, critical work and suitability of the schedule.*
 - *As a representative of the shareholders and giving approval to all construction documents.*
 - *Coordinate architects and consultants.*

Silvia Halim
(Direktur Konstruksi *Director of Construction*)

- *Conduct a project coordination meeting.*
 - *Assist in fulfilling legal aspects.*
 - *Reviewing the performance of planned waste management facilities.*
 - *Obtaining approval regarding waste management.*
3. *Relating to the Procurement of Construction*
4. *Carry out and ensure procurement of construction contracts according to plan until the signing of the contract.*

Tanggung jawab pada Tahap Konstruksi
Responsibilities in the Construction Stage

1. *Persiapan Proyek*
- *Mengembangkan dan mengaplikasikan sistem pengendalian proyek.*
 - *Membantu dalam pemilihan dan pelaksanaan sistem manajemen proyek.*
 - *Memonitor arus kas proyek.*
 - *Menetapkan prosedur informasi dan komunikasi proyek.*
2. *Pembangunan*
- *Mengawasi aktivitas konstruksi lapangan dan menjamin kesesuaian terhadap kontrak dan peraturan.*
 - *Memberikan laporan kepada Pemegang Saham mengenai aktivitas dan interaksi dengan pihak lain mencakup kontraktor, konsultan, sub-konsultan, dan pemasok.*
 - *Mengembangkan dan menjalankan rencana pengendalian dan jaminan kualitas.*
 - *Melakukan negosiasi terhadap jumlah pembayaran untuk *variation order, price adjustment, delay payment* dan pembayaran lainnya terkait pekerjaan konstruksi.*
 - *Mengawasi progres konstruksi dan mengembangkan strategi penyesuaian jadwal.*
 - *Mengoordinasikan rapat pelaksanaan proyek dan sistem dokumentasinya.*
 - *Memberikan solusi atas perselisihan dalam aspek waktu, kepraktisan, maupun biaya.*
 - *Mendistribusikan laporan kemajuan bulanan.*
 - *Mengoordinasikan dokumentasi proyek secara keseluruhan.*
3. *Penyelesaian Proyek*
- *Melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan pekerjaan seluruh konstruksi sebelum serah terima maupun habisnya masa jaminan kontraktor.*
 - *Mempersiapkan dan mengawasi pekerjaan yang perlu diperbaiki.*
 - *Melakukan reviu terhadap dokumen yang diberikan oleh kontraktor*
 - *Menetapkan penjadwalan penyelesaian proyek.*
1. *Project Preparation*
- *Develop and apply a project control system.*
 - *Assist in the selection and implementation of project management systems.*
 - *Monitoring project cash flow.*
 - *Establish project information and communication procedures.*
2. *Development*
- *Oversee field construction activities and ensure compliance with contracts and regulations.*
 - *Providing reports to Shareholders regarding activities and interactions with other parties including contractors, consultants, sub-consultants, and suppliers.*
 - *Develop and implement a control and quality assurance plan.*
 - *Reviewing and preparing payment recommendations for all bills.*
 - *Negotiating the amount of payment for variation orders, price adjustments, delay payments and other payments related to construction work.*
 - *Oversee construction progress and develop schedule adjustment strategies.*
 - *Coordinate project implementation meetings and documentation systems.*
 - *Providing solutions to disputes in aspects of time, practicality, and cost.*
 - *Distributing monthly progress reports.*
 - *Coordinate the overall project documentation.*
3. *Project Completion*
- *Conduct an inspection of the implementation of the entire construction work before the handover or the end of the contractor guarantee period.*
 - *Prepare and supervise the work that needs to be repaired.*
 - *Reviewing documents provided by the contractor*
 - *Establish a project completion schedule.*

Tabel 6.18
Table 6.18

Muhammad Effendi(Direktur Operasi dan Pemeliharaan *Director of Operations and Maintenance*)**Tugas Pokok***Main tasks*

1. Mengusulkan kebijakan tahapan pembangunan, survei, dan standardisasi desain kelayakan operasi sarana dan prasarana serta program pemeliharannya.
 2. Melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan standar pelayanan minimum operasional (*service level*) MRT Jakarta.
 3. Turut bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan, dari tahap *basic design* sampai serah terima pekerjaan sebelum dioperasikan.
 4. Bertanggung jawab atas persiapan pengoperasian, masa pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana dan sarana MRT Jakarta sesuai target yang ditetapkan oleh Direksi dan standar pelayanan minimum.
 5. Membuat kajian dan struktur kelembagaan bagi kegiatan operasi dan pemeliharaan.
 6. Membantu Direktur Konstruksi dalam perancangan dan spesifikasi teknis *Rolling Stock, Station Building & Facilities, Trackwork, Signal, dan Power System & OCS System*.
1. *Propose policies for the stages of development, surveys and standardization of the design of the feasibility of operating facilities and infrastructure and their maintenance programs.*
 2. *Coordinate the preparation and determination of Jakarta MRT service levels (service level).*
 3. *Take responsibility for the implementation of development, from the basic design stage to the handover of the work before it is operated.*
 4. *Responsible for the preparation of the operation, operation, maintenance and operation of Jakarta MRT infrastructure and facilities in accordance with the strategy set by the Directors and minimum service standards.*
 5. *Study the system and institutional structure for operations and maintenance activities.*
 6. *Assist the Director of Construction in the design and technical specifications of the Rolling Stock, Station Building & Facilities, trackwork, Signal, and Power System & OCS System.*

Aspek Teknis*Technical aspects*

1. Dalam posisi dan bertindak sebagai ahli dalam bidang keteknisan dan kerekayasaan baik di lingkungan internal (tim) maupun dengan penyedia teknologi.
 2. Memberikan dukungan teknis pada kegiatan pelaksanaan proyek guna memenuhi standar desain yang telah ditetapkan sebelumnya.
 3. Memberikan solusi alternatif dalam rangka tercapainya kebutuhan (persyaratan) proyek secara lebih efisien.
 4. Pengendalian Aspek Teknis
 - Mengoordinasikan setiap upaya dalam rangka peningkatan pengetahuan teknis dalam organisasi.
 - Menentukan, menginformasikan, mensosialisasikan, dan menetapkan pelaksanaan standar atau ketentuan teknis.
 - Memonitor dan mengusulkan perubahan-perubahan atas solusi atau hasil desain dalam hubungannya terhadap lingkup, kemampuan atau kinerja teknis, efektivitas biaya, ketahanan atau umur layanan, dan kemudahan pemeliharaan.
 5. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan dalam rangka keselamatan kerja dan keselarasan dengan standar keselamatan kerja yang ada, termasuk keselamatan pengguna MRT Jakarta.
 6. Melakukan koordinasi dalam penyusunan ketentuan dan panduan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta yang berbasis pada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang berwenang.
 7. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam rangka penentuan standar pengujian prasarana atau sarana sebelum pengoperasian.
 8. Memberi masukan kepada unit kerja SDM dalam rangka struktur organisasi dan sertifikasi bagi karyawan operasional dan pemeliharaan sesuai ketentuan.
 9. Koordinasi dalam kesiapan *data base asset* terkait infrastruktur dan fasilitas kereta api, beserta sistem jadwal dan pengendalian pemeliharaan.
 10. Menetapkan kebijakan investasi dan *outsourcing* perlengkapan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas sistem MRT.
 11. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan lembaga atau institusi terkait lainnya dalam rangka menyiapkan fasilitas dan sistem layanan yang berkesinambungan bagi penumpang kereta dalam melakukan perjalanan.
 12. Memberi masukan bagi unit kerja Sekretaris Perusahaan dalam rangka menyiapkan konsep sosialisasi atau pengenalan MRT Jakarta kepada masyarakat sebelum dan selama masa permulaan pengoperasian MRT Jakarta.
1. *In a position and acting as an expert in the technical and engineering fields both in the internal environment (team) and with technology providers.*
 2. *Providing technical support to project implementation activities in order to meet predetermined design standards.*
 3. *Providing alternative solutions in order to achieve project needs (requirements) more efficiently.*
 4. *Control of Technical Aspects*
 - *Coordinate every effort in the context of increasing technical knowledge in the organization.*
 - *Determine, inform socialize, and determine the implementation of standards or technical provisions.*
 - *Monitor and propose changes to the solution or design results in relation to the scope, capability or technical performance, cost effectiveness, durability or service life, and ease of maintenance Jakarta MRT Operation Preparation.*

Muhammad Effendi

(Direktur Operasi dan Pemeliharaan *Director of Operations and Maintenance*)

5. *Coordinate in the formulation and development of policies in the context of work safety and harmony with existing work safety standards, including the safety of users of the Jakarta MRT.*
6. *Coordinate the preparation of provisions and guidelines for the operation and maintenance of the Jakarta MRT based on regulations issued by the authorized institutions / institutions.*
7. *Coordinate with authorized institutions in the context of determining standards for testing infrastructure or facilities before operation.*
8. *Provide input to HR work units in the framework of organizational structure and certification for operational and maintenance employees in accordance with the provisions.*
9. *Coordination in the preparation of a database of assets related to railroad infrastructure and facilities, along with a maintenance schedule and control system.*
10. *Establishing investment policies and outsourcing of infrastructure maintenance equipment and MRT system facilities.*
11. *Coordinate with the Central Government or Regional Government and other related institutions or institutions in order to prepare facilities and a continuous service system for train passengers in traveling.*
12. *Providing input to the Corporate Secretary work unit in order to prepare the socialization concept or introduction of the Jakarta MRT to the public before and during the commencement of the operation of the Jakarta MRT.*

Persiapan Operasi MRT Jakarta

Jakarta MRT Operation Preparation

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan dalam rangka keselamatan kerja dan keselarasandengan standar keselamatan kerja yang ada, termasuk keselamatan pengguna MRT Jakarta.
2. Melakukan koordinasi dalam penyusunan ketentuan dan panduan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta yang berbasis padaregulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi yang berwenang.
3. Melakukan koordinasi dengan institusi yang berwenang dalam rangka penentuan standar pengujian prasarana atau sarana sebelum pengoperasian.
4. Memberi masukan kepada unit kerja SDM dalam rangka struktur organisasi dan sertifikasi bagi karyawan operasional dan pemeliharaan sesuai ketentuan.
5. Koordinasi dalam kesiapan data base asset terkait infrastruktur dan fasilitas kereta api, beserta sistem jadwal dan pengendalian pemeliharaan.
6. Menetapkan kebijakan investasi dan outsourcing perlengkapan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas sistem MRT.
7. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan lembaga atau institusi terkait lainnya dalam rangka menyiapkan fasilitas dan sistem layanan yang berkesinambungan bagi penumpang kereta dalam melakukan perjalanan.
8. Memberi masukan bagi unit kerja Sekretaris Perusahaan dalam rangka menyiapkan konsep sosialisasi atau pengenalan MRT Jakarta kepada masyarakat sebelum dan selama masa permulaan pengoperasian MRT Jakarta.
1. *Coordinate in the formulation and development of policies in the context of work safety and harmony with existing work safety standards, including the safety of users of the Jakarta MRT.*
2. *Coordinate the preparation of provisions and guidelines for the operation and maintenance of the Jakarta MRT based on regulations issued by the authorized institutions / institutions.*
3. *Coordinate with authorized institutions in the context of determining standards for testing infrastructure or facilities before operation.*
4. *Provide input to HR work units in the framework of organizational structure and certification for operational and maintenance employees in accordance with the provisions.*
5. *Coordination in the preparation of a database of assets related to railroad infrastructure and facilities, along with a maintenance schedule and control system.*
6. *Establishing investment policies and outsourcing of infrastructure maintenance equipment and MRT system facilities.*
7. *Coordinate with the Central Government or Regional Government and other related institutions or institutions in order to prepare facilities and a continuous service system for train passengers in traveling.*
8. *Providing input to the Corporate Secretary work unit in order to prepare the socialization concept or introduction of the JakartaMRT to the public before and during the commencement of the operation of the Jakarta MRT.*

Aspek Perencanaan

Planning Aspects

1. Melakukan koordinasi dalam penetapan dan pengembangan standar teknis yang diperlukan dalam operasi dan pemeliharaan fasilitas MRT Jakarta.
2. Mempersiapkan tim yang berkemampuan dalam peningkatan kebutuhan perancangan terkait dengan operasi MRT Jakarta.

Muhammad Effendi(Direktur Operasi dan Pemeliharaan *Director of Operations and Maintenance*)

3. Turut serta memberi masukan atas perencanaan pembuatan paket pekerjaan konstruksi dalam kaitan dengan pelaksanaan desain dan pekerjaan konstruksi.
4. Membantu Direktorat Konstruksi dalam mereviu spesifikasi dan gambar, baik perencanaan maupun gambar kerja pelaksanaan.
5. Membantu mengembangkan rencana jangka panjang Perseroan guna menjamin keberlanjutan dan kontinuitas penyelenggaraan dan operasional MRT Jakarta.
6. Melakukan koordinasi penyusunan dan pengkajian rancangan teknis operasional, pemeliharaan, dan perawatan.
7. Memonitor dan merekomendasikan perubahan-perubahan hasil rancangan dalam kaitan dengan lingkup pembangunan, kinerja teknis, efektivitas biaya, usia layanan, dan aspek pemeliharaan.
8. Melakukan koordinasi antar bidang disiplin dalam rangka kesuksesan operasi MRT Jakarta.
9. Bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan pengurusan seluruh perijinan yang diperlukan dalam operasional MRT Jakarta.
10. Bertanggung jawab dalam perizinan terkait operasional, pemeliharaan, dan perawatan.
 1. *Coordinate in the determination and development of technical standards required in the operation and maintenance of Jakarta MRT facilities.*
 2. *Prepare a team capable of increasing the design requirements related to the Jakarta MRT operation.*
 3. *Participate in and provide input on planning the construction work package in relation to the implementation of design and construction work.*
 4. *Assist the Directorate of Construction in reviewing specifications, and drawing both planning and implementing work drawings.*
 5. *Help develop the Corporation long-term plan to ensure the sustainability and continuity of the operation and operation of the Jakarta MRT.*
 6. *Coordinate the preparation and review of operational, maintenance and maintenance technical designs.*
 7. *Monitor and recommend changes to the design results in relation to the scope of development, technical performance, cost effectiveness, service life, and maintenance aspects.*
 8. *Coordinating between disciplines in the context of the success of the Jakarta MRT operation.*
 9. *Responsible for preparing and administering all licenses needed in Jakarta MRT operations.*
 10. *Responsible for licensing related to operations, maintenance and care.*

Tabel 6.19
Table 6.19**Ghamal Peris**(Direktur Pengembangan Bisnis *Director of Business Development*)

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi dari Divisi *Corporate Strategy & Planning*, Divisi *Business Support*, Divisi *Commercial & Retail* dan Divisi *Transit Oriented Development*.
2. Melakukan koordinasi penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa.
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
4. Melakukan koordinasi dalam penyusunan kebijakan tentang pengelolaan investasi Perseroan yang bersifat pengembangan usaha dan pembinaan kerja sama usaha yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan.
5. Menetapkan kebijakan kemitraan strategis.
6. Berkoordinasi dengan Direktur Konstruksi dan Direktur Operasi dan Pemeliharaan, khususnya dalam bidang *engineering* (keteknisan), untuk menyiapkan dokumen pengadaan.
7. Melakukan koordinasi dalam mengembangkan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pengembangan Perseroan.
8. Menetapkan formulasi Kawasan Berorientasi Transit, untuk menjamin kesinambungan (*sustainability*) operasional MRT Jakarta (*potential future direction of system, recommend service and capital improvements*).
9. Mencari peluang usaha sesuai dengan perencanaan jangka panjang Perseroan dengan persetujuan Direksi.
10. Membangun, mengorganisir, dan mengoordinasikan perencanaan dan strategi pengembangan usaha.
11. Berkoordinasi dengan Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan pengembangan usaha, khususnya penggunaan ruang dalam stasiun dan fasilitas kereta api, sampai tersusunnya model bisnis, perkiraan, dan validasi asumsi untuk kebutuhan pengembangan usaha.
12. Mengupayakan jalur pengembangan usaha yang menguntungkan dan tetap berada pada kondisi realistis dan sehat, selaras dengan bisnis utama Perseroan.
13. Menetapkan kebijakan tentang penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) Perseroan.
14. Melakukan koordinasi dalam merencanakan investasi jangka panjang Perseroan.
15. Mengawasi biaya pengembangan usaha dan melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka perubahan rencana maupun implementasi pengembangan usaha.
16. Mengembangkan dan mengkomunikasikan pemahaman strategi bisnis Perseroan.
17. Mengembangkan rencana jangka panjang Perseroan guna menjamin keberlangsungan dan kontinuitas penyelenggaraan dan operasional MRT Jakarta.

Ghamal Peris

(Direktur Pengembangan Bisnis *Director of Business Development*)

1. *Coordinate the preparation and determination of policies for the implementation of all activities related to the functions of the Corporate Strategy & Planning Division, Business Support Division, Commercial & Retail Division and Transit Oriented Development Division.*
2. *Coordinate the preparation of general plans for the procurement of goods and services.*
3. *Coordinate the implementation and evaluation of the procurement of goods and services.*
4. *Coordinate in the preparation of policies regarding the management of Corporate investment that is business development and fostering business cooperation related to the Corporation's business fields.*
5. *Establish a strategic partnership policy.*
6. *Coordinate with the Director of Construction and the Director of Operation and Maintenance, particularly in the field of engineering (technical), for the preparation of procurement documents.*
7. *Coordinate in developing strategic partnerships with relevant stakeholders in the context of developing the Corporation.*
8. *Establish TOD formulation, to ensure the sustainability of the Jakarta MRT operations (potential future direction of the system, recommend services and capital improvements).*
9. *Look for business opportunities in accordance with the Company's long-term planning with the approval of the Directors.*
10. *Develop, organize and coordinate business development planning and strategies.*
11. *Coordinate with the Director of Finance and Corporate Management in the preparation of strategies and implementation of business development, specifically the use of space in train stations and facilities, until the business model, estimates and validation of assumptions are arranged for business development needs.*
12. *Promote profitable business development pathways and remain in a realistic and healthy condition, in line with the Corporation's main business.*
13. *Establish policies regarding the preparation of the Corporation's Key Performance Indicator (KPI).*
14. *Coordinate in planning the Corporation's long-term investment.*
15. *Oversee the costs of business development and make the necessary efforts in the context of changing plans and implementing business development.*
16. *Develop and communicate an understanding of the Corporation's business strategy.*
17. *Developing the Corporation's long-term plans to ensure the sustainability and continuity of the operation and operation of the Jakarta MRT.*

Tabel 6.20
Table 6.20

Tuhayat

(Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi *Director of Finance and Corporate Management*)

1. Melakukan koordinasi dalam penyusunan dan penetapan kebijakan pelaksanaan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi dari Divisi *Information System & Technology, Finance & Accounting* dan Divisi *Human Capital*, dan berkoordinasi dengan Direksi.
2. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan fungsi dari Direktorat Keuangan dan Manajemen Korporasi.
3. Menetapkan kebijakan anggaran, keuangan, dan akuntansi Perseroan.
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran Perseroan.
5. Melakukan pengendalian anggaran, biaya dan pendapatan Perseroan.
6. Melakukan koordinasi laporan keuangan dan laporan RKAP
7. Mengendalikan dan mengoordinasikan fungsi-fungsi administratif kegiatan impor keperluan konstruksi MRT Jakarta.
8. Menetapkan kebijakan teknologi dan sistem informasi Perseroan.
9. Melakukan pengembangan teknologi dan sistem informasi Perseroan.
10. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan teknologi dan sistem informasi Perseroan.
11. Menetapkan kebijakan terkait Sumber Daya Manusia
12. Menetapkan perencanaan pelatihan pegawai dan hubungan antar pegawai Perseroan.
13. Bertanggung jawab dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, mulai dari rekrutmen, pengembangan, dan penempatan.
14. Melakukan koordinasi proses penilaian kinerja karyawan.
15. Melakukan koordinasi dalam penerapan sistem *reward & punishment* atas prestasi kerja dan pelanggaran di Perseroan.
16. Melakukan koordinasi penyusunan struktur organisasi dan penempatan personil di setiap jabatan yang dilengkapi dengan uraian pekerjaan (*job description*).
17. Melakukan koordinasi dalam perencanaan dan pengembangan manajemen suksesi atas berbagai jabatan strategis di Perseroan.
18. Melakukan koordinasi penetapan tolok ukur kinerja, insentif, dan penghargaan lain di Perseroan.
19. Melakukan evaluasi beban kerja di setiap Unit Kerja di Perseroan.
1. *Coordinate the preparation and determination of policies for the implementation of all activities related to the functions of the Information System & Technology, Finance & Accounting Division and the Human Capital Division, and coordinate with the Directors.*
2. *Supervise and evaluate all activities related to the functions of the Directorate of Finance and Corporate Management.*

Tuhyat(Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi *Director of Finance and Corporate Management*)

3. *Establish the Corporate budget, financial and accounting policies.*
4. *Carry out monitoring and evaluation of the realization of the Corporate budget.*
5. *Control the Corporate budget, costs and revenues.*
6. *Coordinate financial statements and RKAP reports*
7. *To control and coordinate the administrative functions of the import activities of the Jakarta MRT construction.*
8. *Establish technology policies and information systems of the Corporation.*
9. *Developing technology and information systems in the Corporation.*
10. *Monitor and evaluate the application of technology and information systems of the Corporation.*
11. *Establish policies related to Human Resources*
12. *Establish employee training plans and relationships between employees.*
13. *Responsible for managing Human Resources, starting from recruitment, development and placement.*
14. *Coordinate the employee performance appraisal process.*
15. *Coordinate the implementation of reward & punishment systems for work performance and violations in the Corporation.*
16. *Coordinate the preparation of the organizational structure and placement of personnel in each position that is equipped with a job description.*
17. *Coordinate the planning and development of succession management for various strategic positions in the Corporation.*
18. *Coordinate the determination of performance benchmarks, incentives and other rewards in the Corporation.*
19. *Evaluate the workload in each Work Unit in the Corporation.*

Tabel 6.21
Table 6.21**PROGRAM PENGENALAN PERSEROAN****CORPORATE INDUCTION PROGRAM**

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan Program Pengenalan mengenai Perseroan. Program Pengenalan meliputi:

- Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum.
- Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Perseroan.
- Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya.
- Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal, dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama; atau Komisaris Utama atau Direksi lainnya jika Direktur Utama berhalangan.

Di tahun 2019 tidak terdapat pengangkatan Direksi baru, dengan demikian tidak dilaksanakan Program Pengenalan Perseroan.

Members of the Directors who are appointed for the first time must be given a Corporate Induction Program. The Induction Programs include:

- *Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors based*
- *Implementation of the principles of Good Corporate Governance by the Corporation.*
- *Description of the Corporation relating to the objectives, nature, scope of activities, financial and operating performance, strategies, short-term and long-term business plans, competitive positions, risks and other strategic issues.*
- *Information relating to delegated authority, internal and external audit, internal control systems and policies and the Audit Committee.*

The responsibility for conducting such an introduction program is carried out by the President Director; or the President Commissioner or other Directors if the President Director is unavailable.

In 2019 there was no appointment of a new Directors, thus the Corporate Induction Program was not implemented.

PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KAPABILITAS**COMPETENCY AND CAPABILITY IMPROVEMENT PROGRAM**

Program peningkatan kompetensi dan kapabilitas untuk Direksi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi. Program ini dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan. Kepada anggota Direksi yang mengikuti program peningkatan

The competency and capability improvement program for Directors is carried out in order to increase the effectiveness of the Directors' work. This program is included in the Work Plan and Corporate Budget. Members of the Directors who take part in a program to improve their competency

kompetensi dan kapabilitas diminta untuk berbagi informasi hasil program dengan anggota Direksi lainnya.

and capability are asked to share information on the results of the program with other members of the Directors.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Concerning the competency improvement activities followed by the Directors throughout 2019, can be seen in the Corporate Profile chapter in this annual report.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2019

BRIEF REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DIRECTORS IN 2019

Selama tahun 2019, Direksi telah mengeluarkan berbagai keputusan baik di bidang operasional, keuangan, maupun beberapa penunjang usaha melalui perangkat kebijakan berupa 495 Keputusan Direksi, 102 Peraturan Direksi, dan 16 Surat Edaran.

During 2019, the Directors issued various decisions in the operational, financial, and several business supports through the policy instruments in the form of 495 Directors' Decrees, 102 Directors' Regulations and 16 Circular Letters.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DAN ORGAN DI BAWAH DIREKSI

PERFORMANCE EVALUATION OF COMMITTEES AND ORGANS UNDER THE DIRECTORS

Pelaksanaan tugas Direksi secara khusus didukung oleh 4 (empat) satuan kerja yang berdiri langsung di bawah Direktur Utama dan 1 (satu) komite, yaitu Divisi Sekretaris Perusahaan, Divisi Corporate Strategy, Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, Divisi Internal Audit, dan Komite Manajemen Risiko. Metode penilaian kinerja Komite dan Organ di bawah Direksi, berdasarkan atas realisasi yang telah dilaksanakan terhadap target yang direncanakan. Hasil penilaian kinerja masing-masing organ sebagai berikut.

The implementation of the Directors' duties is specifically supported by 4 (four) work units that stand directly under the President Director and 1 (one) committee, namely the Corporate Secretary Division, Corporate Strategy Division, Risk Management & QSSHE Assurance Division, Internal Audit Division, and Risk Management Committee. Method of evaluating the performance of Committees and Organs under the Directors, based on the realization that has been carried out against the planned targets. The results of the performance evaluation of each organ are as follows.

• Penilaian Kinerja Divisi Sekretaris Perusahaan

• Performance Appraisal of the Corporate Secretary Division

| No. | Target | Realisasi Realization |
|-----|---|---|
| 1 | Tercapainya peningkatan Indeks <i>Public Readiness Achievement of increased Public Readiness index</i> | 1. Tercapainya Indeks <i>Public Readiness</i> >70 (>100%) 2. Progress Penugasan Acara tepat waktu dan tepat sasaran (acara VVIP, acara Komunikasi) 3. Mendapatkan 9 penghargaan yang diperoleh dalam tahun berjalan (<i>Special Recognition, Brand of the Year, Annual Report Awards, dll</i>) 1. <i>The achievement of Public Readiness Index > 70 (> 100%)</i> 2. <i>Progress Event Assignment on time and on target (VVIP Event, Communication Event)</i> 3. <i>Received 9 awards obtained in the current year (Special Recognition, Brand of the Year, Annual Report Awards, etc.)</i> |
| 2 | Tercapainya Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik 87 <i>GCG Value Achievement 87</i> | Tercapainya Nilai GCG 87 <i>GCG Value Achievement 87</i> |
| 3 | Terwujudnya hubungan eksternal yang efektif, baik dengan operator global maupun dengan lembaga swadaya masyarakat <i>The realization of effective external relations both with global operators, and with non-governmental organizations</i> | Terselesaikannya tindak lanjut dengan DPRD dan Pemerintah dengan tepat waktu tanpa catatan (tanpa kekurangan) <i>Complete follow-up with the DPRD and the Government on time without notes (without shortcomings)</i> |

Tabel 6.22
Table 6.22

• Penilaian Kinerja Divisi Sekretaris Perusahaan

• Performance Appraisal of the Corporate Secretary Division

| No. | Target | Realisasi Realization |
|-----|--|--|
| 1 | Terselesaikannya dokumen Rencana Jangka Menengah Perseroan (RJMP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) <i>Completion of corporate mid-term planning documents (RJMP) and corporate long-term plans (RJPP)</i> | RMJP dan RJPP sudah disahkan melalui mekanisme RUPS pada tanggal 27 Maret 2019. <i>RMJP and RJPP were ratified through the GMS mechanism on 27 March 2019.</i> |
| 2 | Terselesaikannya integrasi inisiatif strategis Direktorat Konstruksi dan Utama dengan RKAP 2020 <i>Completion of integration of the Directorate of Construction and Main strategic initiatives with the 2020 RKAP</i> | Penyusunan RKAP 2020 sudah diintegrasikan dengan inisiatif strategis Direktorat. <i>The preparation of the 2020 RKAP has been integrated with the Directorate's strategic initiatives.</i> |
| 3 | Tersedianya kebijakan manajemen kinerja korporasi <i>The availability of corporate performance management policies</i> | Final draft kebijakan manajemen kinerja korporasi sudah disetujui oleh Direksi melalui Peraturan Direksi (Perdir). <i>The final draft of the corporation performance management policy has been approved by the Directors through the Director Regulations.</i> |
| 4 | Terselesaikannya laporan monitoring kinerja korporasi 2019 <i>Completion of corporate performance monitoring report 2019</i> | Seluruh laporan monitoring KPI korporasi sudah dipaparkan dan disetujui Direksi, di mana KPI yang melekat di setiap Direktorat diperluas. <i>All corporate KPI monitoring reports have been presented and approved by the Directors in each BOD expanded.</i> |
| 5 | Terselesaikannya laporan monitoring pencapaian jejak langkah korporasi 2019 <i>Completion of the monitoring report on the achievement of the 2019 corporate milestone</i> | Seluruh laporan monitoring pencapaian jejak langkah korporasi sudah dipaparkan dan disetujui Direksi di setiap BOD diperluas. <i>All corporate milestone monitoring reports have been presented and approved by the Directors in each BOD expanded.</i> |
| 6 | Terselesaikannya laporan monitoring pencapaian rencana aksi program prioritas nasional infrastruktur <i>The completion of the monitoring report on the achievement of the action plan of the national priority infrastructure program</i> | Telah diserahkan laporan monitoring pencapaian rencana aksi program prioritas nasional infrastruktur kepada Kantor Staf Kepresidenan. <i>A monitoring report on the achievement of action plans for the national priority infrastructure program has been launched to the Office of the Presidential Staff.</i> |
| 7 | Perencanaan Jaringan MRT Masa Depan <i>Future MRT Network Planning</i> | SPMK pengadaan <i>Corridor Study MRT East - West</i> telah diterbitkan dan <i>kick-off</i> telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2019. <i>The SPMK procurement for the East - West MRT Corridor Study has been issued and kick-off was carried out on December 9, 2019.</i> |

Tabel 6.23
Table 6.23

• Penilaian Kinerja Divisi Risk Management & QSSHE Assurance

• Performance Assessment of the Risk Management & QSSHE

| No. | Target | Realisasi Realization |
|-----|---|---|
| 1 | Penyusunan dan Integrasi Kebijakan Risk, Quality & Safety Management <i>Compilation and Integration of Risk, Quality & Safety Management Policies</i> | <p>1. Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Korporasi tidak diubah di tahun 2019 karena digunakan sebagai standar pelaksanaan Audit ISO Terintegrasi dan Penilaian <i>Risk Maturity</i>; Penyesuaian hanya dilakukan pada Tk. SOP Sistem Manajemen Risiko berbasis <i>online</i> dan <i>Working Instruction</i>; Untuk hal-hal yang memerlukan perubahan telah disampaikan dalam Rapat Direksi untuk di tindaklanjuti di tahun 2020</p> <p>2. Kebijakan ISO Terintegrasi telah ditetapkan Direksi dengan Perdir No. 065 Tahun 2019</p> <p>3. Kebijakan <i>Business Continuity Management</i> (BCM) di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) telah ditetapkan dengan Perdir Nomor PER/042/BOD-MRT/VIII/2019.</p> <p>1. <i>Management Policies and Guidelines were not changed in 2019 because they were used as a standard for the implementation of the Integrated ISO Audit and Risk Maturity Assessment; Adjustments are only made at Tk. SOP for On-line Risk Management System and Working Instruction; For items that require changes have been submitted in the BOD Meeting for follow up in 2020</i></p> <p>2. <i>The Integrated ISO Policy has been established by the Directors with Perdir No. 065 in 2019</i></p> <p>3. <i>Business Continuity Management Policy has been established by the Directors with Director Regulation No. PER/042/BOD-MRT/VIII/2019</i></p> |
| 2 | Pengukuran Efektivitas Implementasi Sistem Manajemen Risiko Korporasi dan Implementasi ISO Terintegrasi <i>Measurement of Effectiveness of Corporate Risk Management System Implementation and Integrated ISO Implementation</i> | <p>1. Jejak Langkah Korporasi: "Terbangunnya Sistem Manajemen Berbasis ISO Terintegrasi"; Audit Terlaksana dengan hasil MRT Jakarta Lolos Sertifikasi ISO Terintegrasi untuk ISO 9001:2015; 14001:2015 dan 45001:2018</p> <p>2. Audit SMK3 & Tinjauan Manajemen untuk Semester 2 telah diintegrasikan menjadi Audit ISO Terintegrasi beserta pelaksanaan Tinjauan Manajemennya</p> <p>3. Skor <i>Risk Maturity</i> dengan nilai 3,55 dari skala 5 dan masuk kategori "Defined"</p> <p>4. Hasil pengukuran <i>Risk Conformity</i> terhadap ISO 31000:2018 dengan capaian skor 82,41 dari skala 100</p> <p>5. Hasil audit eksternal Implementasi SMK3-KP mendapatkan persentase pemenuhan 92,17% untuk kategori tingkat Lanjutan dan berhak mendapatkan Bendera Emas</p> <p>6. Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.</p> <p>1. <i>Corporate Milestones: "Development of an Integrated ISO-Based Management System"; Audit Conducted with the results of the Jakarta MRT Passed the Integrated ISO Certification for ISO 9001: 2015; 14001: 2015 and 45001: 2018</i></p> <p>2. <i>The SMK3 Audit & Management Review for Semester - 2 has been integrated into the Integrated ISO Audit and the implementation of its Management Review</i></p> <p>3. <i>Risk Maturity with a score 3,55 out of 5 which categorized as "Defined"</i></p> <p>4. <i>Risk Conformity assessment based on ISO 31000:2018 with a score 82,41 out of 100</i></p> <p>5. <i>External Audit result on the Implementation of SMK3-KP received a 92.17% fulfillment percentage for the Advanced level category and was entitled to get Golden Flag.</i></p> <p>6. <i>Zero Accident Award from the Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i></p> |
| 3 | Pembangunan Budaya Risiko, Kualitas, dan Keselamatan Terintegrasi <i>Development of an integrated Risk, Quality & Safety culture</i> | <p>1. Telah dilakukan 11 rekomendasi kegiatan yang terdapat pada <i>Road Map Risk Culture</i> dari total 13 kegiatan di tahun 2019</p> <p>2. Hasil Pengukuran <i>Risk Culture</i> telah menunjukkan peningkatan skor dari tahun sebelumnya sebesar 6,77 menjadi 7,33 di tahun 2019</p> <p>3. Penyusunan <i>end-to-end Business Continuity Management</i> (BCM) di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) telah ditetapkan dengan Perdir Nomor PER/042/BOD-MRT/VIII/2019.</p> <p>1. <i>11 of 13 recommendation activities in Road Map Risk Culture has been made in 2019</i></p> <p>2. <i>The increase in score Risk Culture from previous year from 6.77 to 7.33 in 2019</i></p> <p>3. <i>End-to-end Business Continuity Management (BCM) has been established by the Directors with Directors Regulation No. PER/042/BOD-MRT/VIII/2019.</i></p> |

Tabel 6.24
Table 6.24

• Penilaian Kinerja Divisi Internal Audit

• Performance Assessment of the Internal Audit Division

| No. | Target | Realisasi Realization |
|-----|--|--|
| 1 | Penyelesaian Hasil Asuransi <i>Settlement of Insurance Results</i> | 1. Monitoring tindak lanjut atas temuan Audit dari unit kerja masing-masing, > 75% dari total jumlah ditindaklanjuti. 2. Seluruh penugasan telah dilengkapi dengan Kertas Kerja 3. Terdapat 4 laporan hasil asuransi telah diselesaikan 1. <i>Follow-up Monitoring of Audit findings from each Work Unit, > 75% of the total number followed up.</i> 2. <i>All assignments have been well equipped with Working Papers</i> 3. <i>There are 4 reports the results of insurance have been completed</i> |
| 2 | Penyelesaian Hasil Konsultasi <i>Completion of Consultation Results</i> | 1. Terdapat konsultasi lebih dari 6 kali 2. Seluruh penugasan telah dilengkapi dengan Kertas Kerja konsultasi 1. <i>There were consultations more than 6 times</i> 2. <i>All assignments have been completed with consultation papers</i> |
| 3 | Pelaksanaan Kegiatan Berbasis TI <i>Implementation of IT Based Activities</i> | 1. Pengembangan proses kerja berbasis TI di Lingkungan Divisi Internal Audit telah diselesaikan 2. Penyelesaian Audit TI (Implementasi ERP) telah disetujui oleh Kepala Divisi 1. <i>Development of IT-based work processes in the Internal Audit Division Environment has been completed</i> 2. <i>IT Audit Completion (ERP Implementation) has been approved by the Head of Division</i> |
| 4 | Pelaksanaan Penilaian dalam Rangka Pengendalian Internal <i>Implementation of Internal Control assessment</i> | 1. Pelaksanaan Reviu Komprehensif dalam rangka QAR mencapai 80% (Terkonfirmasi Sebagian) 2. Skor penilaian Sistem Pengendalian Internal 77,10 (Efektif) 3. Penyelesaian <i>Fraud Risk Register</i> pada 5 Unit Kerja, yaitu Departemen <i>Procurement, Divisi Railway Operation, Divisi Railway Maintenance, Divisi Finance and Accounting, dan Divisi Information System and Technology</i> 1. <i>Comprehensive Review in QAR scheme achieve 80% (Partially Confirm)</i> 2. <i>Internal Control System Assessment score 77,10 (Effective)</i> 3. <i>Completion of Fraud Risk Register pada 5 Unit Kerja, yaitu Departemen Procurement, Divisi Railway Operation, Divisi Railway Maintenance, Divisi Finance and Accounting, dan Divisi Information System and Technology</i> |

Tabel 6.25
Table 6.25

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS RELATIONSHIP

KEBIJAKAN TERKAIT HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

POLICIES RELATING TO WORK RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan.
2. Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, dalam arti senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.
5. Dewan Komisaris berhak memperoleh laporan mengenai tiap keputusan dan kebijakan Direksi yang diambil dalam rangka pengurusan Perseroan.
6. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perseroan kepada Dewan Komisaris.

Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balance* dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan fungsi masing-masing, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen yang tinggi untuk secara bersama-sama:

1. Merealisasikan tujuan Perseroan berupa tercapainya kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang yang tercermin pada:
 - a. Tercapainya *Value of the Firm* sebagaimana diharapkan oleh Pemegang Saham;
 - b. Terlaksananya kontrol internal dan manajemen risiko;
 - c. Terlindunginya kepentingan Pemangku Kepentingan secara wajar;
 - d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di seluruh jajaran organisasi Perseroan;
 - e. Terpenuhinya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
2. Menyepakati hal-hal di bawah ini untuk mendukung pencapaian visi dan misi serta strategi Perseroan:
 - a. Sasaran usaha, strategi, rencana jangka panjang maupun rencana kerja, dan anggaran tahunan;
 - b. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Kebijakan dan metode penilaian kinerja Perseroan, unit-unit dalam organisasi Perseroan, dan personalianya;
 - d. Struktur organisasi Perseroan di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Perseroan.

The working relationship of the Board of Commissioners and Directors is in accordance with the following principles:

1. *The Board of Commissioners respects the responsibilities and authority of the Directors in managing the Corporation as stipulated in the legislation and the Company's Articles of Association.*
2. *The Directors respects the responsibilities and authority of the Board of Commissioners to conduct supervision and provide advice on the policies and the management of the Corporation.*
3. *Each working relationship between the Board of Commissioners and the Directors is a formal institutional relationship, in the sense that it is always based on a standardized mechanism or accountable correspondence.*
4. *The Board of Commissioners is entitled to obtain accurate, complete and timely Corporate information.*
5. *The Board of Commissioners has the right to obtain reports regarding each decision and policy of the Directors taken in the course of managing the Corporation.*
6. *The Directors is responsible for the accuracy, completeness and timeliness of the delivery of Corporate information to the Board of Commissioners.*

The working relationship of the Board of Commissioners and Directors is a check and balance relationship in order to achieve the Company's goals. In connection with this, in accordance with their respective functions, the Board of Commissioners and Directors have a high commitment to jointly:

1. *Realizing the Company's goals in the form of achieving long-term business continuity as reflected in:*
 - a. *The achievement of Value of the Firm as expected by the Shareholders;*
 - b. *The implementation of internal control and risk management;*
 - c. *The interests of Stakeholders are protected fairly;*
 - d. *Implementation of leadership succession and continuity of management in all levels of the Company's organization;*
 - e. *The fulfilment of the implementation of Good Corporate Governance.*
2. *Agree on the following to support the achievement of the Corporation's vision and mission and strategy:*
 - a. *Business goals, strategies, long-term plans as well as work plans and annual budgets;*
 - b. *Policies in meeting the provisions of the law and the Corporate's Articles of Association;*
 - c. *Policies and methods for evaluating the performance of the Corporation, units in the Corporation's organization and its personnel;*
 - d. *The organizational structure of the Corporation at the executive level is able to support the achievement of the Corporation's business goals.*

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DIVERSITY OF THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga dituntut untuk bertindak secara independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

Hingga 31 Desember 2019, Perseroan belum memiliki aturan tertulis yang mengatur keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Namun demikian, berdasarkan kebijakan Pemegang Saham, penetapan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kompleksitas Perseroan termasuk memperhatikan unsur keberagaman, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

The diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors must be considered in such a way as to enable effective, precise and quick decision making. In addition, the Board of Commissioners and Directors are also required to act independently, in the sense that they do not have a conflict of interest that can interfere with the ability to carry out their duties independently and critically.

As of December 31, 2019, the Corporation did not have written rules governing the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors. However, based on Shareholder policy, the determination of the composition of the Corporation's Board of Commissioners and Directors has been carried out taking into account the needs and complexity of the Corporation including taking into account the diversity element, as presented in the table below.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity of the Composition of the Board of Commissioners and Directors

| Nama Name | Kewarganegaraan Citizenship | Jenis Kelamin Gender | Usia Age | Latar Belakang Pendidikan Education Background | Pengalaman Profesional Professional Experience | Keahlian Expertise |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------|--|--|---|
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | | | | | | |
| Muhammad Syaugi (Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>) | Indonesia | Laki-laki <i>Male</i> | 59 | Sarjana (S1) dan Magister (S2) Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Bachelor (S1) in Social Politics and Masters in Management at IMMI School of Management | Memiliki pengalaman profesional di antaranya sebagai Panglima Komando Operasi AU I Jakarta (2012-2014); Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (2014-2017); dan Kepala Badan SAR Nasional (2017-2019). <i>Has professional experience including as Commander in Chief of Operations for AU I Jakarta (2012-2014); Director General of Defense Planning of the Ministry of Defense (2014-2017); and Head of the National SAR Agency (2017-2019)."</i> | Sosial, Politik, Keamanan, dan Manajemen <i>Social, Politics of Defense, Security and Management</i> |
| Rukijo (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | Indonesia | Laki-laki <i>Male</i> | 52 | Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan serta Magister (S2) Manajemen Bachelor (S1) in Economics majoring in Economics and Development Studies and a Masters in Management | Berkarier di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kini masih menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (2016-sekarang) <i>Career in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Now still serves as Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance Ministry of Finance (2016-present)</i> | Manajemen dan Keuangan <i>Management and Finance</i> |

| Nama Name | Kewarganegaraan Citizenship | Jenis Kelamin Gender | Usia Age | Latar Belakang Pendidikan Education Background | Pengalaman Profesional Professional Experience | Keahlian Expertise |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------|---|---|--|
| Zulfikri (Komisaris/ Commissioner) | Indonesia | Laki-laki Male | 57 | Sarjana (S1) Teknik Sipil dan Perencanaan, Magister (S2) Sistem dan Teknik Jalan Raya, Magister (S2) Ekonomi Transportasi <i>Bachelor (S1) in Civil Engineering and Planning, Masters in Road Systems and Engineering, Masters in Transportation Economics</i> | Berkarier di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kini masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian (2017-sekarang) <i>Career in the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia. He currently serves as Director General of Railways (2017-present)</i> | Manajemen dan Keuangan <i>Management and Finance</i> |
| Mukhtasor (Komisaris/ Commissioner) | Indonesia | Laki-laki Male | 50 | Sarjana (S1) Teknik Kimia, Master (S2) of Engineering, Doctor of Philosophy (S3) of Engineering. <i>Bachelor (S1) in Chemical Engineering, Master (S2) of Engineering, Doctor of Philosophy (S3) of Engineering</i> | Pengajar dan akademisi, kini masih menjadi Guru Besar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (2009-sekarang); serta Pendiri dan Promotor Doktorat, Program Pascasarjana Teknik dan Manajemen Energi Laut, Fakultas Teknologi Kelautan ITS (2014-sekarang). Memiliki pengalaman profesional di antaranya sebagai Anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014); Anggota Komisi Kelautan, Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2013-2016); Senior Advisor, CEO Office, PT Pertamina (Persero) (2015-2016); dan Anggota Dewan Penasihat Kalpataru (2015-sekarang) <i>Teachers and academics, now still a Professor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya (2009-present); and Founder and Doctoral Promoter, Marine Energy Engineering and Management Postgraduate Program, ITS Marine Technology Faculty (2014-present). Has professional experience including as a Member of the National Energy Board (2009-2014); Member of the Marine Commission, Research and Development Ministry of Maritime Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia (2013-2016); Senior Advisor, CEO Office, PT Pertamina (Persero) 2015-2016); and Kalpataru Advisory Board Member(2015-present)</i> | Operasi dan Transportasi <i>Operations and Transportation</i> |

| Nama Name | Kewarganegaraan Citizenship | Jenis Kelamin Gender | Usia Age | Latar Belakang Pendidikan Education Background | Pengalaman Profesional Professional Experience | Keahlian Expertise |
|---|--------------------------------|-------------------------|-------------|---|--|--|
| Adnan Pandu Praja (Komisaris/ Commissioner) | Indonesia | Laki-laki Male | 59 | Sarjana (S1) Hukum dan Master (S2) of Laws Bachelor (S1) in Law and Master (S2) of Laws | Memiliki pengalaman profesional di antaranya Komisioner Kopolnas (2006-2011), Komisioner KPK (2011-2015), staf khusus Menteri Perindustrian (2016- 2017), Ketua Dewan Pengawas LSP Pendeteksi Kecurangan Pengadaan. Kini juga menjabat sebagai Komisaris PT Taspen Properti Indonesia (2019-sekarang) dan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2019-sekarang) <i>Has professional experience including the Commissioner of the National Commission (2006-2011), the Commissioner of the Corruption Eradication Commission (2011-2015), special staff of the Minister of Industry (2016-2017), Chairperson of the LSP Board of Trustees for Procurement Fraud Detection. Now also serves as Commissioner of PT Taspen Properti Indonesia (2019-present) and the Open Selection Committee for Middle and Middle Leaders of the DKI Jakarta Provincial Government (2019 - present)</i> | Keuangan, Audit, Tata Kelola, dan Hukum <i>Finance, Audit, Governance and Law</i> |
| Direksi Directors | | | | | | |
| William P. Sabandar (Direktur Utama/ President Director) | Indonesia | Laki-laki Male | 53 | Sarjana (S1) Teknik Sipil, Master (S2) Teknik Transportasi, Doktor (S3) Geografi Transportasi <i>Bachelor of Civil Engineering, Master of Transportation Engineering, Doctor of Transportation Geography</i> | Memiliki lebih dari 25 tahun pengalaman yang solid dalam pembangunan dan manajemen krisis di berbagai bidang, termasuk sebagai Kepala Rekonstruksi Kepulauan Nias (2005-2009); Utusan Khusus Sekretaris Jenderal ASEAN merangkap Kepala Operasi untuk Rekonstruksi Myanmar (2009-2010); Direktur Corporate Affairs Sekretariat ASEAN (2011-2012); Asisten Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (2012-2014); Kepala Operasi Satuan Tugas Nasional REDD+ (2014-2015); Penasihat Senior Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, merangkap Kepala Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (2015-2016). | Manajemen |

| Nama Name | Kewarganegaraan Citizenship | Gender | Usia Age | Latar Belakang Pendidikan Education Background | Pengalaman Profesional Professional Experience | Keahlian Expertise |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------|---|--|---|
| William P. Sabandar | Indonesia | Male | 53 | Sarjana (S1) Teknik Sipil, Master (S2) Teknik Transportasi, Doktor (S3) Geografi Transportasi Bachelor of Civil Engineering, Master of Transportation Engineering, Doctor of Transportation Geography | <i>Having more than 25 years of solid experience in crisis development and management in various fields, including as Chief Nias Islands Reconstruction (2005-2009); Special Representative of the ASEAN Secretary General and concurrently Head of Operations for Myanmar Reconstruction (2009- 2010); Director of Corporate Affairs of the ASEAN Secretariat (2011-2012); Expert Assistant to the Head of the Presidential Work Unit for Development Supervision and Control (UKP4) (2012-2014); Head of Operations of the National REDD + Task Force (2014-2015); Senior Advisor of the Minister of Energy and Mineral Resources, concurrently the Head of the National Task Force for the Acceleration of New and Renewable Energy Development and Energy Conservation (2015- 2016).</i> | Management |
| Silvia Halim (Direktur Konstruksi Construction Director) | Indonesia | Perempuan Female | 37 | Sarjana (S1) Teknik Sipil Bachelor (S1) in Civil Engineering | <i>Project Manager, Road Projects Group di Land Transport Authority (LTA) Singapura, (2004-2016) Project Manager, Road Projects Group at the Land Transport Authority (LTA) Singapore, (2004-2016)</i> | Konstruksi & infrastruktur Construction & infrastructure |

| Nama Name | Kewarganegaraan Citizenship | Gender | Usia Age | Latar Belakang Pendidikan Education Background | Pengalaman Profesional Professional Experience | Keahlian Expertise |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------|---|--|--|
| Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan/ <i>Operations & Maintenance Director</i>) | Indonesia | Laki-laki <i>Male</i> | 55 | Diploma bidang <i>Occupational Safety and Health (K3)</i> , Sarjana (S1) Teknik Sipil, dan Magister (S2) Manajemen <i>Diploma in Occupational Safety and Health (K3), Bachelor (S1) in Civil Engineering and Masters in Management</i> | Bergabung di PT MRT Jakarta (Perseroda) sebagai Kepala Divisi Manajemen Proyek untuk Konstruksi 2 (2017-2018). Sebelumnya bekerja di Rasgas Company Ltd. di Qatar (2005-2017) dengan jabatan terakhir Kepala Divisi Konstruksi dan Penasihat. Berpengalaman sebagai Direktur dan Manajer di sejumlah perusahaan sejak 1997 hingga 2005 <i>Joining in PT MRT Jakarta (Perseroda) as Head of Project Management Division for Construction 2 (2017-2018). Previously worked at Rasgas Company Ltd in Qatar (2005-2017) with the last position as Head of Construction and Advisory Division. He has experience as Director and Manager in a number of companies from 1997 to 2005.</i> | Operasi & Transportasi <i>Operations & Transportation</i> |
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis <i>Business Development Director</i>) | Indonesia | Laki-laki <i>Male</i> | 39 | Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen, Master (S2) of <i>Business Administration Bachelor of Management Economics, Master (S2) of Business Administration</i> | Sebelumnya dipercaya duduk dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebagai Penasihat Strategis Direktur Operasi dan Pemeliharaan (2018). Berkarier di beberapa korporasi besar seperti PT Nestle Indonesia sebagai <i>Head of Area</i> (2003), Sodexo Benefits and Rewards Services (BRS) (2003-2009), dan Sodexo BRS International (2009-2016). <i>Previously entrusted to sit in the Governor's Team for the Acceleration of Development (TGUPP) as Strategic Advisor of Direktur Operasi dan Pemeliharaan (2018). Career in several large corporations such as PT Nestle Indonesia as Head of Area (2003), Sodexo Benefits and Rewards Services (BRS) (2003-2009), and Sodexo BRS International (2009-2016).</i> | Pengembangan Bisnis <i>Business development</i> |

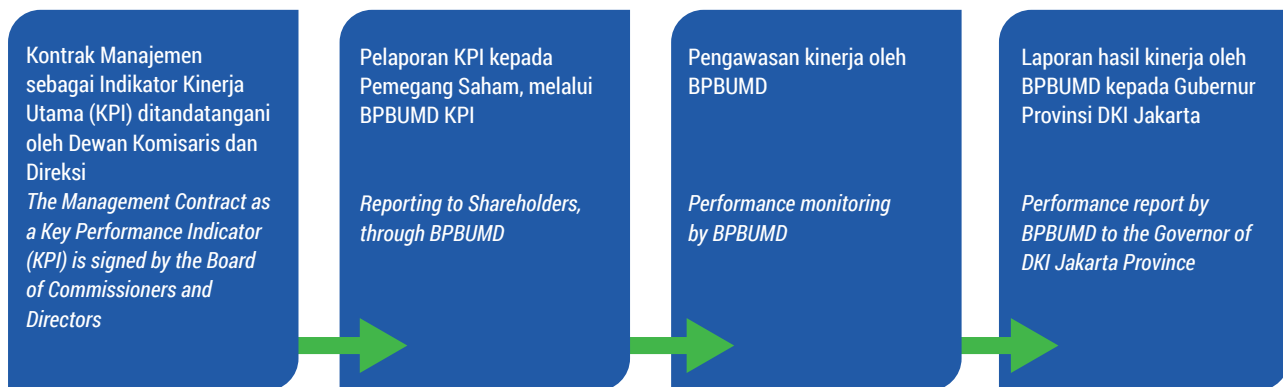
| Nama Name | Kewarganegaraan Citizenship | Gender | Usia Age | Latar Belakang Pendidikan Education Background | Pengalaman Profesional Professional Experience | Keahlian Expertise |
|---|--------------------------------|--------------------------|-------------|---|--|--|
| Tuhyat (Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Finance and Corporate Management</i>) | Indonesia | Laki-laki <i>Male</i> | 53 | Sarjana (S1) Akuntansi dan Magister (S2) Manajemen <i>Bachelor (S1) in Accounting and Masters (S2) in Management</i> | Memiliki pengalaman profesi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (1987-2001); kemudian berkarier di PT Antam (Persero) Tbk sejak tahun 2001 sebagai Senior Internal Auditor hingga jabatan Senior Manajer Treasury, Tax and Insurance (2008-2012). <i>Has professional experience in Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) (1987-2001); then pursued career at PT Antam (Persero) Tbk since 2001 as Senior Internal Auditor until held the position of Senior Manager of Treasury, Tax and Insurance (2008-2012)</i> | Keuangan & Administrasi <i>Finance and Administration</i> |

Tabel. 6.26
 Table. 6.26

PENILAIAN KINERJA TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi menandatangani Kontrak Manajemen dengan Pemegang Saham yang diwakili oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk Indikator Kinerja Utama (KPI) tahun 2019. Capaian atas KPI Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dilaporkan setiap 3 bulannya (triwulan) oleh Perseroan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melalui Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal (BPBUMD). BPBUMD selaku pembina BUMD kemudian melakukan pengawasan atas kinerja BUMD Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 88 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan BUMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

The Board of Commissioners together with the Directors signed a Management Contract with Shareholders represented by the Governor of DKI Jakarta Province for the Key Performance Indicator (KPI) in 2019. The achievements of the Directors and Board of Commissioners' KPIs are reported every 3 months (quarterly) by the Corporation to the DKI Jakarta Provincial Government, through the ROE Development and Investment Board (BPBUMD). BPBUMD as the ROE supervisor then supervises the performance of the DKI Jakarta Province ROE to be subsequently reported to the Governor of DKI Jakarta Province, in accordance with Governor Decree No. 88 of 2003 concerning Guidance and Development of ROE in the DKI Jakarta Provincial Government.



Figur. 6.6 Alur Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi
Figure. 6.6 Flow of Performance Assessment of The Board of Commissioners and Directors

HASIL KPI 2019 DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners KPI Result 2019

| Sasaran Strategis <i>Strategic Target</i> | Indikator Kinerja Utama <i>Key Performance Indicator</i> | Nilai Kinerja <i>Performance Score</i> |
|---|---|---|
| Penyelesaian Perencanaan Perseroan <i>Completion of Corporate Planning</i> | Tingkat ketepatan waktu persetujuan RKAP Tahun 2020 <i>The level of timeliness in approval of the 2020 RKAP</i> | 100% |
| | Tingkat ketepatan waktu penyelesaian dan persetujuan Usulan Perjanjian Kinerja Direksi Tahun 2020 <i>Level of timeliness of completion and approval of the proposed 2020 Performance Agreement for Directors</i> | 62,50% |

| Sasaran Strategis <i>Strategic Target</i> | Indikator Kinerja Utama <i>Key Performance Indicator</i> | Nilai Kinerja <i>Performance Score</i> |
|--|--|---|
| Pelaksanaan Tugas Pengawasan <i>Implementation of Supervision Tasks</i> | Pencapaian skor Perjanjian Kinerja Direksi 2019 <i>Achievement of the 2019 Directors' Performance</i> | 123,32% |
| | Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan terhadap Pengelolaan BUMD <i>Submission of Monitoring Reports on Management of BUMD</i> | 93,75% |
| Pelaksanaan Tugas Konsultasi <i>Implementation of Consultation Tasks</i> | Rata-rata tingkat kehadiran Dewan Komisaris pada rapat gabungan dengan Direksi MRT Jakarta <i>The average percentage of attendance of the Board of Commissioners at a joint meeting with the MRT Jakarta Directors</i> | 100% |
| | Tingkat penyelesaian agenda rapat gabungan (berdasarkan notulen) <i>Level of Completion of joint meeting agenda (based on minutes)</i> | 95,83% |
| Monitoring Pelaksanaan Program Unggulan dan/atau Strategis-KSD <i>Monitoring the Implementation of Featured and / or Strategic Programs-KSD</i> | Ketepatan waktu rata-rata pelaksanaan monitoring dan pelaporan program unggulan dan strategis/KSD yang dilaksanakan BUMD (berdasarkan KPI Direksi) <i>Timeliness of average monitoring and reporting of superior and strategic / KSD programs implemented by BUMD (based on KPI of Directors)</i> | 100% |

Tabel. 6.27
Table. 6.27

HASIL KPI 2019 DIREKSI

Directors KPI Result 2019

| Sasaran Strategis <i>Strategic Target</i> | Bobot <i>Weight</i> | Indikator Kinerja Utama (IKU) <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> | Bobot IKU <i>Weight KPI</i> | Triwulan IV <i>Quarter 4</i> | | Capaian IKU <i>KPI Achievement</i> | Nilai IKU <i>KPI Score</i> | Capaian WIG <i>WIG Achievement</i> | Nilai WIG <i>WIG Score</i> | Nilai Kinerja <i>Performance Score</i> |
|---|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | Target | Realisasi <i>Realization</i> | | | | | |
| Tercapainya pengguna jasa sesuai target rata-rata 65.000 penumpang/hari <i>Achieving 65,000 daily passengers Ridership target</i> | 26% | Persentase ketepatan perjalanan kereta <i>Percentage of on time of train travel</i> | 25% | 75% | 99,89% | 133% | 33% | 120% | 31% | 120% |
| | | Persentase jumlah aktual perjalanan kereta sesuai dengan yang direncanakan <i>Percentage of actual number of train trips as planned</i> | 25% | 75% | 99,81% | 133% | 33% | - | - | - |
| | | Indeks <i>Public Readiness</i> | 25% | 70 | 72,9 | 104% | 26% | - | - | - |
| | | Indeks Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Index</i> | 25% | 75 | 82,78 | 110% | 28% | - | - | - |
| Terselesaikannya konstruksi Fase 1, dimulainya konstruksi dan pendanaan Fase 2 <i>The completion of MRT Phase I Construction, and the commencement of construction and funding of MRT Phase II</i> | 30% | Persentase progres fisik proyek MRT Fase 1 <i>Percentage of physical progress of Phase 1 MRT projects</i> | 21,74% | 100% | 100% | 100% | 22% | 98% | 29% | - |
| | | Persentase progres fisik proyek MRT Fase 2 (CP200) <i>Percentage of physical progress of Phase 2 MRT projects</i> | 21,74% | 100% | 100% | 100% | 22% | - | - | - |
| | | Persentase realisasi dana hibah dan pinjaman MRT Fase 1 & 2 <i>Percentage of realized MRT grants and loans Phase 1 & 2</i> | 21,74% | 85% | 100% | 100% | 22% | - | - | - |

| Sasaran Strategis <i>Strategic Target</i> | Bobot <i>Weight</i> | Indikator Kinerja Utama (IKU) <i>Key Performance Indicator (KPI)</i> | Bobot IKU <i>Weight KPI</i> | Triwulan IV <i>Quarter 4</i> | | Capaian IKU <i>KPI Achievement</i> | Nilai IKU <i>KPI Score</i> | Capaian WIG <i>WIG Achievement</i> | Nilai WIG <i>WIG Score</i> | Nilai Kinerja <i>Performance Score</i> |
|--|------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | Target | Realisasi <i>Realization</i> | | | | | |
| | | Persentase terselesaikannya tender konstruksi & jasa konsultasi MRT Fase 2 <i>Percentage of completion of construction tender & MRT Phase 2 consulting services</i> | 13,04% | 64% | 53% | 83% | 11% | - | - | - |
| | | Persentase penugasan Engineering Design MRT Koridor Timur-Barat <i>Percentage of East-West Corridor Engineering Design MRT assignments</i> | 21,74% | 100% | 100% | 100% | 22% | - | - | - |
| Terwujudnya pengembangan usaha <i>Realization of Business Development</i> | 21% | Pendapatan non-tiket (sesuai RKAP) <i>Farebox Income (according to RKAP)</i> | 51% | 100% | 253% | 253% | 129% | 178% | 37% | - |
| | | Persentase penguatan dasar hukum untuk Kawasan Berorientasi Transit (KBT) di sepanjang koridor MRT <i>Percentage of legal basis strengthening for the TOD area along the MRT corridor</i> | 18% | 100% | 100% | 100% | 18% | - | - | - |
| | | Persentase penyelenggaraan Kawasan KBT di seluruh koridor MRT Jakarta <i>Percentage of TOD Zone implementation in all MRT corridors in Jakarta</i> | 31% | 100% | 100% | 100% | 31% | - | - | - |

| Sasaran Strategis Strategic Target | Bobot Weight | Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicator (KPI) | Bobot IKU Weight KPI | Triwulan IV Quarter 4 | | Capaian IKU KPI Achievement | Nilai IKU KPI Score | Capaian WIG WIG Achievement | Nilai WIG WIG Score | Nilai Kinerja Performance Score |
|---------------------------------------|-----------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Target | Realisasi Realization | | | | | |
| | 24% | Nilai Kematangan Risiko Score of Risk Maturity | 18,18% | 2,9 | 3,55 | 122% | 22% | 109% | 26% | - |
| | | Nilai Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG Value | 18,18% | 87 | 87 | 100% | 18% | - | - | - |
| | | Level Knowledge Management Maturity | 18,18% | 3,4 | 4,26 | 125% | 23% | - | - | - |
| | | Incident Severity Rate FR ≤ 0.4 SR ≤ 0.2 | 45,45% | 100% | 100% | 100% | 45% | - | - | - |

Tabel 6.28
Table 6.28

PENILAIAN PENERAPAN GCG UNTUK ASPEK DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

ASSESSMENT OF GCG APPLICATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Sebagai organ utama dalam Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki peran sentral dalam gerak pertumbuhan Perseroan. Penilaian atas kedua organ ini menjadi sebuah keharusan, terutama karena Perseroan merupakan BUMD yang diarahkan untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada standar yang tinggi sekaligus penilaian terhadap penerapan tersebut.

Assessment terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 dilakukan dengan parameter yang dikembangkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Penilaian dikembangkan melalui beberapa aspek pengujian, termasuk aspek Partisipan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang di dalamnya mencakup Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya, serta Direksi dan organ pendukungnya.

As the main organ in the Corporation, the Board of Commissioners and Directors have a central role in the growth of the Corporation. An assessment of these two organs is a must, especially since the Corporation is a ROE that is directed to apply GCG principles to high standards as well as an assessment of these applications.

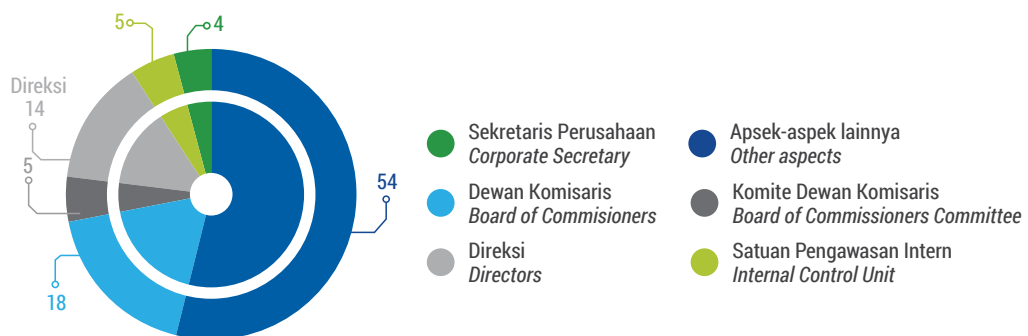
An assessment of the application of GCG for the 2019 fiscal year was carried out with parameters developed by the DKI Jakarta Provincial BPKP Representative. Assessment is developed through several aspects of testing, including aspects of GCG Participants which include the Board of Commissioners and their supporting organs, as well as the Directors and their supporting organs.

PARAMETER PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK YANG DIKEMBANGKAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA MEMBERIKAN PORSI KOMPOSISI HINGGA 46% TERHADAP ASPEK DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN ORGAN-ORGAN PENDUKUNGNYA. BESARNYA PORSI KOMPOSISI INI MENUNJUKKAN PENTINGNYA PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI.

The evaluation parameters of Good Corporate Governance implementation developed by Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) of DKI Jakarta gave a composition portion of up to 46% of the aspects of the Board of Commissioners, Directors, and their supporting organs. The large portion of this composition shows the important role of the Board of Commissioners and Directors.

KOMPOSISI PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERBASIS PARAMETER BPKP PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA

Composition of GCG Implementation Assessment Based on BPKP Parameters of DKI Jakarta



Grafik. 6.1
Graphic. 6.1

Berdasarkan hasil penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilakukan di Tahun Buku 2019 tersebut, Perseroan memperoleh skor sebesar 87,33 dengan predikat "Baik", di mana aspek Dewan Komisaris mencatat pencapaian 82,23 dan aspek Direksi sebesar 85,14.

Based on the results of the GCG Assessment conducted in the 2019 financial year, the Corporation obtained a score of 87.33 with the title "Good", where the aspects of the Board of Commissioners recorded an achievement of 82.23 and aspects of the Directors of 85.14.

| | |
|--|---|
| Jenis Penilaian <i>Type of Assessment</i> | Assessment |
| Penilai <i>Assessor</i> | BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta <i>BPKP DKI Jakarta Province Representative</i> |
| Periode Penerapan <i>Application Period</i> | 1 Januari - 31 Desember 2019 <i>January 1 - December 31, 2019</i> |
| Tahun Ukur <i>Measurement Year</i> | Tahun Buku 2019 <i>Fiscal Year 2019</i> |
| Waktu Pengukuran <i>Time of Measurement</i> | 12 Desember 2019 sampai dengan 14 Februari 2020 <i>December 12, 2019 until Februari 14, 2020</i> |

Tabel. 6.29. Periode Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2019
Table. 6.29. 2019 Good Corporate Governance Period of Assessment

Rincian hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan perbandingannya dengan pencapaian tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Details of the assessment results of the implementation of the Corporation's GCG for the 2019 financial year and its comparison with the achievements in 2018 are as follows:

| Aspek Pengujian <i>Testing Aspect</i> | Bobot <i>Weight</i> | Pencapaian Tahun Buku 2019 <i>Achievement in 2019</i> | | | Capaian Tahun Buku 2018 <i>Achievement of Fiscal Year of 2018</i> |
|---|------------------------|--|-----------------------------------|--|--|
| | | Capaian Aktual <i>Actual Achievement</i> | Capaian <i>Achievement (%)</i> | Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG <i>GCG Implementation Quality Qualifications</i> | |
| I Komitmen <i>Commitment</i> | 15,00 | 13.099 | 87,33 | "Baik" <i>"Good"</i> | 12,67 |
| II Kebijakan <i>Policy</i> | 10,00 | 9.749 | 97,49 | "Baik Sekali" <i>"Very Good"</i> | 9,39 |
| III Partisipan Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>GCG Participant</i> | | | | | |
| Pemegang Saham <i>Shareholder</i> | 24,00 | 21.146 | 88,11 | "Baik" <i>"Good"</i> | 21,33 |
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i> | 18,00 | 14.802 | 82,23 | "Baik" <i>"Good"</i> | 14,17 |
| Komite Dewan Komisaris <i>Committee of Coard of Commissioners</i> | 5,00 | 3.986 | 79,73 | "Baik" <i>"Good"</i> | 4,23 |
| Direksi <i>Directors</i> | 14,00 | 11.920 | 85,14 | "Baik" <i>"Good"</i> | 11,04 |
| Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Audit</i> | 5,00 | 4.161 | 83,22 | "Baik" <i>"Good"</i> | 4,12 |
| Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i> | 4,00 | 3.755 | 93,88 | "Baik Sekali" <i>"Very Good"</i> | 3,64 |
| IV Pengungkapan Informasi <i>Information Disclosure</i> | 5,00 | 4.712 | 94,25 | "Baik Sekali" <i>"Very Good"</i> | 4,55 |
| Skor Akhir <i>Final Score</i> | 100,0 | 87,33 | | "Baik" <i>"Good"</i> | 85,14 |

Keterangan:

0-50,00 : Sangat Kurang Baik | 50,01-60,00 : Kurang Baik | 60,01-75,00 : Cukup Baik | 75,01-90,00 : Baik | 90,01-100 : Sangat Baik

Information:

0-50.00: Very Poor 50.01-60.00: Poor| 60.01-75.00: Fair | 75.01-90.00: Good | 90.01-100: Very Good

Tabel. 6.30

Table. 6.30

Berikut rekomendasi dalam area peningkatan atau Area of Improvement implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi, serta tindak lanjutnya hingga akhir tahun 2019.

The following are recommendations in the area of improvement or the Area of Improvement in the implementation of GCG for the aspects of the Board of Commissioners and Directors, and the follow-up until the end of 2019.





HASIL KPI 2019 DEWAN KOMISARIS




Board of Commissioners KPI Result 2019

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 <i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018 <i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut <i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|--|---|--|
| <p>Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i></p> | | |
| <p>1. Mengesahkan <i>Board Manual</i> yang telah disempurnakan dengan muatan sejarah singkat BUMD, rencana dan realisasi usaha BUMD, serta opini atas Laporan Keuangan <i>Ratifying the Board Manual which has been enhanced with BUMD brief history, plan and Realization of BUMD, and Audit Opinion on financial statements</i></p> | <p>✘</p> | <p>Akan dituangkan dalam Revisi <i>Board Manual</i>. Pembaharuan <i>Board Manual</i> sedang dalam proses dan ditargetkan selesai pada Triwulan II Tahun 2020 <i>Included in the Board Manual renewal. The Board Manual renewal is in process and is targeted to complete in quarter II of 2020</i></p> |
| <p>2. Menyempurnakan Pedoman Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat dengan menambahkan muatan pendelegasian wewenang dan menjadi materi dalam program pengenalan <i>Enhancing the induction program guidelines for the newly appointed Board of Commissioners by adding a charge of the delegation of authority and into the material in the induction program</i></p> | <p>✔</p> | <p>Akan dituangkan dalam Revisi <i>Board Manual</i>. Pembaharuan <i>Board Manual</i> sedang dalam proses dan ditargetkan selesai pada Triwulan II Tahun 2020 <i>Included in the Board Manual renewal. Board Manual renewal is in process and is targeted to complete in quarter II of 2020</i></p> |
| <p>3. Menyampaikan telaahan tertulis atas rancangan RJPP (RJMP) yang disusun oleh Direksi kepada Pemegang Saham <i>Submitting the written review on the RJPP (RJMP) draft compiled by the Directors to shareholders</i></p> | <p>✘</p> | <p>Dewan Komisaris telah secara aktif memberikan arahan atas rancangan RJPP dan RJMP yang disusun oleh Direksi, namun belum disampaikan kepada Pemegang Saham <i>The Board of Commissioners has been actively providing direction for RJPP and RJMP plans compiled by the Directors, but has not submitted to shareholders</i></p> |

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019</p> <p><i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018</p> <p><i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut</p> <p><i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|--|---|---|
| <p>4. Menyampaikan telaahan tertulis atas rancangan RKAP yang disusun oleh Direksi kepada Pemegang Saham</p> <p><i>Submitting the written review on the ABOP draft compiled by the Directors to shareholders</i></p> | <p>×</p> | <p>RKAP Tahun 2020 telah disampaikan kepada Pemegang Saham, namun telaahan tertulis belum disampaikan kepada Pemegang Saham</p> <p><i>The ABOP of 2020 has been submitted to shareholders, but the written review has not been submitted to the shareholders</i></p> |
| <p>5. Menyampaikan telaah atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas kepada Direksi</p> <p><i>Submitting a review on the effectiveness of internal control at the entity level to the Directors</i></p> | <p>×</p> | <p>Menyampaikan telaah atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas kepada Direksi</p> <p><i>Submitting a review on the effectiveness of internal control at the entity level to the Directors</i></p> |
| <p>6. Menyampaikan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang mencakup keseluruhan proses manajemen risiko (antara lain identifikasi, penilaian risiko, respons, dan mitigasi risiko) kepada Direksi</p> <p><i>Submitting a review of policies and implementation of risk management covering the entire process of risk management (including identification, risk assessment, response, and risk mitigation) to the Directors</i></p> | <p>×</p> | <p>Menyampaikan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang mencakup keseluruhan proses manajemen risiko (antara lain identifikasi, penilaian risiko, respons, dan mitigasi risiko) kepada Direksi</p> <p><i>Submitting a review of policies and implementation of risk management covering the entire process of risk management (including identification, risk assessment, response, and risk mitigation) to the Directors</i></p> |
| <p>7. Menyampaikan telaah atas kebijakan TI, kesesuaian pelaksanaan TI dengan Rencana Induk, dan kebutuhan Perseroan kepada Direksi</p> <p><i>Submitting a review on IT policy, compliance with IT implementation with the Master Plan and the company's needs to the Directors</i></p> | <p>×</p> | <p>Menyampaikan telaah atas kebijakan TI, kesesuaian pelaksanaan TI dengan Rencana Induk, dan kebutuhan Perseroan kepada Direksi</p> <p><i>Submitting a review on IT policy, compliance with IT implementation with the Master Plan and the company's needs to the Directors</i></p> |
| <p>8. Menyampaikan telaah atas kebijakan pengembangan karier kepada Direksi</p> <p><i>Submitting a review on career development policy to the Board of Directors</i></p> | <p>×</p> | <p>Menyampaikan telaah atas kebijakan pengembangan karier kepada Direksi</p> <p><i>Submitting a review on career development policy to the Directors</i></p> |

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 <i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018 <i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut <i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|---|--|--|
| <p>9. Menyampaikan telaah tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) kepada Direksi <i>Submitting a review on the accounting policy and the preparation of financial statements following the generally applicable accounting standards in Indonesia (SAK) to the Directors</i></p> | <p>✘</p> | <p>Menyampaikan telaah tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) kepada Direksi <i>Submitting a review on the accounting policy and the preparation of financial statements following the generally applicable accounting standards in Indonesia (SAK) to the Directors</i></p> |
| <p>10. Menyampaikan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Direksi <i>Submitting a review on the policy and implementation of goods / services procurement to the Directors</i></p> | <p>✘</p> | <p>Menyampaikan telaah atas kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Direksi <i>Submitting a review on the policy and implementation of goods / services procurement to Directors</i></p> |
| <p>11. Menyampaikan telaah atas kebijakan mutu kepada Direksi <i>Submitting a review on quality policy to the Directors</i></p> | <p>✘</p> | <p>Membuat surat penetapan penunjukan KAP yang disampaikan kepada Direksi atas dasar hasil evaluasi dari Komite Audit <i>Delivering a letter of the appointment of KAP submitted to the Directors based on evaluation of Audit Committee</i></p> |
| <p>12. Membuat surat penetapan penunjukan KAP yang disampaikan kepada Direksi atas dasar hasil evaluasi dari Komite Audit <i>Delivering a letter of the appointment of KAP submitted to the Board of Directors based on evaluation of Audit Committee</i></p> | <p>✘</p> | <p>Membuat surat penetapan penunjukan KAP yang disampaikan kepada Direksi atas dasar hasil evaluasi dari Komite Audit <i>Delivering a letter of the appointment of KAP submitted to the Directors based on evaluation of Audit Committee</i></p> |
| <p>13. Menyampaikan telaah/penelitian terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham <i>Submitting a review on candidates of directors proposed by the Directors to shareholders</i></p> | <p>✘</p> | <p>Menyampaikan telaah/penelitian terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan oleh Direksi kepada Pemegang Saham <i>Submitting a review on candidates of directors proposed by the Directors to shareholders</i></p> |
| <p>14. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan <i>Conducting Board of Directors' performance assessments individually based on established criteria</i></p> | <p>✔</p> | <p>Pada 2019, Dewan Komisaris telah melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi namun belum secara individu <i>In 2019, the Board of Commissioners has assessed the performance of Directors collectively</i></p> |

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019</p> <p><i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018</p> <p><i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut</p> <p><i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|--|---|--|
| <p>15. Memasukkan kegiatan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai bagian dari rencana kerja tahunan Dewan Komisaris</p> <p><i>Including GCG monitoring activities as part of the Board of Commissioners' annual work plan</i></p> |  | <p>Kegiatan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah menjadi bagian dari rencana kerja tahunan Dewan Komisaris Tahun 2019</p> <p><i>GCG monitoring activities have been part of the annual work plan of the Board of Commissioners of 2019</i></p> |
| <p>16. Melakukan telaah atas hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta melakukan pemantauan progres tindak lanjut <i>area of improvement</i> Tata Kelola Perusahaan yang Baik</p> <p><i>Submitting a review on GCG Assessment and monitoring progress on the follow-up of the GCG area of improvement</i></p> |  | <p>Melakukan telaah atas hasil <i>assessment</i> Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta melakukan pemantauan progres tindak lanjut <i>area of improvement</i> GCG</p> <p><i>Submitting a review on GCG Assessment and monitoring progress on the follow-up of the GCG area of improvement</i></p> |
| <p>17. Memberikan persetujuan (validasi) atas risalah rapat sesuai dengan ketentuan yaitu maksimal 14 hari setelah pengiriman risalah</p> <p><i>Validating the minutes of the meeting following the provisions not more than 14 days after the minutes delivery</i></p> |  | <p>Dewan Komisaris telah menyetujui dan menandatangani risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p><i>The Board of Commissioners has approved and signed the minutes of the Board of Commissioners' meeting following the applicable regulations</i></p> |
| <p>18. Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk membuat undangan rapat sesuai ketentuan yaitu dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 18 ayat 3</p> <p><i>Instructing the Secretary of the Board of Commissioners to make a meeting invitation according to the provisions, namely by registered letter or by letter delivered directly to each member of the Board of Commissioners in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Corporation article 18 paragraph 3</i></p> |  | <p>Menginstruksikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk membuat undangan rapat sesuai ketentuan yaitu dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 18 ayat 3</p> <p><i>Instructing the Secretary of the Board of Commissioners to make a meeting invitation according to the provisions, namely by registered letter or by letter delivered directly to each member of the Board of Commissioners in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Corporation article 18 paragraph 3</i></p> |







| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 <i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018 <i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut <i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|--|--|--|
| <p>19. Mendokumentasikan dalam risalah rapat mengenai evaluasi (pemantauan) terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya dan pembahasan tindak lanjut hasil keputusan rapat sebelumnya yang belum selesai <i>Documenting the minutes of meeting regarding the evaluation (monitoring) of the the previous meeting results and discussion of the follow-up of the results of the decision of the previous meeting that has not been completed.</i></p> |  | <p>Sekretaris Dewan Komisaris telah membuat daftar monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris <i>The Secretary of the Board of Commissioners has made a list of monitoring the follow-up of the decisions, recommendations and directions of the Board of Commissioners at the Board of Commissioners' Meeting</i></p> |
| <p>20. Menginstruksikan seluruh Komite Dewan Komisaris untuk melakukan revisi/ pemutakhiran terhadap piagam/charter yang disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing Komite Komisaris dan ketentuan yang berlaku <i>Instrucing the entire Committee of the Board of Commissioners to revise / update the charter which is adjusted to the nomenclature of each Board of Commissioners Committee and the applicable provisions</i></p> |  | <p>Menginstruksikan seluruh Komite Dewan Komisaris untuk melakukan revisi/ pemutakhiran terhadap piagam/charter yang disesuaikan dengan nomenklatur masing-masing Komite Komisaris dan ketentuan yang berlaku <i>Instrucing the entire Committee of the Board of Commissioners to revise / update the charter which is adjusted to the nomenclature of each Board of Commissioners Committee and the applicable provisions</i></p> |
| <p>21. Menginstruksikan kepada Komite SDM & Pengusahaan untuk menyusun program kerja tahunan <i>Instructing the HC & Business Committee to develop an annual work program</i></p> |  | <p>Menginstruksikan kepada Komite SDM dan Pengusahaan untuk menyusun program kerja tahunan <i>Instructing the HC & Business Committee to develop an annual work program</i></p> |







| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019</p> <p><i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018</p> <p><i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut</p> <p><i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|---|---|---|
| <p>22. Menginstruksikan Komite Audit agar menambahkan muatan dalam program kerja tahunan Komite Audit, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan telaah atas efektivitas sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi atas sistem pengendalian intern beserta pelaksanaannya; 2. Melakukan telaah atas efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Internal Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; Melakukan telaah atas prosedur revidi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan. <p><i>Instructing the Audit Committee to add materials to the Audit Committee's annual work program, namely:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reviewing the effectiveness of the internal control system and provide recommendations on the internal control system and its implementation;</i> 2. <i>Reviewing the effectiveness of the implementation of the duties of the external auditor and Internal Audit submitted to the Board of Commissioners; Reviewing through adequate review procedures for all information released by the company</i> | <p>✘</p> | <p>Menginstruksikan Komite Audit agar menambahkan muatan dalam program kerja tahunan Komite Audit, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan telaah atas efektivitas sistem pengendalian intern dan memberikan rekomendasi atas sistem pengendalian intern beserta pelaksanaannya; 2. Melakukan telaah atas efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Internal Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; Melakukan telaah atas prosedur revidi yang memadai terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh Perseroan. <p><i>Instructing the Audit Committee to add materials to the Audit Committee's annual work program, namely:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Reviewing the effectiveness of the internal control system and provide recommendations on the internal control system and its implementation;</i> 2. <i>Reviewing the effectiveness of the implementation of the duties of the external auditor and Internal Audit submitted to the Board of Commissioners; Reviewing through adequate review procedures for all information released by the Corporation</i> |
| <p>23. Menginstruksikan kepada Komite Dewan Komisaris agar melaksanakan pertemuan rutin sesuai dengan program kerja tahunan</p> <p><i>Instructing the BOC Committee to conduct regular meetings by the annual work program</i></p> | <p>✔</p> | <p>Komite Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan rutin, yaitu 2 kali dalam sebulan</p> <p><i>The Board of Commissioners Committee has conducted regular meetings, which is 2 times a month</i></p> |

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019</p> <p><i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018</p> <p><i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut</p> <p><i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|--|---|--|
| <p>24. Menginstruksikan kepada Komite Audit agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat telaah tertulis terhadap <i>Terms of Reference (ToR)</i> Eksternal Auditor yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; 2. Membuat telaah secara tertulis atas efektivitas sistem pengendalian internal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; 3. Membuat telaah tertulis atas rencana kerja Divisi <i>Internal Audit</i> yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; 4. Membuat telaah tertulis atas efektivitas pelaksanaan tugas Divisi <i>Internal Audit</i> yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; 5. Membuat telaah tertulis atas tindak lanjut manajemen atas temuan dari <i>Internal Audit</i> maupun <i>External Audit</i>. <p><i>Instructing the Audit Committee to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Making a written review of the Terms of Reference (ToR) of External Auditor submitted to the Board of Commissioners;</i> 2. <i>Making a written review of the effectiveness of the internal control system submitted to the Board of Commissioners;</i> 3. <i>Making a written review of the work plan of the Internal Audit Division submitted to the Board of Commissioners;</i> 4. <i>Making a written review of the effectiveness of the implementation of the Internal Audit Division's tasks submitted to the Board of Commissioners;</i> 5. <i>Making a written review of management's follow-up on the findings of the Internal Audit and External Audit.</i> | <p>✘</p> | <p>Menginstruksikan kepada Komite Audit agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat telaah tertulis terhadap <i>Terms of Reference (ToR)</i> Eksternal Auditor yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; 2. Membuat telaah secara tertulis atas efektivitas sistem pengendalian internal yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; 3. Membuat telaah tertulis atas rencana kerja Divisi <i>Internal Audit</i> yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; 4. Membuat telaah tertulis atas efektivitas pelaksanaan tugas Divisi <i>Internal Audit</i> yang disampaikan kepada Dewan Komisaris; 5. Membuat telaah tertulis atas tindak lanjut manajemen atas temuan dari <i>Internal Audit</i> maupun <i>External Audit</i>. <p><i>Instructing the Audit Committee to:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Making a written review of the Terms of Reference (ToR) of External Auditor submitted to the Board of Commissioners;</i> 2. <i>Making a written review of the effectiveness of the internal control system submitted to the Board of Commissioners;</i> 3. <i>Making a written review of the work plan of the Internal Audit Division submitted to the Board of Commissioners;</i> 4. <i>Making a written review of the effectiveness of the implementation of he Internal Audit Division's tasks submitted</i> 5. <i>Making a written review ofto the Board of Commissioners; management's follow-up on the findings of the Internal Audit and External Audit.</i> |

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019</p> <p><i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018</p> <p><i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut</p> <p><i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|---|---|---|
| <p>25. Menginstruksikan kepada seluruh Komite Dewan Komisaris untuk membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugasnya secara berkala (triwulanan dan tahunan) yang memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program tahunan</p> <p><i>Instructing all Committees of the Board of Commissioners to report the implementation of its duties periodically (quarterly and annually) which contains a comparison of the realization of activities with the annual program</i></p> | <p>✘</p> | <p>Menginstruksikan kepada seluruh Komite Dewan Komisaris untuk membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugasnya secara berkala (triwulanan dan tahunan) yang memuat perbandingan realisasi kegiatan dengan program tahunan</p> <p><i>Instructing all Committees of the Board of Commissioners to report the implementation of its duties periodically (quarterly and annually) which contains a comparison of the realization of activities with the annual program</i></p> |
| <p>Direksi <i>Directors</i></p> | | |
| <p>1. Menginstruksikan kepada seluruh karyawan agar menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dan diperbarui secara berkala</p> <p><i>Instructing all employees to sign the integrity pact with the Code of Conduct and periodical update</i></p> | <p>✔</p> | <p>Penandatanganan surat pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku dilakukan setiap tahun oleh seluruh karyawan dan telah dilakukan pembaruan atas isi dari Pedoman Etika dan Perilaku berdasarkan Peraturan Direksi No. 041 Tahun 2019 tentang Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) tanggal 31 Juli 2019</p> <p><i>The signing of a declaration of compliance with the Code of Conduct is conducted annually by all employees and has been renewed on the contents of the Code of Conduct under the Board of Director's regulation No. 041 of 2019 on the Code of Conduct on July 31, 2019</i></p> |
| <p>2. Menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Minoritas agar menandatangani Kontrak Kinerja</p> <p><i>Submitting to the Board of Commissioners and minority shareholders to sign a performance contract</i></p> | <p>✔</p> | <p>Dewan Komisaris berperan aktif terhadap kontrak Kinerja Direksi. Pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja Direksi Tahun 2019 dilaksanakan pada Maret 2019 dan sepenuhnya menjadi wewenang Pemegang Saham</p> <p><i>The Board of Commissioners has an active role in the Directors' Performance contract. The signing of the 2019 Directors' Performance Contract was carried out in March 2019 and is fully under the authority of the Shareholders</i></p> |

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 <i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018 <i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut <i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|--|--|---|
| <p>3. Menyampaikan laporan periodik manajemen kepada Pemegang Saham Minoritas <i>Submitting periodic management reports to minority shareholders</i></p> | <p>✘</p> | <p>Menyampaikan laporan periodik manajemen kepada Pemegang Saham Minoritas <i>Submitting periodic management reports to minority shareholders</i></p> |
| <p>4. Menyampaikan laporan kinerja kepada Pemegang Saham Minoritas <i>Submitting performance reports to minority shareholders</i></p> | <p>✘</p> | <p>Menyampaikan laporan kinerja kepada Pemegang Saham Minoritas <i>Submitting performance reports to minority shareholders</i></p> |
| <p>5. Menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menambahkan muatan penyusunan Kontrak Manajemen, Media Komunikasi dan Informasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Proses Penunjukan Auditor Eksternal <i>Improving GCG guidelines by adding the materials to management contract drafting, communication and information Media, corporate social responsibility, the appointment process of the External Auditor</i></p> | <p>✘</p> | <p>Menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menambahkan muatan penyusunan Kontrak Manajemen, Media Komunikasi dan Informasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Proses Penunjukan Auditor Eksternal <i>Improving GCG guidelines by adding the materials to management contract drafting, communication and information Media, corporate social responsibility, the appointment process of the External Auditor</i></p> |
| <p>6. Mengesahkan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disempurnakan dengan muatan sejarah singkat BUMD, rencana dan realisasi usaha BUMD, serta opini atas Laporan Keuangan <i>Ratifying the Board Manual that has been refined with a brief history of BUMD, BUMD business plans and realization, as well as opinions on Financial Statements</i></p> | <p>✔</p> | <p>Pembaharuan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi sedang dalam proses dan ditargetkan selesai pada Triwulan II Tahun 2020 <i>The Board Manual Renewal is in the process of being targeted for completion in the Quarter II of 2020</i></p> |
| <p>7. Menyempurnakan Pedoman Program Pengenalan bagi Direksi yang baru diangkat dengan muatan pendelegasian wewenang <i>Improving the induction program guidelines for newly appointed Directors with a delegation of authority</i></p> | <p>✔</p> | <p>Akan dituangkan dalam Revisi Board Manual. Pembaharuan Board Manual sedang dalam proses dan ditargetkan selesai pada Triwulan II Tahun 2020 <i>Included in the Board Manual renewal. The Board Manual Renewal is in process and is targeted to complete in the quarter II of 2020</i></p> |

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019</p> <p><i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018</p> <p><i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut</p> <p><i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|--|---|--|
| <p>8. Mengesahkan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang di dalamnya memuat uraian tugas Direksi</p> <p><i>Ratifying the Board Manual containing the description of the Directors' duties</i></p> |  | <p>Pembaruan Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi sedang dalam proses dan ditargetkan selesai pada Triwulan II Tahun 2020</p> <p><i>The Board Manual renewal is in process and is targeted to complete in quarter II of 2020</i></p> |
| <p>9. Menyatakan dalam RKAP adanya keselarasan RKAP dengan Rencana Kerja 5 Tahunan</p> <p><i>Stating the alignment of the ABOP with the 5-year Work Plan in the ABOP</i></p> |  | <p>Menyatakan dalam RKAP adanya keselarasan RKAP dengan Rencana Kerja 5 Tahunan</p> <p><i>Stating the alignment of the ABOP with the 5-year Work Plan in the ABOP</i></p> |
| <p>10. Menyampaikan rancangan RKAP kepada Pemegang Saham Minoritas sebelum pengesahan</p> <p><i>Submitting the drafted ABOP to the Minority Shareholder before the confirmation</i></p> |  | <p>Laporan realisasi RKAP disampaikan setiap bulan kepada Pemegang Saham mayoritas dan ke depannya akan disampaikan sebelum disahkan.</p> <p><i>The RKAP's realization report is delivered each month to the majority shareholder and the future will be delivered before it is confirmed.</i></p> |
| <p>11. Menyampaikan rencana (daftar) SDM yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan satu level di bawah Direksi kepada Dewan Komisaris</p> <p><i>Submitting a plan (list) of talents who have the competency to occupy a level below the Directors to the Board of Commissioners</i></p> |  | <p>Menyampaikan rencana (daftar) SDM yang memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan satu level di bawah Direksi kepada Dewan Komisaris</p> <p><i>Submitting a plan (list) of talents who have the competency to occupy a level below the Directors to the Board of Commissioners</i></p> |
| <p>12. Melaporkan pelaksanaan sistem Teknologi Informasi kepada Dewan Komisaris sesuai Pedoman yang ditetapkan</p> <p><i>Reporting the implementation of the Information Technology system to the Board of Commissioners in accordance with established guidelines</i></p> |  | <p>Melaporkan pelaksanaan sistem Teknologi Informasi kepada Dewan Komisaris sesuai Pedoman yang ditetapkan</p> <p><i>Reporting the implementation of the Information Technology system to the Board of Commissioners in accordance with established guidelines</i></p> |
| <p>13. Mengesahkan SOP Pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan antara lain Prosedur Pengendalian Pelayanan Penumpang di stasiun</p> <p><i>Approve SOP for controlling the quality of services, among others, the Passenger Service Control Procedure at the station</i></p> |  | <p>Mengesahkan SOP Pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan antara lain Prosedur Pengendalian Pelayanan Penumpang di stasiun</p> <p><i>Approve SOP for controlling the quality of services, among others, the Passenger Service Control Procedure at the station</i></p> |

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 <i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018 <i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut <i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|--|--|---|
| <p>14. Mendokumentasikan saran perbaikan atas hasil penilaian capaian kinerja individu yang dilakukan oleh atasan langsung <i>Documenting suggestions for improvement of the results of individual performance assessments performed by the direct supervisor</i></p> |  | <p>Analisis terhadap capaian kinerja dan upaya perbaikan strategi berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh atasan langsung telah dilakukan dan didokumentasikan <i>Analysis of performance achievements and efforts to improve strategy based on the results of the analysis conducted by the direct supervisor has been carried out and documented</i></p> |
| <p>15. Menambahkan muatan kegiatan pelaksanaan tindak lanjut hasil survei pelanggan dalam uraian tugas Divisi yang terkait <i>Analysis of performance achievements and efforts to improve strategy based on the results of the analysis conducted by the direct supervisor has been carried out and documented</i></p> |  | <p>Menambahkan muatan kegiatan pelaksanaan tindak lanjut hasil survei pelanggan dalam uraian tugas Divisi yang terkait <i>Analysis of performance achievements and efforts to improve strategy based on the results of the analysis conducted by the direct supervisor has been carried out and documented</i></p> |
| <p>16. Melakukan evaluasi terhadap pemasok berdasarkan kualitas, biaya, penyampaian, dan layanan <i>Evaluating suppliers based on quality, cost, delivery and services</i></p> |  | <p>Melakukan evaluasi terhadap pemasok berdasarkan kualitas, biaya, penyampaian, dan layanan <i>Evaluating suppliers based on quality, cost, delivery and services</i></p> |
| <p>17. Melakukan survei kepuasan pemasok secara berkala <i>Conducting supplier satisfaction surveys regularly</i></p> |  | <p>Perseroan telah melakukan evaluasi terhadap beberapa pemasok di tahun 2019 <i>The corporation has evaluated the number of suppliers in 2019</i></p> |
| <p>18. Menambahkan muatan kegiatan pelaksanaan tindak lanjut hasil survei pemasok dalam uraian tugas Divisi yang terkait <i>Adding the contents of the follow-up activities of the supplier survey results in the relevant Division job descriptions</i></p> |  | <p>Menambahkan muatan kegiatan pelaksanaan tindak lanjut hasil survei pemasok dalam uraian tugas Divisi yang terkait <i>Adding the contents of the follow-up activities of the supplier survey results in the relevant Division job descriptions</i></p> |
| <p>19. Menyempurnakan sarana/media perseroan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan dugaan pelanggaran <i>Improving company facilities / media to support the implementation of the Whistleblowing System policy</i></p> |  | <p>Menyempurnakan sarana/media perusahaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan dugaan pelanggaran <i>Improving company facilities / media to support the implementation of the Whistleblowing System policy</i></p> |

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019</p> <p><i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018</p> <p><i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut</p> <p><i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|---|---|---|
| <p>20. Menginstruksikan kepada Kepala Divisi <i>Corporate Secretary</i> untuk melaporkan pelaksanaan kebijakan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran kepada Direktur Utama sesuai pedoman yang ditetapkan</p> <p><i>Instructing the Head of Corporate Secretary Division to report the implementation of the Whistleblowing System policy to the President Director following the applicable guidelines</i></p> | <p>✓</p> | <p>Laporan tentang pelaksanaan kebijakan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran telah dibuat</p> <p><i>The report on the implementation of the Whistleblowing System policy has been made</i></p> |
| <p>21. Meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal</p> <p><i>Increase the follow up of the results of the examination of SPI and external auditors</i></p> | <p>✓</p> | <p>Unit Kerja menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal</p> <p><i>The Work Unit follows up all the results of the review of SPI and external auditors</i></p> |
| <p>22. Menyempurnakan pedoman tata tertib rapat Direksi yang minimal mengatur etika rapat dan penyusunan risalah rapat, evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, serta pembahasan atas arahan/usulan dan/atau keputusan Direksi</p> <p><i>Improving the guidelines for the Directors' meeting which minimizes the ethics of the meeting and preparation of minutes of meetings, evaluation of the follow-up to the results of the previous meeting, as well as discussion of directives / recommendations and/or decisions of the Directors</i></p> | <p>✓</p> | <p>Akan dituangkan dalam Revisi Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi. Pembaruan pedoman sedang dalam proses dan ditargetkan selesai pada Triwulan II Tahun 2020</p> <p><i>Included in the Board Manual renewal. The Board Manual renewal is in process and is targeted to complete in quarter II of 2020</i></p> |
| <p>23. Menambah personil yang ditugaskan di Divisi <i>Internal Audit</i> agar sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas Internal Audit</p> <p><i>Adding personnel assigned to the Internal Audit Division to suit the needs for carrying out Internal Audit tasks</i></p> | <p>✓</p> | <p>Pada tahun 2019, terdapat 1 (satu) penambahan personil pada Divisi <i>Internal Audit</i></p> <p><i>In 2019, there was 1 (one) additional personnel in the Internal Audit Division</i></p> |

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 <i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018 <i>Recommendations for the GCG Implementation Assessment Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/ Rencana Tindak Lanjut <i>Follow Ups That Have Been Done / Follow Up Plans</i></p> |
|--|--|--|
| <p>24. Menginstruksikan kepada Kepala Divisi <i>Internal Audit</i> untuk menyempurnakan <i>Internal Audit Manual</i> dengan menambahkan muatan antara lain ketentuan pemantauan tindak lanjut hasil audit, sistematika pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan) <i>Instructing the Head of the Internal Audit Division to refine the Internal Audit Manual by adding content including the provisions for monitoring follow-up of audit results, systematic reporting (Report on Audit Results)</i></p> | <p>×</p> | <p>Menginstruksikan kepada Kepala Divisi <i>Internal Audit</i> untuk menyempurnakan <i>Internal Audit Manual</i> dengan menambahkan muatan antara lain ketentuan pemantauan tindak lanjut hasil audit, sistematika pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan) <i>Instructing the Head of the Internal Audit Division to refine the Internal Audit Manual by adding content including the provisions for monitoring follow-up of audit results, systematic reporting (Report on Audit Results)</i></p> |

√ = Terdapat dalam rekomendasi penilaian penerapan GCG Tahun Buku 2018
 x = Tidak terdapat dalam rekomendasi penilaian penerapan GCG Tahun Buku 2018
 √ = Available in the assessment recommendations for implementing GCG for fiscal year 2018
 x = Not available in the assessment recommendations for implementing GCG for the 2018 fiscal year

Tabel. 6.31
Table. 6.31

Perseroan telah melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sejak tahun 2015 dengan perkembangan hasil atau skor penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus melakukan perbaikan di setiap aspek, khususnya aspek Dewan Komisaris dan Direksi.

The Corporation has been assessing the implementation of GCG since 2015 with the development of GCG assessment results or scores which show an increasing trend. This reflects the Corporation's commitment to continue to make improvements in every aspect, especially aspects of the Board of Commissioners and Directors.

Berikut disampaikan perkembangan hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per aspek sesuai dengan metode penilaian oleh BPKP yang mulai dilakukan Perseroan sejak tahun 2017.

Following is the progress of the results of evaluating the implementation of GCG by aspects according to the method of assessment by BPKP, which began by the Corporation in 2017.

PENCAPAIAN HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PER ASPEK DENGAN METODE PENILAIAN OLEH BPKP

Achievement of Assessment Results of GCG Implementation by Aspect Using The Assessment Method by BPKP

| Tahun <i>Year</i> | Komitmen <i>Commitment</i> | Kebijakan <i>Policy</i> | Pemegang Saham <i>Shareholder</i> | Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | Komite, Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Committee</i> | Direksi <i>Directors</i> | Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Audit Unit</i> | Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i> | Pengungkapan Informasi <i>Information Disclosure</i> | Skor Akhir <i>Final Score</i> | Kategori <i>Category</i> |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------|
| 2019 | 87,33 | 97,49 | 88,11 | 82,23 | 79,73 | 85,14 | 83,22 | 93,88 | 94,25 | 87,33 | "Baik" "Good" |
| 2018 | 84,44 | 93,94 | 88,89 | 78,71 | 84,64 | 78,85 | 82,30 | 90,96 | 91,07 | 85,14 | "Baik" "Good" |
| 2017 | 74,40 | 82,46 | 89,35 | 74,92 | 70,69 | 76,92 | 73,66 | 86,21 | 93,56 | 80,45 | "Baik" "Good" |

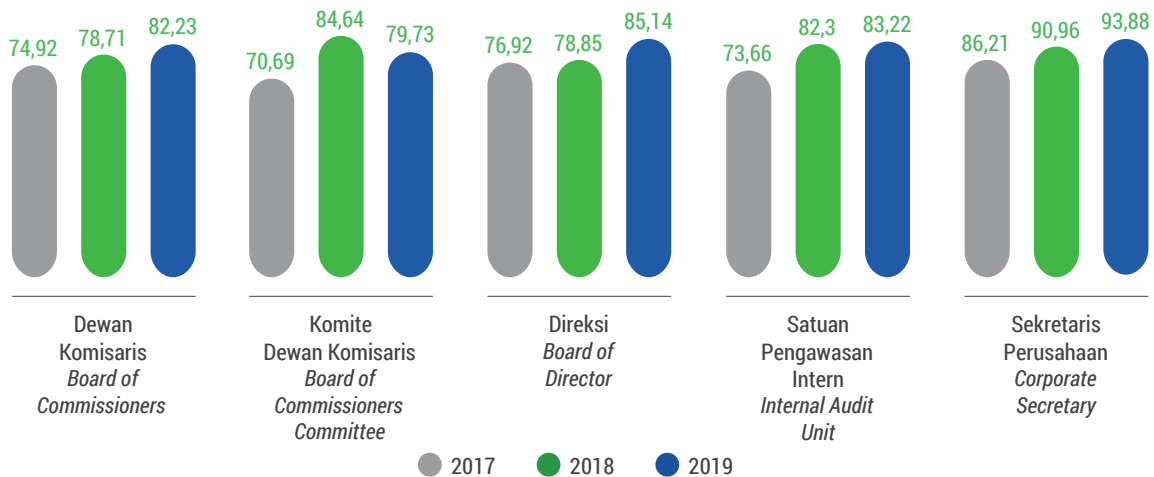
Keterangan: tahun 2015 dan 2016 tidak diikutsertakan karena menggunakan metode penilaian *Self Assessment* oleh Tim Internal Perseroan dengan parameter Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.

Note: 2015 and 2016 were not included because they used the *Self Assessment* method by the Corporate's Internal Team with the parameter of the Ministry of SOE Secretary's Decree No. SK-16 / S.MBU / 2012.

Tabel. 6.32
Table. 6.32

PENCAPAIAN HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PER ASPEK 2017-2019

Achievement of Assessment Results of GCG Implementation by Aspect 2017-2019



Grafik. 6.2
Graphic. 6.2

Aspek Komite Dewan Komisaris mengalami penurunan sebesar 4,91 dari 84,64 di Tahun 2018 menjadi 79,73 di Tahun 2019. Penurunan disebabkan karena belum dilakukan pemutakhiran atas piagam Komite Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners' Committee Aspects decreased by 4.91 from 84.64 in 2018 to 79.73 in 2019. The decline was due to the Board of Commissioners' Committee charter that has yet been updated.

REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

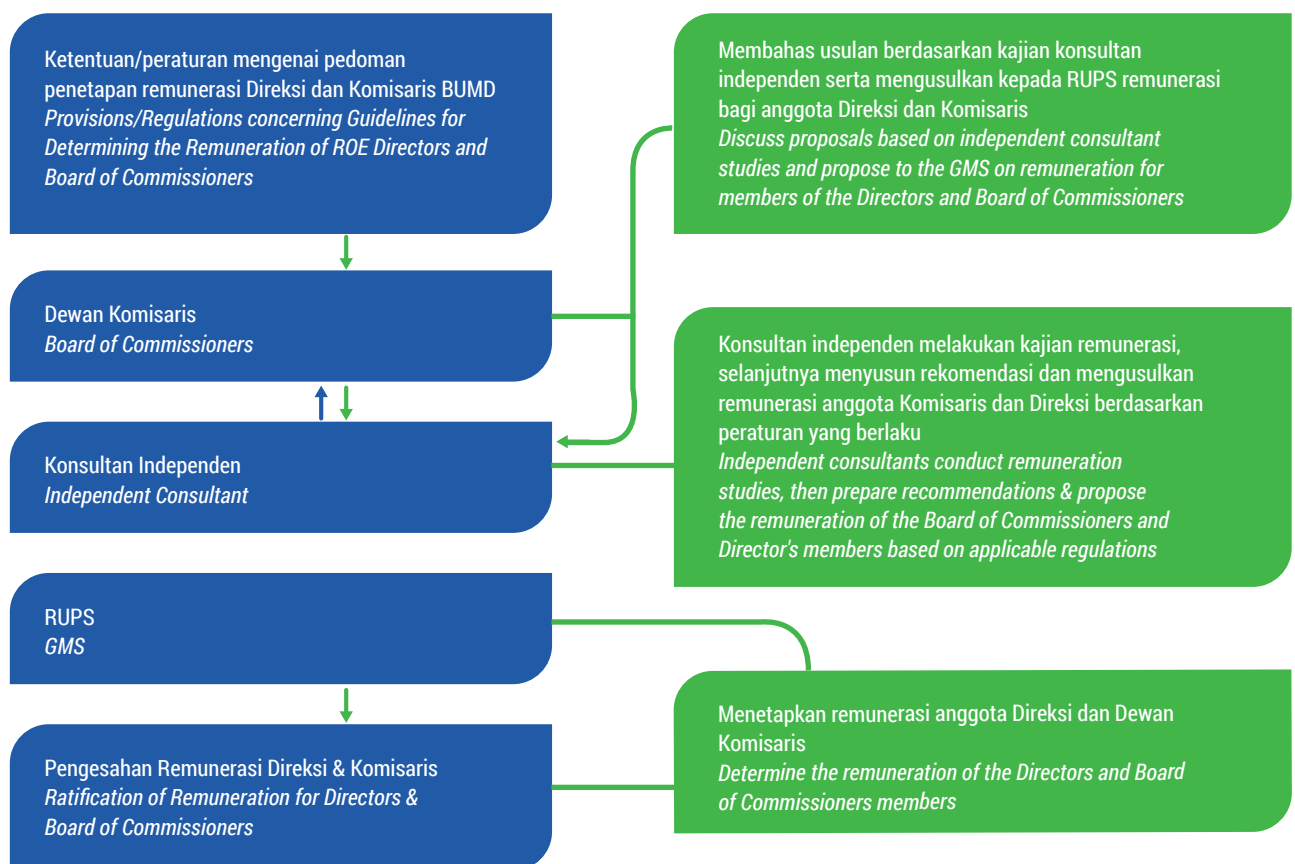
Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Proposal Procedure Until Determination of Remuneration for The Board of Commissioners and Directors

Mekanisme remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, termasuk pemberian uang jasa dan tunjangan purna jabatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas, dan Dewan Komisaris BUMD.

The remuneration mechanism for the members of the Board of Commissioners is determined by the GMS, including the provision of service fees and post-service allowances in accordance with DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 79 of 2019 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Supervisors and Board of Commissioners of ROEs.

Skema pengusulan hingga penetapan remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The proposed scheme to determine the remuneration for the Corporation's Board of Commissioners and Directors can be seen in the chart below.



Figur. 6.7 Skema remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
Figure. 6.7 The Corporate Board of Commissioners and Directors' Remuneration Scheme

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Structure of The Board of Commissioners and Directors

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

1. Remunerasi Dewan Komisaris

- a. Honorarium.
- b. Tunjangan.
- c. Fasilitas.
- d. Tantiem/Insentif Kinerja.

Pajak atas Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.

2. Remunerasi Direksi

- a. Gaji.
- b. Tunjangan.
- c. Fasilitas.
- d. Tantiem/Insentif Kinerja.

Pajak atas Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perseroan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.

Based on the Governor Regulation of the DKI Jakarta Province No. 79 of 2019, the income components of the Board of Commissioners and Directors consist of:

1. Remuneration for the Board of Commissioners

- a. Honorarium.
- b. Allowance.
- c. Facilities.
- d. Performance bonus / incentives.

Taxes on Honorarium, Allowances and Facilities for the Board of Commissioners are borne and borne by the Corporation. Whereas the tax on performance bonus / incentive for the Board of Commissioners is borne by each member of the Board of Commissioners.

2. Remuneration of Directors

- a. Salary.
- b. Allowance.
- c. Facilities.
- d. Performance bonus / incentives.

Taxes on Salaries, Allowances and Facilities for Directors are borne and are borne by the Corporation. Whereas the tax on performance bonus / incentive for the Directors is borne and borne by the Directors.

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan sebagai berikut:

The remuneration structure and its components for the Board of Commissioners and Directors are as follows:

STRUKTUR DAN KOMPONEN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Directors' Remuneration Structure and Component

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Remuneration Structure

Honorarium Dewan Komisaris

Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama.
- Perhitungan gaji Komisaris sebesar 35% dari gaji Direktur Utama.

Board of Commissioners Honorarium

Fixed income in the form of money received each month by members of the Board of Commissioners, with the following conditions:

- The calculation of the salary of the President Commissioner is 45% of the salary of the President Director.
- Commissioner's salary calculation is 35% of the salary of the President Director.

Struktur Remunerasi Direksi

Directors' Remuneration Structure

Gaji Direksi

Penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan rumus perhitungan yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019, serta pedoman internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan sebesar 90% dari Gaji Direktur Utama.

Salary of Directors

Fixed income in the form of money received each month because of his position as a member of the Corporate's Directors, with the following conditions:

- Salary of the President Director is determined by using the calculation formula stated in DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 79 of 2019, as well as internal guidelines for the DKI Jakarta Provincial Government.
- The salary of other members of the Directors is determined by the Position Factor composition of 90% of the Salary of the President Director.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners' Remuneration Structure

Tunjangan Dewan Komisaris

Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium, yang dapat berupa:

- Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya.
- Tunjangan Jabatan, diberikan setiap bulan paling banyak 50% dari honorarium per bulan.
- Tunjangan Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perseroan paling banyak 25% dari honorarium per tahun.

Board of Commissioners' Allowance

Income in the form of money or which can be valued with money received at a certain time by members of the Board of Commissioners in addition to the Honorarium, which can be in the form of:

- *Holiday allowance, is given at most 1 (one) time fixed income per month in each year.*
- *Position allowance, given monthly at most 50% of the honorarium per month.*
- *Retirement Insurance Benefits, provided with the provisions of the premium borne by the Company at most 25% of the annual honorarium*

Fasilitas Dewan Komisaris

Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:

- Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan
- Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.
- Fasilitas Perkumpulan Profesi, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan, dan diberikan dalam bentuk uang pangkal/ pendaftaran dan uang iuran tahunan.
- Fasilitas Perkumpulan Profesi, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan, dan diberikan dalam bentuk uang pangkal/ pendaftaran dan uang iuran tahunan.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang menurut ketentuan perundang-undangan menjalankan fungsi operasional atau yang menjalankan fungsi kepengurusan dan kepenasehatan Perusahaan secara aktif, maka dapat diberikan fasilitas kendaraan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, kepatantasan dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Struktur Remunerasi Direksi
Directors' Remuneration Structure

Tunjangan Direksi

Penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa:

- Tunjangan Hari Raya, paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya.
- Tunjangan Jabatan, diberikan setiap bulan paling banyak 50% dari gaji per bulan.
- Tunjangan Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perseroan paling banyak 25% dari gaji per tahun.
- Tunjangan Cuti Tahunan, diberikan setiap tahun paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan.
- Tunjangan Cuti Besar, diberikan setiap 3 (tiga) tahun paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap per bulan.

Directors' Allowance

Income in the form of money or which can be valued with money received at a certain time by members of the Directors other than Salary, which can be in the form of:

- *Holiday allowance, at most 1 (one) time fixed income per month in each year.*
- *Job allowance, given every month at most 50% of salary per month.*
- *Retirement Insurance Benefits, provided with the provisions of the premium borne by the Corporation at most 25% of salary per year.*
- *Annual leave allowance, given every year at most 1 (one) fixed income per month.*
- *Large leave allowance, given every 3 (three) years at most 2 (two) times a fixed income per month*

Fasilitas Direksi

Penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:

- Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan
- Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan
- Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perseroan.
- Fasilitas Kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai Faktor Jabatan.
- Fasilitas Perkumpulan Profesi, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) perkumpulan, dan diberikan dalam bentuk uang pangkal/pendaftaran dan uang iuran tahunan.
- Fasilitas Club Membership/Corporate Member, diberikan paling banyak untuk 2 (dua) keanggotaan, dan diberikan dalam bentuk uang pangkal/pendaftaran dan uang iuran tahunan

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners' Remuneration Structure

Facilities of the Board of Commissioners

Income in the form of facilities and/or benefits and /or guarantees used / utilized by members of the Board of Commissioners in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of:

- Health facilities, provided in the form of health insurance
- Legal Assistance Facilities, provided if necessary, in the event of actions/actions for and on behalf of his position relating to the Corporation.
- Professional Association facilities, given at most for 2 (two) associations, and are provided in the form of registration / registration and annual fees.
- In the case of members of the Board of Commissioners who according to statutory provisions carry out operational functions or who carry out the Corporation's management and advisory functions actively, vehicle facilities can be given taking into account the principles of efficiency, propriety and financial capability of the Corporation.

Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris

- Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila Perseroan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
- Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila Perusahaan terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris mengikuti Faktor Jabatan, yaitu Komisaris Utama sebesar 45% dari Direktur Utama, dan Komisaris sebesar 35% dari Direktur Utama.

Board of Commissioners Performance / Incentives

- Tantiem is income which is an award given to members of the Board of Commissioners if the Corporation makes a profit and does not experience accumulated losses.
- Performance Incentives are income which is an award given to members of the Board of Commissioners if the Corporation experiences an increase in performance even though there are still losses or accumulated losses.

The composition of the bonus / Performance Incentive for the Board of Commissioners follows the Position Factor, namely the President Commissioner at 45% of the President Director, and the Commissioner of 35% of the President Director.

Struktur Remunerasi Direksi Directors' Remuneration Structure

Directors' Facilities

Income in the form of facilities and/or benefits and/or guarantees used/utilized by members of the Directors in the context of carrying out their duties, authorities, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of:

- Health facilities, provided in the form of health insurance
- Legal Assistance Facilities, provided if necessary, in the vent of actions / actions for and on behalf of his position relating to the Corporation.
- Vehicle Facilities, given as many as 1 (one) unit of official vehicle along with maintenance and operational costs with specifications and standards according to Position Factor.
- Professional Association facilities, given at most for 2 (two) associations, and are provided in the form of registration/ registration and annual fees.
- Club Membership / Corporate Member facilities, given at most for 2 (two) memberships, and are given in the form of registration/registration fees and annual fees

Tantiem Direksi

- Tantiem adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi apabila Perseroan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
- Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila Perusahaan terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.

Komposisi besarnya Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi mengikuti Faktor Jabatan, yaitu anggota Direksi sebesar 90% dari Direktur Utama.

Directors' bonuses

- Tantiem, is income which is an award given to the Directors if the Corporation makes a profit and does not experience accumulated losses.
- Performance incentives, i.e. income which is an award given to members of the Directors if the Corporation's experiences an increase in performance even though there are still losses or accumulated losses.

The composition of the bonuses / Performance Incentives for Directors follows the Position Factor, namely members of the Directors amounting to 90% of the President Director.

Tabel. 6.33
Table. 6.33

Selain struktur dan komponen di atas, Perseroan tidak memberikan remunerasi dalam bentuk lainnya. Perseroan juga tidak memiliki kebijakan opsi saham bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

In addition to the above structures and components, the Corporation does not provide remuneration in any other form. The Corporation also does not have a stock option policy for the Board of Commissioners and Directors.

Kebijakan Dasar Terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019

Basic Policies Regarding Indicators and Determination of Remuneration for The Board of Commissioners and Directors In 2019

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019
- Kinerja Perseroan
- Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi
- Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perseroan
- Regulasi lain yang terkait dengan remunerasi, misalnya Upah Minimum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

The formulation of the structure, policies, and the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors must consider the following matters:

- The prevailing laws and regulations, especially the Governor of DKI Jakarta Province No. 79 of 2019
- Corporate performance
- Work performance of the Board of Commissioners and Directors
- Remuneration applicable in the industry in accordance with the Corporation's business activities that have the same type and scale of business as the Corporation
- Other regulations related to remuneration such as the Minimum Wage and the Labor Law

PERHITUNGAN BESARAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI (SESUAI PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA NO. 79 TAHUN 2019)

Calculation of The Remuneration Amount of The Board of Commissioners and Directors (In Accordance with DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 79 2019)

| | |
|--|---|
| Direktur Utama <i>President Director</i> | 100% |
| Direksi Lainnya <i>Other Directors</i> | Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama <i>90% of President Director salary</i> |
| Komisaris Utama <i>President Commissioner</i> | Sebesar 45% dari gaji Direktur Utama <i>45% of President Director salary</i> |
| Komisaris Lainnya <i>Other Commissioners</i> | Sebesar 35% dari gaji Direktur Utama <i>35% of President Director salary</i> |

Tabel. 6.34
Table. 6.34

Sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1400/-071.241 besarnya gaji yang diterima Direktur Utama sebesar Rp92,569,200. Gaji Direktur Utama tersebut menjadi acuan bagi besaran perhitungan gaji Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 79 Tahun 2019.

In accordance with the Memorandum of Service Plt. The Head of DKI Jakarta Provincial BUMD Development Agency Number 1400 / -071,241 amount of salary received by the President Director amounted to Rp92,569,200. The salary of the President Director becomes a reference for the calculation of salary for the Board of Commissioners and Directors, as stated in DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 79 of 2019.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019*Transparency of Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration in 2019*

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Information on the nominal amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors is as follows:

| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i> | Masa Menjabat di Tahun 2019 <i>Term of Office in 2019</i> | Penghasilan per Bulan <i>Income per Month</i> | | | Jumlah Penghasilan per Bulan <i>Amount of Income per Month</i> | Jumlah Penghasilan per Tahun <i>Amount of Income per Year</i> | Tunjangan Hari Raya <i>Holiday Allowance</i> |
|---|--|--|---|---|---|--|---|
| | | Honorarium (Rp) | Tunjangan Jabatan <i>Allowance</i> (Rp) | Tambahan Penghasilan <i>Extra Income</i> | | | |
| Muhammad Syaugi (Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>) | Juni - Desember <i>June - December</i> | 41.656.200 | 20.828.100 | 8.051.038 | 70.535.300 | 493.747.100 | 0 |
| Rukijto (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | 1 tahun penuh <i>1 year</i> | 32.399.300 | 16.199.650 | 6.261.918 | 54.860.900 | 658.330.800 | 52.729.284 |
| Zulfikri (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | 1 tahun penuh <i>1 year</i> | 32.399.300 | 16.199.650 | 6.261.918 | 54.860.900 | 658.330.800 | 52.729.284 |
| Mukhtasor (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | 1 tahun penuh <i>1 year</i> | 32.399.300 | 16.199.650 | 6.261.918 | 54.860.900 | 658.330.800 | 30.758.749 |
| Adnan Pandu Praja (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | Juni - Desember <i>June-December</i> | 32.399.300 | 16.199.650 | 6.261.918 | 54.860.900 | 384.026.300 | 0 |
| Yusmada Faizal (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | Januari - Mei <i>January - May</i> | 30.978.255 | 15.489.128 | 6.261.901 | 52.729.300 | 263.646.500 | 52.729.284 |
| Erry Riyana Hardjapamekas (Komisaris/ <i>Commissioner</i>)* | | | | | | | |
| Prasetyo Boeditjahjono (Komisaris / <i>Commissioner</i>)* | | | | | | | |
| Jumlah (Rp) <i>Total (Rp)</i> | | | | | | | |

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Remuneration of Board of Commisisoner in 2019

| Asuransi Purna Jabatan Full-Service Insurance | Fasilitas Kesehatan Health Facility | Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility | Fasilitas Perkumpulan Profesi Professional Association Facilities | Fasilitas Kendaraan Vehicle Facilities | Tantiem/ Insentif Kinerja Tantiem / Performance Incentives | Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perseroan Remuneration Tax Borne by the Corporation | Jumlah Remunerasi Tahun 2019 Total Remuneration in 2019 |
|--|---|---|--|---|---|---|--|
| 124.968.600 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | - | 128.854.700 | 747.570.400 |
| 97.197.900 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | - | 236.048.000 | 1.044.305.984 |
| 97.197.900 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | 64.681.627 | 226.245.800 | 1.099.185.411 |
| 97.197.900 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | 16.053.124 | 205.884.500 | 1.082.080.573 |
| 97.197.900 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | 0 | 72.581.000 | 553.805.200 |
| - | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 As Governor Regulation no.79 2019 | 103.605.881 | 40.625.000 | 460.606.66 |
| | | | | | 48.103.495 | | 48.103.495 |
| | | | | | 36.728.977 | | 36.728.977 |
| | | | | | | | 5.046.215.305 |

Tabel. 6.35
Table. 6.35

REMUNERASI DIREKSI TAHUN 2019

Remuneration of Directors in 2019

| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i> | Masa Menjabat di Tahun 2019 <i>Term of Office in 2019</i> | Penghasilan per Bulan <i>Income per Month</i> | | | Jumlah Penghasilan per Bulan <i>Amount of Income per Month</i> | Jumlah Penghasilan per Tahun <i>Amount of Income per Year</i> | Tunjangan Hari Raya <i>Holiday Allowance</i> | Asuransi Purna Jabatan <i>Full-Service Insurance</i> |
|---|--|--|----------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | Honorarium <i>(Rp)</i> | Tunjangan Jabatan <i>(Rp)</i> | Tambahan Penghasilan <i>Extra Income</i> | | | | |
| William P. Sabandar (Direktur Utama/ <i>President Director</i>) | 1 tahun penuh <i>1 year</i> | 92.569.200 | 46.284.600 | 17.891.195 | 156.745.000 | 1.880.940.000 | 150.655.100 | 277.707.600 |
| Silvia Halim (Direktur Konstruksi/ <i>Construction Director</i>) | 1 tahun penuh <i>1 year</i> | 83.312.300 | 41.656.150 | 16.102.076 | 141.070.500 | 1.692.846.000 | 135.589.586 | 249.936.900 |
| Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan/ <i>Director of Operations & Maintenance</i>)* | 1 tahun penuh <i>1 year</i> | 83.312.300 | 41.656.150 | 16.102.076 | 141.070.500 | 1.692.846.000 | 79.093.925 | 249.936.900 |
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis/ <i>Director of Business Development</i>) | 1 tahun penuh <i>1 year</i> | 83.312.300 | 41.656.150 | 16.102.076 | 141.070.500 | 1.692.846.000 | 79.093.925 | 249.936.900 |
| Tuhyat (Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi/ <i>Director of Finance and Corporate Management</i>) | 1 tahun penuh <i>1 year</i> | 83.312.300 | 41.656.150 | 16.102.076 | 141.070.500 | 1.692.846.000 | 135.589.586 | 249.936.900 |
| Agung Wicaksono (Direktur Operasi dan Pemeliharaan/ <i>Director of Operations & Maintenance</i>)* | 1 tahun penuh <i>1 year</i> | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah (Rp) <i>Total (Rp)</i> | | | | | | | | |

| Tunjangan Cuti Tahunan dan/ atau Cuti Besar <i>Annual Leave Allowance and / or Large Leave</i> | Fasilitas Kesehatan <i>Health Facility</i> | Fasilitas Bantuan Hukum <i>Legal Aid Facility</i> | Fasilitas Perkumpulan Profesi <i>Professional Association Facilities</i> | Fasilitas Kendaraan <i>Vehicle Facilities</i> | Tantiem/ Insentif Kinerja <i>Tantiem / Performance Incentives</i> | Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perseroan <i>Remuneration Tax Borne by the Corporation</i> | Jumlah Remunerasi Tahun 2019 <i>Total Remuneration in 2019</i> |
|---|---|---|---|--|--|--|---|
| 313.490.000 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | 299.832.481 | 1.071.452.000 | 3.994.077.181 |
| 282.141.000 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | 269.440.181 | 930.095.900 | 3.560.049.567 |
| 141.070.500 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | SSesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | 44.789.414 | 770.266.700 | 2.978.003.439 |
| 141.070.500 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | 44.750.324 | 780.351.200 | 2.988.048.849 |
| 271.179.172 | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | 268.736.483 | 930.939.500 | 3.549.227.641 |
| - | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | Sesuai Pergub 79 Tahun 2019 <i>As Governor Regulation no.79 2019</i> | 226.678.252 | - | 226.678.252 |
| | | | | | | | 17.296.084.929 |

Tabel. 6.36
Table. 6.36

JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2019*Amount of Remuneration of Board of Commissioner and Directors*

| Uraian <i>Description</i> | Jumlah <i>Amount</i> (Rp) |
|--|---------------------------------|
| Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris <i>Amount of remuneration of Board of Commissioner</i> | 5.046.215.305 |
| Jumlah Remunerasi Direksi <i>Amount of remuneration of Directors</i> | 17.296.084.929 |
| Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2019 <i>Amount of remuneration of Board of Commisisoner and Directors</i> | 22.342.300.234 |

Tabel. 6.37
Table. 6.37**Rasio Gaji**
Salary Ratio

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:

Information regarding the salary ratio of the Board of Commissioners, Directors and Corporate's employees is as follows:

| Perbandingan <i>Comparison</i> | 2019 | 2018 |
|---|----------|----------|
| Direktur Utama terhadap Direktur <i>President Director to Director</i> | 1: 1,11 | 1: 1,11 |
| Direktur Utama terhadap Komisaris Utama <i>President Director to President of Commissioner</i> | 1: 2,22 | 1: 2,19 |
| Direktur Utama terhadap Anggota Dewan Komisaris <i>President Director to Member of Board of Commissioner</i> | 1: 2,86 | 1: 2,82 |
| Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi <i>President Director to highest-salary employee</i> | 1: 1,99 | 1: 2,50 |
| Direktur Utama terhadap Karyawan terendah <i>President Director to lowest-salary employee</i> | 1: 23,49 | 1: 26,79 |
| Karyawan Tertinggi terhadap Karyawan Terendah <i>Highest-salary employee to lowest-salary employee</i> | 1: 11,82 | 1: 10,84 |
| Karyawan Terendah terhadap UMP <i>Lowest-Salary Employee to Provincial Minimum Salary</i> | 1: 1,11 | 1: 1,52 |

Tabel. 6.38
Table. 6.38

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Kepala Divisi *Human Capital*, sementara karyawan terendah adalah *Station Staff*

What is meant by the highest employee in the table above is the Human Capital Division Head, while the lowest employee is the Station Staf

RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DEWAN KOMISARIS YANG MENGUNDANG DIREKSI, DAN RAPAT DIREKSI

BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING, BOARD OF COMMISSIONERS' MEETING INVITING THE DIRECTORS AND THE DIRECTORS' MEETING

SESUAI BOARD MANUAL YANG DIMILIKI PERSEROAN, RAPAT DEWAN KOMISARIS TERDIRI DARI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS YANG HANYA DIHADIRI OLEH ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN MENGUNDANG DIREKSI.

In accordance with the Board Manual owned by the Corporation, the Board of Commissioners Meeting consists of an Internal Board of Commissioners Meeting which is only attended by Members of the Board of Commissioners and Board of Commissioners Meeting by inviting the Directors.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meetings

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali di setiap bulannya, yang dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu. Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.

Secara umum agenda rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja Perseroan
2. Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perseroan dan RKAP
3. Menindaklanjuti temuan Auditor Internal
4. Menindaklanjuti temuan Auditor serta penilai eksternal
5. Melakukan koordinasi dengan komite-komite di bawahnya
6. Melakukan pembahasan terkait hal-hal yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris
7. Agenda lainnya yang masih menjadi kewenangan organ Dewan Komisaris.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, publikasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang diundang dalam menghadiri rapat. Sebagai bentuk persiapan Perseroan dalam menjalankan sistem dan mekanisme tata kelola yang baik, di awal tahun Perseroan telah melakukan

Board of Commissioners meetings are held at least once a month, which can be held at any time if deemed necessary. Decisions of the Board of Commissioners' Meeting are adopted by consensus. If no agreement is reached then the decision is taken by voting, based on a vote of at least more than ½ (one-half) of the total votes cast at the meeting. Minutes of Meeting are made and administered by the Board of Commissioners' Secretary or other official appointed by the Board of Commissioners and gives copies to all meeting participants. If there are Members of the Board of Commissioners who have different opinions on decisions made, then that opinion must be included in the minutes of the meeting as a form of dissenting opinion.

In general, the agenda of the meeting held by the Board of Commissioners discusses:

1. Evaluate Corporate Performance
2. Discussion of the Corporation's long-term plan and RKAP
3. Following up on the findings of the Internal Auditor
4. Following up on the findings of the Auditor and External Assessor
5. Coordinate with the committees under it
6. Discussing matters that require the approval of the Board of Commissioners
7. Other agenda which is still the authority of the Board of Commissioners' Organs.

Based on the provisions contained in the Board Manual, the publication of the plan to conduct a Board of Commissioners meeting shall be made no later than 3 (three) days before the date of implementation. The publication is informed of the date and time of the meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting and the parties invited to attend the meeting. As a form of preparation of the Corporation in carrying out the system and mechanism of good governance, at the beginning of the year the Corporation has conducted the preparation and determination of an annual

penyusunan dan penetapan jadwal tahunan yang turut mencatumkan waktu-waktu pelaksanaan rapat termasuk rencana rapat Dewan Komisaris. Informasi rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti Divisi Internal Audit dan Divisi-Divisi yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental, publikasi dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku.

Dalam menjamin terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas, risalah pelaksanaan rapat (dalam hal ini rapat Dewan Komisaris) didokumentasikan secara baik yang memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat, serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat anggota Dewan Komisaris yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari *dissenting opinion*.

Masyarakat dapat memperoleh risalah rapat internal Dewan Komisaris sepanjang Tahun Buku pelaporan dalam Laporan Tahunan Perseroan pada bab pembahasan Tata Kelola Perusahaan.

Sebagai bentuk akuntabilitas Perseroan terkait dengan pendokumentasian aktivitas tata kelola yang dijalankan, Perseroan memiliki kebijakan umum yang mewajibkan dilakukannya pembuatan risalah rapat pada rapat internal Dewan Komisaris maupun Rapat Gabungan dengan mengundang Direksi. Setelahnya, risalah tersebut juga diwajibkan untuk diadministrasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diberikan salinannya kepada peserta rapat. Penyusunan risalah laporan tahunan Perseroan, telah memenuhi prosedur penyusunan risalah rapat oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang meliputi pemenuhan kebijakan umum terkait aspek prosedural dan administrasi serta rapat yang menggambarkan jalannya rapat.

Di sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris mengadakan Rapat Internal Dewan Komisaris tanpa mengundang Direksi dan/atau Unit Kerja sebanyak 6 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

schedule (calendar event) which also includes the times of the implementation of the meeting including the Board of Commissioners meeting plan. Information on the planned implementation of the meeting has also been widely distributed to related parties such as the Secretary of the Board of Commissioners, the Corporate Secretary and other organs such as the Internal Audit Division and the existing Divisions. In the event that a proposed meeting that is incidental, the publication can be carried out as effectively and efficiently as possible while still following the applicable documentation.

Documentation of Meeting Results In ensuring the implementation of the principles of transparency and accountability, minutes of meeting implementation (in this case Board of Commissioners' meetings) are well documented which includes discussions on the agenda of the meeting, dissenting opinions and decisions made. Documentation of the meeting was then signed by the leadership and all meeting participants present and distributed according to its designation.

Decisions of the Board of Commissioners' Meeting are adopted by consensus. If no agreement is reached then the decision is taken by voting, based on a vote of at least more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total votes cast at the meeting. Minutes of Meeting are made and administered by the Board of Commissioners' Secretary or other official appointed by the Board of Commissioners and gives copies to all meeting participants. If there are Members of the Board of Commissioners who have different opinions on decisions made, then that opinion must be included in the minutes of the meeting as a form of dissenting opinion.

The public can obtain minutes of internal meetings of the Board of Commissioners throughout the reporting year in the Corporation's Annual Report in the chapter on Corporate Governance discussions.

As a form of corporate accountability related to documenting governance activities carried out, the Corporation has a general policy that requires the making of minutes of meetings at internal meetings of the Board of Commissioners and Joint Meetings by inviting the Directors. After that, the minutes are also required to be administered by the Secretary of the Board of Commissioners or other appointed official to provide a copy to the meeting participants. The preparation of the minutes of the Corporation's annual report has complied with the procedure for preparing minutes of meeting by the Secretary of the Board of Commissioners which includes the fulfillment of general policies related to procedural and administrative aspects as well as meetings that describe the course of the meeting.

Throughout 2019, the Board of Commissioners held Internal Meetings of the Board of Commissioners without inviting the Directors and / or Work Units 6 times. The following is the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the attendance of the Board of Commissioners at these meetings.

JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2019

Amount of Remuneration of Board of Commissioner and Directors

| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Amount of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Amount of Attendance</i> | Tidak Hadir <i>Absent</i> | Kehadiran <i>Presence (%)</i> |
|---|--|---|------------------------------|----------------------------------|
| Muhammad Syaugi (Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>)* | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Rukijo (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | 6 | 5 | 1 | 83,3% |
| Zulfikri (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | 6 | 5 | 1 | 83,3% |
| Mukhtasor (Komisaris/ <i>Commissioner</i>) | 6 | 6 | 0 | 100% |
| Adnan Pandu Praja (Komisaris/ <i>Commissioner</i>)* | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Yusmada Faizal (Komisaris/ <i>Commissioner</i>)** | 2 | 0 | 2 | 0% |
| Rata-rata <i>Average</i> | | | | 77,8% |

*) Muhammad Syaugi dan Adnan Pandu Praja duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 31 Mei 2019.

***) Yusmada Faizal tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 31 Mei 2019.

*) *Muhammad Syaugi and Adnan Pandu Praja sit on the Board of Commissioners since 31 May 2019.*

***) *Yusmada Faizal no longer serves on the Board of Commissioners since 31 May 2019.*

Tabel. 6.39

Table. 6.39

RISALAH RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS DAN KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

Minutes of Internal Meeting of The Board of Commissioners and The Presence of The Board of Commissioners

| No. | Tanggal <i>Date</i> | Tempat <i>Place</i> | Agenda Rapat <i>Agenda of Meeting</i> | Peserta Rapat <i>Attendant</i> |
|-----|---|--|--|-----------------------------------|
| 1. | Selasa, 29 Januari 2019 <i>Tuesday, January 29, 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 23 <i>Jakarta Wisma Nusantara MRT Office 23rd Floor</i> | 1. Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2019 2. Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris tahun 2018 <i>1. Determination of the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners in 2019 2. Report on the Implementation of the Duties of the Board of Commissioners in 2018</i> | Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor |

| No. | Tanggal | Tempat Place | Agenda Rapat Agenda of Meeting | Peserta Rapat Attendat |
|-----|---|--|--|---|
| 2. | Jumat, 15 Maret 2019 <i>Friday, March 15, 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 23 <i>Jakarta Wisma Nusantara MRT Office 23rd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian tugas antar Dewan Komisaris 2. Perpanjangan periode penugasan Sekretaris Dewan Komisaris; 3. Rencana pembentukan Komite Pengembangan Usaha dan KBT <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The division of tasks between the Board of Commissioners</i> 2. <i>Extension of the appointment period of the Secretary of the Board of Commissioners;</i> 3. <i>Plans for the establishment of a Business Development Committee and TOD</i> | Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor |
| 3. | Rabu, 31 Juli 2019 <i>Wednesday, 31 July 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 23 <i>Jakarta Wisma Nusantara MRT Office 23rd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan bidang-bidang yang kritikal untuk dilakukan pengawasan dan pemberian nasihat; 2. Evaluasi capaian Dewan Komisari semester 1 tahun 2019; 3. Pembagian tugas tim Dewan Komisaris yang baru; 4. Pembuatan daftar prioritas pengawasan berdasarkan KPI Dewan Komisaris <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Determination of critical areas for supervision and advice;</i> 2. <i>Evaluation of the achievements of the Board of Commissioners of semester 1 of 2019;</i> 3. <i>The division of duties of the new Board of Commissioners team;</i> 4. <i>Making a list of priority priorities based on the KPI of the Board of Commissioners</i> | Muhammad Syauqi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja |
| 4. | Senin, 28 Oktober 2019 <i>Monday, 28 October 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Jakarta Wisma Nusantara MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan mengenai mekanisme rapat dan pemberdayaan anggota Komite; 2. Mekanisme korespondensi Dewan Komisaris ke Direksi dalam mengawal isu-isu penting; 3. Evaluasi penyusunan RKAP tahun 2020; 4. Daftar tindak lanjut yang harus disiapkan Direksi untuk mencapai KPI Korporasi 2019 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Direction on the mechanism for meeting and empowering Committee members;</i> 2. <i>Correspondence mechanism of the Board of Commissioners to the Directors in overseeing important issues;</i> 3. <i>Evaluation of the preparation of the 2020 RKAP;</i> 4. <i>A list of follow-up actions that must be prepared by the Directors to reach the Corporate KPI 2019</i> | Muhammad Syauqi, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja |

| No. | Tanggal | Tempat Place | Agenda Rapat Agenda of Meeting | Peserta Rapat Attendat |
|-----|--|--|---|---|
| 5. | Jumat, 15 Maret 2019 <i>Friday, March 15, 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Jakarta Wisma Nusantara MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan <i>platform</i> bisnis Perseroan dalam rangka penerapan GCG; 2. Evaluasi peran Dewan Komisaris dalam penerapan GCG di Perseroan <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strengthening the corporate's business platform in the context of implementing GCG;</i> 2. <i>Evaluate the role of the Board of Commissioners in implementing GCG in the Corporation.</i> | Muhammad Syaugi, Rukijo, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja |
| 6. | Senin, 9 Desember 2019 <i>Monday, 9 December 2019</i> | Ruang Ekspansi BP BUMD DKI Jakarta DKI BUMD <i>Expansion Room</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi proses pembayaran <i>Variance Order, Financing Charges, dan Price Adjustment</i> untuk konstruksi fase 1; 2. Arahan Dewan Komisaris untuk pembentukan 2 anak perusahaan dan 1 perusahaan ventura bersama dengan PT KAI; 3. Arahan untuk operasi kereta menghadapi libur sekolah, Natal, dan tahun baru; 4. Penetapan tanda tangan pakta integritas seluruh karyawan untuk tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Evaluate the payment process for Variance Orders, Financing Charges, and Price Adjustments for phase 1 construction;</i> 2. <i>Direction from the Board of Commissioners for the establishment of 2 subsidiaries and 1 Joint Venture corporate with PT KAI;</i> 3. <i>Direction for train operations facing school holidays, Christmas and New Year;</i> 4. <i>Determination of the integrity pact signature of all employees for 2020</i> | Muhammad Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja |

Tabel. 6.40
Table. 6.40

RAPAT GABUNGAN: RAPAT DEWAN KOMISARIS DENGAN MENGUNDANG DIREKSI

JOINT MEETING: BOARD OF COMMISSIONERS MEETING BY INVITING DIRECTORS

Seperti yang telah disebutkan di atas, Rapat Dewan Komisaris juga dilakukan dengan mengundang Direksi. Secara umum agenda rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi membahas tentang:

- Evaluasi Kinerja Keuangan dan Operasional Perseroan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
- Pembahasan dan penetapan RKAP.
- Evaluasi dan rekomendasi Komite-Komite di bawah Direksi.
- Persiapan pelaksanaan RUPS.
- Agenda lain yang menjadi kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi

Informasi mengenai rencana pelaksanaan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat. Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti SPI dan departemen-departemen yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental, publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Di tahun 2019, rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan 12 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

As mentioned above, the Board of Commissioners Meeting is also held by inviting the Directors. In general, the Agenda of joint Board of Commissioners and Directors meetings discusses:

- Evaluation of the Corporate's Financial and Operational Performance (monthly, quarterly, semester and yearly).
- Discussion and Determination of RKAP.
- Evaluation and Recommendations of Committees Under the Directors.
- Preparations for the implementation of the GMS.
- Other agendas under the authority of the Board of Commissioners and Directors

Information regarding the planned implementation of the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors is carried out no later than 7 (seven) days prior to the implementation schedule. In the publication, informed of the date and time of the meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting and the parties to the meeting participants. Information about the planned implementation of the meeting has also been widely distributed to related parties such as the Corporate Secretary and other organs such as the SPI and existing Departments. In the event that a proposed meeting that is incidental to the publication be made can be carried out as effectively and efficiently as possible while still following the applicable documentation procedures (making minutes).

In 2019, joint meetings between the Board of Commissioners and the Directors were held 12 times. The following is the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the attendance of the Board of Commissioners and Directors in these meetings.

REKAPITULASI KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN

Recapitulation of The Presence of The Board of Commissioner and Board of Directors at The Join Meeting

| Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners & Board of Directors</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Amount of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Amount of Attendance</i> | Tidak Hadir <i>Absent</i> | % Kehadiran <i>% Presence</i> |
|---|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | | | | |
| Muhammad Syaugi (Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>)* | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Rukijo (Komisaris <i>Commissioner</i>) | 12 | 11 | 1 | 91,7% |
| Zulfikri (Komisaris <i>Commissioner</i>) | 12 | 11 | 1 | 91,7% |
| Mukhtasor (Komisaris <i>Commissioner</i>) | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
| Adnan Pandu Praja (Komisaris <i>Commissioner</i>)* | 7 | 6 | 1 | 85,7% |
| Yusmada Faizal (Komisaris <i>Commissioner</i>)** | 5 | 4 | 1 | 80,0% |

| Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners & Board of Directors</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Amount of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Amount of Attendance</i> | Tidak Hadir <i>Absent</i> | % Kehadiran <i>% Presence</i> |
|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| Direksi <i>Board of Directors</i> | | | | |
| William P. Sabandar (Direktur Utama <i>President Director</i>) | 12 | 11 | 1 | 91,7% |
| Silvia Halim (Direktur Konstruksi <i>Director of Construction</i>) | 12 | 10 | 2 | 83,3% |
| Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Director of Operations & Maintenance</i>) | 12 | 11 | 1 | 91,7% |
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>) | 12 | 10 | 2 | 83,3% |
| Tuhayat (Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Finance & Corporate Management</i>) | 12 | 11 | 1 | 91,7% |
| Rata-rata <i>Average</i> | | | | 90,1% |

*) Muhammad Syaugi dan Adnan Pandu Praja duduk dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 31 Mei 2019.

**) Yusmada Faizal tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris sejak tanggal 31 Mei 2019.

*) Muhammad Syaugi and Adnan Pandu Praja started serving in Board of Commissioners since May 31, 2019

**) Yusmada Faizal no longer served in Board of Commissioners since May 31, 2019

Tabel 6.40
table 6.40

RISALAH RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SERTA KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PADA RAPAT GABUNGAN

Minutes of Join Meeting of The Board of Commissioners and Directors as well as The Presence of The Board of Commissioner and Directors at The Joint Meeting

| No | Tanggal <i>Date</i> | Tempat <i>Place</i> | Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i> | Peserta Rapat <i>Participant</i> |
|----|--|--|--|---|
| 1. | Selasa 29 Januari 2019 <i>Tuesday, January 29th 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> Persiapan operasi komersial MRT Jakarta; Progres pekerjaan konstruksi Fase 1; Integrasi dengan Transjakarta; Pengelolaan kawasan sekitar stasiun MRT Jakarta; Persiapan pembentukan anak perusahaan MRT Jakarta; Persiapan <i>Groundbreaking</i> Fase 2 | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> Rukijo, Zulfikri, Yusmada Faizal, Mukhtasor</p> <p>Direksi <i>Director:</i> William Sabandar, Tuhayat, Silvia Halim, M. Effendi, Ghamal Peris</p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|--|---|---|---|
| 2. | Jumat 22 Februari 2019 Friday, February 22 nd 2019 | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22 nd Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan operasi komersial MRT Jakarta; 2. Pengelolaan kawasan sekitar stasiun MRT Jakarta; 3. Persiapan pembentukan anak perusahaan MRT Jakarta; 4. Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS LB; 5. Penetapan tarif listrik untuk operasi MRT Jakarta; 6. Alih fungsi jalan Kendal di area Stasiun Dukuh Atas. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Preparation of Jakarta MRT commercial operations;</i> 2. <i>Management of the area around the Jakarta MRT station;</i> 3. <i>Preparation for the establishment of a Jakarta MRT subsidiary;</i> 4. <i>Preparation for the Annual General Meeting of Shareholders and LB General Meeting of Shareholders;</i> 5. <i>Stipulation of electricity tariffs for Jakarta MRT operations;</i> 6. <i>Transfer of the Kendal road in the Upper Dukuh Station area.</i> | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> Rukijo, Zulfikri, Yusmada Faizal, Mukhtasor</p> <p>Direksi <i>Director:</i> William Sabandar, Tuhayat, Silvia Halim, M. Effendi, Ghamal Peris</p> |
| 3. | Jumat 15 Maret 2019 Friday, March 15 th 2019 | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22 nd Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan operasi komersial MRT Jakarta; 2. Persiapan RUPS Tahunan dan RUPS LB; <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Preparation of Jakarta MRT commercial operations;</i> 2. <i>Preparation for the Annual General Meeting and General Meeting of Shareholders;</i> | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> Rukijo, Zulfikri, Yusmada Faizal, Mukhtasor</p> <p>Direksi <i>Director:</i> William Sabandar, Tuhayat, Silvia Halim, M. Effendi, Ghamal Peris</p> |
| 4. | Jumat, 26 April 2019 Friday, April 26 th 2019 | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22 nd Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian konstruksi Fase 1; 2. Persiapan pelaksanaan konstruksi Fase 2 3. Evaluasi pembukaan operasi komersial MRT Jakarta; 4. Perkembangan aspek pengusahaan dan KBT MRT Jakarta; <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Completion of Phase 1 construction;</i> 2. <i>Preparation for the implementation of Phase 2 construction;</i> 3. <i>Evaluation of the opening of Jakarta MRT commercial operations;</i> 4. <i>The development of the aspects of business and TOD MRT Jakarta;</i> | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor</p> <p>Direksi <i>Director:</i> William Sabandar, Silvia Halim, M. Effendi</p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|---|--|---|---|
| 5. | Rabu, 29 Mei 2019 <i>Wednesday, May 29th 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian konstruksi Fase 1; 2. Persiapan pelaksanaan konstruksi Fase 2; 3. Evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta; 4. Perkembangan aspek pengusahaan dan KBT MRT Jakarta; 5. Laporan Keuangan dan Anggaran MRT Jakarta 6. Evaluasi pengamanan MRT Jakarta dengan situasi terkini; 7. Monitoring pelaksanaan Program Unggulan Strategis Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Completion of Phase 1 construction;</i> 2. <i>Preparation for the implementation of phase II construction;</i> 3. <i>Evaluation of the operation and maintenance of Jakarta MRT;</i> 4. <i>The development of the aspects of business and TOD MRT Jakarta;</i> 5. <i>Jakarta MRT Financial and Budget Reports;</i> 6. <i>Evaluate the security of the Jakarta MRT with the current situation;</i> 7. <i>Monitoring the implementation of the Regional Strategic Featured Program.</i> | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> Rukijo, Zulfikri, Yusmada Faizal, Mukhtasor</p> <p>Direksi <i>Director:</i> William Sabandar, Tuhiyat, Silvia Halim, M. Effendi, Ghamal Peris</p> |
| 6. | Jumat, 28 Juni 2019 <i>Friday, June 28th 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian konstruksi Fase I; 2. Persiapan pelaksanaan konstruksi Fase II; 3. Evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta; 4. Perkembangan aspek pengusahaan dan KBT MRT Jakarta; 5. Laporan Keuangan dan Anggaran MRT Jakarta 6. Evaluasi pengamanan MRT Jakarta dengan situasi terkini; 7. Monitoring pelaksanaan Program Unggulan Strategis Daerah. <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Completion of Phase 1 construction;</i> 2. <i>Preparation for the implementation of phase II construction;</i> 3. <i>Evaluation of the operation and maintenance of Jakarta MRT;</i> 4. <i>The development of the aspects of business and TOD MRT Jakarta;</i> 5. <i>Jakarta MRT Financial and Budget Reports;</i> 6. <i>Evaluate the security of the Jakarta MRT with the current situation;</i> 7. <i>Monitoring the implementation of the Regional Strategic Featured Program.</i> | <p>Komisaris/ <i>Commissioner:</i> M. Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi/ <i>Director:</i> William Sabandar, Tuhiyat, Silvia Halim, M. Effendi, Ghamal Peris</p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|--|--|--|---|
| 7. | Rabu, 31 Juli 2019 <i>Wednesday, July 31st 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian konstruksi Fase 1; 2. Persiapan pelaksanaan konstruksi Fase 2; 3. Evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta; 4. Perkembangan aspek pengusahaan dan KBT MRT Jakarta; 5. Laporan Keuangan dan Anggaran MRT Jakarta 6. Evaluasi pengamanan MRT Jakarta dengan situasi terkini; 7. Monitoring pelaksanaan Program Unggulan Strategis Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Completion of Phase 1 construction;</i> 2. <i>Preparation for the implementation of phase II construction;</i> 3. <i>Evaluation of the operation and maintenance of Jakarta MRT;</i> 4. <i>The development of the aspects of business and TOD MRT Jakarta;</i> 5. <i>Jakarta MRT Financial and Budget Reports;</i> 6. <i>Evaluate the security of the Jakarta MRT with the current situation;</i> 7. <i>Monitoring the implementation of the Regional Strategic Featured Program.</i> | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> M. Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Director:</i> William Sabandar, Tuhayat, Silvia Halim, M. Effendi</p> |
| 8. | Selasa, 27 Agustus 2019 <i>Tuesday, August 27th 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi capaian KPI Direksi semester I tahun 2019; 2. Monitoring penyusunan RKAP tahun 2020; 3. Laporan pengelolaan proyek konstruksi Fase 1 dan Fase 2; 4. Laporan pengelolaan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta; 5. Laporan pengelolaan pengembangan bisnis MRT Jakarta; 6. Laporan pengelolaan kinerja keuangan Perseroan MRT Jakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring and evaluation of the achievements of the KPI Directors of the first semester of 2019;</i> 2. <i>Monitoring the preparation of the RKAP in 2020;</i> 3. <i>Report on the management of construction projects Phase 1 and Phase 2</i> 4. <i>Report on the operation and maintenance of the Jakarta MRT;</i> 5. <i>Report on the management of the Jakarta Management report on the financial</i> 6. <i>Performance of the Jakarta MRT company</i> | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> M. Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Director:</i> William Sabandar, Tuhayat, Silvia Halim, Ghamal Peris</p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|---|---|---|---|
| 9. | Kamis, 26 September 2019 <i>Thursday, September 26th 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi insiden <i>blackout listrik</i> pada operasi MRT Jakarta dan usaha perbaikan ke depan; 2. Laporan <i>Top Risk</i> Perseroan; 3. Laporan pengelolaan proyek konstruksi Fase 1 dan Fase 2; 4. Laporan pengelolaan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta; 5. Laporan pengelolaan pengembangan bisnis MRT Jakarta; 6. Laporan pengelolaan kinerja keuangan Perseroan MRT Jakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Evaluate the incidence of electric blackout in Jakarta MRT operations and future improvement efforts;</i> 2. <i>The Corporate's top risk report;</i> 3. <i>Report on the management of construction projects Phase 1 and Phase 2;</i> 4. <i>Report on the operation and maintenance of the Jakarta MRT;</i> 5. <i>Report on the management of the Jakarta MRT business development;</i> 6. <i>Management report on the financial performance of the Jakarta MRT company;</i> | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> M. Syaugi, Rukijo, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Director:</i> William Sabandar, Tuhiyat, M. Effendi, Ghamal Peris</p> |
| 10. | Selasa, 29 Oktober 2019 <i>Tuesday, October 29th 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi keluhan pelanggan dan tindak lanjut inspeksi terowongan; 2. Laporan <i>Top Risk</i> Perseroan; 3. Laporan pengadaan paket proyek konstruksi Fase 2; 4. Evaluasi penyusunan RKAP tahun 2020 5. Laporan pengelolaan operasi dan pemeliharaan MRT Jakarta; 6. Laporan pengelolaan pengembangan bisnis MRT Jakarta; 7. Laporan pengelolaan kinerja keuangan Perseroan MRT Jakarta; <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Evaluate customer complaints and follow up on tunnel inspection;</i> 2. <i>The Corporate's top risk report;</i> 3. <i>Report on procurement of Phase 2 construction project packages;</i> 4. <i>Evaluation of the preparation of the 2020 RKAP</i> 5. <i>Reports on the operation and maintenance of the Jakarta MRT;</i> 6. <i>Report on the management of the Jakarta MRT business development;</i> 7. <i>Management report on the financial performance of the Jakarta MRT company;</i> | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> M. Syaugi, Rukijo, Mukhtasor, Adnan PanduPraja</p> <p>Direksi <i>Director:</i> WilliamSabandar, Tuhiyat, M. Effendi, Ghamal Peris</p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|---|--|--|---|
| 11. | Rabu, 27 November 2019 <i>Wednesday, November 27th 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pelaksanaan RUPS LB 2019; 2. Evaluasi pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi Fase 2; 3. Evaluasi rencana pembentukan anak perusahaan dan JV; 4. Evaluasi pelaksanaan operasi khususnya jumlah pengguna jasa MRT Jakarta; 5. Evaluasi rencana serapan anggaran RKAP hingga akhir tahun 2019; 6. Laporan pengelolaan pengembangan bisnis MRT Jakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Preparations for the 2019 LB RUPS;</i> 2. <i>Evaluation of the implementation of the construction Phase 2 construction projects;</i> 3. <i>Evaluate the plan to form a subsidiary and JV;</i> 4. <i>Evaluation of operations, especially the number of Jakarta MRT passengers;</i> 5. <i>Evaluate the planned absorption of the RKAP budget until the end of 2019;</i> 6. <i>Report on the management of the Jakarta MRT business development;</i> | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> M. Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor</p> <p>Direksi <i>Director:</i> WilliamSabandar, Tuhayat, Silvia Halim, M. Effendi, Ghamal Peris</p> |
| 12. | Senin, 30 Desember 2019 <i>Monday, December 30th 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 22 <i>Wisma Nusantara Jakarta MRT Office 22nd Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut korespondensi internal Dewan Komisaris ke Direksi; 2. Evaluasi pengawasan KPI korporasi tahun 2019 melalui <i>IT Dashboard</i>; 3. Laporan <i>top risk</i> akhir tahun 2019; 4. Persiapan pembentukan anak perusahaan dan JV; 5. Laporan akhir tahun pengelolaan aspek konstruksi Perseroan; 6. Laporan akhir tahun pengelolaan aspek operasi & pemeliharaan Perseroan; 7. Laporan akhir tahun pengelolaan pengembangan bisnis Perseroan; 8. Laporan akhir tahun kinerja keuangan Perseroan dan serapan RKAP 2019; <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Follow up on the internal correspondence of the Board of Commissioners to the Directors;</i> 2. <i>Evaluation of corporate KPI supervision in 2019 through the IT Dashboard;</i> 3. <i>Top risk report at the end of 2019;</i> 4. <i>Preparation for the establishment of a subsidiary and JV</i> 5. <i>End of year report on management aspects of the Corporate's construction;</i> | <p>Komisaris <i>Commissioner:</i> M. Syaugi, Rukijo, Zulfikri, Mukhtasor, Adnan Pandu Praja</p> <p>Direksi <i>Director:</i> Tuhayat, Silvia Halim, M. Effendi, Ghamal Peris</p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|-----------------|-----------------|---|------------------------------|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 6. Year-end report on management of the Corporate's operations & maintenance aspects; 7. End of year report on the management of the Corporate's business development; 8. Year-end report of the Corporate's financial performance and 2019 RKAP uptake | |

Tabel 6.41
Table 6.41

RAPAT DIREKSI DIRECTORS MEETING

Rapat Direksi diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di setiap bulannya, yang dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu. Secara umum agenda rapat yang diselenggarakan Direksi membahas tentang:

- Laporan Manajemen mengenai Kinerja Keuangan dan Operasional Perseroan.
- Pembahasan persiapan RUPS.
- Pembahasan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan & RKAP.
- Menindaklanjuti temuan SPI.
- Agenda lainnya yang masih menjadi kewenangan organ Direksi.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) publikasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Direksi selambat-lambatnya dilakukan 3 hari sebelum tanggal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang diundang dalam menghadiri rapat.

Sebagai bentuk persiapan Perseroan dalam menjalankan sistem dan mekanisme tata kelola yang baik, di awal tahun Perseroan telah melakukan penyusunan dan penetapan jadwal tahunan (*calendar event*) yang turut mencatumkan waktu-waktu pelaksanaan rapat termasuk rencana rapat Direksi. Informasinya tentang rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan dan organ-organ terkait lainnya seperti SPI dan divisi-divisi yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental, publikasi dilakukan dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Keputusan rapat Direksi ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju seimbang, maka ketua rapat Direksi yang menentukan. Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi dan

Meetings of the Directors are held at least 1 (one) time each month, which can be held at any time if deemed necessary. In general, the agenda of the meeting held by the Directors discusses:

- *Management Reports on Financial and Operational Performance of the Corporation.*
- *Discussion on the preparation of the GMS.*
- *Discussion on the preparation of the Corporation's Long Term Plan & RKAP.*
- *Following up on SPI's findings.*
- *Other agendas that are still under the authority of the Directors.*

Based on the provisions contained in the Corporate Governance Guidelines (Code of Corporate Governance) publication regarding the plan to conduct a Directors meeting no later than 3 days before the implementation date. The publication is informed of the date and time of the meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting and the parties invited to attend the meeting.

As a form of preparation for the Corporation in carrying out the system and mechanism of good governance, at the beginning of the year the Corporation has conducted the preparation and determination of an annual schedule (calendar event) which also includes the times for the implementation of meetings including the Directors' meeting plans. The information on the plan for holding the meeting has also been widely distributed to related parties such as the Corporate Secretary and other relevant organs such as the SPI and existing Divisions. In the event that a proposed meeting that is incidental to the publication be made can be carried out as effectively and efficiently as possible while still following the applicable documentation procedures (making minutes).

Decisions of the Directors' Meetings are determined by deliberation to reach consensus. If no agreement is reached then the decision is taken by voting, based on a vote of at least more than ½ (one-half) of the total votes cast at the meeting. If the votes that agree and disagree are balanced, then the chair of the Directors' meeting decides. Minutes of Meeting are made and administered by the Corporate Secretary or other official appointed by the Directors and gives copies to all meeting participants. If there are

memberikan salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat anggota Direksi yang mempunyai pendapat yang berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari perbedaan pendapat.

Hasil pelaksanaan rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang didokumentasikan secara baik, memuat pembahasan-pembahasan atas agenda rapat, perbedaan pendapat, serta keputusan yang ditetapkan. Dokumentasi rapat kemudian ditandatangani oleh pimpinan dan seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan sesuai peruntukannya.

Risalah Rapat dibuat dan diadministrasikan oleh Sekretaris Perusahaan dan memberikan salinannya kepada semua peserta rapat. Jika terdapat anggota Direksi yang mempunyai pendapat berbeda terhadap keputusan yang dibuat, maka pendapat tersebut harus dicantumkan dalam risalah rapat sebagai bentuk dari perbedaan pendapat.

Laporan ringkasan risalah rapat Direksi telah memenuhi ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum, serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk *dissenting opinion* atau pendelegasian pimpinan rapat jika Direktur Utama berhalangan hadir dalam rapat.

Di sepanjang tahun 2019, Direksi melaksanakan rapat sebanyak 50 kali. Berikut disampaikan agenda dan risalah rapat, kehadiran, serta rekapitulasi tingkat kehadiran Direksi dalam rapat-rapat tersebut.

members of the Directors who have different opinions on decisions made, then the opinion must be included in the minutes of the meeting as a form of dissenting opinion.

The results of the Board of Directors' meetings are outlined in the minutes of the meeting, which are well documented containing discussions on the agenda of the meeting, dissenting opinions and decisions made. documentation of the meeting was then signed by the leadership and all meeting participants present and distributed according to its designation.

Minutes of Meeting are prepared and administered by the Corporate Secretary and provide copies to all meeting participants. If there are members of the Board of Directors who have different opinions on decisions made, the opinion must be included in the minutes of the meeting as a form of dissenting opinion.

A summary report of the minutes of meetings of the Board of Directors has fulfilled the provisions of procedures, administration of the law and described the situation and chronology of the meeting including dissenting opinions or delegation of the chairperson if the President Director is unable to attend the meeting.

Throughout 2019, the Board of Directors held 50 meetings. Following is the agenda and minutes of meetings, attendance, and recapitulation of the level of attendance of the Directors at these meetings

REKAPITULASI KEHADIRAN DIREKSI PADA RAPAT DIREKSI

Recapitulation of Directors Attendance at Directors' Meeting

| Direksi <i>Directors</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Amount of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Amount of Attendance</i> | Tidak Hadir <i>Absent</i> | % Kehadiran <i>% Presence</i> |
|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|
| William P. Sabandar (Direktur Utama <i>President Director</i>) | 50 | 48 | 2 | 96% |
| Silvia Halim (Direktur Konstruksi <i>Director of Construction</i>) | 50 | 46 | 4 | 92% |
| Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Director of Operations & Maintenance</i>) | 50 | 43 | 7 | 86% |
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>) | 50 | 43 | 7 | 86% |
| Tuhyat (Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Finance & Corporate Managment</i>) | 50 | 47 | 3 | 94% |
| Rata-rata <i>Average</i> | | | | 90,80% |

Tabel 6.42
Table 6.42

RISALAH DAN KEHADIRAN RAPAT DIREKSI

Minute of Meeting and Attendance of Directors' Meeting

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|-----------------------------------|---|--|---|
| 1. | 7 Januari 2019 January 7, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji coba Publik Terbatas pada <i>Parallel Trial Run & Full Trial Run</i> 2. Hasil ORWG 3. Kepala Departemen Direktorat Operasi & Pemeliharaan 4. Penetapan Tarif 5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 6. <i>Outsource Frontliner, Security, dan Cleaning</i> 7. VO SOWJ CA 17 & 18 8. Mutasi Jabatan 9. <i>Financial Charges SOWJ CP 104 & CP 105</i> 10. UMKM 11. Pengadaan Kartu Tiket MRT Jakarta 12. PRK Dukuh Atas 13. Pengelolaan Kawasan Sekitar <i>Entrance MRT Jakarta (200m)</i> 14. Rencana Perusahaan Patungan EFC (<i>Electronic Fare Collection</i>) 15. Launching MRT Jakarta 16. <i>Groundbreaking Fase 2</i> 17. Direktorat Konstruksi 18. Direktorat Keuangan dan Administrasi 19. <i>Transport Hub (Eks Pasar Blora)</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Public Trials are Limited to Parallel Trial Run & Full Trial Run</i> 2. <i>ORWG results</i> 3. <i>Head of the Department of Operations & Maintenance Directorate</i> 4. <i>Pricing</i> 5. <i>Minimum Service Standards (SPM)</i> 6. <i>Outsource Frontliner, Security, and Cleaning</i> 7. <i>VO SOWJ CA 17 & 18</i> 8. <i>Mutation Position</i> 9. <i>Financial Charges SOWJ CP 104 & CP 105</i> 10. <i>MSMEs</i> 11. <i>Procurement of Jakarta MRT Ticket Cards</i> 12. <i>Dukuh Atas PRK</i> 13. <i>Management of the Area Around the Entrance of the Jakarta MRT (200m)</i> 14. <i>1EFC (Electronic Fare Collection) Joint Venture Plan</i> 15. <i>Launching Jakarta MRT</i> 16. <i>Groundbreaking Phase II</i> 17. <i>Directorate of Construction</i> 18. <i>Directorate of Finance and Administration</i> 19. <i>Transport Hub (Ex Blora Market)</i> | |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|-------------------------------------|---|--|---|
| 2. | 14 Januari 2019 January 14, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji coba Publik Terbatas pada <i>Parallel Trial Run & Full Trial Run</i> 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 3. <i>Outsource Frontliner</i> 4. VO SOWJ CA 17 & 18 5. <i>Vacant Position</i> 6. Pengadaan Kartu Tiket MRT Jakarta 7. Seleksi Mitra UMKM 8. Amandemen Kontrak dengan PT Avabanindo Perkasa 9. Evaluasi Status Aset dan Subsidi 10. Seragam Baru MRT Jakarta 11. Usulan Kewenangan MRT Jakarta ke Rapimtas 12. Pengelolaan Kawasan Sekitar <i>Entrance</i> MRT Jakarta Radius 200m 13. Rencana Perusahaan Patungan EFC (<i>Electronic Fare Collection</i>) 14. Peluncuran MRT Jakarta 15. <i>Groundbreaking</i> Fase 2 16. Gedung di Eks Pasar Blora 17. <i>KPI Alignment</i> 18. Implementasi 5R (<i>Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Public Trials are Limited to Parallel Trial Run & Full Trial Run</i> 2. <i>Minimum Service Standards (SPM)</i> 3. <i>Outsource Frontliner</i> 4. VO SOWJ CA 17 & 18 5. <i>Vacant Position</i> 6. <i>Procurement of Jakarta MRT Ticket Cards</i> 7. <i>MSME Partner Selection</i> 8. <i>Amendment of Contract with PT Avabanindo Perkasa</i> 9. <i>Evaluation of Asset and Subsidy Status</i> 10. <i>New Uniforms MRT Jakarta</i> 11. <i>Proposed Authority of the Jakarta MRT to Rapimtas</i> 12. <i>Management of the Area Around the Entrance of the Jakarta MRT Radius 200m</i> 13. <i>EFC (Electronic Fare Collection) Joint Venture Plan</i> 14. <i>Launching Jakarta MRT</i> 15. <i>Groundbreaking Phase 2</i> 16. <i>Building in Ex Blora Market</i> 17. <i>Alignment KPIs</i> 18. <i>Implementation of 5R (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle)</i> | |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|-------------------------------------|---|--|---|
| 3. | 21 Januari 2019 January 21, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan 5R (<i>Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle</i>) 2. Uji coba Publik Terbatas pada <i>Full Trial Run</i> 3. Persiapan <i>Outsource on Board</i> 4. <i>Vacant Position</i> 5. Mitra Terpilih UMKM 6. Amandemen Kontrak dengan PT Avabanindo Perkasa 7. Penetapan Tarif MRT Jakarta 8. Usulan Kewenangan MRT Jakarta oleh Rapimtas 9. Rencana Perusahaan Patungan EFC (<i>Electronic Fare Collection</i>) 10. Gedung di Eks Pasar Blora 11. <i>KPI Alignment</i> 12. Direktorat Operasi & Pemeliharaan 13. Progres Fase 1 14. Progres Fase 2 15. Integrasi dengan KCI dan LRT 16. Persiapan Peluncuran MRT Jakarta 17. Pedoman Tata Laksana Pemilihan <i>Counterparty</i> Jasa Keuangan 18. Kronologi Temuan Pemeriksa Pajak Tahun 2015 19. <i>Extension of Time</i> CP 104 dan 105 20. <i>Extension of Time</i> CP 106 21. <i>KD 9 for All Package</i> 22. CP 103 – Instalasi PID 23. <i>Naming Rights</i> 24. <i>Prepaid Acceptance Cards</i> 25. <i>Operasional Sewage Treatment Plan (STP)</i> 26. <i>Park & Ride di South Quarter (SQ)</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>5R Policy (Refuse, Reduce, Reuse, Repurpose, Recycle)</i> 2. <i>Public Trials are Limited to Full Trial Runs</i> 3. <i>Preparing to outsource on Board</i> 4. <i>Vacant Position</i> 5. <i>MSME Selected Partners</i> 6. <i>Amendment of Contract with PT Avabanindo Perkasa</i> 7. <i>Determination of Transjakarta Rates</i> 8. <i>Proposed Authority of the Jakarta MRT by Rapimtas</i> 9. <i>EFC (Electronic Fare Collection) Joint Venture Plan</i> 10. <i>Building in Ex Blora Market</i> 11. <i>KPI Alignment</i> 12. <i>Directorate of Operation & Maintenance</i> 13. <i>Phase 1 Progress</i> 14. <i>Phase 2 Progress</i> 15. <i>Integration with KCI and LRT</i> 16. <i>Preparation for the Jakarta MRT Launching</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|---|---|--|---|
| | | | 17. <i>Code of Conduct for the Selection of Financial Services Counterparties</i> 18. <i>Chronology of 2015 Tax Examiner Findings</i> 19. <i>Extension of Time CP 104 and 105</i> 20. <i>Extension of Time CP 106</i> 21. <i>KD 9 for All Package</i> 22. <i>CP 103 - Installing PID</i> 23. <i>Naming Rights</i> 24. <i>Prepaid Acceptance Cards</i> 25. <i>Operational Sewage Treatment Plan (STP)</i> 26. <i>Park & Ride in South Quarter (SQ)</i> | |
| 4. | 28 Januari 2019 <i>January, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | 1. Fase 2 2. Peresmian Peluncuran MRT Jakarta Fase I 3. Integrasi dengan Transjakarta 4. Rencana Perusahaan Patungan EFC <i>(Electronic Fare Collection)</i> 5. Penanggung Jawab MRT Jakarta untuk <i>Update Rutin Pemprov DKI</i> 6. Pengelolaan KBT 7. Pembentukan Anak Perusahaan MRT Jakarta 8. Rekomendasi Pembentukan Anak Perusahaan Operator 9. Uji coba Publik Terbatas pada <i>Full Trial Run</i> 10. Amandemen Kontrak dengan PT Avabanindo Perkasa 11. Gedung di Eks Pasar Blora 12. <i>KPI Alignment</i> 13. Direktorat Operasi & Pemeliharaan 14. Progres Fase 1 15. Kronologi Temuan Pemeriksa Pajak Tahun 2015 16. <i>Park & Ride di South Quarter (SQ)</i> 17. <i>Staff Card MRT Jakarta</i> 18. <i>Commercial & Retail Tahap 1</i> 19. <i>Naming Rights Bank Mandiri</i> 20. <i>Vacant Position</i> Direktorat Pengembangan & Dukungan Bisnis 21. <i>Head Hunter</i> untuk <i>Vacant Position</i> 22. Ritel Reguler Tahap 2 23. Persiapan Operasional Depo dan Stasiun 1. <i>Phase 2</i> 2. <i>Inauguration of Jakarta Phase 1 MRT Launching</i> 3. <i>Integration with Transjakarta</i> 4. <i>EFC (Electronic Fare Collection) Joint Venture Plan</i> 5. <i>Responsible for MRT Jakarta for Routine Update of DKI Jakarta Provincial Government</i> 6. <i>TOD management</i> 7. <i>Establishment of MRT Jakarta Subsidiary</i> 8. <i>Recommendations for Establishing Subsidiaries' Operators</i> | 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Peserta Rapat Participant |
|----|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 9. <i>Public Trials are Limited to Full Trial Runs</i> 10. <i>Amendment of Contract with PT Avabanindo Perkasa</i> 11. <i>The building at Ex Blora Market</i> 12. <i>KPI Alignment</i> 13. <i>Directorate of Operation & Maintenance</i> 14. <i>Phase 1 Progress</i> 15. <i>Chronology of 2015 Tax Examiner Findings</i> 16. <i>Park & Ride in South Quarter (SQ)</i> 17. <i>MRT Jakarta Staff Card</i> 18. <i>Commercial & Retail Phase 1</i> 19. <i>Bank Mandiri Naming Rights</i> 20. <i>Vacant Position Directorate of Business Development & Support</i> 21. <i>HeadHunter for Vacant Position</i> 22. <i>Regular Retail Phase 2</i> 23. <i>Depot and Station Operational Preparation</i> |
| 5. | 4 Februari 2019 <i>February 4, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Amandemen Kontrak dengan PT Avabanindo Perkasa 2. Pengelolaan KBT 3. Gedung di Eks Pasar Blora 4. <i>KPI Alignment</i> 5. Perpanjangan OMCS Fase 1 6. Progres Fase 1 7. Pintu Gerbang Khusus Karyawan 8. Jejak Langkah dan Proyek <i>Human Capital</i> 9. Pemutakhiran Pengadaan Depo & Stasiun 10. Ritel Fase 1 11. Seleksi Mitra UMKM 12. <i>Commercial</i> 13. Hak Penamaan (<i>Naming Rights</i>) 1. <i>Amendment of Contract with PT Avabanindo Perkasa</i> 2. <i>TOD management</i> 3. <i>Building in Ex Blora Market</i> 4. <i>KPI Alignment</i> 5. <i>Extension of OMCS Phase 1</i> 6. <i>Phase I Progress</i> 7. <i>Special Gate Employees</i> 8. <i>Milestones & Project Human Capital</i> 9. <i>Depo & Station Procurement Updates</i> 10. <i>Retail Phase 1</i> 11. <i>MSME Partner Selection</i> 12. <i>Commercial</i> 13. <i>Naming Rights</i> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|---------------------------------------|---|--|---|
| 6. | 11 Februari 2019 February 11, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Keamanan Depo Lebak Bulus 2. Reviu Materi Integrasi untuk Rapingub - Park & Ride 3. Penataan Ojek Online 4. Pedestrianisasi di area Dukuh Atas 5. Depo dan Stasiun 6. Ritel dan Komersial <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Lebak Bulus Depot Security System</i> 2. <i>Review of Integration Materials for Rapingub - Park & Ride</i> 3. <i>Online motorcycle taxi arrangement</i> 4. <i>Pedestrianization in the Upper Hamlet area</i> 5. <i>Depots and Stations</i> 6. <i>Retail and Commercial</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |
| 7. | 18 Februari 2019 February 18, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Kartu Prabayar 2. Tindak Lanjut Rapingub 14 Februari 2019 – Integrasi Moda & Penataan Stasiun 3. Studi Kelayakan Lebak Bulus – Tangerang Selatan 4. Tampias Air Hujan Stasiun <i>Elevated</i> 5. Sistem Manajemen Pengamanan 6. Pemutakhiran Depo & Stasiun 7. Kebutuhan Listrik Ritel 8. Ritel Reguler tahap I <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Acceptance Prepaid Card</i> 2. <i>Follow-up to Rapingub 14 February 2019 - Station Integration & Station Arrangement</i> 3. <i>Feasibility Study (FS) of Lebak Bulus - South Tangerang</i> 4. <i>Raindrop Elevated Station</i> 5. <i>Security Management System</i> 6. <i>Update Depots & Stations</i> 7. <i>Retail Electricity Needs</i> 8. <i>Regular retail stage 1</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |
| 8. | 25 Februari 2019 February 25, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Kartu Prabayar 2. Kebutuhan Listrik MRT Jakarta 3. Lowongan Posisi di Direktorat Operasi & Pemeliharaan 4. Tindak Lanjut Rapingub 14 Februari 2019 – Integrasi Moda & Penataan Stasiun 5. Pemutakhiran Depo & Stasiun 6. Sistem Manajemen Pengamanan 7. Pemutakhiran Ritel dan Komersial 8. Pemutakhiran Aplikasi MRT Jakarta 9. VO CP 101 & 102 10. PMD APBD Tahun 2019 dan 2020 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Acceptance Prepaid Card</i> 2. <i>MRT Jakarta Electricity Needs</i> 3. <i>Vacant Position Directorate of Operation & Maintenance</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat <p>Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis (Ghamal Peris) tidak hadir karena Perjalanan Dinas <i>Director of Business Development and support (Ghamal Peris) was absent due to business trip</i></p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|---------------------------------|---|---|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Follow up Rapimgub 14 February 2019 - Integration of Station Mode & Structuring</i> 5. <i>Update Depots & Stations</i> 6. <i>Security Management System</i> 7. <i>Retail & Commercial Updates</i> 8. <i>Update MRT Jakarta Application</i> 9. <i>VO CP 101 & 102</i> 10. <i>Regional Equity Participation of Regional Budget in 2019 and 2020</i> | |
| 9. | 4 Maret 2019 March 4, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Listrik MRT Jakarta 2. Sistem Manajemen Pengamanan 3. RKAP 2019 4. Pemutakhiran Komersial 5. Pemutakhiran Ritel 6. Tindak Lanjut Rapimgub 14 Februari 2019 – Integrasi Moda & Penataan Stasiun 7. Penggunaan <i>Multi Trip Ticket</i> MRT Jakarta 8. VO CP 101 & 102 9. VO CP105 10. Pemutakhiran Depo & Stasiun 11. Pengadaan Fase 2 12. Uji Coba Publik 1. <i>MRT Jakarta Electricity Needs</i> 2. <i>Security Management System</i> 3. <i>RKAP 2019</i> 4. <i>Commercial Updates</i> 5. <i>Retail Update</i> 6. <i>Follow-up to Rapimgub 14 February 2019 - Integration of Station Mode & Structuring</i> 7. <i>Use of MRT Jakarta MTT Ticket Cards</i> 8. <i>VO CP 101 & 102</i> 9. <i>VO CP105</i> 10. <i>Depo & Station Updates</i> 11. <i>Procurement Phase II</i> 12. <i>Public Trial</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |
| 10. | 11 Maret 2019 March 11, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan Pengamanan 2. Sistem Manajemen Pengamanan 3. Pengadaan <i>Card Reader & Software</i> untuk P&R 4. Aplikasi MRT Jakarta 5. Kebutuhan Eskalator 6. Perubahan <i>Signages</i> Stasiun Sisingamangaraja 7. Survei Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) 1. <i>Security Placement</i> 2. <i>Security Management System</i> 3. <i>Procurement Card Reader & Software for P&R</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|--|---|---|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>MRT Jakarta Application</i> 5. <i>Escalator Needs</i> 6. <i>Changes in Sisingamangaraja Station Signages</i> 7. <i>Survey of the Fire Department (Damkar)</i> | |
| 11. | 18 Maret 2019 <i>March 18, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Penempatan Security</i> 2. <i>Pengadaan Card Reader & Software untuk P&R</i> 3. <i>Aplikasi MRT Jakarta</i> 4. <i>Peresmian MRT Jakarta Fase I & Penganangan MRT Jakarta Fase II</i> 5. <i>Tanggung Jawab Cleaning Service di Stasiun</i> 6. <i>Pemutakhiran Divisi Customer Engagement</i> 7. <i>Sistem Manajemen Pengamanan</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat <p>Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis (Ghamal Peris) tidak hadir karena Perjalanan Dinas <i>Director of Business Development and support (Ghamal Peris) was absent due to business trip</i></p> |
| 12. | 25 Maret 2019 <i>March 25, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>MRT Day</i> 2. <i>Fase Operasi Komersial</i> 3. <i>Pemutakhiran Divisi Customer Engagement</i> 4. <i>Sistem Manajemen Pengamanan</i> 5. <i>Kartu Pass untuk Staf</i> 6. <i>Skybridge CSW</i> 7. <i>Tema Annual Report (AR) 2018</i> 8. <i>Arahan Presiden Fase 2</i> 9. <i>Pemutakhiran Fase 2B</i> 10. <i>Evaluasi Public Engagement</i> 11. <i>Pemutakhiran Sistem Pengamanan - BUJP</i> 12. <i>Pemutakhiran KBT</i> 13. <i>IKT atas Kinerja Tahun 2018</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | 12. <i>TOD update</i> 13. <i>IKT on 2018 Performance</i> | |
| 13. | 1 April 2019 <i>April 1, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Operasi Komersial 2. <i>Skywalk CSW</i> 3. Konsep KBT-Pusat Jajanan 4. Pengelolaan Kawasan Sekitar <i>Entrance</i> MRT Jakarta Radius 200m 5. Pemutakhiran Fase 2B 6. Pembebasan Lahan Fase 2 MRT Jakarta 7. Evaluasi Pengamanan 8. Kebijakan & SOP Prosedur Aset dan Penumpang 9. Penyesuaian Honorarium Verifikasi 10. Skema Kebijakan Medikal 11. Skema <i>Excess Medical</i> Tenaga Ahli 12. Skema Wawancara Kandidat 13. Integrasi Moda & Penataan Stasiun <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Operational Commercial Evaluation</i> 2. <i>CSW Skywalk</i> 3. <i>The TOD concept - Hawker Center</i> 4. <i>Area Management Around the Jakarta MRT Entrance Radius 200m</i> 5. <i>Update Phase 2B</i> 6. <i>MRT Jakarta Phase 2 Land Acquisition</i> 7. <i>Security Evaluation</i> 8. <i>Asset and Passenger Policies & SOP Procedures</i> 9. <i>Adjustment of Verification Honorarium</i> 10. <i>Medical Policy Scheme</i> 11. <i>Expert Medical Excess Scheme</i> 12. <i>Candidate Interview Scheme</i> 13. <i>Station Integration & Arrangement</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |
| 14. | 8 April 2019 <i>April 8, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Skema <i>Excess Medical</i> Tenaga Ahli 2. Perpindahan <i>Divisi Business Support</i> 3. IP – 578 4. Pengangkatan Kembali Sekretaris Dewan Komisaris 5. Interkoneksi dengan Kementerian 6. <i>Rate Shooting & Photoshoot</i> 7. Tindak lanjut Masa Operasi Komersial dari Internal Audit 8. Pemutakhiran Fase 2 9. Perizinan Fase 1 10. Ketiga KBT dalam KSD <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Expert Medical Excess Scheme</i> 2. <i>Transfer of Business Support Division</i> 3. <i>IP - 578</i> 4. <i>Reappointment of the Board of Commissioners' Secretary</i> 5. <i>Interconnection with the Ministry</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|--|---|--|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 6. <i>Rate Shooting & Photoshoot</i> 7. <i>Follow-up the Commercial Operation Phase from the Internal Audit</i> 8. <i>Updating Phase II</i> 9. <i>Phase I Licensing</i> 10. <i>Third TOD in KSD</i> | |
| 15. | 15 April 2019 <i>April 15, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Jajanan 2. Pengelolaan Kawasan Sekitar <i>Entrance</i> MRT Jakarta Radius 200m 3. Penunjukkan Penasehat Dewan Komisaris 4. Penataan Stasiun 5. <i>Naming Rights</i> 6. IP - 578 7. KBT dalam KSD & Jejak Langkah 8. Kenaikan <i>Cost of Living Adjustment</i> (COLA) Tahun 2019 9. Pemberian Tunjangan Karyawan <i>Worksite</i> 10. <i>Employee Card</i> untuk Karyawan 11. Pemutakhiran Peraturan Perseroan 2019-2021 12. Program <i>Benefit</i> Bank DKI untuk karyawan Perseroan 13. <i>QR Code Server Based</i> 14. IBM MAXIMO <i>Software Subscription and Support Renewal</i> 15. Acara Apresiasi MRT Jakarta 16. <i>Rate Shooting & Photoshoot</i> 17. Galeri Foto di Stasiun MRT 18. Buku Interaktif Pembelajaran Fase 1 19. Laporan Operasional pada Minggu Kedua 20. Strategi Program <i>Customer Loyal</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Hawker Center</i> 2. <i>Management of the Area Around the Jakarta MRT Entrance Radius 200m</i> 3. <i>Appointment of BoD Advisor</i> 4. <i>Station Arrangement</i> 5. <i>Naming Rights</i> 6. IP - 578 7. <i>TOD in KSD & Milestone</i> 8. <i>Increase in Cost of Living Adjustment (COLA) in 2019</i> 9. <i>Provision of Worksite Employee Benefits</i> 10. <i>Employee Card for Employees</i> 11. <i>Update of Company Regulations 2019-2021</i> 12. <i>Bank DKI Benefit Program for Company employees</i> 13. <i>QR Code Server Based</i> 14. <i>BM MAXIMO Software Subscription and Support Renewal</i> 15. <i>Jakarta MRT Appreciation Event</i> 16. <i>Rate Shooting & Photoshoot</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|---------------------------------|---|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 17. Photo Gallery at the MRT Station 18. Interactive Learning Phase I Book 19. Operational Report on the Second Week 20. Customer Loyalty Program Strategies | |
| 16. | 22 April 2019 April 22, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Fraud 2. Laporan Operasional pada Minggu Ketiga 3. Peraturan Gubernur 4. Survei Transportasi Publik MRT 5. Perpindahan Departemen Security 6. Penunjukkan Penasihat Dewan Komisaris 7. Penataan Stasiun 8. Naming Rights 9. IP - 578 10. Acara Apresiasi MRT Jakarta 11. Shooting & Photoshoot 12. Pemutakhiran Fase 2B 13. Prolongation Cost CP 104 & 105 14. Pengadaan Sparepart dan Consumable Materials 1. Fraud 2. Operational Report on the Third Week 3. Governor's Regulation 4. MRT Public Transportation Survey 5. Displacement of the Security Department 6. Appointment of BoD Advisor 7. Station Arrangement 8. Naming Rights 9. IP - 578 10. Jakarta MRT Appreciation Event 11. Shooting & Photoshoot 12. Updating Phase 2B 13. Prolongation Cost CP 104 & 105 14. Spare Parts and Consumable Materials Procurement | <ul style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |
| 17. | 29 April 2019 April 29, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran O&M 2. Survei Transportasi Publik MRT 3. Pemutakhiran Security & Cleaning Service 4. Penataan Stasiun 5. Pengadaan Sparepart dan Consumable Materials 6. Perpanjangan Kontrak JMCMC 7. Iklan Operasi di Media Cetak 8. Penempatan Prasasti di Stasiun 9. Thanking Event 10. Hak Cipta Desain Patung Selamat Datang 11. Desain Pagar CP 200 12. Aspek GCG 13. Naming Rights Grab 14. QR Payment 15. Pemutakhiran Peraturan Gubernur (Pergub) | <ul style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Ghamal Peris <p>Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi (Tuhiyat) tidak hadir karena Cuti Tahunan <i>Director of Finance and Administration (Tuhiyat) was absent due to annual leave</i></p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|---------------------------|---|---|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. O&M update 2. MRT Public Transportation 3. Survey Security Cleaning Service Update 4. Station Arrangement 5. Spare Parts and Consumable Materials Procurement 6. JMCMC Contract Extension 7. Advertising Operations in Print Media 8. Placement of the inscription at the station 9. Thanking Event 10. Copyright of the Welcome Sculpture Design 11. CP 200 Fence Design 12. GCG aspects 13. Naming Rights Grab 14. QR Payment 15. Governor Regulation (Pergub) Update | |
| 18 | 6 Mei 2019 May 6, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Acara MRT Jakarta 2. Struktur Organisasi MRT Jakarta 3. Iklan MRT Jakarta 4. Pengadaan di Divisi Corporate Secretary 5. Pemutakhiran Cleaning Service 6. Penataan Stasiun 7. Pemutakhiran TBG 8. Kebijakan Car Free Day di MRT Jakarta 9. Security Risk & Plan 10. Penambahan Personel Staf Stasiun (Outsourcing) 11. Kebutuhan Kartu STT Baru 12. Hasil Izin MTT dari Bank Indonesia <ol style="list-style-type: none"> 1. MRT Jakarta Event 2. MRT Jakarta Organizational Structure 3. MRT Jakarta advertisements 4. The Corporate Secretary Division Procurement 5. Cleaning Service Update 6. Station Arrangement 7. TBG update 8. Car Free Day Policy at MRT Jakarta 9. Security Risk & Plan 10. Station Staff Personnel (Outsourcing) Addition 11. The need for a New STT Card 12. MTT License Result from Bank Indonesia | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|-----------------------------|---|---|---|
| 19 | 13 Mei 2019 May 13, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan Rencana Depo Fase 2 2. Iklan MRT Jakarta 3. Pemutakhiran <i>Cleaning Service</i> 4. Penataan Stasiun 5. Pemutakhiran TBG 6. Penambahan Personel Staf Stasiun (<i>Outsourcing</i>) 7. Kebutuhan Kartu STT Baru 8. Pemutakhiran <i>Tenant Ritel</i> 9. Penetapan Tarif Keluar dan Masuk di Stasiun yang Sama 10. Struktur Organisasi 11. Interkoneksi dengan Stasiun MRT 12. Ekstensi Trase Fase 2 dan Lokasi Depo Fase 2B 13. Peraturan Direksi Perekaman Video dan Gambar di Sarana dan Prasarana 14. Penempatan Prasasti di Stasiun 15. Program Peningkatan <i>Ridership</i> 16. Nomenklatur Tunjangan <i>Worksite</i> 17. Sistem Pengelolaan Logistik 18. Perubahan Kontrak JMCMC 19. CP 103 - VO Parapet Works 20. PA IPC 62-67 <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Direction for Depo Phase 2 Plan</i> 2. <i>MRT Jakarta advertisements</i> 3. <i>Cleaning Service Update</i> 4. <i>Station Arrangement</i> 5. <i>TBG Update</i> 6. <i>Station Staff Personnel (Outsourcing) Addition</i> 7. <i>The need for a New STT Card</i> 8. <i>Tenant Retail Update</i> 9. <i>Exit and Entry Fares at the Same Station Setting</i> 10. <i>Organizational Structure</i> 11. <i>Interconnection with MRT Stations</i> 12. <i>Phase 2 Extension and Phase 2B Depot Location</i> 13. <i>Regulations of the Directors for Video and Image Recording in Facilities and Infrastructure</i> 14. <i>Placement of Inscriptions at the Station</i> 15. <i>Ridership Improvement Program</i> 16. <i>Nomenclature of Worksite Benefits</i> 17. <i>Logistics Management System</i> 18. <i>Changes to the JMCMC Contract</i> 19. <i>CP 103 - VO Parapet Works</i> 20. <i>PA IPC 62-67</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|-----------------------------|---|--|---|
| 20. | 20 Mei 2019 May 20, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan Kartu STT Baru 2. Struktur Organisasi 3. Ekstensi Trase Fase 2 dan Lokasi Depo Fase 2B 4. Sistem Pengelolaan Logistik 5. Aplikasi SAP 6. Evaluasi Penambahan BUJP 7. Rencana Aksi Demo Pemilu dan Keputusan Direksi untuk Penguatan Pengamanan 8. Penambahan Penguatan Pengamanan di Kawasan <i>Entrance</i> Radius 200 m 9. Tindak Lanjut Izin MTT 10. Peraturan Gubernur (Pergub) 11. Permintaan Damkar 12. <i>Variation Order</i> - CP 107 13. Evaluasi <i>Employee Card</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The need for a New STT Card</i> 2. <i>Organizational Structure</i> 3. <i>Phase 2 Extension and Phase 2B Depot Location Extensions</i> 4. <i>Logistics Management System</i> 5. <i>SAP Application</i> 6. <i>Evaluation of BUJP Additions</i> 7. <i>Election Protest Scheme and Directors' Decrees Strengthening Safeguards</i> 8. <i>Strengthening the Security Area of the Entrance Radius 200 m Addition</i> 9. <i>Follow-up on MTT Permit</i> 10. <i>Governor Regulation (Pergub)</i> 11. <i>Request Damkar</i> 12. <i>Variation Order - CP 107</i> 13. <i>Employee Card Evaluation</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |
| 21. | 27 Mei 2019 May 27, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan Direktur Utama 2. OMCS Fase 2 3. Pemasangan LED di Stasiun 4. Evaluasi Penambahan BUJP 5. Evaluasi <i>Employee Card</i> 6. Kebijakan CSR 7. <i>Community Engagement</i> 8. Museum MRT Jakarta 9. Papan Hak Penamaan untuk Stasiun Grab & BCA 10. <i>Transit Plaza</i> 11. Studi Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Penggunaan Transportasi Publik 12. Terminal Blok M 13. Media Luar Ruang 14. Analisis Finansial KBT 15. Peraturan Gubernur KBT 16. Peraturan Gubernur No. 53, Subsidi dan SPM | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 17. Program Lebaran MRT 18. <i>Variation Order</i> - CP106 19. Progres Pemenuhan Izin MTT 20. Pengadaan <i>Brakeshoe</i> dan <i>Consumable Parts</i> 21. Persiapan Libur Lebaran 22. Evaluasi Rencana Perpanjangan Penjaminan Bank dari PT Quantum Convex International 23. Acara Apresiasi kepada Pemangku Kepentingan <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Direction of President Director</i> 2. <i>OMCS Phase 2</i> 3. <i>LED Installation in the Station</i> 4. <i>Evaluation of Addition of BUJP</i> 5. <i>Employee Card Evaluation</i> 6. <i>CSR Policy</i> 7. <i>Community Engagemen.</i> 8. <i>MRT Jakarta Museum</i> 9. <i>Grab & BCA Naming Rights Signage</i> 10. <i>Transit Plaza</i> 11. <i>Study of Government Policies in Encouraging the Use of Public Transportation</i> 12. <i>Terminal Block M</i> 13. <i>Outdoor Media</i> 14. <i>Financial Analysis TOD</i> 15. <i>TOD Governor Regulation</i> 16. <i>Governor Regulation 53, Subsidies and SPM</i> 17. <i>MRT Eid Program</i> 18. <i>Variation Order - CP106</i> 19. <i>Progress in fulfilling MTT permits</i> 20. <i>Brakeshoe and Consumable Parts Procurement</i> 21. <i>Preparation for Lebaran Holidays</i> 22. <i>Evaluate the Bank Guarantee Extension Plan from</i> 23. <i>Stakeholder's Thanking Event</i> | |
| 22. | 10 Juni 2019 <i>June 10, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Arahan Direktur Utama 2. OMCS Fase 2 3. Evaluasi Penambahan Pamovit 4. Evaluasi <i>Employee Card</i> 5. Kebijakan CSR 6. Pembuatan Galeri & Museum MRT Jakarta 7. Studi Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Penggunaan Transportasi Publik 8. Peraturan Direksi Skema Bisnis KBT 9. Peraturan Gubernur KBT 10. Peraturan Gubernur 53, Subsidi dan SPM 11. Progres Pemenuhan Izin MTT 12. Kebijakan Standarisasi <i>Signage</i> | <ul style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Tuhayat 4. Ghamal Peris <p>Direktur Operasi dan Pemeliharaan (Muhammad Effendi) tidak hadir karena Perjalanan Dinas <i>Director of Maintenance and operations (Muhammad Effendi) was absent due to business trip</i></p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|--------------------------------------|--|---|---|
| | | | 13. Transit Plaza Stasiun Lebak Bulus 14. Pendampingan Tim <i>Maintenance</i> 15. Modul QR Gerbang Penumpang 16. Acara Apresiasi MRT Jakarta Fase 1 17. Persiapan Pencanangan KBT Lebak Bulus 18. Evaluasi Operasi Komersial 19. Program Upaya Peningkatan <i>Ridership</i> 1. <i>President Director Instructions</i> 2. <i>OMCS Phase 2</i> 3. <i>Evaluation of the additional Pamovits</i> 4. <i>Employee Card Evaluation</i> 5. <i>CSR policy</i> 6. <i>Making the MRT Jakarta Gallery & Museum</i> 7. <i>Study of Government Policies in Encouraging the Use of Public Transportation</i> 8. <i>TOD Directors' Business Scheme Regulations</i> 9. <i>TOD Governor Regulation</i> 10. <i>Governor's Regulation 53, Subsidies and SPM</i> 11. <i>Progress in fulfilling MTT permits</i> 12. <i>Signage Standardization Policy</i> 13. <i>Transit Plaza Lebak Bulus Station</i> 14. <i>Maintenance Team Assistance</i> 15. <i>Passenger Gate QR Module</i> 16. <i>Jakarta MRT Appreciation Event Phase 1</i> 17. <i>Preparation for the launching of Lebak Bulus TOD</i> 18. <i>Evaluate Commercial Operations</i> 19. <i>Ridership Improvement Program</i> | |
| 23. | 17 Juni 2019 <i>June 17, 2019</i> | Kantor MRT Jakarta Wisma Nusantara Lantai 21 <i>Meeting Room</i> Wisma Nusantara 21 st Floor | 1. Desain Struktur Organisasi 2. Usulan Tata Kelola Organisasi 3. Interkoneksi Stasiun MRT dengan Intiland 4. Modul QR Gerbang Penumpang 5. Kebijakan Parkir di Depo 6. MoU dengan Seoul Metro 7. Program LPDP 8. Studi Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Penggunaan Transportasi Publik 9. Evaluasi Penambahan Pamovit 10. Penguatan Keamanan Menjelang Keputusan MK (Sengketa Pilpres) 11. Amandemen Kontrak BUJP 12. Penebalan Personil Luar (Paket D) 13. Pengelolaan Kebersihan di Area 200 meter 14. Perizinan Kartu MTT | 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Organizational Structure Design</i> 2. <i>Corporate Governance Proposal</i> 3. <i>Interconnecting MRT Stations with Intiland</i> 4. <i>Passenger Gate QR Module</i> 5. <i>Parking Policy at Depot</i> 6. <i>MoU with Seoul Metro</i> 7. <i>LPDP Program</i> 8. <i>Government Policy Studies in Encouraging the Use of Public Transportation</i> 9. <i>Evaluation of the additional Pamovits</i> 10. <i>Security Strengthening Towards MK Decision (Presidential Election Dispute)</i> 11. <i>The BUJP Contract Amendment</i> 12. <i>Strengthening of External Personnel (Package D)</i> 13. <i>Management of cleanliness in the area of 200meters</i> 14. <i>MTT Card Licensing</i> | |
| 24. | 24 Juni 2019 <i>June 24, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek GCG 2. Perubahan Nomenklatur Direksi 3. Pembentukan Komite di Bawah Direksi 4. Interkoneksi Stasiun MRT Lebak Bulus dengan Poins Square 5. Perizinan Kartu MTT 6. Pengadaan <i>Brakeshoe</i> 7. SAP Fase 2 8. <i>International Board Advisory</i> 9. <i>Skybridge</i> CSW 10. Pencanaan KBT Lebak Bulus 11. Prosedur Perizinan Mengadakan Acara di Area Stasiun 12. Pengamanan BUJP di Area 200 m dan Lebih dari 200 m 13. Penguatan Keamanan Menjelang Keputusan MK (Sengketa Pilpres) 14. Pengelolaan Kebersihan di Area 200 meter | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Tuhayat 4. Ghamal Peris <p>Direktur Operasi dan Pemeliharaan (Muhammad Effendi) tidak hadir karena Perjalanan Dinas <i>Director of Operations and maintenance (Muhammad Effendi) was absent due to business trip</i></p> |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>GCG aspects</i> 2. <i>Changes of the Directors Nomenclature</i> 3. <i>Committees Under the Directors Establishment</i> 4. <i>Interconnecting Lebak Bulus MRT Station with Poins Square</i> 5. <i>MTT Card Licensing</i> 6. <i>Procurement of Brakeshoe</i> 7. <i>SAP Phase 2</i> 8. <i>International Board Advisory</i> 9. <i>CSW Skybridge</i> 10. <i>The declaration of Lebak Bulus TOD</i> 11. <i>Licensing Procedure for Holding Events in the Station Area</i> | |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|-----------------------------|---|---|---|
| | | | 12. <i>BUJP security in an area of 200 m and more than 200 m</i> 13. <i>Security Strengthening Towards MK Decision (Presidential Election Dispute)</i> 14. <i>Cleanliness Management in an area of 200 meters</i> | |
| 25. | 8 Juli 2019 July 8, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kunjungan MRT secara Gratis 2. Pemasangan Iklan untuk Informasi Publik 3. MoU dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) 4. Apresiasi Insan MRT Jakarta 5. Rotasi Karyawan di Stasiun 6. Investigasi Bau Pesing di Kereta 7. Penggantian <i>Cleaning Service</i> 8. Program Inisiatif <i>Knowledge Management</i> 9. Pembuatan <i>Water Treatment Plan (WTP)</i> 10. Kebutuhan Penambahan Karyawan Direktorat Operasi dan Pemeliharaan 11. Panduan Penyusunan Perencanaan Strategis & Operasional Perseroan 12. Fasilitas Pengguna Jasa yang Bersepeda 13. Perjanjian Kerja sama di Lahan Eks Pasar Blora 14. <i>Transport Hub (Eks Pasar Blora)</i> 15. Mekanisme Perekrutan Internal 16. Penyediaan ATM, <i>Top Up Machine</i> dan <i>Vending Machine Prepaid Card</i> 17. Studi Banding ke Kuala Lumpur & Bangkok 1. <i>Standard Operating Procedure (SOP) for MRT Free Visits</i> 2. <i>Advertising for Public Information</i> 3. <i>MoU with PT China Indonesia Fast Train (KCIC)</i> 4. <i>MRT Jakarta Employees appreciation</i> 5. <i>Rotation of Employees at the Station</i> 6. <i>Investigate the smell of urine on trains</i> 7. <i>Replacement Cleaning Service</i> 8. <i>Knowledge Management Initiative Program</i> 9. <i>Water Treatment Plan (WTP) Construction</i> 10. <i>The need of additional Operational & Maintenance Employees</i> 11. <i>Guidelines for Compilation of Corporate Strategic & Operational Planning</i> 12. <i>Cycling Passenger Facilities</i> 13. <i>Cooperation Agreement on Ex Blora market</i> 14. <i>Transport Hub (Ex Blora Market)</i> 15. <i>Internal Recruitment Mechanism</i> 16. <i>Provision of ATMs, Top Up Machines and Vending Machine Prepaid Cards</i> 17. <i>Benchmarking to Kuala Lumpur & Bangkok</i> | 1. William P. Sabandar 2. Muhammad Effendi 3. Tuhayat 4. Ghamal Peris Direktur Konstruksi (SilviaHalim) tidak hadir karena Perjalanan Dinas <i>Director of Construction (Silvia Halim) was absent due to business trip</i> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|-------------------------------|---|--|---|
| 26. | 15 Juli 2019 July 15, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Pengamanan 2. Kebersihan di Stasiun MRT 3. Arahan Gubernur Bersepeda dan Naik MRT 4. Tindak Lanjut MoU dengan Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) 5. Inisiatif Program Pengurangan Emisi 6. Percepatan Pekerjaan Utilitas Fase 2 7. Percepatan Fase 3 8. Peraturan Direksi KBT 9. Kebutuhan Tim Direktorat Operasi & Pemeliharaan 10. Mural Persahabatan Jakarta-Berlin 11. Pembukaan Rekening Dana <i>Sponsorship</i> 12. <i>Variation Order</i> - CP103 13. <i>Variation Order</i> - CP104 dan CP105 14. Perbaikan <i>Signage</i> Stasiun 15. Pengadaan <i>Brakeshoe</i> dan <i>Consumable Parts</i> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Security Aspects</i> 2. <i>Cleanliness at the MRT Station</i> 3. <i>Governor Instruction of Cycling and Using the MRT</i> 4. <i>Follow-up of the MoU with the Institute for Transportation & Development Policy (ITDP)</i> 5. <i>Initiative Emission Reduction Program</i> 6. <i>Acceleration of Phase II Utility Work</i> 7. <i>Acceleration Phase III</i> 8. <i>TOD Directors' Regulations</i> 9. <i>The Need of the Operation & Maintenance Directorate Team</i> 10. <i>Jakarta-Berlin Friendship Mural</i> 11. <i>Opening a Sponsorship Fund Account</i> 12. <i>Variation Order</i> - CP103 13. <i>Variation Order</i> - CP104 and CP105 14. <i>Repair Station Signage</i> 15. <i>Brakeshoe and Consumable Parts Procurement</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |
| 27. | 22 Juli 2019 July 22, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan Direktur Utama 2. Kebutuhan Tim Direktorat Operasi & Pemeliharaan 3. Percepatan Fase 3 4. Subsidi MRT Jakarta 5. Obligasi Daerah 6. Kanal Pembayaran <i>QR Code</i> 7. Fasilitas <i>Bike Rack</i> 8. Kartu MTT 9. Implementasi Kegiatan MRT Jakarta dengan Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|-------------------------------|---|--|--|
| | | | 10. <i>Variation Orders CP101 dan CP102</i> 1. <i>President Director Instructions</i> 2. <i>The Need of the Operation & Maintenance Directorate Team</i> 3. <i>Accelerate Phase 3</i> 4. <i>MRT Jakarta subsidies</i> 5. <i>Municipal Bonds</i> 6. <i>QR Code Payment Channel</i> 7. <i>Bike Rack Facilities</i> 8. <i>MTT Card</i> 9. <i>Implementation of MRT Jakarta Activities with the Institute for Transportation & Development Policy (ITDP)</i> 10. <i>Variation Orders CP101 and CP102</i> | |
| 28. | 29 Juli 2019 July 29, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | 1. <i>Variation Order CP101 dan CP 102</i> 2. <i>Inisiatif Strategic Maps</i> 3. <i>Pergub 53, Subsidi dan SPM</i> 4. <i>Fase 2B</i> 5. <i>Pekerjaan OCG Fase 2</i> 6. <i>Pedestrianisasi Kota Tua</i> 7. <i>Panitia Pengadaan CP205</i> 8. <i>Pengelolaan Keamanan dan Kebersihan</i> 9. <i>OMCS Tahap Kedua</i> 10. <i>Investigasi dan Rencana Penanggulangan Bau pada Kereta</i> 11. <i>QR Code Ticketing</i> 12. <i>SAP Fase 2</i> 13. <i>Rencana Aksi Pembentukan Anak Perusahaan EFC</i> 14. <i>Fase 3 (Proyek Jalur Timur-Barat)</i> 15. <i>Pengadaan Brakeshoe</i> 16. <i>CMCS</i> 17. <i>Penyesuaian Harga (IPC 43 - IPC 45)CP 106</i> 18. <i>Variation Orders CP101 & 102</i> 1. <i>Variation Order CP101 and CP 102</i> 2. <i>Strategic Maps Initiative</i> 3. <i>Pergub 53, Subsidies and SPM</i> 4. <i>Phase 2B</i> 5. <i>OCG Phase 2 work</i> 6. <i>Pedestrianization of the Old City</i> 7. <i>CP205 Procurement Committee</i> 8. <i>Safety and Cleanliness Management</i> 9. <i>OMCS 2nd Stage</i> 10. <i>Investigation and Odor Mitigation Plan on Train</i> 11. <i>QR Code Ticketing</i> 12. <i>SAP Phase 2</i> 13. <i>Action Plan for the Formation of an EFC Subsidiary</i> 14. <i>Phase 3 (East - West Line Project)</i> 15. <i>Procurement of Brakeshoe</i> | 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis (Ghamal Peris) tidak hadir karena Perjalanan Dinas <i>Director of Business Development and support (Ghamal Peris) was absent due to business trip</i> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|------------------------------------|---|---|--|
| | | | 16. CMCS 17. Price Adjustment (IPC 43 - IPC 45) CP106 18. Variation Orders CP101 & 102 | |
| 29. | 5 Agustus 2019 August 5, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> Rencana Aksi Pembentukan Anak Perusahaan EFC Fase 3 (Proyek Jalur Timur-Barat) MoU dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) <i>QR Code Ticketing</i> Evaluasi Dampak Kejadian Luar Biasa Padamnya Listrik PLN pada 4 Agustus 2019 Rencana Penyediaan <i>Bike Rack</i> di Stasiun MRT Jakarta Pengelolaan Keamanan dan Kebersihan Area Lebak Bulus Aksesibilitas dan <i>Signage</i> Integrasi Status Persiapan Acara Penganangan KBT Lebak Bulus Model Aset-aset Informasi <i>Variation Orders</i> CP104 & 105 <i>Action Plan for the Formation of an EFC Subsidiary</i> <i>Phase 3 (East-West Line Project)</i> <i>MoU with PT China Indonesia Fast Train (KCIC)</i> <i>QR Ticket Ticketing</i> <i>Evaluate the Impact of the Extraordinary Event of Power Outages on 4 August 2019</i> <i>Plan for Provision of Bike Rack at MRT Jakarta Station</i> <i>Management of the Safety and Cleanliness of the Lebak Bulus Area</i> <i>Accessibility and Signage Integration</i> <i>Status of the Lebak Bulus TOD Launching Event</i> <i>Assets Information Model</i> <i>Variation Orders CP104 & 105</i> | <ol style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Ghamal Peris <p>Direktur Operasi dan Pemeliharaan (Muhammad Effendi) tidak hadir karena Cuti Tahunan <i>Director of Operations and Maintenance (Muhammad Effendi) was absent due to annual leave</i></p> |
| 30. | 12 Agustus 2019 August 12, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> Pembentukan Komite Kerja KBT Penawaran Reklame pada Pilar-pilar Jalur Layang MRT Pemilihan Kantor Akuntan Publik Usulan CCTV & <i>Radio Command Centre</i> Pemasangan Eskalator Pengelolaan Kebersihan Area 200 M di Stasiun MRT Jakarta Penyediaan <i>Bike Rack</i> di Stasiun MRT Jakarta Standar Operasional Prosedur (SOP) Keadaan Darurat Hasil Asuransi Penyelenggaraan Peluncuran MRT Jakarta oleh Quantum Convex | <ol style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Tuhayat Ghamal Peris <p>Direktur Operasi dan Pemeliharaan (Muhammad Effendi) tidak hadir karena Perjalanan Dinas <i>Director of Operations and Maintenance (Muhammad Effendi) was absent due to annual leave</i></p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|------------------------------------|---|---|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 10. Pencanaan KBT Lebak Bulus 11. Tata Kelola Kawasan Berorientasi Transit 12. Evaluasi CMT Pasca Insiden Pemadaman Listrik 13. Tindak Lanjut Negosiasi dengan PLN 14. Pembayaran Digital dengan QR Code 15. Backup Power System 16. Penunjukan Nippon Signal untuk Menjadi Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Modifikasi Sistem AFC untuk Tindak Lanjut Hasil Onsite Bank Indonesia dalam Proses Perijinan MTT 17. Indeks Presepsi Tata Kelola (<i>Corporate Governance Perception Index/CGPI</i>) <ul style="list-style-type: none"> 1. Establishment of the TOD Work Committee 2. Billboard Offers on MRT Flyway Pillars 3. Selection of a Public Accountant Firm 4. Proposed CCTV & Radio Command Center 5. Installation of Escalator 6. Management of 200 M Area Cleaning at MRT Jakarta Station 7. Provision of Bike Rack at MRT Jakarta Station 8. Emergency Standard Operating Procedures (SOP) 9. Insurance Results of the Implementation of MRT Jakarta Launching by Quantum Convex 10. The declaration of Lebak Bulus TOD 11. TOD Area Governance 12. Evaluation of Post-Power Outage Incident CMT 13. Follow-up Negotiations with PLN 14. Digital Payment with QR Code 15. Backup Power System 16. Appointment of Nippon Signal to Become an AFC System Modification Work Contractor to Follow Up on Bank Indonesia Onsite Results in the MTT Licensing Process 17. Corporate Governance Perception Index (CGPI) | |
| 31. | 19 Agustus 2019 August 19, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ul style="list-style-type: none"> 1. Komite Kerja TO 2. Penawaran Reklame pada Pilar-pilar Jalur Layang MRT 3. Pemilihan Kantor Akuntan Publik 4. Usulan CCTV & Radio Command Centre 5. Pemasangan Eskalator 6. Operasional Prosedur (SOP) Keadaan Darurat 7. Evaluasi CMT Pasca Insiden Pemadaman Listrik 8. Backup Power System | <ul style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|------------------------------------|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 9. Pembayaran Digital dengan QR Code 10. Kebersihan dan Keamanan 11. Penyediaan Bike Rack di Stasiun MRT Jakarta 12. Paparan Terkait Bike Rack dan Transit Plaza 13. Program #JalanJakarta 14. Variation Orders CP 101-102 15. Variation Orders CP 103 16. Konsultan OCG Fase 2 17. Tata Kelola Kawasan Berorientasi Transit 18. Realokasi Anggaran <ul style="list-style-type: none"> 1. TO Working Committee 2. Billboard Offers on MRT Flyway Pillars 3. Selection of a Public Accounting Firm 4. Proposed CCTV & Radio Command Center 5. Installation of Escalator 6. Emergency Standard Operating Procedures (SOP) 7. Evaluation of Post Power Outage Incident CMT 8. Backup Power System 9. Digital Payment with QR Code 10. Cleanliness and Safety 11. Provision of Bike Rack at MRT Jakarta Station 12. Exposure to Bike Rack and Transit Plaza 13. #JalanJakarta Program 14. Variation Orders CP 101-102 15. Variation Orders CP 103 16. OCG Consultant Phase 2 17. TOD Area Governance 18. Budget Reallocation | |
| 32. | 26 Agustus 2019 August 26, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ul style="list-style-type: none"> 1. Tindak Lanjut Keputusan Direksi 2. QR Code 3. Tata Kelola Kawasan Berorientasi Transit 4. Biaya Akselerasi dan Gangguan 5. Biaya Finansial IPC 1-39 – CP 106 6. Perpanjangan Kontrak JMCMC 7. Insentif Kinerja Tahunan (IKT) 8. Komitmen Penggunaan RKAP sampai dengan 31 Desember 2019 <ul style="list-style-type: none"> 1. Follow-up to the Directors Decree 2. QR Code 3. TOD Area Governance 4. Acceleration and Disruption Cost 5. Financing Charges IPC 1-39 - CP 106 6. JMCMC Contract Extension 7. Annual Performance Incentives (IKT) 8. Commitment of Using RKAP until 31 December 2019 | <ul style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Tuhayat 4. Ghamal Peris <p>Direktur Operasi dan Pemeliharaan (Muhammad Effendi) tidak hadir karena Izin Sakit Director of Operations and Maintenance (Muhammad Effendi) was absent due to sick leave</p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|---------------------------------------|---|---|---|
| 33. | 2 September 2019 September 2, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Acara/Event Khusus 2. Aspek Safety dan Persiapan Keadaan Darurat 3. Perpanjangan Kontrak JMCMC 4. Skybridge CSW 5. Pembebasan Lahan Fase 2 6. Sosialisasi Program Klola 7. Penyerapan Dana Operasional RKAP 2019 8. Konsultan Hukum 9. Perpanjangan Fase 2B - Ancol Barat 10. Manifes Penumpang 11. Kebersihan Stasiun 12. Program "Sapa Penumpang" – Hari Pelanggan Nasional 13. Optimalisasi Transit Plaza 14. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keadaan Darurat 15. Future Escalator Stasiun MRT Jakarta 16. Program Peningkatan Ridership 17. Integrasi Tiket & Peta Jalan Pembayaran di Masa Depan 18. Proposal Simposium Nasional 19. Variation Orders CP 108 20. Tata Kelola Kawasan Berorientasi Transit 21. Implementasi dan Sertifikasi ISO Terintegrasi <ol style="list-style-type: none"> 1. Standard Operating Procedure (SOP) for Events /Special Events 2. Safety Aspects and Emergency Preparation 3. JMCMC Contract Extension 4. CSW Skybridge 5. Land Acquisition Phase 2 6. Socialization of the Klola Program 7. Absorption of Operational Funds for RKAP 2019 8. Legal Consultant 9. Extension of Phase 2B - Ancol Barat 10. Passenger Manifest 11. Station Cleanliness 12. "Greet Passenger" Program - National Customer Day 13. Optimizing Transit Plaza 14. Emergency Operational Procedure (SOP) 15. Future Escalator Jakarta MRT Station 16. Ridership Improvement Program 17. QR Ticketing Integration & Future Payment Roadmap 18. National Symposium Proposal 19. Variation Orders CP 108 20. TOD Zone Governance | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|---|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 21. TOD Zone Governance 22. Integrated ISO Implementation and Certification | |
| 34. | 9 September 2019 September 9, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ul style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan Rambu-Rambu 2. Pengembangan KBT 3. Pembebasan Lahan Fase 2 4. Penyerapan Anggaran 5. <i>Permit to Work</i> Penempatan Rak Buku 6. Sosialisasi Program Klola 7. Optimalisasi Transit Plaza 8. <i>Future Escalator</i> Stasiun MRT Jakarta 9. Program Peningkatan <i>Ridership</i> 10. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keadaan Darurat 11. Status Pengadaan Kegiatan Tahun Baru 2019 12. Hasil Asuransi STT <i>Revenue Handling</i> (<i>Farebox</i>) 13. Program #RuangBacaJakarta <ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Repair Signages</i> 2. <i>TOD Area Development</i> 3. <i>Land Acquisition Phase 2</i> 4. <i>Budget Absorption</i> 5. <i>Permit to Work Bookshelf Placement</i> 6. <i>Socialization of the Klola Program</i> 7. <i>Optimizing Transit Plaza</i> 8. <i>Future Escalator Jakarta MRT Station</i> 9. <i>Ridership Improvement Program</i> 10. <i>Emergency Operating Procedure Standard (SOP)</i> 11. <i>Status of Procurement of New Activities in 2019</i> 12. <i>Insurance Results of STT Revenue Handling (Farebox)</i> 13. <i>#RuangBacaJakarta Program</i> | <ul style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Tuhiyat 4. Ghamal Peris <p>Direktur Operasi dan Pemeliharaan (Muhammad Effendi) tidak hadir karena Cuti Tahunan</p> <p><i>Director of Operations and Maintenance (Muhammad Effendi) was absent due to annual leave</i></p> |
| 35. | 16 September 2019 September 16, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ul style="list-style-type: none"> 1. Pergantian Sekretaris Dewan Komisaris 2. Proposal Pengembangan Kawasan KBT 3. Tenaga Ahli <i>Safety</i> dan <i>Security</i> 4. <i>Security</i> Lebak Bulus - Transit Plaza 5. Pengelolaan Kebersihan Stasiun MRT 6. Status Pengadaan Kegiatan Baru Tahun 2019 7. Pedoman Pengambilan Keputusan 8. <i>Man Power Planning</i> (MPP) Direktorat Operasi & Pemeliharaan 9. Surat Teguran Kepada Nippon Signal 10. Proposal Kawasan Fase 2 11. Mekanisme Pembebasan Lahan Depo Fase 2 12. Lahan Thamrin 10 | <ul style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Ghamal Peris <p>Direktur Keuangan dan manajemen Korporasi (Tuhiyat) tidak hadir karena Izin Sakit</p> <p><i>Director of Finance and Administration (Tuhiyat) was absent due to sick leave</i></p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|---|---|--|---|
| | | | 13. Pengembangan Kawasan KBT 14. Progres Design Signage Improvement 1. Succession of the Secretary of the Board of Commissioners 2. TOD Area Development Proposal 3. Safety and Security Experts 4. Security Lebak Bulus - Transit Plaza 5. Management of Cleanliness of MRT Stations 6. Status of Procurement of New Activities in 2019 7. Guidelines for Decision Making 8. ManPower Planning (MPP) Directorate of Operations & Maintenance 9. Letter of Rebuke to Nippon Signal 10. Phase II Area Proposal 11. Depot Land Release Mechanism Phase II 12. Thamrin Land 10 13. TOD Area Development 14. Progress Design Signage Improvement | |
| 36. | 23 September 2019 September 23, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | 1. Rekomendasi Jalur Timur-Barat 2. Proposal Pengembangan Kawasan KBT 3. Mekanisme Pembebasan Lahan Depo Fase II 4. Standar Operasional Prosedur Pengembangan Pelatihan 5. Pergantian Chief Dispatcher – Departemen Operation Control Center 6. Tenaga Ahli Liaison Traffic Management 7. Tindak Lanjut Power Blackout & Voltage Dip 8. Prosedur Pengadaan 1. East-West Line Recommendations 2. TOD Area Development Proposal 3. Mechanism of Land Acquisition Depot Phase II 4. Standard Operating Procedures for Training 5. Development Succession of Chief Dispatcher - Department of Operation Control Center 6. Liaison Traffic Management Experts 7. Follow up on Power Blackout & Voltage Dip 8. Procurement Procedures | 1. William P. Sabandar 2. Muhammad Effendi 3. Tuhiyat 4. Ghamal Peris Direktur Konstruksi (Silvia Halim) tidak hadir karena Perjalanan Dinas Director of Construction (Silvia Halim) was absent due to business trip |
| 37. | 30 September 2019 September 30, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | 1. Mekanisme Pembebasan Lahan Depo Fase 2 2. Panduan Rancang Kota (PRK) Fase 2 – Ancol Barat 3. Peraturan Gubernur (Pergub) Subsidi 4. Man Power Planning (MPP) Departemen Civil & General Equipment Maintenance 5. Restrukturisasi Direktorat Operasi & Pemeliharaan | 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|---|---|---|---|
| 37. | 30 September 2019 September 30, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 6. Struktur Organisasi Anak Perusahaan Sarana 7. Tenaga Ahli <i>Liaison Traffic Management</i> 8. Pedoman Pengambilan Keputusan 9. <i>Security Evacuation Drill</i> 10. Pembubaran Panitia Pembentukan Anak Perusahaan Sarana 11. Pembagian Tugas dan Wewenang Divisi <i>Customer Engagement</i> dan <i>Corporate Secretary</i> 12. Proses Bisnis Pengumpulan Tarif Elektronik (EFC) 13. Proposal Pengembangan Kawasan KBT 14. <i>Variation Orders CP103</i> 15. Tiket Manual 1. <i>Depot Land Acquisition Mechanism Phase 2</i> 2. <i>Phase 2 - Ancol West Urban Design Guidelines (PRK)</i> 3. <i>Subsidies Governor Regulation</i> 4. <i>ManPower Planning (MPP) Department of Civil & General Equipment Maintenance</i> 5. <i>Restructuring the Directorate of Operations & Maintenance</i> 6. <i>Organizational Structure of Facility Subsidiaries</i> 7. <i>Liaison Traffic Management Experts</i> 8. <i>Guidelines for Decision Making</i> 9. <i>Security Evacuation Drill</i> 10. <i>The Committee for the Establishment of the Subsidiary for Facilities Dissolution</i> 11. <i>Distribution of Duties and Powers of the Customer Engagement Division and Corporate Secretary</i> 12. <i>Electronic Fare Collection (EFC) Business Process</i> 13. <i>TOD Area Development Proposal</i> 14. <i>Variation Orders CP103</i> 15. <i>Manual Ticket</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |
| 38. | 7 Oktober 2019 October 7, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Anak Usaha KBT 2. Rapingub Fase 2 3. Mekanisme Pengambilan Keputusan 4. Pembebasan Lahan Fase 2 5. Struktur Organisasi Direktorat Operasi dan Pemeliharaan 6. Progres Pengadaan <i>QR Code</i> pada Sistem Gerbang Penumpang 7. Pengadaan Eskalator 8. Kajian Alternatif Energi Gas 9. <i>Variations, Price Adjustment & Financing Charges</i> pada CP 101&102 | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat <p>Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis (Ghamal Peris) tidak hadir karena Perjalanan Dinas <i>Director of Business Development and support (Ghamal Peris) was absent due to business trip</i></p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|-------------------------------------|---|--|---|
| 38 | 7 Oktober 2019 October 7, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | 10. <i>Variations, Price Adjustment & Financing Charges</i> pada CP 104 & 105 11. <i>Variation Orders dan Claim</i> CP107 1. <i>Formation of a TOD Subsidiary</i> 2. <i>Rapimgub Phase II</i> 3. <i>Decision Making Mechanism</i> 4. <i>Land Acquisition Phase II</i> 5. <i>Organizational Structure of the Directorate of Operations and Maintenance</i> 6. <i>Procurement Progress of QR Code on the Passenger Gate System</i> 7. <i>Escalator Procurement Progress</i> 8. <i>Alternative Study of Gas Energy</i> 9. <i>Variations, Price Adjustment & Financing Charges on CP 101 & 102</i> 10. <i>Variations, Price Adjustment & Financing Charges on CP 104 & 105</i> 11. <i>Variation Orders and Claim</i> CP107 | |
| 39 | 14 Oktober 2019 October 14, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | 1. Pembentukan Anak Usaha KBT 2. Pengembangan Program <i>Bike Sharing</i> DKI Jakarta 3. Pembebasan Lahan Fase 2 4. Progres Pengadaan <i>QR Code</i> pada Sistem Gerbang Penumpang 5. Struktur Organisasi Direktorat Operasi dan Pemeliharaan 6. Informasi Keterlambatan Perjalanan Kereta 7. <i>Sharing knowledge Training</i> di Paris 8. Pengajuan Dana Subsidi ke Pemprov DKI Jakarta 9. MPP Tahun 2020 10. Keputusan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System/WBS) 11. Tindak Lanjut Permintaan Pembiayaan Kegiatan Qurban dan Modifikasi Cuaca Oleh Pemprov DKI 12. Persiapan Jalur Sepeda, Rencana Sodetan di Setiabudi, Demarkasi Persiapan Tampias Hujan di Stasiun Layang 13. Peningkatan Pengamanan Jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 14. Pekerjaan Tambahan dan <i>Man-month</i> CA-4 OCG 15. Studi Kelayakan Fase 2B – Kota Tua – Ancol Barat 16. <i>Variations, Price Adjustment & Financing Charges</i> pada CP103 1. <i>Formation of a TOD Subsidiary</i> 2. <i>Development of DKI Jakarta Bike Sharing Program</i> 3. <i>Land Acquisition Phase II</i> 4. <i>QR Code Procurement Progress on the Passenger Gate System</i> 5. <i>Organizational Structure of the Directorate of Operations and Maintenance</i> 6. <i>Train Travel Delay Information</i> 7. <i>Sharing Knowledge Training in Paris</i> 8. <i>Submission of Subsidy Funds to the DKI Jakarta Provincial Government</i> 9. <i>MPP of 2020</i> 10. <i>WBS Decision</i> 11. <i>Follow-up Requests for Financing Qurban Activities and Weather Modifications by DKI Provincial Government</i> 12. <i>Preparation of bicycle lanes, river flow plans in Setiabudi, demarcation of rainwater preparation at elevated stations</i> 13. <i>Increased security ahead of the inauguration of the President and Vice President</i> | 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|--|---|---|--|
| | | | <p>14. <i>Additional works and Man-month CA-4 OCG</i> 15. <i>Feasibility Study Phase IIB - Kota Tua - Ancol Barat</i> 16. <i>Variations, Price Adjustment & Financing Charges on CP103</i></p> | |
| 40 | 21 Oktober 2019 <i>October 21, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <p>1. Rapimgub terkait KBT 2. Evaluasi Anggaran 2020 3. Pengumuman Pengadaan QR Code 4. Tindak Lanjut Program <i>Bike Sharing</i> ke Kadishub DKI 5. Struktur Organisasi Operasi & Pemeliharaan 6. WBS 7. Evaluasi Persiapan Jalur Sepeda 8. Percepatan Pembebasan Lahan Fase 2 9. Progres Percepatan Fase 2 10. KPI & <i>Performance Rewarding System</i> 11. Pelatihan Kepemimpinan Operasi dan Pemeliharaan 12. <i>Variations, Claims, Price Adjustment & Financing Charges</i> pada CP 103 dan CP 107 13. Kajian Opsi Alternatif Sumber Energi untuk Traksi Darurat 14. Kajian Teknis <i>Improvement Backup Power System - Switching LVSWGR</i></p> <p>1. <i>Rapimgub related to TOD</i> 2. <i>Evaluate the 2020 Budget</i> 3. <i>Announcement of QR Code Procurement</i> 4. <i>Follow up on the Bike Sharing program to the Kadishub DKI</i> 5. <i>OM Organizational Structure</i> 6. WBS 7. <i>Evaluate Bicycle Path Preparation</i> 8. <i>Accelerating land acquisition Phase II</i> 9. <i>Phase II acceleration progress</i> 10. KPI & <i>Performance Rewarding System</i> 11. <i>Operation and Maintenance Leadership Training</i> 12. <i>Variations, Claims, Price Adjustment & Financing Charges on CP 103 and CP 107</i> 13. <i>Study of Alternative Energy Source Options for Emergency Traction</i> 14. <i>Technical Review for Improvement of Backup Power System - LVSWGR Switching</i></p> | <p>1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris</p> |
| 41 | 28 Oktober 2019 <i>October 28, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <p>1. Percepatan Pembentukan Anak Perusahaan Kawasan Berorientasi Transit (KBT), Anak Perusahaan Sarana (Operasi), dan Proyek Pasar Blora 2. <i>Manpower Planning (MPP) Kepala Divisi Transit Oriented Development (TOD)</i> 3. RKAP Anggaran 2020 4. Perubahan Keputusan <i>Whistleblowing System (WBS)</i> 5. Program <i>Bike Sharing</i> Kadishub DKI Jakarta 6. Pengadaan Simulator 7. Kebersihan dan Keamanan Pedestrian 8. Kamera CCTV dan <i>Handy Talky (HT)</i> 9. Keputusan Rapimgub Terkait Perjalanan Dinas 10. Skema Kerja Sama Pengadaan Lahan 11. Keputusan Kandidat Mitra Pilar</p> <p>1. <i>Acceleration of the Establishment of Transit Oriented Development (TOD) Subsidiaries, Sarana (Operation)</i></p> | <p>1. William P. Sabandar 2. Muhammad Effendi 3. Tuhayat 4. Ghamal Peris</p> <p>Direktur Konstruksi (Silvia Halim) tidak hadir karena Cuti Tahunan <i>Director of Construction (Silvia Halim) was absent due to annual leave</i></p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|--|---|---|--|
| | | | <p><i>Subsidiaries, and Blora Market Projects</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. <i>Manpower Planning (MPP) Head of Transit Oriented Development (TOD) Division</i> 3. <i>RKAP Budget 2020</i> 4. <i>Changes to the Whistleblowing System (WBS) Decision</i> 5. <i>DKI Kadishub Bike Sharing Program</i> 6. <i>Procurement Simulator</i> 7. <i>Pedestrian Hygiene and Safety</i> 8. <i>CCTV Cameras and Handy Talky (HT)</i> 9. <i>Rapimgub Decree Regarding Official Travel</i> 10. <i>Land Acquisition Cooperation Scheme</i> 11. <i>Decision of Pillar Partner</i> | |
| 42 | 4 November 2019 <i>November 4, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Isu Prioritas untuk TGUPP 2. <i>Micro Library</i> di Terowongan Kendal 3. Pengadaan Simulator 4. <i>Whistleblowing System (WBS)</i> 5. Program <i>Bike Sharing</i> dan Kerja Sama <i>Grab Wheels</i> 6. Pembebasan Lahan Area Stasiun Kota 7. Logo Dishub pada <i>Pilot Project Signage</i> Stasiun Blok M 8. Kebersihan Saluran Air di Stasiun Bawah Tanah 9. Penyelenggaraan MRT Jakarta Festival - Maret 2020 1. <i>Priority Issues for TGUPP</i> 2. <i>Micro Library in Kendal Tunnel</i> 3. <i>Simulator Procurement</i> 4. <i>Whistleblowing System (WBS)</i> 5. <i>Bike Sharing and Grab Wheels Cooperation Program</i> 6. <i>Land Acquisition of the City Station Area</i> 7. <i>Dishub logo on Blok M Station Pilot Project Signage</i> 8. <i>Cleanliness of Drains in the Underground Station</i> 9. <i>Implementation of MRT Jakarta Festival - March 2020</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Muhammad Effendi 3. Tuhiyat 4. Ghamal Peris <p>Direktur Konstruksi (Silvia Halim) tidak hadir karena Cuti Tahunan <i>Director of Construction (Silvia Halim) was absent due to annual leave</i></p> |
| 43 | 11 November 2019 <i>November 11, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Isu Prioritas untuk TGUPP 2. Hasil Rapat Gubernur terkait Pembentukan Perusahaan Baru 3. Kawasan Berorientasi Transit (KBT) dan Pengelola Kawasan 4. Penyelesaian Kontrak Kontraktor Fase 1 dan Progres Fase 2 5. Progres Izin MTT dari Bank Indonesia 6. Pengadaan QR Code 7. <i>Information Center</i> Dukuh Atas dan <i>Micro Library</i> 8. Rekomendasi <i>Whistleblowing System (WBS)</i> 9. Sosialisasi Maket (<i>Mock Up</i>) Rambu (<i>Signage</i>) di Stasiun Blok M BCA 10. Hasil Konsinyering AFC 11. Hasil Audit Eksternal ISO Terintegrasi Tahap I 12. Kajian Pengadaan X-Ray Sepanjang Tahun 2020 13. Proses Pergub Pengelola Kawasan dan PRK 5 Kawasan 14. <i>Variations, Claims, Price Adjustment & Financing Charges</i> pada CP 107 1. <i>Priority Issues for TGUPP</i> 2. <i>Results of the Governor's Meeting regarding the Establishment of a New Company</i> 3. <i>Transit Oriented Development (TOD) and Area Management</i> 4. <i>Completion of Phase I Contractors and Phase II Progress</i> 5. <i>Progress of MTT Permit from Bank Indonesia</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat <p>Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis (Ghamal Peris) tidak hadir karena Cuti Tahunan <i>Director of Business Development and support (Ghamal Peris) was absent due to annual leave</i></p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|---------------------------------------|---|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 6. Procurement of QR Code 7. Dukuh Atas and Micro Library Information Center 8. Whistleblowing System (WBS) Recommendations 9. Socialization of Mock Up Signage at Blok M BCA Station 10. AFC Consignment Results 11. Results of the Integrated ISO External Phase I Audit 12. X-Ray Procurement Study Throughout 2020 13. Regional Governor Regulation Process and PRK 5 Regions 14. Variations, Claims, Price Adjustment & Financing Charges on CP 107 | |
| 44 | 18 November 2019 November 18, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ul style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Izin sebagai Penerbit Uang Elektronik 2. Progres Pembentukan Perusahaan Baru 3. Penerbitan Pergub KBT dan PRK 4. Rekrutmen Kepala Divisi TOD 5. Transport Hub Dukuh Atas 6. Penataan Utilitas 7. Revisi Pergub 53 Tahun 2017 8. Pembuatan Galeri di Bundaran HI 9. Penyelesaian Whistleblowing System 10. Sosialisasi Mock-Up Signage 11. Kajian Pengadaan X-Ray dan Pengadaan Simulator 12. Penyusunan Frequently Asked Question (FAQ) Multi Trip Ticket (MTT) 13. Hasil Survei Kontraktor pada Tender CP 202-203 14. MRT Summit Maret 2020 15. Automatic Fare Collection (AFC) 16. #RuangBacaJakarta dalam Proposal Komite Buku Nasional untuk World Book Capital 2022 17. Progres Digital Library 18. Peluncuran Kartu MTT 19. Skema Penjualan MTT 20. Lingkup Wilayah Media Luar Ruang MRT Jakarta Fase 1 dalam Kerja Sama Mitra Pilar 1. Approval for License as Electronic Money Issuer 2. Progress on Establishment a New Company (NewCo) 3. Issuance of the Pergub TOD and PRK 4. Recruitment of TOD Division Head 5. Hamlet Upper Transport Hub 6. Arrangement of Utilities 7. Revised Governor Regulation / Pergub 53 of 2017 8. Making Gallery at HI Roundabout 9. Completion of the Whistleblowing System 10. Mock-Up Signage Socialization 11. X-Ray Procurement and Simulator Procurement Studies 12. Preparation of Multi Trip Ticket (MTT) Frequently Asked Question (FAQ) 13. Contractor Survey Results on CP 202-203 Tender 14. MRT Summit March 2020 15. Automatic Fare Collection (AFC) 16. #RuangBacaJakarta in the National Book Committee Proposal for World Book Capital 2022 17. Digital Library Progress 18. Launching MTT Card 19. MTT Sales Scheme 20. The scope of the Jakarta MRT Phase I Outdoor Media Area in Pillar Partner Cooperation | <ul style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Tuhayat <p>Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis (Ghamal Peris) tidak hadir karena Cuti Tahunan, Direktur Operasi dan Pemeliharaan tidak hadir karena Perjalanan Dinas. Director of Business Development and support (Ghamal Peris) was absent due to annual leave, Director of operations and maintenance was absent due to business trip.</p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|---------------------------------------|---|---|---|
| 45 | 25 November 2019 November 25, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Pembayaran <i>Financing Charges, Claims</i>, dan <i>Variations</i> dalam Percepatan Pengerjaan Fase 1 2. Percepatan Pembebasan Lahan Fase 2 3. Penataan Utilitas 4. Persiapan <i>Soft Launching Multi Trip Ticket</i> (MTT) 5. Perkembangan Pergub 53 6. <i>Head of Agreement</i> Perusahaan Baru (NewCo) PT KAI dan PT MRT Jakarta (Perseroda) 7. Sosialisasi Maket (<i>Mock-up</i>) Rambu (<i>Signage</i>) 8. Proses Penerbitan Pergub KBT dan PRK 5 Kawasan 9. Posisi Struktural Tiap Direktorat 10. Perkembangan Pembangunan Galeri Mini Museum Stasiun Bundaran HI 11. Penutupan Kasus <i>Whistleblowing System</i> (WBS) 12. Kajian Pengadaan X-Ray dan Simulator 13. Skala Prioritas dalam Anggaran Tahun 2020 14. Percepatan Pembangunan Fase 2 15. Pembentukan Anak Perusahaan dan Ventura Bersama 16. Kerja Sama Proyek <i>Micro Library</i> dengan Komite Buku Nasional 17. Pembayaran Dewatering 18. Proses Pengambilan Keputusan 19. <i>Variations, Claims, Price Adjustment & Financing Charges</i> pada CP 107 20. Skema Otoritas Penandatanganan Kontrak Fase II 21. Penagihan Selisih Denda pada Otego 22. Penyebutan Lingkup Media Luar Ruang 23. Progres <i>QR Code Ticketing</i> 24. Persiapan Rivi Final FGD <i>Mock-up Signage</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Settlement of Financing Charges, Claims and Variations in the Acceleration of Phase I Work</i> 2. <i>Accelerating Land Acquisition Phase II</i> 3. <i>Utility Setup</i> 4. <i>Preparing for the Soft Launching Multi Trip Ticket (MTT)</i> 5. <i>Development of the Governor Regulation 53</i> 6. <i>Head of Agreement of New Companies (NewCo) of PT KAI and PT MRT Jakarta (Perseroda)</i> 7. <i>Mock-up Socialization Signs</i> 8. <i>The process of issuing Pergub TOD and PRK 5 Regions</i> 9. <i>Structural Position of Each Directorate</i> 10. <i>Development of the Mini Gallery Museum of the HI Roundabout Station</i> 11. <i>Closure of the Whistleblowing System (WBS) Case</i> 12. <i>X-Ray Procurement and Simulator Study</i> 13. <i>Priority Scale in the 2020 Budget</i> 14. <i>Accelerated Development Phase II</i> 15. <i>Formation of a Subsidiary and Joint Venture (NewCo)</i> 16. <i>Cooperation of the Micro Library Project with the National Book Committee</i> 17. <i>Dewatering Payment</i> 18. <i>Decision Making Process</i> 19. <i>Variations, Claims, Price Adjustment & Financing Charges on CP 107</i> 20. <i>Authority Scheme for Signing Phase II Contracts</i> 21. <i>Billing the Difference in Fines on Otego</i> | |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|-------------------------------------|---|--|---|
| | | | 22. <i>Scope of Media Luar Ruang</i> 23. <i>QR Code Ticketing Progress</i> 24. <i>Preparation of Final Review FGD Mock-up Signage</i> | |
| 46 | 2 Desember 2019 December 2, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | 1. Penyelesaian Pembayaran <i>Financing Charges, Claims</i> , dan <i>Variations</i> dalam Percepatan Pengerjaan Fase 1 2. Efisiensi Anggaran 2020 3. Progres Pergub 53, Pergub KBT, dan Kartu MTT pada Gubernur DKI 4. Kegiatan Kunjungan Tamu Khusus 5. Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>) 6. Acara Tahun Baru 2020 (<i>Jakarta Night Festival</i>) 7. Progres Pergub KBT dan Pergub 140 8. Proses Pembebasan Lahan Fase 2 9. Publikasi dan Sosialisasi Kartu MTT 10. Integrasi Antarmoda dengan Kartu MTT 11. Pemasangan Maket (<i>Mock-up</i>) Rambu (<i>Signage</i>) di Kawasan Stasiun Dukuh Atas 12. Instalasi Galeri di Stasiun Bundaran HI 13. Capaian Tahunan Korporasi 14. Posisi Struktural Anak Perusahaan Sarana dan KBT 15. Progres EFC 16. Keputusan <i>Whistleblowing System (WBS)</i> 17. Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra Pembayaran <i>QR Code</i> 18. Kajian Konsultan dalam Pembentukan Perdir Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1. <i>Settlement of Financing Charges, Claims and Variations in the Acceleration of Phase I Work</i> 2. <i>2020 Budget Efficiency</i> 3. <i>Progress Governor Regulation 53, Governor Regulation TOD, and MTT Cards at the Governor of DKI</i> 4. <i>Special Guest Visit Activities</i> 5. <i>Corporate Social Responsibility (CSR) Budget</i> 6. <i>2020 New Year's Event (Jakarta Night Festival)</i> 7. <i>Progress of Governor Regulation TOD and Governor Regulation 140</i> 8. <i>Process of Land Acquisition Phase II</i> 9. <i>Publication and Socialization of MTT Cards</i> 10. <i>Inter mode Integration with MTT Cards</i> 11. <i>Installing Mock-up Signs in the Upper Hamlet Station Area</i> 12. <i>Gallery Installation at HI Roundabout Station</i> 13. <i>Corporate Annual Achievement</i> 14. <i>Structural Position of Subsidiaries for Facilities and TOD</i> 15. <i>EFC Progress</i> 16. <i>Whistleblowing Decision (WBS)</i> 17. <i>Cooperation Agreement with QR Code Payment Partners</i> 18. <i>Consultant Study on Building Floor Coefficient Perdir Formation (KLB)</i> | 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |
| 47 | 9 Desember 2019 December 9, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | 1. <i>Head of Agreement (HoA)</i> Perusahaan Baru PT KAI (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda) 2. Penyelesaian Pembayaran <i>Financing Charges, Claims</i> , dan <i>Variations</i> dalam Pengerjaan Fase 1 3. Efisiensi Anggaran 2020 4. Progres Pergub 53, Pergub KBT, dan Pergub 140 | 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhayat 5. Ghamal Peris |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|-----------------|-----------------|--|------------------------------|
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Anggaran CSR 6. Acara Tahun Baru 2020 (Jakarta Night Festival) 7. Proses Pembebasan Lahan Fase 2 8. Penggunaan Nama Stasiun MRT Jakarta Fase 2 9. Integrasi Antarmoda Menggunakan MTT 10. Pemasangan Maket (<i>Mock-up</i>) Rambu (<i>Signage</i>) di Kawasan Stasiun Dukuh Atas 11. Proses Pembentukan Struktural Anak Perusahaan Sarana 12. Keputusan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) 13. Sosialisasi Penggunaan <i>QR Code</i> 14. Perjanjian Kerja Sama Go-pay 15. Pertimbangan Penandatanganan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan 16. <i>Overview</i> Kebijakan Kesehatan 2019 17. Sistem Pengolaan Kinerja 18. <i>Person Evaluation</i> 19. <i>Variations, Claims, Price Adjustment & Financing Charges</i> pada CP 108 20. Penguatan Pengamanan Hari Raya Natal Tahun 2019 dan Tahun Baru 2020 21. Pengadaan X-RAY Tahun 2020 22. Paket Pengamanan Luar (Paket 4) Tahun 2020 23. Pembayaran Biaya Pengamanan Luar oleh PAM OBVIT 24. Biaya Penguatan Pengamanan terkait Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI | |
| | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Head of Agreement (HoA) of PT KAI (Persero) and PT MRT Jakarta (Perseroda) for NewCo</i> 2. <i>Settlement of Financing Charges, Claims and Variations in Phase I Work</i> 3. <i>2020 Budget Efficiency</i> 4. <i>Progress Governor Regulation 53, Governor Regulation TOD, and Governor Regulation 140</i> 5. <i>Corporate Social Responsibility (CSR) Budget</i> 6. <i>2020 New Year's Event (Jakarta Night Festival)</i> 7. <i>Land Acquisition Process Phase II</i> 8. <i>The Phase II Jakarta MRT Station Name Application</i> 9. <i>Transportation Integration Using MTT</i> 10. <i>Mock-up Installation of Signage in the Upper Hamlet Station Area</i> 11. <i>Structural Formation Process of Subsidiary Companies</i> 12. <i>Whistleblowing Decision (WBS)</i> 13. <i>Socialization of the Use of QR Code</i> 14. <i>Go-pay Cooperation Agreement</i> 15. <i>Consideration of the Signing of the Decree on Appointment of Employees</i> 16. <i>Overview of Health Policy 2019</i> 17. <i>Performance Management System</i> 18. <i>Person Evaluation</i> 19. <i>Variations, Claims, Price Adjustment & Financing Charges on CP 108</i> 20. <i>Strengthening of Safeguards for Christmas Day 2019 and New Year 2020</i> 21. <i>X-RAY Procurement 2020</i> 22. <i>Outer Security Package (Package 4) 2020</i> 23. <i>Payment of External Security Fees by PAM OBVIT</i> 24. <i>Security Strengthening Costs related to the Inauguration of the President and Vice President of the Republic of Indonesia</i> | |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|---------------------------------------|---|---|--|
| 48 | 16 Desember 2019 December 16, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> Pengantar Rapat oleh Direktur Utama Persiapan Pembentukan Perusahaan Baru <i>Financing Charges</i> Revisi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 53 dan Penerbitan Pergub No. 140 Peraturan Direksi terkait CSR Revisi Penetapan Lokasi (Penlok) Pembebasan Lahan Fase 2 Penamaan Stasiun Pembayaran Pajak untuk Pembentukan Anak Usaha Struktur Organisasi Anak Perusahaan Sarana dan Anak Perusahaan KBT Program Penghijauan di Depo Lebak Bulus Sumber Daya Manusia Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Peraturan Direksi terkait <i>Nominated Sub-Contractor</i> <i>Shareholder Agreement</i> (SHA) dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Revisi Pedoman Manajemen Risiko Perhitungan Subsidi Hasil Indeks Kepuasan Pelanggan | <ol style="list-style-type: none"> William P. Sabandar Silvia Halim Muhammad Effendi Ghamal Peris <p>Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi (Tuhayat) tidak hadir karena Perjalanan Dinas <i>Director of Finance and Corporate Management (Tuhayat) was absent due to business trip</i></p> |
| 49 | 23 Desember 2019 December 23, 2019 | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 Meeting Room Wisma Nusantara 21 st Floor | <ol style="list-style-type: none"> Persiapan Pembentukan Perusahaan Baru <i>Financing Charges</i> Revisi Penetapan Lokasi (Penlok) Pembebasan Lahan Fase 2 Penamaan Stasiun Struktur Organisasi Anak Perusahaan Sarana Program Penghijauan di Depo Lebak Bulus <i>Variations, Claims, Price Adjustment & Financing Charges</i> pada CP 107 Persiapan Operasi Stasiun pada Libur Natal dan Tahun Baru 2020 Penambahan Aturan <i>Same Station</i> Program Preventif Pengelolaan Kebersihan dan Modifikasi untuk Meminimalisir Potensi Banjir di Stasiun MRT Jakarta Penguatan Keamanan Natal dan Tahun Baru 2020 | <ol style="list-style-type: none"> Silvia Halim Muhammad Effendi Tuhayat <p>Direktur Utama (William P. Sabandar) dan Direktur Pengembangan dan Dukungan Bisnis (Ghamal Peris) tidak hadir karena Cuti Tahunan <i>President Director (William P. Sabandar) and Director of Business development and support (Ghamal Peris) were absent due to annual leave</i></p> |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|----|--|---|---|---|
| | | | 13. Perhitungan Subsidi Tahun Anggaran 2019 1. <i>Preparation for the Establishment of NewCo</i> 2. <i>Financing Charges</i> 3. <i>Revised Location Determination (Locator)</i> 4. <i>Land Acquisition Phase 2</i> 5. <i>Naming the Station</i> 6. <i>Organizational Structure of Facility Subsidiaries</i> 7. <i>Greening Program in Lebak Bulus Depot</i> 8. <i>Variations, Claims, Price Adjustment & Financing Charges on CP 107</i> 9. <i>Preparation of Station Operations on Christmas and New Year 2020 Holidays</i> 10. <i>Addition to Same Station Rules</i> 11. <i>Preventive Programs for Hygiene Management and Modification to Minimize Potential Floods at MRT Jakarta stations</i> 12. <i>Jakarta MRT Station Strengthening of Christmas and New Year's</i> 13. <i>Calculation of Subsidies for Fiscal Year 2019</i> | |
| 50 | 31 Desember 2019 <i>December 31, 2019</i> | Ruang Rapat Wisma Nusantara Lt. 21 <i>Meeting Room Wisma Nusantara 21st Floor</i> | 1. Posisi Direksi dan Komisaris PT Perusahaan Baru 2. Penyetoran Modal Dasar PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk PT Perusahaan Baru 3. Tim Pendamping Pembentukan Perusahaan Baru 4. Pertimbangan Penagihan PT QuantumConvex International 5. Penagihan Denda Keterlambatan Pembayaran BNI dan Astra 6. Pengadaan Konsultan Pendamping Perusahaan Baru 1. <i>Position of Directors and Commissioners of PT NewCo</i> 2. <i>Paid in Capital of PT MRT Jakarta (Perseroda) for PT NewCo</i> 3. <i>NewCo Formation Assistance Team</i> 4. <i>PT QuantumConvex International Billing Considerations</i> 5. <i>Collection of Late Payment Fees for BNI and Astra</i> 6. <i>NewCo Assistant Consultants Procurement</i> | 1. William P. Sabandar 2. Silvia Halim 3. Muhammad Effendi 4. Tuhiyat 5. Ghamal Peris |

Tabel 6.43
Table 6.43

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN BOARD OF COMMISSIONERS, DIRECTORS AND / OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

INFORMATION ON MAJOR / CONTROLLING SHAREHOLDERS

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Perseroan merupakan BUMD Provinsi DKI Jakarta, dengan kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 100,00%, yang terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung melalui Perumda Pasar Jaya sebesar 0,01%. Dengan demikian Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Shareholders are individuals or legal entities that legally own Corporate shares. The Corporate is DKI Jakarta Province Regionally Owned Enterprise, with 100% ownership of the DKI Jakarta Provincial Government, consisting of 99.99% direct ownership and indirect ownership through Perumda Pasar Jaya 0.01%. Therefore the DKI Jakarta Provincial Government act as the main Shareholder / Controller of the Corporation.

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI

DISCLOSURE OF AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND MAJOR / CONTROLLING SHAREHOLDERS

Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi saling menghormati pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki Pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan antara lain tanggung jawab, kewajiban, wewenang, dan hak masing-masing.

Main / Controlling Shareholders, Board of Commissioners and Directors respect each other in carrying out their respective duties, responsibilities and authorities in accordance with statutory regulations and the Articles of Association. The Board of Commissioners and Directors of the Corporation have work guidelines and procedures which include, among others, their respective responsibilities, obligations, authority and rights.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maka antar anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

In accordance with the Corporate's Articles of Association, between members of the Board of Commissioners and between members of the Board of Commissioners and members of the Directors there is no family relationship to the third degree, either in a straight line or sideways or in a relationship. The family relationship of members of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners and / or members of the Directors and Main/Controlling Shareholders can be seen in the table below:

| | Hubungan Afiliasi Affiliate Relation | | |
|--|--|-------------------------------|--|
| | Dewan Komisaris Board of Commissioners | Direksi Board of Directors | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemegang Saham Utama/Pengendali) DKI Jakarta Government (Main Shareholder) |
| Dewan Komisaris Board of Commissioners | | | |
| Muhammad Syaugi (Komisaris Utama President Commissioner)* | x | x | x |
| Rukijo (Komisaris Commissioner) | x | x | √ |
| Zulfikri (Komisaris Commissioner) | x | x | √ |
| Mukhtasor (Komisaris Commissioner) | x | x | x |

| | Hubungan Afiliasi Affiliate Relation | | |
|---|--|-------------------------------|--|
| | Dewan Komisaris Board of Commissioners | Direksi Board of Directors | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemegang Saham Utama/Pengendali) DKI Jakarta Government (Main Shareholder) |
| Adnan Pandu Praja (Komisaris Commissioner) | x | x | √ |
| Direksi Directors | | | |
| William P. Sabandar (Direktur Utama President Director) | x | x | x |
| Silvia Halim (Direktur Konstruksi Director of Construction) | x | x | x |
| Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan Director of Operations & Maintenance) | x | x | x |
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis Director of Business Development) | x | x | x |
| Tuhyat (Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi Director of Finance & Corporate Management) | x | x | x |

√ = terdapat adanya hubungan | x = tidak terdapat adanya hubungan
√=there is relation | x=there is no relation

Tabel 6.44
Table 6.44

Rukijo memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian Keuangan sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perseroan. Zulfikri memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari entitas pemilik akhir Perseroan. Adnan Pandu Praja memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali, melalui jabatan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Rukijo has an affiliation with the Major / Controlling Shareholders, through his position within the Ministry of Finance as part of the Corporation's final owner entity. Zulfikri has an affiliated relationship with Major / Controlling Shareholders, through his position within the Ministry of Transportation as part of the Corporation's final owner entity. Adnan Pandu Praja has an affiliation with the Major / Controlling Shareholders, through his position within the DKI Jakarta Provincial Government as the Open Selection Committee for the Middle Senior Leadership and Primary of the DKI Jakarta Provincial Government.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris Perseroan tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pengangkatan Dewan Komisaris telah melalui uji kepatutan dan kelayakan.

The concurrent position of the Board of Commissioners of the Corporation does not violate the applicable laws and regulations. All appointments of the Board of Commissioners have passed the fit and proper test.

PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

CONCURRENT POSITION DISCLOSURE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Hubungan kepengurusan anggota Direksi pada perusahaan lain dan/atau institusi lain di luar Perseroan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perseroan periode tahun 2019 sebagai berikut:

Relationship of management of members of the Directors to other companies and/or other institutions outside the Corporation that may cause conflicts of interest both directly and indirectly with the interests of the Corporation for the period 2019 as follow:

| | Kepengurusan pada Perusahaan Lain Position in Other Company | | |
|--|--|---|-----------------------------------|
| | Sebagai Anggota Dewan Komisaris As a Member of the Board of Commissioners | Sebagai Anggota Direksi As a Member of the Directors | Jabatan Lainnya Other Position |
| Dewan Komisaris Board of Commissioners | | | |
| Muhammad Syaugi (Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>)* | X | X | X |
| Rukijo (Komisaris <i>Commissioner</i>) | X | X | √ |
| Zulfikri (Komisaris <i>Commissioner</i>) | X | X | √ |
| Mukhtasor (Komisaris <i>Commissioner</i>) | X | X | X |
| Adnan Pandu Praja (Komisaris <i>Commissioner</i>) | X | X | √ |
| Direksi Directors | | | |
| William P. Sabandar (Direktur Utama <i>President Director</i>) | X | X | X |
| Silvia Halim (Direktur Konstruksi <i>Director of Construction</i>) | X | X | X |
| Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Director of Operations & Maintenance</i>) | X | X | X |
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>) | X | X | X |
| Tuhayat (Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Finance & Corporate Management</i>) | X | X | X |

√ = ada | x = tidak ada
√ = there is | x = none

Tabel 6.45 Kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi pada Perusahaan Lain
Table 6.45 Board of Commissioners and Directors' Positions in Other Companies

Penjelasan terkait kepengurusan pada perusahaan lain adalah sebagai berikut: *Explanations related to management in other companies are as follows:*

| Nama dan Jabatan Name and Position | Jabatan pada Perusahaan Lain Other Positions |
|--|---|
| Rukijo (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2016-sekarang) <i>Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2016-present)</i> |
| Zulfikri (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (2017-sekarang) <i>Director General of Railways, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia (2017-present)</i> |
| Adnan Pandu Praja (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Komisaris PT TASPEN Properti Indonesia (2019-Sekarang) Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2019 – Sekarang) <i>Commissioner of PT TASPEN Properti Indonesia (2019-Present) Open Selection Committee for High and Middle Leadership Position of DKI Jakarta Provincial Government (2019 - Present)</i> |

Tabel 6.46 Penjelasan Kepengurusan pada Perusahaan Lain
Table 6.46 Details on Management Position in other Companies

Rangkap jabatan Dewan Komisaris merupakan bagian dari pengelolaan proyek MRT Jakarta yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

The concurrent position of the Board of Commissioners is part of the management of the Jakarta MRT project which involves a number of stakeholders, including the Central Government and the DKI Jakarta Provincial Government.

PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

DISCLOSURE OF SHARE OWNERSHIP OF BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada Perseroan dan perseroan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Demi menjaga independensi, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menyampaikan keterbukaan transaksi pembelian dan penjualan surat berharga.

Share ownership of members of the Board of Commissioners and Directors of the Corporation and other corporation is regularly disclosed through the list of share ownership of the members of the Board of Commissioners and Directors. In order to maintain independence, all members of the Board of Commissioners and Directors are required to submit to the transparency of the purchase and sale of securities transactions.

Hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak melakukan penerbitan saham untuk dimiliki oleh publik, dan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan demikian, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham Perseroan.

Until the end of 2019, the Corporation did not issue shares to be owned by the public and did not have a shareholding program by management. Therefore, the Board of Commissioners and the Directors do not own the Corporate's shares.

Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dan kepemilikan saham perseroan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Following is the transparency of the Corporate's share ownership by the Board of Commissioners and Directors, and ownership of other corporations above 5% by the Board of Commissioners and Directors of the Corporation which could lead to a potential conflict of interest in decision making.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Directors Share Ownership

| | Kepemilikan Saham Share Ownership | |
|---|--------------------------------------|--|
| | PT MRT Jakarta (Perseroda) | Perusahaan Lain > 5% Other Company > 5% |
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | | |
| Muhammad Syaugi (Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>)* | Nihil None | Nihil None |
| Rukijo (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Nihil None | Nihil None |
| Zulfikri (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Nihil None | Nihil None |
| Mukhtasor (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Nihil None | Nihil None |
| Adnan Pandu Praja (Komisaris <i>Commissioner</i>) | Nihil None | Nihil None |
| Direksi <i>Directors</i> | | |
| William P. Sabandar (Direktur Utama <i>President Director</i>) | Nihil None | Nihil None |
| Silvia Halim (Direktur Konstruksi <i>Director of Construction</i>) | Nihil None | Nihil None |
| Muhammad Effendi (Direktur Operasi dan Pemeliharaan <i>Director of Operations & Maintenance</i>) | Nihil None | Nihil None |
| Ghamal Peris (Direktur Pengembangan Bisnis <i>Director of Business Development</i>) | Nihil None | Nihil None |
| Tuhyat (Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi <i>Director of Finance & Corporate Management</i>) | Nihil None | Nihil None |

Tabel 6.47
Table 6.47

ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

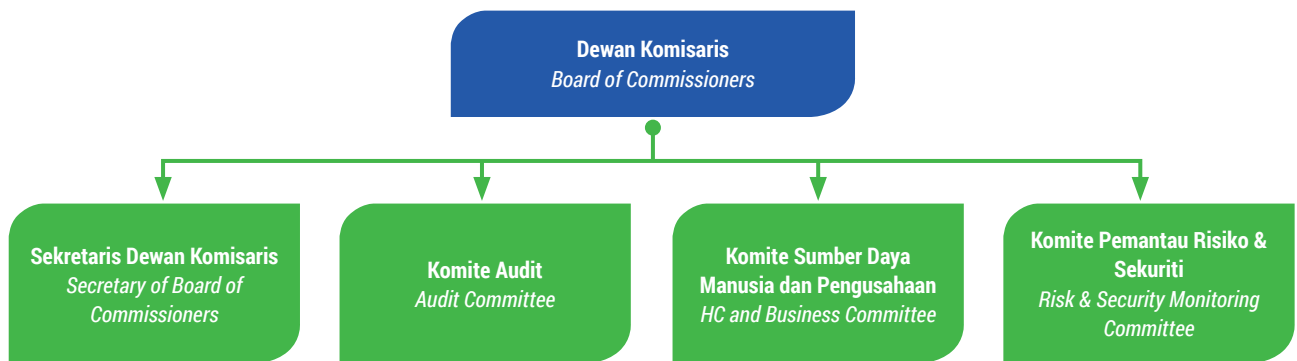
BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran serta rekomendasi, Dewan Komisaris dibantu oleh 4 (empat) organ pendukung, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite SDM dan Pengusahaan, serta Komite Pemantau Risiko & Sekuriti.

In carrying out its supervisory duties and responsibilities, providing advice and recommendations, the Board of Commissioners is assisted by 4 (four) supporting organs, namely the Secretary of the Board of Commissioners, the Audit Committee, HC and Business Committee, and the Risk & Security Monitoring Committee.

DEWAN KOMISARIS DAN ORGAN PENUNJANG

Board of Commissioners and Supporting Organs



Figur 6.8
Figure 6.8

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Selain itu, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran yang besar dalam memastikan Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan praktik terbaik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The Secretary of the Board of Commissioners has duties and functions in terms of carrying out administrative and secretarial activities within the scope of the Board of Commissioners' supervisory duties and is directly responsible to the Board of Commissioners. In addition, the Secretary of the Board of Commissioners has a large role in ensuring the Board of Commissioners applies GCG principles in accordance with best practices and applicable laws and regulations.

Kualifikasi Menjadi Sekretaris Dewan Komisaris

Qualifications to Become Secretary of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan Permen BUMN No. PER-12/MBU/2012 harus memenuhi persyaratan memahami sistem pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan badan usaha; memiliki integritas yang baik, memahami fungsi kesekretariatan, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

The Secretary of the Board of Commissioners based on Minister of State Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 must meet the requirements to understand the management, supervision and business entity development system; have good integrity, understand the secretarial function, and have the ability to communicate and coordinate well.

Ketentuan Masa Jabatan

Terms of Office Period

Ketentuan masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris tidak diatur dalam Anggaran Dasar maupun Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi. Pengangkatan dilakukan oleh Dewan Komisaris, kemudian dicatatkan dalam perjanjian kerja dengan Perseroan secara tahunan.

Provisions for the term of office of the Secretary of the Board of Commissioners are not regulated in the articles of association or the board manual. The appointment is carried out by the Board of Commissioners, then recorded in an annual work agreement with the Corporation.

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary of the Board of Commissioners

Sekretaris Dewan Komisaris dari tanggal 1 Januari 2019 hingga 30 September 2019 dijabat oleh Akbar Anwar berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 060-2/DIR-MRT/SPK-HR/VI/2019. Pergantian pejabat Sekretaris Dewan Komisaris dari Akbar Anwar menjadi Rendi Alhial efektif berlaku per tanggal 1 Oktober 2019 hingga saat ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 281-1 Tahun 2019.

The Secretary of the Board of Commissioners from 1 January 2019 to 30 September 2019 was held by Akbar Anwar based on the Decree of the Directors Number 060-2/DIR-MRT/SPK-HR/VI/2019. The change of official Secretary of the Board of Commissioners from Akbar Anwar to Rendi Alhial is effective from October 1, 2019 to the present based on the tDecree of the Directors No. 281-1 of 2019.



Rendi Alhial

Sekretaris Dewan Komisaris (Periode Jabatan: 01/10/2019 – 30/09/2020, Periode ke-1)
Secretary of the Board of Commissioners (Position Period: 01/10/2019 - 09/30/2020, 1st Period)

Kewarganegaraan *Citizenship*

Warga Negara Indonesia

Indonesian

Usia *Age*

35 Tahun

35 Years Old

Domisili *Domicile*

Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat

Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat

Tempat dan Tanggal Lahir *Place and Date of Birth*

Jakarta, 23 Desember 1984

Jakarta, December 23, 1984

Riwayat Pendidikan *Educational History*

2011 Magister Psikologi, Jurusan Profesi Psikologi Klinis Dewasa, Universitas Indonesia

2011 Masters in Psychology, Department of Adult Clinical Psychology, University of Indonesia

Riwayat Pekerjaan *History of Employment*

- Human Capital Services Department Head, MRT Jakarta, 2018-2019
- Human Resources Department Head, MRT Jakarta 2016-2017
- Human Resources Operation Specialist, CSUL Finance, 2013-2016

- Human Capital Services Department Head, Jakarta MRT, 2018-2019
- Human Resources Department Head, Jakarta MRT 2016-2017
- Human Resources Operation Specialist, CSUL Finance, 2013-2016

Sertifikasi *Certification*

- Manajer Sumber Daya Manusia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, 2019
- Best Practices in Implementing Effective Governance from Rules to Principles, PAII, 2019
- Green Belt Lean Six Sigma, Uno Talent, 2019
- Management Development Program, PPM, 2019
- HR Business Partner Program, GML, 2019

- Human Resources Manager, National Professional Certification Agency, 2019
- Best Practices in Implementing Effective Governance from Rules to Principles, PAII, 2019
- Lean Six Sigma Green Belt, Uno Talent, 2019
- Management Development Program, PPM, 2019
- HR Business Partner Program, GML, 2019

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners

Berdasarkan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, tugas pokok dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris adalah membantu Dewan Komisaris dalam kegiatan kesekretariatan yang mencakup:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan.
2. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal, Direksi, maupun pihak-pihak terkait lainnya;

Based on the Board Manual, the main duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are to assist the Board of Commissioners in secretarial activities which include:

1. Carry out secretarial administration activities.
2. Organizing Board of Commissioners meetings and meetings / meetings between the Board of Commissioners and Shareholders / Capital Owners, Directors and other relevant parties;

3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris, seperti:
 - a. Pemantauan tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Komisaris;
 - b. Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi dalam mengelola Perseroan;
 - c. Membuat undangan rapat Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak-pihak lain yang diundang;
 - d. Mendokumentasikan hasil rapat Dewan Komisaris;
 - e. Menyampaikan salinan risalah Rapat Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris.
 - f. Mengelola data, informasi, dukungan administrasi dan pemantauan yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris;
4. Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris dan tenaga ahli Dewan Komisaris untuk keperluan Dewan Komisaris;
5. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib;
6. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
7. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris;
8. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
9. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
10. mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas;
11. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain.
12. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Kebijakan Remunerasi

Remuneration Policy

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, terdiri dari honorarium per bulan dan tunjangan jabatan.

The Board of Commissioners' Secretary's Remuneration is determined by the Board of Commissioners by taking into account the Corporation's ability, consisting of honorarium per month and position allowance.

REMUNERASI SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Secretary's Remuneration

| Nama dan Jabatan Name & Position | Honorarium per Bulan Monthly Honorarium | Tunjangan Jabatan Position Allowance | Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Amount of Honorarium & Allowance | Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun Total amount of Honorarium & Allowance 1 Year | Tantiem | Jumlah Remunerasi Tahun 2019 Remuneration Amount in 2019 |
|-------------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | (Rp) | (Rp) | | (Rp) | (Rp) | (Rp) |
| Akbar Anwar | 31.610.000 | - | 31.610.000 | 284.490.000 | - | 284.490.000 |
| Rendi Alhial | 24.750.000 | 6.400.000 | 31.150.000 | 93.450.000 | - | 93.45.000 |

Tabel 6.48
Table 6.48

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Competency Development for the Board of Commissioners' Secretary

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris mengikuti program peningkatan kompetensi, sebagai berikut:

Throughout 2019, the Secretary of the Board of Commissioners followed the competency improvement program, as follows:

| Nama Name | Jenis Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Type | Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials | Tempat/Tanggal Date/Time | Penyelenggara Organizer |
|--------------|---|---|---|--|
| Akbar Anwar | Hard Skills | Pelatihan (In-house) PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 Training (In-house) PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 | 18 Juni 2019 June 18, 2019 | Kantor Jasa Akuntan (KJA) Ahalik |
| Akbar Anwar | Hard Skills | Konferensi Nasional Anti Fraud: Embracing Technology to Sustain Economic Growth – Anti Fraud Perspective National Anti-Fraud Conference: Embracing Technology to Sustain Economic Growth – Anti-Fraud Perspective | 9 -11 Juli 2019 July 9-11, 2019 | Association of Certified Fraud Examiners |
| Rendi Alhial | Hard Skills | Pelatihan Internasional : Best Practices in Implementing Effective Governance – From Rules to Principles International Workshop: Best Practices in Implementing Effective Governance – From Rules to Principles | 24 - 28 November 2019 November 24-28, 2019 | Perhimpunan Auditor Internal Indonesia |

Tabel 6.49. Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris
Table 6.49. Secretary of the Board of Commissioners' Competency Improvement Programs

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2019

Duties Implementation Report 2019

Tugas-tugas lain yang dilakukan Sekretaris Dewan Komisaris dalam tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Menyelenggarakan rapat dan/atau pertemuan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Komite Komisaris, Direksi, Unit Kerja, maupun pihak-pihak terkait lainnya.
- Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris, seperti:
 - Pemantauan tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi, dan arahan Dewan Komisaris yang diberikan melalui rapat Dewan Komisaris dengan Direksi maupun korespondensi internal;
 - Bahan/materi mengenai laporan/kegiatan Direksi atau Unit Kerja dalam mengelola Perseroan;
 - Membuat undangan rapat Dewan Komisaris dan Komite Komisaris, yang disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris, Direksi, Unit Kerja terkait, maupun pihak-pihak lain;
 - Mendokumentasikan seluruh hasil rapat Dewan Komisaris;
 - Menyampaikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris;
 - Mengelola data, informasi, dukungan administrasi dan pemantauan yang berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Dewan Komisaris;
- Mengumpulkan data-data teknis yang berasal dari Dewan Komisaris dan Manajemen untuk keperluan Dewan Komisaris

Other tasks performed by the Board of Commissioners' Secretary in 2019 are as follows:

- Holding meetings and / or meetings of the Board of Commissioners with Shareholders, the Board of Commissioners, the Directors, work units, and other relevant parties.
- Providing data / information needed by the Board of Commissioners and Committees within the Board of Commissioners, such as:
 - Monitoring the follow-up of the decisions, recommendations and directions of the Board of Commissioners, which are given through a meeting of the Board of Commissioners with the Directors and internal correspondence;
 - Materials/material concerning reports/activities of the Directors or work units in managing the Corporation;
 - Make invitation to the meeting of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners, which is conveyed to all members of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners, Directors, related Work Units, as well as other parties.
 - Documenting all Board of Commissioners meeting results;
 - Submit a copy of the minutes of the Board of Commissioners' Meeting to members of the Board of Commissioners
 - Managing data, information, administrative support and monitoring related to matters that must obtain approval or recommendations from the Board of Commissioners;
- Collecting technical data from the Board of Commissioners and Management for the needs of the Board of Commissioners

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris, dan dokumen lainnya dengan tertib 5. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris 6. Menyusun Rancangan Laporan-laporan Dewan Komisaris 7. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik 8. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Administer outgoing and incoming letters to the Board of Commissioners, and other documents in an orderly manner 5. Prepare the Board of Commissioners Annual Work Plan and Budget 6. Prepare the Draft Reports of the Board of Commissioners 7. Ensuring that the Board of Commissioners complies with the laws and regulations and applies GCG principles 8. Provide information needed by the Board of Commissioners periodically and / or at any time when requested. |
|---|--|

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS OLEH DEWAN KOMISARIS

Evaluation and Evaluation of the Performance of the Secretary of the Board of Commissioners by the Board of Commissioners

| Sasaran Strategis <i>Strategic objectives</i> | Indikator Kinerja Utama <i>Key Performance Indicators</i> | Nilai Kinerja <i>Performance Score</i> |
|---|---|---|
| Fungsi kesekretariatan Dewan Komisaris <i>Secretarial functions of the Board of Commissioners</i> | Tingkat ketepatan waktu penyelesaian risalah rapat Dewan Komisaris <i>Timeliness of minutes documentation of the Board of Commissioners meeting</i> | 100% |
| | Tingkat ketepatan waktu penyelesaian risalah rapat Internal Dewan Komisaris <i>Timeliness of minutes documentation of the Internal meeting of BOC</i> | 100% |
| | Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris dan Komite tahun 2020 <i>Drafting of the operational plan and annual budget of Board of Commissioners and Committee of 2020</i> | 95% |
| Fungsi kesekretariatan Komite Komisaris <i>Secretarial Function of BOC Committee</i> | Tingkat ketepatan waktu penyelesaian risalah rapat Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, dan Komite SDM & Pengusahaan <i>Timeliness of minutes documentation of the Audit committee meeting, Risk Monitoring Committee & Securities & Security, and HC & Business Committee</i> | 100% |
| | Tingkat ketepatan waktu penyelesaian laporan triwulanan Komite ke Dewan Komisaris <i>Timeliness of minutes documentation of the Audit committee meeting, Risk Monitoring Committee & Securities & Security, and HC & Corporate Affairs Committee</i> | 66,7% |
| Pemenuhan Aspek Kepatuhan Tata Kelola Dewan Komisaris <i>Compliance with the governance aspect of the Board of Commissioners</i> | Tingkat ketepatan waktu penyelesaian laporan triwulanan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham <i>Timeliness of quarterly report documentation of the Board of Commissioners to shareholders</i> | 75% |
| | Tindak Lanjut Temuan Penilaian GCG oleh BPKP <i>Follow up on GCG Assessment findings by BPKP</i> | 80% |
| Skor Total <i>Total Score</i> | | 88,1% |

Tabel 6.50
Table 6.50

KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan, memberikan masukan dan rekomendasi kepada Direksi, mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Perseroan, dan meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dan instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.

The Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners whose function is to assist the Board of Commissioners in carrying out supervision, provide input and recommendations to the Directors, encourage the application of GCG principles within the Corporate and improve the quality of financial disclosure and reporting. The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners and carries out its functions in accordance with the regulations and instructions received from the Board of Commissioners.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Audit

Qualifications Become a Member of the Audit Committee

Anggota Komite Audit Perseroan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam piagam Komite Audit, yaitu:

1. Persyaratan Independensi
 - a. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik yang menjadi auditor eksternal Perseroan, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit, dan atau jasa konsultasi lain pada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
 - b. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;
 - c. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - d. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perseroan.
2. Persyaratan Kompetensi
 - a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - b. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang keuangan dan akuntansi;
 - c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
 - d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan terutama yang menyangkut Badan Usaha Milik Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis operasi Perseroan;
 - e. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki kemampuan dan pemahaman tentang lingkup bisnis Perseroan.

Masa Jabatan

Term of Office

Masa tugas anggota Komite Audit adalah 1 (satu) tahun dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Bagi anggota Komite Audit yang telah berakhir masa jabatannya, dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

Members of the Corporate's Audit Committee must meet the requirements as regulated in the audit committee's charter, namely:

1. *Independence Requirements*
 - a. *Not a person in the Public Accountant Firm who became the Corporation's external auditor, the Legal Consultant's Office, or other parties who provided audit services, non-audit services and or other consulting services to the Corporation within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners;*
 - b. *Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Corporation's activities within the last 6 (six) months before being appointed by the Commissioners;*
 - c. *Does not have a business relationship, directly or indirectly, related to the Corporation's business activities;*
 - d. *Has no family relations due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically with the Commissioners, Directors, or Shareholders of the Corporation.*
2. *Competency Requirements*
 - a. *Have high integrity, ability, knowledge, and adequate experience in accordance with his educational background, and able to communicate well;*
 - b. *At least one of the members of the Audit Committee must have an educational background and experience in finance and accounting;*
 - c. *Having sufficient knowledge to read and understand financial statements;*
 - d. *Have adequate knowledge of the laws and regulations, especially those concerning Regionally Owned Enterprises and legislation relating to the Corporation's business operations;*
 - e. *One of the members of the Audit Committee has the ability and understanding of the scope of the Corporation's business*

The term of office for members of the Audit Committee is 1 (one) year without prejudice to the Commissioner's right to dismiss him at any time. Audit Committee Members who have ended their terms of office may be reappointed only for 1 (one) subsequent term.

Jumlah Susunan dan Komposisi Anggota Komite Audit Tahun 2019

Number and Composition of Audit Committee Members in 2019

Susunan Komite Audit secara kronologis di sepanjang tahun 2019 dan susunan Komite Audit per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The chronological composition of the Audit Committee throughout 2019 and the composition of the Audit Committee as of December 31, 2019 are as follows:

KRONOLOGI SUSUNAN KOMITE AUDIT DI SEPANJANG TAHUN 2019

Chronology of Audit Committee Composition Throughout 2019

| Periode 1 Januari - 1 September 2019 <i>Period January 1-September 1, 2019</i> | Periode 2 September - 31 Oktober 2019 <i>Period September 2-October 31, 2019</i> | Periode 3 September - 31 Desember 2019 <i>Period September 2-December 31, 2019</i> |
|--|---|---|
| Rukijo (Ketua Komite Audit/Komisaris) <i>(Chairman of the Audit Committee / Commissioner)</i> | Adnan Pandu Praja (Ketua Komite Audit/Komisaris) <i>(Chairman of the Audit Committee / Commissioner)</i> | Adnan Pandu Praja (Ketua Komite Audit/Komisaris) <i>(Chairman of the Audit Committee / Commissioner)</i> |
| Mohamad Hassan (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> | Mohamad Hassan (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> | Mohamad Hassan (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> |
| Ina Susanti (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> | Ina Susanti (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> | |
| | Krishna Mochtar (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> | Krishna Mochtar (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> |
| | | Hary Budiarto (Anggota Komite Audit/ Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> |

Tabel 6.51
Table 6.51

SUSUNAN KOMITE AUDIT PER 31 DESEMBER 2019

Audit Committee Composition per December 31 2019

| Nama <i>Name</i> | Jabatan <i>Position</i> | Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i> | Masa Jabatan <i>Term of Office</i> | Periode Jabatan <i>Term of Office</i> |
|---|---|--|--|--|
| Adnan Pandu Praja (Ketua Komite Audit/Komisaris) <i>(Chairman of the Audit Committee / Commissioner)</i> | Ketua Komite Audit/Komisaris <i>Chairman of the Audit Committee / Commissioner</i> | | Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris <i>Based on the Commissioners term of office</i> | |
| Mohamad Hassan (Anggota Komite Audit/ Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> | Anggota/Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i> | Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02 Tahun 2018 <i>Board of Commissioners Decree No. 02 of 2018</i> | 31/10/2018 – 30/10/2019 | Mohamad Hassan (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> |
| Krishna Mochtar (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> | Anggota/Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i> | SK/003/BOC-MRT/IX/2019 | 02/09/2019 - 31/10/2020 | Krishna Mochtar (Anggota Komite Audit/ Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> |
| Hary Budiarto (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> | Anggota/Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i> | SK/004/BOC-MRT/XI/2019 | 01/11/2019 – 31/10/2020 | Hary Budiarto (Anggota Komite Audit/Pihak Independen) <i>(Member of Audit Committee / Independent Party)</i> |

Tabel 6.52
Table 6.52

Profil Anggota Komite Audit

Profile of Audit Committee Members

Adnan Pandu Praja

Ketua Komite Audit/Komisaris

Chairman of The Audit Committee / Commissioner

Profil Ketua Komite Audit Adnan Pandu Praja dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini

The profile of the Audit Committee Chairman Adnan Pandu Praja can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Corporate Profile chapter in this Annual Report



Mohamad Hassan

Anggota Komite Audit (31 Oktober 2016 – 30 Oktober 2019, periode ke-2)

Member of Audit Committee (Office Period: October 31 2 2016- October 31 2019, 2nd period)

Kewarganegaraan Citizenship

Warga Negara Indonesia

Indonesian

Usia Age

59 Tahun

59 Years Old

Domisili Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth

Jakarta, 21 September 1960

Jakarta, September 21, 1960

Riwayat Pendidikan Educational History

- S-2 Internal Audit, Cleveland State University, USA, 1993;
- D-IV Akunting, STAN, 1991.
- S-2 Internal Audit, Cleveland State University, USA, 1993;
- D-IV Accounting, STAN, 1991.

Riwayat Pekerjaan History of Employment

- Komite Audit, PT Bakrieland Development, Tbk, November 2019 – Sekarang;
- Direktur Akademis, Pusat Pelatihan Internal Audit, April 2018 – Sekarang;
- Komisaris, Bina Audita Indonesia, April 2018 – Sekarang;
- Komite Audit, Universitas Indonesia, Maret 2017 - Sekarang;
- Komite Audit, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Maret 2016 – Sekarang;
- Komite Audit, PT MRT Jakarta (Perseroda), Februari 2016 – Sekarang;
- Komite Audit, PT Graha Andrasenta Propertindo Tbk, November 2018 – Oktober 2019;
- Direktur, PT Bina Audita Indonesia – YPIA, Desember 2014 – Maret 2018;
- Komite Audit, PT Perkebunan Nusantara 5 (Persero), Oktober 2014 – September 2017;
- Komite Audit, PT Darma Henwa, Desember 2007 – September 2017;
- Komite Audit, PT Bakrieland Development Tbk, Maret 2008 – Juli 2016;
- Senior Consultant, PT Bina Audita Indonesia – YPIA, Januari 2013 – Desember 2014;
- Audit Committee, PT Bakrieland Development, Tbk, November 2019 - Present;
- Academic Director, Internal Audit Training Center, April 2018 - Present;
- Commissioner, Bina Audita Indonesia, April 2018 - Present;
- Audit Committee, University of Indonesia, March 2017 - Present;
- Audit Committee, Deposit Insurance Agency (LPS), March 2016 - Present;
- Audit Committee, PT MRT Jakarta (Perseroda), February 2016 - Present;
- Audit Committee, PT Graha Andrasenta Propertindo Tbk, November 2018 - October 2019;
- Director, PT Bina Audita Indonesia - YPIA, December 2014 - March 2018;
- Audit Committee, PT Perkebunan Nusantara 5 (Persero), October 2014 - September 2017;
- Audit Committee, PT Darma Henwa, December 2007 - September 2017;
- Audit Committee, PT Bakrieland Development Tbk, March 2008 - July 2016;
- Senior Consultant, PT Bina Audita Indonesia - YPIA, January 2013 - December 2014;

- Komite Audit, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Juni 2013 – September 2014;
- Komite Audit, PT Pupuk Indonesia Holding Company, April 2011 – September 2014;
- Komite Audit, PT Asabri (Persero), Maret 2008 – Juli 2014.
- *Audit Committee, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, June 2013 - September 2014;*
- *Audit Committee, PT Pupuk Indonesia Holding Company, April 2011 - September 2014;*
- *Audit Committee, PT Asabri (Persero), March 2008 - July 2014.*

Sertifikasi *Certification*

- *Certified Professional Management Accountant (CPMA), Dewan Penguji CPMA – IAMI, 2018;*
- *Certification in Audit Committee Practices (CACP), Dewan Sertifikasi CACP IKAI, 2016;*
- *Chartered Accountant (CA), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2014;*
- *Certification in Risk Management Assurance (CRMA), The IIA Global, USA, 2013;*
- *Certified Risk Management Professional (CRMP), LSPMR, 2010;*
- *Qualified Internal Auditor (QIA), Dewan Sertifikasi QIA, 2000.*
- *Certified Professional Management Accountant (CPMA), Board of Examiners CPMA - IAMI, 2018;*
- *Certification in Audit Committee Practices (CACP), CACP IKAI Certification Board, 2016;*
- *Chartered Accountant (CA), Indonesian Institute of Accountants (IAI), 2014;*
- *Certification in Risk Management Assurance (CRMA), The IIA Global, USA, 2013;*
- *Certified Risk Management Professional (CRMP), LSPMR, 2010;*
- *Qualified Internal Auditor (QIA), QIA Certification Board, 2000.*



Hary Budiarto

Anggota Komite Audit (1 November 2019 - 31 Oktober 2020 Periode ke-1)
Member of Audit Committee (Office Period: November 2019- October 31 2020, First period)

Kewarganegaraan *Citizenship*

Warga Negara Indonesia *Indonesian*

Usia *Age*

52 Tahun *52 Years Old*

Domisili *Domicile*

Depok, Jawa Barat, Indonesia *Depok, Jawa Barat, Indonesia*

Tempat dan Tanggal Lahir *Place and Date of Birth*

Surabaya, 28 Juni 1967 *Surabaya, June 28, 1967*

Riwayat Pendidikan *Educational History*

- *Doctoral Degree (S3), Science and Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering, Tokyo Institute of Technology (Titech) Japan, 1999-2004;*
- *Master Degree (S2), Faculty of Computer Science, University of Indonesia, 1996- 1999;*
- *Bachelor Degree (S1), Department of Informatics, Sepuluh November Institute of Technology (ITS) Surabaya, 1985-1990.*
- *Doctoral Degree (S3), Science and Engineering, Department of Electrical and Electronics Engineering, Tokyo Institute of Technology (Titech) Japan, 1999-2004;*
- *Master Degree (S2), Faculty of Computer Science, University of Indonesia, 1996- 1999;*
- *Bachelor Degree (S1), Department of Informatics, Sepuluh November Institute of Technology (ITS) Surabaya, 1985-1990.*

Riwayat Pekerjaan *History of Employment*

- *Perekayasa Ahli Utama (Profesor) Principal Engineering, Pusat Pelayanan Teknologi, (2019-sekarang);*
- *Professional Staff of Bank Rakyat Indonesia (BRI), Institut Teknologi dan Bisnis BRI, (2019-sekarang);*
- *Deputy of Data and Information, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (2015- 2019);*
- *Director of Research Center for Information*
- *Principal Engineering Expert (Professor) Principal Engineering, Technology Services Center, (2019-present);*
- *Professional Staff of Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Institute of Technology and Business, (2019-present);*
- *Deputy of Data and Information, Corruption Eradication Commission (KPK), (2015-2019);*
- *Director of Research Center for Information*



and Communication Technology, BPPT, (2014-2015);

- Head of Center for Data, Information and Standardization, in the principal secretary, BPPT, (2010-2014);
- Head of Division for Multimedia Communication System in Center of Information and Communication Technology, BPPT, (2005-2009);
- Researcher in Research Center of the Assessment and Application for Environmental Technology, BPPT, 1992- 2005);
- Programmer in Indosoft Teknologi Utama Lts, (1991-1994).

and Communication Technology, BPPT, (2014-2015);

- Head of Center for Data, Information and Standardization, in the principal secretary, BPPT, (2010-2014);
- Head of Division for Multimedia Communication Systems in the Center for Information and Communication Technology, BPPT, (2005-2009);
- Researchers in the Research Center for the Assessment and Application for Environmental Technology, BPPT, 1992- 2005);
- Programmers in Indosoft Utama Technology Lts, (1991-1994).

Krishna Mochtar

Anggota Komite Audit (2 September 2019 – 31 Oktober 2020, periode ke-1)
Member of Audit Committee (September 2 2019- October 31 2020, First period)

Kewarganegaraan *Citizenship*

Warga Negara Indonesia

Indonesian

Usia *Age*

58 Tahun

58 Years Old

Domisili *Domicile*

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir *Place and Date of Birth*

Jakarta, 21 September 1961

Jakarta, 21 September 1961

Riwayat Pendidikan *Educational History*

- Doctor of Philosophy in Civil Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, 2000;
- Master of Science in Civil Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, 1994;
- Bachelor of Science in Civil Engineering (Structure), University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1987.
- Doctor of Philosophy in Civil Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, 2000;
- Master of Science in Civil Engineering, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA, 1994;
- Bachelor of Science in Civil Engineering (Structure), University of Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1987.

Riwayat Pekerjaan *History of Employment*

- Head of Senate, 2016 – Sekarang;
- Vice Rector in Academic Affair ITI (Pembantu Rektor 1), 2000-2008;
- Head of Construction Materials Laboratory ITI, 2000-2001;
- Vice Dean in Academic Affair (Pembantu Dekan 1), Faculty of Civil Engineering and Planning ITI, 1996-1997;
- Head of Civil Engineering Studio, 1994- 1996;
- Head of Soil Mechanics, Laboratory ITI, 1990-1991;
- Secretary of Soil Mechanics, Laboratory ITI, 1989-1990.
- Head of Senate, 2016 – Present;
- ITI Vice Rector in Academic Affairs (Vice Rector 1), 2000-2008;
- Head of ITI Construction Materials Laboratory, 2000-2001;
- Vice Dean in Academic Affair (Assistant Dean 1), Faculty of Civil Engineering and Planning ITI, 1996-1997;
- Head of Civil Engineering Studio, 1994- 1996;
- Head of Soil Mechanics, Laboratory ITI, 1990-1991;
- Secretary of Soil Mechanics, ITI Laboratory, 1989-1990.

Pedoman Kerja: Piagam Komite Audit

Work Guidelines: Audit Committee Charter

Komite Audit Perseroan memiliki Piagam sebagai acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan kewajiban kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal Perseroan. Piagam Komite Audit ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2016, tanggal 29 Januari 2016.

Piagam Komite Audit antara lain berisi:

- Struktur Komite Audit.
- Pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Audit.
- Persyaratan dan masa tugas anggota Komite Audit.
- Fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Audit.
- Lingkup pekerjaan.
- Kode etik dan mekanisme rapat.

The Corporate's Audit Committee has a Charter as a reference and work guidelines for the Audit Committee in carrying out its duties and authority in carrying out compliance obligations with the laws and regulations and internal control of the Corporate. The Audit Committee Charter is stipulated through Decision of the Board of Commissioners No. 002 of 2016, January 29, 2016.

The Audit Committee Charter includes:

- *Audit Committee Structure.*
- *Formation and appointment of members of the Audit Committee.*
- *Requirements and tenure of members of the Audit Committee.*
- *The functions, duties, authorities and responsibilities of the Audit Committee.*
- *Scope of work.*
- *Code of ethics and meeting mechanisms.*

Independensi Komite Audit

Independence of the Audit Committee

Agar dapat bertindak independen, anggota Komite Audit Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
2. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite Audit yang berasal dari Dewan Komisaris.
3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite Audit.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.

In order to act independently, members of the Corporate's Audit Committee are required to meet the following independence criteria:

1. *Not an employee of a Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, or other Party who provides audit services, non-audit services and or other consulting services to the Corporate within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners*
2. *Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Corporation within the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners, except for Audit Committee Members who are from the Board of Commissioners.*
3. *Do not have a business relationship, either directly or indirectly related to the Corporation's business including not receiving compensation from the Corporation and its subsidiaries other than compensation for services received relating to duties as a Member of the Audit Committee.*
4. *Having no family relations due to marriage and descent to the second degree, both horizontally and vertically with the Board of Commissioners, Directors, or Major / Controlling Shareholders of the Corporate.*

Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:

The independence of the Audit Committee's independence is shown in the following table:

| Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i> | Adnan Pandu Praja | Mohamad Hassan | Krishna Mochtar | Hary Budiarto |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non-audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir <i>Is a person who provides audit services, non-audit services, or other consulting services to the Corporation within the last 6 (six) months</i> | X | X | X | X |

| Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i> | Adnan Pandu Praja | Mohamad Hassan | Krishna Mochtar | Hary Budiarto |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir <i>A person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Corporation's activities within the last 6 (six) months</i> | x | x | x | x |
| Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan <i>Have a business relationship, both directly and indirectly related to the Corporation's business</i> | x | x | x | x |
| Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali <i>Have family relations with the Board of Commissioners, Directors, or Major / Controlling Shareholders</i> | x | x | x | x |

Tabel 6.53
Table 6.53

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite Audit

Duties, Responsibilities and Authority of the Audit Committee

Tugas Komite Audit:

- Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor;
- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit maupun auditor eksternal;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perseroan;
- Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
- Tanggung jawab Komite Audit:
 - Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
 - Pertanggungjawaban Komite Audit kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - Laporan triwulanan pelaksanaan tugas Komite Audit;
 - Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Audit.
 - Komite Audit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit diberikan wewenang sebagai berikut:

- Mendapatkan informasi secara penuh dan bebas tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- Bekerja sama dengan Divisi Internal Audit, dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan.

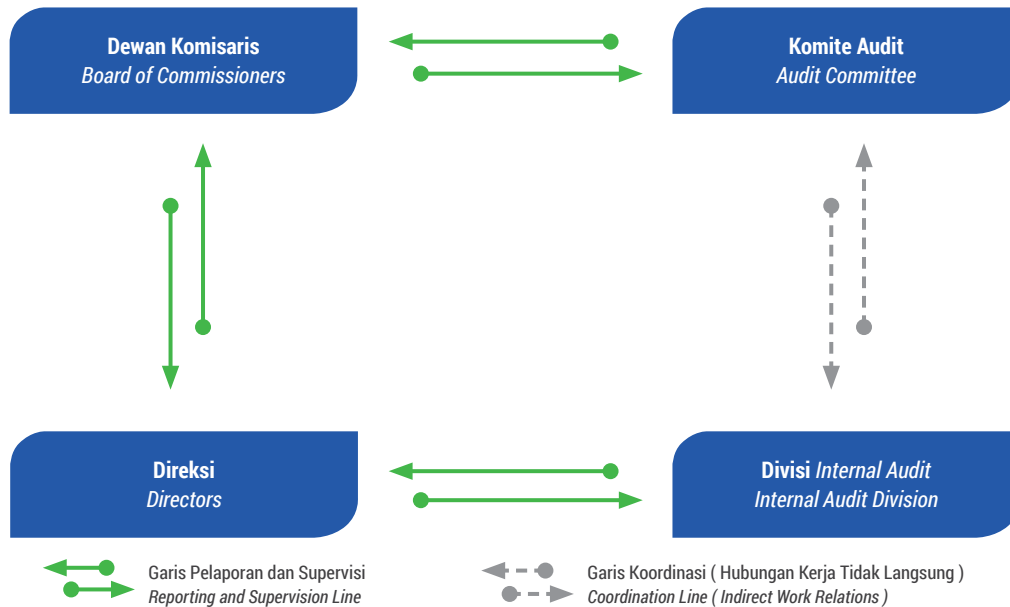
Duties of the Audit Committee:

- Assist the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of the internal control system as well as the performance of external and internal auditors;*
- Assess the activity of implementations and results of audits carried out by both the Internal Audit Division and external auditors;*
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding improvements in the management control system and its implementation;*
- Ensuring that availability of satisfactory review procedures for all information released by the Corporation;*
- Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other duties of the Board of Commissioners.*
- Audit Committee Responsibilities:*
 - The Audit Committee reports to the Board of Commissioners;*
 - The Audit Committee's responsibilities to the Board of Commissioners are stated in the following reports:*
 - Annual reports on the implementation of the duties of the Audit Committee;*
 - Quarterly report on the implementation of the duties of the Audit Committee;*
 - Reports for each implementation of the special tasks of the Audit Committee.*
 - The Audit Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Corporate documents, data and information.*

To carry out its duties and responsibilities, the Audit Committee is granted the following authority:

- Fully and freely obtaining information about employees, funds, assets and other Corporate resources related to the implementation of their duties;*
- Collaborating with the Internal Audit Division, adhering to the established procedures;*
- If needed, with the approval of the Board of Commissioners, seeking assistance from experts and/or consultants.*

HUBUNGAN KERJA KOMITE AUDIT Work Relationships of the Audit Committee



Figur 6.9
Figure 6.9

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Audit Distribution of Duties and Responsibilities among Audit Committee Members

Lingkup tugas masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

The scopes of duties of each Audit Committee Member are as follows:

ADNAN PANDU PRAJA
Ketua Komite Audit/Komisaris
Chairman of the Audit Committee / Commissioner

Mengawasi keseluruhan tugas dan tanggung jawab semua anggota Komite
Oversee the overall duties and responsibilities of all committee members

MOHAMAD HASSAN
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Bidang Governance, Risk, and Compliance dan Keuangan
Governance, Risk, and Compliance and Finance

KRISHNA MOCHTAR
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan
Construction, Operation and Maintenance

HARY BUDIARTO
Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Bidang TI
Information Technology

Pengembangan Kompetensi Komite Audit Audit Committee Competency Development

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif

The Corporation facilitates the implementation of development programs for the Audit Committee in order to improve the competency of members of the Audit Committee. The program is expected to have a positive impact on

terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Audit.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite Audit di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meetings

Komite mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir. Risalah rapat disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite.

Secara umum agenda rapat yang diselenggarakan Komite Audit membahas tentang:

- Pemantauan dan evaluasi kinerja dan temuan SPI.
- Pemantauan dan evaluasi kinerja KAP
- Pemantauan dan evaluasi kinerja perkembangan proyek
- Pemantauan dan evaluasi Laporan Keuangan

Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat Komite Audit dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum jadwal pelaksanaan. Dalam publikasi tersebut, diinformasikan mengenai tanggal dan waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, agenda rapat, dan pihak-pihak yang menjadi peserta rapat. Informasi mengenai rencana pelaksanaan rapat juga telah didistribusikan secara luas kepada pihak-pihak terkait seperti Sekretaris Perusahaan serta organ-organ lainnya seperti SPI dan divisi-divisi yang ada. Dalam hal terjadi usulan rapat yang bersifat insidental, publikasi dapat dilakukan dengan seefektif dan seefisien mungkin namun tetap mengikuti prosedur pendokumentasian yang berlaku (membuat berita acara).

Laporan ringkasan risalah rapat Komite Audit telah memenuhi ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum, serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk *dissenting opinion* atau pendelegasian pimpinan rapat jika Pimpinan Rapat berhalangan hadir dalam rapat.

Di tahun 2019, Komite Audit melakukan 9 kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

the productivity and effectiveness of the Audit Committee's performance.

For more information on the competency improvement activities Audit Committee Members participated in throughout 2019, refer to the Corporate Profile chapter in this annual report.

The Committee held meetings at least as often as the minimum provision set by the Board of Commissioners/Supervisory Board dictated in the articles of association. Each Committee meeting was documented in meeting minutes signed by all Committee Members who were present. Minutes of meetings are submitted in writing by the Committee to the Board of Commissioners/Supervisory Board. The attendance of Committee members in meetings is reported in the quarterly and annual reports of the Committee.

In general, the agenda of the meetings held by the Audit Committee covered the following:

- *Monitoring and evaluation of SPI performance and findings.*
- *Monitoring and evaluation of KAP performance*
- *Monitoring and evaluation of project development performance*
- *Monitoring and evaluation of financial statements*

Information regarding the planned the Audit Committee meeting arrangements was communicated no later than 7 (seven) days prior to the implementation schedule. The publication contained the date and time of the meeting, the location of the meeting, the agenda of the meeting and the parties participating in the meeting. Information about the the meeting was also distributed to related parties such as the Corporate Secretary and other organs such as SPI and other divisions. In the event where there were incidental meeting submissions, information was to be published as effectively and efficiently as possible while still following the documentation procedure (meeting minutes).

A summary report of the minutes of the Audit Committee meetings has adhered to the set procedure as well as the administrative and legal provisions, describing the situation and chronology of the meeting including dissenting opinions or delegation of the Chairperson role if the Chairperson was unable to attend the meeting.

In 2019, the Audit Committee held 9 (nine) meetings, with the minutes and recapitulation of attendance as follows:

REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE AUDIT PADA RAPAT

Recapitulation of Audit Committee Meeting Attendance

| Komite Audit Audit Committee | Jumlah Wajib Rapat Meeting Required | Jumlah Kehadiran Attendance | Tidak Hadir Absent | %Kehadiran %Attendance |
|--|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| Adnan Pandu Praja (Ketua <i>Chairman</i>) | 5 | 6 | - | 100% |
| Mohamad Hassan (Anggota <i>Member</i>) | 12 | 9 | 3 | 75% |

| Komite Audit <i>Audit Committee</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Meeting Required</i> | Jumlah Kehadiran <i>Attendance</i> | Tidak Hadir <i>Absent</i> | %Kehadiran <i>%Attendance</i> |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Krishna Mochtar (Anggota <i>Member</i>) | 4 | 5 | - | 100% |
| Hary Budiarto (Anggota <i>Member</i>) | 2 | 4 | - | 100% |
| Ina Susanti (Anggota <i>Member</i>) | 10 | 5 | 5 | 50% |
| Rata-Rata <i>Average</i> | | | | 85% |

Tabel 6.54
Table 6.54

RISALAH RAPAT KOMITE AUDIT DAN KEHADIRAN KOMITE AUDIT *The Audit Committee Meeting Minutes and Attendance*

| No | Tanggal <i>Date</i> | Tempat <i>Place</i> | Agenda Rapat <i>Agenda</i> | Peserta Rapat <i>Participants</i> |
|----|--|--|---|--|
| 1 | 15 Februari 2019 <i>February 15, 2019</i> | Ruang rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>PT MRT Jakarta (Perseroda)'s meeting room</i> | Rapat Komite Audit Bersama Divisi Internal Audit dan Kantor Akuntan Publik <i>Joint Audit Committee Meetings with the Internal Audit Division and the Public Accountant Office</i> | 1. Mohamad Hassan (Komite Audit/ <i>Audit Committee</i>) 2. Ina Susanti (Komite Audit / <i>Audit Committee</i>) |
| 2 | 28 Mei 2019 <i>May 28, 2019</i> | Ruang rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>PT MRT Jakarta (Perseroda)'s meeting room</i> | Rapat Monitoring Kinerja Divisi Internal Audit <i>Internal Audit Division Performance Monitoring Meeting</i> | 1. Mohamad Hassan (Komite Audit/ <i>Audit Committee</i>) 2. Ina Susanti (Komite Audit / <i>Audit Committee</i>) |
| 3 | 16 Juli 2019 <i>July 16, 2019</i> | Ruang rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>PT MRT Jakarta (Perseroda)'s meeting room</i> | Rapat Monitoring Kinerja Divisi Internal Audit <i>Internal Audit Division Performance Monitoring Meeting</i> | 1. Mohamad Hassan (Komite Audit/ <i>Audit Committee</i>) 2. Ina Susanti (Komite Audit / <i>Audit Committee</i>) |
| 4 | 2 Agustus 2019 <i>August 2, 2019</i> | Ruang rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>PT MRT Jakarta (Perseroda)'s meeting room</i> | Rapat Pembahasan Penunjukan KAP <i>Public Accounting Firm (KAP) Appointment Discussion Meeting</i> | Mohamad Hassan |
| 5 | 25 Oktober 2019 <i>October 25, 2019</i> | Ruang rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>PT MRT Jakarta (Perseroda)'s meeting room</i> | Rapat Monitoring Kinerja Divisi Internal Audit <i>Internal Audit Division Performance Monitoring Meeting</i> | 1. Adnan Pandu Praja 2. Mohamad Hassan 3. Krishna Mochtar |
| 6 | 25 Oktober 2019 <i>October 25, 2019</i> | Ruang rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>PT MRT Jakarta (Perseroda)'s meeting room</i> | Rapat Bulanan Komite Audit <i>Monthly Audit Committee Meeting</i> | 1. Adnan Pandu Praja 2. Mohamad Hassan 3. Ina Susanti 4. Krishna Mochtar |
| 7 | 8 November 2019 <i>November 8, 2019</i> | Ruang rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>PT MRT Jakarta (Perseroda)'s meeting room</i> | Pembahasan RKAP 2020 bersama Divisi Keuangan & Akuntansi <i>Discussion on the Corporation's Budget Plan (RKAP) 2020 with the Finance & Accounting Division</i> | 1. Adnan Pandu Praja 2. Mohamad Hassan 3. Ina Susanti 4. Krishna Mochtar |

| No | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Agenda | Peserta Rapat Participants |
|----|---------------------------------------|---|---|---|
| 8 | 5 November 2019 November 15, 2019 | Ruang Executive Depo Lebak Bulus Executive Room at Lebak Bulus Depot | Rapat bulanan Komite Audit dengan Unit Kerja dengan agenda: • Kick-off audit eksternal oleh EY • Audit konstruksi pengadaan Fase 2 Monthly meetings of the Audit Committee with the work units with the following agenda: • Kick off external audit by EY • Phase 2 procurement construction audit | 1. Adnan Pandu Praja 2. Mohamad Hassan 3. Krishna Mochtar 4. Hary Budiarto |
| 9 | 25 November 2019 November 25, 2019 | Ruang rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) PT MRT Jakarta (Perseroda)'s meeting room | Rapat bulanan Komite Audit dengan Unit Kerja IT Monthly Meetings of the Audit Committee with the IT Work Unit | Hary Budiarto |

Tabel 6.55
Table 6.55

Kebijakan Remunerasi

Remuneration Policy

Perseroan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi Komite Audit. Persetujuan pemberian remunerasi Komite Audit ditetapkan berdasarkan keputusan persetujuan pemberian remunerasi Komite Audit yang ditetapkan oleh SK Direksi No. 098/BOD- MRT/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Honorarium Komite Audit Perseroan.

The Corporation has a policy related to remuneration for the Audit Committee. Approval for granting remuneration for the Audit Committee is determined based on the decision to approve the remuneration for the Audit Committee as regulated in Decree of the Board of Directors No. 098 / BODMRT / XI / 2017 dated November 30, 2017 concerning the Honorarium of the Corporate Audit Committee.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit pada Tahun 2019

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Audit Committee in 2019

Untuk memenuhi ketentuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkup Perseroan, program kerja yang menjadi tugas dan kewajiban Komite Audit di tahun 2019 adalah:

- Rapat Komite Audit dengan Divisi Internal Audit
- Rapat Komite Audit dengan Kantor Akuntan Publik
- Kunjungan lapangan Dewan Komisaris dan Komite Komisaris dalam rangka pemantauan ke 5 stasiun jalur layang dalam rangka persiapan opening operasional kereta MRT

To fulfill the provisions of GCG implementation within the Corporate scope, work programs that fall under The Audit Committee's duties and obligation in 2019 are:

- Meetings of the Audit Committee with the Internal Audit Division
- Meetings of the Audit Committee with the Public Accounting Firm
- Site visits of the Board of Commissioners and the Committees of Commissioners to monitor the 5 (five) elevated stations in preparation for opening the MRT train operation commencement

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Performance Appraisal by the Board of Commissioners

Evaluasi kehadiran pada rapat rutin Komite Audit:

Attendance evaluation of regular Audit Committee meetings:

| No | Nama Name | Kedudukan Position | Mulai Menjabat sebagai Komite Starting Date | Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency | |
|----|-------------------|--|---|---|-----------------------------|
| | | | | Jumlah Hadir Rapat / Wajib Rapat Required Meetings / Obligatory | % Kehadiran % Attendance |
| 1 | Adnan Pandu Praja | Ketua/Komisaris Chairman / Commissioner | 31 Juli 2019 July 31, 2019 | 6/5 | 100% |
| 2 | Mohamad Hassan | Anggota Member | 1 Februari 2016 February 1, 2016 | 9/12 | 75% |

| No | Nama Name | Kedudukan Position | Mulai Menjabat sebagai Komite Starting Date | Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency | |
|---|-----------------|-----------------------|---|---|-----------------------------|
| | | | | Jumlah Hadir Rapat / Wajib Rapat Required Meetings / Obligatory | % Kehadiran % Attendance |
| 3 | Krishna Mochtar | Anggota Member | 2 September 2019 September 2, 2019 | 5/4 | 100% |
| 4 | Hary Budiarto | Anggota Member | 1 November 2019 November 1, 2019 | 4/2 | 100% |
| 5 | Ina Susanti* | Anggota Member | | 5/10 | 50% |
| Rata-Rata % Kehadiran Average % Attendance | | | | | 85% |

Ina Susanti berakhir masa jabatannya pada 31 Oktober 2019 dan digantikan oleh Hary Budiarto
Ina Susanti ended her term of office on 31 October 2019 and was replaced by Hary Budiarto

Tabel 6.56. Evaluasi Kehadiran pada Rapat Rutin Komite Audit
Table 6.56. Attendance Evaluation on the Audit Committee Recurring Meetings

Evaluasi ketepatan waktu laporan triwulan Komite Audit:

Timeliness evaluation of the Audit Committee's quarterly reports:

| No | Periode Period | Ketepatan Pengumpulan Timely Submission |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| 1 | Triwulan 1 Quarter 1 | ✓ |
| 2 | Triwulan 2 Quarter 2 | - |
| 3 | Triwulan 3 Quarter 3 | ✓ |
| 4 | Triwulan 4 Quarter 4 | ✓ |
| Total Ketepatan Total Timeliness | | 75% |

Tabel 6.57. Evaluasi Ketepatan Waktu Laporan Triwulan Komite Audit
Table 6.57. Timeliness Evaluation of the Audit Committee's Quarterly Reports

Dengan demikian total pencapaian Komite Audit adalah sebagai berikut:

Thus the total achievements of the Audit Committee are as follows:

| Key Performance Indicator | Bobot Weight | Skor Score | Bobot x Skor Weight x Score |
|---|-----------------|---------------|--------------------------------|
| Kehadiran Rapat Meeting Attendance | 50% | 85% | 42,5% |
| Ketepatan Waktu Laporan Ontime Reporting | 50% | 75% | 37,5% |
| Total Capaian Total Achievement | | | 80% |

Tabel 6.58. Total Pencapaian Komite Audit
Table 6.58 Timeliness Evaluation of the Audit Committee's Quarterly Reports

KOMITE SDM DAN PENGUSAHAAN

HC AND BUSINESS COMMITTEE

Komite SDM dan Pengusahaan dibentuk guna membantu tugas pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan kerja Perseroan.

The HC and Business Committee was formed to assist the Board of Commissioners' supervisory and advisory duties in monitoring and ensuring the implementation of Good Corporate Governance in the Corporate environment.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite SDM & Pengusahaan

Qualifications to Become a Member of The HC & Business Committee

Mengacu pada aturan di Piagam Komite, komposisi keanggotaan Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris;
2. dan Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - a. Anggota Dewan Komisaris;
 - b. Pihak yang berasal dari luar Perseroan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
 - ii. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.
 - iii. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
3. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Referring to the rules in the Committee Charter, the Committee shall consist of at least 3 (three) members, with the following provisions:

1. 1 (one) chairman and also a member, who is a Commissioner;
2. and Other members who may come from:
 - a. Members of the Board of Commissioners;
 - b. Parties outside the Corporation and fulfill the following requirements:
 - i. No affiliations with the Corporation, of the Directors, the Board of Commissioners members, or Major Corporate Shareholders.
 - ii. Experienced in Nomination and/or Remuneration.
 - iii. Not concurrently serving as a member of another Committee under the Corporation.
3. Parties occupying managerial positions under the Directors in charge of human capital.

Ketentuan Masa Jabatan

Terms of Office Period

Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. Masa jabatan anggota Komite adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Committee members are appointed for a certain term of office and can be reappointed. The term of office period of members of the Committee is 1 (one) year and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years of service, not disregarding The Board of Commissioners' rights to discharge members at any time.

Susunan Komite SDM & Pengusahaan secara kronologis di sepanjang tahun 2019 dan susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The chronological structures of the HC and Business Committee throughout 2019 and the Remuneration and Nomination Committee's structure as of December 31, 2019 are as follows:

KRONOLOGI SUSUNAN KOMITE SDM & PENGUSAHAAN DI SEPANJANG TAHUN 2019

The Chronology of the HC & Business Committee Structures Throughout 2019

| Periode 1 Januari – 31 Mei 2019 Period January 1-May 31 2019 | Periode 1 April - 31 Desember 2019 Period April 1-December 31 2019 | Keterangan Description |
|---|---|--|
| Yusmada Faizal (Ketua Komite SDM & Pengusahaan/Komisaris) (Chairman of HC and Business Committee / Commissioner) | | Yusmada Faizal tidak lagi menjabat Ketua Komite SDM & Pengusahaan sejak 31 Mei 2019 sejalan dengan posisinya yang tidak lagi menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris Perseroan <i>Yusmada Faizal no longer served as Chairman of the HC and Business Committee as of May 31, 2019, in line with his position that no longer served on the Corporation's Board of Commissioners</i> |
| | Rukijo (Ketua Komite SDM & Pengusahaan/Komisaris) Chairman of HC and Business/Commissioners) | Rukijo menjabat Ketua Komite SDM & Pengusahaan sejak 1 April 2019 menggantikan Yusmada Faizal <i>Rukijo has been the Chairman of the HC and Business Committee since April 1, 2019 replacing Yusmada Faizal</i> |

| Periode 1 Januari – 31 Mei 2019 <i>Period January 1-May 31 2019</i> | Periode 1 April - 31 Desember 2019 <i>Period April 1-December 31 2019</i> | Keterangan <i>Description</i> |
|--|--|---|
| Irwan Rei (Anggota Komite <i>Committee Member</i>) | Irwan Rei (Anggota Komite/ <i>Committee Member</i>) | |
| Lilyani Hasulistiyati (Anggota Komite <i>Committee Member</i>) | Lilyani Hasulistiyati (Anggota Komite <i>Committee Member</i>) | Lilyani Hasulistiyati tidak lagi menjabat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 31 Oktober 2019 <i>Lilyani Hasulistiyati is no longer a member of the Remuneration and Nomination Committee since 31 October 2019</i> |
| | Helda Chandra (Anggota Komite <i>Committee Member</i>) | Helda Chandra menjabat sebagai anggota Komite SDM & Pengusahaan sejak 1 Desember 2019 <i>Helda Chandra has served as a member of the HC and Business Committee since December 1, 2019a</i> |

Tabel 6.59
Table 6.59

KRONOLOGI SUSUNAN KOMITE SDM & PENGUSAHAAN DI SEPANJANG TAHUN 2019

The Chronology of the HC & Business Committee Structures Throughout 2019

| Nama <i>Name</i> | Jabatan <i>Position</i> | Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i> | Masa Jabatan <i>Term of Office</i> | Periode Jabatan <i>Period of Office</i> |
|---------------------|---|--|---------------------------------------|--|
| Rukijo | Ketua Komite SDM dan Pengusahaan/Komisaris <i>Chairman of HC and Business Committee / Commissioner</i> | Mengikuti masa jabatan sebagai Komisaris <i>Based on the term of office as Commissioner</i> | | |
| Irwan Rei | Anggota/Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i> | SK/003/BOC-MRT/IX/2019 | 02/09/2019 - 31/10/2020 | Ke-2 2 nd |
| Helda Chandra | Anggota/Pihak Independen <i>Member / Independent Party</i> | SK/004/BOC-MRT/IX/2019 | 01/12/2019 - 31/10/thn | Ke-1 1 st |

Tabel 6.60
Table 6.60

Profil Anggota Komite SDM & Pengusahaan

Profile of HC and Business Committee Member

Rukijo

Ketua Komite SDM & Pengusahaan/Komisaris
Chairman of HC and Business Committee / Commissioner

Profil Ketua Komite SDM & Pengusahaan, Rukijo, dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini

The Profile of the Chairman of the HC and Business Committee, Rukijo, can be found in the profile section of the Board of Commissioners in the Corporate Profile chapter of this Annual Report

Irwan Rei

Anggota Komite SDM & Pengusahaan (2 September 2019–31 Oktober 2020, periode ke-2)
Member of HC and Business Committee (September 2, 2019 - October 31, 2020, 2nd Period)

Kewarganegaraan *Citizenship*

Warga Negara Indonesia *Indonesian*

Usia *Age*

53 Tahun *53 Years*

Domisili *Domicile*

DKI Jakarta, Indonesia *DKI Jakarta, Indonesia*

Tempat dan Tanggal Lahir *Place and Date of Birth*

Manado, 9 Oktober 1965 *Manado, 9 Oktober 1965*

Riwayat Pendidikan *Educational History*

- MBA (S2) dari Monash Mt. Eliza Business School, Monash University, Australia (1997);
- MSc (S2) di Bidang Teknik Perminyakan dari University of Southern California, USA (1993);
- Sarjana (S1) di Bidang Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia (1989).
- An MBA (S2) from Monash Mt. Eliza Business School, Monash University, Australia (1997);
- MSc in Petroleum Engineering from the University of Southern California, USA (1993);
- Bachelor's degree in Petroleum Engineering from the Bandung Institute of Technology, Indonesia (1989).

Riwayat Pekerjaan *History of Employment*

- Pengajar, *School of Business Management (SBM) ITB*, 2009–sekarang;
- Tim Penulis Buku "Ketahanan Industri Indonesia 2018-2030", Dewan Analisis Strategis BIN, 2017;
- Tim Penulis Buku "Practical Human Resources", Gramedia, 2016;
- *Strategy Advisor*, Daya Dimensi Indonesia, 2014–2018;
- Komite SDM, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), 2013–2017;
- Komite Remunerasi, Donggi Senoro-LNG, 2011–2018;
- Komite SDM, LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), 2010–2015;
- *Managing Director*, MTI Consulting, 2006–sekarang;
- *Managing Director & Partner*, SRW&Co., 2003-2006;
- *Sr. Consultant*, Towers Perrin, Singapore, 2001-2003;
- *Business Team Leader/Director*, Hewitt Associates, 1997–2001;
- *Petroleum Engineer*, Conoco Indonesia, 1993-1995;
- *Petroleum Engineer*, Hubday Oil, 1990-1991.
- *Lecturer*, School of Business Management (SBM) ITB, 2009 - present;
- *Writer Team of "Indonesia's Industry Resilience 2018-2030" Book*, BIN Strategic Analysis Board, 2017;
- *Writer Team of "Practical Human Resources" Book*, Gramedia, 2016;
- *Strategy Advisor*, Daya Dimensi Indonesia, 2014 - 2018 ;
- *HR Committee*, OJK (Financial Services Authority), 2013 - 2017;
- *Remuneration Committee*, Donggi Senoro-LNG, 2011 - 2018;
- *HR Committee*, LPS (Loan Insurance Agency), 2010 - 2015;
- *Managing Director*, MTI Consulting, 2006 - present;
- *Managing Director & Partner*, SRW&Co., 2003 - 2006;
- *Sr. Consultant*, Towers Perrin, Singapore, 2001 - 2003;
- *Business Team Leader/Director*, Hewitt Associates, 1997 - 2001;
- *Petroleum Engineer*, Conoco Indonesia, 1993 - 1995;
- *Petroleum Engineer*, Hubday Oil, 1990 - 1991.

Sertifikasi *Certification*

Irwan Rei tidak mengikuti pelatihan di sepanjang tahun 2019, dan tidak memiliki sertifikasi yang berlaku per 31 Desember 2019.

Irwan Rei did not participate in any training during 2019 and did not have any valid certification as of December 31, 2019.

Helda Chandra

Anggota Komite SDM & Pengusahaan (1 Desember 2019–31 Oktober 2020, periode ke-1)
Member of HC and Business Committee (December 1, 2019 - October 31, 2020, 1st Period)

Kewarganegaraan *Citizenship*

Warga Negara Indonesia *Indonesian*

Usia *Age*

39 Tahun *39 Years*

Domisili *Domicile*

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia *East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*

Tempat dan Tanggal Lahir *Place and Date of Birth*

Pontianak, 11 Mei 1980 *Pontianak, May 11, 1980*

Riwayat Pendidikan *Educational History*

- Kandidat *Master of Communication*, Universitas Indonesia, Juni 2018–sekarang;
- *Associate's Degree*, Sastra & Budaya Cina, Beijing Language and Culture University, 2003-2004;
- Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran, Universitas Indonesia, 2002.
- *Candidate of Master of Communication*, University of Indonesia, June 2018 - present;
- *Associate's Degree*, Chinese Literature & Culture, Beijing Language and Culture University, 2003-2004;
- *Bachelor's Degree in Economics, Marketing Management*, University of Indonesia, 2002.

Riwayat Pekerjaan *History of Employment*

- *Partner*, Commerce Development Research Institute, Taiwan, 2019;
- *Partner*, Red & White, China, Alibaba Project, 2016;
- CEO, Communic 8 Agency, 2014–sekarang;
- Salah satu juri kompetisi Debat Pemasaran & Perencanaan Pemasaran Indonesia, 2013–2014;
- *Senior Marketing Communication Manager*, Fujitsu, 2011–2013;
- *Marketing Communication*, Adira Finance, 2008–2011;
- *Marketing Communication*, LG Indonesia, 2005–2008.
- *Partner*, Commerce Development Research Institute, Taiwan, 2019;
- *Partners*, Red & White, China, Alibaba Project, 2016;
- CEO, Communic 8 Agency, 2014 - present;
- A jury of Indonesia Marketing Debate & Marketing Plan competition, University of Indonesia, 2013 - 2014;
- *Senior Marketing Communication Manager*, Fujitsu, 2011 - 2013;
- *Marketing Communication*, Adira Finance, 2008 - 2011;
- *Marketing Communication*, LG Indonesia, 2005 - 2008.

Sertifikasi *Certification*

Passing HSK Intermediate Level Chinese Literature Certification, Beijing Language & Culture University 2014.



Pedoman Kerja: Piagam Komite SDM & Pengusahaan

Work Guideline: HC & Business Committee Charter

Sebagai Komite yang dibentuk untuk menjadi mitra independen bagi Dewan Komisaris guna mendorong peningkatan kinerja manajemen dalam mencapai tujuan Perseroan, Perseroan telah menyusun Piagam Komite, untuk menjadi pedoman Komite dalam menjalankan tugasnya.

As a committee formed as an independent partner of the Board of Commissioners aimed to encourage improved management performance in achieving the Corporate objectives, the Corporation has prepared a Committee Guideline, to guide the Committee in performing its duties.

Piagam Komite SDM & Pengusahaan antara lain berisi:

- Pembentukan dan Keanggotaan
- Fungsi, Tugas, Kewenangan, dan Tanggung Jawab

The Charter of the HC and Business Committee includes:

- *Formation and Membership*
- *Functions, Duties, Authority and Responsibilities*

- Prosedur Kerja dan Mekanisme Rapat
- Kode Etik

- *Work Procedure and Meeting Mechanism*
- *Code of Ethics*

Independensi Komite SDM & Pengusahaan

The Human Capital & Business Committee Independence

Agar dapat bertindak independen, anggota Komite SDM & Pengusahaan Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Bukan merupakan bagian dari perusahaan konsultan bidang sumber daya manusia yang bekerja untuk Perseroan.
2. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite SDM & Pengusahaan.
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perseroan.
4. Tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepada daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Transparansi independensi Komite SDM & Pengusahaan terlihat dalam tabel berikut:

In order to act independently, Members of the Corporations's HC and Business Committee are required to fulfill the following independence criteria:

1. *Are not part of a consulting firm in the field of human resources working for the Corporation.*
2. *Do not have business relationships, either directly or indirectly related to the Corporation's business, including not receiving compensation from the Corporation and its subsidiaries in addition to the compensation for services received relating to duties as a Member of the HC and Business Committee.*
3. *Do not have family relations by marriage and blood to the second degree, either horizontally and vertically with members of the Board of Commissioners, the Directors, or Major/Controlling Shareholders of the Corporation.*
4. *Do not hold dual positions as administrators of political parties and/or legislative members/candidates and or regional head/deputy officials/candidates, and other positions in accordance with the statutory regulations that may potentially lead to conflicts of interest.*

The transparency and independence of the HC and Business Committee can be observed in the following table:

| Aspek Independensi <i>Independence Aspect</i> | Irwan Rei | Lilyani Harsulistiyati | Helda Chandra |
|---|------------------|-------------------------------|----------------------|
| Merupakan bagian dari perusahaan konsultan bidang sumber daya manusia yang bekerja untuk Perseroan <i>Part of a consulting firm in the field of human resources working for the Corporation</i> | x | x | x |
| Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan usaha Perseroan <i>Has business relationships either directly or indirectly related to the Corporation's business</i> | x | x | x |
| Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali <i>Has family relations with the Board of Commissioners, Directors, or Major/Controlling Shareholders</i> | x | x | x |
| Memangku jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan atau calon kepada daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan <i>Holds dual positions as an official of a political party and/or a legislative candidate/member and/or a regional head/deputy official/candidate, and other positions in accordance with the statutory regulations that can potentially lead to conflicts of interest</i> | x | x | x |

Tabel 6.61. Transparansi independensi Komite SDM & Pengusahaan
Table 6.61. Transparency and Independence of the HC and Business Committee

Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite SDM & Pengusahaan

Functions, Duties, Responsibilities and Authority of the HC & Business Committee

Komite SDM & Pengusahaan berfungsi sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi konsultansi pada bidang remunerasi dan nominasi Perseroan. Untuk itu, Komite mempunyai hubungan kerja langsung dengan Dewan Komisaris, serta berkoordinasi dengan Divisi *Human Capital*.

The Human Capital and Business Committee functions as an extension of the Board of Commissioners in carrying out the consultancy function in the field of remuneration and nomination of the Corporation. For this reason, the Committee has a direct working relationship with the Board of Commissioners, and coordinates with the Human Capital Division.

Tugas Komite SDM & Pengusahaan terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu:

The duties of the HC and Business Committee are divided into 2 (two) categories, namely:

1. Tugas terkait dengan fungsi Nominasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan kebijakan Unit Kerja Perseroan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi, serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Unit Kerja Perseroan.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Unit Kerja Perseroan berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Unit Kerja Perseroan.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Dalam mengidentifikasi kandidat yang cocok, Komite dapat menggunakan jasa penasihat eksternal pencarian perekrutan untuk mempermudah pencarian.

1. Nomination Duties

- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the structures of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and Corporate Work Units, policies and criteria needed in the Nomination process, and performance evaluation policies for members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Corporate Work Units.
- Assist the Board of Commissioners in evaluating the performances of members of the Board of Directors, the Board of Commissioners and Corporate Work Units based on benchmarks that have been prepared as evaluation materials.
- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building programs for members of the Directors, members of the Board of Commissioners and the Company's Work Units.
- Provide proposals for candidates who qualify as members of the Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS. In identifying suitable candidates, the Committee may use the services of an external recruitment advisor to facilitate the search.

2. Tugas terkait dengan fungsi Remunerasi

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Unit Kerja Perseroan.
- Meninjau kelayakan yang berlaku dan relevansi terkait struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi.

2. Remuneration duties

- Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies and amounts of Remuneration.
- Assist the Board of Commissioners in evaluating performance according to the remuneration received by each member of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Corporate Work Units.
- Review the applicable eligibility and relevance related to the Remuneration structure, policies and amounts.

3. Pelaporan

Komite wajib membuat laporan kegiatan triwulanan kepada Komisaris Utama, laporan ditandatangani oleh Ketua Komite atau anggota Komite lainnya setelah mendapat kuasa dari Ketua Komite.

3. Reporting

The Committee is required to prepare a quarterly activity report to the President Commissioner, the report is signed by the Chair of the Committee or other Committee members after obeying granted authority by the Chair of the Committee.

Tanggung jawab Komite SDM & Pengusahaan adalah:

Responsibilities of the HC and Business Committee:

1. Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Menyusun program kerja tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Pertanggungjawaban Komite kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - Laporan tahunan
 - Laporan triwulanan

1. The committee reports to the Board of Commissioners.
2. Develop an annual work program approved by the Board of Commissioners.
3. The accountability of the Committee to the Board of Commissioners is communicated in the following reports:
 - Annual report
 - Quarterly Reports

- Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus dari Dewan Komisaris.
4. Komite bertanggung jawab dan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang Piagam Komite SDM & Pengusahaan

1. Komite berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh tentang karyawan, dana, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite.
2. Dalam melaksanakan wewenang di atas, Komite bekerja sama dengan Divisi Human Capital sesuai prosedur kerja yang telah ditentukan.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Komite.

- Reports for each implementation of special tasks from the Board of Commissioners.

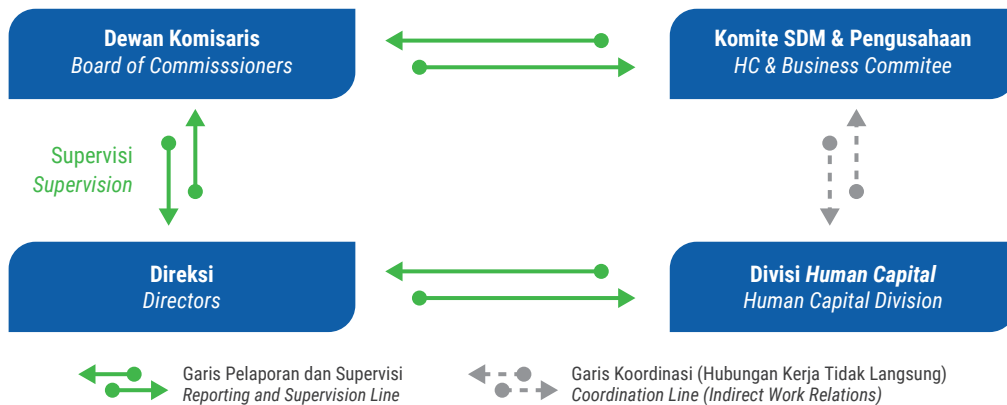
4. The Committee is responsible and obliged to maintain the confidentiality of Corporate documents, data and information.

Authority of the HC & Business Committee

1. The Committee has the authority to obtain full information about employees, funds, and other Corporate resources relating to the implementation of the Committee's duties.
2. In carrying out the above authority, the Committee cooperates with the Human Capital Division in accordance with the determined work procedures.
3. If necessary, with written approval from the Board of Commissioners, the Committee may request the assistance of experts and or consultants to assist the Committee.

HUBUNGAN KERJA KOMITE SDM & PENGUSAHAAN

Work Relationships of the HC & Business Committee



Figur 6.10
Figure 6.10

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite SDM & Pengusahaan

Distribution of Duties and Responsibilities among Members of the HC & Business Committee

Lingkup tugas masing-masing anggota Komite SDM & Pengusahaan adalah sebagai berikut:

The scopes of duties of each HC and Business Committee member are as follows:

Rukijo

Ketua Komite SDM & Pengusahaan/Komisaris
Chairman of HC and Business Committee/Commissioner

1. Menyampaikan laporan bulanan dan triwulanan kepada Komisaris Utama
2. Memberikan saran terkait pengembangan SDM & Pengusahaan kepada Komisaris Utama
3. Bertanggung jawab atas program kerja tahunan kepada Komisaris Utama

1. Submit monthly and quarterly reports to the President Commissioner
2. Provide advice related to HC and business developments to the President Commissioner
3. Responsible for the reporting of the annual work program to the President Commissioner

Irwan Rei

Anggota Komite SDM & Pengusahaan (2 September 2019–31 Oktober 2020, periode ke-2)
Member of HC and Business Committee (Position September 2, 2019 - October 31, 2020, 2nd Period)

- | | |
|--|--|
| 1. Menyusun Program Kerja Tahunan | 1. Develop the Annual Work Program |
| 2. Menyampaikan saran terkait pengembangan SDM kepada Unit Kerja HC dan melaporkan kepada Ketua Komite | 2. Deliver advice related to HC development to the HC Work Unit and report to the Chair of the Committee |
| 3. Berkoordinasi dengan Unit Kerja HC dan Sekdekom dalam rapat bulanan | 3. Coordinate with HC work units and Sekdekom in monthly meetings |

Helda Chandra

Anggota Komite SDM & Pengusahaan (1 Desember 2019–31 Oktober 2020, periode ke-1)
Member of HC and Business Committee (December 1, 2019 - October 31, 2020, 1st Period)

- | | |
|--|--|
| 1. Menyusun Program Kerja Tahunan | 1. Develop the Annual Work Program |
| 2. Menyampaikan saran terkait pengembangan usaha kepada Unit Kerja Business Development dan melaporkan kepada Ketua Komite Audit | 2. Deliver advice related to business developments to the Business Development Unit and report to the Chair of the Audit Committee |
| 3. Berkoordinasi dengan Unit Kerja Business Development dan Sekdekom dalam rapat bulanan | 3. Coordinate with the Business Development and Sekdekom work units in monthly meetings |

Pengembangan Kompetensi Komite SDM & Pengusahaan

Competency Development of the HC & Business Committee

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite SDM & Pengusahaan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite SDM & Pengusahaan.

The Corporation facilitates the implementation of development programs for the HC and Business Committee in order to improve the competency of HC and Business Committee members. The programs are expected to have a positive impact on the productivity and effectiveness of the HC and Business Committee performance.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite SDM & Pengusahaan di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

The competency enhancement activities that the HC and Business Committee participated in throughout 2019 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

Rapat Komite SDM & Pengusahaan

HC & Business Committee Meetings

Rapat Komite diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| 1. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam satu bulan. | 1. Meetings are held periodically at least 1 (one) time in a month |
| 2. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila: <ul style="list-style-type: none">• Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite; dan• Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite yang akan bertindak sebagai pimpinan rapat | 2. Meetings can only be held if: <ul style="list-style-type: none">• Attended by a majority of the committee members; and• Among the majority of the committee members attending as mentioned in Item a is the Chairperson of the Committee who will act as the chair of the meeting. |
| 3. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka pimpinan rapat dapat dikuasakan kepada salah satu anggota Komite. | 3. In the event that the Chair of the Committee is unable to attend, the chairperson role of the meeting may be granted to one of the committee members. |
| 4. Setiap orang dapat menghadiri rapat dari waktu ke waktu atas undangan Ketua Komite | 4. Everyone can attend the Meetings from time to time at the invitation of the Chair of the Committee |
| 5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. | 5. Decisions of Committee meetings are made based on consensus agreements |
| 6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. | 6. In the event that a decision based on consensus is not reached, decision making is based on most votes collected |
| 7. Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, Komite dapat meminta pendapat anggota Dewan Komisaris di luar Komite. | 7. If equal numbers of votes occurred in a voting, the Committee may request the opinion of members of the Board of Commissioners outside the Committee. |

8. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
9. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
10. Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris, melalui Sekretaris Dewan Komisaris.
11. Sekretaris Dewan Komisaris, menghadiri rapat Komite dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada Komite. Sekretaris Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite menerima informasi dan dokumen tepat waktu untuk memungkinkan pertimbangan penuh dan tepat dari topik yang ada.
8. *In the case of the decision making process in which there are differences of opinion, the differences shall be included in the minutes of the meeting along with the reasons for the dissenting opinions.*
9. *The results of the Committee's meetings must be stated in the minutes of the meeting and documented by the Corporation.*
10. *Minutes of Committee meetings must be submitted in writing to the Board of Commissioners, through the Secretary of the Board of Commissioners.*
11. *The Secretary of the Board of Commissioners attends Committee meetings and provides the necessary support to the Committee. The Secretary of the Board of Commissioners ensures that the Committee receives information and documents in a timely manner to allow full and appropriate consideration of the topics at hand.*

Laporan ringkasan risalah rapat Komite SDM & Pengusahaan telah memenuhi ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk perbedaan pendapat atau pendelegasian pimpinan rapat jika Pimpinan Rapat berhalangan hadir dalam rapat.

A summary report of the minutes of meetings of the HC and Business Committee has met the procedural provisions and administration of the law and describes the situation and chronology of the meetings including dissenting opinions or delegation of the chairperson role if the Chairperson is unable to attend meeting.

Di tahun 2019, Komite SDM & Pengusahaan melakukan 4 kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

In 2019, the HC and Business Committee conducted 4 (four) meetings, with the minutes and recapitulation of attendance as follows,

REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE SDM & PENGUSAHAAN PADA RAPAT

Attendance Recapitulation of the HC & Business Committee Meetings

| Komite SDM & Pengusahaan <i>HC and Business Committee</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Meeting(s) Attended</i> | Tidak Hadir <i>Absent</i> | % Kehadiran <i>% Attendance</i> |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------------|
| Rukijo (Ketua <i>Chairman</i>) | 5 | 3 | 2 | 60,00 |
| Irwan Rei (Anggota <i>Member</i>) | 5 | 3 | 2 | 60,00 |
| Helda Chandra (Anggota <i>Member</i>) | 3 | 3 | - | 100,00 |
| Rata-rata <i>Average</i> | | | | 73,33 |

Tabel 6.62
Table 6.62

REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE SDM & PENGUSAHAAN PADA RAPAT

Attendance Recapitulation of the HC & Business Committee Meetings

| No. | Tanggal <i>Date</i> | Tempat <i>Place</i> | Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i> | Peserta Rapat <i>Participants</i> |
|-----|--|--|---|--------------------------------------|
| 1. | 20 September 2019 <i>September 20, 2019</i> | Ruang Rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Meeting Room</i> | Pemutakhiran pekerjaan Divisi <i>Human Capital</i> <i>Human Capital Division work update</i> | Irwan Rei |
| 2. | 21 Oktober 2019 <i>October 21, 2019</i> | Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lantai 10 <i>Director General of Fiscal Balance Ministry of Finance, 10th Floor</i> | Pemutakhiran pekerjaan Divisi <i>Human Capital</i> <i>Human Capital Division work update</i> | Rukijo |

| No. | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participants |
|-----|---------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| 3. | 21 November 2019 November 21, 2019 | Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lantai 10 Director General of Fiscal Balance Ministry of Finance, 10 th Floor | 1. Pemutakhiran pekerjaan Divisi <i>Human Capital</i> 2. Penetapan Anggota Komite SDM & Pengusahaan yang baru 1. Update on the work of the Human Capital Division 2. Appointment of new HC & Business Committee Members | Rukijo Irwan Rei Helda Chandra |
| 4. | 16 Desember 2019 December 16, 2019 | Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lantai 10 Director General of Fiscal Balance Ministry of Finance, 10 th Floor | 1. Ikhtisar ruang lingkup Komersial dan Ritel 2. Masukan Komite Aspek Pengusahaan untuk Komersial dan Ritel 1. Overview of the Commercial & Retail Scope 2. Business Aspect Committee's Input for Commercial & Retail | Helda Chandra |
| 5. | 20 Desember 2019 December 20, 2019 | Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lantai 10 Director General of Fiscal Balance Ministry of Finance, 10 th Floor | 1. Ikhtisar Ruang Lingkup Komersial dan Ritel 2. Persiapan Divisi <i>Human Capital</i> untuk perluasan Perseroan (Anak Perusahaan & JV dengan KAI) 1. Overview of the Commercial & Retail Scope 2. Preparation done by the Human Capital Division for Corporate expansion (Subsidiaries & JV with KAI) | Rukijo Irwan Rei Helda Chandra |

Tabel 6.63
Table 6.63

Kebijakan Remunerasi

Remuneration Policy

Perusahaan memiliki kebijakan untuk memberikan remunerasi bagi anggota Komite SDM & Pengusahaan yang berasal dari unsur non-komisaris.

The Corporation has a policy to provide remuneration for members of the HC and Business Committee originating from non-Commissioner elements.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite SDM & Pengusahaan pada Tahun 2019

Brief Report on the Implementation of the Duties and Activities of the HC & Business Committee in 2019

Di sepanjang tahun 2019, Komite SDM & Pengusahaan telah melaksanakan berbagai kegiatan maupun rapat-rapat pembahasan dengan Manajemen, Kepala Unit Kerja terkait, serta Komite-komite Dewan Komisaris lainnya, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

Throughout 2019, the HC and Business Committee carried out various events and meetings with the Management, heads of related work units, and other committees of the Board of Commissioners, with the following results:

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|--|---|
| <p>1. Perlu dilakukan <i>Job Person Mapping</i> untuk memastikan seseorang cocok atau tepat dengan posisinya dan rencana pengembangan dalam waktu 2 tahun</p> <p>2. HC mulai melakukan analisis pendekatan remunerasi yang berbasis kinerja dan penerapannya di luar gaji pokok</p> <p>3. HC mengawal agar dalam penyusunan KPI individu tidak terjadi penentuan target yang terlalu mudah, sehingga terlihat semua capaian melebihi target, maka target tahun depan minimal harus sama atau diletakkan dari target tahun sebelumnya</p> | <p>1. <i>Job Person Mapping</i> needs to be done to ascertain whether a person fits his or her position and determine the developmental plans for the next 2 (two) years</p> <p>2. HC begins to conduct a performance-based remuneration analysis and its application outside the base salary</p> <p>3. HC oversees the drafting of individual KPIs to ensure that there are no underwhelming targets, which make all achievements appear to have exceeded targets, thus the targets for the following year must be equal to or exceed the targets of the previous year</p> |
|--|---|

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|--|--|
| <p>4. HC dapat melakukan kajian mengenai kebutuhan tenaga kerja khususnya fungsi Operasi & Pemeliharaan yang dibandingkan dengan operator perkeretaapian di negara lain, sehingga jumlah tenaga kerja dapat diidentifikasi sesuai kebutuhan</p> <p>5. Perlu dibuatkan langkah-langkah yang jelas menuju <i>learning academy</i> di tahun 2021. Persiapan dapat dimulai dengan membuat pelatihan internal, sehingga <i>cost efficiency</i> karena tidak lagi menggunakan vendor atau ditugaskan keluar kota/negeri</p> <p>6. <i>Profiling</i> SDM Perseroan dapat diperlengkap, dengan sistem yang ada pastikan bahwa data <i>talent pool</i>, pelatihan yang dibutuhkan, serta data karyawan yang sudah keluar/tidak aktif</p> | <p>4. <i>HC can conduct studies on manpower needs, especially operation & maintenance functions compared to other countries' railway operators, so that the number of manpower can be identified as needed</i></p> <p>5. <i>Clear and concrete steps need to be made to prepare for the learning academy in 2021. Preparation can begin by conducting internal training to achieve cost-efficiency, cutting the budget for external vendors or out of town/overseas training trips</i></p> <p>6. <i>The Corporation's HR profiling can be made more comprehensive, ensure that with the existing system the Corporation has access to data that covers talent pool, required trainings, and former employees</i></p> |
|--|--|

Tabel 6.64
Table 6.64

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|--|--|
| <p>1. Divisi HC perlu memastikan bahwa Direksi sudah mengetahui dan menyepakati market pembeding (referensi) dari MRT Jakarta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah BUMN, BUMD, atau <i>general market</i> • Apakah Direksi sudah menyepakati tingkat <i>competitiveness</i> MRT Jakarta di market pada posisi (persentil) berapa <p>2. Divisi HC perlu memperhatikan <i>financial implications</i> dari penerapan skema remunerasi yang baru, baik dalam jangka pendek maupun panjang, <i>fixed</i> atau <i>variable</i>. Agar target posisi market digunakan sebagai rujukan terlebih dahulu, sebelum menggunakan rujukan <i>pay ratio</i>.</p> <p>3. Perhatikan perbedaan nilai frekuensi bonus antara level pegawai yang cukup besar, yang dapat menimbulkan <i>Internal equity issue</i>.</p> <p>4. Penerapan sistem remunerasi harus berbasis kinerja, Perseroan mencapai tingkat <i>competitiveness</i> di pasar (market persentil 75), kemudian diikuti <i>pay ratio</i></p> <p>5. Besaran <i>multiplier bonus</i> antara level jabatan cukup berbeda dan akan cukup sensitif bagi karyawan</p> <p>6. Agar konsultan membuat simulasi jika semua <i>layer grade</i> secara konsisten dijaga untuk mencapai posisi market di persentil 75, bagaimanakah matriks <i>multiplier performance bonus</i> yang akan dihasilkan, menimbang posisi umum remunerasi MRT Jakarta saat ini, jarak <i>multiplier bonus per grade</i> seharusnya tidak terlalu jauh antara <i>grade</i> atas dan bawah jika yang digunakan adalah pendekatan <i>market competitiveness (vs pay-ratio)</i></p> | <p>1. <i>The HC Division must ensure that the Directors are aware of and have agreed to a comparative market (reference) from the Jakarta MRT with the following considerations:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Whether it refers to SOE, ROE, or the general market</i> • <i>Whether the Directors have agreed on what position (percentile) the competitiveness level of MRT Jakarta is currently at</i> <p>2. <i>The HC Division needs to pay attention to the financial implications of the new remuneration scheme implementation, both in the short and long terms, fixed or variable. To ensure that the target market position is used as a reference first, before using the "pay ratio" reference</i></p> <p>3. <i>Note the significant differences in the bonus frequency values between employees of different levels, which can lead to "Internal equity issues"</i></p> <p>4. <i>The implementation of the remuneration system must be based on performance, the Corporation reaches a level of competitiveness in the market (75th percentile market), followed by the pay ratio</i></p> <p>5. <i>The amounts of bonus multiplier between levels are quite different and will be quite sensitive for employees</i></p> <p>6. <i>In order for the consultant to make a simulation if all grade layers are consistently maintained to reach market positions in the 75th percentile, how will the bonus multiplier performance matrix be generated, considering the current general position of MRT Jakarta remuneration, the differences in multiplier bonus of the top and bottom grades shall not be too significant if the market competitiveness is applied (vs pay-ratio)</i></p> |
|--|--|

Tabel 6.65
Table 6.65

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. HC diminta mulai melengkapi aturan Perseroan terkait <i>Performance Management System</i> (PMS), termasuk di dalamnya bagaimana penilaian PMS untuk orang yang menjabat 2 posisi atau lebih (karena promosi/mutasi) dalam siklus KPI tahunan 2. Untuk keputusan Perseroan menggunakan <i>forced ranking</i> dalam PMS ada 3 hal yang harus diperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan <i>target setting</i> harus dikawal • Ada <i>logbook system</i> yang mencatat progres pencapaian sebagai bahan pertimbangan penilaian • Ada sistem TI yang menunjang untuk memantau KPI secara <i>real time</i> 3. Skema pemberian reward dari KPI juga ditetapkan dengan baik berdasarkan penetapan target masing-masing dan dijaga keseimbangan antara kinerja individual dan kinerja tim/organisasi 4. HC perlu berperan penting dalam penetapan KPI tahunan unit kerja, perlu ada review dan penilaian dalam penetapan target unit kerja 5. Internalisasi budaya perusahaan mulai diperhatikan juga dan ada rencana kerja dari HC untuk budaya perusahaan ini 6. Untuk visualisasi skala upah Perseroan, pastikan data yang divisualisasikan juga menggambarkan skala upah MRT Jakarta sendiri dan regulasi yang ada 7. Tiap triwulan akan diadakan juga rapat Komite SDM dan aspek Perseroan dapat saling <i>update</i> dan berkoordinasi jika ada inisiatif masing-masing yang saling berpengaruh | <ol style="list-style-type: none"> 1. HC is asked to begin completing the Corporation's rules related to <i>Performance Management System</i> (PMS), including how to assess PMS for people holding 2 (two) or more positions (due to promotion/mutation) in the annual KPI cycle 2. With regards to the Corporation's decision to use <i>forced ranking</i> in PMS, there are 3 (three) things that must be considered: <ul style="list-style-type: none"> • The target setting must be done under supervision • There is a logbook system that records the progress of achievements as a consideration for assessment • There is a supporting IT system to monitor KPIs in real time 3. The reward schemes from KPIs are also established based on the targets set while maintaining a balance between individual performance and team/organization performance 4. HC needs to play an important role in determining the annual KPIs of the work units, there needs to be a review and assessment in determining work unit targets 5. Corporate culture internalization needs to receive more attention and there is a work plan from HC regarding this Corporate culture 6. For the visualization of the Corporation's wage scale, make sure that the visualized data also reflects MRT Jakarta's own wage scale and existing regulations 7. Every quarter, there will be a meeting of the HC Committee and aspects of the company can be updated and coordinated if there are initiatives that influence each other. |
|--|---|

Tabel 6.66
Table 6.66

Hasil Rapat Meeting Result

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Dipastikan regulasinya dari Pemerintah Daerah dan Pusat terkait rencana pemasangan iklan di area CTVT (<i>Cooling Tower Ventilation Tower</i>) juga pemasangan iklan di pilar-pilar layang agar tidak ada hal yang melanggar MRT Jakarta 2. Perlu penjelasan pertimbangan Perseroan saat memutuskan untuk periklanan di stasiun hanya boleh 1 <i>line product</i> saja per kategori (1 <i>telco</i>, 1 <i>ride hailing</i>, dst) juga pertimbangan pembatasan <i>brand</i> ritel yang boleh masuk (walaupun ritel sanggup membayar sewa, tapi jika <i>brand</i> tidak sesuai dengan <i>image</i> maka akan ditolak MRT Jakarta) 3. Inisiatif Ritel Komersial juga harus dilandaskan pada penetapan <i>marketing funneling</i>-nya Perseroan. Untuk itu perlu diketahui terlebih dahulu dan dianalisis <i>traffic</i> pengguna jasa di MRT Jakarta seperti apa, demografi penumpang seperti apa, sehingga strateginya sesuai | <ol style="list-style-type: none"> 1. Governments related to the plans to advertise in the CTVT (<i>Cooling Tower Ventilation Tower</i>) area and on elevated pillars to ensure that MRT Jakarta will not commit any violation 2. There is a need for an explanation on the Corporation's considerations when deciding to advertise only 1 <i>line product</i> per category (1 <i>telco</i>, 1 <i>ride hailing</i> app, etc.) at the station, and the consideration to limit the incoming retail brands (even though retail brands are able to pay rent, MRT Jakarta will reject the applications if the brands are not aligned with the Corporate image) 3. The Commercial Retail Initiative must also be based on the Corporation's decisions regarding marketing funneling. As such, it is necessary to know and analyze passenger traffic in MRT Jakarta, to know the passenger demographics in order to prepare the appropriate strategy |
|--|--|

Hasil Rapat Meeting Result

- | | |
|---|---|
| <p>4. Walaupun laba sekarang sudah didapat oleh Perseroan, namun <i>branding</i> Perseroan dan <i>customer engagement</i> harus tetap dikuatkan agar pengguna jasa juga <i>long term</i>. Strategi perusahaan <i>start up</i> untuk investasi besar di awal pendirian untuk membangun <i>engagement</i> dan loyalitas pengguna dapat dicontoh juga oleh MRT Jakarta</p> | <p>4. <i>Although the Corporation has generated revenue by now, the Corporation's branding and customer engagement must still be strengthened to attract and retain long term passengers. The start-up strategy of investing a large sum of capital in the initial stages to build engagement and user loyalty can be a reference for MRT Jakarta</i></p> |
|---|---|

Tabel 6.67
Table 6.67

Hasil Rapat Meeting Result

- | | |
|---|---|
| <p>1. Perlu dipastikan terkait penetapan nominal 100 miliar sebagai angka kontrak untuk <i>Out of Home (OOH)</i> Periklanan pada tiang-tiang <i>elevated</i> MRT Jakarta, apakah harga tersebut di atas atau di bawah harga pasar</p> <p>2. Divisi <i>Retail & Commercial</i> menjelaskan bahwa penetapan harga tersebut sudah berdasarkan <i>benchmark</i> harga OOH dan pertimbangan pengeluaran tahunan OOH dari perusahaan-perusahaan. Divisi <i>Retail & Commercial</i> juga menjelaskan bahwa 100 miliar adalah <i>minimum guarantee</i> yang diterima MRT Jakarta dan MRT Jakarta akan menerima <i>income</i> tambahan berupa <i>profit sharing</i> dari Jakpro sebagai pemenang tender yang berhasil menjual ruang iklan ke pihak lain</p> <p>3. Kontrak untuk OOH ini agar dapat direviu tiap tahun untuk memastikan bahwa nilai 100 miliar yang ditetapkan apakah sudah di bawah atau di atas harga pasar. Ketua Komite SDM & Pengusahaan menambahkan reviu kontrak tahunan ini perlu dilakukan karena rute MRT Jakarta otomatis juga meningkatkan harga pasar area yang dilewatinya</p> <p>4. Untuk model <i>Performance Management System (PMS)</i> yang baru (skema <i>Balanced Scorecard</i>) agar dilakukan otomatisasi dan berbasis aplikasi mengingat jumlah SDM di MRT Jakarta yang semakin besar</p> <p>5. Untuk rencana kesiapan SDM dalam pembentukan anak perusahaan dan perusahaan JV yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah sudah dilakukan prosedur <i>Work Load Analysis (WLA)</i> dalam penetapan jumlah SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan baru dan MRT Jakarta di tahun 2020 • Bagaimana aspek legal dan hubungan industrial dari MRT Jakarta dengan anak perusahaan dan perusahaan JV, dan apakah MRT Jakarta sudah melakukan <i>benchmark</i> dengan BUMD lain yang memiliki anak perusahaan <p>6. Selama dalam proses penugasan/pemindahan <i>manpower</i> dari MRT Jakarta ke anak perusahaan maupun perusahaan JV agar posisi-posisi yang kritical bagi operasional Perseroan dipastikan tetap terisi dan fungsinya tetap berjalan, sehingga kinerja (KPI) Perseroan pun tetap terjaga</p> | <p>1. <i>Confirm whether the agreed amount of Rp100 billion for an Out of Home (OOH) Advertising contract on the elevated pillars of MRT Jakarta is above or below the market price</i></p> <p>2. <i>The Retail & Commercial Division explained that the pricing was based on OOH price benchmarks and had taken into consideration the annual OOH expenditures of various companies. The Retail & Commercial Division also explained that Rp100 billion is the minimum guaranteed amount received by MRT Jakarta and the Corporation will receive additional income in the form of profit sharing from Jakpro as the winning bidder who managed to sell advertising spaces to other parties</i></p> <p>3. <i>The contract for this OOH advertising needs to be reviewed annually to confirm whether the determined value of Rp100 billion is below or above the market price. The Chair of the HC & Business Committee added that this annual contract review needs to be done because the MRT Jakarta route also automatically increases the market value of the areas passed by the MRT</i></p> <p>4. <i>The new Performance Management System (PMS) model (Balanced Scorecard scheme) to be carried out in an automated and application-based manner considering the increasing number of HC in MRT Jakarta</i></p> <p>5. <i>Notes on the HR readiness plan in establishing a subsidiary and JV company, namely:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>If the Work Load Analysis (WLA) procedure has been carried out to determine the number of HC required by new corporations and MRT Jakarta in 2020</i> • <i>How the legal and industrial relations aspects of MRT Jakarta are with its subsidiary and JV companies, and whether the MRT Jakarta has performed benchmark tests with other ROEs that have subsidiaries</i> <p>6. <i>During the assignment / transfer process of manpower from Jakarta During the manpower assignment/transfer process from MRT Jakarta to its subsidiaries and JV companies, ensure that the critical positions for the Corporation's operations remain filled and their functions continue to operate normally, so that the Corporation's performance (KPIs) is maintained</i></p> |
|---|---|

Hasil Rapat
Meeting Result

- | | |
|--|---|
| <p>7. Untuk sosialisasi pembentukan anak perusahaan dan JV ini harus dijaga dengan baik, khususnya aspek psikologis karyawan tentang status dan nasib mereka. HC harus menyiapkan regulasi SDM untuk pembentukan anak perusahaan dan JV, <i>workplan/roadmap</i>, maupun berbagai skenario situasi yang dapat timbul</p> | <p>7. <i>The socialization of the subsidiary and JV companies formations must be carried out properly, especially the psychological aspects of employees regarding their employment status. HC must prepare HR regulations for the formation of subsidiaries and JVs, work plans/road maps, as well as bracing for various situational scenarios that may arise</i></p> |
| <p>8. Divisi HC perlu menyiapkan materi komunikasi, termasuk <i>Frequently Asked Questions (FAQ)</i>, untuk menjawab dengan konsisten dan komprehensif pertanyaan-pertanyaan yang diperkirakan akan banyak ditanyakan oleh karyawan</p> | <p>8. <i>The HC Division needs to prepare communication materials, including Frequently Asked Questions (FAQ), to consistently and comprehensively answer questions that are expected to come from employees</i></p> |

Tabel 6.68
Table 6.68

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris
Performance Evaluation by the Board of Commissioners

Evaluasi kehadiran pada rapat rutin Komite SDM & Pengusahaan:

Attendance evaluation at regular HC and Business Committee meetings:

| No. | Nama <i>Name</i> | Kedudukan <i>Position</i> | Mulai Menjabat sebagai Komite <i>Start Date</i> | Frekuensi Kehadiran <i>Attendance Frequency</i> | |
|--------------------------|---------------------|---|--|--|------------------------------------|
| | | | | Jumlah Hadir Rapat/Wajib Rapat <i>Meeting(s) Attended</i> | % Kehadiran <i>% Attendance</i> |
| 1. | Rukijo | Ketua/Komisaris <i>Head / Commissioner</i> | 31 Juli 2019 <i>July 31, 2019</i> | 3/5 | 60,00 |
| 2. | Irwan Rei | Anggota <i>Member</i> | 1 Februari 2016 <i>February 1, 2016</i> | 4/12 | 33,30 |
| 3. | Helda Chandra | Anggota <i>Member</i> | 1 Desember 2019 <i>December 1, 2019</i> | 2/1 | 100,00 |
| Rata-Rata <i>Average</i> | | | | | 64,40 |

Tabel 6.69. Evaluasi kehadiran pada rapat rutin Komite SDM & Pengusahaan
Table 6.69. *Attendance evaluation at regular HC and Business Committee meetings*

Evaluasi ketepatan waktu laporan triwulan Komite SDM & Pengusahaan:

Timeliness evaluation of quarterly reports by the HC and Business Committee:

| Periode <i>Period</i> | Triwulan I <i>Quarter I</i> | Triwulan II <i>Quarter II</i> | Triwulan III <i>Quarter III</i> | Triwulan IV <i>Quarter IV</i> | Total Ketepatan Pengumpulan <i>Total Timely Submission</i> |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|
| Ketepatan Pengumpulan <i>Timely Submission</i> | - | - | - | √ | 25% |

Tabel 6.70. Evaluasi ketepatan waktu laporan triwulan Komite SDM & Pengusahaan
Table 6.70. *Timeliness Evaluation of quarterly reports by the HC and Business Committee*

Dengan demikian total pencapaian Komite SDM & Pengusahaan adalah sebagai berikut:

Thus, the total achievements of the HC and Business Committee are as follows:

| Key Performance Indicators | Bobot | Skor | Bobot x Skor |
|---|-------|-------|--------------|
| Kehadiran Rapat <i>Meeting Attendance</i> | 50% | 91,7% | 32,2% |
| Ketepatan Waktu Laporan <i>Timely Reporting</i> | 50% | 25% | 12,5% |
| Total Capaian <i>Total Achievements</i> | | | 44,7% |

Tabel 6.71. Total Pencapaian Komite SDM & Pengusahaan
Table 6.71. Total Achievements of the HC and Business Committee

Kebijakan Suksesi Direksi

Directors Succession Policy

Kebijakan dasar terkait suksesi Direksi di lingkup Perseroan sebagai BUMD mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Patungan, yang mengatur bahwa sumber Bakal Calon Direksi BUMD dapat berasal dari:

- Direksi yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain.
- Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang sedang menjabat pada BUMD yang bersangkutan atau BUMD lain.
- Pejabat atau karyawan internal BUMD 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- Pegawai lembaga/instansi Pemerintah.
- Individu selain yang telah disebutkan di atas yang paling sedikit memiliki pengalaman sebagai Direksi atau 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- Individu selain yang telah disebutkan di atas yang diusulkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta selaku lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan optimalisasi BUMD di lingkup Provinsi DKI Jakarta berperan dalam mengusulkan, melakukan proses seleksi administrasi, serta proses Uji Kelayakan dan Kepatutan. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan yang terdiri dari psikotest/penilaian; serta paparan dan wawancara terkait rencana kerja Bakal Calon jika terpilih menjadi Direksi. Dalam pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta dapat membentuk tim dan/atau dibantu oleh lembaga profesional/narasumber/pakar.

Di samping persyaratan formal dan material, Bakal Calon diwajibkan memenuhi persyaratan lainnya, yaitu:

1. Bakal Calon bukan merupakan anggota dan/atau pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.
2. Bakal Calon bukan merupakan pejabat negara yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Bakal Calon bukan merupakan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah.

The basic policy related to the succession of Directors in the Corporate scope as an ROE refers to the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No. 5 of 2018 concerning Procedures for Appointment and Dismissal of Directors of Regional-Owned Enterprises and Joint Ventures, which regulates that prospective candidates for ROE Directors may come from:

- Directors who are currently serving in the relevant ROE or other ROEs.
- Members of the Board of Commissioners or Supervisory Board who are currently serving in the relevant ROE or other ROEs.
- ROE officials or internal employees 1 (one) level below the Directors.
- Employees of government institutions/agencies.
- Individuals other than those mentioned above who have at least experiences as Directors or 1 (one) level below the Directors.
- Individuals other than those mentioned above proposed by the Provincial Governor of DKI Jakarta.

The DKI Jakarta ROE Development Agency as the agency appointed to carry out guidance and optimization duties for ROEs in the DKI Jakarta Province has a role in proposing, carrying out the administrative selection process, and conducting the Fit and Proper Test process. Fit and Proper Test is a process of measuring appropriateness and propriety consisting of psychology test/assessment; as well as explanations and interviews related to the work plan for Candidates if elected as Directors. In conducting the Fit and Proper test, the DKI Jakarta ROE Development Agency may form a team and/or be assisted by professional institutions/resource persons/experts.

In addition to formal and material requirements, Candidates will be required to meet other requirements, namely:

1. Candidates are not members and/or administrators of political parties and/or candidates for legislative members and/or legislative members.
2. Candidates are not state officials who are prohibited based on statutory regulations.
3. Candidates are not candidates for head/deputy regional head and/or head/deputy regional head.

4. Bakal Calon tidak sedang menjabat sebagai Direksi selama 2 (dua) periode pada BUMD yang sama.
5. Bakal Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara menyatakan bersedia mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Aparatur Sipil Negara.

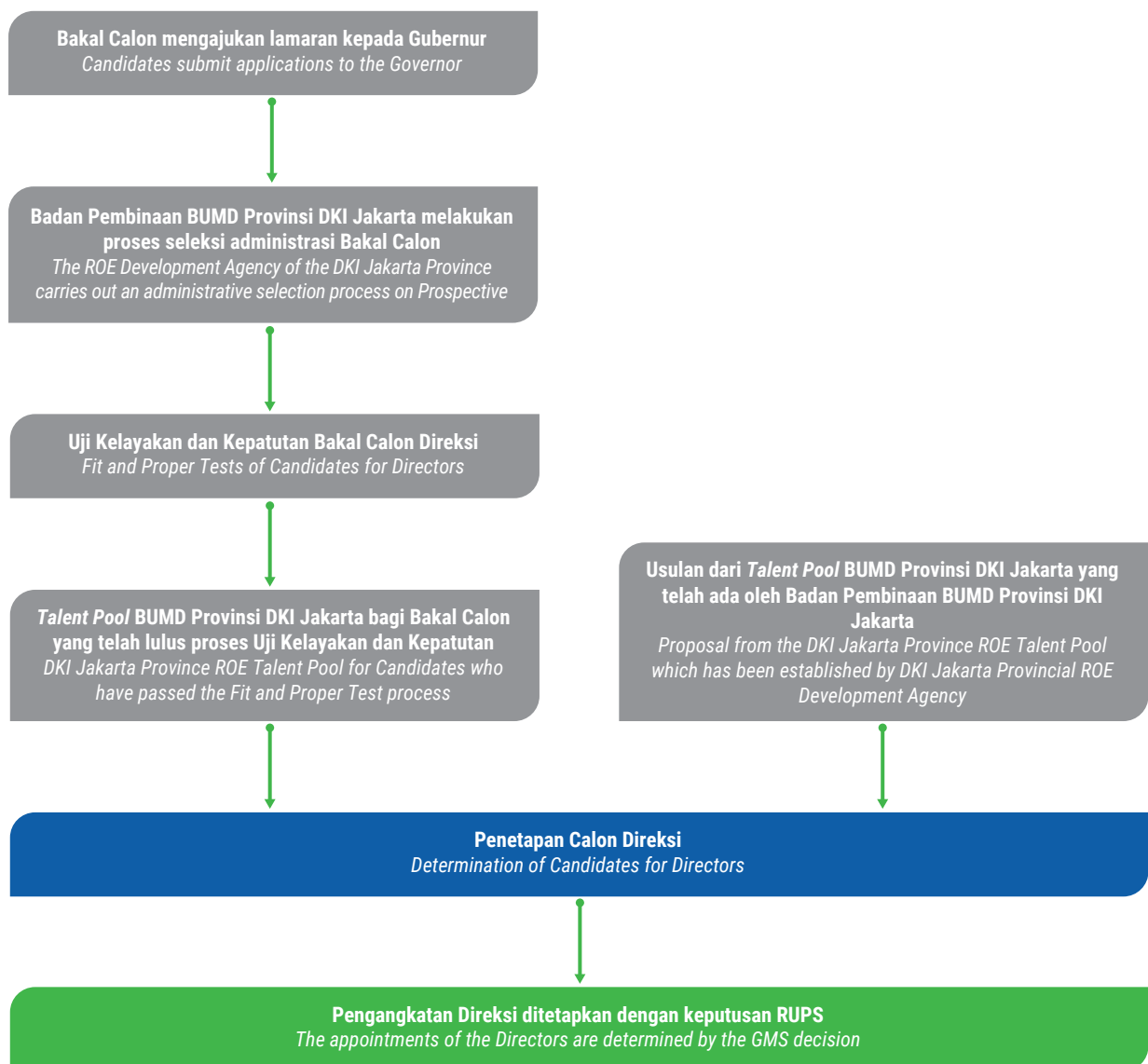
4. Candidates are not currently serving as Directors for 2 (two) periods in the same ROE.
5. Candidates who are listed as State Civil Apparatus shall state their willingness to follow the applicable laws and regulations related to the State Civil Apparatus.

Berikut disampaikan bagan pengusulan hingga penetapan Direksi di lingkup Perseroan sebagai BUMD Provinsi DKI Jakarta.

The following is the proposal chart in appointing Directors in the Corporate scope as an ROE of the DKI Jakarta Province:

PROSES PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN DIREKSI PERUSAHAAN

The Proposal Process Up To Appointments of the Corporation's Directors



Figur 6.11
Figure 6.11

Selain menerima pendaftaran secara terbuka, Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta memiliki manajemen talenta sebagai proses manajemen sumber daya manusia untuk Direksi dalam rangka pengembangan, perkuatan dan pemeliharaan, dan kesinambungan BUMD. Manajemen talenta dilakukan melalui pengelolaan wadah kandidat sebagai wadah para talenta untuk Calon Direksi dalam rangka keberlanjutan, kesinambungan pengurusan BUMD. Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan laporan wadah kandidat berupa daftar kandidat per posisi/rumpun jabatan serta wadah kandidat secara berkala kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

In addition to openly accepting applications, the DKI Jakarta ROE Development Agency has its talent management program as a human resource management process for Directors in the contexts of ROE development, strengthening and maintenance and sustainability. Talent management is carried out through talent pool management as a vessel for candidates for Directors in achieving ROE continuity and management sustainability. The ROE Development Agency of the DKI Jakarta Province delivers a candidate pool report in the forms of candidate lists per position/cluster as well as candidate pool periodically to the Provincial Governor of DKI Jakarta.

Per 31 Desember 2019, Direksi Perseroan yang berasal dari lingkungan internal sebanyak 1 (satu) orang. Hal ini menunjukkan kesempatan yang sama bagi siapa pun yang memiliki talenta dan prestasi untuk mendapatkan promosi jabatan.

As of December 31, 2019, there was 1 (one) Corporate Director sourced from the internal environment. This reflects equal opportunity for anyone who has the talent and achievements to get a promotion.

KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN SEKURITI

THE RISK & SECURITY MONITORING COMMITTEE

Komite Pemantau Risiko & Sekuriti (sebelumnya Komite Pemantau Risiko) dibentuk melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan No. 002 Tahun 2019, yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan Perseroan dan pengelolaan risiko.

The Risk & Security Monitoring Committee (formerly Risk Monitoring Committee) was formed through Decree of the Corporation's Board of Commissioners No. 002 of 2019, and is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out the Corporation's supervisory and risk management duties.

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Qualifications to Become a Member of the Risk & Security Monitoring Committee

Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti berhak mengusulkan pergantian Komite Pemantau Risiko & Sekuriti jika salah seorang anggota Komite berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Sekretaris Komite ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Komite.

Members of the Risk Monitoring & Security Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Chairperson of the Risk & Security Monitoring Committee has the right to propose the replacement for the Risk & Security Monitoring Committee if a member of the Committee ends his or her term of office, resigns, or is dismissed. The Committee Secretary is appointed based on the decision of the Committee meeting.

Mengacu pada aturan di Piagam Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:

Referring to the rules in the Risk & Security Monitoring Committee Charter, the composition of the membership of the Risk & Security Monitoring Committee consists of at least 3 (three) people, namely:

1. Seorang Komisaris Independen.
2. Seorang Pihak Independen dari unsur akademisi/praktisi yang memiliki keahlian di bidang keuangan.
3. Seorang Pihak Independen dari unsur akademisi/praktisi yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko, bersertifikasi ISO 31000.

1. An Independent Commissioner.
2. An Independent Party from an academic/practitioner sector who has expertise in finance.
3. An Independent Party from the academic/practitioner sector who has expertise in the field of Risk Management, ISO 31000 certified.

Masa Jabatan

Term of Office

Masa jabatan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti adalah 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The duty period of the Risk Monitoring & Security Committee is 1 (one) year and can be reappointed only for the next 1 (one) term, without prejudice to the Board of Commissioners' right to dismiss it at any time.

Jumlah, Susunan Dan Komposisi Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Tahun 2019

Number, Structure and Composition of the 2019 Risk & Security Monitoring Committee Members

Susunan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti secara kronologis di sepanjang tahun 2019 dan susunan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

The chronological structures of the Risk & Security Monitoring Committee throughout 2019 and the structure of the Risk & Security Monitoring Committee as of December 31, 2019 are as follows:

KRONOLOGI SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO & SEKURITI DI SEPANJANG TAHUN 2019

The Chronological Structures of the Risk & Security Monitoring Committee throughout 2019

| Periode 1 Januari – 31 Desember 2019 <i>Period of January 1 – December 31, 2019</i> | Periode 2 September 2019 - 31 Oktober 2020 <i>Period of September 2 – October 31, 2019</i> | Keterangan <i>Description</i> |
|--|--|---|
| Zulfikri (Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti/Komisaris) (<i>Chairman of Risk Monitoring & Security Committee</i>) | Zulfikri (Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti/Komisaris) (<i>Member / Independent Party</i>) | Berdasarkan SK/002/BOC-MRT/IX/2019 <i>Following the term of office as Commissioner</i> |
| Ivan Malik (Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti/Pihak Independen) (<i>Member / Independent Party</i>) | Ivan Malik (Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti/Pihak Independen) (<i>Member / Independent Party</i>) | Berdasarkan SK/002/BOC-MRT/IX/2019 <i>Following the term of office as Commissioner</i> |
| Singgih Budihartono (Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti/Pihak Independen) (<i>Member / Independent Party</i>) | Singgih Budihartono (Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti/Pihak Independen) (<i>Member / Independent Party</i>) | Berdasarkan SK/002/BOC-MRT/IX/2019 <i>Following the term of office as Commissioner</i> |
| | Sutrisno (Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti/Pihak Independen) (<i>Member / Independent Party</i>) | Berdasarkan SK/002/BOC-MRT/IX/2019 <i>Following the term of office as Commissioner</i> |

Tabel 6.72
Table 6.72

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO & SEKURITI PER 31 DESEMBER 2019

Structure of the Risk Monitoring & Security Committee as of December 31, 2019

| Nama <i>Name</i> | Jabatan <i>Position</i> | Dasar Pengangkatan <i>Basis of Appointment</i> | Masa Jabatan <i>Term of Office</i> | Periode Jabatan <i>Period of Office</i> |
|---------------------|--|--|---------------------------------------|--|
| Zulfikri | Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti/Komisaris <i>Chairman of Risk Monitoring & Security Committee</i> | Berdasarkan SK/002/ BOC-MRT/IX/2019 <i>Based on SK/002/BOC- MRT/IX/2019</i> | | |
| Ivan Malik | Anggota/Pihak Independen <i>Member/Independent Party</i> | Berdasarkan SK/002/ BOC-MRT/IX/2019 <i>Based on SK/002/BOC- MRT/IX/2019</i> | 02/09/2019 - 31/10/2020 | Ke-2 2 nd |
| Singgih Budihartono | Anggota/Pihak Independen <i>Member/Independent Party</i> | Berdasarkan SK/002/ BOC-MRT/IX/2019 <i>Based on SK/002/BOC- MRT/IX/2019</i> | 02/09/2019 - 31/10/2020 | Ke-2 2 nd |

| Nama Name | Jabatan Position | Dasar Pengangkatan Basis of Appointment | Masa Jabatan Term of Office | Periode Jabatan Period of Office |
|--------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| Sutrisno | Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party | Berdasarkan SK/002/ BOC-MRT/IX/2019 Based on SK/002/BOC- MRT/IX/2019 | 02/09/2019 - 31/10/2020 | Ke-1 1 st |

Tabel 6.73
Table 6.73

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Profiles of Members Of the Risk Monitoring & Security Committee

Zulfikri

Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti/Komisaris
Chairman of Risk Monitoring & Security Committee / Commissioner

Profil Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, Zulfikri dapat dilihat bagian profil Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini

The Profile of the Chairman of the Risk Monitoring & Security Committee, Zulfikri can be seen in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter of this Annual Report



Ivan Malik

Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti (2 September 2019–31 Oktober 2020, periode ke-2)
Member of the Risk Monitoring & Security Committee / Commissioner (September 2, 2019 - October 31, 2020, 2nd Period)

Kewarganegaraan Citizenship

Warga Negara Indonesia Indonesian

Usia Age

57 Tahun 57 Years

Domisili Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth

Jakarta, 27 Agustus 1962 Jakarta, August 27, 1962

Riwayat Pendidikan Educational History

- Doctoral Degree, Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia, 2012;
- Master Degree, Manajemen Keuangan, Universitas Indonesia, 2001;
- Ajun Ahli Asuransi Indonesia–Kerugian (AAAIK), 1997;
- Sarjana Teknik Sipil, ITB, 1987.
- Doctoral Degree, Financial Management, University of Indonesia, 2012;
- Master's Degree, Financial Management, University of Indonesia, 2001;
- Adjunct Indonesian Insurance Expert - Losses (AAAIK), 1997;
- Bachelor of Civil Engineering, ITB, 1987.

Riwayat Pekerjaan History of Employment

- Komite PR MRT Jakarta, 2018-sekarang;
- Komite GCG & MR Pelindo 3, 2017-2018;
- Direktur, PT Aero Hotel Management, 2016–sekarang;
- Direktur Finance and Administration, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), 2013-2015;
- Mengelola Bagian Audit Internal, PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk, 2003-2013;
- Manager di Departemen Finance and
- Jakarta MRT PR Committee, 2018-Present;
- Pelindo GCG & MR Committee 3, 2017- 2018;
- Director, PT Aero Hotel Management, 2016 - present;
- Director of Finance and Administration, PT Hotel Indonesia Natour (Persero), 2013 - 2015;
- Managing Internal Audit Section, PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk, 2003 - 2013;
- Managed Finance and Accounting

Accounting, PT Asuransi Intra Asia, 2001–2003;

- Managed and involved in several work units, PT Bank Duta, 1991–2000;
- Agen di Beckmen-Jorgensen International Ltd, 1989–1990;
- Menganalisis struktur pesawat CN 235, PT IPTN, 1988–1989.

Department, PT Asuransi Intra Asia, 2001–2003;

- Managed and involved in several work units, PT Bank Duta, 1991 - 2000;
- Agent of the Beckmen - Jorgensen International Ltd, 1989 - 1990;
- Analyzed CN-235's aircraft frame structure,

Sertifikasi Certification

- Program Edukasi Pasar Modal, Bursa Efek Jakarta, 2007
- Microeconomics of Competitiveness, Universitas Indonesia, 2006
- Sertifikasi Internal Auditor Berkualifikasi Tingkat Dasar, YPIA, 2004

- Capital Market Education Program, Jakarta Stock Exchange, 2007
- Microeconomics of competitiveness, University of Indonesia, 2006
- Basic Qualified Internal Auditor Certification, YPIA, 2004

Singgih Budihartono

Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti (2 September 2019–31 Oktober 2020, periode ke-2)
Member of the Risk Monitoring & Security Committee / Commissioner (September 2, 2019 - October 31, 2020, 2nd Period)

Kewarganegaraan Citizenship

Warga Negara Indonesia

Indonesian

Usia Age

56 Tahun

56 Years

Domisili Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

South Tangerang, Banten, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth

Madiun, 22 Oktober 1963

Jakarta, October 22, 1963

Riwayat Pendidikan Educational History

- Magister Sains, Program Administrasi dan Kebijakan Publik, FISIP UI, 2003;
- Diploma IV, Akuntansi, STAN, 1993.

- Master of Science, Administration and Public Policy Program, FISIP UI, 2003;
- Diploma IV, Accounting, STAN, 1993.

Riwayat Pekerjaan History of Employment

- Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, PT MRT Jakarta (Perseroda), Sept 2018–Sept 2020;
- Direktur, PT Tujuh Karta Wesi, Mei 2014–Desember 2019;
- Komite Audit Perum LKBN Antara, 2014–2018;
- Direktur Utama, PT Target Citra Konsultama, 2013–2014;
- Direktur, PT SPA Consulting, Maret 2010–Februari 2011;
- Konsultan Individu, Bappenas, Mei–November 2009;
- Komite Audit, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, 2008–2014;
- Managing Partner, PT CSA Strategic Advisory, 2004–2009;

- Member of Risk & Security Monitoring Committee, PT MRT Jakarta (Perseroda), Sept 2018 - Sept 2020;
- Director, PT Tujuh Karta Wesi, May 2014 - December 2019;
- Audit Committee Perum LKBN Antara, 2014 - 2018;
- President Director, PT Target Citra Konsultama, 2013 - 2014;
- Director, PT SPA Consulting, March 2010 - February 2011;
- Individual Consultant, Bappenas, May - November 2009;
- Audit Committee, TVRI Public Broadcasting Institute, 2008 - 2014;
- Managing Partner, PT CSA Strategic Advisory, 2004 - 2009;



- Manager, PT CSA Lingkar Mitra, 2004-2009;
- *Business Analyst*, PT Pranata Management Consulting, 1995-1999;
- Auditor, BPKP, 1985-1995.
- *Manager*, PT CSA Lingkar Mitra, 2004 - 2009;
- *Business Analyst*, PT Pranata Management Consulting, 1995-1999;
- *Auditors*, BPKP, 1985 - 1995.

Sertifikasi *Certification*

- *Certified Risk Governance Profesional* (19-20 November 2019);
- Sertifikat Kompetensi Metodologi Pelatihan KKKNI Level 3 (6 November 2017).
- *Certified Risk Governance Profesional* (November 19-20, 2019);
- *Certificate of Methodology Competency Level 3 KKKNI Training* (November 6, 2017).



Sutrisno

Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti (2 September 2019-31 Oktober 2020, periode ke-1)
Member of the Risk Monitoring & Security Committee / Commissioner (September 2, 2019 - October 31, 2020, 1st Period)

Kewarganegaraan *Citizenship*

Warga Negara Indonesia *Indonesian*

Usia *Age*

59 Tahun *59 Years*

Domisili *Domicile*

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia *South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia*

Tempat dan Tanggal Lahir *Place and Date of Birth*

Kudus, 7 November 1960 *Kudus, November 7, 1960*

Riwayat Pendidikan *Educational History*

- Diskpespa Pers, Surabaya, 2012;
- Dikcapareg, Surabaya, 2002;
- Dikcabaregsus, Surabaya, 1991;
- Diktaifib, Surabaya, 1983;
- Dik mata Wamil, Surabaya, 1980.
- *Diskpespa Pers*, Surabaya, 2012;
- *Dikcapareg*, Surabaya, 2002;
- *Dikcabaregsus*, Surabaya, 1991;
- *Diktaifib*, Surabaya, 1983;
- *Dik mata Wamil*, Surabaya, 1980.

Riwayat Pekerjaan *History of Employment*

- Wadantim, Satgas Intel Bais Leuser-04, NAD, 2009-2010;
- Wadantim, Satgas Intel Bais TNI/Gajah Putih, NAD, 2000 - 2001;
- Anggota, Satgas Keris Tim Tim, Timor Timur, 1984 - 1985;
- Anggota, Satgas Tim Tim Pasmal-11, Timor Timur, 1980 - 1981.
- *Wadantim, Intel Task Force Bais Leuser-04, NAD, 2009-2010;*
- *Wadantim, Intel Bais TNI / White Elephant Task Force, NAD, 2000 - 2001;*
- *Member, Task Force Team Keris Tim, East Timor, 1984 - 1985;*
- *Member, Task Force Team Pasmal-11 Team, East Timor, 1980 - 1981.*

Sertifikasi *Certification*

Sutrisno tidak pernah mengikuti pelatihan di sepanjang tahun 2019, dan tidak memiliki sertifikasi yang berlaku per 31 Desember 2019

Sutrisno did not participate in any training in 2019 and did not have any active certification as of December 31, 2019

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Qualifications to Become a Member of the Risk & Security Monitoring Committee

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Perseroan memiliki Piagam yang digunakan sebagai acuan dan pedoman kerja yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2015 tanggal 30 November 2015.

Piagam Komite Pemantau Risiko & Sekuriti antara lain berisi:

- Struktur Komite Pemantau Risiko & Sekuriti.
- Pembentukan dan pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti.
- Persyaratan dan masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti.
- Fungsi, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko & Sekuriti.
- Lingkup pekerjaan.
- Kode etik dan mekanisme rapat.

In carrying out its duties and authorities to ensure the effectiveness of the implementation of risk management, the Corporation's Risk Monitoring & Security Committee has a Charter used as a reference and work guideline established through the Decision of the Board of Commissioners No. 001 of 2015 on November 30, 2015.

The Risk & Security Monitoring Committee Charter includes:

- *Risk & Security Monitoring Committee Structure.*
- *Formation and appointment of members of the Risk & Security Monitoring Committee.*
- *Requirements and tenure of members of the Risk & Security Monitoring Committee.*
- *The functions, duties, authorities and responsibilities of the Risk & Security Monitoring Committee.*
- *Scope of work.*
- *Code of ethics and meeting mechanism.*

Independensi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

The Risk & Security Monitoring Committee Independence

Agar dapat bertindak independen, anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Perseroan diwajibkan memenuhi kriteria independensi berikut:

1. Bukan pegawai Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
2. Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti yang berasal dari Dewan Komisaris.
3. Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan usaha Perseroan termasuk di dalamnya tidak menerima kompensasi dari Perseroan dan entitas anak selain imbalan jasa yang diterima berkaitan dengan tugas-tugas sebagai anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti.
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan.

In order to act independently, Members of the Corporation's Risk Monitoring & Security Committee are required to meet the following independence criteria:

1. *Not an employee of a Public Accounting Firm, Legal Consultant Office, or other Parties that provide audit services, non-audit services and/or other consulting services for the Corporation in the past 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners.*
2. *Not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Corporation within the past 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners, except members of the Risk Monitoring & Security Committee who come from the Board of Commissioners.*
3. *Does not have a business relationship, either directly or indirectly related to the Corporation's business including not receiving compensation from the Corporation and its subsidiaries in addition to compensation for services received relating to duties as a Member of the Risk & Security Monitoring Committee.*
4. *Does not have familial relations by marriage or blood to the second degree, both horizontally and vertically with the Board of Commissioners, Directors, or Major/Controlling Shareholders of the Corporation.*

Transparansi independensi Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti terlihat dalam tabel berikut:

The independence of the Risk and Security Monitoring Committee's independence is described in the following table:

| | Ivan Malik | Singgih Budihartono | Sutrisno |
|---|------------|---------------------|----------|
| Merupakan orang yang memberikan jasa audit, non-audit, atau jasa konsultan lainnya kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir <i>A person who provides audit services, non-audit services, or other consulting services for the Corporation within the past 6 (six) months</i> | x | x | x |
| Merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir <i>A person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Corporation's activities within the past 6 (six) months</i> | x | x | x |
| Memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Perseroan <i>Has a business relationship, both directly and indirectly related to the Corporation's business</i> | x | x | x |
| Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama/Pengendali <i>Have family relations with the Board of Commissioners, Directors, or Major / Controlling Shareholders</i> | x | x | x |

Tabel 6.74. Independensi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Table 6.74. Independence of The Risk & Security Monitoring Committee

Fungsi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Functions, Duties, Responsibilities and Authority of the Risk & Security Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko & Sekuriti berfungsi sebagai kepanjangan tangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan supervisi/pengawasan. Dalam hubungan kerja, Komite Pemantau Risiko & Sekuriti mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.

The Risk & Security Monitoring Committee functions as an extension of the Board of Commissioners in carrying out supervisory duties. In terms of working relations, the Risk Monitoring & Security Committee has a direct and responsible work relationship with the Commissioners and an indirect employment relationship with the Risk Management Committee and the Risk Management Division.

Komite Pemantau Risiko & Sekuriti bertugas:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penyempurnaan sistem Manajemen Risiko Perseroan serta pelaksanaannya
3. Menyampaikan laporan evaluasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perseroan (RKAP) tahun berjalan
4. Menyampaikan laporan evaluasi atas usulan RJPP dan RKAP yang diajukan oleh Direksi sesuai jadwal yang ditentukan oleh Dewan Komisaris
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan RJPP dan RKAP
6. Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas kebijakan yang telah diambil oleh Direksi berkaitan dengan manajemen risiko

The Risk & Security Monitoring Committee is tasked with:

1. Assisting the Board of Commissioners in ensuring the effectiveness of risk management and the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Division
2. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the improvements of the Corporation's Risk Management system and its implementation
3. Submitting evaluation reports to the Board of Commissioners related to the implementation of the Corporation's Long-Term Plan (RJPP) and the Corporation's Annual Business Plan and Budget (RKAP)
4. Submitting evaluation reports on RJPP and RKAP proposals submitted by the Directors according to the schedule determined by the Board of Commissioners
5. Providing recommendations to the Board of Commissioners in granting RJPP and RKAP approvals
6. Delivering recommendations to the Board of Commissioners regarding the policies that have been administered by the Directors regarding risk management

- | | |
|---|---|
| <p>7. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan risiko kepada Dewan Komisaris tentang kegiatan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar</p> <p>8. Melakukan penilaian atas situasi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan proyek MRT Jakarta agar Dewan Komisaris dapat melaporkan kepada Pemegang Saham</p> <p>9. Melakukan evaluasi atas rekomendasi perihal komunikasi risiko dilaksanakan, pembinaan budaya sadar Risiko diselenggarakan, penciptaan situasi yang kondusif untuk penerapan manajemen risiko diciptakan dan pembentukan <i>tone at the top</i> terlaksana</p> <p>10. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite (Piagam) dan melakukan review sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali</p> <p>11. Memberikan persetujuan atas risiko kritis sebelum ditetapkannya tahun anggaran yang baru</p> <p>12. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Komisaris mengenai keseluruhan Selera Risiko, Toleransi Risiko, dan strategi Perseroan serta melakukan pengawasan implementasi strategi Perseroan</p> <p>13. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu</p> | <p>7. <i>Providing recommendations and considerations of risk to the Board of Commissioners regarding activities that require the Board of Commissioners' approval in accordance with those required in the Articles of Association</i></p> <p>8. <i>Conducting assessments of situations projected to potentially threaten the continuity of the MRT Jakarta Project so that the Board of Commissioners can report to the Shareholders</i></p> <p>9. <i>Evaluating recommendations on risk communication that is to be carried out, fostering a culture of risk awareness, and creating a conducive situation for risk management implementation and ensuring that the establishment of "Tone at the Top" will be done.</i></p> <p>10. <i>Developing guidelines and work rules for the Committee (Charter) and reviewing them as needed, at least once every 3 (three) years</i></p> <p>11. <i>Granting approval for critical risks before the new fiscal year</i></p> <p>12. <i>Providing consideration and advice to the Board of Commissioners regarding the overall Risk Appetite, Risk Tolerance and Corporate strategy and overseeing the implementation of the Corporate strategy</i></p> <p>13. <i>Carrying out other duties and responsibilities tasked by the Board of Commissioners from time to time</i></p> |
|---|---|

Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko & Sekuriti adalah:

1. Komite Pemantau Risiko & Sekuriti bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris
2. Pertanggungjawaban Komite Pemantau Risiko & Sekuriti kepada Dewan Komisaris disampaikan dalam laporan sebagai berikut:
 - Laporan Profil Risiko Triwulanan
 - Laporan Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko
 - Laporan Evaluasi Pelaksanaan RJPP dan RKAP
 - Laporan tahunan pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
 - Laporan untuk setiap pelaksanaan tugas khusus Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
3. Laporan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti ditandatangani oleh Ketua
4. Komite Pemantau Risiko & Sekuriti bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan

Komite Pemantau Risiko & Sekuriti memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko & Sekuriti berwenang untuk mendapatkan informasi secara penuh tentang informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya melalui Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance*
2. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, Komite Pemantau Risiko & Sekuriti wajib bekerja sama dengan Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* dengan melalui prosedur yang telah ditetapkan

The responsibilities of the Risk & Security Monitoring Committee are:

1. *The Risk Monitoring & Security Committee reports to the Board of Commissioners.*
2. *The accountability of the Risk & Security Monitoring Committee to the Board of Commissioners is stated in the following reports:*
 - *Quarterly Risk Profile Reports*
 - *Evaluation Report on the Implementation of Risk Management*
 - *Evaluation Report on the Implementation of RJPP and RKAP*
 - *Annual report on the implementation of the duties of the Risk & Security Monitoring Committee*
 - *Report on each implementation of the special duties of the Risk & Security Monitoring Committee*
3. *The Risk & Security Monitoring Committee report is signed by the Chairperson*
4. *The Risk Monitoring & Security Committee is responsible for maintaining the confidentiality of Corporate documents, data and information*

The Risk & Security Monitoring Committee has the following authority:

1. *The Risk & Security Monitoring Committee has the authority to obtain full information on Corporate information related to the implementation of its tasks through the Risk Management & QSSHE Assurance Division*
2. *In carrying out the authority as mentioned in the previous point, the Risk & Security Monitoring Committee must cooperate with the Risk Management & QSSHE Assurance Division and follow the established procedures*

Kriteria dan Independensi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Criteria and Independence of the Risk & Security Monitoring Committee

Perseroan telah menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti. Adapun persyaratannya antara lain:

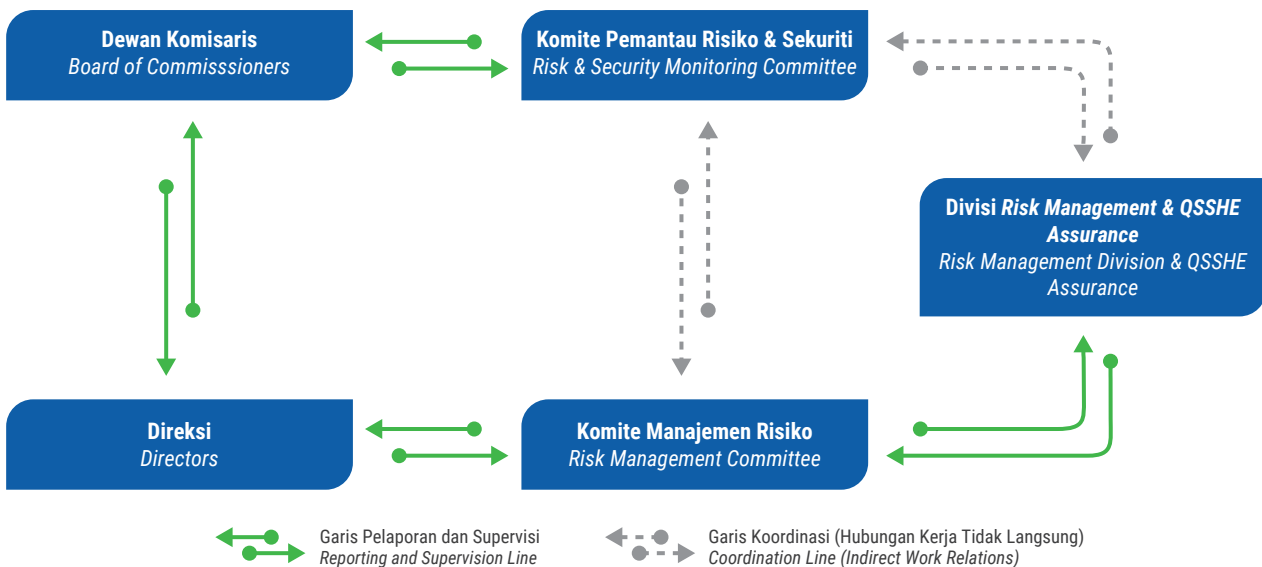
1. Bukan merupakan mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Kementerian dan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan proyek MRT Jakarta yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen dalam keanggotaan Komite sebelum menjalani masa tunggu selama 6 (enam) bulan
2. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan anak perusahaan;
3. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris; dan
4. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Perseroan.

The Corporation has determined several requirements that must be met in order to become members of the Risk & Security Monitoring Committee. The requirements include:

1. Not a former member of the Directors or Executive Officer of the DKI Jakarta Provincial Government or the Ministry and parties related to MRT Jakarta project that can influence its ability to act independently, cannot become an independent party in the Committee's membership before undergoing a waiting period of 6 (six) months;
2. Has no business relations, directly or indirectly, that are related to the business activities of the Corporation and its Subsidiaries;
3. Is not a person who has the authority and responsibility to plan, lead or control the Corporation within the past 6 (six) months before being appointed by the Commissioners; and
4. Has no family relations by marriage or blood to the second degree, both horizontally and vertically with the Commissioners, Directors or Shareholders of the Corporation.

HUBUNGAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO & SEKURITI

Work Relationships of the Risk Monitoring & Security Committee



Figur 6.12
Figur 6.12

Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dalam Keanggotaan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Distribution of Duties and Responsibilities in Members of the Risk Monitoring & Security Committee

Lingkup tugas masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti adalah sebagai berikut:

The scopes of duties of each Member of the Risk Monitoring & Security Committee are as follows:

ZULFIKRI

Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti/Komisaris
Chairperson of the Risk Monitoring & Security Committee / Commissioner

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Menyampaikan laporan bulanan dan triwulanan kepada Komisaris Utama2. Memberikan saran terkait pengelolaan risiko dan sekuriti kepada Komisaris Utama3. Bertanggung jawab atas program kerja tahunan kepada Komisaris Utama | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Submitting monthly and quarterly reports to the President Commissioner</i>2. <i>Providing advice related to risk management and security to the President Commissioner</i>3. <i>Responsible for the annual work program to the President Commissioner</i> |
|---|---|

Ivan Malik

Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Member of the Risk Monitoring & Security Committee

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Program Kerja Tahunan2. Menyampaikan saran terkait pengelolaan risiko kepada Unit Kerja Manajemen Risiko dan melaporkan kepada Ketua Komite3. Berkoordinasi dengan Unit Kerja RM dan Sekdekom dalam rapat bulanan | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Developing an Annual Work Program</i>2. <i>Delivering advice related to risk management to the Risk Management Unit and reporting to the Chair of the Committee</i>3. <i>Coordinating with RM and Sekdekom work units in monthly meetings</i> |
|---|---|

Singgih Budihartono

Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Member of the Risk Monitoring & Security Committee

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Program Kerja Tahunan2. Menyampaikan saran terkait pengelolaan risiko kepada Unit Kerja Manajemen Risiko dan melaporkan kepada Ketua Komite3. Berkoordinasi dengan Unit Kerja RM dan Sekdekom dalam rapat bulanan | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Developing an Annual Work Program</i>2. <i>Delivering advice related to risk management to the Risk Management Unit and reporting to the Chair of the Committee</i>3. <i>Coordinating with RM and Sekdekom work units in monthly meetings</i> |
|---|---|

Sutrisno

Anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Member of the Risk Monitoring & Security Committee

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun Program Kerja Tahunan2. Menyampaikan saran terkait pengelolaan keamanan kepada Unit Sekuriti dan melaporkan kepada Ketua Komite3. Berkoordinasi dengan Unit Kerja Sekuriti dan Sekdekom dalam rapat bulanan | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Developing an Annual Work Program</i>2. <i>Delivering advice related to security management to the Security Unit and reporting to the Chair of the Committee</i>3. <i>Coordinating with the security work unit and Sekdekom in monthly meetings</i> |
|---|---|

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Competency Development of the Risk & Security Monitoring Committees

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko & Sekuriti.

The Corporation facilitates the implementation of development programs for the Risk & Security Monitoring Committee in order to improve the competencies of members of the Risk & Security Monitoring Committee. The programs are expected to have a positive impact on the productivity and effectiveness of the Risk & Security Monitoring Committee.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko & Sekuriti di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Information concerning the competency improvement activities that Members of the Risk Monitoring & Security Committee participated in throughout 2019 can be accessed in the Company Profile chapter of this annual report.

Rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti

Risk & Security Monitoring Committee Meeting

Ketentuan atau mekanisme rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti telah diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko & Sekuriti. Rapat Komite dilakukan 10 (sepuluh) kali dalam setahun dan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun melalui media elektronik atau kombinasi antara keduanya. Jadwal dan agenda serta program kerja harus dibuat dalam program tahunan yang ditetapkan pada akhir tahun sebelumnya. Kuorum rapat sekurang-kurangnya dihadiri 51% dari jumlah anggota termasuk Ketua Komite dan seorang pihak independen.

The provisions or mechanism of the Risk & Security Monitoring Committee meetings are regulated in the Risk & Security Monitoring Committee Charter. Committee meetings are conducted 10 (ten) times a year and at least 1 (one) time in 3 (three) months. Meetings can be held either by physical presence or through electronic media or a combination of the two. Schedules and agendas and work programs must be made in the annual program determined at the end of the previous year. The meeting quorum is attended by at least 51% of the members including the Chair of the Committee and an independent party.

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat oleh Sekretaris Komite, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, serta diketahui dan ditandatangani oleh anggota Komite yang tidak hadir. Perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.

Decisions of Committee Meetings are based on deliberations to reach a consensus. In the events where deliberations to reach a consensus are unsuccessful, the decision is made based on the majority votes. The results of the Committee Meetings must be stated in the minutes of meeting prepared by the Committee Secretary, and signed by all members of the Committee who are present, and known and signed by members of the Committee who are not present. Dissenting opinions during the decision-making process at meetings must be clearly stated in the minutes of meeting along with the reasons for the dissenting opinions.

Laporan ringkasan risalah rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti telah memenuhi ketentuan prosedur, pengadministrasian hukum serta menggambarkan situasi dan kronologis rapat termasuk perbedaan pendapat atau pendelegasian pimpinan rapat jika Pimpinan Rapat berhalangan hadir dalam rapat.

A summary report of the minutes of meetings of the Risk Monitoring & Security Committee has fulfilled the provisions of procedures, the administration of the law and describes the situations and chronologies of the meetings including dissenting opinions or delegation of the role of chairperson if the Chairperson of the Meeting is unable to attend the meeting.

Di tahun 2019, Komite Pemantau Risiko & Sekuriti melakukan sembilan (9) kali rapat, dengan risalah dan rekapitulasi kehadiran sebagai berikut:

In 2019, the Risk & Security Monitoring Committee conducted nine (9) meetings, with the minutes and recapitulation of attendance as follows:

REKAPITULASI KEHADIRAN KOMITE PEMANTAU RISIKO & SEKURITI PADA RAPAT

Attendance Recapitulation of the Risk Monitoring & Security Committee at Meetings

| Komite Pemantau Risiko & Sekuriti <i>Risk Monitoring & Security Committee</i> | Jumlah Wajib Rapat <i>Number of Mandatory Meeting</i> | Jumlah Kehadiran <i>Meeting(s) Attended</i> | Tidak Hadir <i>Absent</i> | % Kehadiran <i>% Attendance</i> |
|--|--|--|------------------------------|------------------------------------|
| Zulfikri (Ketua Chairman) | 7 | 7 | 0 | 100,00 |
| Ivan Malik (Anggota Member) | 9 | 5 | 4 | 55,56 |
| Singgih Budihartono (Anggota Member) | 9 | 9 | 0 | 100,00 |
| Sutrisno (Anggota Member) | 6 | 5 | 1 | 83,33 |
| Rata-rata <i>Average</i> | | | | 84,72 |

Tabel 6.75
Table 6.75

RISALAH RAPAT DAN KEHADIRAN KOMITE PEMANTAU RISIKO & SEKURITI

Minutes of Meeting and Attendance of the Risk & Security Monitoring Committee

| No. | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|---------------------------------------|--|---|--|
| 1. | 12 April 2019 April 12, 2019 | Ruang Rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Meeting Room | Rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Maret 2019 <i>Risk & Security Monitoring Committee Meeting March 2019</i> | 1. Ivan Malik 2. Singgih Budihartono |
| 2. | 27 Juni 2019 June 27, 2019 | Ruang Rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Meeting Room | Rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti Maret 2019 <i>Risk & Security Monitoring Committee Meeting March 2019</i> | 1. Ivan Malik 2. Singgih Budihartono |
| 3. | 25 Juli 2019 July 25, 2019 | Ruang Rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Meeting Room | 1. Pemutakhiran pekerjaan Divisi <i>Human Capital</i> 2. Penetapan Anggota Komite SDM & Perusahaan yang baru 1. <i>Updates on the work of the Human Capital Division</i> 2. <i>Appointment of new HC & Business Committee Members</i> | 1. Zulfikri 2. Singgih Budihartono |
| 4. | 17 Oktober 2019 October 17, 2019 | Ruang Rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Meeting Room | Mekanisme pertemuan Komite dan persiapan rapat <i>Committee Meeting Mechanism & Meeting Preparation</i> | 1. Zulfikri 2. Singgih Budihartono 3. Sutrisno |
| 5. | 22 Oktober 2019 October 22, 2019 | Ruang Rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Meeting Room | 1. Mekanisme penetapan <i>top 10 risk</i> Perseroan 2. Perkembangan analisis risiko terhadap pengadaan DEG 3. Pemutakhiran pembuatan Piagam Komite Pemantau Risiko & Sekuriti 4. Pemutakhiran pekerjaan Divisi <i>RMQA Assurance</i> 1. <i>Mechanisms for determining the top 10 corporate risks</i> 2. <i>Risk analysis development on DEG procurement</i> 3. <i>Updates on the creation of the risk & security committee charter</i> 4. <i>Updates on the work of the RMQA Assurance Division</i> | 1. Zulfikri 2. Singgih Budihartono |
| 6. | 6 November 2019 November 6, 2019 | Ruang Rapat Stasiun Dukuh Atas BNI MRT Jakarta <i>Meeting Room at the Dukuh Atas BNI Station MRT Jakarta</i> | Rapat internal bulanan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti <i>Monthly internal meeting of the Risk & Security Monitoring Committee</i> | 1. Zulfikri 2. Ivan Malik 3. Singgih Budihartono 4. Sutrisno |
| 7. | 14 November 2019 November 14, 2019 | Ruang Rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Meeting Room | Rapat bulanan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti dengan unit kerja dengan agenda: 1. <i>Top risk</i> Fase 1 dan Fase 2 2. Pengadaan unit X-Ray <i>Monthly meeting of the Risk Monitoring & Security Committee with work units with an agenda of:</i> 1. <i>Top risk phase 1 and phase 2</i> 2. <i>Procurement of X-Ray units</i> | 1. Zulfikri 2. Singgih Budihartono 3. Ivan Malik 4. Sutrisno |
| 8. | 12 Desember 2019 December 12, 2019 | Ruang Rapat Stasiun ASEAN MRT Jakarta <i>Meeting Room at the ASEAN Station MRT Jakarta</i> | Rapat internal Komite Pemantau Risiko & Sekuriti <i>Internal meeting of the Risk & Security Monitoring Committee</i> | 1. Zulfikri 2. Singgih Budihartono 3. Ivan Malik 4. Sutrisno |

| No. | Tanggal Date | Tempat Place | Agenda Rapat Meeting Agenda | Peserta Rapat Participant |
|-----|---------------------------------------|---|--|---|
| 9. | 23 Desember 2019 December 23, 2019 | Ruang Rapat PT MRT Jakarta (Perseroda) PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Meeting Room | Rapat Komite Pemantau Risiko & Sekuriti dengan Divisi Meeting of the Risk Monitoring & Security Committee with the divisions | 1. Zulfikri 2. Singgih Budihartono 3. Sutrisno |

Tabel 6.76
Table 6.76

Kebijakan Remunerasi

Remuneration Policy

Perseroan memiliki kebijakan terkait remunerasi bagi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti. Persetujuan pemberian remunerasi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti ditetapkan berdasarkan persetujuan pemberian remunerasi Komite Pemantau Risiko & Sekuriti yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direksi No.098/BOD-MRT/XI/2017 tanggal 30 November 2017.

The Corporation has a policy related to remuneration for the Risk & Security Monitoring Committee. The approval for the remuneration of the Risk Monitoring & Security Committee is determined based on the approval for the remuneration of the Risk & Security Monitoring Committee which is determined by the Decree of the Directors No.098 / BOD-MRT / XI / 2017 dated November 30, 2017.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti pada Tahun 2019

Brief Report on the Task and Activity Implementations of the Risk Management & Security Committee In 2019

Di sepanjang tahun 2019, Komite Pemantau Risiko & Sekuriti telah melaksanakan berbagai kegiatan maupun rapat-rapat pembahasan dengan Manajemen, Kepala Unit Kerja terkait, serta Komite-komite Dewan Komisaris lainnya, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

In 2019, the Risk Management & Security Committee conducted various discussions and meetings with the management, heads of related work units, and other committees under the Board of Commissioners, which resulted in the following:

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|--|---|
| 1. Membahas risiko terkait kesiapan operasi | 1. Discussed risks related to operational readiness |
| 2. Komite Pemantau Risiko & Sekuriti akan menyampaikan pada ke Komisaris mengenai usulan perpanjangan Rekomtek | 2. The Risk & Securities Monitoring Committee will inform the Commissioner about the proposed extension of the Rekomtek |
| 3. MRT Jakarta akan mengalami <i>negative net income</i> karena menanggung beban penyusutan semua bangunan sipil yang tidak masuk dalam subsidi | 3. MRT Jakarta will experience <i>negative net income</i> because it bears the burden of depreciation of all civil buildings that are not included in the subsidy |
| 4. KPR mengusulkan untuk berkonsultasi dengan Komite Audit dari IAI terkait perlakuan akuntansi untuk pencatatan depresiasi pada laporan keuangan | 4. KPR proposed to consult with the Audit Committee of IAI related to accounting treatment for recording the depreciation in the financial statements |
| 5. MRT Jakarta mengaplikasikan <i>Framework Business Continuity Management</i> sebagai antisipasi kerawanan pilpres dan pileg 17 | 5. MRT Jakarta applies the <i>Business Continuity Management Framework</i> in anticipation of the presidential and legislative election vulnerabilities 17 |
| 6. Apabila ancaman terjadi, MRT Jakarta akan mengaktifkan <i>Emergency Response Team (ERT)</i> bahkan sampai <i>Crisis Management Team (CMT)</i> apabila kejadian merupakan kondisi krisis | 6. If a threat occurs, MRT Jakarta will activate the <i>Emergency Response Team (ERT)</i> and even the <i>Crisis Management Team (CMT)</i> if the event is a critical condition |

Tabel 6.77
Table 6.77

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Arahan Komisaris rapat bulanan tiap Komite akan diadakan minimal 2 kali dalam sebulan. Rapat minggu pertama dalam bulan berjalan untuk internal anggota Komite saja dengan agenda tindak lanjut rapat Dewan Komisaris dan Direksi pada bulan sebelumnya. Rapat minggu ketiga dalam bulan berjalan adalah antar anggota Komite dengan minimal Divisi Risk Quality SHE Assurance, dengan agenda utama membahas 10 risiko bulan berjalan 2. Pada 22 Oktober 2019 akan dilakukan inspeksi terowongan bawah tanah atas laporan rembesan air di media sosial 3. Arahan Bapak Zulfikri selaku Ketua Komite Pemantau Risiko & Sekuriti terkait pembelian Diesel Engine Generator untuk traksi kereta perlu dilakukan kajian komprehensif perbandingan antara nilai investasi yang akan dikeluarkan dengan probabilitas terjadi kembali kejadian kereta berhenti di tengah terowongan 4. Secara garis besar proses pembahasan RKAP 2020 lebih baik dari tahun sebelumnya dengan alur penurunan program dari Divisi Corporate Strategy lebih jelas dan panduan pembuatan proposal kegiatan (KAK) dan rincian biaya dari Divisi Finance & Accounting juga lebih jelas dan detail | <ol style="list-style-type: none"> 1. The Board of Commissioners gave the direction that every Committee should hold at least 2 (two) meetings per month. The first week's meeting of the current month is for internal Committee members only with the agenda of following up the BOC & BOD Meetings of the previous month. The third week's meeting of the current month is between Committee members with at least the Risk Quality SHE Assurance Division, with the main agenda of discussing the 10 (ten) risks of the current month. 2. On October 22, 2019 an underground tunnel inspection will be conducted based on a water seepage report on social media 3. There was a direction from Mr. Zulkifri as Chairperson of the Risk & Security Monitoring Committee regarding the purchase of Diesel Engine Generators for traction trains, that there needed to be a comprehensive study of the value of the investment to be issued and the probability of recurrences of a train stopping in the middle of the tunnel. 4. In general, the discussion process for the 2020 RKAP was better than the previous year with a clearer flow of programs from the Corporate Strategy Division and guidelines for making activity proposals (KAK) and the cost details from the Finance & Accounting Division are also clearer and more detailed. |
|---|--|

Tabel 6.78
Table 6.78

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan DEG traksi kereta dibatalkan, perbaikan berfokus kepada perbaikan jalur evakuasi, khususnya landasan track dibuat mulus sehingga mudah dilewati penumpang yang dievakuasi 2. Pastikan PLTD Senayan mencukupi sumber energi fase 2A dan fase 2B, dan kalau tidak cukup dari mana sumber energi ketiganya 3. Top risk Perseroan mulai dibedakan antara top risk Fase 1 (risiko operasi) dan top risk Fase 2 (risiko pengadaan dan konstruksi Fase 2) 4. MRT sebagai Objek Vital Nasional dan harus menjadi bahan pertimbangan dan direspons seberapa tinggi risiko benda-benda ilegal dibawa ke stasiun, ancaman apa yang mungkin muncul dan apakah investasi terhadap X-Ray ini sebanding dan dapat menjadi salah satu solusi 5. Hasil kajian terhadap risiko agar segera dikomunikasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris ke unit-unit kerja terkait untuk disiapkan analisis dan paparan dari tindak lanjutnya 6. Tolok ukur dan indikator security dan safety juga harus ditetapkan Perseroan dan dilaporkan berkala pada Dewan Komisaris dan Direksi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Procurement of DEG traction is canceled, repairs focus on the improvements of evacuation routes, the track base in particular needs to be made smoother so that it will be easily passed through by evacuating passengers 2. Ensure that the Senayan PLTD is able to provide sufficient energy sources for phase 2A and phase 2B, and if it is not sufficient, determine the third energy resource 3. The Corporation's top risks start to be distinguished between the phase 1 top risk (operating risk) and the phase 2 top risk (procurement and construction risk phase 2) 4. MRT is a Vital National Object and it must be taken into consideration and responded how high the risks of illegal objects being taken to the stations are, what threats may arise and whether the investment in X-Ray machines is justified and can be a solution. 5. The results of the risk assessments should be immediately communicated by the Board of Commissioners' secretary to the relevant work units to prepare for their follow-up analysis and presentation. 6. Security and safety benchmarks and indicators must also be determined by the Corporation and reported periodically to the BOC |
|--|--|

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|--|--|
| <p>7. Risiko keterlambatan penyelesaian konstruksi yang harus dikawal oleh Unit Kerja Risk mengingat tenggat penyelesaian 57 bulan dengan tantangan yang berat</p> <p>8. <i>Top risk</i> tiap fase akan dikomunikasikan secara detail di Komite Pemantau Risiko & Sekuriti, sedangkan untuk di level Dewan Komisaris dan Direksi agar dibawa <i>top risk</i> yang sudah disepakati bersama untuk dijelaskan secara umum ke Dewan Komisaris dan Direksi</p> <p>9. Siklus rapat Komite dengan Divisi Risk diatur agar pada pertemuan bulanan dimutakhirkan dengan registrasi risiko yang baru</p> <p>10. Perbaikan kantor polisi terowongan Kendal sehingga lebih terlihat dan menimbulkan <i>deterrence effect</i> bagi orang-orang yang melewati area dan punya niat tidak baik</p> <p>11. Lokasi penempatan X-Ray dapat dianalisis dampaknya dalam hal keamanan dan arus penumpang bulanan dimutakhirkan dengan registrasi risiko yang baru</p> | <p>and BOD</p> <p>7. <i>The risk of delays in the completion of construction that must be overseen by the risk work unit, considering the 57 months completion timeline is very challenging</i></p> <p>8. <i>The top risk for each phase will be communicated in details to the Risk & Security Monitoring Committee, while the BOC & BOD level will be presented with general explanations regarding the agreed top risk</i></p> <p>9. <i>The cycle of the committee meeting with the Risk Division is arranged so that each monthly meeting is updated with a new risk register</i></p> <p>10. <i>Repair the Kendal Tunnel Police Station to make it more visible and bring a deterrence effect for people who pass through the area with bad intentions.</i></p> <p>11. <i>The locations of the placements of X-Ray machines can be analyzed to</i></p> |
|--|--|

Tabel 6.79
Table 6.79

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|--|--|
| <p>1. Risiko harus dimitigasi dengan cepat dan jangan dibiarkan <i>top risk</i> yang sama selalu muncul dari bulan ke bulan. Untuk aspek pengoperasian kereta, aspek keamanan adalah prioritas, baru setelah itu aspek kenyamanan dan lain-lain.</p> <p>2. Sinergi antara Komite Audit sebagai lini ketiga pertahanan dengan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti sebagai lini kedua, sehingga Rencana Audit Tahunan harus <i>inline</i> dengan <i>top risk</i></p> <p>3. <i>Template</i> registrasi risiko dilengkapi dengan kapan risiko tersebut mulai muncul sehingga dapat dilihat waktu penyelesaiannya, kemudian dilengkapi juga dengan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap mitigasi risiko</p> <p>4. Atas risiko keterlambatan relokasi Fase 2, agar bersurat ke Gubernur untuk mewajibkan ke perusahaan-perusahaan memetakan utilitas yang berada di wilayah DKI Jakarta</p> <p>5. Untuk pengadaan Fase 3, Perseroan diminta untuk melakukan analisis apakah masih menggunakan <i>tight loan</i> atau <i>commercial loan</i>, dan sumber pendanaan apakah masih dengan Pemerintah Jepang atau bisa dengan negara lain</p> <p>6. Rencana Pengadaan X-Ray dengan hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X-Ray akan digunakan sepanjang tahun dan akan dipasang di seluruh stasiun • X-Ray akan dipasang di area <i>concourse</i>, tidak lagi di area <i>entrance</i> | <p>1. <i>Risks must be mitigated quickly and never allow the same top risks to appear for months. For the train operational aspect, safety is the priority, followed by comfort and other aspects.</i></p> <p>2. <i>Reach synergy between the Audit Committee as the third line of defense and the Risk Monitoring Committee as the second line, so the Annual Audit Plan must be in line with the Top Risk</i></p> <p>3. <i>The template risk register is equipped with when the risk starts to appear so the mitigation time can be monitored, it is also equipped with the work units responsible for risk mitigation</i></p> <p>4. <i>Regarding the Phase 2 relocation delay risks, to send a letter to the Governor to make it mandatory for companies to map out their utilities that are located within the DKI Jakarta area</i></p> <p>5. <i>For phase 3 procurement, the Corporation is asked to conduct an analysis if they should continue using tight loans or commercial loans, and if the funding source will still be the Japanese Government or if there are other options.</i></p> <p>6. <i>X-Ray Machines Procurement Plan with the following results:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>X-Ray machines will be used throughout the year and will be installed in all stations</i> • <i>X-Ray machines will be installed in the concourse area, no longer in</i> |
|--|--|

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mesin X-Ray dan petugas keamanan yang mengoperasikannya akan disewa oleh Perseroan, tidak dibeli • Biaya sewa jasa X-Ray dan petugasnya sudah dianggarkan untuk RKAP 2020 • Penggunaan mesin X-Ray akan mengurangi penggunaan Security Officer di stasiun berakibat efisiensi biaya sebesar 15 miliar • dibandingkan penggunaan security officer secara manual • Sebagai bahan edukasi, pada area entrance perlu dipasang • peringatan larangan membawa benda/senjata tajam • Agar Komite Pemantau Risiko & Sekuriti diberikan akses view only terhadap aplikasi risk register agar dapat melakukan monitoring | <p>the entrance area</p> <ul style="list-style-type: none"> • The X-Ray machines and the security officers who operate it will be leased by the Company, not purchased • The X-Ray service rental budget and officers have been budgeted for the 2020 RKAP • The use of X-Ray machines will reduce the use of Security Officers at the station resulting in a cost efficiency of 15 billion compared to the manual use of security officers • As an educational material, at the entrance area it is necessary to install a warning containing prohibitions of carrying sharp object and weapons • The Risk & Security Monitoring Committee to be given view-only access to the risk register application for monitoring purposes |
|--|--|

Tabel 6.80
Table 6.80

Hasil Rapat Meeting Results

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat O&M perlu memetakan gangguan yang berulang, di luar isu On Time Performance (OTP) perjalanan kereta. Gangguan operasi dan pemeliharaan yang terjadi agar dibuat klasifikasinya 2. Secara prinsip subsidi dilakukan untuk menutup celah cashflow antara tarif komersial yang diberikan pada penumpang dengan tarif riil operasional. Pendapatan yang didapat dari bisnis non-tiket seharusnya mengurangi nilai PSO karena ia membantu menalangi tarif riil operasional 3. Tugas berat yang harus disiapkan oleh Perseroan adalah menjaga agar PKS antara Perseroan dengan KAI tercapai pada Maret 2020 4. Pembukaan jalur penyeberangan di bawah jembatan rel dan dekat dengan area transisi dinilai tidak aman. Disarankan agar ditutup saja dengan pertimbangan keselamatan penyeberangan dan mengurangi resources penjagaan oleh petugas keamanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. The O&M Directorate needs to map out recurring disturbances, beyond the issue of train travel On Time Performance (OTP). Make classifications of operation and maintenance disruptions that occur in order to be classified. 2. In principle, the subsidy is carried out to close the cash flow gap between commercial rates given to passengers and the real operational tariffs. The income earned from the non-Farebox business should reduce the value of the PSO because it helps cover the real operational tariffs 3. The heavy duty that must be prepared by the MRT is ensuring that the contract agreement between the MRT and KAI will be reached by March 2020 4. Opening the crossings under the railroad bridge and close to the transition area is considered unsafe. It is recommended to close it with crossing safety considerations and reduce guarding resources by security officers. |
|--|--|

Tabel 6.81
Table 6.81

Penilaian Kinerja oleh Dewan Komisaris

Performance Appraisal by the Board of Commissioners

Evaluasi kehadiran pada rapat rutin Komite Pemantau Risiko & Sekuriti: *Attendance evaluation at regular Risk & Security Monitoring Committee meetings:*

| No. | Nama Name | Kedudukan Position | Mulai Menjabat sebagai Komite Starting Period | Frekuensi Kehadiran Attendance Frequency | |
|-------------------|---------------------|--|--|---|-----------------------------|
| | | | | Jumlah Hadir Rapat/Wajib Rapat Meeting(s) Attended | % Kehadiran % Attendance |
| 1. | Zulfikri | Ketua/Komisaris Head / Commissioner | 31 Juli 2019 | 7/7 | 100,00 |
| 2. | Singgih Budihartono | Anggota Member | 1 September 2019 | 9/9 | 100,00 |
| 3. | Ivan Malik | Anggota Member | 1 November 2019 | 5/9 | 55,56 |
| 4. | Sutrisno | Anggota Member | 1 September 2019 | 6/5 | 83,33 |
| Rata-Rata Average | | | | | 84,72 |

Tabel 6.82. Evaluasi kehadiran pada rapat rutin Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Table 6.82. Attendance evaluation at regular Risk & Security Monitoring Committee meetings

Evaluasi ketepatan waktu laporan triwulan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti: *Timeliness evaluation of quarterly reports by the Risk Monitoring & Security Committee:*

| No. | Periode Period | Ketepatan Pengumpulan Timely Submission |
|---|------------------------|--|
| 1. | Triwulan I Quarter 1 | ✓ |
| 2. | Triwulan II Quarter 2 | ✓ |
| 3. | Triwulan III Quarter 3 | ✓ |
| 4. | Triwulan IV Quarter 4 | ✓ |
| Total Ketepatan Total Timely Submission | | 100% |

Tabel 6.83. Evaluasi ketepatan waktu laporan triwulan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Table 6.83. Timeliness evaluation of quarterly reports by the Risk Monitoring & Security Committee

Dengan demikian total pencapaian Komite Pemantau Risiko & Sekuriti adalah sebagai berikut: *Thus the total achievements of the Risk & Security Monitoring Committee and Security are as follows:*

| Key Performance Indicator | Bobot | Skor | Bobot x Skor |
|--|-------|--------|--------------|
| Kehadiran Rapat Meeting Attendance | 50% | 84,7% | 42,35% |
| Ketepatan Waktu Laporan Timely Reporting | 50% | 100,0% | 50,00% |
| Total Capaian Total Achievements | | | 92,35% |

Tabel 6.84. Total Pencapaian Komite Pemantau Risiko & Sekuriti
Table 6.84. Total Achievements of the Risk & Security Monitoring Committee and Security

ORGAN PENUNJANG DIREKSI

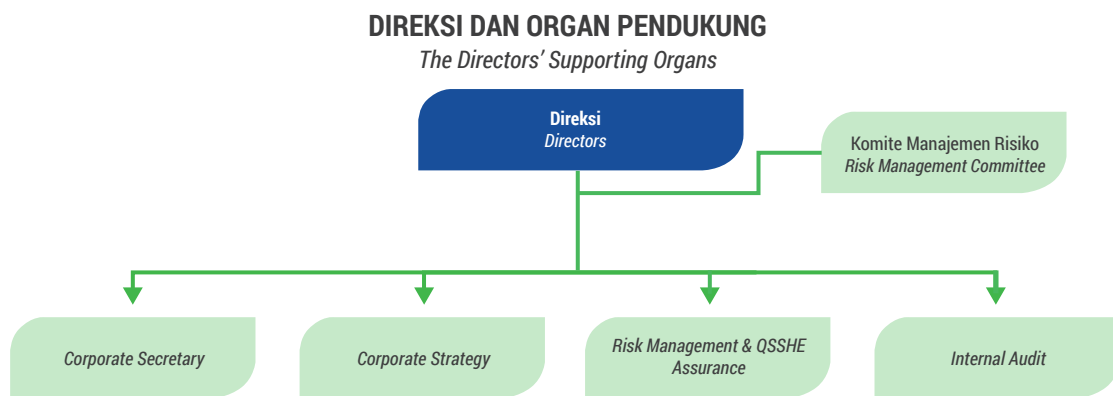
SUPPORTING ORGANS OF THE DIRECTORS



Gambar 6.4
Image 6.4

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan Perseroan, Direksi dibantu oleh beberapa organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan, Corporate Strategy, Internal Audit, Risk Management and QSSHE Assurance, dan Komite Manajemen Risiko.

In carrying out the duties and responsibilities of the management of the Corporation, the Directors are assisted by several supporting organs as explained below, such as the Risk Management Committee, the Corporate Secretary, the Corporate Strategy, the Risk Management and QSSHE Assurance and the Internal Audit.



Figur 6.13
Figure 6.13

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Perseroan membentuk Komite Manajemen Risiko pada tahun 2015, dalam memberikan dukungan bagi Direksi dalam memantau langsung pengelolaan risiko Perseroan yang mencakup risiko proyek konstruksi, risiko pengoperasian dan pemeliharaan MRT Jakarta, risiko pengelolaan bisnis, serta risiko lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan.

The Corporation established the Risk Management Committee to provide support for the Directors in directly monitoring the risk management of the Corporation which includes the risks of construction projects, the risks of operation and maintenance of MRT Jakarta, business management risks, and other risks that can affect the Corporate performance.

Keanggotaan dan Peran Komite Manajemen Risiko

Membership and Role of The Risk Management Committee

Komite Manajemen Risiko adalah komite yang beranggotakan Direktur selain Direktur Utama, Kepala *Divisi Risk Management & QSSHE Assurance*, serta sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Kepala Divisi terkait penanganan risiko Perseroan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi. Komite Manajemen Risiko dapat diketuai oleh salah satu Direktur selain Direktur Utama.

The Risk Management Committee is a committee consisting of Directors other than the President Director, Head of the Risk Management & QSSHE Assurance Division, and at least 1 (one) Head of the Division related to the handling of Corporate risk determined through a Directors Decree. The Risk Management Committee can be chaired by a Director other than the President Director.

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Komite ini berperan untuk memantau independensi Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* sesuai Peraturan Direksi No. 33 Tanggal 27 November 2018.

The Risk Management Committee reports directly to the President Director. This committee has the role of monitoring the independence of Risk Management & QSSHE Assurance Division in accordance with Directors' Regulation No. 33 on November 27, 2018.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 252 tanggal 30 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

The membership structure of the Risk Management Committee, in accordance with Directors Decree No. 252 on August 31, 2019, is as follows:

- Ketua: Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi
- Anggota:
 1. Direktur Konstruksi
 2. Direktur Operasi dan Pemeliharaan
 3. Direktur Pengembangan Bisnis
 4. Kepala Divisi *Corporate Secretary*
 5. Kepala Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance*
 6. Kepala Divisi Internal Audit
 7. Kepala Divisi *Project Management Office*
 8. Kepala Divisi *Engineering*
 9. Kepala Divisi *Railway Operation*
 10. Kepala Divisi *Railway Maintenance*
 11. Kepala Divisi *Operation & Maintenance Facility Service*
 12. Kepala Divisi *Financial & Accounting*
 13. Kepala Divisi *Transit Oriented Development*
 14. Kepala Divisi *Commercial & Retail*
 15. Kepala Divisi *Corporate Strategy*

- *Chairman: Finance & Corporate Management Director*
- *Members:*
 1. *Construction Director*
 2. *Operations & Maintenance Director*
 3. *Business Development Director*
 4. *Corporate Secretary Division Head*
 5. *Risk Management & QSSHE Assurance Division Head*
 6. *Internal Audit Division Head*
 7. *Project Management Office Division Head*
 8. *Engineering Division Head*
 9. *Railway Operation Division Head*
 10. *Railway Maintenance Division Head*
 11. *Operation & Maintenance Facility Service Division Head*
 12. *Financial & Accounting Division Head*
 13. *Transit Oriented Development Division Head*
 14. *Commercial & Retail Division Head*
 15. *Corporate Strategy Division Head*

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE MANAJEMEN RISIKO

DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITY OF THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Fungsi, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang Komite Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

The functions, duties and responsibilities as well as the authority of Risk Management Committee are as follows:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko termasuk penetapan dan persetujuan batas (limit) risiko, penetapan top risiko Perusahaan serta perubahan Kebijakan Manajemen Risiko (apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang dapat memengaruhi kegiatan Perseroan secara signifikan).

1. *Establish risk management policies and strategies including the establishment and approval of risk limits, determination of the Corporate top risks and changes in Risk Management Policies (if there are changes in factors that can significantly affect the Corporate activities).*

- | | |
|---|---|
| <p>2. Memberikan fasilitasi dan konsultasi kepada Direksi, khususnya Direktur Utama, dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan Perseroan yang memiliki eksposur risiko yang signifikan.</p> <p>3. Mengembangkan budaya sadar risiko pada seluruh karyawan Perseroan melalui kegiatan pengembangan kapasitas pengelolaan risiko dan sosialisasi hal-hal yang bersifat strategis yaitu menyampaikan profil, peta, risiko kritis, dan batas toleransi risiko Perseroan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>4. Menyediakan sumber daya yang memadai dan memastikan keselarasan program manajemen risiko dengan strategi Perseroan secara keseluruhan.</p> <p>5. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian risiko serta memberikan arahan berdasarkan laporan profil risiko Perseroan yang disampaikan Departemen Manajemen Risiko untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko dan memantau kinerjanya.</p> <p>6. Diberikan kewenangan untuk mendapatkan dan menghimpun seluruh data dan informasi termasuk penjelasan yang dibutuhkan untuk melakukan analisis risiko.</p> | <p>2. Provide facilitation and consultation to the Directors, especially the President Director in making decisions regarding the Corporate activities that have significant risk exposure.</p> <p>3. Develop a risk awareness culture for all Corporate employees through capacity building activities for risk management and dissemination of strategic matters, namely submitting profiles, maps, critical risks, and the Corporate risk tolerance limits at least once a year.</p> <p>4. Providing adequate resources and ensuring alignment of risk management programs with the overall Corporate strategy.</p> <p>5. Evaluate the implementation of risk control and provide directions based on the Corporate risk profile report submitted by the Risk Management Department to ensure the effectiveness of the implementation of risk management and monitor its performance.</p> <p>6. Authorization to obtain and collect all data and information including explanations needed to conduct a risk analysis.</p> |
|---|---|

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2019

Brief Report on the Implementation of the Risk Management Committee's Duties in 2019

Rapat Komite Manajemen Risiko Januari (7 Februari 2019)

January Risk Management Committee Meeting (February 7, 2019)

Agenda:

1. Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per Januari 2019
2. Pembahasan risiko-risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen

Agenda:

1. Monitoring the Corporate *Top Risk* mitigation progress as of January 2019
2. Discussion of new identified risks that require management's attention

Rapat Komite Manajemen Risiko Februari (28 Februari 2019)

February Risk Management Committee Meeting (February 28, 2019)

Agenda:

1. Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per Februari 2019
2. Pembahasan risiko-risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen

Agenda:

1. Monitoring the Corporate *Top Risk* mitigation progress as of February 2019
2. Discussion of new identified risks that require management's attention

Rapat Komite Manajemen Risiko Maret (4 April 2019)

March Risk Management Committee Meeting (April 4, 2019)

Agenda:

Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per Maret 2019

Agenda:

Monitoring the Corporate *Top Risk* mitigation progress as of March 2019

Rapat Komite Manajemen Risiko April (3 Mei 2019)*April Risk Management Committee Meeting (May 3, 2019)***Agenda:**Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per April 2019**Agenda:***Monitoring the Corporate Top Risk mitigation progress as of April 2019***Rapat Komite Manajemen Risiko Mei (28 Mei 2019)***May Risk Management Committee Meeting (May 28, 2019)***Agenda:**Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per Mei 2019**Agenda:***Monitoring the Corporate Top Risk mitigation progress as of May 2019***Rapat Komite Manajemen Risiko Juni (28 Juni 2019)***June Risk Management Committee Meeting (June 28, 2019)***Agenda:**Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per Juni 2019**Agenda:***Monitoring the Corporate Top Risk mitigation progress as of June 2019***Rapat Komite Manajemen Risiko Juli (31 Juli 2019)***July Risk Management Committee Meeting (July 31, 2019)***Agenda:**

1. Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per Juli 2019
2. Pembahasan risiko-risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen
3. Pengelompokan *Top Risk* menjadi Fase 1 dan Fase 2

Agenda:

1. *Monitoring the Corporate Top Risk mitigation progress as of July 2019*
2. *Discussion of new identified risks that require management's attention*
3. *Grouping Top Risks into Phase 1 and Phase 2*

Rapat Komite Manajemen Risiko Agustus (2 September 2019)*August Risk Management Committee Meeting (September 2, 2019)***Agenda:**

1. Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per Agustus 2019
2. Pembahasan risiko-risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen
3. Pengelompokan *Top Risk* menjadi Fase 1 dan Fase 2

Agenda:

1. *Monitoring the Corporate Top Risk mitigation progress as of August 2019*
2. *Discussion of new identified risks that require management's attention*
3. *Grouping Top Risks into Phase 1 and Phase 2*

Rapat Komite Manajemen Risiko September (30 September 2019)*September Risk Management Committee Meeting (September 30, 2019)***Agenda:**

1. Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per September 2019
2. Penggabungan *Top Risk* Fase 1 dan Fase 2 menjadi satu kesatuan

Agenda:

1. *Monitoring the Corporate's Top Risk mitigation progress as of September 2019*
2. *The merging of Phase 1 and Phase 2 Top Risk into one unit*

Rapat Komite Manajemen Risiko Oktober (28 Oktober 2019)

October Risk Management Committee Meeting (October 28, 2019)

Agenda:

1. Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per Oktober 2019
2. Pembahasan risiko-risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen

Agenda:

1. *Monitoring the Corporate's Top Risk mitigation progress as of October 2019*
2. *Discussion of new identified risks that require management's attention*

Rapat Komite Manajemen Risiko November (22 November 2019)

November Risk Management Committee Meeting (November 22, 2019)

Agenda:

1. Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per November 2019
2. Pembahasan risiko-risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen
3. Penetapan kode warna untuk membedakan risiko Fase 1, risiko Fase 2 dan risiko baru

Agenda:

1. *Monitoring the Corporate's Top Risk mitigation progress as of November 2019*
2. *Discussion of new identified risks that require management's attention*
3. *Designation of color codes to distinguish Phase 1 risk, Phase 2 risk and new risks*

Rapat Komite Manajemen Risiko Desember (31 Desember 2019)

December Risk Management Committee Meeting (December 31, 2019)

Agenda:

1. Pemantauan progres mitigasi *Top Risk* Perseroan per Desember 2019
2. Pembahasan risiko-risiko yang baru yang teridentifikasi yang membutuhkan perhatian dari manajemen
3. Penyampaian hasil *Risk Assessment* Sistem AFC *Upgrading* Fase 1 & Fase 2

Agenda:

1. *Monitoring the Corporate's Top Risk mitigation progress as of December 2019*
2. *Discussion of new identified risks that require management's attention*
3. *Submission of the results of the Phase 1 & Phase 2 AFC Upgrading System Risk Assessment*

Tabel 6.85

Table 6.85

SEKRETARIS PERUSAHAAN

THE CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama.

Salah satu elemen dalam struktur dan proses Tata Kelola Perusahaan adalah pemastian bahwa penggunaan wewenang dan hubungan dengan pemangku kepentingan berjalan dengan baik untuk kepentingan Perseroan. Untuk mendukung fungsi pembentukan citra positif Perseroan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan, manajemen Perseroan didukung oleh Sekretaris Perusahaan. Selain fungsi tersebut, Sekretaris Perusahaan juga bertugas untuk membantu tugas Direksi, yaitu merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman, perencanaan, evaluasi, dan melaksanakan aktivitas hubungan eksternal, pemasaran, tanggung

The Corporate Secretary is an official who is specifically appointed to carry out the functions of the Corporate Secretary and is appointed and dismissed by the President Director based on the Corporation's internal mechanism. The Corporate Secretary is responsible and reports his or her activities directly to the President Director.

One of the elements in the structure and process of Corporate Governance is ensuring that the Corporation's authority (exercise of power) and relations with stakeholders are exercised properly for the interests of the Corporation. To support the function of forming a positive Corporate image through effective communication programs management all stakeholders, the Corporation management is supported by the Corporate Secretary. In addition to the aforementioned function, the Corporate Secretary is also tasked with assisting the Board of Directors in carrying out its duties, namely formulating and arranging policies and guidelines, planning, evaluating and implementing external relations activities, as well as assisting in the

jawab sosial, protokoler, legal, administrasi, dan komunikasi internal Perseroan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan perencanaan yang telah ditetapkan.

areas of marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), protocols, legal, administration and internal Corporate communication in accordance with policies, guidelines and plans that have been established.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

The Party that Appoints and Dismisses the Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal Perseroan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama.

The Corporate Secretary is an official who is specifically appointed to carry out the functions of the Corporate Secretary and is appointed and dismissed by the President Director based on the Corporation's internal mechanism. The Corporate Secretary is responsible and reports his or her activities directly to the President Director.

Profil Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan

Profile of Corporate Secretary Division Head

Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan sesuai dengan Keputusan Direksi SK/001/BOD-MRT/1/2019 yang mengangkat Muhamad Kamaluddin sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Appointment of the Corporate Secretary Executives in accordance with the Decree of the Directors SK / 001 / BOD-MRT / 1 / 2019 appointed Muhamad Kamaluddin as Corporate Secretary Division Head and has been approved by the Board of Commissioners.



MUHAMAD KAMALUDDIN

Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (Menjabat sejak Menjabat sejak 03 Januari 2019)
Head of Corporate Secretary Division (Serving since January 3, 2019)

Kewarganegaraan *Citizenship*

Warga Negara Indonesia

Indonesian

Usia *Age*

45 Tahun

45 Years old

Domisili *Domicile*

DKI Jakarta, Indonesia

DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir *Place and Date of Birth*

Jakarta, 21 April 1974

Jakarta, April 21, 1974

Bergabung di Perseroan *Join the Company*

03 Juli 2017 sebagai Kepala Divisi Corporate Strategy & Planning

July 3, 2017 as Head of Corporate Strategy & Planning Division

Riwayat Pendidikan *Educational History*

- S2 Business Administration, London Business School, 2008;
- S1 Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung, 1997.

- *S2 Business Administration, London Business School, 2008;*
- *S1 Physics Engineering, Bandung Institute of Technology, 1997.*

Riwayat Pekerjaan *History of Employment*

- Kepala Divisi *Corporate Secretary*, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2019 – sekarang;
- Kepala Divisi *Corporate Strategy*, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2017 – 2018;
- *Strategy and Performance Specialist*, RasGas Company Limited, Qatar, 2009 – 2017;
- *Portfolio Projects Manager*, SHELL, 2008 - 2009.
- *Head of Corporate Secretary Division*, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2019 - present;
- *Head of Corporate Strategy Division*, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2017 - 2018;
- *Strategy and Performance Specialist*, RasGas Company Limited, Qatar, 2009 - 2017;
- *Portfolio Projects Manager*, SHELL, 2008 – 2009.

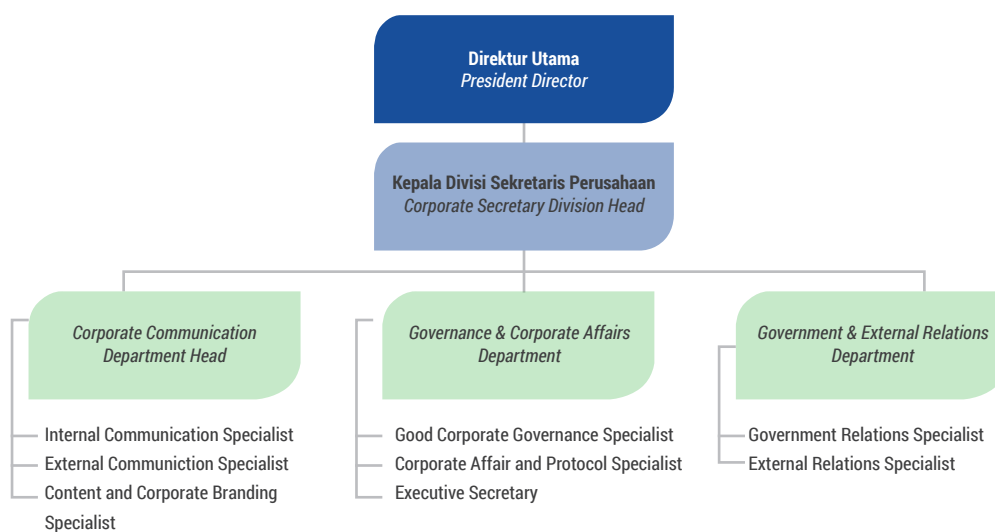
Sertifikasi *Certification*

- Pelatihan Pembahasan Sistem Manajemen Pengukuran Kinerja dengan Korn Ferry;
- Pelatihan *Corporate Communications: Integrated Government Relation Strategy*;
- Pelatihan *Leadership in Urban Regeneration: The Role on BUMD DKI*;
- Pelatihan Kerugian Negara dalam BUMN dan BUMD : Resiko Investasi atau Korupsi?
- Pelatihan *Executive Management Development Program (EMDP) Seri Managing Business - Inspiring Leadership: Becoming High Performing Leader*
- Pelatihan (In House) Sustainability Report.
- *Workshop on the Performance Measurement Management System with Korn Ferry*;
- *Training of Corporate Communications: Integrated Government Relation Strategy*;
- *Training of Leadership in Urban Regeneration: The Role on BUMD DKI*;
- *Workshop “Kerugian Negara dalam BUMN dan BUMD: Resiko Investasi atau Korupsi?”*;
- *Training of Executive Management Development Program (EMDP), Managing Business-Inspiring Leadership Series: Becoming a High-Performing Leader*
- *Workshop (In House) Sustainability Report*.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan
Organizational Structure of the Corporate Secretary

Berikut struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang menggambarkan fungsi-fungsi yang berada di dalamnya.

The following is the organizational structure of the Corporate Secretary that describes the functions within it.



Figur 6.14
Figure 6.14

Struktur organisasi Sekretaris Perusahaan ditetapkan sesuai Keputusan Direksi no. 213 Tahun 2019

Hingga akhir tahun 2019 jumlah karyawan yang tergabung dalam unit Sekretaris Perusahaan sebanyak 19 orang.

The organizational structure of the Corporate Secretary is determined in accordance with Directors Decree No. 213 of 2019

As of the end of 2019, there were 19 employees in the Corporate Secretary unit.

| Jabatan Position | Jumlah Karyawan Number of Employee |
|---|---------------------------------------|
| Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan <i>Head of Corporate Secretary Division</i> | 1 |
| Kepala Departemen <i>Corporate Communication</i> <i>Head of Department Corporate Communication</i> | 1 |
| Kepala Departemen <i>Governance and Corporate Affairs</i> <i>Head of Department Governance and Corporate Affairs</i> | 1 |
| Kepala Departemen <i>Government and External Relation</i> <i>Head of Department Government and External Relation</i> | 1 |
| <i>Internal Communication Specialist</i> | 1 |
| <i>External Communication Specialist</i> | 6 |
| <i>External Communication Staff</i> | 1 |
| <i>Corporate Affair and Protocol Specialist</i> | 3 |
| <i>Executive Secretary</i> | 3 |
| <i>Government Relations Specialist</i> | 1 |
| Jumlah Total | 19 |

Tabel 6.86
Table 6.86

Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan

Functions and Duties of the Corporate Secretary

1. Fungsi Pokok:

- Sebagai pejabat penghubung antara Perseroan dengan organ Perseroan dan Pemangku Kepentingan.
- Menangani kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan pengelolaan masalah kehumasan

2. Tugas Pokok:

- Memberikan laporan secara periodik kepada Direktur Utama.
- Menyusun pusat data dan penyimpanan dokumen asli Perseroan.
- Membangun jaringan kerjasama yang saling menguntungkan

1. Main Functions:

- As a liaison officer between the Corporation and Corporate Organs and Stakeholders.
- Handling activities related to the secretariat, and management of public relations problems (relation officer).

2. Main Tasks:

- Providing periodic reports to the President Director.
- Organizing database and storage of original Corporate documents.
- Building a network of mutually beneficial cooperations with various

- d. Mengomunikasikan kebijakan Perseroan kepada pihak internal dan eksternal.
- e. Menyiapkan laporan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan manajemen dan proyek untuk keperluan selain RUPS.
- g. Mengoordinasikan bahan-bahan laporan untuk Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, RUPS, dan rapat dengan Pemangku Kepentingan lainnya.
- h. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perseroan.
- i. Menyiapkan laporan kegiatan Sekretaris Perusahaan secara benar dan tepat waktu

- d. *Communicating Corporate policies to internal and external parties.*
- e. *Preparing Corporate reports in accordance with the applicable regulations.*
- f. *Coordinating the preparation of management and project reports for purposes other than GMS.*
- g. *Coordinating report materials for Board of Directors' Meetings, Board of Commissioners' Meetings, GMS and other Stakeholders meetings.*
- h. *Carrying out Corporate secretarial activities.*
- i. *Preparing reports on the activities of the Corporate Secretary in a proper and timely manner.*

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Secara umum, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mempersiapkan penyelenggaraan RUPS;
2. Menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi;
3. Mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perseroan meliputi dokumen RUPS, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris, dan dokumen-dokumen Perseroan yang penting lainnya;
4. Mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Komisaris dan keluarganya baik dalam Perseroan maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan;
5. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama secara berkala;
6. Menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perseroan dari setiap unit kerja;
7. Menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada Pemangku Kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
8. Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perseroan yang disampaikan kepada Pemangku Kepentingan, baik dalam situs web atau media informasi lainnya;
9. Menyelenggarakan *database* dan penyimpanan dokumen asli Perseroan;

In general, the Corporate Secretary is given the following duties and responsibilities:

1. *Preparing the execution of the General Meeting of Shareholders;*
2. *Attending the Board of Directors' meetings and joint meetings between the Board of Commissioners and the Directors;*
3. *Managing and storing documents related to Corporate activities, including GMS documents, minutes of Directors' meetings, minutes of joint meetings between the Directors and the Board of Commissioners and other important Corporate documents;*
4. *Recording a special list relating to the Directors and their families and the Commissioners and their families both in the Corporate ionnd itsaffiliates which include share ownership, business relationships and other roles that create conflicts of interest with the interests of the Corporation;*
5. *Periodically reporting the implementation of duties and responsibilities to the President Director;*
6. *Gathering all important information about the Corporation from each work unit;*
7. *Determining criteria regarding the types and content of information that can be submitted to stakeholders, including information that can be submitted as public documents;*
8. *Maintaining and updating information about the Corporation to be communicated to Stakeholders, whether on the Corporate website or other informative media;*
9. *Maintaining a database and storage of original Corporate documents;*

- | | |
|--|--|
| 10. Membangun jaringan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk Pemangku Kepentingan; | <i>10. Building a network of mutually beneficial cooperation with various parties, including Stakeholders;</i> |
| 11. Mengomunikasikan kebijakan Perseroan kepada pihak internal dan eksternal; | <i>11. Communicating Corporate policies to internal and external parties;</i> |
| 12. Menyiapkan laporan Perseroan sesuai ketentuan yang berlaku; | <i>12. Preparing Corporate reports in accordance with the applicable regulations;</i> |
| 13. Mengoordinasikan penyusunan laporan manajemen dan proyek untuk keperluan selain RUPS; | <i>13. Coordinating the preparation of management and project reports for purposes other than GMS;</i> |
| 14. Mengoordinasikan bahan-bahan laporan untuk rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, RUPS, dan rapat dengan Pemangku Kepentingan lainnya; | <i>14. Coordinating report materials for the Board of Directors' Meetings, Board of Commissioners Meetings, GMS and other Stakeholders meetings;</i> |
| 15. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Perseroan; | <i>15. Carrying out Corporate secretarial activities;</i> |
| 16. Merumuskan dan menyusun kebijakan dan Pedoman hubungan masyarakat, pemasaran, tanggung jawab sosial perusahaan, protokoler, legal, administrasi dan komunikasi internal Perseroan. | <i>16. Formulating and compiling policies and guidelines on public relations, marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), protocols, legal, administration and internal communication of the Corporation</i> |
| 17. Menyetujui dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait. | <i>17. Approving and implementing CSR programs in coordination with relevant parties.</i> |
| 18. Menyusun Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Pedoman Perilaku, dan Pedoman-Pedoman lain yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan; | <i>18. Compiling Corporate Governance Guidelines, Board of Commissioners and Directors Work Guidelines (Board Manual), Code of Conduct and other Guidelines relating to the implementation of Good Corporate Governance;</i> |
| 19. Melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik ke seluruh karyawan; | <i>19. Socializing Good Corporate Governance principles to all Corporate Personnel;</i> |
| 20. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. | <i>20. Monitoring the follow-up actions of the assessment results of the implementation of Good Corporate Governance.</i> |

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Competency Development of the Corporate Secretary

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi karyawan Divisi Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Sekretaris Perusahaan.

Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan karyawan Divisi Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

The Corporation facilitates the implementation of development programs for employees of the Corporate Secretary Division in order to improve competency. The programs are expected to have a positive impact on the productivity and effectiveness of the performance of the Corporate Secretary.

For more information on the list of training and competency enhancement activities that the Corporate Secretary Division Head and employees of The Corporate Secretary Division partook in throughout 2019, see the Corporate Profile chapter of this annual report.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan 2019 *Implementation of the Corporate Secretary Duties in 2019*

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan beberapa tugas dan kegiatan sebagai berikut:

1. Memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perseroan pada situs web Perseroan.
2. Menyusun Siaran Pers sebanyak 41 (empat puluh satu) kali selama periode Januari sampai dengan Desember 2019.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan media, antara lain sebagai berikut:
 - a. Forum jurnalis sebanyak 12 (dua belas) kali.
 - b. Konferensi pers sebanyak 30 (tiga puluh) kali.
4. Perkembangan media sosial, sebagai berikut: facebook 63.459 pengikut, Instagram 268.002 pengikut, Youtube 16.800 dan Twitter 46.829 pengikut.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kunjungan para pemangku kepentingan.
6. Mengoordinasikan pelaksanaan beberapa kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi, antara lain seperti Sosialisasi Penggunaan Kartu Bank Elektronik, Sosialisasi Kartu Jaklingko, Sosialisasi Larangan Buang Sampah Sembarangan, Sosialisasi Integrasi Transjakarta, Sosialisasi Jadwal Ratangga, Sosialisasi Diskon 50% selama April, Sosialisasi ikut partisipasi dalam kegiatan acara Smabels Day di SMPN 115 Jakarta, dan lain-lain.
 - b. Kunjungan, antara lain seperti kunjungan DPRD, kunjungan istri Wiranto dan Agum Gumelar, kunjungan Menteri Perhubungan, kunjungan Dubes Korea dengan Wantimpres, kunjungan KemenPUPR Ladies Programme, kunjungan Menteri BUMN, Diaspora Coba MRT, Kementerian Luar Negeri, Ho Chi Minh City, Telkom Indonesia, dan lain-lain.
 - c. Pameran, antara lain seperti Pameran Acara Pelayanan Publik PTSP DKI, Pameran Bappenas, Pameran PRJ Dimulai, Pameran Foto MSF, I See Fest, dan lain-lain.
 - d. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan eksternal lewat kampanye "Official Transport Solution" pada acara Ganaskustik, peluncuran album Padi, Brightspot Market, Urban Sneaker Society, Jakarta Graffiti Festival, dan lain-lain.
 - e. Mengoordinasikan penandatanganan nota kesepahaman dengan Seoul Metro, Blue Bird, ITDP, KCIC, WWF, dan lain-lain.
 - f. Kegiatan lainnya seperti *Townhall Meeting*, *shooting*, peresmian, *car free day*, acara musik, dan lain-lain.
 - g. Nilai iklan (*ad value*) dan nilai pemberitaan (*PR value*), masing-masing sebesar Rp519.702.919.271 dan Rp1.034.462.717.037.
7. Mengoordinasikan penyusunan materi sosialisasi pada stasiun, antara lain materi sosialisasi musala terdekat, larangan membuang sampah, alternatif metode pembayaran, pengalihan akses ke DKA

During 2019, Corporate Secretary Division has carried out the following tasks and activities:

1. *Maintained and updated information about the Corporation on the Corporate website.*
2. *Prepared 41 (forty one) Press Releases for the period of January to December 2019.*
3. *Coordinated the implementation of media relations activities, including:*
 - a. *12 (twelve) Journalist Forums*
 - b. *30 (thirty) Press conferences*
4. *Improved the Corporation's social media presence which included: Facebook 63,459 followers, Instagram 268,002 followers, YouTube 16,800 subscribers and Twitter 46,829 followers.*
5. *Coordinated the execution of stakeholder visits.*
6. *Coordinated the implementation of several activities, namely:*
 - a. *Socialization, among others, the Socialization of Electronic Bank Cards Usage, the Socialization of Jaklingko Cards, the Socialization of Ban on Littering, Transjakarta Integration Socialization, Ratangga Schedule Socialization, Socialization of the 50% Discount during April, Socialization to engage people to participate in the Smabels Day event at SMPN 115 Jakarta, and others.*
 - b. *Visits, such as the Regional House of Representatives Visits, Wiranto & Agum Gumelar's Wives' Visits, the Transportation Minister's Visit, the Korean Ambassador's Visit with the Presidential Advisory Council, visit of the Ladies Program from the Ministry of Public Works, the Minister of SOE's Visit, visit of Diaspora Try MRT by the Ministry of Foreign Affairs, and visits by Ho Chi Minh City, Telkom Indonesia, and others.*
 - c. *Exhibitions, such as the PTSP DKI Public Service Event Exhibition, Bappenas Exhibition, the Jakarta Fair, MSF photo exhibition, I See Fest, and others.*
 - d. *Partnerships with external stakeholders by presenting the "Official Transport Solution" campaign at the Ganaskustik event, Padi's album launching event, Brightspot Market, Urban Sneakers Society, Jakarta Graffiti Festival, and others*
 - e. *Coordinated the signing of the memorandum of understanding with Seoul Metro, Blue Bird, ITDP, KCIC, WWF, and others.*
 - f. *Other activities such as town-hall meetings, shootings, inaugurations, car free day activations, music events, etc.*
 - g. *Ad value and PR value, respectively valued at Rp519,702,919,271 and Rp1,034,462,717,037.*
7. *Coordinated the preparation of socialization materials at the Stations, including materials for socializations of the closest praying room, prohibition of littering, payment method alternatives, transfer of access*

- dari BHI dan tentang JakLingko, peraturan di stasiun, sosialisasi pencegahan kekerasan pada perempuan di transportasi publik, rambu stasiun, peta, video animasi mengenai penanggulangan bencana di stasiun MRT, sejarah dan toponim stasiun, rambu area Kawasan Berorientasi Transit dan sosialisasi Transit Plaza, dan lain-lain.
8. Mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu *living project* bersama komunitas Si Dalang, Ruang Baca Jakarta (Pojoek Buku MRT Jakarta, MRT Jakarta Berbagi Buku, dan *Micro Library* MRT Jakarta), Jalan Jakarta Area Stasiun MRT Cipete Raya dan Haji Nawi, MRTeach, dan Liburan Transportasi Publik Terintegrasi.
 9. Mengoordinasikan, memeriksa, dan mengawasi pelaksanaan kajian "Public Readiness Index 2019 MRT Jakarta".
 10. Mengoordinasikan penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS LB di Tahun 2019.
 11. Menghadiri Rapat Direksi sebanyak 55 kali dan penyusunan risalah Rapat Direksi.
 12. Menghadiri Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 12 kali dan mempersiapkan materi Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
 13. Mengoordinasikan pelaksanaan Rapat Direksi dengan Kepala Divisi dan Kepala Departemen (BoD diperluas) bulan Januari sampai dengan Desember 2019.
 14. Menghadiri rapat khusus Direksi dengan Divisi terkait sebanyak 6 kali bulan Oktober sampai dengan Desember 2019.
 15. Mengelola dan menyimpan dokumen Perseroan, seperti Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, Surat Edaran, risalah rapat Direksi, dan risalah rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Peraturan Direksi, Keputusan Direksi, Surat Edaran, Peraturan Direktur Utama, Peraturan Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi, Peraturan Direktur Operasi dan Pemeliharaan, Peraturan Direktur Konstruksi, dan Peraturan Direktur Pengembangan Bisnis yang disahkan selama periode Januari sampai dengan Desember 2019 masing-masing sebanyak 101, 479, 16, 9, 1, 4, 8, dan 2.
 16. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaporan laporan perkembangan pekerjaan MRT Jakarta bulan Januari sampai dengan Desember kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan beberapa Pemangku Kepentingan lainnya.
 17. Membuat kebijakan terkait Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Untuk menunjang implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, selama periode Januari-Desember 2019 telah dibuat dan disahkan 7 (tujuh) Peraturan Direksi, 1 (satu) Keputusan Direksi, dan 7 (tujuh) *to DKA from BHI and about JakLingko, regulations at the station, campaign against female harassment in public transportations, station signages, maps, animated videos about disaster management at the MRT station, station's history and toponym, signages of the Transit Oriented Zone area and Transit Plaza socialization, and others.*
 8. *Coordinated and implemented Corporate Social Responsibility programs and activities, namely Living Project with the Si Dalang community, Jakarta Reading Room (MRT Jakarta Book Corner, MRT Jakarta Sharing Books, and MRT Jakarta Micro Library), Jalan Jakarta Cipete Raya MRT Station Area and Haji Nawi MRT, MRTeach, and Integrated Public Transportation Holidays.*
 9. *Coordinated, examined and supervised the implementations of the 2019 MRT Jakarta Public Readiness Index Study.*
 10. *Coordinated the execution of the Annual General Meeting of Shareholders and LB General Meeting of Shareholders in 2019.*
 11. *Attended the Directors' Meeting 55 times and prepared the minutes of the Board of Directors' Meeting.*
 12. *Attend 12 Board of Commissioners and Board of Directors joint meetings and prepare materials for Board of Commissioners and Board of Directors joint meetings.*
 13. *Coordinating the implementation of Directors' Meetings with Division Heads and Department Heads (BoD expanded) from January to December 2019.*
 14. *Attended Special Directors' Meetings with relevant Divisions 6 (six) times from October to December 2019.*
 15. *Managed and stored Corporate documents, such as the Board of Directors' Regulations, Directors' Decrees, Circular Letters, Minutes of Directors' Meetings and Minutes of Joint Board of Commissioners and Directors' Meetings. Directors' Regulations, Directors' Decrees, Circular Letters, Regulations of the President Director, Regulations of the Director of Finance and Corporate Management, Regulations of the Director of Operations and Maintenance, Regulations of the Director of Construction and Regulations of the Director of Business Development, all of which were ratified during the period January to December 2019, amounting to 101, 479, 16, 9, 1, 4, 8 and 2 documents respectively.*
 16. *Coordinate the preparation and reporting of the Jakarta MRT work progress report from January to December to the Regional Secretary of DKI Jakarta Province and several other stakeholders.*
 17. *Created structures related to Good Corporate Governance (GCG). To support the implementation of GCG. During the period January - December 2019, 7 (seven) Directors' Regulations, 1 (one) Board of Directors' Decree and 7 (seven) other documents, including a Shareholder*

dokumen lainnya, termasuk Daftar Khusus Saham Direksi dan Dewan Komisaris, Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan, dan Pakta Integritas Direksi dan Dewan Komisaris.

18. Mengadakan sosialisasi pengisian dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 23 Januari 2019, internalisasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan sebanyak 6 kali dan sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku kepada karyawan baru sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Mei 2019, sementara sosialisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi pada 8, 15, 23 dan 29 Agustus 2019, dan sosialisasi Pengelolaan Dokumen Perseroan pada tanggal 15 Oktober 2019.

19. Melaksanakan program pengenalan bagi Komisaris baru pada tanggal 17 dan 21 Juni 2019.

20. Sebagai Unit Pengendali Gratifikasi, melakukan pemantauan terhadap pengelolaan gratifikasi di Perseroan. Selama periode Januari sampai dengan Desember 2019, telah diterima 17 (tujuh belas) laporan penerimaan gratifikasi; 2 (dua) merupakan gratifikasi yang tidak dilarang, 1 (satu) telah dikembalikan kepada pihak Pemberi dan 14 (empat belas) laporan telah diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sampai saat ini masih berstatus verifikasi.

21. Melakukan asistensi/pendampingan pengisian dan pelaporan LHKPN kepada Wajib LHKPN dan menyerahkan dokumen kelengkapan LHKPN milik Wajib LHKPN kepada KPK. Sampai dengan 31 Desember 2019, dari total 94 Wajib LHKPN, sebanyak 68 Wajib LHKPN telah mengisi dan melaporkan LHKPN periode 2018 (100% dari total Wajib LHKPN Tahun 2018) melalui aplikasi e-LHKPN, sedangkan 26 orang merupakan Wajib LHKPN yang merupakan Kepala Divisi dan Kepala Departemen yang baru diangkat di tahun 2019.

22. Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sistem pelaporan dugaan pelanggaran periode Januari sampai dengan Maret 2019, terdapat 14 (empat belas) laporan yang masuk melalui aplikasi sistem pelaporan dugaan pelanggaran. Adapun laporan yang telah memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti sebanyak 1 (satu) laporan, sedangkan 13 (tiga belas) laporan lainnya tidak memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti.

23. Mengoordinasikan pemantauan tindak lanjut hasil penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Rekomendasi hasil penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dari Perseroan telah diinformasikan kepada seluruh Unit Kerja terkait.

24. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pedoman Etika dan Perilaku di Perseroan. Selama periode Januari sampai dengan Desember 2019, tidak ada laporan terkait pelanggaran Pedoman Etika dan Perilaku.

List of the Directors and Board of Commissioners Statements, Statement of No Conflict of Interests and the Integrity Pact of the Directors and Board of Commissioners.

18. Conducted socialization of Filing and Reporting of Report of State Officials Wealth (LHKPN) by the Corruption Eradication Commission (KPK), on January 23, 2019, internalization of GCG guideline was carried out 6 (six) times and socialization of the Code of Conduct to new employees was conducted 1 (one) time on May 21, 2019 and the socialization of the Gratification Control Guidelines was held on 8, 15, 23 and 29 August 2019, while the socialization of Corporate Document Management took place on October 15, 2019.

19. Implemented an introductory program for new Commissioners on 17 and 21 June 2019.

20. As a Gratification Control Unit, the unit monitored Gratification management in the Corporation. During the period of January to December 2019, there were 17 (seventeen) reports of acceptance of gratification submitted. In which 2 (two) were gratifications that were allowed, 1 (one) gratification has been returned to the giver and 14 (fourteen) reports have been forwarded to the Corruption Eradication Commission (KPK) and as of now the reports are still being verified at the KPK.

21. Provided assistance in Report on State Official Wealth (LHKPN) filing and reporting to LHKPN obligees and submitted their documents to the Corruption Eradication Commission (KPK). Up until December 31, 2019, out of a total of 94 LHKPN obligees, as many as 68 LHKPN obligees had filled and reported their LHKPN for the 2018 period (100% of the total LHKPN obligees of 2018) through the LHKPN application, while 26 people were LHKPN obligees who were Division Heads and the new Heads of Department who were appointed in 2019.

22. Monitored the management of the Whistle-Blowing System (WBS). During the period of January to March 2019, there were 14 (fourteen) reports that came through the WBS application. The reports that have met the criteria for a follow-up was 1 (one) report, while 13 (thirteen) other reports did not meet the criteria to be followed-up.

23. Coordinated the follow-up monitoring of the GCG assessment results. Recommendations on the results of the Corporate GCG assessment have been informed to all relevant Work Units and are in the process of following up.

24. Monitored the implementation of the code of conduct in the Corporation. During the period of January to December 2019, there were no reports related to violations of the code of conduct.

25. Menghadiri acara seremonial dan upacara hari besar di tahun 2019 di antaranya adalah kegiatan Solidaritas KORPRI, peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91, Hari Pahlawan tahun 2019, dan Upacara Bela Negara Tahun 2019.
26. Melakukan koordinasi jadwal rapat badan anggaran dengan Sekretariat DPRD DKI Jakarta dan melakukan kegiatan protokoler Direksi yang hadir dalam rapat pada bulan November – Desember 2019.
27. Mengoordinasikan acara seremonial dalam penandatanganan perjanjian pokok atau MoU dengan pemerintah dan mitra strategis lainnya. Penandatanganan perjanjian pokok tersebut di antaranya:
- Penandatanganan Kerja Sama Ekuitas Antara PT KAI (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda) yang diadakan pada tanggal 9 Desember 2019 di Gedung Balai Agung Balai Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada tanggal 20 Desember 2019 di Kantor MRT Jakarta.
 - Penandatanganan Perjanjian Pemegang Saham dan Perjanjian Penataan Stasiun Terintegrasi antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada tanggal 10 Januari 2020 di Kementerian BUMN.
28. Melakukan koordinasi dan memfasilitasi kunjungan dan visitasi kegiatan pemerintah dan mitra strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya kegiatan *fun bike* bersama DPRD DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan pada tanggal 29 Desember 2020 dengan rute Plaza Senayan - Pusat Grosir Cililitan. Kemudian pada kegiatan kunjungan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 10 Januari 2020 di Stasiun Bundaran HI - Stasiun ASEAN.
25. *Attended ceremonial events and ceremonies for holidays in 2019 including KORPRI Solidarity Activities, Commemoration of the 91st Youth Oath Day, Heroes Day 2019 and 2019 State Defense Ceremony.*
26. *Coordinated the budget board meeting schedule with the DKI Jakarta Regional House of Representatives (DPRD) Secretariat and carried out the Board of Directors' protocol activities with those who were present at the meetings in November - December 2019.*
27. *Coordinated ceremonial events for the signing of main agreements or MoUs with the government and other strategic partners. Some of the signing of the main agreements taking place were:*
- Signing of the Equity Cooperation between PT KAI (Persero) and PT MRT Jakarta (Perseroda) which was held on December 9, 2019 at the Balai Agung Building, City Hall, DKI Jakarta Provincial Government.*
 - Signing of a Memorandum of Understanding Between PT MRT Jakarta (Perseroda) and the National Counterterrorism Agency (BNPT) on December 20, 2019 at the MRT Jakarta Office.*
 - Signing of the Shareholders Agreement and Integrated Station Arrangement Agreement between PT MRT Jakarta (Perseroda) and PT Kereta Api Indonesia (Persero) on January 10, 2020 at the Ministry of BUMN building.*
28. *Coordinated and facilitated visits and visitations of government and strategic partners' activities. These activities included Fun Bike activities with the DKI Jakarta Regional House of Representatives and the Department of Transportation on December 29, 2020, taking the Senayan Plaza - Cililitan Wholesale Center route. Then, during the visit of the Japanese Foreign Minister on January 10, 2020 at the HI Roundabout Station - ASEAN Station.*

CORPORATE STRATEGY

CORPORATE STRATEGY

Perseroan membentuk Divisi *Corporate Strategy* dalam rangka untuk memastikan proses formulasi strategi, pengukuran kinerja yang terstruktur dari level korporasi serta mengalir ke level divisi, perbaikan bisnis yang berkelanjutan serta manajemen pengetahuan sesuai prosedur guna meningkatkan kualitas karyawan agar dapat mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Profil Kepala Divisi Corporate Strategy

Profile of the Corporate Strategy Division Head

Kepala Divisi Corporate Strategy ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 265-31 tahun 2019 tentang Pengangkatan Ratih Mayasari sebagai Kepala Divisi *Corporate Strategy*.

The Corporation formed the Corporate Strategy Division to ensure that the processes of strategy formulation, structured performance evaluation from the Corporate to Division level, continuous business improvements, as well as knowledge management are carried out according to procedures in order to improve the quality of employees so as to support the Corporation's operational activities.

The Head of Corporate Strategy Division is determined based on Directors Decree No. 265-31 of 2019 concerning the Appointment of Ratih Mayasari as Head of the Corporate Strategy Division.



RATIH MAYASARI

Kepala Divisi *Corporate Strategy* (Menjabat sejak 14 Juni 2019)
Head of Corporate Strategy Division (Serving since June 14, 2019)

Kewarganegaraan *Citizenship Indonesian*

Warga Negara Indonesia Indonesian

Usia *Age*

37 Tahun 37 Years old

Domisili *Domicile*

Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia North Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir *Place and Date of Birth*

Palembang, 15 Mei 1982 Palembang, May 15 1982

Riwayat Pendidikan *Educational History*

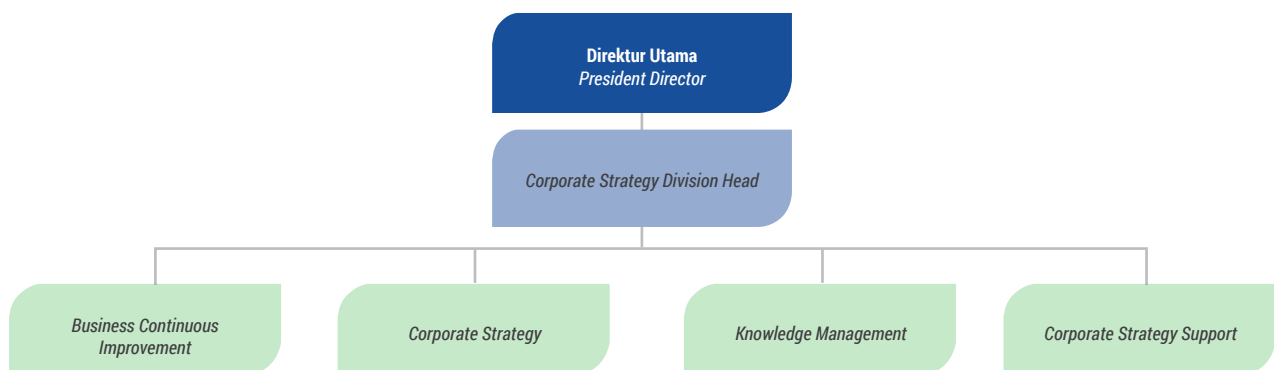
Magister Manajemen Strategi, Universitas Gadjah Mada, 2015 Master of Strategy Management, Gadjah Mada University, 2015

Riwayat Pekerjaan *History of Employment*

- *Strategic Management System Senior Manager, Kalbe Farma, 2013-2019;*
- *Department Head of Strategy Management, Multistrada Arah Sarana (MASA), 2008-2011;*
- *Operation Control and Biz Performance Analyst, Astra International, 2005-2008.*
- *Senior Strategic Management System Manager, Kalbe Farma, 2013-2019;*
- *Department Head of Strategy Management, Multistrada Directions for Facilities (MASA), 2008-2011;*
- *Operation Control and Biz Performance Analyst, Astra International, 2005-2008.*

Sertifikasi *Certification*

- *Pelatihan Pembahasan Sistem Manajemen Pengukuran Kinerja dengan Korn Ferry;*
- *Pelatihan Understanding International Project Finance;*
- *Pelatihan Executive Management Development Program (EMDP) Seri Managing Business - Inspiring Leadership: Becoming High Performing Leader.*
- *Workshop on performance measurement management system with Korn Ferry;*
- *Training of Understanding International Project Finance;*
- *Training of Executive Management Development Program (EMDP), Managing Business-Inspiring Leadership series: Becoming a High-Performing Leader.*



Figur 6.15
Figure 6.15

Hingga akhir tahun 2019 jumlah karyawan yang tergabung dalam Corporate Strategy adalah sebanyak 8 orang.

By the end of 2019, there were 8 (eight) employees in the Corporate Strategy Division.

| Jabatan Position | Jumlah Karyawan Number of Employees |
|---|--|
| Corporate Strategy Division Head | 1 |
| Corporate Strategy Principal | 1 |
| Knowledge Management Principal | 1 |
| Business and Process Improvement Principal | 1 |
| Corporate Strategy Specialist | 2 |
| Knowledge Management Specialist | 1 |
| Business and Process Improvement Specialist | 1 |
| Jumlah Total | 8 orang persons |

Tabel 6.87
Table 6.87

Tugas dan Tanggung Jawab Corporate Strategy

Duties and Responsibilities of the Corporate Strategy Division

- Memastikan proses penyusunan dan implementasi budaya dan nilai perseroan, proses bisnis, dan manajemen pengetahuan
 - Memimpin, mengawasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan strategis (termasuk perancangan visi, misi dan Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP), penyusunan Indikator Kinerja Utama (KPI), dan penilaian kinerja Perseroan dan Divisi
 - Melakukan evaluasi terhadap implementasi rencana strategis Perseroan (seperti visi, misi dan RJPP) dan program-program transformasi Perseroan, termasuk transformasi bisnis, operasi, dan organisasi
 - Memantau efektivitas pelaksanaan kegiatan penyusunan KPI untuk korporasi dan tiap divisi bersama dengan Divisi *Human Capital*
 - Melakukan Penyusunan, Pengawasan, serta Evaluasi Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja Utama di tingkat Korporasi, Direktorat, dan Divisi
 - Mempersiapkan laporan berkala untuk Direktur Utama terkait pelaksanaan kegiatan perencanaan strategis, penyusunan KPI, dan penilaian kerjanya.
- Ensure the implementations of the process of preparing and implementing Corporate culture & values, business processes, and knowledge management*
 - Lead, supervise and coordinate the implementation of strategic planning activities (including designing the vision, mission and Long Term Corporate Plan (RJPP)), preparation of Key Performance Indicators (KPI) and performance assessments of the Corporation and Divisions*
 - Evaluate the implementation of the Corporation's strategic plans (such as vision, mission and RJPP) and Corporate transformation programs, including business, operations and organizational transformations*
 - Monitor the effectiveness of the KPI preparation activities for the Corporation and each division in tandem with the Human Capital Division*
 - Conduct arrangement, supervision, and evaluations of the Annual Work Plan and Key Performance Indicators on the Corporate, Directorate, and Divisional levels.*
 - Prepare periodic reports for the President Director regarding the implementations of strategic planning activities, preparation of KPI and its performance assessment*

Pengembangan Kompetensi Corporate Strategy

Competency Development of the Corporate Strategy Division

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Divisi Corporate Strategy dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Corporate Strategy.

The Corporation facilitates the implementation of development programs for the Corporate Strategy Division in order to improve competency. The program is expected to have a positive impact on the productivity and effectiveness of the Corporate Strategy Division's performance.

Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Corporate Strategy dan karyawan Divisi Corporate Strategy di sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The list of training and competency development activities that the Head of the Corporate Strategy Division and employees of the Corporate Strategy Division partook in throughout 2019 can be found below:

| Nama dan Jabatan Name and Position | Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Tempat/Tanggal Place/Date | Penyelenggara Organizer |
|--|--|---|---|--|
| Ratih Mayasari Kepala Divisi Corporate Strategy Head of the Corporate Strategy Division | Hard Skills | Pelatihan Pembahasan Sistem Manajemen Pengukuran Kinerja dengan Korn Ferry <i>Workshop on Performance Assessment Management System Discussion with Korn Ferry</i> | 18 Juli 2019 / Jakarta, Indonesia <i>July 18, 2019</i> | Korn Ferry |
| Ratih Mayasari Kepala Divisi Corporate Strategy Head of the Corporate Strategy Division | Soft Skills | Pelatihan Executive Coaching-Leader As Coach Batch 1 <i>Executive Coaching Training - Leader As Coach Batch 1</i> | 9, 29, 30 Oktober 2019 / Jakarta, Indonesia <i>October 9,29, 30, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Loop Institute of Coaching |
| Ratih Mayasari Kepala Divisi Corporate Strategy Head of Division of Corporate Strategy | Hard Skills | Pelatihan Understanding International Project Finance <i>Training of Understanding International Project Finance</i> | 20 - 22 November 2019 / Jakarta, Indonesia <i>November 20-22, 2019</i> | International Project Finance Association (IPFA) |
| Ratih Mayasari Kepala Divisi Corporate Strategy Head of Division of Corporate Strategy | Soft Skills | Pelatihan Executive Management Development Program (EMDP) Seri Managing Business - Inspiring Leadership : Becoming High Performing Leader <i>Training of Executive Management Development Program (EMDP), Managing Business-Inspiring Leadership series: Becoming a High-Performing Leader</i> | 16 - 17 Desember 2019 / Jakarta, Indonesia <i>December 16-17, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Asian Leadership Centre |
| Andy Credo Sibuea Knowledge Management Principal | Hard Skills | Pelatihan Strategic Business Analysis <i>Training of Strategic Business Analysis</i> | 17 - 18 September 2019 / Jakarta, Indonesia <i>September 17-19, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Prasetya Mulya Executive Learning Institute |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|---|---|--|--|
| Andy Credo Sibuea <i>Knowledge Management Principal</i> | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Strategic Business Analysis <i>Training of Strategic Business Analysis</i> | 05 - 06 November 2019 / Bandung, Indonesia <i>November 05-06, 2019</i> | Knowledge Summit Indonesia |
| Andy Credo Sibuea <i>Knowledge Management Principal</i> | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) <i>Training of Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 18 - 19 November 2019 / Jakarta, Indonesia <i>November 16-19, 2019</i> | Precena Strategic Partners |
| Nino Muhamad <i>Business Continuous Improvement Principal</i> | <i>Soft Skills</i> | Program Leadership Six Sigma Final Project Evaluation <i>Leadership Program of Six Sigma Final Project Evaluation</i> | 07 - 09 Februari 2019 / Bogor, Indonesia <i>February 07-09, 2019</i> | Unotalent |
| Nino Muhamad <i>Business Continuous Improvement Principal</i> | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) <i>Training of Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 30 September 2019 - 1 Oktober 2019 / Jakarta, Indonesia <i>September 30, 2019-October 1, 2019</i> | Precena Strategic Partners |
| Nino Muhamad <i>Business Continuous Improvement Principal</i> | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Business Process Design <i>Training of Business Process Design</i> | 05 - 06 November 2019 / Jakarta, Indonesia | Prasetya Mulya Executive Learning Institute |
| Teuku Firmansyah <i>Corporate Strategy Principal</i> | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Finance for Non Finance Professional <i>Training of Finance for Non-finance Professional</i> | 13 - 15 Agustus 2019 / Jakarta Indonesia <i>August 13-15, 2019</i> | Prasetya Mulya Executive Learning Institute |
| Teuku Firmansyah <i>Corporate Strategy Principal</i> | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) <i>Training of Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 2 - 3 Oktober 2019 / Jakarta, Indonesia <i>October 2-3, 2019</i> | Precena Strategic Partners |
| Teuku Firmansyah <i>Corporate Strategy Principal</i> | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Understanding International Project Finance <i>Training of Understanding International Project Finance</i> | 20 - 22 November 2019 / Jakarta, Indonesia <i>November 20-22, 2019</i> | International Project Finance Association (IPFA) |
| Dionisius Denizar <i>Corporate Strategy Specialist</i> | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Agile Way in Business <i>Training of Agile Way in Business</i> | 17 - 18 September 2019 / Jakarta, Indonesia <i>September 17-18, 2019</i> | Prasetya Mulya Executive Learning Institute |
| Sapto Ashardianto <i>Knowledge Management Specialist</i> | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Business Process Design <i>Training of Business Process Design</i> | 106 - 07 Agustus 2019 / Jakarta, Indonesia <i>August 06-07, 2019</i> | Prasetya Mulya Executive Learning Institute |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|---|---|---|---|-----------------------------------|
| Sapto Ashardianto <i>Knowledge Management Specialist</i> | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) <i>Training of Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 30 September 2019 - 1 Oktober 2019 / Jakarta, Indonesia <i>September 30, 2019-October 31, 2019</i> | Precena Strategic Partners |
| Sapto Ashardianto <i>Knowledge Management Specialist</i> | <i>Hard Skills</i> | Knowledge Summit Indonesia 2019 <i>Indonesia Knowledge Summit 2019</i> | 05 - 06 November 2019 / Bandung, Indonesia | Knowledge Summit Indonesia |

Tabel 6.88
Table 6.88

Pelaksanaan Tugas Corporate Strategy 2019 *Implementation of the Corporate Strategy Duties in 2019*

Pada tahun 2019, Divisi *Corporate Strategy* bertransformasi dengan membentuk 3 fungsi di bawahnya yaitu *Strategy*, *Knowledge Management* ("KM"), dan *Business and Process Improvement* ("B&PI"). Dimulai di awal kuartal 2019, fungsi *Strategy* telah menyelesaikan revisi Rencana Jangka Panjang Perseroan ("RJPP") 2018-2030 dan Rencana Jangka Menengah Perseroan ("RJMP") 2018-2022. Kedua dokumen ini disahkan melalui mekanisme RUPS untuk digunakan sebagai panduan arah perencanaan strategis Perseroan di masa depan.

Pada kuartal kedua di tahun yang sama, Perseroan mulai melakukan penguatan pada proses perencanaan strategis Perseroan dimana sebelum umnya di masa *non-commercial* masih menggunakan metode 4dX ("4 Discipline of Execution") yang berfokus pada sasaran yang dianggap paling strategis (3-4 sasaran), kemudian di masa *commercial* mulai menggunakan metode *Balanced Scorecard* ("BSC") yang lebih komprehensif dimana identifikasi indikator kinerja diawali dengan identifikasi sasaran strategis yang dikelompokkan ke dalam 4 perspektif dan melihat hubungan sebab-akibat antar perspektif. Metode ini akan efektif digunakan di tahun 2020.

Selain itu fungsi *Corporate Strategy* juga mengkoordinasikan proses pembentukan anak Perusahaan Sarana dan *Transit Oriented Development* (TOD) sebagai tindak lanjut hasil RUPS Luar Biasa tanggal 28 Maret 2019 yang mengamanatkan pembentukan kedua anak Perseroan untuk segera dilakukan. Divisi *Corporate Strategy* juga terlibat dalam proses pengembangan jalur MRT di masa depan dan pembentukan perusahaan patungan ("JV") bekerjasama dengan PT KAI (Persero).

Fungsi *Knowledge Management* juga telah menjalankan sejumlah program strategis di tahun 2019, antara lain: transfer pengetahuan dari proyek MRT tahap 1 ke proyek MRT tahap 2 melalui *Retrospect Lesson Learned* Proyek Konstruksi Fase I, pendokumentasian pembelajaran dari proses pembebasan lahan dan relokasi utilitas, serta penyusunan

In 2019, the Corporate Strategy Division was transformed by forming 3 (three) functions under it, namely Strategy, Knowledge Management ("KM"), and Business and Process Improvement ("B&PI"). Beginning in the early quarter of 2019, the Strategy Function has completed the revision of the 2018-2030 Long-Term Corporate Plan ("RJPP") and the 2018-2022 Medium-Term Corporate Plan ("RJMP"). Both of these documents were approved through the GMS mechanism to be used as a guide for the Corporation's future strategic planning.

In the second quarter of the same year, the Corporation had begun strengthening the Corporate strategic planning process, in which previously during the non-commercial period the Corporation still used the 4dX method ("4 Discipline of Execution"), which focused on the targets considered most strategic (3-4 targets). After MRT Jakarta began its commercial phase, the Corporation started using the Balanced Scorecard ("BSC") method, which was more comprehensive, and performance indicator identification began identifying strategic targets which are categorized into 4 (four) perspectives, while taking into consideration causal relationships between perspectives. This method will be effective in 2020.

In addition, the Corporate Strategy also has a function in coordinating the process of establishing O&M Subsidiary and Transit Oriented Development (TOD) Subsidiary as a follow-up to the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on March 28, 2019 which mandated the formations of the two subsidiaries to be executed immediately. The Corporate Strategy Division is also involved in the process of developing future MRT lines and the formation of a joint venture ("JV") in collaboration with PT KAI (Persero).

The Knowledge Management Function has also carried out a number of strategic programs in 2019, including knowledge transfer from the Phase 1 MRT Project to Phase 2 MRT Project through Phase 1 Construction Project's Retrospect Lesson Learned, documentation of lessons learned from the land acquisition and utility relocation processes, authoring a book titled

buku “Menuju Ratangga: Kereta Kota Kita” yang menceritakan awal mula terbentuknya MRT Jakarta hingga saat beroperasinya. Selain itu aktivitas *knowledge sharing* dalam bentuk *café talk* dengan mengundang pembicara eksternal dan internal tetap rutin dilakukan, serta didukung dengan penyebaran pengetahuan melalui *KM Newsletter*.

Untuk memastikan pengelolaan pengetahuan dilakukan secara sistematis, fungsi KM juga telah menyelesaikan dan mensosialisasikan Pedoman Pengelolaan Pengetahuan di Lingkungan PT MRT Jakarta (Persero) dalam bentuk peraturan direksi. Struktur *Strategic Business Partner* dan *Strategic Business Associate* juga menjadi mitra dalam memastikan proses KM terlaksana di unit kerja level divisi, didukung dengan perencanaan manajemen kinerja dalam bentuk KPI (*Key Performance Indicator*) khusus bernama *KM Index*.

Untuk teknologi pendukung pengelolaan pengetahuan, fungsi KM berkolaborasi dengan Divisi *Information System & Technology* dalam mengembangkan aplikasi KM berbasis web dengan tiga fitur utama yang telah dapat digunakan sebagai wadah penyimpanan dan penyebaran aset pengetahuan. KM juga berkontribusi dalam persiapan pengembangan serta penyediaan kurikulum, silabus, dan studi kasus untuk UPT PKP3 (Pusat Kebijakan Publik dan Pengembangan Perkotaan) DKI Jakarta. Perseroan juga berkontribusi sebagai pembicara di dalam *KM Summit 2019* yang diselenggarakan *Knowledge Management Society Indonesia* melalui Kepala Divisi *Corporate Strategy* dan fungsi KM. Komunikasi intensif dan kunjungan khusus ke *Asian Development Bank (ADB)* di Manila juga berhasil mendapatkan komitmen menghadirkan bantuan teknis dari ADB untuk implementasi KM lebih baik di tahun 2020.

Tahun 2019 ditutup dengan capaian pengukuran *KM Maturity Level* Perseroan sebesar 4,26 dari target awal 3,40. Hal ini menggambarkan pertumbuhan yang signifikan dalam kedewasaan pengelolaan pengetahuan di Perseroan.

Fungsi baru yang ada di Divisi *Corporate Strategy*, yaitu *Business and Process Improvement*. Fungsi ini menggantikan fungsi *Change management* yang sebelumnya ada di Divisi ini. Fungsi *Business and Process Improvement* ini menjadi penting, karena Perseroan perlu senantiasa melakukan perbaikan dalam proses bisnisnya dan hal ini harus terkelola dengan baik dan rapi.

Di tahun 2019, fungsi ini memulai aktivitasnya dengan meluncurkan inisiatif program perbaikan proses bisnis dengan mengadopsi metode *Lean Six Sigma* sebagai basis dari perbaikan proses bisnis Perseroan dengan melakukan *pilot project* di area operasi dan internal *Corporate Strategy* secara mandiri untuk merumuskan Panduan *Business and Process Improvement*. Direktorat O&M menjadi pilot project implementasi awal dari metode yang telah banyak digunakan dan berhasil di berbagai Perseroan, hal ini dilakukan karena Direktur Operasi dan Pemeliharaan memiliki komitmen yang kuat untuk perbaikan. Selain itu, Direktorat ini merupakan garda terdepan sebagai pemberi layanan transportasi publik kepada masyarakat.

“Menuju Ratangga: Kereta Kota Kita” (“Heading for Ratangga: Our City’s Train”) that tells the beginning of MRT Jakarta’s establishment to the time that it launched its operations. In addition, knowledge sharing activities in the form of Café talks with external speakers were conducted regularly, and supported by the KM Newsletter.

To ensure that knowledge management is executed systematically, the KM Function has also completed and socialized the Knowledge Management Guideline within the Corporate Scope for PT MRT Jakarta (Persero) in the form of Director’s regulations. The Strategic Business Partner Structure and Strategic Business Associate also became partners in ensuring that KM processes were carried out on the division level work units, supported by performance management planning in the form of a special Key Performance Indicator (KPI) called KM Index.

For KM supporting technology, the KM Function collaborated with the Information System & Technology Division in developing a web-based KM application with three main features that can be used as a knowledge asset storage and sharing platform. KM also contributed in the preparation of development and provision of curriculum, syllabus, and case studies for UPT PKP3 (Center for Urban Policy and Development) of DKI Jakarta. The Corporation also contributed as a speaker at the KM Summit 2019, organized by the Knowledge Management Society Indonesia through the Division Head of Corporate Strategy and the KM Function. Intensive communication with and a special visit to the Asian Development Bank (ADB) in Manila also successfully obtained commitment in providing technical assistance from the ADB to implement better KM in 2020.

The year 2019 ended with an achievement of Corporate KM Maturity Level Assessment score of 4.26, exceeding the initial target of 3.40. This reflected significant growth of KM maturity in the Corporation.

A new function within the Corporate Strategy Division is the Business and Process Improvement Function. This replaced the Change Management Function which was previously under this division. The Business and Process Improvement Function became vital, as the Corporation needed to continuously improve its business process, which needed to be managed properly and neatly.

In 2019, this function began its activities by launching a business process improvement initiative through the adoption of the Lean Six Sigma method as the base of Corporate business process improvement, by independently establishing a pilot project in the operational area and an Internal Corporate Strategy to formulate a Business and Process Improvement Guideline. The O&M Directorate became the pilot project for the early implementation of this method that had been successfully applied in many corporations, this was done because the O&M Director had a strong commitment for improvements. In addition, this Directorate was on the front line when it comes to providing public transportation service to the public.

Di tahun 2019, fungsi ini menginisiasi proses "Define" dari siklus DMAIC yang menjadi dasar dari metode *Lean Six Sigma* ini. Tahun 2019 ditutup oleh Divisi *Corporate Strategy* dengan peluncuran 3 Pedoman yang mewakili seluruh fungsi yang ada di Divisi *Corporate Strategy*.

In 2019, this Function initiated the Define process of the DMAIC cycle, which was the base of the Lean Six Sigma method. The year 2019 for the Corporate Strategy Division ended with the launches of 3 (three) Guidelines that represented all functions under the Corporate Strategy Division.

RISK MANAGEMENT & QSSHE ASSURANCE

RISK MANAGEMENT & QSSHE ASSURANCE DIVISION

Manajemen Perseroan berkomitmen untuk menempatkan pengelolaan risiko sebagai prioritas. Untuk itu, dibentuklah Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* agar pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan dapat terjaga dengan baik. Divisi ini mengalami perubahan fungsi; pada tahun sebelumnya memiliki tugas sebagai Divisi *Risk, Quality & Safety Management*. Perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis Perseroan dan juga melindungi nilai-nilai Perseroan melalui pengembangan Sistem Manajemen Risiko Korporasi secara Terintegrasi dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen lingkungan, dan sistem manajemen kualitas. Perubahan ini dimaksudkan untuk merespons perkembangan Perseroan yang pada tahun 2019 telah menyelesaikan fase konstruksi dan mulai melakukan pengelolaan sistem perkeretaapian perkotaan secara komersial.

The Corporate Management commits to treat risk management as a priority. Hence, the Risk Management & QSSHE Assurance Division was formed to ensure that risk management within the Corporate scope can be properly maintained. This division went through a change in functions, in which it acted as the Risk, Quality & Safety Management Division in the previous year. This change was meant to ensure the attainment of strategic corporate targets and protect Corporate values through Corporate Risk Management System Development that is integrated with the Occupational Safety and Health Management System, Environmental Management System, and Quality Management System. This change was meant to respond to the development within the Corporation in 2019, during which it completed its construction phase and began to execute the urban railroad management system commercially.

Dalam pengembangan Sistem Manajemen Risiko Korporasi, Perseroan menggunakan Standar ISO31000:2009 yang kemudian disesuaikan dengan terbitnya ISO31000:2018, dan dalam mengembangkan Sistem Manajemen Terintegrasi, Perseroan menerapkan ISO9001:2015, ISO14001:2015 dan ISO45001:2018. Selain menerapkan standar internasional sebagai referensi dalam pengelolaan korporasi, Perseroan tetap memastikan kepatuhan terhadap pemenuhan regulasi dan standar nasional dimana untuk bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012. Penerapan SMK3 oleh Perseroan telah diaudit oleh Auditor Eksternal dan berhasil meraih hasil yang memuaskan dan mendapatkan penghargaan Bendera Emas. Konsistensi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tahun 2019 berhasil meraih penghargaan Nasional untuk Kecelakaan Nihil.

In developing the Corporate Risk Management System, the Corporation used the ISO31000:2009 standard, which was then adjusted with the issuance of ISO31000:2018. While developing the Integrated Management System, the Corporation applied the following: ISO9001:2015, ISO14001:2015 and ISO45001:2018. In addition to applying international standards as references in Corporate Management, the Corporation ensured its compliance with the national regulations and standard, which in the case of occupational safety and health is the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) which is governed by PP50 Th. 2012. The application of SMK3 has been audited by an external auditor and has achieved satisfactory results, which granted the Corporation the Golden Flag (Bendera Emas) Award. Consistency in applying the Occupational Safety and Health Management System in 2019 won the Corporation a National Award for Zero Accident.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance

The Party that Appoints and Dismisses the Head of Risk Management & QSSHE Assurance Division

Dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan telah dilaksanakan, Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, dimana Kepala Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* diangkat oleh Direktur Utama dengan mekanisme internal yang berlaku di Perseroan. Untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan, kepala divisi dan karyawan unit Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* telah dilengkapi oleh sertifikasi/kualifikasi terkait manajemen risiko.

In order to ensure that Corporate management has been implemented, the Risk Management & QSSHE Assurance Division reports directly to the President Director, in which case the Head of the Risk Management & QSSHE Assurance Division is appointed by the President Director following internal mechanisms applied in the Corporation. To support the implementation of risk management within the Corporation, the head of the division and employees of the Risk Management & QSSHE Assurance Division have been equipped with certifications/ qualifications related to risk management.

Profil Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance

Profile of Risk Management & QSSHE Assurance Division Head Division

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/081/BOD-MRT/XII/2014, Direktur Utama mengangkat Ernie Widianty Rahardjo sebagai Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance.

Based on Directors Decree No. SK/081/BOD-MRT/XII/2014, President Director appointed Ernie Widianty Rahardjo as the Head of Risk Management & QSSHE Assurance Division.



ERNIE WIDIANTY RAHARDJO, DR., M.KES., MBA.

Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance (Menjabat sejak December 2014)
Head of Risk Management & QSSHE Assurance Division (Serving since December 2014)

Kewarganegaraan Citizenship Indonesian

Warga Negara Indonesia Indonesia

Usia Age

46 Tahun 46 Years old

Domisili Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Tempat dan Tanggal Lahir Place and Date of Birth

Surabaya, 16 April 1973 Surabaya, April 16, 1973

Bergabung di Perseroan Join the Corporate

02 Januari 2010 Government Relation Staff. January 02, 2010 Government Relations Staff.

Riwayat Pendidikan Educational History

- Nanyang Business School, Nanyang Technological University, Singapore, 2009, Lulus sebagai Master of Business Administration (MBA);
- Fakultas Kesehatan Masyarakat, Univ. Indonesia, 2003, Lulus Magister Kesehatan;
- Fakultas Kedokteran Univ. Airlangga, 1998, Lulus sebagai Dokter.
- Nanyang Business School, Nanyang Technological University, Singapore, 2009, Graduated as a Master of Business Administration (MBA);
- Faculty of Public Health, Univ. Indonesia, 2003, Graduated with a Masters in Health;
- Faculty of Medicine, Univ. Airlangga, 1998, Graduated as a Doctor.

Riwayat Pekerjaan History of Employment

- Kepala Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2017 - Sekarang;
- Kepala Divisi Risk Management, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2014 - 2017;
- Kepala Divisi Human Resources, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2013 - 2014;
- Kepala Departemen Human Resources, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2010 - 2013;
- Asisten Eksekutif Deputy Gubernur DKI Jakarta Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Pemprov. DKI Jakarta, 2009 - 2010;
- Asisten Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Bappeda DKI Jakarta, 2004 - 2008;
- Head of Risk Management & QSSHE Assurance, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2017 - now;
- Head of Risk Management Division, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2014 - 2017;
- Head of Human Resources Division, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2013 - 2014;
- Head of Human Resources Department, PT MRT Jakarta (Perseroda), 2010 - 2013;
- Executive Assistant to Deputy Governor for Environment and Spatial Planning, Jakarta Planning Board Provincial Government of Jakarta, 2009 - 2010;
- Executive Assistant to Chairman of Jakarta Planning Board, Jakarta Planning Board Provincial Government of Jakarta, 2004 - 2008;

- Manajer Mutu Layanan, Rumah Sakit Daerah Cengkareng DKI Jakarta, 2002 - 2003;
- Manajer dan Fasilitator Proyek Implementasi Total Quality Management (TQM), Suku Dinas Kesehatan Jakarta Utara, 2001 - 2003.
- *Quality Manager, Cengkareng State Hospital Provincial Government of Jakarta, 2002 - 2003;*
- *TQM Projects Facilitator and Manager, North Jakarta District Health Office, 2001 - 2003.*

Sertifikasi *Certification*

- *Certified Talent Management;*
- *Certified Human Resource Professional;*
- *Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP), Enterprise Risk Management Academy, Singapore;*
- *Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum (AK3U), Kemenakertrans RI;*
- *Auditor Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Kemenakertrans RI.*
- *Certified Talent Management;*
- *Certified Professional Human Resources;*
- *Enterprise Risk Management Associate Professional (ERMAP), Enterprise Risk Management Academy, Singapore;*
- *Expert Occupational Safety and Health (AK3U), Republic of Indonesia Ministry of Manpower and Transmigration;*
- *Auditor of Occupational Safety and Health Management System (SMK3), RI Ministry of Manpower and Transmigration.*

Publikasi *Publication*

- *Yin & Yang dan Kepemimpinan Politik Strategis. Pearson Education South Asia Pte. Ltd. ISBN 978-981-06-8283-5. (2010);*
- *Profil Angka Kematian Komunitas di antara Penduduk Miskin Perkotaan: Survei Kematian Berbasis Masyarakat dan Studi Kasus Kelurahan Ancol, Jakarta Utara, Indonesia. ISBN 978-4-904516-17-1. ISSN 0917-6543 (2013).*
- *Yin & Yang and Strategic Political Leadership. Pearson Education South Asia Pte. Ltd. ISBN 978-981-06-8283-5. (2010);*
- *Profile of Community Death Events among Urban Poor Residents: Community-based Mortality Survey and Case Study in Ancol Village, North Jakarta, Indonesia. ISBN 978-4-904516-17-1. ISSN 0917-6543 (2013).*

Struktur Organisasi Divisi Risk Management & QSSHE Assurance

Risk Management & QSSHE Assurance Division Organizational Structure

Perseroan menyadari bahwa pengelolaan manajemen risiko harus diterapkan di semua unit kerja, dimana setiap karyawan memiliki peranan dalam mengelola dan memastikan penerapan manajemen risiko. Untuk mendukung hal tersebut dibuat suatu Struktur Organisasi Pengelolaan Risiko di Perseroan yang terdiri dari:

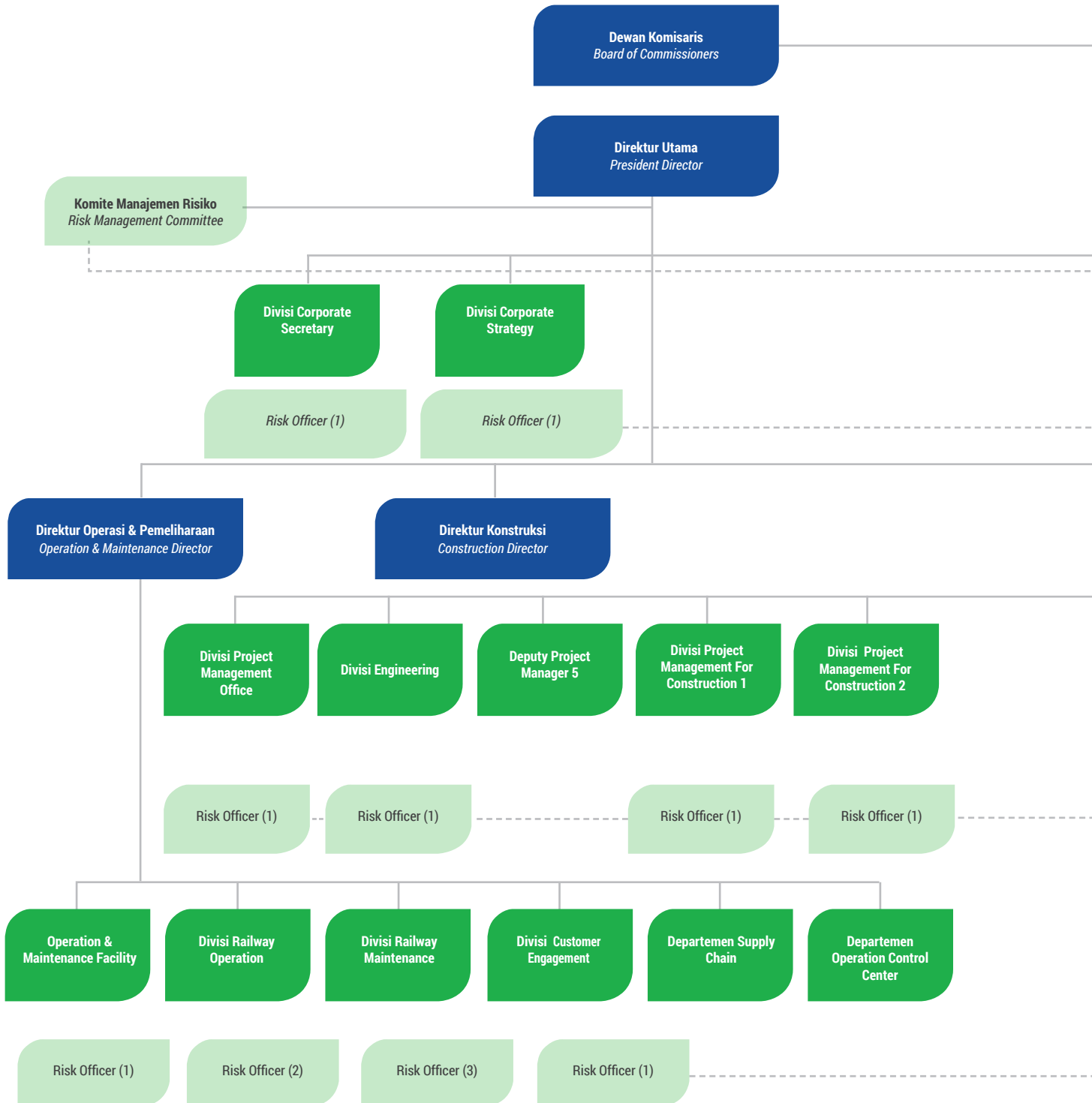
- Komite Pemantau Risiko & Sekuriti di tingkat Dewan Komisaris
- Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi
- Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* sebagai penanggung jawab implementasi Kebijakan Manajemen Risiko
- Pemilik Risiko/Unit Pengelola Risiko yang ditetapkan di tingkat Divisi/Departemen
- *Risk Officers* yang terdapat di tiap unit kerja setingkat Divisi/Departemen
- Divisi *Internal Audit* sebagai unit yang melakukan pengawasan dan assurance terhadap proses Manajemen Risiko

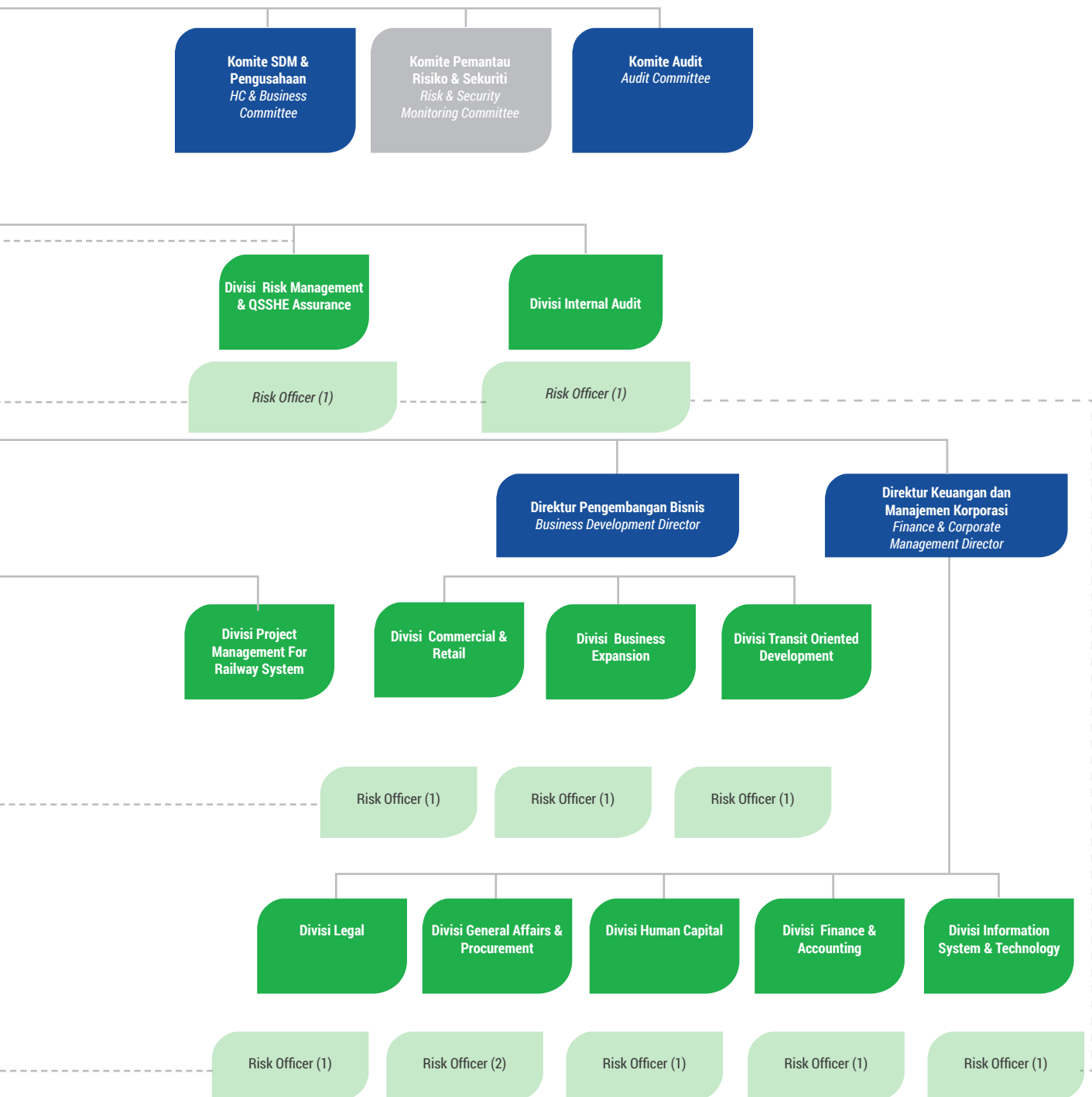
The Corporation realizes that risk management must be implemented in all work units, where each employee has a role in managing and ensuring the implementation of risk management. To support this, a Risk Management Organizational Structure in the Corporation was formed, consisting of the following:

- *Risk & Security Monitoring Committee on the Board of Commissioners level*
- *Risk Management Committee on the Directors level*
- *Risk Management & QSSHE Assurance Division as a unit responsible for implementing Risk Management Policy*
- *Risk Owner or Risk Management Unit determined at the Division Department level*
- *Risk Officers in each work unit on the Division / Department level*
- *Internal Audit Division as a unit that carries out supervision and assurance of the Risk Management process*

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN RISIKO Risk Management Organizational Structure

Berdasarkan Peraturan Direksi No. PER/033/BOD-MRT/XI/2018
Based on Director's Regulation No. PER/033/BOD-MRT/XI/2018





Figur 6.16
 Figure 6.16

Perseroan memiliki Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti yang terpisah dengan Komite Audit. Hal ini merupakan kebijakan yang telah diperhitungkan, mengingat Manajemen Risiko berperan bukan hanya mengelola potensi dampak negatif dalam pencapaian tujuan Perseroan, namun juga mengeksplorasi potensi dan peluang-peluang positif untuk meningkatkan nilai Perseroan dan pendekatan pengelolaan risiko tersebut mempunyai orientasi rentang waktu ke masa depan yang cukup jauh untuk dapat membangun kesiapan dan kapasitas organisasi dalam menjaga nilai Perseroan. Komite Pemantau Risiko dan Sekuriti diketuai oleh salah satu Komisaris Perseroan.

The Corporation has a Risk Monitoring and Security Committee that is separate from the Audit Committee. This was a calculated policy, given that Risk Management has other roles beyond managing potential negative impact on Corporate targets, which was exploring positive prospects and opportunities to increase the Corporate value, and this risk management approach has a relatively long term future orientation to build organizational readiness and capacity in guarding the Corporate value. The Risk Monitoring and Security Committee is led by one of the Corporate Commissioners.

Pembentukan Divisi Risk Management and QSSHE Assurance

Establishment of the Risk Management and QSSHE Assurance Division

Agar pengelolaan risiko di lingkungan Perseroan dapat terjaga dengan baik, Direksi membentuk Divisi *Risk Management and QSSHE Assurance*. Divisi ini mengalami perubahan fungsi di mana pada tahun sebelumnya memiliki tugas sebagai Divisi *Risk, Quality, and Safety Management*. Perubahan ini dimaksudkan menambahkan aspek *security, health, and environment* dalam lingkup tugasnya.

To ensure proper risk management in the Corporate environment, the Directors formed a Risk Management & QSSHE Assurance Division. This division experienced a change in functions, as it operated as the Risk, Quality, and Safety Management Division in the previous year. This change meant adding security, health, and environment aspects to its job scope.

Hingga akhir tahun 2019, Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* memiliki 13 karyawan dengan rincian penempatan dan pelaksanaan tugas sebagai berikut:

As of the end of 2019, the Risk Management & QSSHE Assurance Division had 13 employees with the following details on placements and task executions:

| Jabatan Position | Jumlah Karyawan Number of Employees |
|--|--|
| Kepala Divisi <i>Risk Management & QSSHE Assurance</i> Head of Risk Management & QSSHE Assurance Division | 1 |
| Kepala Departemen <i>Risk Management</i> Head of the Risk Management Department | 1 |
| Kepala Departemen <i>QSSHE Assurance</i> Head of the QSSHE Assurance Department | 1 |
| <i>Risk Management Specialist</i> | 3 |
| <i>Quality Management System Specialist</i> | 2 |
| <i>Safety Health Environment Assurance Specialist</i> | 5 |
| Jumlah Total | 13 orang persons |

Tabel 6.89
Table 6.89

Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko

Risk Management Professional Certification

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan pengelolaan manajemen risiko, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* hingga akhir tahun 2019.

Professional certification became an important aspect for auditors to understand developments in risk management, especially with regards to compliance with regulations and industry updates. The following is a list of professional certifications held by employees of the Risk Management & QSSHE Assurance Division by the end of 2019.

| Jenis dan Level Sertifikasi <i>Type and Level of Certification</i> | Jumlah Karyawan Divisi Risk Management & QSSHE Assurance yang Memiliki Sertifikasi <i>Number of Employees in the Risk Management & QSSHE Assurance Division with the certification</i> | Komposisi Terhadap Jumlah Karyawan Divisi Risk Management & QSSHE Assurance <i>Composition of the Number of Employees in the Risk Management & QSSHE Assurance Division</i> |
|---|---|--|
| ERMAP | 6 | 46% |
| CRMP | 4 | 31% |
| BCMCP | 1 | 8% |
| AK3U | 7 | 54% |
| Auditor SMK3 | 4 | 31% |
| Lead Auditor ISO 9001:2015 | 2 | 15% |
| Lead Auditor ISO 14001:2015 | 1 | 8% |
| Lead Auditor ISO 45001:2018 | 1 | 8% |
| P3K | 3 | 23% |
| Jumlah Total | 29 | 224% |

Tabel 6.90
Table 6.90

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum.

The Corporation is committed to increase the level of professional certifications in the Risk Management & QSSHE Assurance Division for employees with or without professional certifications.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab, Serta Wewenang *Functions, Duties and Responsibilities, and Authority*

Sekilas uraian tugas dan fungsi Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* adalah sebagai berikut:

A brief description of the duties and functions of the Risk Management & QSSHE Assurance Division is as follows:

Memastikan terlaksananya pengelolaan manajemen risiko dan QSSHE (kegagalan proses internal, kesalahan pengelolaan sumber daya manusia, sistem, dan lain-lain) maupun yang berdampak pada kelangsungan bisnis, termasuk kegiatan konsultasi guna memastikan kelancaran kegiatan operasional Perseroan agar terhindar dari kerugian atau risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan bisnis Perseroan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Ensuring the implementation of risk management and QSSHE (failure of internal processes, mismanagement of human resources, systems, etc.) as well as those that impact business continuity, including consulting activities, to ensure the Corporate operational activities run smoothly in order to prevent losses or risks that will threaten the Corporation's business continuity, with the following duties and responsibilities:

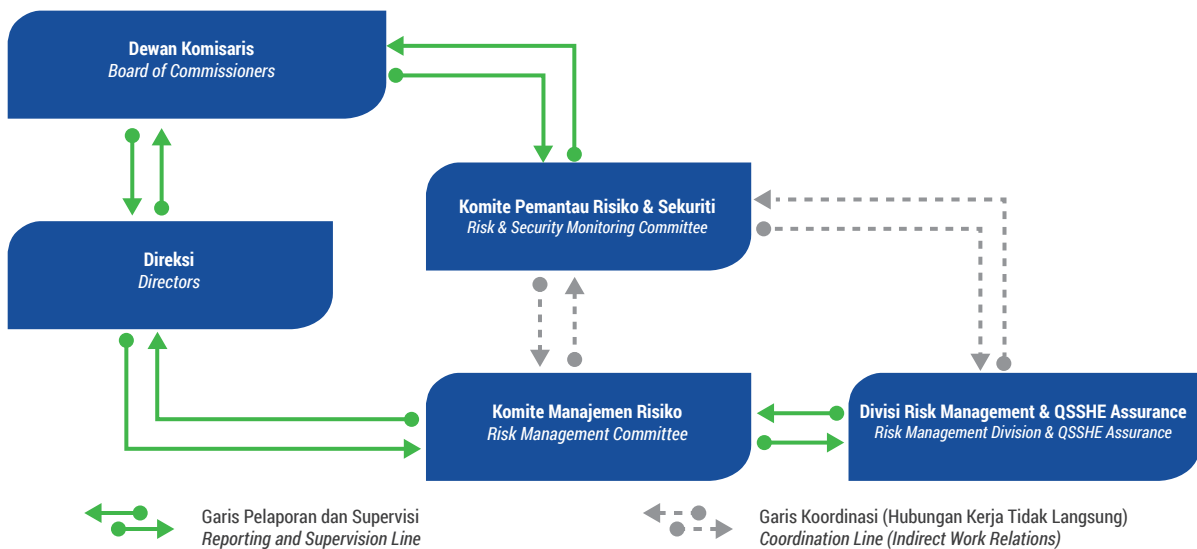
1. Memimpin proses pengembangan sistem manajemen risiko dan QSSHE Perseroan
2. Memimpin proses perencanaan, pengendalian, dan pemantauan kegiatan manajemen risiko dan QSSHE dari kegiatan operasional Perseroan yang berpotensi berisiko kepada Perseroan sesuai dengan standar yang ditetapkan
3. Menyusun strategi implementasi, kerangka manajemen, infrastruktur, sistem pemantauan dan pelaporan, serta mekanisme evaluasi & pengukuran efektivitas
4. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pemantauan manajemen risiko dan QSSHE dari kegiatan operasional Perseroan

1. Lead the process of developing a Corporate risk management and QSSHE system
2. Lead the process of planning, controlling, and monitoring risk management and QSSHE activities of the Corporation's operational activities that potentially risk the Corporation in accordance with the established standards
3. Develop an implementation strategy, management framework, infrastructure monitoring and reporting system as well as a effectiveness evaluation and measurement mechanism
4. Evaluate and report the results of risk management and QSSHE monitoring activities of the Corporate operational activities

5. Memastikan terlaksananya pengelolaan proses manajemen risiko, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan manajemen risiko
6. Memastikan terlaksananya penilaian risiko insidental serta pelaporan hasil penilaian risiko insidental
7. Memastikan terlaksananya pengelolaan kegiatan desain kebijakan dan standar QSSHE Perseroan, *project and operational safety review*, inspeksi dan investigasi kecelakaan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan manajemen QSSHE.
8. Memastikan tersedianya standar dan sistem QSSHE

5. Ensure the implementations of risk management processes, the implementation of risk management monitoring and reporting
6. Ensure the implementation of incidental risk assessments and reporting of incidental risk assessment results
7. Ensure the implementation of management of the Corporate QSSHE policy and standard design activities, project and operational safety reviews, accident inspection & investigation, implementation of monitoring and reporting of QSSHE management.
8. Ensure the availability of QSSHE standards and systems

Hubungan dengan Organ Lain *Relationships with Other Organs*



Figur 6.17
Figure 6.17

Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* memiliki garis pelaporan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko yang termasuk di dalamnya:

1. Menyampaikan laporan profil risiko Perseroan secara berkala kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko;
2. Memberi masukan kepada Komite Manajemen Risiko mengenai besaran atau eksposur risiko maksimum untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan;
3. Melakukan pengkajian terhadap usulan aktivitas/ transaksi usaha tertentu apabila dipandang perlu oleh Direktur dan Komite Manajemen Risiko;
4. Mengkaji secara berkala kecukupan dan kelayakan dari Kebijakan, Pedoman, dan Strategi Penerapan Manajemen Risiko serta menyampaikan rekomendasi perubahannya kepada Komite Manajemen Risiko.

The *Risk Management & QSSHE Assurance Division* has a reporting line to the *Directors and Risk Management Committee* which includes:

1. Submit periodic Corporate risk profile reports to the *Directors and Risk Management Committee*;
2. Provide input to the *Risk Management Committee* regarding the amount or maximum risk exposure to be included in the *Work Plan and Budget of the Corporation*;
3. Review specific proposed business activities/transactions if deemed necessary by the *Directors and the Risk and Monitoring Committee*;
4. Periodically review the adequacy and properness of the *Risk Management Policies, Guidelines, and Implementation Strategy* as well as communicate their recommendations for change to the *Risk Management Committee*.

Sedangkan Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* memiliki garis koordinasi (hubungan kerja tidak langsung) dengan Komite Pemantau Risiko & Sekuriti yaitu :

1. Menyampaikan informasi mengenai manajemen risiko Perseroan kepada Komite Pemantau Risiko & Sekuriti (jika diperlukan) berdasarkan hasil laporan kepada Komite Manajemen Risiko;
2. Berkoordinasi dengan Sekretaris Komite Pemantau Risiko dalam menyusun laporan pengawasan manajemen risiko Perseroan sebagaimana diatur pada Piagam Komite Pemantau Risiko.

Whereas the *Risk Management & QSSHE Assurance Division* has a coordination line (indirect working relationship) with the *Risk & Security Monitoring Committee*, which covers:

1. Submitting information about the Corporate risk management to the *Risk & Security Monitoring Committee* (if needed) based on the results of the report to the *Risk Management Committee*;
2. Coordinating with the Secretary of the *Risk Monitoring Committee* in preparing the risk management supervision report of the Corporation as regulated in the *Risk Monitoring Committee Charter*.

| Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material | Jumlah Karyawan yang mengikuti Number of Participants |
|--|--|--|
| Pelatihan Hard Skills Hard Skills Training | Pelatihan 2 Hari Refreshment CRMP 2-Day Workshop Refreshment CRMP | 1 orang 1 person |
| Pelatihan Hard Skills Hard Skills Training | 8th International Railway Summit dan Pelatihan Perkeretaapian (Training Institute, Shastri Park) 8th International Railway Summit and Railway Training (Training Institute, Shastri Park) | 1 orang 1 person |
| Pelatihan Hard Skills Hard Skills Training | Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII National Risk Management Professional Conference VII | 1 orang 1 person |
| Pelatihan Hard Skills Hard Skills Training | Konferensi Risk Management : Embracing GRC in Industry 4.0 Risk Management Conference : Embracing GRC in Industry 4.0 | 2 orang 2 persons |
| Pelatihan Hard Skills Hard Skills Training | Pelatihan (In House) Behaviour Based Safety (In House) Behaviour Based Safety Training | 6 orang 6 persons |
| Pelatihan Hard Skills Hard Skills Training | Pelatihan (In House) Sustainability Report (In House) Sustainability Report Training | 3 orang 3 persons |
| Pelatihan Soft Skills Soft Skills Training | Pelatihan Executive Management Development Program (EMDP) Seri Managing Business - Inspiring Leadership : Becoming High Performing Leader Training of Executive Management Development Program (EMDP) Managing Business Series - Inspiring Leadership : Becoming High Performing Leader | 1 orang 1 person |
| Pelatihan Hard Skills Hard Skills Training | Pelatihan ISO Series : SOP Writing and Improvement Training of ISO Series : SOP Writing and Improvement | 2 orang 2 persons |
| Pelatihan Soft Skills Soft Skills Training | Pelatihan Leadership Becoming an Effective Leader and Manager Training of Leadership Becoming an Effective Leader and Manager | 1 orang 1 person |
| Pelatihan Soft Skills Soft Skills Training | Pelatihan Leadership Development Program (LDP) Seri Managing People - Leader As Coach Training of Leadership Development Program (LDP) Managing People Series - Leader As Coach | 2 orang 2 persons |
| Pelatihan Soft Skills Soft Skills Training | Pelatihan Leadership Development Program Seri Managing Task Training of Leadership Development Program Managing Task Series | 2 orang 2 persons |
| Pelatihan Soft Skills Soft Skills Training | Pelatihan Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) Training of Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance) | 5 orang 5 persons |
| Pelatihan Soft Skills Soft Skills Training | Pelatihan Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Basic) Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Basic) | 3 orang 3 persons |
| Pelatihan Hard Skills Hard Skills Training | Pelatihan Penanggulangan Kebakaran (Mengelola dan Mengatasi Kebakaran Menggunakan Hydrant) Fire Fighting Training (Managing and Managing Fires using Hydrant) | 1 orang 1 persons |

| Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Materi Pendidikan dan Pelatihan <i>Education and Training Material</i> | Jumlah Karyawan yang mengikuti <i>Number of Participants</i> |
|---|--|---|
| Pelatihan Hard Skills <i>Hard Skills Training</i> | Pelatihan <i>Probity Audit</i> <i>Training of Probity Audit</i> | 1 orang <i>1 person</i> |
| Pelatihan Hard Skills <i>Hard Skills Training</i> | Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001 <i>Training of Anti Bribery Management System Based on ISO 37001</i> | 1 orang <i>1 person</i> |
| Pelatihan Soft Skills <i>Soft Skills Training</i> | Pelatihan <i>The 7 Habits of Highly Effective People Signature Edition 4.0</i> <i>Training of The 7 Habits of Highly Effective People Signature Edition 4.0</i> | 1 orang <i>1 person</i> |
| Pelatihan Soft Skills <i>Soft Skills Training</i> | Pelatihan <i>Understanding International Project Finance</i> <i>Training of Understanding International Project Finance</i> | 1 orang <i>1 person</i> |
| Pelatihan Hard Skills <i>Hard Skills Training</i> | Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum <i>Extention of Decree on Appointment of the General Occupational Safety and Health Expert</i> | 2 orang <i>2 persons</i> |
| Pelatihan Hard Skills <i>Hard Skills Training</i> | Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum <i>Issuance of Decree on Appointment of the General Occupational Safety and Health Expert</i> | 1 orang <i>1 person</i> |
| Pelatihan Hard Skills <i>Hard Skills Training</i> | Perpanjangan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum <i>Extention of Decree on Appointment of the General Occupational Safety and Health Expert</i> | 1 orang <i>1 person</i> |
| Pelatihan Soft Skills <i>Soft Skills Training</i> | <i>Leadership Program on Six Sigma (Final Project Evaluation)</i> <i>Leadership Program of Six Sigma Final Project Evaluation</i> | 3 orang <i>3 persons</i> |
| Pelatihan Hard Skills <i>Hard Skills Training</i> | Sertifikasi <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> <i>Certification of Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> | 2 orang <i>2 persons</i> |
| Pelatihan Hard Skills <i>Hard Skills Training</i> | Pelatihan Pembahasan Sistem Manajemen Pengukuran Kinerja dengan Korn Ferry <i>Workshop on Management of Performance Measurement Discussion System with Korn Ferry</i> | 2 orang <i>2 persons</i> |
| Pelatihan Soft Skills <i>Soft Skills Training</i> | Pelatihan <i>Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> <i>Training of Managing Performance Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 5 orang <i>5 persons</i> |
| Pelatihan Soft Skills <i>Soft Skills Training</i> | Pelatihan <i>Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Basic)</i> <i>Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Basic)</i> | 3 orang <i>3 persons</i> |

Tabel 6.91

Table 6.91

Adapun rincian pengembangan kompetensi yang diikuti karyawan Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The details of the competency development activities the members of the Risk Management Division & QSSHE Assurance partook in throughout 2019 are as follows:

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|---|--|--|--|
| Ernie Widianty Rahardjo | <i>Hard Skills</i> | <i>Workshop Pembahasan Sistem Manajemen Pengukuran Kinerja dengan Korn Ferry</i> <i>Workshop on Management of Performance Measurement System Discussion with Korn</i> | 18 Juli 2019/ Jakarta, Indonesia <i>July 18, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Korn Ferry |
| Ernie Widianty Rahardjo | <i>Hard Skills</i> | <i>Pelatihan (In House) Behaviour Based Safety</i> <i>In House Behaviour-Based Safety Training</i> | 18 September 2019/ Jakarta, Indonesia <i>September 18, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | SGS Academy |
| Ernie Widianty Rahardjo | <i>Hard Skills</i> | <i>Pelatihan Executive Coaching - Leader As Coach Batch 1</i> <i>Executive Coaching - Leader As Coach Batch 1 Training</i> | 9, 29, 30 Oktober 2019/Jakarta, Indonesia <i>October 9, 29, 30, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Loop Institute of Coaching |
| Ernie Widianty Rahardjo | <i>Hard Skills</i> | <i>8th International Railway Summit dan Pelatihan Perkeretaapian (Training Institute, Shastri Park)</i> <i>8th International Railway Summit and Railroad Training (Training Institute, Shastri Park)</i> | 18 - 22 November 2019 / India <i>November 18-22, 2019 / India</i> | IRITS Events Ltd dan Delhi Metro Rail Corporation Ltd. |
| Ernie Widianty Rahardjo | <i>Hard Skills</i> | <i>8th International Railway Summit dan Pelatihan Perkeretaapian (Training Institute, Shastri Park)</i> <i>8th International Railway Summit</i> | 5 - 6 Desember 2019/Bali, Indonesia <i>December 5-6, 2019 / Bali, Indonesia</i> | ERMA (Enterprise Risk Management Academy) |
| Ernie Widianty Rahardjo | <i>Soft Skills</i> | <i>Pelatihan Executive Management Development Program (EMDP) Seri Managing Business - Inspiring Leadership : Becoming High Performing Leader</i> <i>Training of Executive Management Development Program (EMDP), Managing Business-Inspiring Leadership series: Becoming a High-Performing Leader</i> | 16 - 17 Desember 2019/Jakarta, Indonesia <i>December 16-17, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Asian Leadership Centre |
| Ernie Widianty Rahardjo | <i>Hard Skills</i> | <i>Pelatihan (In House) Sustainability Report</i> <i>(In House) Behaviour Based Safety Training</i> | 19 Desember 2019 <i>December 19, 2019</i> | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Gita Septianingsih | <i>Soft Skills</i> | <i>Program Leadership Six Sigma Final Project Evaluation Program</i> <i>Leadership program of Six Sigma Final Project Evaluation Program</i> | 7 - 9 Februari 2019 / Bogor, Indonesia <i>February 7-9, 2019 / Bogor, Indonesia</i> | Unotalent |
| Gita Septianingsih | <i>Hard Skills</i> | <i>Pelatihan Leadership Becoming an Effective Leader and Manager</i> <i>Leadership Training: Becoming an Effective Leader and Manager</i> | 25-26 Juni 2019/ Jakarta, Indonesia <i>June 25-26, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | QB Leadership Center |
| Gita Septianingsih | <i>Hard Skills</i> | <i>Pelatihan 2-Hari Refreshment CRMP</i> <i>2-Day CRMP Refreshment Workshop</i> | 1 - 2 Agustus 2019/ Bandung, Indonesia <i>August 1-2, 2019</i> | RAP Asia Consulting |

| Nama dan Jabatan Name and Position | Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Tempat/Tanggal Place/Date | Penyelenggara Organizer |
|---------------------------------------|--|--|---|--|
| Gita Septianingsih | Hard Skills | Pelatihan Pembahasan Sistem Manajemen Pengukuran Kinerja dengan Korn Ferry <i>Workshop on Management of Performance Measurement System Discussion with Korn Ferry</i> | 19 Juli 2019/ Jakarta, Indonesia <i>July 19, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Korn Ferry |
| Gita Septianingsih | Hard Skills | Pelatihan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis ISO 37001 <i>Training on ISO 37001 Based Anti-Bribery Management System</i> | 19 - 20 Agustus 2019/ Bandung, Indonesia <i>August 19-20, 2019</i> | CRMS Indonesia |
| Gita Septianingsih | Soft Skills | Pelatihan <i>Leadership Development Program Seri Managing Task Batch 2</i> <i>Training of Leadership Development Program of the Managing Task Batch 2 series</i> | 16 - 17 September 2019, 23 Oktober 2019 dan 12 November 2019 <i>September 16-17, 2019, 23 Oktober 2019 dan 12 November 2019</i> | Precena Strategic Partners |
| Gita Septianingsih | Hard Skills | Pelatihan (<i>In House</i>) <i>Behaviour Based Safety Training of (In House) Behaviour Based Safety</i> | 19 September 2019/ Jakarta, Indonesia <i>September 19, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | SGS Academy |
| Gita Septianingsih | Hard Skills | Pelatihan <i>Understanding International Project Finance</i> <i>Understanding International Project Finance Training</i> | 20 - 22 November 2019/ Jakarta, Indonesia <i>November 20-22, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | International Project Finance Association (IPFA) |
| Gita Septianingsih | Soft Skills | Pelatihan <i>Leadership Development Program (LDP) Seri Managing People - Leader As Coach</i> <i>Leadership Development Program (LDP) of the Managing People: Leader as Coach Series</i> | 10 - 11 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 10-11, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Asian Leadership Centre |
| Gita Septianingsih | Hard Skills | Pelatihan (<i>In House</i>) <i>Sustainability Report Training of (In House) Sustainability Report</i> | 19 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 19, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Anggandanu Dwi Pramestyo | Soft Skills | Program <i>Leadership Six Sigma Final Project Evaluation Program</i> <i>Leadership program of Six Sigma Final Project Evaluation Program</i> | 7 - 9 Februari 2019/ Bogor, Indonesia <i>February 7-9, 2019 / Bogor, Indonesia</i> | Unotalent |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|---|--|---|-------------------------------------|
| Anggandanu Dwi Pramestyo | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Leadership Development Program Seri Managing Task Batch 1 Leadership Development Program of Managing Task Batch 1 series</i> | 10 - 11 September 2019, 16 Oktober 2019 dan 07 November 2019/Jakarta, Indonesia <i>September 10-11, 2019, October 1, 2019, and November 7, 2019</i> | Precena Strategic Partners |
| Anggandanu Dwi Pramestyo | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan (<i>In House</i>) <i>Behaviour Based Safety Training of (In House) Behaviour Based Safety</i> | 19 September 2019/ Jakarta, Indonesia <i>September 19, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | SGS Academy |
| Anggandanu Dwi Pramestyo | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan <i>Probity Audit Training of Probity Audit</i> | 11 - 13 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 11-13, 2019</i> | Lembaga Pengembangan Fraud Auditing |
| Anggandanu Dwi Pramestyo | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Leadership Development Program (LDP) Seri Managing People - Leader As Coach Leadership Development Program (LDP) of the Managing People: Leader As Coach Series</i> | 3 - 4 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 3-4, 2019</i> | Asian Leadership Centre |
| Anggandanu Dwi Pramestyo | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan (<i>In House</i>) <i>Sustainability Report Training of In House Sustainability Report</i> | 19 Desember 2019 / Jakarta, Indonesia <i>December 19, 2019</i> | PT MRT Jakarta (Perseroda) |
| Bagas Novendra Mulyabitama | <i>Hard Skills</i> | Sertifikasi <i>Certified Risk Management Professional (CRMP) Certified Risk Management Professional (CRMP) Certification</i> | 11 - 15 Februari 2019/ Jakarta, Indonesia <i>February 11-15, 2019</i> | RAP Asia Consulting |
| Bagas Novendra Mulyabitama | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>The 7 Habits of Highly Effective People Signature Edition 4.0 Training of The 7 Habits of Highly Effective People: Signature Edition 4.0</i> | 17-19 Juli 2019/ Bogor, Indonesia <i>July 17-19, 2019 / Bogor, Indonesia</i> | Dunamis Organization Services |
| Bagas Novendra Mulyabitama | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance) Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 18 - 19 November 2019/ Jakarta, Indonesia <i>November 18-19, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|---|---|---|--|
| Bagas Novendra Mulyabitama | <i>Hard Skills</i> | Konferensi Nasional Profesional Manajemen Risiko VII <i>National Risk Management Professional Conference VII</i> | 28 - 29 November 2019/ Semarang, Indonesia <i>November 28-29, 2019 / Semarang, Indonesia</i> | "Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko" |
| Fhonna Armelia Caezara | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan ISO Series : SOP Writing and Improvement <i>ISO Series Training: SOP Writing and Improvement</i> | 11-12 Juli 2019/ Tangerang, Banten <i>July 11-12, 2019 / Tangerang, Banten</i> | "Phitagoras Training and Consulting" |
| Fhonna Armelia Caezara | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Basic) Batch 1 <i>Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Basic) Batch 1</i> | 11 - 13 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 11-13, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | "Precena Strategic Partners" |
| Ivana Ameta Putri | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan ISO Series : SOP Writing and Improvement <i>ISO Series Training: SOP Writing and Improvement</i> | 11-12 Juli 2019/ Tangerang, Banten <i>July 11-12, 2019 / Tangerang, Banten</i> | "Phitagoras Training and Consulting" |
| Ivana Ameta Putri | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Basic) Batch 1 <i>Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Basic) Batch 1</i> | 11 - 13 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 11-13, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | "Precena Strategic Partners" |
| Ivana Ameta Putri | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan (In House) Behaviour Based Safety Training of (In House) Behaviour Based Safety | 18 September 2019/ Jakarta, Indonesia <i>September 18, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | SGS Academy |
| Ivana Ameta Putri | <i>Hard Skills</i> | Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum <i>Issuance of Appointment Decree (SKP) for General K3 Expert</i> | Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Upaya Riksa Patra |
| Maria Winda Anggreni S | <i>Soft Skills</i> | Program Leadership Six Sigma Final Project Evaluation Program <i>Leadership program of Six Sigma Final Project Evaluation</i> | 7 - 9 Februari 2019/ Bogor, Indonesia <i>February 7-9, 2019 / Bogor, Indonesia</i> | Unotalent |
| Maria Winda Anggreni S | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan (In House) Behaviour Based Safety Training of (In House) Behaviour Based Safety | 18 September 2019/ Jakarta, Indonesia <i>September 18, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | SGS Academy |

| Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Jenis Pendidikan dan Pelatihan <i>Type of Education and Training</i> | Tempat/Tanggal <i>Place/Date</i> | Penyelenggara <i>Organizer</i> |
|--|---|---|---|--|
| Maria Winda Anggreni S | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> <i>Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 17-19 Juli 2019/Bogor, Indonesia <i>July 17-19, 2019 / Bogor, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |
| Maria Winda Anggreni S | <i>Hard Skills</i> | Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum <i>Issuance of Appointment Decree (SKP) for General K3 Expert</i> | Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Upaya Riksa Patra |
| Nirmala | <i>Hard Skills</i> | Sertifikasi <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> <i>Certified Risk Management Professional (CRMP) Certification</i> | 11 - 15 Februari 2019/ Jakarta, Indonesia <i>February 11-15, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | RAP Asia Consulting |
| Nirmala | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Basic) Batch 2</i> <i>Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Basic) Batch 2</i> | 11-12 Juli 2019/ Tangerang, Banten <i>July 11-12, 2019 / Tangerang, Banten</i> | Phitagoras Training and Consulting |
| Nirmala | <i>Hard Skills</i> | Konferensi <i>Risk Management : Embracing GRC in Industry 4.0</i> <i>Risk Management Conference: Embracing GRC in Industry 4.0</i> | 05 - 06 Desember 2019/ Bali, Indonesia <i>December 5-6, 2019 / Bali, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |
| Ovvyasa Wayka Putri | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan <i>(In House) Behaviour Based Safety Training of (In House) Behaviour Based Safety</i> | 11-12 Juli 2019/ Tangerang, Banten <i>July 11-12, 2019 / Tangerang, Banten</i> | ERMA (Enterprise Risk Management Academy) |
| Ovvyasa Wayka Putri | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> <i>Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 11 - 13 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 11-13, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |
| Sayid Adnan | <i>Hard Skills</i> | Pelatihan Penanggulangan Kebakaran (Mengelola dan Mengatasi Kebakaran Menggunakan Hydrant) <i>Fire Fighting Training (Managing and Managing Fires using Hydrant)</i> | 29 November 2019/ Jakarta, Indonesia <i>November 29, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta |
| Sayid Adnan | <i>Soft Skills</i> | Pelatihan <i>Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> <i>Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 4 - 5 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December, 4 - 5, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |

| Nama dan Jabatan Name and Position | Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training | Tempat/Tanggal Place/Date | Penyelenggara Organizer |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Sayid Adnan | Hard Skills | Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum <i>Issuance of Appointment Decree (SKP) for General K3 Expert</i> | Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Upaya Riksa Patra |
| Septio Wahyudi | Soft Skills | Pelatihan <i>Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> <i>Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 4 - 5 Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December, 4 - 5, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Precena Strategic Partners |
| Septio Wahyudi | Hard Skills | Penerbitan Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum <i>Issuance of Appointment Decree (SKP) for General K3 Expert</i> | Desember 2019/ Jakarta, Indonesia <i>December 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | Upaya Riksa Patra |
| Zulfi Rahman Hakim | Hard Skills | Pelatihan <i>Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> <i>Training of Managing Task Effectively Using PDCA Cycle (Advance)</i> | 20 - 22 November 2019/ Jakarta, Indonesia <i>November 20-22, 2019 / Jakarta, Indonesia</i> | International Project Finance Association (IPFA) |

Tabel 6.92
Table 6.92

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Risiko Tahun 2019

Brief Report on the Implementation of Risk Management Duties in 2019

Pada kuartal I 2019, Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* memfasilitasi penyusunan dan penetapan Selera Risiko & Toleransi Risiko Perseroan oleh Direksi serta mengadakan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kesadaran risiko di level Direksi serta Kepala Divisi.

In the first quarter of 2019, the Risk Management & QSSHE Assurance Division facilitated the preparation and determination of the Corporate Risk Appetite & Risk Tolerance by the Directors and held workshops to increase risk awareness at the Directors and Division Heads levels.

Setiap tahun, Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* memastikan terlaksananya pengelolaan risiko, pelaksanaan monitoring, dan pelaporan manajemen risiko melalui pendampingan unit kerja dalam menyusun *Risk Register* per Semester dan *Risk Monitoring* per Triwulan serta menyampaikan *Top Risk* setiap bulan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

Each year, the Risk Management & QSSHE Assurance Division ensures the implementation of risk management, implementation of risk management monitoring and reporting through work unit assistance in preparing the Quarterly Risk Register and Quarterly Risk Monitoring and submitting the Top Risk every month to the Directors and the Risk Management Committee.

Pada bulan Agustus 2019, sebagai salah satu upaya peningkatan budaya risiko di Perseroan, Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* melakukan kegiatan Diskusi Panel Manajemen Risiko dengan mengundang Pemangku Kepentingan eksternal Perseroan seperti Direksi dan Komisaris BUMD serta pemangku kepentingan terkait, dengan tema kegiatan "Peran Manajemen Keberlangsungan Usaha untuk Kelangsungan Perusahaan". Selain itu, *Divisi Risk Management & QSSHE Assurance* juga mengadakan kegiatan Kompetisi Risiko pada bulan September sampai dengan Oktober 2019 dengan melibatkan karyawan di setiap stasiun.

In August 2019, as one of the efforts to improve risk culture in the Corporation, the Risk Management & QSSHE Assurance Division conducted activities such as the Risk Management Panel Discussion by inviting external Corporate stakeholders such as the Directors and Commissioners of ROEs and related stakeholders, with an activity theme of Business Continuity Management's Role on Corporate sustainability. In addition, the Risk Management & QSSHE Division also held a Risk Competition activity in September to October 2019 which involved employees in every station.

AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT

Untuk memastikan pengelolaan Perseroan berjalan dengan optimal dan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, diperlukan sebuah proses audit internal mencakup audit atas operasional proyek dan keuangan Perseroan. Perseroan menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian internal berbasis risiko berdasarkan Standar Prosedur Operasi Audit Internal yang disusun dengan mengacu kepada Piagam Audit Internal.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 pasal 343 tentang perlunya Pembentukan Komite Audit dan Internal Audit pada BUMD, serta Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tanggal 7 Oktober 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Perseroan membentuk Divisi Audit Internal sebagai organ pendukung yang penting untuk menjamin tercapainya tujuan.

To ensure that the management of the Corporation runs optimally and in accordance with the applicable laws and regulations, an internal audit process is needed and that includes auditing the Corporate project operations and finances. The Corporation implements a risk-based internal control and supervision system based on the Internal Audit Operating Procedure Standards which are prepared with reference to the Internal Audit Charter.

In accordance with Law No.23 of 2014, article 343, concerning the need for the Establishment of the Audit Committee and Internal Audit in ROEs, as well as DKI Jakarta Provincial Governor Decree No. 96 of 2004 dated October 7, 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regionally Owned Enterprises (ROE) within the DKI Jakarta Provincial Government area, the Corporation established an Internal Audit Division as an important supporting organ to ensure the achievements of objectives.



Gambar. 6.4. Proses Audit Internal MRT Jakarta
Image. 6.4. MRT Jakarta Internal Audit Process

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL

THE PARTY THAT APPOINTS AND DISMISSES THE INTERNAL AUDIT DIVISION HEAD

Dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan telah dilaksanakan, Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung terhadap Direktur Utama, di mana Kepala Divisi Audit Internal diangkat oleh Direktur Utama dengan mekanisme internal yang berlaku di Perseroan. Untuk mendukung pelaksanaan Audit Internal di Perseroan, kepala dan anggota Unit Kerja Divisi Audit Internal telah dilengkapi oleh sertifikasi/kualifikasi audit internal.

In order to ensure that the management of the Corporation has been carried out, the Internal Audit Division is directly accountable to the President Director, in which the Head of the Internal Audit Division is appointed by the President Director with an internal mechanism that applies in the Corporation. To support the implementation of Internal Audit in the Corporation, the head and members of the work units of the Internal Audit Division have been equipped with internal audit certifications / qualifications.

PROFIL KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL

PROFILE OF THE INTERNAL AUDIT DIVISION HEAD

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK/44/BOD-MRT/VI/2017, Direktur Utama mengangkat Andy Revy Rohadian sebagai Kepala Divisi Audit Internal

Based on Directors Decree No. SK / 44 / BOD-MRT / VI / 2017, the President Director appoints Andy Revy Rohadian as the Internal Audit Division Head.



Andy Revy Rohadian

Kepala Divisi Audit Internal (Menjabat sejak 2017 – Sekarang)
Head of Internal Audit Division (Served since 2017 – now)

Kewarganegaraan *Citizenship*

Warga Negara Indonesia *Indonesian*

Usia *Age*

53 Tahun *53 Years*

Domisili *Domicile*

Ciluar, Bogor Indonesia *Ciluar, Bogor Indonesia*

Tempat dan Tanggal Lahir *Place and Date of Birth*

Pontianak, 23 Maret 1966 *Pontianak, March 23 1966*

Riwayat Pendidikan *Educational History*

- Sarjana Ekonomi, *Accounting*, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 1996
- *Bachelor of Economics, Accounting, State College of Accountancy, 1996*

Riwayat Pekerjaan *History of Employment*

- Kepala Subdirektorat Investigasi dan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan, Januari 2016-Februari 2017, BPKP
- *Head of Sub Directorate of Investigation and Settlement of Constraints to Smooth Development, January 2016-February 2017, BPKP*
- September 2014 - January 2016 Kepala Subdirektorat Pengawasan Lembaga Pemerintah Lainnya dalam Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Deputi Pengawas Lembaga Pemerintah: Politik, Sosial, dan Keamanan, BPKP - Jakarta.
- *September 2014 - January 2016 Head of Sub-Directorate for Supervision of Other Governmen tInstitutions in the Politics, Social and Security Sector, Deputy Supervisor of Government Institutions: Political, Social and Security, BPKP - Jakarta.*
- Januari 2013 - Agustus 2014: Kepala Subdirektorat Investigasi dan Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan (IHKP) - Badan Usaha Milik Negara, Deputi Investigasi, BPKP - Jakarta
- *January 2013-August 2014: Head of Sub Directorate of Investigation and Settlement of Smooth Development Barriers (IHKP) - State - Owned Enterprises, Deputy Investigation, BPKP - Jakarta*

Sertifikasi *Certification*

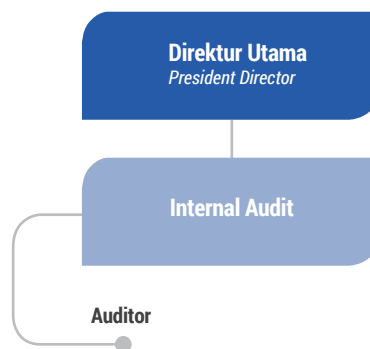
- 2018, *Enterprise Risk Management Certified Professional.*
- 2018, *Enterprise Risk Management Certified Professional.*
- 2017, *Institute of Internal Auditor International Conference, Sydney*
- 2017, *Institute of Internal Auditor International Conference, Sydney*
- 2016, *Certified Accountant (CA)*
- 2016, *Certified Accountant (CA)*
- 2013, *Certified Forensic Auditor (CFrA)*
- 2013, *Certified Forensic Auditor (CFrA)*
- 2002, *Certified Fraud Examiner (CFE)*
- 2002, *Certified Fraud Examiner (CFE)*

STRUKTUR ORGANISASI AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Berikut struktur organisasi Divisi Audit Internal yang menggambarkan fungsi-fungsi yang berada di dalamnya.

The following is the organizational structure of the Internal Audit Division that describes the functions within it.



Figur. 6.18
Figure. 6.18

Struktur organisasi Divisi Audit Internal ditetapkan sesuai Keputusan Direksi No. 213 Tahun 2019.

The Internal Audit Division's organizational structure is determined in accordance with Directors Decree No. 213 of 2019.

Hingga akhir tahun 2019, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Audit Internal sebanyak 8 orang.

As of the end of 2019, there were 8 (eight) employees in the Internal Audit Division.

| Jabatan Position | Jumlah Karyawan Number of Employee |
|--|---------------------------------------|
| Kepala Divisi Audit Internal Head of Internal Audit Division | 1 |
| Auditor | 6 |
| Petugas Kendali Dokumen dan Administrasi Document and Administrative Control Specialist | 1 |
| Jumlah Total | 8 |

Tabel. 6.92
Table. 6.92

PERSYARATAN KEAHLIAN DAN KECERMATAN PROFESIONAL

PROFESSIONAL SKILLS AND ACCURACY REQUIREMENTS

Audit Internal haruslah dilaksanakan oleh auditor internal yang baik secara individu ataupun secara kolektif, mempunyai kecakapan profesional yang memadai dan kecermatan yang saksama untuk bidang tugasnya. Tanggung jawab Divisi Audit Internal untuk memenuhi standar kecakapan profesionalisme dengan mempertimbangkan penugasan tenaga Auditor internal, yang memenuhi syarat tuntutan tugas baik dari segi pendidikan, kemampuan teknis, luas cakupan, dan kompleksitas tugas Audit Internal tersebut. Pemenuhan kebutuhan tenaga auditor yang mempunyai kecakapan sesuai dengan variasi bidang kerja dan disiplin ilmu yang menjadi tugas dari Divisi Audit

Internal audits must be carried out by internal auditors who individually or collectively have sufficient professional skills and meticulousness for their area of work. The responsibility of the Internal Audit Division is to meet the professional proficiency standards by considering the appointments of internal auditors, who meet the requirements of the tasks in terms of education, technical ability, scope and complexity of the Internal Audit tasks. Meeting the need for auditors who have the skills in accordance with the variety of work fields and disciplines required by the Internal Audit Division, and if necessary can be carried out by experts from outside the Corporation. As such, the Corporation has tasked the Audit Team, which

Internal, bila perlu dapat dilaksanakan melalui tenaga ahli dari luar. Untuk itu, Perseroan menugaskan Tim Audit yang terdiri dari Pengawas Tim Audit, Ketua Tim Audit, serta anggota Tim Audit yang berpengalaman dan ahli sehingga terlaksana supervisi yang baik mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan audit, pelaporan audit, dan pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Persyaratan jabatan Auditor pada Divisi Audit Internal tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.053 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unit Kerja di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).

consists of the Audit Team Supervisors, Audit Team Head, an experienced member of the Audit Team, and an expert so as to ensure the implementation of proper supervision from planning to audit execution, audit reporting, and follow-up monitoring of audit results.

The requirements for the position of Auditor in the Internal Audit Division are stated in Directors Decree No. 053 of 2010 concerning Job Description Work Unit in PT MRT Jakarta (Perseroda)'s Environment.

SERTIFIKASI PROFESI AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT PROFESSIONAL CERTIFICATION

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Divisi Audit Internal hingga akhir tahun 2019.

Professional certification is an important aspect for auditors to understand audit developments, especially related to compliance with regulations and industrial developments. The following are the professional certifications held by the Internal Audit Division employees as of the end of 2019.

| Jenis dan Level Sertifikasi Type & Level of Certification | Jumlah Karyawan Divisi Internal Audit yang Dimiliki Number of Employees of the Internal Audit Division | Jumlah Karyawan Divisi Internal Audit Number of Employees of the Internal Audit Division |
|--|---|---|
| Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Dasar <i>Basic Qualified Internal Audit Certification</i> | 3 | 43% |
| Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Lanjutan <i>Advanced Level Qualified Internal Audit Certification</i> | 1 | 14% |
| Sertifikasi <i>Qualified Internal Audit</i> Tingkat Manajerial <i>Managerial Level Qualified Internal Audit Certification</i> | 1 | 14% |
| Jumlah Amount | 5 | 71% |

Tabel. 6.93
Table. 6.93

Jumlah karyawan Divisi Audit Internal yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak 5 orang atau 71% dari jumlah keseluruhan auditor pada Divisi Audit Internal. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan Divisi Audit Internal, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

There are 5 (five) employees in the Internal Audit Division with professional certifications, or 71% of the total auditors in the Internal Audit Division. The Corporation is committed to improve the professional certification level of employees in the Internal Audit Division, referring to those with and without professional certifications.

PIAGAM AUDIT INTERNAL: PEDOMAN DAN TATA TERTIB

THE INTERNAL AUDIT CHARTER: GUIDELINES AND RULES

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Piagam Audit Internal merupakan salah satu penjabaran dari pedoman pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan disusun untuk menjadi norma-norma acuan kerja bagi Divisi Audit Internal agar dapat bekerja secara profesional sesuai dengan tujuan penugasannya.

In carrying out its duties, the Internal Audit Division is guided by the Internal Audit Charter that has been established by the Board of Commissioners and Directors. The Internal Audit Charter is one of the elaborations of the guidelines to implement GCG and was compiled to become the norms of reference for the Internal Audit Division to be able to work professionally in accordance with the objectives of the assignments.

Piagam Audit Internal ini ditandatangani tanggal 19 November 2011 dan telah diperbarui melalui Surat Keputusan Direktur Utama No. 001 Tahun 2015 tentang Internal Audit Manual PT MRT Jakarta (Perseroda) dan telah diperbaharui tanggal 25 Januari 2016.

Piagam Audit Internal antara lain berisi:

1. Kedudukan dan Fungsi Audit Internal
2. Tugas dan Tanggung Jawab Audit Internal
3. Wewenang Audit Internal
4. Lingkup Kerja Audit Internal
5. Hubungan Kerja dan Koordinasi
6. Persyaratan Pelaksanaan dan Pelaporan Audit
7. Kode etik

This Internal Audit Charter was signed on November 19, 2011 and has been updated through the Decree of the President Director No. 001 of 2015 concerning PT MRT Jakarta (Perseroda) Internal Audit Manual and was updated on January 25, 2016.

The Internal Audit Charter includes:

1. *Internal Audit Position and Function*
2. *Internal Audit Duties and Responsibilities*
3. *Internal Audit Authority*
4. *Internal Audit Work Scope*
5. *Work Relations and Coordination*
6. *Audit Implementation and Reporting Requirements*
7. *Code of Ethics*

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Dalam Piagam Audit Internal yang dimiliki Perseroan, tugas dan tanggung jawab Divisi Audit Internal dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memastikan/asuransi pelaksanaan proses bisnis di Unit-unit Kerja telah sesuai dengan kebijakan Direksi, peraturan perundang-undangan, dan didukung akuntabilitas yang baik.
2. Memastikan asuransi pelaksanaan manajemen risiko yang terintegrasi di setiap proses pada unit-unit kerja.
3. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian intern dan penerapan tata kelola perusahaan serta penilaian kesesuaian dengan ketentuan/kebijakan peraturan Perseroan yang berlaku.
4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap efektivitas sistem dan prosedur serta rencana investasi perseroan, sehubungan dengan risiko Perseroan.
5. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kegiatan yang dilakukan dalam bidang:
 - a. Administrasi dan Keuangan.
 - b. Operasional dan Proyek.
 - c. Investasi dan belanja modal.
 - d. SDM dan Organisasi.
 - e. Manajemen Risiko.
 - f. Kegiatan Perseroan lainnya.
6. Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan berkala Unit Kerja di lingkungan Perseroan.
7. Melakukan penilaian dan memastikan agar kegiatan dari setiap unit kerja Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, seperti:
 - a. Informasi penting Perseroan terjamin keamanannya.
 - b. Fungsi Sekretaris Perusahaan dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif.
 - c. Penyajian laporan Perseroan dan kegiatan-kegiatan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan.

In the Internal Audit Charter owned by the Corporate, the duties and responsibilities of the Internal Audit Division can be described as follows:

1. *Ensure that the implementation of business processes in the Work Units are in accordance with the Directors' policies, Regulations, and supported by good accountability.*
2. *Ensure / guarantee the implementation of integrated risk management in every process in the work units.*
3. *Carry out inspections / audits of the running of the internal control system and the implementation of GCG as well as the assessment of compliance with the applicable Corporate regulations / policies.*
4. *Analyze and evaluate the effectiveness of the Corporate system and procedures as well as the Corporate investment plan, in relation with the Corporate risks.*
5. *Supervise and examine activities carried out in the fields of:*
 - a. *Administration and Finance.*
 - b. *Operations and Projects.*
 - c. *Investment & capital expenditure.*
 - d. *HR and Organization.*
 - e. *Risk management.*
 - f. *Other company activities.*
6. *Conduct tests and assessments of periodic work unit reports within the Corporate environment.*
7. *Conduct assessments and ensure that the activities of Corporate work unit are carried out in accordance with the predetermined provisions, such as:*
 - a. *The safety and security of important Corporate information are guaranteed.*
 - b. *The function of the Corporate Secretary in controlling information can be carried out effectively.*
 - c. *The presentations of Corporate reports and Corporate activities are in compliance with statutory regulations.*

8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan perseroan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sudah sesuai dengan perkembangan Perseroan dan biaya usaha.
9. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Divisi *Internal Audit* mempunyai kewenangan dalam hal:

1. Menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
2. Akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi tempat atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data, dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
3. Melakukan verifikasi dan uji keandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diauditnya.
4. Bermitra dengan Komite Audit untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.

Audit Internal tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direviu/diaudit, tetapi tanggung jawab Internal Audit adalah pada penilaian dan analisis atas aktivitas tersebut.

8. Monitor and evaluate the audit findings and submit suggestions for improvements in the implementations of Corporate activities and systems / policies / rules that are relevant with Corporate developments and business costs.

9. Carry out special tasks within the scope of internal control assigned by the President Director.

In carrying out its duties and responsibilities, the Internal Audit Division has the authority to:

1. Develop, change and implement internal audit policies including determining procedures and scopes of audit works.
2. Access all documents, records, personal and physical, place information on audit objects it works on, to obtain data and information relating to the implementation of its duties.
3. Verify and test the reliability of the information obtained, in relation with evaluating the effectiveness of the audited system.
4. Partner with the Audit Committee to provide information relating to the implementations of tasks.

Internal Audit does not have implementation authority and responsibility over reviewed / audited activities, but bears the responsibility of assessing and analyzing of those activities.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDIT INTERNAL

INTERNAL AUDIT COMPETENCY DEVELOPMENT

Perseroan memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Divisi Audit Internal dalam rangka meningkatkan kompetensi karyawan. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Divisi Audit Internal.

Tentang daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Audit Internal sepanjang tahun 2019 dapat dilihat pada Bab Profil Perseroan dalam laporan tahunan ini.

The Corporation facilitates the implementation of development programs for the Internal Audit Division in order to improve employee competencies. These programs are expected to have a positive impact on the productivity and effectiveness of the Internal Audit Division's performance.

The list of training and competency improvement activities the Head of the Internal Audit Division participated in throughout 2019 can be seen in the Corporate Profile chapter of this annual report.

LAPORAN SINGKAT PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERNAL TAHUN 2019

A BRIEF REPORT ON INTERNAL AUDIT DUTY IMPLEMENTATIONS IN 2019

Di tahun 2019, Divisi Audit Internal melaksanakan program kerja pengawasan yang rencana dan realisasinya adalah:

In 2019, the Internal Audit Division carried out a supervisory work program with the following plans and realization:

| Rencana Plan | Realisasi Realization | Pencapaian Achievement |
|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 23 Asurans 23 Assurance | 27 Laporan 27 Reports | 117,39% |
| 24 Konsultansi 24 Consultants | 64 Laporan 64 Reports | 266,67% |

Tabel. 6.94
Table. 6.94

Di awal tahun 2019, Divisi Audit Internal melaksanakan program kerja pengawasan dengan rencana sebanyak 19 asuransi dan terdapat revisi di pertengahan Tahun 2019 menjadi 23 asuransi dengan realisasinya sebanyak 27 laporan dengan tingkat pencapaian 117,39%, dengan detail rincian pelaksanaan tugas seperti tabel di bawah ini.

At the beginning of 2019, the Internal Audit Division carried out a supervisory work program with a plan of 19 Assurance and there was a revision in mid 2019, changing it to 23 Assurance, with a realization of 27 reports with an achievement level of 117.39%, with a detailed description of the task implementations in the table below:

| No. | RAT | No. | Realisasi 2019 2019 Realization |
|----------|--|----------|---|
| A | Judul Asurans Title of Assurance | A | No. Lap Judul Asuransi Title of Insurance |
| 1. | Asurans atas Pengadaan Barang <i>Assurance for Procurement of Goods</i> | 1. | 02/INA/2019 Laporan Asuransi atas Pengadaan Seragam <i>Assurance Report of Uniform Procurement</i> |
| 2. | Asurans atas Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran <i>Assurance for Whistle Blowing System</i> | 2. | 01/INA/2019 Laporan WBS <i>WBS report</i> |
| 3. | Asurans atas Kesiapan Operasi MRT <i>Assurance for MRT Operational Readiness</i> | 3. | 04/INA/2019 Audit Kesiapan Operasi <i>Operational Readiness Audit</i> |
| 4. | Asurans atas Kontrak 108 (Rolling Stock) <i>Assurance for Contract 108 (Rolling Stock)</i> | 4. | 11/INA/2019 Reviu Pembayaran Pengamanan GMT <i>GMT Security Payment Review</i> |
| 5. | Asurans atas Kontrak CMCS <i>Assurance for CMCS Contracts</i> | 5. | 12/INA/2019 Laporan Asurans atas CMCS <i>CMCS Assurance Report</i> |
| 6. | Asurans atas Kontrak OMCS <i>Assurance for OMCS Contracts</i> | 6. | 09/INA/2019 Laporan Asurans atas OMCS <i>OMCS Assurance Report</i> |
| 7. | Asurans atas Divisi PMO - Variation Order (CP 103) <i>Assurance for PMO Division</i> - Variation Order (CP 103) | 7. | 17/INA/2019 Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan PT Quantum Convex Int'l: Penyelenggaraan Kegiatan Peresmian MRT Jakarta <i>Audit Report of PT Quantum Convex Int'l Financial Report for the Implementation of Jakarta MRT Inauguration Activities</i> |

| No. | RAT | No. | Realisasi 2019 2019 Realization |
|-----|--|-----------------|---|
| 8. | Asurans atas Divisi PMO - Variation Order (CP 104) Assurance for PMO Division - Variation Order (CP 104) | 8. 07/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans atas <i>Financing Changes</i> CP 104 Assurance Report of <i>Financing Changes</i> CP 104 |
| 9. | Asurans atas Divisi PMO - Variation Order (CP 105) Assurance for PMO Division - Variation Order (CP 105) | 9. 08/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans atas <i>Financing Changes</i> CP105 Assurance Report of <i>Financing Changes</i> CP 105 |
| 10. | Asurans atas Divisi Keuangan & Akuntansi Assurance for Finance & Accounting Division | 10. 25/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans Kegiatan Divisi Keuangan dan Akuntansi Assurance Results Report of Finance & Accountability Activities Division |
| 11. | Asurans atas Divisi PMO - IPC Assurance for PMO Division - IPC | 11. 14/INA/2019 | Lesson Learned Pelaksanaan Proyek MRT Jakarta Fase 1 Lesson Learned Implementation of the Jakarta Phase 1 MRT Project |
| 12. | Asurans atas Divisi Engineering Assurance for Engineering Division | 12. 23/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans Kesiapan Proyek MRT Jakarta Fase 2 Assurance Report of MRT Jakarta Project Readiness Asset Results Phase 2 |
| 13. | Asurans atas Divisi Information System & Technology Assurance for the Information System & Technology Division | 13. 16/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans atas STT Revenue Handling (Farebox) Assurance Report of STT Revenue Handling (Farebox) |
| 14. | Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Evaluation of Internal Control Systems | 14. 13/INA/2019 | Kajian atas Pergub No 67 Tahun 2019 Review on Pergub No. 67 of 2019 |
| 15. | Penilaian Eksternal atas Quality Assurance Review External Assessment of Quality Assurance Review | 15. 06/INA/2019 | Evaluasi atas Kontrak BUJP Evaluation of the BUJP Contract |
| 16. | Penilaian atas Fraud Risk Fraud Risk Assessment | 16. 05/INA/2019 | Audit Kas di Stasiun Senayan Cash Audit at Senayan Station |
| 17. | Asurans atas Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi dan Masa Pemeliharaan pada Fase 1 Assurance for Construction Supervision and Maintenance Period in Phase 1 | 17. 19/INA/2019 | Laporan Asurans atas Pembayaran Tagihan Kegiatan Proyek MRT Jakarta pada Bulan Oktober dan November 2018 Report on Jakarta MRT Project Activities Bill Payments in October and November 2018 |
| 18. | Asurans atas Divisi Human Capital Assurance for the Human Capital Division | 18. 24/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans Kegiatan Divisi Human Capital Assurance Report of Human Capital Division Activities |

| No. | RAT | No. | Realisasi 2019 2019 Realization |
|-----|---|-----------------|--|
| 19. | Asurans atas Divisi <i>Railway Maintenance Assurance for the Railway Maintenance Division</i> | 19. 21/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans AFC PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>AFC PT MRT Jakarta Assurance Reports</i> |
| 20. | Asurans atas Kegiatan <i>Enterprise Resource Planning System Assurance for Enterprise Resource Planning System Activities</i> | 20. 15/INA/2019 | Laporan Hasil Audit atas WBS <i>Assurance Report of WBS</i> |
| 21. | Asurans <i>Conformity</i> atas Divisi <i>Risk, Quality, and Safety Management Assurance Conformity for the Risk, Quality, and Safety Management Division</i> | 21. 20/INA/2019 | Laporan Hasil Evaluasi atas <i>Risk Conformity</i> ISO 31000 2018 <i>Evaluation Report of Risk Conformity ISO 31000 2018</i> |
| 22. | <i>Self Assesment</i> atas Tata Kelola Perusahaan <i>Self Assessment of Good Corporate Governance</i> | 22. 10/INA/2019 | Evaluasi Perhitungan dan Pemotongan Pph Pasal 21 Bukan Pegawai <i>Evaluation of Calculation and Withholding Article 21 PPH Not Employees</i> |
| 23. | Audit atas permintaan dan perintah Direksi/Komisaris/ Komite Audit <i>Audit at the request and order of the Board of Directors / Commissioners / Audit Committee</i> | 23. 03/INA/2019 | Kajian Periklanan <i>Advertising Review</i> |
| | | 24. 18/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans atas Denda Keterlambatan Pembayaran Sewa <i>Gedung Tahun 2019 Assurance Report on Late Payment of Building Leases in 2019</i> |
| | | 25. 22/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans Departemen <i>General Affairs Assurance Report of General Affairs Department</i> |
| | | 26. | Laporan Asurans Pelaksanaan <i>Implementasi Enterprise Resource System (ERP)</i> pada PT MRT Jakarta (Perseroda), dilaksanakan oleh PT RSM Indonesia <i>Assurance Report of the Implementation of the Enterprise Resource (ERP) System in PT MRT Jakarta, conducted by PT RSM Indonesia</i> |
| | | 27. | Laporan Asurans Kontrak & Hasil Pekerjaan CP 108 (<i>Rolling Stock</i>) PT MRT Jakarta (Perseroda), dilaksanakan oleh LAPI ITB <i>Consultancy Assurance of Contracts & Work Results CP 108 (Rolling Stock) PT MRT conducted by LAPI ITB</i> |

Catatan: No Laporan berdasarkan urutan RAT

Tabel. 6.95
Table. 6.95

Selain asurans yang dilakukan secara mandiri, Divisi *Internal Audit* juga menggunakan pihak ketiga untuk melakukan asurans, yaitu: Asuransi Pelaksanaan *Implementasi Enterprise Resource System (ERP)* pada PT MRT Jakarta (Perseroda), yang dilaksanakan oleh PT RSM Indonesia, dan Asuransi Kontrak dan Hasil Pekerjaan CP 108 (*Rolling Stocks*) PT MRT Jakarta (Perseroda), yang dilaksanakan oleh LAPI ITB.

Dalam hal konsultansi, Divisi Audit Internal memiliki target untuk mengeluarkan 24 Konsultansi. Sampai akhir tahun 2019, Divisi Audit Internal telah mengeluarkan 64 laporan konsultansi dengan capaian 266,67% dengan uraian sebagai berikut:

In addition to independently conducted assurances, the Internal Audit Division also appointed third parties to conduct assurances, such as: Assurance of the Implementation of Enterprise Resource System (ERP) on PT MRT Jakarta by PT RSM Indonesia, and Assurance of Contract and Work Results CP 108 (Rolling Stocks) by LAPI ITB.

In terms of consultancy, the Internal Audit Division had a target to issue 24 Consultancies. By the end of 2019, the Internal Audit Division had issued 64 consultancy reports with an achievement of 266.67% with a description of the implementation of the 2019 consultancy tasks as follows:

| No. | Nomor & Judul Laporan Report Number & Title |
|-----|--|
| 1. | IOM No 6 – Reviu VO CA 17 <i>IOM No. 6 - Review VO CA 17</i> |
| 2. | IOM No 7 – Reviu PA CA 16 <i>IOM No. 7 - Review PA CA 16</i> |
| 3. | IOM No 10 – Tindak Lanjut Hasil Reviu VO CA 17 <i>IOM No. 10 - Follow Up Results of VO CA Review 17</i> |
| 4. | IOM No 21 – Divisi HC Skema Biaya Honor <i>IOM No. 21 - HC Division Honor Fees Scheme</i> |
| 5. | IOM No 23 – <i>Transfer of Knowledge</i> terkait Telekomunikasi <i>IOM No. 23 - Transfer of Knowledge related to Telecommunications</i> |
| 6. | IOM No 44 – Asuransi D&O <i>IOM No 44 - D&O Insurance</i> |
| 7. | IOM No 58 – Reviu Addendum SAP Tahap II <i>IOM No 58 - Review Addendum SAP Phase II</i> |
| 8. | IOM No 64 – Evaluasi Atas Informasi dan Sanggahan Pemenang Mitra QR Gate <i>IOM No. 64 - Evaluation of Information and Refutation of the QR Gate Partner Winner</i> |
| 9. | IOM No 67 – Hasil Evaluasi Lanjutan Atas Proses Pengadaan Mitra QR Gate <i>IOM No. 67 - Results of the Continued Evaluation of the Procurement Process of QR Gate Partners</i> |
| 10. | IOM No 89 – Reviu Denda Ketidakpatuhan Avabanindo <i>IOM No. 89 - Review the Avabanindo Non-Compliance Penalty</i> |
| 11. | IOM No 96 – Audit Internal Penambahan Jasa MNC pada <i>Fellowship</i> MRT <i>IOM No. 96 - Internal Audit of the Additional MNC Services in the MRT Fellowship</i> |
| 12. | IOM No 103 - Evaluasi atas Proses Pengadaan Mitra Penyedia Sistem dan Perangkat Keras untuk QR Gate PT MRT Jakarta <i>IOM No. 103 - Evaluation of the Procurement Process of System and Hardware Provider Partners for PR MRT Jakarta QR Gate</i> |
| 13. | IOM No 17a <i>Financing Charges</i> CP 104 dan CP 105 <i>IOM No. 17a Financing Charges CP 104 and CP 105</i> |

| No. | Nomor & Judul Laporan Report Number & Title |
|-----|---|
| 14. | IOM No 22 Reviu atas Pengajuan <i>Variation Order</i> dan penyesuaian harga <i>IOM No. 22 Review of Submission of variation orders and price adjustments</i> |
| 15. | IOM No 27 Pengadaan <i>Spare Part</i> untuk perawatan Kereta <i>IOM No. 27 Procurement of spare parts for train maintenance</i> |
| 16. | IOM No 29 Dokumentasi Berkas RFI dan RWAI <i>IOM No. 29 Documentation on RFI and RWAI files</i> |
| 17. | IOM No 30 Masa Berlaku Kontrak Konsultan CMCS <i>IOM No. 30 Term of Contract of CMCS Consultant</i> |
| 18. | IOM No 31 Evaluasi terhadap KAK Pengadaan Jasa <i>Babysitting</i> untuk Sistem Telekomunikasi Plant (STP) <i>IOM No. 31 Evaluation of the Procurement of Babysitting Services ToR for Plant Telecommunications System (STP)</i> |
| 19. | IOM No. 73 Reviu <i>Draft PM Manual</i> <i>IOM No. 73 Review PM Draft Manual</i> |
| 20. | IOM No. 90 Reviu Pengajuan Kerja Tambah Jasa Manajemen Operasional untuk <i>Sewage Treatment Plant</i> (STP) <i>IOM No. 90 Review of Submission of Operational Management Additional Work for the Sewage Treatment Plant (STP)</i> |
| 21. | IOM No 41 Perhitungan Penyesuaian Harga pada Kontrak Konsultansi <i>IOM No. 41 Calculation of Price Adjustments in Consultancy Contracts</i> |
| 22. | IOM No 47 <i>Draft Amendemen No. 7 Kontrak OMCS</i> <i>IOM No. 47 Draft Amendment No. 7 OMCS Contract</i> |
| 23. | IOM No 61 – Tenaga Ahli untuk Mengkaji Dokumen Pengadaan CP 205 dan CP 206 <i>IOM No. 61 - Experts, to Review Procurement Documents for CP 205 and CP 206</i> |
| 24. | CMCS CA 7 (29 Juli) <i>CMCS CA 7 (July 29)</i> |
| 25. | CMCS CA 8 (30 Oktober) <i>CMCS CA 8 (30 October)</i> |
| 26. | CP 101 CA 18 (30 Oktober) <i>CP 101 CA 18 (October 30)</i> |
| 27. | CP 101 CA 18 (30 Oktober) <i>CP 101 CA 18 (October 30)</i> |
| 28. | CP 101 CA No. 16 (30 Agustus) <i>CP 101 CA No. 16 (August 30)</i> |
| 29. | CP 101 CA No. 17 (15 Oktober) <i>CP 101 CA No. 17 (15 October)</i> |
| 30. | CP 102 CA No. 15 (12 September) <i>CP 102 CA No. 15 (September 12)</i> |

| No. | Nomor & Judul Laporan <i>Report Number & Title</i> |
|-----|---|
| 32. | CP 102 CA 18 (30 Oktober) <i>CP 102 CA 18 (October 30)</i> |
| 33. | CP 102 CA No. 16 (30 Agustus) <i>CP 102 CA No. 16 (August 30)</i> |
| 34. | CP 102 CA No. 17 (15 Oktober) <i>CP 102 CA No. 17 (October 15)</i> |
| 35. | CP 103 CA No. 13 (5 September) <i>CP 103 CA No. 13 (5 September)</i> |
| 36. | CP 103 CA No. 15 (14 Oktober) <i>CP 103 CA No. 15 (October 14)</i> |
| 37. | CP 103 CA No. 16 (30 Oktober) <i>CP 103 CA No. 16 (October 30)</i> |
| 38. | CP 103 CA No. 17 (30 Oktober) <i>CP 103 CA No. 17 (October 30)</i> |
| 39. | CP 104 CA 24 CP 104 (17 Juli 2019) <i>CP 104 CA 24 CP 104 (17 July 2019)</i> |
| 40. | CP 104 CA 25 (5 September 2019) <i>CP 104 CA 25 (5 September 2019)</i> |
| 41. | CP 104 CA 26 CP 104 (13 September 2019) <i>CP 104 CA 26 CP 104 (13 September 2019)</i> |
| 42. | CP 104 CA 27 (25 Oktober) <i>CP 104 CA 27 (October 25)</i> |
| 43. | CP 104 CA 28 (30 Oktober) <i>CP 104 CA 28 (October 30)</i> |
| 44. | CP 105 CA 16 (5 September 2019) <i>CP 105 CA 16 (5 September 2019)</i> |
| 45. | CP 105 CA 25 CP 105 (17 Juli 2019) <i>CP 105 CA 25 CP 105 (17 July 2019)</i> |
| 46. | CP 105 CA 27 (13 September 2019) <i>CP 105 CA 27 (September 13, 2019)</i> |
| 47. | CP 105 CA 28 (30 Oktober) <i>CP 105 CA 28 (October 30)</i> |
| 48. | CP 106 CA 10 (5 September) <i>CP 106 CA 10 (September 5)</i> |

| No. | Nomor & Judul Laporan Report Number & Title |
|-----|--|
| 49. | CP 106 CA 12 (1 November) <i>CP 106 CA 12 (November 1)</i> |
| 50. | CP 107 CA No. 5 (14 Oktober) <i>CP 107 CA No. 5 (October 14)</i> |
| 51. | IOM No. 35 Hasil Observasi atas penggunaan <i>Staff Pass</i> <i>IOM No. 35 Observation results of the use of staff pass</i> |
| 52. | IOM No. 49 – Penyampaian Pendapat atas Sewa Kendaraan Mobil Operasional <i>IOM No. 49 - Submission of Opinions on Operational Vehicle Rentals</i> |
| 53. | IOM No. 70 Penyampaian Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT Quantum Convex Int. atas Penyelenggaraan Kegiatan Peresmian MRT Jakarta <i>IOM No. 70 Submission of Report on the Audit of PT Quantum Convex Int. Financial Report regarding MRT inauguration activities</i> |
| 54. | IOM No. 98 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus WBS <i>IOM No. 98 Follow-Up on Special WBS Examination Results</i> |
| 55. | IOM No. 100 Monitoring Tindak Lanjut Audit FC CP 105 <i>IOM No. 100 Follow Up Monitoring FC CP Audit 105</i> |
| 56. | IOM No. 101 Monitoring Tindak Lanjut Audit FC CP 104 <i>IOM No. 101 Follow Up Monitoring FC CP Audit 104</i> |
| 57. | IOM No. 20 Tanggapan atas <i>Draft Board Manual 2019</i> <i>IOM No. 20 Responses to the 2019 Draft Board Manual</i> |
| 58. | IOM No. 28 Tindak Lanjut keikutsertaan PT MRT Jakarta (Perseroda) dalam Kegiatan Inacraft 2019 Pemprov DKI Jakarta <i>IOM No. 28 Follow up of PT MRT Jakarta's participation in the 2019 Inacraft DKI Jakarta Provincial Government Activity</i> |
| 59. | IOM No. 53 Tanggapan atas Kebijakan JakOne dan JakCard <i>IOM No. 53 Responses to JakOne and JakCard Policies</i> |
| 60. | IOM No. 38 – Evaluasi Penunjukan Kembali Penyedia Jasa <i>Firewall</i> <i>IOM No. 38 - Evaluation of Re-Appointment of Firewall Service Providers</i> |
| 61. | IOM No. 59 – Permohonan Opini IA Perihal Skema Pembayaran Tenaga Ahli <i>IOM No. 59 - Request for Opinion IA Regarding Expert Payment Scheme</i> |
| 62. | IOM No. 63 – Atensi atas Perpanjangan Kontrak Penyedia Jasa Biro Perjalanan <i>IOM No. 63 - Attention on the Extension of Travel Service Provider Contracts</i> |
| 63. | IOM No. 91 – Atensi atas Aset <i>Handover</i> dari OCMJ kepada MRTJ <i>IOM No. 91 - Attention on Asset Handovers from OCMJ to MRTJ</i> |
| 64. | IOM No. 102 – Atensi atas Permohonan Penyaluran Barang <i>Lost & Found</i> Stasiun <i>IOM No. 102 - Attention on Requests for Distribution of Station Lost & Found Goods</i> |

Tabel. 6.96
Table. 6.96

AUDIT EKSTERNAL

EXTERNAL AUDIT

Auditor Eksternal atau Akuntan Perseroan ditunjuk untuk melakukan audit finansial serta untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatasasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Perseroan ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Auditor Eksternal yang ditunjuk harus independen dari pengaruh Direksi, Dewan Komisaris, dan pihak yang berkepentingan di Perseroan. Perseroan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi Auditor Eksternal/Kantor Akuntan Publik sehingga memungkinkan Kantor Akuntan Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasasan dan kesesuaian laporan keuangan Perseroan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia. Kantor Akuntan Publik wajib memberitahu Perseroan bila ada kejadian di Perseroan yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

External auditors or Corporate Accountants are appointed to conduct financial audits and provide independent and objective opinions regarding the fairness, compliance and suitability of the Corporation's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards and applicable laws and regulations. Corporate accountants are appointed by the GMS based on the candidates nominated by the Board of Commissioners. External auditors who are appointed are independent from the influence of the Directors, the Board of Commissioners and interested parties in the Corporation. The Corporation is required to provide all accounting records and supporting data needed to the External Auditor / Public Accounting Firm to enable the Public Accounting Firm to give its opinion on the fairness, compliance and suitability of the Corporation's financial statements with the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK). The Public Accounting Firm is obliged to notify the Corporation if there are incidents in the Corporation that are not in accordance with the applicable laws and regulations.

KEPATUHAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA

COMPLIANCE WITH THE INDONESIAN FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Perseroan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

The management is responsible for the presentation of the Corporation's financial statements and complies with the Indonesian Financial Accounting Standards established by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

PROSEDUR AUDIT EKSTERNAL DAN STANDAR AUDIT

EXTERNAL AUDIT PROCEDURE AND AUDIT STANDARDS

1. Audit atas laporan keuangan Perseroan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
1. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Audit mengandung risiko inherent bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen.
3. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perseroan untuk di reviu oleh badan atau otoritas terkait.
1. Audits of the Corporation's financial statements are done in accordance with the Public Accountant professional standards that cover all audit procedures deemed necessary by the situations.
2. The audits include testing and evaluation of the internal control system, as well as inspections, on the basis of testing, evidences that support amounts and disclosures within the financial statements. Audit will also cover assessments of accounting principles used and significant estimations created by the management, as well assessment of the overall financial statement presentation as regulated by the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the IAI.
1. As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts interviews with the management regarding management statements stated in the financial statements.
2. Audit carries an inherent risk that if there are material errors and irregularities, the KAP will notify the management.
3. The Management approves the KAP examination work paper on the Corporation to be reviewed by the relevant agencies or authorities.

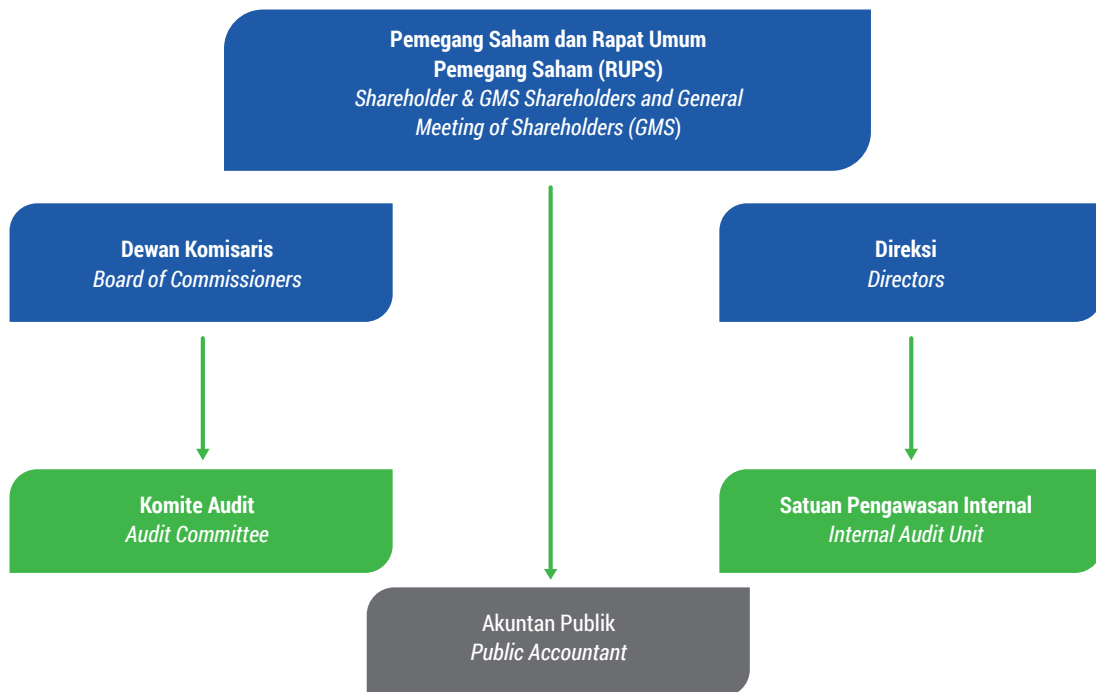
Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

The audit was conducted based on the Professional Standards of Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of the Republic of Indonesia, then the audit is carried out based on the State Financial Examination Standards (SPKN) issued by the Republic of Indonesia's Supreme Audit Institution (BPK RI).

Hubungan Auditor Eksternal dengan organ internal Perseroan dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

The relationships of the external auditor with the Corporation's internal organs can be observed in the chart below.

HUBUNGAN AUDITOR EKSTERNAL DENGAN ORGAN INTERNAL PERSEROAN *Relationship between External Auditor and the Corporation's Internal Organs*



Figur. 6.19
Figure. 6.19

Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik *Mechanism for Appointing a Public Accountant*

Tahapan mekanisme penunjukan KAP:

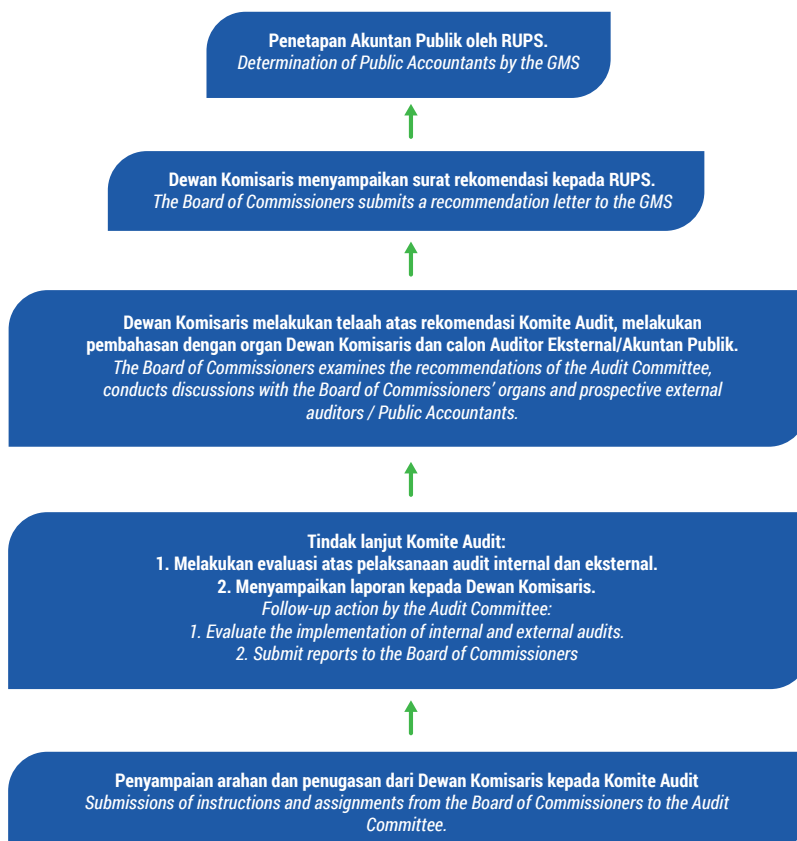
1. Dewan Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon Auditor Eksternal dengan meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa.
2. Dewan Komisaris dapat melakukan penunjukan kembali Auditor Eksternal dengan berdasarkan pada hasil evaluasi atas kinerja Auditor Eksternal untuk melakukan audit atas laporan keuangan.

Stages of the mechanism for the appointment of KAP:

1. *The Board of Commissioners, through the Audit Committee, conducts the process of appointing an external Auditor candidate by requesting the assistance of the Board of Directors in the appointment process in accordance with the provisions of the procurement of goods / services.*
2. *The Board of Commissioners may reappoint an external auditor based on the performance evaluation results of the external auditor in auditing financial statements..*

- | | |
|---|---|
| <p>3. Dewan Komisaris menyampaikan alasan pencalonan tersebut kepada RUPS dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk Auditor Eksternal tersebut.</p> | <p>3. <i>The Board of Commissioners submits the reasons for the nomination to the GMS and the amount of the proposed fee / honorarium for the external auditor.</i></p> |
| <p>4. Usulan kepada RUPS tersebut dapat disampaikan melalui surat tersendiri yang merupakan bagian dari surat tanggapan Dewan Komisaris atas kinerja tahunan Perseroan.</p> | <p>4. <i>Proposals to the GMS can be submitted through a separate letter which is part of the Board of Commissioners' response letter to the Corporation's annual performance.</i></p> |
| <p>5. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal melalui Komite Audit sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.</p> | <p>5. <i>The Board of Commissioners evaluates the performance of external auditors through the Audit Committee in accordance with the applicable regulations and standards.</i></p> |
| <p>6. Untuk proses penunjukan calon Auditor Eksternal dan atau penunjukan kembali Auditor Eksternal yang dilakukan oleh RUPS, Dewan Komisaris cukup memberikan kuasa kepada RUPS untuk menetapkan auditor tersebut.</p> | <p>6. <i>For the process of appointing a prospective external auditor and / or re-appointment of an external auditor conducted by the GMS, the Board of Commissioners is sufficient</i></p> |

MEKANISME PENUNJUKAN HINGGA PENETAPAN AKUNTAN PUBLIK
Public Accountant Appointment to Determination Mechanism by the GMS



Figur. 6.20
Figure. 6.20

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2019

PUBLIC ACCOUNTANT IN 2019

Berdasarkan dengan Nomor Kontrak: Con-1/51/ PRC-MRT/X/2019, Perseroan telah menyetujui penunjukan Kantor Publik Purwanto, Sungkoro & Surja untuk melakukan pekerjaan audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

Based on Contract Number: Con-1 / 51 / PRC-MRT / X / 2019, the Corporation has approved the appointment of Purwanto, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm to conduct general audit work on the 2019 Financial Report. To guarantee independence and quality of the assessment results, the appointed External Auditor may not have a conflict of interest with the Corporation.

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2019

Public Accountant in 2019

| | |
|--|--|
| Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i> | PURWANTONO, SUNGKORO & SURJA |
| Akuntan <i>Accountant</i> | Damestar Hutagalung, CPA |
| Tahun Audit <i>Auditing Year</i> | Tahun Buku 2019 <i>Fiscal Year 2019</i> |
| Periode Penugasan <i>Assignment Period</i> | 31 Desember 2019 <i>December 31, 2019</i> |

Tabel. 6.97
Table. 6.97

AKUNTAN PUBLIK TAHUN 2019

Public Accountant in 2019

| | |
|---------------------------------------|---|
| Jasa <i>Service</i> | Audit atas Laporan Keuangan <i>Audit of Financial Statements</i> |
| Jasa Lainnya <i>Other Services</i> | Jasa asuransi atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2019 dan Jasa asuransi atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2019 <i>Assurance services on the report of compliance with the 2019 legislation and Assurance services on the report on compliance with internal controls in 2019</i> |
| Biaya <i>Cost</i> | Rp670.000.000 (termasuk PPN) <i>Rp670,000,000 (including VAT)</i> |

Tabel. 6.98
Table. 6.98

Laporan Keuangan Perseroan periode 31 Desember 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) mendapatkan opini "Wajar, dalam segala hal yang material" dan telah disampaikan pada Direksi.

The Corporation's financial statement for the year ending on December 31, 2019, has been audited by the public accounting firm (PAF) Purwanto, Sungkoro & Surja (EY Indonesia) and received the opinion of "fair, in all material respects" and has been submitted to the Directors.

DAFTAR AKUNTAN PUBLIK

LIST OF PUBLIC ACCOUNTANTS

Untuk menjaga profesionalitas dan independensi, pemilihan Auditor Eksternal yang dilakukan setiap tahun wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa 1 (satu) Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam) Tahun Buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik (Mitra) maksimal 3 (tiga) Tahun Buku berturut-turut. Guna kebutuhan transparansi, berikut disampaikan daftar Kantor Akuntan Publik, Akuntan, dan biaya yang diberikan dalam mengaudit laporan Perseroan untuk periode 6 (enam) tahun terakhir.

To maintain professionalism and independence, the selection of External Auditor that is conducted every year must meet the provisions of the Minister of Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 concerning Public Accountant Services which stipulates that 1 (one) Public Accounting Firm (KAP) may only audit a maximum of 6 (six) consecutive financial years and with a maximum Public Accountant (Partner) 3 (three) consecutive fiscal years. For the purpose of transparency, the following is a list of Public Accountants, Accountants and fees involved in the audits of the Corporations financial statements in the past 6 (six) years.

AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2019

External Audit for Fiscal Year 2019

| | |
|--|--|
| Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i> | Purwanto, Sungkoro & Surja |
| No. Izin: <i>Permit Number:</i> | 603/KM.1/2015 |
| Akuntan Publik: <i>Public Accountant:</i> | Damestar Hutagalung, CPA |
| No. Izin <i>Permit Number</i> | AP.1609 |
| Jasa <i>Services</i> | Audit atas Laporan Keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Perseroan") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. <i>Audit of the PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Corporation") Financial Statements for the year ending on December 31, 2019.</i> |
| Opini <i>Opinion</i> | Wajar dalam semua hal yang material. <i>Fair in all material things.</i> |
| Jasa Lainnya <i>Other Services:</i> | 1. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2019 2. Jasa asurans atas laporan kepatuhan terhadap pengendalian internal tahun 2019. <i>1. Assurance services for compliance with the 2019 legislation</i> <i>2. Assurance services for the report on compliance with internal control in 2019</i> |
| Biaya Jasa: <i>Service Fee:</i> | Rp670.000.000 (termasuk PPN) <i>Rp670,000,000 (including VAT)</i> |

Tabel. 6.99
Table. 6.99

AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2018

External Audit for Fiscal Year 2018

| | |
|--|--|
| Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i> | Purwantono, Sungkoro & Surja |
| No. Izin: <i>Permit Number:</i> | 603/KM.1/2015 |
| Akuntan Publik: <i>Public Accountant:</i> | Drs. David Sungkoro, CPA |
| No. Izin <i>Permit Number</i> | AP.0691 |
| Jasa <i>Services</i> | Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018. <i>General audit of Financial Statements for Fiscal year 2018.</i> |
| Opini <i>Opinion</i> | Wajar dalam semua hal yang material. <i>Fair in all material things</i> |
| Jasa Lainnya <i>Other Services:</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian <i>Intern.</i> <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control.</i> |
| Biaya Jasa: <i>Service Fee:</i> | Rp581,4 juta <i>Rp581.4 million</i> |

Tabel. 6.100
Table. 6.100

AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2017

External Audit for Fiscal Year 2017

| | |
|--|--|
| Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i> | Purwantono, Sungkoro & Surja |
| No. Izin: <i>Permit Number:</i> | 603/KM.1/2015 |
| Akuntan Publik: <i>Public Accountant:</i> | Drs. David Sungkoro, CPA |
| No. Izin <i>Permit Number</i> | AP.0691 |
| Jasa <i>Services</i> | Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017. <i>General audit of Financial Statements for Fiscal year 2017.</i> |
| Opini <i>Opinion</i> | Wajar dalam semua hal yang material. <i>Fair in all material things.</i> |
| Jasa Lainnya <i>Other Services:</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian <i>Intern.</i> <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control.</i> |
| Biaya Jasa: <i>Service Fee:</i> | Rp508,8 juta <i>Rp508.8 million</i> |

Tabel. 6.101
Table. 6.101

AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2016*External Audit for Fiscal Year 2016*

| | |
|--|--|
| Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i> | Purwantono, Sungkoro & Surja |
| No. Izin: <i>Permit Number:</i> | 603/KM.1/2015 |
| Akuntan Publik: <i>Public Accountant:</i> | E. Batara Manurung, CPA |
| No. Izin <i>Permit Number</i> | AP.0693 |
| Jasa <i>Services</i> | Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2016. <i>General audit of Financial Statements for Fiscal year 2016.</i> |
| Opini <i>Opinion</i> | Wajar dalam semua hal yang material. <i>Fair in all material things</i> |
| Jasa Lainnya <i>Other Services:</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian <i>Intern.</i> <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control.</i> |
| Biaya Jasa: <i>Service Fee:</i> | Rp480 juta <i>Rp480 million</i> |

Tabel. 6.102
*Table. 6.102***AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2015***External Audit for Fiscal Year 2015*

| | |
|--|--|
| Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i> | Purwantono, Sungkoro & Surja |
| No. Izin: <i>Permit Number:</i> | 603/KM.1/2015 |
| Akuntan Publik: <i>Public Accountant:</i> | E. Batara Manurung, CPA |
| No. Izin <i>Permit Number</i> | AP.0693 |
| Jasa <i>Services</i> | Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2015. <i>General audit of Financial Statements for Fiscal year 2015.</i> |
| Opini <i>Opinion</i> | Wajar dalam semua hal yang material. <i>Fair in all material things</i> |
| Jasa Lainnya <i>Other Services:</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian <i>Intern.</i> <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control.</i> |
| Biaya Jasa: <i>Service Fee:</i> | Rp400 juta <i>Rp400 million</i> |

Tabel. 6.103
Table. 6.103



AUDIT EKSTERNAL TAHUN BUKU 2014
External Audit for Fiscal Year 2014

| | |
|--|---|
| Kantor Akuntan Publik <i>Public Accounting Firm</i> | Purwantono, Sungkoro & Surja |
| No. Izin: <i>Permit Number:</i> | 381/KM.1/2010 |
| Akuntan Publik: <i>Public Accountant:</i> | E. Batara Manurung, CPA |
| No. Izin <i>Permit Number</i> | AP.0693 |
| Jasa <i>Services</i> | Audit umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2014. <i>General audit of Financial Statements for Fiscal year 2014..</i> |
| Opini <i>Opinion</i> | Wajar dalam semua hal yang material. <i>Fair in all material things</i> |
| Jasa Lainnya <i>Other Services:</i> | Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan dan Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. <i>Compliance with Regulations and Legislation and Compliance with Internal Control.</i> |
| Biaya Jasa: <i>Service Fee:</i> | Rp335 juta <i>Rp335 million.</i> |

Tabel. 6.104
Table. 6.104

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Direksi BUMD diwajibkan untuk menetapkan sebuah Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan. Sistem Pengendalian Internal ini mencakup antara lain: lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, pengukuran risiko, rencana mitigasi risiko, aktivitas pengendalian, komunikasi dan informasi, serta atau pemantauan.

In accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Corporations, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Governor of DKI Jakarta Provincial Government Decree No. 96 of 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regionally Owned Enterprises (ROEs) within the Government of the Special Capital Region of Jakarta, ROE Directors are required to establish an effective Internal Control System to secure investment and Corporate assets. This Internal Control System includes, among others: the control environment, risk identification, risk measurement, risk mitigation plans, control activities, communication and information, and monitoring.

PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM GUIDELINE

Dalam rangka penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, di tahun 2017 manajemen telah menetapkan Pedoman Sistem Pengendalian Internal melalui Peraturan Direksi No. PER/004/BOD-MRT/VI/2017 tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan PT MRT Jakarta (Persero). Pedoman ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menunjukkan komitmen Perseroan dalam mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan.
2. Pemahaman bagi internal Perseroan tentang kerangka dan manajemen Sistem Pengendalian Internal Perseroan.

In order to apply effective and efficient internal control system, in 2017 the management established the Internal Control System Guideline through Directors' Regulation No. PER / 004 / BOD-MRT / VI / 2017 concerning Guidelines for Internal Control Systems in the PT MRT Jakarta (Persero). This guideline has the following objectives:

1. Showcase the Corporation's commitment to realizing Good Corporate Governance to all stakeholders.
2. Reach the understanding of all internal parties of the Corporation regarding the framework and management of the Corporation's Internal Control System.

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DI LINGKUP PERSEROAN

IMPLEMENTATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM WITHIN THE CORPORATE SCOPE

Direksi Perseroan telah merancang Sistem Pengendalian Internal dengan acuan *Committee of Sponsoring Organization of Threadway Commission (COSO) Framework*. *COSO Internal Control-Integrated Framework (2013)* yang mendefinisikan pengendalian intern sebagai, "A process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of subjectives in the following categories:

- Effectiveness and efficiency of operations.
- Reliability of financial reporting.
- Compliance with applicable laws and regulations.

Definisi di atas dapat diartikan bahwa pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh direksi, manajemen dan pihak lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai guna menjamin pencapaian tujuan perseroan yang efektifitas dan efisiensi, dengan didukung keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan.

Pengembangan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan telah menyesuaikan dengan *COSO Framework* tersebut. 5 (lima) unsur yang diperhatikan Perseroan dalam pengembangan pengendalian internal adalah:

The Corporation's Directors have designed the Internal Control System with reference to the Committee of Sponsoring Organization of Thread-way Commission (COSO) Framework. The COSO Internal Control-Integrated Framework (2013) defines internal control as, "a process, effected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of subjects in the following categories:

- Effectiveness and efficiency of operations.
- Reliability of financial reporting
- Compliance with the applicable laws and regulations.

Based on the definition above, it can be interpreted that intern control is a process that is influenced by the directors, management and other parties and is designed to provide sufficient confidence to ensure the achievement of corporate goals that are effective and efficient, supported by the reliability of financial statements and compliance with laws and regulations.

The development of the Internal Control System in the Corporation has been adjusted to comply with the COSO Framework. The 5 (five) elements that the Corporation considers in developing internal control are:

1. Lingkungan Pengendalian Perusahaan

Perseroan telah mengembangkan dan menciptakan lingkungan pengendalian yang baik melalui pembangunan budaya Perseroan, seperti adanya kesepakatan seluruh karyawan Perseroan akan nilai-nilai Perseroan dan aturan perilaku serta adanya penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan pendelegasian kewenangan dan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan strategi Perseroan, kebijakan SDM yang berbasis kepada kompetensi, dan pengembangan Tata Kelola Perusahaan secara terus menerus.

2. Penilaian Risiko

Guna menjamin adanya sadar risiko pada setiap karyawan Perseroan, Perseroan telah membangun budaya risiko di setiap unsur dan proses utama. Perseroan telah menetapkan Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* sebagai leader dalam pengembangan manajemen risiko, baik itu pada risiko level korporasi maupun unit kerja sehingga tersedia *Risk Register* di masing-masing unit kerja. *Risk Register* ini selalu dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan.

3. Aktivitas Pengendalian

Untuk menjamin bahwa seluruh proses utama Perseroan telah dilakukan secara baik, memenuhi unsur efektivitas, efisiensi, dan dilengkapi dengan akuntabilitas serta pertanggungjawaban yang baik, Perseroan telah melakukan identifikasi proses-proses yang diperlukan dalam pengelolaan Perseroan, baik itu pada Divisi yang bersifat teknis maupun pada Divisi pendukung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap proses pengelolaan telah dilengkapi standar operasi dan prosedur. Standar operasi dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi ini merupakan bagian dari mitigasi risiko dari masing-masing *Risk Register* unit kerja yang bersangkutan. Dalam penyusunan SOP untuk operasi, pemeliharaan dan perawatan MRT Jakarta, Perseroan dibantu oleh Konsultan Internasional.

4. Komunikasi dan informasi

Sebagai Perseroan yang sedang mengerjakan proyek besar, proyek untuk kepentingan publik, manajemen sangat menyadari arti penting komunikasi dan informasi, khususnya komunikasi dan informasi tentang dan jalannya pekerjaan proyek, progress proyek dan dampaknya terhadap pelayanan publik lainnya. Fungsi komunikasi dan informasi dikoordinasikan oleh Divisi *Corporate Secretary*. Hal-hal yang telah dilakukan antara lain adalah membangun, memantau, dan mengevaluasi situs web. Di samping itu, kegiatan lain dilakukan melalui sosialisasi kegiatan proyek baik dengan cara tinjauan langsung kepada masyarakat sekitar jalur proyek maupun melakukan seminar dan konferensi pers.

5. Monitoring

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah berjalan dengan baik, manajemen dan unit-unit kerja terkait diwajibkan melakukan pemantauan dan perbaikan secara terus menerus atas penerapan Sistem Pengendalian Internal. Selain itu, Internal Audit secara terpisah juga melakukan pemantauan terhadap implementasi Sistem Pengendalian Internal. Fungsi pemantauan juga dilakukan Komite Audit dan Auditor Publik, dimana proses audit eksternal yang telah melakukan pemantauan atas implementasi Sistem Pengendalian Internal Perseroan di tahun 2016 adalah Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young).

1. Corporate Control Environment

The Corporation has developed and created good control environment through the development of Corporate Culture, such as the agreement by all Corporate employees about Corporate Values and the arrangement of organizational structure that reflects clear authority and task delegations that align with the Corporate Strategy, human capital policies that that are based on competency, and continuous GCG developments.

2. Risk Assessment

To ensure risk awareness in every employee of the Corporation, the Corporation has built risk culture in every main element and process. The Corporation has appointed the Risk Management & QSSHE Assurance Division as the leader in developing risk management, both on the Corporate and work unit levels that results in the availability of Risk Register in every work unit. Risk Register shall be evaluated every 3 (three) months.

3. Control Activities

To ensure that all Corporate main processes have been carried out properly and fulfilled the effectiveness and efficiency elements and are equipped with good accountability, the Corporation has conducted identification processes need in Corporate Management, both on technical divisions and supporting divisions. This is done to ensure that every management process has been equipped with operation standards and procedures. Operation standards and procedures established by the Directors are part of the risk mitigation of each work unit's Risk Register. In formulating the operational, maintenance, and care SOPs of MRT Jakarta, the Corporation is assisted by international consultants.

4. Communication and information

As a Corporation that is currently handling a major project – one related to public interests – the management completely understands the importance of communication and information, especially information on the running of the project, project progress, and its impacts on other public services. The communication and information function is coordinated by the Corporate Secretary Division. Some of the efforts that have been carried out include building, monitoring, and evaluating the website. In addition, other activities were conducted through socialization of project activities by visiting the community along the project route and conducting seminars and press conferences.

5. Monitoring

To ensure that the Internal Control System has been implemented properly, the management and relevant units are obligated to conduct continuous monitoring and improvements of the Internal Control System applications. In addition, the Internal Audit Division also separately conducts monitoring of the Internal Control System implementation. The monitoring function is also carried out by the Audit Committee and Public Accountant, and the external auditor that conducted monitoring of the Corporate Internal Control System implementation in 2016 was the Purwantono, Sungkoro, & Surja Public Accounting Firm (Ernst & Young).

Untuk memastikan bahwa aktivitas pengendalian pada setiap proses utama telah dilakukan secara baik, Auditor Internal telah melakukan pemetaan tentang proses-proses utama yang telah memiliki SOP yang baik dan yang belum baik. Hasil pemetaan telah disampaikan kepada Direktur Utama dan selanjutnya memerintah kepada pemilik proses untuk segera memperbaiki SOP yang ada. Selain itu, Direksi telah mengeluarkan surat keputusan Direksi tentang SOP untuk SOP, sebagai panduan bagi unit kerja dalam menyusun SOP pada proses-proses yang ada di unit kerjanya.

To ensure that control activities on each main process have been conducted properly, the Internal Auditor has conducted mapping on main processes that have been equipped with satisfactory and unsatisfactory SOPs. The mapping result has been communicated to the President Director, who then directed process owners to improve the current SOPs. In addition, the Directors have issued a Decree of the Directors regarding SOPs for SOPs, as guides for work units in preparing SOPs in the processes in their work units.

PENGENDALIAN ATAS ASPEK OPERASIONAL DAN ASPEK KEUANGAN

CONTROL OVER OPERATIONAL AND FINANCIAL ASPECTS

Terkait aspek operasional, Divisi *Internal Audit* telah melakukan asurans terkait SOP pada unit kerja yang telah direncanakan pada Rencana Audit Tahunan (RAT) 2019.

A description of the control over operational aspects and financial aspects Related to operational aspects, the Internal Audit Division has conducted Assurance related to the SOP in the work units that have been planned in the 2019 Annual Audit Plan (RAT).

Namun, SOP yang belum baik belum dipetakan secara khusus oleh Divisi *Internal Audit*. Pengendalian aspek operasional sampai dengan 31 Desember 2019 masih mengacu kepada jadwal RAT 2019.

However, SOPs that have not been good have not been specifically mapped by the Internal Audit Division. Control over operational aspects as of December 31, 2019 still refers to the 2019 RAT schedule.

| No. Laporan Report Number | Judul Asurans Assurance Title | Unit Kerja Work Unit |
|------------------------------|---|--|
| 01/INA/2019 | Laporan WBS WBS Report | Divisi Information Technology Information Technology Division |
| 02/INA/2019 | Pengadaan Seragam Uniform Procurement | Divisi GA and Procurement GA and Procurement Division |
| 03/INA/2019 | Kajian Periklanan Advertising Review | Divisi Business Development Business Development Division |
| 04/INA/2019 | Audit Kesiapan Operasi Operational Readiness Audit | Divisi PMC1, PMC2, PMRS PMC1 Division, PMC2, PMRS |
| 05/INA/2019 | Audit Kas di Stasiun Senayan Cash Audit at Senayan Station | Divisi Railway Operation Railway Operation Division |
| 06/INA/2019 | Evaluasi atas Kontrak BUJP Evaluation of the BUJP Contract | Departemen Security Security Department |
| 07/INA/2019 | Financing Charges CP 104 Financing Charges CP 104 | Divisi PMO PMO Division |
| 08/INA/2019 | Financing Charges CP 105 Financing Charges CP 105 | Divisi PMO PMO Division |

| No. Laporan Report Number | Judul Asurans Assurance Title | Unit Kerja Work Unit |
|------------------------------|---|--|
| 08/INA/2019 | <i>Financing Charges CP 105 Financing Charges CP 105</i> | Divisi PMO PMO Division |
| 09/INA/2019 | Asurans OMCS <i>OMCS Assurance</i> | Departemen Contract Administration and Vendor Management <i>Department of Contract Administration and Vendor Management</i> |
| 10/INA/2019 | Evaluasi Perhitungan dan Pematangan Pph Pasal 21 Bukan Pegawai <i>Evaluation of Calculation and Withholding Article 21 PPH Not Employees</i> | Divisi Human Capital dan Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>Human Capital Division and Finance and Accounting Division</i> |
| 11/INA/2019 | Reviu Pembayaran Pengamanan GMT <i>GMT Security Payment Review</i> | Divisi GA and Procurement <i>GA and Procurement Division</i> |
| 12/INA/2019 | Asurans CMCS <i>CMCS Assurance</i> | Departemen Engineering <i>Engineering Department</i> |
| 13/INA/2019 | Kajian atas Pergub No 67 Tahun 2019 <i>Review on Pergub No. 67 of 2019</i> | N/A |
| 14/INA/2019 | Lesson Learned Pelaksanaan Proyek MRT Jakarta Fase 1 <i>Lesson Learned Implementation of the Jakarta Phase 1 MRT Project</i> | Direktorat Konstruksi dan Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>Lesson Learned Implementation of the Jakarta Phase 1 MRT Project</i> |
| 15/INA/2019 | Laporan WBS <i>WBS report</i> | Divisi TI <i>IT division</i> |
| 16/INA/2019 | Asurans STT Revenue Handling (Farebox) <i>Assurance STT Revenue Handling (Farebox)</i> | Divisi Railway Operation <i>Railway Operation Division</i> |
| 17/INA/2019 | Laporan Hasil Audit Lap Keuangan PT Quantum Convex Int Penyelenggaraan Kegiatan Peresmian MRT Jakarta <i>Report on PT Quantum Convex Int's Financial Report Audit Results on the Implementation of Jakarta MRT Inauguration Activities</i> | Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>Finance and Accounting Division</i> |
| 18/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans atas Denda Keterlambatan Pembayaran Sewa Gedung Tahun 2019 <i>Assurance Reports on the Late Payments of Building Leases in 2019</i> | Divisi GA and Procurement <i>GA and Procurement Division</i> |
| 19/INA/2019 | Laporan Asurans atas Pembayaran Tagihan Kegiatan Proyek MRT Jakarta pada Bulan Oktober dan November 2018 <i>Assurance Report on Bill Payments for Jakarta MRT Project Activities in October and November 2018</i> | Divisi PMO dan Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>PMO Division and Finance and Accounting Division</i> |

| No. Laporan Report Number | Judul Asurans Assurance Title | Unit Kerja Work Unit |
|------------------------------|--|--|
| 20/INA/2019 | <i>Risk Conformity ISO 31000 2018 ISO 31000 2018 Risk Conformity</i> | Divisi Risk Management & QSSHE Assurance Risk Management & QSSHE Assurance Division |
| 21/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans AFC PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>AFC PT MRT Jakarta Assurance Reports</i> | Divisi PMRS PMRS Division |
| 22/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans Department General Affairs <i>General Affairs Department Assurance Reports</i> | Divisi GA and Procurement GA and Procurement Division |
| 23/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans Kesiapan Proyek MRT Jakarta Fase 2 <i>Assurance Report on MRT Jakarta Phase 2 Project Readiness</i> | Direktorat Konstruksi Directorate of Construction |
| 24/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans Kegiatan Divisi Human Capital <i>Report on Assurance Results of Human Capital Division Activities</i> | Divisi Human Capital Human Capital Division |
| 25/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans Kegiatan Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>Assurance Results Report on Activities of the Finance & Accounting Division</i> | Divisi Keuangan dan Akuntansi Finance and Accounting Division |
| | Laporan Asurans atas Pelaksanaan Implementasi Enterprise Resource System (ERP) pada PT MRT Jakarta (Perseroda), dilaksanakan oleh PT RSM Indonesia <i>Assurance Report of the Enterprise Resource System (ERP) implementation at PT MRT Jakarta, conducted by PT RSM Indonesia</i> | Divisi TI IT division |
| | Laporan Asurans atas Kontrak & Hasil Pekerjaan CP 108 (Rolling Stock) PT MRT Jakarta (Perseroda), dilaksanakan oleh LAPI ITB <i>Report of Assurance of Work Contracts & Results of CP 108 (Rolling Stock) PT MRT Jakarta, conducted by LAPI ITB</i> | Divisi PMRS PMRS Division |

Tabel. 6.105
Table. 6.105

Untuk pengendalian Aspek Keuangan, Divisi Audit Internal juga sudah melakukan asuransi pada Divisi Keuangan dan Akuntansi yang mana berfungsi sebagai lapis kedua untuk bagian keuangan pada 3 Lines of Defense, kita telah melakukan asuransi yakni Kebijakan Anggaran, Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Keuangan, serta untuk SOP dan prosedur Divisi Audit Internal juga melakukan asuransi pada SOP Akuntansi, SOP Asuransi, SOP Anggaran, dan SOP Keuangan pada Divisi Keuangan dan Akuntansi.

For controlling the Financial Aspects, the Internal Audit Division has also carried out insurance for the Finance and Accounting Division which serves as the second layer for the Financial section on the 3 Lines of Defense, we have insured the Budget Policy, Accounting Policy, Financial Policy, and for SOPs and Internal Audit Division Procedures also perform assurance on the Accounting SOP, SOP Insurance, Budget SOP and Financial SOP in the Finance and Accounting Division.

Untuk uraian asuransi terkait dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi adalah sebagai berikut:

For the description of assurance related to the Finance and Accounting Division are as follows:

| No. Laporan Report Number | Judul Asurans Assurance Title | Unit Kerja Work Unit |
|------------------------------|---|---|
| 10/INA/2019 | Evaluasi Perhitungan dan Pemotongan Pph Pasal 21 Bukan Pegawai <i>Evaluation of Non-Employees PPH Article 21 Calculation and Deduction</i> | Divisi Human Capital dan Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>Human Capital Division and Finance and Accounting Division</i> |
| 14/INA/2019 | Lesson Learned Pelaksanaan Proyek MRT Jakarta Fase 1 <i>Lesson Learned Implementation of the Jakarta Phase 1 MRT Project</i> | Direktorat Konstruksi dan Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>Directorate of Construction and Finance and Accounting Division</i> |
| 17/INA/2019 | Laporan Hasil Audit Laporan Keuangan PT Quantum Convex Int. atas Penyelenggaraan Kegiatan Peresmian MRT Jakarta <i>PT Quantum Convex Int's Financial Lap Audit Results Report on Implementation of MRT Jakarta Inauguration Activities</i> | Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>Finance and Accounting Division</i> |
| 19/INA/2019 | Laporan Asurans atas Pembayaran Tagihan Kegiatan Proyek MRT Jakarta pada Bulan Oktober dan November 2018 <i>Assurance Report on Bill Payment for Jakarta MRT Project Activities in October & November 2018</i> | Divisi PMO dan Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>PMO Division and Finance and Accounting</i> |
| 25/INA/2019 | Laporan Hasil Asurans Kegiatan Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>Assurance Results Report on Activities of the Finance & Accounting Division</i> | Divisi Keuangan dan Akuntansi <i>Finance and Accounting Division</i> |

Tabel. 6.106
Table. 6.106

PENILAIAN, EVALUASI, DAN PERNYATAAN PENGENDALIAN INTERNAL

ASSESSMENT, EVALUATION AND STATEMENT OF INTERNAL CONTROL

Untuk mengetahui kondisi terkini atas Sistem Pengendalian Internal, Perseroan melakukan penilaian terhadap 2 (dua) tingkatan pengendalian.

1. Penilaian atas Pengendalian tingkat Perseroan (*entity level*) Proses Pengendalian Internal merupakan proses yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnis dan pengelolaan risikonya. Proses tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap karyawan pada seluruh unit kerja di Perseroan (*entity level*). Pelaksanaan proses pengendalian internal pada unit kerja akan dievaluasi dan dinilai melalui penilaian mandiri setiap tahun. Divisi *Internal Audit* merupakan salah satu unit yang memberikan kontribusi dalam melakukan penilaian mandiri atas pengendalian internal tingkat Perseroan sesuai dengan COSO tahun 2013. Penugasan tersebut dapat direncanakan dan tertuang dalam Rencana Audit Tahunan (RAT).

Hasil pelaksanaan penilaian mandiri, Divisi Audit Internal menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit atas hasil penilaian dan rekomendasi terhadap peningkatan pengendalian internal Perseroan. Selanjutnya hasil penilaian akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan.

2. Penilaian atas Pengendalian tingkat Aktivitas

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya permasalahan eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko operasional bersifat tanpa batas dan melekat pada semua aktivitas bisnis dan operasional Perseroan. Mengingat Perseroan bergerak dalam bidang transportasi umum maka risiko operasional merupakan prioritas utama untuk pengendalian internal. Oleh sebab itu perlu dilakukan penilaian atas kecukupan efektivitas pengendalian ("*Control*") pengendalian internal yang sudah ditetapkan Perseroan berdasarkan Pedoman dan Prosedur ("*Compliance*"). Divisi Audit Internal melaksanakan penilaian pengendalian internal tingkat aktivitas sesuai dengan metode *Control & Compliance Self Assessment (CCSA)*.

Setiap unit kerja (*risk owner*) melaksanakan identifikasi risiko dan aktivitas pengendalian atas proses kerja sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara periodik. Hasil identifikasi tersebut berkoordinasi dengan Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* akan berbentuk Daftar Risiko (*risk register*). Divisi *Internal Audit* melaksanakan penilaian kecukupan kontrol dan kepatuhan atas kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan pada pelaksanaan aktivitas operasional yang terdapat pada Daftar Risiko. Bilamana pengendalian yang dimiliki dianggap belum memadai oleh Divisi *Internal Audit* untuk mengantisipasi risiko maka Divisi *Internal Audit* merekomendasikan pengendalian tambahan dalam rencana mitigasi risiko dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia (anggaran, SDM, infrastruktur, waktu, dan lain-lain).

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal/pihak independen lainnya maka Direksi dapat menyatakan

To find out the latest condition of the Internal Control System, the Corporation evaluates 2 (two) levels of control.

1. Assessment of corporate level control (*entity level*)

The Internal Control Process is an inseparable process in every business process and its risk management. The process must be carried out by every employee in all work units in the Corporation (entity level). The implementation of internal control processes in work units will be evaluated and assessed through a yearly self-assessment. The Internal Audit Division is one of the units contributing in conducting independent assessments of Corporate-level internal controls in accordance with the 2013 COSO. The assignment can be planned and contained in the Annual Audit Plan (RAT).

The Internal Audit Division then submits a report to the President Director with a copy to the Audit Committee on the results of the assessments and recommendations in improving the Corporation's internal control. Furthermore, the results of the assessment will be included in the Annual Report.

2. Assessment of Activity Level Control

*Operational risk is the risk caused by the inadequacy and/or failure of the internal processes, human error, system failure or external problems that affect the Corporation's operations. Operational risk is unlimited and is inherent in all business and operational activities of the Corporation. Given that the corporation operates in the public transportation sector, operational risk is a top priority for internal control. Therefore, it is necessary to assess the adequacy of the effectiveness of internal control ("*Control*") that has been established by the Corporation based on the Guidelines and Procedures ("*Compliance*"). The Internal Audit Division carries out activity level internal control assessments in accordance with the Control & Compliance Self Assessment (CCSA) method.*

Each work unit (risk owner) periodically carries out risk identification and control activities over work processes according to their duties and responsibilities. The identification results will be coordinated with the Risk Management & QSSHE Assurance Division to form a Risk Register. The Internal Audit Division conducts assessments of control adequacy and compliance with the policies and procedures set for operational activity implementation contained in the Risk Register. If the control provided is deemed inadequate by the Internal Audit Division, to anticipate risks the Internal Audit Division will recommend extra control in the risk mitigation plan while taking into consideration the available resources (budget, HC, infrastructures, time, etc).

Based on the results of the assessments conducted by the Internal Division Audit independent parties, the Directors can declare that the effectiveness

efektivitas Pengendalian Internal telah memadai yang didukung oleh pernyataan setiap Kepala Divisi.

of Internal Control is adequate, supported by the statements of each Division Head.

Dewan Komisaris dapat menunjuk Kantor Akuntan Publik/konsultan independen untuk melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal setiap tahunnya. Biaya yang muncul atas evaluasi tersebut akan dibebankan dalam anggaran Dewan Komisaris. Laporan pihak independen akan disampaikan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

The Board of Commissioners may appoint a public accounting firm / independent consultant to evaluate the internal control system annually. Costs arising from the evaluation will be covered by the Board of Commissioners' budget. An independent party report will be submitted by the Board of Commissioners to Shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders.

PROSES DAN HASIL EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TAHUN 2019 PROCESS AND RESULTS OF THE 2019 INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION

Untuk memastikan penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan berjalan secara efektif, Perseroan melakukan penilaian dan evaluasi. Proses penilaian dan evaluasi telah sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PT MRT Jakarta (Perseroda) No. LEV-539/PW/4.2/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

To ensure the effective implementation of the Corporation's Internal Control System, the Corporation conducts assessments and evaluations. The assessment and evaluation process are aligned with the Report of the Implementation of Internal Control Systems at PT MRT Jakarta (Perseroda) No. LEV-539 / PW / 4.2 / 2019 on October 21, 2019..

| | |
|--|--|
| Jenis Penilaian <i>Assesment type</i> | Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern pada PT MRT Jakarta (Perseroda) <i>Evaluation of the Implementation of Internal Control Systems at PT MRT Jakarta (Perseroda)</i> |
| Penilai <i>Assessor</i> | BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta <i>National Government Internal Auditor (BPKP) Representative of the DKI Jakarta Province</i> |
| Periode Evaluasi <i>Evaluation period</i> | 2019 |
| Waktu Pengukuran <i>Measurement time</i> | Januari - Juni 2019 <i>January-June 2019</i> |

Tabel. 6.107
Table. 6.107

Ruang lingkup evaluasi meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal pada Perseroan yang terbagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan .

The scope of the evaluation includes all aspects that support the implementation of internal control systems in the Corporation and is divided into 5 (five) components, namely: Control Environment, Risk Assessment, Control Activities, Information and Communication, and Monitoring.

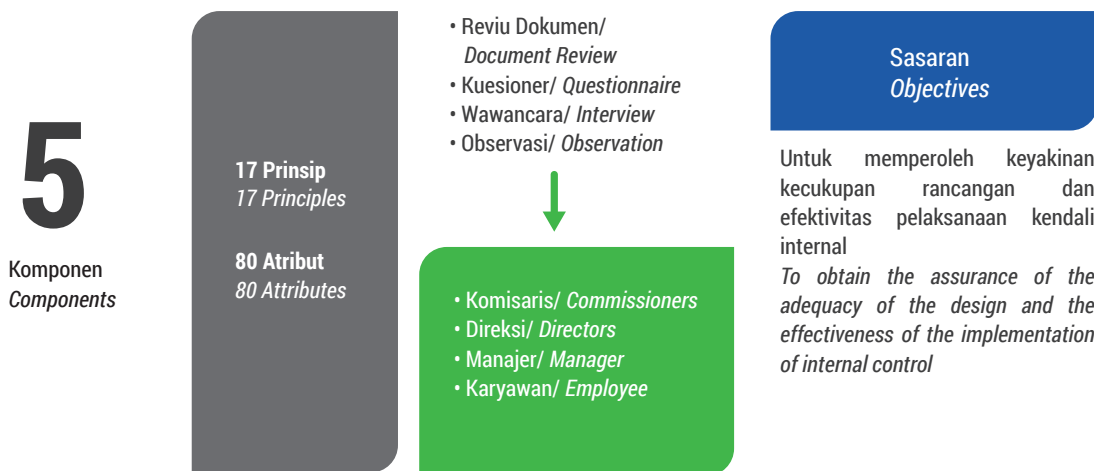
Dari kelima komponen tersebut, evaluasi menggunakan 17 prinsip dan 80 atribut dengan metode evaluasi seperti yang tergambar di bawah ini:

From the 5 (five) components, the evaluation used 17 principles and 80 attributes with the evaluation method as illustrated below:

| No. | Komponen <i>Component</i> | Bobot <i>Weight</i> | Prinsip <i>Principle</i> | Atribut <i>Attribute</i> |
|-----|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Lingkungan Pengendalian <i>Control Environment</i> | 25,00 | 5 | 20 |
| 2. | Penilaian Risiko <i>Risk Assessment</i> | 25,00 | 4 | 20 |

| No. | Komponen Component | Bobot Weight | Prinsip Principle | Atribut Attribute |
|-------------------------|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| 3. | Aktivitas Pengendalian <i>Control Activities</i> | 20,00 | 3 | 16 |
| 4. | Informasi dan Komunikasi <i>Information & Communications</i> | 17,50 | 3 | 14 |
| 5. | Pemantauan <i>Monitoring</i> | 12,50 | 2 | 10 |
| Jumlah Total | | 100,00 | 17 | 80 |

Tabel. 6.108
Table. 6.108



Figur. 6.20
Figure. 6.20

HASIL: RENTANG SKOR DAN TINGKAT EFEKTIVITAS

Results : Range of Scores and Effectiveness Levels

| | |
|---|--|
| Skor ≤ 50 (Tidak Efektif) <i>Score ≤ 50 (Not Effective)</i> | Pengendalian intern masih sederhana <i>Internal control is still simple</i> |
| 50 < Skor ≤ 60 (Kurang Efektif) <i>50 < Score ≤ 60 (Less effective)</i> | Pengendalian intern belum terintegrasi dan belum disesuaikan terhadap perubahan organisasi yang terjadi <i>Internal control is not integrated and has not been adjusted to organizational changes that occur</i> |
| 60 < Skor ≤ 75 (Cukup Efektif) <i>60 < Score ≤ 75 (Effective enough)</i> | Pengendalian intern belum sepenuhnya terintegrasi dan belum disesuaikan terhadap perubahan organisasi yang terjadi <i>Internal control is not fully integrated and has not been adjusted to organizational changes that occur</i> |

| | |
|--|---|
| 75 < Skor ≤ 85 (Efektif) 75 < Score ≤ 85 (Effective) | Pengendalian intern telah terintegrasi namun belum memungkinkan dilakukan perubahan secara cepat mengikuti tuntutan perubahan organisasi dan operasional <i>Internal control has been integrated but does not allow changes to be made quickly following the demands of organizational and operational changes</i> |
| Nilai di atas 85 (Sangat Efektif) Value above 85 (Very effective) | Pengendalian intern telah terintegrasi dan memungkinkan dilakukan perubahan dengan cepat sesuai tuntutan perubahan organisasi dan operasional <i>Internal control has been integrated and allows changes to be made quickly according to the demands of organizational and operational changes</i> |

Tabel. 6.109
Table. 6.109

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, hasil evaluasi menunjukkan Sistem Pengendalian Internal Perseroan untuk tahun 2019 menunjukkan capaian 77,10 atau berada pada tingkat efektivitas "Efektif".

Based on the evaluation that has been conducted, the evaluation results show that the Corporate internal control system for 2019 indicates an achievement of 77.10 or is at the "Effective" level of effectiveness.

HASIL: RENTANG SKOR DAN TINGKAT EFEKTIVITAS

Results : Range of Scores and Effectiveness

| No. | Komponen Component | Bobot Weight | Skor Score | Capaian Achievement (%) | Atribut Attribute |
|--|--|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | Lingkungan Pengendalian <i>Control Environment</i> | 25,00 | 21,27 | 85,06% | "Efektif" |
| 2. | Penilaian Risiko <i>Risk Assessment</i> | 25,00 | 17,15 | 68,61% | "Cukup Efektif" |
| 3. | Aktivitas Pengendalian <i>Control Activities</i> | 20,00 | 15,95 | 79,76% | "Efektif" |
| 4. | Informasi dan Komunikasi <i>Information & Communication</i> | 17,50 | 12,50 | 71,43% | "Cukup Efektif" |
| 5. | Pemantauan <i>Monitoring</i> | 12,50 | 10,23 | 81,83% | "Efektif" |
| Hasil Akhir <i>Final Score</i> | | 100,00 | 77,10 | | "Efektif" |

Tabel. 6.110
Table. 6.110

Dari hasil evaluasi di atas, terdapat 36 rekomendasi sebagai catatan penting bagi peningkatan penerapan sistem pengendalian internal di lingkup Perseroan. Berikut disampaikan rekomendasi tersebut, dan tindak lanjut yang telah dilakukan.

Based on the evaluation results above, there are 36 recommendations as the important notes to improve the implementation of the internal control system within the Corporation scope. The following are the recommendations and the follow-up actions taken.

| No. | Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2019 <i>Evaluation Results of the Internal Control System in 2019</i> | Status Tindak Lanjut <i>Follow-up Status</i> | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2019/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan <i>Follow Ups That Have Been Carried Out Until the End of 2019 / Follow Up Plans / Reasons If Evaluation Recommendations Have Not Been Implemented</i> |
|----------|--|---|--|
| I | Lingkungan Pengendalian <i>Control Environment</i> | | |
| 1. | <p>Perseroan belum sepenuhnya menetapkan unit kerja yang menjalankan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan perilaku, namun telah menyusun penetapan draft Keputusan Direksi tentang penetapan Anggota Komite Etika dan Perilaku di lingkungan PT MRT Jakarta (Persero)</p> <p><i>The Corporation has yet to fully establish a work unit that carries out an evaluation of the implementation of the code of conduct, but has compiled a draft of Decree of the Directors concerning the establishment of the Code of Conduct Committee Members in PT MRT Jakarta (Persero) environment.</i></p> | ✘ | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 2. | <p>Dewan Komisaris telah memiliki rencana pengembangan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya, namun sampai dengan akhir bulan September tahun 2019 belum dilaksanakan</p> <p><i>The Board of Commissioners has a plan to develop the capabilities and expertise needed to carry out its duties, but has yet to be executed as of the end of September 2019.</i></p> | ✘ | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 3. | <p>Struktur organisasi disusun dengan mempertimbangkan pemisahan fungsi, namun uraian tugas dan spesifikasi jabatan belum disesuaikan dengan setiap jabatan dalam struktur organisasi yang terbaru</p> <p><i>The organizational structure is prepared in consideration of function separations, but the description of duties and position specifications have yet to be adjusted with the positions listed in the newest organizational structure.</i></p> | ✘ | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 4. | <p>Perseroan telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan SDM, namun masih terdapat SOP yang masih berupa draft antara lain SOP <i>Internal Recruitment</i>, SOP Tenaga Alih Daya</p> <p><i>The Corporation has a policy in HC management, although there are SOPs that are still in the drafting stage, such as the Internal Recruitment SOP and Outsourcing SOP.</i></p> | ✘ | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |

| No. | Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2019 <i>Evaluation Results of the Internal Control System in 2019</i> | Status Tindak Lanjut <i>Follow-up Status</i> | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2019/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan <i>Follow Ups That Have Been Carried Out Until the End of 2019 / Follow Up Plans / Reasons If Evaluation Recommendations Have Not Been Implemented</i> |
|--|---|---|--|
| 5. | <p>Perseroan telah melakukan evaluasi kompetensi terhadap karyawan, namun belum ditetapkan dalam kebijakan tertulis <i>The Corporation has conducted competency evaluations on employees, but has yet to establish such evaluations on written policies.</i></p> | ✘ | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020 <i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 6. | <p>Perseroan telah menetapkan target kinerja individu, namun belum memiliki kebijakan/prosedur analisis beban kerja individu. <i>The Corporation has set individual performance targets, but has yet to have a policy / procedure regarding individual workload analysis.</i></p> | ✘ | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020 <i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| II Penilaian Risiko <i>Risk Assessment</i> | | | |
| 1. | <p>Perseroan belum melakukan penilaian risiko dengan mempertimbangkan potensi risiko kecurangan (<i>fraud</i>) yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan <i>The Corporation has yet to conduct risk assessments with considerations of potential frauds affecting Corporate goal attainment.</i></p> | ✘ | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020 <i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 2. | <p>Perseroan belum sepenuhnya mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern <i>The Corporation has yet to fully identify and assess significant changes that can potentially affect the internal control system.</i></p> | ✘ | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020 <i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| III Aktivitas Pengendalian <i>Control Activities</i> | | | |
| 1. | <p>Perseroan memiliki proses bisnis yang membutuhkan aktivitas pengendalian (persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, reviu kinerja, pengamanan aset dan pemisahan tugas) yang diatur dalam prosedur, namun belum seluruhnya dilengkapi alur proses bisnis. <i>The Corporation has business processes that require control activities (approval, authorization, verification, reconciliation, performance review, asset security, and task delegation) that are regulated in the procedures, but have not been fully equipped with business process flows.</i></p> | ✘ | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020 <i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |

| No. | Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2019 <i>Evaluation Results of the Internal Control System in 2019</i> | Status Tindak Lanjut <i>Follow-up Status</i> | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2019/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan <i>Follow Ups That Have Been Carried Out Until the End of 2019 / Follow Up Plans / Reasons If Evaluation Recommendations Have Not Been Implemented</i> |
|--|---|---|--|
| 2. | <p>Perseroan telah memiliki pedoman pengelolaan teknologi informasi di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroan) yang ditetapkan tahun 2017 dan telah menetapkan <i>IT Roadmap</i> dan <i>Blue Print</i> di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroan) periode tahun 2018-2021, namun pengembangan pengendalian aplikasi dan pengendalian umum atas teknologi belum seluruhnya terintegrasi</p> <p><i>The Corporation has an Information Technology Management Guideline for the PT MRT Jakarta (Perseroan) environment which was established in 2017 and has set the IT Roadmap and Blue Print in the PT MRT Jakarta (Perseroan) environment for the 2018-2021 period, although the developments of application and general control of technology are not fully integrated yet.</i></p> | × | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 3. | <p>Belum seluruh aktivitas pengendalian dituangkan dalam kebijakan dan prosedur</p> <p><i>Not all control activities are stated in policies and procedures</i></p> | × | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 4. | <p>Perseroan telah memiliki petunjuk penyusunan SOP, namun belum mencantumkan keharusan melakukan reviu secara berkala</p> <p><i>The Corporation has an SOP development manual, but has yet to state the need for mandatory regular reviews.</i></p> | × | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| IV Informasi dan Komunikasi <i>Information & Communication</i> | | | |
| 1. | <p>Perseroan telah memiliki sistem informasi, namun belum menetapkan prosedur memperoleh data internal, misalnya data-data penjualan Perseroan secara periodik, biaya, jumlah tenaga kerja</p> <p><i>The Corporation already has an information system, but has yet to establish a procedure to obtain internal data, such as periodical Corporate sales data, costs, total manpower</i></p> | × | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |

| No. | Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2019 <i>Evaluation Results of the Internal Control System in 2019</i> | Status Tindak Lanjut <i>Follow-up Status</i> | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2019/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan <i>Follow Ups That Have Been Carried Out Until the End of 2019 / Follow Up Plans / Reasons If Evaluation Recommendations Have Not Been Implemented</i> |
|-----|---|---|--|
| 2. | <p>Perseroan telah memiliki sistem informasi, namun belum menetapkan prosedur memperoleh data eksternal, misalnya: tren pasar, tren demografi, perilaku pengguna jasa, hukum-hukum atau undang-undang yang terkait dengan bisnis Perseroan</p> <p><i>The Corporation has an information system, but has yet to establish a procedure in obtaining external data, such as market trends, demographic trends, consumer behavior, and regulations related to the Corporate business.</i></p> | × | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 3. | <p>Perseroan telah memiliki sistem informasi, namun belum menetapkan prosedur memproses data menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen</p> <p><i>The Corporation has an information system, but has yet to establish a procedure to process data to become information relevant to the management.</i></p> | × | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 4. | <p>Perseroan telah memiliki sistem informasi, namun belum menetapkan petugas yang melakukan pengolahan data</p> <p><i>The Corporation already has an information system, but has yet to appoint personnel to do data processing.</i></p> | × | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 5. | <p>Perseroan telah memiliki sistem informasi, namun belum menetapkan batas waktu informasi selesai disusun, didistribusikan, dan dimutakhirkan termasuk kelengkapan informasi yang harus ada</p> <p><i>The Corporation has an information system, but has yet to set the deadlines to arrange, distribute, and update information, including the mandatory supporting information.</i></p> | × | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |
| 6. | <p>Perseroan telah memiliki sistem informasi, namun belum menetapkan akses informasi, misalnya, siapa yang boleh/tidak boleh mengakses, cara mengakses, dan penggunaan kata sandi</p> <p><i>The Corporation already has an information system, but has yet to set information accessibility, such as who can and cannot access the information, the way to access it and password usage.</i></p> | × | <p>Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020</p> <p><i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i></p> |

| No. | Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Tahun 2019 <i>Evaluation Results of the Internal Control System in 2019</i> | Status Tindak Lanjut <i>Follow-up Status</i> | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Hingga Akhir Tahun 2019/Rencana Tindak Lanjut/Alasan Jika Rekomendasi Evaluasi Belum Dilaksanakan <i>Follow Ups That Have Been Carried Out Until the End of 2019 / Follow Up Plans / Reasons If Evaluation Recommendations Have Not Been Implemented</i> |
|--|---|---|--|
| 6. | Pelaksanaan verifikasi informasi (penanggung jawab dan proses verifikasi) <i>Information verification implementation (person(s) in charge and verification process)</i> | × | Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020 <i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i> |
| V Pemantauan <i>Monitoring</i> | | | |
| 1. | Terdapat kebijakan/prosedur untuk melakukan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah untuk menilai keberadaan intern, namun evaluasi berkelanjutan pada setiap proses bisnis belum dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan <i>There are policies / procedures to conduct sustainable evaluation and separate evaluation to assess internal existence, but sustainable evaluation of each business process has not been executed in compliance with the relevant policies.</i> | × | Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020 <i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i> |
| 2. | Penyusunan Rencana Audit Tahunan (RAT) berbasis risiko, namun belum seluruh RAT dilaksanakan disebabkan banyak penugasan yang merupakan permintaan Direksi <i>The preparation of an Annual Audit Plan (RAT) is based on risk, but not all of the RATs have been carried out due to many assignments requested by the Directors.</i> | × | Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020 <i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i> |
| 3. | Evaluasi terpisah telah dilakukan secara berkala, namun manajemen belum sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi auditor internal maupun pihak eksternal <i>Separate evaluations have been conducted periodically, but the management has not fully followed up on the recommendations of the evaluation results by the internal auditor or external parties.</i> | × | Laporan Hasil Evaluasi SPI No LEV-539/PW09/4.2/2019 akan ditindaklanjuti pada tahun 2020 <i>The SPI Evaluation Results Report No. LEV-539 / PW09 / 4.2 / 2019 will be followed up in 2020</i> |

Tabel. 6.111
Table. 6.111

MANAJEMEN RISIKO

RISK MANAGEMENT



Gambar. 6.4
Image. 6.4

DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN PROSES MANAJEMEN RISIKONYA, KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN MENGGUNAKAN ISO 31000:2018 SEBAGAI ACUAN.

In developing and implementing its risk management process, the Corporate Risk Management policies use ISO 31000: 2018 as a reference.

Sebagai entitas usaha di bidang penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan, Perseroan selalu dihadapkan pada kemungkinan risiko yang timbul dalam melaksanakan proses usahanya. Oleh sebab itu, Perseroan perlu untuk menerapkan Manajemen Risiko yang merupakan upaya terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan Perseroan terhadap risiko-risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan penerapan Manajemen Risiko, diharapkan potensi kerugian dapat ditekan serendah mungkin atau apabila memungkinkan pemanfaatan risiko menjadi peluang yang dapat meningkatkan keuntungan Perseroan.

Sejak Tahun 2014, Perseroan telah menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan secara terstruktur. Perseroan bertekad untuk membangun budaya sadar risiko di seluruh lapisan Perseroan dipicu oleh proses implementasi konstruksi yang semakin berkembang, sehingga membuat Perseroan kerap mengalami banyak hal-hal yang bersifat tidak pasti. Walaupun demikian, ketidakpastian tersebut dapat menjadi peluang-peluang baru yang dapat membawa dampak positif bagi perkembangan bisnis Perseroan.

Perseroan berupaya maksimal dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan landasan berpikir yang termaktub dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) berdasarkan pada tata nilai, sasaran dan strategi dengan prinsip Manajemen Risiko Perusahaan yang

As a business entity that carries out business activities in the field of providing Urban Railways infrastructure, the Corporation is always faced with risk possibilities that arise in the process of conducting its business. As such, the Corporation needs to apply risk management in the form of coordinated efforts to direct and control the Corporation in facing risks related to its business activities. With the application of Risk Management, it is hoped that loss potential can be made as low as possible or, if possible, capitalize on risks and create opportunities out of them to increase the Corporation's profits.

Since 2014, the Corporation has applied and developed a structured Corporate Risk Management System. The Corporation is committed to build risk awareness culture in all layers of the Corporation, triggered by the continuously developing construction implementation process, which often led the Corporation to experience uncertainties. Even so, such uncertainties can become new opportunities that can positively impact the Corporation's business.

The Corporation exerts maximum efforts in applying Risk Management in compliance with the foundation of thinking as stated in the Long Term Corporate Plan (RJPP), which is based on values, targets, and strategies with Corporate Risk Management principles that are protective, encourage

bersifat melindungi, menciptakan nilai, transparan dan inklusif. Manajemen risiko merupakan bagian integral dari proses bisnis dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan tepat waktu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Perseroan. Di samping itu, Manajemen Risiko tak hanya menjadi alat ukur kinerja operasional harian semata, tetapi juga dapat menjadi alat strategi utama dalam menentukan perencanaan strategis Perseroan.

value creation, and are transparent and inclusive. Risk Management is a vital part of a business and decision making process that is systematic, structured, and timely based on the best available information that is adjusted with the internal and external conditions of the Corporation. In addition, Risk Management not only becomes a measuring tool of daily operational performance, but also a main strategic tool in determining the Corporation's strategic planning.

LATAR BELAKANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN

BACKGROUND OF THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE RISK MANAGEMENT.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PT MRT Jakarta (Persero) selaku salah satu dari BUMD DKI Jakarta wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten dan/atau menjadikannya sebagai landasan operasionalnya.

Based on the Decree of the Governor of DKI Jakarta Province No. 96 of 2004 concerning the Implementation of GCG Practices in Regionally Owned Enterprises (BUMD) in the environment of the Government of the Special Capital Region of Jakarta, PT MRT Jakarta (Persero) as one of DKI Jakarta's ROEs must implement Good Corporate Governance (GCG) consistently and/or make it its operational foundation.

Salah satu pilar dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang diterapkan Perseroan adalah Manajemen Risiko. Dengan dimulainya pelaksanaan konstruksi, Direksi Perseroan memutuskan untuk mengubah pendekatan dalam pengelolaan manajemen risiko. Dengan adanya Jasa Konsultasi Manajemen Konstruksi pada proyek Perseroan, pengelolaan risiko konstruksi dapat dipersepsikan sebagai bagian dari tugas yang telah dikelola oleh Konsultan. Terlebih lagi dengan belum adanya pengetahuan organisasi yang memadai terkait proses pembangunan proyek MRT Jakarta dengan segala risiko yang kemungkinan terjadi.

One of the pillars of Good Corporate Governance implemented by the Corporation is Risk Management. With the start of its construction, the Corporation's Directors decided to change their approach in managing risk management. With the Construction Management Consultancy Services in the Corporation's project, the management of construction risk can be perceived as part of the tasks that have been managed by the Consultant. Moreover, in the absence of adequate Corporate knowledge related to the MRT Jakarta project development process with all the risks that might occur.

Akan tetapi, dengan memperhatikan kompleksitas proses konstruksi yang berlangsung dalam pembangunan MRT Jakarta dan juga hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari berbagai lembaga pemerintahan, LSM, serta masyarakat, Direksi memutuskan untuk mengambil peran pro-aktif dan sesuai prinsip pengelolaan risiko yaitu mengutamakan upaya pencegahan/preventif sebagai cara untuk memastikan kesuksesan pelaksanaan konstruksi dan pengelolaan proyek.

However, by taking into account the complexity of the construction process that took place in the construction of MRT Jakarta and the relationships with all stakeholders consisting of various government agencies, NGOs and the community, the Directors decided to take a proactive role that is in accordance with the risk management principles, which prioritizes prevention efforts as a way to ensure the successful implementation of construction and project management.

Isu manajemen risiko dalam Perseroan ini memang masih menjadi suatu hal yang timbul tenggelam. Hal ini dianggap wajar karena Perseroan tengah melakukan proses pertumbuhan bisnis dan masih berupaya menentukan arah tujuan jangka panjangnya serta budaya korporasi dalam korporasi tersebut yang masih fleksibel.

The issue of risk management in this Corporation is a recurring matter. This is considered reasonable as the Corporation is currently experiencing a business growth process and still strives to determine its long term direction, as well its still flexible Corporate culture.

Akhir tahun 2014, Perseroan telah menetapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang berisi Visi, Misi, Tujuan Strategis Perseroan, Model Bisnis, dan Risiko-risiko Strategis Korporasi melalui mekanisme keputusan RUPS LB. Keputusan ini membawa konsekuensi logis bahwa pengelolaan manajemen risiko perlu dilakukan secara profesional dan sungguh-sungguh demi tercapainya tujuan strategis Perseroan.

At the end of 2014, the Corporation had determined its on Long-Term Plan (RJP) containing the Corporate Vision, Mission, Strategic Objectives, Business Model and Strategic Risks through the decision mechanism of the EGMS. This decision brought a logical consequence that risk management needed to be implemented professionally and seriously in order to achieve strategic Corporate objectives.

TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUP PERSEROAN

RISK MANAGEMENT OBJECTIVES IN THE CORPORATE SCOPE

Tujuan dari pengelolaan risiko di Perseroan adalah:

1. Melindungi dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perseroan serta mendorong manajemen untuk bertindak pro-aktif terhadap pengelolaan risiko dan menjadikannya sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja Perseroan.
2. Membangun kesadaran bertindak hati-hati dan kemampuan dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai bagian dari pengelolaan risiko yang terintegrasi.
3. Meningkatkan kinerja Perseroan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus menerus dan berkesinambungan.

The objectives of risk management in the Corporation are:

1. Protecting from significant risks that can hinder the achievements of the Corporate objectives and encouraging the management to act proactively towards risk management and make it a source of competitive advantage and Corporate performance.
2. Building awareness of acting carefully and competency in managing risks according to their own positions and responsibilities as part of the integrated risk management.
3. Improving Corporate performance by providing risk level information as outlined in the risk map that is useful for the management in developing strategies and improving the risk management process continuously and sustainably.

PETA JALAN MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN

CORPORATE RISK MANAGEMENT ROAD MAP

Manajemen Risiko mulai diterapkan di Perseroan pada tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 42 Tahun 2009 tentang Penetapan Satuan Tugas Manajemen Risiko Perseroan dan Surat Keputusan Direksi No. 33 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Manajemen Risiko (Satgas MR) di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Pada tahun 2011, Perseroan telah menerapkan manajemen risiko dalam bentuk Tim Ad-Hoc.

Namun, penerapan manajemen risiko pada tahun 2011 tidak dilanjutkan karena struktur organisasi manajemen risiko masih bersifat sementara (dalam bentuk Satgas MR) dan belum adanya Risk Governance. Sehingga pada tahun 2014 Perseroan mulai membentuk Divisi Risk Management melalui Surat Keputusan Direksi No. 29 Tahun 2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Struktur Organisasi di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) dan penempatan karyawan di Divisi Risk Management melalui Surat Keputusan Direksi No. 73 Tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan penempatan kepala Divisi Risk Management melalui Surat Keputusan Direksi No. 81 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014. Divisi Risk Management mengalami perubahan menjadi Divisi Risk, Quality and Safety Management melalui Surat Keputusan Direksi No. 001 tahun 2018. Pada Tahun 2019 melalui Surat Keputusan Direksi No. 213 Divisi Risk, Quality and Safety Management berubah menjadi Divisi Risk Management & QSSHE Assurance.

Seiring dengan dibentuknya Divisi Risk Management & QSSHE Assurance, disusunlah Peta Jalan Pengembangan Manajemen Risiko dalam rentang waktu 2008 sampai dengan 2022. Peta Jalan ini diperbarui setiap tahun mengikuti perkembangan lingkungan internal maupun eksternal Perseroan.

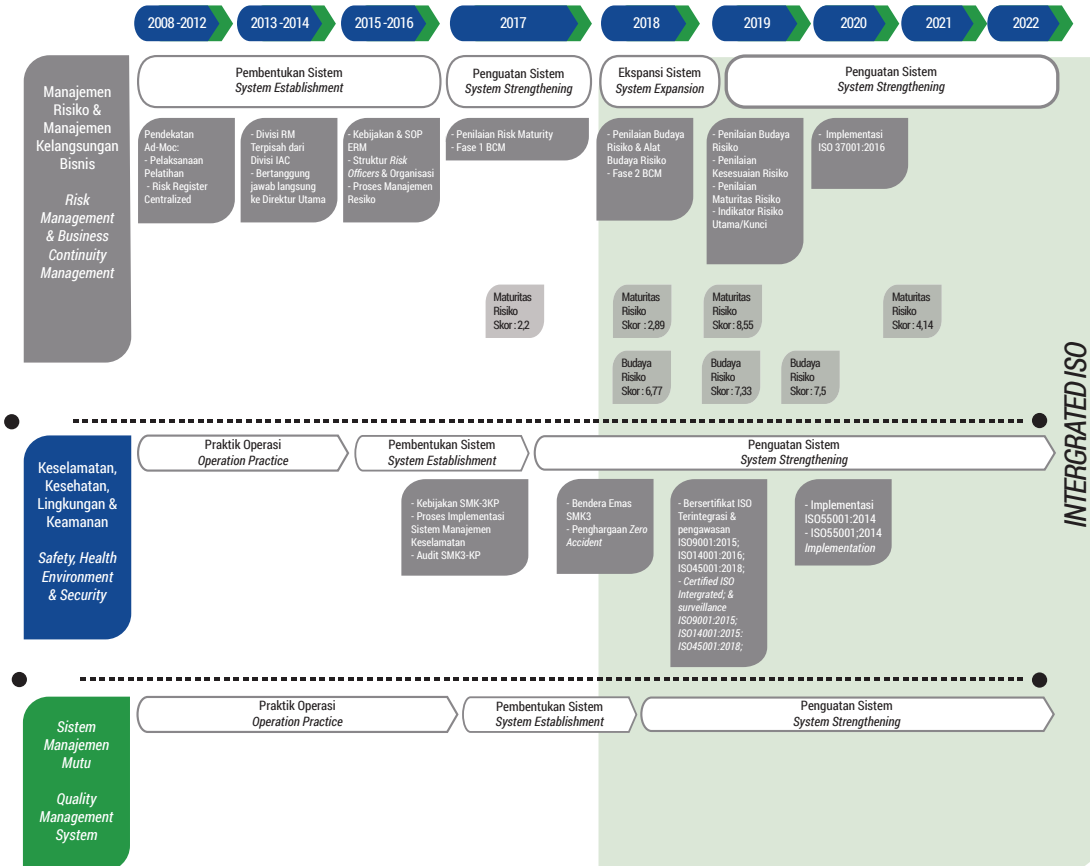
Risk Management began to be implemented in the Corporation in 2011 as stipulated in the Decree of the Directors No. 42 of 2009 concerning Establishment of the Corporation's Risk Management Task Force and Directors Decree No. 33 of 2011 concerning the Establishment of the Risk Management Task Force (Satgas MR) in the PT MRT Jakarta (Perseroda) Environment. In 2011, the Corporation implemented risk management in the form of an Ad-Hoc Team.

However, the implementation of risk management in 2011 was discontinued because the organizational structure of the risk management was still temporary (in the form of the MR Task Force) with no Risk Governance. Hence, in 2014 the Corporation began to form a Risk Management Division through Decree of the Directors No. 29 of 2014 dated March 20, 2014 concerning Changes in the Corporate Structure in PT MRT Jakarta (Perseroda) and the placements of employees in the Risk Management Division through Directors Decree No. 73 of 2014 dated August 27, 2014 and the placement of the Head of the Risk Management Division through Decree of the Directors No. 81 of 2014 dated December 1, 2014. The Risk Management Division experienced a change to become the Risk, Quality and Safety Management Division through Directors Decree No. 001 in 2018. In 2019, through the Directors Decree No. 213, the Risk, Quality and Safety Management Division changed to become the Risk Management & QSSHE Assurance Division

Along with the formation of the Risk Management & QSSHE Assurance Division, a Risk Management Development Road Map of the 2008-2022 period was developed. This Road Map is updated annually following developments in the Corporation's internal and external environments.

PETA JALAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO MRT JAKARTA

Road Map of the Risk Management Development of MRT Jakarta



Figur 6.21
Figure 6.21

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN

CORPORATE RISK MANAGEMENT POLICY

KOMPONEN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Components of the Risk Management System



Figur 6.22
Figure 6.22

Prinsip dan kebijakan Manajemen Risiko merupakan aturan dasar bagi pengembangan kebijakan kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan manajemen risiko. Adapun Komitmen Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko dilakukan dengan landasan berpikir yang termaktub dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) berdasarkan pada tata nilai, sasaran, dan strategi dengan prinsip manajemen risiko Perseroan yang bersifat melindungi, menciptakan nilai, transparan, dan inklusif.
2. Manajemen Risiko merupakan bagian integral dari proses bisnis dan pengambilan keputusan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu berdasarkan informasi terbaik yang tersedia yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Perseroan.
3. Manajemen Risiko adalah alat strategi utama dalam penentuan perencanaan strategis Perseroan, bukan hanya menjadi alat ukur kinerja operasional harian semata.
4. Manajemen Risiko dimulai dari integritas Direksi, dilakukan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dengan memperhatikan seluruh aspek risiko yang terdapat dalam Perseroan, sehingga manajemen anti kecurangan menjadi hal yang wajib dilakukan, khusus untuk risiko yang berhubungan dengan integritas, Direksi tidak memberikan toleransi.
5. Manajemen Risiko menjamin seluruh laporan yang menyajikan pengukuran kinerja Perseroan, dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sehingga terhindar dari potensi kecurangan.
6. Manajemen Risiko mengutamakan faktor keselamatan dan kesehatan kerja bagi Karyawan yang merupakan aset utama yang dimiliki oleh Perseroan.
7. Manajemen Risiko ditujukan untuk menjaga Perseroan tidak berseberangan dengan hukum dan segala bentuk peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
8. Manajemen Risiko menjamin diterapkannya proses penghargaan dan konsekuensi terhadap segenap Karyawan tanpa terkecuali.
9. Manajemen Risiko dikembangkan sebagai suatu sistem yang dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan perkembangan Perseroan dan menjadi fasilitas untuk mendeteksi terjadinya perubahan serta proses penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi.
10. Manajemen Risiko merupakan sistem yang mendukung perbaikan dan peningkatan Perseroan secara berkelanjutan.
11. Manajemen Risiko harus menjadi bagian sistem budaya Perseroan, sebagai landasan dalam mewujudkan cita-cita menjadi Perseroan terkemuka di Indonesia dan sasaran Perseroan tercapai.

The Principles and Policies of Risk Management are the basic rules for developing risk management work policies which are pillars for the implementation of risk management. The following are the Corporation's Risk Management Commitments:

1. *Risk management is carried out with the foundation of thinking as stated in the Long Term Corporate Plan (RJPP) based on values, objectives and strategies with principles of corporate risk management that are protective, supports value creation, and are transparent and inclusive.*
2. *Risk Management is an integral part of the business processes and decision making that is carried out in a systematic, structured and timely manner based on the best available information that is adjusted to the internal and external conditions of the Corporation.*
3. *Risk Management is the main strategic tool in determining the Corporation's strategic planning, not only as a measuring tool for daily operational performance.*
4. *Risk Management starts from the integrity of the Directors, carried out with the principles of effectiveness and efficiency by taking into account all aspects of risks in the Corporation so that antifraud management becomes an obligation, specifically for risks related to integrity, the Directors apply zero tolerance.*
5. *Risk Management guarantees that all reports that present measurements of the Corporate performance are carried out carefully, so as to avoid potential frauds.*
6. *Risk Management prioritizes occupational safety and health factors for Employees who are the main assets of the Corporation.*
7. *Risk Management is intended to keep the Corporation from conflicting with the law and all forms of applicable laws and regulations.*
8. *Risk Management guarantees the implementation of the reward and punishment process for all employees without exception.*
9. *Risk Management is developed as a system that is dynamic, repetitive and responsive to changes in the Corporate development and is meant to become a facility to detect changes as well as the process of adjusting to occurring changes.*
10. *Risk Management is a system that supports continuous improvements of the Corporation.*
11. *Risk Management must become a part of the Corporate culture system, as a foundation in realizing the goal of becoming a leading corporation in Indonesia and achieving the Corporate objectives.*

Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko di lingkup Perseroan didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang efektif menurut ISO 31000:2018, yaitu:

1. **Penciptaan dan Perlindungan Nilai**
Pengelolaan risiko menciptakan dan melindungi nilai yang dinyatakan dalam objektif korporasi;
2. **Terintegrasi**
Pengelolaan risiko merupakan bagian yang terintegrasi dengan keseluruhan proses dalam korporasi;
3. **Terstruktur dan Komprehensif**
Pendekatan yang terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang sebanding dan konsisten;
4. **Disesuaikan**
Kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan diatur secara berimbang sesuai dengan konteks internal dan eksternal korporasi yang terkait dengan tujuannya;
5. **Inklusif**
Pertimbangan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk memperoleh pengetahuan, pandangan, dan persepsi dalam menentukan kriteria risiko. Hal ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan pengelolaan risiko yang diinformasikan;
6. **Dinamis**
Risiko bisa muncul, berubah atau menghilang ketika konteks internal dan eksternal korporasi berubah. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan atas kejadian tersebut dengan cara yang tepat dan tepat waktu;
7. **Informasi Terbaik yang Tersedia**
Pengelolaan risiko membutuhkan ketersediaan informasi yang memadai seperti data historis, pengalaman Perseroan, umpan balik dari pemangku kepentingan, observasi, dan penilaian ahli sehingga para pengambil keputusan dapat meyakini bahwa keputusannya telah memperhitungkan semua informasi yang tersedia pada waktu keputusan tersebut dibuat;
8. **Faktor Manusia dan Budaya**
Pengelolaan risiko seharusnya memperhitungkan faktor manusia dan budaya karena mempengaruhi secara signifikan secara aspek manajemen risiko di setiap level dan tahap;
9. **Perbaikan Berkelanjutan**
Manajemen risiko terus ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengalaman.

Direksi menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai wujud komitmen untuk penerapan Manajemen Risiko di Perseroan secara terintegrasi, dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Perseroan, serta memberikan kerangka penerapan manajemen risiko secara sistematis dan terukur.

Risk Management Policy Guidelines in the Corporate scope are based on the principles of effective risk management according to ISO 31000: 2018, namely:

1. **Value Creation and Protection**
Risk management creates and protects the values stated in the Corporate objectives;
2. **Integrated**
Risk management is an integrated part of the whole process in the Corporation;
3. **Structured and Comprehensive**
A structured and comprehensive approach to risk management contributes to comparable and consistent results;
4. **Customized**
The risk management framework and process are adjusted and regulated in a balanced manner in accordance with the internal and external contexts of the Corporation in relation to its objectives;
5. **Inclusive**
Consideration of the involvements of stakeholders to obtain knowledge, views and perceptions in determining risk criteria. This results in increased informed risk awareness and management.
6. **Dynamic**
Risks can appear, change or disappear when the internal and external contexts of the Corporation change. Risk management anticipates, detects, recognizes, and responds to changes in these events in an appropriate and timely manner;
7. **Best Available Information**
Risk management requires the availability of adequate information such as historical data, Corporate experience, stakeholder feedback, observation and expert assessments so that decision makers can be sure that their decision has taken into account all the available information at the time the decision was made;
8. **Human and Cultural Factors**
Risk management should take into account the human and cultural factors because they significantly influence the aspects of risk management at each level and stage;
9. **Continuous Improvements**
Risk Management continues to be improved through learnings and experience.

The Directors establishes Risk Management Policy as a form of commitment to the integrated implementation of Risk Management in the Corporation in order to support the achievements of the Corporate goals, as well as providing a framework for implementing risk management in a systematical and measurable manner.

Kebijakan Manajemen Risiko menggunakan ISO 31000:2018 sebagai acuan dalam melaksanakan proses manajemen risiko dan tertuang dalam Keputusan Direksi Perseroan yang telah dibuat pada tahun 2015 dan terakhir telah diperbarui di tahun 2018 yang tertuang dalam Keputusan Direksi Perseroan No. PER/033/BOD-MRT/XI/2018 tentang Kebijakan Manajemen Risiko di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda). Implementasi manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 merupakan tahun ke-3 yang mengintegrasikan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko disusun berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Setiap Pemilik Proses di dalam lingkungan Perseroan mempunyai kewajiban menerapkan manajemen risiko yang terkait dengan aktivitas usaha yang menjadi tanggung jawabnya dan mendokumentasikan seluruh aktivitas manajemen risiko di unit kerjanya;
2. Pemimpin Pemilik Proses bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko di unit kerjanya sebagaimana mestinya;
3. Manajemen Risiko diterapkan untuk seluruh aktivitas dan kepentingan Perseroan, antara lain:
 - Aktivitas Konstruksi;
 - Aktivitas Operasi; dan
 - Aktivitas Pengembangan Usaha.
4. Penerapan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup:
 - Pengawasan aktif pemimpin tertinggi di tiap Pemilik Proses;
 - Adanya kebijakan, prosedur, dan penetapan batasan risiko yang memadai;
 - Penetapan toleransi risiko yang sejalan dengan rencana strategis, pengelolaan, penganggaran risiko, dan kemampuan manajemen Perseroan dalam mengelola portofolio bisnis;
 - Adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko yang komprehensif dan penyediaan data yang terintegrasi;
 - Prosedur dan persyaratan yang memadai dalam melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan aktivitas bisnis baru serta perubahan sistem dan prosedur kerja dilakukan;
 - Sistem pengendalian internal yang menyeluruh;
 - Keseluruhan proses bisnis Perseroan; dan
 - Peningkatan pengetahuan mengenai manajemen risiko khususnya pada tingkat Manajemen.

Sementara itu, proses manajemen risiko sendiri merupakan penjabaran dari Kerangka Kerja Manajemen Risiko untuk mempermudah integrasi penerapan pengelolaan risiko baik di tingkat korporasi, unit kerja maupun individu.

Perseroan menetapkan kerangka kerja manajemen risiko yang menjadi dasar dalam pelaksanaan seluruh kegiatan manajemen risiko di seluruh tingkatan korporasi. Kerangka kerja Manajemen Risiko Perseroan membantu dalam mengelola risiko secara efektif dan akan memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses manajemen risiko dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan.

The Risk Management Policy uses ISO 31000: 2018 as a reference in carrying out the risk management process and is contained in the Decree of the Directors of the Corporation which was made in 2015 and most recently updated in 2018 as contained in Decree of the Corporation's Directors No. PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018 concerning Risk Management Policy within PT MRT Jakarta (Perseroda). The implementation of risk management based on ISO 31000: 2018 is the 3rd year that integrated Human Resources in risk management

The Risk Management Policy is prepared based on the following aspects:

1. *Every Process Owner within the Corporation has an obligation to apply risk management related to business activities that are his / her responsibility and document all risk management activities in his / her work unit;*
2. *Leader(s) of the Process Owner is responsible for implementing risk management in their work unit as it should;*
3. *Risk Management is applied to all activities and interests of the Corporation, including:*
 - *Construction Activities;*
 - *Operational Activities; and*
 - *Business Development Activities.*
4. *The application of risk management should at least include:*
 - *Active supervision of the highest leader in each Process Owner;*
 - *Availability of policies, procedures and determination of adequate risk limits;*
 - *Determination of risk tolerance that is in line with the strategic plan, management, risk budgeting and the ability of the Corporation's management to manage the business portfolio;*
 - *The process of risk identifying, measuring, monitoring and controlling as well as a comprehensive risk management information system and the provision of integrated data;*
 - *Adequate procedures and requirements for evaluating and approving new business activities and changes to the implemented systems and work procedures;*
 - *A comprehensive internal control system;*
 - *The entirety of the Corporate business process; and*
 - *Increased knowledge about risk management, especially at the Management level.*

Meanwhile, the Risk Management Process itself is a description of the Risk Management Framework to facilitate the integration of the application of risk management at the corporate, work unit and individual levels.

The Corporation established a risk management framework that forms the basis for implementing all risk management activities at all levels of the Corporation. The Corporation's Risk Management framework helps the Corporation to manage risks effectively and will ensure that complete and adequate risk information obtained from the risk management process can be used as a basis for decision making.

SKEMA ALUR PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN CORPORATE RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION FLOW CHART

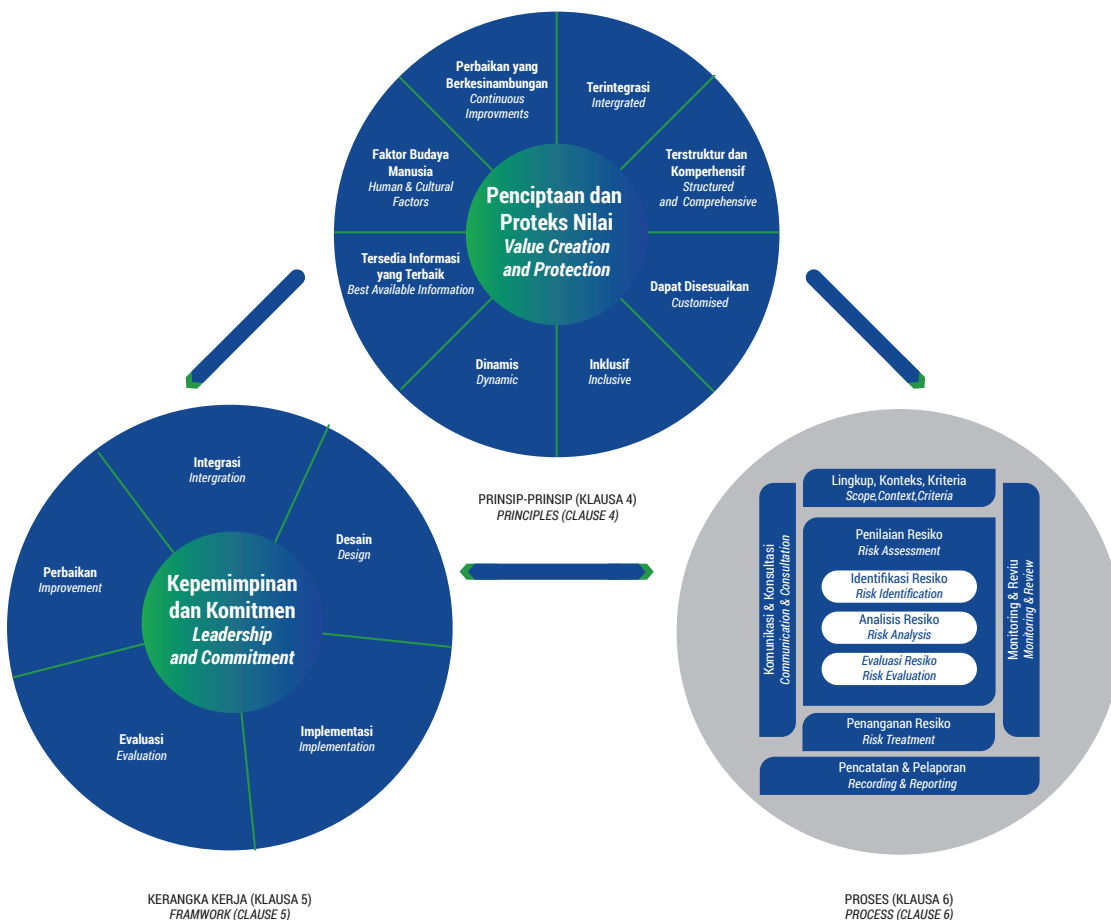
Manajemen Risiko Korporasi berbasis ISO 31000:2018 pada PT MRT Jakarta (Persero) didefinisikan menjadi: Suatu pendekatan yang terintegrasi, terstruktur dan sistematis yang didukung oleh seluruh aspek sumber daya Perseroan, guna mencapai peningkatan nilai bagi pemegang saham dengan melakukan implementasi prinsip, kerangka kerja dan proses atas pengelolaan seluruh aspek ketidakpastian risiko Perseroan dalam konteks internal dan eksternal Perseroan, yang menghasilkan informasi objektif untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga menciptakan budaya manajemen risiko yang proaktif, konsisten, dan relevan mengikuti perkembangan.

ISO 31000: 2018 based Corporate Risk Management at PT MRT Jakarta (Persero) can be defined as: An integrated, structured and systematic approach supported by all aspects of the Corporation's resources, in order to achieve value enhancement for shareholders, by implementing the principles, framework and process for managing all aspects of the Corporation's risk uncertainties in the internal and external Corporate contexts, which produces objective information to be used as a basis for decision making so as to create a culture of risk management that is proactive, consistent and relevant in light of new developments.

Sehubungan dengan komitmen Perseroan dalam menerapkan Manajemen Risiko Korporasi SNI ISO 31000:2018, Perseroan menerapkan alur proses manajemen risiko sesuai dengan ISO 31000:2018 sebagai berikut:

In relation to the Corporation's commitment in implementing ISO 31000:2018 Corporate Risk Management, the Corporation applies the following risk management process flow that is in accordance with ISO 31000:2018:

SKEMA ALUR PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO MRT JAKARTA Flowchart of MRT Jakarta's Risk Management Implementation



Figur 6.23
Figure 6.23

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko, Perseroan telah menyusun beberapa prosedur antara lain:

1. Prosedur Penentuan Konteks Risiko Perseroan (PER/033/BOD-MRT/XI/2018)
2. Prosedur Penilaian Risiko (PER/033/BOD-MRT/ XI/2018)
3. Prosedur Pelaporan Periodik Risiko (PER/033/BOD-MRT/ XI/2018)
4. Prosedur Penentuan Risiko Kritis Perseroan (PER/033/BOD-MRT/ XI/2018)
5. Prosedur Kajian Risiko Insidental (PER/033/BOD-MRT/ XI/2018)

To support the application of risk management, the Corporation has established several procedures, including:

1. Procedure for Determining Corporate Risk Context (PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018)
2. Risk Assessment Procedure (PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018)
3. Periodic Risk Reporting Procedures (PER / 033 / BOD- MRT / XI / 2018)
4. Corporate Critical Risk Determination Procedure (PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018)
5. Incidental Risk Assessment Procedure (PER / 033 / BOD-MRT / XI / 2018)

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEBERLANGSUNGAN USAHA DI PT MRT JAKARTA (PERSERODA)

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT (BCM) IMPLEMENTATION IN PT MRT JAKARTA

PT MRT Jakarta (Perseroda) menyadari bahwa saat operasi dan pemeliharaan berlangsung keselamatan penumpang dan juga keselamatan karyawan adalah hal utama yang mengesampingkan keberlangsungan usaha. Penerapan Manajemen Keberlangsungan Usaha merupakan salah satu upaya untuk melindungi nilai Perseroan "I CAN" (Integrity, Customer Focus, Achievement Orientation, dan Nurturing Teamwork) sehingga *framework* tersebut dilekatkan sebagai bagian dari implementasi Manajemen Risiko Korporasi.

MRT Jakarta is aware that during operation and maintenance, the safety of the passengers as well as employees is the main priority, without disregarding business continuity. The application of Business Continuity Management (BCM) is one of MRT Jakarta's efforts in protecting the Corporate value of "I CAN" (Integrity, Customer Focus, Achievement Orientation, and Nurturing Team Work). Thus, the framework is placed as part of the implementation of Corporate Risk Management

Keberadaan Manajemen Keberlangsungan Usaha didasari oleh Peta Jalan Manajemen Risiko yang dalam penyusunannya terlebih dahulu dilakukan penilaian risiko dan ancaman, dan disiapkan prosedur tanggap, pemulihan, dan restorasi apabila terjadi insiden. Kebijakan Manajemen Keberlangsungan Usaha di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) sudah ditetapkan melalui Peraturan Direksi Nomor PER/042/BOD-MRT/VIII/2019 yang menetapkan implementasi BCM sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman sebagai berikut:

The existence of BCM is based on the Risk Management Road Map, of which the preparation was preceded by risk and threat assessments and equipped with a response, recovery, and restoration procedure in the case of incidents. The policies of BCM in the PT MRT Jakarta (Perseroda) environment has been established through Directors'Decree number PER / 042 / BOD-MRT / VIII / 2019, which established BCM implementation in accordance with the following Policies and Guidelines:

1. Kebijakan Manajemen Keberlangsungan Usaha (BCM)
2. Pedoman Rencana Tanggap Darurat (ERP)
3. Pedoman Rencana Manajemen Krisis (CMP)
4. Pedoman Rencana Kesiambungan Bisnis (BCP)
5. Pedoman Rencana Pemulihan Bencana (DRP)

1. Business Continuity Management (BCM) Policy
2. Emergency Response Plan (ERP) Guidelines
3. Crisis Management Plan (CMP) Guidelines
4. Business Continuity Plan (BCP) Guidelines
5. Disaster Recovery Plan (DRP) Guidelines

Dalam persiapan menghadapi mulainya kegiatan operasional, Perseroan sudah melakukan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan Manajemen Keberlangsungan Usaha, yaitu:

In preparation for the commencement of the Jakarta MRT operations, several activities related to BCM have been carried out, namely:

| Waktu Time | Kegiatan Activities | Peserta Participant(s) |
|---------------------------------------|--|---|
| 18 Februari 2019 February 18, 2019 | Simulasi Keadaan Darurat Tim Manajemen Krisis (CMT) Crisis Management Team (CMT) Table Top Simulation | <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Direksi 2. Koordinator BCM 3. Koordinator Tim Tanggap Darurat (ER) 4. Koordinator Tim Komunikasi Krisis (CC) 5. Koordinator Tim Kesiambungan Bisnis (BC) 6. Koordinator Tim Pemulihan Bencana |

| Waktu Time | Kegiatan Activities | Peserta Participant(s) |
|---|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. All Directors 2. BCM Coordinator 3. Emergency Response (ER) Team Coordinator 4. Crisis Communication (CC) Team Coordinator 5. Business Continuity (BC) Team Coordinator 6. Disaster Recovery (DR) Team Coordinator |
| 5 dan 6 Maret 2019 March 5 and 6, 2019 | <p>Simulasi Kebakaran di Stasiun Dukuh Atas. Pada kegiatan ini, seluruh komponen Manajemen Keberlangsungan Usaha diaktifkan <i>Fire Drill Simulation at Dukuh Atas Station.</i> <i>All components of BCM which were activated during this simulation</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Karyawan Internal 2. Pihak Eksternal (Damkar, AGD Dinkes) 3. Undangan dan Volunteer <ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Employee 2. External Parties (Fire Rescue Squad, Health Office Emergency Ambulance) 3. Invitation and Volunteers |
| 20 Maret 2019 March 20, 2019 | <p>Simulasi Keadaan Darurat DRP <i>Disaster Recovery Plan (DRP) Table Top Simulation</i></p> | <p>Anggota tim Pemulihan Bencana <i>Disaster Recovery Team Members</i></p> |
| 21 Maret 2019 March 21, 2019 | <p>Simulasi Keadaan Darurat BCP <i>Business Continuity Plan (BCP) Table Top Simulation</i></p> | <p>Anggota tim Keberlangsungan Bisnis <i>Business Continuity Team Members</i></p> |

Tabel 6.112
table 6.112

Selama berjalannya operasi pada tahun 2019, Tim Manajemen Krisis (CMT) sudah beberapa kali diaktifkan.

During the course of operations in 2019, the Crisis Management Team (CMT) had been activated several times.

| Waktu Time | Kejadian Activities | Tindakan Action |
|----------------------------------|---|---|
| 22 Mei 2019 May 22, 2019 | <p>Unjuk rasa Pemilu Presiden <i>Demonstration during the Presidential Election Period</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan kondisi termutakhir melalui media massa dan CCTV; 2. Melakukan penutupan pintu masuk di beberapa stasiun melihat perkembangan pergerakan massa. <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitored the updated conditions through mass media and CCTV; 2. Entrance Closures at several stations to observe the developments of mass movements. |
| 4 Agustus 2019 August 4, 2019 | <p>Mati Listrik PLN, terjadi insiden pada PLN yang menyebabkan 2 pasokan listrik untuk operasional MRT mati <i>PLN power outage, which caused 2 electricity supply sources for MRT operations to go out</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evakuasi penumpang sesuai dengan SOP; 2. Anggota CMT dan tim terkait berkumpul di Pusat Komando untuk memantau perkembangan dan pemulihan; 3. Memberikan siaran pers kepada publik; 4. Melakukan uji coba perjalanan dengan kecepatan terbatas sebelum dibuka untuk masyarakat umum; 5. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait; 6. mekanisme pelayanan pasca insiden di hari tersebut. <ol style="list-style-type: none"> 1. Evacuated passengers according to the SOP; 2. CMT members and related teams gathered at the command center to monitor progress and recovery; 3. Delivered a Press Release to the public; 4. Executed limited travel testing before it was opened for the public again; |

| Waktu Time | Kejadian Activities | Tindakan Action |
|---|---|--|
| 17 September 2019 September 17, 2019 | Dip Power PLN, Insiden kedip tegangan yang berpengaruh kepada layanan operasi MRT terutama pada sistem AFC (Automatic Fare Collection) <i>Power Dip PLN, where voltage dip happened causing disruption in MRT's operation especially on AFC (Automatic Fare Collection) System</i> | <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemulihan secara manual di masing-masing stasiun; Anggota CMT dan tim terkait berkumpul di Pusat Komando untuk memantau perkembangan dan pemulihan; Memberikan siaran pers kepada publik; Melakukan investigasi dan upaya perbaikan teknis yang diperlukan <ol style="list-style-type: none"> Coordinated with the Provincial Government of DKI Jakarta regarding the post-incident service and operation mechanisms; On operation mechanism after the incident. <ol style="list-style-type: none"> Performed manual recovery efforts at each station; CMT members and related teams gathered at the Command Center to monitor progress and recovery; Provided press releases to the public; Conducted investigative and technical improvement efforts as required. |

Tabel 6.113
Table 6.113

Dokumentasi
Documentation

SIMULASI KEBAKARAN 5-6 MARET 2019
Fire Drill on March 5-6, 2019



Gambar 6.5
Image 6.5

SIMULASI KEADAAN DARURAT CMT 18 FEBRUARI 2019*CMT Table Top Simulation on February 18, 2019*Gambar 6.6
Image 6.6**SIMULASI KEADAAN DARURAT DRP 20 MARET 2019***DRP Table Top Simulation on March 20, 2019*Gambar 6.7
Image 6.7**SIMULASI KEADAAN DARURAT BCP 21 MARET 2019***BCP Table Top Simulation on March 21, 2019*Gambar 6.8
Image 6.8**EVALUASI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO PERSEROAN*****EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE CORPORATE RISK MANAGEMENT SYSTEM***

Evaluasi terhadap penerapan Sistem Manajemen Risiko Perseroan pada tahun 2019 dilakukan oleh PT Deloitte Konsultan Indonesia, pada tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020. Tujuan evaluasi penerapan Manajemen Risiko adalah untuk:

1. Menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses Manajemen Risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa tujuan dan sasaran Perseroan tercapai sebagaimana diharapkan.
2. Mengetahui tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko.
3. Mengidentifikasi penerapan Manajemen Risiko yang memerlukan peningkatan berikut rekomendasi perbaikan.

An evaluation of the application of the corporate risk management system in 2019 was carried out by PT Deloitte Konsultan Indonesia, from November 5, 2019 to January 24, 2020. The purpose of the evaluation of the application of risk management was to:

1. *Assess the adequacy of the design and effectiveness of the risk management process implementation as a management tool in providing confidence to stakeholders that the Corporate goals and objectives are achieved as expected.*
2. Find out the level of risk management maturity level.
3. Identify the application of risk management that requires improvements, followed by recommendations for improvements.

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi penerapan Manajemen Risiko pada PT MRT Jakarta (Perseroda) meliputi semua aspek yang mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang terbagi dalam sembilan komponen, yaitu:

1. Strategi Risiko
2. Selera Risiko
3. Profil Risiko
4. Struktur Tata Kelola
5. Kebijakan Risiko
6. Pemantauan dan Pelaporan Risiko
7. Pemodelan Risiko
8. Budaya Risiko
9. Teknologi Risiko

The scope of the evaluation of the implementation of risk management in PT MRT Jakarta (Perseroda) covered all aspects that support the implementation of risk management, which are divided into nine components, namely:

1. Risk Strategy
2. Risk Appetite
3. Risk Profile
4. Governance Structure
5. Risk Policies
6. Risk Monitoring and Reporting
7. Risk Modeling and Analysis
8. Risk Culture
9. Risk Technology

Hasil akhir evaluasi adalah skor/nilai capaian yang akan menunjukkan tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko di PT MRT Jakarta (Perseroda) yang diklasifikasikan ke dalam 5 kategori sebagai berikut:

The final result of the evaluation is the score/achievement value, which indicates the level of risk management maturity at PT MRT Jakarta (Perseroda), which can be classified into 5 (five) categories as listed below:

| Tingkat Kematangan <i>Maturity level</i> | Nilai Capaian <i>Score</i> | Ciri Kapabilitas <i>Characteristic of Capability</i> |
|---|-------------------------------|--|
| <i>Initial</i> | 1 | Kegiatan belum terdefiniskan, tidak terdokumentasi, dan tidak terorganisir. Proses bergantung pada kontribusi dari pelaku/individu kunci. <i>The activities are undefined, undocumented and unorganized. The process depends on contributions from key actors / individuals.</i> |
| <i>Repeatable</i> | 2 | Proses dasar sudah terbentuk dan dilakukan secara berulang, namun masih bergantung pada inisiatif berlanjut dari pelaku proses. <i>The basic process has been formed and carried out repeatedly, but still depends on the continuous initiatives of the process' actors.</i> |
| <i>Defined</i> | 3 | Kegiatan dan proses telah terdefiniskan dan terstandardisasi serta menjadi bagian dari kegiatan Perseroan. <i>The activities and processes have been defined and standardized, and have become part of the Corporation's activities.</i> |
| <i>Managed</i> | 4 | Risiko terus dianalisis, diukur, dan dikelola dalam Perseroan. <i>Risks continue to be analyzed, measured, and managed within the Corporation.</i> |
| <i>Optimized</i> | 5 | Perseroan berfokus pada pengembangan berkelanjutan dari proses yang sudah dibentuk. Manajemn Risiko menjadi suatu keunggulan kompetitif. <i>The Corporation focuses on the continuous developments of the processes that have been formed. Risk management becomes a competitive advantage.</i> |

Tabel 6.114
Table 6.114

Berdasarkan hasil evaluasi melalui metode survei, Diskusi Kelompok Terarah serta Observasi, & Reviu Dokumen, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Based on the evaluation results through the survey method, Focus Group Discussion (FGD) and Observation & Document Review, the following results are obtained:

| No | Komponen/Atribut Penerapan MR <i>Components / Attributes of RM Implementation</i> | Survei | Diskusi Kelompok Terarah | Observasi & Reviu Dokumen | Tingkat Kematangan (Maturity Level) | |
|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------|
| | | <i>Survey</i> | <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> | <i>Document Observation & Review</i> | Nilai Akhir | Keterangan |
| | | (Bobot 20%) <i>(Weight 20%)</i> | (Bobot 20%) <i>(Weight 20%)</i> | (Bobot 60%) <i>(Weight 60%)</i> | Final Score | Notes |
| 1 | Strategi Risiko <i>Risk Strategy</i> | 4.51 | 3.67 | 3.67 | 3.84 | Defined |
| 2 | Selera Risiko <i>Risk Appetite</i> | 4.26 | 3.33 | 3.33 | 3.52 | Defined |
| 3 | Profil Risiko <i>Risk Profile</i> | 4.24 | 3.17 | 3.17 | 3.38 | Defined |
| 4 | Struktur Tata Kelola <i>Governance Structure</i> | 4.17 | 3.83 | 3.50 | 3.70 | Defined |
| 5 | Kebijakan Risiko <i>Risk Policies</i> | 4.26 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | Defined |
| 6 | Pemantauan dan Pelaporan Risiko <i>Risk Monitoring & Reporting</i> | 4.12 | 3.00 | 3.17 | 3.32 | Defined |
| 7 | Analisis & Pemodelan Risiko <i>Risk Modeling & Analysis</i> | 4.13 | 3.25 | 3.25 | 3.43 | Defined |
| 8 | Budaya Risiko <i>Risk Culture</i> | 3.94 | 3.17 | 3.00 | 3.22 | Defined |
| 9 | Teknologi Risiko <i>Risk Technology</i> | 4.25 | 3.80 | 3.70 | 3.83 | Defined |
| Total Nilai Matury <i>Total Maturity Value</i> | | 4.21 | 3.47 | 3.36 | 3.55 | Defined |

Tabel 6.115
Table 6.115

JENIS-JENIS RISIKO PERSEROAN TAHUN 2019 DAN PENGELOLAANNYA

TYPES OF CORPORATE RISKS IN 2019 AND THEIR MANAGEMENT

Sejalan dengan komitmen Direksi Perseroan untuk mengimplementasikan pengelolaan risiko secara efektif di setiap jenjang korporasi, Perseroan harus memperhatikan prioritas kegiatan untuk keberhasilan pencapaian tujuan Perseroan berdasarkan Toleransi Risiko/Selera Risiko yang telah ditetapkan Perseroan.

In line with the commitment of the Directors to implement risk management effectively at every Corporate level, the Corporation must pay attention to the priority of activities for the successful achievements of the Corporation's objectives based on the Risk Tolerance/Risk Appetite set by the Corporation.

URAIAN TENTANG RISIKO TAHUN 2019

DESCRIPTION OF RISKS IN 2019

Dalam penerapan Manajemen Risiko Perseroan, Divisi *Risk Management & QSSHE Assurance* menyusun kebijakan yang sudah ditandatangani Direksi, di mana salah satu isinya adalah matriks peringkat risiko yang dapat menunjukkan peringkat risiko dan selera risiko Perseroan.

In implementing Corporate risk management, the Risk Management & QSSHE Assurance Division compiled policies that had been signed by the Directors, one of which was a risk rating matrix that could indicate the risk rating and risk appetite of the Corporation.

| Kemungkinan <i>Likelihood</i> | Konsekuensi <i>Consequences</i> | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Minor <i>Minor</i> | Sedang <i>Moderate</i> | Signifikan <i>Significant</i> | Parah <i>Severe</i> |
| Hampir pasti <i>Almost certain</i> | H | H | E | E |
| Mungkin <i>Likely</i> | M | H | E | E |
| Tidak mungkin <i>Unlikely</i> | L | M | H | E |
| Langka jarang <i>Rare</i> | L | L | M | H |

E=Extreme; H=High; M=Medium; L=Low

Garis Hitam (cetak tebal) merupakan *risk attitude/risk appetite*;

Wilayah dibawah garis hitam (cetak tebal) merupakan batas toleransi (*risk tolerance*);

E = Extreme; H = High; M = Medium; L = Low

Black Line (Bold) is *risk attitude/risk appetite*; The area below the black line (thick print) is the *risk tolerance*;

Tabel 6.116

Table 6.116

Pada tahun 2019 ini, jumlah *Risk Register* yang terkumpul dari seluruh unit kerja sebanyak 221 (dua ratus dua puluh satu) risiko. Dari risiko –risiko tersebut, ada 27 (dua puluh tujuh) risiko yang berdasarkan penilaian, berada di atas toleransi risiko yang sudah ditetapkan.

In 2019, the number of risk registers collected from all work units was 221 (two hundred twenty one) risks. Of these risks, there were 27 (twenty seven) risks that, based on assessments, were above the accepted level of risk tolerance.

Risiko Operasional *Operational Risks*

Deskripsi Risiko:

Pencabutan izin operasional kereta MRT karena rekomendasi teknis sarana dari Kemenhub belum ditindaklanjuti sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (bulan Maret 2020) sehingga dapat mengakibatkan tidak tercapainya pemenuhan aspek keandalan pada SPM dan terhentinya operasional kereta MRT.

Tindakan Mitigasi yang Dilakukan:

1. MRT Jakarta melakukan penunjukan kepada INKA untuk melakukan penyesuaian rasio selisih beban roda dan telah dilaksanakan *kick off meeting* tanggal 27 Desember 2019;
2. Melakukan negosiasi dengan DJKA untuk memperpanjang periode tindak lanjut yang terdapat di Rekomendasi Teknis.

Risk Description:

The revocation of MRT trains' operational permit due to technical recommendations related to facilities from the Ministry of Transportation have not been followed up by the set deadline (March 2020), which may lead to the failure in fulfilling the reliability aspect of the Indonesian Minimum Service Standards and halt MRT train operations.

Mitigation Actions Performed:

1. *MRT Jakarta appointed INKA to adjust the wheel load difference ratio, for which a kick-off meeting was held on December 27, 2019;*
2. *Negotiated with Directorate General of Railways (DJKA) to extend the follow-up period set in the Technical Recommendations.*

Tabel 6.117

Table 6.117

Risiko Strategis *Strategic Risks*

Deskripsi Risiko:

Kegagalan pengadaan ulang CMCS karena jadwal pelaksanaan pengadaan yang terbatas dan calon penyedia jasa tidak memenuhi kualifikasi sehingga mengakibatkan keterlambatan *commencement date* CP 201.

Tindakan Mitigasi yang Dilakukan:

1. Panitia telah melakukan simulasi evaluasi dengan kriteria yang telah dimutakhirkan dan telah mengirimkan surat balasan kepada JICA tanggal 13 Desember 2019;

Risiko Strategis Strategic Risks

- Pada 23 Desember 2019, JICA menyampaikan tanggapannya melalui surat No 778/PRJ/12/2019 Perihal *2nd Comment on Technical Evaluation Report of Construction Management and Construction Supervision (CMCS) 2nd Phase* yang menyatakan agar MRT Jakarta melakukan tender klarifikasi kepada *Bidder*.

Risk Description:

The failure to re-procure CMCS was due to the limited procurement schedule and the unqualified prospective service providers, resulting in a delayed CP 201 commencement date.

Mitigation Actions Performed:

- The committee has conducted an evaluation simulation with updated criteria and has sent a reply letter to JICA on December 13, 2019;
- On December 23, 2019, JICA submitted its response through letter No. 778 / PRJ / 12/2019 Regarding *2nd Comment on Technical Evaluation Report of Construction Management and Construction Supervision (CMCS) 2nd Phase* stating that MRT Jakarta should conduct tender clarifications to Bidders.

Tabel 6.118
Table 6.118

Risiko Strategis Strategic Risks

Deskripsi Risiko:

Kegagalan proses pelelangan ulang CP 202-203 karena jadwal pelaksanaan pengadaan dan konstruksi yang terbatas serta calon penyedia jasa tidak memenuhi kualifikasi sehingga mengakibatkan keterlambatan *commencement date* CP 201 dan CP 205.

Tindakan Mitigasi yang Dilakukan:

- Bersurat ke JICA tanggal 13 Desember 2019 terkait:
 - Revisi Dokumen Tender (perpanjangan masa konstruksi, penyesuaian *key dates*, perpanjangan periode *bid submission*);
 - Staging operation* (CP 201 di Desember 2024, CP 202 – 203 di September 2025).
- Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait (SDA, Dishub) tanggal 19 Desember 2019.
- Sudah dilakukan *Project Orientation* tanggal 7 Januari 2020 mengundang *potential contractor* untuk mensosialisasikan perubahan spesifikasi pada dokumen *retender* CP 202 – 203.

Risk Description:

The CP 202-203 re-auction process failed due to the limited procurement and construction implementation schedule and the unqualified prospective service providers, resulting in the delay in the commencement date for CP 201 and CP 205.

Mitigation Actions Performed:

- Wrote to JICA on December 13, 2019 regarding the following:
 - Revision of Tender Documents (extension of construction period, key date adjustments, extension of bid submission period);
 - Staging operation* (CP 201 in December 2024, CP 202 - 203 in September 2025).
- Held a coordination meeting with relevant Regional Working Units or SKPD (SDA, Dishub) on December 19, 2019 .
- Conducted a Project Orientation on January 7, 2020 and invited a potential contractor to socialize changes to the specifications in the CP 202-203 re-tender document.

Tabel 6.119
Table 6.119

Risiko Keuangan Financial Risks

Deskripsi Risiko:

Kekurangan penerimaan subsidi karena:

- Terdapat perbedaan target jumlah penumpang yang digunakan oleh Dishub DKI dengan MRT Jakarta;
- Perseroan hanya dibayarkan subsidi 50% dari target awal dan sisanya ditangguhkan karena Pemprov DKI mengalami defisit.

Tindakan Mitigasi yang Dilakukan:

- MRT Jakarta telah mencatat seluruh pengembalian Uang Muka sebagai pendapatan sedangkan sisa tagihan yang belum dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dicatatkan sebagai piutang;

Risiko Keuangan Financial Risks

2. Melakukan evaluasi atas capaian jumlah pengguna jasa per stasiun pada tahun 2019 untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan target per stasiun tahun 2020;
3. MRT Jakarta mendorong diterbitkannya surat pengakuan utang dari Pemprov DKI Jakarta untuk kepastian pembayaran sisa tagihan subsidi 2019.

Risk Description:

Lack of receipt of subsidies due to:

1. *A difference in the target number of passengers used by the Jakarta Transportation Agency and MRT Jakarta;*
2. *The Corporation was only paid 50% of the initial target and the remainder was suspended because the DKI Jakarta Provincial Government was experiencing a deficit.*

Mitigation Actions Performed:

1. *MRT Jakarta has recorded all down payments as revenue while the remaining bills that have not been paid by the DKI Jakarta Provincial Government are recorded as receivables.*
2. *Evaluated the achievement of the number of service users per station in 2019 to be used as a reference in determining the target per station in 2020.*
3. *MRT Jakarta encouraged the issuance of a letter of acknowledgment of debt from the DKI Jakarta Provincial Government to ensure payment of the remaining 2019 subsidy bills.*

Tabel 6.120
Table 6.120

Risiko Strategis Strategic Risks

Deskripsi Risiko:

Potensi keterlambatan relokasi utilitas Fase 2 karena pemilik utilitas tidak memiliki anggaran.

Tindakan Mitigasi yang Dilakukan:

1. Telah dilakukan pembahasan teknis relokasi PLN 150 kv pada 18 Dec 2019, PLN UIP JBB akan melakukan kajian dampak teknis, biaya, dan risiko atas opsi relokasi yang dibahas;
2. Direksi MRT Jakarta akan melakukan pertemuan dengan Direksi PLN dengan agenda penyampaian *schedule detail* kebutuhan lahan dan kajian dampak *cost* dari mitigasi teknis yang perlu dilakukan PLN selama pekerjaan konstruksi Fase 2 yaitu menonaktifkan kabel, menggeser kabel PLN, atau proteksi kabel PLN.

Risk Description:

Potential delays in phase 2 utility relocation because utility owners did not have a budget

Mitigation Actions Performed:

1. *Conducted a technical discussion on the relocation of PLN 150 kv on December 18, 2019, PLN UIP JBB will conduct a technical impact, cost and risk assessment of the relocation options discussed;*
2. *MRT Jakarta Directors will hold a meeting with the PLN Directors with the agenda of delivering a detailed schedule of land requirements and a study of the cost impacts of technical mitigation that PLN needs to do during the phase 2 construction work which is deactivating cables, sliding PLN cables or protecting PLN cables.*

Tabel 6.121
Table 6.121

Risiko Strategis Strategic Risks

Deskripsi Risiko:

Keterlambatan mulainya pengadaan CP 206 karena keterlambatan JICA *concurrency*.

Tindakan Mitigasi yang Dilakukan:

1. JICA pada dasarnya belum setuju dengan jumlah 6 *trainset* dan akan menunggu kepastian depo Fase 2 untuk mengeluarkan *concurrency* CP 206;

Risiko Strategis Strategic Risks

- MRT Jakarta akan mengusulkan untuk dilakukan tender kereta sejumlah kebutuhan kereta Fase 2 & 2B. Dari rencana tersebut, diusulkan untuk dilakukan pengiriman sebanyak 3 *batch*;
- JICA sedang melakukan cek market apakah kontraktor bisa mengikuti pengadaan konstruksi MRT Jakarta Fase 2. Jika tidak, alternatifnya adalah mencari sumber dana lain selain Jepang.

Risk Description:

A delay in the start of procurement of CP 206 due to JICA concurrence delays.

Mitigation Actions Performed:

- On principles, JICA has not agreed with the number 6 (six) trainsets and will wait for the certainty of the phase 2 depot to issue the CP 206 concurrence;*
- MRT Jakarta will propose to tender a number of railroad for phases 2 & 2B. From the plan, it is proposed to deliver in 3 (three) batches;*
- JICA is conducting a market check to see whether the contractor can participate in the MRT Jakarta phase 2 construction. If not, the alternative is to find another source of funds other than Japan.*

Tabel 6.122
Table 6.122

Risiko Operasional Operational Risks

Deskripsi Risiko:

Kerusakan *Overhead Contact System* (OCS) yang disebabkan oleh keausan *contact wire* yang sangat tinggi di beberapa titik di jalur bawah tanah.

Tindakan Mitigasi yang Dilakukan:

- Telah dilakukan pemasangan *Emergency Contact Wire* di 5 titik dengan tingkat yang tinggi. Saat ini dilakukan pengadaan jasa pemasangan *Emergency Contact Wire*;
- Melakukan studi untuk mencegah terjadinya keausan yang tinggi di titik-titik tersebut;
- Mengubah skema operasi menggunakan 4 *pantograph* akan dilakukan di bulan Januari 2020;
- PMRS sedang menyusun TOR untuk Tenaga Ahli untuk mencari *root cause* keausan *contact wire*;
- Merencanakan modifikasi pada *contact wire* baik itu dari kandungan materialnya maupun ukuran.

Risk Description:

Overhead Contact System (OCS) damage caused by very high contact wire wear at several points on the Underground line.

Mitigation Actions Performed:

- Emergency Contact Wire installations at 5 points with high levels of wear. Currently, the procurement of Emergency Contact Wire installation services is being carried out;*
- Conducted studies to prevent high wear at these points;*
- Changed the operation scheme using 4 pantograph, the action will be conducted in January 2020;*
- PMRS is preparing a TOR for experts to find the root cause of contact wire wear;*
- Planned for modifications to the contact wire, both in the material content and the size of the contact wire.*

Tabel 6.123
Table 6.123

Risiko Strategis Strategic Risks

Deskripsi Risiko:

Potensi temuan audit oleh auditor eksternal karena belum adanya prosedur pengadaan *Nominated Sub Contractor* (NSC) pada SOP pengadaan yang berlaku di Perseroan sehingga hasil pengadaan NSC tidak dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.

Tindakan Mitigasi yang Dilakukan:

- Berdasarkan hasil konsultasi dengan LKPP dan BPKP, penambahan klausul "*nominated sub contractor* (NSC)" pada SOP Pengadaan yang berlaku di Perseroan dianggap cukup untuk menjadi dasar pengadaan NSC. Saat ini Bagian Pengadaan sedang menyusun *draft Working Instruction* untuk prosedur pengadaan NSC;
- MRT Jakarta telah mengirimkan *warning of poor response letter* ke Nippon Signal pada 31 Desember 2019.

Risiko Strategis Strategic Risks

Risk Description:

Potential audit findings by external auditors due to the absence of a Nominated Sub Contractor (NSC) procurement procedure in the procurement SOPs applicable in the Corporation, hence the results of the NSC procurement cannot be accounted for in the future.

Mitigation Actions Performed:

1. Based on the results of the consultations with the National Public Procurement Agency (LKPP) and the National Government Internal Auditor (BPKP), the addition of the "nominated sub contractor (NSC)" clause to the Procurement SOP used by the Corporation is considered sufficient to be the basis for the procurement of the NSC. Currently, Procurement is preparing a draft of Working Instruction for NSC procurement procedures;
2. MRT Jakarta has sent a warning of poor response letter to Nippon Signal on 31 December 2019.

Tabel 6.124
Table 6.124

Risiko Strategis Strategic Risks

Deskripsi Risiko:

Tidak tersedianya lahan (Stasiun, Depot, CT/VT) untuk pembangunan Fase 2 karena:

1. Tidak tersedianya anggaran untuk pembebasan lahan setiap bulan Januari-Maret APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun berjalan;
2. Surat tugas P2T (Panitia Pengadaan Tanah) yang dibentuk BPN akan berakhir di tahun 2019;
3. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan mulainya konstruksi Fase 2.

Tindakan Mitigasi yang Dilakukan:

Berkoordinasi dengan Dishub terkait status penugasan P2T; Dishub bersurat kepada BPN untuk meminta perpanjangan penugasan P2T atau pembentukan panitia baru.

Risk Description:

Unavailability of land (Stations, Depot, CT / VT) for Phase 2 development due to:

1. Unavailability of budget for land acquisition every January - March APBD (Regional Revenue and Expenditure Budget) of the current year;
2. The P2T (Land Acquisition Committee) assignment letter established by BPN will end in 2019;
3. This can result in a delay in the start of phase 2 construction.

Mitigation Actions Performed:

Coordinated with the Transportation Agency regarding the status of the P2T assignment, in which the Transportation Agency corresponds with the National Land Agency to request for an extension of the P2T assignment or the formation of a new committee.

Tabel 6.125
Table 6.125

Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Safety and health risks

Deskripsi Risiko:

Potensi kejadian kebakaran tidak dapat sejak dini tertangani dengan baik karena ketidaksesuaian dengan Perda 8/2008.

Tindakan Mitigasi yang Dilakukan:

1. Sudah dilakukan pemasangan 350 Alat Pemadam Api Ringan (APAR) baru dan reposisi APAR sebanyak 524;
2. Telah diadakan 100 APAR powder untuk menutupi kekurangan tersebut. Sisa kekurangan APAR akan diadakan menggunakan anggaran 2020.

Risk Description:

Potential fire incidents could not be handled early and properly due to incompatibilities with Perda 8/2008.

Mitigation Actions Performed:

1. Installations of 350 new Lightweight Fire Extinguishers (APAR) and repositions of 524 APARs;
2. Provisions of 100 APAR powder to mitigate the shortage. The remaining APAR shortages will be provided using the 2020 budget.

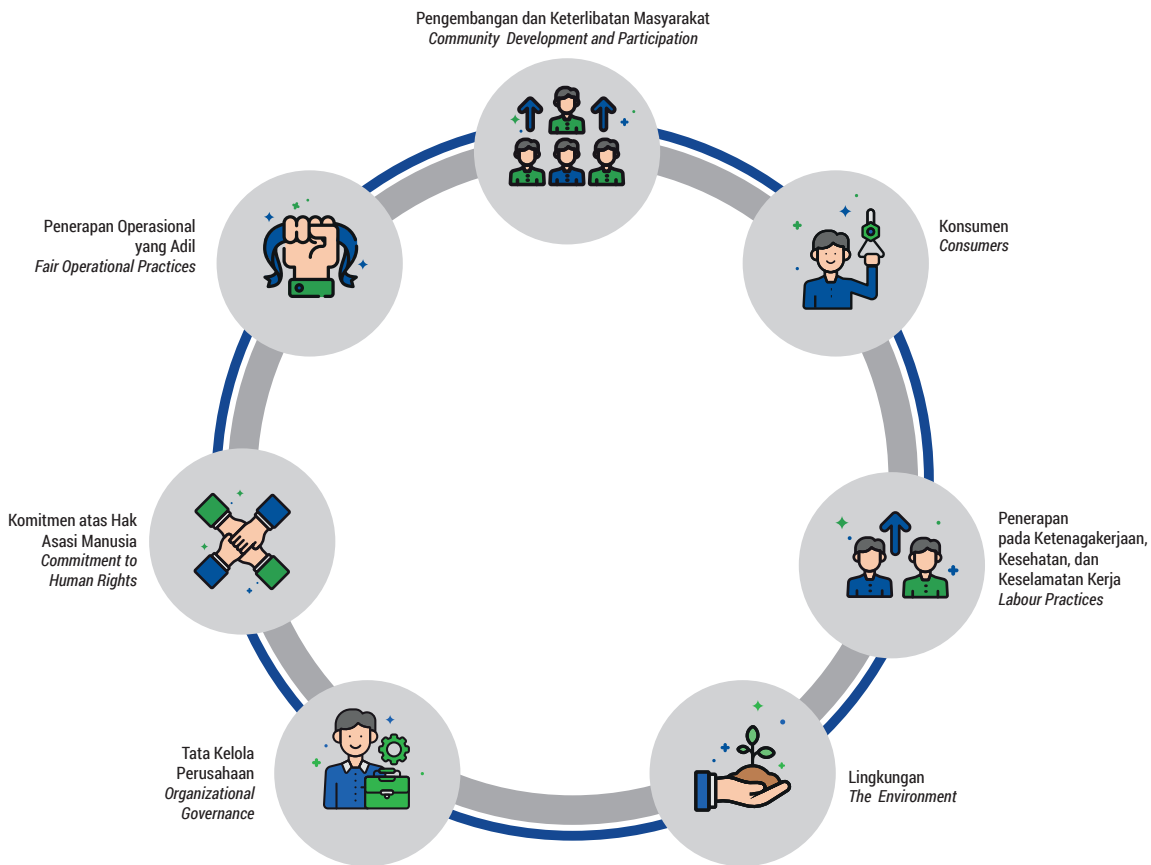
Tabel 6.126
Table 6.126

TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang menekankan pada keberlanjutan pengembangan masyarakat dan lingkungan. Tanggung Jawab Sosial menjadi wadah bagi Perseroan dalam membangun hubungan tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi proyek dan pengguna jasa. Terkait pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan membaginya ke dalam 7 (tujuh) aspek, sesuai ISO 26000 sebagai standar internasional dalam pelaksanaan CSR.

The Corporation is committed to implement Corporate Social Responsibility activities that emphasize on sustainable developments of communities and environment. Corporate Social Responsibility is a platform for the Corporation to build collective growth relationships with stakeholders, whether internally such as with the management and employees or externally such as with the communities surrounding the project and consumers. With regards to the implementation of Corporate Social Responsibility, the Corporation divides it into 7 (seven) aspects, in accordance with ISO 26000 as the international standard in CSR implementation.



Figur 6.24
Figure 6.24

Selengkapnya tentang pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan oleh Perseroan dapat dilihat pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Perseroan juga menyusun Laporan Keberlanjutan Perseroan yang pertama dirilis pada buku terpisah.

More information on Corporate Social Responsibility implementation by the Corporation can be found on the Corporate Social Responsibility chapter of this Annual Report. The Corporation also prepared a Corporate Sustainability Report that was initially released in a separate report.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERSEROAN

ACCESS TO CORPORATE INFORMATION AND DATA

Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan untuk mengakses informasi dan data Perseroan melalui situs web www.jakartamrt.co.id yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain sebagai sarana penyebaran informasi kepada publik, situs web ini juga merupakan upaya Perseroan dalam menerapkan praktik Tata Kelola Perusahaan dan transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan.

The Corporation strives to make it easy and simple for stakeholders to access Corporate information and data through jakartamrt.co.id that is available in Bahasa Indonesia and English. In addition to being an informative platform for the public, this website is also the Corporation's effort in applying GCG practices and transparency to all stakeholders.

Untuk memperoleh laporan tahunan dan informasi lainnya dari Perseroan, dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan di Kantor Pusat PT MRT Jakarta (Perseroda), dengan alamat sebagai berikut:

To obtain annual reports and other information on the Corporation, please contact the Corporate Secretary at the PT MRT Jakarta (Perseroda) Headquarter at the following address:

PT MRT Jakarta (Perseroda)
Wisma Nusantara Lt. 21-23
Jl. MH Thamrin 59
Jakarta 10350 - Indonesia

 (62)21 3906454
 (62)21 3155846
 1500 332 (24 jam)
 jakartamrt.co.id

TATA KELOLA INFORMASI DAN AKSES DATA PERSEROAN UNTUK PIHAK EKSTERNAL

CORPORATE INFORMATION AND DATA ACCESS GOVERNANCE FOR EXTERNAL PARTIES

Perseroan menyediakan akses informasi dan data Perseroan untuk pihak eksternal dengan cara berikut:

The Corporation provides access to Corporate information and data for external parties in the following ways:

Pengelolaan Situs Web

Website Management

Perseroan telah memiliki situs web resmi yang mencerminkan identitas Perseroan dan dapat diakses melalui www.jakartamrt.co.id. Situs web ini menyediakan berbagai informasi, antara lain mengenai profil perseroan, visi dan misi, bidang usaha, informasi keuangan, berita terbaru, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, keterbukaan informasi, dan lain-lain.

The Corporation has set up an official website that reflects the Corporate identity and can be accessed via jakartamrt.co.id. This website provides a plethora of information, including the corporate profile, vision & mission, business sector, financial information, news, corporate social responsibility, information disclosure, and others.

Situs web Perseroan juga telah tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan. Situs web Perusahaan juga menyediakan nomor kontak serta alamat surat elektronik dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan.

The Corporate website is also available in 2 (two) languages, which are Bahasa Indonesia and English. The Corporation periodically updates the website to continuously provide the latest information to stakeholders. The Corporate website also provides the contact number as well as email and postal addresses that can be contacted for further communication with stakeholders.

Jejaring Sosial Perseroan

Corporate Social Network

Perseroan juga memperhatikan perkembangan media sosial sebagai fasilitas komunikasi dan interaksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Perseroan membuka kanal komunikasi daring.

The Corporation is well informed of the developments of social media as a communication facility for interaction with all stakeholders. As such, the Corporation has set up its online communication channels

 @mrtjkt  @mrtjakarta  MRT Jakarta  MRTv  jakartamrt.co.id

Siaran Pers/Rilis Media dan Hubungan Media

Press Releases / Media Releases and Media Relations

Perseroan memanfaatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarluaskan informasi tentang Perseroan kepada khalayak. Berikut disampaikan siaran pers/rilis media serta hubungan media yang dilakukan di sepanjang tahun 2019.

The Corporation utilizes the mass media as partners to spread information about the Corporation to the masses. The following is a list of press / media releases and media relations activities that took place throughout 2019.

Januari 2019

January 2019

09 [SIARAN PERS] Rekayasa Lalu Lintas Persimpangan Jalan Dr. Satrio dan Jalan Jenderal Sudirman
[PRESS RELEASE] Road Traffic Traffic Simulation of Dr. Satrio and Jenderal Sudirman Roads

15 [SIARAN PERS] SHES Award MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] SHES Award MRT Jakarta

18 [SIARAN PERS] Pelibatan Publik Terbatas
[PRESS RELEASE] Limited Public Engagement

22 [SIARAN PERS] MOU MRT Jakarta-Kodam Jaya
[PRESS RELEASE] MRT Jakarta - Kodam Jaya MOU

24 [SIARAN PERS] Seleksi Mitra UMKM MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] MRT Jakarta MSME Partner Selection

Februari 2019

February 2019

02 [SIARAN PERS] Uji Coba Publik MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] MRT Jakarta Public Trial

Maret 2019

March 2019

01 [SIARAN PERS] Penataan Arus Lalu Lintas Jalan Kendal
[PRESS RELEASE] Traffic Management in Kendal Road

04 [SIARAN PERS] Registrasi Online untuk Uji Coba Publik MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] Online Registration for MRT Jakarta Public Trial

05 [SIARAN PERS] Pendaftaran Hari Pertama Uji Coba Publik
[PRESS RELEASE] Registration for the First Day of Public Trial

06 [SIARAN PERS] Penjelasan PT MRT Jakarta Terkait Kebakaran Pasar Blok A
[PRESS RELEASE] Explanation of PT MRT Jakarta Regarding Blok A Market Fire

[SIARAN PERS] Pendaftaran Hari Kedua Uji Coba Publik
[PRESS RELEASE] Registration for the Second Day of Public Trial

08 [SIARAN PERS] Pendaftaran Hari Keempat Uji Coba Publik
[PRESS RELEASE] Registration for the Fourth Day of Public Trial

24 [SIARAN PERS] Tata Cara Menggunakan MRT Jakarta Fase Operasi Tidak Berbayar
[PRESS RELEASE] Procedures for Using the MRT Jakarta during the Free Operation Phase

27 [SIARAN PERS] Earth Hour 2019
[PRESS RELEASE] Earth Hour 2019

30 [SIARAN PERS] Dimulainya Operasi Komersil MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] The Commencement of MRT Jakarta Commercial Operations

31 [SIARAN PERS] Tarif MRT Jakarta selama April 2019
[PRESS RELEASE] Jakarta MRT Rates in April 2019

April 2019

April 2019

01 [SIARAN PERS] Operasi Komersial MRT Jakarta Hari Pertama
[PRESS RELEASE] MRT Jakarta's First Day of Commercial Operation



April 2019

April 2019

05 [SIARAN PERS] Perkembangan Penggunaan Uang Elektronik di MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] *Developments in the Use of Electronic Money in the Jakarta MRT*

10 [SIARAN PERS] Siaran Pers Gubernur Anies Resmikan Penamaan Stasiun ASEAN MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] *Governor Anies Officiated the Naming of MRT Jakarta ASEAN Station*

30 [SIARAN PERS] Peresmian Kawasan Terintegrasi dan Air Siap Minum Dukung Atas
[PRESS RELEASE] *The Inauguration of the Integrated Area and Ready-to-Drink Water in Dukung Atas*

Mei 2019

May 2019

02 [SIARAN PERS] Penandatanganan Nota Kesepahaman PT MRT Jakarta dan Cross Rail
[PRESS RELEASE] *Signing of Memorandum of Understanding between of PT MRT Jakarta and Cross Rail*

10 [SIARAN PERS] Penerapan Tarif Normal
[PRESS RELEASE] *Application of Normal Rates*

22 [SIARAN PERS] Rekayasa Jalur MRT Jakarta 23 Mei 2019
[PRESS RELEASE] *MRT Jakarta Route Simulation on May 23, 2019*

23 [SIARAN PERS] MRT Jakarta Beroperasi Penuh Kembali 24 Mei 2019
[PRESS RELEASE] *MRT is Fully Operational Again by May 24, 2019*

31 [SIARAN PERS] Penandatanganan Adendum I Perjanjian Kerja Sama MRT Jakarta & Pasar Jaya
[PRESS RELEASE] *Signing of Addendum I of the MRT Jakarta & Pasar Jaya Cooperation Agreement*

Juni 2019

June 2019

10 [SIARAN PERS] #JelajahiJakarta Edisi Lebaran
[PRESS RELEASE] *#ExploreJakarta Eid Edition*

12 [SIARAN PERS] Penggantian Komisaris dan Pengangkatan Komisaris Utama
[PRESS RELEASE] *Replacement of Commissioners and Appointment of President Commissioner*

19 [SIARAN PERS] Penandatanganan Pakta Integritas Pengadaan Fase 2
[PRESS RELEASE] *Signing of Phase 2 Integrity Pact*

Juli 2019

July 2019

03 [SIARAN PERS] Penandatanganan Nota Kesepahaman PT MRT Jakarta dan PT Blue Bird Tbk
[PRESS RELEASE] *The Signing of the Memorandum of Understanding of PT MRT Jakarta and PT Blue Bird Tbk*

11 [SIARAN PERS] Penandatanganan Nota Kesepahaman PT MRT Jakarta dan ITDP Indonesia
[PRESS RELEASE] *Signing of the Memorandum of Understanding between PT MRT Jakarta and ITDP Indonesia*

13 [SIARAN PERS] Upaya Peningkatan Pelayanan kepada Pengguna MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] *Efforts to Improve Services for MRT Jakarta Users*

24 [SIARAN PERS] Mural Persahabatan Terowongan Kendal
[PRESS RELEASE] *The Friendship Mural of Kendal Tunnel*

Agustus 2019

August 2019

03 [SIARAN PERS] Sosialisasi Panduan Standar
[PRESS RELEASE] *Standard Guidelines Socialization*

04 [SIARAN PERS] MRT Jakarta Kembali Membuka Layanan
[PRESS RELEASE] *MRT Jakarta Reopens Service*

[SIARAN PERS] MRT Jakarta Beroperasi Normal Kembali 4 Agustus 2019
[PRESS RELEASE] *MRT Jakarta Operates Normally again by August 4, 2019*

Agustus 2019

August 2019

- 06** [SIARAN PERS] Kronologi Evakuasi dan Ketersediaan Pasokan Listrik Menjamin Keandalan Operasional MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] *Evacuation Chronology and Availability of Electricity Supply Ensure the Reliability of MRT Jakarta Operations*

- 08** [SIARAN PERS] Partipasi MRT Jakarta Dalam Rangka ASEAN Day
[PRESS RELEASE] *MRT Jakarta's Participation in ASEAN Day*

- 15** [SIARAN PERS] MOU MRT Jakarta-Seoul Metro
[PRESS RELEASE] *MRT Jakarta MOU - Seoul Metro*

[SIARAN PERS] Kolaborasi Intiland dan MRT Jakarta Luncurkan *Park & Ride SQ*
[PRESS RELEASE] *Intiland and MRT Jakarta Collaboration Launch Park & Ride SQ*

- 16** [SIARAN PERS] Klarifikasi Siaran Pers MOU MRT Jakarta - Seoul Metro
[PRESS RELEASE] *Clarification of MRT Jakarta MOU Press Release - Seoul Metro*

- 23** [SIARAN PERS] Uji Coba Penutupan Jalur Busway Lebak Bulus
[PRESS RELEASE] *Trial Closing of the Lebak Bulus Busway Line*

September 2019

September 2019

- 10** [SIARAN PERS] Penandatanganan MOU antara PT MRT Jakarta dan PT KCIC
[PRESS RELEASE] *MOU Signing between PT MRT Jakarta and PT KCIC*

- 16** [SIARAN PERS] Penghargaan *Merit Awards* TOD Dukuh Atas
[PRESS RELEASE] *Merit Awards for Dukuh Atas TOD*

- 17** [SIARAN PERS] Gangguan Pasokan Listrik PLN
[PRESS RELEASE] *PLN Electricity Supply Disruption*

[SIARAN PERS] Stasiun Kembali Operasi Normal
[PRESS RELEASE] *Station Resumes Normal Operation*

- 18** [SIARAN PERS] Perkembangan Investigasi Awal Gangguan Pasokan Listrik
[PRESS RELEASE] *Progress of the Initial Investigation of Power Supply Disruption*

- 20** [SIARAN PERS] Penghargaan *Special Recognition for Public Facility*
[PRESS RELEASE] *Special Recognition for Public Facility Award*

[SIARAN PERS] MOU MRT Jakarta-WWF Indonesia
[PRESS RELEASE] *MRT Jakarta - WWF Indonesia MOU*

- 23** [SIARAN PERS] PKS MRT Jakarta-Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
[PRESS RELEASE] *MRT Jakarta - Culture Directorate of the Ministry of Education and Culture Collaboration Agreement*

Oktober 2019

October 2019

- 04** [SIARAN PERS] Maklumat Pelayanan MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] *MRT Jakarta Service Notice*

- 09** [SIARAN PERS] Penjelasan PT MRT Jakarta terkait Keterlambatan Perjalanan Ratangga
[PRESS RELEASE] *Explanation of PT MRT Jakarta related to Delays in Ratangga Trip*

- 11** [SIARAN PERS] Klarifikasi Isu Seleksi UMKM
[PRESS RELEASE] *Clarification on MSME Selection Issues*

- 15** [SIARAN PERS] Optimalisasi Integrasi Layanan Transportasi *First Mile* dan *Last Mile* di Transit Plaza Lebak Bulus
[PRESS RELEASE] *Optimization of the First Mile and Last Mile Transportation Services Integration at the Plaza Lebak Bulus Transit*

- 17** [SIARAN PERS] Evaluasi Barang Penjualan di Tenan Ritel MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] *Evaluation of Sales Items of MRT Jakarta's Retail Tenants*

[SIARAN PERS] Keterlambatan Kereta 17 Oktober 2019
[PRESS RELEASE] *Train Delays on October 17, 2019*

- 20** [SIARAN PERS] Rekrutasi Buka Tutup Pintu Masuk MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] *Simulations of Opening and Closing of MRT Jakarta Entrances*

25 [SIARAN PERS] Internalisasi PT MRT Jakarta Mendukung Program #JakartaRamahBersepeda
[PRESS RELEASE] PT MRT Jakarta's Internalization Supports the #BikerFriendlyJakarta Program

27 [SIARAN PERS] Pameran Foto Ruang Ketiga Jakarta di Stasiun-Stasiun MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] Photo Exhibition of Jakarta's Third Room at MRT Jakarta Stations

November 2019

November 2019

12 [SIARAN PERS] Penangkapan Kurir Narkoba yang Bukan Terjadi di Stasiun MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] The Arrest of Drug Couriers That Did Not Take Place at an MRT Jakarta Station

15 [SIARAN PERS] Izin Bank Indonesia bagi MRT Jakarta
[PRESS RELEASE] Bank Indonesia's Permit for MRT Jakarta

21 [SIARAN PERS] Dukungan PT MRT Jakarta terhadap Giat Operasi Cipta Kondisi Polsek Cilandak
[PRESS RELEASE] PT MRT Jakarta's Support for Cilandak Police Station's Cipta Kondisi Operation

Desember 2019

December 2019

04 [SIARAN PERS] Periksa Gigi Gratis Disabilitas
[PRESS RELEASE] Free Dental Check-ups for People with Disabilities

05 [SIARAN PERS] PT MRT Jakarta (Perseroda) Mendapatkan 2 Penghargaan Internasional dan Indonesia
[PRESS RELEASE] PT MRT Jakarta (Perseroda) Received 2 International and Indonesian Awards

09 [SIARAN PERS] Penandatanganan Perjanjian Pokok Pembentukan Perusahaan dalam rangka Integrasi Transportasi Jabodetabek, antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda)
[PRESS RELEASE] Signing of the Principal Agreement for Corporation Establishment for the purpose of Jabodetabek Transportation integration between PT Kereta Api Indonesia (Persero) and PT MRT Jakarta (Perseroda)

10 [SIARAN PERS] MRT Jakarta Menerima Penghargaan Internasional Dari Eropa
[PRESS RELEASE] MRT Jakarta Receives an International Award from Europe

11 [SIARAN PERS] Diskusi Publik 'Evaluasi 9 Bulan Operasional MRT Jakarta'
[PRESS RELEASE] Public Discussion on '9-Month Evaluation of MRT Jakarta Operations'

20 [SIARAN PERS] Penandatanganan MOU antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
[PRESS RELEASE] MOU Signing between PT MRT Jakarta (Perseroda) and the National Counterterrorism Agency (BNPT)

22 [SIARAN PERS] Lomba E-Sport
[PRESS RELEASE] E-Sport Competition

26 [SIARAN PERS] Seremoni Simbol Official Development Assistance (ODA) dari Jepang untuk Indonesia
[PRESS RELEASE] The Symbolic Ceremony of the Official Development Assistance (ODA) from Japan for Indonesia

Hubungan Media

Media Relations

Januari 2019

January 2019

20 MRT-Bility
MRT-Bility

22 Penandatanganan MOU MRT Jakarta-Kodam Jaya
Signing of the MRT Jakarta - Kodam Jaya MOU

24 Konferensi Pers Seleksi Mitra UMKM MRT Jakarta
MRT Jakarta's Partner Selection Press Conference

28 Kunjungan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta dan Influencer
Visit of the Governor of DKI Jakarta Province, President Director of PT Transportasi Jakarta and Influencers

30 Forum Jurnalis Januari
January Journalists Forum

Februari 2019

February 2019

12 Kunjungan Dubes Uni Eropa
Visit of the European Union Ambassador

13 Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah MRT Fase 2
Signing of the Phase 2 Regional MRT Grant Agreement

20 Kunjungan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla
Visit of The Indonesian Vice President Jusuf Kalla

25 Kunjungan Menteri Ketenagakerjaan RI
Visit of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

28 Forum Jurnalis Februari
February Journalists Forum

Maret 2019

March 2019

01 Konferensi Pers Penataan Arus Lalu Lintas Jalan Kendal
Press Conference on Kendal Road Traffic Management

06 Kunjungan Menteri Keuangan RI
Visit of the Republic of Indonesia's Minister of Finance

12 Konferensi Pers Uji Coba MRT Jakarta
MRT Jakarta Trial Press Conference

13 Kunjungan Menteri PUPR RI & Walikota Tangerang Selatan
Visit of the Minister of PUPR RI & Mayor of South Tangerang

16 Uji Coba Publik Sahabat Disabilitas
Public Trial for Friends with Disabilities

18 Kunjungan Ibu Negara RI
Visit of the First Lady of the Republic of Indonesia

19 Kunjungan Presiden RI
Visit of the President of the Republic of Indonesia

21 Kunjungan Presiden RI & Influencer
Visit of the Indonesian President & Influencer

24 Peresmian MRT Jakarta
Inauguration of the Jakarta MRT

27 Konferensi Pers Earth Hour
Earth Hour Press Conference

29 Forum Jurnalis Maret
March Journalists Forum

31 Talkshow "Perilaku Penumpang yang Baik"
"Good Passenger Behaviors" Talkshow

April 2019

April 2019

02 Kunjungan Gubernur Provinsi DKI Jakarta & DPRD Provinsi DKI Jakarta
Visit of the Governor of the DKI Jakarta Province & DKI Jakarta Provincial Parliament

06 Talkshow "B'Smart Zero Waste"
"B'Smart Zero Waste" Talk Show

10 Peresmian Penamaan Stasiun ASEAN
Inauguration of the ASEAN Station Naming

29 Forum Jurnalis April
April Journalists Forum

30 Peresmian Kawasan Terintegrasi Transit & Air Siap Minum Duku Atas
The Inauguration of the Integrated Area and Ready-to-Drink Water in Duku Atas

Mei 2019

May 2019

02 Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Crossrail
Signing of a Memorandum of Understanding with Crossrail

19 Penandatanganan Pakta Integritas Pengadaan Fase 2 dan Malam Apresiasi MRT Jakarta
Signing of the Phase 2 Procurement Integrity Pact and MRT Jakarta Appreciation Night

29 Forum Jurnalis Mei
May Journalists Forum

Juni 2019 June 2019

25 Kunjungan Presiden RI & Kedutaan Besar Jepang
Visit of the President of the Republic of Indonesia & the Japanese Embassy

26 Forum Jurnalis Juni
June Journalists Forum

Juli 2019 July 2019

03 Penandatanganan Nota Kesepahaman PT MRT Jakarta dan PT Blue Bird Tbk
Signing of Memorandum of Understanding of PT MRT Jakarta and PT Blue Bird Tbk

11 Penandatanganan Nota Kesepahaman PT MRT Jakarta dan ITDP Indonesia
Signing of Memorandum of Understanding between PT MRT Jakarta and ITDP Indonesia

13 Upaya Peningkatan Pelayanan kepada Pengguna MRT Jakarta
Efforts to Improve Services for MRT Jakarta Users

24 Mural Persahabatan Terowongan Kendal
The Friendship Mural of Kendal Tunnel

25 Forum Jurnalis Juli
July Journalists Forum

Agustus 2019 August 2019

03 Sosialisasi Panduan Standar
Socialization of the Standard Guideline

04 MRT Jakarta Kembali Membuka Layanan
MRT Jakarta Reopens Service

MRT Jakarta Beroperasi Normal Kembali 4 Agustus 2019
Jakarta Operates Normally Again by August 4, 2019

06 Kronologi Evakuasi dan Ketersediaan Pasokan Listrik Menjamin Keandalan Operasional MRT Jakarta
Chronology of Evacuation and Availability of Electricity Supply Guarantee the Reliability of MRT Jakarta Operations

08 Partipasi MRT Jakarta Dalam Rangka ASEAN Day
MRT Jakarta's Participation in ASEAN Day

15 MOU MRT Jakarta-Seoul Metro
MRT Jakarta - Seoul Metro MOU

Kolaborasi Intiland dan MRT Jakarta Luncurkan Park & Ride SQ
Intiland and MRT Jakarta Collaborate to Launch Park & Ride SQ

16 Klarifikasi Siaran Pers MOU MRT Jakarta-Seoul Metro
Clarification of the Press Release on MRT Jakarta - Seoul Metro MOU

23 Uji Coba Penutupan Jalur Busway Lebak Bulus
Trial Closing of the Lebak Bulus Busway Line

27 Pencanangan Kerja Sama dalam Rangka Kampanye Anti Korupsi di Stasiun & Kereta MRT Jakarta
The Declaration of Cooperation in the Context of Anti-Corruption Campaign in MRT Jakarta Stations & Trains

28 Forum Jurnalis Agustus
August Journalists Forum

September 2019 September 2019

04 Hari Pelanggan Nasional
National Customer Day

08 Peresmian Pojok Buku dan Kampanye #RuangBacaJakarta
Launch of the Book Corner and the #JakartaReadingRoom Campaign

- 16** Penghargaan Merit Awards TOD Duku Atas
Merit Award for the TOD of Duku Atas
-
- 17** Stasiun Kembali Operasi Normal
Station Resumes Normal Operation
-
- 18** Perkembangan Investigasi Awal Gangguan Pasokan Listrik
Development of the Preliminary Investigations of Power Supply Disorders

- 20** Penandatanganan MOU antara PT MRT Jakarta dan PT KCIC
Signing of the MOU between PT MRT Jakarta and PT KCIC
- Penghargaan Special Recognition for Public Facility
Special Recognition for Public Facility Award

MOU MRT Jakarta-WWF Indonesia
MRT Jakarta - WWF Indonesia MOU

- 23** PKS MRT Jakarta-Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
MRT Jakarta - Directorate of Culture Ministry of Education and Culture Collaboration Agreement

- 26** Forum Jurnalis September
September Journalists Forum

Oktober 2019

October 2019

- 04** Maklumat Pelayanan MRT Jakarta
Information on Jakarta MRT Services
-
- 14** Integrasi Layanan Transportasi Online Instan di Transit Plaza Lebak Bulus
Integration of Instant Online Transportation Services at Lebak Bulus Transit Plaza
-
- 25** Kegiatan Bersepeda bersama Internal PT MRT Jakarta Mendukung Program #JakartaRamahBersepeda
PT MRT Jakarta's Internal Cycling Activity to Support the #BikerFriendlyJakarta Program
-
- 31** Forum Jurnalis Oktober
October Journalists Forum

November 2019

November 2019

- 15** Kelas MRT Fellowship 2019 kelas 1
Class 1 of the MRT Fellowship Class 2019
-
- 21** Kelas MRT Fellowship 2019 kelas 2
Class 2 of the MRT Fellowship Class 2019
-
- 27** Forum Jurnalis November & Kelas MRT Fellowship 2019 kelas 3
November Journalist Forum & Class 3 of the MRT Fellowship Class 2019

Desember 2019

December 2019

- 06** Acara peluncuran Kartu Jelajah Berganda (Multi Trip) MRT Jakarta
The Launch MRT Jakarta's Multi Trip Card
-
- 09-03** MRT Fellowship Program ke Jepang
MRT Fellowship Program to Japan
-
- 09** Penandatanganan Perjanjian Pokok Pembentukan Perusahaan dalam rangka Integrasi Transportasi Jabodetabek, antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT MRT Jakarta (Perseroda)
Signing of the Principal Agreement for Corporation Establishment for the purpose of Jabodetabek Transportation Integration between PT Kereta Api Indonesia (Persero) and PT MRT Jakarta (Perseroda)
-
- 10** Acara Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta
Anti Violence Against Women and Children Campaign Event of the DKI Jakarta Province
- Acara peringatan Hari Hak Asasi Manusia
Commemoration of the Human Rights Day
-
- 11** Acara Diskusi Publik 'Evaluasi 9 Bulan Operasional MRT Jakarta'
Public Discussion Event on '9 Month Evaluation of MRT Jakarta Operations'
-
- 19** Forum Jurnalis Desember
December Journalists Forum

Desember 2019
December, 2019

20 Penandatanganan MOU antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Signing of MOU between PT MRT Jakarta (Perseroda) and the National Counterterrorism Agency (BNPT)

26 Seremoni Simbol *Official Development Assistance* (ODA) dari Jepang untuk Indonesia
Symbolic Ceremony of the Official Development Assistance (ODA) from Japan for Indonesia

| Tanggal Date | Bentuk Kegiatan Form of Activities |
|---------------------------------------|--|
| 19 Desember 2019 December 19, 2019 | Forum Jurnalis Desember December Journalists Forum |
| 20 Desember 2019 December 20, 2019 | Penandatanganan MOU antara PT MRT Jakarta (Perseroda) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) <i>Signing of MOU between PT MRT Jakarta (Perseroda) and the National Counterterrorism Agency (BNPT)</i> |
| 26 Desember 2019 December 26, 2019 | Seremoni Simbol <i>Official Development Assistance</i> (ODA) dari Jepang untuk Indonesia <i>Symbolic Ceremony of the Official Development Assistance (ODA) from Japan for Indonesia</i> |

Tabel 6.127
Table 6.127

Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan
Annual Report and Sustainability Report

Perseroan juga menerbitkan buku Laporan Tahunan yang dibagikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Penerbitan dan penyampaian Laporan Tahunan juga merupakan bentuk pemenuhan Perseroan terhadap ketentuan peraturan dan informasi Perseroan serta salah satu syarat pelaksanaan RUPS. Selain itu, Perseroan juga menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang upaya yang dilakukan Perseroan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

The Corporation also issued the Annual Report book that has been distributed to Shareholders and other stakeholders. The issuance and delivery of the Annual Report is also part of the Corporation's compliance with the provisions of Corporate regulation and information as well as one of the requirements to hold a GMS. In addition, the Corporation also issued a Sustainability Report that is meant to provide an overview of the efforts carried out by the Corporation with regards to the aspects of economy, social, and environment.

kunjungan Lapangan
Site Visits

Perseroan juga memberikan program kegiatan kunjungan lapangan atau *site visit* sebagai bentuk edukasi moda transportasi MRT Jakarta kepada masyarakat. *Site visit* saat pembangunan proyek diharapkan dapat memberikan perspektif yang menyeluruh terkait MRT Jakarta, mulai dari pendekatan studi, pembangunan tata kota, ataupun pembentukan perilaku masyarakat terhadap layanan publik.

The Corporation also provided a site visit activity program as a form of MRT Jakarta transportation mode education for the public. Site visits during the project development phase can hopefully provide a comprehensive perspective about MRT Jakarta, from the study approach, city planning development, or even the formation of public behavior towards public services.

Korespondensi dan Laporan Berkala

Periodic Correspondence and Reports

Informasi keuangan dan non-keuangan dari Perseroan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perseroan.

Financial and non-financial information of the Corporation has been arranged and reported periodically to shareholders, stakeholders, and other relevant authorities. The information is delivered in a timely manner based on the set deadline, and is presented comprehensively and accurately, providing updated, full, and adequate data in accordance with the procedures, type, and scope as regulated in the provisions on Corporate Financial Condition Transparency.

Di bawah ini disajikan korespondensi Perseroan selama tahun 2019:

The following is a list of the Corporation's correspondences throughout 2019:

| Korespondensi Kepada <i>Correspondence to</i> | Frekuensi <i>Frequency</i> | Perihal <i>Subject</i> |
|---|--------------------------------|---|
| Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan <i>Shareholders and Other Stakeholders</i> | Bulanan <i>Monthly</i> | Laporan Kemajuan Pembangunan, Operasi, dan Pengusahaan Proyek MRT Jakarta. <i>Progress Report on the Development, Operation and Business of the MRT Jakarta Project.</i> |
| Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan <i>Shareholders and Other Stakeholders</i> | Bulanan <i>Monthly</i> | Laporan Kemajuan Persiapan Pembangunan Proyek MRT Jakarta Fase 2. <i>Progress Report on the Preparation for the Construction of the MRT Jakarta Project Phase 2.</i> |
| Pemegang Saham <i>Shareholders</i> | Triwulanan <i>Quarterly</i> | Laporan Realisasi RKAP. <i>Corporate Budget Plan (RKAP) Realization Report.</i> |
| Pemegang Saham <i>Shareholders</i> | Triwulanan <i>Quarterly</i> | Laporan Realisasi RKAP. <i>Corporate Budget Plan (RKAP) Realization Report.</i> |

Tabel 6.128
Table 6.128

Ragam Media

Variety of Media

Di bawah ini tabel yang menggambarkan lini media komunikasi yang digunakan Perseroan untuk menyampaikan data dan informasi terkait korporasi, aktivitas operasional, dan capaian-capaian kinerja serta kegiatan-kegiatan lainnya.

The following is a table that describes the communication media used by the Corporation to deliver data and information regarding the Corporation, operational activities and performance targets as well as other activities.

| Kepada <i>To</i> | Bentuk Media <i>Media Form</i> |
|--|---|
| Regulators | Laporan Kemajuan Pembangunan MRT Jakarta. <i>Progress Report of MRT Jakarta Development.</i> |
| Pemegang Saham <i>Shareholders</i> | Laporan Bulanan Kemajuan Pembangunan MRT Jakarta. <i>Monthly Progress Report of MRT Jakarta Development.</i> |
| Lembaga Publik <i>Public Institutions</i> | Sosialisasi dalam bentuk penerimaan kunjungan ke kantor/lokasi proyek MRT Jakarta. <i>Socialization in the form of receiving visits to offices/locations of the MRT Jakarta project.</i> |

| Kepada to | Bentuk Media Media Form |
|---|--|
| Konsumen/Calon Konsumen <i>Consumers/Prospective Consumers</i> | Sosialisasi dalam bentuk penerimaan kunjungan ke kantor/lokasi proyek MRT Jakarta, Situs Web Perseroan, media sosial, pameran, penyebaran flyer/brosur, <i>school roadshow</i> . <i>Socialization in the form of receiving visits to the office/location of the MRT Jakarta project, Corporate Website, social media, exhibitions, flyer/brochure distribution, school roadshows.</i> |
| Karyawan <i>Employees</i> | Situs Web Perseroan, Media Sosial, <i>Town Hall Meeting</i> . <i>Corporate Websites, Social Media, Town Hall Meetings.</i> |
| Perusahaan Sejenis Lainnya <i>Other Similar Companies</i> | Situs Web Perseroan, Media Sosial, penerimaan kunjungan ke kantor/lokasi proyek MRT Jakarta. <i>Corporate Website, Social Media, acceptance of visits to MRT Jakarta project sites/offices</i> |
| Mitra Kerja dan Rekanan <i>Work Partners and Associates</i> | Situs Web Perseroan, Media Sosial, penerimaan kunjungan ke kantor/lokasi proyek MRT Jakarta. <i>Website, Social Media, acceptance of visits to the MRT Jakarta project office/locations.</i> |
| Organisasi Profesi <i>Professional Organizations</i> | Situs Web Perseroan, Media Sosial. <i>Corporate Website, Social Media.</i> |
| Masyarakat/Umum <i>General Public</i> | Situs Web Perseroan, media sosial, pameran, penyebaran flyer/brosur, siaran pers. <i>Website, social media, exhibitions, flyer/brochure distribution, press releases.</i> |

Tabel 6.129
Table 6.129



Gambar 6.9. Town Hall Meeting
Image 6.9. Town Hall Meeting



Gambar 6.10 MRT Goes to School
Image 6.10 MRT Goes to School

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) GOVERNANCE



Gambar 6.11
Image 6.11

Bidang usaha Perseroan yang luas dan memiliki jumlah unit kerja yang besar, membuat jaringan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dan terpadu menjadi hal mendesak yang harus dipenuhi. Perseroan sepenuhnya menyadari bahwa di tengah pesatnya arus digitalisasi, TIK menjadi aspek penting dalam melaksanakan kegiatan bisnis, karena pemanfaatan TIK yang optimal dapat memberikan efisiensi biaya dan operasional bagi keberlangsungan usaha Perseroan. Pengembangan sistem TIK Perseroan dilakukan dengan tujuan mengembangkan lingkungan kerja yang efisien, terintegrasi, akuntabel, transparan, serta dapat diandalkan.

Sistem TIK Perseroan bertugas untuk menyediakan sistem informasi yang optimal untuk mendukung bisnis Perseroan. Sementara pada bagian layanan, TIK diharapkan mampu mendorong level produktivitas dan efisiensi Perseroan. Selain itu, implementasi TIK dalam Perseroan adalah dengan mendukung penerapan *paperless working area*, sehingga dapat meminimalisir risiko operasional usaha, dan menghadirkan sistem keamanan yang maksimal.

The Corporation's wide-ranging business fields and large amount of work units have made a reliable and integrated Information and Communication Technology (ICT) system an urgent matter to be fulfilled. The Corporation fully understands that with the rapid developments of digitalization, ICT has become an important aspect in conducting business activities, since optimal ICT utilization can lead to cost and operational efficiency that impact the Corporation's business continuity. Corporate ICT system development is done with the objective of developing a work environment that is efficient, integrated, accountable, transparent, and reliable.

The Corporate ICT system is tasked with providing an optimal information system to support the Corporation's business. Meanwhile on the area of service, ICT is used to improve the productivity and efficiency levels of the Corporation. In addition, ICT implementation within the Corporation means supporting the implementation of paperless working areas, which can minimize business operational risks and maximize the security system.

KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN TIK ICT POLICIES AND INSTITUTION

Regulasi Tata Kelola dan Kepatuhan Regulations on Governance and Compliance

Dalam implementasi TIK, Perseroan merujuk pada regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan informasi ataupun data yang lengkap, akurat, terkini, aman, dan tepat waktu guna mendukung pengelolaan bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip GCG. Adapun regulasi yang dikeluarkan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran Kementerian Informasi dan Komunikasi No. 05/SE/M.Kominfo/07/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik
2. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada BUMD di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
3. Keputusan Komisaris No. 004 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Kelola Perseroan (*Code of Corporate Governance*) PT MRT Jakarta.
4. Peraturan Direksi No. 05 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi

Di Tahun 2019, Perseroan telah menerapkan kebijakan tersebut melalui lingkup sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi menerapkan fungsi pengelolaan manajemen risiko yaitu perencanaan, penilaian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
2. Pengembangan sistem perangkat lunak umum dan khusus.
3. Pemeliharaan dan dukungan untuk operasional sistem informasi.
4. Kepemilikan perangkat keras (*hardware*).
5. Ketentuan dan prosedur penggunaan perangkat aset Perseroan.
6. Keamanan Teknologi Informasi.
7. *Disaster Recovery Plan*

Strategi Pengembangan TIK ICT Development Strategy

Semua bentuk jenis pengembangan Sistem Informasi pada Aplikasi dan Infrastruktur TIK Perseroan mengacu pada Peraturan Direksi No. 008 Tahun 2017 yang penerapannya dilakukan secara efektif secara 1 (satu) tahun penuh, mulai tahun 2018. Oleh karena itu kebutuhan operasional maupun korporasi dikembangkan melalui Divisi *Information System & Technology* (IST) Perseroan yang menjadi 1 (satu) pintu dalam pengembangan teknologi informasi tersebut.

Pengembangan TIK di lingkup Perseroan dapat bersifat kebutuhan yang diajukan oleh divisi-divisi di luar Divisi *Information System & Technology* (IST) sebagai penunjang dalam penerapan digitalisasi, dan berupa *ICT Road Map* yang telah dituangkan dalam Peraturan Direksi No. 13 Tahun 2018. Pengembangan tersebut dilakukan menggunakan sumber daya internal yang terdapat pada Divisi *Information System & Technology*

In implementing ICT, the Corporation refers to the regulations issued by the government to provide comprehensive, accurate, updated, safe, and timely information or data in order to support business management that prioritizes GCG principles. As for the regulations issued by the government are as follows:

1. *Circular Letter of the Ministry of Information and Communication No. 05/SE/M.Kominfo/07/2011 concerning the Implementation of Information Security Governance for Public Service Providers.*
2. *Decree of the Provincial Governor of DKI Jakarta No. 96 of 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in ROEs in the DKI Jakarta Provincial Environment.*
3. *Commissioner Decree No. 004 of 2003 concerning PT MRT Jakarta's Code of Corporate Governance.*
4. *Director's Regulation No. 05/2017 concerning Information Technology Management*

In 2019, the Corporation has implemented the aforementioned policies through the following scopes:

1. *Information Technology development and management implemented risk management functions, namely planning, assessment, measurement, monitoring and risk control.*
2. *System developments of general and specific softwares.*
3. *Maintenance and support of information system operations*
4. *Hardware Ownership.*
5. *Provisions and procedures in using Corporate assets.*
6. *Information Technology security.*
7. *Disaster Recovery Plan*

All forms of information system developments in ICT applications and infrastructures of the Corporation refer to the Board of Directors' Regulation No. 008 of 2017, the application of which was carried out effectively for 1 (one) whole year starting in 2018. Hence, operational and corporate needs are developed through the Information System and Technology Division of the Corporation, which becomes the one stop point of contact for information technology developments.

ICT developments within the Corporate scope may come in the form of requirements submitted by divisions outside of the Information System & Technology (IST) Division as a support for digitalization application in the form of ICT Road Map as regulated in the Board of Directors' Regulation No. 13 of 2018. The developments are carried out using internal resources from the IST Division. The Corporation believes that hardware

(IST). Perseroan percaya bahwa kebutuhan *hardware* atau infrastruktur dapat meningkatkan kinerja operasional Perseroan.

Di sepanjang tahun 2019, Perseroan telah melakukan berbagai pengembangan aplikasi yang terdiri dari:

1. Implementasi Sistem ERP Fase – 2
 - Modul *Success Factor*
 - Modul *Plan Maintenance*
 - Modul *e-Budgeting* (BPC)
2. Integrasi Perangkat Non Enterprise – SAP
 - AFC
 - Maximo MMS
 - MokaPOS
3. Sistem Portal *Knowledge Management* (KM)
4. *Enterprise Risk Management* (ERM)
5. Aplikasi *MiniPOS*
6. Aplikasi *General Affair* (GAAS)
7. Aplikasi *Lost & Found*
8. Sistem Tiket dengan kode QR
9. Aplikasi *Mobile* terintegrasi *Payment Channel* (Dana, LinkAja, Ovo dan Gopay)

Selain itu, Perseroan sudah melakukan rencana–rencana pengembangan untuk tahun 2020. Rencana pengembangan TIK tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem ERP Fase – 3
2. Sistem CRM
3. Peningkatan Fungsi Sistem Tiket dengan Kode QR
4. *Trouble Ticket System*
5. DRC
6. *Financial Projection Payment Tracking*
7. Peningkatan KM Portal System
8. Aplikasi *Train Driver Roster*

or infrastructure requirements can improve the Corporation's operational performance.

Throughout 2019, Corporate has carried out various application developments consist of:

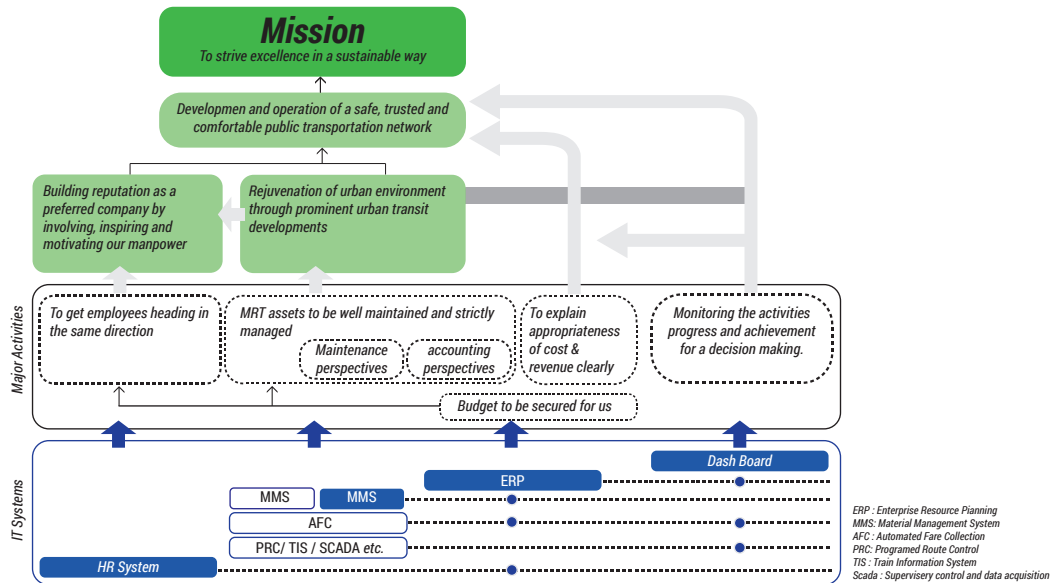
1. *ERP System Implementation Phase - 2*
 - *SuccessFactor Module*
 - *Plan Maintenance Module*
 - *e-Budgeting Module (BPC)*
2. *Integration of Non Enterprise Devices – SAP*
 - AFC
 - Maximo MMS
 - MokaPOS
3. *Knowledge Management (KM) Portal System*
4. *Enterprise Risk Management (ERM)*
5. *MiniPOS Application*
6. *General Affair (GAAS) Application*
7. *Lost & Found Application*
8. *QR Code Ticketing System*
9. *Integrated Mobile Apps Payment Channel (Dana, LinkAja, Ovo and Gopay)*

Moreover, the Corporation has set the development plans for 2020. The ICT development plans for 2020 are as follows:

1. *ERP Implementation System Phase – 3*
2. *CRM System*
3. *Improvement of QR Code Payment System Function*
4. *Trouble Ticket System*
5. *DRC*
6. *Financial Projection Payment Tracking*
7. *Improvement of KM Portal System*
8. *Train Driver Roster Application*

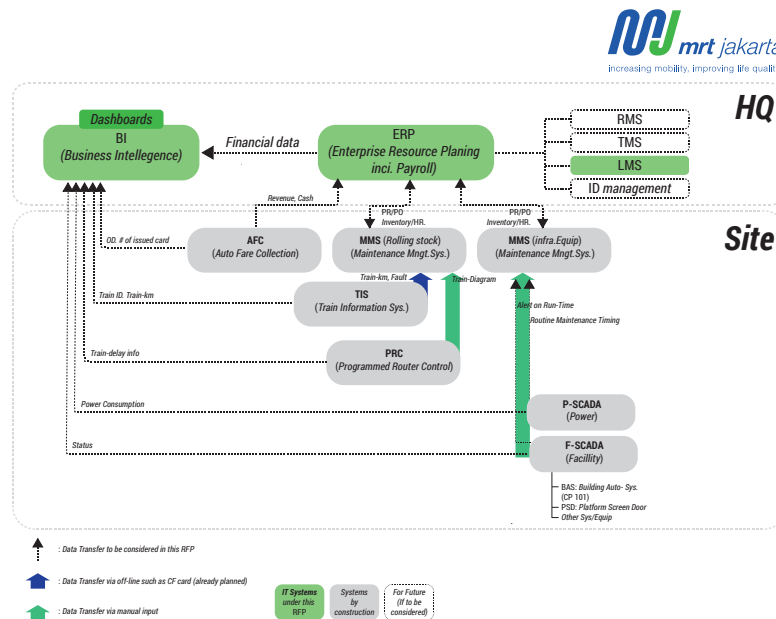
Cetak Biru TIK
ICT Blue Print

GAMBARAN BESAR INTEGRASI SISTEM ERP DAN SISTEM OPERASIONAL PT MRT JAKARTA (PERSERODA)



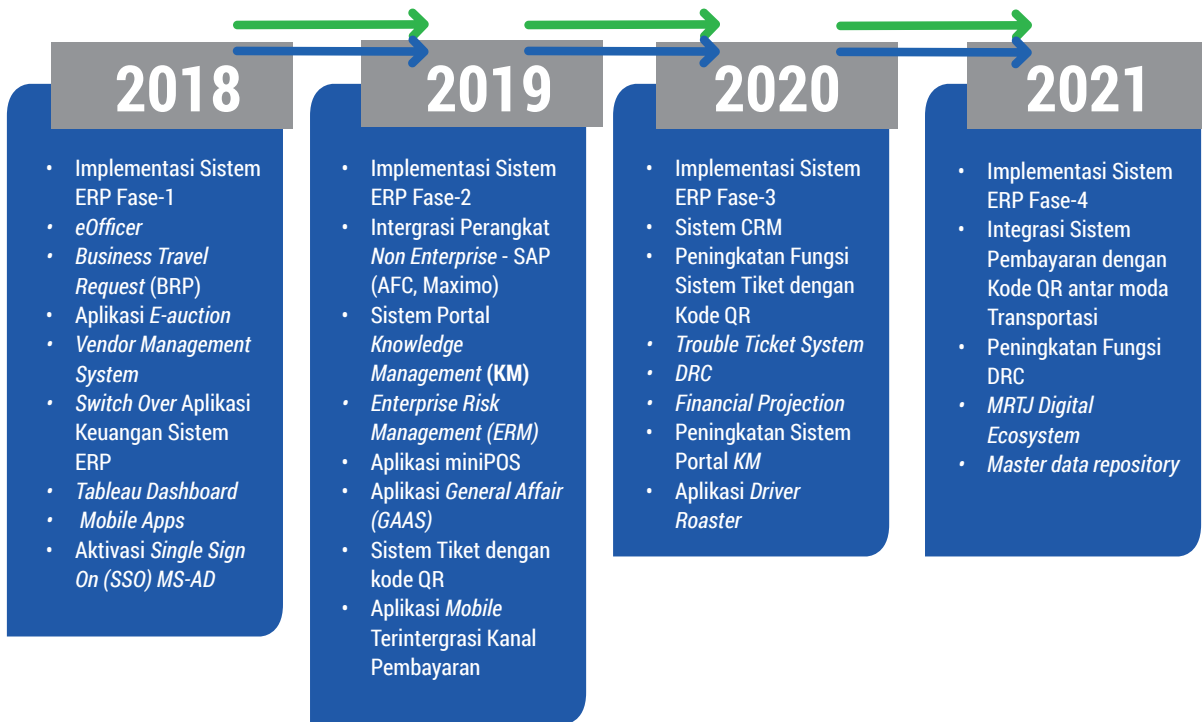
Figur 6.25
Figure 6.25

DETAIL TEKNIS INTEGRASI SISTEM ERP DAN SISTEM OPERASIONAL PT MRT JAKARTA (PERSERODA)



Figur 6.26
Figure 6.26

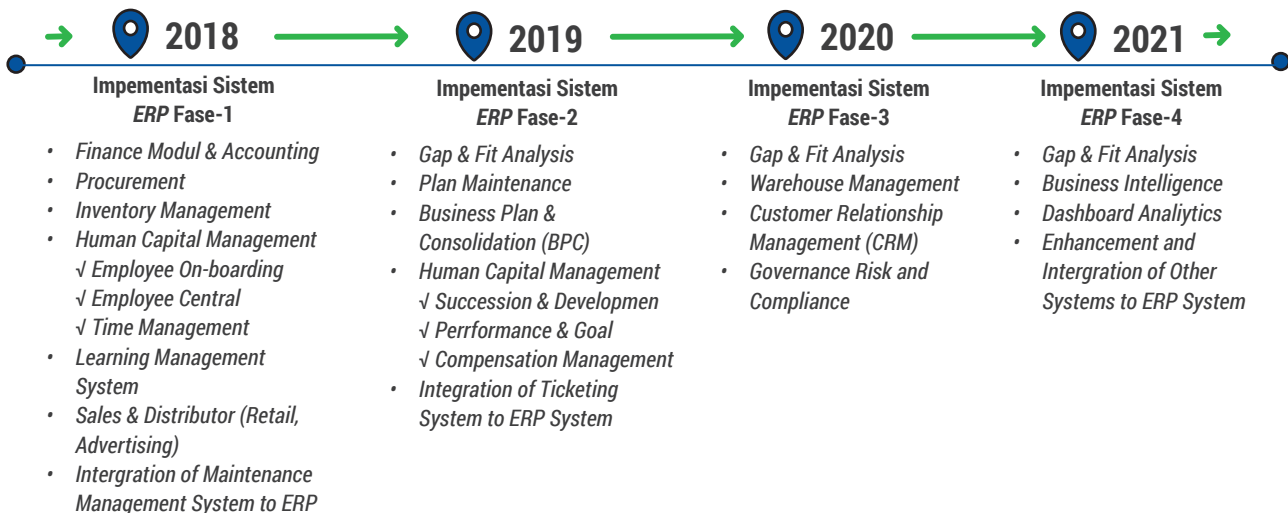
Peta Jalan TIK
ICT Road Map



Figur 6.27
Figure 6.27

Berdasarkan kebijakan TIK, RJPP, dan RKAP tahun 2018 maka pengelolaan dan pengoperasian seluruh aplikasi Perseroan diintegrasikan dalam sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Hal tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Based on the ICT Policy, Long-Term Corporate Plan (RJPP), and Corporate Work Plan and Budget (RKAP), the management and operations of all corporate applications are integrated in the Enterprise Resource Planning (ERP) System as shown below.



Figur 6.28
Figure 6.28

Pelaksanaan Kebijakan itu dilakukan bertujuan antara lain :

- Mudah dalam mengelola aplikasi.
- Mengubah budaya dari konvensional menjadi *Go Green* (dengan bantuan divisi lainnya) dengan melalui gerakan digitalisasi.
- Mempermudah implementasi ISO 27001 (*Information Security Management*).

Policy implementation was carried out with the objectives to:

- Simplify application management
- Change the conventional culture to the *Go Green* culture (with the help of other divisions) through digitalization
- Simplify the implementation of ISO 27001 (*Information Security Management*).

Pembiayaan TIK

ICT Financing

Sebagai wujud komitmen pengembangan TIK, bawah ini disajikan investasi Teknologi Informasi Perseroan tahun 2019 dan perbandingannya dengan tahun 2018 serta anggaran tahun 2019. Hal-hal menyangkut pembiayaan untuk pengembangan kompetensi SDM Divisi *Information System & Technology (IST)*, diajukan ke Divisi *Human Capital*, dan menggunakan anggaran Unit Kerja *Organization, Talent and Training*

In line with the Corporation's commitment to develop ICT, the following is a list of the Corporation's Information Technology investments in 2019 in comparison to the ones in 2018, as well as the 2019 budget. Matters related to funding for the competency developments of the Information System & Technology (IST) Division's human capital are submitted to the Human Capital Division, and are covered by the Organization, Talent and Training work unit budget.

| Perihal (Item) | Realisasi Tahun 2019 (2019 Realization) | Anggaran Tahun 2019 (2019 Budget) | Penyerapan Anggaran 2019 (%) Budget Absorption in 2019 (%) | Realisasi Tahun 2018 (Rp-juta) (2018 Realization) (Rp Million) | Kenaikan (Penurunan) 2018-2019 (%) Increase (Decrease) 2018-2019 (%) |
|---|---|---|--|---|--|
| | (1) | (2) | (1/2) | (3) | ((1-3)/3) |
| Investasi Teknologi Informasi <i>Information Technology Investments</i> | 37.381.485.887 | 48.505.750.000 | 77,06% | 24.517 | 65,25% |

Tabel 6.130
Table 6.130

Uraian secara rinci tentang realisasi investasi di tahun 2019 dan rincian penyerapan anggaran tahun 2019 dapat dilihat di bawah ini:

Detailed descriptions of investment realizations in 2019 and 2019 budget absorption can be observed below.

| Perihal (Item) | Realisasi Tahun 2019 (2019 Realization) | Anggaran Tahun 2019 (2019 Budget) | Penyerapan Anggaran 2019 (%) Budget Absorption in 2019 (%) |
|---|--|--------------------------------------|---|
| | (1) | (2) | (1/2) |
| <i>Capital Expenditure (Information Technology Development & Support)</i> | 5.822.139.074 | 9.713.705.074 | 59,93% |
| <i>Operational Expenditure (Biaya Information Communication & Technology)</i> | 31.559.346.813 | 38.792.044.926 | 81,35% |

Tabel 6.131
Table 6.131

| Perihal Item | Jenis Anggaran Budget Detail | Penyerapan Anggaran 2019 Budget Absorption in 2019 |
|---|---|---|
| <i>Capital Expenditure (Information Technology Development & Support)</i> | <i>Operational Hardware (Server, Switch, Firewall, etc)</i> | 4,188,581,637 |
| | <i>Operational Software (Tableau, PRTG, Lumion, etc)</i> | 659,078,437 |
| | <i>AMS and Trouble Ticket Integration Service</i> | 975,479,000 |
| <i>Operational Expenditure (Biaya Information Communication & Technology)</i> | <i>Work and Productivity Hardware (Notebook, Monitor, etc)</i> | 1,043,147,537 |
| | <i>Work, Productivity and Design Software (Sketch Up, Office 365, etc)</i> | 2,801,494,657 |
| | <i>Managed Service (HelpDesk, Internet, Security, Cloud, etc)</i> | 2,890,328,541 |
| | <i>On-Premise Licenses (PIPO, BW)</i> | 5,076,899,866 |
| | <i>Implementation and Cloud License Services (ERP, MMS Non Rolling Stock, SF)</i> | 19,747,476,212 |

Tabel 6.132
Table 6.132

Sesuai anggaran yang telah ditetapkan, *Capital Expenditure* mencakup biaya Lisensi, biaya *Software*, biaya *Hardware*. Sedangkan *Operational Expenditure* dianggarkan untuk biaya Lisensi, biaya *Software*, dan biaya Jasa.

In accordance with the set budget, Capital Expenditure covers Licensing, Software and Hardware fees. Whereas Operational Expenditure covers Licensing, Software, and Service fees.

Sumber Daya Manusia Bidang TIK

ICT Human Resources

Divisi *Information System & Technology (IST)* terdiri dari:

1. Kepala Divisi : 1 (satu) orang
2. Kepala Departemen : 2 (dua) orang
3. *Engineer/Specialist* : 6 (enam) orang dengan perincian 1 (satu) orang lulusan Sarjana Strata 2 (S2) dan 7 orang lulusan Sarjana Strata 1 (S1)

The Information System & Technology (IST) Division consists of:

1. *Head of Division: 1 (one) person*
2. *Head of Department: 2 (two) persons*
3. *Engineer / Specialist: 6 (six) persons with the requirements of 1 (one) Master degree holder and 7 (seven) Bachelor's degree holders.*

Adapun kompetensi personel Divisi *Information System & Technology (IST)* terdiri dari:

1. Jaringan:
 - a. *Cisco Certified Network Associate (CCNA)*
 - b. *Cisco Certified Network Professional (CCNP)*
 - c. *Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP)*
2. Administrasi Sistem:
 - a. *Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)*
 - b. *VMware Certified Associate (VCA)*
 - c. *F5 Certified Technical Specialist (F5-CTS)*
3. Pemrograman:
 - a. Java
 - b. Golang
 - c. Phyton

The competency of the Information System & Technology (IST) personnel includes:

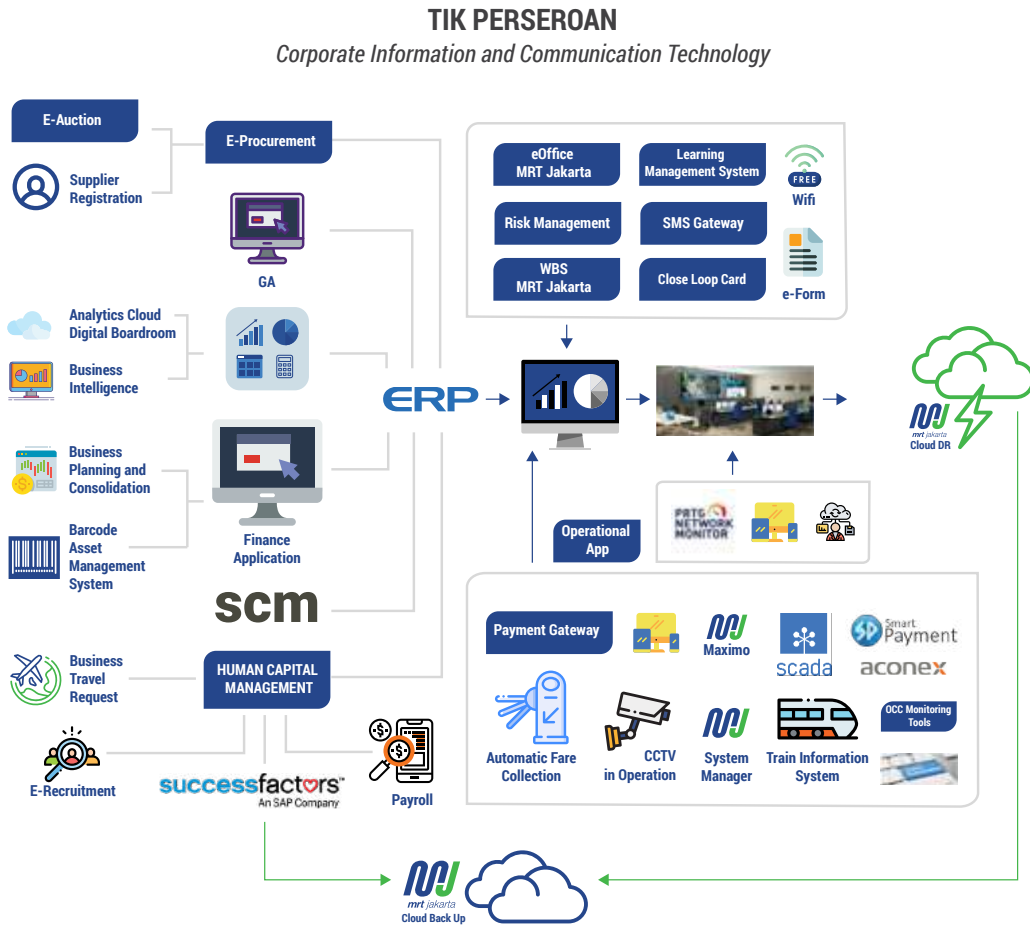
1. *Network:*
 - a. *Cisco Certified Network Associate (CCNA)*
 - b. *Cisco Certified Network Professional (CCNP)*
 - c. *Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP)*
2. *System Administration:*
 - a. *Red Hat Certified System Administrator (RHCSA)*
 - b. *VMware Certified Associate (VCA)*
 - c. *F5 Certified Technical Specialist (F5-CTS)*
3. *Programming:*
 - a. Java
 - b. Golang
 - c. Phyton

MENGIMPLEMENTASI TIK DI LINGKUP PERSEROAN

ICT IMPLEMENTATION WITHIN THE CORPORATE SCOPE

Teknologi dan Infrastruktur

Technology and Infrastructure

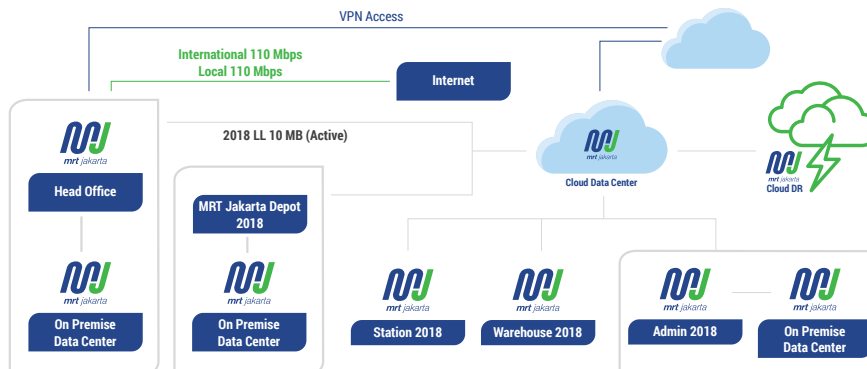


Integrasi Sistem Dashboard dan Monitoring Infrastruktur TIK Perseroan
The Integration of the Corporate Dashboard and Infrastructure Monitoring System

Figur 6.29
Figure 6.29

INFRASTRUKTUR TIK PERSEROAN

Corporate Information and Communication Technology Infrastructure



Topologi Infrastruktur TIK

Figur 6.30
Figure 6.30

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) Operasional Menggunakan SAP

Enterprise Resource Planning (ERP) System Operations Using SAP

Perseroan secara bertahap mengembangkan *Enterprise Resource Planning* (ERP) sebagai infrastruktur TIK untuk menunjang kinerja operasional. Pengembangan sistem portal diperlukan untuk mengintegrasikan seluruh sistem terutama integrasi akses *user/akun* sehingga setiap karyawan menggunakan 1 akun untuk akses semua aplikasi. Salah satunya yaitu sistem *Single Sign On* (SSO) yang terintegrasi dengan *Active Directory* yang telah dikembangkan pada tahun 2017.

Integrasi Sistem

System Integration

Untuk mendukung pengelolaan sistem *Information & Communication Technology* (ICT) perkeretaapian atau sistem industrial, Perseroan mengintegrasikan sistem TIK perkeretaapian dengan sistem operasional manajemen atau sistem informasi berbasis ERP. Perancangan, implementasi dan integrasi pada sistem tersebut dilakukan sebelum masa beroperasinya MRT Jakarta agar hasil yang didapat saat MRT Jakarta beroperasi dapat berjalan secara optimal. Integrasi antara sistem industrial dengan sistem informasi dilakukan agar data dan informasi yang berada di lapangan dapat memberikan laporan *dashboard* yang akurat kepada manajemen di level atas untuk dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Pengembangan ERP yang terintegrasi dengan sistem ICT perkeretaapian dilakukan dengan mendesain pembangunan TIK *master plan* yang melibatkan seluruh fungsi unit kerja yang terkait dalam mendukung persiapan operasional MRT. Dengan adanya ICT *master plan*, dapat ditentukan sistem ERP yang akan diimplementasikan. Pada saat dilakukan pembangunan sistem ERP, sistem tersebut terintegrasi dengan sistem ICT perkeretaapian, sehingga sistem tersebut berjalan saat pengoperasian MRT Jakarta pada tahun 2019.

Transformasi Digital

Digital Transformation

Transformasi digital adalah salah satu tugas dan kontribusi utama Divisi *Information System & Technology* (IST) dalam semua aspek kegiatan dan operasional PT MRT Jakarta (Persero). Transformasi digital merupakan tantangan untuk mengenali faktor perubahan budaya yang dihadapi baik oleh karyawan maupun manajemen di level atas PT MRT Jakarta dan pengguna layanan MRT Jakarta agar dapat menyesuaikan diri saat mengadopsi pada teknologi yang masih baru.

Divisi *Information System & Technology* (IST) berperan sebagai *transformer* atau pelaku utama transformasi digital dengan mengedepankan proses digitalisasi. Salah satu contoh proses perubahan budaya konvensional (penggunaan kertas) menjadi budaya digital (*paperless*) adalah *Enterprise Resource Planning* (ERP) dengan SAP dan *eOffice*. ERP sendiri adalah sistem korporasi terintegrasi untuk mendukung kegiatan pengadaan (*procurement*), keuangan, *budgeting*, logistik, serta kegiatan operasional dan pemeliharaan. Hal ini akan memberikan nilai tambah Perseroan dalam hal administrasi Perseroan dan mendukung kegiatan TIK dalam hal Transformasi Digital dengan harapan kegiatan Perseroan tidak lagi menggunakan kertas, melainkan menggunakan sistem aplikasi dengan proses yang berkesinambungan dan proses *approval* yang bisa dilakukan di mana saja. *eOffice* juga sudah digunakan secara massal sebagai

Gradually, the Corporate has developed Enterprise Resource Planning (ERP) as an ICT infrastructure to support operational performance. Portal System Development is essential to integrate all existing systems, especially integrating user/account access so that each employee uses 1 (one) account for all applications. One of them is the existence of a Single Sign-On (SSO) system integrated with Active Directory which was developed in 2017.

To support the Railroad ICT management or industrial system, the Corporation integrated the Railroad ICT System with the management operational system or ERP-based information system. The design, implementation, and integration of the systems took place before the MRT Jakarta operations commenced so that the output received once MRT Jakarta begins operations can run optimally. The integration of the industrial system can deliver accurate dashboard reports to top level management to be used as an effective and efficient decision-making tool.

ERP development that is integrated with the Railroad ICT System is achieved by designing an ICT development master plan that involves all related work unit functions in supporting the MRT's operational readiness. With the ICT master plan, the Corporation can determine which ERP system to be implemented. When the ERP system development was carried out, the system was integrated with the Railroad ICT System, so the system can run once MRT Jakarta operates in 2019.

Digital Transformation is one of the main contributions of the IST Division in all activity and operational aspects of PT MRT Jakarta. Digital Transformation is a challenge to recognize cultural change factors faced by the employees and Top Level Management of PT MRT Jakarta and users of MRT Jakarta services in adapting themselves when adopting new technologies.

The IST Division bears the role of a Transformer or the main actor of Digital Transformation by prioritizing the digitalization process. One example of a conventional culture (paper usage) transformation into digital culture (paperless) is the ERP with SAP and eOffice. ERP by itself is an integrated Corporate system to support activities related to Procurement, Finance, Budgeting, Logistics, Operational and Maintenance. This will provide an added value for the Corporation in terms of Corporate administration as well as supporting the ICT activities in Digital Transformation with the hope that Corporate activities will no longer require paper, and will only use application systems with a sustainable process and an approval process that can be carried out anywhere. eOffice has also been used Corporation-wide as the official correspondence facility in the PT MRT Jakarta environment. Since the introduction of eOffice, internal correspondences in the form of paper memos between work units have decreased.

fasilitas korespondensi resmi di lingkungan PT MRT Jakarta (Persero). Sejak hadirnya *eOffice*, korespondensi internal (memo) antar unit kerja yang biasanya menggunakan kertas sudah mulai ditinggalkan.

Selain berperan dalam transformasi digital di lingkungan internal Perseroan, Divisi *Information System & Technology* (IST) juga turut serta dalam digitalisasi pengguna layanan PT MRT Jakarta. Diluncurkannya *Mobile App* MRT-J sebagai sistem aplikasi *mobile* untuk mendukung kegiatan Perseroan dalam penjualan tiket MRT dan moda transportasi lain yang terintegrasi, pembayaran *merchant*, *Corporate Profiling*, informasi Perseroan serta penyampaian saran dan kritik. Aplikasi ini akan memudahkan pelanggan dan masyarakat dalam pembelian tiket kereta dan moda transportasi lainnya serta pembayaran pada *merchant* yang bekerja sama, serta menumbuhkan budaya baru untuk bertransaksi secara digital.

Manajemen Perubahan *Change Management*

Seiring dengan operasional Perseroan yang makin membutuhkan optimalisasi kinerja perangkat TIK dan sudah berubahnya layanan dari konvensional menjadi digital, banyak aset yang digunakan di Divisi *Information System & Technology* (IST) yang membutuhkan perubahan. Perubahan ini mencakup infrastruktur TIK (aset fisik, aset jaringan, dan aset sistem serta aplikasi). Perubahan dapat dilakukan secara terjadwal namun tidak menutup kemungkinan dilakukan secara mendadak karena permintaan manajemen di level atas Perseroan dan permintaan yang berkaitan dengan teknologi dan infrastruktur yang harus segera dilakukan, yang jika tidak, akan berdampak pada bisnis Perseroan

Dalam manajemen perubahan, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini, yaitu:

1. *Change Requestor*: Pihak pemohon yang bertanggung jawab untuk meminta dilakukannya perubahan terkait layanan TIK melalui formulir *Change Request* (RFC) dan proposal (apabila perubahan merupakan layanan baru).
2. *Change Manager*: Kepala Departemen penanggung jawab layanan yang bertanggung jawab melakukan penilaian terhadap perubahan.
3. *Change Control Board*: Kepala Departemen TI yang bertanggung jawab memberikan keputusan terkait persetujuan dilakukannya perubahan serta meninjau implementasinya.
4. *Change Implementor*: Karyawan yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan implementasi terkait *Change Management*. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan manajemen perubahan:
 - a. *Change Requestor* mengajukan permohonan perubahan dengan mengisi formulir RFC dan menyerahkan formulir kepada *Change Manager*.
 - b. *Change Manager* memeriksa apakah permohonan memenuhi persyaratan:
 - » Jika tidak sesuai, maka proses selesai.
 - » Jika sesuai, maka proses dilanjutkan untuk proses perubahan.
 - c. Jika permohonan memenuhi persyaratan, *Change Manager* melakukan analisis risiko terhadap perubahan yang diajukan.
 - d. Jika risiko dapat diterima, *Change Manager* meneruskan permohonan kepada *Change Control Board* untuk dilakukan pembahasan.

Beyond its main role in digital transformation within the internal PT MRT Jakarta environment, the IST Division is also involved in the digitalization of users of PT MRT Jakarta. The MRT-J Mobile App was launched as a mobile application system to support Corporate activities in Ticket Sales of the MRT and other integrated transportation modes, merchant payments, Corporate Profiling, delivery of Corporate Information as well as submissions of input and critiques. For passengers and the public, this application will simplify the process of MRT and other transportation modes ticket purchases, payments to collaborating merchants, as well as building a new culture of digital transactions.

Along with the PT MRT Jakarta operations that increasingly require optimal ICT tools and the transformation of conventional services to become digital, there are many assets used by the IST Division that require changes. These changes cover ICT infrastructures (physical assets, network assets, and system and application assets). The changes may be carried out based on schedules, but there are possibilities of sudden changes due to requests by the Top Level Management of PT MRT Jakarta and urgent requests related to technology and infrastructures, which if not done in a timely manner will impact the Corporation's business.

For Change Management, the following are the parties involved in the process:

1. *Change Requestor*: The requesting party is responsible for requesting changes related to ICT services through the *Change Request* (RFC) form and proposal (if the change is a new service).
2. *Change Manager*: The Head of Department as the person in charge for services is responsible to carry out assessment on changes.
3. *Change Control Board*: The Head of IT Department is responsible for making decisions related to approval for the changes and reviewing their implementation.
4. *Change Implementer*: Employees who are given the responsibility to carry out implementations related to *Change Management*.
The following steps are taken to conduct Change Management:
 - a. *Change Requestor* submits a request for change by filling in the RFC form and submitting the form to *Change Manager*.
 - b. *Change Manager* checks whether the application meets the requirements:
 - » If not appropriate, then the process is complete.
 - » If appropriate, then the process proceeds for the change process.
 - c. If the application meets the requirements, *Change Manager* carries out a risk analysis of the proposed changes.
 - d. If the risk is acceptable, the *Change Manager* forwards the request to the *Change Control Board* for discussion.

- e. *Change Control Board* memberikan persetujuan terhadap permohonan perubahan yang diajukan.
- f. Jika *Change Control Board* tidak setuju, *Change Manager* melihat apakah permohonan masih dapat direvisi:
 - » Jika tidak setuju, maka proses selesai.
 - » Jika setuju, proses dilanjutkan ke langkah berikutnya.
- g. Jika *Change Control Board* setuju, *Change Manager* menentukan jadwal untuk melakukan implementasi perubahan dan menentukan area mana saja yang memungkinkan terkena dampak dari perubahan tersebut.
- h. *Change Manager* melakukan konfirmasi kepada *Change Requestor* mengenai jadwal tersebut di atas.
- i. *Change Manager* menunjuk *Change Implementor* untuk melakukan perubahan.
- j. *Change Implementor* mengimplementasikan perubahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dengan mengikuti prosedur *Release Management*.
- k. *Change Manager* menilai berhasil tidaknya implementasi perubahan:
 - » Jika berhasil, maka lanjut ke proses poin m.
 - » Jika tidak berhasil, maka lanjut ke proses poin l.
- l. *Change Implementor* menilai apakah kegagalan perubahan dapat diperbaiki:
 - » Jika dapat diperbaiki, maka *Change Implementor* melakukan perbaikan atas implementasi perubahan, lalu kembali ke proses poin k.
 - » Jika tidak dapat diperbaiki, maka *Change Implementor* mengembalikan ke kondisi semua (*roll back*) dan lanjut ke proses poin m.
- m. *Change Implementor* mendokumentasikan pelaksanaan perubahan beserta hasil dan tindak lanjutnya pada *Log Change*.
- n. *Change Manager* melakukan *Post Implementation Review* (PIR) dan menentukan apakah dapat dilakukan *improvement* terhadap perubahan yang dilakukan.
- o. *Change Manager* melaporkan hasil PIR perubahan yang telah dilakukan kepada *Change Control Board*.
- p. *Change Control Board* melakukan revidasi atas hasil PIR.
- q. *Change Manager* mengambil tindak lanjut yang diperlukan terkait hasil revidasi dari *Change Control Board*.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan manajemen perubahan pada kondisi darurat. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan ketika melakukan manajemen perubahan dalam kondisi darurat:

1. *Change Requestor* mengajukan permohonan perubahan saat kondisi darurat dengan mengisi Formulir RFC dan menyerahkannya kepada *Change Control Board*.
Segala jenis permohonan perubahan darurat, baik yang berasal dari personil internal maupun eksternal Departemen TI, harus melalui pengisian Formulir RFC.
2. *Change Control Board* memeriksa apakah permohonan memenuhi persyaratan:
 - a. Jika tidak sesuai, maka proses selesai.
 - b. Jika sesuai, maka proses dilanjutkan untuk proses perubahan.
3. *Change Control Board* melakukan analisis risiko terhadap perubahan yang diajukan.
4. Jika risiko dapat diterima, *Change Control Board* memberikan persetujuan terhadap perubahan yang diajukan.

- e. *Change Control Board* provides approval for the proposed changes.
- f. If the *Change Control Board* does not agree, *Change Manager* checks whether the application can still be revised:
 - » If not agreed, then the process is complete.
 - » If agreed, the process continues to the next step.
- g. If the *Change Control Board* agrees, *Change Manager* determines the schedule for implementing the changes and determines which areas may be affected by the changes.
- h. *Change Manager* confirms to the *Change Requestor* about the schedule above.
- i. *Change Manager* appoints a *Change Implementer* to make changes.
- j. *Change Implementer* implements changes according to a predetermined schedule and by following the *Release Management* procedure.
- k. *Change Manager* assesses the success or failure of the implementation of the change:
 - » If successful, then proceed to process point m.
 - » If not successful, then proceed to process point l.
- l. *Change Implementer* assesses whether the change failure can be fixed:
 - » If can be fixed, then the *Change Implementer* makes improvements to the implementation of the change, then returns to process point k.
 - » If cannot be fixed, then the *Change Implementer* returns to all roll back conditions and continues to the process point m.
- m. *Change Implementor* documents the implementation of the change along with the results and follow-up actions on the *Change Log*.
- n. *Change Manager* conducts a *Post Implementation Review* (PIR) and determines whether improvements can be made to the changes made.
- o. *Change Manager* reports the results of the PIR changes that have been made to the *Change Control Board*.
- p. *Change Control Board* reviews the PIR results.
- q. *Change Manager* takes the necessary follow-up related to the review the results from the *Change Control Board*.

As explained earlier, it is possible to execute change management in an emergency. The following steps must be taken when implementing *Change Management* in an emergency situation:

1. *Change Requestor* submits an application for change during an emergency by filling in the RFC Form and submitting it to the *Change Control Board*.
All types of requests for emergency changes, both from the internal and external personnel of the IT Department, must be filled out by filling in the RFC Form.
2. *Change Control Board* checks whether the application meets the requirements:
 - a. If not appropriate, then the process is complete.
 - b. If appropriate, then the process proceeds for the change process.
3. *Change Control Board* conducts a risk analysis of proposed changes.
4. If the risk is acceptable, *Change Control Board* approves the proposed change.

5. Jika *Change Control Board* setuju, *Change Implementor* mengimplementasikan perubahan mengikuti prosedur *Release Management*.
6. *Change Control Board* menilai berhasil tidaknya implementasi perubahan:
 - a. Jika berhasil, maka lanjut ke proses poin g.
 - b. Jika gagal, maka dilakukan perbaikan atas solusi perubahan hingga keadaan darurat dapat ditangani, setelah itu lanjut ke proses poin i.
7. *Change Implementor* melaporkan hasil implementasi yang telah dilakukan kepada *Change Control Board* dan mendokumentasikan perubahan pada *Log Change*.
8. *Change Control Board* melakukan *Post Implementation Review* (PIR) atas hasil implementasi.
9. *Change Implementor* akan melakukan perbaikan atas kegagalan implementasi perubahan.

Rincian mengenai manajemen perubahan sudah dipaparkan dalam Peraturan Direktur Nomor PER/070/BOD-MRT/ XI/2019 tentang Pedoman Perubahan Infrastruktur TI dan Aplikasi (*Change Request*) di Lingkungan PT MRT Jakarta.

5. If *Change Control Board* agrees, the *Change Implementer* implements the changes following the *Release Management* procedure.
6. *Change Control Board* evaluates the success of the change implementation:
 - a. If successful, then proceed to the process point g.
 - b. If not successful, then an improvement is made on the solution to the change so that an emergency can be handled, then proceed to process point i.
7. The *Change Implementer* submits the result of implementation to the *Change Control Board* and document the changes into the *Log Change*
8. *Change Control Board* conducts *Post-Implementation Review* (PIR) on the implementation result.
9. *Change Implementer* will revise the input if there are failures in implementing changes.

Details related to *Change Management* has been described in *Director Regulation* number PER/070/BOD-MRT/XI/2019 concerning *Guidelines for IT Infrastructure and Applications' Change in the PT Jakarta MRT*.

MANAJEMEN RISIKO TIK PERSEROAN

CORPORATE ICT RISK MANAGEMENT

Penanganan Insiden

Incident Handling

Insiden merupakan setiap peristiwa yang bukan merupakan operasi standar dari layanan yang menyebabkan gangguan atau penurunan kualitas layanan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang mengelola insiden keamanan terkait dengan layanan TIK Perseroan. Prosedur ini juga ditujukan untuk memulihkan operasi/layanan TIK secepat mungkin sehingga menjamin terjaganya ketersediaan dan kualitas layanan serta menekan dampak buruk bagi aktivitas bisnis Perseroan. Penanganan insiden ini mengatur tata cara mengenai :

1. Identifikasi dan pencatatan insiden.
2. Pengklasifikasian (kategorisasi dan penentuan skala prioritas) dan dukungan awal bagi pengguna saat terjadinya insiden.
3. Investigasi dan analisis insiden.
4. Penanganan insiden dan pemulihan layanan ke kondisi operasi normal.
5. Penyelesaian insiden keamanan dan komunikasi kepada pengguna.

Penanganan insiden ini juga melibatkan beberapa pihak yaitu:

1. Pengguna layanan TIK: pihak yang menggunakan layanan TIK di lingkup Perseroan.
2. *IT Helpdesk*: Tim *Helpdesk* yang menerima laporan insiden.
3. Manajer Insiden: Personel yang ditunjuk untuk mengelola dan menyelesaikan insiden.

Berikut prosedur penanganan insiden yang dilakukan Departemen TI:

1. Pengguna layanan TIK yang mengalami insiden menghubungi *IT Helpdesk*.
2. *IT Helpdesk* mencatat laporan insiden.
3. *IT Helpdesk* melakukan eskalasi kepada Manajer Insiden.
4. Manajer Insiden mengkoordinasikan *Incident Response* dan pengamanan bukti insiden.
5. Manajer Insiden melakukan analisis dan mengkoordinasikan penyelesaian insiden.
6. Manajer Insiden menyampaikan rekomendasi tindakan perbaikan

Incidents are events outside the operation standards of services that cause disruptions or a decrease in service quality. Hence, there needs to be a procedure to manage security incidents related to the Corporate ICT services. This procedure is also meant to recover ICT operations/ services as soon as possible in order to ensure the maintenance of service availability and quality and surpress the negative impacts the incidents may bring to the Corporate business activities. The *Incident Handling* procedure regulates the following aspects:

1. Identification & recording of incidents.
2. Classification (categorization and prioritization), and user first aid during incident.
3. Incident investigation and analysis.
4. Incident handling and service recovery to return to normal operating conditions.
5. Resolution of security incident and communication to users.

Incident handling also involves the following parties:

1. *ICT service users*: those who use ICT services within the Corporation.
2. *IT Helpdesk*: The *Helpdesk* team that receives incident reports.
3. *Incident Manager*: The Personnel appointed to manage and resolve incidents.

The procedures for handling incidents by the IT Department are as follows:

1. User of ICT services that who experiencing an incident contacts the *IT Helpdesk*.
2. *IT Helpdesk* records the incident report.
3. *IT Helpdesk* escalates the report to the *Incident Manager*.
4. *Incident Manager* coordinates the *Incident Response* and secures the evidence of incident.
5. *Incident Manager* analyzes and coordinates the resolution of incident.
6. *Incident Manager* submits recommendations for corrective actions to

kepada pihak terkait.

7. Manajer Insiden melakukan pemantauan tindakan perbaikan.
8. Manajer Insiden memperbarui status tindakan setiap ada progres tindakan perbaikan hingga selesai.

related parties.

7. *Incident Manager monitors corrective actions.*
8. *Incident Manager updates the status of the action every time there is a progress of the corrective action until completion.*

ETIKA PENYEBARAN INFORMASI NON-PUBLIK

ETHICS OF NON-PUBLIC INFORMATION DISSEMINATION

Perseroan menekankan pentingnya etika penyebaran informasi non-publik oleh karyawan Perseroan. Segenap karyawan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan semua informasi non-publik mengenai Perseroan serta yang berkaitan dengan pengguna jasa, mitra, maupun pihak lainnya yang diperoleh selama bekerja di Perseroan. Pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang dilakukan baik pada masa bakti karyawan maupun masa purna bakti.

The Corporation emphasizes the importance of the ethics of non-public information dissemination by Corporate employees. All employees are required to maintain the secrecy of all non-public information of the Corporation and all information related to passengers, partners, and other parties obtained while working for the Corporation. Disclosure of confidential information to non-relevant parties is prohibited, whether during or after employees' tenure in the Corporation.

Pelayanan Data dan Informasi

Data and Information Services

Seiring dengan operasional Perseroan yang memerlukan pelayanan data dan informasi yang selalu terkini, Divisi *Information System & Technology* (IST) sudah menyiapkan berbagai macam fasilitas yang mendukung kelancaran operasional PT MRT Jakarta (Persero) terkait pelayanan data dan informasi. Berikut adalah fasilitas-fasilitas yang mendukung hal tersebut:

1. *Microsoft Office*: sebagai fasilitas resmi pendukung produktivitas kerja.
2. *Microsoft Kaizala*: sebagai fasilitas resmi berbagi pesan di lingkungan Perseroan.
3. *Microsoft Teams*: sebagai fasilitas resmi *video conference* di lingkungan Perseroan.
4. *Microsoft OneDrive*: sebagai fasilitas resmi penyimpanan data di lingkungan Perseroan.
5. *eOffice*: sebagai fasilitas resmi Korespondensi Internal Perseroan.
6. *FortiClient VPN*: sebagai fasilitas resmi *Remote Access*.
7. *Microsoft Sharepoint*: sebagai *platform* kolaborasi berbasis web yang terintegrasi dengan *Microsoft Office*.
8. *Zoom*: sebagai fasilitas media pertemuan Virtual berbasis *Video* dan *Voice* untuk menunjang kebutuhan eksternal.
9. *GAAS*: sebagai fasilitas permintaan barang dan jasa serta kendaraan kepada unit kerja *General Affair*.
10. *Kinetic Knowledge Management*: sebagai fasilitas akses dan rekam pengetahuan-pengetahuan strategis Perseroan.
11. *eProc*: sebagai fasilitas pengadaan dan atau pembelian dalam melakukan seleksi penyedia jasa dan atau barang.
12. *SAP*
 - a. *SuccessFactor*: sebagai fasilitas pelayanan karyawan secara mandiri dalam kebutuhan *Human Resources* (izin, cuti, dispensasi, dan lain sebagainya).
 - b. *Fiori*: sebagai fasilitas persetujuan pengadaan dan pembayaran secara *mobile*.
 - c. *BIBO (Business Intelligence & Business Object) Dashboard*: sebagai fasilitas monitoring keuangan, kinerja dan kegiatan perawatan kereta MRT Jakarta.
 - d. *FICO (Financial and Controlling)*: sebagai fasilitas dalam mendukung

In line with PT MRT Jakarta's operations that require updated data and information services, the IST Division has prepared facilities to support the operational activities of PT MRT Jakarta with regards to data and information services. The following are the supporting facilities:

1. *Microsoft Office*: as an official facility for supporting work productivity.
2. *Microsoft Kaizala*: as an official facility for sharing messages within the Corporation.
3. *Microsoft Teams*: as an official video conference facility in the Corporate environment.
4. *Microsoft OneDrive*: as an official data storage facility in the Corporate environment.
5. *eOffice*: as an official facility for the Corporation's Internal Correspondences.
6. *FortiClient VPN*: as an official Remote Access facility.
7. *Microsoft Sharepoint*: as a web-based collaboration platform integrated with *Microsoft Office*.
8. *Zoom*: as a Video and Voice-based Virtual meeting media facility to support external needs.
9. *GAAS*: as a facility for requesting goods and services and vehicles to the General Affairs unit.
10. *Kinetic Knowledge Management*: as a facility to access and record the Corporation's strategic knowledge.
11. *eProc*: as a procurement and/or purchasing facility for selecting providers of services and/or goods.
12. *SAP*
 - a. *Success Factor*: as an employee self-service facility in *Human Resources* needs (permits, leave, dispensation, etc.).
 - b. *Fiori*: as a mobile procurement and payment approval facility.
 - c. *BIBO (Business Intelligence & Business Object) Dashboard*: as a financial monitoring facility, performance and maintenance activities for MRT Jakarta trains.
 - d. *FICO (Financial and Controlling)*: as a facility to support financial

- kegiatan keuangan dan akuntansi serta *Budget Control*.
- e. *MM (Material Management)*: sebagai fasilitas dalam mendukung kegiatan pengadaan dan inventarisasi.

- and accounting activities and *Budget Control*.
- e. *MM (Material Management)*: as a facility to support procurement and inventory activities.

Proses Pengadaan TIK

ICT Procurement Process

Dalam proses *procurement*, Divisi IST selalu mengedepankan transparansi dan mengikuti pedoman yang sudah disepakati bersama. Pedoman tersebut dibuat oleh unit kerja *Procurement* dan sudah menjadi Peraturan Direksi No. 059 Tahun 2019 tentang Kebijakan Rantai Pasok dan Tata Kelola Pengadaan di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).

In its procurement process, the IST Division always prioritizes transparency and follows the guidelines that have been collectively agreed upon. The guidelines were made by the Procurement work unit and has become the Board of Directors' Regulation No. 059 of 2019 concerning Supply Chain Policy and Procurement Governance in PT MRT Jakarta.

MONITORING DAN EVALUASI TIK

ICT MONITORING AND EVALUATION

Peran Audit Internal

Role of Internal Audit

Proses audit internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah suatu proses pengujian sistematis dan mandiri untuk mengetahui apakah sistem berjalan secara efektif dan apakah implementasi sesuai dengan rencana awal yang telah ditetapkan. Referensi yang digunakan dalam proses Internal Audit meliputi:

1. ISO/IEC 27001:2013 – Annex A.6 – *Internal ISMS Audits*
1. ISO/IEC 27001:2013 – Annex A.12.7.1 – *Information System Audit Controls*
2. Kebijakan Keamanan Informasi Departemen *Information System & Technology Management* PT MRT Jakarta (Perseroda).

The internal audit of the Information Security Management System (SMKI) is a systematic and independent assessment process to find out if the system runs effectively and is implemented in accordance with the initial plan. References used in the Internal Audit process include:

1. ISO/IEC 27001: 2013 - Annex A.6 - *Internal ISMS Audits*
2. ISO/IEC 27001: 2013 - Annex A.12.7.1 - *Information System Audit Control*
3. *Information Security Policy Information System & Technology Management Department, PT MRT Jakarta*

Dalam rangka melaksanakan tata kelola TIK dengan benar maka diperlukan peran audit internal, untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola TIK yang dilakukan oleh Divisi IST. Seluruh temuan audit, baik temuan mayor maupun temuan minor, dicatat dalam *non-conformance report* dan dilaporkan pada saat *closing meeting* kepada pihak yang diaudit. Pihak yang diaudit bersama Divisi IST dan divisi lain yang bersangkutan, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai temuan audit. Tim Audit melakukan *monitoring* dan verifikasi atas hasil tindakan perbaikan yang telah dilakukan pihak yang diaudit. *Lead Auditor* membuat laporan hasil audit internal beserta tindakan perbaikan yang dilakukan kepada manajemen di level atas.

In order to properly conduct ICT governance, the internal auditor must conduct monitoring and evaluation on the implementation of ICT governance by the IST Division. All audit findings, whether Major or Minor, shall be recorded in the non-conformance report and communicated during the closing meeting to the Auditee. Auditee, along with the IST Division and other related divisions, shall perform corrective and preventive actions in accordance with the audit findings. The Audit Team then performs monitoring and verification on corrective action results done by the Auditee. Lead Auditor then prepares a report on the results of the internal audit and the corrective measures to be submitted to the Top Level Management.

Proses audit internal perlu ditinjau secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun. Peninjauan perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian, efektivitas dan efisiensi proses audit internal dan mengidentifikasi perbaikan dan peningkatan terhadap proses audit internal. Peninjauan perlu mempertimbangkan aspek berikut:

The internal audit process needs to be reviewed regularly, at least once a year. Reviews are required to ensure the appropriateness, effectiveness, and efficiency of the internal audit process and identify improvements in the internal audit process. The reviews need to consider the following factors:

1. Perubahan terhadap kriteria audit, yang mencakup namun tidak terbatas pada: perubahan pada persyaratan dari standar ISO, perubahan terhadap kebijakan, prosedur maupun peraturan Perseroan atau perubahan terhadap peraturan hukum dan undang-undangan yang berlaku kepada Departemen *Information System & Technology Management*.
2. Perubahan terhadap ruang lingkup audit internal, yang mencakup namun tidak terbatas pada perubahan organisasi dan atau personel pada Divisi *Information System & Technology Management* maupun perubahan organisasi dan atau personel Departemen *Information*

1. *Changes in the audit criteria, which covers but not limited to changes in the requirements of the ISO standard, changes in policies, procedures, or Corporate regulations or changes in the statutory law applicable to the Department of the Information System and Technology Management.*
2. *Changes to the scope of internal audit, which includes but not limited to organizational or personnel changes in the IST Management Division or organizational and personnel changes in the IST Management Department.*

System & Technology Management.

3. Perubahan pada kebijakan dan prosedur terkait audit internal SMKI di Divisi *Information System & Technology Management*.

3. *Changes to policies and procedures related to the internal audit of ISMS in the Information System & Technology Management Division.*

Peran Audit Eksternal*Role of External Audit*

Proses audit eksternal tidak berbeda dengan proses audit internal. Dalam prosesnya, audit eksternal tidak menggunakan Auditor Internal dari Perseroan tapi menggunakan auditor eksternal yang proses penunjukan dan pengadaannya mengikuti prosedur dari Unit Kerja *Procurement*. Audit Eksternal TIK sudah dilaksanakan di tahun 2019 oleh Ernst & Young (EY) dan RSM Indonesia.

The external audit process is no different from the internal audit process. In its process, external audit does not use an Internal Auditor from PT MRT Jakarta, and employs the services of an External Auditor whose appointment and procurement follow the procedures set by the Procurement work unit. ICT External Audit has been conducted in 2019 by Ernst & Young (EY) and RSM Indonesia.

Pekerjaan audit yang dilakukan oleh RSM Indonesia bertujuan untuk memberikan asurans pada pekerjaan implementasi *ERP System* tahap 1 pada Perseroan. Adapun ruang lingkup pekerjaan tersebut adalah untuk melakukan pengujian implementasi Sistem ERP berdasarkan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan, dengan tahapan pekerjaan sistem ERP Perseroan yang meliputi:

Audit works done by RSM Indonesia were meant to provide assurance on the Phase 1 ERP System implementation in PT MRT Jakarta. The scope of the works was to conduct testing on the ERP System implementation based on the established specifications and standards, with work stages consisting of:

1. Tahapan Persiapan,
2. Implementasi,
3. Integrasi,
4. Implementasi berdasarkan *business design*,
5. Migrasi Data,
6. Pengujian,
7. Pelatihan,
8. Dukungan pasca implementasi,
9. Kualifikasi *cloud server*,
10. Kualifikasi perangkat keras,
11. Kualifikasi Tenaga Ahli,
12. Alih Pengetahuan,
13. *Process Flow*,
14. *Function list*.

1. *Preparation Stage*
2. *Implementation*
3. *Integration*
4. *Business Design Implementation*
5. *Data Migration*
6. *Testing*
7. *Training*
8. *GoLive Support*
9. *Cloud server qualifications*
10. *Hardware qualifications*
11. *Expertise qualifications*
12. *Knowledge Transfer*
13. *Process Flow*
14. *Function List*

Beberapa hasil asurans sesuai dengan pekerjaan audit yang dilakukan oleh RSM Indonesia selaku *IT Auditor* yang telah disampaikan menjadi prioritas manajemen untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

Some of the assurance results are aligned with the audit works conducted by RSM Indonesia as the IT Auditor, and the following are the management's priorities to be followed up:

1. Integrasi sistem aplikasi SAP dengan aplikasi di sekitarnya masih perlu disempurnakan;
2. Pengembangan/Perubahan Sistem ERP.
3. Dokumentasi Proses Migrasi.
4. Dokumentasi tahap pengujian atas implementasi SAP.
5. Administrasi kehadiran dan pelaporan rutin.
6. Implementasi Fitur SAP.
7. Potensi permasalahan atas penggunaan lisensi SAP.
8. Pemenuhan Ruang Lingkup Implementasi Sistem ERP.

1. *The Integration of SAP application System with its surrounding applications still needs to be improved.*
2. *Development/Change of ERP System.*
3. *Migration Documentation.*
4. *Documentation of SAP Implementation Testing Phase.*
5. *Routine Report and Attendance Administration.*
6. *SAP Feature Implementation.*
7. *SAP license potential misusage.*
8. *ERP Implementation scope of work accomplishment/completion.*

Daftar di bawah ini adalah hasil asurans sesuai dengan pekerjaan audit yang terkait dengan TIK oleh *Ernst & Young (EY)*, sebagai berikut:

The list below contains assurance results of ICT audit works conducted by Ernst & Young (EY):

1. Perlu perbaikan dalam pendokumentasi atas manajemen perubahan program terkait beberapa kode transaksi di SAP.
2. Optimalisasi pengaturan *password* dan kontrol terhadap *user access* di lingkungan TIK.
3. Perlu perbaikan dalam pendokumentasi atas manajemen *user access* di lingkungan TIK.
4. Perlu adanya pengujian terhadap restorasi data.

1. *Improvements are needed in documenting change management programs related to some transaction codes in SAP.*
2. *Password settings and user access control must be optimized in the ICT environment.*
3. *User access management documentation needs to be improved in the ICT environment.*
4. *Data restoration testing is needed.*

BUDAYA ANTI KORUPSI

ANTI CORRUPTION CULTURE

Perseroan memiliki komitmen yang kuat dalam mendorong budaya anti korupsi. Bentuk praktik paling mendasar dari komitmen ini adalah larangan suap dan penerimaan hadiah oleh insan Perseroan dalam bentuk apapun.

Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh karyawan Perseroan dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain dengan cara menerima sejumlah imbalan yang bersifat material. Perseroan melarang Pejabat Perseroan untuk menerima hadiah dari bawahan, rekan kerja, konsultan, kontraktor, dan/atau mitra kerja/pengusaha dalam bentuk apapun, baik berupa karangan bunga, bingkisan makanan maupun barang berharga lainnya.

Pejabat Perseroan juga dilarang melakukan pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun dalam rangka mengharapkan imbalan agar mendapatkan perlakuan khusus.

Perseroan mengembangkan budaya anti korupsi melalui beberapa cara, meliputi:

1. Penerapan Kode Etika dan Perilaku
2. Pengendalian gratifikasi
3. Wajib lapor LHKPN
4. Penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran
5. Pengungkapan praktik tata kelola yang tidak baik

The Corporation has a strong commitment in encouraging anti-corruption culture. The most basic form of practice of this commitment is the prohibition of bribery and acceptance of gifts by the Corporation's employees in any form.

The Directors, the Board of Commissioners and all employees of the Corporation are prohibited from abusing their position for personal, family and other parties' interests or benefits by receiving material rewards. The Corporation prohibits Corporate Executives from accepting gifts from subordinates, coworkers, consultants, contractors, and/or work partners/entrepreneurs in any form, whether in the forms of bouquets of flowers, food packages or other valuables.

The Corporate Executives are also prohibited from giving or promising something to anyone in exchange of compensation to receive special treatments.

The Corporation develops an anti corruption culture through various approaches, including:

1. Implementation of Code of Conduct
2. Gratification Control
3. Fulfilling the Mandatory Report of State Officials Wealth
4. Implementing a Whistle-blowing System
5. Transparency of bad governance practices

KODE ETIKA DAN PERILAKU

CODE OF CONDUCT

Kode Etika dan Perilaku, merupakan pijakan paling mendasar baik bagi Perseroan sendiri, manajemen, pemangku kepentingan maupun pemegang saham dalam menjalin hubungan sesuai dengan tujuan Perseroan dan asas kepatutan. Kode Etika dan Perilaku berperan penting sebagai Pedoman etika dan perilaku yang mengatur hubungan etika kerja antar elemen dalam Perseroan, khususnya terkait hubungan yang dilandasi atas profesionalitas yang diharapkan dapat terus memberikan nilai tambah bagi proses pengelolaan Perseroan.

Landasan utama Kode Etika dan Perilaku Perseroan adalah visi dan misi, di mana visi dan misi menjadi proyeksi pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan.

Code of Conduct is the most basic foundation for the Corporation, management, stakeholders, and shareholders in building relationships in accordance with the Corporate objective and propriety principles. Code of Conduct has an important role as an Ethical Guideline that regulate ethical relationships between different Corporate elements, especially in relation to relationships that are based on professionalism that are hoped to continue providing added values to the Corporation's management process.

The main foundation of Corporate Code of Conduct is its vision and mission, in which they become a projection of the Corporation's sustainable growth.



Visi & Misi
Vision & Mission



Nilai-Nilai Perseroan
Corporate Values



Kode Etika dan Perilaku
Code of Conduct

Figur 6.31
Figure 6.31

Memberlakukan Kode Etika dan Perilaku Kepada Seluruh Tingkat Organisasi

Enforcement of the Code of Conduct on All Organizational Levels

Komitmen dalam berperilaku dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan menjadi perhatian Perseroan dan menjadi bagian dari etika

Commitment in behaving and interacting with stakeholders has caught the attention of the Corporation and has become part of the Corporate business

bisnis dan etika kerja Perseroan dalam menciptakan nilai tambah tidak saja bagi Perseroan tetapi juga bagi para pemangku kepentingan.

Perseroan menyusun dan mengembangkan Kode Etika dan Perilaku dengan standar yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan termasuk kriteria kepuasannya. Penerapan Kode Etika dan Perilaku yang dilakukan oleh Perseroan secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan, komitmen, dan ketentuan mendukung terciptanya budaya Perseroan yang menjunjung tinggi moral dan integritas dalam menjalankan keberlangsungan Perseroan.

Kode Etika dan Perilaku berlaku bagi insan Perseroan di setiap jenjang organisasi, baik itu karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris, diwajibkan menandatangani pernyataan komitmen kepatuhan terhadap Kode Etika dan Perilaku.

Isi Kode Etika dan Perilaku Perseroan dan Penetapannya

Corporate Code of Conduct and Its Implementation

Perseroan memiliki Kode Etika dan Perilaku yang tertuang dalam bentuk pernyataan secara tertulis tentang nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan Perseroan dan menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diwajibkan bagi seluruh insan Perseroan. Kode Etika dan Perilaku Perseroan telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi No. 041 Tahun 2019 tentang Pedoman Etika dan Perilaku.

Kode Etika dan Perilaku Perseroan mengatur beberapa perilaku yang ideal yang wajib dijalankan berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini sesuai dengan budaya Perseroan, di antaranya:

1. Kepatuhan terhadap hukum
2. Ketentuan pemberian
3. Ketentuan penerimaan
4. Pertemuan bisnis
5. *Sharing Knowledge*
6. Donasi atau Sumbangan
7. Aktivitas Politik
8. Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan
9. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perseroan
10. Komitmen terhadap Keselamatan dan Lingkungan Hidup
11. Benturan Kepentingan
12. Pengungkapan Informasi Keuangan
13. Integritas Laporan Keuangan dan Tahunan
14. Minuman Keras, Narkoba, Judi dan Kegiatan Lain yang Melanggar Peraturan Perundang-Undangan.

Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etika dan Perilaku Perseroan Kepada Karyawan

Socialization and Internalization of the Corporate Code of Conduct to Employees

Sosialisasi Kode Etika dan Perilaku Perseroan kepada seluruh karyawan dilakukan dengan membagikan buku Pedoman Kode Etika dan Perilaku. Sebagai tanda telah dibaca dan dipahami, setiap karyawan menandatangani pernyataan kepatuhan Kode Etika dan Perilaku Perseroan. Penandatanganan pernyataan kepatuhan Kode Etika dan Perilaku Perseroan dilakukan setahun sekali oleh seluruh Insan Perseroan.

and work ethics in creating added values not only for the Corporation but also for all stakeholders.

The Corporation prepares and develops the Code of Conduct with high standards and considerations of the interests of stakeholders, including their satisfaction criteria. The continuous and sustainable implementation of the Code of Conduct by the Corporation in the forms of attitude, actions, commitments, and policies to support the creation of a Corporate culture that prioritize morality and integrity in implementing Corporate continuity.

The Code of Conduct applies to all Corporate employees on all organizational levels, from employees to the Directors and the Board of Commissioners, they are all required to sign a statement of compliance with the Code of Conduct.

The Corporation has a Code of Conduct that is described in a written statement on ethical values applicable in the Corporate environment and is considered a policy and behavioral standard that all Corporate employees are required to comply with. The Corporate Code of Conduct has been established through Directors' Regulation No. 041 of 2019 concerning the Code of Conduct.

The Corporate Code of Conduct regulates several ideal behaviors that must be implemented based on the values that align with the Corporate culture, including:

1. *Compliance with the law*
2. *Policies on Gifting*
3. *Policies on Acceptance*
4. *Business Meeting*
5. *Knowledge Sharing*
6. *Donations or Donations*
7. *Political Activities*
8. *Confidentiality of Corporate Data and Information*
9. *Protection and Use of Corporate Assets*
10. *Commitment to Safety and the Environment*
11. *Conflicts of Interest*
12. *Disclosure of Financial Information*
13. *Integrity of the Financial and Annual Reports*
14. *Liquor, Drugs, Gambling and Other Activities that Violate the Laws and Regulations.*

Socialization of the Corporate Code of Conduct to all employees is implemented by distributing a guidebook on Code of Conduct. As a confirmation that employees have read and understood the guidebook, all employees must sign a statement of compliance with the Corporate Code of Conduct. The signing of the statement of compliance with the Corporate Code of Conduct is done once a year by all employees of the Corporation.

Penegakan Kode Etika dan Perilaku *Enforcement of the Code of Conduct*

Perseroan berkomitmen untuk melakukan penegakan Kode Etika dan Perilaku di seluruh lini Perseroan. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etika dan Perilaku dikenakan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin Perseroan yang berlaku.

Mekanisme penegakan Kode Etika dan Perilaku diatur sebagai berikut:

1. Terdapatnya laporan pelanggaran Kode Etika dan Perilaku baik melalui media surat atau surel kepada atasan langsung karyawan dan Divisi *Internal Audit*.
2. Setiap pelaporan yang masuk akan diperhatikan secara serius dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
3. Pelaksanaan proses pemeriksaan.
4. Penetapan sanksi apabila hasil penyelidikan menyatakan pegawai melakukan pelanggaran Kode Etika dan Perilaku.

Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etika dan Perilaku dikenakan sanksi sesuai dengan berat/ringan, sifat dan seringnya pelanggaran dilakukan. Pemberian sanksi mengacu kepada Peraturan Perusahaan.

The Corporation is committed to perform an enforcement of the Code of Conduct in all Corporate units. Every violation of the Code of Conduct is subject to the applicable provisions concerning violations of the Corporate discipline.

The mechanism for enforcing the Code of Conduct is as follows:

1. *There are reports of violations of the Code of Conduct either through a letter or email to the direct supervisor of employees and Internal Audit.*
2. *Every incoming report will be taken seriously and will be followed up according to procedure.*
3. *Execution of the inspection process.*
4. *Enforcement of sanctions if the result of an investigation states that an employee has violated the Code of Conduct.*

Employees who have been proven to have violated the Code of Conduct may be sanctioned according to the weight, type, and frequency of the violations committed. Sanctioning is regulated by the Corporate Regulations.

Jumlah Pelanggaran Kode Etika dan Perilaku *Frequency of Code of Conduct Violations*

Sebagai realisasi penegakan Kode Etika dan Perilaku, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etika dan Perilaku selama 3 (tiga) tahun terakhir.

As a realization of the enforcement of the Code of Conduct, the following table details the sanctions imposed related to the enforcement of the Code of Conduct in the past 3 (three) years:

| Kategori Pelanggaran <i>Violation Category</i> | Jenis Sanksi <i>Type of Sanction</i> | Jumlah Pelanggaran <i>Frequency of Violation(s)</i> | | |
|---|---|--|----------------------|----------------------|
| | | 2019 | 2018 | 2017 |
| | Teguran <i>Reprimand</i> | - | Nihil <i>None</i> | Nihil <i>None</i> |
| | Peringatan 1 <i>Warning 1</i> | - | | |
| | Peringatan 2 <i>Warning 2</i> | - | | |
| | Peringatan 3 <i>Warning 3</i> | - | | |
| | Pengunduran Diri <i>Resignation</i> | - | | |
| | Pemecatan <i>Dismissal</i> | - | | |

Tabel 6.133
Table 6.133

Sebagai bagian dari transparansi yang dilakukan Perseroan, berikut disampaikan jumlah penyimpangan internal yang terjadi dan upaya penyelesaiannya.

As part of the transparency efforts by the Corporation, the following list contains the number of internal violations that happened as well as their resolutions.

| Penyimpangan Internal dalam 1 Tahun <i>Violation(s) in 1 Year</i> | Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh <i>Number of Cases By</i> | | | | | |
|---|---|----------|---|----------|---|----------|
| | Manajemen <i>Management</i> | | Pegawai Tetap <i>Regular Employees</i> | | Pegawai Tidak Tetap <i>Non-Regular Employees</i> | |
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Telah diselesaikan <i>Resolved</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalam proses penyelesaian internal <i>In the process of resolution</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belum diupayakan penyelesaiannya <i>Resolution efforts have not begun</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum <i>Followed up by legal processes</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah Penyimpangan <i>Number of Violation(s)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabel 6.134
Table 6.134

Kajian dan Evaluasi Manajemen *Management Study and Evaluation*

Manajemen secara konsisten melakukan kajian dalam rangka mengevaluasi kinerja Perseroan, termasuk keterkaitan antara visi, misi dan budaya Perseroan serta kode etik dengan rencana jangka panjang dan profil risiko yang dihadapi Perseroan. Penerapan Kode Etika dan Perilaku juga menjadi kajian manajemen untuk menjadi salah satu perangkat evaluasi keorganisasian Perseroan.

The management consistently conducts reviews in order to evaluate the Corporate performance, including the synergy between vision, mission, the Corporate culture as well as the Code of Conduct and the long term plan and risk profile faced by the Corporation. The application of the Code of Conduct is part of the managerial review to become one of the organizational evaluation tools of the Corporation.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI *GRATIFICATION CONTROL*

Perseroan berkomitmen untuk menghindari praktik gratifikasi di dalam kegiatan kerja sehari-hari dengan menerbitkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi berdasarkan Peraturan Direksi No. 005 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Pedoman ini mengatur tentang pemberian dan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh karyawan serta upaya-upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan. Pedoman Pengendalian Gratifikasi telah dipublikasikan dalam website Perseroan.

The Corporation is committed to prevent Gratification practices in its daily operations by issuing a Gratification Control Guideline based on Directors' Regulation No. 005 of 2019 concerning Gratification Control. This guideline regulates the gifting and acceptance of Gratifications by employees and the Gratification prevention and control efforts in the Corporate environment. The Gratification Control Guideline has been published on the Corporate website.

Untuk mengelola pengendalian gratifikasi, Perusahaan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), yaitu Divisi *Corporate Secretary*, yang memiliki tugas dan fungsi utama melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan.

To manage Gratification Control, the Corporation formed a Gratification Control Unit (UPG) within the Corporate Secretary Division, which is tasked with monitoring and controlling Gratification in the Corporate environment.

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2019, telah diterima 17 (tujuh belas) laporan penerimaan gratifikasi. 2 (dua) gratifikasi merupakan gratifikasi yang tidak dilarang, 1 (satu) di antaranya telah dikembalikan kepada pihak Pemberi dan 14 (sebelas) laporan telah diteruskan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedang menunggu penetapan status kepemilikannya oleh KPK.

From the period of January – December 2019, there were 17 (reports) of gratification receipts. Of which 2 (two) were the allowed Gratification, 1 (one) Gratification has been returned to the giver, and 14 (fourteen) reports have been submitted to the Corruption Eradication Commission (KPK) and currently await the determination of their ownership status by the KPK.

INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

INFORMATION ON FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES

Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang keterlibatan individu atas nama Perseroan dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi untuk kepentingan politik. Secara tegas, Perseroan tidak mengizinkan insan Perseroan menggunakan fasilitas atau sumber daya apapun untuk tujuan kampanye politik, penggalangan dana politik maupun untuk tujuan partisipasi politik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kode Etik dan Perilaku Perseroan.

The Corporation has a policy to prohibit individual involvements on behalf of the Corporation in political activities, including providing donations for political purposes. The Corporation firmly prohibits employees of the Corporation to use Corporate facilities or resources for political campaign purposes, political fundraising, or political participation purposes, as regulated in the Corporate Code of Conduct.

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

REPORT OF STATE OFFICIALS WEALTH (LHKPN)

Pelaksanaan LHKPN di Lingkup Perseroan

Implementation of the Report of State Officials Wealth in the Corporation

Perseroan telah memiliki Pedoman Pengelolaan LHKPN yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi No. 011 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor 009 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang merupakan pemutakhiran dari Peraturan Direksi No. 009 Tahun 2017. Pedoman ini mengatur tata cara penyampaian, pengelolaan LHKPN, karyawan yang wajib menyampaikan LHKPN dan sanksi bagi yang tidak melaporkan LHKPN.

The Corporation has a Report of State Officials Wealth Management Guideline that was established through Directors' Regulation No. 011 of 2019 concerning Amendments to Directors' Regulation Number 009 of 2017 concerning the Report of State Officials Wealth Management, which is an update of Directors Regulation No. 009 of 2017. This guideline regulates delivery procedure and management of the Report of State Officials Wealth, employees who are obliged to submit the report, and sanctions for those who fail to do so.

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan LHKPN, Wajib LHKPN Perseroan adalah sebagai berikut:

Based on the Report of State Officials Wealth Management Guideline, the following are individuals who are obliged to submit Reports of State Officials Wealth:

1. Dewan Komisaris;
2. Direksi;
3. Kepala Divisi atau yang setara;
4. Kepala Departemen atau yang setara.

1. Board of Commissioners;
2. Directors;
3. Heads of Divisions or equivalent;
4. Heads of Departments or equivalent.

Pengelola LHKPN

Administrators of Report of State Officials Wealth

STRUKTUR TIM PENGELOLA LHKPN Structure of Report of State Officials Wealth Management Team

Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi
Finance & Corporate Management Director

Kepala Divisi Corporate Secretary
Head of Corporate Secretary Division

Good Corporate Governance Specialist



Koordinator LHKPN
Report of State Officials Wealth Coordinator



Administrator Instansi
Agency Administrator



Administrator Unit Kerja
Work Unit Administrator

Figur 6.32
Figure 6.32

1. Koordinator LHKPN

- Menyelenggarakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda);
- Mengoordinasikan semua kegiatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda);
- Mengarahkan kegiatan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda);
- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda);
- Melaporkan kegiatan pelaksanaan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) kepada Direktur Utama.

2. Administrator Instansi

- Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda);
- Membuat akun admin unit kerja;
- Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar Wajib LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN;
- Berkordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian Aplikasi Wajib LHKPN;
- Memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN;
- Membuat laporan kegiatan pelaksanaan LHKPN di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) kepada Koordinator LHKPN untuk dilaporkan kepada Direktur Utama;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator LHKPN yang berkaitan dengan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).

3. Administrator Unit Kerja

- Mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Unit Kerja;
- Membuat akun wajib LHKPN;
- Membuat dan memutakhirkan daftar Wajib LHKPN;
- Menyiapkan kelengkapan LHKPN untuk dikirimkan ke KPK RI;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator LHKPN yang berkaitan dengan LHKPN bagi pejabat di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).

1. Report of State Official Wealth (LHKPN) Coordinator

- *Conduct Reports of State Official Wealth (LHKPN) for Executives in PT MRT Jakarta (Perseroda);*
- *Coordinate all Reports of State Official Wealth activities for Executives within PT MRT Jakarta (Perseroda);*
- *Provide directions on Report of State Official Wealth activities for Executives within PT MRT Jakarta (Perseroda);*
- *Carry out monitoring and evaluation of Report of State Official Wealth implementation for Executives in PT MRT Jakarta (Perseroda);*
- *Report Report of State Official Wealth implementation activities for Executives within PT MRT Jakarta (Perseroda) to the President Director.*

2. Agency Administrator

- *Manage the e-Report of State Official Wealth application within PT MRT Jakarta (Perseroda);*
- *Create a work unit admin account;*
- *Validate the creation/updating of the Report of State Official Wealth Obligatory list into the e-Report of State Official Wealth application;*
- *Coordinate with the KPK regarding the management and administration of Report of State Official Wealth Mandatory Applications;*
- *Socialize the Report of State Official Wealth obligations and technical guidance on the procedures for filling and submitting Report of State Official Wealth;*
- *Report the implementation of the Report of State Official Wealth's activities in the PT MRT Jakarta (Perseroda) environment to the State Official Wealth Coordinator to be reported to the President Director;*
- *Carry out other tasks assigned by the Report of State Official Wealth Coordinator related to the Report of State Official Wealth for Executives in PT MRT Jakarta (Perseroda).*

3. Work Unit Administrator

- *Manage the e-Report of State Official Wealth applications in the Work Unit environment;*
- *Create a mandatory Report of State Official Wealth account;*
- *Make and update the list of Report of State Official Wealth Obligees;*
- *Prepare Report of State Official Wealth documents to be sent to the Corruption Eradication Commission;*
- *Carry out other tasks assigned by the Report of State Official Wealth Coordinator related to the Report of State Official Wealth for Executives in PT MRT Jakarta (Perseroda).*

Wajib Laporan dan Tingkat Kepatuhan LHKPN

Obligees and Compliance Level of the Report of State Officials Wealth

Di bawah ini disampaikan Daftar Wajib Laporan dan tingkat kepatuhan LHKPN tahun 2019:

The following is a list of Obligees and the compliance level of Report of State Officials Wealth in 2019:

DAFTAR WAJIB LAPOR LHKPN DI TAHUN 2019
List of Obligees of Report of State Official Wealth in 2019

| Wajib LHKPN <i>Obligees of LHKPN</i> | 2019 | | | 2018 | | |
|--|--|--|-------------|--|--|-------------|
| | Jumlah Wajib Lapor <i>Number of Obligees</i> | Jumlah yang Telah Melaporkan <i>Total Reports</i> | % | Jumlah Wajib Lapor <i>Number of Obligees</i> | Jumlah yang Telah Melaporkan <i>Total Reports</i> | % |
| Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i> | 5 | 5 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| Direksi <i>Directors</i> | 5 | 5 | 100% | 4 | 4 | 100% |
| Sekretaris Perusahaan <i>Company Secretary</i> | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Kepala Divisi dan Kepala Departemen <i>Division & Department Heads</i> | 83 | 83 | 100% | 39 | 39 | 100% |
| Jumlah Total | 94 | 94 | 100% | 48 | 48 | 100% |

Tabel 6.135
Table 6.135

SELURUH PEJABAT PERSEROAN YANG TERCATAT SEBAGAI WAJIB LAPOR LHKPN TELAH MENYELESAIKAN KEWAJIBANNYA, SEBAGAI BAGIAN DARI KOMITMEN PERSEROAN DALAM MENGUSUNG BUDAYA ANTI KORUPSI.

All Corporate Executives who are registered as Obligees of the Report of State Officials Wealth have completed their obligations, as part of the Corporation's commitment in implementing anti-corruption culture.

SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

WHISTLE-BLOWING SYSTEM

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran adalah sistem pencegahan dan identifikasi terhadap kecurangan atau tindakan penyimpangan atau pembiaran yang disengaja. Manajemen Perseroan memiliki komitmen yang kuat, bersikap independen, serta bebas intervensi dalam melaksanakan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran. Kecukupan dan efektivitas pelaksanaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran diawasi oleh Dewan Komisaris.

Agar kecurangan dapat terdeteksi lebih dini, Perseroan mewajibkan setiap insan Perseroan membuat pernyataan komitmen akan kesediaannya untuk melaksanakan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dan berpartisipasi aktif melaporkan pelanggaran. Kepada pemangku kepentingan eksternal, Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Perseroan disosialisasikan untuk memberikan pemahaman eksistensi dan mekanisme Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.

The Whistle-Blowing System is a prevention and identification system of frauds or violations or intentional omissions. The Corporation's management has a strong commitment, is independent and free from intervention in implementing the Whistle-Blowing System. The adequacy and effectiveness of the Whistle-Blowing System application are monitored by the Board of Commissioners.

In order for frauds to be detected earlier, the Corporation requires all employees to make a statement of commitment to carry out the Whistle-Blowing System and actively participate in reporting violations. For external stakeholders, the Whistle-Blowing System is socialized to provide understanding of the existence and mechanism of the Whistle-Blowing System.

Penetapan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

Establishment of Guidelines for the Whistle-Blowing System

Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Perseroan mengacu kepada Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK/002/BOC-MRT/V/2017 dan No. SK/042-2/BOD-MRT/V/2017 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.

Guidelines for the Whistle-Blowing System or WBS refer to the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. SK/002/BOC-MRT/V/2017 and No. SK/042-2/BOD-MRT/V/2017 concerning Guidelines for Whistle-Blowing System

Ruang Lingkup Pengaduan Pelanggaran Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran

Scope of Complaints of Violations Through the Whistle-Blowing System

Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui mekanisme Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Perseroan adalah:

1. Pelanggaran Etika
2. Pelanggaran Korupsi
3. Pelanggaran Kolusi
4. Pelanggaran Nepotisme
5. Kecurangan
6. Benturan Kepentingan
7. Pelanggaran Gratifikasi
8. Pelanggaran Norma, Ketentuan dan Peraturan Perseroan
9. Pelanggaran Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan
10. Pelanggaran lain-lain

Violations that can be reported through the Corporation's WBS mechanism are:

1. *Ethical Violations*
2. *Corruption Violations*
3. *Collusion Violations*
4. *Nepotism Violations*
5. *Frauds*
6. *Conflicts of Interest*
7. *Gratification Violations*
8. *Violations of Norms, Regulations and Corporate Rules*
9. *Violations of Laws and Regulations*
10. *Other violations*

Saluran Pengaduan

Complaint Channels

Informasi rinci tentang saluran pelaporan melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dapat diakses di <http://wbs.jakartamrt.co.id/wbs> melalui situs web Perseroan di <https://www.jakartamrt.co.id>.

Detailed information about the reporting channels through WBS can be accessed at <http://wbs.jakartamrt.co.id/wbs> through the Corporate website at <https://www.jakartamrt.co.id>.

Pihak Pengelola Pengaduan

Complaints Manager

Pengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Perseroan adalah:

1. *Divisi Corporate Secretary*
 - Mengelola penyelenggaraan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
 - Memeriksa laporan yang masuk pada sistem pelaporan dugaan pelanggaran setiap hari.
 - Melakukan validasi kesesuaian data/informasi pada laporan yang masuk pada sistem pelaporan dugaan pelanggaran.
 - Melaporkan hasil validasi data/informasi laporan kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
 - Menyimpan dokumen laporan yang tidak memenuhi syarat pelaporan.
 - Membuat laporan secara periodik, minimal 3 (tiga) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah Pelaporan dan kategori Pelaporan, serta menyampaikannya kepada Direktur Utama.
2. *Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran*
Tugas dan tanggung jawab Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran adalah:
 - Memutuskan hasil validasi data/informasi laporan. Apakah Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran telah memenuhi unsur 4W+1H atau belum untuk dapat dilanjutkan ke selanjutnya.
 - Melaporkan hasil validasi data/informasi laporan sistem

Administrators of the WBS in the Corporation are:

1. *The Corporate Secretary Division*
 - *Manage the implementation of the whistle-blowing system..*
 - *Check the reports that enter the whistle-blowing system every day.*
 - *Validate the suitability of data/information in the reports that enter the whistle-blowing system.*
 - *Report the results of data validation/report information to the Whistle-Blowing Management Committee.*
 - *Store report documents that do not meet reporting requirements.*
 - *Make reports periodically, at least once every 3 (three) months, including the number of Reports and Report categories, and submit them to the President Director.*
2. *Whistle-Blowing Management Committee*
The duties and responsibilities of the Whistle-Blowing Management Committee are:
 - *Decide on the results of data/information validation of the WBS report, whether it meets the 4W + 1H to be able to proceed to the next stage.*
 - *Report the results of data/information validation of the WBS report*

pelaporan dugaan pelanggaran kepada Direktur Utama (jika terlapor adalah selain Direksi) atau Komisaris Utama (jika terlapor adalah Direksi) untuk diputuskan, apakah laporan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau tidak.

- Membentuk Tim Penelitian Awal
- Mereviu laporan hasil Pemeriksaan Khusus yang dilakukan oleh Tim Penelitian Awal.
- Membuat laporan akhir pelaporan sistem pelaporan dugaan pelanggaran dan menyampaikannya kepada Direktur Utama/ Komisaris Utama.

to the President Director (if the reported is somebody other than the Directors) or the Chief Commissioner (if the reported is the Directors) to decide whether the report can proceed to the next stage.

- Establish the Investigation team
- Review the results of the Special Examination conducted by the Investigation team.
- Make a final report on WBS reporting and submit it to the President Director/Chief Commissioner.

Prosedur dan Mekanisme Penyampaian Pengaduan dan Penanganan Pengaduan *Procedures and Mechanism for Complaint Filing and Handling*

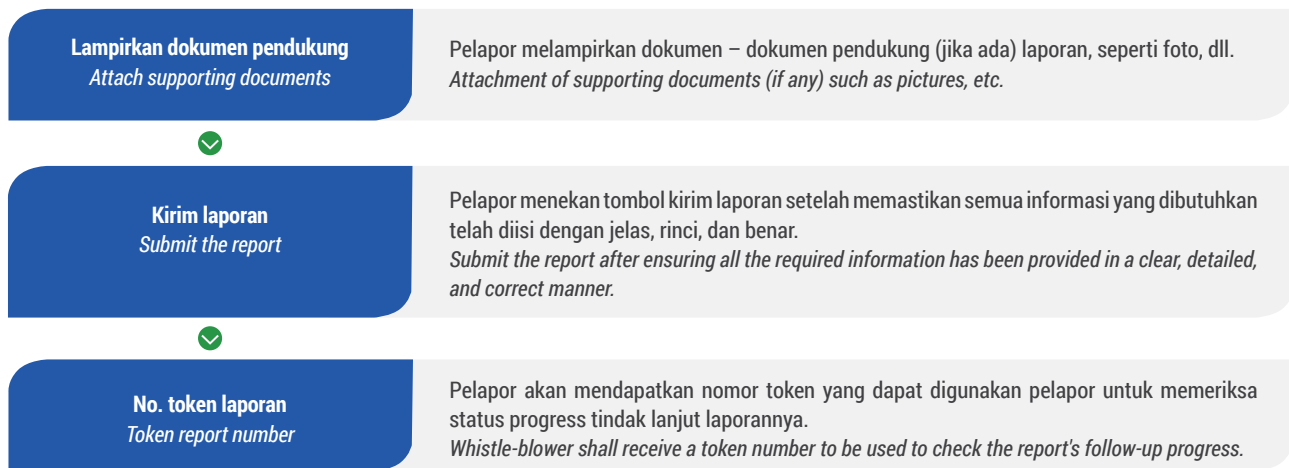
Unit pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran Perseroan berada di bawah Divisi *Corporate Secretary*. Setiap pelaporan pelanggaran yang diterima, Perseroan akan menginvestigasi lebih lanjut guna mendapat bukti agar dapat mengambil kesimpulan yang tepat sesuai dengan prosedur operasional standar.

The WBS management unit of the Corporation operates under the Corporate Secretary Division. Every whistle-blowing report received will be investigated further by the Corporation to obtain evidence used to draw the correct conclusions in accordance with the standard operational procedure.

Mekanisme penyaluran Pelaporan terjadinya dugaan Pelanggaran oleh pelapor dapat dilakukan melalui menu Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran yang terdapat dalam situs web Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

The whistle-blowing report submission may be done through the whistle-blowing reporting menu on the Corporate website with the following conditions:

| Pelapor <i>Whistle-blower</i> | Keterangan <i>Description</i> |
|---|--|
| <p>Mengakses Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran melalui website Perusahaan <i>Access the Whistle-Blowing System through the Corporate Website</i></p> | <p>Pelapor mengakses Whistleblowing System melalui website Perusahaan (www.jakartamrt.co.id) <i>Whistle-blower accesses the Whistle-Blowing System through the Corporate Website (jakartamrt.co.id)</i></p> |
| <p>Masukkan identitas diri (Nama/Email No. Telephone) <i>Input personal identity data (Name/Email/Phone Number)</i></p> | <p>Pelapor memasukkan informasi mengenai identitas diri, yang sekurang- kurangnya memuat nama/email/No. telepon. Pelaporan dapat dilakukan secara anonim, namun harus melampirkan dokumen pendukung laporan. <i>Whistle-blower provides personal identity information that at the very least contains the name/email/phone number. Reports can be submitted anonymously as long as they are accompanied by supporting documents.</i></p> |
| <p>Buat Laporan secara rinci dan jelas <i>Produce a detailed and clear Report</i></p> | <p>Pelapor memasukkan informasi kejadian yang diketahuinya, yang sekurang - kurangnya memenuhi unsur-unsur 4W+1H (<i>Apa, Di mana, Kapan, Siapa, Bagaimana</i>) <i>Submission of information containing 4W+1H (What, where, when, who, how).</i></p> |
| <p>Pilih kategori laporan <i>Select report category</i></p> | <p>Pelapor memilih kategori laporan yang sesuai dengan jenis dugaan pelanggaran yang dilaporkannya pada kolom kategori laporan. <i>Selection of report category based on the suspected violation in the reporting column category.</i></p> |
| <p>Mengisi kolom apakah bersedia untuk dihubungi <i>Fill in the contact authorization column</i></p> | <p>Pelapor mengisi kolom "apakah bersedia dihubungi", untuk keperluan konfirmasi dan tindak lanjut pelaporan. <i>Fill in the "willing to be contacted" column for confirmation and reporting follow up.</i></p> |

Figur 6.33
Figure 6.33

Proses Tindak Lanjut atas Pelaporan

Follow-Up Process for Reporting

Tindak lanjut atas Pelaporan dilakukan mulai dari diterimanya pengaduan tersebut, dengan proses sebagai berikut:

1. Setiap harinya, Petugas Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran memeriksa apakah terdapat laporan yang masuk pada sistem
2. Petugas melakukan validasi data/informasi dari Pelapor dan menganalisis laporan dugaan Pelanggaran yang masuk apakah memenuhi unsur 4W+1H (Apa, Dimana, Kapan, Siapa dan Bagaimana)
3. Petugas Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran melaporkan hasil validasi data/informasi laporan sistem pelaporan dugaan pelanggaran kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran, untuk kemudian memutuskan apakah laporan tersebut memenuhi unsur 4W+1H atau belum. Apabila laporan belum memenuhi unsur tersebut, Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran dapat melakukan klarifikasi kepada Pelapor.
4. Terhadap laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat, Petugas Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran menyimpan dokumen laporan dugaan pelanggaran tersebut.
5. Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran membuat laporan hasil validasi laporan sistem pelaporan dugaan pelanggaran dan menyampaikannya kepada Direktur Utama (jika terlapor adalah selain Direksi) atau kepada Komisaris Utama (jika terlapor adalah Direksi).
6. Berdasarkan laporan dari Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran, Direktur Utama/ Komisaris Utama memutuskan apakah laporan istem pelaporan dugaan pelanggaran dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya atau tidak dan menyampaikannya kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
7. Berdasarkan hasil keputusan Direktur Utama/ Komisaris Utama, Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran membentuk

Follow-up on Reporting begins from when the report is received, and the entire process follows the following procedure:

1. Every day, WBS officer checks for new reports in the WBS
2. WBS officer conducts data/information validation from Whistle-blower and analyze the incoming whistle-blowing report to see if it fulfills the 4W+1H (What, Where, When, Who, How) elements.
3. WBS officer reports the result of data/information validation on the WBS report to the Whistle-Blowing Management Committee to determine whether the report fulfills the 4W+1H elements. If the report has yet to fulfill the requirements, the Whistle-Blowing Management Committee may conduct clarification with the whistle-blower.
4. For whistle-blowing reports that have not fulfilled the requirements, WBS officer will keep the report documents.
5. The Whistle-Blowing Management Committee prepares a report on WBS validation results and submits the report to the President Director (if the reported is not among the Directors) or Chief Commissioner (if the reported is among the Directors).
6. Based on reports from the Whistle-Blowing Management Committee, the President Director/Chief Commissioner decides whether the WBS report can proceed to the next stage and submits it to the Whistle-Blowing Management Committee.
7. Based on the decision of the President Director/Chief Commissioner, the Whistle-Blowing Management Committee will form a Preliminary

Tim Penelitian Awal, yang terdiri dari Divisi *Internal Audit* untuk dilakukan Pemeriksaan Khusus.

8. Atas penugasan tersebut, Kepala Divisi *Internal Audit* membuat Surat Tugas Pemeriksaan Khusus.
9. Tim Penelitian Awal melakukan pemeriksaan khusus dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja atau lebih jika diperlukan. Dalam melakukan Pemeriksaan Khusus, Tim Penelitian Awal dapat dibantu oleh Konsultan, jika dibutuhkan.
10. Tim Penelitian Awal melaporkan hasil Pemeriksaan Khusus kepada Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
11. Berdasarkan hasil laporan pemeriksaan khusus dari Tim Penelitian Awal, Komite Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran membuat laporan akhir hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama/Komisaris Utama.
12. Berdasarkan laporan tersebut tersebut, Direktur Utama/Komisaris Utama memutuskan tindak lanjut:
 - a. Jika tidak terbukti, menutup laporan pelaporan dugaan pelanggaran.
 - b. Jika terbukti:
 - » Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan; dan/atau
 - » Meneruskan laporan tersebut kepada instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.
 - » Angka 1) dan 2) harus dilakukan melalui Rapat Direksi atau Rapat Dewan Komisaris.
13. Divisi *Corporate Secretary* membuat laporan secara periodik, minimal 3 (tiga) bulan sekali, antara lain meliputi jumlah Pelaporan dan kategori Pelaporan, serta menyampaikannya kepada Direktur Utama.
14. Komisaris Utama membuat laporan apabila ada anggota Direksi yang terbukti melakukan Pelanggaran dan dapat disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai bahan evaluasi kinerja Direksi.
15. Direktur Utama melaporkan penanganan Pelaporan yang ditindaklanjuti maupun tidak dapat ditindaklanjuti kepada Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) bulan sekali.

Investigation Team

8. *Upon the assignment, the Head of the Internal Audit Division produces a Special Investigation Assignment Letter.*
9. *The Preliminary Investigation Team conducts a special investigation within 14 (fourteen) working days or more if necessary. In conducting the Special Investigation, the Preliminary Investigation Team may be assisted by a Consultant if needed.*
10. *The Preliminary Investigation Team reports the results of the Special Investigation to the Whistle-Blowing Management Committee.*
11. *Based on the results of the special investigation report by the Preliminary Investigation Team, the Whistle-Blowing Management Committee reports the final results of the investigation to the President Director/Chief Commissioner.*
12. *Based on the report, the President Director/Chief Commissioner determines the follow-up actions:*
 - a. *If not proven, close the whistle-blowing report.*
 - b. *If proven:*
 - » *Provide sanctions in accordance with the provisions enforced in the Corporation; and/or*
 - » *Forward the report to the authorized agencies for further processing.*
 - » *Figures 1) and 2) must be done through a Directors' Meeting or Board of Commissioners' Meeting.*
13. *The Corporate Secretary Division prepares reports periodically, at least once every 3 (three) months, which cover the number of Reporting and Reporting categories, and submits them to the President Director.*
14. *The Chief Commissioner shall file reports if there are members of the Directors who have been proven to have violated Corporate regulations and can submit the reports to the Shareholders as a material for evaluating the performance of the Directors*
15. *The President Director reports on the handling of reports that have been/ are being processed and those that cannot be processed further to the Board of Commissioners at least once every 3 (three) months.*

Perlindungan bagi Pelapor *Protection for Whistle-Blowers*

Kebijakan Perlindungan Pelaporan yang dimiliki Perseroan mengatur secara tegas dan jelas bahwa Perseroan berkomitmen untuk melindungi pelaporan pelanggaran yang beritikad baik, patuh terhadap segala peraturan dan perundang-undangan, serta praktik terbaik yang berlaku dalam penyelenggaraan sistem pelaporan dugaan pelanggaran.

Kebijakan perlindungan terhadap Pelapor antara lain sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perseroan.
2. Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala

The Corporation's Whistle-Blower Protection Policy firmly and clearly stipulates that the Corporation is committed to protect well-intentioned whistle-blowers who comply with the statutory law and the best practices applied in the WBS implementation.

The Whistle-Blower Protection Policy includes:

1. *The Corporation guarantees the confidentiality of the whistle-blowers' identities*
2. *The Corporation guarantees protection for Whistle-blower from all forms*

bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.

3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan pemeriksaan maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

Setiap pelaporan pelanggaran diinvestigasi lebih lanjut untuk memperoleh bukti dalam rangka pengambilan kesimpulan yang tepat, yang diatur dengan prosedur operasional standar. Mekanisme pelaporan internal Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memastikan bahwa:

1. Semua pelanggaran yang telah dilaporkan dan diverifikasi telah tertangani dengan baik.
2. Pelanggaran yang berulang dan sistematis telah dilaporkan kepada pejabat terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.

Penghargaan dan Sanksi

Awards and Sanctions

Bentuk sanksi terhadap terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan juga memberikan sanksi bagi pelaporan pelanggaran yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan ini, misalnya fitnah atau pelaporan palsu.

Selain itu, penghargaan diberikan kepada Pelapor apabila kasus yang dilaporkan mengandung kebenaran dan Perseroan mendapat dampak positif dari adanya laporan tersebut. Jenis dan besarnya penghargaan yang diberikan diatur dengan kebijakan Direksi.

of threats, intimidation, or unpleasant actions from any party as long as the whistle-blowers maintain secrecy of the reported violations from any party.

3. *Protection for whistle-blowers also applies to parties who conduct investigation of provide information in relation to whistle-blowing reports.*

Each violation report is further investigated to obtain evidence in the context of making appropriate conclusions, which is governed by the standard operational procedures. The WBS internal reporting mechanism is designed to ensure that:

1. *All reported and verified violations have been handled properly.*
2. *Repeated and systematic violations have been reported to relevant personnel with the authorities to make improvements.*

The forms of sanctions imposed on the reported parties who have been proven to commit violations are regulated by the regulations and laws applicable in the Corporation, and sanctions are also imposed on reports that are not in accordance with the intents and purposes of the regulations, such as defamations or fake reports.

In addition, awards are given to Whistle-Blowers if the reported cases are proven to be true and the Corporation is positively impacted by the reports. The type and amount of awards are regulated by the Directors' policy.

Pelaporan Pelanggaran Tahun 2019 dan Tindak Lanjut

Violation Reporting in 2019 and the Follow-Up Actions

Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk selama tahun 2019 sebanyak 14 pengaduan pelanggaran. Berikut disampaikan jumlah pengaduan yang tidak ditindaklanjuti, serta jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti serta jenis sanksi yang diberikan.

There were 14 reports of violations submitted in 2019. The following is a list of reported violations that are not processed further, as well as the ones that were followed-up on and the sanctions imposed.

| Transparansi Pengaduan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran <i>Transparency of WBS Reports</i> | Total <i>Total</i> | Persentase % <i>Percentage %</i> |
|---|-----------------------|-------------------------------------|
| Pengaduan yang Masuk <i>Incoming Complaints</i> | | |
| Jumlah <i>Amount</i> | 14 | 100 |
| Pengaduan yang Selesai Tanpa Tindak Lanjut <i>Complaints Completed Without Follow-Up Actions</i> | | |
| Jumlah <i>Amount</i> | 13 | 92.86 |
| Pengaduan dengan Tindak Lanjut Sanksi <i>Complaints with Follow-Up Sanctions</i> | | |

| Transparansi Pengaduan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran <i>Transparency of WBS Reports</i> | Total <i>Total</i> | Persentase % <i>Percentage %</i> |
|--|-----------------------|-------------------------------------|
| Teguran <i>Reprimand</i> | 1 | 7.14 |
| Peringatan 1 <i>Warning 1</i> | - | - |
| Peringatan 2 <i>Warning 2</i> | - | - |
| Peringatan 3 <i>Warning 3</i> | - | - |
| Pengunduran Diri <i>Resignation</i> | - | - |
| Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) <i>Termination of Employment</i> | - | - |
| Jumlah <i>Amount</i> | | 100 |

Tabel 6.136
Table 6.136

Selama tahun 2019, dari 14 (empat belas) laporan dugaan pelanggaran yang masuk pada Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran, terdapat 1 (satu) laporan yang ditindaklanjuti. Laporan dugaan pelanggaran telah ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemeriksaan khusus oleh Divisi *Internal Audit* melalui Surat Tugas Direktur Utama No. ST-006/INT/BOD-MRT/ST/III/2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Divisi *Internal Audit*, manajemen memutuskan untuk memberikan Surat Teguran Tertulis kepada beberapa pihak yang terlibat.

Throughout 2019, of the 14 (fourteen) reports of violations submitted to the WBS, 1 (one) report was followed-up further. This particular report was followed-up with a special investigation by the Internal Audit Division as directed by the Letter of President Director No. ST-006/INT/BOD-MRT/ST/III/2019. Based on the investigation conducted by the Internal Audit Division, the management decided to issue a written Reprimand Letter to several involved parties.

Pemantauan dan Evaluasi *Monitoring and Evaluation*

Untuk menjamin efektivitas penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi sasaran yang telah ditetapkan pada awal penancangan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dan juga memastikan bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan tuntutan bisnis Perseroan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh Direksi melalui Divisi *Corporate Secretary*. pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan Sistem WBS maupun melakukan pemantauan atas rekomendasi penilaian dari penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Hasil pemantauan dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan kepada Direksi.

To ensure the effectiveness of the WBS application, monitoring and evaluation are required. These are done to achieve the targets set during the initial planning of the WBS and to ensure that the target achievements are in alignment with the business requirements of the Corporation and the enforced laws and regulations. Monitoring and evaluation may be conducted by the Directors through the Corporate Secretary Division. Monitoring and evaluation are carried out to provide recommendations for the improvements of the WBS, as well as to monitor the the GCG assessment recommendations. The results of the monitoring and evaluation are delivered in the form of reports to the Directors.

TRANSPARANSI PRAKTIK TATA KELOLA YANG TIDAK BAIK *TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES*

Laporan Atas Aktivitas Perseroan yang Mencemari Lingkungan *Report on Corporate Activities that Pollute the Environment*

Di tahun 2019, Perseroan tidak menemukan adanya laporan atas aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan.

In 2019, the Corporate did not receive any report on the activity that pollutes the environment.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Disclosure of Tax Obligation Fulfillment

Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya adalah kepatuhan terhadap peraturan terkait perpajakan. Per 31 Desember 2019, kontribusi pembayaran pajak Perseroan tercatat sebesar Rp40,43 miliar, meningkat 179,74% dibandingkan kontribusi pembayaran pajak tahun 2018 yang sebesar Rp14,45 miliar. Pajak tersebut terdiri dari PPh Pasal 21-26, PPh Pasal 23-26, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPN Keluaran. Adapun hingga akhir tahun 2019, Perseroan tidak pernah sekalipun menghadapi persoalan terkait pajak, yang berdampak terhadap kinerja keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan.

The Corporation is highly committed in complying with the applicable laws and regulations, including the laws concerning taxes. As of December 31, 2019, the tax expenditure contribution of the company was recorded at Rp40.43 billion, increasing by 179.94% from the tax expenditure contribution of 2018 that amounted to Rp14.45 billion. The taxes consist of PPh (Income Tax) article 21-26, PPh article 23-26, and PPh article 4 paragraph 2 and Output VAT. Up to the end of 2019, the Corporation never experienced issues regarding taxations that could have impacted the financial performance and business continuity of the Corporation.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Incompatibility of the Presentation of the Annual Reports and Financial Statements with the Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja. Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

All presentations of information in this Annual Report, particularly concerning financial performance and other matters, refer to the Financial Reports for years ended on December 31, 2019 and December 31, 2018 which have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja. The presentation and disclosure of the Corporation's financial statements are prepared and arranged in compliance with the Financial Accounting Standards in Indonesia, which is the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Cases Regarding Laborers and Employees

Sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak menemukan adanya kasus terkait dengan buruh ataupun karyawan.

In 2019, the Corporation did not find any cases related to laborers or employees.

Informasi tentang Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Information on Business Segment Disclosures in the Financial Statements

Informasi tentang pengungkapan segmen operasi pada laporan keuangan hingga akhir tahun 2019, Perseroan belum menerapkan segmen operasi pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.

For information on disclosures of business segments in the financial statements up to the end of 2019, the Corporation had yet to apply business segments on Financial Statements for years ending on December 31, 2019 and December 31, 2018 which have been audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Conformity of the Annual Report and Digital Annual Report

Laporan Tahunan digital Perseroan baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perseroan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

The digital Annual Report of the Corporation, referring to the one submitted to the shareholders and stakeholders, as well as the one uploaded on the official Corporate website, is in conformity with the Annual Report printed and issued by the Corporation.

PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

ASSESSMENT OF THE CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

Hasil Tata Kelola, merupakan keluaran dari implementasi Struktur dan Proses Tata Kelola, baik dari hasil kinerja maupun cara-cara/praktik-praktik yang digunakan untuk mencapai hasil kinerja tersebut. Untuk dapat mengetahui dan menggambaran kualitas hasil Tata Kelola, Perseroan memiliki mekanisme penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara periodik. Perseroan melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik melalui 2 (dua) model, yaitu:

1. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan Metode Penilaian BPKP Sebagai BUMD, Perseroan melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan menggunakan pihak independen terpercaya, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
2. Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh *The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)* Penilaian *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*

The result of Corporate Governance is the output of the implementations of Corporate Governance Structure and Process, including from the performance and the methods/practices applied to achieve the performance result. To find out and illustrate the quality of the Corporate Governance Results, the Corporation has a periodic assessment mechanism on the GCG application. The Corporation conducts assessments on GCG using two models:

1. *Assessment of GCG Implementation Based on the Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) Assessment Method. As an ROE, the Corporation evaluates the implementation of GCG with the assistance of a trusted independent party, namely the Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP) of DKI Jakarta Province representative office.*
2. *Assessment of GCG by The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG) Corporate Governance Perception Index (CGPI) evaluation conducted by The Indonesia Institute for Corporate Governance (IICG)*

PROSES PENGUSULAN HINGGA PENETAPAN DIREKSI PERSEROAN

Proposal Process Up To the Determination of the Corporation's Directors



PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
YANG BAIK OLEH BPKP
ASSESSMENT OF GCG APPLICATION BY THE INDONESIA'S
NATIONAL GOVERNMENT INTERNAL AUDITOR (BPKP)



THE INDONESIA INSTITUTE
FOR CORPORATE GOVERNANCE

PENILAIAN CORPORATE GOVERNANCE
PERCEPTION INDEX (CGPI)
ASSESSMENT OF CORPORATE GOVERNANCE
PERCEPTION INDEKS (CGPI)

PENILAIAN PENERAPAN GCG OLEH BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

ASSESSMENT OF GCG APPLICATION BY THE INDONESIA'S NATIONAL GOVERNMENT INTERNAL AUDITOR (BPKP)

Dasar Penilaian dan Metode

Basic Assessment and Methods

Setiap tahun, Perseroan melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup Perseroan. Penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan sejak tahun 2015. Penilaian dilakukan secara mandiri pada tahun 2015 dan 2016, menggunakan metode penilaian berdasarkan Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN. Sejak tahun 2017, penilaian dilakukan secara independen di mana Perseroan menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. Penilaian yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta menggunakan Indikator atau Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD yang dikembangkan oleh BPKP.

Every year, the Corporation conducts assessments on the application of GCG to find out the adequacy level of the GCG application within the Corporate scope. Assessments of GCG application have been conducted since 2015. Independent assessments were conducted in 2015 and 2016, using assessment methods as regulated by the Decree of the Secretary of the Ministry of SOE No. SK-16/S.MB./2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Evaluation and Evaluation Parameters for the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs. Since 2017, assessment has been conducted independently, in which the Corporation appoints the DKI Jakarta Province's representatives of the Indonesia's National Government Internal Auditor (BPKP). The assessments conducted by the agency use an assessment and monitoring indicators or parameters on GCG applications in ROEs developed by BPKP.

Indikator penilaian yang dikembangkan BPKP mencakup 4 (empat) aspek pengujian, dengan rincian sebagai berikut:

1. Komitmen
2. Kebijakan
3. Partisipan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
 - Pemegang Saham
 - Dewan Komisaris
 - Komite Dewan Komisaris
 - Direksi
 - Satuan Pengawasan Intern
 - Sekretaris Perusahaan
4. Pengungkapan Informasi

The assessment indicators developed by BPKP cover 4 (four) aspects of testing, with details as follows:

1. Commitment
2. Policy
3. GCG Participants
 - Shareholders
 - Board of Commissioners
 - Committees of the Board of Commissioners
 - Directors
 - Internal Audit Unit
 - Corporate Secretary
4. Information Disclosure

Penilaian dilakukan dengan penelusuran kelengkapan dokumen-dokumen serta wawancara penilai kepada beberapa pihak di internal Perseroan. Hasil penilaian menggunakan skor dengan angka maksimal 100 yang disesuaikan dengan poin-poin kriteria di atas, dengan komposisi sebagai berikut.

The assessment is carried out by tracking the completeness of the documents and appraisal interviews with several parties within the Corporation. The results of the assessment use a score with a maximum number of 100 adjusted to the criteria points above, with the following composition.

KOMPOSISI PARAMETER PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BERBASIS PENILAIAN OLEH BPKP

The Composition of GCG Implementation Parameters Based on Assessment by BPKP



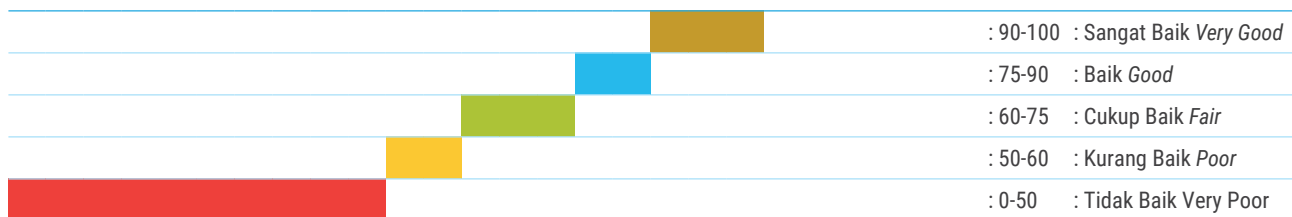
Grafik 6.3
Graphic 6.3

Skor yang didapatkan berada di rentang 0-100 dengan kualifikasi kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mulai dari "Tidak Baik" hingga "Sangat Baik".

The scores obtained are in the range of 0-100 with GCG Implementation Quality Qualifications ranging from "Very Poor to"Very Good".

KUALIFIKASI KUALITAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Qualification of the GCG Application Quality



Figur 6.34
Figure 6.34

Proses dan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019

Process and Results of GCG Implementation Assessment of Year 2019

Evaluasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik periode Tahun Buku 2019 dilakukan dengan metode penilaian yang disusun dan dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan DKI Jakarta No. ST-1071/ PW09/4.2/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan pada PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2019. Berdasarkan hasil penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 tersebut, Perseroan memperoleh skor sebesar 87,33 dengan predikat kualifikasi kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan "Baik", meningkat 2,19 poin dari skor penilaian tahun 2018 yang tercatat sebesar 85,14 dengan predikat kualifikasi kualitas penerapan Tata Kelola Perusahaan "Baik".

The evaluation of GCG application in the period of fiscal year 2019 was conducted using an assessment method that was prepared and developed by BPKP Representatives of the DKI Jakarta Province as stated in the Letter of Duty of the Head of BPKP DKI Jakarta Representatives No. ST-1071 / PW09 / 4.2 / 2019 dated November 28, 2019 concerning Assessment of GCG Implementation in PT MRT Jakarta (Perseroda) in 2019. Based on the results of the GCG application assessment of fiscal year 2019, the Corporation earned a score of 87.33 and a GCG application qualification of "Good", improving by 2.19 points from the assessment score in 2018 of 85.14 with a GCG application qualification of "Good".

| | |
|--|--|
| Jenis Penilaian Type of Assessment | Penilaian Assessment |
| Penilai Assessor | BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Surat Tugas Kepala BPKP Perwakilan DKI Jakarta No. ST-1071/PW09/4.2/2019 tanggal 28 November 2019 tentang Assessment Penerapan GCG pada PT MRT Jakarta (Perseroda) Tahun 2019 <i>DKI Jakarta Provincial BPKP in accordance with the Letter of Duty of the Head of BPKP DKI Jakarta Representative No. ST-1071 / PW09 / 4.2 / 2019 dated November 28, 2019 concerning Assessment of GCG Implementation in PT MRT Jakarta (Perseroda) 2019</i> |
| Periode Penerapan Application Period | 1 Januari-31 Desember 2019 <i>January 1 - December 31, 2019</i> |
| Tahun Ukur Measure Year | Tahun Buku 2019 <i>2019 Fiscal Year</i> |
| Waktu Pengukuran Time of Measurement | 12 Desember 2019–14 Februari 2020 <i>December 12 2019 - February 14, 2020</i> |
| Waktu Terbit Laporan Date of Report Publication | Maret 2020 <i>March 2020</i> |

Tabel 6.137
Table 6.137

Rincian hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan perbandingannya dengan pencapaian tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Details of the assessment results of the Corporation's GCG implementation in fiscal year 2019 and its comparison with the achievements in 2018 are as follows:

| Aspek Pengujian Assessment Aspect | Bobot Weight | Capaian Aktual Actual Achievement | Capaian Achievement (%) | Kualifikasi Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Qualification of GCG Implementation Quality | Capaian Tahun Buku 2018 Achievement of Fiscal Year 2018 |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--|--|
| Komitmen Commitment | 15,00 | 13,10 | 87,33 | "Baik" Good | 12,67 |
| Kebijakan Policy | 14,00 | 9,75 | 97,49 | "Sangat Baik" Very Good | 9,39 |

| Aspek Pengujian Assessment Aspect | Bobot Weight | Capaian Aktual Actual Achievement | Capaian Achievement (%) | Kualifikasi Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Qualification of GCG Implementation Quality | Capaian Tahun Buku 2018 Achievement of Fiscal Year 2018 |
|--|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---|--|
| Partisipan GCG GCG Participation | | | | | |
| Pemegang Saham Shareholders | 24,00 | 21,15 | 88,11 | "Baik" Good | 21,33 |
| Dewan Komisaris Board of Commissioners | 18,00 | 14,8 | 82,23 | "Baik" Good | 14,17 |
| Komite Dewan Komisaris Committees of Board of Commissioners | 5,00 | 3,99 | 79,73 | "Baik" Good | 4,23 |
| Direksi Directors | 14,00 | 11,92 | 85,14 | "Baik" Good | 11,04 |
| Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit | 5,00 | 4,16 | 83,22 | "Baik" Good | 4,12 |
| Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary | 4,00 | 3,75 | 93,88 | "Baik" Good | 3,64 |
| Pengungkapan Informasi Information Disclosure | 5,00 | 4,71 | 94,25 | "Sangat Baik" Very Good | 4,55 |
| Skor Keseluruhan Total Score | 100,00 | 87,33 | | "Baik" Good | 85,14 |

Keterangan: 0-50 : Tidak Baik | 50-60 : Kurang Baik | 60-75 : Cukup Baik | 75-90 : Baik | 90-100 : Sangat Baik
Information: 0-50: Very Poor | 50-60: Poor | 60-75: Fair | 75-90: Good | 90-100: Very Good

Tabel 6.138
Table 6.138

Rekomendasi atas penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dilakukan untuk tahun 2019, serta ada atau tidak adanya kesamaan dengan hasil penilaian untuk Tahun Buku 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Recommendations based on the GCG application assessment conducted in 2019, as well as the existence of similarities (or lack thereof) with the assessment result from the fiscal year 2018 can be observed below:

| Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019 | Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018 Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018 | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/Rencana Tindak Lanjut Follow-Up Actions That Have Been Done / Follow-Up Plans |
|---|---|---|
|---|---|---|

I Komitmen Commitment

1. Menyampaikan kepada seluruh karyawan untuk menandatangani Pernyataan Kepatuhan Terhadap Pedoman Perilaku dan melakukan monitoring atas

x

Rencana Tindak Lanjut: Meminta kepada seluruh karyawan untuk menandatangani Pernyataan Kepatuhan Terhadap Pedoman Perilaku setiap tahun, termasuk

| <p>Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 <i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i></p> | <p>Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018 <i>Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018</i></p> | <p>Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/Rencana Tindak Lanjut <i>Follow-Up Actions That Have Been Done / Follow-Up Plans</i></p> |
|---|--|---|
| <p>pelaksanaannya <i>Communicating to all employees to sign a Statement of Compliance with the Code of Conduct and monitor its implementations.</i></p> | | <p>kepada karyawan yang baru bergabung, serta melakukan monitoring atas pelaksanaannya <i>Follow-up Plan: Asking all employees to sign a the Statement of Compliance with the Code of Conduct every year, including new employees, and monitor its implementation</i></p> |
| <p>2. Meningkatkan pemahaman terkait Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh seluruh karyawan <i>Improve employee understanding of GCG Guidelines.</i></p> | x | <p>Rencana Tindak Lanjut: Melakukan sosialisasi pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara berkala kepada seluruh insan Perseroan <i>Follow Up Plan: Socializing GCG Guidelines to all Corporate Personnel regularly.</i></p> |
| <p>3. Kontrak Kinerja Perseroan juga ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham minoritas <i>The Corporate Performance Contract to be signed by the Board of Commissioners and minority shareholders as well</i></p> | x | <p>Kontrak Kinerja Perseroan juga ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham minoritas <i>Corporate Performance Contract to be signed by the Board of Commissioners and minority shareholders as well</i></p> |
| <p>4. Menyampaikan Laporan Realisasi KPI dan Laporan Realisasi RKAP kepada Pemegang Saham, baik Pemegang Saham mayoritas maupun minoritas <i>Submit KPI Realization Report and the Corporate Budget Plan Realization Report to Shareholders, both majority and minority</i></p> | √ | <p>Laporan realisasi RKAP disampaikan setiap bulan kepada Pemegang Saham mayoritas dan kedepannya akan disampaikan juga kepada pemegang saham minoritas <i>The Corporate Budget Plan realization report is currently submitted monthly to the majority shareholders, and in the future will be submitted to minority shareholders as well</i></p> |
| <p>II Kebijakan Policies</p> | | |
| <p>1. Melakukan pemutakhiran dan mengesahkan <i>Board Manual</i> <i>Update and authorize the Board Manual</i></p> | √ | <p>Pembaruan <i>Board Manual</i> sedang dalam proses dan ditargetkan selesai pada Triwulan II Tahun 2020 <i>The Board Manual Renewal process is currently ongoing, and the the completion target is set in the second Quarter of 2020</i></p> |
| <p>III Partisipan Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG Participants</p> | | |
| <p>Pemegang Saham Shareholders</p> | | |
| <p>1. Pemegang Saham Minoritas berperan aktif terkait haknya untuk memperoleh informasi material mengenai keadaan Perseroan secara tepat waktu dan teratur <i>Minority Shareholders play an active role in their rights to obtain material information about the Corporation's situation in a timely and orderly mannersituation in a timely and orderly manner</i></p> | √ | <p>Perseroan senantiasa memberikan perlakuan yang sama kepada semua Pemegang Saham termasuk dalam hal perolehan informasi Perseroan <i>The Corporation always gives the same treatment to all Shareholders including in terms of Corporate information disclosure and delivery</i></p> |
| <p>2. Menetapkan mekanisme/sistem penilaian kinerja Direksi secara individu dan melaksanakan penilaiannya <i>Determine the mechanism/system of individual</i></p> | √ | <p>Sistem penilaian kinerja Direksi sepenuhnya menjadi hak Pemegang Saham. Setiap tahunnya Direksi menandatangani Kontrak Kinerja dengan Pemegang Saham <i>Directors' performance appraisal system is fully the rights</i></p> |

| Hasil Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019 <i>Results of the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2019</i> | Terdapat Dalam Rekomendasi Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018 <i>Found in the GCG Implementation Assessment Recommendations for Fiscal Year 2018</i> | Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan/Rencana Tindak Lanjut <i>Follow-Up Actions That Have Been Done / Follow-Up Plans</i> |
|--|--|---|
| <p><i>performance appraisals of the Directors and carry out their assessments</i></p> | | <p><i>of the Shareholders. Every year the Directors sign a Performance Contract with the Shareholders</i></p> |
| <p>Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Audit Unit</i></p> | | |
| <p>1. Menginstruksikan kepada Kepala Divisi <i>Internal Audit</i> untuk menyempurnakan <i>Internal Audit Manual</i> dengan menambahkan muatan antara lain ketentuan pemantauan tindak lanjut hasil audit, sistematika pelaporan (Laporan Hasil Pemeriksaan) <i>Instruct the Head of the Internal Audit Division to improve the Internal Audit Manual by adding content on follow-up monitoring requirements of audit results and reporting system (Assessment Result Report)</i></p> | <p>x</p> | <p>Divisi <i>Internal Audit</i> melakukan pemutakhiran atas Pedoman Audit yang antara lain memuat ketentuan pemantauan tindak lanjut hasil audit dan sistematika pelaporan <i>The Internal Audit Division updates the Audit guidelines which, among others, contain the follow-up monitoring requirements of audit results and reporting system</i></p> |
| <p>2. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern dan ekstern <i>Perform follow-up monitoring of internal and external assessment results</i></p> | <p>x</p> | <p>Divisi <i>Internal Audit</i> melakukan <i>monitoring</i> tindak lanjut rekomendasi hasil audit eksternal dan internal secara berkala dan mendokumentasikannya <i>The Internal Audit Division periodically monitors and documents the follow-up recommendations of external and internal audit results</i></p> |
| <p>3. Menginstruksikan kepada Kepala Divisi <i>Internal Audit</i> untuk mendokumentasikan pemberian masukan upaya pencapaian strategi bisnis Perseroan <i>To instruct the Head of Internal Audit Division to document the input on the efforts to achieve the Corporate business strategies</i></p> | <p>x</p> | <p>Divisi <i>Internal Audit</i> mendokumentasikan masukannya tentang upaya pencapaian strategi bisnis Perseroan <i>The Internal Audit Division documents its input on the efforts to achieve the Corporate business strategies</i></p> |
| <p>Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i></p> | | |
| <p>1. Kepala Divisi <i>Corporate Secretary</i> untuk melaporkan pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan dugaan pelanggaran kepada Direktur Utama sesuai Pedoman yang ditetapkan <i>Head of the Corporate Secretary Division to report on the implementation of the Whistle-Blowing System policies to the President director in accordance to the established guideline</i></p> | | <p>Laporan tentang pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan dugaan pelanggaran telah dibuat di tahun 2019 <i>The report on the implementation of the Whistle-Blowing System policies was made in 2019</i></p> |
| <p>2. Memberikan informasi yang materiel dan relevan kepada pemangku kepentingan <i>Provide material and relevant information to stakeholders</i></p> | | <p>Sekretaris Perusahaan untuk memberikan informasi yang materiel dan relevan kepada pemangku kepentingan <i>The Corporate Secretary provides material and relevant information to stakeholders</i></p> |
| <p>IV Pengungkapan Informasi <i>Information Disclosure</i></p> | | |

√ = Terdapat dalam rekomendasi assessment penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018

x = Tidak terdapat dalam rekomendasi assessment penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2018

√ = Available in the assessment recommendations for implementing GCG for fiscal year 2018

x = Not included in the assessment recommendations for implementing GCG fiscal year 2018

Tabel 6.139

Table 6.139

Penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang dilakukan oleh BPKP dilakukan secara menyeluruh, dan menjadi alat bagi Perseroan untuk melakukan perbaikan berkesinambungan. Evaluasi dan perbaikan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi penerapan tata kelola perusahaan yang baik Perseroan di masa mendatang.

The GCG implementation assessment carried out by BPKP is carried out comprehensively, and is a tool to conduct sustainable improvements. This Corporate evaluation and improvements can hopefully bring positive impacts on the application of GCG in the Corporation in the future.

Perkembangan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik MRT Jakarta

Development of Assessment on the Implementation of GCG in MRT Jakarta

Sejak dilakukan penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada tahun 2015 tercatat perkembangan hasil atau skor penilaian tata kelola perusahaan yang baik selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai rekomendasi yang muncul. Penilaian juga dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/ penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil penilaian menjadi masukan yang sangat penting bagi Perseroan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

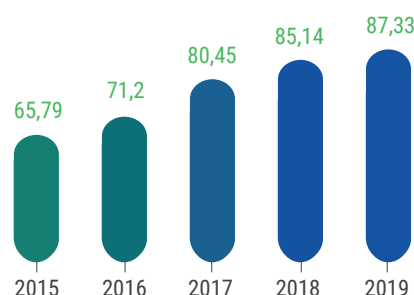
Since the assessment of GCG began to be implemented in 2015, the results or scores of the GCG assessment have continuously shown improvements. This reflects the Corporation's commitment in applying GCG principles in accordance with the provided recommendations. The assessment is also linked with the applicable policies and best practices in applying GCG, hence areas in need of improvements can be identified. Assessment results become an important input for the Corporation in future decision-making.

| Tahun Ukur Penilaian* Measurement Year* | Skor Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik GCG Assessment Score | Kategori Category | Jenis Penilaian dan Pelaksanaan Type of Assessment & Implementation |
|--|--|----------------------|--|
| 2019 | 87,33 | "Baik" Good | Penilaian; BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Assesment: BPKP DKI Jakarta Province Representative |
| 2018 | 85,14 | "Baik" Good | Penilaian; BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Assesment: BPKP DKI Jakarta Province Representative |
| 2017 | 80,45 | "Baik" Good | Penilaian; BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Assesment: BPKP DKI Jakarta Province Representative |
| 2016 | 71,20 | "Baik" Good | Penilaian Mandiri; Tim Internal MRT Jakarta Self Assesment: Internal Team of MRT Jakarta |
| 2015 | 65,79 | "Cukup Baik" Fair | Penilaian Mandiri; Tim Internal MRT Jakarta Self Assesment: Internal Team of MRT Jakarta |

*) Sejak tahun 2017 penilaian tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan menggunakan parameter yang disusun oleh BPKP. Hal ini berbeda dengan tahun 2015 dan 2016, dimana parameter yang digunakan adalah Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.

*) Since 2017 the GCG assessment has been carried out using parameters compiled by BPKP. This is different from 2015 and 2016, during which the parameter used is the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-16 / S.MBU / 2012.

Tabel 6.140. Pencapaian Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Sejak Tahun 2015
Table 6.140. Achievements of the GCG Implementation Assessment Results since 2015



Grafik 6.4. Perkembangan Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 2015-2019
Graphic 6.4. The Development of GCG Implementation Assessment Results 2015-2019

Sebagai bagian dari pemantauan pada setiap aspeknya, berikut disampaikan perkembangan hasil penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik per aspek sesuai dengan metode penilaian oleh BPKP yang mulai dilakukan Perseroan sejak tahun 2017.

As part of each aspect's monitoring, the following is the development of the GCG implementation assessment results of each aspect in accordance with the assessment method set by BPKP that has been applied by the Corporation since 2017.

PENCAPAIAN HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PER ASPEK DENGAN METODE PENILAIAN OLEH BPKP

Achievement of Assessment Results on GCG Implementation by Aspect Using the Assessment Method by BPKP

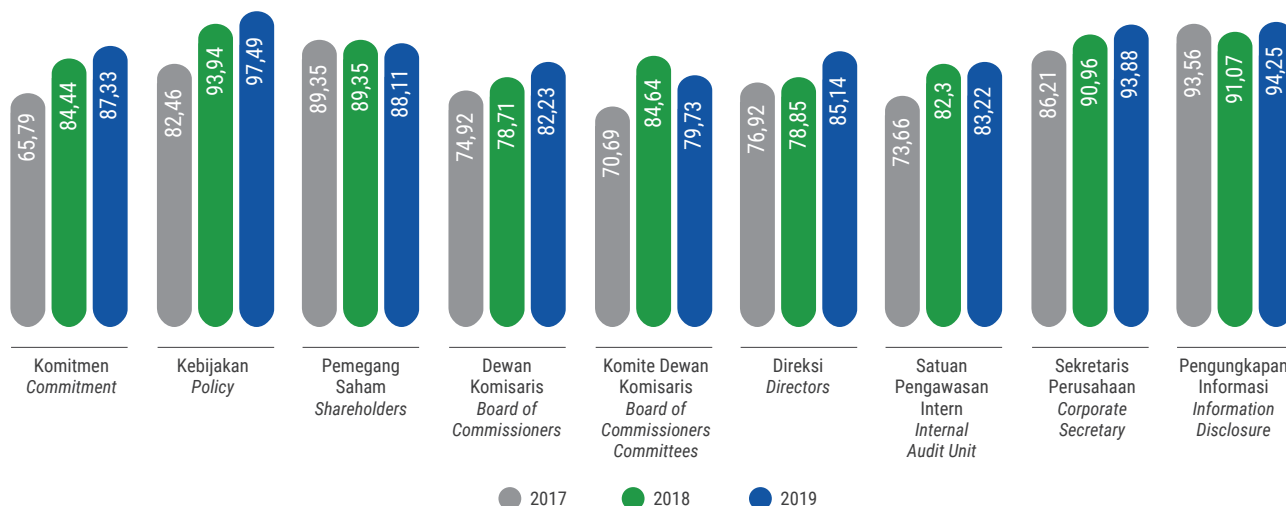
| Tahun <i>Year</i> | Komitmen <i>Commitment</i> | Kebijakan <i>Policy</i> | Pemegang Saham <i>Shareholders</i> | Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i> | Komite Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Committees</i> | Direksi <i>Directors</i> | Satuan Pengawasan Intern <i>Internal Audit Unit</i> | Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i> | Pengungkapan Informasi <i>Information Disclosure</i> | Skor Akhir <i>Final Score</i> | Kategori <i>Category</i> |
|----------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------|
| 2019 | 87,33 | 97,49 | 88,11 | 82,23 | 79,73 | 85,14 | 83,22 | 93,88 | 94,25 | 87,33 | "Baik" <i>Good</i> |
| 2018 | 84,44 | 93,94 | 88,89 | 78,71 | 84,64 | 78,85 | 82,3 | 90,96 | 91,07 | 85,14 | "Baik" <i>Good</i> |
| 2017 | 74,4 | 82,46 | 89,35 | 74,92 | 70,69 | 76,92 | 73,66 | 86,21 | 93,56 | 80,45 | "Baik" <i>Good</i> |

Keterangan: Tahun 2015 dan 2016 tidak diikutsertakan karena menggunakan metode penilaian yang berbeda
Note: 2015 and 2016 were not included because they used different assessment methods

Tabel 6.141
Table 6.141

PENCAPAIAN HASIL ASSESSMENT PENERAPAN GCG PER ASPEK 2017-2019

Achievement of GCG Implementation Assessment Results per Aspect 2017 - 2019



Grafik 6.5
Graphic 6.5

Berdasarkan hasil penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2019, terjadi penurunan di aspek Pemegang Saham sebesar 0,78 dari 88,89 di tahun 2018 menjadi 88,11 di tahun 2019. Penurunan disebabkan karena belum semua laporan manajemen di sampaikan kepada Pemegang Saham minoritas. Selain pada aspek Pemegang Saham, aspek Komite

Based on the results of the GCG assessment in 2019, there was a decrease in the Shareholders aspect by 0.78 from 88.89 in 2018 to 88.11 in 2019. The decline was caused by the fact that not all management reports have been submitted to the minority Shareholders. In addition, the Shareholders aspect and the Board of Commissioners Committees aspect

Dewan Komisaris juga mengalami penurunan sebesar 4,91 dari 84,64 di Tahun 2018 menjadi 79,73 di Tahun 2019. Penurunan disebabkan karena belum dilakukan pemutakhiran atas Piagam Komite Dewan Komisaris.

also decreased by 4.91 from 84.64 in 2018 to 79.73 in 2019. The decline was due to a delay in the updates on the Board of Commissioners' Committee Charter.

PENILAIAN INDEX PERSEPSI TATA KELOLA CORPORATE GOVERNANCE PERCEPTION INDEX ASSESSMENT (CGPI)

Perseroan berupaya meningkatkan level untuk penerapan tata kelolanya. Di tahun 2019, Perseroan berperan serta dalam pemeringkatan *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG)* untuk Tahun Buku 2018. Riset dan pemeringkatan yang dilakukan IICG setiap tahunnya akan melihat implementasi tata kelola perusahaan dari perspektif yang berbeda dengan menggunakan kerangka Struktur Governansi, Proses Governansi dan Hasil Governansi.

The Corporation is making efforts to increase its level of GCG implementation. In 2019, the Corporation participated in the Corporate Governance Perception Index (CGPI) ranking organized by The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG) for Fiscal Year 2018. The research and ranking conducted by the IICG every year will show the implementation of Corporate governance from different perspectives using the framework of Governance Structure, Governance Process, and Governance Results.

Hasil penilaian CGPI berupa rentang skor yang dicapai oleh peserta dengan kategorisasi atas tingkat kualitas implementasi tata kelola perusahaan yang baik dengan menggunakan istilah "Terpercaya".

CGPI assessments results are in the form of score ranges achieved by participants with categorizations in GCG implementation quality levels using the term "Trusted".

ASPEK PENILAIAN CGPI CGPI Assessment Aspects



55,00-69,99% = Cukup Terpercaya *Fairly Trusted* | 70,00-84,99% = Terpercaya *Trusted* | 85,00-100% = Sangat Terpercaya *Very Trusted*

Figur 6.35
Figure 6.35

Hasil Penilaian CGPI Tahun 2019 dan Rekomendasi serta Tindak Lanjutnya CGPI Assessment Results in 2019 and the Recommendations and Follow-Up Actions

Penilaian CGPI tahun 2019 dilakukan pada September - Desember 2019, dengan rincian hasil penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

The 2019 CGPI assessment was conducted in September - December 2019 with details of the assessment results described in the following table:

| Aspek dan Indikator Aspect and Indicator | Bobot Weight | Nilai Perseroan Company Value |
|--|-----------------|--|
| Aspek Struktur Tata Kelola <i>Governance Structure</i> | 32,72 | 28,02 |
| Aspek Proses Tata Kelola <i>Governance Process</i> | 33,64 | 26,03 |
| Aspek Hasil Tata Kelola <i>Governance Result</i> | 33,64 | 26,42 |
| Nilai Akhir <i>Final Score</i> | 100 | 80,47 (Terpercaya) <i>(Trusted)</i> |

Tabel 6.142
Table 6.142

Hasil penilaian CGPI tahun 2019 menunjukkan perolehan skor 80,47 dari skala 100 dengan kategori "Terpercaya". Terdapat beberapa rekomendasi dari IICG terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup Perseroan. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di lingkup Perseroan.

The results of the 2019 CGPI assessment indicated a score of 80.47 out of 100, thus categorizing the Corporation as "Trusted". There were several recommendation from the IICG with regards to GCG implementation within the Corporate scope. The recommendations are materials for improvements that need to be followed-up with regards to the GCG application within the Corporate scope.

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT CGPI TAHUN 2019

CGPI Recommendations and Follow-Up Actions in 2019

Rekomendasi Recommendation

Aspek Struktur Tata Kelola *Governance Structure Aspect*

Perseroan perlu mempertimbangkan dan merespons isu keberagaman *gender* dalam komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The Corporation needs to consider and respond to the issue of gender diversity in the composition of the Board of Commissioners and Directors.

Perseroan perlu mempertimbangkan keseimbangan komposisi anggota Dewan Komisaris dengan Komisaris Independen.

The Corporation needs to consider the balance in the composition of the members of the Board of Commissioners with the Independent Commissioners.

Perseroan perlu menetapkan Komisaris Independen sebagai ketua Komite Audit.

The Corporation needs to appoint an Independent Commissioner as chairman of the Audit Committee.

Perseroan perlu menetapkan pembagian tugas Dewan Komisaris berdasarkan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat pada pembagian tugas Direksi sesuai kebutuhan secara efektif.

The Corporation needs to effectively determine the division of duties within the Board of Commissioners based on the supervisory and advisory functions on the division of duties of the Directors according to the needs.

Perseroan perlu mempertimbangkan adanya pembatasan jumlah rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris untuk mengoptimalkan tugas pengawasan Dewan Komisaris.

The Corporation needs to consider limiting the number of concurrent positions held by members of the Board of Commissioners to optimize the supervisory duties of the Board of Commissioners.

Perseroan perlu mengembangkan kebijakan suksesi anggota Direksi untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan di Perseroan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan usaha dan tujuan jangka panjang Perseroan.

The Corporation needs to develop a succession policy for members of the Directors to maintain the continuity of the regeneration and leadership regeneration processes in the Corporation in order to maintain business continuity and long term Corporate goals.

Perseroan perlu menetapkan rancangan struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan dan memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi.

The Corporation needs to determine the design of the organizational structure tailored to the needs of the Corporation and fill the vacant functional structure formations, which is the responsibility of the Directors.

Aspek Proses Tata Kelola *Governance Process Aspect*

Perseroan perlu mengembangkan dan memutakhirkan pedoman pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris, khususnya terkait hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The Corporation needs to develop and update guidelines for the implementation of the duties of the Directors and the Board of Commissioners, especially in relation to the resignation of members of the Board of Commissioners and Directors.

Perseroan perlu mengembangkan mekanisme pendidikan dan pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala dan berkelanjutan.

The Corporation needs to develop an education and training mechanism for the Board of Commissioners and Directors on a regularly and continuously.

Perseroan perlu mengembangkan sistem dan mekanisme pemantapan budaya Perseroan serta evaluasi pengukuran implementasi budaya Perseroan.

The Corporation needs to develop systems and mechanisms to strengthen the Corporate culture and evaluate the Corporate culture implementation measurement.

Rekomendasi
Recommendation

Perseroan perlu mengembangkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang intensif dan jelas antara anggota Komite Audit dan Audit Intern/SPI dengan Auditor Eksternal/KAP yang telah dipilih oleh RUPS dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, sehingga keluaran hasil audit bisa digunakan untuk optimalisasi program pengawasan oleh organ Perseroan.

The Corporation needs to develop an intensive and clear communication and coordination mechanisms between members of the Audit Committee and Internal Audit/SPI and the External Auditors/KAP selected by the GMS in implementing the supervisory function, so that the output of audit results can be used to optimize the supervisory programs by Corporate organs.

Perseroan perlu memperkuat dan mengoptimalkan efektivitas sistem manajemen risiko sehubungan dengan peningkatan risiko dari semakin luasnya kegiatan operasional Perseroan.

The Corporation needs to strengthen and optimize the effectiveness of the risk management system in relation to the increase in risks caused by the increasingly broad scope of the Corporation's operational activities.

Perseroan perlu mengembangkan standarisasi terhadap produk/jasa dan sistem manajemen/kerja berdasarkan standarisasi nasional (seperti SNI) dan global (seperti ISO).

The Corporation needs to develop standardization of products/services and management/work systems based on national (such as SNI) and global (such as ISO) standards.

Perseroan perlu mengembangkan kebijakan, pedoman dan sistem penerapan Tanggung Jawab Sosial Perseroan secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah untuk Perseroan.

The Corporation needs to develop policies, guidelines and systems for implementing corporate social responsibility in a sustainable manner and providing added values to the Corporation.

Perseroan perlu mengembangkan mekanisme penciptaan inovasi yang bernilai tambah di semua bidang (inovasi produk, inovasi proses bisnis, inovasi organisasi, dll) oleh seluruh anggota Perseroan.

The Corporation needs to develop a mechanism for creating value-added innovations in all fields (product innovation, business process innovation, organizational innovation, etc.) by all Corporate personnel.

Perseroan perlu memperkuat dan mengoptimalkan sistem dan mekanisme pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia Perseroan yang dapat mendukung strategi dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

The Corporation needs to strengthen and optimize the systems and mechanisms for the management and development of the Corporation's human resources that can support the Corporations's business strategy and growth.

Perseroan perlu menjalankan *master plan* teknologi informasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan peta jalan (*roadmap*), serta menjalankan program perbaikan yang dicanangkan dari tingkat maturitas yang ditetapkan sehingga mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan.

The Corporation needs to run an information technology master plan that has been determined in accordance with the road map, as well as running an improvement program that is planned based on the determined maturity level to support the Corporation's business growth.

Aspek Hasil Tata Kelola Governance Results Aspect

Perseroan perlu memastikan hasil-hasil yang dicapai merupakan dampak dari proses bisnis yang telah melalui proses penjaminan mutu yang intensif dan mengutamakan tercapainya tujuan Perseroan sehingga tingkat transparansi, responsibilitas, dan keadilan dapat diwujudkan oleh korporasi.

The Corporation needs to ensure that the results achieved are the impacts of business processes that have gone through an intensive quality assurance process and prioritize the achievements of Corporate goals so that the level of transparency, responsibility and fairness can be realized by the Corporation.

Perseroan perlu memberikan dividen secara proporsional dan konsisten bagi seluruh Pemegang Saham.

The Corporation needs to provide proportional and consistent dividends for all Shareholders.

Dari tren kinerja keuangan Perseroan selama beberapa tahun terakhir didapati mengalami pergerakan yang dinamis, sehingga Perseroan harus terus meningkatkan pertumbuhan kinerja dengan selalu menjaga prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang terstruktur dan sistematis.

Based on the trends in the financial performance of the Corporation over the past few years it appears that the Corporation has been experiencing dynamic movements, hence the Corporation must continue to improve its performance growth by always maintaining the precautionary principles and implementing structured and systematic.

Perseroan perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis yang mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan yang sehat dan berkelanjutan.

The Corporation needs to improve business effectiveness and efficiency that support healthy and sustainable company business growth.

Tabel 6.143
Table 6.143

Tindak lanjut akan disampaikan Perseroan pada tahun berikutnya setelah penilaian berakhir karena penilaian CGPI 2018 yang dilakukan pada tahun 2019 merupakan yang pertama kali bagi Perseroan. Adapun rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh IICG adalah sebagai berikut:

Rekomendasi Tindak Lanjut

Program Riset dan Pemingkatan CGPI 2018 merekomendasikan beberapa tindak lanjut bagi Perseroan antara lain:

1. Rekomendasi Konseptual

Perseroan diharapkan mampu mengembangkan konsep penguatan wadah bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik melalui perencanaan bisnis Perseroan yang menghasilkan skenario bisnis sesuai tuntutan keberhasilan di dunia industri dan bisnisnya melalui penetapan sasaran strategis yang komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan, program, dan kegiatan strategisnya.

2. Rekomendasi Teknikal

- Perseroan diharapkan mampu merancang program penguatan wadah bisnis yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat bagi wadah bisnis dilengkapi dengan tahapan peta jalannya.
- Perseroan diharapkan mampu melaksanakan secara disiplin program penguatan wadah bisnis yang telah dirancang dan mengukur tingkat keberhasilannya.

The follow-up actions will be delivered by the Corporation in the next year after the assessment is completed because the CGPI 2018 assessment conducted in 2019 was the first time for the Corporation. As for the follow-up recommendations given by the IICG are as follows:

Follow-up Recommendations

The 2018 CGPI Research and Ranking Program recommends several follow-up actions for the Corporation, including:

1. Conceptual Recommendations

The Corporation is expected to be able to develop a business platform strengthening concept based on GCG principles through Corporate business planning that results in business scenarios tailored to the success requirements in the industry and its business, which is carried out through determination of comprehensive strategic targets that are integrated with the related policies, program, and activities.

2. Technical Recommendations

- *The Corporation is expected to be able to design a sustainable business platform strengthening program that considers the driving and inhibiting factors of the business platform, as well as determining its road map.*
- *The Corporation is expected to be able to carry out disciplined business platform strengthening programs that have been designed as well as measuring their levels of success.*

Perkembangan Nilai CGPI

Development of CGPI Score

Berikut nilai CGPI yang diperoleh Perseroan di tahun 2019.

The following is the CGPI score achieved by the Corporation in 2019.

| Tahun Year | Hasil Penilaian Scoring Result | | | | |
|---------------|--|--|---|----------------------------|-----------------------|
| | Aspek Struktur Tata Kelola Aspect of Governance Structure | Aspek Proses Tata Kelola Aspect of Governance Process | Aspek Hasil Tata Kelola Aspect of Governance Results | Nilai Akhir Final Score | Kategori Category |
| 2019 | 28,02 | 26,03 | 26,42 | 80,47 | Terpercaya Trusted |

Tabel 6.144
Table 6.144

Kepatuhan Atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan

Compliance with The Good Corporate Governance Guidelines

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, Perseroan tunduk dan patuh terhadap Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pergub tersebut menjadi salah satu dasar penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

As a DKI Jakarta Regionally-owned Enterprise, the Corporation operates in compliance with the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation No.96 of 2004 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Practices in Regionally-owned Enterprises (ROE) within the Government of the Special Capital Region of Jakarta. The Governor Regulation became one of the foundations for the implementation of GCG principles.

PERKARA PENTING

IMPORTANT MATTERS

PERMASALAHAN HUKUM

LEGAL ISSUES

Permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan di tahun 2019 dibanding tahun 2018 adalah sebagai berikut.

The legal issues faced by the Corporation in 2019 compared to 2018 are as follows.

| Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i> | 2019 | | 2018 | |
|--|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Perdata <i>Civil</i> | Pidana <i>Criminal</i> | Perdata <i>Civil</i> | Pidana <i>Criminal</i> |
| Perseroan <i>Corporation</i> | - | - | - | - |
| Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has permanent legal force</i> | - | - | - | - |
| Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i> | 1 | - | - | - |
| Jumlah <i>Amount</i> | 1 | - | - | - |
| Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Directors</i> | - | - | - | - |
| Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap <i>Completed and has permanent legal force</i> | - | - | - | - |
| Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i> | - | - | - | - |
| Jumlah <i>Amount</i> | - | - | - | - |
| Informasi tentang Entitas Anak <i>Information about Subsidiaries</i> | | | | |
| Hingga akhir tahun 2019 Perseroan tidak memiliki entitas anak <i>By the end of 2019 the Corporation had no Subsidiaries</i> | | | | |
| Jumlah Keseluruhan <i>Total Amount</i> | 1 | - | - | - |

Tabel 6.145
Table 6.145

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perseroan di tahun 2019 dan/atau telah dinyatakan selesai di tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Details of the legal issues faced by the Corporation in 2019 and/or are considered "Completed" in 2019 are as follows.

Perkara #01: Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atas Ganti Rugi Tanah di Lebak Bulus
Case # 01: Civil Lawsuit Against the Law in the South Jakarta District Court for Land Compensation in Lebak Bulus

Pihak yang Berperkara *Disputing Parties*

| | |
|--|---|
| A Para Penggugat (Penggugat I s/d IV) <i>Parties in litigation The Plaintiffs (Plaintiffs I to IV)</i> | Terdiri dari 14 warga yang mengaku memiliki tanah hak garap di sekitar Depo Lebak Bulus <i>Consists of 14 residents who claim to have rights of the arable land around the Lebak Bulus Depot</i> |
| B Para Tergugat <i>Defendants</i> | Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T)/Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta <i>Chairman of the Land Acquisition Procurement Committee (P2T)/Head of the Land and Spatial Planning Office/National Land Agency of the Republic of Indonesia (ATR / BPN RI) South Jakarta City</i> |
| Tergugat I <i>Defendant I</i> | Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta <i>Governor of the Jakarta Capital Special Region</i> |
| Tergugat II <i>Defendant II</i> | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta <i>Head of the Transportation Agency of the Jakarta Capital Special Region</i> |
| Tergugat III <i>Defendant III</i> | Walikota Administrasi Kota Jakarta Selatan <i>Mayor of South Jakarta City Administration</i> |
| Tergugat IV <i>Defendant IV</i> | |
| C Para Turut Tergugat <i>Co-Defendants</i> | |
| Turut Tergugat I <i>Co-Defendant I</i> | Direktur PT Mass Rapid Transit Jakarta (MRT Jakarta) <i>Director of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Jakarta MRT)</i> |
| Turut Tergugat II <i>Co-Defendant II</i> | Kepala Kelurahan Lebak Bulus <i>Head of the Lebak Bulus Village Office</i> |
| Turut Tergugat III <i>Co-Defendant III</i> | Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta <i>Head of the Jakarta Provincial Youth and Sports Agency</i> |

Dalam Pokok Perkara *In Subject Case*

- Para Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menetapkan bahwa Objek Sengketa adalah merupakan tanah miliknya, karena Para Penggugat telah menempati, memelihara, membayar PBB, iuran listrik, air, dsb., selama lebih dari 20 tahun di atas tanah yang berlokasi di Jl. Lebak Bulus RT 09/RW 01, RT 09/RW 07, RT 08/RW 01, RT 010/RW 01, RT 010/RW 07 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak ("Objek Sengketa"). Di mana saat ini di atas Objek Sengketa tersebut telah berdiri Depo MRT Jakarta, dimana Para Penggugat merasa tidak mendapat ganti rugi atas pembebasan lahan pada Objek Sengketa dari Para Tergugat;
 - Berdasarkan butir 1 di atas, Para Penggugat dalam permohonan gugatannya memohon Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- The Plaintiffs requested the Panel of Judges to determine that the Object of Dispute is their property, because the Plaintiffs have occupied, maintained, paid the property tax, electricity bills, water bills, etc., for more than 20 (twenty) years, and the property is located at Lebak Bulus Street RT 09 / RW 01, RT 09 / RW 07, RT 08 / RW 01, RT 010 / RW 01, RT 010 / RW 07 Lebak Bulus Village, Cilandak District ("Object of Dispute"). Currently, on the Object of the Dispute a Depot of MRT Jakarta has been built, for which the Plaintiffs believe that they did not receive compensation of land acquisition for the Object of Dispute from the Defendants;*
 - Referring to point 1 above, the Plaintiffs, through their lawsuit, requested the Panel of Judges to state that the Defendants had committed illegal actions (Onrechtmatige Overheidsdaad) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code (Civil Code).*

Perkara #01: Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atas Ganti Rugi Tanah di Lebak Bulus
Case # 01: Civil Lawsuit Against the Law in the South Jakarta District Court for Land Compensation in Lebak Bulus

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng dan/atau Tergugat III memberikan Ganti Rugi atas pembebasan lahan kepada Para Penggugat berupa Kerugian Materiel sebesar Rp62.371.746.000 dan Kerugian Imateriel sebesar Rp3.641.534.560,-
3. *Based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code, the Plaintiffs requested the Panel of Judges to punish the Defendants and order them in the manner of joint responsibilities and/or Defendant III to provide land acquisition compensation to the Plaintiffs for Material Losses amounting to Rp62,371,746,000 and Non-Material Losses amounting to Rp3,641,534,560.*
4. Memohon kepada Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,- per hari untuk keterlambatan membayar isi putusan ini.
4. *Requested the Judges to punish the Defendants by paying Penalties (dwangsom) to the Plaintiffs amounting to Rp1,000,000 per day for their late payments of this decision's verdict.*

Dalam Pokok Perkara In Subject Case

1. Para Penggugat dalam provisi memohon kepada Majelis Hakim Jakarta Selatan untuk menyatakan tanah garap milik Para Penggugat yang kini digunakan sebagai Depo MRT dinyatakan status quo sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. *The Plaintiffs in their provision requested the South Jakarta's Panel of Judges to declare the status of the arable land owned by the Plaintiffs, which is currently used as a Depot for MRT Jakarta, as status quo until the final and binding verdict is released by the Panel of Judges.*

Status Perkara Case Status

1. Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah dan senantiasa menjalin koordinasi, komunikasi dan kerja sama yang baik dalam memberikan jawaban atas seluruh isi gugatan dari Para Tergugat dimana seluruhnya adalah tidak benar dan menyampaikan bukti-bukti bahwa saksi-saksi yang memperkuat Posisi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa yang dilakukan oleh Para Tergugat terkait dengan Pembebasan Lahan untuk DEPO MRT tersebut sudah secara patut dan sah menurut hukum yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya;
1. *Defendants and Co-Defendants have maintained and continue to maintain good coordination, communication, and cooperation in providing answers to all items contained in the lawsuit from the Defendants that state that the lawsuit items are untrue, while providing evidences from witnesses that strengthen the positions of the Defendants and Co-Defendants that what the Defendants had done in relation to Land Acquisition for the aforementioned MRT Depot was proper and legal based on the applicable statutory laws, and had been carried out in accordance with the policies established previously;*
2. Tergugat IV telah menghadirkan Saksi (I) yang memperkuat dan menegaskan Posisi Para Tergugat bahwa Tanah yang digugat oleh Para Tergugat tersebut adalah termasuk ke dalam Lahan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. *Defendant IV has presented Witness (I) who has strengthened and confirmed the position of the Defendants that the land, which was contested by the Defendants, was part of the Jakarta Provincial Government's Land.*

Risiko yang dihadapi Perusahaan dan Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan Risks faced by the Company and the Nominal Value of Claims / Lawsuits

1. Risiko yang dihadapi bagi Perseroan sebagai Turut Tergugat I, pada prinsipnya tidak secara langsung mendapat dampak hukum sekalipun dimenangkan oleh Para Penggugat;
1. *The risk faced by the Corporation as a Co-Defendant I, in principle, did not have a direct legal impact even if the lawsuit is won by the Plaintiffs;*
2. Nilai Nominal Tuntutan/Gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat kecuali Perseroan sebagai Turut Tergugat I adalah Kerugian Materiel sebesar Rp62.371.746.000 dan Kerugian Imateriel sebesar Rp3.641.534.560,-
2. *The Nominal Value of Claims/Lawsuit for the Defendants and Co-Defendants except the Corporation as the Co-Defendant I are the Material losses in the amount of Rp62,371,746,000 and Non-Material losses in the amount of Rp3,641,534,560*

Tindak Lanjut Follow-up Action

Menunggu Putusan Pengadilan dan Menghadiri sidang berikutnya yaitu:

1. Pemeriksaan Saksi (II) Tergugat 4;
2. Kesimpulan dari Para Penggugat;
3. Kesimpulan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
4. Putusan Pengadilan.

Waiting for the Court's Decision and Attending the next trial, with the following agenda:

1. *Examination of Witness (II) Defendant 4;*
2. *Conclusions from the Plaintiffs;*
3. *Conclusions from the Defendants and the Co-Defendants;*
4. *Court's Decision.*

Tabel 6.146
Table 6.146

PENGUNGKAPAN PERKARA YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DISCLOSURE OF CASES FACED BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Di sepanjang tahun 2019, tidak terdapat perkara yang dihadapi oleh Dewan Komisaris maupun Direksi.

Throughout 2019, there were no cases faced by the Board of Commissioners and Directors.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRASI OLEH OTORITAS TERKAIT DISCLOSURE OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS BY RELATED AUTHORITIES

Selama tahun 2019, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan sebagai induk, kepada entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh otoritas terkait.

Throughout 2019, there were no material administrative sanctions that affected the continuity of the Corporation's business and there were also no administrative sanctions imposed on the Corporation as the parent to subsidiaries, members of the Directors or members of Board of Commissioners by the relevant authorities.

| Entitas Entity | Sanksi Administratif Administrative Sanction |
|--|---|
| Lingkup Perseroan Corporate Scope | - |
| Perseroan Corporation | - |
| Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Directors | - |
| Informasi tentang Entitas Anak Information about Subsidiaries | |
| Hingga akhir tahun 2019 Perseroan tidak memiliki entitas anak <i>Until the end of 2019 the Corporation did not have a subsidiary</i> | |

Tabel 6.147
Table 6.147

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM IMPORTANT MATTERS OUTSIDE THE LEGAL ASPECT

Di sepanjang tahun 2019, Perseroan tidak menemukan adanya perkara penting di luar aspek hukum yang melibatkan Perseroan sebagai organisasi, Dewan Komisaris maupun Direksi.

Throughout 2019, the Corporation did not find any important cases outside the legal aspects that involved the Corporation as an organization, Board of Commissioners or Directors.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY

Proses pengadaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting pada saat fase pembangunan infrastruktur operasional Perseroan. Sebagai bagian dari Divisi *General Affairs & Procurement* yang memiliki tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan operasional Perseroan, Departemen Procurement menjalankan proses dengan penuh tanggung jawab dan integritas sebagai mana diamanahkan dalam Pedoman Tata Kelola Perseroan.

The procurement process is one of the most critical elements during the construction phase in the Corporation's operational infrastructure. As part of the General Affairs & Procurement Department, which has a responsibility to fulfill the operational needs of the Corporation, the Procurement Department runs its process responsibly and with integrity as mandated in the Corporate Code of Conduct.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai angkutan publik perkotaan yang modern yang telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional dan dalam upaya memberikan layanan mengacu pada standar internasional sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2008, maka Kebijakan Rantai Pasok dan Tata Kelola Pengadaan yang selanjutnya akan disebut sebagai SCMM ini diterbitkan sebagai salah satu syarat penting dalam tata kelola Perseroan yang baik dan menjadi rujukan bagi entitas Perseroan secara menyeluruh tanpa pengecualian dengan pemangku kepentingan dan terutama untuk penyedia untuk penyedia dalam memenuhi kebutuhan Perseroan.

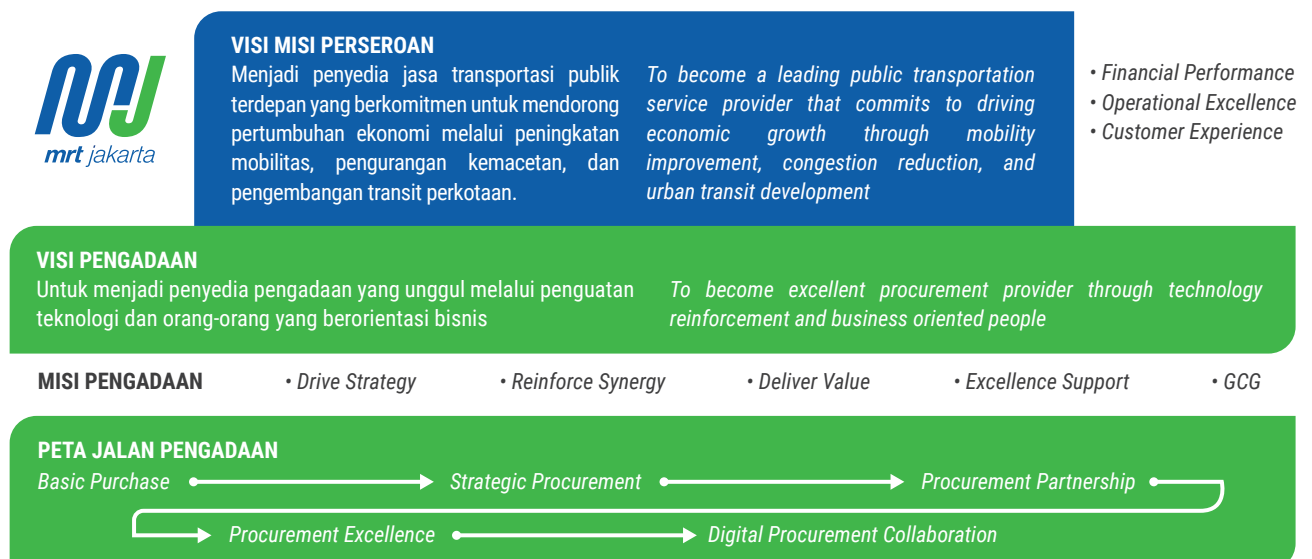
To carry out the tasks and functions of a modern public transportation mode that has been established as a national priority program and in the efforts to provide services that refer to the international standards in accordance with the Regional Regulation of the DKI Jakarta Province Number 3 of 2008, the Supply Chain Policies and Procurement Governance, which from this point on will be referred to as SCMM, are issued as one of the critical requirements in GCG and become a reference for the Corporate entity as a whole without exceptions with stakeholders and especially for suppliers of the Corporation's needs.

Kebijakan SCCM menjadi panduan dalam menyusun Perencanaan Persediaan, Penganggaran, Akuisisi, Manajemen Pemilihan Penyedia, Kemitraan Bebas Biaya, Kerja sama Operasi, Proses Pengadaan, Manajemen Persediaan dan Manajemen Kontrak serta Audit yang berkaitan dengan kriteria Perseroan. Kebijakan SCCM terdiri dari 10 bagian yakni: Penganggaran, Pasokan dan Perencanaan, Permintaan Pembelian, Strategi Pemilihan, Metode Pengadaan, Manajemen Kontrak, Manajemen Persediaan, Sistem Informasi Pengadaan, serta Evaluasi dan Pemantauan.

The SCCM policy serves as a guide in preparing Inventory Planning, Budgeting, Acquisition, Sourcing Management, Zero Cost Partnership, Joint Operation, Procurement Processes, Inventory Management and Contract Management and Audits relating to the Corporate criteria. The SCCM Policy consists of 10 parts, namely: Budgeting, Supply and Planning, Purchase Requisition, Inventory Management, Sourcing, Procurement Method, Contract Management, Vendor Management, Procurement Information System and Review and Monitoring.

Sebagai bagian dari rangkaian proses pengembangan sistem pengadaan, Perseroan secara konsisten telah menjalankan strategi pengembangan sesuai dengan program jangka panjang serta visi & misi mendorong pencapaian tujuan Kerangka strategi pengembangan pengadaan untuk Perseroan tersebut dijelaskan dalam gambar penjabaran peta jalan dan strategi pengadaan sebagai berikut.

As part of procurement system development processes, the Corporation has consistently implemented development strategies in line with the procurement long-term program and vision & mission to drive the achievements of goals of the procurement development strategy framework for the Corporation, as described in the road map and procurement strategies below.



Figur 6.36
Figure 6.36

Guna menjawab tantangan bisnis dalam industri yang cukup kompetitif dan masuknya fase Industri 4.0, Perseroan kini menitikberatkan pengembangan pada tahap Kolaboratif dan Pengadaan Berbasis Digital, di mana strategi yang dijalankan dalam tahap ini ditujukan untuk mendorong terciptanya pengadaan yang lebih efisien dan efektif melalui peningkatan sinergi dan kolaborasi antar mitra strategis serta optimalisasi penggunaan teknologi yang dapat memperkuat pengadaan untuk menjadi salah satu pendorong peningkatan daya saing Perseroan.

KINERJA PENGADAAN TAHUN 2019

PROCUREMENT PERFORMANCE IN 2019

Sepanjang tahun 2019, Departemen *Procurement* melaksanakan sebanyak 207 proses pengadaan di mana rata-rata produktivitas personel pengadaan mencapai 52 pengadaan per personel. Adapun kontribusi penghematan yang cukup signifikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengadaan pengelolaan limbah yang memberikan potensi penghematan biaya sebesar Rp4.981.051.959 per tahun;
2. Pengadaan QR gate yang memberikan potensi penghematan biaya sebesar Rp4.350.000.000 per tahun.

Selain itu, Departemen *Procurement* ikut berkontribusi dalam percepatan pembangunan jembatan penyeberangan interkoneksi Stasiun MRT ASEAN dengan nilai proyek yang cukup besar senilai Rp 20.321.876.834. Pengadaan tersebut selesai dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dengan proses evaluasi yang ketat.

Terkait hubungan dengan penyedia secara periodik Perseroan melaksanakan Survei Kepuasan Penyedia dengan tujuan mendapatkan persepsi penyedia atas pengadaan di Perseroan dan juga mendapatkan tanggapan dari penyedia guna pengembangan pengadaan ke depan.

Persepsi penyedia atas pengadaan di Perseroan berdasarkan hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan sebesar 85% atau meningkat sebesar 12% dari tahun sebelumnya. Meskipun secara garis besar tingkat kepuasan penyedia cukup baik, Perseroan tetap melakukan penyempurnaan berkelanjutan guna mengembangkan sistem pengadaan yang lebih baik dan transparan.

RENCANA DAN STRATEGI PENGADAAN TAHUN 2020

PROCUREMENT PLAN AND STRATEGY FOR 2020

Sejalan dengan tujuan Perseroan dalam rangka meningkatkan daya saing di tengah tantangan bisnis dalam industri yang cukup kompetitif, Perseroan telah menyiapkan beberapa inisiatif strategi yang diterapkan di tahun 2020 untuk aspek pengadaan, antara lain:

Strategi Pemilihan Penyedia

Sourcing Strategy

Strategi Pemilihan ditetapkan berdasarkan orientasi pengembangan bisnis Perseroan untuk mendukung peningkatan efisiensi dan daya saing Perseroan. Fokus utama strategi pemilihan penyedia adalah mengoptimalkan pembelanjaan dengan memiliki penyedia yang sesuai dan memastikan pemenuhan semua kebutuhan bisnis perseroan. Selain itu metode strategi pemilihan penyedia dapat membantu menciptakan efisiensi yang lebih baik dan kesempatan penghematan

In response to the business challenges within a competitive industry and the beginning of the Industry 4.0 Phase, the Corporation currently emphasizes on developments in the Collaborative phase and Digital-Based Procurement, in which the implemented strategies in this phase are meant to drive the creation of more efficient and effective procurement through improvements in the synergy and collaboration between strategic partners as well as the optimization of technology usage that can strengthen procurement to become one of the drivers of improvements in the Corporation's competitiveness.

In 2019, the Procurement Department executed 207 procurement processes in which the average personnel productivity was 52 procurements per personnel. The significant cost-saving contribution of the department is further explained as follows:

1. *Waste Management Procurement gave cost-saving potential amounting to Rp4,981,051,959 per year;*
2. *QR Gate Procurement gave cost-saving potential amounting to Rp4,350,000,000 per year.*

In addition, the Procurement Department contributed in the acceleration of the Interconnection Sky Bridge construction at ASEAN MRT Station with a considerable project value of Rp20,321,876,834. The procurement process was completed in approximately 1 (one) month with a rigorous evaluation process.

Regarding the relationship with suppliers, the Corporation periodically conducts a "Supplier Satisfaction Survey" with the aim of obtaining supplier perceptions of procurement in the Corporation and getting feedback from suppliers for future procurement developments.

The suppliers' perspectives on procurement in the Corporation, based on the survey result, show a satisfaction level of 85% or increasing by 12% from the previous year. Although overall the satisfaction level is fairly good, the Corporation keeps making continuous improvements to develop a better and more transparent procurement system.

Aligned with the Corporate objective of improving competitiveness in the midst of business challenges in a competitive industry, the Corporation has prepared several strategic initiatives to be applied in 2020 for the procurement aspect, including:

Sourcing Strategy is determined based on the Corporation's business development orientation to support Corporate efficiency and competency developments. The main focus of the Sourcing Strategy is to optimize expenditures by having the right suppliers and ensuring the fulfillment of all business requirements of the Corporation. In addition, the Sourcing Strategy method can help create better efficiency and cost-saving opportunities for the Corporation. By engaging as many suppliers as

menciptakan efisiensi yang lebih baik dan kesempatan penghematan Perseroan menjadi lebih besar. Dengan menggandeng sebanyak-banyaknya penyedia untuk memenuhi kebutuhan Perseroan mulai dari kategori barang kebutuhan primer Perseroan hingga barang kebutuhan sekunder diharapkan mampu menghadirkan pilihan penyedia terbaik dengan harga yang sesuai. Strategi Pemilihan Penyedia tersebut dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:

possible to fulfill the requirements of the Corporation, from primary Corporate needs to secondary needs, hopefully the Procurement Department can provide the best selections of suppliers with appropriate prices. The Sourcing Strategy is further described through the following figure:



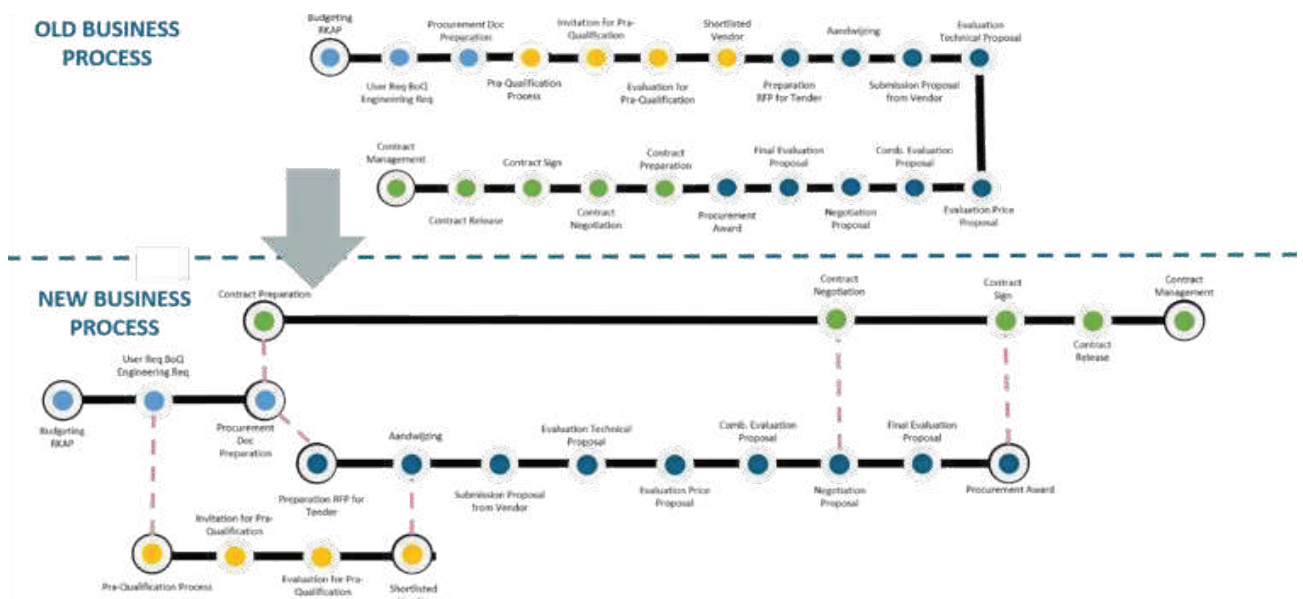
Figur 6.37
Figure 6.37

Proses bisnis merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang disusun secara spesifik disesuaikan dengan aturan bisnis yang diterapkan oleh Perseroan. Proses bisnis pengadaan yang semula dijalankan secara berurutan diubah menjadi sebuah proses yang berjalan secara paralel sehingga mampu memangkas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses pengadaan. Hal tersebut dimungkinkan dengan adanya pembagian tugas yang jelas untuk setiap personil. Adapun ilustrasi strategi paralel bisnis proses tersebut dijelaskan pada gambar di bawah ini:

Business process is a chain of activities that are specifically arranged and adjusted to the applicable business rules of a Corporation. The procurement business process that was initially conducted consecutively is now transformed into a parallel process that is able to cut the time needed to finish a procurement process. This is made possible by a clear task delegation for every personnel. The illustration of the parallel business strategy process can be observed in the figure below:

Bisnis Proses Paralel

Parallel Business Process



Figur 6.38
Figure 6.38

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Human Capital Empowerment

Keberhasilan pengadaan tidak terlepas dari peran serta personil pengadaan yang berkualitas. Personil pengadaan harus memiliki kemampuan untuk dapat memberikan solusi komprehensif yang efisien dan efektif atas strategi pemenuhan kebutuhan barang atau jasa dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan tata kelola Perseroan yang baik, serta mengedepankan integritas sebagai nilai utama pengadaan. Personil pengadaan akan diberikan program pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan.

The success of procurement is inseparable from the role of qualified procurement personnel. Procurement personnel must have the ability to provide end-to-end solutions that are efficient and effective to fulfill the Corporate needs while adhering to the principles and good corporate governance, as well as promoting integrity as the main value of procurement. Procurement personnel will be given training and certification programs to improve the competencies needed to support the work.

Konsolidasi Permintaan Pembelian

Consolidate of Purchase Requests

Dengan mengkonsolidasikan beberapa permintaan pengadaan menjadi beberapa paket pengadaan, Perseroan dapat meningkatkan kekuatan negosiasi dengan penyedia. Selain itu, Perseroan dapat menekan biaya pengiriman, biaya penanganan dan mengurangi biaya tidak langsung.

By consolidating several procurement requests into a number of procurement packages, the Corporation can increase the power of negotiation with vendors. In addition, the Corporation can reduce shipping costs, handling costs and indirect costs.

Sistem Pengembangan Pengadaan yang Berkelanjutan

Sustainable Procurement Development System



Gambar 6.6
Image 6.6

Di samping strategi pengadaan yang tepat dan sumber daya manusia yang berkualitas, sistem pengadaan juga memerlukan pengembangan berkelanjutan guna memastikan relevansi dengan kondisi saat ini. Pengembangan berkelanjutan atas sistem pengadaan meliputi:

1. Simplifikasi proses bisnis secara periodik, Departemen *Procurement* melakukan review atas proses bisnis pengadaan guna memastikan bahwa proses yang diimplementasikan merupakan proses bisnis yang paling efektif dan juga relevan guna menjawab tantangan bisnis.
2. Sistem Pengadaan berbasis Teknologi dan Informasi mendorong penggunaan teknologi informasi dengan kolaborasi perangkat digital untuk menjadikan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif dan efisien.

Beyond the right procurement strategy and qualified human resources, the procurement system also requires continuous developments to ensure relevance with the current conditions. Continuous developments of the procurement system include:

1. *Periodic simplification of the business processes. The Procurement Department conducts a review of the procurement business processes to ensure that the implemented business processes are the most effective and relevant business processes to respond to business challenges.*
2. *The ICT-Based Procurement System encourages the use of information technology with the collaboration of digital devices to make the process of procuring goods and services more effective and efficient.*





TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan bentuk kontribusi dan partisipasi dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan.

The Implementation of Corporate Social Responsibility is a form of contribution and participation in the pursuit of realizing sustainable development.

LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT

2019

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN MRT JAKARTA



Gambar 7.1. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dalam Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat
Image 7.1 Corporate Social Responsibility Activity aimed at Improving Community Accessibility

Konsep Pembangunan Berkelanjutan yang telah berkembang di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara kemanusiaan, lingkungan, dan keuntungan. Konsep ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

Organisasi Internasional untuk Standarisasi (*International Organization for Standardization/ISO*) merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*).

The Concept of Sustainable Development that has been developed in various countries emerged in relation to the desire of many parties to find a balance between people, planet and profit. This concept can only be realized through the strong commitment of all parties, especially business entities that undoubtedly rely on profit orientation and which thus tend to ignore the long-term impacts of their activities.

In Indonesia, regulators have encouraged this harmonization through Corporate Social Responsibility, which requires business entities to formulate policies and programs which reflect their commitment to building sustainable relationships with stakeholders.

The International Organization for Standardization (ISO) has released ISO 26000 which addresses Guidance for Social Responsibility.

ISO memberikan pola dan modul yang berlaku secara internasional tentang bagaimana CSR dapat dikembangkan dalam dimensi sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

The ISO provides a standard and modules which are applicable internationally in relation to how CSR can be developed within an organization. In Indonesia, ISO 26000 was ratified by the Government in 2010 and was made a National Standard (SNI) in 2012.

Dalam penerapan program CSR, Perseroan telah melaksanakan sesuai dengan standar ISO 26000 yang juga sejalan dengan visi dan misi dari Perseroan sebagai salah satu perusahaan transportasi publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

In implementing its CSR program, the Corporation has complied with ISO 26000 standards. These standards are also in line with the vision and mission of the Corporation, which, as a public transportation corporation, is aiming to improve the quality of life of the community.

SUBJEK INTI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN BERDASARKAN ISO 26000

Core Subjects of Corporate Social Responsibility Based on ISO 26000



Figur 7.1
Figure 7.1

KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP MRT JAKARTA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY POLICY AND GOVERNANCE OF MRT JAKARTA

PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENERAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

PRINCIPLES AND POLICY FOR THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CSR tidak dapat dilepaskan dari perkembangan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG). GCG berangkat dari gagasan tentang entitas usaha yang dapat menerapkan pola hubungan yang harmonis antara entitas usaha, pemangku kepentingan, dan pemilik modal atau pemegang saham. Perseroan menyakini CSR menjadi bagian dari komitmen yang terus menerus diupayakan dengan mengusung prinsip TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*) khususnya prinsip yang dapat membuat Perseroan percaya bahwa bisnis akan berkelanjutan apabila memberikan perhatian yang seimbang kepada aspek kemanusiaan (*people*), lingkungan (*planet*), dan keuntungan (*profit*). Oleh karena itu Perseroan menjadikan CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari operasional untuk mendukung keberlanjutan usaha.

CSR cannot be separated from the development of Good Corporate Governance (GCG). GCG departs from the idea of a business entity that can apply a harmonious relationship between business entities, stakeholders and capital owners or shareholders. The Corporation believes that CSR is part of a continuous commitment to carrying out the principle of TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness), especially the principle of Responsibility, which should make the Corporation more robust and sustainable. The Corporation believes that business will be sustainable if it pays equal attention to humanity (people), the environment (planet) and profit (profit). Therefore, the Corporation has made CSR an integral part of its operations in an effort to support business sustainability.

HARMONISASI OPERASI MRT JAKARTA YANG BERKELANJUTAN

Harmonization of MRT Jakarta's Sustainable Operations



Figur 7.2
Figure 7.2

Sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selalu sejalan dengan visi pemerintah, Perseroan memiliki peran untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial tersebut ke dalam seluruh lapisan Perseroan. Kepada karyawan dan/atau pekerja sebagai pemangku kepentingan internal, Perseroan wajib memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang dapat memberikan landasan bagi perkembangan diri setiap karyawan. Kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal, Perseroan melakukan berbagai aktivitas pengembangan sosial kemasyarakatan.

As a Regionally Owned Enterprise (ROE) which is always in line with the vision of the government, the Corporation has a role to play in realizing Social Responsibility across all of its various Corporate layers. For Employees/workers, as internal stakeholders, the Corporation must pay attention to welfare and working environments in order to provide a foundation for each employee's development. For the community as external stakeholders, the Corporation should carry out various social development activities.

Aspek lain dari Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan Perseroan adalah pertanggungjawaban pengelolaan operasional usaha kepada pemegang saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemangku kepentingan. Sebagai BUMD, Perseroan telah berkomitmen untuk mewujudkan praktik tata kelola yang sehat seperti yang dapat dilihat lebih rinci pada bagian Tata Kelola Perusahaan dalam laporan tahunan ini dan terus mengupayakan perbaikan pada area pengelolaan organisasi yang masih membutuhkan peningkatan.

Another aspect of Corporate Social Responsibility, as realized by the Corporation, is ensuring the management of business operations as a form of responsibility to the DKI Jakarta Provincial Government as a shareholder and to regulators as stakeholders. As an ROE, the Corporation is obliged to commit to operational management that implements Good Corporate Governance practices, as can be seen in more detail in the Good Corporate Governance section of this annual report, and continues to strive for improvements in the areas of organizational management that require them.

Fondasi penting yang melandasi komitmen Tanggung Jawab Sosial meliputi:

- Bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- Dorongan global terhadap penerapan Tanggung Jawab Sosial yang baik dan merata.
- Meningkatnya perhatian masyarakat luas terhadap etika dan akuntabilitas bisnis.
- Harapan bahwa Perseroan dan lingkungan sekitarnya dapat tumbuh bersama secara berdampingan.

The important foundations that underpin the Corporation's commitment to implementing Social Responsibility activities include:

- *Part of the implementation of good corporate governance.*
- *A global push for good and equitable implementation of Social Responsibility.*
- *Increased public attention regarding ethics and business accountability.*
- *Hope that the Corporation and the surrounding environment can grow together side by side.*

PEMANGKU KEPENTINGAN SIGNIFIKAN YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH ATAS DAMPAK DARI KEGIATAN PERSEROAN

SIGNIFICANT STAKEHOLDERS WHICH AFFECTED OR INFLUENTIAL BY THE IMPACTS OF THE CORPORATE ACTIVITIES

Berikut disampaikan daftar pemangku kepentingan yang terdampak dari kegiatan Perseroan, atau memiliki pengaruh dalam kegiatan Perseroan.

The following is a list of stakeholders who are affected by the Corporation's activities or who have influence over the Corporation's activities.

| Pemangku Kepentingan Stakeholder | Hubungan Relation | Harapan Pemangku Kepentingan kepada Perseroan Stakeholder Expectations of the Corporation | Bentuk Pelibatan Form of Engagement |
|----------------------------------|----------------------------|---|--|
| Pelanggan Customer | Pelanggan Customer | Layanan dan Mutu Service and Quality | Layanan dan Mutu dari Perseroan yang berstandar tinggi demi keamanan dan kenyamanan pengguna jasa. High Standard of Corporate service and quality as regards the safety and comfort of passengers. |
| Pemegang Saham Shareholder | Pemegang Saham Shareholder | Layanan, Mutu, dan Lingkungan Service, Quality and Environment | Perseroan menjadi perusahaan transportasi publik dengan standar tinggi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga dapat mengurangi emisi karbon demi menjaga lingkungan. The Corporation has become a public-transportation corporation with high standards that can improve the quality of life of people and that can also reduce carbon emissions in order to protect the environment. |
| Karyawan Employee | Karyawan Employee | Ketenagakerjaan Employment | Perseroan memberikan pemenuhan harapan karyawan melalui penyelenggaraan hubungan industrial yang seimbang, yang memungkinkan karyawan menjalankan kewajibannya sesuai kompetensi yang dimiliki secara optimal. Di sisi lain karyawan juga mendapatkan haknya, berupa imbal jasa yang sesuai standar dan jenjang karirnya. The Corporation aims to fulfill employee expectations through the implementation of balanced industrial relations, which allow employees to carry out their competencies optimally. On the other hand, employees also have their rights fulfilled in the form of compensation which is in accordance with their standards and career path. |

| Pemangku Kepentingan Stakeholder | Hubungan Relation | Harapan Pemangku Kepentingan kepada Perseroan Stakeholder Expectations of the Corporate | Bentuk Pelibatan Form of Engagement |
|---|---|---|--|
| Regulator <i>Regulator</i> | Regulator <i>Regulator</i> | Ekonomi dan kualitas hidup <i>Economy and quality of life</i> | Diharapkan Perseroan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat banyak. <i>It is expected that the Corporation can provide benefits to improve the economic conditions and quality of life of many people.</i> |
| Pemasok, Mitra Kerja <i>Partner, Supplier</i> | Mitra Kerja, Pemasok <i>Partner, Supplier</i> | Layanan, Mutu, dan Lingkungan <i>Service, Quality and Environment</i> | Perseroan bekerja sama dengan mitra kerja dan pemasok menciptakan suasana aman, nyaman, dan ramah lingkungan. <i>The Corporation works together with partners and suppliers to create developments that are safe, comfortable and environmentally-friendly.</i> |
| Media Massa <i>Mass Media</i> | Media Massa <i>Mass Media</i> | Layanan dan Mutu <i>Service and Quality</i> | Perseroan menjadi perusahaan transportasi dengan standar internasional. <i>The Corporation aims to become a transportation corporation which upholds international standards</i> |
| Masyarakat, Komunitas Lokal <i>Public, Local Community</i> | Masyarakat, Komunitas Lokal <i>Public, Local Community</i> | Aksesibilitas, Ekonomi, dan Sosial <i>Accessibility, Economics and Society</i> | Perseroan selalu berkomitmen untuk membantu aksesibilitas, ekonomi, dan sosial masyarakat yang terdampak langsung ataupun tidak terdampak langsung dimulai dari sebelum, saat, dan setelah pembangunan hingga saat berjalannya operasional. <i>The Corporation is committed to assisting and improving accessibility, and economic and social impacts upon any persons directly or indirectly affected before, during and after construction until the start of operations.</i> |

Tabel 7.1
Table 7.1

LINGKUP DAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

SCOPE AND PROGRAM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pelaksanaan program CSR oleh Perseroan dilandasi pada kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

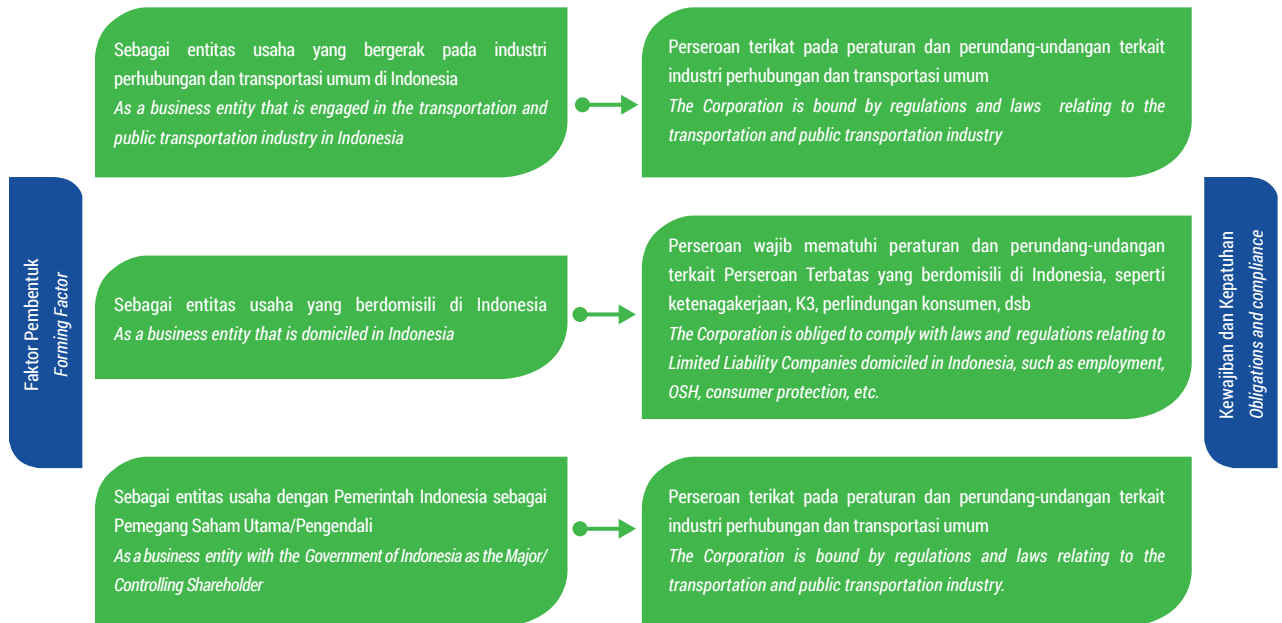
1. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha.

Gambaran tentang kewajiban yang diemban Perseroan dalam implementasi CSR adalah sebagai berikut.

The implementation of the CSR program by the Corporation is based on obligations which are regulated under various Republic of Indonesia Laws, for instance:

1. *Government Regulation No. 47 of 2012 concerning Limited Corporate Social and Environmental Responsibility.*
2. *Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems.*
3. *DKI Jakarta Governor Regulation No. 112 of 2013 concerning Social and Environmental Responsibilities of the Business World.*

A description of the obligations of the Corporation during the implementation of CSR is as follows.



Figur 7.3
Figure 7.3

Selain kewajiban, pemenuhan kepatuhan Perseroan atas program CSR didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan wajib menerapkan program sesuai Instruksi Presiden dan/atau Pemerintah Pusat
- Sebagai bagian dari BUMD Pemerintah DKI Jakarta, Perseroan menerapkan Instruksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- Sebagai perseroan di bawah regulator di bidang transportasi, instruksi dari Menteri Perhubungan dan Dinas Perhubungan Pemerintah DKI Jakarta
- Sebagai perseroan yang dipimpin oleh direksi instruksi direksi untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dapat mendukung citra Perseroan

The implementation of the CSR program by the Corporation is based on obligations which are regulated under Republic of Indonesia Laws, for example:

- As part of the DKI Jakarta Provincial Government's ROE, the Corporation is required to implement the program in accordance with Presidential and/or Indonesian Government Instructions*
- As part of the DKI Jakarta Provincial Government's ROE based on Central and DKI Jakarta, the Corporation implements Provincial Government Instructions*
- As part of an ROE under regulators in the Transportation sector based on instructions from the Minister of Transportation and the Transportation Department of the DKI Jakarta Provincial Government*
- As an ROE led by directors, directors' instructions regarding the implementation of Corporate Social Responsibility that can improve the image of the Corporation*

ORGANISASI, PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA THE ORGANIZATION, PARTIES IN CHARGE AND CONTROLLER

Kegiatan CSR merupakan bagian integral dari aktivitas di lingkup Perseroan, sehingga pengambilan keputusan bisnis dan aktivitas yang dilakukan tidak hanya untuk tujuan peningkatan probabilitas semata, melainkan juga untuk memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, karyawan, konsumen, pemberi kerja, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan.

CSR activities are an integral part of activities within the Corporation so business decision making and activities are carried out not only for the purpose of increasing profitability but also to maximize value for shareholders, employees, consumers, employers, suppliers, the public, the government and parties of other stakeholders.

| | Aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Aspect of Corporate Social Responsibility</i> | Penanggung Jawab di Lingkup MRT Jakarta <i>Parties in Charge at MRT Jakarta</i> |
|--|---|--|
| Tanggung Jawab Sosial Perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> | ● → Lingkungan <i>Environment</i> | ● → <i>Quality, Safety, Security, Health and Environment Department</i> |
| | ● → Praktik Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja <i>Practice of Employment, Occupational Safety and Health</i> | ● → <i>Quality, Safety, Security, Health, and Environment Department</i> |
| | ● → Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan <i>Social & Public Development</i> | ● → <i>Corporate Communication Department</i> |
| | ● → Tanggung Jawab Konsumen dan Produk/Jasa serta Mitra Kerja <i>Consumer Responsibility and Product / Service and Partner</i> | ● → <ul style="list-style-type: none">• <i>Customer Engagement Division</i>• <i>Project Management for Construction 1 & 2</i>• <i>Commercial & Retail Division</i> |

Tabel 7.2
Table 7.2

ASPEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL ASPECTS OF SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung jawab Sosial Perusahaan merupakan suatu konsep yang menegaskan bahwa sebuah perseroan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingannya (pemegang saham, karyawan, pengguna jasa, alam, lingkungan, dan lain-lain), dalam segala aspek operasional perseroan yang antara lain mencakup aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan.

Perseroan dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan tidak hanya kepada aktivitas yang berdampak pada aspek ekonomis saja, seperti misalnya tingkat pencapaian keuntungan, tapi juga harus mempertimbangkan dampak yang timbul pada aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek lainnya, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang.

Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa peduli untuk memberikan manfaat tidak hanya bagi para pemegang saham, melainkan juga berperan serta dalam pemenuhan kesejahteraan bagi karyawan dan masyarakat, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Selaras dengan visi "Menjadi penyedia jasa transportasi publik terdepan yang berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas, pengurangan kemacetan, dan pengembangan sistem transit perkotaan", Perseroan berusaha untuk berkontribusi dalam membantu dan menguntungkan masyarakat terutama yang berada di area kantor, stasiun, dan kereta Perseroan. Perseroan sangat peduli dengan masalah yang dirasakan dan dihadapi oleh masyarakat, dan senantiasa berperan serta untuk ikut menanggulangnya.

CSR is a concept that asserts that a corporation has various forms of responsibility to all of its stakeholders (shareholders, employees, passengers, nature, the environment, etc.) across all aspects of corporate operations, which include economic aspects, social aspects and environmental aspects.

The Corporation should not carry out its activities based on impact upon economic aspects only, such as the levels of profit, but should also consider the impact upon social aspects, environmental aspects and other aspects, both in the short term and the long term.

In carrying out its business activities the Corporation always strives to not only provide benefits to its shareholders but also strives to participate in fulfilling the welfare of its employees and the community, as well as actively participating in preserving the environment.

In line with the vision of "Becoming a leading public transportation service provider committed to driving economic growth through increased mobility, reducing congestion and developing the urban transit system," the Corporation strives to contribute to helping and bringing benefits to the people, especially those in office, stations and trains owned by the Corporation. The Corporation cares about the problems felt and faced by the people, and takes a positive role as regards overcoming them.

LINGKUP DAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

SCOPE AND PROGRAM OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pembiayaan anggaran yang ditetapkan Perseroan pada tahun 2019 realisasinya adalah sebagai berikut:

The following table addresses the budget set by the Corporation at the beginning of 2019 and its realization at the end of 2019:

| | Realisasi 2019 Realization 2019 (Rp) | Anggaran 2019 Budget 2019 (Rp) | Penyerapan Anggaran 2019 Budget Absorption 2019 (%) | | Realisasi 2018 Realization 2018 (Rp) | Realisasi 2019 Terhadap Realisasi 2018 Ratio of Realization 2019 to Realization 2018 (%) |
|--|--|--------------------------------------|---|---|--|---|
| | 1 | 2 | (1:2) | | 3 | (1:3) |
| Living Project <i>Living Project</i> | 76.125.000 | 76.125.000 | 100% | ↑ | 0 | 100% |
| Liburan Pintar Terintegrasi <i>Smart Integrated Holiday</i> | 8.750.000 | 8.750.000 | 100% | ↑ | 43.825.990 | 19,96% |
| MRTeach <i>MRTeach</i> | 12.000.000 | 12.000.000 | 100% | ↑ | 0 | 100% |
| Ruang Baca Jakarta • Pojok Buku MRT Jakarta • MRT Jakarta Berbagi Buku <i>Jakarta Reading Room</i> • <i>MRT Jakarta Book Corner</i> • <i>MRT Jakarta Book Sharing</i> | 38.000.000 | 38.000.000 | 100% | ↑ | 0 | 100% |
| Peremajaan Mesjid Al Hidayah <i>Renovation of the Al Hidayah Mosque</i> | 0 | 0 | 0 | | 46.225.000 | - |
| Jalan Jakarta <i>Jalan Jakarta</i> | 130.535.950 | 130.535.950 | 100% | ↑ | 0 | 100% |
| Sekolah Ramah Bersepeda <i>Bike to School</i> | 20.000.000 | 20.000.000 | 100% | ↑ | 0 | 100% |
| Ruang Baca Jakarta <i>Jakarta Reading Space</i> Micro Library <i>Micro Library</i> | 324.995.000 | 324.995.000 | 100% | ↑ | 0 | 100% |
| Donasi untuk korban kebakaran: • Pemukiman warga Kampung Bali, Matraman • Pemukiman warga Pademangan, Jakarta utara <i>Donation to victims of Disasters in:</i> • <i>Residential areas of Kampung Bali, Matraman</i> • <i>Residential areas of Pademangan, North Jakarta</i> | 32.000.000 | 0 | 100% | ↑ | 0 | 100% |

| | Realisasi 2019 Realization 2019 (Rp) | Anggaran 2019 Budget 2019 (Rp) | Penyerapan Anggaran 2019 Budget Absorption 2019 (%) | | Realisasi 2018 Realization 2018 (Rp) | Realisasi 2019 Terhadap Realisasi 2018 Ratio of Realization 2019 to Realization 2018 (%) |
|--|--|--------------------------------------|---|---|--|---|
| | 1 | 2 | (1:2) | | 3 | (1:3) |
| Sumbangan Hewan Qurban DKI Jakarta <i>Donations for Qurban in DKI Jakarta</i> | 25.000.000 | 0 | 100% | ↑ | 0 | 100% |
| Bakti Sosial Kemasyarakatan kepada Yayasan Anak Juang Bangsa <i>Community Service to Juang Anak Bangsa Foundation</i> | 1.000.000 | 262.000.000 | 100% | ↑ | 0 | 100% |
| Sumbangan Korps Cacat Veteran RI <i>Donation to the Disabled Veteran Corps of the Republic of Indonesia</i> | 4.000.000 | 0 | 100% | ↑ | 0 | 100% |
| Mural Persahabatan Jakarta- Berlin di Terowongan Kendal <i>Jakarta-Berlin Friendship Mural at Kendal Tunnel</i> | 200.000.000 | 0 | 100% | | 0 | 100% |
| Perbandingan Realisasi Anggaran 2019 terhadap Anggaran 2018 <i>Comparison of Budget Absorption in 2019 to Budget Absorption in 2018</i> | 882.405.950 | 882.405.950 | 100% | ↑ | 90.050.990 | |

Tabel 7.3
Table 7.3



- Anggaran CSR tahun 2019 hanya sebesar Rp150.000.000 dan total realisasi kegiatan CSR sebesar Rp882.405.950. Kekurangan dana diperoleh dari dana relokasi. Dana relokasi tersebut diperoleh dari efisiensi anggaran lainnya.
- Perseroan melaksanakan program #JalanJakarta sebagai bagian dari pemenuhan aspirasi Pemprov DKI Jakarta terkait aksesibilitas pejalan kaki dan pesepeda pada moda transportasi Jakarta. Sebagai program yang diinisiasi oleh Pemprov DKI bersama MRT Jakarta dan Institute for Transportation and Development Indonesia (ITDP) dengan menggunakan anggaran tahun 2019 telah berhasil memberikan infrastruktur terintegrasi bagi pejalan kaki dan pesepeda.
- Anggaran Ruang Baca Jakarta bukan dari anggaran CSR tetapi dari Anggaran *Mini Information Center* yang diperuntukkan bagi kegiatan CSR *Micro Library*.
- *The CSR budget in 2019 was only Rp150,000,000 while the total CSR budget realization was Rp882,405,950. The shortage was obtained through funding reallocations. The reallocated funds were obtained through other budget efficiencies.*
- *The Corporation implements the #JalanJakarta program as part of its goal to fulfill the aspirations of the DKI Jakarta Provincial Government regarding accessibility for pedestrians and cyclists in relation to Jakarta transportation. As a program initiated by the DKI Jakarta Provincial Government in conjunction with Provincial MRT Jakarta and the Indonesian Institute for Transportation and Development (ITDP) through the 2019 budget, it has succeeded in providing integrated infrastructure for pedestrians and cyclists.*
- *The budget for the Jakarta Micro Library Reading Room was not sourced from the CSR budget but was taken from the Mini Information Centre Budget.*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE SCOPE OF FULFILLING HUMAN RIGHTS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

COMMITMENT AND POLICY

Komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial terkait hak asasi manusia antara lain dilakukan melalui terealisasinya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Perwujudan ini antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan kebutuhan Perseroan.
2. Menerapkan *reward* dan *punishment* secara adil.
3. Memberikan hak kepada karyawan untuk berserikat.
4. Menempatkan Peraturan Perseroan sebagai komitmen CSR.
5. Memberikan kondisi kerja yang baik, aman, dan nyaman bagi karyawan.
6. Memberikan hak-hak purna bakti (pensiun) sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Perseroan menghormati hak asasi serta hak dan kewajiban karyawan sesuai dengan peraturan Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.

The Corporation's commitment and policies in the field of social responsibility regarding aspects of human rights are manifested through the realization of the development and improvement of the quality of Human Resources. This embodiment includes, among others, the following matters:

1. *Providing opportunities for employees to take part in education and training that is in line with Corporate competencies and needs.*
2. *Implementing rewards and punishments fairly.*
3. *Providing the right to freedom of association for employees.*
4. *Placing Collective Work Agreements as a CSR commitment.*
5. *Providing decent, safe and comfortable working conditions for employees.*
6. *Providing post-service rights (retirement) in accordance with applicable regulations.*
7. *The Corporation respects human rights, as well as the rights and obligations of employees in accordance with Corporation Regulations and the applicable laws.*

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB SOSIAL HAK ASASI MANUSIA

STAKEHOLDERS AND THE IMPACTS OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON HUMAN RIGHTS

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM di lingkup operasi dan bisnisnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM di lingkungan Perseroan di antaranya meliputi penegakan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh karyawan, pelaksanaan sistem remunerasi, dan kesejahteraan karyawan, komitmen atas Peraturan Perseroan, serta hal terkait lainnya.

The Corporation is committed to always upholding human rights in relation to its operations and business. The scope of social responsibility as it relates to the implementation of human rights in the Corporation's environment includes the enforcement of the principles of diversity and equality for all employees, the implementation of the remuneration system and employee welfare, commitment to the Corporation's regulations and other related matters.

RENCANA DAN TARGET KEBIJAKAN PROGRAM

PROGRAM PLANS AND POLICY TARGETS

Dalam pemenuhan HAM pada lingkup operasi dan bisnisnya, Perseroan menekankan pentingnya hak-hak karyawan, terutama terkait HAM seperti kehidupan yang layak dan pemenuhan hak dasar hidup seperti kelahiran. Perseroan telah memiliki sejumlah Prosedur Tetap yang mengatur berbagai pemenuhan HAM karyawan, dan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan penerapan Prosedur Tetap sejalan dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks. Selain itu, Perseroan menekankan perihal tanggung jawab sosial terkait HAM pada sasaran dengan melaksanakan seluruh kebijakan yang terkait dengan ruang lingkup HAM tersebut.

In fulfilling human rights during the scope of its operations and business, the Corporation emphasizes the importance of the rights of employees, especially rights relating to human rights, such as the right to a decent life and the fulfillment of the basic rights, including birth. The Corporation has a number of Permanent Procedures that regulate the fulfillment of employees' human rights, and will continue to evaluate and develop the application of these Permanent Procedures in line with the increasingly complex needs of human life. In addition, the Corporation emphasizes social responsibility in relation to human rights in-line with its objectives by implementing relevant policies.

PENERAPAN INISIATIF HAK ASASI MANUSIA

IMPLEMENTATION OF THE HUMAN RIGHTS INITIATIVE

Perseroan menerapkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai sesuai dengan prinsip dasar ketenagakerjaan yang termuat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Prinsip ini diterapkan pada peraturan atau kebijakan tentang hak asasi manusia yang dimuat dalam Peraturan Direksi, Surat Edaran Direksi, dan Peraturan Perseroan. Di dalam peraturan tersebut, Perseroan menerapkan prinsip kesetaraan dari mulai penerimaan karyawan, program pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, pengembangan karir karyawan, hingga dalam pemberian remunerasi dan kesejahteraan karyawan tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan keberagaman lainnya.

The Corporation implements the principle of diversity and equality for all of its employees in accordance with the basic labor principles set out under Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. This principle is implemented through regulations and policies on human rights, as set out under Directors Regulation Circulars and Collective Labor Agreements. Through these regulations, the Corporation applies the principle of equality through recruitment, training programs, employee competency development and employee career development, through to remuneration and employee welfare, regardless of gender, religion, ethnicity, race or other diverse factors.

Terkait dengan remunerasi dan kesejahteraan karyawan, Perseroan menerapkan pola penghargaan yang adil dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi kepada seluruh karyawan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan keberagaman lainnya, melainkan berdasarkan pencapaian kinerja dan tanggung jawab jabatan yang diemban.

In relation to employee remuneration and welfare, the Corporation implements fair appreciation and identical treatment without discrimination among all employees, regardless of gender, ethnicity, race, religion, skin color or other diverse factors. Instead, performance achievements and job responsibilities are assessed.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK OPERASI YANG ADIL

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR FAIR OPERATIONS

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

COMMITMENT AND POLICY

ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial memberikan definisi operasi yang adil sebagai praktik yang mencakup anti korupsi, keterlibatan yang bertanggungjawab dalam politik, kompetisi yang adil, promosi tanggung jawab sosial dalam rantai pemasok (*supply chain*), serta penghargaan atas *property rights*.

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan Perseroan sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku termasuk di antaranya anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil, mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai, serta menghargai hak kepemilikan. Penerapan operasi yang adil tak lepas dari pengelolaan Perseroan yang dilandasi pada prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perseroan yang Baik, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan kesetaraan.

ISO 26000 on Social Responsibility Guidelines provides a definition of fair operations as practices that include: anti-corruption; responsible involvement in politics; fair competition; promotion of social responsibility within the supply chain; and awards for property rights.

Fair operations should emphasize the importance of managing the Corporation in accordance with applicable business ethics; including anti-corruption, involvement in responsible politics; fair competition; encouraging social responsibility across the value chain; and respect for ownership rights. The implementation of fair operations cannot be separated from the management of the Corporation, which should be based on basic principles of Good Corporate Governance, which include transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB ATAS OPERASI YANG ADIL

STAKEHOLDERS AND SCOPE OF RESPONSIBILITIES IMPACT UPON FAIR OPERATION

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan perseroan yang transparan, wajar, dan setara. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

- Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perseroan yang transparan dan akuntabel.
- Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan.
- Pelanggan/pengguna jasa dengan kepentingan atas pengelolaan jasa layanan yang bertanggung jawab.
- Regulator yang memiliki kepentingan atas industri yang stabil.

Fair operations mainly emphasize the importance of managing a transparent, fair and equitable corporation. Meeting aspects of fair operations involve the interests of various stakeholders, including:

- *Shareholders and their interests through transparent and accountable corporation management.*
- *Employees with an interest in a reasonable, fair work mechanisms that can be accounted for.*
- *Business partners and suppliers who have an interest in partnership processes that rely on transparency and fairness.*
- *Customers/service users with an interest in responsible service management.*
- *Regulators who have an interest in a stable industry.*

RENCANA DAN TARGET KEBIJAKAN PROGRAM

PROGRAM PLANS AND POLICY TARGETS

Sasaran dan target serta rencana penerapan tanggung jawab atas operasi yang adil ditekankan pada penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yang bersandar pada 2 (dua) tujuan utama, yaitu pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan pelibatan pemangku kepentingan untuk dapat tumbuh bersama. Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan penerapan GCG pada kedua aspek tersebut, dengan harapan mampu menciptakan operasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Objectives and targets, as well as plans for implementing responsibility for fair operations are emphasized in the implementation of Good Corporate Governance (GCG), which relies on 2 (two) main objectives, namely the fulfillment of compliance with applicable laws and regulations, as well as stakeholder involvement and the importance of being able to grow together. The Corporation strives to continuously improve the implementation of GCG in relation to both of these aspects, in the hope of being able to create fair and accountable operations.

PENERAPAN INISIATIF OPERASI YANG ADIL

IMPLEMENTATION OF THE FAIR OPERATION INITIATIVE

Perseroan memiliki Tata Kelola Organisasi yang telah menyesuaikan dengan iklim dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan dan pengawasan dijalankan dengan kelengkapan organ pendukung yang dapat memberikan kinerja yang optimal. Perseroan juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis bagi kinerja keberlanjutan Perseroan.

Kebijakan Perseroan dan kode etik disusun dan dilaksanakan untuk menciptakan operasi yang adil. Di samping itu, penerapan prinsip GCG seperti yang telah disampaikan dalam keseluruhan bagian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam laporan tahunan ini akan memperkuat aspek fundamental Perseroan yang akan berimbas pada nilai positif bagi keberlanjutan Perseroan.

The Corporation has an Organizational Governance that has adapted to the climate and the applicable laws and regulations. The duties and authority of the Board of Directors and Board of Commissioners in managing and supervising are carried out with the completeness of supporting organs that can provide optimal performance. The Corporation also holds General Meetings of Shareholders (GMS) as a forum through which shareholders can make strategic decisions in relation to Corporate sustainability.

The Corporation's policies and Code of Conduct were formulated and implemented in order to create fair operations. In addition, the implementation of the GCG principle, which is dealt with in the Good Corporate Governance section of this annual report, will strengthen the fundamentals of the Corporation and contribute positive values in relation to Corporate sustainability.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

BIDANG LINGKUNGAN (KOMITMEN UNTUK LINGKUNGAN HIDUP YANG HARMONI)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE ENVIRONMENT (COMMITMENT FOR A HARMONIOUS ENVIRONMENT)

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

COMMITMENT AND POLICY

Undang-undang dan beberapa peraturan seperti yang telah disebutkan di awal bab ini mengatur secara tegas dan definitif atas kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Kegiatan utama Perseroan sejak *groundbreaking* pada konstruksi bawah tanah di penghujung tahun 2013 hingga berakhirnya tahapan konstruksi berkaitan langsung dengan aspek lingkungan.

Kebijakan lingkungan Perseroan termasuk dalam Peraturan Direksi No. PER/065/BOD-MRT/X/2019 tentang Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Perkeretaapian, Lingkungan, dan Pengamanan). Adapun terkait dengan Sistem Manajemen Lingkungan tertuang dalam poin 4, 6, 7, 8, 9, dan 10 dari keseluruhan Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi.

Laws and regulations, as mentioned at the beginning of this chapter explicitly and definitively regulate business activities which are directly related to natural resources. The Corporation's main activities since the groundbreaking for underground construction at the end of 2013 until the end of the construction phase were directly related to environmental aspects.

The Corporation's environmental policy is included under Board of Directors Regulation No. PER / 065 / BOD-MRT / X / 2019 concerning the Integrated Management System Policy (Quality, Occupational Safety and Health, Railway Safety, Environment and Security). Meanwhile, related Environmental Management Systems can be found under points 4, 6, 7, 8, 9 and 10 of the overall Integrated Management System Policy.

KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (MUTU, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN PERKERETAAPIAN, LINGKUNGAN, DAN PENGAMANAN)

INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM POLICY (QUALITY, OCCUPATIONAL AND HEALTH SAFETY, RAILWAY OPERATIONS SAFETY, ENVIRONMENT, AND SECURITY)

Segep pimpinan dan karyawan Perseroan yang bergerak di bidang jasa transportasi publik memiliki komitmen untuk mewujudkan visi dan misi Perseroan dengan menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi sebagai berikut:

1. Mengedepankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan kepuasan pelanggan dalam pengelolaan perseroan;
2. Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Pengamanan serta Sistem Manajemen Mutu, terintegrasi sebagai upaya untuk mencapai *service and operational excellence*.
3. Melaksanakan Sistem Manajemen K3-KP dalam setiap aktivitas Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Memastikan Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Sistem Keselamatan Perkeretaapian pada fase konstruksi, fase operasi dan pemeliharaan, dan pengusahaan di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan standar internasional yang berlaku untuk prosedur keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan kondisi lingkungan kerja serta menjaga keselamatan pengguna jasa dan publik di lingkungan Perseroan;
 - c. Menyediakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta berkomitmen untuk menghilangkan setiap potensi bahaya K3 dan mengurangi risiko K3;
 - d. Mematuhi dan meningkatkan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh aktivitas Perseroan;
4. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dalam setiap aktivitas Perseroan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Mencegah pencemaran udara, air, tanah, dan lingkungan sekitar serta mengurangi dampak sosial akibat aktivitas Perseroan;
 - b. Mengelola limbah yang timbul akibat aktivitas Perseroan dengan implementasi program 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*);
 - c. Melakukan pengawasan dampak lingkungan secara rutin dan konsisten;
 - d. Melestarikan lingkungan dan mengantisipasi dampak pemanasan global dengan konservasi air dan energi, mengefisienkan penggunaan sumber daya alam dan energi, dan meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan;
 - e. Mengelola partisipasi masyarakat dan melakukan pemberdayaan pengguna jasa untuk meningkatkan kesadaran mengelola lingkungan;

All Leaders and Employees of the Corporation engaged in the field of public transportation services are committed to realizing the Vision and Mission of the Corporation through the establishment of the Integrated Management System Policy, as follows:

1. *Prioritizing Good Corporate Governance and customer satisfaction in managing the corporation;*
2. *Implementing Occupational Safety and Health Management Systems, Railway Safety Management Systems, Environmental Management Systems, Security Management Systems and Quality Management Systems, integrated in an effort to achieve service and operational excellence.*
3. *Implementing the K3-KP Management System across all of the corporation's activity with the following objectives:*
 - a. *Ensuring the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System and Railway Safety System during the construction, operation and maintenance phases, and during operations of the PT MRT Jakarta (Perseroda) environment in accordance with applicable Indonesian laws and regulations and international standards on occupational health and safety procedures;*
 - b. *Improving protection for workers and other persons in the workplace in relation to safety, health and working environment conditions, as well as maintaining the safety of passengers and the public in relation to the Corporation;*
 - c. *Providing a safe, efficient and productive work environment in order to prevent work accidents and occupational diseases, and commitment to eliminating any potential OSH hazards and reducing OSH risks;*
 - d. *Compliance with and improving the culture of occupational health and safety across all corporation activities;*
4. *Implementing the Environmental Management System across all every corporation activity with the following objectives:*
 - a. *Preventing the pollution of air, water, soil and the surrounding environment and reducing social impacts due to corporation activities;*
 - b. *Managing waste arising from corporation activities by implementing the 3R (Reduce-Reuse-Recycle) program;*
 - c. *Monitoring environmental impacts regularly and consistently;*
 - d. *Conserving the environment and anticipating the effects of global warming by conserving water and energy, making efficient use of natural resources and energy, and increasing the use of renewable energy sources;*
 - e. *Managing community participation and empowering service users to increase awareness of managing the environment;*

5. Mengimplementasikan Sistem Manajemen Pengamanan yang efektif di seluruh area Perseroan untuk memastikan penyediaan tempat kerja yang aman dan perlindungan aset;
 6. Mengembangkan kompetensi sumber daya manusia dan sumber daya perkeretaapian pada khususnya untuk memenuhi standar yang ditetapkan perundang-undangan dan standar internasional yang relevan secara konsisten dalam semua aspek terkait K3-KP, Lingkungan, Pengamanan, dan Mutu;
 7. Mematuhi seluruh persyaratan hukum dan peraturan perundangan Indonesia serta standar internasional yang berlaku untuk K3-KP, Lingkungan, Pengamanan dan Mutu;
 8. Secara berkelanjutan meningkatkan Integrasi Sistem Manajemen Mutu, K3-KP, Lingkungan, dan Pengamanan di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda) menuju "Zero Accident, Zero Defect, Zero Delay and Zero Discharge"
 9. Menetapkan indikator kinerja terkait K3-KP, Lingkungan, Pengamanan, dan Mutu, di seluruh aktivitas Perseroan secara terintegrasi;
 10. Memastikan ketersediaan sumber daya Perseroan untuk melaksanakan kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi untuk mencapai kinerja yang optimal.
5. *Implementing the Security Management System effectively in all areas of the corporation to ensure the provision of a safe workplace and asset protection;*
 6. *Developing human-resource competencies and railway resources in particular to meet the standards set by the law and relevant international standards in a consistent manner across all aspects relating to K3-KP, Environment, Security and Quality;*
 7. *Complying with all Indonesian law and regulatory requirements and international standards that apply to K3-KP, Environment, Safety and Quality;*
 8. *Continuously increasing the Integration of the Quality Management System, K3-KP, Environment and Security within the PT MRT Jakarta (Perseroda) Environment in relation to "Zero Accident, Zero Defect, Zero Delay and Zero Discharge"*
 9. *Establishing indicators relating to K3-KP, Environment, Security and Quality across all corporation activities in an integrated manner;*
 10. *Ensuring the support of corporation resources during the implementation of the Integrated Management System policy to achieve optimal*

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN DAMPAK TANGGUNG JAWAB ATAS LINGKUNGAN HIDUP STAKEHOLDERS AND IMPACTS ON ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

Kegiatan operasi dan bisnis Perseroan berupaya memperhatikan kebutuhan hidup manusia, di mana lingkungan menjadi bagian dari keseluruhan ekosistem. Sebagai perusahaan penyedia jasa layanan transportasi publik, menekankan pada pentingnya pengelolaan lingkungan di sekitar lokasi Perseroan, serta dampak lingkungan yang terjadi kepada masyarakat sekitar.

The operations and business activities of the Corporation seek to pay attention to the needs of human life, where the environment is part of the entire ecosystem. As a public transportation corporation, the Corporation emphasizes the importance of environmental management around its business locations, as well as the environmental impact upon the surrounding people.

RENCANA DAN TARGET KEBIJAKAN PROGRAM PROGRAM PLANS AND POLICY TARGETS

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi poin 8, tujuan dari penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi salah satunya adalah menuju *Zero Discharge*. Adapun beberapa program dan indikator keberhasilan Perseroan untuk mencapai *Zero Discharge* ini adalah tertuang dalam Tabel 7.4.

As stated in point 8 of the Integrated Management System Policy, the purpose of implementing the Integrated Management System is the achieving of Zero Discharge. Some of the programs and indicators of Corporate success in relation to said Zero Discharge are shown in Table 7.4.

PROGRAM DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PERSEROAN DALAM PENCAPAIAN ZERO DISCHARGE

Programs and Indicators of Corporate Success in the Achieving of Zero Discharge

| Program | Indikator Keberhasilan Success Indicators |
|--|--|
| Penyusunan dan pelaporan implementasi RKL-RPL pada kegiatan operasional MRT Fase I (Lebak Bulus – Bundaran HI) per semester <i>Preparation and reporting of RKL-RPL implementation in Phase I MRT operational activities (Lebak Bulus – Bundaran HI) every semester</i> | Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>In accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management</i> |
| Penyusunan dan pelaporan implementasi RKL-RPL pada kegiatan konstruksi MRT Fase IIA per 3 bulan <i>Preparation and reporting of RKL-RPL implementation in Phase IIA MRT construction activities every 3 months</i> | Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>In accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management</i> |
| Pengukuran contoh efluen air limbah setiap bulan ke laboratorium terakreditasi dan per 3 bulan ke Dinas LH <i>Measurement of wastewater effluent samples every month by an accredited laboratory and every 3 months by the Department of the Environment</i> | Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>In accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management</i> |
| Pelaporan festronik limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) per 3 bulan <i>Reporting on B3 waste every 3 months</i> | Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>In accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management</i> |
| Penyusunan Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk seluruh STP dan IWWTP <i>Preparation of Wastewater Management Permits (IPAL) for all STP and IWWTP</i> | Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <i>In accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management</i> |

Tabel 7.4
Table 7.4

Mengurangi emisi CO2 merupakan salah satu bentuk fokus Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari Perseroan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan selalu mentaati perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan selalu memenuhi kesepakatan tertentu sesuai dengan perizinan yang ada.

Reducing CO2 emissions is one of the focuses of the Corporation's Corporate Social Responsibility. In carrying out its business activities, the Corporation always abides by the regulations concerning the environment and always fulfills specific agreements in accordance with the existing laws.

Perseroan melengkapi fasilitas operasional dengan standar yang telah ditentukan oleh regulator untuk tetap menjaga lingkungan dan mempekerjakan sumber daya manusia untuk memantau kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup yang ditetapkan. Kegiatan pengelolaan limbah terutama sekali melibatkan pemantauan dan pembuangan limbah padat dan limbah cair.

The Corporation complements standards operational facilities which have been determined by regulators to preserve the environment and employs human resources to monitor compliance with established environmental standards. Waste management activities primarily involve the monitoring and disposal of solid and liquid waste.

Pada area kantor, stasiun, dan depo sudah disediakan tempat sampah yang memisahkan jenis sampah secara jelas bagi karyawan dan pengguna jasa serta turut aktif dalam mengampanyekan untuk lebih mencintai dan memelihara lingkungan hidup dengan membuang sampah pada tempatnya.

Within office, station and depot areas, bins are provided which clearly separate waste from employees and passengers and a campaign to love and care for the environment by disposing of trash properly is also being implemented.

PENERAPAN INISIATIF DAN PROGRAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

APPLICATION OF ENVIRONMENTAL INITIATIVES AND PROGRAMS

PENGGUNAAN MATERIAL DAN ENERGI

USE OF MATERIALS AND ENERGY

Material merupakan bahan-bahan/materi-materi dasar yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan. Perseroan memiliki kebijakan terkait penggunaan material dan energi yang efisien serta berorientasi pada dampak lingkungan.

Materials are basic compounds that are used in order to carry out activities. The Corporation has policies relating to the use of materials and energy, which should be efficient and oriented towards environmental impact.

PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK

ELECTRIC ENERGY USAGE

Kegiatan Operasi Kereta/Rolling Stock

Train/Rolling Stock Operations Activity

Energi listrik yang digunakan oleh Perseroan dibedakan menjadi daya traksi dan non-traksi. Daya traksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan traksi pada kereta/rolling stock, sedangkan daya non traksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik gedung stasiun, depo, dan workshop. Perseroan memiliki kebijakan terkait penggunaan energi yang efisien serta berorientasi pada dampak lingkungan. Tahun pertama operasi Fase 1 MRT Jakarta, yakni tahun 2019, merupakan tahap inventarisasi data dan penancangan kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk meraih Zero Discharge. Pada tahun selanjutnya dilakukan program penerapan efisiensi energi sehingga dapat dilakukan analisis persentase penurunan dengan membandingkan data tahun tersebut dengan data tahun 2019. Tabel 2 merupakan data total penggunaan energi listrik selama tahun 2019 beserta konversi emisi CO₂ yang dihasilkan. Perhitungan emisi CO₂ menggunakan faktor konversi on grid 0.877 kg/ kWh (ESDM, 2018).

The electrical energy used by the Corporation is divided into traction power and non-traction power. Traction power is used to meet traction needs for trains/rolling stock, while non-traction power is used to meet the electricity needs of station buildings, depots and workshops. The Corporation implements a policy on the use of energy in an efficient way that is oriented towards environmental impacts. The year 2019, which was the first year for MRT Jakarta Phase I operations, was the stage used to develop a data inventory and for the launching of environmental policies aimed at achieving Zero Discharge. During the following year, an energy efficiency application program will be implemented so that a percentage reduction analysis can be completed by comparing the year's data with 2019 data. Table 7.5. sets out total data on electricity usage during 2019 along with the conversion of CO₂ emissions produced, calculations of the conversion of CO₂ emissions produced, and calculations of CO₂ emissions using an on-grid conversion factor of 0.877 kg/kWh (The Ministry of Energy and Mineral Resources, 2018).

TOTAL PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK TRAKSI, NON-TRAKSI, DAN KONVERSI EMISI CO₂

Total Electricity Traction Usage, Non-Traction Energy and CO₂ Emissions Conversion

| Bulan Month | Daya Traksi Traction Power (kWh) | Daya Non-Traksi/ER Non-Traction Power / ER (kWh) | Faktor Emisi Emissions Factor (kg/ kWh) | Emisi GRK dari Daya Traksi GHG Emissions from Traction Power (tCO ₂) |
|-------------------|--|--|---|---|
| Maret March | 10.383 | - | 0,877 | 9 |
| April April | 1.462,20 | 1.525.214 | 0,877 | 1.250 |
| Mei May | 2.011.800 | 3.412.477 | 0,877 | 1.764 |
| Juni June | 1.683.700 | 3.492.165 | 0,877 | 1.476 |
| Juli July | 1.826.700 | 3.260.363 | 0,877 | 1.602 |
| Agustus August | 1.771.500 | 3.200.108 | 0,877 | 1.553 |

| Bulan Month | Daya Traksi Traction Power (kWh) | Daya Non-Traksi/ER Non-Traction Power / ER (kWh) | Faktor Emisi Emissions Factor (kg/ kWh) | Emisi GRK dari Daya Traksi GHG Emissions from Traction Power (tCO2) |
|------------------------|--|--|---|--|
| September September | 1.734.900 | 3.185.892 | 0,877 | 1.521 |
| Oktober October | 1.807.600 | 3.255.862 | 0,877 | 1.585 |
| November November | 1.853.900 | 3.347.373 | 0,877 | 1.625 |
| Desember December | 1.828.000 | 3.605.387 | 0,877 | 1.603 |
| Total | 15.954.683 | 28.294.861 | - | 13.988 |

Tabel 7.5
Table 7.5

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan selama satu tahun beroperasi (Maret – Desember 2019) sebesar 13,988 ton CO2. Adapun selanjutnya terkait dengan mitigasi GRK dibutuhkan perhitungan emisi moda *shift* untuk mengetahui penurunan emisi yang dihasilkan dengan adanya perpindahan moda ke MRT Jakarta.

Greenhouse Gas (GHG) emissions produced during one year of operations (March - December 2019) amounted to 13,988 tons of CO2. Furthermore, in relation to GHG mitigation, a shift mode emissions calculation is needed to find out the emissions reduction generated by the change of mode to the Jakarta MRT.

KEGIATAN OPERASIONAL KANTOR

Office Operations

| Jenis Energi Type of Energy | 2019 | | 2018 | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|---|------------|
| | kWh/ Liter | Rupiah | kWh/ Liter | Rupiah | Jumlah | Percentase |
| | | | | | Amount | Percentage |
| | | | | | (%) | |
| Listrik (kWh) Electricity | 452.834 | 504.792.061 | 343.482 | 382.893.591 | 121.898.470 | 13,73% |
| BBM (liter) Fuel | 95.234 | 857.106.095 | 56.417 | 507.756.850 | 349.349.245 | 25,60% |

Tabel 7.6
Table 7.6

Terjadi kenaikan jumlah pemakaian listrik dan bahan bakar minyak (BBM) yang digunakan selama tahun 2019 dibandingkan tahun 2018. Hal ini terjadi karena banyaknya waktu *overtime* atau lembur karyawan pada Q1 tahun 2019 dalam rangka persiapan operasi MRT Jakarta. Di samping itu, kenaikan BBM terjadi karena penambahan unit kendaraan operasional dari 32 menjadi 44 kendaraan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional karyawan, baik di Kantor Pusat (Wisma Nusantara) dan Depo Lebak Bulus yang berjalan selama 24 jam (3 *shift*).

The amount of electricity and fuel (BBM) used increased during 2019 compared to 2018, due to workload and the impact of employee overtime in Q1 2019 as preparations got underway for the operation of MRT Jakarta. In addition, the increase in fuel occurred due to an increase in operational vehicle units from 32 to 44 vehicles, which were needed to support the operational activities of employees, both at the Head Office (Wisma Nusantara) and Lebak Bulus Depot, which runs for 24 hours (3 shifts).

PENGELOLAAN LIMBAH

WASTE MANAGEMENT

Limbah dikategorikan sebagai bahan surplus, didefinisikan baik sebagai bahan usang yang sudah tidak dapat digunakan oleh Perseroan karena perubahan dalam prosedur operasional atau bahan melebihi jumlah wajar yang diperlukan. Limbah dapat digambarkan seperti kertas yang terbuang, limbah B3, limbah non B3, atau bentuk-bentuk lainnya yang tersisa dan terbuang dari kegiatan usaha. Perseroan secara khusus menekankan pentingnya pengolahan limbah dalam pengoperasian MRT Jakarta.

Waste is categorized as surplus material, defined either as obsolete material that can no longer be used by the Corporation because of changes in operational procedures or materials that exceed the required amount. Waste can be defined as waste paper, B3 waste, non-B3 waste or other forms of waste that result from business activities. The Corporation specifically emphasizes the importance of waste treatment during the operations of MRT Jakarta.

PENGELOLAAN LIMBAH NON B3

NON-B3 WASTE MANAGEMENT

Perseroan menerapkan konsep 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*), sehingga diharapkan limbah yang dihasilkan tidak menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa proses pengolahan. Tabel 7.7. menunjukkan banyaknya sampah dari keseluruhan stasiun dan depo yang dibedakan menjadi organik dan anorganik. Pada awal operasi MRT Jakarta, masih terdapat sampah campuran. Berdasarkan konsep 3R ditekankan pemilahan di awal pengumpulan sampah, maka dapat dilihat pada tabel di bawah pemilahan sampah campuran menjadi sampah organik dan anorganik berjalan efektif mulai bulan September. Pada bulan Desember, jumlah sampah campuran menurun dan terbagi ke dalam sampah organik dan anorganik hingga menjadi 0 kg.

The Corporation applies the concept of 3R (Reduce-Reuse- Recycle) so that waste does not accumulate in the form of landfill (TPA) without any processing. Table 7.7. shows the amount of waste from all stations and depots, which has been divided into organic and inorganic. At the start of the operations of MRT Jakarta, there was still mixed waste being produced. Based on the 3R concept, an initial selection was emphasized for waste collection. As can be seen in the table below, the separation of mixed waste into organic and inorganic waste has been performed effectively since September, resulting in a decline in mixed waste and separation into organic and inorganic waste, until mixed waste ultimately dropped to 0 kg in December.

Konsep 3R yang telah diterapkan di Perseroan antara lain *Reduce*: Pembuatan dan pengiriman IOM (*Internal Office Memorandum*) melalui *e-Office*, serta penyediaan makanan/kudapan prasmanan ketika terdapat acara/pelatihan; *Reuse*: Penyediaan air minum isi ulang dan gelas untuk karyawan, serta tidak lagi dilakukan penyediaan air minum dalam kemasan; serta *Recycle*: Pengolahan daun kering dan sisa makanan menjadi pupuk, sisa makanan menjadi pakan ternak, serta limbah kardus, plastik, dan kaleng dibawa ke perusahaan pemanfaat untuk pengolahan lanjutan.

The 3R concept applied by the Corporation includes Reduce: making and sending of IOM (Internal Office Memoranda) via e-Office, as well as the provision of food/snacks in a buffet-style whenever there are events/training; Reuse: provision of refillable drinking vessels and glasses for employees, and no more provision of bottled drinking water; and Recycle: conversion of dry leaves and food scraps into fertilizer and food scraps into animal feed, with waste cardboard, plastics and cans being brought to the utility company for further processing. and cans brought to the utility company for further processing.

BANYAKNYA SAMPAH DARI KESELURUHAN STASIUN DAN DEPO

Amount of Waste From Entire Stations and Depots

| Bulan Month | Banyaknya Sampah Waste Amount (kg) | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | Organik Organic | Anorganik Anorganic | Campuran Mixed |
| April April | 3.749,9 | 3.391 | 7.995,5 |
| Mei May | 2.282 | 3.325 | 11.319 |
| Juni June | 1.578 | 2.454 | 17.124 |

| Bulan Month | Banyaknya Sampah Waste Amount (kg) | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | Organik Organic | Anorganik Anorganic | Campuran Mixed |
| Juli July | 1.679 | 2.759 | 18.935 |
| Agustus August | 3.786 | 4.381 | 13.516 |
| September September | 10.338 | 11.421 | 1.615 |
| Oktober October | 15.119 | 14.526 | 3 |
| November November | 14.825 | 13.818 | 3 |
| Desember December | 16.645 | 14.057 | 0 |
| Total | 700.819,9 | 70.132 | 70.510,5 |

Tabel 7.7
Table 7.7

Pembuangan limbah cair ke dalam drainase umum harus melewati serangkaian pengukuran dan pengolahan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), agar limbah cair tidak menimbulkan dampak lingkungan yang negatif. Tahapan seperti pengendapan air limbah ke dalam tangki sedimentasi menjadi salah satu proses dalam IPAL yang dikelola oleh pihak ketiga. Perseroan saat ini memiliki 25 Sewage Treatment Plant (STP) yang tersebar di stasiun dan Depo serta 1 Industrial Wastewater Treatment Plant (IWWTP) yang terletak di Depo Lebak Bulus untuk pengolahan limbah cair. Perseroan berupaya untuk memenuhi baku mutu lingkungan agar aman sebelum pembuangan ke drainase umum.

Adapun untuk pengelolaan limbah B3, Perseroan juga memastikan limbah termanfaatkan sesuai jenisnya dan tercatat dalam manifest limbah B3, baik manual maupun elektronik, yang dilaporkan secara rutin ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setiap 3 bulan.

The disposal of wastewater into public drainage systems must pass through a series of measurements and processing technology Wastewater Treatment Plants (WWTP), so that liquid waste does not cause negative environmental impacts. Stages such as the depositing of waste water into sedimentation tanks into one process in WWTP managed by third parties have been introduced. The Corporation currently operates 25 Sewage Treatment Plants (STP) spread across the stations and depot and 1 Industrial Wastewater Treatment Plant (IWWTP) for wastewater treatment located in Depot Lebak Bulus. The Corporation continues to strive for the fulfillment of environmental standards in order to secure prior discharge into public drainage

As for B3 waste management, the Corporation also ensures that said waste is utilized according to each type and recorded in the manifest for B3 waste (both manual and electronic), as well as reported regularly to the Ministry of Environment and Forestry every 3 months.

PEMANFAATAN AIR DALAM KEGIATAN OPERASI

UTILIZATION OF WATER IN OPERATIONS

Air bersih yang digunakan oleh Perseroan untuk operasi di stasiun dan depo adalah air bersih yang berasal dari PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Terkait dengan pemanfaatan air dalam kegiatan operasi stasiun, Perseroan juga berkomitmen dalam program minimalisasi sampah botol plastik air minum melalui kerja sama dengan Palyja dalam penyediaan *drinking fountain*/keran air siap minum. Dua keran air

Clean water used by the Corporate for operations at stations and depots is clean water from PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Related to the utilization of water in the station's operational activities, the Corporate is also committed in reducing the use of plastic bottle through synergy with Palyja by providing two water fountain in Dukuh Atas and Blok M Station. In addition, the Corporate also conducts reuse activities from the IWWTP

dapat ditemukan di Stasiun Dukuh Atas dan Stasiun Blok M yang telah beroperasi dari bulan April 2019. Selain itu, Perseroan juga melakukan kegiatan *reuse* dari hasil pengolahan IWWTP di mana air bersih hasil olahan digunakan untuk pencucian kereta di Depo Lebak Bulus.

processing, whereby processed clean water is used for train washing at the Lebak Bulus Depot.

PEMENUHAN PERIZINAN LINGKUNGAN

COMPLIANCE WITH ENVIRONMENTAL PERMITS

Perseroan telah memiliki perizinan di bidang lingkungan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 157 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan. Termasuk—dan yang terpenting—analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memberikan dasar bagi Perseroan untuk dapat melakukan seluruh proses pembangunan proyek MRT Jakarta.

The Corporation is obliged to fulfill all regulations and legislation relating to business licenses and environmental management in accordance with Law No. 32 of 2009 concerning environmental Protection and Management, Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits and DKI Jakarta Governor's Regulation No. 157 of 2013 concerning Environmental Permits. Including - most importantly - creation of an Environmental Impact Analysis (AMDAL) which provided the basis upon which the Corporation was able to carry out the entire process of MRT construction.

PENANAMAN POHON KEMBALI

REPLANTING TREES

Konstruksi *Diaphragm Wall* (Dinding Penahan Tanah) untuk Pembangunan Gardu Listrik (RSS) Bawah Tanah Fase 2 MRT Jakarta di Kawasan Monumen Nasional (Monas) membutuhkan penebangan dan relokasi pohon sebanyak total 92 pohon, dengan rincian relokasi/pemindahan sebanyak 32 pohon dan penebangan sebanyak 60 pohon. Proses perizinan untuk pemindahan maupun pemotongan pohon adalah dengan mengajukan izin kepada Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta. Adapun rekomendasi relokasi dan penebangan pohon tersebut berdasarkan kepada:

1. Surat Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala PTSP No. 3112/-1.795.252 tanggal 9 Mei 2019 tentang "Rekomendasi dan Relokasi Pohon".
2. Surat Izin Penebangan Pohon Pelindung Nomor 5/C.9/31.71.01.1001/-1.795.25/2019 dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gambir tanggal 10 Mei 2019
3. Surat dari Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas No.2.293/-1.795.222 tanggal 17 Mei 2019 tentang "Penebangan dan Penggantian Pohon".
4. Hasil Survei Lapangan dengan Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta dan UPK Monas tanggal 16 April 2019

The construction of the Diaphragm wall for the Receiving Sub Station (RSS) located at Monumen Nasional (Monas) required tree cutting/relocation, specifically some 32 trees had to be relocated and 60 trees had to be felled, which resulted in a total of 92 trees being impacted. The permit process for moving or cutting trees is completed by submitting applications to the One-Stop Integrated Service Implementation Unit (PTSP) and by obtaining a recommendation from the DKI Jakarta Provincial Forestry Service. Relocation and logging trees recommendations are based on:

1. Surat Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta to the Head of PTSP No. 3112 / -1,795,252 dated 9 May 2019 concerning "Tree Recommendations and Relocation".
2. Surat Izin Penebangan Pohon Pelindung Number 5 / C.9 / 31.71.01.1001 / -1.795.25 / 2019 from the One-Stop Integrated Service Implementing Unit of Gambir Village on May 10, 2019
3. Surat dari Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas No.2293 / -1.795.222 dated May 17, 2019 concerning "Logging and Replacing Trees".
4. Results of a Field Survey conducted with the DKI Jakarta Provincial Forestry Service and Monas UPK on April 16, 2019.

Dasar dilakukannya penggantian atau penanaman pohon kembali adalah berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Bab III Pasal 12 point G mengenai memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau, dan taman.
2. Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2002.

The basis for replacing or replanting trees comprised:

1. DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2007 concerning Public Order Chapter III Article 12 point G on cutting, cutting down trees or plants growing along roads, green belt and parks.
2. Decree of the Head of the Jakarta Provincial Parks Department Number 9 of 2002.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertamanan Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2002 Bab V mengenai penggantian pohon dijelaskan bahwa pohon dan tanaman hias milik Pemerintah Daerah Khusus

Based on the Decree of the Head of the Jakarta Provincial Parks Department Number 9 of 2002 Chapter V regarding tree replacement, it was explained that any trees and ornamental plants owned by the Government of the Special

Ibukota Jakarta yang ditebang wajib untuk diganti dengan ketentuan 1 (satu) pohon milik Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditebang maka harus diganti oleh pemohon sebanyak 10 (sepuluh) pohon. Oleh karena itu, untuk konstruksi *Diaphragma Wall* (Dinding Penahan Tanah) untuk pembangunan Gardu Listrik (RSS) Bawah Tanah Fase 2 MRT Jakarta di Kawasan Monumen Nasional (Monas) dilakukan penggantian pohon sebanyak 920 pohon, dengan rincian sebagai berikut :

1. 400 pohon Tabebuaya Pink
2. 400 pohon Tabebuaya Ungu
3. 120 pohon Cemara Norflok

Adapun lokasi penanaman pohon kembali adalah sebagai berikut :

1. Sisi Utara Monas: Pohon Tabebuaya (232 pohon)
2. Sisi Timur Monas: Pohon Tabebuaya (147 pohon)
3. Sisi Selatan Monas: Pohon Tabebuaya (140 pohon);
Pohon Cemara (50 pohon)
4. Sisi Barat Monas: Pohon Tabebuaya (281 pohon);
Pohon Cemara (70 pohon)

Berikut *mapping* lokasi dan jumlah pohon pengganti yang telah ditanam dan telah dilaksanakan pemeriksaan bersama dengan UPK Monas dengan Berita Acara Pekerjaan Penanaman Pohon Pengganti tanggal 11 September 2019.

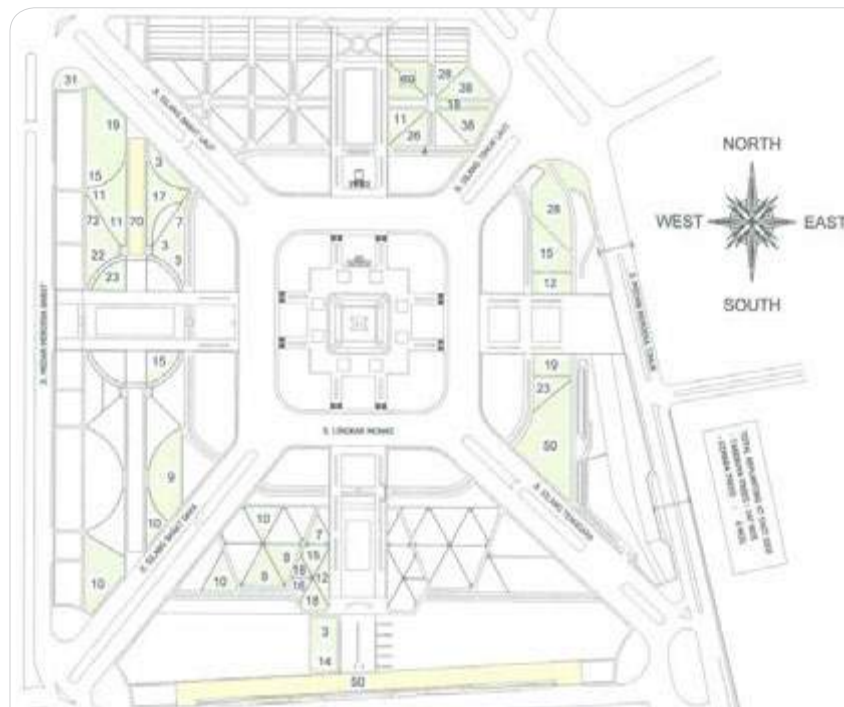
Capital Region of Jakarta that are removed due to the project shall be replaced, with the provision that 1 (one) tree belonging to the Government of the Special Capital Region of Jakarta that is felled must be replaced with 10 (ten) trees. Therefore, for the Construction of the Diaphragm wall for the Receiving Sub Station of Jakarta MRT located in Monumen Nasional (Monas), a total of 920 trees were replaced, as follows:

1. 400 Pink Tabebuaya trees
2. 400 Purple Tabebuaya trees
3. 120 Cemara Norflok trees

The locations for the replanting of trees were as follows:

1. North side of Monas: Tabebuaya Tree (232 trees)
2. East side of Monas: Tabebuaya Tree (147 trees)
3. South Side of Monas: Tabebuaya Tree (140 trees);
Fir Tree (50 trees)
4. West side of Monas: Tabebuaya Tree (281 trees);
Fir Tree (70 trees)

The following diagram is a map of the location and the number of replacement trees that have been planted and which have been inspected and approved by UPK Monas through the Official Report on the Planting of Replacement Trees on September 11, 2019.



Legend:
 : Replanting Tabebuaya Trees
 : Replanting Cemara Trees

Note
 - Tabebuaya trees : 800 NOS
 - Cemara trees : 120 NOS
 - Total of trees : 920 NOS

Gambar 7.2
Image 7.2



Gambar 7.3. Survei Pemotongan Pohon dengan Dinas Kehutanan dan UPK Monas
Image 7.3. Tree Cutting Survey with the Forestry Service and Monas UPK



Gambar 7.4. Pembersihan Area Setelah Konstruksi dan Penanaman Pohon Kembali
Image 7.4. Clearing the Area after Construction and Replanting

• Pemantauan Dampak Lingkungan

Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan memiliki komitmen untuk melakukan pemantauan dampak lingkungan dari keberadaan pembangunan proyek MRT Jakarta; baik sebelum adanya pembangunan proyek maupun saat proyek berjalan. Perseroan mewajibkan seluruh kontraktor untuk melakukan pemantauan dan pengukuran dampak lingkungan yang mencakup pengukuran kualitas udara ambien, pengukuran kebisingan, pengukuran getaran, pengukuran kualitas air bersih, dan pengukuran kualitas air limbah domestik. Pemantauan dan pengukuran dilakukan secara berkala, yaitu:

- » Pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien di setiap bulannya.
- » Pemantauan dan pengukuran kebisingan, getaran, kualitas air bersih, dan pengukuran kualitas air limbah domestik dilakukan secara periodik 3 (tiga) bulan sekali.
- » Pemantauan air limbah proyek dilakukan setiap bulan.

Di samping itu, pemantauan terhadap Greenhouse Gas (GHG) Emissions, atau Emisi Gas Rumah Kaca juga dilakukan pada proyek pembangunan MRT Jakarta. Pemantauan terhadap GHG dilakukan di seluruh Paket Kontrak pembangunan proyek, dan diterapkan sepanjang tahun untuk melihat tingkat pembuangan emisi dari aktivitas pembangunan konstruksi.

• Environmental Impact Monitoring

In accordance with applicable laws and regulations, the Corporation has made a commitment to monitoring the environmental impact of the development of the Jakarta MRT project; both before the project's commencement and during its running. The Corporation requires all contractors to carry out the monitoring and measurement of environmental impacts, which include measurements of ambient air quality, noise measurements, vibration measurements, measurements of clean water quality and measurements of domestic wastewater quality. Monitoring and measurements are carried out regularly, as follows:

- » Monitoring and measuring ambient air quality every month.
- » Monitoring and measuring noise, vibration, clean water quality and measuring the quality of domestic wastewater are conducted periodically every 3 (three) months.
- » Project wastewater monitoring is carried out ever month.

In addition, the monitoring of Greenhouse Gases (GHG) was also carried out during the Jakarta MRT construction project. GHG monitoring is carried out throughout all contract packages for project development, and is implemented throughout the year in order to gauge the levels of emissions discharged during construction activities.

Penilaian atas pemantauan dampak lingkungan di atas berguna bagi evaluasi kinerja pembangunan proyek MRT Jakarta dan meminimalisir dampaknya terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Kegiatan pemantauan ini dapat memberikan masukan bagi Perseroan untuk mengambil tindakan penanganan yang diperlukan agar dapat mencegah dampak lingkungan hidup yang negatif dari proyek MRT Jakarta.

The assessment of environmental impact monitoring above will be used to evaluate the performance of the MRT Jakarta project development and to minimize its impact on the surrounding environment. These monitoring efforts can provide input for the Corporation relating to the taking of necessary measures in order to prevent negative environmental impacts due to the MRT Jakarta project.

Hasil pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan di antaranya pemantauan polusi udara, polusi air, polusi tanah, polusi suara/kebisingan, dan lain-lain.

The results of the monitoring of environmental impacts include air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, etc.

Perseroan telah mematuhi regulasi yang ada terkait monitoring partikel yang dihasilkan dari kegiatan konstruksi. Hal ini diatur sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja. Berikut adalah tabel monitoring udara, kebisingan, air bersih, dan vibrasi di beberapa titik sepanjang lintasan jalur MRT Jakarta (at grade):

The Corporation is in compliance with existing regulations regarding the monitoring of particles produced during construction activities. This is in accordance with Minister of Manpower and Transmigration Regulation PER. 13 / MEN / X / 2011 concerning Threshold Values for Physical Factors and Chemical Factors within the Workplace. The following tables address the monitoring of air, noise, clean water and vibration at several points along the MRT Jakarta lines (at grade):

PEMANTAUAN KUALITAS UDARA HASIL DARI SAMPLING LABORATORIUM PADA STASIUN LEBAK BULUS

Air Monitoring of Laboratory Sampling Results at Lebak Bulus Station

| No. | Parameter Parameter | Baku Mutu Quality Standard | Satuan Unit | Hasil Results | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|------------------|-------|---|---------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah Amount | Persentase Percentage (%) |
| 1 | Sulfur Dioksida (SO ₂) Sulfur Dioxide (SO ₂) | 900 | µg/Nm ³ | 45 | 45 | 0 | 0,00% |
| 2 | Karbon Monoksida (CO) Carbon Monoxide (CO) | 26 | µg/Nm ³ | 5,155 | 4,812 | 343 | 7,13% |
| 3 | Nitrogen Dioksida (NO ₂) Nitrogen Dioxide (NO ₂) | 400 | µg/Nm ³ | 42 | 40 | 2 | 5,00% |
| 4 | Oksidan (O ₃) Oxydant (O ₃) | 200 | µg/Nm ³ | 47 | 45 | 2 | 4,44% |
| 5 | Hidrokarbon (HC) Hydrocarbons (HC) | 160 | µg/Nm ³ | 115 | 125 | -10 | -8,00% |
| 6 | Debu (TSP) Dust (TSP) | 230 | µg/Nm ³ | 187 | 179 | 8 | 4,47% |
| 7 | Timbal (Pb) Lead (Pb) | 2 | µg/Nm ³ | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,00% |

Tabel 7.8
Table 7.8

PEMANTAUAN UDARA HASIL SAMPLING LABORATORIUM JALAN FATMAWATI

Air Monitoring of Laboratory Sampling Results from Jalan Fatmawati

| No. | Parameter Parameter | Baku Mutu Quality Standard | Satuan Unit | Hasil Results | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|------------------|------|---|---------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah Amount | Persentase Percentage (%) |
| 1 | Sulfur Dioksida (SO ₂) Sulfur Dioxide (SO ₂) | 900 | µg/Nm ³ | 43 | 40 | 3 | 7,50% |
| 2 | Karbon Monoksida (CO) Carbon Monoxide (CO) | 26000 | µg/Nm ³ | 5041 | 4239 | 802 | 18,92% |
| 3 | Nitrogen Dioksida (NO ₂) Nitrogen Dioxide (NO ₂) | 400 | µg/Nm ³ | 49 | 45 | 4 | 8,89% |
| 4 | Oksidan (O ₃) Oxydant (O ₃) | 200 | µg/Nm ³ | 52 | 47 | 5 | 10,64% |
| 5 | Hidrokarbon (HC) Hydrocarbons (HC) | 160 | µg/Nm ³ | 102 | 130 | -28 | -21,54% |
| 6 | Debu (TSP) Dust (TSP) | 230 | µg/Nm ³ | 191 | 190 | 1 | 0,53% |
| 7 | Timbal (Pb) Lead (Pb) | 2 | µg/Nm ³ | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 25,00% |

Tabel 7.9
Table 7.9

PEMANTAUAN KEBISINGAN (STASIUN LEBAK BULUS DAN JALAN FATMAWATI)

Noise Monitoring (Lebak Bulus Station and Jalan Fatmawati)

| No. | Parameter Parameter | Baku Mutu Quality Standard | Satuan Unit | Hasil Results | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|-----|--|----------------------------------|----------------|------------------|------|---|---------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah Amount | Persentase Percentage (%) |
| 1 | Stasiun Lebak Bulus Lebak Bulus Station | 85 | dB (A) | 54 | 66 | -12 | -18,18% |
| 2 | Jalan Fatmawati | 85 | dB (A) | 76 | 75 | 1 | 1,33% |

Tabel 7.10
Table 7.10

PEMANTAUAN VIBRASI (JALAN FATMAWATI)
Vibration Monitoring (Jalan Fatmawati)

| No. | Parameter <i>Parameter</i> | Baku Mutu <i>Quality Standard</i> | Satuan <i>Unit</i> | Hasil <i>Results</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|--|-------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah <i>Amount</i> | Persentase <i>Percentage (%)</i> |
| 1 | Stasiun Lebak Bulus <i>Lebak Bulus Station</i> | 14 | mm/s | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 50,00% |
| 2 | Jalan Fatmawati | 14 | mm/s | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 350,00% |

Tabel 7.10
Table 7.10

PEMANTAUAN AIR BERSIH (JALAN FATMAWATI)
Clean Water Monitoring (Jalan Fatmawati)

| No. | Parameter <i>Parameter</i> | Baku Mutu <i>Quality Standard</i> | Satuan <i>Unit</i> | Hasil <i>Results</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|--|-------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah <i>Amount</i> | Persentase <i>Percentage (%)</i> |
| A. FISIKA <i>Physical</i> | | | | | | | |
| 1 | Bau (insitu) <i>Odor</i> | Tidak Berbau <i>Odorless</i> | - | - | - | - | - |
| 2 | Zat padat terlarut (TDS) <i>Dissolved Solids (TDS)</i> | 1500 | mg/L | 250 | 230 | 20 | 8,70% |
| 3 | Kekeruhan <i>Turbidity</i> | 25 | NTU | 0,76 | 0,76 | 0 | 0,00% |
| 4 | Rasa <i>Taste</i> | Tidak Berasa <i>Tasteless</i> | | | | | |
| 5 | Suhu *) <i>Temperature</i> | Udara <i>Air</i> ±30C" | oC | 27,5 | 28,7 | -1,2 | -4,18% |
| 6 | Warna <i>Color</i> | 50 | Pt-Co | 2 | 2 | 0 | 0,00% |
| B. KIMIA <i>Chemical</i> | | | | | | | |
| 1 | pH (Insitu)*) | 6,5 – 9,0 | | 6,73 | 6,52 | 0,21 | 3,22% |
| 2 | Besi (Fe) | 1,0 | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,00% |

| No. | Parameter Parameter | Baku Mutu Quality Standard | Satuan Unit | Hasil Results | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|---|---|----------------------------------|----------------|------------------|--------|---|---------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah Amount | Persentase Percentage (%) |
| 3 | Fluorida (F) | 1,5 | mg/L | 0,01 | 0,04 | -0,03 | -75,00% |
| 4 | Kasudahan total (CaCO ₃) Total hardness (CaCO ₃) | 500 | mg/L | 169 | 185 | -16 | -8,65% |
| 5 | Mangan (Mn) Manganese (Mn) | 0,5 | mg/L | 0,07 | 0,02 | 0,05 | 250,00% |
| 6 | Nitrat (NO ₃ -N) Nitrate (NO ₃ -N) | 10 | mg/L | 0,1 | 2 | -1,9 | -95,00% |
| 7 | Nitrit (NO ₂ -N) Nitrite (NO ₂ -N) | 1,0 | mg/L | 0,006 | 0,006 | 0 | 0,00% |
| 8 | Sianida (CN) Cyanide (CN) | 0,1 | mg/L | 0,005 | 0,005 | 0 | 0,00% |
| 9 | Surfactan anion (MBAS) | 0,05 | mg/L | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| C. MIKROBIOLOGI Microbiology | | | | | | | |
| 1 | Total Koliform Total Coliform | 50 | CFU /100ml | 2 | 0 | 2 | 4,00% |
| 2 | E. Coli | 0 | CFU /100ml | 0 | 0 | 0 | - |
| PARAMETER TAMBAHAN Additional Parameter | | | | | | | |
| 1 | Air raksa (Hg) Mercury (Hg) | 0,001 | mg/L | 0,0005 | 0,0005 | 0 | 0,00% |
| 2 | Arsen (As) Arsen (As) | 0,05 | mg/L | 0,005 | 0,005 | 0 | 0,00% |
| 3 | Kadmium (Cd) Cadmium (Cd) | 0,005 | mg/L | 0,003 | 0,003 | 0 | 0,00% |
| 4 | Khromium VI (Cr ₆) Chromium VI (Cr ₆) | 0,05 | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,00% |
| 5 | Selenium (Se) Selenium (Se) | 0,01 | mg/L | 0,002 | 0,002 | 0 | 0,00% |
| 6 | Seng (Zn) Zinc (Zn) | 15 | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,00% |
| 7 | Sulfat (SO ₄) Sulfate (SO ₄) | 400 | mg/L | 13 | 12 | 1 | 8,33% |
| 8 | Timbal (Pb) Lead (Pb) | 0,05 | mg/L | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,00% |
| 9 | Zat Organik (KMnO ₄) Organic Substances (KMnO ₄) | 10 | mg/L | 3 | 4 | -1 | -25,00% |

Tabel 7.12
Table 7.12

PEMANTAUAN UDARA HASIL SAMPLING LABORATORIUM TAMAN SAMBAS PKK

Air Monitoring of Sampling Result Laboratory of Taman Sambas PKK

| No. | Parameter <i>Parameter</i> | Baku Mutu <i>Quality Standard</i> | Satuan <i>Unit</i> | Hasil <i>Results</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|--|-------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah <i>Amount</i> | Persentase <i>Percentage (%)</i> |
| 1. | Sulfur Dioksida (SO ₂) <i>Sulfur Dioxide (SO₂)</i> | 900 | µg/Nm ³ | 34 | 37 | (3) | (8,11%) |
| 2. | Karbon Monoksida (CO) <i>Carbon Monoxide (CO)</i> | 26.000 | µg/Nm ³ | 3.780 | 3.895 | (115) | (2,95%) |
| 3. | Nitrogen Dioksida (NO ₂) <i>Nitrogen Dioxide (NO₂)</i> | 400 | µg/Nm ³ | 38 | 42 | (4) | (9,52%) |
| 4. | Oksidan (O ₃) <i>Oxydant (O₃)</i> | 200 | µg/Nm ³ | 40 | 45 | (5) | (11,11%) |
| 5. | Hidrokarbon (HC) <i>Hydrocarbons (HC)</i> | 160 | µg/Nm ³ | 77 | 101 | (24) | (23,76%) |
| 6. | Debu(TSP) <i>Dust (TSP)</i> | 230 | µg/Nm ³ | 131 | 151 | (20) | (13,25%) |
| 7. | Timbal (Pb) <i>Lead (Pb)</i> | 2 | µg/Nm ³ | 0,09 | 0,1 | (0,01) | (10,00%) |

Tabel. 7.14
Table. 7.14

PEMANTAUAN UDARA HASIL SAMPLING LABORATORIUM STASIUN ASEAN

Air Monitoring of Sampling Results Laboratory at ASEAN Station

| No. | Parameter <i>Parameter</i> | Baku Mutu <i>Quality Standard</i> | Satuan <i>Unit</i> | Hasil <i>Results</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|--|-------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah <i>Amount</i> | Persentase <i>Percentage (%)</i> |
| 1. | Sulfur Dioksida (SO ₂) <i>Sulfur Dioxide (SO₂)</i> | 900 | µg/Nm ³ | 38 | 35 | 3 | 8,57% |
| 2. | Karbon Monoksida (CO) <i>Carbon Monoxide (CO)</i> | 26 | µg/Nm ³ | 4353 | 4010 | 343 | 8,55% |
| 3. | Nitrogen Dioksida (NO ₂) <i>Nitrogen Dioxide (NO₂)</i> | 400 | µg/Nm ³ | 40 | 38 | 2 | 5,26% |
| 4. | Oksidan (O ₃) <i>Oxydant (O₃)</i> | 200 | µg/Nm ³ | 34 | 42 | -8 | -19,05% |
| 5. | Hidrokarbon (HC) <i>Hydrocarbons (HC)</i> | 160 | µg/Nm ³ | 87 | 115 | -28 | -24,35% |
| 6. | Debu(TSP) <i>Dust (TSP)</i> | 230 | µg/Nm ³ | 155 | 160 | -5 | -3,13% |
| 7. | Timbal (Pb) <i>Lead (Pb)</i> " | 2 | µg/Nm ³ | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -50,00% |

Tabel. 7.15
Table. 7.15

PEMANTAUAN KEBISINGAN (STASIUN ASEAN DAN TAMAN SAMBAS PKK)*Noise Monitoring (Asean Station and Taman Sambas PKK)*

| No. | Parameter <i>Parameter</i> | Baku Mutu <i>Quality Standard</i> | Satuan <i>Unit</i> | Hasil <i>Results</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|--|-------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah <i>Amount</i> | Persentase <i>Percentage (%)</i> |
| 1. | Stasiun ASEAN <i>ASEAN Station</i> | 85 | dB (A) | 62 | 64 | (2) | (3,13%) |
| 2. | Taman Sambas PKK <i>Taman Sambas PKK</i> | 85 | dB (A) | 55 | 61 | (6) | (9,84%) |

Tabel. 7.16
Table. 7.16**PEMANTAUAN VIBRASI (STASIUN ASEAN DAN TAMAN SAMBAS PKK)***Vibration Monitoring (Asean Station and Taman Sambas PKK)*

| No. | Parameter <i>Parameter</i> | Baku Mutu <i>Quality Standard</i> | Satuan <i>Unit</i> | Hasil <i>Results</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|-----|---|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------|--|-------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah <i>Amount</i> | Persentase <i>Percentage (%)</i> |
| 1. | Stasiun ASEAN <i>ASEAN Station</i> | 14 | mm/s | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 150,00% |
| 2. | Taman Sambas PKK <i>Taman Sambas PKK</i> | 14 | mm/s | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 100,00% |

Tabel. 7.17
Table. 7.17**PEMANTAUAN AIR BERSIH (STASIUN ASEAN)***Clean Water Monitoring (Asean Station)*

| No. | Parameter <i>Parameter</i> | Baku Mutu <i>Quality Standard</i> | Satuan <i>Unit</i> | Hasil <i>Results</i> | | Kenaikan (Penurunan) <i>Increase (Decrease)</i> | |
|----------|---|---|-----------------------|-------------------------|-------|--|-------------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah <i>Amount</i> | Persentase <i>Percentage (%)</i> |
| A | Fisika <i>Physics</i> | | | | | | |
| 1. | Bau (insitu) <i>Odor</i> | Tidak Berbau/ <i>Odorless</i> | - | - | - | - | - |
| 2. | Zat padat terlarut (TDS) <i>Dissolved Solids (TDS)</i> | 1500 | mg/L | 225 | 132 | 93 | 70,45% |
| 3. | Kekeruhan <i>Turbidity</i> | 25 | NTU | <0.76 | <0.76 | - | - |
| 4. | Rasa <i>Taste</i> | Tidak Berasa/ <i>Tasteless</i> | - | - | - | - | - |
| 5. | Suhu *) <i>Temperature</i> | "Udara/ Air $\pm 30^{\circ}\text{C}$ " | oC | 29,2 | 28,4 | 0,8 | 2,82% |
| 6. | Warna <i>Color</i> | 50 | Pt-Co | 2 | 2 | 0 | 0,00% |

| No. | Parameter Parameter | Baku Mutu Quality Standard | Satuan Unit | Hasil Results | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|----------|---|----------------------------------|----------------|------------------|---------|---|------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah Amount | Persentase Percentage (%) |
| B | Kimia Chemical | | | | | | |
| 1. | pH (Insitu)* | 6,5 – 9,0 | - | 7,35 | 7,25 | 0,1 | 1,38% |
| 2. | Besi (Fe) | 1,0 | mg/L | <0.02 | <0.02 | - | - |
| 3. | Fluorida (F) | 1,5 | mg/L | 0,42 | 0,01 | 0,41 | 4100,00% |
| 4. | Kasadahan total (CaCO ₃) Total hardness (CaCO ₃) | 500 | mg/L | 112 | 102 | 10 | 9,80% |
| 5. | Mangan (Mn) Manganese (Mn) | 0,5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | - | - |
| 6. | Nitrat (NO ₃ -N) Nitrate (NO ₃ -N) | 10 | mg/L | 0,4 | 0,9 | (0,5) | (55,56%) |
| 7. | Nitrit (NO ₂ -N) Nitrite (NO ₂ -N) | 1,0 | mg/L | <0.006 | <0.006 | - | - |
| 8. | Sianida (CN) Cyanide (CN) | 0,1 | mg/L | <0.005 | <0.005 | - | - |
| 9. | Surfactan anion (MBAS) | 0,05 | mg/L | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 100,00% |
| C | Mikrobiologi Microbiology | | | | | | |
| 1 | Total Koliform Total Coliform | 50 | CFU/100m | 4 | 2 | 2 | 4,00% |
| 2 | E. Coli | 0 | CFU/100m | 0 | 0 | 0 | - |
| D | Parameter Tambahan Additional Parameter | | | | | | |
| 1. | Air raksa (Hg) Mercury (Hg) | 0,001 | mg/L | <0.0005 | <0.0005 | - | - |
| 2. | Arsen (As) Arsen (As) | 0,05 | mg/L | <0.005 | <0.005 | - | - |
| 3. | Kadmium (Cd) Cadmium (Cd) | 0,005 | mg/L | <0.003 | <0.003 | - | - |
| 4. | Khromium VI (Cr ₆) Chromium VI (Cr ₆) | 0,05 | mg/L | <0.01 | <0.01 | - | - |
| 5. | Selenium (Se) Selenium (Se) | 0,01 | mg/L | <0.002 | <0.002 | - | - |
| 6. | Seng (Zn) Zinc (Zn) | 15 | mg/L | <0.01 | <0.01 | - | - |

| No. | Parameter Parameter | Baku Mutu Quality Standard | Satuan Unit | Hasil Results | | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|-----|--|----------------------------------|----------------|------------------|-------|---|------------------------------|
| | | | | 2019 | 2018 | Jumlah Amount | Persentase Percentage (%) |
| 7. | Sulfat (SO ₄) Sulfate (SO ₄) | 400 | mg/L | 3 | 2 | 1 | 50,00% |
| 8. | Timbal (Pb) Lead (Pb) | 0,05 | mg/L | <0.01 | <0.01 | - | - |
| 9. | Zat Organik (KMnO ₄) Organic Substances (KMnO ₄) | 10 | mg/L | 2 | 4 | -2 | -50,00% |

Tabel. 7.18
Table. 7.18

Dapat dilihat bahwa hasil monitoring udara, kebisingan, air bersih, dan vibrasi di beberapa titik sepanjang lintasan jalur MRT Jakarta (*at grade*) tidak ada yang melampaui baku mutu yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi PER.13/MEN/ X/2011 yang berlaku. Adapun kenaikan jumlah partikel yang dihasilkan di tahun 2019 dibandingkan pada tahun 2018 tidak menimbulkan masalah karena masih pada batas baku mutu yang diizinkan.

As shown in the above results, air, noise, clean water and vibration monitoring at several points along the MRT Jakarta Line (at grade) have not exceeded the quality standards set in accordance with Minister of Manpower and Transmigration Regulation PER.13 / MEN / X / 2011. This means that the number of particles produced during 2019 and 2018 are not an issue since they are still within permissible quality standards.

KEANEKARAGAMAN HAYATI

BIODIVERSITY

Perseroan telah merencanakan upaya keanekaragaman hayati untuk dilakukan di tahun 2020.

The Corporation has planned for biodiversity efforts to be implemented during 2020.

Gambar. 7.5 Pengukuran kualitas udara di area pembangunan Stasiun Asean
Image. 7.5 Measurement of air quality in the Asean Station construction area



Pertimbangan Aspek Lingkungan pada Proses Pengadaan Kontrak Konstruksi

Consideration of Environmental Aspects during the Procurement Process for Construction Contracts

Komitmen terhadap lingkungan hidup telah dilakukan Perseroan sejak tahapan awal pada perencanaan. Proses lelang atau tender *Contract Package* (CP) mempersyaratkan para peserta lelang, khususnya pihak pemenang lelang untuk memperhatikan dampak pengerjaan proyek terhadap lingkungan.

A commitment the environment has been met by the Corporation since the initial stages of planning. Tender or bidding process Contract Packages (CP) requires bidders, and in particular winning bidders, to consider the impacts of the project work on the environment.

Proses lelang proyek MRT Jakarta mempersyaratkan pihak kontraktor untuk melakukan pemantauan secara berkala atas dampak lingkungan yang timbul dari pembangunan proyek MRT Jakarta. Pemantauan meliputi pengukuran kualitas ambien udara, pengukuran kebisingan, pengukuran getaran, pengukuran kualitas air bersih, dan pengukuran kualitas air limbah domestik; yang kemudian dilaporkan kepada Perseroan sebagai alat untuk mengukur dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan proyek MRT Jakarta.

The MRT Jakarta project tender process required contractors to carry out regular monitoring of the environmental impacts arising from the construction of the MRT Jakarta project. Monitoring included measurements of ambient air quality, measurements of noise, measurements of vibration, measurements of clean water quality, and measurements of the quality of domestic wastewater, which was then reported to the Corporation to use as a tool with which to measure the environmental impacts arising from the construction of MRT Jakarta projects.

Penanganan Insiden yang Mencemari Lingkungan

Handling Incidents That Pollute The Environment

Sepanjang tahun 2019, tidak tercatat adanya insiden pencemaran lingkungan. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait penanganan insiden yang mencemari lingkungan.

Throughout 2019, there were no recorded incidents of environmental pollution. Thus, there is no information available relating the handling of incidents that pollute the environment.

PENGADUAN MASALAH LINGKUNGAN

COMPLAINTS RELATING TO ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Perseroan menyediakan sarana pengaduan terkait masalah lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan ataupun operasi usaha Perseroan, melalui beberapa jalur, yaitu:

The Corporation provides a several channels for complaints in relation to environmental problems caused by the construction or business operations of the Corporation, specifically:

PT MRT Jakarta (Persero)

 (62)21 3906454

Wisma Nusantara Lt. 21-23

 (62)21 3155846

Jl. MH Thamrin 59

 **1500 332 (24 jam)**

Jakarta 10350 - Indonesia

 jakartamrt.co.id

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pengaduan terkait masalah lingkungan yang ditujukan kepada Perseroan.

Throughout 2019, no complaints relating to environmental issues were addressed to the Corporation.

PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN YANG MASIH BERLANGSUNG TAHUN 2019

Environmental Permits Valid in 2019

| Tanggal Dikeluarkannya Izin Date of Permit Issued | Jenis Perizinan Type of Permit | Dikeluarkan Oleh Issued by | Masa Berlaku Hingga Valid Until Work Unit |
|--|--|---|---|
| 20 Februari 2017 February 20, 2017 | Izin Lingkungan Pembangunan MRT Jakarta, Lebak Bulus- Bundaran HI (Penempatan Jaringan Utilitas SKTT 150 kV di Bawah Tanah) oleh PT Mass Rapid Transit Jakarta <i>Environmental Permit for the Development of MRT Jakarta, Lebak Bulus-Bundaran HI (Installation of an underground utility network of 150 kV SKTT) by PT Mass Rapid Transit Jakarta</i> | DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPTSP</i> | - |
| 9 Januari 2018 January 9, 2018 | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Stasiun Senayan) <i>Wastewater Treatment Plant Installation / IIPAL (Senayan Station)</i> | DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 9 Januari 2018 January 9, 2018 | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Stasiun Istora) <i>Wastewater Treatment Plant Installation / IIPAL (Istora Station)</i> | DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 24 Januari 2018 January 24, 2018 | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Stasiun Lebak Bulus) <i>Wastewater Treatment Plant Installation / IIPAL (Lebak Bulus Station)</i> | DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 24 Januari 2018 January 24, 2018 | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Stasiun Fatmawati) <i>Wastewater Treatment Plant Installation / IIPAL Installation License (Fatmawati Station)</i> | DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 24 Januari 2018 January 24, 2018 | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Stasiun Cipete Raya) <i>Wastewater Treatment Plant Installation / IIPAL Installation (Cipete Raya Station)</i> | DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 1 Februari 2018 February 1, 2018 | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Stasiun Bundaran HI) <i>Wastewater Treatment Plant Installation / IIPAL Installation License (Bundaran HI Station)</i> | DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 8 Februari 2018 February 8, 2018 | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Stasiun Dukuh Atas) <i>Wastewater Treatment Plant Installation / IIPAL (Dukuh Atas Station)</i> | DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |

Tabel. 7.19
Table. 7.19

PERIZINAN BIDANG LINGKUNGAN YANG MASIH BERLAKU TAHUN 2019

Environmental Permits Valid in 2019

| Tanggal Dikeluarkannya Izin <i>Date of Permit Issued</i> | Jenis Perizinan <i>Type of Permit</i> | Dikeluarkan Oleh <i>Issued by</i> | Masa Berlaku Hingga <i>Valid Until Work Unit</i> |
|--|---|---|---|
| 19 Desember 2018 <i>December 19, 2018</i> | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL <i>(Infrastructure Workshop-D06 dan Gate House-D08)</i> Wastewater Treatment Plant Permit / IIPAL <i>Installation License (Infrastructure Workshop-D06 and Gate House -D08)</i> | DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 19 Desember 2018 <i>December 19, 2018</i> | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Main Gate House-D07 Depot MRT) <i>Wastewater Treatment Plant Permit / IIPAL (Main Gate House-D07 MRT Depot)</i> | DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 19 Desember 2018 <i>December 19, 2018</i> | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Inspection Shed-D05 Depot MRT) <i>Wastewater Treatment Plant Permit / IIPAL (Inspection Shed-D05 Depot MRT)</i> | DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 19 Desember 2018 <i>December 19, 2018</i> | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Infrastructure Maintenance-D03 Depot MRT) <i>Wastewater Treatment Permit / IIPAL (Infrastructure Maintenance-D03 MRT Depot)</i> | DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 19 Desember 2018 <i>December 19, 2018</i> | Izin Instalasi Pengolahan Air Limbah/IIPAL (Workshop Office-D02 dan Workshop-D04 Depot MRT) <i>Wastewater Treatment Plant Permit / IIPAL Installation License (Workshop Office-D02 and Workshop-D04 MRT Depot)</i> | DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPPTSP</i> | Sampai dengan terbitnya IPAL <i>Until the issuance of WWTP</i> |
| 7 Oktober 2019 <i>October 7, 2019</i> | "Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <i>Temporary Storage Permit for Hazardous and Toxic Waste (B3)</i> " | DPMPPTSP Provinsi DKI Jakarta <i>DKI Jakarta Province DPMPPTSP</i> | 7 Oktober 2022 <i>October 7, 2022</i> |

Tabel. 7.20
Table. 7.20

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA (TUMBUH BERSAMA KARYAWAN)

*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL SAFETY AND
HEALTH (GROWING WITH EMPLOYEES)*



Gambar. 7.5
Image. 7.5

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN *COMMITMENT AND POLICY*

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan operasional usaha adalah Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3). Aspek ini didasari pada pandangan Perseroan akan karyawan sebagai bagian dari pemangku kepentingan di mana laju pertumbuhan Perseroan akan memiliki imbas yang positif terhadap perkembangan setiap karyawan. Pada aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Perseroan memandang aspek ini sebagai pengelolaan operasional proyek dengan

One important aspect of managing business operations is Occupational Safety and Health (OSH). This based on the Corporation's view of its employees as stakeholders and of the growth rate of the Corporation hopefully having a positive impact on the development of each employee. In terms of Occupational Safety and Health (OSH), the Corporation views this aspect as part of the management of operational projects through a striving for a low-risk environment, especially as regards the risk of work



mengupayakan risiko yang rendah, terutama adanya risiko kecelakaan kerja dari tenaga kerja di lapangan. Selain berdampak positif terhadap citra Perseroan, upaya menekan risiko kecelakaan kerja akan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan dan pengoperasian MRT Jakarta.

Sebagai entitas usaha berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih muda belia, elemen SDM sangat menentukan dalam membentuk fondasi, pola, dan cikal bakal Perseroan. Kehadiran SDM dalam proses awal Perseroan yaitu tahapan konstruksi dan pengoperasian layanan MRT Jakarta, menjadi penentu keberhasilan Perseroan untuk dapat menghadirkan layanan MRT Jakarta yang berkualitas dan mampu menjawab persoalan kemacetan serta kebutuhan transportasi publik di Ibu kota.

accidents being sustained by workers in the field. In addition to having a positive impact upon the Corporation's corporate image, efforts to reduce the risk of work accidents will create a safe and comfortable working environment for all stakeholders and parties involved in the construction and operation of the MRT Jakarta project.

As an ROE, the HC element is crucial in forming the foundation, pattern and embryo of the Corporation. The presence of HC in the initial processes of the Corporation, namely the stages involving the construction and operation of Jakarta's MRT services, has been critical for the Corporation's success and its ability to deliver quality MRT Jakarta services able to address congestion problems and public transportation needs within the capital.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN DAMPAK TANGGUNG JAWAB KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

STAKEHOLDERS AND THE IMPACT OF RESPONSIBILITY ON LABOR, OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Pemangku kepentingan yang terdampak oleh tanggung jawab di bidang ini meliputi kesejahteraan, pemenuhan hak-hak, serta pengelolaan kompetensi pribadi.

Stakeholders impacted by their responsibility on this subject covers welfare, fulfilment of rights, and management of personal competency.

Perseroan memandang SDM sebagai aset berharga yang eksistensinya selalu mendapat perhatian khusus, baik dalam bentuk pengembangan kompetensi, sertifikasi dan peningkatan kapasitas diri, maupun tingkat kesejahteraan. Pengelolaan SDM memiliki tanggung jawab untuk membentuk karyawan yang andal dan kompeten agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

The Corporation views human resource as a valuable asset where its existence always gains special attention, be it in the form of competency development, certification and personal capacity improvements, or level of welfare. It is part of the human resource management responsibility to shape reliable and competent employees to be able to carry out tasks as expected.

Sistem rekrutmen dan promosi memberikan kesempatan yang sama kepada semua Warga Negara Republik Indonesia untuk dapat diterima menjadi karyawan Perseroan. Demikian juga halnya dalam pengembangan karier, Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.

The recruitment and promotion system provides equal opportunities to all Citizens of the Republic of Indonesia to be accepted as employees of the Corporate. In the career development, the Corporate provides equal opportunities for each employee to be promoted to a higher position

RENCANA DAN TARGET KEBIJAKAN PROGRAM

PROGRAM PLANS AND POLICY TARGETS

Sasaran dan target/rencana kebijakan program yang ditetapkan manajemen.

Targets / plans for policies and programs set by management.

PENERAPAN INISIATIF DAN PROGRAM BIDANG KETENAGAKERJAAN

IMPLEMENTATION OF LABOR INITIATIVES AND PROGRAMS

Sistem Manajemen SDM

HC Management System

Dalam mengembangkan organisasi dan SDM Perseroan memiliki sistem manajemen SDM yang diharapkan dapat menopang seluruh proses perkembangan yang terus berjalan seiring dengan pertumbuhan proyek dan bisnis Perseroan ke depan.

In developing its organization and HC, the Corporation has created an HC management system that is expected to support the entire development process in line with the growth of the Corporation's projects and business going forward.

Matrik Pemetaan Akuntabilitas

Accountability Mapping Matrix

Dalam mengelola bidang atau proses pekerjaan terhadap posisi atau jabatan, Perseroan menggunakan *Accountability Mapping Matrix* (AMM) yang disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis Perseroan dan perkembangan struktur organisasi di mana Perseroan sudah menggunakan analisis *value chain* dan analisis proses bisnis.

In order to manage the job creation process throughout the entire field or process of work, the Corporation uses an Accountability Mapping Matrix (AMM) which has been adapted to the development of the business processes of the Corporation and the development of its organizational structure. The Corporation also utilizes value chain analysis and business process analysis.

Model Kompetensi

Competency Model

Seperangkat kompetensi yang disyaratkan untuk suatu jabatan, agar pemangku jabatan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan (sangat) baik, dan mencapai (atau melampaui) sasaran yang diharapkan merupakan *Competency Model*. Pada saat ini Perseroan telah memiliki *Competency Model* untuk *Core Competency* dan *Leadership Competency* dimana telah menjadi acuan dalam pelaksanaan *Assessment Program* untuk *Technical Competency*.

A set of competencies is required for a given position, so that office holders can carry out their work well and achieve (or exceed) the expected targets of the relevant Competency Model. At present, the Corporation has a Competency Model which covers Core Competency and Leadership Competency, which has become a reference in the implementation of the Assessment Program for Technical Competency.

Competency Model yang disusun akan menjadi standar yang diterapkan Perseroan dalam:

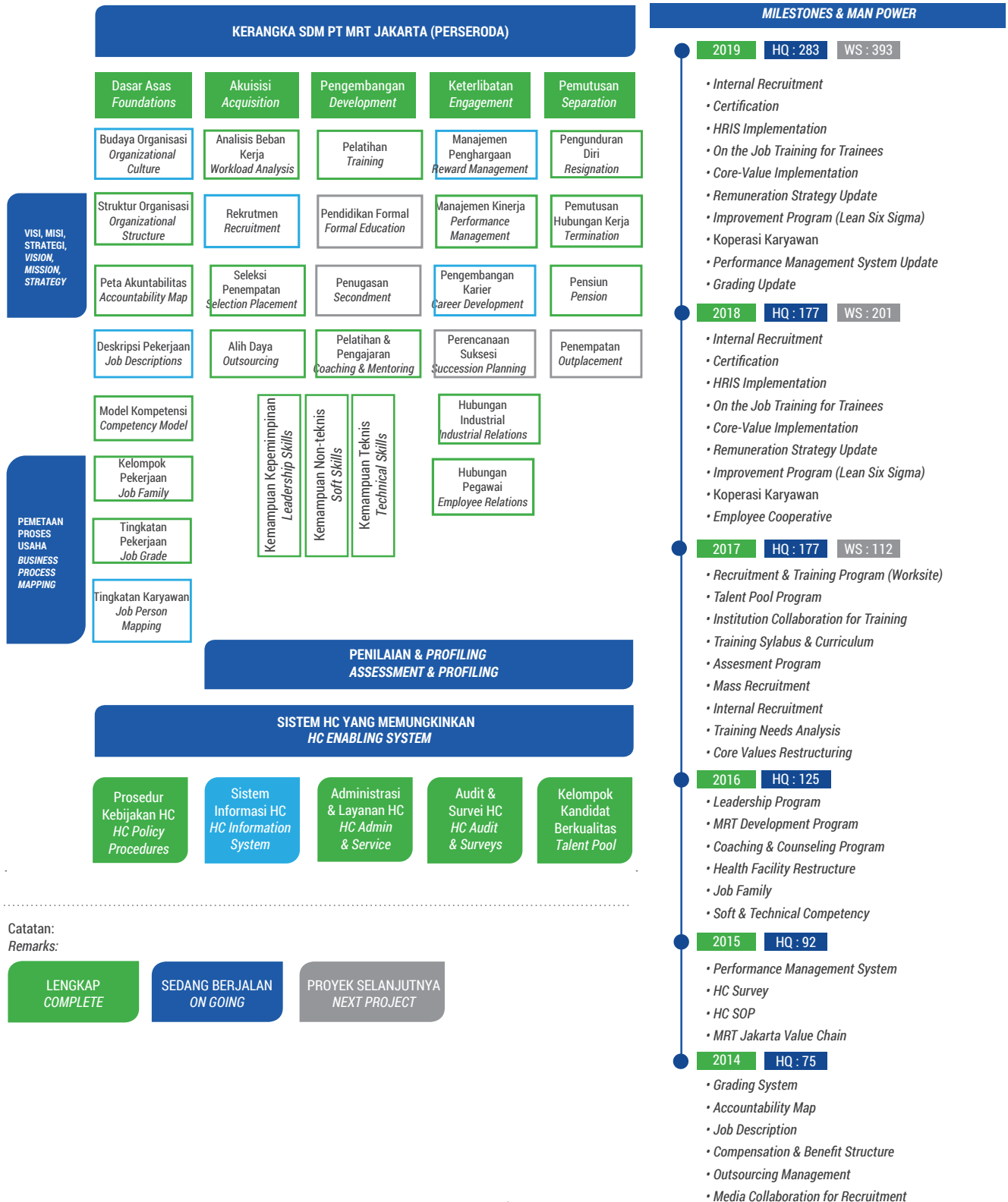
1. Merekrut dan menempatkan karyawan.
2. Menentukan jenis pengembangan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Menentukan standar perilaku yang akan menjadi salah satu sasaran yang harus dicapai dalam Sistem Manajemen Kinerja.
4. Menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun jalur karir.

The Competency Model developed will be the standard applied by the Corporation in regard to:

1. Recruitment and placement of employees.
2. Determining the types of competency development needed.
3. Determining the standards of behavior to be achieved through the Performance Management System.
4. Development of career paths.

BAGAN PETA JALAN PENGEMBANGAN SDM DAN URAIANNYA

The HC Development Road Map and Description



Figur. 7.4
Figure. 7.4

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE SDM

HC STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

Dalam rangka mewujudkan kinerja yang efektif, efisien, dan sebagai penunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan tugas di Perseroan dibutuhkan sebuah acuan baku yang memberikan kepastian dan keseragaman dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan serta menjamin terselesaikannya pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tepat sasaran, menjamin kemudahan dan kelancaran secara prosedural. Untuk itu, disusun beberapa *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu:

- SOP Rekrutmen
- SOP Seleksi dan Penempatan Karyawan
- SOP *Training* (Pelatihan & Pengembangan)
- SOP Fasilitas Kesehatan
- SOP Perjalanan Dinas
- SOP *Performance Management System* (PMS)
- SOP Remunerasi
- SOP Alih Daya
- SOP Peraturan dan Sanksi Disiplin
- SOP Status Kepegawaian dan Pengangkatan Karyawan
- SOP *Talent Acquisition*
- SOP *Talent Development*
- SOP Terminasi

In order to realize an effective, efficient, and supporting performance in the process of carrying out tasks in the Corporate, a standard reference is needed that provides certainty and uniformity in the process of carrying out an activity and ensures completion of work in accordance with a predetermined time, right on target, ensuring ease and procedural fluency. For this reason, several Standard Operational Procedures (SOP) have been prepared, namely:

- *Recruitment SOP*
- *SOP for Employee Selection and Placement*
- *SOP Training (Training & Development)*
- *SOP of Health Facilities*
- *SOP for Official Travel*
- *SOP Performance Management System (PMS)*
- *SOP of Remuneration*
- *Outsourcing SOP*
- *SOP for Discipline Regulations and Sanctions*
- *SOP Employee Status and Appointment of Employees*
- *SOP Talent Acquisition*
- *SOP Talent Development*
- *Termination SOP*

KESEMPATAN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIER YANG SAMA, SERTA KESETARAAN GENDER

EQUAL JOB OPPORTUNITIES, CAREER DEVELOPMENT AND GENDER EQUALITY

Perseroan merupakan BUMD yang menjunjung tinggi falsafah negara Republik Indonesia dan peraturan serta perundang-undangan sebagai produk hukumnya. Sesuai visi dan misinya, Perseroan tidak memiliki afiliasi terhadap salah satu golongan maupun paham tertentu yang dapat menciptakan pandangan diskriminatif terhadap sebuah hal. Hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak individu yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian dari terbangunnya hubungan Perseroan dengan manajemen dan seluruh karyawan.

Perseroan selalu menghargai hak asasi karyawan dan menghargai segala bentuk perbedaan tanpa melihat budaya, kebangsaan, agama, suku, jenis kelamin, usia maupun kategori yang dilindungi lainnya. Perseroan menghargai martabat dan nilai setiap individu dalam mengembangkan kemitraan yang setara sebagai bagian dari tim.

Perseroan tidak memberikan toleransi sedikit pun terhadap perilaku menyimpang antar rekan kerja maupun di luar rekan kerja. Dalam kesehariannya, karyawan Perseroan tidak boleh menggunakan kata-kata atau perilaku yang menghina, mendiskriminasi atau melanggar hak asasi manusia, atau merendahkan nilai spiritual seseorang.

The Corporation is an ROE that upholds the philosophy of the Republic of Indonesia and the regulations and laws as its legal products. In accordance with its vision and mission, the Corporation has no affiliation with any particular group or any understanding that may lead to discriminatory views. Human rights - in this case the individual rights set out under the applicable laws and regulations - are part of the Corporation's relationship with management and all of its employees.

The Corporation always respects the rights of employees and respects all forms of difference regardless of culture, nationality, religion, ethnicity, gender, age or other protected categories. The Corporation respects the dignity and value of each individual in developing equal partnerships as part of a team.

The Corporation does not tolerate any deviant behavior between co-workers and outside co-workers. In daily life, the Corporation's personnel not use words or behavior considered insulting, discriminatory or that violate human rights or undermine spiritual values.

Perseroan berkomitmen untuk mengakomodir segala bentuk perbedaan dan menyatukan kemampuan karyawan, individualitas, dan nilai pandang yang beragam ke dalam kekuatan kolektif Perseroan. Perseroan memberikan penilaian kepada masing-masing individu secara adil, sesuai dengan peran, tugas, dan kinerjanya dalam mengembangkan kariernya sehingga mereka dapat menghadapi serta mengatasi semua bentuk kesulitan secara proaktif.

Perseroan bukan hanya terus berupaya untuk menjaga tempat kerja yang aman, bersih, nyaman, dan higienis atas dasar kerja sama antara Perseroan dan karyawannya, namun juga berupaya memberikan keseimbangan yang sehat antara kinerja pekerjaan dan kesejahteraan karyawan.

Jika terjadi diskriminasi atau pelecehan, Perseroan telah memiliki standar baku yang tepat dan cepat, dengan melakukan tindakan sesuai norma dan perundang-undangan yang berlaku, serta membuat skema preventif agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jika terjadi kasus pelecehan, Perseroan berkomitmen untuk melindungi kerahasiaan semua pihak, termasuk korban, terduga pelaku, dan pemberi informasi.

Perseroan juga berkomitmen untuk tidak mempekerjakan anak di bawah umur atau memaksa karyawan bekerja dengan upah minim yang membahayakan perkembangan fisik, mental, moral karyawan.

Dalam program rekrutmen, Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen karyawan.

Pengangkatan calon karyawan didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi karyawan. Demikian pula dengan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan promosi atau penghargaan. Perseroan selalu mengedepankan hasil dan produktifitas yang ditunjukkan karyawan, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang positif kepada lingkungan kerja di sekitarnya.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan usaha dan jangkauan operasi yang berkembang cepat, Perseroan menerapkan beberapa strategi pemenuhan SDM yang tepat, akurat, dan cepat namun tetap memperhatikan kualitas ataupun kompetensi dasar para kandidat. Strategi Pemenuhan SDM yang diterapkan Perseroan mencakup 2 (dua) fokus, yaitu:

1. Mempertahankan karyawan yang masuk dalam kelompok kandidat berkualitas (*talent pool*) agar terus menjadi bagian dari organisasi, dan memberi kontribusi penuh sesuai dengan potensi maksimalnya.
2. Menarik minat para talenta baru yang terdapat di dalam industri segmen Perseroan ataupun talenta baru yang tertarik masuk ke dunia infrastruktur transportasi.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan antara kepentingan keluarga dan Perseroan khususnya bagi karyawan dalam Perseroan terdapat beberapa kebijakan yang mendukung hal tersebut yakni sebagai berikut:

The Corporation is committed to accommodating all forms of diversity and integrating employee capabilities, individuality and diverse viewpoints into its collective strengths. The Corporation makes a fair assessment of each individual, according to their roles, tasks, performances and career development so that they can face and proactively overcome all forms of difficulties.

The Corporation not only continues to strive to maintain a safe, clean, comfortable and hygienic workplace on the basis of cooperation between the Corporation and its employees but also seeks to provide a healthy balance between work performance and employee welfare.

In the event of any discrimination or harassment, the Corporation implements appropriate standards and takes quick action in accordance with applicable norms and regulations, and also implements preventive schemes so that such events do not happen again in the future. In cases of harassment, the Corporation is committed to protecting the confidentiality of all parties, including victims, suspected perpetrators and informants

The Corporation is also committed to not employing minors or forcing employees to work at minimum wages that endanger their physical, mental and moral development.

The Corporation provides equal opportunities for all men and women to participate in its employee recruitment programs, regardless of ethnicity, religion, race, class, gender or physical condition.

Appointments of candidates are based on the results of selection, probation evaluation results and employee orientation, as are opportunities for employees to gain promotions or awards. The Corporation always prioritizes the results and productivity shown by employees, which in turn will create positive results throughout the surrounding work environment.

In order to anticipate the development of business and the rapidly expanding range of operations, the Corporation applies a number of strategies aimed at correct, accurate and fast HC, while still paying attention to the qualities and basic competencies of the candidates. The HC fulfilment strategy implemented by the Corporation includes 2 (two) areas of focus, namely:

1. *Retaining employees who enter the talent pool so that they continue to be part of the organization and make full contributions in accordance with their maximum potential.*
2. *Attracting new talent to the Corporation's industry segment or new talent interested in entering the world of transportation infrastructure.*

In order to create a balance between the interests of the family and the Corporation, especially for female employees, several policies support this goal, as follows:

1. Ruang Laktasi bagi Ibu Menyusui sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2013 di kantor maupun stasiun.
2. Istirahat melahirkan/gugur kandungan yakni 1,5 bulan sebelum dan setelah melahirkan.
3. Fasilitas kesehatan dengan menanggung maksimal 3 (tiga) anak dari karyawan termasuk suami dari karyawan yang telah didaftarkan di Perseroan.
4. Kesempatan wanita untuk dapat menyusui anaknya pada saat jam kerja dan/atau pemerah ASI.
5. *Pap smear* bagi Karyawan wanita yang telah menikah.
6. Karyawan mendapatkan manfaat pemeriksaan bulanan kehamilan dan persalinan.
7. Karyawan mendapatkan izin untuk meninggalkan pekerjaan pada saat istri melahirkan tanpa memotong hak cuti tahunan sebanyak 2 (dua) hari kerja.
8. Olahraga rutin bagi karyawan
9. Tidak ada diskriminasi dan prasyarat gender dalam proses perekrutan karyawan.

1. *Lactation Room for Breastfeeding Mothers according to Minister of Manpower Regulation No. 15 of 2013.*
2. *Leave after childbirth / miscarriage of 1.5 months, both before and after giving birth.*
3. *Health facilities which cover a maximum of 3 (three) children of employees, including the husbands of employees who have registered with the Corporation.*
4. *Opportunities for women to breastfeed their children during working hours and / or express milk.*
5. *Pap smears for married female employees.*
6. *Female employees receive monthly check-ups in relation to pregnancy and childbirth.*
7. *Employees can enjoy paternity leave periods of 2 (two) working days when their wives gives birth without cutting into their annual leave entitlements.*
8. *Regular exercise for female employees.*
9. *There is no gender discrimination or prerequisite to meet as part of the employee recruitment process.*

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

Program peningkatan kompetensi juga dilakukan Perseroan dengan Sistem Manajemen SDM yang Terintegrasi, atau *HC Integrated System*, yang mampu menerapkan secara sistemik terkait penilaian dan kebutuhan pengembangan kompetensi dari setiap individu karyawan. Perseroan memiliki pelatihan dengan 3 (tiga) jenis pelatihan yang berlandaskan pada peningkatan standar kompetensi. Di samping itu, Perseroan juga memiliki *MRT Development Program (MDP)* sebagai program pendidikan bekerja sama dengan Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar tentang perkeretaapian serta membentuk rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan kemampuan bekerja dalam kelompok serta terampil. Program *Management Trainee*, atau pelatihan manajerial juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada karyawan pilihan untuk dapat memahami organisasi Perseroan dalam perspektif makro.

The competency improvement program is also implemented by the Corporation through an Integrated HC Management System or HC Integrated System, which is able to systemically implement the assessment and competency development needs of each individual employee. The Corporation offers 3 (three) types of training based aimed at improving competency standards. In addition, the Corporation also has an MRT Development Program (MDP), which is an educational program run in collaboration with the Indonesian Academy of Railways (API) Madiun. The MDP aims to provide basic knowledge about railways and establish a sense of responsibility, discipline and the ability to work in groups and lead. The Management Trainee program and managerial training is also offered in order to provide opportunities for selected employees so that they can understand the organization of the Corporation from a macro perspective.

PEMENUHAN HAK KESEJAHTERAAN KARYAWAN

FULFILLMENT OF EMPLOYEE WELFARE RIGHTS

Perseroan memiliki komitmen yang kuat bagi pemberdayaan karyawan; termasuk di antaranya kesejahteraan dan program peningkatan kompetensi. Gaji atau honorarium sebagai hak karyawan atas imbalan kerja diberikan dengan perhitungan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta pertimbangan kelayakan harga di pasar tenaga kerja DKI Jakarta. Besaran gaji karyawan mencapai Rp72,27 miliar untuk 676 karyawan, meningkat 17.77% dari tahun 2018 yang sebesar Rp61,37 miliar untuk 520 karyawan.

The Corporation has a strong commitment to employee empowerment, which includes the welfare and competency improvement program. Salaries or honorariums include an employee's right to benefits, which are provided in accordance with regulations and legislation, as well as through a consideration of the appropriateness of salaries within the Jakarta labor market. Throughout 2019, the remuneration provided by the Corporation in relation to employee salaries reached Rp72.27 billion for 676 employees, an increase of 17.77% over 2018's figure, which amounted to Rp61.37 billion for 520 employees.

JUMLAH GAJI KARYAWAN TAHUN 2014-2019

Amount of Employee Salaries 2014-2019

| Tahun Year | Jumlah Karyawan Number of Employees | Jumlah Gaji (Rp) Amount of Salary (Rp) |
|---------------|--|---|
| 2014 | 75 | 7.608.945.406 |
| 2015 | 89 | 12.390.590.774 |
| 2016 | 120 | 15.481.741.733 |
| 2017 | 288 | 27.042.308.267 |
| 2018 | 520 | 61.370.052.727 |
| 2019 | 676 | 72.278.168.525 |

Tabel. 7.21
Table. 7.21

Sebagai bagian dari transparansi informasi, berikut disampaikan rasio gaji/remunerasi tertinggi dan terendah per bulan yang menggambarkan jenjang gaji/remunerasi yang diberlakukan Perseroan.

In order to ensure transparency of information, the following sets out the highest salary and remuneration ratio per month and illustrates the salary / remuneration levels imposed by the Corporation.

RASIO GAJI/REMUNERASI TERTINGGI DAN TERENDAH PER BULAN

Ratio of Highest to Lowest Salary / Remuneration per Month

| Rasio Gaji/Remunerasi Ratio of Salary/Remuneration | Skala Ratio | |
|--|----------------|----------|
| | 2019 | 2018 |
| Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah <i>The ratio of the highest to lowest employee salaries</i> | 1: 11,82 | 1: 10,84 |
| Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah <i>The ratio of the highest to lowest directors salaries</i> | 1: 1,11 | 1: 1,11 |
| Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah <i>The ratio of the highest to lowest board of commissioners salaries</i> | 1 :1,34 | 1 :1,29 |
| Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan karyawan tertinggi <i>The ratio of the highest directors salaries to lowest employee salaries</i> | 1: 1,99 | 1: 2,50 |

Tabel. 7.22
Table. 7.22

Yang dimaksud karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Kepala Divisi *Human Capital*, sementara karyawan terendah adalah Staf Stasiun.

The highest employee in the table above is the Head of Human Capital Division, while the lowest employees comprise Station Staff.

APRESIASI

APPRECIATION

Perseroan menetapkan Anugerah Masa Bakti pada Peraturan Perseroan Pasal 49 yang berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan memberikan Anugerah Masa Bakti kepada karyawan dengan masa bakti sewindu (8 tahun), dwi windu (16 tahun), tri windu (24 tahun), dan catur windu (32 tahun) dengan hubungan kerja tanpa terputus.
2. Anugerah Masa Bakti yang diberikan:
 - Plakat Penghargaan dari Perseroan yang ditandatangani oleh Direktur Utama;
 - Emas dengan berat tertentu yang tergantung pada masa bakti dengan rincian sebagai berikut:
 - » Masa Bakti 8 (delapan) tahun diberikan seberat 10 gram;
 - » Masa Bakti 16 (enam belas) tahun diberikan seberat 15 gram;
 - » Masa Bakti 24 (dua puluh empat) tahun diberikan seberat 20 gram;
 - » Masa Bakti 32 (tiga puluh dua) tahun diberikan seberat 25 gram
 - Kegiatan pemberian Anugerah Masa Bakti dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pada tahun 2019, seremoni Anugerah Masa Bakti dan penyerahan emas dilakukan pada 17 Agustus 2019 di Depo Lebak Bulus dan sebanyak 7 karyawan Perseroan mendapatkan penghargaan tersebut.

The Corporation stipulates the Time Period Award under Article 49 of the Corporate Regulations, which contain the following provisions:

1. *The Corporation awards the Time Period to Employees who have completed a period of 8 (eight) years, 16 (sixteen) years, 24 (twenty four) year and 32 (thirty two) years of uninterrupted work service.*
2. *Service Award given:*
 - *Award Plaque from the Corporate signed by the President Director;*
 - *Gold with a certain weight that depends on the service period with the following details:*
 - » *The service period of 8 (eight) years is given as heavy as 10 grams;*
 - » *The service period of 16 (sixteen) years is given as heavy as 15 grams;*
 - » *A period of 24 (twenty four) years is given as heavy as 20 grams;*
 - » *A period of 32 (thirty two) years is given as heavy as 25 grams*
 - *Service Award Ceremony is held every year*

In 2019, the Service Award Ceremony and the handover of gold was conducted on August 17, 2019 at the Lebak Bulus Depot and 7 employees received the award.

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN KERJA YANG KONDISIF

ESTABLISHMENT OF A CONDUCTIVE WORK ENVIRONMENT

Dalam menerapkan *work-life balance* dan lingkungan kerja yang kondusif bagi karyawan di tengah target kerja yang meningkat seiring dengan aktivitas operasi dan komersial, Perseroan memberikan kesempatan karyawan untuk melakukan kegiatan olahraga, *event* karyawan, *employee gathering*, dan lain-lain.

Perseroan secara rutin mengadakan *Townhall Meeting*, di mana karyawan dan jajaran manajemen dikumpulkan di kantor pusat atau Depo untuk mendengarkan pidato langsung oleh Direktur Utama dan juga serta sesi berbagi oleh tokoh dan pembicara inspiratif di Indonesia. Pada kesempatan ini pula karyawan-karyawan baru di Perseroan dikenalkan kepada karyawan eksisting, hal ini dilakukan guna membangun suasana yang nyaman bagi karyawan baru untuk memperkenalkan dirinya masing-masing.

Berbagai kegiatan olahraga rutin diselenggarakan Perseroan kepada seluruh karyawan, dari mulai program bersepeda, Zumba di Depo Lebak Bulus, kelas-kelas olahraga setelah pulang kantor, dan lain-lain. Selain kegiatan olahraga rutin, *employee gathering* dengan tema "*MRT Heroes Gathering, Change is Coming*" juga diselenggarakan pada 23 November 2019, di mana karyawan berkumpul untuk menjaga tali silaturahmi dengan satu sama lain.

When implementing work-life balance and a conducive work environment for employees, within the context of work targets that increase along with operational and commercial activities, the Corporation provides employees with the opportunity to organize sports activities, employee events, employee gatherings and other events.

The Corporation holds a Town-hall Meeting, every month, during which employees and management gather at the head office or Depot to listen to an address given by the President Director and also enjoy sessions given by inspiring figures and speakers. At these meetings, new employees at the Corporation are also introduced to existing employees in an effort to create a comfortable atmosphere for new employees.

Various routine sports activities are held by the Corporation and are participated in by all employees, including the cycling program, Zumba at the Lebak Bulus Depot, sports classes after office hours and other activities. In addition to routine sports activities, an Employee Gathering with the theme "MRT Heroes Gathering, Change is Coming" was also held on November 23, 2019, at which employees gathered to maintain friendships with one another.



Gambar. 7.6
Image. 7.6



Gambar. 7.7
Image. 7.7



Gambar. 7.8
Image. 7.8



REKRUTMEN DAN PERPUTARAN KARYAWAN EMPLOYEE RECRUITMENT AND TURNOVER

Perseroan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang, baik pria dan wanita, tanpa memandang perbedaan etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen karyawan. Pengangkatan calon karyawan didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada masa percobaan, dan orientasi karyawan. Demikian pula dengan kesempatan bagi karyawan untuk mendapatkan promosi atau penghargaan. Perseroan selalu mengedepankan hasil dan produktivitas yang ditunjukkan karyawan, yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang positif kepada lingkungan kerja di sekitarnya.

Rasio perputaran karyawan dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja Perseroan. Selain itu, tingkat perputaran karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perseroan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

The Corporation provides equal opportunities for all men and women, regardless of ethnic background, religion, race, class, gender or physical condition, to participate in employee recruitment programs. Appointments of candidates are based on the results of a selection process, evaluation results in relation to probation periods and employee orientation. Likewise, there are opportunities for employees to receive promotions or awards. The Corporation always seeks to prioritize the results and productivity shown by employees, which, in turn, should provide positive results across the surrounding work environment.

Employee turnover ratios can be indicative of the productivity of the Corporation's performance. In addition, the level of employee turnover is also a reflection of the culture and working systems of the Corporation and can be an indicator of the success of the Corporation as regards the creation of a conducive working environment.

TINGKAT PERPUTARAN DIHITUNG BERDASARKAN RUMUS SEBAGAI BERIKUT

Turnover Rate Calculated Based on the Following Formula:

| | |
|--|--|
| Tingkat Perputaran Karyawan = <i>Employee Turnover rate</i> | Jumlah Karyawan Keluar <i>Total employee turnover</i> |
| | $\frac{[(\text{Jumlah Karyawan Awal Tahun} + \text{Jumlah Karyawan Akhir Tahun}) \times 1/2]}{[(\text{number of employees at the beginning of a year}) + \text{number of employees at the end of a year}] \times 1/2}$ |

Tabel. 7.23
Table. 7.23

Hingga akhir Desember 2019, jumlah karyawan mencapai 676 karyawan, meningkat 156 karyawan dibandingkan jumlah di akhir tahun 2018 yang sebanyak 520 orang. Di sepanjang tahun 2019, terdapat 11 karyawan yang keluar dari Perseroan, dengan tingkat perputaran sebesar 1.84%. Angka ini sedikit lebih rendah dibanding tahun 2018 yang sebesar 22.2%.

Up until the end of December 2019, the number of employees totaled 676, an increase of 156 employees over the 2018 figure of 520. Throughout 2019, some 11 employees left the Corporation at a turnover rate of 1.84%. This figure is slightly lower than the figure for 2018, which amounted to 22.2%.

PENYEBAB KARYAWAN KELUAR DARI PERSEROAN

Reason for Employees Leaving the Corporation

| Penyebab <i>Cause</i> | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Pensiun alami <i>Regular retirement</i> | - | 1 | - | - | - |
| Pensiun dini <i>Early retirement</i> | - | - | - | - | - |
| Meninggal <i>Death</i> | - | - | - | - | - |
| Mengundurkan diri <i>Resignation</i> | 10 | 8 | 5 | 5 | 4 |
| Diberhentikan karena melakukan pelanggaran <i>Dismissal due to regulation violations</i> | 1 | - | - | - | - |
| Jumlah karyawan keluar <i>Number of leaving employees</i> | 11 | 9 | 5 | 5 | 4 |
| Jumlah karyawan akhir tahun <i>Number of employees at the end of year</i> | 676 | 520 | 288 | 120 | 92 |
| Persentase perputaran <i>Turnover percentage</i> | 1,84% | 2,22% | 2,42% | 4,59% | 4,52% |

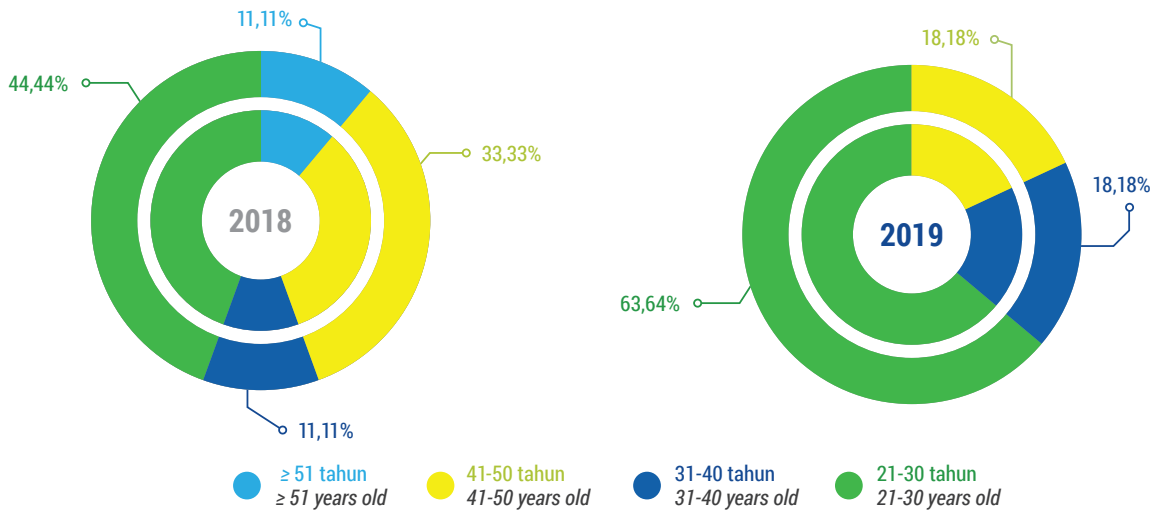
Tabel. 7.24
Table. 7.24

RENTANG USIA KARYAWAN YANG KELUAR DARI PERUSAHAAN DI TAHUN 2019 (ORANG)

Age Range of Employees Leaving The Corporate in 2019

| Rentang Usia Age Range | 2019 | | | | 2018 | | | |
|--------------------------------|-----------|-------------|------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------------|----------------------------------|
| | L Male | P Female | Jumlah Number | Persentase (%) Percentage (%) | L Male | P Female | Jumlah Number | Persentase (%) Percentage (%) |
| >= 51 tahun >= 51 years | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 11,11% |
| 41-50 tahun 41-50 years | 1 | 1 | 2 | 18,18% | 3 | - | 3 | 33,33% |
| 31-40 tahun 31-40 years | 2 | - | 2 | 18,18% | 1 | - | 1 | 11,11% |
| 21-30 tahun 21-30 years | 4 | 3 | 7 | 63,64% | 3 | 1 | 4 | 44,44% |
| Jumlah Total Number | 7 | 4 | 11 | 100,00% | 8 | 1 | 9 | 100,00% |

Tabel. 7.25
Table. 7.25



Grafik. 6.5
Graphic. 6.5

Dapat dilihat bahwa persentase pengunduran diri di rentang usia 21-30 tahun dan 41-50 tahun meningkat, sedangkan persentase pengunduran diri di rentang umur 41-50 tahun berkurang dibandingkan tahun 2018.

The percentage of resignations in the age range 21-30 years and 41-50 years has increased, while the percentage of resignations of around ages 41-50 years has declined in comparison with 2018.

SURVEI KEPUASAN/KETERIKATAN KARYAWAN

EMPLOYEE SATISFACTION / ENGAGEMENT SURVEY

Survei Internal atas Komitmen dan Keterikatan Karyawan (*Engagement Survey*) dilakukan oleh Departemen *Organization, Talent, and Training* Perseroan pada bulan Desember 2019. Metodologi pengambilan data menggunakan survei dan setiap pernyataan yang ada pada lembaran survei diberikan skala 1-4 (1 - < 2 = *Low*, 2 - < 2.5 = *Low to Moderate*, 2.5 - < 3 = *Moderate*, 3 - < 3.5 = *Moderate to High*, 3.5 - < 4 = *High*).

The Internal Engagement Commitment and Engagement Survey was organized by the Corporation's Organization, Talent and Training Department in December 2019. The data collection method used was a survey and each statement on the survey sheet was given a scale of 1-4 (1 - < 2 = Low, 2 - < 2.5 = Low to Moderate, 2.5 - < 3 = Moderate, 3 - < 3.5 = Moderate to High, 3.5 - < 4 = High).

Teori dan Pendekatan

Theory and Approach

Teori dan pendekatan survei ini berdasarkan riset yang dilakukan selama 25 tahun dalam bidang *Employee Engagement* oleh *Corporate Leadership Council (CLC) / Corporate Executive Board (CEB)*.

The survey's theory and approach is based on 25 years of research in the field of Employee Engagement undertaken by the Corporate Leadership Council (CLC) / Corporate Executive Board (CEB).

Terdapat 2 (dua) hal yang dapat mempengaruhi tingkat keterikatan karyawan terhadap Perseroan, yakni *Rational Commitment* dan *Emotional Commitment*. *Rational Commitment* merupakan komitmen yang muncul karena karyawan merasa Perseroan adalah tempat kerja yang dapat memenuhi kebutuhannya (menguntungkan untuk pribadinya). *Emotional Commitment* merupakan komitmen yang muncul karena karyawan percaya Perseroan mampu membuat karyawan merasa nyaman, merasa dihargai, serta juga memiliki kesamaan dengan (mendukung) "nilai-nilai" pribadi karyawan

There are 2 (two) factors that can affect the level of employee attachment to a corporation, namely Rational Commitment and Emotional Commitment. Rational Commitment is a commitment that arises because employees feel the Corporation is a workplace that can meet their needs (i.e. beneficial for themselves). Emotional Commitment is a commitment that arises because employees believe the Corporation is able to make them feel comfortable and valued and also because there are similarities with the personal "values" of employees.

Terdapat 4 (empat) faktor yang dapat mempengaruhi komitmen karyawan yang juga berpengaruh kepada tingkat keterikatan karyawan terhadap Perseroan, yakni:

- Atasan Langsung (*Direct Manager*)
- Pekerjaan Sehari-hari (*Day-to-day work*)
- Tim (*Team*)
- Organisasi (*Organization*)

There are 4 (four) factors that can affect employee commitment and that also affect the level of employee engagement with the Corporation, namely:

- *Direct Supervisor (Direct Manager)*
- *Daily work (Day-to-day work)*
- *Team*
- *Organization*

Discretionary Effort dan *Intention to Stay* merupakan 2 (dua) karakteristik yang membuat karyawan memiliki *engagement* atau keterikatan terhadap Perseroan. *Discretionary Effort* adalah kesediaan karyawan untuk mengeluarkan usaha lebih dalam melakukan pekerjaannya dan berkontribusi untuk Perseroan (kinerja). *Intention to Stay* adalah kesediaan karyawan untuk bertahan dalam Perseroan untuk jangka waktu yang lama (retensi).

Discretionary Effort and Intention to Stay are 2 (two) characteristics that make Employees feel an engagement or attachment to the Corporation. Discretionary Effort is the willingness of Employees to spend more effort in completing their work and contribute to the Corporation (performance). Intention to Stay is the willingness of Employees to remain in the Corporation for long periods of time (retention).

Metode Survei

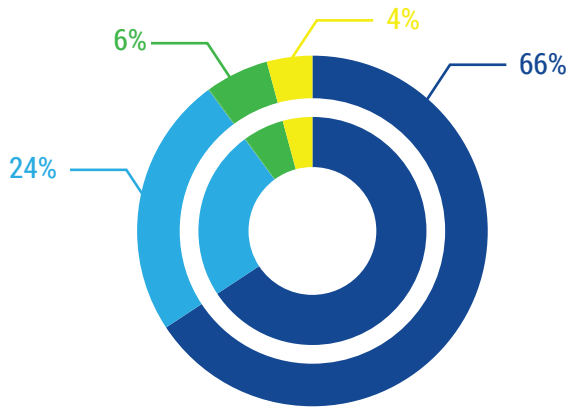
Survey Method

Jumlah karyawan Perseroan ada sebanyak 676 orang sampai dengan Desember 2019, dan 619 di antaranya merupakan populasi Karyawan dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun. Sampel yang diambil pada saat survei dibagikan sebanyak 355 orang dari total populasi karyawan.

The number of Corporate employees stood at 676 people as of December 2019, 619 of which were Employees with more than 3 (three) years of service behind them. Samples taken at the time of the survey were distributed among 355 employees.

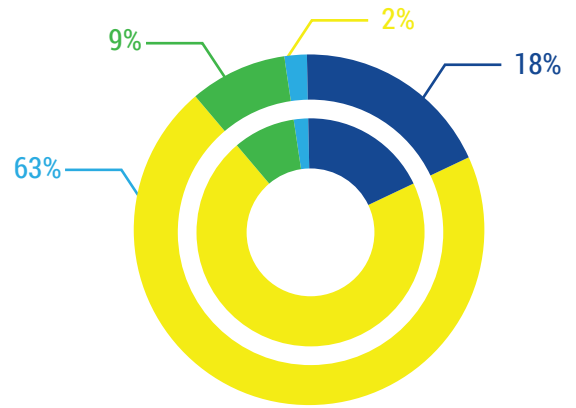
Berikut grafik demografi sampel pengambilan Survei Internal atas Komitmen dan Keterikatan Karyawan Perseroan pada tahun 2019:

The following demographic charts address the internal Corporation Commitment and Employee Commitment survey with samples taken during 2019:



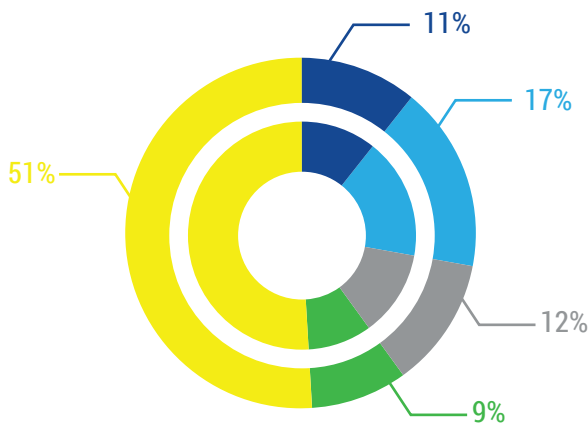
Usia Age

- 20 - 30 Tahun Years Old
- 31 - 40 Tahun Years Old
- 41 - 50 Tahun Years Old
- >50 Tahun Years Old



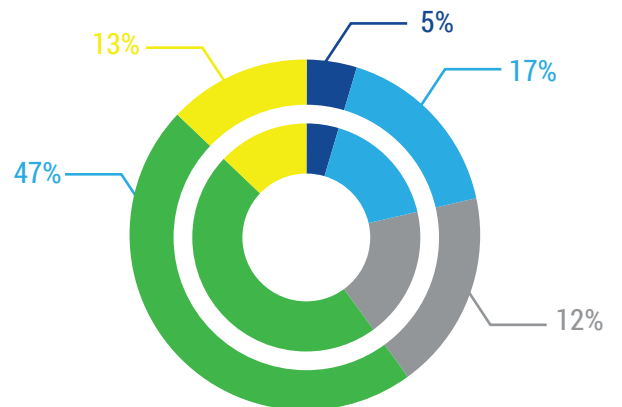
Periode Kerja Working Period

- <1 Tahun Years
- 1 - 3 Tahun Years
- 4 - 6 Tahun Years
- 7 - 9 Tahun Years



Direktorat Directorate

- Direktorat Utama Main Directorate
- Direktorat Keuangan dan Manajemen Korporasi Finance and Corporate Management
- Direktorat Konstruksi Construction Directorate
- Direktorat Pengembangan Bisnis Business Development Directorate
- Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Operation and Maintenance Directorate



Level Jabatan Job Level

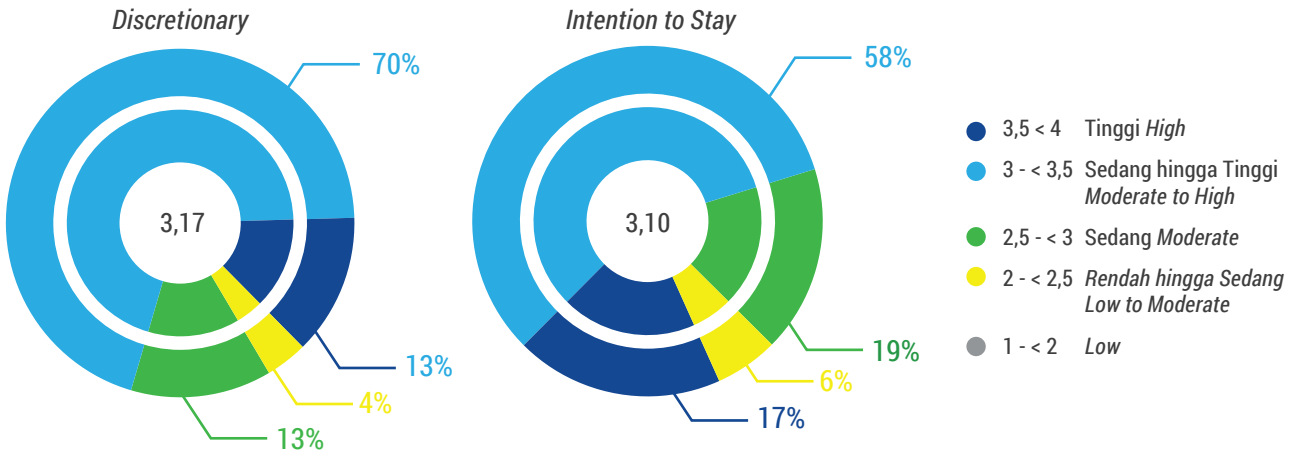
- Kepala Divisi Division Head
- Kepala Departemen Department Head
- Kepala Seksi Section Head
- Spesialis/Insinyur Specialist / Engineer
- Staf Staff Member

Grafik. 6.5
Graphic. 6.5

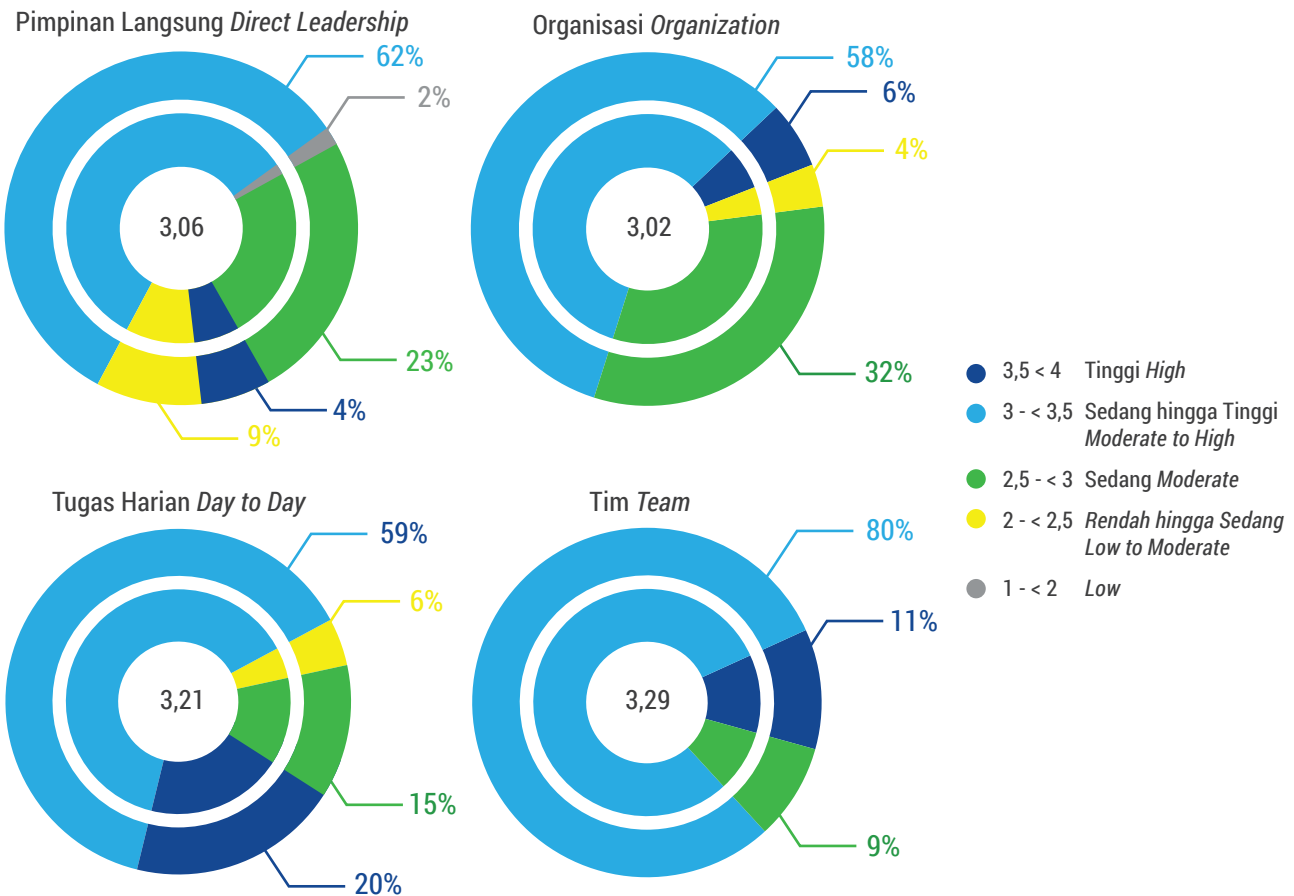
HASIL SURVEI

Survey Results

Keterikatan Engagement



Komitmen Commitment



Grafik. 6.5
Graphic. 6.5

PENERAPAN INISIATIF DAN PROGRAM BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

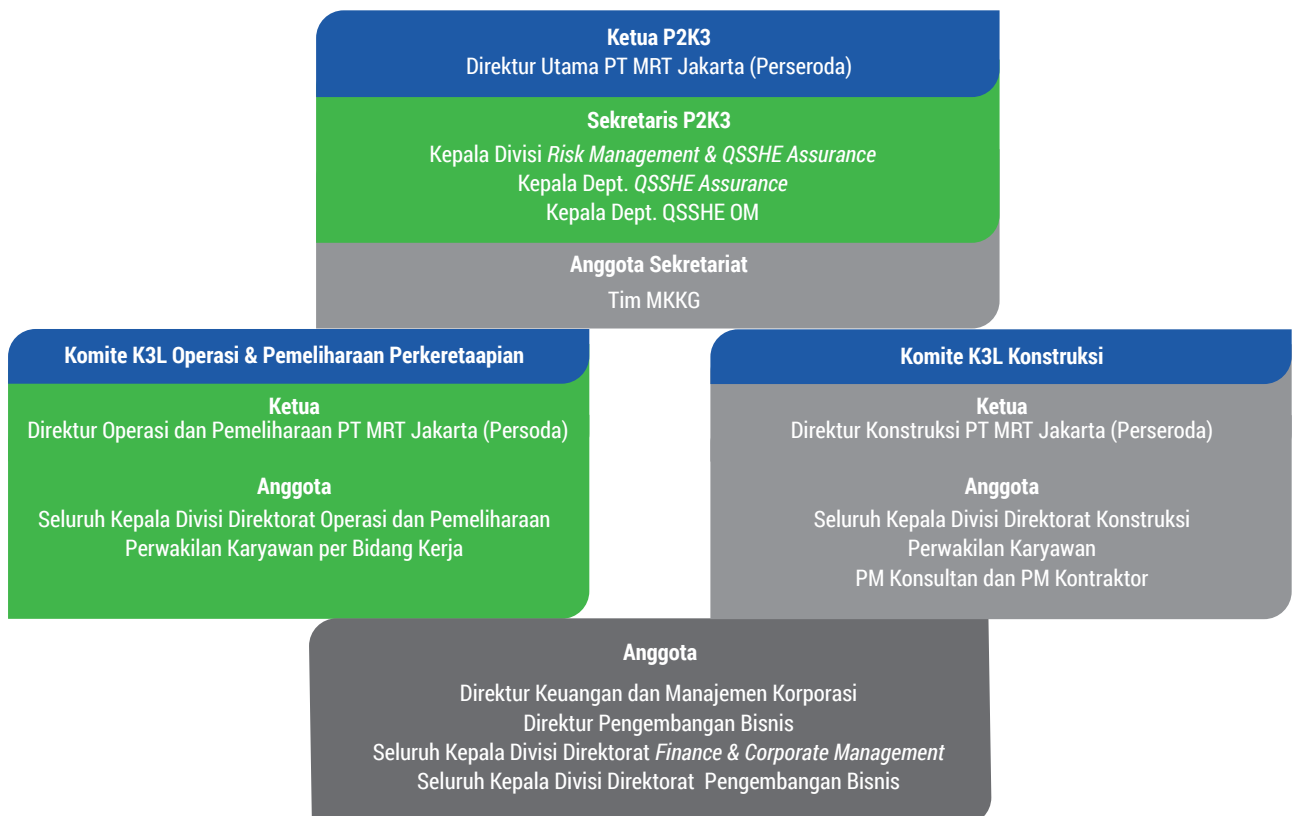
IMPLEMENTATION OF INITIATIVES AND PROGRAMS IN THE FIELD OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Pembentukan P2K3

P2K3 Formation

Sebagai entitas usaha yang berkomitmen dalam kepatuhan atas norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perseroan membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Pembentukan organisasi ini mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. PER.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja. P2K3 merupakan badan pembantu yang merupakan wadah kerja sama antara Perseroan dan karyawan untuk mengembangkan kerja sama dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja.

As a business entity that is committed to compliance with occupational safety and health norms, as well as regulations and legislation which are applicable within Indonesia, the Corporation has formed a Safety Committee (P2K3). The formation of this organization refers to Minister of Manpower Regulation No. PER.04 / MEN / 1987 concerning the Committee for Guidance for Occupational Safety and Health and Procedures for the Appointment of Work Safety Experts. P2K3 is an auxiliary body which allows for cooperation between the Corporation and employees as regards the application of occupational safety and health.



Figur. 7.5
Figure. 7.5

Struktur P2K3 Perseroan mengalami perubahan pada tahun 2019 yang sudah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor Keputusan 3214 Tahun 2019.

The Corporation's P2K3 structure underwent a change in 2019 which was approved by the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office through the issuance of Decree Number 3214 of 2019.

Kontrol Perseroan Terhadap Mitra Kerja Terkait Keselamatan Kerja

Corporate Control of Work Partners in Relation to Work Safety

Perseroan pengelolaan menekankan pentingnya keselamatan kerja kepada seluruh kontraktor yang melakukan pekerjaan proyek pembangunan MRT Jakarta; tidak terkecuali kepada tamu yang kebetulan melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau kemajuan proyek. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti alat barikade area kerja, APAR (alat pemadam api ringan), hidran, helm pengaman, *safety shoes*, dan rompi berpendingin maupun pakaian bekerja yang sesuai diwajibkan tanpa pengecualian.

Perseroan juga mewajibkan seluruh kontraktor untuk terus meningkatkan kesadaran para pekerja proyek akan pentingnya keselamatan kerja. Faktor pengetahuan umum dan pengetahuan teknis akan beroperasinya alat-alat di lapangan harus disosialisasikan kepada seluruh proyek. Hal ini penting, agar setiap pekerja memahami proses beroperasinya alat saat bekerja dan dapat menghindari risiko kecelakaan secara lebih dini. Selain itu, Perseroan mewajibkan untuk peralatan yang modern dari kontraktor harus diikuti dengan standarisasi internasional terkait pengetahuan tentang keselamatan kerja dan pencegahannya bagi seluruh pekerja.

The Corporation always stresses the importance of Work Safety among all contractors who carry out their work in relation to the MRT Jakarta construction project; while no exceptions are made for guests who make field visits in order to review the progress of the project. The use of personal protective equipment, such as cones, fire extinguishers, hydrants, safety helmets, safety shoes and reflective vests, as well as proper wear pack uniforms for work, is required without any exception.

The Corporation also requires all of its contractors to continue to increase awareness among project workers of the importance of work safety. General knowledge and technical knowledge of the operation of tools in the field must be disseminated across all projects. This is important, so that every worker understands the operation of a given tool while they are on the job and can thus avoid the risk of accidents. In addition, the Corporation requires its contractors to utilize modern equipment and to observe international standards relating to work safety and accident prevention for all project workers.

Sarana Keselamatan Kerja

Occupational Safety Tools

Pada area kantor pusat tempat Perseroan dan seluruh karyawan melakukan aktivitas, Perseroan telah melengkapi seluruh kantor operasional (kantor pusat dan kantor proyek/*worksites*) dengan berbagai perangkat keselamatan kerja seperti: Alat Pemadam Api Ringan (APAR), pompa hidran kebakaran, sensor deteksi asap, tangga darurat, dan alat penunjang keselamatan kerja lainnya. Fasilitas keselamatan dalam gedung dimana kantor Perseroan telah sesuai dengan standar alat keselamatan kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.

In the head office area where the Corporation and all of its employees carry out their activities, the Company has equipped all of its operational offices (head office and project offices/work sites) with various work safety devices, including: Light Fire Extinguishers (APAR), fire hydrant pumps, smoke detectors, emergency stairs and other work-safety support tools. Safety facilities in buildings in which the Corporation has offices are in accordance with fire safety equipment standards based on Minister of Public Works Regulation on Technical Requirements for Fire Protection Systems in Buildings and the Environment.

FOTO-FOTO SARANA KESELAMATAN KERJA

Photographs of Work Safety Facilities



Gambar. 7.9
Image. 7.9



Gambar. 7.10
Image. 7.10



Gambar. 7.11
Image. 7.11



Gambar. 7.12
Image. 7.12



Gambar. 7.13
Image. 7.13



Gambar. 7.14
Image. 7.14



Gambar. 7.15
Image. 7.15



Gambar. 7.16
Image. 7.16



Gambar. 7.17
Image. 7.17



Gambar. 7.18
Image. 7.18



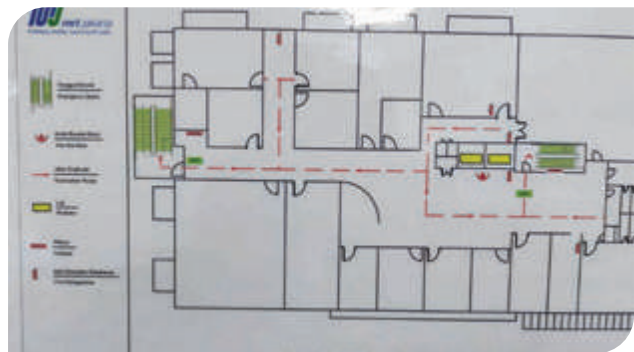
Gambar. 7.19
Image. 7.19



Gambar. 7.20
Image. 7.20

| NOMOR DARURAT EMERGENCY CALLS | |
|--|---------------------------------|
| PEMADAM KEBAKARAN / FIRE FIGHTING | |
| COMMAND CENTER | (021) 63858213, 63855357 |
| SUB COMMAND CENTER JAKARTA PUSAT | (021) 6344215, 6328469, 6328576 |
| SUB COMMAND CENTER LEBAK BULUS | (021) 7694519, 7515054 |
| LAYANAN MEDIS / MEDICAL SERVICE | |
| ALARM CENTER KLINIK MRT JAKARTA | |
| Dr. NIKI ERISTA AYUDIA | 081196201480 |
| POS LAYANAN KESEHATAN | |
| STASIUN LEBAK BULUS | 081196201482 |
| STASIUN BLOK M | 081196201483 |
| STASIUN SENAYAN | 081196201484 |
| STASIUN DUKU ATAS | 081196201485 |
| STASIUN BUNARAN HI | 081196201486 |
| AMBULANS GAWAT DARURAT (AGD) DKI | 119 |

Gambar. 7.21
Image. 7.21



Gambar. 7.22
Image. 7.22

Sosialisasi dan Keselamatan K3 *OSH Information and Training*

Perseroan menempatkan sosialisasi keselamatan kerja sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses konstruksi maupun dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan. Proses sosialisasi dilakukan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proyek, baik para pekerja, maupun kepada pengguna jalan umum yang melintas di area proyek konstruksi MRT Jakarta.

The Corporation emphasizes work safety socialization as one of the most important factors during the construction process, as well as during all operations and maintenance activities. The socialization process is implemented among all parties involved in the project, including both workers and public road users who pass through MRT Jakarta construction project areas.

| No. | Bulan Month | Nama Training/Sosialisasi Training Name/Dissemination | Peserta Participant |
|-----|--|---|--|
| 1. | November 2019 <i>November, 2019</i> | Sosialisasi Anti Kekerasan pada Perempuan <i>Dissemination of Anti Violence against Women information</i> | Perwakilan Karyawan dan Pihak Ketiga <i>Representatives of Employees and third parties</i> |
| 2. | November 2019 <i>November, 2019</i> | Sosialisasi Pencegahan dan Penyebaran HIV AIDS di tempat kerja <i>Dissemination of Prevention and Spread of HIV AIDS information</i> | "Perwakilan Karyawan dan Pihak Ketiga <i>Representatives of Employees and third parties</i> |

Tabel. 7.27
Table. 7.27

SOSIALISASI HIV-AIDS DAN ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (22 NOVEMBER 2019) *Dissemination of HIV-AIDS Prevention and Anti -Violence Against Women (November 22, 2019)*



Gambar. 7.23
Image. 7.23

PEMAPARAN KESELAMATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Operational and Maintenance Safety Highlights



Gambar. 7.24
Image. 7.24

DISKUSI KESELAMATAN MINGGUAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Operational and Maintenance Weekly Safety Talk



Gambar. 7.25
Image. 7.25

PEDOMAN KESELAMATAN MINGGUAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Operation and Maintenance Weekly Safety Induction



Gambar. 7.26
Image. 7.26

VIDEO PEDOMAN KESELAMATAN MRT JAKARTA

Safety Induction Video MRT Jakarta



Gambar. 7.27
Image. 7.27

Perseroan memberikan pengenalan pedoman keselamatan bekerja di Perseroan bagi setiap karyawan dan pekerja yang akan bekerja di seluruh area operasional Perseroan. Inspeksi terhadap peralatan sistem proteksi kebakaran dilakukan secara periodik. Perseroan juga telah melakukan pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan terhadap tanggap darurat kebakaran di seluruh area operasional Perseroan yaitu lokasi proyek, depo, dan stasiun dengan standar prosedur yang sesuai dengan situasi dan kondisi aktual di lapangan.

The Corporation provides safety induction guidelines for employees and workers that will work in operational areas. Periodic inspections of fire protection systems are also undertaken, while the Corporation also implements fire emergency contingency training and simulations across all operational areas, such as project work sites, depots and stations, through their respective standard procedures, according to the characteristics of the actual situations and conditions out in the field.

FOTO-FOTO KEGIATAN SIMULASI

Photographs of Simulation Activities



Gambar. 7.28
Image. 7.28



Gambar. 7.29
Image. 7.29



Gambar. 7.30
Image. 7.30



Gambar. 7.31
Image. 7.31



Gambar. 7.32
Image. 7.32



Gambar. 7.33
Image. 7.33



Gambar. 7.34
Image. 7.34



Gambar. 7.35
Image. 7.35



Gambar. 7.36
Image. 7.36



Gambar. 7.37
Image. 7.37

DATA PELATIHAN/EKSEKUSI KESELAMATAN KERJA DI TAHUN 2019

Training Data / Safety Training in 2019

| No. | Bulan Month | Nama Pelatihan/Sosialisasi Training Name/Socialization | Peserta Participant |
|-----|------------------------|---|--|
| 1. | Juli July | "Pelatihan Awareness ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 <i>Awareness Training ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018</i> | Kepala Divisi, Kepala Departemen, Perwakilan karyawan dari setiap Departemen (PIC ISO) <i>Head of Division, Head of Department, Representatives of Employees from each Department (PIC ISO)</i> |
| 2. | Juli July | Pelatihan HIRADC & IADL <i>HIRADC & IADL Training</i> | Kepala Divisi, Kepala Departemen, Perwakilan karyawan dari setiap Departemen (PIC ISO) <i>Head of Division, Head of Department, Representatives of Employees from each Department (PIC ISO)</i> |
| 3. | Agustus August | Pelatihan FMEA <i>FMEA Training</i> | Kepala Divisi, Kepala Departemen, Perwakilan karyawan dari setiap Departemen (PIC ISO) <i>Head of Division, Head of Department, Representatives of Employees from each Department (PIC ISO)</i> |
| 4. | September September | Pelatihan Pengendalian Dokumen <i>Document Control Training</i> | Perwakilan karyawan dari setiap Departemen (PIC ISO) <i>Representatives of Employees from each Department (PIC ISO)</i> |
| 5. | September September | Keamanan Berdasarkan Perilaku <i>Behavior Based Safety</i> | Kepala Departemen <i>Head of Department</i> |
| 6. | Oktober October | Pelatihan Audit Internal ISO Terintegrasi <i>Integrated Internal Audit ISO Training</i> | Perwakilan karyawan dari setiap Departemen (PIC ISO) <i>Representatives of Employees from each Department (PIC ISO)</i> |
| 7. | Oktober October | Pelatihan Teknik Pemadaman Api menggunakan APAR <i>Fire Extinguishing Technique training using APAR</i> | Keamanan <i>Security</i> |
| 8. | Desember December | Pelatihan P3K (Basic First Aid) <i>Training in Basic First Aid</i> | Perwakilan karyawan <i>Representatives of Employees</i> |

Tabel. 7.28
Table. 7.28

DOKUMEN PELATIHAN KESELAMATAN KERJA DI TAHUN 2019*Safety Training Documentation 2019*Gambar 7.40
Image 7.40Gambar 7.41
Image 7.41**Kecelakaan Kerja**
Work Accident

Perseroan memiliki kebijakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai bagian dari pemenuhan hak kerja karyawan. Definisi dan jenis kecelakaan kerja di lingkup Perseroan adalah sebagai berikut:

1. *Fatality* adalah kecelakaan yang mengakibatkan karyawan/personel kehilangan nyawa dalam waktu 24 jam terhitung waktu terjadinya kecelakaan tersebut;
2. *Lost Time Injury (LTI)* terjadi ketika karyawan yang terluka atau sakit mengalami hari hilang kerja. Dalam situasi ini, karyawan yang terluka atau sakit harus terlepas dari pekerjaan untuk perawatan medis atau pemulihan pada hari setelah kecelakaan terjadi atau penyakit mulai timbul sesuai dengan hari kalender. LTI juga termasuk di dalamnya kejadian cedera berat. Cedera berat merupakan cedera yang mengakibatkan cacat tetap, yaitu kehilangan atau tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ tubuh atau gangguan jiwa;
3. *Restricted Work Day Case (RWDC)* adalah akibat dari cedera atau penyakit akibat kerja menimbulkan kondisi karyawan ditugaskan untuk pekerjaan lain secara sementara atau permanen (transfer ke pekerjaan lain) atau; karyawan bekerja di pekerjaan yang ditugaskan secara permanen tetapi kurang dari waktu penuh atau; karyawan bekerja di pekerjaan yang ditugaskan secara permanen tetapi tidak dapat melakukan semua tugas yang biasa terkait dengannya. RWDC juga termasuk dalam kategori cedera ringan;
4. *Medical Treatment Cases (MTC)* adalah kasus kecelakaan kerja yang perawatan lukanya dilakukan oleh tenaga medis profesional (perawat/dokter). Dalam kasus ini tidak menyebabkan kehilangan waktu kerja pada *shift*/hari berikutnya. MTC termasuk dalam kategori cedera ringan. Cedera ringan adalah cedera yang memerlukan perawatan medis sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan tidak lebih dari 1 (satu) hari. MTC tidak termasuk pada

The Corporation operates a Work Accident Insurance Program as part of its commitment to fulfilling its employees' work rights. The definitions and types of work accidents within the scope of the Corporation are as follows:

1. *A fatality is an accident that results in employees/personnel losing their lives within 24 hours of an accident occurring;*
2. *A Lost Time Injury (LTI) occurs when employees who are injured or sick experience a day of lost work. In this situation, employees who are injured or sick must be discharged from work for medical treatment or recovery on the day after the accident occurs or the illness begins to occur according to calendar days. LTI also includes the incidence of severe injuries. A severe injury is an injury that results in permanent disability, i.e. loss or malfunction of one or more organs or mental disorders;*
3. *A Restricted Work Day Case (RWDC) is where, as a result of work injury or illness, a worker is assigned to another job either temporarily or permanently (transfer to another job); or the worker works in the same job to which they were permanently assigned but work hours less than full time; or the worker works in a job to which they were permanently assigned but cannot perform all the usual tasks associated with it. RWDC is also included in the category of minor injuries;*
4. *Medical Treatment Cases (MTC) are work accident cases that require treatment of wounds by professional medical personnel (nurses/doctors). In this case, there is no loss of work time during the next shift/day. Medical Treatment Cases (MTC) are included in the category of minor injuries. Minor injuries are injuries that require medical treatment so that work is stopped for no longer than 1 (one) day. MTC do not include*



- Kunjungan ke dokter atau profesional perawatan kesehatan berlisensi lainnya semata-mata untuk observasi atau konseling;
 - Pelaksanaan prosedur diagnostik, seperti *x-rays* dan tes darah, termasuk pemberian obat yang diresepkan hanya digunakan untuk tujuan diagnostik (misalnya, tetes mata untuk melebarkan pupil); atau
 - *First Aid Case (FAC)*
5. *First Aid Cases (FAC)* adalah kasus kecelakaan kerja yang dalam perawatan lukanya tidak membutuhkan penanganan dari tenaga medis profesional (perawat/dokter), cukup Unit P3K yang sudah diberikan pelatihan, termasuk:
- Penggunaan obat tanpa resep yang tidak memerlukan dosis khusus;
 - Pemberian imunisasi tetanus (imunisasi lainnya, seperti vaksin Hepatitis B atau vaksin rabies, dianggap sebagai pengobatan medis);
 - Pembersihan, penyiraman, atau perendaman luka di permukaan kulit;
 - Penggunaan penutup luka seperti perban, *Band-Aids*, bantalan kasa, dan lain-lain; atau menggunakan *butterfly bandages* atau *steri-strips* (perangkat penutupan luka lainnya seperti jahitan, *staples*, dan lain-lain, dianggap sebagai MTC);
 - Penggunaan terapi panas atau dingin;
 - Penggunaan segala sarana pendukung yang tidak kaku, seperti perban elastis, pembungkus luka, *non-rigid back belts*, dan lain-lain (perangkat dengan sistem tetap atau sistem lain yang dirancang untuk menghentikan pergerakan tubuh dianggap sebagai MTC untuk tujuan penyimpanan catatan);
 - Menggunakan perangkat imobilisasi sementara saat mengangkat korban kecelakaan (misalnya *splint*, *sling*, *neck collars*, *back board*, dan lain-lain);
 - Pengeboran kuku tangan atau kuku kaki untuk menghilangkan tekanan, atau mengalirkan cairan lepuhan;
 - Penggunaan penutup mata;
 - Pembuangan benda asing dari mata hanya menggunakan irigasi atau kapas;
 - Pembuangan serpihan atau benda asing dari area selain mata dengan irigasi, pinset, kapas, atau alat sederhana lainnya;
 - Penggunaan *finger guards*;
 - Pemijatan (terapi fisik atau perawatan *kiropraktik* dianggap sebagai MTC untuk tujuan penyimpanan catatan); atau
 - Minum cairan untuk menghilangkan *heat stress*.
6. Nyaris celaka yang tidak menyebabkan cedera atau sakit dan/atau kerusakan (kerugian) untuk aset, lingkungan, atau reputasi Perseroan.
- *Visits to doctors or other licensed health care professionals which are undertaken solely for observation or counseling purposes;*
 - *Performance of diagnostic procedures, such as x-rays and blood tests, including the administration of prescribed drugs that are only used for diagnostic purposes (for example, eyedrops to dilate pupils); or*
 - *First Aid Case (FAC)*
5. *First Aid Cases (FAC)* are cases of work accidents which do not require the treatment of injuries from professional medical personnel (nurses / doctors), only the first aid units that have been given training, including:
- *Use of non-prescription drugs which do not require special doses;*
 - *Tetanus immunization (other immunizations, such as the Hepatitis B vaccine or rabies vaccine, are considered medical treatments);*
 - *Cleansing, watering or soaking of surface wounds;*
 - *Use of wound covers such as bandages, Band- Aids, gauze pads, etc; or use butterfly bandages or Steri-Strips (other wound closure devices such as stitches, staples, etc., are considered MTC);*
 - *Use of heat or cold therapy;*
 - *Use of support facilities that are not rigid, such as elastic bandages, wraps, non-rigid back belts, etc. (Devices with fixed systems or other systems designed to stop bodily movements are considered MTC for record keeping purposes);*
 - *Use temporary immobilization devices when transporting accident victims (for example splints, slings, neck collars, back boards, etc.);*
 - *Drilling of fingernails or toenails to relieve pressure, or the draining of blisters;*
 - *Use of eye patches;*
 - *The removal of external object from the eye using only irrigation or cotton;*
 - *Removal of debris or external object from areas other than the eye by irrigation, tweezers, cotton wool or other simple tools;*
 - *Use of finger guards;*
 - *Massage (physical therapy or chiropractic care is considered as MTC for the purpose of keeping records); or*
 - *Drinking of fluids to relieve heat stress.*
6. *Near misses that do not cause injury or illness and/or damage (loss) to the Corporation's assets, environment or reputation.*

SURVEI DAN INSPEKSI KESELAMATAN KERJA*Surveys and Safety Inspection*

| Tanggal <i>Date</i> | Jenis Survei <i>Type of Survey</i> | Metode <i>Method</i> | Dilakukan Oleh <i>Carried by</i> | Hasil <i>Result</i> |
|---------------------------------------|---|--|---|---|
| Februari 2019 <i>February 2019</i> | Penilaian Keamanan Perkeretaapian PT MRT Jakarta (Perseroda) Fase 1 <i>Safety assessment of the PT. MRT Jakarta (Perseroda) Phase 1 Railway</i> | Lembar centang, survei, dan wawancara <i>Checksheet, survey and interview</i> | Direktorat Jenderal Perkeretaapian <i>Directorate-General of Railways</i> | Berita acara penilaian keamanan <i>Safety assessment minutes</i> |
| Maret 2019 <i>March 2019</i> | Rekomendasi Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian <i>Recommendations for Railway Safety Management System</i> | Lembar centang, survei, dan wawancara <i>Checksheet, survey and interview</i> | Direktorat Jenderal Perkeretaapian <i>Directorate-General of Railways</i> | Surat rekomendasi <i>Recommendation letter</i> |
| Maret 2019 <i>March 2019</i> | Pemeriksaan dan uji coba sistem proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa stasiun dan depo MRT <i>Examination and testing of fire protection systems and life-saving facilities at MRT stations and depots</i> | Uji Coba <i>Testing</i> | Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan <i>Directorate of Fire and Safety management</i> | Berita acara hasil pemeriksaan <i>Recommendation letter</i> |

Tabel 7.23
*Table 7.23***AUDIT KESELAMATAN KERJA***Audit of Occupational Safety*

| Uraian tentang Audit <i>Description Audit</i> | Auditor <i>Auditor</i> | Waktu Pelaksanaan <i>Implementation</i> | Hasil Audit <i>Audit Result</i> |
|---|---|--|---|
| Audit Eksternal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Tingkat: Lanjutan) <i>External Audit of the Implementation of the Management System for Occupational Safety and Health (level: advanced)</i> | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) <i>PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)</i> | 7-9 Januari 2019 <i>January 7-9, 2019</i> | 92,17% dari Kriteria Audit SMK3 dalam Lampiran II PP 50 Tahun 2012 <i>92.17% for the Audit Criteria of SMK3 under attachment II of PP 50, 2012</i> |
| Audit Eksternal ISO Terintegrasi (9001:2015; 14001:2015; dan 45001:2018) <i>External Audit of integrated ISO (9001:2015; 14001:2015; and 45001:2018)</i> | PT TUV Rheinland Indonesia <i>PT TUV Rheinland Indonesia</i> | 16-20 Desember 2019 <i>December 16-20, 2019</i> | <i>Passed</i> |

Tabel 7.24
Table 7.24



Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Bagi Karyawan

Health Facilities and Insurance for Employees

Perseroan memfasilitasi karyawan dengan beberapa kegiatan yang diharapkan dapat membangkitkan kesadaran dan motivasi dalam menjaga kesehatan masing-masing. Fasilitas kesehatan yang diselenggarakan Perseroan adalah:

1. Fasilitas kesehatan berkala meliputi fasilitas *Medical Check Up*.
2. Fasilitas pengobatan yaitu jaminan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit, rawat jalan setelah keluar dari rumah sakit, biaya persalinan, biaya perawatan gigi, penggantian kaca mata, alat bantu dengar, pemeriksaan lab, dan pengobatan medis lainnya yang direkomendasikan dokter pasca rawat inap.

Selain itu Perseroan juga menyediakan fasilitas poliklinik dan tenaga dokter guna memberikan pelayanan jasa medis atau kedokteran kepada karyawan dan keluarganya.

Di samping fasilitas di atas, Perseroan mengikutsertakan karyawan dan keluarganya dengan asuransi kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan proteksi dan biaya pertanggungans asuransi saat menjalani pemeriksaan kesehatan atau perawatan di rumah sakit termasuk jaminan bagi karyawan dan istri karyawan yang menjalani persalinan.

The Corporation facilitates employees through several activities aimed at generating awareness and motivation as regards maintaining personal health. The various health facilities organized by the Corporate comprise:

1. *Periodic health facilities including Medical Check Up facilities.*
2. *Treatment facilities, namely guaranteed reimbursement of inpatient hospital costs, outpatient costs after discharge from hospital, labor costs, dental care costs, replacement glasses, hearing aids, laboratory examinations and other medical treatments recommended by post-hospitalization doctors.*

In addition, the Corporation also provides polyclinic facilities and doctors who offer medical and doctor services to employees and their families.

In addition to the above-mentioned facilities, the Corporation also offers its employees and families health insurance, as organized by the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), the implementation of which is carried out in stages. This facility aims to provide protection and insurance coverage costs in relation to medical examinations and hospital treatment, including guarantees for employees and wives of employees during childbirth.

| Perihal Subject | 2019 | 2018 | Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease) | |
|--|---------------|---------------|---|----------------------------------|
| | | | Jumlah Amount | Persentase (%) Percentage (%) |
| Jumlah Klaim yang Disetujui (Rp) <i>Approved Claims (Rp)</i> | 8.749.951.936 | 3.578.725.427 | 12.328.677.363 | 144% |
| Jumlah Klaim <i>Claim number</i> | 4,967 | 2,664 | 7,631 | 86% |
| Jumlah Karyawan (Beserta Keluarga) yang Klaim (orang) <i>Number of employee (including family members) claims (number of persons)</i> | 1,018 | 591 | 1,609 | 72% |

Tabel 7.25
Table 7.25

SARANA KESEHATAN KERJA

OCCUPATIONAL HEALTH FACILITIES

Perseroan telah melengkapi seluruh kantor operasional (kantor pusat dan kantor proyek/*worksites*) dengan berbagai perangkat kesehatan kerja seperti: Klinik kesehatan, paramedis, kotak P3K, dan *ambulance*.

Pos Kesehatan

- Tersedia 1 Klinik Kesehatan di Depo Lebak Bulus dengan dokter dan paramedis yang melayani 24 jam.

The Corporation has equipped all of its operational offices (head offices and project offices/work sites) with a variety of occupational health equipment such as: Health Clinics, Medics, First-Aid Kits and Ambulances.

Health Posts

- *There is 1 health clinic available at the Lebak Bulus Depot with 24-hour doctors and paramedics available.*

- Tersedia 5 Pos Kesehatan di Stasiun Lebak Bulus, Blok M, Senayan, Dukuh Atas, dan Bundaran HI dengan paramedis jaga mengikuti jam operasional MRT.
- Ambulans tersedia siaga di Depo Lebak Bulus.
- Kotak P3K tersedia di seluruh area kerja depo maupun stasiun.

Pos kesehatan telah mendapatkan izin dari Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

- There are 5 Health Posts available at LBB, BLM, SNy, DKA and BHI stations with paramedics on duty and which follow MRT operating hours.
- An ambulance is available on standby at the Lebak Bulus Depot.
- First-aid kits are available throughout the working areas of the depot and the station.

The health post has obtained a permit from Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).



Gambar 7.42. Pos kesehatan
Image 7.42. Health Pos



Gambar 7.43. Ambulans
Image 7.43. Ambulance



Gambar 7.44. Klinik Kesehatan di Lebak Bulus Depo
Image 7.44. Health clinic in Lebak Bulus Depo



Gambar 7.45. Kotak P3K
Image 7.45. First aid kits

PENGADUAN MASALAH KETENAGAKERJAAN, KESELAMATAN, DAN KESEHATAN KERJA COMPLAINTS ABOUT EMPLOYMENT, SAFETY AND HEALTH ISSUES

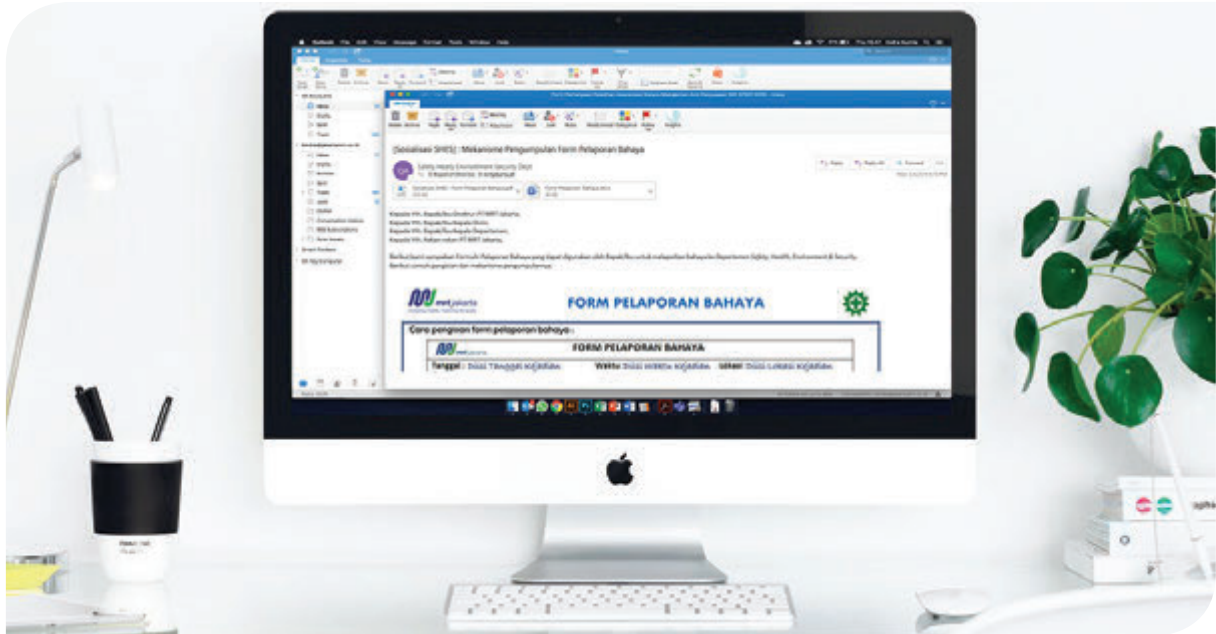
Dalam rangka memastikan bahwa kebijakan K3 terjaga dengan baik, maka Departemen *Quality, Safety, Security, Health, and Environment Assurance (QSSHE Assurance)* telah membuat mekanisme pengaduan masalah di lingkungan kerja dengan menggunakan sistem pengisian 'Form Pelaporan Bahaya'. Form tersebut tersebar di beberapa titik di kantor pusat, depo, dan stasiun MRT Jakarta yang dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh karyawan Perseroan.

Pada tahun 2019, Unit Kerja *QSSHE Assurance* telah melakukan sosialisasi terkait pengisian Form Pelaporan Bahaya melalui media intranet (*e-mail*) yang dikirim kepada seluruh karyawan.

In order to ensure that the OSH policy is well maintained, the Department of Quality, Safety, Security, Health and Environment Assurance (QSSHE Assurance) has established a mechanism for complaints about problems within the work environment which involves the 'Hazard Reporting Form' system. The form is displayed at several points throughout the Jakarta head office, depot and MRT stations and can easily be accessed by all of the Corporation's employees.

In 2019, the QSSHE Assurance work unit implemented a socialization relating to a filling out of Hazard Reporting Forms via intranet media (e-mails) which were sent to all of the Corporation's employees.

SOSIALISASI PENGISIAN FORM PELAPORAN BAHAYA PT MRT JAKARTA (PERSERODA)
Socialization of the Completion of PT MRT Jakarta (Perseroda) Hazard Reporting Forms



Gambar 7.46
Image 7.46

Berikut merupakan tata cara pengisian Form Pelaporan Bahaya Perseroan: *The following example shows a completed Corporate Hazard Reporting Form:*

LAPORAN BAHAYA KARYAWAN MRT JAKARTA TAHUN 2019
Employee Danger Report 2019

Gambar 7.47
Image 7.47

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI DI BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

AWARDS AND CERTIFICATION IN THE FIELD OF LABOR, SAFETY AND HEALTH

SERTIFIKASI BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA YANG MASIH BERLAKU DI TAHUN 2019

The Field of Labor, Safety, and Health Certification in force during 2019

| Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi <i>Date of certificate release</i> | Jenis Sertifikat <i>Type of Certificate</i> | Dikeluarkan Oleh <i>Released by</i> | Masa Berlaku Hingga <i>Valid Until</i> |
|--|---|--|---|
| 29 Maret 2019 <i>March 29, 2019</i> | Sertifikat Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Bendera Emas) <i>Occupational Safety and Health Management System Award Certificate (Gold Flag)</i> | Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia <i>Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia</i> | 2022 |
| 20 Desember 2019 <i>December 20, 2019</i> | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | TUVRhineland <i>TUVRhineland</i> | 2022 |

Tabel 7.26
Table 7.26

DAMPAK KUANTITATIF TANGGUNG JAWAB ASPEK KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

QUANTITATIVE IMPACTS OF EMPLOYMENT, HEALTH AND SAFETY RESPONSIBILITIES

Berikut disampaikan biaya dan/atau investasi yang dilakukan Perseroan dalam mewujudkan tanggung jawab bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja.

The following table shows the costs and/or investments made by the Corporation in realizing its responsibilities within the fields of Manpower, Safety and Health

| | Realisasi 2019 <i>Realization 2019</i> (Rp) | Anggaran 2019 <i>Budget 2019</i> (Rp) | Penyerapan Anggaran 2019 <i>Budget Absorption 2019</i> (%) |
|---|---|---|--|
| | 1 | 2 | (1:2) |
| Fasilitas Kesehatan <i>Health Facilities</i> | 8.440.222.640 | 10.236.425.142 | 82% |
| BPJS Kesehatan <i>BPJS Health</i> | 1.788.337.895 | 2.095.164.116 | 85% |
| BPJS Ketenagakerjaan <i>BPJS of Employment</i> | 4.565.032.038 | 4.311.922.461 | 106% |
| Jaminan Sosial Hubungan Kerja di Luar Jam Kerja <i>Employment Social Guarantee for outside Working Hours</i> | 169.169.514 | 199.171.382 | 85% |
| Dana Pensiun <i>Pension Fund</i> | 2.213.849.224 | 3.070.558.801 | 72% |

Tabel 7.27
Table 7.27

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG TANGGUNG JAWAB TERHADAP KUALITAS PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA (LAYANAN BERMUTU)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DURING THE PROVISION OF QUALITY GOODS AND SERVICES TO CUSTOMERS AND WORK PARTNERS (QUALITY SERVICE)

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

COMMITMENT AND POLICY

Perseroan memandang warga Kota Jakarta, khususnya pengguna jalur koridor MRT Jakarta, sebagai salah satu pemangku kepentingan yang dapat diasosiasikan sebagai konsumen infrastruktur transportasi kota. Salah satu permasalahan dalam perkembangan pembangunan proyek MRT Jakarta adalah melakukan inovasi pengerjaan proyek di tengah jantung lalu lintas Jakarta yang padat. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan proyek, Perseroan memperhitungkan infrastruktur pipa dan kabel bawah tanah perkotaan yang telah ada selama ini. Di samping itu, Perseroan menempatkan hak pengguna lalu lintas jalur di mana proyek berjalan baik pengguna jalan raya maupun pejalan kaki di trotoar dapat terus terpenuhi dengan tetap memperhitungkan kemajuan proyek.

Demi meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi umum, pada tahun 2019 Perseroan telah membangun 1 km jalur sepeda di sepanjang jalur MRT dan *bike rack* di Stasiun Bundaran HI sampai dengan Stasiun Lebak Bulus.

The Corporation considers the citizens of the city of Jakarta, especially users of the corridor along which MRT Jakarta projects operate, as stakeholders who can be categorized as consumers of the city's transportation infrastructure. One of the problems associated with MRT Jakarta project development is to complete innovative project work within the heart of Jakarta's heavy traffic. As the party responsible for project development, the Corporation has to take into account existing urban underground pipe and cable infrastructure. In addition, the Corporation has to ensure and protect the rights of road users and pedestrians in project areas while also taking into account the progress of the project.

In order to improve community access and comfort in relation to public transportation, the Corporation constructed 1 km of bicycle lanes along the MRT line from Bundaran HI Station to Lebak Bulus Station in 2019. In addition, the Corporation always strives to ensure the quality of its products and services.

BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, PERSEROAN BERKOMITMEN UNTUK MEMASTIKAN KESELAMATAN PENGGUNA LAYANAN TRANSPORTASI MRT JAKARTA. PERSEROAN MEMILIKI STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) YANG KETAT DALAM MELAKSANAKAN DAN MENGELOLA KEGIATAN OPERASINYA

Based on the prevailing laws and regulations, The Corporation is committed to ensuring the safety of all MRT Jakarta transportation service users. The Corporation also implements strict Standard Operating Procedures (SOP) when carrying out and managing its operations

Di samping itu, tanggung jawab Perseroan terhadap kualitas produk dan/atau jasa juga bergantung pada hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan mitra kerja. Kontraktor/pemasok/*vendor* maupun kreditur memiliki peran yang cukup besar dalam mempermudah kegiatan Perseroan, khususnya dalam menghadirkan layanan MRT Jakarta yang berkualitas.

Also important are good and mutually beneficial relationships with partners. Contractors/suppliers/vendors/suppliers and creditors all have significant roles to play in facilitating the Corporation's activities, particularly in relation to the provision of quality MRT Jakarta services.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB TERHADAP MUTU PRODUK/JASA SERTA KONSUMEN DAN MITRA KERJA

STAKEHOLDERS AND THE IMPACT SCOPE OF RESPONSIBILITY FOR THE QUALITY OF PRODUCTS / SERVICES AND CONSUMERS AND WORK PARTNERS

Pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas tanggung jawab pada aspek ini adalah konsumen dan mitra kerja. Perseroan berupaya melakukan pemenuhan tanggung jawabnya terkait mutu kualitas produk/jasa serta hubungan yang harmonis dengan mitra kerja berdasarkan etika kerja.

The stakeholders who have an impact on responsibility as regards this aspect are primarily consumers and business partners. The Corporation always seeks to fulfill its responsibilities in relation to the quality of its products / services and strives for harmonious relations with its partners based on work ethics.

RENCANA DAN TARGET KEBIJAKAN PROGRAM

POLICY AND PROGRAM OBJECTIVES, PLANS, AND TARGETS

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum, Perseroan sangat mengedepankan layanan kepada pengguna. Maklumat Pelayanan MRT Jakarta telah ditandatangani oleh Direktur Operasi dan Pemeliharaan dan disebar di seluruh media sosial milik Perseroan, dan juga dipajang di stasiun-stasiun MRT.

As a corporation engaged in the field of public transportation, the Corporation places a high priority on service to users. The MRT Jakarta Service Notification was signed by the Director of Operations and Maintenance and posted across all of the Company's social-media platforms and can also be found displayed in MRT stations.

Dengan ditandatanganinya Maklumat Pelayanan tersebut, artinya Perseroan menyatakan kesanggupan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana MRT Jakarta yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang telah ditetapkan, dan apabila tidak memenuhi standar tersebut, maka Perseroan siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

With the signing of the Service Notice, the Corporation has declared its ability to run MRT Jakarta Infrastructure and Facilities in accordance with the Minimum Service Standards that have been set, and if it does not meet these standards, the Corporation is ready to accept sanctions in accordance with applicable laws and regulations.



Gambar 7.48
Image 7.48

Merupakan suatu komitmen bagi Perseroan untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna jasa, karena dua hal tersebut adalah hal yang sangat penting dalam operasionalisasi MRT Jakarta. Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO terintegrasi dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (ISO 45001:2018),

The Corporation is committed to ensuring the safety and security of all of its passengers, as these two things are very important as regards the operation of MRT Jakarta. The Corporation has secured integrated ISO certification in Occupational Safety and Health Management Systems (ISO 45001: 2018), Environmental Management Systems (ISO 14001: 2015) and

Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001:2015), dan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2015) yang berlaku sampai dengan tahun 2022.

Kesiapan Perseroan dalam menangani bencana banjir yang melanda Ibu kota pada malam pergantian tahun 2020 menggambarkan bahwa tahap perencanaan beserta eksekusinya di lapangan sudah menunjukkan kualitas yang baik. Perencanaan pembangunan MRT Jakarta Fase 2 juga akan sangat memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan kerja bagi para karyawan dan mitra. Tidak lupa, kenyamanan masyarakat sekitar juga akan dijaga sehingga proses pembangunan MRT Jakarta Fase 2 berjalan dengan lancar.

Tentunya Perseroan tidak dapat mewujudkan segala perencanaan yang matang tanpa menggandeng para pemangku kepentingan. Misalnya, dalam mengantisipasi dan merencanakan langkah-langkah mitigasi bencana alam, Perseroan menggandeng Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam kerja sama pertukaran informasi terkait informasi cuaca demi mengantisipasi lebih dini potensi bencana alam. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan aspek keselamatan dalam kegiatan operasi MRT Jakarta.

Dalam rangka meningkatkan kepuasan pemasok, Unit Kerja *Procurement* juga telah menyelenggarakan survei kepuasan pemasok atau *Supplier Feedback Survey* secara periodik demi mendapatkan persepsi untuk mengembangkan sistem pengadaan Perseroan kedepannya. Dibandingkan dengan tahun 2018, survei kepuasan pemasok menunjukkan angka 85% atau 12% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun berikutnya, Perseroan akan terus meningkatkan kualitas pengadaan dengan strategi pengadaan yang tepat dan juga sumber daya manusia yang berkualitas mengikuti tren pengembangan berkelanjutan. Unit Kerja *procurement* akan menuju kepada simplifikasi proses bisnis, dan *IT-based Procurement System* di mana tahap pengadaan akan dilakukan secara digital.

Quality Management Systems (ISO 9001: 2015) and these will remain valid until 2022.

The Corporation's preparedness to deal with the disastrous flooding that hit the capital on New Year's Eve 2020 illustrates that the planning stage and its execution on the ground is up to standard. The MRT Jakarta Phase 2 development plan will also pay close attention to work safety and security aspects for employees and partners. And not to be forgotten, the comfort of surrounding communities will also be maintained so that the MRT Jakarta Phase 2 development process runs smoothly.

Of course, the Corporation cannot realize all of its careful planning without the cooperation of its stakeholders. For example, in anticipating and planning natural disaster mitigation measures, the Corporation is collaborating with the Meteorology Climatology and Geophysics Agency (BMKG) to exchange information relating to the weather in order to anticipate the potential for natural disasters. This initiative is aimed at improving the various safety aspects of MRT Jakarta operations.

In order to increase supplier satisfaction, the Procurement work unit also conducts a supplier satisfaction survey or Supplier Feedback Survey on a periodic basis in order to gain a good idea of the developing Corporate procurement system going forward. In comparison with 2018, the most recent supplier satisfaction survey revealed a satisfaction level of 85%, which is 12% higher than the previous year. In the following years, the Corporation will continue to improve the quality of its procurement through the right procurement strategies while the quality of its human resources will follow the trend of sustainable development. The procurement work unit will lead to the simplification of business processes, while the IT-based Procurement System will implement procurements digitally

Penerapan Inisiatif dan Program Bidang Mutu Produk/Jasa Serta Konsumen dan Mitra Kerja

Implementation of Initiative and Programs in The Field of Product/Service Quality and Consumers and Work Partners

Membangun Proyek MRT Jakarta di Tengah Kepadatan Masyarakat Jakarta

Building MRT Jakarta within the Dense Population of Jakarta

Tahun 2019 telah menjadi momentum mulai beroperasinya MRT Jakarta Fase 1 secara komersial. Hal ini menandai kegiatan konstruksi MRT Jakarta Fase 1 yang secara umum selesai dilakukan. Untuk mendukung operasional MRT agar semakin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat, Perseroan berkomitmen untuk membangun fasilitas-fasilitas penunjang di sekitar fasilitas MRT Jakarta Fase 1, antara lain pembangunan *Sky Bridge ASEAN* dan fasilitas pendukung pengguna jasa lainnya di sekitar area Stasiun.

2019 saw great momentum at the start of the commercial operations of MRT Jakarta Phase 1. This marked the point at which MRT Jakarta Phase 1 construction activities were generally completed. To support MRT operations and to increasingly provide comfort and convenience for the community, the Corporation is committed to building supporting facilities around MRT Jakarta Phase 1 facilities, including the construction of the ASEAN Sky Bridge and other passenger supporting facilities around Station areas.

Kegiatan konstruksi penunjang ini tetap memperhatikan kenyamanan dan keamanan masyarakat di sekitar area konstruksi. Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian utama. Berbagai rambu keselamatan,

These supporting construction activities take account of the comfort and safety of the communities around construction areas. The safety of road users is also a major concern and various safety signs, barricades and

barikade, dan pagar pembatas dibangun untuk memberikan penanda kepada pengguna jalan.

guardrails have been built to provide markers for road users.



Gambar 7.49
Image 7.49

Memastikan Kualitas Infrastruktur dan Beroperasi MRT Jakarta

Ensuring the Quality of Infrastructure and the Operations of MRT Jakarta

Untuk memastikan kualitas infrastruktur yang dihasilkan berfungsi dengan baik, Perseroan senantiasa melakukan proses inspeksi selama proses konstruksi. Inspeksi dilakukan oleh personel yang berkompeten di bidangnya masing-masing agar kualitas infrastruktur yang dibangun sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan. Setelah MRT Jakarta resmi beroperasi hingga kini, proses pemastian kualitas infrastruktur dan operasional MRT terus dilakukan melalui pengecekan secara rutin.

In order to ensure that the quality of the resulting infrastructure is functioning properly, the Corporation always conducts inspection processes during construction works. Inspections are carried out by personnel who are competent in their respective fields so that the quality of the infrastructure built is in accordance with the required specifications. From the official start of operations of MRT Jakarta until now, the process of ensuring the quality of infrastructure and MRT operations continues to be implemented through regular checks.



Gambar 7.50
Image 7.40



Gambar 7.51
Image 7.51

Informasi Pengaduan Masyarakat Terkait K3 Perseroan

Community Complaints Regarding the Occupational Safety and Health of the Corporation

Tahun 2019 merupakan tahun pertama MRT Jakarta beroperasi, maka dari itu banyak informasi tentang layanan dan keselamatan pengguna jasa yang perlu disosialisasikan. Seluruh informasi baik mengenai Perseroan maupun informasi bagi pengguna jasa Perseroan, termasuk potensi negatif dari Perseroan, dapat diakses melalui platform media sosial MRT Jakarta (Instagram: @mrtjkt, twitter

2019 was the first operational year for MRT Jakarta, therefore, a great deal of information regarding passenger services and safety needs to be socialized. Information about both the Corporation and information for the Corporation's passengers, including the negative potential of the Corporation, can be accessed through MRT Jakarta's various social-media platforms (Instagram: @mrtjkt, twitter @mrtjkt, Youtube: MRTv), as well as via the

@mrtjkt, Youtube: MRTv), dansitusweb Perseroan: www.jakartamrt.co.id. Corporate website and through the following media channels:



VIDEO INFORMASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENGGUNA JASA DI DALAM KERETA *Video Information in Trains on Passenger Safety and Security*



Gambar 7.52
Image 7.52

POSTER KEAMANAN DAN KENYAMANAN PENGGUNA JASA PADA PERGANTIAN TAHUN BARU 2019 YANG DIUNGGAH DI MEDIA SOSIAL MRT JAKARTA *Passenger Safety and Comfort Poster for New Year 2019 as Uploaded via MRT Jakarta Social Media*



Gambar 7.53
Image 7.53

Pengelolaan Hubungan dengan Mitra kerja Kontraktor/Pemasok/Vendor/Mitra Lainnya

Management of Relationships with Contractors/Suppliers/Vendors/Other Partners

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kinerja vendor, maka dilakukan evaluasi terhadap vendor secara berkala atau pada masa akhir kontrak. Kriteria pengukuran untuk penilaian sebagai berikut:

- Kualitas
- Layanan
- Pengiriman
- Implementasi
- Efisiensi

Penilaian secara berkala juga dilakukan untuk vendor-vendor yang dikategorikan sebagai *Approved Vendor List (AVL)*. Penilaian vendor dilakukan dengan mengevaluasi beberapa parameter, termasuk tapi tidak terbatas pada: responsif dan kualitas kinerja vendor pada saat berpartisipasi dalam penawaran.

Selain itu dalam kebijakan Pasal 23 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Perseroan mengatur kewajiban penyedia untuk mematuhi Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L):

- Dalam melaksanakan lingkup pekerjaan, Penyedia wajib memenuhi dan menjalankan persyaratan serta aturan kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L) Pengguna dan mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku yang diterbitkan oleh Instansi/ Pemerintah terkait K3L.
- Penyedia wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyedia wajib mematuhi ketentuan Pengguna terkait peraturan tentang manajemen K3L.

Di samping itu, terkait evaluasi kinerja pemasok, secara berkala Perseroan melakukan "*Vendor Performance Index*" dengan tujuan mendapatkan laporan terkait kinerja vendor serta umpan balik dari para pengguna untuk pengembangan proses pengadaan di masa depan.

Berdasarkan hasil survei 2019, rata-rata tingkat kepuasan pengguna terhadap performa vendor adalah sebesar 81,21, atau lebih besar 11,08 dibandingkan dengan standar yang ditetapkan oleh Perseroan yakni 70,13. Meskipun secara garis besar tingkat kepuasan pengguna terhadap vendor cukup baik, Unit Kerja *Procurement* tetap akan melakukan reviu berkala untuk penyempurnaan berkelanjutan guna mengembangkan sistem pengadaan yang lebih baik dan transparan ke depannya.

As part of efforts to improve vendor performance, vendors are evaluated at regular intervals or at the end of their contracts. The measurement criteria for assessments are as follows:

- *Quality*
- *Services*
- *Shipment*
- *Implementation*
- *Efficiency*

Periodic assessments are also carried out in relation to vendors categorized on the Approved Vendor List (AVL). Vendor assessments are completed by evaluating several parameters, including, but not limited to: the responsiveness and quality of vendor performances when participating in bidding.

In addition, Article 23 of the Goods and Services Procurement policy regulates the obligation of providers to comply with various Health, Safety and Environment (K3L) factors:

- *In carrying out the scope of work, Providers are required to fulfill and implement requirements and rules relating to user health, safety and the environment (K3L) and to comply with all applicable legal provisions issued by the Agency/Government in relation to K3L.*
- *Providers are responsible for implementing the occupational safety and health management system in accordance with applicable laws and regulations.*
- *Providers are required to comply with User provisions relating to K3L management*

In addition to related supplier performance evaluations, the Corporation periodically conducts a "Vendor Performance Index" survey with the aim of soliciting reports relating to vendor performance and also soliciting feedback from users as regards future procurement developments.

Based on the results of the 2019 survey, the average level of user satisfaction with vendor performance was 81.21. 11.08 greater than the previous standard set by the Corporation of 70.13. Although, in general, the level of user satisfaction with vendors is quite good, the Procurement Unit will continue to conduct periodic reviews in order to make continuous improvements so as to develop a better and more transparent procurement system going forward.

Pengelolaan Hubungan Dengan Kreditur *Managing Relation With Creditors*

Dalam proses pembangunan Fase 1 dan Fase 2, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Perseroan melakukan perjanjian kerja sama perihal pendanaan proyek dengan pihak Pemerintah Jepang yang diwakili oleh *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Berdasarkan perjanjian kerja sama tersebut, maka seluruh proses pengadaan baik material, kontraktor, maupun konsultan menggunakan basis *JICA Guideline*. Perseroan dan JICA secara aktif saling berkoordinasi satu sama lain, terutama dalam proses pengadaan. Seluruh dokumen teknis pengadaan maupun hasil evaluasi selama proses pengadaan, akan dilaporkan oleh Perseroan untuk nantinya disetujui oleh JICA.

During the development processes for Phase 1 and Phase 2, the Corporation, representing the Government of Indonesia, entered into a cooperation agreement regarding project funding with the Japanese Government represented by the Japan International Cooperation Agency (JICA). Based on the cooperation agreement, the entire procurement process, including materials, contractors and consultants, followed the JICA Guidelines. The Corporation and JICA also actively coordinated with each other, particularly during the procurement process. All technical procurement documents and evaluation results during the procurement process will be reported by MRT Jakarta to be later approved by JICA.

Survei Kepuasan Pelanggan *Customer Satisfaction Survey*

24 Maret 2019 merupakan salah satu tonggak sejarah penting, di mana Perseroan telah resmi beroperasi. Dalam memastikan layanan yang baik dan maksimal kepada pengguna jasa, Perseroan melakukan Survei Kepuasan Pelanggan. Tujuan dilakukannya survei ini adalah untuk memetakan tingkat kepuasan pelayanan Perseroan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan Perseroan menuju standar internasional. Perseroan mendapatkan nilai *Customer Satisfaction Index* (CSI) 82,78. Sebanyak 1.430 pengguna jasa Perseroan terlibat dalam survei ini, dan setiap responden dianalisis nilai *Net Promoter Score*-nya agar dapat diketahui sejauh mana mereka akan atau dapat mempromosikan Perseroan kepada orang lain di sekitarnya.

March 24, 2019 represents an important milestone, specifically the official start of the Corporation's operations. In order to ensure a decent and optimal service to passengers, the Corporation conducts a Customer Satisfaction Survey. The purpose of this survey is to map the level of satisfaction in the Corporation's services in an effort to improve the Corporation's services to international standards. standards. The Corporation recently received a Customer Satisfaction Index (CSI) score of 82.78. 1,430 of the Corporation's passengers were involved in this survey and each respondent was analyzed in relation to the value of the Net Promoter Score in order to find out the extent to which they would or could promote the Corporation to others in the vicinity.

Dengan dilakukannya Survei Kepuasan Pelanggan, Perseroan dapat mengetahui hal-hal berikut:

- *Expectation, Satisfaction and Experience, dan Experience Mapping (Customer Journey)* dari proses pelayanan Perseroan di masing-masing *touchpoint*;
- Mendapatkan umpan balik dari pengguna jasa mengenai pengalaman mereka selama berinteraksi dengan masing-masing *touchpoint*;
- Mengetahui kepuasan pengguna jasa lewat *Customer Satisfaction Index* beserta *Net Promoter Score* (NPS) untuk merekomendasikan Perseroan secara keseluruhan; dan
- Mendapatkan masukan dari pengguna jasa pada setiap tahapan-tahapan yang mereka alami, serta pemetaan penyampaian parameter layanan di setiap *touchpoint* Perseroan.

By conducting a Customer Satisfaction Survey, the Corporation can find out about the following:

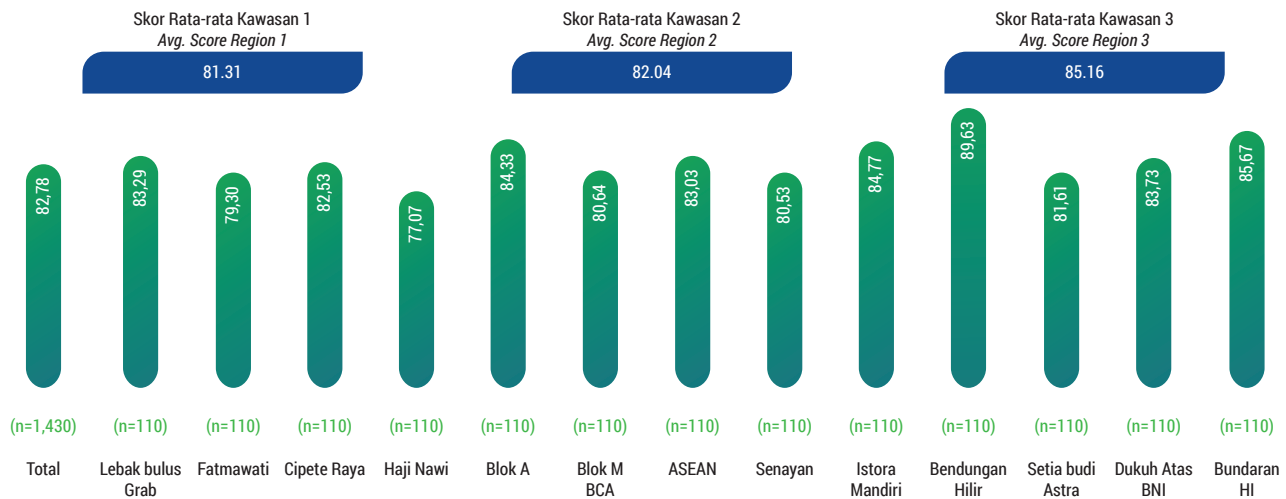
- *Expectation, Satisfaction and Experience, and Experience Mapping (Customer Journey)* in relation to the Corporate service process at each *touchpoint*;
- *Getting feedback from customers about their experiences and difficulties during interactions at each touchpoint;*
- *Assessing user satisfaction through the Customer Satisfaction Index, along with the Net Promoter Score (NPS) as a recommendation of the Corporation as a whole; and*
- *Obtaining input from the user at each stage experienced by the user, as well as mapping the delivery of service parameters at each Corporate touchpoint*

Metode Survei Kepuasan Pelanggan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pada pendekatan kualitatif, dilakukan wawancara mendalam kepada pengguna jasa, di mana informasi yang lebih dalam mengenai *Customer Journey* bisa didapatkan, serta menggali *touchpoints* yang ditemukan pengguna sebagai bahan untuk menjadi CSAT *touchpoint* di pendekatan kuantitatif. Sementara itu, pendekatan kuantitatif dilakukan dengan wawancara 13 pertanyaan untuk mendapatkan tingkat kepuasan dan masukan dari para responden.

The Customer Satisfaction Survey Method was conducted through the use of a qualitative and quantitative approach. In a qualitative approach, an in depth Passenger interview is carried out, where deeper information about Customer Journeys can be obtained, as well as exploring the touchpoints that users find as materials to become CSAT touchpoints using a quantitative approach. Meanwhile, the quantitative approach is carried out through face-to-face interviews involving 13 questions designed to gauge the levels of satisfaction and inputs from respondents.

Berikut adalah grafik *Customer Satisfaction Index* di seluruh stasiun MRT Jakarta dari mulai Stasiun Lebak Bulus sampai dengan Stasiun Bundaran HI. Hasil CSI 82,78 merupakan angka rata-rata CSI di setiap stasiun.

The following is a graph of the *Customer Satisfaction Index* across the entire MRT Jakarta network from Lebak Bulus Station to Bundaran HI Station. CSI results reveal that 82.78 is the average CSI figure for each station.



Grafik 7.4
Graphic 7.4

Dalam perhitungan CSI di setiap stasiun, digunakan aspek-aspek atau *touchpoint* yang sangat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna MRT Jakarta secara keseluruhan.

In CSI calculations at each station, aspects or *touchpoints* are used which greatly affect the overall satisfaction of MRT Jakarta users.

| No. | Touchpoint | Index |
|---|--|-------|
| 1. | Kereta MRT Jakarta <i>MRT Jakarta Trains</i> | 84,48 |
| 2. | Petugas MRT Jakarta <i>MRT Jakarta Staff</i> | 82,69 |
| 3. | Kebersihan Stasiun <i>Station Cleanliness</i> | 82,22 |
| 4. | Fasilitas Stasiun <i>Station Facilities</i> | 81,6 |
| 5. | Tiketing MRT Jakarta <i>MRT Ticketing</i> | 81,48 |
| Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Index (CSI) Score</i> | | 82,78 |

Tabel 7.28
Table 7.28



Berikut hasil CSI tahun 2019 berdasarkan masing-masing *touchpoint*: Here are the 2019 CSI results based on each *touchpoint*:

Kereta MRT Jakarta MRT Jakarta Train

| No. | Faktor Factor | Index |
|-----------------------------------|---|-------|
| 1. | Kecepatan/Durasi Perjalanan Speed/Travel Duration | 85,5 |
| 2. | Ketepatan Waktu Kereta Train Punctuality | 85,24 |
| 3. | Kebersihan Kereta Train Cleanliness | 85,08 |
| 4. | Kenyamanan Kereta Train Comfort | 84,99 |
| 5. | Rasa Aman di dalam Kereta Sense of Security in Trains | 84,97 |
| 6. | Waktu Menunggu Kereta Waiting Times for Trains | 84,38 |
| 7. | Informasi di dalam Kereta Information inside trains | 84,14 |
| 8. | Kejelasan Suara/Audio Informasi Voice/audio clarity of information | 84,01 |
| 9. | Aroma Kereta Train aroma | 81,83 |
| Indeks Rata-rata Average Index | | 84,48 |

Tabel 7.29
Table 7.29

Petugas MRT Jakarta MRT Jakarta Staff

| No. | Faktor Factor | Index |
|-----|---|-------|
| 1. | Petugas Keamanan di dalam Kereta Security on Trains | 83,71 |
| 2. | Petugas Keamanan di area Stasiun Security in Station areas | 83,29 |
| 3. | Petugas Kebersihan Janitors | 82,9 |
| 4. | Petugas tiket yang membantu Ticket staff who provided help | 82,29 |

| No. | Faktor Factor | Index |
|--|---|-------|
| 5. | Petugas tiket yang ramah <i>Friendly ticketing staff</i> | 82,25 |
| Indeks Rata-rata <i>Average Index</i> | | 82,69 |

Tabel 7.30
Table 7.30

Kebersihan Stasiun *Station Cleanliness*

| No. | Faktor Factor | Index |
|--|---|-------|
| 1. | Kebersihan Lantai <i>Floor cleanliness</i> | 83,21 |
| 2. | Kebersihan Papan Informasi <i>Information Board Cleanliness</i> | 82,48 |
| 3. | Kebersihan Kaca <i>Cleanliness of Glass</i> | 82,21 |
| 4. | Kebersihan Toilet <i>Cleanliness of toilets</i> | 82,2 |
| 5. | Aroma bersih di stasiun <i>Clean scent at the station</i> | 81,33 |
| 6. | Kebersihan di luar Area Stasiun (sekitar area stasiun) <i>Cleanliness outside station areas (around station areas)</i> | 80,5 |
| Indeks Rata-rata <i>Average Index</i> | | 82,22 |

Tabel 7.31
Table 7.31

Fasilitas Stasiun *Station Facilities*

| No. | Faktor Factor | Index |
|-----|--|-------|
| 1. | Rasa aman dalam area stasiun <i>A sense of security in station areas</i> | 84,16 |
| 2. | Pintu Peron <i>Platform Doors</i> | 83,01 |
| 3. | Tampilan Informasi Jam Kedatangan Kereta <i>Information displays of Train arrival times</i> | 82,89 |
| 4. | Kejelasan Suara/audio informasi <i>Voice/audio clarity of information</i> | 82,75 |

| No. | Faktor <i>Factor</i> | Index |
|--|---|-------|
| 5. | Kejelasan Penunjuk Arah <i>Clarity of Direction</i> | 82,41 |
| 6. | Stiker Informasi <i>Information Stickers</i> | 81,92 |
| 7. | Kenyamanan halte untuk naik turun kendaraan umum <i>Convenience of bus stops for public transportation</i> | 81,66 |
| 8. | Ketersediaan eskalator <i>Escalator availability</i> | 80,93 |
| 9. | Keragaman tenan di dalam stasiun <i>Tenant diversity within the station</i> | 79,38 |
| 10. | Jarak antara tempat parkir dan Stasiun <i>Distances between parking lots and stations</i> | 77,59 |
| 11. | Ketersediaan Lahan Parkir di sekitar stasiun <i>Parking lot availability around stations</i> | 77,38 |
| Indeks Rata-rata <i>Average Index</i> | | 81,60 |

Tabel 7.32
Table 7.32

Tiketing MRT Jakarta *MRT Jakarta Ticketing*

| No. | Faktor <i>Factor</i> | Index |
|--|--|-------|
| 1. | Jenis kartu yang digunakan <i>Type of card used</i> | 82,23 |
| 2. | Kemudahan pembelian tiket <i>Ease of purchasing tickets</i> | 81,96 |
| 3. | Kemudahan visibilitas Informasi sisa saldo <i>Ease of visibility of remaining balance information</i> | 81,76 |
| 4. | Kemudahan masuk ke Gate <i>Ease of entry through gates</i> | 80,57 |
| Indeks Rata-rata <i>Average Index</i> | | 81,48 |

Tabel 7.33
Table 7.33

PENGADUAN TERKAIT PRODUK/LAYANAN/JASA PERSEROAN DAN PENANGANANNYA

COMPLAINTS REGARDING CORPORATE PRODUCT/SERVICES AND HANDLING

Perseroan juga memberikan perhatian atas keluhan yang diajukan oleh masyarakat atas dampak dari proyek pembangunan Perseroan. Penanganan atas setiap keluhan yang ada dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek, termasuk melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Perseroan menerapkan sistem pengaduan *Call Center* di nomor 1500 332 yang efektif pada 25 Maret 2019. Layanan tersebut beroperasi 24 jam setiap harinya. Langkah ini diambil demi menjaga kepercayaan pengguna jasa dan untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan karyawan Perseroan selalu beroperasi selama 24 jam. Di bawah ini disajikan keluhan dengan kategori Mayor dengan status *Closed* atau terselesaikan ada di tahun 2019.

The Corporation also pays attention to any complaints which are made by the community regarding the impact of the Corporation's development project. The handling of existing complaints is undertaken by taking into account all of the relevant aspects, including coordinating with various related parties. The Corporation has operated a *Call Center* complaints system through the phone number: 1500 332 since March 25, 2019. This service operates 24 hours a day and was introduced in order to maintain customer trust and to ensure that the quality of service offered by the Corporation's employees applies 24 hours a day. Listed below are complaints that fall into the Major category which were either Closed or resolved during 2019.

KELUHAN MAYOR PELANGGAN DI TAHUN 2019

Major Customer Complaints in 2019

| No | Keluhan Complaint | Kanal Pengaduan Complaint Channel | Tanggal Date | Skala Keluhan Complaint Level | Status Keluhan Complaint Status |
|----|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Keluhan turun di Stasiun Bundaran HI ingin ke Plaza Indonesia namun tidak diperbolehkan melalui Pintu Exit A karena hanya untuk pintu masuk, pelapor menyarankan agar ke depannya diperbolehkan. <i>Complaint involved a passenger who disembarked at Bundaran HI station and who wanted to walk to Plaza Indonesia but was not allowed through exit A, which is for entry only, the customer suggested that in the future this should be allowed.</i> | <i>Call Center</i> | 06 Mei 2019 <i>May 6, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |
| 2. | Lift (<i>elevator</i>) tidak berfungsi, pelapor terjebak di lift Stasiun Bundaran HI. <i>The complainant was trapped in the Bundaran HI Station elevator, which was not functioning.</i> | <i>Call Center</i> | 03 Juni 2019 <i>June 3, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |
| 3. | Pelapor terkurung di lift Stasiun Cipete Raya karena mati, sudah mencoba menekan tombol darurat. <i>The complainant was trapped in the Cipete Raya Station elevator because it had been turned off, and tried to press the emergency button.</i> | <i>Call Center</i> | 04 Juli 2019 <i>July 4, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |
| 4. | Terjebak di dalam Lift Stasiun Duku Atas pukul 13.58 WIB. <i>The complainant was trapped inside the Duku Atas Station elevator at 13.58</i> | <i>Call Center</i> | 21 Juli 2019 <i>July 21, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |
| 5. | Terjebak di Lift Stasiun Setiabudi Astra, ada 4 orang bersama pelapor dan belum ada petugas. <i>Four persons were trapped in the Setiabudi Atas Station elevator, no staff members were present.</i> | <i>Call Center</i> | 6 Agustus 2019 <i>August 6, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |

| No | Keluhan <i>Complaint</i> | Kanal Pengaduan <i>Complaint Channel</i> | Tanggal <i>Date</i> | Skala Keluhan <i>Complaint Level</i> | Status Keluhan <i>Complaint Status</i> |
|-----|---|---|--|---|---|
| 6. | <p>Terjebak di lift Stasiun Haji Nawi lantai 2 dengan 2 orang lainnya.</p> <p><i>The complainant was trapped in the elevator on the 2nd floor of Haji Nawi Station with 2 other people.</i></p> | <i>Call Center</i> | 15 Agustus 2019 <i>August 15, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |
| 7. | <p>Keluhan terkait kereta di Stasiun Fatmawati sudah 15 menit tidak berjalan dan tidak ada informasi apapun dari petugas. Pelapor meminta agar segera dilakukan evakuasi.</p> <p><i>Complaint about a train at Fatmawati station which had not been running for 15 minutes while no information was provided by staff. Complainant requested that evacuations be immediately carried out.</i></p> | <i>Call Center</i> | 8 Oktober 2019 <i>October 8, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |
| 8. | <p>Kereta di Stasiun Fatmawati tidak berjalan dan AC terkadang menyala dan padam</p> <p><i>A train at Fatmawati MRT Station was not running while the air conditioner sometimes turned on and off.</i></p> | <i>Call Center</i> | 8 Oktober 2019 <i>October 8, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |
| 9. | <p>Di Stasiun Senayan, terdapat batu-batuan di pintu masuk. Batu tersebut tersentuh sehingga terpecah dan membahayakan pengguna jasa. Pelapor menyampaikan kakinya terkena batu tersebut</p> <p><i>Rocks were discovered around the Senayan Station entrance which could potentially endanger passengers. The complainant hit his foot on one of the rocks.</i></p> | <i>Call Center</i> | 23 Oktober 2019 <i>October 23, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |
| 10. | <p>Pelapor meminta petugas keamanan ditambah di dekat pintu keluar/masuk stasiun Bundaran HI dekat Kedutaan Jepang, terutama menjelang malam hari karena ada yang hampir dicopet. Kecurian karena situasi sepi.</p> <p><i>The complainant asked for security officers to be added near the exit/entrance to Bundaran HI station near the Japanese Embassy, especially late in the evening, due to their almost being robbed quiet during these quieter hours.</i></p> | <i>Call Center</i> | 12 November 2019 <i>November 12, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |
| 11. | <p>Pada saat libur sekolah, gerbang masuk Stasiun Lebak Bulus hanya ada 1 (satu) akses yang dibuka, dan prosedur cek tas sebelum memasuki area berbayar memakan waktu lama.</p> <p><i>During the school holidays, only 1 (one) access point was open at the Lebak Bulus station entrance gate, meaning that the bag checking procedure prior to entering the paid area took a long time.</i></p> | <i>Call Center</i> | 30 November 2019 <i>November 30, 2019</i> | Mayor <i>Major</i> | Terselesaikan <i>Closed</i> |

Tabel 7.34
Table 7.34

Untuk mendapatkan masukan, evaluasi, maupun keluhan, Perseroan membuka jalur komunikasi kepada masyarakat luas melalui akses situs web resmi www.jakartamrt.co.id pada halaman kontak/*feedback*. Selain itu, publik dapat membuka komunikasi kepada Perseroan melalui:

PT MRT Jakarta (Perseroda)

Wisma Nusantara Lt. 21-23

Jl. MH Thamrin 59

Jakarta 10350 - Indonesia

 (62)21 3906454

 (62)21 3155846

 1500 332 (24 jam)

 jakartamrt.co.id

*In an effort to solicit input, evaluations and complaints, the Corporation has opened a line of communication with the wider community through its official website: www.jakrtamrt.co.id, which features a contact/*feedback* page. Moreover, the public can open communications with the Corporation through the following channels:*

Customer Care MRT Jakarta senantiasa melakukan upaya peningkatan pelayanan terhadap para pengguna jasa, salah satunya dengan melakukan kunjungan ke *Call Center* MRT Jakarta untuk memberikan motivasi kepada para agen *Call Center* yang merupakan alternatif saluran pelayanan dan pengaduan pengguna jasa melalui saluran telepon 24 jam dalam seminggu.

Upaya lain yang juga telah dilakukan untuk meningkatkan performa serta pelayanan *Call Center* 24 jam MRT Jakarta adalah dengan melakukan studi banding ke BCA serta KAI.

Service Recovery

Service Recovery

Service Recovery adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh Departemen *Customer Care* sebagai upaya pemulihan kepuasan pelanggan (pengguna jasa) setelah terjadi suatu kendala atau keluhan yang menyebabkan kekecewaan terhadap pelayanan MRT Jakarta, bukan karena kekecewaan atau kendala yang disebabkan oleh pihak lain di luar MRT Jakarta.

Dalam hal ini, tidak semua keluhan pelanggan akan mendapatkan tindakan *service recovery*. Hanya keluhan atau kendala tertentu yang sudah tidak bisa dihadapi lagi oleh *frontliner* ataupun keluhan yang belum dapat diterima penyelesaiannya oleh pengguna jasa pada tahap tersebut.

MRT Jakarta Customer Care is always trying to improve services to its users, including the possibility of visiting the MRT Jakarta Call Center in order to provide motivation to the Call Center Agents who comprise one of service channels through which customer can complain via telephone on a 24/7 basis.

Other efforts have also been made to improve the performance of the 24-hour MRT Jakarta Call Center, including benchmarking with BCA and KAI.

Service Recovery is an activity carried out by the Customer Care Department as part of an effort to restore customer satisfaction (service users) after a complaint arises and leads to dissatisfaction with the the service of MRT Jakarta which is not due to any disappointment or obstacle caused by other parties external to MRT Jakarta.

Not all customer complaints will receive any service recovery action. If front-liners cannot resolve a complaint at a certain stage, then it will be moved up to a higher level.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI DI BIDANG MUTU LAYANAN/PRODUK DAN LAYANAN KONSUMEN

COMPLAINTS REGARDING CORPORATE PRODUCTS / SERVICES AND HANDLING

| Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Date of Certificate | Jenis Sertifikat Type of Certificate | Dikeluarkan Oleh Issued By | Masa Berlaku Hingga Valid Until |
|---|--|-------------------------------|------------------------------------|
| 20 Desember 2019 December 20, 2019 | Sertifikasi ISO Terintegrasi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | TUVRhineland | 2022 |

Tabel 7.35
Table 7.35



Gambar 7.54
Image 7.54

DAMPAK KUANTITATIF TANGGUNG JAWAB ASPEK MUTU LAYANAN/PRODUK DAN LAYANAN KONSUMEN

QUANTITATIVE IMPACT OF RESPONSIBILITY FOR SERVICES / PRODUCTS AND CONSUMER SERVICE QUALITY ASPECTS

| | Realisasi 2019 (Rp) Realization 2019 (Rp) | Anggaran 2019 (Rp) Budget 2019 (Rp) | Penyerapan Anggaran 2019 Budget Absorption 2019 (%) |
|-----------------------------|---|---|---|
| | 1 | 2 | (1:2) |
| Call Center | 1.090.485.810 | 1.117.046.700 | 97,6% |
| Pemeliharaan Maintenance | 12.524.605.853 | 24.693.190.000 | 50,7% |

Tabel 7.36
Table 7.36

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN (BERBAGI DENGAN MASYARAKAT)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE SOCIAL AND COMMUNITY DEVELOPMENT (SHARING WITH THE COMMUNITY)

KOMITMEN DAN KEBIJAKAN

COMMITMENT AND POLICY

Pengembangan sosial kemasyarakatan yang dilakukan Perseroan belum mengarah kepada aspek ekonomi dan peningkatan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi operasional. Selain bahwa proyek MRT Jakarta masih dalam tahap pembangunan, pengembangan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan berjalan seiring dengan tahapan pengoperasian dan komersialisasi dari Perseroan.

Pada tahap konstruksi, pengembangan sosial kemasyarakatan difokuskan pada aspek pendidikan dan berbagi pengetahuan. Kegiatan ini dilakukan melalui *site visit*, atau kunjungan lapangan yang diberikan Perseroan kepada kalangan umum, khususnya kepada regulator, konsultan, dan aktivitas akademika yang memiliki hasrat terhadap proyek transportasi kota, pembangunan konstruksi skala besar, serta pengetahuan tentang tata ruang dan tata kota khususnya DKI Jakarta.

Tidak hanya pada tahap konstruksi, pada tahap operasi Perseroan juga melakukan kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan dengan program *Living Project Bersama Si Dalang* (Kreasi Daur Ulang) dan perkumpulan *Lingkar Temu Kabupaten Lestari* untuk mengembangkan masyarakat yang rentan akibat terdampak langsung oleh pembangunan jalur proyek MRT Jakarta. Program ini ditujukan kepada kelompok perempuan ataupun ibu rumah tangga dengan fokus pelatihan pada keterampilan menjahit. Perseroan turut menyiapkan bahan baku berupa hasil limbah *banner/spanduk* untuk dijadikan hasil kerajinan yang bernilai.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan mengaktifkan program di 3 lokasi yaitu Rumah Susun Tambora, Kelurahan Lebak Bulus, dan Kelurahan Kramat Pela dengan melakukan pelatihan secara berkelanjutan untuk mempersiapkan keahlian dari para kelompok perempuan atau ibu-ibu penerima manfaat. Total hasil kerajinan yang telah diselesaikan dari binaan ini berjumlah 500 buah, dan hasil dari penjualannya menjadi penghasilan tambahan untuk meningkatkan ekonomi dan sosial kelompok perempuan atau ibu-ibu tersebut.

Dalam perjalanan satu tahun Perseroan beroperasi secara komersial, Pedoman Tanggung Jawab Sosial Perusahaan masih dalam tahap perencanaan dan pembuatan yang diselaraskan dengan nilai, visi, dan misi Perseroan. Pedoman Tanggung Jawab Perusahaan ditargetkan untuk dapat disahkan pada tahun mendatang untuk selanjutnya setiap kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan akan diimplementasikan sesuai pedoman tersebut.

The Corporation's social development has not yet led to economic benefits or to the improvement of the standard of living and welfare of the communities around operational locations. However, the MRT Jakarta project is still under construction, while the development of economic aspects and community welfare will go hand in hand with the Corporation's operational and commercialization stages.

During the construction stage, social development is focused on aspects of education and knowledge sharing. This activity is carried out through site visits and field visits conducted by the Corporation for the general public, particularly in relation to regulatory, consultancy and academic activities and parties who have a passion for city transportation projects, large-scale construction development, as well as knowledge of spatial and urban planning, particularly within DKI Jakarta.

As well as during the construction stage, the Corporation also carries out various community social development activities during the operational stage in conjunction with the Si Dalang Community (Recycled Creation) and the Lestari Circle Gathering Association in order to develop vulnerable communities which are being directly affected by the construction of the MRT Jakarta project. This program is aimed at groups of women or housewives with a focus on training in sewing skills. The Corporation also prepares raw materials in the form of waste banners which are turned into valuable handicrafts.

Throughout 2019, the Corporation managed to foster 3 locations namely Rumah Susun Tambora, Kelurahan Lebak Bulus and Kelurahan Kramat Pela by conducting ongoing training aimed at developing expertise among women's groups or beneficiary mothers. The total number of handicrafts that have been completed from the target is 500, while the proceeds from their sale will become additional income used to improve the economic and social welfare of the relevant women and mothers.

After one year of the Corporation's commercial operations, the Corporate Social Responsibility Guidelines are still in the planning and formulation stages and are being aimed at alignment with the value, vision, and mission of the Corporation. The Corporate Social Responsibility Guidelines are being targeted for completion in the coming year and all Corporate Social Responsibility activities will subsequently be implemented according to these guidelines.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAN LINGKUP DAMPAK TANGGUNG JAWAB BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

STAKEHOLDERS AND IMPACT SCOPE OF RESPONSIBILITY IN THE FIELD OF COMMUNITY SOCIAL DEVELOPMENT

Pemangku kepentingan yang memiliki dampak atas pengembangan sosial kemasyarakatan adalah masyarakat di sekitar lokasi proyek atau operasi Perseroan. Untuk itu, Perseroan berupaya melibatkan masyarakat sekitar, baik melalui rekrutmen maupun pelibatan sebagai pemasok lokal. Selain itu, Perseroan berupaya memberikan program pengembangan sosial kemasyarakatan yang bersifat langsung, dengan tujuan memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

The stakeholders who have an impact on social development are the communities in the vicinity of the Corporation's project sites or operations. The Corporation is seeking to involve surrounding communities, both through recruitment and engagement, as local suppliers. In addition, the Corporation is striving to provide direct social development programs with the aim of having a direct impact on society.

RENCANA DAN TARGET KEBIJAKAN PROGRAM

POLICY AND PROGRAM OBJECTIVES, PLANS, AND TARGETS

Selaras dengan usaha dari Perseroan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat bukan hanya dari segi transportasi publik akan tetapi juga pengembangan aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda agar dapat mencapai sarana transportasi publik. Dalam hal tersebut Perseroan bekerja sama dengan ITDP Indonesia (*Institute for Transportation Development Policy*) sebagai lembaga *non-profit* yang bekerja bersama sejumlah kota di dunia mewujudkan sistem transportasi berkelanjutan dan berkeadilan dengan nama program "Jalan Jakarta". Jalan Jakarta adalah program peningkatan konektivitas masyarakat serta pengguna jasa dari/ke stasiun MRT Jakarta, terutama di dalam radius 500 Meter dari stasiun sebagai lokasi fokus peningkatan kualitas infrastruktur berjalan kaki dan bersepeda. Selama tahun 2019 Jalan Jakarta telah terlaksana di area dekat Stasiun Cipete Raya dan Stasiun Haji Nawi dengan melibatkan warga sekitar dan pemerintah daerah setempat.

The efforts of the Corporation to improve the quality of life of the community not only include public transportation but also the development of accessibility for pedestrians to public transportation facilities. In this regard, the Corporation is collaborating with ITDP Indonesia (The Institute for Transportation Development Policy), a non-profit organization that works in a number of cities across the world, in order to realize a sustainable and equitable transportation system which goes by the name of the Jakarta Road program. Jalan Jakarta is a program aimed at improving the connectivity of the community and passengers to and from MRT Jakarta stations, especially within a 500-meter radius of stations, which are specific locations of focus for the improvement of the quality of walking and cycling infrastructure. From 2019, Jalan Jakarta has been implemented in the areas near Cipete Raya Station and Haji Nawi Station and has involved local residents and local government.

Program pengembangan aksesibilitas khususnya sepeda dengan program Sepeda Ramah Sekolah yaitu dengan penyediaan rak penyimpanan sepeda di sekolah untuk memudahkan murid sekolah dalam menambah semangat dan kebanggaan, serta apresiasi. Program juga dapat memotivasi anak untuk bersepeda dan mendorong orang tua untuk memberikan izin anak bersepeda ke sekolah setiap hari.

The accessibility development program especially bicycles with the School Friendly Bikes program is by providing bicycle storage racks in schools to make it easier for school students to add enthusiasm and pride, and appreciation can also motivate cycling and parents can also give permission for children to ride to school every day.

Perseroan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di sekitar jalur kereta Perseroan, mulai dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI ataupun area DKI Jakarta. Program yang dilakukan Perseroan ini bertujuan menguatkan masyarakat dari segi sosial dan ekonomi.

The Corporation is implementing a community empowerment program around the tracks of MRT Jakarta from Lebak Bulus to the Bundaran HI or DKI Jakarta areas. The program being carried out by the Corporation is aiming to strengthen the community in terms of various social and economic aspects.

Living Project adalah program kolaborasi dengan komunitas Si Dalang (Kreasi Daur Ulang) dan perkumpulan Lingkar Temu Kabupaten Lestari untuk mengembangkan masyarakat yang rentan akibat terdampak langsung oleh pembangunan jalur proyek MRT Jakarta. Program ini ditujukan kepada kelompok perempuan ataupun ibu rumah tangga dengan memfokuskan pelatihan pada keterampilan menjahit. Perseroan turut menyiapkan bahan baku berupa hasil limbah *banner/spanduk* untuk dijadikan hasil kerajinan yang bernilai. Sepanjang tahun

Living Project is a collaborative program with the Si Dalang community (Recycled Creation) and the Lestari Circle Gathering Association aimed at the development of vulnerable communities directly affected by the construction of the MRT Jakarta project pathway. This program is being aimed at groups of women or housewives with a focus on training in sewing skills while the Corporation also prepares raw materials in the form of waste banners which are turned into valuable handicrafts. Throughout 2019, the Corporation managed to foster 3 locations namely Tambora Flats, Lebak

2019, Perseroan mengaktifkan program di 3 lokasi yaitu Rumah Susun Tambora, Kelurahan Lebak Bulus, dan Kelurahan Kramat Pela dengan melakukan pelatihan secara berkelanjutan untuk mempersiapkan keahlian dari para kelompok perempuan atau ibu-ibu penerima manfaat. Total hasil kerajinan yang telah diselesaikan dari binaan ini berjumlah 500 buah, dan hasil dari penjualannya menjadi penghasilan tambahan untuk meningkatkan ekonomi dan sosial kelompok perempuan atau ibu-ibu tersebut.

Di bidang pendidikan Perseroan meyakini bahwa generasi penerus bangsa harus dapat meraih masa depan yang lebih baik dan lebih cerah untuk bangsa Indonesia. Untuk itu, salah satu fokus kegiatan Perseroan dilakukan pada bidang pendidikan. Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di bidang pendidikan adalah pada bidang yang selaras dengan bisnis Perseroan, yaitu transportasi publik. Adapun beberapa program yang dikembangkan Perseroan antara lain:

- Ruang Baca Jakarta
Program untuk meningkatkan minat membaca buku di ruang publik (termasuk di dalam transportasi publik) sehingga membaca dapat menjadi bagian gaya hidup baru masyarakat Kota Jakarta. Adapun Perseroan menyiapkan 3 aktivitas utama:
 - » Pojok Buku MRT Jakarta
Aktivitas membudayakan membaca di transportasi publik dengan menggunakan fasilitas peminjaman buku bacaan selama berada atau menggunakan MRT Jakarta.
 - » MRT Jakarta Berbagi Buku
Kampanye penggalangan donasi buku bekas ataupun baru dari publik dengan cara menyumbangkan di Kotak Donasi Buku di setiap stasiun MRT Jakarta
 - » *Micro Library* Ruang Baca Jakarta
Fasilitas publik dalam peminjaman buku, dan berkumpulnya masyarakat dari semua golongan bukan hanya untuk membaca buku, akan tetapi menjadi segala aktivitas positif yang dapat mengembangkan kapabilitas masyarakat yang berlokasi di kawasan Dukuh Atas.
- *MRTeach*
Aktivitas berbagi inspirasi, ilmu pengetahuan, dan pengalaman dari karyawan-karyawan Perseroan kepada anak-anak muda. Pada *MRTeach* tahun ini terdapat peserta dari komunitas Anak Kolong Tomang sebanyak 50 anak.
- Jelajah Transportasi Publik Terintegrasi
Aktivitas menggunakan beberapa transportasi publik (MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan Transjakarta) yang terintegrasi dengan mengajak murid sekolah tingkat menengah atau atas guna membudayakan bertransportasi publik. Kegiatan ini terlaksana pada bulan Mei 2019 yang mengundang siswa dari Sekolah Garuda Cendikia sebanyak 75 orang.

Bulus Village and Kramat Pela Village by conducting ongoing training to build expertise within the women's groups and beneficiary mothers. The total number of handicrafts that have been completed from the target stands at 500, while the proceeds from their sale will be additional income that will be used to improve the economic and social conditions of the women and mothers.

Within the field of education, the Corporation believes that the next generation of the nation must be able to achieve a better and brighter future for the Indonesian people. For this reason, one of the focuses of the Corporation's activities lies within the field of education. The Corporation's corporate social responsibility activities within the field of education lie in areas that are in harmony with the Corporation's business, namely public transportation. Some of the programs developed by Corporation include:

- *Jakarta Reading Space*
This program will hopefully increase interest in the reading of books in public spaces (including on public transportation) so that reading can become part of the new lifestyle of the people of Jakarta. The Corporation has prepared 3 main activities:
 - » *MRT Jakarta Book Corner*
Activities to cultivate reading on public transportation through the use of the facility to borrow books while in or using MRT Jakarta.
 - » *MRT Jakarta Shares Books*
Campaign to raise donations of used or new books from the public through the Book Donation Boxes which can be found at every MRT station in Jakarta.
 - » *Micro Library Jakarta Reading Room*
Public facilities for the borrowing of books and gatherings of people from all communities, not only to read books but also to participate in positive activities that can develop the capabilities of the community located in the Dukuh Atas area.
- *MRTeach*
Activities aimed at sharing inspiration, knowledge and experience between the Corporation's employees and young people. At this year's MRTeach, the participants were drawn from the Anak Kolong Tomang community of 50 children.
- *Integrated Public Transportation Roaming*
Activities involving several public transportation modes (MRT Jakarta, LRT Jakarta, and Transjakarta) have been integrated while high-school students are invited to cultivate public transportation. This activity was conducted in May 2019 and saw 75 students from Garuda Cendikia School being invited.

PENGADAAN PROCUREMENT

Departemen Pengadaan berkomitmen untuk selalu mengutamakan vendor lokal sebagai penyedia barang dan jasa. Selain akan berdampak terhadap pengembangan penyedia lokal, Perseroan dapat menghemat biaya karena umumnya pemasok yang berasal dari luar negeri cenderung memberikan penawaran harga yang lebih mahal dibandingkan vendor lokal. Namun Unit kerja Pengadaan tidak serta-merta memilih pemasok lokal karena tetap mempertimbangkan kualitas barang/jasa yang diberikan. Oleh karena itu, di tahun 2020 dan di masa mendatang, Unit Kerja Pengadaan akan menggunakan fungsi *strategic sourcing* yang bertugas untuk mendapatkan calon-calon pemasok yang berkualitas sesuai Perseroan dengan akan standar dimaksimalkan guna mendapatkan sebanyak-banyaknya pemasok lokal yang berkualitas sehingga nantinya pada saat proses pengadaan opsi penyedia barang dan/atau jasa akan semakin banyak. Selain itu, fungsi ini juga akan mengurangi ketergantungan terhadap pemasok luar negeri dan meningkatkan *bargaining power* Perseroan.

KOMERSIAL DAN RITEL COMMERCIAL AND RETAIL

Dalam rangka menyediakan layanan terintegrasi dan bermutu tinggi yang konsisten kepada pengguna jasa, sangat penting bagi Perseroan untuk tidak hanya memfokuskan strategi bisnis dan mengalokasikan sumber daya pada pendapatan tiket, namun juga pada pendapatan non-tiket lainnya yang potensial. Pendapatan non-tiket yang potensial diperoleh dengan mengoptimalkan aset operasional Perseroan seperti periklanan, non-periklanan (melalui penyediaan jaringan telekomunikasi di dalam stasiun dan penyediaan pilihan pembelian tiket), manajemen ritel, dan aset non-operasional Perseroan.

Guna mendapatkan pendapatan dari bisnis properti yang diperoleh dari realisasi konsep KBT di area sekitar stasiun MRT Jakarta, Perseroan telah melakukan studi dan analisis lebih lanjut terkait pengembangan bisnis non-tiket yang dapat dilakukan Perseroan, serta melakukan pembelajaran ke beberapa negara dengan sistem Perseroan yang lebih maju. Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu sektor non-tiket yang dapat memberikan sumber pendapatan potensial bagi Perseroan dan dapat memberikan sebuah pelayanan yang terintegrasi bagi pengguna jasanya adalah sektor komersial atau ritel. Stasiun MRT Jakarta yang menyediakan area komersial atau terintegrasi dengan area komersial di luar area MRT Jakarta, selain mampu memberikan pelayanan bagi pengguna jasa, juga memberikan dampak sosial-ekonomi yang baik bagi kawasan sekitar. Keberadaan UMKM juga diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada stasiun MRT Jakarta dan menjadi identitas pada area sekitar stasiun MRT Jakarta.

Sebagai informasi, Perseroan telah menerbitkan Peraturan Direksi yang mengatur mekanisme kerja sama dengan pelaku UMKM, yaitu melalui Peraturan Direksi No.PER/004/BOD-MRT/1/2019 tentang Pedoman Tata Laksana Seleksi Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai *Tenant Retail* di Stasiun MRT Jakarta. Di dalamnya terdapat penjelasan

The Procurement Department is committed to always prioritizing local vendors as providers of goods and services. Besides having an impact on the development of local providers, the Corporation can save costs due to the fact that, generally speaking, suppliers who come from abroad tend to offer higher prices than local vendors. However, the Procurement Unit does not necessarily choose local suppliers over others, as it still takes the quality of goods/services provided into consideration. Therefore, going forward in 2020, the Procurement unit will use the strategic sourcing function whose task is to obtain prospective quality suppliers and, in accordance with the Corporation's standards, will seek to maximize this initiative in order to find as many highquality local suppliers as possible, so that later on during the procurement process, there will be more options for the providers of goods and/or services. In addition, this function will also reduce dependence on foreign suppliers and increase the Corporation's bargaining power.

In order to provide integrated and high-quality services which are consistent with service users, it is important that the Corporation not only focuses on business strategy and allocating its resources to its farebox business, but also looks at other potential nonfarebox revenue streams and lines of business. Potential non-farebox business should be implemented by optimizing the operational assets of the Corporation, such as advertising, non-advertising (through the provision of telecommunications services in stations and electronic money systems for ticketing payments) and retail management, as well as the non-operational assets of the Corporation.

In order to generate revenue from business property obtained through the TOD concept surrounding MRT Jakarta stations, the Corporation has carried out further studies and analysis of non-farebox business development which can be implemented by the Corporation and has also carried out benchmarking against other countries with more developed systems. It has now been concluded that one of the main nonfarebox sectors which can generate potential revenue for the Corporation, as well as integrated services for its service users, is the commercial and retail sector. MRT Jakarta stations which provide commercial areas that are integrated into commercial areas other than MRT Jakarta's, are not only able to offer services to services users, but are also able to have a positive socio-economic impact upon surrounding areas. The existence of MSMEs is also expected to provide added value to MRT Jakarta stations and to provide identity for the areas surrounding MRT Jakarta stations.

As further information, the Corporation has issued a Director's Regulation which mandates for a partnership mechanism with MSME entrepreneurs, specifically Director's Regulation No.PER/004/BOD-MRT/1/2019 regarding Selection Guidelines for Micro, Small & Medium Enterprises (MSMEs) as Retail Tenants in MRT Jakarta Stations, which elaborates upon the

tahapan seleksi yang meliputi proses pendaftaran sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

selection process and which covers the registration process up until agreement signing.

Adanya Peraturan Direksi yang secara spesifik menjelaskan tata laksana seleksi UMKM dalam menjalin kerja sama dengan Perseroan menunjukkan bahwa Perseroan serius dalam memberikan program pengembangan masyarakat lokal, dalam hal ini pelaku usaha UMKM.

The existence of the Director's Regulation, which specifically elaborates upon the selection process for MSMEs in partnership with the Corporation shows, that the Corporation takes development programs for local communities seriously, in this case MSME entrepreneurs are the focus.

Penyerapan Tenaga Kerja Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Lokasi Usaha *Absorption of Local Workers and Empowerment of Communities Around Business Locations*

Perseroan tidak memiliki kesulitan yang berarti dalam melakukan proses rekrutmen sesuai kebutuhan Perseroan, serta seleksi calon karyawan yang berasal dari DKI Jakarta dan sekitarnya. Sebagai ibu kota negara dengan daya tarik ekonomi yang tinggi, Jakarta memiliki beragam lapisan dan latar belakang masyarakat yang memungkinkan bagi Perseroan.

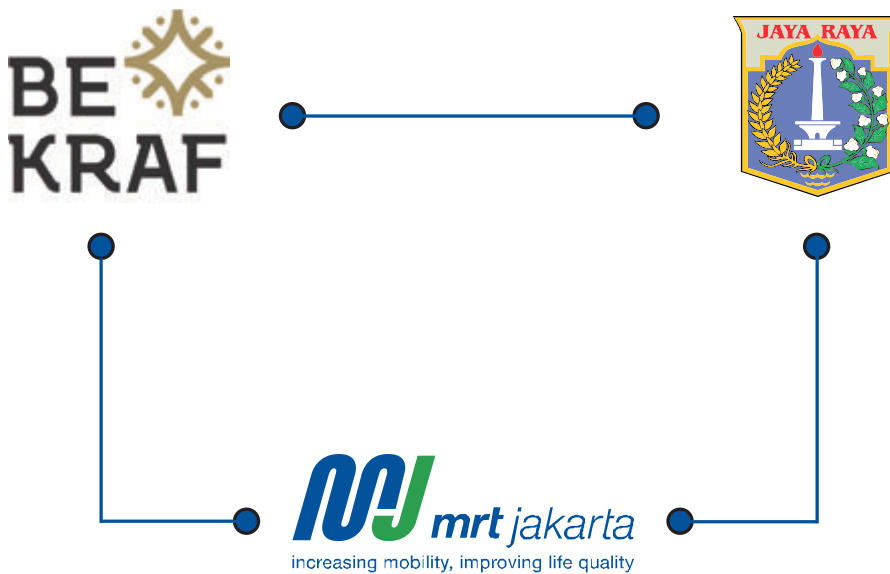
The Corporation has had no significant difficulties in carrying out the recruitment and selection process for prospective employees drawn from DKI Jakarta and its surrounding areas. As the capital city of a country with a high level of economic attractiveness, Jakarta has a variety of layers and backgrounds within its communities that make it possible for the Corporation to recruit successfully.

Seluruh karyawan Perseroan berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya, mencakup Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

All of the Corporation's employees are drawn from the Greater Jakarta area, including Depok, Tangerang, Bekasi, and Bogor.

Pemberdayaan Masyarakat di Lokasi Usaha *Community Empowerment in Business Locations*

RITEL UMKM PT MRT JAKARTA (PESERODA)
Retail MSME's PT MRT JAKARTA (Perseroda)



Figur 7.6
Figure 7.6

Stasiun MRT Menjadi Wadah Pengembangan Industri Kreatif dan UMKM Dengan Standar Nasional *MRT Stations Become a Place for the Development of Creative Industries and MSMEs Based on National Standards*

PENGEMBANGAN RETAIL UMKM PT MRT JAKARTA *MSME Retail Development within PT MRT Jakarta*



Figur 7.7
Figure 7.7

Perseroan sebagai *agent of development* memberikan ruang ritel kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai bagian dari tujuan Perseroan dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Perseroan memilih peran sebagai inkubator bisnis bagi UMKM. Pada tahun 2018, Perseroan bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta dan BEKRAF (saat itu) sebagai mitra strategis dalam mengembangkan industri kreatif. Mengacu pada standar yang digunakan oleh BEKRAF, maka pemilihan peserta dibuka melalui situs web dan akun media sosial Perseroan yang kemudian dikurasi oleh Tenaga Ahli Independen dari BEKRAF. Adapun para peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ber-KTP DKI Jakarta
2. Produk merupakan hasil karya orisinal dan menggunakan 90% bahan dan material dari dalam negeri
3. Untuk makanan mempunyai konsep 'Grab dan Go'
4. Peserta belum pernah dan tidak mempunyai outlet di pusat perbelanjaan modern

Perseroan menyediakan 16 unit ruang sewa yang dilengkapi oleh berbagai fasilitas dan kemudahan sebagai berikut:

1. Harga sewa yang sangat terjangkau sebesar Rp1.360.000,00,-/bulan
2. Booth dan perlengkapannya sudah dipersiapkan oleh Perseroan, sehingga semua tenan UMKM cukup membawa barang dagangannya.
3. Perseroan bekerja sama dengan MOKA POS menyediakan fasilitas POS software maupun hardware.
4. Pelatihan dan mentoring mengenai *merchandise, marketing* dan *retail* dari tenaga ahli.
5. Evaluasi bulanan dari tenaga ahli yang memberikan input dan saran untuk perbaikan dan pengembangan.

The Corporation, as an agent of development, provides retail space for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and Small and Medium Industries (SMI) as part of the Corporation's goal of empowering the people's economy. The Corporation has chosen to take on the role of a business incubator for MSMEs. In 2018, the Corporation synergized with the DKI Jakarta Provincial Government and BEKRAF, as it was then known, as a strategic partner in the development of creative industries. Referring to the standardization used by BEKRAF, the selection of participants was conducted through the Corporation's website and social media accounts and involved input from an independent Experts from BEKRAF. All of the participants were required to meet the following criteria:

1. *DKI Jakarta ID*
2. *Products must be original works and use a 90% level of domestic materials*
3. *For food, the concept set was 'Grab and Go'*
4. *Participants must have never operated any outlets in modern shopping centers*

The Corporation provides 16 rental space units equipped with various facilities, as follows:

1. *A highly affordable rental price of Rp1,360,000.00,-/month.*
2. *Booths and equipment have been prepared by the Corporation so that all MSMEs tenants have sufficient space to display their merchandise.*
3. *The Corporation works closely with MOKA POS to provide POS software and hardware facilities.*
4. *Training and mentoring in merchandise, marketing and retail is provided by experts.*
5. *Monthly evaluations are provided by experts who provide input and suggestions for improvements and developments.*

6. *Total support* atau bantuan yang diberikan mencapai Rp 100 juta per tenan.

Dalam upaya untuk memberikan dukungan secara optimal kepada UMKM, maka Perseroan mengubah strategi dengan menempatkan UMKM di 3 (tiga) stasiun MRT Jakarta (dahulu 5 (lima) stasiun) yang strategis dengan angka laju pengguna jasa, yaitu Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati, dan Stasiun Dukuh Atas dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: kuliner, fesyen, dan kriya.

Dari hasil seleksi yang telah dijalankan, 14 *booth* UMKM telah beroperasi. Berikut daftar UMKM tersebut:

6. *Total support and assistance provided* has reached IDR 100 million per tenant.

In an effort to provide optimal support to MSMEs, the Corporation altered its strategy by placing MSMEs in 3 (three) MRT Jakarta stations (formerly 5 [five] stations) with strategically high traffic numbers, namely Lebak Bulus Station, Fatmawati Station and Dukuh Atas Station across 3 (three) categories, namely: culinary, fashion and crafts.

From the selection results that have been produced, 14 MSMEs booths have begun operations. The following is a list of these MSMEs:

| UMKM Terpilih Tahap 1 hasil sinergi antara Bekraf dan Pemprov DKI Jakarta, terpilih 12 tenan sebagai berikut: <i>Selected MSMEs Phase 1</i> <i>As a result of the synergy between Bekraf and the DKI Jakarta Provincial Government, 12 tenants were selected as follows:</i> | | UMKM Terpilih Tahap 2 kerja sama antara MRT Jakarta dengan Dinas Perindustrian dan Energi, dan Dinas, terpilih 8 (delapan) tenan sebagai berikut: <i>Selected MSMEs Phase 2</i> <i>This is a collaboration between the Jakarta MRT and the Department of Industry and Energy, and the Department, and 8 (eight) tenants were selected, as follows:</i> | |
|---|--------------------------------|---|------------|
| No | | No | |
| 1 | Broodmet | 1 | Happinaz |
| 2 | Lox Salmon | 2 | Lulu Pasta |
| 3 | Gorjuice | 3 | Dodol Beko |
| 4 | Delicacies by Melati Bakehouse | 4 | Uninam |
| 5 | Lemper Purnama | 5 | Klopo |
| 6 | Kaya Rempah | 6 | Adusi |
| 7 | RA Hijab by Ratu Anggraini | 7 | Lungsin |
| 8 | Dekreasda DKI Jakarta | 8 | Sacquu |
| 9 | Apikmen | | |
| 10 | Hwan | | |
| 11 | Batik Shio | | |
| 12 | KOMM | | |

Tabel 7.37
Table 7.37

BOOTH UMKM DI STASIUN LEBAK BULUS

Booth MSMEs booths at Lebak Bulus Station



Gambar 7.55. Broodmet
Image 7.55. Broodmet



Gambar 7.56. Dekranasda DKI Jakarta
Image 7.56. Dekranasda DKI Jakarta



Gambar 7.57. LOK Salmon
Image 7.57. LOK Salmon



Gambar 7.58. GORJUICE
Image 7.58. GORJUICE



Gambar 7.59. Delicacies by Melati Bakehouse
Image 7.59. Delicacies by Melati Bakehouse

BOOTH UMKM DI STASIUN FATMAWATI
MSMEs booths at Fatmawati Station



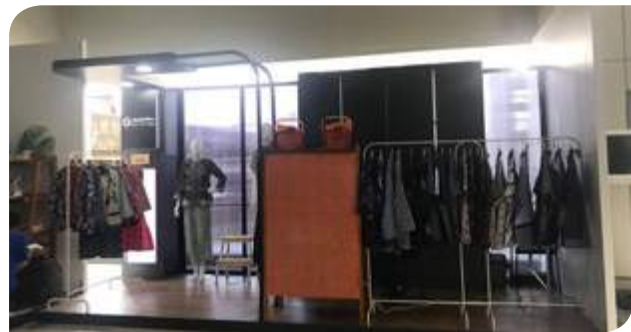
Gambar 7.60. HWAN
Image 7.60. HWAN



Gambar 7.61. Kaya Rempah
Image 7.58. Kaya Rempah



Gambar 7.62. Lemper Purnama
Image 7.62. Lemper Purnama



Gambar 7.63. Apikmen
Image 7.63. Apikmen

BOOTH UMKM DI STASIUN DUKUH ATAS BNI
MSMEs booths at Dukuh Atas BNI



Gambar 7.64. KOMMA
Image 7.64. KOMMA



Gambar 7.65. Batik Shio
Image 7.65. Batik Shio

BOOTH UMKM DI STASIUN LEBAK BULUS GRAB

MSMEs booths at Lebak Bulus Grab Station



Gambar 7.66. Wande Jajan / Image 7.66. Wande Jajan



Gambar 7.67. Wande Seni / Image 7.67. Wande Seni

Delapan tenan dari peserta IKM Binaan Dinas Perindustrian dan Energi penataan dan penempatannya digabung ke dalam dua booth yang dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu makanan dan minuman (wandeJAJAN), dan kriya (wandeSENI), karena konsep yang diusung adalah shop in shop, artinya dalam satu booth terdiri dari beberapa merek. Strategi ini diambil oleh Perseroan agar dalam satu lokasi booth dapat menampung lebih banyak lagi UMKM dan IKM. Maka dalam 14 booth yang ada, Perseroan dapat memberikan kesempatan kepada 20 pelaku usaha. Saat ini Perseroan masih mempunyai dua booth lagi yang disiapkan untuk menampung 10 sampai dengan 12 pelaku usaha UMKM lainnya, sehingga pada akhir April 2020. Perseroan berharap dapat membina 32 total usahawan UMKM dan IKM.

The eight tenants from the SMI were assisted by the Industry and Energy Department and structuring and placement were merged into two booths which were divided into 2 (two) categories, namely food and beverage (wandeJAJAN), and crafts (wandeSENI). This was because the concept used was shop-in-shop, meaning that one booth featured several brands. This strategy was adopted by the Corporation so that in one booth location it could accommodate more MSMEs and SMI. This meant that in 14 existing booths, the Corporation could provide opportunities for 20 business people. At present, the Corporation still has two more booths prepared able to accommodate 10 to 12 other MSMEs entrepreneurs, so that at the end of April 2020, the Corporation is hoping to be able to foster 32 total MSMEs and SMI entrepreneurs.

Peran Perseroan sebagai inkubator bisnis memberikan dampak langsung kepada masyarakat sekitar. Hal ini terjadi karena para pelaku usaha UMKM dan IKM yang beroperasi di stasiun-stasiun MRT Jakarta telah menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan proyeksi 32 UMKM dan IKM binaan Perseroan, maka paling tidak akan ada 150 tenaga kerja baru yang terserap dari masyarakat lokal, sebagai

The role of the Corporation as a business incubator is having a direct impact on surrounding communities. This is because the MSMEs and SMI businesses operating in MRT Jakarta stations have created new jobs. With projections of 32 MSMEs and SMI under the guidance of the Perseroan, at least 150 new workers will be absorbed from the local community, as a direct impact of job creation within the informal sector.

Sosialisasi dan Pelatihan Anti Korupsi

Anti Corruption Socialization and Training



Gambar 7.68 / Image 7.68

Sebagai bagian dari bentuk dukungan terhadap program dan kegiatan anti-korupsi di berbagai sektor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang diwakili oleh Direktur Utama dan Kepala Divisi Sekretaris Perseroan, dan KPK RI yang diwakili oleh Wakil Ketua KPK RI bekerja sama melakukan kampanye publik di kereta dan stasiun MRT Jakarta. Salah satu bentuk kampanye yang dilakukan adalah dengan pemasangan stiker layanan masyarakat yang berisi pesan antikorupsi agar bisa dilihat oleh pengguna jasa Perseroan, dan berdampak bukan hanya di kawasan stasiun MRT Jakarta namun juga di kawasan sekitarnya.

Stiker layanan masyarakat tersebut ditempel di sejumlah kursi dan dinding di dalam kereta serta layar videotron di stasiun. Setelah meninjau Stasiun Bundaran HI, rombongan kemudian menuju Stasiun Blok M BCA dan meninjau sejumlah iklan antikorupsi di layar LED videotron di beberapa tiang di area peron stasiun.

As part of an effort by the Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) to support anti-corruption programs and activities across various sectors, the MRT, represented by the President Director and Head of the Corporate Secretary Division, and the KPK RI, represented by the Deputy Chairperson of the Indonesian KPK, decided to implement a public campaign within MRT Jakarta trains and stations. One form that this campaign took was the installing of community service stickers containing anti-corruption messages so that they could be seen by the Corporation's passengers and hopefully have an impact not only within the area of MRT Jakarta stations but also within surrounding areas.

The public-service stickers were posted on a number of seats and walls on trains and videotron screens within stations. After visiting the Bundaran HI Station, the group then headed to Blok M BCA Station and reviewed a number of anti-corruption advertisements displayed on LED videotron screens mounted on several poles in the station platform area.

Perbaikan Sarana dan Prasarana Sosial

Improvement of Social Facilities and Infrastructure

Salah satu tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham kepada Perseroan adalah merelokasi fasilitas umum serta sarana dan prasarana sosial yang berada di jalur perlintasan proyek MRT Jakarta. Proses relokasi fasilitas umum seperti halte bus tidak hanya dilakukan dengan memindahkan fasilitas tersebut, namun juga penataan yang sejalan serta seirama dengan tata jalur lalu lintas di wilayah Jakarta. Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk dapat menghadirkan fasilitas umum yang dapat dipergunakan oleh semua kalangan, tak terkecuali bagi para penyandang disabilitas.

One of the responsibilities granted by shareholders to the Corporation is to relocate public facilities, social facilities and infrastructure located in MRT Jakarta project crossing areas. The process of relocating public facilities such as bus stops is not only carried out by moving said facilities but also through structuring that is in line and in tune with traffic lanes across the Jakarta area. The Corporation has pledged a high level of commitment to creating public facilities that can be used by all people, including those with disabilities.

FOTO FASILITAS UMUM KHUSUSNYA BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Photographs of Public Facilities Dedicated to People with Disabilities



Gambar 7.69. Lift Prioritas
Image 7.69. Priority Lifts



Gambar 7.70. Gerbong Kereta Khusus Disabilitas
Image 7.70. Disabled Carriage Car



Gambar 7.71. Toilet Khusus Disabilitas
Image 7.71. Special Toilets for People with Disabilities



Gambar 7.72. Sandai khusus untuk Disabilitas
Image 7.72. Special Ramp for People with Disabilities

Kunjungan Lapangan Proyek MRT Jakarta Bagi Publik

Public Field Trips to MRT Jakarta Construction Projects

Salah satu program pendidikan yang diusung Perseroan adalah *site visit* atau kunjungan lapangan proyek MRT Jakarta kepada khalayak umum. Program ini menjadi penting, mengingat proyek MRT Jakarta menggunakan teknologi perkeretaapian yang cukup tinggi, yang dapat menjadi aspek pembelajaran bagi banyak pihak, terutama bagi regulator, konsultan, dan sivitas akademika.

Beroperasinya MRT Jakarta di tahun 2019 menjadi momentum besar bagi Indonesia dan mengundang banyak reaksi positif dari berbagai kalangan masyarakat. Perseroan berharap, program kunjungan lapangan proyek MRT Jakarta dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi pihak yang membutuhkan, khususnya pemerhati transportasi dan pembangunan konstruksi skala besar.

One of the educational programs implemented by the Corporation includes site visits or a field visits to MRT Jakarta projects for the general public. This program is important, given that the MRT Jakarta project uses high-end railway technologies, which thus offer an interesting learning experience for many parties, especially regulators, consultants and the civitas academica.

The operation of MRT Jakarta in 2019 has provided a big momentum for Indonesia and has garnered many positive reactions from various members of society. The Corporation hopes that site-visit programs can offer extra knowledge for the groups that need it, especially observers involved in transportation and large-scale infrastructure development.



Gambar 7.73. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Meninjau Progres Pembangunan MRT Fase 1 Sekaligus Menyampaikan Dukungannya dari Segenap Pelaku Sektor Jasa Keuangan Kepada Perkembangan MRT Jakarta. (7 Februari 2019)

Image 7.73. The Financial services Authority (OJK) Reviewed the Progress of Phase 1 MRT Development and also Expressed its Support to All Financial Service Sector Players for the Development of MRT Jakarta (7 February 2019)



Gambar 7.74. Kunjungan Lapangan Duta Besar dari 13 Negara Eropa, Menjajal Kereta MRT Jakarta dari Stasiun Bundaran HI Menuju Stasiun Lebak Bulus Grab dan Kembali Ke Stasiun Bundaran HI. (12 Februari 2019)

Image 7.74. Field Trip for Ambassadors from 13 European Countries, Who Tested the MRT Jakarta Train from Bundaran HI Station to Lebak Bulus Grab Station before Returning to Bundaran HI Station (February 12, 2019)



Gambar 7.75. Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda) Menerima Kunjungan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani (6 Maret 2019)

Image 7.75. The Directors of PT MRT Jakarta (Perseroda) Received a Visit from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Sri Mulyani (March 6, 2019)



Gambar 7.76. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Mengadakan Kunjungan Kerja Ke Proyek Fase 1 (25 Februari 2019)

Image 7.76. The Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Working Visit to the Phase 1 Project (February 25, 2019)



Gambar 7.77. Kunjungan KAI Ke MRT Jakarta
Image 7.77. KAI Visit to MRT Jakarta



Gambar 7.78. Kunjungan Duta Besar Swedia Untuk Indonesia ke MRT Jakarta (18 November 2019)

Image 7.78. Visit of The Swedish Ambassador to Indonesia for MRT Jakarta (November 18, 2019)



Gambar 7.79. Kunjungan Lapangan Bina Marga ke MRT Jakarta

Image 7.79. Bina Marga Field Visit to MRT Jakarta
February 22, 2019



Gambar 7.80. Kunjungan Siswa Sekolah Dasar Kabupaten Jayapura dan Asmat

Image 7.80. Visit from Jayapura and Asmat District Primary School Students



Gambar 7.81. Kunjungan Lapangan Direksi BUMD DKI Jakarta ke MRT Jakarta

Image 7.81. Jakarta BUMD Directors' Field Visit to MRT Jakarta

Mekanisme Pengaduan Publik

Public Complaints Mechanism

Perseroan telah menyediakan sarana pengaduan bagi para pengguna jasa agar dapat menyampaikan keluhan, kritik, dan saran melalui beberapa kanal media sebagai berikut:

The Corporation has provided a facility through which passengers can submit complaints, criticisms and suggestions through the following media channels:

PT MRT Jakarta (Perseroda)

 (62)21 3906454

Wisma Nusantara Lt. 21-23

 (62)21 3155846

Jl. MH Thamrin 59

 **1500 332 (24 jam)**

Jakarta 10350 - Indonesia

 jakartamrt.co.id

Setiap masukan yang diberikan melalui kanal-kanal tersebut didata secara sistematis oleh penanggung jawab pengaduan publik di lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda), dan dilakukan juga tahapan tindak lanjut penyelesaian masalah yang ada.

Every complaint, criticism and suggestion made through these channels is systematically recorded by the person in charge of public complaints for the PT MRT JAKARTA (Perseroda) environment and there is also a follow-up stage for the resolution of existing problems.

Di setiap stasiun MRT Jakarta tersedia Pos Sahabat Perempuan dan Anak yang merupakan kerja sama antara MRT Jakarta dengan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta. Pos Sahabat Perempuan dan Anak tersebut diresmikan pada tanggal 10 Desember 2019 oleh Gubernur DKI Jakarta dan bertujuan untuk menampung pengaduan.

Every MRT Jakarta station provides a Women and Children Friendly Spot, which were inaugurated on December 10, 2019 by the Governor of DKI Jakarta. The Women and Children Friendly Spots are collaboration between MRT Jakarta and the Office of Child Empowerment, Protection and Population Control of DKI Jakarta, which will accommodate any related complaints.



Informasi
Information



LAPORAN KEUANGAN TERAUDIT 2019

2019 AUDITED FINANCIAL REPORT

Depo kereta api dibangun di area Lebak Bulus, berdekatan dengan stasiun awal/akhir Lebak Bulus. Sejak beroperasi hingga kini indeks kepuasan pelanggan MRT Jakarta mencapai nilai 82,8.

The train depot was built in the Lebak Bulus area, adjacent to the start / end station of Lebak Bulus. Since its operation, the Jakarta MRT customer satisfaction index has reached 82.8.



PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen
Financial statements as of December 31,2019 and for the year then ended with independent auditors' report

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

| | | |
|--|------|---|
| Surat Pernyataan Direksi | | <i>Board of Directors' Statement</i> |
| Laporan Auditor Independen | | <i>Independent Auditors' Report</i> |
| Laporan Posisi Keuangan | 1-2 | <i>Statement of Financial Position</i> |
| Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain | 3 | <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> |
| Laporan Perubahan Ekuitas..... | 4 | <i>Statement of Changes in Equity</i> |
| Laporan Arus Kas | 5 | <i>Statement of Cash Flows</i> |
| Catatan Atas Laporan Keuangan..... | 6-82 | <i>Financial Statement notes</i> |

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama/Name | : | William P. Sabandar |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Wisma Nusantara 21 st Floor Jalan M.H Thamrin 59 Jakarta 10350 |
| Alamat domisili sesuai KTP <i>(Domicile as stated on ID Card)</i> | : | BSD Blok Γ. 12/23 A Sektor 1 – 5 Serpong, Tangerang Selatan. |
| Nomor telepon/Phone number | : | (021) 3906454 |
| Jabatan/Position | : | Direktur Utama/President Director |
| 2. Nama/Name | : | Silvia Hailm |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Wisma Nusantara 21 st Floor Jalan M.H Thamrin 59, Jakarta 10350 |
| Alamat domisili sesuai KTP <i>(Domicile as stated on ID Card)</i> | : | Jl. Tirta Nadi II GG Cendana 2 No.6 BR/UNK Blanjong Sanur Kauh Denpasar Selatan, Bali |
| Nomor telepon/Phone number | : | (021) 3906454 |
| Jabatan/Position | : | - Direktur Konstruksi/Construction Director - P.t. Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi/Acting Official Finance & Corporate Management Director |

Menyatakan bahwa:

Declare that:

- | | |
|---|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the Company's financial statements as of December 31, 2019 and for the year then ended;</i> |
| 2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements of the Company has been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;</i> |

H



- b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung Informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

- b. The financial statements of the Company do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any material information or facts;

4. We are responsible for the Company's internal control system.

The above statement is made truthfully.

Jakarta, 12 Maret 2020/March 12, 2020



William P. Sabandar
Direktur Utama/President Director



Silvia Halim
Direktur Konstruksi/Construction Director
Plt. Direktur Keuangan & Manajemen Korporasi/Acting Official Finance & Corporate Management Director



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00240/2.1032/AU.1/06/1609-1/1/III/2020

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. 00240/2.1032/AU.1/06/1609-1/1/III/2020

**The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda)**

We have audited the accompanying financial statements of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2019, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00240/2.1032/AU.1/06/1609-1/1/III/2020 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Mass Rapid Transit Jakarta (Persero) tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. 00240/2.1032/AU.1/06/1609-1/1/III/2020 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Mass Rapid Transit Jakarta (Persero) as of December 31, 2019, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Purwanto, Sungkoro & Surja



Damestar Hutagalung, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1609/Public Accountant Registration No. AP.1609

12 Maret 2020/March 12, 2020

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2019
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

| | <u>31 Desember 2019/ December 31, 2019</u> | <u>Catatan/ Notes</u> | <u>31 Desember 2018/ December 31, 2018</u> | |
|--|--|---------------------------|--|--|
| ASET | | | | ASSETS |
| ASET LANCAR | | | | CURRENT ASSETS |
| Kas dan setara kas | 976.544.700.866 | 2,4 | 604.890.512.336 | <i>Cash and cash equivalents</i> |
| Piutang usaha | 78.192.571.791 | 2,5 | - | <i>Account receivables</i> |
| Piutang subsidi | 105.707.838.783 | 2,20 | - | <i>Subsidy receivables</i> |
| Piutang lain-lain | 921.569.087 | 2 | 1.952.248.911 | <i>Other receivables</i> |
| Pendapatan yang akan diterima | 9.585.176.485 | 2,6 | 518.340.064 | <i>Accrued revenues</i> |
| Persediaan | 3.621.218.127 | 7 | - | <i>Inventories</i> |
| Pajak dibayar di muka | - | 17a | 3.277.464.575 | <i>Prepaid tax</i> |
| Biaya dibayar di muka - neto dan uang muka | 9.543.207.097 | 8 | 6.166.712.208 | <i>Prepaid expenses - net and advance payments</i> |
| Dana dibatasi penggunaannya | 1.146.376.356 | | - | <i>Restricted fund</i> |
| Total aset lancar | <u>1.185.262.658.592</u> | | <u>616.805.278.094</u> | <i>Total current assets</i> |
| ASET TIDAK LANCAR | | | | NON-CURRENT ASSETS |
| Uang muka kontraktor | 18.999.519.135 | 2 | 68.570.885.284 | <i>Contractors' advances</i> |
| Aset tetap - neto | 16.023.641.838.869 | 2,9 | 12.708.591.099.651 | <i>Fixed assets - net</i> |
| Aset takberwujud - neto | 28.740.832.279 | 2,10 | 13.207.508.256 | <i>Intangible assets - net</i> |
| Uang jaminan | 13.432.176.936 | 2,11 | 6.724.921.336 | <i>Guarantee deposits</i> |
| Aset pajak tangguhan - neto | 78.326.320.877 | 17e | - | <i>Deferred tax assets - net</i> |
| Taksiran tagihan pajak penghasilan | 5.003.642.683 | 17d | - | <i>Estimated claim for tax refund</i> |
| Total aset tidak lancar | <u>16.168.144.330.779</u> | | <u>12.797.094.414.527</u> | <i>Total non-current assets</i> |
| TOTAL ASET | <u>17.353.406.989.371</u> | | <u>13.413.899.692.621</u> | TOTAL ASSETS |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2019
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2019
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

| | 31 Desember 2019/ December 31, 2019 | Catatan/ Notes | 31 Desember 2018/ December 31, 2018 | |
|--|--|-------------------|--|--|
| LIABILITAS DAN EKUITAS | | | | LIABILITIES AND EQUITY |
| LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | | CURRENT LIABILITIES |
| Utang usaha | 1.105.805.255 | 2,12 | 11.207.236.410 | Account payables |
| Utang lain-lain | 1.163.703.808 | | 1.358.493.945 | Other payables |
| Utang kontraktor dan konsultan | 146.818.938.125 | 13 | 14.649.392.009 | Payables to contractors and consultants |
| Beban akrual | 369.967.252.006 | 2,14 | 354.094.360.436 | Accrued expenses |
| Pendapatan diterima di muka | 127.615.283.528 | 2,15 | - | Unearned revenues |
| Utang pajak | 52.606.273.985 | 2,17b | 1.573.096.069 | Taxes payable |
| Total liabilitas jangka pendek | 699.277.256.707 | | 382.882.578.869 | Total current liabilities |
| LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | | NON-CURRENT LIABILITIES |
| Utang retensi | 480.756.470.176 | 2,26b | 691.273.055.316 | Retention payables |
| Pendapatan diterima di muka | 134.734.477.949 | 15 | 40.000.000.000 | Unearned revenue |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 28.854.656.099 | 2,25 | 16.881.689.759 | Liability for employee benefits |
| Uang jaminan pelanggan | 13.020.934.409 | 2,16 | - | Customer's security deposit |
| Total liabilitas jangka panjang | 657.366.538.633 | | 748.154.745.075 | Total non-current liabilities |
| TOTAL LIABILITAS | 1.356.643.795.340 | | 1.131.037.323.944 | TOTAL LIABILITIES |
| EKUITAS | | | | EQUITY |
| Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham | | | | Share capital - par value of Rp1,000,000 per share |
| Modal dasar - 40.757.353 saham | | | | Authorized - 40,757,353 shares |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh - 12.771.972 saham (2018: 6.165.807 saham) | 12.771.972.000.000 | 18 | 6.165.807.000.000 | Issued and fully paid - 12,771,972 shares (2018: 6,165,807 shares) |
| Modal disetor lainnya | 3.567.201.942.700 | 18 | 6.606.169.772.791 | Other paid-up capital |
| Defisit | (342.410.748.669) | | (489.114.404.114) | Deficit |
| EKUITAS NETO | 15.996.763.194.031 | | 12.282.862.368.677 | NET EQUITY |
| TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 17.353.406.989.371 | | 13.413.899.692.621 | TOTAL LIABILITIES AND EQUITY |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2019
 (Disajikan dalam rupiah)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
 For the year ending December 31, 2019
 (Expressed in rupiah)

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ending December 31 | | | |
|--|---|-------------------|--------------------------|--|
| | 2019 | Catatan/ Notes | 2018 | |
| PENDAPATAN | | | | REVENUES |
| Pendapatan tiket | 191.552.481.872 | 2,19 | - | Farebox revenue |
| Pendapatan subsidi | 534.069.547.569 | 2,20 | - | Subsidy revenue |
| Pendapatan non-tiket | 207.607.500.005 | 2,21 | - | Non-farebox revenue |
| TOTAL PENDAPATAN | 933.229.529.446 | | - | TOTAL REVENUES |
| BEBAN POKOK PENDAPATAN | (760.414.806.769) | 2,22 | - | COST OF REVENUES |
| LABA KOTOR | 172.814.722.677 | | - | GROSS PROFIT |
| Beban umum dan administrasi | (221.749.924.235) | 2,23 | (207.263.897.046) | General and administrative expenses |
| RUGI USAHA | (48.935.201.558) | | (207.263.897.046) | OPERATING LOSS |
| PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | | OTHER INCOME (EXPENSE) |
| Laba selisih kurs - neto | 48.213.315.714 | 2 | 33.565.935.079 | Gain on foreign exchange - net |
| Penghasilan bunga | 38.510.886.239 | 2,24 | 43.684.004.732 | Interest income |
| Penghasilan denda | 23.419.576.928 | 26f | - | Penalty income |
| Penghasilan keuangan | 11.979.065.591 | 16 | - | Finance income |
| Penghasilan (beban) lain-lain - neto | (1.268.975.119) | | 31.276.751 | Other income (expense) - net |
| Penghasilan lain-lain - neto | 120.853.869.353 | | 77.281.216.562 | Other income - net |
| LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK FINAL DAN MANFAAT PAJAK PENGHASILAN | 71.918.667.795 | | (129.982.680.484) | INCOME (LOSS) BEFORE FINAL TAX EXPENSE AND INCOME TAX BENEFIT |
| Beban pajak final | (7.973.152.602) | 2,17f | (8.736.800.946) | Final tax expense |
| LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT PAJAK PENGHASILAN | 63.945.515.193 | 2 | (138.719.481.430) | INCOME (LOSS) BEFORE INCOME TAX BENEFIT |
| MANFAAT PAJAK PENGHASILAN TANGGUHAN | 79.434.275.721 | | - | DEFERRED INCOME TAX BENEFIT |
| LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 143.379.790.914 | | (138.719.481.430) | INCOME (LOSS) FOR THE YEAR |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | | OTHER COMPREHENSIVE INCOME |
| Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi periode berikutnya | | | | Item that will not be reclassified to profit or loss in subsequent periods |
| Laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja - neto dari pajak | 3.323.864.531 | 2,25 | 1.213.352.901 | Remeasurement gain on employee benefits liability - net of tax |
| TOTAL PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN | 146.703.655.445 | | (137.506.128.529) | TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2019
(Disajikan dalam rupiah)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For the year ending December 31, 2019
(Expressed in rupiah)

| | Catatan/ Notes | Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital | Modal disetor lainnya/ Other paid-up capital | Defisit/ Deficit | Ekuitas neto/ Net equity | |
|--|-------------------|--|---|--------------------------|--------------------------------|--|
| Saldo tanggal 31 Desember 2017 | | 5.721.807.000.000 | 3.389.444.841.341 | (351.608.275.585) | 8.759.643.565.756 | Balance as of December 31, 2017 |
| Modal disetor lainnya | 18 | - | 3.660.724.931.450 | - | 3.660.724.931.450 | Other paid-up capital |
| Reklasifikasi atas modal disetor lainnya | 18 | 444.000.000.000 | (444.000.000.000) | - | - | Reclassification of other paid-up capital |
| Rugi tahun berjalan | | - | - | (138.719.481.430) | (138.719.481.430) | Loss for the year |
| Penghasilan komprehensif lain - neto | | - | - | 1.213.352.901 | 1.213.352.901 | Other comprehensive income - net |
| Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 | | 6.165.807.000.000 | 6.606.169.772.791 | (489.114.404.114) | 12.282.862.368.677 | Balance as of December 31, 2018 |
| Modal disetor lainnya | 18 | - | 3.567.197.169.909 | - | 3.567.197.169.909 | Other paid-up capital |
| Reklasifikasi atas modal disetor lainnya | 18 | 6.606.165.000.000 | (6.606.165.000.000) | - | - | Reclassification of other paid-up capital |
| Laba tahun berjalan | | - | - | 143.379.790.914 | 143.379.790.914 | Income for the year |
| Penghasilan komprehensif lain - neto | | - | - | 3.323.864.531 | 3.323.864.531 | Other comprehensive income - net |
| Saldo pada tanggal 31 Desember 2019 | | 12.771.972.000.000 | 3.567.201.942.700 | (342.410.748.669) | 15.996.763.194.031 | Balance as of December 31, 2019 |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember 2019
 (Disajikan dalam rupiah)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
STATEMENT OF CASH FLOWS
 For the year ending December 31, 2019
 (Expressed in rupiah)

Tahun yang berakhir pada tanggal
 31 Desember/Year ending December 31

| | 2019 | Catatan/ Notes | 2018 | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|---|
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | | | CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES |
| Penerimaan dari pelanggan | 601.046.856.393 | 19,21 | 40.000.000.000 | <i>Receipts from customers</i> |
| Penerimaan dari subsidi | 427.027.424.467 | 20 | - | <i>Receipts from subsidy</i> |
| Penerimaan penghasilan bunga | 29.862.448.524 | 24 | 35.150.178.790 | <i>Receipts from interest income</i> |
| Pembayaran kepada pemasok | (347.314.529.248) | 22,23 | (90.433.887.594) | <i>Payment to vendors</i> |
| Pembayaran kepada komisaris, direksi, dan karyawan | (148.806.310.428) | 23,25 | (96.314.836.698) | <i>Payments to commissioners, directors and employees</i> |
| Kas bersih yang diperoleh (digunakan) untuk aktivitas operasi | 561.815.889.708 | | (111.598.545.502) | Net cash received (used) in operating activities |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | | | CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES |
| Penambahan aset tetap | (172.436.098.293) | 9 | (50.471.787.810) | <i>Additions to fixed assets</i> |
| Penambahan aset takberwujud | (17.725.602.885) | 10 | (13.381.696.153) | <i>Additions to intangible assets</i> |
| Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi | (190.161.701.178) | | (63.853.483.963) | Net cash used in investing activities |
| KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS | 371.654.188.530 | | (175.452.029.465) | NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 604.890.512.336 | 4 | 780.342.541.801 | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 976.544.700.866 | 4 | 604.890.512.336 | CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR |

Pengungkapan informasi tambahan arus kas disajikan pada Catatan 32.

Supplemental disclosure of cash flow information is presented in Note 32.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM

PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Perseroan Daerah") adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn. No.140 tanggal 17 Juni 2008 dan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tanggal 17 Juni 2008 ("Perda No. 3"). Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-36355.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 7 Juni 2008. Pada tanggal 28 Desember 2018 diterbitkan Peraturan Daerah No. 9 ("Perda No. 9"), menggantikan Peraturan Daerah sebelumnya dan status Perseroan diubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Anggaran Dasar ("AD") Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir pada tanggal 13 Desember 2019 sehubungan dengan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan. Perubahan terakhir termuat dalam Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 23 tanggal 13 Desember 2019 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0105309.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 dan melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0373409 tanggal 16 Desember 2019. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 9 Tahun 2018, ruang lingkup kegiatan Peran mencakup:

- a. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan dan perusahaan prasarana.
- b. Penyelenggaraan sarana perkeretaapian umum perkotaan yang meliputi pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan dan perusahaan sarana.
- c. Pengembangan dan pengelolaan properti atau bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya, serta Depo dan kawasan sekitarnya.

Pada tanggal 13 April 2017, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah No. 53 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan ini, Perseroan diberi penugasan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana Mass Rapid Transit.

1. GENERAL

PT Mass Rapid Transit Jakarta ("Perseroan Daerah") is a Regionally Owned Company established in the Republic of Indonesia by virtue of Notarial Deed No. 140 dated June 17, 2008 of Sutjipto, S.H., M.Kn. and Government Regulation No. 3 Year 2008 dated June 17, 2008 ("Perda No. 3"). Its establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through letter No. AHU-36355.AH.01.01 Year 2008 dated June 27, 2008. On December 28, 2018, published Government Regulation No. 9 ("Perda No. 9") replaced the previous Government Regulation and the status of the Corporation was changed to "Perseroan Daerah (Perseroda)".

The Corporation's Articles of Association ("AoA") have been amended several times, the most recent of which was made on December 13, 2019 in relation to equity changes. The latest amendment was set out under Notarial Deed No. 23 dated December 13, 2019 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. and was approved by the Ministry of Law and of Human the Rights Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0105309.AH.01.02. Year 2019 dated December 16, 2019, and acknowledgement Letter No. AHUAH.01.03-0373409 dated December 16, 2019. Based on Government Regulation of DKI Jakarta No. 9 Year 2018, the Corporation's scope of activities encompasses the following:

- a. Infrastructure management for public railways in an urban area that includes infrastructure development, infrastructure operation, infrastructure maintenance and infrastructure management.
- b. Facilities management for public railways in an urban area that includes facility development, facility operations, maintenance and management of the facilities.
- c. Development and management of property or business within station areas and areas around stations, as well as Depots and areas around them.

On April 13, 2017, the Governor of DKI Jakarta issued Government Regulation No. 53 Year 2017. Based on this regulation, the Corporation has been appointed to implement the infrastructure and rolling stock of the Mass Rapid Transit system.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Pada tanggal 6 Oktober 2017, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 140 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan ini, Perseroan ditugaskan sebagai operator utama pengelola Kawasan Berorientasi Transit Koridor (Utara - Selatan) Fase 1 Moda Raya Terpadu Jakarta.

Pada tanggal 13 Oktober 2017, Perseroan menandatangani perjanjian penyelenggaraan prasarana angkutan umum massal kereta api (*Mass Rapid Transit*) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perjanjian ini meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan. Perjanjian ini berlaku selama 30 tahun terhitung dan dapat diperpanjang untuk setiap kali untuk jangka waktu maksimal 20 tahun berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 29 Maret 2019, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian *Mass Rapid Transit* dan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit*.

Pada tanggal 9 September 2019, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 95 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu.

Pada tanggal 30 September 2019, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur No. 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu Dan Lintas Raya Terpadu.

Perseroan berlokasi di Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, Indonesia. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 April 2019.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mempunyai 527 karyawan tetap (2018: 194 karyawan tetap) (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

On October 6, 2017, the Governor of DKI Jakarta issued Governor's Regulation No. 140 Year 2017. Based on this regulation, the Corporation has been assigned as the main operator of the Transit Oriented Development Corridor (North - South) Phase I Mass Rapid Transit Jakarta.

On October 13, 2017, the Corporation signed an infrastructure operations agreement for mass railway public transport (Mass Rapid Transit) with the Provincial Government of DKI Jakarta. This agreement covers development, operations maintenance and business. This agreement is valid for 30 years starts from the operating license determination date for public railway infrastructure and may be renewed more than once for a maximum period of 20 years based on the agreement in accordance with the provisions of the law.

On March 29, 2019, the Governor of DKI Jakarta issued Governor's Regulation No. 34 Year 2019 regarding Mass Rapid Transit and Light Rail Transit Tariffs.

On September 9, 2019, the Governor of DKI Jakarta issued Governor's Regulation No. 95 Year 2019 regarding Minimum Service Standards for public transportation via Mass Rapid Transit and Light Rail Transit.

On September 30, 2019, the Governor of DKI Jakarta issued Governor's Regulation No. 107 Year 2019 regarding Subsidies for Mass Rapid Transit and Light Rail Transit.

The Corporation is located in Wisma Nusantara, Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta, Indonesia. The Corporation started its commercial operations on April 1, 2019.

As of December 31, 2019, the Corporation had a total of 527 permanent employees (2018: 194 permanent employees) (unaudited).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 23 tanggal 13 Desember 2019, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

Muhammad Syaugi
Rukijo
Adnan Pandu Praja
Mukhtasor
Zulfikri

Board of Commissioners
President Commissioners
Commissioners

Direksi
Direktur Utama
Direksi

William P. Sabandar
Silvia Halim
Muhammad Effendi
Tuhiyat
Ghamal Peris

Directors
President Director
Directors

Berdasarkan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 16 tanggal 7 November 2018, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Plt. Komisaris Utama
Komisaris

Rukijo
Yuzmada Faizal
Zulfikri
Mukhtasor

Board of Commissioners
Acting Official President Commissioners
Commissioners

Direksi
Direktur Utama
Direksi

William P. Sabandar
Silvia Halim
Muhammad Effendi
Tuhiyat
Ghamal Peris

Directors
President Director
Directors

Jumlah gaji dan tunjangan lainnya untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.630.160.815 (2018: Rp14.230.029.795).

The compensation and other benefits of the Corporation's Boards of Commissioners and Directors for the year ending December 31, 2019 amounted to Rp16,630,160,815 (2018: Rp14,230,029,795).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of presentation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consist of the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK").

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a. Dasar penyajian laporan keuangan
(lanjutan)**

Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk instrumen keuangan yang dinyatakan dengan nilai wajar dan untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan menggunakan metode langsung.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2019, Perseroan menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi standar akuntansi keuangan baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Perseroan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya:

- ISAK 33: Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka

Interpretasi ini mengatur penentuan tanggal transaksi untuk tujuan menentukan nilai tukar yang akan digunakan pada pengakuan awal aset, biaya, atau pendapatan (atau bagiannya) terkait pada penghentian pengakuan aset atau liabilitas non-moneter yang timbul dari pembayaran atau penerimaan uang muka dalam mata uang asing.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**a. Basis of presentation of the financial
statements (continued)**

The financial statements were prepared in accordance with PSAK 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements".

The financial statements were prepared using the historical cost basis of accounting, except for financial instruments, which are stated at fair value and for certain accounts which are stated on the bases described in the related accounting policies for those accounts.

The statement of cash flows presents the receipts and payments of cash and cash equivalents as classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the direct method.

b. Changes in accounting principles

On January 1, 2019, the Corporation adopted new and revised statements of financial accounting standards and interpretations of statements of financial accounting standards that are mandatory for application from that date. Changes to the Corporation's accounting policies have been made as required, in accordance with the transitional provisions in the respective standards and interpretations.

The adoption of the following new and revised standards and interpretation did not result in substantial changes to the Corporation's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial years:

- ISAK 33: Foreign Currency Transaction and Advance Consideration

This interpretation addresses how to determine the date of a transaction for the purpose of determining the exchange rate to use during initial recognition of the related asset, expense or income (or part thereof) regarding the de-recognition of a non-monetary asset or non-monetary liability arising from the payment or receipt of advance consideration in a foreign currency.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- ISAK 34: Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Interpretasi ini mengatur akuntansi pajak penghasilan ketika perlakuan pajak melibatkan ketidakpastian yang mempengaruhi penerapan PSAK 46: Pajak Penghasilan. Interpretasi ini tidak berlaku untuk pajak atau retribusi di luar ruang lingkup PSAK 46, juga tidak secara khusus mencakup persyaratan yang berkaitan dengan bunga dan denda yang terkait dengan ketidakpastian perlakuan pajak. Interpretasi ini secara khusus membahas hal-hal berikut:

- ▶ Apakah suatu entitas mempertimbangkan ketidakpastian perlakuan pajak secara terpisah
- ▶ Asumsi yang dibuat entitas tentang pemeriksaan atas perlakuan pajak oleh otoritas perpajakan
- ▶ Bagaimana entitas menentukan laba pajak/(rugi pajak), dasar pengenaan pajak, rugi pajak yang belum digunakan, kredit pajak yang belum digunakan, dan tarif pajak
- ▶ Bagaimana entitas mempertimbangkan perubahan fakta dan keadaan terkait

Perseroan menentukan apakah akan mempertimbangkan masing-masing perlakuan pajak yang tidak pasti secara terpisah atau bersama-sama dengan satu atau lebih perlakuan pajak tidak pasti lainnya dan menggunakan pendekatan yang dapat memprediksi penyelesaian ketidakpastian tersebut dengan lebih baik.

Pada saat melakukan adopsi Interpretasi, Perseroan mempertimbangkan apakah mereka memiliki posisi pajak yang tidak pasti, terutama yang berkaitan dengan *transfer pricing*. Pelaporan pajak Perseroan di berbagai yurisdiksi termasuk pengurangan beban pajak terkait dengan *transfer pricing* dan otoritas perpajakan mungkin dapat memiliki pandangan yang berbeda atas perlakuan pajak tersebut.

Perseroan menentukan, berdasarkan pada kepatuhan perpajakannya dan studi penentuan transfer pricing, bahwa besar kemungkinan perlakuan pajaknya akan diterima oleh otoritas perpajakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Changes in accounting principles (continued)

- ISAK 34: *Uncertainty over Income Tax Treatments*

The interpretation addresses the accounting for income taxes when tax treatments involve uncertainty that affects the application of PSAK 46: Income Taxes. It does not apply to taxes or levies outside the scope of PSAK 46, nor does it specifically include requirements relating to interest and penalties associated with uncertain tax treatments. The interpretation specifically addresses the following:

- ▶ *Whether an entity considers uncertain tax treatments separately*
- ▶ *The assumptions an entity makes about the examination of tax treatments by taxation authorities*
- ▶ *How an entity determines taxable profit/(tax loss), tax bases, unused tax losses, unused tax credits and tax rate*
- ▶ *How an entity considers changes in facts and circumstances*

The Company determines whether to consider each uncertain tax treatment separately or together with one or more other uncertain tax treatments and uses the approach that better predicts the resolution of the uncertainty.

Upon adoption of the Interpretation, the Company considered whether it has any uncertain tax positions, particularly those relating to transfer pricing. The Company's tax filings in different jurisdictions include deductions related to transfer pricing and the taxation authorities may challenge those tax treatments.

The Company determined, based on its tax compliance and transfer pricing study, that it is probable that its tax treatments will be accepted by the taxation authorities.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program.

Amandemen PSAK 24 mengatur akuntansi ketika amandemen, pembatasan, atau penyelesaian program terjadi dalam periode pelaporan, maka entitas diharuskan untuk menentukan biaya jasa kini untuk sisa periode setelah amandemen, pengurangan atau penyelesaian program menggunakan asumsi aktuarial yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan berdasarkan program dan aset program setelah peristiwa tersebut.

Perseroan juga diharuskan untuk menentukan bunga neto untuk sisa periode setelah amandemen, pembatasan atau penyelesaian program dengan menggunakan liabilitas imbalan pasti (aset) yang mencerminkan manfaat yang ditawarkan di dalam program dan aset program setelah peristiwa tersebut, serta tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

- Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari dividen lebih terkait langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan daripada distribusi kepada pemilik. Dengan demikian, entitas mengakui konsekuensi dari pajak penghasilan atas dividen dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal atas transaksi atau peristiwa masa lalu terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Changes in accounting principles (continued)

- *Amendments to PSAK 24: Employee Benefits - Plan Amendment, Curtailment or Settlement.*

The amendments to PSAK 24 address the accounting when a plan amendment, curtailment or settlement occurs during a reporting period, an entity is required to determine the current service cost for the remainder of the period after the plan amendment, curtailment or settlement, using the actuarial assumptions used to remeasure the net defined benefit liability (asset) reflecting the benefits offered under the plan and the plan assets after that event.

The Company is also required to determine the net interest for the remainder of the period after the plan amendment, curtailment or settlement using the net defined benefit liability (asset) reflecting the benefits offered under the plan and the plan assets after that event, and the discount rate used to remeasure that net defined benefit liability (asset).

- *Amendments to PSAK 46: Income Taxes*

The amendments clarify that the income tax consequences of dividends are linked more directly to past transactions or events that generated distributable profits than to distributions to owners. Therefore, an entity recognises the income tax consequences of dividends in profit or loss, other comprehensive income or equity according to where it originally recognised those past transactions or events.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

c. Klasifikasi lancar dan tidak lancar

Perseroan menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual, atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

d. Mata uang asing

Mata uang fungsional yang digunakan Perseroan adalah rupiah, yang juga merupakan mata uang penyajian dalam laporan keuangan. Transaksi dalam mata uang selain rupiah dicatat dengan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan tahun tersebut. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31, | |
|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| | 2019 | 2018 |
| 1 Dolar Amerika Serikat | 13.901 | 14.481 |
| 100 Yen Jepang | 12.797 | 13.112 |

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Current and non-current classification

The Corporation presents assets and liabilities in statements of financial position based on current / non-current classification. An asset is current when it is:

- i) expected to be realised or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) expected to be realised within 12 months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within twelve months of the reporting period, or
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting period.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets are classified as non-current assets.

d. Foreign currencies

The functional currency of the Corporation is rupiah, which is also the presentation currency used in its financial statements. Transactions in currencies other than rupiah are recorded at the prevailing rates of exchange in effect on the date of the transactions. On the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to rupiah based on the middle rates published by Bank Indonesia on the last banking transaction date for the year. The resulting gains or losses are credited or charged to current year operations.

The exchange rates used were as follows:

1 United States dollar
100 Japanese yen

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

e. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan terdiri dari kas, bank, dan deposito jangka pendek dengan jangka waktu jatuh tempo antara 3 bulan atau kurang pada saat penempatan dan tidak dibatasi penggunaannya, dan mana yang memiliki risiko tidak signifikan dari perubahan nilai.

f. Aset tetap

Perseroan telah menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011), "Aset Tetap".

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi diakui dalam nilai tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya.

Penyusutan atas setiap aset tetap dimulai ketika aset tetap siap untuk digunakan sesuai peruntukannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

| | Tahun/Year | |
|------------------------------------|------------|--|
| Sarana | 14-30 | Rolling stock |
| Prasarana | | Infrastructure |
| Fasilitas pengoperasian | 5-30 | Operating facilities |
| Jalur dan bangunan | 5-50 | Buildings and track |
| Fasilitas | | Facilities |
| Peralatan pemeliharaan | 10-30 | Maintenance equipment |
| Peralatan mekanikal dan elektrikal | 10-30 | Mechanical and electrical equipment |
| Kendaraan | 4 | Vehicles |
| Peralatan dan perabotan kantor | 4-8 | Furniture, fixtures and office equipment |

Suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak terdapat manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan nilai tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

e. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents in the statement of financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 months or less at the time of placements and not restricted to use, and which are subject to an insignificant risk of changes in value.

f. Fixed assets

The Company has applied PSAK 16 (Revised 2011), "Fixed Assets".

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as they are incurred.

Depreciation of each item of fixed assets starts when it is available for its intended use and is calculated on the straight-line basis over the estimated useful lives of the assets as follows:

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the year the asset is derecognized.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

f. Aset tetap (lanjutan)

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, masa manfaat, dan metode penyusutan atas aset tetap ditelaah dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

Akumulasi biaya konstruksi bangunan, mesin dan peralatan, serta pemasangan mesin dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan tersebut selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada saat aset tersebut siap digunakan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Perseroan bahwa manfaat ekonomi di masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Perusahaan telah menerapkan PSAK 26 (Revisi 2011), "Biaya Pinjaman".

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung maupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian, dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai. Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset kualifikasian tersebut. Tingkat kapitalisasi adalah tingkat rata-rata tertimbang biaya pinjaman terkait pinjaman dalam tahun tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pendanaan pembangunan aset kualifikasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

f. Fixed assets (continued)

The residual values, useful lives, and methods of depreciation of fixed assets are reviewed and adjusted prospectively, if appropriate, at each financial year end.

The accumulated costs of the construction of buildings, machinery and equipment and the installation of machinery are capitalized as construction in progress. These costs are reclassified to the appropriate fixed assets accounts when the related construction or installation is completed.

Depreciation is charged from the date the assets become ready for their intended use. Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Corporation and will depreciate over the remaining useful life of the related asset.

The Corporation has applied PSAK 26 (Revised 2011), "Borrowing Costs".

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date upon which the construction is completed. For borrowing directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned from the temporary investment of such borrowing.

For borrowing that is not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount disbursed on the qualifying asset. The capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the total borrowings outstanding during the year, excluding borrowings directly attributable to financing the qualifying asset under construction.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Aset takberwujud

Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas diamortisasi selama masa manfaat ekonomis dan dinilai untuk penurunan nilai setiap ada indikasi bahwa aset takberwujud tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas dikaji paling lambat pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, sebagaimana mestinya, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laba rugi di kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan suatu aset takberwujud diukur sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dan diakui dalam laba rugi.

h. Pengakuan pendapatan dan beban

PSAK 23 (Revisi 2014) mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Perseroan dan jumlahnya dapat diukur secara andal.

Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat, dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN").

Perseroan menilai pengaturan pendapatannya terhadap kriteria tertentu untuk menentukan apakah ia bertindak sebagai prinsipal atau agen. Perseroan telah menyimpulkan bahwa ia bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Intangible Assets

Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at the end of each reporting period at the least. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense for intangible assets with a finite life is recognized in the statement of profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

Gains or losses arising from derecognition of an intangible asset are measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in the statement of profit or loss when the asset is derecognized.

h. Revenue and expense recognition

PSAK 23 (Revised 2014) identifies the circumstances in which the criteria for revenue recognition are met and, therefore, revenue may be recognized, and prescribes the accounting treatment of revenue arising from certain types of transactions and events, and also provides practical guidance on the application of the criteria on revenue recognition. Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Corporation and the revenue can be reliably measured.

Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value Added Taxes ("VAT").

The Corporation assesses its revenue arrangements against specific criteria to determine if it is acting as principal or agent. The Corporation has concluded that it is acting as principal in all of its revenue arrangements.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**h. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)**

Kriteria pengakuan tertentu berikut ini harus dipenuhi sebelum pengakuan pendapatan diakui:

- Pendapatan tiket diakui pada saat jasa angkutan telah selesai diberikan.
- Pendapatan non-tiket diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa kontrak ditambah dengan bagi hasil, apabila ada.

Beban diakui pada saat terjadinya, kecuali biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan konstruksi proyek MRT Jakarta yang dikapitalisasi pada aset dalam penyelesaian.

i. Imbalan kerja

Perseroan mempunyai program dana pensiun dengan iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Perseroan juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada para karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-Undang Tenaga Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, efek dari plafon aset, tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas manfaat pasti bersih dan pengembalian aset program (tidak termasuk jumlah yang termasuk dalam bunga bersih atas liabilitas imbalan pasti bersih) segera diakui pada laporan posisi keuangan dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii) ketika Perseroan mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**h. Revenue and expense recognition
(continued)**

The following specific recognition criteria must be met before revenue recognition will be recognized:

- Farebox revenue is recognized when services are rendered.
- Non-farebox revenue is recognized as revenue on a straight-line basis over the contract period plus revenue and/or profit sharing, if any.

Expenses are recognized when incurred, except for the costs incurred in connection with the construction of Jakarta MRT's project which are capitalized as construction in progress.

i. Employee benefits

The Corporation has defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

The Corporation also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising actuarial gains and losses, the effect of the asset ceiling, excluding the amounts included in the net interest on the net defined benefit liability and the return on plan assets (excluding the amounts, included in net interest on the net defined benefit liability) are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI during the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified as profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized as profit or loss at the earliest between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and
- ii) the date the Company recognizes related restructuring costs.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

i. Imbalan kerja (lanjutan)

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Perseroan mengakui perubahan berikut pada liabilitas obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laba rugi:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

ii. Perpajakan

Pajak Penghasilan Lancar

Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Perseroan beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

i. Employee benefits (continued)

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The Corporation recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Revenues" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the profit or loss:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and*
- ii) Net interest expense or income.*

j. Taxation

Current Income Tax

Current income tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that are enacted or substantively enacted at the reporting date in the countries in which the Corporation operates and generates taxable income.

Interest and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered a part of income tax expenses.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes on the reporting date.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan, dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aset pajak tangguhan diakui apabila jumlah penghasilan kena pajak besar kemungkinan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan atas barang yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan transaksi dasarnya baik di penghasilan komprehensif lain maupun langsung di ekuitas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Taxation (continued)

Deferred Tax (continued)

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses. Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and any unused tax losses can be utilised, except:

- i. when the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or*
- ii. in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, associates and interest in joint arrangements, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.*

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed on each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed on each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year in which the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in other comprehensive income or directly in equity

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

j. Perpajakan (lanjutan)

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban, dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- ▶ PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari *item* beban-beban yang diterapkan; dan
- ▶ Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

k. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Perseroan mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 27.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan merupakan pihak tidak berelasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Taxation (continued)

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are the recognized net of the amount of VAT except:

- ▶ When the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable from the taxation authority, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
- ▶ When receivables and payables are stated with the amount of VAT included.

The net amount of VAT recoverable from, or payable to, the taxation authorities is included as part of receivables or payables in the statement of financial position.

Final Tax

In accordance with the tax regulations in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying out transactions recognize losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

k. Transaction with related parties

The Corporation has transactions with related parties, as defined in PSAK 7: Related party disclosures.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties. Transactions and balances with related parties are disclosed in Note 27.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the financial statements are unrelated parties.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

l. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Perseroan menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

m. Instrumen keuangan

Perseroan telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

1. Aset keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Perseroan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

l. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realisable value. Cost is calculated using the weighted-average method.

The Corporation provides allowances for net realisable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realisable values of the inventories.

m. Financial instruments

The Corporation has adopted PSAK 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and PSAK 60, "Financial Instruments: Disclosures".

1. Financial assets

Initial recognition

Financial assets within the scope of PSAK 55 are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets. The Corporation determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, reevaluates the designation of such assets on each reporting date.

Financial assets are recognized initially at fair value plus, in the case of investments, not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e. the date upon which the Corporation commits to purchase or sell the assets.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

1. Aset keuangan (lanjutan) Pengakuan awal (lanjutan)

Aset keuangan Perseroan meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang subsidi, piutang lain-lain, pendapatan yang akan diterima, dan uang jaminan pada tanggal 31 Desember 2019.

Perseroan telah menentukan bahwa semua aset keuangan tersebut dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tersedia untuk dijual dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau derivatif yang ditetapkan sebagai investasi lindung nilai sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuota di pasar aktif. Aset keuangan tersebut dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai maupun melalui proses amortisasi.

2. Liabilitas keuangan

Pengukuran setelah pengakuan awal

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, pinjaman dan utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perseroan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Financial instruments (continued)

1. Financial assets (continued)

Initial recognition (continued)

The Corporation's financial assets include cash and cash equivalents, account receivables, subsidy receivables, other receivables, accrued revenues and guarantee deposits as of December 31, 2019.

The Corporation has determined that all of these financial assets are categorized as loans and receivables. As of December 31, 2019, the Corporation did not have any financial assets at fair value through profit or loss, available for sale financial assets and held-to-maturity investments or derivatives designated as a hedging investment in an effective hedge.

Subsequent measurement

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

2. Financial liabilities

Subsequent measurement

Financial liabilities within the scope of PSAK 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Corporation determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal
(lanjutan)

Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk utang usaha, utang lain-lain, utang kontraktor dan konsultan, beban akrual, utang retensi, dan uang jaminan pelanggan.

Perseroan telah menentukan bahwa semua liabilitas keuangan tersebut dikategorikan sebagai pinjaman dan utang. Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perseroan tidak memiliki liabilitas keuangan derivatif yang ditempatkan sebagai investasi lindung nilai sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat kewajibannya serta melalui proses amortisasi.

3. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Financial instruments (continued)

2. Financial liabilities (continued)

Subsequent measurement (continued)

Financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, include directly attributable transaction costs.

The Corporation's financial liabilities as of December 31, 2019 included account payables, other payables, to contractors and consultants, accrued expenses, retention payable and customer security deposits.

The Corporation has determined that all off these financial liabilities are categorized as loans and borrowings. As of December 31, 2019, the Corporation had financial liabilities at fair value through profit or loss. The Corporation did not have any financial liability derivatives designated as hedging investments in an effective hedge.

After initial recognition, loans and borrowings are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

3. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

4. Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir tahun pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

Penyesuaian risiko kredit

Perseroan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit counterparty antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perseroan yang terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

5. Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan menentukan penurunan nilai berdasarkan bukti objektif secara individual atas penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Financial instruments (continued)

4. Fair value of financial instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to quoted market-bid prices at the close of business at the end of the reporting year. For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include the use of recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis or other valuation models.

Credit risk adjustment

The Corporation adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the ones being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liability positions, the Corporation's own credit risk associated with the instrument is taken into account.

5. Impairment of financial assets

The Corporation conducts an assessment at the end of each reporting year, whether or not there is any objective evidence that a financial asset or a company of financial assets is impaired.

For loans and receivables carried at amortized cost, the Corporation assesses impairment based on individual objective evidence of impairment.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

**5. Penurunan nilai dari aset keuangan
(lanjutan)**

Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa mendatang (tidak termasuk ekspektasi kerugian kredit masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa mendatang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya, berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan pemulihan di masa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada Perseroan. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Financial instruments (continued)

**5. Impairment of financial assets
(continued)**

If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset's original effective interest rate. If a "loans and receivables" asset has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Corporation. If, during a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, then the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

m. Instrumen keuangan (lanjutan)

**6. Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan**

Aset keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau (2) Perseroan telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian "pass-through" dan baik (a) Perseroan telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perseroan secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu kewajiban yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

m. Financial instruments (continued)

**6. Derecognition of financial assets and
liabilities**

Financial assets

A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a company of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or (2) the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

Financial liabilities

A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged or cancelled or has expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA
(PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada akhir tahun, Perseroan melakukan penelaahan untuk menentukan ada-tidaknya indikasi penurunan nilai aset.

Aset tetap dan aset tidak lancar lainnya ditelaah untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai apabila terjadi kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali secara penuh. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset-aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui sebagai penghasilan pada tahun ketika pemulihan tersebut terjadi.

o. Provisi

Perseroan menerapkan PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". PSAK ini menetapkan pengakuan dan pengukuran liabilitas diestimasi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi, serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar para pengguna memahami sifat, waktu dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Provisi diakui jika Perseroan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian liabilitas tersebut akan mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini yang terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan liabilitas tersebut, provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Impairment of non-financial assets

At the end of the year, the Corporation will undertake a review in order to determine whether there is any indication of asset impairment.

Fixed asset and other non-current assets are reviewed for impairment losses whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the amount by which an asset's carrying amount exceeds its recoverable amount which is the higher of the asset's net selling price or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are compared at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows. Reversal of an impairment provision is recorded as income in the year when the reversal occurs.

o. Provisions

The Corporation adopted PSAK 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". This PSAK provides that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to the financial statements to enable users to understand the nature, timing and amount related to the information.

A provision is recognized when the Corporation has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

All provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligations, then the provisions will be reversed.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

p. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomi.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN**

Penyusunan laporan keuangan Perseroan mensyaratkan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, serta pengungkapan liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Namun, ketidakpastian estimasi dan asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang memerlukan penyesuaian material atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang berdampak pada masa mendatang.

a. Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perseroan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

- Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Perseroan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di mana entitas tersebut beroperasi. Mata uang tersebut adalah, antara lain, mata uang yang mempengaruhi secara signifikan terhadap beban usaha dan mata uang atas dana yang dihasilkan dari kegiatan pembiayaan.

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak, serta jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

p. Contingencies

Unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Corporation's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to be made to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments were made by management in the process of applying Corporation accounting policies that have the most significant effects to the amounts recognized in financial statements:

- *Determination of functional currency*

The functional currency of the Corporation is the currency of the primary economic environment in which it operates. It is the currency that, among others, mainly influences operating expenses and the currency in which funds from financing activities are generated.

Any uncertainties that exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws and the amount and timing of future taxable income could necessitate future adjustments to tax income and expenses that have already been recorded.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

- Penentuan mata uang fungsional (lanjutan)

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal.

b. Estimasi dan asumsi

- Penentuan nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk model arus kas terdiskonto.

Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan.

- Estimasi masa manfaat aset tetap

Perseroan mengestimasi masa manfaat dari aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dapat didukung dengan rencana dan strategi usaha yang juga mempertimbangkan perkembangan teknologi di masa depan dan perilaku pasar.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Judgments (continued)

- *Determination of functional currency (continued)*

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

b. Estimates and assumptions

- *Determination of fair values of financial assets and financial liabilities*

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded in the statement of financial position cannot be derived from active markets, their fair values are determined using valuation techniques which include the discounted cash flow model.

The inputs to these models are taken from observable markets where possible, but if this is not feasible, a degree of judgment is required in order to establish fair values.

The judgments include considerations of inputs such as liquidity risk, credit risk and volatility. Changes in assumptions about these factors could affect the reported fair values of financial instruments.

- *Estimating useful lives of fixed assets*

The Corporation estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected future technological developments and market behavior.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perseroan secara kolektif terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal, dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah paling sedikit setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya karena pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum, atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Akan tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dimungkinkan dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Jumlah dan waktu dari beban yang dicatat untuk setiap tahun akan terpengaruh oleh perubahan atas faktor-faktor dan situasi tersebut. Pengurangan dalam estimasi masa manfaat dari aset tetap Perseroan akan meningkatkan beban operasi dan menurunkan aset tidak lancar yang dicatat.

Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 50 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Perseroan menjalankan bisnisnya.

- Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perseroan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap tahun pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

- *Estimating useful lives of fixed assets (continued)*

The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Corporation's collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for any year will be affected by changes in these factors and circumstances. A reduction in the estimated useful lives of the Corporation's fixed assets will increase the recorded operating expenses and decrease non-current assets.

The management estimates the useful lives of these fixed assets to be within the range of 4 to 50 years, which are common life expectancies applied within the industry in which the Corporation conducts its business.

- *Impairment of non-financial assets*

In accordance with the Corporation's accounting policy, each asset or cash-generating unit is evaluated each reporting year in order to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount is performed and an impairment loss recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash-generating company of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar dan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi operasi dan volume pendapatan, harga tiket, biaya operasi, serta belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- Realisasi dari aset pajak tangguhan

Perseroan melakukan penelaahan atas nilai tercatat aset pajak tangguhan pada setiap akhir periode pelaporan dan mengurangi nilai tersebut sampai sebesar kemungkinan aset tersebut tidak dapat direalisasikan, di mana penghasilan kena pajak yang tersedia memungkinkan untuk penggunaan seluruh atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut. Penelaahan Perseroan atas pengakuan aset pajak tangguhan untuk perbedaan permanen yang dapat dikurangkan didasarkan atas tingkat dan waktu dari penghasilan kena pajak yang ditaksirkan untuk periode pelaporan berikutnya.

Taksiran ini berdasarkan hasil pencapaian di masa lalu dan ekspektasi di masa depan terhadap pendapatan dan beban, sebagaimana pula dengan strategi perencanaan perpajakan di masa depan. Namun tidak terdapat kepastian bahwa Perseroan dapat menghasilkan penghasilan kena pajak yang cukup untuk memungkinkan penggunaan sebagian atau seluruh bagian dari aset pajak tangguhan tersebut.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and assumptions (continued)

- *Impairment of non-financial assets (continued)*

The determination of fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected operations and revenue volumes, ticket prices, operating costs, and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence, there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

- *Realization of deferred tax assets*

The Corporation reviews the carrying amounts of deferred tax assets at the end of each reporting period and reduces these to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized. The Corporation's assessment of the recognition of deferred tax assets on deductible temporary differences is based on the level and timing of forecast taxable income for the subsequent reporting period.

This forecast is based on the Corporation's past results and future expectations in relation to revenues and expenses as well as future tax planning strategies. However, there is no assurance that the Corporation will generate sufficient taxable income to allow all or part of deferred tax assets to be utilized.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI,
DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)**

b. Estimasi dan asumsi (lanjutan)

- Estimasi beban imbalan kerja karyawan

Estimasi beban imbalan kerja karyawan Imbalan karyawan ditentukan dengan menggunakan metode *projected-unit-credit*. Penilaian aktuaris termasuk membuat variasi asumsi yang terdiri dari, di antaranya, tingkat diskonto, tingkat pengembalian dana pensiun yang diharapkan, tingkat kenaikan kompensasi, dan tingkat kematian.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Perseroan langsung diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya, sementara Perseroan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai. Perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Perseroan dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan karyawan dan beban imbalan karyawan neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas imbalan karyawan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp28.854.656.099 dan Rp16.881.689.759 (Catatan 25).

Perseroan percaya bahwa asumsi mereka adalah memadai dan tepat. Perbedaan signifikan dalam pengalaman aktual Perseroan atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat mempengaruhi secara material beban dan kewajiban pensiun dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Semua asumsi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan.

**3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and assumptions (continued)

- Estimation of employee benefits

Employee benefits are determined using the *projected-unit-credit* method. Actuarial valuation includes making various assumptions which consist of, among others, discount rates, expected rates of return on plan assets, rates of compensation increases and mortality rates.

Actual results that differ from the assumptions set forth by the Corporation are recognized immediately in profit or loss as incurred. While the Corporation believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions used can materially affect the estimated liability for employee benefits and employee benefits expense. The amount of the estimated employee benefits liability as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp28,854,656,099 and Rp16,881,689,759, respectively (Note 25).

While the Corporation believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Corporation's actual experience or significant changes in its assumptions may materially affect the costs and obligations of pension and other long-term employee benefits. All assumptions are reviewed on each reporting date.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|---------------------------------|------------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Kas | 2.705.635.609 | 7.398.350 |
| Bank | | |
| Pihak berelasi - rupiah (Catatan 27): | | |
| PT Bank DKI | 294.823.431.814 | 8.355.083.088 |
| Pihak ketiga: | | |
| Rupiah | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 21.850.933.390 | 10.551.006.595 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 2.572.080.943 | - |
| PT Bank Central Asia Tbk | 1.126.648.542 | - |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 459.609.157 | - |
| Dolar Amerika Serikat | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$15,052 pada tahun 2019 dan US\$851 pada tahun 2018) | 209.243.412 | 12.324.634 |
| Sub-total | 26.218.515.444 | 10.563.331.229 |
| Total bank | 321.041.947.258 | 18.918.414.317 |
| Total kas dan bank | 323.747.582.867 | 18.925.812.667 |
| Deposito berjangka - rupiah | | |
| Pihak berelasi (Catatan 27): | | |
| PT Bank DKI | 384.000.000.000 | 545.000.000.000 |
| Pihak ketiga: | | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 174.029.494.063 | 40.964.699.669 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 57.140.669.834 | - |
| PT Bank Central Asia Tbk | 30.000.000.000 | - |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 7.626.954.102 | - |
| Sub-total | 268.797.117.999 | 40.964.699.669 |
| Total deposito berjangka | 652.797.117.999 | 585.964.699.669 |
| Total kas dan setara kas | 976.544.700.866 | 604.890.512.336 |

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka berkisar antara 2,50% sampai dengan 8,00% (2018: antara 4,25% sampai dengan 7,00%)

Tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak yang berelasi sebanding dengan tingkat bunga yang diperoleh dari bank pihak ketiga.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consists of:

| | 31 Desember/December 31, |
|--|---------------------------------|
| | 2019 |
| Cash on hand | 7.398.350 |
| Cash in banks | |
| Related party - rupiah (Note 27): | |
| PT Bank DKI | 8.355.083.088 |
| Third parties: | |
| Rupiah | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 10.551.006.595 |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | - |
| PT Bank Central Asia Tbk | - |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - |
| United States Dollar | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (US\$15,052 in 2019 and US\$851 in 2018) | 12.324.634 |
| Sub-total | 10.563.331.229 |
| Total cash in banks | 18.918.414.317 |
| Cash on hand and in banks | 18.925.812.667 |
| Time deposits - rupiah | |
| Related party (Note 27): | |
| PT Bank DKI | 545.000.000.000 |
| Third parties: | |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 40.964.699.669 |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - |
| PT Bank Central Asia Tbk | - |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | - |
| Sub-total | 40.964.699.669 |
| Total time deposits | 585.964.699.669 |
| Total cash and cash equivalents | 604.890.512.336 |

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. Time deposits earned interest at annual rates ranging from 2.50% to 8.00% (2018: from 4.25% to 7.00%).

The interest rates of the related-party bank are comparable to those offered by third-party banks.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA

Piutang usaha terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|--------------------------|----------|
| | 2019 | 2018 |
| Pihak berelasi (Catatan 27): | | |
| Bank DKI | 3.775.000 | - |
| Pihak ketiga: | | |
| PT Avabanindo Perkasa | 33.857.861.741 | - |
| PT Espay Debit Indonesia Koe | 13.750.000.000 | - |
| PT Fintek Karya Nusantara | 8.250.000.000 | - |
| PT Visionet Internasional | 8.250.000.000 | - |
| PT Dompot Anak Bangsa | 8.250.000.000 | - |
| PT Inti Menara Jaya | 2.750.000.000 | - |
| PT Quantumconvex International | 1.800.000.000 | - |
| Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000) | 1.280.935.050 | - |
| Sub-total | 78.188.796.791 | - |
| Total | 78.192.571.791 | - |

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif dari penurunan nilai piutang dan seluruh saldo piutang usaha tersebut dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

6. PENDAPATAN YANG AKAN DITERIMA

Pendapatan yang akan diterima terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|--------------------------|--------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Pendapatan bagi hasil dari kerja sama retail | 4.921.580.861 | - |
| Pendapatan bagi hasil dari kerja sama layanan periklanan | 3.198.995.093 | - |
| Bunga | 1.464.600.531 | 518.340.064 |
| Total | 9.585.176.485 | 518.340.064 |

7. PERSEDIAAN

Akun ini merupakan suku cadang sarana yang digunakan untuk perawatan rutin/terjadwal kereta yang dilakukan di Depo Lebak Bulus.

Berdasarkan penilaian manajemen Perseroan, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang dapat mengindikasikan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2019, sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai persediaan pada tanggal tersebut.

5. TRADE RECEIVABLES

Trade receivables consist of:

| | 31 Desember/December 31, | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------|
| | 2019 | 2018 |
| Related party (Note 27): | | |
| Bank DKI | 3.775.000 | - |
| Third parties: | | |
| PT Avabanindo Perkasa | 33.857.861.741 | - |
| PT Espay Debit Indonesia Koe | 13.750.000.000 | - |
| PT Fintek Karya Nusantara | 8.250.000.000 | - |
| PT Visionet Internasional | 8.250.000.000 | - |
| PT Dompot Anak Bangsa | 8.250.000.000 | - |
| PT Inti Menara Jaya | 2.750.000.000 | - |
| PT Quantumconvex International | 1.800.000.000 | - |
| Others (each below Rp500,000,000) | 1.280.935.050 | - |
| Sub-total | 78.188.796.791 | - |
| Total | 78.192.571.791 | - |

Management believes that there is no objective evidence which may indicate impairment in value of the above receivables; hence, no provision for impairment has been made.

6. ACCRUED REVENUES

Accrued revenues consist of:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|--------------------------|--------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Revenue sharing from retail cooperation | 4.921.580.861 | - |
| Revenue sharing from advertising cooperation | 3.198.995.093 | - |
| Interest | 1.464.600.531 | 518.340.064 |
| Total | 9.585.176.485 | 518.340.064 |

7. INVENTORIES

This account represents rolling-stock spare parts used during the routine/scheduled maintenance of rolling stock, which is undertaken in the Corporation's Lebak Bulus Depot.

Based on the Corporation's management's review, there are no events or changes in circumstances which indicate that there is impairment in value of the inventories as of December 31, 2019, thus, no allowance for impairment in the value of inventories is provided.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA - NETO DAN UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Biaya dibayar di muka - neto | 9.496.465.097 | 4.623.594.826 |
| Uang muka operasional | 46.742.000 | 1.543.117.382 |
| Total | 9.543.207.097 | 6.166.712.208 |

Akun biaya dibayar di muka -neto merupakan biaya sewa kantor dan asuransi sarana dan prasarana yang dibayar di muka.

8. PREPAID EXPENSES - NET AND ADVANCES

This account consists of:

| | 31 Desember/December 31, | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Prepayments - net | 9.496.465.097 | 4.623.594.826 |
| Operational advances | 46.742.000 | 1.543.117.382 |
| Total | 9.543.207.097 | 6.166.712.208 |

The prepayments account represents office rent, rolling stock and infrastructure insurance expenses which are paid in advance.

9. ASET TETAP - NETO

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2019/December 31, 2019 | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|---|
| | Saldo awal/ Initial balance | Penambahan/ Additions | Reklasifikasi/ Reclassification | Saldo akhir/ End balance |
| Harga perolehan | | | | |
| Sarana | - | - | 1.596.355.715.700 | 1.596.355.715.700 |
| Prasarana | | | | |
| Fasilitas pengoperasian | - | - | 2.286.922.615.671 | 2.286.922.615.671 |
| Jalur dan bangunan | - | - | 10.700.948.863.521 | 10.700.948.863.521 |
| Fasilitas | | | | |
| Peralatan pemeliharaan | - | 2.152.711.250 | 404.856.013.859 | 407.008.725.109 |
| Mekanikal dan elektrik | - | - | 1.121.865.965.832 | 1.121.865.965.832 |
| Peralatan dan perabotan kantor | 13.755.220.665 | 12.121.623.204 | - | 25.876.843.869 |
| Kendaraan | 4.346.800.000 | - | 13.097.825.691 | 17.444.625.691 |
| Sub-total | 18.102.020.665 | 14.274.334.454 | 16.124.047.000.274 | 16.156.423.355.393 |
| Aset dalam penyelesaian | 12.701.984.089.863 | 3.693.159.114.734 | (16.124.047.000.274) | 271.096.204.323 |
| Total harga perolehan | 12.720.086.110.528 | 3.707.433.449.188 | - | 16.427.519.559.716 |
| Akumulasi penyusutan | | | | |
| Sarana | - | 41.451.192.707 | - | 41.451.192.707 |
| Prasarana | | | | |
| Fasilitas pengoperasian | - | 101.618.465.169 | - | 101.618.465.169 |
| Jalur dan bangunan | - | 175.596.209.593 | - | 175.596.209.593 |
| Fasilitas | | | | |
| Peralatan pemeliharaan | - | 21.754.665.395 | - | 21.754.665.395 |
| Mekanikal dan elektrik | - | 45.293.578.835 | - | 45.293.578.835 |
| Peralatan dan perabotan kantor | 8.806.187.961 | 3.433.855.955 | - | 12.240.043.916 |
| Kendaraan | 2.688.822.916 | 3.234.742.316 | - | 5.923.565.232 |
| Total akumulasi penyusutan | 11.495.010.877 | 392.382.709.970 | - | 403.877.720.847 |
| Nilai tercatat | 12.708.591.099.651 | | | 16.023.641.838.869 |

9. FIXED ASSETS - NET

The details of fixed assets are as follows:

| |
|--|
| Acquisition cost |
| Rolling-stock |
| Infrastructure |
| Operating facilities |
| Building and track |
| Facilities |
| Equipment maintenance |
| Mechanical and electrical |
| Furniture, fixtures and office equipment |
| Vehicles |
| Sub-total |
| Construction in progress |
| Total acquisition cost |
| Accumulated depreciation |
| Rolling stock |
| Infrastructures |
| Operating facilities |
| Building and Track |
| Facilities |
| Maintenance equipment |
| Mechanical and electrical |
| Furniture, fixtures and office equipment |
| Vehicles |
| Total accumulated depreciation |
| Carrying amount |

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

9. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

9. FIXED ASSETS - NET (continued)

The details of fixed assets are as follows: (continued)

| 31 Desember 2018/December 31, 2018 | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | Saldo awal/ Initial balance | Penambahan/ Additions | Reklasifikasi/ Reclassification | Saldo akhir/ End balance | |
| Harga perolehan | | | | | Acquisition cost |
| Peralatan dan perabotan kantor | 12.722.659.984 | 1.032.560.681 | - | 13.755.220.665 | Furniture, fixtures and office equipment |
| Kendaraan | 4.275.600.000 | 71.200.000 | - | 4.346.800.000 | Vehicles |
| Sub-total | 16.998.259.984 | 1.103.760.681 | - | 18.102.020.665 | Sub-total |
| Aset dalam penyelesaian | 8.375.536.556.104 | 4.326.447.533.759 | - | 12.701.984.089.863 | Construction in progress |
| Total harga perolehan | 8.392.534.816.088 | 4.327.551.294.440 | - | 12.720.086.110.528 | Total acquisition cost |
| Akumulasi penyusutan | | | | | Accumulated depreciation |
| Peralatan dan perabotan kantor | 6.740.068.320 | 2.066.119.641 | - | 8.806.187.961 | Furniture, fixtures and office equipment |
| Kendaraan | 1.856.228.123 | 832.594.793 | - | 2.688.822.916 | Vehicles |
| Total akumulasi penyusutan | 8.596.296.443 | 2.898.714.434 | - | 11.495.010.877 | Total accumulated depreciation |
| Nilai tercatat | 8.383.938.519.645 | | | 12.708.591.099.651 | Carrying amount |

Biaya penyusutan aset tetap dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets are allocated as follows:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ending December 31, | | |
|---|---|----------------------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| Beban pokok penjualan (Catatan 22) | 388.169.954.015 | - | Costs of revenues (Note 22) |
| Beban umum dan administrasi (Catatan 23) | 4.212.755.955 | 2.898.714.434 | General and administrative expenses (Note 23) |
| Total | 392.382.709.970 | 2.898.714.434 | Total |

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mengasuransikan aset tetap terhadap risiko kerugian fisik atau kerusakan termasuk risiko kebakaran dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp17.017.745.492.494 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

As of December 31, 2019, The Corporation had insured its fixed assets against physical losses or damage including losses due to fire for a total sum amounting to Rp17,017,745,492,494 which, according to the management's opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap Perseroan dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan adanya penurunan nilai atas aset tetap tersebut.

The management believes that the carrying value of all property and equipment of the Corporation is fully recoverable, hence, no provision for impairment in the value of fixed assets is provided.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

10. ASET TAKBERWUJUD – NETO

Rincian aset takberwujud adalah sebagai berikut:

| 31 Desember 2018/December 31, 2019 | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| | Saldo awal/ <i>Initial balance</i> | Penambahan/ <i>Additions</i> | Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i> | Saldo akhir/ <i>End balance</i> |
| Harga perolehan | | | | |
| Aset takberwujud | 10.451.273.800 | 637.678.437 | 257.500.000 | 11.346.452.237 |
| Aset takberwujud dalam penyelesaian | 2.930.422.353 | 17.087.924.448 | (257.500.000) | 19.760.846.801 |
| Total harga perolehan | 13.381.696.153 | 17.725.602.885 | - | 31.107.299.038 |
| Akumulasi amortisasi | | | | |
| Aset takberwujud | 174.187.897 | 2.192.278.862 | - | 2.366.466.759 |
| Nilai tercatat | 13.207.508.256 | | | 28.740.832.279 |

| 31 Desember 2018/December 31, 2018 | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| | Saldo awal/ <i>Initial balance</i> | Penambahan/ <i>Additions</i> | Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i> | Saldo akhir/ <i>End balance</i> |
| Harga perolehan | | | | |
| Aset takberwujud | - | 10.451.273.800 | - | 10.451.273.800 |
| Aset takberwujud dalam penyelesaian | - | 2.930.422.353 | - | 2.930.422.353 |
| Total harga perolehan | - | 13.381.696.153 | - | 13.381.696.153 |
| Akumulasi amortisasi | | | | |
| Aset takberwujud | - | 174.187.897 | - | 174.187.897 |
| Nilai tercatat | - | | | 13.207.508.256 |

Amortisasi dari aset takberwujud pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.192.278.862 dan Rp174.187.897 dan dibebankan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 23).

Manajemen berpendapat bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset takberwujud Perseroan dapat dipulihkan, sehingga tidak diperlukan adanya penurunan nilai atas aset takberwujud tersebut.

11. UANG JAMINAN

Akun ini merupakan penempatan jaminan langganan listrik kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan jaminan sewa kantor kepada PT Wisma Nusantara International.

10. INTANGIBLE ASSETS - NET

The details of intangible assets are as follows:

| 31 Desember 2018/December 31, 2019 | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| | Saldo awal/ <i>Initial balance</i> | Penambahan/ <i>Additions</i> | Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i> | Saldo akhir/ <i>End balance</i> |
| Harga perolehan | | | | |
| Aset takberwujud | 10.451.273.800 | 637.678.437 | 257.500.000 | 11.346.452.237 |
| Aset takberwujud dalam penyelesaian | 2.930.422.353 | 17.087.924.448 | (257.500.000) | 19.760.846.801 |
| Total harga perolehan | 13.381.696.153 | 17.725.602.885 | - | 31.107.299.038 |
| Akumulasi amortisasi | | | | |
| Aset takberwujud | 174.187.897 | 2.192.278.862 | - | 2.366.466.759 |
| Nilai tercatat | 13.207.508.256 | | | 28.740.832.279 |

| 31 Desember 2018/December 31, 2018 | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| | Saldo awal/ <i>Initial balance</i> | Penambahan/ <i>Additions</i> | Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i> | Saldo akhir/ <i>End balance</i> |
| Harga perolehan | | | | |
| Aset takberwujud | - | 10.451.273.800 | - | 10.451.273.800 |
| Aset takberwujud dalam penyelesaian | - | 2.930.422.353 | - | 2.930.422.353 |
| Total harga perolehan | - | 13.381.696.153 | - | 13.381.696.153 |
| Akumulasi amortisasi | | | | |
| Aset takberwujud | - | 174.187.897 | - | 174.187.897 |
| Nilai tercatat | - | | | 13.207.508.256 |

The amortization of intangible assets in 2019 and 2018 amounted to Rp2,192,278,862 and Rp174,187,897, respectively and was charged as part of general and administrative expenses (Note 23).

Management believes that the carrying value of all intangible assets of the Corporation is fully recoverable, hence, no provision for impairment in the value of intangible assets is provided.

11. UANG JAMINAN

This account mainly consists of the placement of an electricity subscription guarantee to PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) and office space rental guarantee to PT Wisma Nusantara International.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

12. UTANG USAHA

Utang usaha terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2018 |
| PT Dutagaruda Piranti Prima | 742.486.595 | - |
| Akademi Perkeretaapian Indonesia | - | 3.333.660.560 |
| PT Pandega Desian Waherma | - | 858.736.740 |
| PT Deloitte Konsultan Indonesia | - | 856.288.125 |
| PT YND Planning Indonesia | - | 710.296.411 |
| PT Haskoning Indonesia | - | 668.340.000 |
| Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta | - | 526.615.645 |
| Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000) | 363.318.660 | 4.253.298.929 |
| Total | 1.105.805.255 | 11.207.236.410 |

Seluruh utang usaha berdenominasi dalam mata uang rupiah.

12. ACCOUNTS PAYABLES

Account payables consists of:

| |
|--------------------------------------|
| PT Dutagaruda Piranti Prima |
| Akademi Perkeretaapian Indonesia |
| PT Pandega Desian Waherma |
| PT Deloitte Konsultan Indonesia |
| PT YND Planning Indonesia |
| PT Haskoning Indonesia |
| Ikatan Arsitek Indonesia Jakarta |
| Others (each below Rp500,000,000) |

Total

All account payables denominated in rupiah.

13. UTANG KONTRAKTOR DAN KONSULTAN

Utang kontraktor dan konsultan terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|--------------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Shimizu - Obayashi - Wijaya Karya - Jaya Konstruksi Joint Venture | 60.892.665.412 | - |
| Oriental Consultant Global Co, Ltd | 33.472.109.449 | 14.338.192.009 |
| Oriental Consultant Co, Ltd | 31.363.926.091 | - |
| Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi Joint Venture | 15.127.618.669 | - |
| Tokyu - Wika Joint Operations | 3.054.276.940 | - |
| SMCC - HK Joint Operations | 2.007.507.241 | 311.200.000 |
| Metro One Consortium | 900.834.323 | - |
| Total | 146.818.938.125 | 14.649.392.009 |

Utang kontraktor dan konsultan berdasarkan mata uang terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Yen Jepang | 54.244.290.676 | 10.844.972.509 |
| Rupiah | 92.574.647.449 | 3.804.419.500 |
| Total | 146.818.938.125 | 14.649.392.009 |

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor dan konsultan sehubungan dengan proyek pembangunan MRT Fase 1 dan 2.

13. PAYABLES TO CONTRACTORS AND CONSULTANTS

Payables to contractors and consultants consist of:

| |
|--|
| Shimizu - Obayashi - Wijaya Karya - Jaya Konstruksi Joint Venture |
| Oriental Consultant Global Co, Ltd |
| Oriental Consultant Co, Ltd |
| Obayashi - Shimizu - Jaya Konstruksi Joint Venture |
| Tokyu - Wika Joint Operations |
| SMCC - HK Joint Operations |
| Metro One Consortium |

Total

Payables to contractors and consultants based on currency consist of:

Japanese yen
Rupiah

Total

This account represents payables to contractors and consultants associated with MRT's construction project for phase I and II.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

14. BEBAN AKRUAL

Beban akrual terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Kontraktor dan konsultan | 267.134.135.730 | 320.424.530.563 |
| Operasional kantor | 72.808.737.230 | 15.914.758.776 |
| Gaji dan tunjangan | 22.647.112.933 | - |
| Jasa profesional | 7.377.266.113 | 17.755.071.097 |
| Total | 369.967.252.006 | 354.094.360.436 |

Beban akrual jasa kontraktor dan konsultan terdiri dari nilai kemajuan pekerjaan yang belum ditagihkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

14. ACCRUED EXPENSES

Accrued expenses consists of:

| | 31 Desember/December 31, | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | 2019 | 2018 | |
| | 267.134.135.730 | 320.424.530.563 | Contractors and consultants |
| | 72.808.737.230 | 15.914.758.776 | Office operations |
| | 22.647.112.933 | - | Salaries and benefits |
| | 7.377.266.113 | 17.755.071.097 | Professional services |
| Total | 369.967.252.006 | 354.094.360.436 | Total |

Accrued expenses relating to contractors and consultant services consist of progress value which had not been billed as of December 31, 2019.

15. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan diterima di muka terdiri dari:

| | 31 Desember/December 31, | |
|---|--------------------------|----------|
| | 2019 | 2018 |
| Jatuh tempo dalam satu tahun | | |
| Tiket | 1.159.531.510 | - |
| Non-tiket: | | |
| Hak penamaan stasiun | 47.525.000.000 | - |
| Kerja sama pembayaran berbasis aplikasi seluler | 35.000.000.000 | - |
| Kerja sama layanan periklanan | 32.779.874.310 | - |
| Kerja sama penerimaan uang elektronik | 6.915.909.092 | - |
| Kerja sama ritel | 1.964.968.616 | - |
| Kerja sama telekomunikasi | 1.250.000.000 | - |
| Kerja sama penyewaan ruang ATM | 1.020.000.000 | - |
| Total | 127.615.283.528 | - |

| | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| Jatuh tempo lebih dari satu tahun | | |
| Non-tiket: | | |
| Hak penamaan stasiun | 97.100.000.000 | - |
| Kerja sama layanan periklanan | 36.500.000.000 | 40.000.000.000 |
| Kerja sama penyewaan ruang ATM | 977.500.000 | - |
| Kerja sama ritel | 156.977.949 | - |
| Total | 134.734.477.949 | 40.000.000.000 |

16. UANG JAMINAN PELANGGAN

Uang jaminan pelanggan merupakan nilai uang jaminan yang diberikan oleh PT Astra International Tbk sehubungan dengan hak penamaan stasiun.

15. UNEARNED REVENUES

Unearned revenues consist of:

| | 31 Desember/December 31, | | |
|--------------|--------------------------|----------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| | 1.159.531.510 | - | Current maturities |
| | 47.525.000.000 | - | Farebox |
| | 35.000.000.000 | - | Non-farebox : |
| | 32.779.874.310 | - | Station naming rights |
| | 6.915.909.092 | - | Mobile-application-based payment cooperation |
| | 1.964.968.616 | - | Advertising cooperation |
| | 1.250.000.000 | - | Electronic money acceptance cooperation |
| | 1.020.000.000 | - | Retail cooperation |
| | - | - | Telecommunication cooperation |
| | - | - | Cooperation regarding rental space for ATMs |
| Total | 127.615.283.528 | - | Total |

| | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|---|
| | 97.100.000.000 | - | Long-term maturities |
| | 36.500.000.000 | 40.000.000.000 | Non-farebox : |
| | 977.500.000 | - | Station naming rights |
| | 156.977.949 | - | Advertising cooperation |
| | - | - | Cooperation regarding rental space for ATMs |
| | - | - | Retail cooperation |
| Total | 134.734.477.949 | 40.000.000.000 | Total |

16. CUSTOMER SECURITY DEPOSIT

The customer security deposit represents a deposit by PT Astra International Tbk in relation to station naming rights.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

16. UANG JAMINAN PELANGGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, uang jaminan pelanggan ini disajikan pada nilai wajarnya. Atas pengukuran kembali nilai wajar uang jaminan pelanggan, Perseroan mencatatkan penghasilan keuangan sebesar Rp11.979.065.591.

16. CUSTOMER SECURITY DEPOSIT (continued)

On December 31, 2019, the customer security deposit was presented in its fair value. Upon a revaluation of the customer security deposit, the Corporation recorded finance income amounting to Rp11,979,065,591.

17. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar di muka

Akun ini merupakan lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN Masukan).

a. Prepaid taxes

This account represents Value Added Tax Overpayment (VAT-In).

b. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

b. Tax payables

This account consists of:

| | 31 Desember/December 31, | | |
|-------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | 2019 | 2018 | |
| Pajak penghasilan: | | | <i>Income taxes:</i> |
| Pasal 4(2) | 634.132.164 | 3.760.869 | <i>Article 4(2)</i> |
| Pasal 21 | 2.635.061.728 | 1.459.296.198 | <i>Article 21</i> |
| Pasal 23 | 658.919.828 | 69.129.911 | <i>Article 23</i> |
| Pasal 26 | 1.020.000 | - | <i>Article 26</i> |
| Pajak Pertambahan Nilai | 6.007.170.770 | 40.909.091 | <i>Value Added Tax</i> |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 42.669.969.495 | - | <i>Land and Property Tax</i> |
| Total | 52.606.273.985 | 1.573.096.069 | Total |

c. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan estimasi rugi fiskal adalah sebagai berikut:

c. The reconciliation between income (loss) before income tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated tax loss are as follows:

| | Tahun yang berakhir pada | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|--|
| | tanggal 31 Desember/ | | |
| | Year ending December 31, | | |
| | 2019 | 2018 | |
| Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan | 71.918.667.795 | (138.719.481.430) | <i>Income (loss) before income tax</i> |
| Beda waktu: | | | Temporary differences: |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | 13.658.377.086 | 3.968.328.424 | <i>Liability for employee benefits</i> |
| Akrual bonus dan insentif | 18.982.672.685 | - | <i>Accruals for bonuses and incentives</i> |
| Penyusutan dan amortisasi | (259.537.599.718) | 419.962.501 | <i>Depreciation and amortization</i> |
| Sub-total | (226.896.549.947) | 4.388.290.925 | <i>Sub-total</i> |
| Beda tetap: | | | Permanent differences: |
| Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak | 18.531.367.829 | 6.652.129.739 | <i>Non-deductible expenses</i> |
| Penghasilan yang dikenakan pajak final: | | | <i>Income subject to final tax:</i> |
| Bunga | (30.808.708.991) | (34.947.203.786) | <i>Interest</i> |
| Sewa | (2.709.753.543) | - | <i>Rent</i> |
| Sub-total | (14.987.094.705) | (28.295.074.047) | <i>Sub-total</i> |
| Estimasi rugi fiskal | (169.964.976.857) | (162.626.264.552) | Estimated tax loss |

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

- c. Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan estimasi rugi fiskal adalah sebagai berikut: (lanjutan)

17. TAXATION (continued)

- c. The reconciliation between income (loss) before income tax, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income, and the estimated tax loss are as follows: (continued)

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ending December 31, | | |
|--|---|--------------------------|---|
| | 2019 | 2018 | |
| Estimasi taksiran akumulasi rugi fiskal awal tahun: 2014 ^{*)} | - | (44.113.302.351) | <i>Estimated tax losses carry-forward at beginning of year: 2014^{*)}</i> |
| 2015 | (74.211.150.922) | (74.211.150.922) | <i>2015</i> |
| 2016 | (50.044.645.329) | (50.044.645.329) | <i>2016</i> |
| 2017 | (130.993.470.241) | (130.993.470.241) | <i>2017</i> |
| 2018 | (162.626.264.552) | - | <i>2018</i> |
| Estimasi taksiran akumulasi rugi fiskal akhir tahun | (417.875.531.044) | (299.362.568.843) | <i>Estimated tax losses carry-forward at end of year</i> |

^{*)} Kadaluwarsa pada 2019

^{*)} Expired in 2019

Perseroan akan menyampaikan SPT Pajak Penghasilan Tahun 2019 ke Kantor Pajak sesuai dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2019.

The Corporation will submit its Annual Corporate Income Tax Return for 2019 to the Tax Office based on information reported in its 2019 financial statements.

- d. Taksiran tagihan pajak penghasilan

- d. Estimated claim for tax refund

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan masih mempunyai pajak penghasilan dibayar di muka pasal 22 dan 23 dengan nilai masing-masing sebesar Rp615.597.486 dan Rp4.388.045.197. Perseroan akan mengajukan restitusi pajak kepada Kantor Pajak.

As of December 31, 2019, the Corporation still had prepaid article 22 and 23 income taxes amounting to Rp615,597,486 and Rp4,388,045,197, respectively. The Corporation plans to file for a tax restitution with the Tax Office.

- e. Aset pajak tangguhan - neto

- e. Deferred tax assets - net

Aset pajak tangguhan - neto terdiri dari:

Deferred tax assets - net consists of:

| | 2019 | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | Saldo awal/ Initial balance | Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss | Dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain/Credited to Other comprehensive income | Saldo akhir/ End balance | |
| Aset (liabilitas) pajak tangguhan | | | | | Deferred tax asset (liabilities) |
| Rugi fiskal | - | 136.158.413.208 | - | 136.158.413.208 | <i>Fiscal loss</i> |
| Akrual bonus dan insentif | - | 4.745.668.171 | - | 4.745.668.171 | <i>Accruals for bonus and incentives</i> |
| Liabilitas imbalan kerja karyawan | - | 3.414.594.272 | (1.107.954.844) | 2.306.639.428 | <i>Liability for employee benefits</i> |
| Aset tetap dan aset takberwujud | - | (64.884.399.930) | - | (64.884.399.930) | <i>Fixed assets and intangible assets</i> |
| Aset pajak tangguhan - neto | - | 79.434.275.721 | (1.107.954.844) | 78.326.320.877 | Deferred tax assets - net |

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

17. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Aset pajak tangguhan - neto (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari beda waktu di atas dapat direalisasikan pada periode mendatang.

f. Pajak final

Perhitungan pajak final untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Dasar pengenaan pajak: | |
| Pendapatan bunga | 38.510.886.239 |
| Pendapatan sewa | 2.709.753.543 |
| Beban pajak final: | |
| Bunga (20%) | 7.702.177.248 |
| Sewa (10%) | 270.975.354 |
| Total | 7.973.152.602 |

17. TAXATION (continued)

e. *Deferred tax assets - net (continued)*

Management believes that the deferred tax assets resulting from the above temporary differences are realizable in future periods.

f. *Final tax*

The computation of final tax for the year ending December 31, 2019 is as follows.

| |
|---------------------|
| Tax base: |
| Interest revenues |
| Rent revenues |
| Final tax expenses: |
| Interest (20%) |
| Rent (10%) |
| Total |

18. MODALSAHAM

Rincian pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

18. SHARE CAPITAL

Details of the Corporation's shareholders as of December 31, 2019 and 2018 are as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019

| Pemegang saham | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Number of shares issued and fully paid</i> | Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i> | Total/ <i>Total</i> | Shareholders |
|-------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Pemerintah Daerah DKI Jakarta | 12.771.472 | 99,99% | 12.771.472.000.000 | DKI Jakarta Provincial Government |
| PD Pasar Jaya | 500 | 0,01% | 500.000.000 | PD Pasar Jaya |
| Total | 12.771.972 | 100% | 12.771.972.000.000 | Total |

31 Desember 2018/December 31, 2018

| Pemegang saham | Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Number of shares issued and fully paid</i> | Persentase kepemilikan/ <i>Percentage of ownership</i> | Total/ <i>Total</i> | Shareholders |
|-------------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------------|
| Pemerintah Daerah DKI Jakarta | 6.165.307 | 99,99% | 6.165.307.000.000 | DKI Jakarta Provincial Government |
| PD Pasar Jaya | 500 | 0,01% | 500.000.000 | PD Pasar Jaya |
| Total | 6.165.807 | 100% | 6.165.807.000.000 | Total |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 21 Desember 2018, yang telah dibuatkan aktanya melalui Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 14 tanggal 14 Januari 2019, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar menjadi sebesar Rp14.659.000.000.000 dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan menjadi sebesar Rp9.111.248.000.000.

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0028922 tahun 2019 tanggal 16 Januari 2019.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 29 November 2019, yang telah dibuatkan aktanya melalui Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No. 23 tanggal 13 Desember 2019, para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal dasar menjadi Rp40.757.353.000.000. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0105309.AH.01.02. tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019.

Para pemegang saham juga menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor menjadi sebesar Rp12.771.972.000.000. Perubahan tersebut telah disetujui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT MRT Jakarta Nomor AHU-AH.01.03-0373409 tanggal 16 Desember 2019.

Selama tahun 2019, Perseroan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai penyertaan modal disetor yang berasal dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman sebesar Rp3.567.197.169.909 (Catatan 26a).

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, penambahan modal sebesar Rp3.567.201.942.700 belum dibuatkan aktanya dan dicatat sebagai "Modal Disetor Lainnya" di dalam bagian Ekuitas di laporan posisi keuangan.

18. SHARE CAPITAL (continued)

Based on the General Meeting of Shareholders held on December 21, 2018, Notarial Deed No. 14 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated January 14, 2019, the shareholders approved an increase in authorized share capital to Rp14,659,000,000,000 and increase in issued and fully paid share capital to Rp9,111,248,000,000.

The above changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its acknowledgement Letter No. AHU-AH.01.03-0028922 year 2019 dated January 16, 2019.

Based on the minutes of the General Meeting of Shareholders held on November 29, 2019, Notarial Deed No. 23 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., dated December 13, 2019, the shareholders approved an increase in authorized share capital to Rp40,757,353,000,000. The changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0105309.AH.01.02. year 2019 dated December 16, 2019.

The shareholders also approved an increase in issued and fully paid capital to Rp12,771,972,000,000. The changes were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its acknowledgement Letter No. AHU-AH.01.03-0373409 dated December 16, 2019.

During 2019, the Corporation received an additional contribution from the Government of DKI Jakarta, as paid-up capital sourced through the grant and loan mechanism, amounting to Rp3,567,197,169,909 (Note 26a).

As of December 31, 2019, paid-up capital amounting to Rp3,567,201,942,700 had not been notarized and presented as "Other Paid-up Capital" in the Equity section of the statement of financial position.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

18. SHARE CAPITAL (continued)

| | 31 Desember/December 31, | | |
|---|---------------------------------|--------------------------|---|
| | 2019 | 2018 | |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | | | Issued and fully paid share capital |
| Saldo awal tahun | 6.165.807.000.000 | 5.721.807.000.000 | <i>Balance at beginning of the year</i> |
| Penambahan tahun berjalan yang berasal dari reklasifikasi modal disetor lainnya | 6.606.165.000.000 | 444.000.000.000 | <i>Addition during the year from reclassification of other paid-up capital</i> |
| Saldo akhir tahun | 12.771.972.000.000 | 6.165.807.000.000 | Balance at end of the year |
| Modal disetor lainnya | | | Other paid-up capital |
| Saldo awal tahun | 6.606.169.772.791 | 3.389.444.841.341 | <i>Balance at beginning of the year</i> |
| Penambahan tahun berjalan yang berasal dari APBD dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman | 3.567.197.169.909 | 3.660.724.931.450 | <i>Addition during the year from APBD from grant and loan mechanism</i> |
| Pengurangan selama tahun berjalan yang disebabkan oleh reklasifikasi ke modal ditempatkan dan disetor penuh | (6.606.165.000.000) | (444.000.000.000) | <i>Deduction during the year from reclassification to issued and fully paid share capital</i> |
| Saldo akhir tahun | 3.567.201.942.700 | 6.606.169.772.791 | Balance at end of the year |

Perseroan membukukan penambahan modal disetor lainnya pada saat penerbitan Notice of Disbursement oleh JICA serta diakui sebagai modal ditempatkan yang berasal dari penerusan hibah dan penerusan pinjaman Pemerintah menggunakan nilai tukar yang terdapat dalam Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

The Corporation recorded the addition of other paid-up capital on the date of the Notice of Disbursement from JICA and recognized it as issued share capital sourced from a Government grant and loan using the exchange rate listed in Surat Pembukuan/Pengesahan, which is published by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Pengelolaan modal

Capital management

Dalam mengelola permodalannya, Perseroan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

In managing its capital, the Corporation safeguards its ability to continue as a going concern and to maximize benefits to shareholders and other stakeholders.

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan (a) efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas yang digunakan untuk kegiatan operasi serta (b) pengeluaran modal, dan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

The Corporation actively and regularly reviews and manages its capital to ensure optimal capital structure and returns to shareholders, taking into consideration the (a) efficiency of capital use based on operational cash flow and (b) capital expenditures and future capital requirements.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

18. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan modal (lanjutan)

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (gearing ratio), dengan membagi utang neto dengan ekuitas neto. Rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Liabilitas jangka pendek | 699.277.256.707 | 382.882.578.869 |
| Liabilitas jangka panjang | 657.366.538.633 | 748.154.745.075 |
| Total | 1.356.643.795.340 | 1.131.037.323.944 |
| Dikurangi kas dan setara kas | (976.544.700.866) | (604.890.512.336) |
| Utang neto | 380.099.094.474 | 526.146.811.608 |
| Total ekuitas | 15.996.763.194.031 | 12.282.862.368.677 |
| Rasio utang neto terhadap ekuitas | 0,02 | 0,04 |

Perseroan memiliki porsi ekuitas lebih besar dibandingkan porsi utang dikarenakan sebagian besar sumber pendanaan berasal dari penyertaan modal atau ekuitas.

19. PENDAPATAN TIKET

Pendapatan tiket merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket sesuai tarif angkutan penumpang yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 34 tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit ("Peraturan Gubernur No. 34"). Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 34 tersebut, tarif terjauh angkutan perkeretaapian MRT koridor Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia adalah sebesar Rp14.000.

20. PENDAPATAN SUBSIDI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi sarana dan prasarana kepada Perseroan untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan sarana dan prasarana MRT serta keterjangkauan tarif bagi masyarakat. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi sarana dan prasarana menggunakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 107 Tahun 2019 tentang Subsidi Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu.

18. SHARE CAPITAL (continued)

Capital management (continued)

The Corporation monitors its capital through the use of gearing ratios, by dividing net debt by net equity. The gearing ratio is as follows:

| | 31 Desember/December 31, |
|---------------------------------|---------------------------------|
| | 2019 |
| Current liabilities | 699.277.256.707 |
| Non-current liabilities | 657.366.538.633 |
| Total | 1.356.643.795.340 |
| Less cash and cash equivalents | (976.544.700.866) |
| Net debt | 380.099.094.474 |
| Total equity | 15.996.763.194.031 |
| Net debt-to-equity ratio | 0,02 |

The Corporation has higher equity portion compared to debt because most of its financing sources derive from capital contributions or equity.

19. FAREBOX REVENUES

Farebox revenues are revenues deriving from the sale of tickets based on the passenger transportation tariffs stipulated under Jakarta Governor's Regulation No. 34 Year 2019 regarding Railway Transportation Tariffs for Mass Rapid Transit and "Kereta Api Ringan"/Light Rail Transit ("Governor Regulation No. 34"). Based on Governor's Regulation No. 34, the highest tariff for railway transportation for the Lebak Bulus -Bundaran Hotel Indonesia line is set at: Rp14,000.

20. SUBSIDY REVENUE

The Government of DKI Jakarta provides facilities and infrastructure subsidies to the Corporation in order to ensure the sustainability of the operation of MRT facilities and infrastructure and the affordability of tariffs for the general public. The procedure for the calculation and payment of facilities and infrastructure subsidies is stipulated under Governor's Regulation No. 107 of 2019 regarding subsidies for "Moda Raya Terpadu" and "Lintas Raya Terpadu".

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

20. PENDAPATAN SUBSIDI (lanjutan)

Subsidi sarana merupakan adalah alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelenggaraan sarana perkeretaapian dalam rangka kewajiban pelayanan publik agar tarif terjangkau oleh pelanggan.

Subsidi prasarana merupakan alokasi anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membayar biaya operasional dan perawatan prasarana perkeretaapian serta biaya modal fasilitas operasi.

Berdasarkan peraturan di atas, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan Pemprov DKI Jakarta No. 4343/-1.811.32 tanggal 30 September 2019 tentang Pemberian Subsidi Moda Raya Terpadu yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Besaran pagu pemberian subsidi sarana dan prasarana tahun 2019 senilai Rp672.389.154.515 dan akan dibayarkan dalam beberapa tahapan pembayaran, yaitu:

- a. Pencairan uang muka dengan nilai 20% dari nilai kontrak atau senilai Rp134.477.830.903 yang dibayarkan dalam jangka waktu 7 hari kalender sejak tanggal perjanjian.
- b. Pencairan subsidi periode 1 April - 30 September 2019 dilakukan secara sekaligus selambat-lambatnya akhir bulan Oktober 2019.
- c. Pencairan subsidi periode 1 - 31 Oktober 2019 dilakukan maksimal 10 hari sejak Perseroan menyampaikan surat permohonan pencairan subsidi.
- d. Pencairan subsidi periode 1 November - 31 Desember 2019 dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 12 Desember 2019.

Selama tahun 2019, Perseroan telah menerima pencairan uang muka subsidi dan subsidi bulan April-September 2019 dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp427.027.424.467 setelah dikurangi denda atas ketidaktercapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebesar Rp1.334.284.319.

Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo piutang subsidi Perseroan adalah sebesar Rp105.707.838.783.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh saldo piutang subsidi dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai piutang ini.

20. SUBSIDY REVENUE (continued)

The facilities subsidy comprises a budget allocation from the Government of DKI Jakarta for the operation of railway facilities in the context of public service obligations so that tariffs are affordable for customers.

The infrastructure subsidy comprises a budget allocation from the DKI Jakarta Provincial Government in order to cover the operational and maintenance costs of railway infrastructure and the capital costs of operational facilities.

Based on the above-mentioned regulation, the Corporation signed agreement with DKI Jakarta Provincial Government No. 4343/-1.811.32 dated September 30, 2019 on "Moda Raya Terpadu" Subsidies sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget for the 2019 Fiscal Year.

The maximum amount of facilities and infrastructure subsidy in 2019 is Rp672,389,154,515 and will be paid in several payment phase, which are:

- a. *Advances amounting to 20% of the contract value or Rp134,477,830,903 which will be paid within 7 calendar days from the date of the agreement.*
- b. *Subsidies for the period April 1 - September 30, 2019 will be paid by the end of October 2019 at the latest.*
- c. *Subsidies for the period October 1 - 31, 2019 will be paid a maximum of 10 days after the Company sends a letter of request for the disbursement of subsidies.*
- d. *Subsidies for the period November 1 - December 31, 2019 will be paid by December 12, 2019 at the latest.*

During 2019, the Corporation has received the payment of advance and subsidy for the period of April-September 2019 from Government of DKI Jakarta with the total amount of Rp427,027,424,467 after deducting a penalty for not achieving the Minimum Service Standards (MSS) amounted to Rp1,334,284,319.

As of December 31, 2019, the balance of the Company's subsidy receivables amounting to Rp105,707,838,783.

Management believes that there is no objective evidence which may indicate impairment in value of the subsidy receivables; hence, no provision for impairment was made.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

21. PENDAPATAN NON-TIKET

Pendapatan non-tiket terdiri dari:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ending December 31, | | |
|--|---|----------|---|
| | 2019 | 2018 | |
| Kerja sama layanan periklanan | 97.038.617.992 | - | Advertising cooperation |
| Hak penamaan stasiun | 74.575.000.000 | - | Stations' naming rights |
| | | | Electronic money acceptance cooperation |
| Kerja sama penerimaan uangelektronik | 20.893.909.090 | - | Retail cooperation |
| Kerja sama ritel | 7.157.618.364 | - | Telecommunication cooperation |
| Kerja sama telekomunikasi | 3.750.000.000 | - | Interconnection building design cooperation |
| Kerja sama perancangan bangunan interkoneksi | 2.500.000.000 | - | Jakarta MRT inauguration activities cooperation |
| Kerja sama kegiatan peresmian MRT Jakarta | 1.200.000.000 | - | Others (each below Rp500,000,000) |
| Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000) | 492.354.559 | - | |
| Total | 207.607.500.005 | - | Total |

21. NON-FAREBOX REVENUE

Non-farebox revenue comprises:

Rincian pendapatan di atas berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of the above revenues amounts by customers are as follows:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ending December 31, | | |
|--|---|----------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| Pihak ketiga | | | Third parties |
| PT Avabanindo Perkasa | 97.038.617.992 | - | PT Avabanindo Perkasa |
| PT Astra International Tbk | 18.750.000.000 | - | PT Astra International Tbk |
| PT Bank Central Asia Tbk | 18.318.181.818 | - | PT Bank Central Asia Tbk |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | 18.068.181.818 | - | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 16.789.363.636 | - | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Solusi Transportasi Indonesia | 16.500.000.000 | - | PT Solusi Transportasi Indonesia |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 4.568.181.818 | - | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| PT Tower Bersama | 3.750.000.000 | - | PT Tower Bersama |
| PT Inti Menara Jaya | 2.500.000.000 | - | PT Inti Menara Jaya |
| PT Quantumconvex International | 1.200.000.000 | - | PT Quantumconvex International |
| Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500.000.000) | 7.649.972.923 | - | Others (each below Rp500,000,000) |
| Sub-total | 205.132.500.005 | - | Sub-total |
| Pihak berelasi (Catatan 27) | | | Related party (Note 27) |
| PT Bank DKI | 2.475.000.000 | - | PT Bank DKI |
| Total | 207.607.500.005 | - | Total |

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

22. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Beban pokok pendapatan terdiri dari:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Years ending December 31, | |
|---------------------------------|--|----------|
| | 2019 | 2018 |
| Penyusutan (Catatan 9) | 388.169.954.015 | - |
| Keamanan dan kebersihan | 102.875.645.261 | - |
| Gaji dan kesejahteraan karyawan | 94.627.577.127 | - |
| Energi dan utilitas | 92.528.279.252 | - |
| Pajak bumi dan bangunan | 32.002.477.121 | - |
| Asuransi | 20.675.300.850 | - |
| Keperluan rumah tangga | 15.676.682.971 | - |
| Pemeliharaan | 12.524.605.853 | - |
| Denda dan sanksi subsidi | 1.334.284.319 | - |
| Total | 760.414.806.769 | - |

22. COST OF REVENUES

Cost of revenues comprise the following:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Years ending December 31, | |
|-------------------------------|--|--------------|
| | 2019 | 2018 |
| Depresiasi (Note 9) | - | - |
| Security and hygiene | - | - |
| Salaries and employee welfare | - | - |
| Energy and utilities | - | - |
| Land and property tax | - | - |
| Insurance | - | - |
| Household appliances | - | - |
| Maintenance | - | - |
| Subsidy penalty | - | - |
| Total | - | Total |

23. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Years ending December 31, | |
|--|--|------------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Gaji dan kesejahteraan karyawan | 106.968.694.868 | 92.070.527.122 |
| Perlengkapan kantor | 30.050.902.449 | 16.018.137.849 |
| Pelatihan dan keanggotaan | 18.851.849.431 | 37.901.583.992 |
| Sewa kantor dan kendaraan | 17.330.254.548 | 19.073.047.747 |
| Jasa profesional | 17.081.969.711 | 17.536.960.183 |
| Promosi dan pameran | 8.989.284.942 | 6.218.815.296 |
| Keperluan rumah tangga | 6.585.321.754 | 7.814.627.483 |
| Penyusutan (Catatan 9) | 4.212.755.955 | 2.898.714.434 |
| Rapat koordinasi dan rapat umum pemegang saham | 3.490.469.301 | 2.528.485.564 |
| Transportasi dan parkir | 2.707.064.416 | 3.197.823.756 |
| Amortisasi (Catatan 10) | 2.192.278.862 | 174.187.897 |
| Sumbangan | 1.648.162.728 | 330.245.000 |
| Komunikasi, energi, dan utilitas | 1.567.472.615 | 1.472.220.967 |
| Administrasi bank | 73.442.655 | 28.519.756 |
| Total | 221.749.924.235 | 207.263.897.046 |

23. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

General and administrative expenses comprise the following:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Years ending December 31, | |
|---|--|--------------|
| | 2019 | 2018 |
| Salaries and employee welfare | - | - |
| Office supplies | - | - |
| Training and membership | - | - |
| Office and vehicle rental expenses | - | - |
| Professional fees | - | - |
| Promotions and exhibitions | - | - |
| Household appliances | - | - |
| Depreciation (Note 9) | - | - |
| Coordination and shareholders' meetings | - | - |
| Transportation and parking | - | - |
| Amortization (Note 10) | - | - |
| Donations | - | - |
| Communications, energy and utilities | - | - |
| Bank administration | - | - |
| Total | - | Total |

24. PENGHASILAN BUNGA

Penghasilan bunga terdiri dari:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Years ending December 31, | |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Penghasilan bunga deposito | 35.387.488.961 | 42.699.371.402 |
| Penghasilan jasa giro | 3.123.397.278 | 984.633.330 |
| Total | 38.510.886.239 | 43.684.004.732 |

24. INTEREST INCOME

Interest income comprises the following:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Years ending December 31, | |
|-------------------------|--|--------------|
| | 2019 | 2018 |
| Deposit interest income | - | - |
| Current-account income | - | - |
| Total | - | Total |

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

25. PROGRAM PENSUN DAN IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 ditentukan berdasarkan penilaian aktuaris yang dilakukan oleh PT Sentra Jasa Aktuaria, aktuaris independen, berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 28 Februari 2020 dan 28 Februari 2019.

Rincian liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31 | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| | 2019 | 2018 | |
| Program purnakarya | 16.601.166.133 | 11.767.950.404 | Post-retirement benefits program |
| Program cuti besar | 7.219.541.838 | 4.325.408.004 | Long leave program |
| Program masa persiapan pensiun | 3.056.110.448 | - | Pension preparation program |
| Program penghargaan masa kerja | 1.977.837.680 | 788.331.351 | Jubilee program |
| Total | 28.854.656.099 | 16.881.689.759 | Total |

Penilaian aktuaris dihitung dengan menggunakan metode *Projected-Unit-Credit* yang berdasarkan asumsi-asumsi berikut:

| | 31 Desember/December 31, | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| | 2019 | 2018 | |
| Tingkat diskonto | 5,42% - 8,19% | 8,58% | Discount rate |
| Kenaikan gaji dan upah | 3,13% | 6% | Wage and salary increase |
| Usia pensiun normal | 58 tahun/58 years | 58 tahun/58 years | Retirement age |
| Tabel mortalitas | TMI III (2011) | TMI III (2011) | Mortality table |
| Tingkat cacat | 10% dari TMI 2011/ 10% of TMI 2011 | 10% dari TMI 2011/ 10% of TMI 2011 | Disability rate |
| Tingkat pengunduran diri untuk usia: | | | Voluntary resignation by age: |
| 15-29 | 6% | 6% | 15-29 |
| 30-34 | 3% | 3% | 30-34 |
| 35-39 | 1,8% | 1,8% | 35-39 |
| 40-49 | 1,2% | 1,2% | 40-49 |
| 50-53 | 0,0% | 1,2% | 50-53 |
| lebih dari 53 | 0,0% | 0,0% | more than 53 |

Estimasi liabilitas imbalan kerja yang diakui Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Program purnakarya

Perseroan mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Dana pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Manulife Indonesia, yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri Keuangan. Perjanjian dengan DPLK berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019 dan akan secara otomatis diperpanjang untuk waktu yang sama, kecuali diputuskan lain oleh salah satu pihak.

25. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS

Liability for employee benefits as of December 31, 2019 and 2018 was determined based on the actuarial valuation performed by PT Sentra Jasa Aktuaria, an independent actuary, based on their reports dated February 28, 2020 and February 28, 2019, respectively.

Details of the long-term employee benefits liability are as follows:

The actuarial valuation was performed through the use of the *Projected-Unit-Credit* method which considered the following assumptions:

The estimated employee benefit liabilities recognized by the Corporation are as follows:

a. Post-retirement benefits program

The Corporation has defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees. The pension plan assets are managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") Manulife Indonesia while the establishment was approved by the Minister of Finance. The agreement with DPLK was effective from October 1, 2017 until October 1, 2019 and will be automatically extended for the same period in perpetuity, unless otherwise decided by either party.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

25. PROGRAM Pensiun dan Imbalan Kerja (lanjutan)

a. Program purnakarya (lanjutan)

Iuran dana pensiun yang ditanggung Perseroan adalah sebesar 3,7% dari penghasilan dasar pensiun karyawan tetap.

Selain mempunyai program pensiun iuran pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat, Perseroan juga mencatat penyisihan imbalan kerja untuk memenuhi imbalan minimum yang diwajibkan untuk dibayar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja.

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo liabilitas imbalan kerja tersebut cukup untuk memenuhi imbalan minimum sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebanyak 527 karyawan.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31, | |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Nilai kini liabilitas - awal tahun | 11.767.950.404 | 9.606.036.712 |
| Biaya bunga | 1.009.690.144 | 681.068.002 |
| Biaya jasa kini | 4.269.387.884 | 2.840.940.546 |
| Biaya jasa lalu | 4.062.267.099 | - |
| Pembayaran manfaat | (54.661.050) | (134.811.571) |
| Pengukuran kembali: | | |
| - Perubahan asumsi demografi | (1.619.303.038) | - |
| - Perubahan asumsi keuangan | (3.903.259.836) | (1.778.820.045) |
| - Penyesuaian atas pengalaman | 1.069.094.526 | 553.536.760 |
| Nilai kini liabilitas - akhir tahun | 16.601.166.133 | 11.767.950.404 |

Penyisihan imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi terdiri dari:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Years ending December 31, | |
|---|---|----------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Biaya jasa kini | 4.269.387.884 | 2.840.940.546 |
| Biaya bunga | 1.009.690.144 | 681.068.002 |
| Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti - neto | (21.648.973) | (11.930.384) |
| Biaya jasa lalu | 4.062.267.099 | - |
| Beban yang diakui | 9.319.696.154 | 3.510.078.164 |

25. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a. Post-retirement benefits program (continued)

The fund contribution paid by the Corporation is 3.7% of the basic pension income of permanent employees.

Aside from the benefits provided under the above-mentioned defined contributions retirement plans, the Company has also made additional provisions for employee benefits in order to meet the minimum benefits for employees as stipulated under the Labor Law.

Management believes that the balance of employee benefit liability is sufficient to cover the minimum benefits required under the Labor Law.

The number of employees as of December 31, 2019 entitled to these totaled 527 employees.

Reconciliation of the initial and end balance of the present value of liabilities is as follows:

| |
|--|
| Present value of liability - beginning of the year |
| Interest cost |
| Current service cost |
| Past service cost |
| Benefits paid |
| Remeasurement: |
| - Changes in demographic assumptions |
| - Changes in financial assumptions |
| - Experience adjustments |
| Present value of liability - end of year |

The provision of employee benefits recognized in the statement of profit or loss comprises the following:

| |
|--|
| Current service cost |
| Interest cost |
| Remeasurement of defined benefit liability (asset) - net |
| Past service cost |
| Expenses recognized |

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

25. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)

25. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS
(continued)

a. Program purnakarya (lanjutan)

a. Post-retirement benefits program (continued)

Rincian keuntungan (kerugian) aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The details of actuarial gain (loss) recognized through other comprehensive income are as follows:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ending December 31, | | |
|--|---|------------------------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja pasti - neto | | | Remeasurement of defined benefit liability (asset) - net |
| - Perubahan asumsi demografi | (1.616.418.670) | - | - Changes in demographic assumptions |
| - Perubahan asumsi keuangan | (3.878.166.957) | (1.765.075.660) | - Changes in financial assumptions |
| - Penyesuaian atas pengalaman | 1.062.766.252 | 551.722.759 | - Adjustments of experience |
| Penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain | (4.431.819.375) | (1.213.352.901) | Income recognized in other comprehensive income |

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements in the liabilities in the statements of financial position are as follows:

| | 31 Desember/December 31 | | |
|---|-------------------------|-----------------------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| Liabilitas neto - awal tahun | 11.767.950.404 | 9.606.036.712 | Net liability - beginning of the year |
| Beban tahun berjalan | 9.319.696.154 | 3.510.078.164 | Current year expenses |
| Diakui pada penghasilan komprehensif lain | (4.431.819.375) | (1.213.352.901) | Recognized in other comprehensive income |
| Pembayaran manfaat | (54.661.050) | (134.811.571) | Benefits paid |
| Liabilitas neto - akhir tahun | 16.601.166.133 | 11.767.950.404 | Net liability - end of the year |

b. Program Masa Persiapan Pensiun

b. Retirement Preparation Program

Sesuai dengan Peraturan Perseroan, Perseroan memberikan Masa Persiapan Pensiun kepada karyawan selama 12 bulan sebelum masa usia pensiun normal. Selama Masa Persiapan Pensiun, karyawan masih mendapatkan penghasilan, namun dibebaskan dari tugas dan kewajibannya di Perseroan.

Based on the Company Regulation, the Corporation provides a Retirement Preparation Program to employees for 12 months prior to the normal retirement age. During this Retirement Preparation Program, employees still receive their salaries but are released from their tasks and responsibilities within the Corporation.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the initial and end balances for the present value of liabilities is as follows:

| | 31 Desember/December 31, | | |
|--|--------------------------|------|---|
| | 2019 | 2018 | |
| Nilai kini liabilitas - awal tahun | - | - | Present value of liability - beginning of the year |
| Biaya jasa kini | 695.548.380 | - | Current service cost |
| Biaya jasa lalu | 2.360.562.068 | - | Past service cost |
| Nilai kini liabilitas - akhir tahun | 3.056.110.448 | - | Present value of liability - end of the year |

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

25. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)

25. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS
(continued)

b. Program Masa Persiapan Pensiun (lanjutan)

b. Retirement Preparation Program (continued)

Penyisihan imbalan kerja tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

The provision of employee benefits is recognized in the statement of profit or loss.

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

Movements of liabilities in the statements of financial position are as follows:

| | 31 Desember/December 31 | | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| Liabilitas neto - awal tahun | - | - | Net liability - beginning of the year |
| Beban tahun berjalan | 3.056.110.448 | - | Current year expenses |
| Liabilitas neto - akhir tahun | 3.056.110.448 | - | Net liability - end of the year |

c. Program penghargaan masa kerja

c. Jubilee program

Perseroan memberikan penghargaan kesetiaan kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja tertentu dalam bentuk emas.

The Corporation rewards employees who have worked for certain periods in the form of gold.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the initial and end balances for the present value of liabilities is as follows:

| | 31 Desember/December 31 | | |
|--|-------------------------|--------------------|---|
| | 2019 | 2018 | |
| Nilai kini liabilitas - awal tahun | 788.331.351 | - | Present value of liability - beginning of the year |
| Biaya bunga | 67.638.830 | - | Interest cost |
| Biaya jasa kini | 754.000.964 | 228.837.697 | Current service cost |
| Biaya jasa lalu | - | 635.602.062 | Past service cost |
| Pembayaran manfaat | (46.645.000) | - | Benefits paid |
| Pengukuran kembali: | | | Remeasurement: |
| - Perubahan asumsi demografi | (27.117.631) | - | - Changes in demographic assumptions |
| - Perubahan asumsi keuangan | 83.925.813 | (76.108.408) | - Changes in financial assumptions |
| - Penyesuaian atas pengalaman | 357.703.353 | - | - Experience adjustments |
| Nilai kini liabilitas - akhir tahun | 1.977.837.680 | 788.331.351 | Present value of liability - end of the year |

Penyisihan imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi terdiri dari:

The provision of employee benefits recognized in the statement of profit or loss comprises the following:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ending December 31 | | |
|---|---|--------------------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| Biaya jasa kini | 754.000.964 | 228.837.697 | Current service cost |
| Biaya bunga | 67.638.830 | - | Interest cost |
| Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti - neto | - | (76.108.408) | Remeasurement of defined benefit liability (asset) - net |
| Biaya jasa lalu | 414.511.535 | 635.602.062 | Past service cost |
| Total | 1.236.151.329 | 788.331.351 | Total |

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

25. PROGRAM PENSIUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)

25. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE
BENEFITS (continued)

c. Program penghargaan masa kerja (lanjutan)

c. Jubilee program (continued)

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements in the liabilities in the statements of financial position are as follows:

| | 31 Desember/December 31 | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| Liabilitas neto - awal tahun | 788.331.351 | - | Net liability - beginning of the year |
| Beban tahun berjalan | 1.236.151.329 | 788.331.351 | Current year expenses |
| Pembayaran manfaat | (46.645.000) | - | Benefits paid |
| Liabilitas neto - akhir tahun | 1.977.837.680 | 788.331.351 | Net liability - end of the year |

d. Program cuti besar

d. Long leave program

Perseroan memberikan program cuti besar kepada karyawan sebesar gaji pokok bulanan dan tunjangan tetap bulanan untuk setiap 3 tahun masa kerja.

The Corporation rewards employees with a long leave program amounting to basic monthly salary and fixed monthly allowance every 3 years of work.

Rekonsiliasi saldo awal dan akhir dari nilai kini liabilitas adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the initial and end balances for the present value of liabilities is as follows:

| | 31 Desember/December 31 | | |
|--|--------------------------------|----------------------|---|
| | 2019 | 2018 | |
| Nilai kini liabilitas - awal tahun | 4.325.408.004 | 3.242.141.227 | Present value of liability - beginning of the year |
| Biaya bunga | 371.120.007 | 229.867.813 | Interest cost |
| Biaya jasa kini | 2.658.759.046 | 1.330.639.301 | Current service cost |
| Pembayaran manfaat | (683.265.000) | (753.654.034) | Benefits paid |
| Pengukuran kembali: | | | Remeasurement: |
| - Perubahan asumsi demografi | (61.563.827) | - | - Changes in demographic assumptions |
| - Dari perubahan asumsi keuangan | (442.342.591) | (262.297.540) | - From changes in financial assumptions |
| - Penyesuaian atas pengalaman | 1.051.426.199 | 538.711.237 | - Experience adjustments |
| Nilai kini liabilitas - akhir tahun | 7.219.541.838 | 4.325.408.004 | Present value of liability - end of the year |

Penyisihan imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi terdiri dari:

The provision of employee benefits recognized in the statement of profit or loss comprise the following:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ending December 31 | | |
|---|---|----------------------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| Biaya jasa kini | 2.658.759.046 | 1.330.639.301 | Current service cost |
| Biaya bunga | 371.120.007 | 229.867.813 | Interest cost |
| Pengukuran kembali liabilitas/aset imbalan pasti - neto | 547.519.781 | 276.413.697 | Remeasurement of defined benefit liability/asset - net |
| Total | 3.577.398.834 | 1.836.920.811 | Total |

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

25. PROGRAM PENSUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)

25. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS (continued)

d. Program cuti besar (lanjutan)

d. Long leave program (continued)

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements in the liabilities in the statements of financial position are as follows:

| | 31 Desember/December 31 | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | 2019 | 2018 | |
| Liabilitas neto - awal tahun | 4.325.408.004 | 3.242.141.227 | Net liability - beginning of the year |
| Beban tahun berjalan | 3.577.398.834 | 1.836.920.811 | Current year expenses |
| Pembayaran manfaat | (683.265.000) | (753.654.034) | Benefits paid |
| Liabilitas neto - akhir tahun | 7.219.541.838 | 4.325.408.004 | Net liability - end of the year |

Selama tahun 2019, Perseroan mengkapitalisasi beban imbalan kerja pada tahun berjalan ke dalam aset dalam penyelesaian sebesar Rp2.746.408.629.

During 2019, the Corporation capitalized expenses for employee benefits for the current year for construction in progress amounting to Rp2,746,408,629.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain yang dianggap tetap, terhadap nilai kini liabilitas imbalan kerja dan beban jasa kini pada tanggal 31 Desember 2019:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the present value of the obligations and current service costs as of December 31, 2019:

| | Nilai kini kewajiban imbalan pasti/ Present value of the benefit obligations | Beban jasa kini/ Current service cost | |
|---|---|--|---|
| Kenaikan 1% tingkat diskonto | 26.318.991.529 | 7.572.535.799 | 1% increase in discount rate |
| Penurunan 1% tingkat diskonto | 31.863.776.190 | 9.343.047.583 | 1% decrease in discount rate |
| Kenaikan 1% tingkat kenaikan gaji masa depan | 31.865.455.299 | 9.327.660.395 | 1% increase in future salary incremental rate |
| Penurunan 1% tingkat kenaikan gaji masa depan | 26.297.113.077 | 7.580.642.368 | 1% decrease in future salary incremental rate |

Analisis sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode deterministik atas pengaruh terhadap liabilitas imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang beralasan atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

The sensitivity analysis above was calculated based on a deterministic method for gauging the impact on employees of benefit obligations after reasonable changes in key assumptions occur at the end of the reporting period.

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari liabilitas imbalan kerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

The expected contribution payments of the employee benefit liability in future years are as follows:

| | 2019 | |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 tahun | 1.280.525.969 | 1 year |
| Antara 1 sampai 2 tahun | 2.432.783.772 | Between 1 and 2 years |
| Antara 2 sampai 5 tahun | 13.177.390.484 | Between 2 and 5 years |
| Antara 5 sampai 10 tahun | 28.289.131.698 | Between 5 and 10 years |
| Diatas 10 tahun | 484.650.132.698 | Beyond 10 years |
| Total | 529.829.964.621 | Total |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**25. PROGRAM PENSUN DAN IMBALAN KERJA
(lanjutan)**

Durasi rata-rata dari liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 17,21 tahun (2018: 10,30 tahun).

25. RETIREMENT BENEFITS AND EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The average duration of the employee benefit liability on December 31, 2019 was 17.21 years (2018: 10.30 years).

26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN

a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah, dan pinjaman

- 1) Pada tanggal 28 November 2006, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-536 dengan Pemerintah Jepang melalui *Japan Bank for International Cooperation* ("JBIC") terkait dengan jasa teknik untuk Proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta ("Proyek").

JBIC setuju untuk memberikan pinjaman tidak melebihi dari JPY1.869.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan jasa teknik untuk Proyek. Pinjaman akan digunakan untuk pengadaan jasa konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

Pencairan terakhir terkait Perjanjian Utang harus dilakukan sebelum lima tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman pada hari dan bulan yang sama, kecuali terdapat kesepakatan lain antara JBIC dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Juni 2012, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *closing date* Perjanjian Utang No. IP-536 yang semula tanggal 22 Maret 2012 diubah sehingga menjadi tanggal 22 Desember 2014.

Pada tanggal 27 Februari 2013, berdasarkan *Minutes of Discussion of Pre-Appraisal Mission* yang telah ditandatangani oleh perwakilan dari *Japan International Cooperation Agency* ("JICA"), Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan Perseroan di mana para pihak telah menyetujui nilai keseluruhan pembangunan Proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta adalah sebesar JPY 137.695.000.000.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Agreements related to capital investments, grants and loans

- 1) On November 28, 2006, Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-536 with the Japanese Government through the *Japan Bank for International Cooperation* ("JBIC") in relation to the *Jakarta Mass Rapid Transit Project* (the "Project").

JBIC agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount not exceeding JPY1,869,000,000 for the engineering services of the Project. The loan would be used for the purchase of eligible services from consultants which were necessary for the Project's implementation.

The final disbursement under the Loan Agreement should be made not later than the same day and month five years after the effective date of the Loan Agreement, unless otherwise agreed upon between JBIC and the Government of the Republic of Indonesia.

On June 19, 2012, based on a letter from the Director-General of Treasury of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, the Closing Date of Loan Agreement No. IP-536, which was originally set at March 22, 2012, was extended to December 22, 2014.

On February 27, 2013, based on the *Minutes of Discussion of the Pre-Appraisal Mission*, which were signed by representatives of the *Japan International Cooperation Agency* ("JICA"), the Government of the Republic of Indonesia, as represented by the National Development Planning Agency, the Directorate General of Railways, DKI Jakarta Provincial Government and the Corporation agreed that the total project cost for the construction of the *Mass Rapid Transit Jakarta Project* amounted to JPY137,695,000,000.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah, dan pinjaman (lanjutan)
- 2) Pada tanggal 25 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Hibah, Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menghibahkan dana sebesar JPY758.000.000 yang diperoleh dari pinjaman yang berasal dari negara lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan jasa konsultasi manajemen dan jasa konsultasi pengadaan.

Dana hibah yang tidak melebihi dari JPY191.000.000 akan diteruskan seluruhnya kepada Perseroan sebagai penyertaan modal daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan jasa konsultasi pengadaan oleh Perseroan.

Tata cara penyaluran hibah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 188/PMK.07/2012 tanggal 26 November 2012.

- 3) Pada tanggal 31 Maret 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-554 dengan JICA terkait dengan Proyek.

JICA setuju untuk memberikan pinjaman tidak melebihi dari JPY48.150.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari para pemasok, kontraktor, atau konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek.

Pencairan terakhir terkait Perjanjian Utang harus dilakukan sebelum sepuluh tahun setelah tanggal efektif perjanjian pinjaman pada hari dan bulan yang sama, kecuali terdapat kesepakatan lain antara JICA dan Pemerintah Republik Indonesia.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

- 2) *On March 25, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 with the Government of DKI Jakarta.*

Under the Grant Agreement, the Government of the Republic of Indonesia agreed to provide grant funding amounting to JPY758,000,000, which was to be obtained from a loan from another country, to the DKI Jakarta Provincial Government in order to implement management consultancy services and tender assistance consultancy.

Grant funding not exceeding JPY191,000,000 would be granted to the Company as equity of the DKI Jakarta Provincial Government for the implementation of the Corporation's consulting services.

Procedures for the distribution of the grants are set out under Regulation No. 188/PMK.07/2012 of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, dated November 26, 2012.

- 3) *On March 31, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-554 with JICA in relation to the Project.*

JICA agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia an amount not exceeding JPY48,150,000,000 to be used for the purchase of goods and services from the suppliers, contractors and consultants necessary for the implementation of the Project.

The final disbursement under the Loan Agreement should be made not later than the same day and month ten from after the effective date of the Loan Agreement, unless otherwise agreed upon by JICA and the Government of the Republic of Indonesia.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah, dan pinjaman (lanjutan)

- 4) Pada tanggal 24 Juli 2009, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Perjanjian Hibah, Pemerintah Republik Indonesia setuju untuk menghibahkan dana sebesar JPY48.150.000.000 yang diperoleh dari pinjaman yang berasal dari negara lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pekerjaan sipil dan peralatan, jasa konsultasi, dan alokasi cadangan kontinjensi oleh Perseroan bagi pelaksanaan kegiatan Proyek.

Pada tanggal 23 Maret 2016, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah Daerah No.PHD-001/PK/2016 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerusan hibah dari JICA atas Loan Agreement IP-571 untuk Pembiayaan Proyek Mass Rapid Transit Jakarta. Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman JICA IP-571 sebagai hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar JPY11.347.000.000.

- 5) Pada tanggal 27 Oktober 2011, Perseroan menerima Keputusan Gubernur No. 1517/2011 tentang disetujuinya pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp44.179.480.000 yang alokasinya bersumber dari APBD sebesar Rp30.000.000.000 dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp14.179.480.000, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 26a2).

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

- 4) *On July 24, 2009, the Government of the Republic of Indonesia signed Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 with the Government of DKI Jakarta.*

Under the Grant Agreement, the Government of the Republic of Indonesia agreed to provide grant funding amounting to JPY48,150,000,000, which would be obtained from a loan from another country, to the DKI Jakarta Provincial Government in order to implement equipment and civil works, consultation services and allocations for contingency reserves by the Corporation for the implementation of Project development activities.

On March 23, 2016, the Government of the Republic Indonesia signed grant agreement No.PHD-001/PK/2016 with the government of DKI Jakarta relating to the subsidiary loan JICA loan agreement on IP-571 for the project financing of Mass Rapid Transit Jakarta. The parties agreed to continue with JICA loan IP-571, as granted to the DKI Jakarta Provincial Government, amounting to JPY 11,347,000,000.

- 5) *On October 27, 2011, the Corporation received Governor's Decree No. 1517/2011, whereby additional paid-in capital amounting to Rp44,179,480,000 would be provided by the Government of DKI Jakarta, Rp30,000,000,000 of which would be sourced from the APBD and Rp14,179,480,000 of which would be granted by the Government of the Republic of Indonesia based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 26a2).*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah, dan pinjaman (lanjutan)

menerima Keputusan Gubernur No. 1525/2012 yang menyetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp968.509.699.990 yang alokasinya bersumber dari APBD sebesar Rp65.000.000.000 dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp14.041.116.650 sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 26a2) dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp889.468.583.340, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 (Catatan 26a4).

Pada bulan November dan Desember 2013, Perseroan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 111.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 704 tanggal 1 Mei 2013 sebesar Rp31.000.000.000 dan Keputusan Gubernur No. 1923 tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp80.000.000.000 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada tanggal 11 Desember 2013, Perseroan menerima Keputusan Gubernur No. 1924/2013 yang menyetujui pencairan tambahan modal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.720.529.427.822 yang alokasinya bersumber dari hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp12.088.062.892, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-001/PK/2009 (Catatan 26a2) dan hibah dari Pemerintah Republik Indonesia sebesar Rp1.708.441.364.930, sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Hibah No. NPPH-002/PK/2009 (Catatan 26a4).

Pada bulan Juli 2014, Perseroan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp125.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1123 tanggal 8 Juli 2014 yang alokasinya bersumber dari APBD.

**26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

On October 2, 2012, the Corporation received Governor's Decree No. 1525/2012, whereby additional paid in capital amounting to Rp968,509,699,990 would be provided by the DKI Jakarta Provincial Government, Rp65,000,000,000 of which would be funded from the APBD, Rp14,041,116,650 of which would be granted by the Government of the Republic of Indonesia based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 26a2) and Rp889,468,583,340 of which would be granted by the Government of the Republic of Indonesia based on Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 (Note 26a4).

In November and December of 2013, the received an additional Corporation Contribution from the DKI Jakarta Provincial Government totaling Rp111,000,000,000, Rp31,000,000,000 of which was based on Governor's Decree No. 704 dated May 1, 2013 and Rp80,000,000,000 of which was funded from the APBD based on Governor's Decree No. 1923 dated December 11, 2013.

On December 11, 2013, the Corporation received Governor Decree No. 1924/2013, whereby additional paid in capital amounting to Rp1,720,529,427,822 would be provided by the DKI Jakarta Provincial Government. Rp12,088,062,892 was sourced from a grant provided by the Government of the Republic of Indonesia based on Grant Agreement No. NPPH-001/PK/2009 (Note 26a2) and Rp1,708,441,364,930 was sourced from a grant provided by the Government of the Republic of Indonesia based on Grant Agreement No. NPPH-002/PK/2009 (Note 26a4).

In July 2014, the Corporation received the additional contribution from the DKI Jakarta Provincial Government amounting to Rp125,000,000,000 which was funded by the APBD based on Governor's Decree No. 1123 dated July 8, 2014.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah, dan pinjaman (lanjutan)

Pada bulan Desember 2015, Perseroan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2700 tanggal 8 Desember 2015 yang alokasinya bersumber dari APBD.

Pada tanggal 4 Desember 2015, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Utang No. IP-571 dengan JICA terkait dengan Proyek. JICA setuju untuk memberikan pinjaman sebesar JPY75.218.000.000 kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk pelaksanaan Proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta. Pinjaman akan digunakan untuk membeli barang dan jasa dari para pemasok, kontraktor, atau konsultan yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta.

Pada tanggal 4 Februari 2016, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Penerusan Pinjaman No.SLA-1263/DSMI/2016 dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerusan pinjaman dari JICA atas Loan Agreement IP-571 untuk Pembiayaan Proyek *Mass Rapid Transit* Jakarta. Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman JICA IP-571 sebesar JPY63.871.000.000 kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada bulan Desember 2016, Perseroan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp49.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2092 tanggal 16 September 2016 dan Rp100.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2730 tanggal 20 Desember 2016.

Pada bulan Desember 2017, Perseroan telah menerima penambahan Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp444.000.000.000 berdasarkan Keputusan Gubernur No. 2308 tanggal 20 Desember 2017 yang alokasinya bersumber dari APBD.

**26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

In December 2015, the Corporation received the additional contribution from the DKI Jakarta Provincial Government totaling Rp145,000,000,000 which was funded by the APBD based on Governor's Decree No. 2700 dated December 8, 2015.

On December 4, 2015, the Government of the Republic of Indonesia signed Loan Agreement No. IP-571 with JICA in relation to the Project. JICA agreed to lend the Government of the Republic of Indonesia JPY75,218,000,000 for the implementation of the Mass Rapid Transit Jakarta Project. The loan was to be used for the purchase of goods and services from suppliers, contractors or consultants necessary for the implementation of the Mass Rapid Transit Jakarta Project.

On February 4, 2016, the Government of the Republic of Indonesia signed Grant Agreement No.SLA-1263/DSMI/2016 with the DKI Jakarta Provincial Government relating to a subsidiary loan through JICA loan agreement IP-571 for project financing of Mass Rapid Transit Jakarta. The parties agreed to continue with the JICA loan IP-571 of JPY63,871,000,000 to the DKI Jakarta Provincial Government.

In December 2016, the Corporation received an additional contribution from the DKI Jakarta Provincial Government amounting to Rp49,000,000,000 based on Governor's Decree No. 2092 dated September 16, 2016 and amounting to Rp100,000,000,000 based on Governor's Decree No. 2730 dated December 20, 2016.

In December 2017, the Corporation received an additional contribution from the DKI Jakarta Provincial Government totaling Rp444,000,000,000 based on Governor's Decree No. 2308 dated December 20, 2017 was were funded through the APBD.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- a. Perjanjian terkait penyertaan modal, hibah, dan pinjaman (lanjutan)

Pada tanggal 28 Desember 2018, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 tentang penyertaan modal daerah pada Perseroan sebesar Rp40.757.353.000.000, setara dengan 99% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada Perseroan. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 mencabut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2008 beserta perubahannya.

- 6) Pada tanggal 13 Februari 2019, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Perjanjian Hibah Daerah No. PHD-001/MK.7/2019 dengan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait penerusan hibah atas Loan Agreement IP-578 untuk kegiatan Mass Rapid Transit Jakarta Fase 2 (II). Para pihak setuju untuk meneruskan pinjaman IP-578 sebagai hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar JPY70.021.000.000.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah menerima pencairan modal yang berasal dari APBD, setoran modal dari PD Pasar Jaya dan penerusan hibah, serta penerusan pinjaman masing-masing sebesar Rp1.193.500.000.000, Rp500.000.000, dan Rp15.145.173.942.700.

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT

- 1) Pada tanggal 10 Juni 2013, Perseroan menandatangani perjanjian Construction Management Consulting Services dengan Oriental Consultant Co. Ltd., Japan International Consultant for Transportation Co. Ltd., dan Pacific Consultants, Co. Ltd. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedelapan tanggal 30 Oktober 2019. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Total nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY2.027.823.537 dan Rp 139.002.181.198.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- a. *Agreements related to capital investments, grants and loans (continued)*

On December 28, 2018, the Governor of DKI Jakarta issued Government Regulation No. 9 Year 2018 regarding capital investment in the Corporation amounting to Rp40,757,353,000,000, which was equivalent to 99% of the issued and fully paid share capital of the Corporation. Government Regulation No. 9 Year 2018 revoked Government Regulation No. 4 Year 2008 and its amendment.

- 6) *On February 13, 2019, the Government of the Republic of Indonesia signed grant No.PHD-001/MK.7/2019 with the DKI Jakarta Provincial Government relating to subsidiary loan agreement IP-578 for Mass Rapid Transit Jakarta Phase 2 (II) activities. The parties agreed to proceed with loan IP-578, which comprised a grant of JPY70,021,000,000 to the DKI Jakarta Provincial Government.*

As of December 31, 2019, the Corporation received additional paid-up capital funded via the APBD, capital investment from PD Pasar Jaya and the grant and loan mechanism amounting to Rp1,193,500,000,000, Rp500,000,000 and Rp15,145,173,942,700, respectively.

- b. *Contractors and consultants agreement relating to the MRT project*

- 1) *On June 10, 2013, the Corporation entered into a Construction Management Consulting Services agreement with Oriental Consultant Co. Ltd., Japan International Consultant for Transportation Co. Ltd., and Pacific Consultants, Co. Ltd. The agreement was amended for a final eighth time on October 30, 2019. The agreement remained valid until March 31, 2020. The total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY2,027,823,537 and Rp139,002,181,198.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

Selama tahun 2019, nilai sertifikat pembayaran konsultan yang telah dibayarkan terkait perjanjian di atas adalah sebesar JPY676.196.415 (setara dengan Rp87.616.497.498) dan Rp 42.170.682.444.

- 2) Pada tanggal 11 Juni 2013, Perseroan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

(i) Perjanjian *Underground and Tunnels* 9K+211 to 11K+043 dengan Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan Jaya Konstruksi JV (CP-104). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh enam tanggal 17 September 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY1,764,998,290 dan Rp1.250.585.724.984. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2019.

(ii) Perjanjian *Underground and Tunnels* 11K+043 to 13K+102 dengan Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan Jaya Konstruksi JV (CP-105). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh tujuh tanggal 17 September 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY1.343.981.791 dan Rp1.349.893.773.880. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2019.

(iii) Perjanjian *Underground and Tunnels* 13K+102 to 15K+123 dengan SMCC and HK JO (CP-106). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kesembilan tanggal 22 April 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY5.553.967.186 dan Rp1.217.378.773.931. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2019.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. Contractors and consultants agreements relating to the MRT project (continued)

During 2019, the total consultants' payment certificates which were paid in relation to the above agreements amounted to JPY676,196,415 (equivalent to Rp87,616,497,498) and Rp42,170,682,444.

- 2) On June 11, 2013, the Corporation entered into several agreements as follows:

(i) *Underground and Tunnels* 9K+211 to 11K+043 agreement with Shimizu-Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk and Jaya Konstruksi JV (CP-104). The agreement's twenty-sixth and final Amendment was dated September 17, 2019 and the total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY1,764,998,290 and Rp1,250,585,724,984. The contract was valid until March 27, 2019.

(ii) *Underground and Tunnels* 11K+043 to 13K+102 agreement with Shimizu, Obayashi, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk & Jaya Konstruksi JV (CP-105). The agreement's twenty-seventh and final Amendment was dated September 17, 2019 and the total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY1,343,981,791 and Rp1,349,893,773,880. The contract was valid until March 27, 2019.

(iii) *Underground and Tunnels* 13K+102 to 15K+123 agreement with SMCC and HK JO (CP-106). The agreement's ninth and final Amendment was dated April 22, 2019 and the total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY5,553,967,186 and Rp1,217,378,773,931. The contract was valid until March 27, 2019.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

Selama tahun 2019, nilai sertifikat pembayaran Kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian di atas adalah sebesar JPY388.942.688 (setara dengan Rp50.661.882.841) dan Rp 725.245.552.923.

- 2) Pada tanggal 4 Juli 2013, Perseroan menandatangani perjanjian *Tender Assistance Services (2) for Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project* dengan Nippon Koei Co. Ltd., Japan Transportation Consultants, Inc., The Japan Electrical Consulting Co., Ltd, PT Jaya CM, PT Dardela Yasa Guna, PT Wiratman, PT Rayakonsult, PT LAPI ITB, dan PT Inti Daya Kreasicitra. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen keempat tanggal 8 Juli 2015 dengan jumlah nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY91.284.484 dan Rp5.045.016.623.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, keseluruhan nilai pembayaran konsultan yang telah dibayarkan terkait perjanjian di atas adalah sebesar JPY66.582.190 (setara dengan Rp7.472.838.243) dan Rp4.159.605.827.

Pada bulan Oktober 2013, Perseroan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian *Depot, Elevated Structure and Station 0K+580 TO 0K+630* dengan Tokyu-Wika JO (CP-101). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua puluh tanggal 1 November 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY6.533.334.118 dan Rp 1.305.252.074.433. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- b. *Contractors and consultants agreements relating to the MRT project (continued)*

During 2019, the total Contractors' payment certificates which were paid in relation to the above agreements amounted to JPY388,942,688 (equivalent to Rp50,661,882,841) and Rp 725,245,552,923.

- 3) *On July 4, 2013, the Company entered into the Tender Assistance Services (2) for Installation and Procurement of Railway System & Track and Rolling Stock for Jakarta MRT System Project agreement with Nippon Koei Co. Ltd., Japan Transportation Consultants, Inc., The Japan Electrical Consulting Co., Ltd, PT Jaya CM, PT Dardela Yasa Guna, PT Wiratman, PT Rayakonsult, PT LAPI ITB and PT Inti Daya Kreasicitra. The agreement was amended for a fourth and final time on July 8, 2015 with a total cost (excluding VAT) amounting to JPY91,284,484 and Rp5,045,016,623.*

As of December 31, 2019, total payments to consultants in relation to the above agreements amounted to JPY66,582,190 (equivalent to Rp7,472,838,243) and Rp4,159,605,827.

In October 2013, the Corporation entered into several agreements as follows:

- (i) *Depot, Elevated Structure and Station 0K+580 TO 0K+630 agreement with Tokyu-Wika JO (CP-101). The agreement was amended for twentieth and final time on November 1, 2019, with a total cost of contract (excluding PPN) amounting to JPY6,533,334,118 and Rp1,305,252,074,433. The contract was valid until February 3, 2019.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

4) Pada bulan Oktober 2013, Perseroan menandatangani beberapa perjanjian sebagai berikut: (lanjutan)

(ii) Perjanjian *Elevated Structures and Stations* dengan Tokyu-Wika JO (CP 102). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen ketujuh belas tanggal 15 Oktober 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) sebesar JPY2.397.764.583 dan Rp1.143.562.614.005. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.

(iii) Perjanjian *Elevated Structures and Stations 5K+369 to 9K+211* dengan Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV (CP 103). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen ketiga belas tanggal 9 September 2019 dengan jumlah nilai pekerjaan (tidak termasuk PPN) dengan jumlah nilai pekerjaan sebesar JPY3.964.377.206 dan Rp1.160.331.456.898. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 3 Februari 2019.

Selama tahun 2019, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian di atas adalah sebesar JPY2.139.323.279 (setara dengan Rp275.996.462.052) dan Rp1.471.714.037.673.

5) Pada tanggal 3 Maret 2015, Perseroan menandatangani perjanjian Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 - Rolling Stock dengan Sumitomo Corporation. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen kedua tanggal 27 Maret 2019. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 5 April 2019. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY10.835.357.676 dan Rp21.960.355.914.

Selama tahun 2019, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian di atas adalah sebesar JPY1.575.545.598 (setara dengan Rp205.245.987.970) dan Rp7.643.089.100.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

b. Contractors and consultants agreements relating to the MRT project (continued)

4) In October 2013, the Company entered into several agreements, as follows: (continued)

(ii) *Elevated Structures and Stations agreement with Tokyu-Wika JO (CP 102). The agreement was amended for a seventeenth and final time on October 15, 2019, with a total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY2,397,764,583 and Rp 1,143,562,614,005. The contract was valid until February 3, 2019.*

(iii) *Elevated Structures and Stations 5K+369 to 9K+211 agreement with Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi JV (CP 103). The agreement was amended for an eighteenth and final time on September 9, 2019, with total cost of contract (excluding VAT) amounting to JPY3,964,377,206 and Rp1,160,331,456,898. The contract is valid until February 3, 2019.*

During 2019, the total contractors' payment certificates which were paid in relation to the above agreements amounted to JPY2,139,323,279 (equivalent to Rp275,996,462,052) and Rp1,471,714,037,673.

5) *On March 3, 2015, the Company entered into Contract for Systems and Rolling Stock Section: CP 108 - Rolling Stock with the Sumitomo Corporation. The agreement was amended for a second and final time on March 27, 2019. The agreement remained valid until April 5, 2019. The total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY10,835,357,676 and Rp21,960,355,914.*

During 2019, the total contractors' payment certificates which were paid in relation to the above agreements amounted to JPY1,575,545,598 (equivalent to Rp205,245,987,970) and Rp7,643,089,100.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

- 6) Pada tanggal 30 April 2015, Perseroan menandatangani perjanjian *Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107* dengan Mitsui & Co, Ltd., Toyo Engineering Corporation, Kobe Steel, Ltd., Sumitomo Corporation, dan PT Inti Karya Persada Teknik. Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen keempat tanggal 15 Maret 2019. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 27 Maret 2019. Jumlah nilai keseluruhan kontrak (tidak termasuk PPN) adalah sebesar JPY15.762.000.007 dan Rp1.010.217.668.955.

Selama tahun 2019, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian di atas adalah sebesar JPY2.695.783.847 (setara dengan Rp351.532.851.474) dan Rp225.015.295.714.

- 7) Pada tanggal 13 April 2016, Perseroan menandatangani perjanjian *Operation and Maintenance Consulting Services* Proyek MRT Jakarta System Fase 1 Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia dengan Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd. (*Joint Venture and Association*). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen keenam tanggal 4 Maret 2019. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah sebesar JPY803.705.793 (tanpa pajak) dan Rp49.479.817.804 (tanpa pajak).

Selama tahun 2019, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian di atas adalah sebesar JPY200.400.142 (setara dengan Rp25.844.711.320) dan Rp 12.076.169.269.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

b. *Contractors and consultants agreements relating to the MRT project (continued)*

- 6) *On April 30, 2015, the Corporation entered into Contract for Railway Systems and Trackwork CP-107 with the Mitsui & Co, Ltd., Toyo engineering Corporation, Kobe Steel, Ltd., Sumitomo Corporation and PT Inti Karya Persada Teknik. The agreement was amended for a fourth and final time on March 15, 2019. The agreement remained valid until March 27, 2019. The total cost of the contract (excluding VAT) amounted to JPY15,762,000,007 and Rp 1,010,217,668,955.*

During 2019, the total contractors payment certificates which were paid in relation to the above agreements amounted to JPY2,695,783,847 (equivalent to Rp351,532,851,474) and Rp 225,015,295,714.

- 7) *On April 13, 2016, the Company entered into the Contract for Operation and Maintenance Consulting Services Proyek MRT Jakarta System Phase 1 Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia with Japan International Consultants for Transportation Co., Ltd. (Joint Venture and Association). The agreement was amended for a sixth and final time on March 4, 2019. The Agreement remained valid until March 31, 2020. The total cost of the Contract amounted to JPY803,705,793 (without taxes) and Rp49,479,817,804 (without taxes).*

During 2019, the total contractors' payment certificates which were paid in relation to the above agreements amounted to JPY200,400,142 (equivalent to Rp25,844,711,320) and Rp 12,076,169,269.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

b. Perjanjian kontraktor dan konsultan terkait proyek MRT (lanjutan)

- 8) Pada tanggal 4 Desember 2017, Perseroan menandatangani perjanjian *Engineering Design and Tender Assistances Consulting Services for Phase II Section MRT System* dengan Oriental Consultants Global Co., Ltd (*Joint Venture and Association*). Perjanjian tersebut telah diubah terakhir pada Amandemen ketiga tanggal 28 Juni 2019. Perjanjian tersebut berlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2021. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah sebesar JPY1.113.348.000 (tanpa pajak) dan Rp66.140.078.750 (tanpa pajak).

Selama tahun 2019, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian di atas adalah sebesar JPY404.760.153 (setara dengan Rp52.100.556.133) dan Rp15.533.843.500.

- 9) Pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan menandatangani perjanjian Paket Pekerjaan CP 200: Jasa Konstruksi Dinding Diafragma untuk Gardu Induk Monas Proyek MRT Jakarta Fase 2 dengan PT Trocon Indah Perkasa. Jumlah nilai keseluruhan kontrak adalah sebesar Rp21.767.900.000 (termasuk pajak). Selama tahun 2019, nilai sertifikat pembayaran kontraktor yang telah dibayarkan terkait perjanjian di atas adalah sebesar Rp18.799.550.000.

Perseroan memiliki utang retensi sebesar 10% yang akan dibayarkan masing-masing sebesar 5% pada masa tahun pertama dan kedua *defect liability period*. Pada tanggal 31 Desember 2019, saldo utang retensi adalah sebesar Rp480.756.470.176 (2018: Rp691.273.055.316).

**26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

b. *Contractors and consultants agreements relating to the MRT project (continued)*

- 8) *On December 4, 2017, the Corporation entered into Contract for Engineering Design and Tender Assistances Consulting Services for Phase II Section MRT System with Oriental Consultants Global Co., Ltd (Joint Venture and Association). The agreement was amended for a third and final time on June 28, 2019. The Agreement remained valid until May 4, 2021. The total cost of the contract amounted to JPY1,113,348,000 (without taxes) and Rp66,140,078,750 (without taxes).*

During 2019, the total contractors' payment certificates which were paid in relation to the above agreements amounted to JPY404,760,153 (equivalent to Rp52,100,556,133) and Rp 15,533,843,500.

- 9) *On December 31, 2018, the Company entered into Contract for Contract Package CP200: Diaphragm Wall Construction Services for Jakarta Monas Substation MRT Phase 2 Project. The total cost of the Contract amounted to Rp21,767,900,000 (include taxes). During 2019, the total contractors' payment certificates which were paid in relation to the above agreements amounted to Rp18,799,550,000.*

The Corporation has 10% retention payables, 5% of which will be paid during the first and second years of the defect liability period. As of December 31, 2019, the balance of retention payables stood at Rp480,756,470,176 (2018: Rp691,273,055,316).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

- c. Denda keterlambatan pembayaran kepada kontraktor proyek MRT

Berdasarkan General Conditions of Contract, FIDIC Yellow Book edisi tahun 1999, pada klausul 20.1 Contractor's Claim, kontraktor dapat mengajukan notifikasi bila mereka merasa berhak atas hal tersebut/dengan memberikan pemberitahuan kepada Engineer dalam waktu tidak lebih dari 28 hari setelah kontraktor mengetahui, atau seharusnya mengetahui, terhadap keadaan atau kejadian yang mengakibatkan notifikasi tersebut.

Dalam hal ini, selama tahun 2019 Perseroan telah menerima notifikasi dari kontraktor berupa tagihan atas denda keterlambatan sebesar JPY41.674.681 dan Rp 76.552.737.123.

Akan tetapi, tagihan yang telah diterima dari kontraktor atas denda keterlambatan ini belum meliputi seluruh termin yang telah ditagihkan dan termin yang belum dibayarkan. Masih terdapat potensi denda keterlambatan yang bisa ditagihkan oleh kontraktor di masa depan. Atas hal ini, Perseroan melakukan akrual atas denda keterlambatan sebesar JPY22.231.778 dan Rp8.287.367.598.

- d. Reekspor atas peralatan dan mesin yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi MRT

Untuk memenuhi kebutuhan proyek, Perseroan melakukan impor atas material, peralatan, dan mesin tertentu. Terdapat kewajiban Perseroan untuk melakukan reekspor atas peralatan dan mesin yang telah diimpor. Terkait atas kewajiban tersebut, Perseroan telah mengeluarkan surat jaminan atas bea masuk kepada Kantor Bea dan Cukai, yang akan menjadi kewajiban sesungguhnya apabila Perseroan tidak melakukan reekspor. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, Perseroan telah melakukan reekspor atas peralatan dan mesin yang telah diimpor dan telah mencairkan surat jaminan bea masuk sebesar Rp9.307.233.380.

**26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

- c. *Delayed payment charges to contractors working on the MRT project*

Based on contract clause 20.1 in the FIDIC General Conditions of Contract, Yellow Book Year 1999, the contractor shall give notice if the contractor considers himself to be entitled to make a claim, describing the event or circumstance giving rise to said claim. The notice should be sent as soon as practicable and by not later than 28 days to the Engineer after the contractor has become aware, or should have become aware, of the event or circumstance.

In this case, during 2019, the Corporation received notifications from the contractors in the form of invoices relating to delayed charges of JPY41,674,681 and Rp76,552,737,123.

However, the invoices that have been received from the contractors relating to late payment do not cover the whole term of payments that have been billed and not yet been paid. There are still possibilities that delayed charges can be billed by the contractor in the future. Because of this, the Corporation has provided accrual for delayed charges amounting to JPY22,231,778 and Rp8,287,367,598.

- d. *Re-exports of equipment and machinery used in relation to the MRT project*

In order to fulfill the project requirements, the Corporation imported certain materials, equipment and machinery. The Corporation is liable to re-export the equipment and machinery which was previously imported. In relation to this liability, the Corporation has issued a guarantee letter which covers the custom import duty to "Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai", in which, the liability will be recognized if the Corporation fails to reexport said items. As of December 31, 2019, the Corporation had re-exported all of the equipment and machinery which was previously been imported and withdrew its guarantee letter in the amount of Rp9,307,233,380.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSEROA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket

- 1) Pada tanggal 15 Desember 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Telekomunikasi dengan PT Tower Bersama untuk kebutuhan penyediaan konektivitas seluler dan wifi pada area operasional MRT Jakarta - Fase 1. PT Tower Bersama wajib membayar bagi hasil dengan nilai minimum Rp5.000.000.000 setiap tahun ditambah jumlah nominal tersisa dari bagi hasil pada tahun kerja sama dikurangi nilai minimum. Perjanjian tersebut berlaku selama 10 tahun dimulai dari tanggal operasi pendapatan.
- 2) Pada tanggal 13 Desember 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Layanan Periklanan dengan PT Avabanindo Perkasa ("AP") untuk kebutuhan penyediaan layanan periklanan operasional MRT Jakarta - Fase 1. Perjanjian tersebut berlaku selama 20 tahun dimulai dari tanggal operasi pendapatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, AP wajib memberikan komisi penandatanganan perjanjian kepada Perseroan sebesar Rp40.000.000.000. Atas biaya tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka dan akan diamortisasi sejak Perseroan beroperasi dan selama jangka waktu perjanjian.

Pada tanggal 28 November 2019, Perseroan dan AP sepakat untuk menyelesaikan denda ketidakpatuhan sebesar Rp23.027.897.652 dan denda tersebut telah dibayarkan oleh AP.

**26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

e. *Agreements relating to non-farebox revenues*

- 1) *On December 15, 2017, the Company signed Telecommunication Cooperation Agreement with PT Tower Bersama for provide cellular connectivity and Wifi in the operational area of MRT Jakarta - Phase 1. PT Tower Bersama is required to pay profit sharing with a minimum value of Rp5,000,000,000 annually plus the remaining nominal amount of profit sharing in the year of cooperation minus the minimum value. The agreement is valid for 10 years starting from the date of operating income.*
- 2) *On December 13, 2017, the Company signed an Advertising Cooperation Agreement with PT Avabanindo Perkasa ("AP") for provide advertising services in the operational area of MRT Jakarta - Phase I. This agreement is valid for 20 years from the revenue operation date.*

Based on the agreement, AP shall have an obligation to pay the Agreement signing commission to the Company amounting to Rp40,000,000,000. The fee recognized as unearned revenue and will amortize since the Company operated and during the term of the agreement.

On November 28, 2019, the Company and AP have agreed to settle the non-compliance penalty amounted to Rp23,027,897,652 and the said penalty has been paid by AP.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket (lanjutan)

- 3) Selama tahun 2018 dan 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Hak Penamaan Stasiun dengan pihak ketiga dalam rangka hak penamaan eksklusif stasiun MRT Jakarta Fase 1 di stasiun dengan beberapa pihak dengan rincian sebagai berikut:

| Tanggal/ Date | Pihak Ketiga/Third Parties | Stasiun/ Station | Jangka Waktu/ Period |
|--|--|------------------|-------------------------|
| 31 Desember 2018/ December 31, 2018 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Dukuh Atas | 10 tahun/ 10 years |
| 31 Desember 2018/ December 31, 2018 | PT Astra International Tbk | Setiabudi | 10 tahun/ 10 years |
| 11 Februari 2019/ February 11, 2019 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Istora | 10 tahun/ 10 years |
| 1 April 2019/ April 1, 2019 | PT Solusi Transportasi Indonesia | Lebak Bulus | 5 tahun/ 5 years |
| 17 Mei 2019/ May 17, 2019 | PT Bank Central Asia Tbk | Blok M | 5 tahun/ 5 years |

Nilai kontrak atas perjanjian-perjanjian di atas berkisar antara Rp16.100.000.000 sampai dengan Rp33.000.000.000 per tahun.

- 4) Pada tanggal 17 Desember 2018, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Usaha Ritel dengan pihak ketiga dalam rangka sewa ruang dan bagi hasil usaha ritel. Perjanjian tersebut berlaku untuk 2 tahun yang dimulai dari tanggal dimulainya usaha gerai. Atas perjanjian ini, pihak ketiga berkewajiban atas biaya sewa dan bagi hasil dari penjualan harian. Detail Perjanjian Kerja Sama Usaha Ritel dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

| Pihak Ketiga/Third Parties | Kategori/ Categories | Stasiun/ Station | Persentase bagi hasil/ Percentage of revenue sharing |
|---|--|---------------------------------|---|
| PT Perintis Pelayanan Paripurna (Century) | Mode dan aksesoris/ Fashion and accessories | Dukuh Atas | 10% |
| PT Just Shop Jaya (Daiso Japan) | Mode dan aksesoris/ Fashion and accessories | Dukuh Atas | 10% |
| PT Kaizen Indonesia (Kaizen) | Mode dan aksesoris/ Fashion and accessories | Dukuh Atas | 10% |
| PT Fajar Mitra Indah (FamilyMart Indonesia) | Toko serba ada/ Convenience store | Bendungan Hilir dan Lebak Bulus | 12% |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) | Toko serba ada/ Convenience store | Bundaran HI dan Stasiun Blok M | 12% |
| PT Moradi (MOR) | Toko serba ada/ Convenience store | Cipete Raya dan Setiabudi | 10% |
| PT Indomarco Prisma (Indomaret) | Toko serba ada/ Convenience store | Istora dan Dukuh Atas | 12% |
| PT Lancar Wiguna Sejahtera (Lawson Indonesia) | Toko serba ada/ Convenience store | Senayan dan Fatmawati | 15% |

e. Agreements relating to non-farebox revenues (continued)

- 3) During 2018 and 2019, the Corporation signed the Station Naming Rights Agreement with several third parties in the context of the exclusive naming rights for MRT Jakarta stations phase 1, as follows:

The contract values of the agreement above range from Rp16,100,000,000 to Rp33,000,000,000 per year.

- 4) On December 17, 2018, the Company signed the Retail Business Agreement with several third parties in the context of retail business space rentals and revenue sharing. The agreement is valid for 2 years after the store opening dates. In relation to these agreements, third parties are obliged to pay a rental fee and engage in revenue sharing on daily sales. Details of the Retail Business Agreement with third parties are as follows:

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)

- e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket (lanjutan)

| Pihak Ketiga/Third Parties | Kategori/ Categories | Stasiun/ Station | Persentase bagi hasil/ Percentage of revenue sharing |
|---|--|-----------------------------|---|
| PT Citra Rasa Betawi (Kafe Betawi Express) | Makanan dan minuman /Food and beverage | Dukuh Atas dan Lebak Bulus | 10% |
| PT Sari Coffee Indonesia (Starbucks) | Makanan dan minuman /Food and beverage | Cipete Raya dan Bundaran HI | 12% |
| PT KOI Cafe Indonesia (KOI) | Makanan dan minuman /Food and beverage | Dukuh Atas dan Fatmawati | 10% |
| PT Jaya Wira Jerindo (Shihlin) | Makanan dan minuman /Food and beverage | Lebak Bulus dan Blok M | 18% |
| PT Griya Miesejati (Bakmi GM) | Makanan dan minuman /Food and beverage | Setiabudi dan Blok M | 10% |
| PT Pretzelindo Sukses Pratama (Auntie Anne's) | Makanan dan minuman /Food and beverage | Dukuh Atas dan Istora | 20% |
| PT Prima Usaha Era Mandiri (A&W) | Makanan dan minuman /Food and beverage | Bendungan Hilir dan Senayan | 13% |

- 5) Selama tahun 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemesanan dan Pembayaran Tiket *Digital* Berbasis *Mobile Application* dengan pihak ketiga untuk kebutuhan penyediaan layanan pembayaran digital tiket berbasis *mobile application*. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun dimulai dari tanggal operasi pendapatan.

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak ketiga wajib membayar biaya pelaksanaan kerja sama selama jangka waktu perjanjian. Atas biaya tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dan akan diamortisasi sejak Perseroan beroperasi dan selama jangka waktu perjanjian. Detail Perjanjian Kerja Sama Pemesanan dan Pembayaran Tiket *Digital* Berbasis *Mobile Application* dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut:

| Tanggal/Date |
|-----------------------------------|
| 7 Oktober 2019/ October 7, 2019 |
| 3 Oktober 2019/ October 3, 2019 |
| 6 November 2019/ November 6, 2019 |
| 31 Oktober 2019/ October 31, 2019 |

Komisi atas pelaksanaan kerja sama atas perjanjian tersebut berkisar antara Rp15.000.000.000 sampai dengan Rp25.000.000.000 per tahun.

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

- e. *Agreements relating to non-farebox revenues (continued)*

- 5) *During 2019, the Corporation signed the Digital Ticketing Payment with Mobile Application Cooperation Agreement with several third parties for the provision of digital ticketing payment services with mobile applications. This agreement remains valid for 3 years from the revenue operation date.*

Based on the agreements, third parties shall be obliged to pay an agreement signing commission to the Corporation during the term of the agreement. The fee is recognized as unearned revenue and will be amortized from the time that the Corporation began operating and during the term of the agreement. Details of Digital Ticketing Payment with Mobile Application Cooperation Agreement with third parties break down as follows:

| Pihak Ketiga/Third Parties |
|-------------------------------------|
| PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana) |
| PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) |
| PT Visionet Internasional (OVO) |
| PT Dompot Anak Bangsa (Gopay) |

The agreement signing commission for the agreements above range from Rp15,000,000,000 to Rp25,000,000,000 per year.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

e. Perjanjian terkait pendapatan non-tiket
(lanjutan)

- 6) Pada tanggal 26 Desember 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Layanan Periklanan dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo ("Jakpro") untuk kebutuhan penyediaan layanan periklanan pada media luar ruang media pilar MRT Jakarta - Fase 1. Perjanjian tersebut berlaku selama 5 tahun dimulai dari tanggal 14 Februari 2020 atau tanggal Berita Acara Pemasangan, tergantung yang tercapai terlebih dahulu.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Jakpro wajib memberikan fee komitmen kepada Perseroan sebesar Rp25.000.000.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, perjanjian ini belum berlaku efektif.

f. Perjanjian jual beli tenaga listrik

Pada tanggal 21 Desember 2016, Perseroan menandatangani perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya untuk kebutuhan sistem operasi MRT Jakarta dengan Biaya Penyambungan (BP) listrik menurut kontrak sebesar Rp32.100.000.000. Perjanjian tersebut berlaku selama Perseroan masih menjadi pelanggan listrik. Kewajiban bulanan pembayaran listrik dimulai pada saat Perseroan memulai kegiatan operasional MRT Jakarta.

g. Perjanjian sewa kantor

Pada tanggal 29 Februari 2016, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Kantor dengan PT Wisma Nusantara International terkait penambahan ruang kantor PT MRT Jakarta di Gedung Wisma Nusantara Lantai 23. Perjanjian ini berlaku selama 36 bulan, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 dengan nilai kontrak sewa tahun pertama dan kedua sebesar Rp250.000 per meter persegi per bulan, lalu tahun ketiga sebesar Rp300.000 per meter persegi per bulan dengan pembayaran di muka setiap enam bulan.

**26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

e. *Agreements relating to non-farebox revenues
(continued)*

- 6) *On December 26, 2019, the Corporation signed an Advertising Services Cooperation Agreement with Jakarta Infrastruktur Propertindo ("Jakpro") for the provision of advertising services on the outdoor pillar media of MRT Jakarta -Phase I. This agreement is valid for 5 years from February 14, 2020 or from the installation report date, whichever is sooner.*

Based on the agreement, Jakpro is obliged to pay a commitment fee to the Corporation amounting to Rp25,000,000,000. As of December 31, 2019, this agreement had not yet become effective.

f. *Agreement on electrical power*

On December 21, 2016, the Corporation signed a Purchase Agreement for Electrical Power with PT PLN (Persero) Distribution Area of Jakarta Raya in order to supply electricity for the operational systems of MRT Jakarta. The cost of the electrical installations amounted to Rp32,100,000,000. This agreement will remain valid for as long as the Corporation is a customer of PT PLN (Persero). The monthly payment for the electricity began when the Corporation commenced MRT Jakarta operations.

g. *Agreement on office rental*

On February 29, 2016, the Corporation signed a Lease Agreement for Office Area with PT Wisma Nusantara International in relation to the addition of office space for PT MRT Jakarta within the Wisma Nusantara building. This agreement remained valid for 36 months, commencing March 1, 2016 until February 28, 2019, with a contract value for the first and second years amounting to Rp250,000 per square meter per month and for the third year of Rp300,000 per square meter per month. The payment of office rent will be completed in advance on a six-monthly basis.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

g. Perjanjian sewa kantor (lanjutan)

Pada tanggal 28 Agustus 2017, Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Kantor dengan PT Wisma Nusantara International terkait penambahan ruang kantor PT MRT Jakarta di Gedung Wisma Nusantara Lantai 22. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan nilai kontrak sewa tahun pertama sebesar Rp300.000 per meter persegi per bulan, lalu sewa tahun kedua dan ketiga sebesar Rp350.000 per meter persegi per bulan dengan pembayaran di muka setiap enam bulan.

Pada tanggal 2 Januari 2019, Perseroan menandatangani Perubahan Perjanjian Sewa Kantor dengan PT Wisma Nusantara International terkait perpanjangan masa sewa ruang kantor PT MRT Jakarta di Gedung Wisma Nusantara Lantai 21. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dengan nilai kontrak sewa tahunan sebesar Rp350.000 per meter persegi per bulan dengan pembayaran di muka setiap enam bulan.

h. Perjanjian pengadaan barang dan jasa

1) Pada tanggal 2 September 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan pihak PT Evic Mora Sugih dalam rangka Pembangunan Skybridge Interkoneksi Stasiun Asean dan CSW. Perjanjian tersebut berlaku selama 27 minggu sejak tanggal mulai kerja 16 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp20.321.876.834 (termasuk pajak).

2) Pada tanggal 29 April 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa dengan pihak PT Arkonin dalam rangka Penyusunan Pengembangan Transport Hub & Fasilitas Pendukung di Kawasan Berorientasi Transit Dukuh Atas. Perjanjian tersebut berlaku selama 32 minggu sejak tanggal mulai kerja. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp9.643.155.500 (termasuk pajak).

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

g. Agreement on office rental (continued)

On August 28, 2017, the Corporation signed a Lease Agreement for Office Area with PT Wisma Nusantara International in relation to the addition of office space for PT MRT Jakarta on the 22nd floor of the Wisma Nusantara. This lease agreement was valid from September 18, 2017 until December 31, 2019 with a contract value for the first year of Rp300,000 per square meter per month and for the second and third years of Rp350,000 per square meter per month. The payment of office rent will be completed in advance on a six-monthly basis.

On January 2, 2019, the Corporation signed a Lease Agreement Amendment for Office Area with PT Wisma Nusantara International in relation to an office space extension for PT MRT Jakarta on the 21st floor of the Wisma Nusantara building. This lease agreement Amendment will remain valid from August 17, 2019 until December 31, 2020 with a contract value of Rp350,000 per square meter per month. The payment of office rent will be completed in advance on a six-monthly basis.

h. Agreements on the procurement of goods and services

1) On September 2, 2019, the Corporation entered into an agreement for Interconnection Skybridge Construction between Asean Station and CSW with PT Evic Mora Sugih. The agreement was valid for 27 weeks from the starting date of September 16, 2019 until March 16, 2020. The total cost of the contract amounted to Rp20,321,876,834 (including tax).

2) On April 29, 2019, the Corporation entered into an agreement for the preparation of consultancy services for Transport Hub and Support Facilities development within the Transit Oriented Development of Dukuh Atas with PT Arkonin. The agreement was valid for 32 weeks from its starting date. The total cost of the contract amounted to Rp9,643,155,500 (including tax).

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)**

h. Perjanjian pengadaan barang dan jasa
(lanjutan)

- 3) Pada tanggal 14 Februari 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Jasa Kebersihan, *Pest Control*, dan Pengelolaan Limbah dengan pihak PT ISS Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal mulai kerja 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp66.000.000.000 (tidak termasuk pajak).
- 4) Pada tanggal 25 Februari 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Jasa Pengamanan Paket 1 (*Elevated*) dengan pihak PT Nawakara Perkasa Nusantara. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal mulai kerja 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp86.055.197.000 (tidak termasuk pajak).
- 5) Pada tanggal 4 Maret 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Jasa Pemeriksaan dan Perawatan *Platform Screen Door* dengan pihak PT Len Rekaprima Semesta. Perjanjian tersebut berlaku selama 2 tahun sejak tanggal mulai kerja 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp11.951.500.000 (termasuk pajak).
- 6) Pada tanggal 14 Februari 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Jasa Pengamanan Paket 2 (*Underground*) dengan pihak PT Dutagaruda Piranti Prima. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp74.997.282.608 (tidak termasuk pajak).

**26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
COMMITMENTS (continued)**

h. Agreements on procurement of goods and services (continued)

- 3) *On February 14, 2019, the Corporation signed an agreement for Cleaning, Pest Control and Waste Management Services with PT ISS Indonesia. The agreement will remain valid for 3 years from February 14, 2019 until February 13, 2022. The total cost of the contract amounts to Rp66,000,000,000 (excluding tax).*
- 4) *On February 25, 2019, the Corporation signed an agreement for Security Service Package 1 (Elevated) with PT Nawakara Perkasa Nusantara. The agreement will remain valid for 3 years from February 25, 2019 until February 24, 2022. The total cost of the contract amounts to Rp86,055,197,000 (excluding tax).*
- 5) *On March 4, 2019, the Corporation signed an agreement for Platform Screen Door Checking and Maintenance Service with PT Len Rekaprima Semesta. The agreement will remain valid for 2 years from March 4, 2019 until March 4, 2021. The total cost of the contract amounts to Rp11,951,500,000 (including tax).*
- 6) *On February 14, 2019, the Corporation signed an agreement for Security Service Package 2 (Underground) with PT Dutagaruda Piranti Prima. The agreement will remain valid for 3 years from February 14, 2019 until February 13, 2022. The total cost of the contract amounts to Rp74,997,282,608 (excluding tax).*

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)

h. Perjanjian pengadaan barang dan jasa (lanjutan)

- 7) Pada tanggal 25 Februari 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Jasa Pengamanan Paket 3 (Depo, RSS, Kereta, dan Area Transisi) dengan pihak PT Sumber Gunadinamis. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp30.773.000.000 (tidak termasuk pajak).
- 8) Pada tanggal 30 April 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Pengadaan Lisensi dan Jasa Implementasi Sistem SAP Tahap II dengan pihak PT Astra Graphia Information Technology. Perjanjian tersebut berlaku selama 1 tahun sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp26.895.000.000 (termasuk pajak).
- 9) Pada tanggal 17 Juni 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Jasa Manajemen Operasional untuk Sewage Treatment Plant (STP) dengan pihak PT Spektra Solusindo. Perjanjian tersebut berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp10.355.903.849 (termasuk pajak).
- 10) Pada tanggal 11 Maret 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Jasa Pemeriksaan dan Perawatan Mechanical, Electrical, & Plumbing (MEP) dengan pihak PT Rezekisurya Intimakmur. Perjanjian tersebut berlaku selama 2 tahun sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp12.707.015.000 (termasuk pajak).

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

h. *Agreements on the procurement of goods and services (continued)*

- 7) *On February 25, 2019, the Corporation signed the Security Service Package 3 (Depo, RSS, Train, and Transition Area) agreement with PT Sumber Gunadinamis. The agreement is valid for 3 years from February 25, 2019 until February 24, 2022. The total cost of the contract amounts to Rp30,773,000,000 (excluding tax).*
- 8) *On April 30, 2019, the Corporation signed a procurement agreement for SAP System Phase 2 License and Implementation Service with PT Astra Graphia Information Technology. The agreement is valid for 1 year from May 2, 2019 until May 2, 2020. The total cost of the contract amount to Rp26,895,000,000 (including tax).*
- 9) *On June 17, 2019, the Corporation signed an agreement for Operational Management Services for Sewage Treatment Plants (STP) with PT Spektra Solusindo. The agreement will remain valid for 3 years from July 1, 2019 until July 1, 2022. The total cost of the contract amounts to Rp10,355,903,849 (including tax).*
- 10) *On March 11, 2019, the Corporation signed an agreement for Mechanical, Electrical, & Plumbing (MEP) Checking and Maintenance Service with PT Rezekisurya Intimakmur. The agreement is valid for 2 years from March 11, 2019 until March 10, 2021. The total cost of the contract amounts to Rp12,707,015,000 (including tax).*

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

26. PERJANJIAN PENTING DAN KOMITMEN
(lanjutan)

h. Perjanjian pengadaan barang dan jasa (lanjutan)

11) Pada tanggal 9 Desember 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan MRT East-West Corridor Study dengan pihak PT Egis International Indonesia. Perjanjian tersebut berlaku selama 8 bulan sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp6.967.929.650 (termasuk pajak).

12) Pada tanggal 18 Oktober 2019, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan Pengadaan Perangkat Integrated CCTV Command Centre dengan pihak PT Belant Persada. Perjanjian tersebut berlaku selama 180 hari kerja sejak tanggal 14 Oktober 2019 atau setelah *Kick Off Meeting*, tergantung mana yang tercapai terlebih dahulu. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar Rp17.300.000.000 (termasuk pajak).

27. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI

Saldo dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember/December 31, | |
|---|--------------------------|-----------------|
| | 2019 | 2018 |
| Bank (Catatan 4) PT Bank DKI | 294.823.431.814 | 8.355.083.088 |
| Persentase terhadap total aset | 1,70% | 0,06% |
| Deposito berjangka (Catatan 4) PT Bank DKI | 384.000.000.000 | 545.000.000.000 |
| Persentase terhadap total aset | 2,21% | 4,06% |
| Piutang usaha (Catatan 5) PT Bank DKI | 3.775.000 | - |
| Persentase terhadap total aset | 0,01% | 0,00% |
| Piutang subsidi (Catatan 20) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 105.707.838.783 | - |
| Persentase terhadap total aset | 0,61% | 0,00% |

26. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)

h. *Agreements on the procurement of goods and services (continued)*

11) *On December 9, 2019, the Corporation signed an the Preparation MRT East-West Corridor Study Consultation Service agreement with PT Egis International Indonesia. The agreement is valid for 8 months from December 9, 2019 until August 8, 2020. The total cost of the contract amounts to Rp6,967,929,650 (including tax).*

12) *On October 18, 2019, the Corporation signed a procurement agreement for Integrated CCTV Command Centre Hardware with PT Belant Persada. The agreement is valid for 180 working days from October 14, 2019 or after the Kick Off Meeting, whichever is sooner. The total cost of the contract amounts to Rp17,300,000,000 (including tax).*

27. BALANCES AND NATURE OF RELATED - PARTIES TRANSACTIONS

Balances with related parties are as follows:

| |
|--|
| Bank (Note 4) PT Bank DKI |
| Percentage of total assets |
| Time deposits (Note 4) PT Bank DKI |
| Percentage of total assets |
| Trade receivables (Note 5) PT Bank DKI |
| Percentage of total assets |
| Subsidy receivables (Note 20) Government of DKI Jakarta |
| Percentage of total assets |

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

27. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Saldo dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

| | 31 Desember/December 31, | |
|---|--------------------------|--------------|
| | 2019 | 2018 |
| Piutang bunga (Catatan 6) PT Bank DKI | 422.208.219 | 512.273.973 |
| Persentase terhadap total aset | 0,01% | 0,01% |
| Utang pajak bumi dan bangunan (Catatan 17b) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 42.669.969.495 | - |
| Persentase terhadap total liabilitas | 3,15% | 0,00% |
| Pendapatan diterima di muka (Catatan 15) PT Bank DKI | 825.000.000 | - |
| Persentase terhadap total liabilitas | 0,06% | 0,00% |

Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/Year ending December 31, | |
|--|---|----------------|
| | 2019 | 2018 |
| Pendapatan subsidi (Catatan 20) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 534.069.547.569 | - |
| Persentase terhadap pendapatan | 57,23% | 0,00% |
| Pendapatan non-tiket (Catatan 21) PT Bank DKI | 2.475.000.000 | - |
| Persentase terhadap pendapatan | 0,27% | 0,00% |
| Beban pajak bumi dan bangunan (Catatan 22) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | 32.002.477.121 | - |
| Persentase terhadap total beban pokok pendapatan | 4,21% | 0,00% |
| Penghasilan bunga (Catatan 24) PT Bank DKI | 20.834.418.818 | 31.169.314.514 |
| Persentase terhadap total Pendapatan lain-lain (neto) | 17,24% | 40,33% |

27. BALANCES AND NATURE OF RELATED - PARTIES TRANSACTIONS (continued)

Balances with related parties are as follows: (continued)

| |
|---|
| <i>Interest receivables (Note 6) PT Bank DKI</i> |
| Percentage of total assets |
| <i>Land and property tax payable (Note 17b) The DKI Jakarta Provincial Government</i> |
| Percentage of total liabilities |
| <i>Unearned revenues (Note 15) PT Bank DKI</i> |
| Percentage of total liabilities |

Transactions with related parties are as follows:

| |
|---|
| <i>Subsidy revenue (Note 20) The DKI Jakarta Provincial Government</i> |
| Percentage of revenues |
| <i>Non-farebox revenue (Note 21) PT Bank DKI</i> |
| Percentage of revenues |
| <i>Land and property tax expenses (Note 22) The DKI Jakarta Provincial Government</i> |
| Percentage of the total cost of revenues |
| <i>Interest revenue (Note 24) PT Bank DKI</i> |
| Percentage of other revenues (net) |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

27. SALDO DAN SIFAT TRANSAKSI PIHAK YANG BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sifat transaksi dan hubungan dengan pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

| Pihak-pihak yang berelasi/ Related parties | Hubungan/ Nature of relationship |
|---|---|
| Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/ <i>The DKI Jakarta Provincial Government</i> | Pemegang saham utama/ <i>Major</i> |
| PT Bank DKI Jakarta | Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/ <i>Controlled by the DKI Jakarta Provincial Government</i> |
| PT Jakarta Infrastruktur Proptindo | Dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta/ <i>Controlled by the DKI Jakarta Provincial Government</i> |

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Kebijakan manajemen risiko keuangan Perseroan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing), risiko kredit, dan risiko likuiditas. Perseroan beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan membentuk Divisi *Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance* yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Perseroan. Divisi *Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance* bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

27. BALANCES AND NATURE OF RELATED - PARTIES TRANSACTIONS (continued)

In the normal course of business, the Corporation engages in transactions with related parties. The nature of these transactions and relationships with related parties are as follows:

| Sifat transaksi/ Nature of transactions |
|--|
| Subsidi dan pajak bumi dan bangunan/ <i>Subsidy and land and property tax</i> |
| Penempatan giro, deposito berjangka, bank untuk pengumpulan pendapatan tiket, pendapatan bunga, pendapatan diterima dimuka dan pendapatan nontiket/ <i>Placement of current accounts, time deposits, bank for ticket collection, interest income, unearned revenues and non-farebox revenues</i> |
| Kerjasama layanan periklanan/ <i>Advertising services cooperation</i> |

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The financial risk management policies of the Corporation were created in order to ensure that adequate financial resources are available for operations, business development and managing exposure to market risks (including foreign currency risk), credit risk and liquidity risk. The Corporation operates within the bounds of defined policies approved by its Board of Directors.

In order to manage these risks, the Corporation has established a Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance Division, which is responsible for the preparation of policies, the relevant frameworks, implementation guidelines and the necessary risk management infrastructure in order to ensure the implementation of risk management within the Corporation's environment. The Risk Management and Quality, Security, Safety, Health and Environment Assurance Division reports directly to the President Director.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko utama dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko mata uang asing, risiko Perseroan dan, risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

a. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perseroan terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari utang usaha yang akan dibayarkan melalui penerusan pinjaman JICA.

Perseroan menanggung risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi dan saldo yang di denominasi dalam mata uang selain Rupiah. Mata uang yang menimbulkan risiko ini terutama adalah Yen Jepang.

Perseroan memonitor secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perseroan pada waktu yang tepat.

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual.

Semua kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank-bank yang memiliki kualitas kredit yang baik.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perseroan memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi, serta jasa lainnya yang telah dilakukan dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang yang bermasalah. Perseroan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

The main risks arising from the Corporation's financial instruments are foreign currency risk, credit risk and liquidity risk. The Directors review and agree policies for managing each of these risks, which are described in greater detail below:

a. Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rates. The Corporation's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from trade payables that will be settled through JICA grants.

The Corporation incurs foreign currency risk in relation to transactions and balances that are denominated in currencies other than the Indonesian rupiah. The currency that gives rise to this risk is primarily the Japanese yen.

The Corporation closely monitors foreign exchange rate fluctuations and market expectations so that it can take necessary actions that will benefit most of the Corporation in due time

b. Credit risk

Credit risk refers to the risk that the Corporation will default on its contractual obligations, resulting in financial losses being sustained by the Corporation.

All cash in banks and time deposits is placed in banks with good credit ratings.

Management is confident in its ability to continue to control and to maintain minimal exposure to credit risk, since the Corporation has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sales transactions and other services rendered and historically low levels of bad debts. The Corporation thus has no concentration of credit risk.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

28. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas (juga dikenal sebagai risiko pendanaan) adalah risiko di mana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Perseroan untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Perseroan kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan yang penyelesaiannya tidak menggunakan dana JICA.

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati sebagai berikut:

28. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

c. Liquidity risk

Liquidity risk (also known as funding risk) comprises risk whereby the Corporation may experience difficulty in obtaining funds to fulfill commitments associated with financial instruments. Liquidity risk may arise from the incapability of the Corporation to sell assets immediately at prices close to their fair value.

Liquidity risk arises in situations where company struggle to obtain financing. Risk management policy regarding liquidity has been implemented carefully in order to maintain sufficient cash and cash equivalents. The Corporation manages liquidity risk by monitoring cash flow forecasts and actual cash flows and adjusts the maturity profile of financial assets and liabilities which are not settled through JICA funding.

The following table details the Corporation's remaining contractual maturity in relation to its financial liabilities with agreed repayments, as follows:

31 Desember 2019/December 31, 2019

| | Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year | 1-2 tahun/ 1-2 years | Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years | Total/ Total | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|---|
| Utang usaha | 1.105.805.255 | - | - | 1.105.805.255 | Trade payables |
| Utang lain-lain | 1.163.703.808 | - | - | 1.163.703.808 | Other payables |
| Utang kontraktor dan konsultan | 146.818.938.125 | - | - | 146.818.938.125 | Payables to contractors and consultants |
| Beban akrual | 369.967.252.006 | - | - | 369.967.252.006 | Accrued expenses |
| Utang retensi | - | 480.756.470.176 | - | 480.756.470.176 | Retention payables |
| Utang jaminan pelanggan | - | - | 13.020.934.409 | 13.020.934.409 | Customer security deposits |
| Total | 519.055.699.194 | 480.756.470.176 | 13.020.934.409 | 1.012.833.103.779 | Total |

31 Desember 2018/December 31, 2018

| | Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year | 1-2 tahun/ 1-2 years | Lebih dari 2 tahun/ More than 2 years | Total/ Total | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|
| Utang usaha | 11.207.236.410 | - | - | 11.207.236.410 | Trade payables |
| Utang lain-lain | 1.358.493.945 | - | - | 1.358.493.945 | Other payables |
| Utang kontraktor dan konsultan | 14.649.392.009 | - | - | 14.649.392.009 | Payable to contractors and consultants |
| Beban akrual | 354.094.360.436 | - | - | 354.094.360.436 | Accrued expenses |
| Utang retensi | - | 691.273.055.316 | - | 691.273.055.316 | Retention payables |
| Total | 381.309.482.800 | 691.273.055.316 | - | 1.072.582.538.116 | Total |

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

29. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas, piutang usaha, piutang subsidi, piutang lain-lain, pendapatan yang akan diterima, utang usaha, utang kontraktor dan konsultan, serta beban akrual kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek.

30. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun berjalan, diungkapkan di bawah ini.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020

- PSAK 71 - Instrumen Keuangan, yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan, dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

- PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari *joint project* yang sukses antara International Accounting Standards Board (IASB) dan Financial Accounting Standards Board (FASB), yang mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

29. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

The carrying values of financial instruments presented in the statement of financial position approximate their fair values.

Management has determined that the carrying values (based on notional amounts) of cash and cash equivalents, trade receivables, subsidy receivables, other receivables, accrued revenues, trade payables, payables to contractors and consultants and accrued expenses reasonably approximate their fair values, as they are mostly short-term in nature.

30. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES

The standards and interpretations that were issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK) but which are not yet effective for current financial statements are disclosed below.

Effective beginning on or after January 1, 2020

- PSAK 71: Financial Instruments, adopted from IFRS 9, effective January 1, 2020 with earlier application permitted.

This PSAK provides for the classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and the business model of the relevant entity; expected credit loss impairment model allowing for more timely, relevant and understandable information for users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introducing more general requirements based on the management's judgment.

- PSAK 72 - Revenue from Contracts with Customers, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020, and earlier application is permitted.

This PSAK is a single standard that is a joint project between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting Standards Board (FASB), which provides revenue recognition from contracts with customers, and the entity is expected to possess an analysis before recognizing the revenue.

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**30. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PENGUNGKAPAN (lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2020
(lanjutan)**

- PSAK 73 - Sewa, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal, untuk mengakui aset hak-guna (*right-of-use assets*) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang aset terkait (*underlying assets*) bernilai-rendah.

- Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi material berlaku efektif 1 Januari 2020.

Amandemen ini mengklarifikasi definisi material dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

- Amandemen PSAK 15 - Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dan penerapan dini diperkenankan.

Amandemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama di mana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

- Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan: Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif.

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa aset keuangan melewati kriteria 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok terutang' terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menyebabkan pemutusan awal kontrak dan terlepas dari pihak mana membayar atau menerima kompensasi yang wajar untuk awal pemutusan kontrak.

**30. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND
DISCLOSURES (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2020
(continued)**

- PSAK 73: Leases, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020, with earlier application permitted, but not before an entity applies PSAK 72: Revenue from Contracts with Customers.

This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation and disclosure of the lease by introducing a single accounting model to recognize the asset's right-of-use and lease liability; there are 2 optional exclusions which apply in relation to the recognition of lease assets and liabilities: (i) short-term leases and (ii) leases with low-value underlying assets.

- Amendment to PSAK 1 and PSAK 25: Definition of material, effective January 1, 2020.

This amendment clarifies the definition of material with the aim of harmonizing the definitions used in the conceptual framework and some relevant PSAK. In addition, it also provides clearer guidance regarding the definition of material within the context of reducing in relation to disclosure due to changes in the threshold of the material definition.

Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures, effective January 1, 2020, and earlier application is permitted

These amendments state that the entity should also apply PSAK 71 to financial instruments in relation to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associate or joint venture.

- Amendments to PSAK 71: Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation.

These amendments clarify that a financial asset passes the 'solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding' criterion regardless of an event or circumstance that causes the early termination of the contract and irrespective of which party pays or receives reasonable compensation for the early termination of the contract

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

30. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENGUNGKAPAN (lanjutan)

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2021

Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis, berlaku efektif 1 Januari 2021.

Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan *output*, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.

Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022

PSAK 74: Kontrak Asuransi, yang diadopsi dari IFRS 17, berlaku efektif 1 Januari 2022, dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 71 dan PSAK 72.

Ini adalah standar akuntansi baru yang komprehensif untuk kontrak asuransi yang mencakup pengakuan dan pengukuran, presentasi, dan pengungkapan. Setelah efektif, PSAK 74 akan menggantikan PSAK 62 Kontrak Asuransi. PSAK 74 berlaku untuk semua jenis kontrak asuransi (yaitu, jiwa, non-jiwa, asuransi langsung, dan asuransi ulang), terlepas dari jenis entitas yang menerbitkannya, juga mengenai jaminan dan instrumen keuangan tertentu dengan fitur partisipasi tidak mengikat.

Beberapa pengecualian ruang lingkup akan berlaku. Tujuan keseluruhan PSAK 74 adalah untuk menyediakan model akuntansi untuk kontrak asuransi yang lebih bermanfaat dan konsisten untuk perusahaan asuransi. Berbeda dengan persyaratan dalam PSAK 62, yang sebagian besar didasarkan pada kakek kebijakan akuntansi lokal sebelumnya, IFRS 17 menyediakan model komprehensif untuk kontrak asuransi, yang mencakup semua aspek akuntansi yang relevan. Inti dari IFRS 17 adalah model umum, dilengkapi dengan:

- Adaptasi spesifik untuk kontrak dengan fitur partisipasi langsung (pendekatan biaya variabel).
- Pendekatan yang disederhanakan (pendekatan alokasi premium) terutama untuk kontrak jangka pendek.

30. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND DISCLOSURES (continued)

Effective beginning on or after January 1, 2021

Amendments to PSAK 22: Definition of Business, effective from January 1, 2021.

These amendments were issued in order to help entities determine whether an acquired set of activities and assets is a business or not. They clarify the minimum requirements for a business, remove the assessment of whether market participants are capable of replacing any missing elements, add guidance to help entities assess whether an acquired process is substantive, narrow the definitions of a business and of outputs, and introduce an optional fair value concentration test. New illustrative examples were provided along with the amendments.

Effective beginning on or after January 1, 2022

PSAK 74: Insurance contracts, adopted from IFRS 17, effective January 1, 2022, with earlier application permitted, but not before the entity applies PSAK 71 and PSAK 72.

This is a comprehensive new accounting standard for insurance contracts that covers recognition and measurement, presentation and disclosure. Once effective, PSAK 74 will replace PSAK 62 Insurance Contracts. PSAK 74 applies to all types of insurance contracts (i.e. life, non-life direct insurance and reinsurance), regardless of the type of entities that financial instruments with discretionary participation feature.

A few scope exceptions will apply. The overall objective of PSAK 74 is to provide an accounting model for insurance contracts that proves more useful and consistent for insurers. In contracts to the requirement in PSAK 62, which are largely based on grandfathering previous local accounting policies, IFRS 17 provides a comprehensive model for insurance contracts, covering all relevant accounting aspects. The core of IFRS 17 is the general model, supplemented by:

- *A specific adaption for contracts with direct participation features (the variable direct participation features (the variable fee approach).*
- *A simplified approach (the premium allocation approach) mainly for short-duration contracts.*

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)**

**30. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PENGUNGKAPAN (lanjutan)
Mulai efektif pada atau setelah 1 Januari 2022
(lanjutan)**

Pada saat penerbitan laporan keuangan Perseroan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

31. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Pada tanggal 12 Februari 2020, berdasarkan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, No. 11, Perseroan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mendirikan badan usaha patungan dengan nama PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ("MITJ") dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 51% dan 49%.
- b. Pada tanggal 14 Februari 2020, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Paket Pekerjaan CP201 Rancang Bangun Bangunan Bawah Tanah - Pekerjaan Sipil 1 - berlokasi di sepanjang KP. 15K+123 hingga KP. 17K+800 pada proyek MRT Jakarta Fase 2 dengan Shimizu - Adhi Karya Joint Venture. Perjanjian tersebut berlaku selama 58 bulan sejak perjanjian efektif. Jumlah nilai kontrak adalah sebesar JPY3.746.033.751 dan Rp 4.038.472.467.522 (termasuk pajak).
- c. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham sirkuler tanggal 21 Februari 2020, para pemegang saham telah menyetujui pemberhentian Sdr. Tuhiyat selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi.

Berdasarkan keputusan tersebut, Perseroan mengangkat Sdri. Silvia Halim sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/11/BOD-MRT/II/2020 tanggal 21 Februari 2020.

**30. CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES AND
DISCLOSURES (continued)**

*Effective beginning on or after January 1, 2022
(continued)*

As of the authorisation date of this financial statement, the Corporation was still evaluating the potential impact of these new and revised standards on Corporation financial statements.

31. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. *On February 12, 2020, based on Notarial Deed No 11 of Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., the Company and PT Kereta Api Indonesia (Persero) established a joint venture company named PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ("MITJ") with a share ownership of 51% and 49%, respectively.*
- b. *On February 14, 2020, the Corporation signed CP201 agreement for the Design and Build of Underground Section - Civil 1 - From 15K+123 to 17K+800 of MRT Jakarta Phase 2 Project with Shimizu - Adhi Karya Joint Venture. The Agreement will remain valid for 58 months from its effective date. The total cost of the Contract amounts to JPY3,746,033,751 and Rp 4,038,472,467,522 (including tax).*
- c. *Based on Shareholders Circular Resolution dated February 21, 2020, the shareholders approved the dismissal of Mr. Tuhiyat as Finance and Corporate Management Director.*

In the wake of this decision, the Corporation appointed Mrs. Silvia Halim as Acting Official Finance and Corporate Management Director based on Director's Resolution No. SK/11/BOD-MRT/II/2020 dated February 21, 2020.

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut
(Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MASS RAPID TRANSIT JAKARTA (PERSERODA)
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2019
and for the year then ended
(Expressed in rupiah, unless otherwise stated)

32. PENGUNGKAPAN INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Transaksi non-kas:

| | Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ending December 31, | |
|--|--|-------------------|
| | 2019 | 2018 |
| a. Penambahan aset tetap dikreditkan ke: | | |
| 1) Modal ditempatkan dan disetor penuh | 6.606.165.000.000 | 444.000.000.000 |
| 2) Modal disetor lainnya | (3.038.967.830.091) | 3.216.724.931.450 |
| 3) Uang muka kontraktor dan konsultan | 49.571.366.149 | 539.961.334.613 |
| 4) Utang retensi | (210.516.585.140) | 148.864.713.578 |
| 5) Utang kontraktor dan konsultan | 132.169.546.116 | 14.649.392.009 |
| 6) Beban akrual | (53.290.394.833) | (120.690.331.528) |
| 7) Laba selisih kurs | 49.866.248.693 | 33.569.466.508 |
| b. Penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dikreditkan ke modal disetor lainnya | (6.606.165.000.000) | (444.000.000.000) |
| c. Penghasilan keuangan dari pengukuran nilai wajar uang jaminan pelanggan | 11.979.065.591 | - |

32. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE OF CASH FLOW INFORMATION

Non-cash transactions:

| |
|--|
| a. Addition to fixed assets credited to: |
| 1) Issued and fully paid capital |
| 2) Other paid-up capital |
| 3) Contractors' and consultant advances |
| 4) Retentions payable |
| 5) Payables to contractors and consultants |
| 6) Accrued expenses |
| 7) Gains on foreign exchange |
| b. Addition to issued and fully paid capital credited to other paid-up capital |
| c. Finance income from measurement of fair value on the customer security deposits |

33. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perseroan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang selesai disusun dan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 12 Maret 2020.

33. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Corporation is responsible for the preparation of financial statements that were completed and authorized for issue on March 12, 2020.